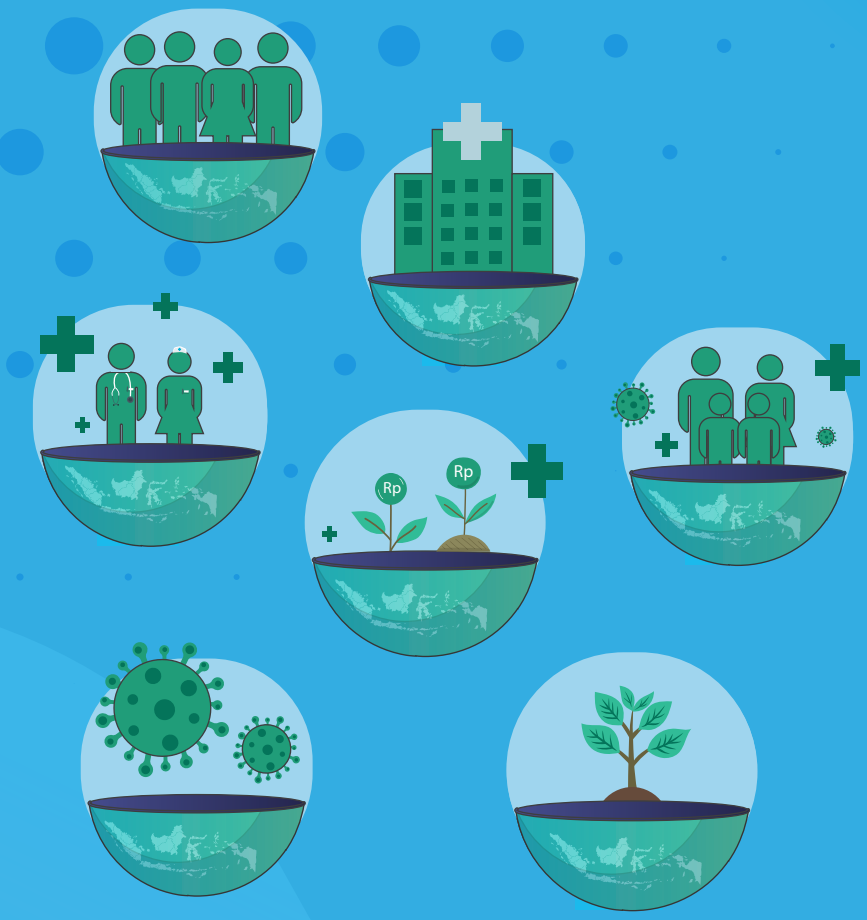
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

GERMAS
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat



PROFIL KESEHATAN INDONESIA

2021

PROFIL KESEHATAN INDONESIA
TAHUN 2021

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2022

Buku ini diterbitkan oleh
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav 4-9, Jakarta 12950
Telepon no: 62-21-5229590, 5221432, 5277168
Fax no: 62-21-5277168
E-mail: datainformasi.pusdatin@kemkes.go.id
Website: http://www.kemkes/go.id

TIM PENYUSUN

Pengarah

Kunta Wibawa Dasa Nugraha, S.E, M.A, Ph.D
Sekretaris Jenderal Kemenkes RI

Ketua

Setiaji, S.T, M.Si
Plt. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi

Editor

Farida Sibuea, SKM, MSc.PH
Boga Hardhana, S.Si, MM
Winne Widiantini, SKM, MKM

Anggota

Intan Suryantisa Indah, SKM, MKM; Supriyono Pangribowo,SKM, MKM; dr. Yoeyoen Aryantin Indrayani; Wardah, SKM, MKM; dr. Ellysa, M.Epid; Marlina Indah Susanti, SKM, M.Epid; Annisa Harpini, SKM, MKM; Khairani SKM, MKM; Ratri Aprianda, SKM, MKM; Tri Wahyudi, S.Si; Hira Ahmad Habibi, S.Sn; Hellena Maslinda; Prillia Syafira Liani, SKM; Elsa Kathalea Putri, S.I.Kom; Anisah Mufidatush Shalihah, S.Stat; Ridwan Febryanto Syahputra, SKM; Muhammad Hafid, S.Stat.

Kontributor

Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Badan Pusat Statistik; Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; Biro Perencanaan dan Anggaran; Biro Keuangan dan BMN; Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia; Pusat Kesehatan Haji; Pusat Krisis Kesehatan; Setditjen. Kesehatan Masyarakat; Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat; Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu Anak; Direktorat Kesehatan Produktif dan Lanjut Usia; Direktorat Kesehatan Jiwa; Direktorat Tata Kelola Kesehatan Masyarakat; Setditjen. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; Direktorat Pengelolaan Imunisasi; Direktorat Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan; Direktorat Penyehatan Lingkungan; Setditjen. Pelayanan Kesehatan; Direktorat Pelayanan Kesehatan Primer; Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan; Setditjen. Kefarmasian dan Alat Kesehatan; Setditjen. Tenaga Kesehatan; Direktorat Perencanaan Kesehatan; Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan; Direktorat Pendayagunaan Tenaga Kesehatan; Set. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan; Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan; Konsil Kedokteran Indonesia; Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

KATA PENGANTAR

SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KESEHATAN RI



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas terbitnya Profil Kesehatan Indonesia 2021. Terbitnya Profil Kesehatan Indonesia 2021 merupakan upaya dalam pemenuhan hak masyarakat terhadap akses informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab.

Profil Kesehatan Indonesia menyajikan gambaran nasional, perbandingan antar provinsi, serta tren dari tahun ke tahun. Profil Kesehatan ini disusun berdasarkan data rutin maupun data survei dari unit teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan serta institusi lain terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Informasi yang disajikan meliputi data dan narasi tentang situasi demografi, fasilitas pelayanan kesehatan dan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), pembiayaan kesehatan, kesehatan keluarga, serta pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan.

Kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Profil Kesehatan Indonesia 2021 ini. Kritik dan saran kami harapkan sebagai penyempurnaan di masa yang akan datang.

Jakarta, Juli 2022
Sekretaris Jenderal
Kementerian Kesehatan

Kunta Wibawa Dasa Nugraha

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBUTAN



Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan upaya antar program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya.

Profil Kesehatan Indonesia terbit setiap tahun sebagai publikasi data dan informasi kesehatan yang komprehensif, diharapkan dapat menyediakan data dan informasi akurat sekaligus menjadi parameter keberhasilan pembangunan kesehatan dari tahun ke tahun. Melalui profil ini juga tergambar keberhasilan pembangunan kesehatan yang telah dicapai sampai tahun 2021. Profil Kesehatan Indonesia 2021 diharapkan dapat memberikan akses informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab bagi jajaran pemerintah maupun masyarakat. Semoga dengan terbitnya Profil Kesehatan Indonesia ini dapat mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan di setiap proses manajemen kesehatan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Para pengelola data, baik di pusat maupun daerah diharapkan akan selalu berupaya meningkatkan kualitas data termasuk ketepatan waktu, kelengkapan dan konsistensi data yang dilaporkan.

Akhir kata, saya sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Profil Kesehatan 2021 ini.

Juli 2022
Menteri Kesehatan,

Budi G. Sadikin

Jl. H.R. Rasuna Said Blok X5, Kav. 4-9 Jakarta 12950 Telpon/Faxsimile (021) 5201591

DAFTAR GAMBAR

BAB I. DEMOGRAFI

GAMBAR 1.1	JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN TAHUN 2021 (dalam jutaan)	2
GAMBAR 1.2	JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	3
GAMBAR 1.3	PERSENTASE PERSEBARAN PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2021	4
GAMBAR 1.4	PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA TAHUN 2021	5
GAMBAR 1.5	PETA PERSEBARAN KEPADATAN PENDUDUK (jiwa/Km^2) DI INDONESIA TAHUN 2021	6
GAMBAR 1.6	PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2017 – 2021 (dalam %)	8
GAMBAR 1.7	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	9
GAMBAR 1.8	PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN TAHUN 2021	11
GAMBAR 1.9	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PER PROVINSI TAHUN 2021	13
GAMBAR 1.10	RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS TAHUN 2017 – 2021 (dalam tahun)	14
GAMBAR 1.11	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH TAHUN 2017 – 2021	15
GAMBAR 1.12	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR TAHUN 2017 – 2021	16
GAMBAR 1.13	PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN TAHUN 2017 – 2021	17
GAMBAR 1.14	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA TAHUN 2004 – 2021	18
GAMBAR 1.15	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	19

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

GAMBAR 2.1	JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2016 - 2021	22
GAMBAR 2.2	RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN DI INDONESIA TAHUN 2021	23
GAMBAR 2.3	JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP DI INDONESIA TAHUN 2017-2021	24
GAMBAR 2.4	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN 9 (SEMBILAN) SESUAI STANDAR JENIS TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	25
GAMBAR 2.5	PERSENTASE PUSKESMAS TANPA DOKTER MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	26
GAMBAR 2.6	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN KERJA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	28
GAMBAR 2.7	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN OLAHRAGA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	29
GAMBAR 2.8	JUMLAH PELAKSANAAN KESEHATAN KERJA DI TEMPAT KERJA DI INDONESIA TAHUN 2021	30
GAMBAR 2.9	JUMLAH PELAKSANAAN KESEHATAN OLAHRAGA DI INDONESIA TAHUN 2021	31

GAMBAR 2.10	PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN HATTRA, ASMAN, DAN PELATIHAN NAKES DI INDONESIA TAHUN 2021	33
GAMBAR 2.11	JUMLAH RUMAH SAKIT PEMERINTAH DENGAN TENAGA KESEHATAN YANG SUDAH DILATIH DI INDONESIA TAHUN 2021	33
GAMBAR 2.12	PROPORSI KLINIK TEREGISTRASI MENURUT KEPEMILIKAN DI INDONESIA TAHUN 2021	34
GAMBAR 2.13	JUMLAH KLINIK PRATAMA TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA	35
GAMBAR 2.14	JUMLAH KLINIK UTAMA TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021	35
GAMBAR 2.15	JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021	36
GAMBAR 2.16	JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021	37
GAMBAR 2.17	JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021	38
GAMBAR 2.18	JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2021	39
GAMBAR 2.19	JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	40
GAMBAR 2.20	PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DI INDONESIA TAHUN 2017 – 2021	41
GAMBAR 2.21	JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KELAS TAHUN 2021	42
GAMBAR 2.22	PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS PENUNJANG TAHUN 2021	43
GAMBAR 2.23	RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2016 - 2021	44
GAMBAR 2.24	RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2020	45
GAMBAR 2.25	PERSENTASE RUMAH SAKIT TERAKREDITASI DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	46
GAMBAR 2.26	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL TAHUN 2021	48
GAMBAR 2.27	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL TAHUN 2021	49
GAMBAR 2.28	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL (IMUNISASI DASAR LENGKAP) TAHUN 2021	51
GAMBAR 2.29	JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2021	52
GAMBAR 2.30	JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2021	53
GAMBAR 2.31	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 80 PERSEN POSYANDU AKTIF PER PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021	54
GAMBAR 2.32	JUMLAH POSBINDU PTM PER PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021	55

BAB III. SDM KESEHATAN

GAMBAR 3.1	REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2021	57
GAMBAR 3.2	JUMLAH TENAGA MEDIS DI INDONESIA TAHUN 2021	58
GAMBAR 3.3	JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2021	59
GAMBAR 3.4	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021	60
GAMBAR 3.5	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER GIGI DI INDONESIA TAHUN 2021	61
GAMBAR 3.6	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN PERAWAT DI INDONESIA TAHUN 2021	62
GAMBAR 3.7	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN BIDAN DI INDONESIA TAHUN 2021	63
GAMBAR 3.8	JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2021	64
GAMBAR 3.9	JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2021	65
GAMBAR 3.10	DISTRIBUSI JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2021	66
GAMBAR 3.11	PERBANDINGAN JUMLAH BEBERAPA TENAGA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL TERHADAP JUMLAH NASIONAL TAHUN 2021	67
GAMBAR 3.12	SEBARAN JUMLAH SDMK DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA TAHUN 2021	67
GAMBAR 3.13	JUMLAH TENAGA MEDIS YANG MEMILIKI STR PER 31 DESEMBER 2021	68
GAMBAR 3.14	JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2021	69
GAMBAR 3.15	JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	70
GAMBAR 3.16	JUMLAH PENERBITAN STR ULANG MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2021	71
GAMBAR 3.17	JUMLAH PENERBITAN STR ULANG MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	71
GAMBAR 3.18	JUMLAH TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP AKTIF KEMENTERIAN KESEHATAN MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA PER 31 DESEMBER 2021	73
GAMBAR 3.19	PROPORSI RESIDEN DOKTER SPESIALIS BERDASARKAN REGIONAL WILAYAH PADA TAHUN 2021	74
GAMBAR 3.20	PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA TIM NUSANTARA SEHAT HINGGA TAHUN 2021	75
GAMBAR 3.21	PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA NUSANTARA SEHAT INDIVIDU TAHUN 2021	76
GAMBAR 3.22	PROPORSI DOKTER PESERTA INTERSIP TAHUN 2021	77
GAMBAR 3.23	PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS TAHUN 2021	79
GAMBAR 3.24	JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLITEKNIK KESEHARAN MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2021	81
GAMBAR 3.25	JUMLAH LULUSAN PROGRAM PROFESI POLITEKNIK KESEHATAN MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2021	82
GAMBAR 3.26	JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2021	82

GAMBAR 3.27 JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2021 83
GAMBAR 3.28 JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 84
GAMBAR 3.29 JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS TAHUN 2021 85

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

GAMBAR 4.1 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI TAHUN 2017-2021 88
GAMBAR 4.2 ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT UNIT ESELON I TAHUN 2021 89
GAMBAR 4.3 PERSENTASE ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2021 90
GAMBAR 4.4 PERSENTASE REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2021 90
GAMBAR 4.5 REALISASI DANA DEKONSENTRASI KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021 91
GAMBAR 4.6 REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KB MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021 93
GAMBAR 4.7 REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020 94
GAMBAR 4.8 PROPORSI BELANJA KESEHATAN MENURUT SKEMA PENDANAAN TAHUN 2012-2019 96
GAMBAR 4.9 PERKEMBANGAN CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) TAHUN 2014-2020 99
GAMBAR 4.10 CAKUPAN KEPERSERTAAN JAMINAN NASIONAL (JKN) DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 100
GAMBAR 4.11 TARGET DAN CAPAIAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2015-2021 101
GAMBAR 4.12 ALOKASI DAN REALISASI PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2015-2021 101
GAMBAR 4.13 JUMLAH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2015-2021 102
GAMBAR 4.14 PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) BEKERJA SAMA DENGAN BPJS TAHUN 2021 102
GAMBAR 4.15 JUMLAH FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT (FKRTL) BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2021 103
GAMBAR 4.16 PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT (FKRTL) BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2021 103
GAMBAR 4.17 JUMLAH FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2021 103
GAMBAR 4.18 PERSENTASE FASILTAS KESEHATAN PENUNJANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2021 103
GAMBAR 4.19 PENDAPATAN IURAN BPJS KESEHATAN BERDASARKAN SEGMEN KEPERSERTAAN TAHUN 2021 104
GAMBAR 4.20 PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JKN TAHUN 2021 105
GAMBAR 4.21 BIAYA MANFAAT PROGRAM DAN JKN TAHUN 2021 105

BAB V. KESEHATAN KELUARGA

GAMBAR 5.1	ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP TAHUN 1991 – 2015	109
GAMBAR 5.2	JUMLAH KEMATIAN IBU DI INDONESIA TAHUN 2018 - 2021	109
GAMBAR 5.3	JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB TAHUN 2021	110
GAMBAR 5.4	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 DI INDONESIA TAHUN 2007 - 2021	111
GAMBAR 5.5	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	112
GAMBAR 5.6	CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K6 MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	113
GAMBAR 5.7	CAKUPAN IMUNISASI Td1-Td5 PADA IBU HAMIL DI INDONESIA TAHUN 2021	114
GAMBAR 5.8	CAKUPAN IMUNISASI Td2 PADA IBU HAMIL DI INDONESIA TAHUN 2021	115
GAMBAR 5.9	CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	116
GAMBAR 5.10	CAKUPAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	117
GAMBAR 5.11	CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS LENGKAP DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	119
GAMBAR 5.12	PUSKESMAS MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	120
GAMBAR 5.13	PUSKESMAS MELAKSANAKAN ORIENTASI PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	121
GAMBAR 5.14	PREVALENSI PUS PESERTA KB MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	123
GAMBAR 5.15	PUS PESERTA KB MODERN MENURUT METODE KONTRASEPSI TAHUN 2021	124
GAMBAR 5.16	JUMLAH PUS PESERTA KB MODERN MENURUT TEMPAT PELAYANAN DI INDONESIA TAHUN 2021	125
GAMBAR 5.17	PERSENTASE IBU HAMIL YANG POSITIF HIV MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	126
GAMBAR 5.18	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	127
GAMBAR 5.19	PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	128
GAMBAR 5.20	PERSENTASE IBU HAMIL HBSAG REAKTIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	129
GAMBAR 5.21	JUMLAH KEMATIAN BALITA (0 – 59 BULAN) MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2021	130
GAMBAR 5.22	PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI) DI INDONESIA TAHUN 2021	131
GAMBAR 5.23	PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI-11 BULAN) DI INDONESIA TAHUN 2021	131
GAMBAR 5.24	PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN ANAK BALITA (12-59 BULAN) DI INDONESIA TAHUN 2021	132
GAMBAR 5.25	BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) DI INDONESIA TAHUN 2018-2021	133

GAMBAR 5.26	CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1) DAN KN LENGKAP DI INDONESIA TAHUN 2018-2021	134
GAMBAR 5.27	CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	135
GAMBAR 5.28	BALITA MEMILIKI BUKU KIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	137
GAMBAR 5.29	BALITA DIPANTAU PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	138
GAMBAR 5.30	BALITA DILAYANI SDIDTK MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	139
GAMBAR 5.31	BALITA DILAYANI MTBS MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	140
GAMBAR 5.32	CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI DI INDONESIA TAHUN 2012-2021	142
GAMBAR 5.33	CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	143
GAMBAR 5.34	ANGKA DROP OUT (DO) IMUNISASI PADA BAYI TAHUN 2019-2021	144
GAMBAR 5.35	CAKUPAN DESA/KELURAHAN UCI MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	145
GAMBAR 5.36	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI TAHUN 2019-2021	146
GAMBAR 5.37	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	147
GAMBAR 5.38	CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-HIB4 DAN CAMPAK RUBELA 2 PADA ANAK BADUTA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	148
GAMBAR 5.39	CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH DI INDONESIA TAHUN 2021	149
GAMBAR 5.40	CAKUPAN SEKOLAH SD/MI YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	151
GAMBAR 5.41	CAKUPAN SEKOLAH SMP/MTS YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	152
GAMBAR 5.42	CAKUPAN SEKOLAH SMA/MA YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	153
GAMBAR 5.43	PERSENTASE BERAT BADAN SANGAT KURANG DAN BERAT BADAN KURANG PADA BADUTA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021	155
GAMBAR 5.44	PERSENTASE BERAT BADAN SANGAT KURANG DAN BERAT BADAN KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021	156
GAMBAR 5.45	PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BADUTA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021	157
GAMBAR 5.46	PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021	158
GAMBAR 5.47	PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BADUTA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021	159
GAMBAR 5.48	PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021	160
GAMBAR 5.49	PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK DAN GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN DI INDONESIA TAHUN 2016-2021	161
GAMBAR 5.50	GRAFIK PROPORSI SANGAT PENDEK DAN PENDEK (TB/U) PADA BALITA	161

MENURUT PROVINSI, SSGI 2021
GAMBAR 5.51 CAKUPAN BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 163
GAMBAR 5.52 CAKUPAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 164
GAMBAR 5.53 PERSENTASE RERATA BALITA DITIMBANG PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 165
GAMBAR 5.54 CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA (6-59 BULAN) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 167
GAMBAR 5.55 CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) PADA REMAJA PUTRI MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 168
GAMBAR 5.56 CAKUPAN IBU HAMIL KEK MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN (PMT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 169
GAMBAR 5.57 CAKUPAN BALITA GIZI KURANG MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 170

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

GAMBAR 6.1 PROPORSI KASUS TUBERKULOSIS MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2021 173
GAMBAR 6.2 *TREATMENT COVERAGE* (*TC*) TAHUN 2011-2021 174
GAMBAR 6.3 *TREATMENT COVERAGE* (*TC*) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 175
GAMBAR 6.4 ANGKA NOTIFIKASI SEMUA KASUS TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2011-2021 176
GAMBAR 6.5 ANGKA NOTOFIKASI SEMUA KASUS TUBERKULOSIS PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 177
GAMBAR 6.6 ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS DI INDONESIA TAHUN 2011-2021 178
GAMBAR 6.7 ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 179
GAMBAR 6.8 JUMLAH KASUS HIV POSITIF DAN AIDS YANG DILAPORKAN DI INDONESIA TAHUN 2011-2021 180
GAMBAR 6.9 PROPORSI KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DI INDONESIA TAHUN 2021 181
GAMBAR 6.10 PERSENTASE KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2021 181
GAMBAR 6.11 CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA (%) DI INDONESIA TAHUN 2011-2021 182
GAMBAR 6.12 CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA (%) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 183
GAMBAR 6.13 CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KABUPATEN/ KOTA YANG 50% PUSKESMASNYA MELAKSANAKAN TATALAKSANA STANDAR PNEUMONIA 2016-2021 184
GAMBAR 6.14 TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) TAHUN 2015-2021 185
GAMBAR 6.15 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 186

GAMBAR 6.16	CAKUPAN PELAYANAN PENDERITA DIARE BALITA (%) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	187
GAMBAR 6.17	ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR) TAHUN 2010-2021	189
GAMBAR 6.18	PETA ELIMINASI KUSTA PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2020 DAN 2021	189
GAMBAR 6.19	ANGKA CACAT TINGKAT 2 PENDERITA KUSTA BARU PER 1.000.000 PENDUDUK TAHUN 2011-201	190
GAMBAR 6.20	ANGKA CACAT TINGKAT 2 KUSTA PER 1.000.000 PENDUDUK PER PROVINSI TAHUN 2021	191
GAMBAR 6.21	PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK TAHUN 2011-2021	192
GAMBAR 6.22	KASUS KONFIRMASI COVID-19 MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2021	193
GAMBAR 6.23	*RECOVERY RATE* (*RR*) DAN *CASE FATALITY RATE* (*CFR*) COVID-19 TAHUN 2021	194
GAMBAR 6.24	*RECOVERY RATE* COVID-19 MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	195
GAMBAR 6.25	*CASE FATALITY RATE* COVID-19 MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	196
GAMBAR 6.26	*POSITIVITY RATE* COVID-19 MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	197
GAMBAR 6.27	SITUASI VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA TAHUN 2021	198
GAMBAR 6.28	CAPAIAN VAKSINASI DOSIS PERTAMA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	199
GAMBAR 6.29	CAPAIAN VAKSINASI DOSIS KEDUA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	200
GAMBAR 6.30	DISTRIBUSI KASUS *TETANUS NEONATORUM* PER PROVINSI TAHUN 2020 DAN 2021	202
GAMBAR 6.31	PROPORSI KASUS *TETANUS NEONATORUM* MENURUT RISIKO TAHUN 2021	203
GAMBAR 6.32	SEBARAN KASUS SUSPEK CAMPAK DI INDONESIA TAHUN 2020 DAN 2021	204
GAMBAR 6.33	JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK PER BULAN DI INDONESIA TAHUN 2021	205
GAMBAR 6.34	PROPORSI SUSPEK CAMPAK BERDASARKAN UMUR DI INDONESIA TAHUN 2021	206
GAMBAR 6.35	PERSENTASE SUSPEK CAMPAK YANG DIVAKSINASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021	206
GAMBAR 6.36	FREKUENSI KLB SUSPEK CAMPAK MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021	207
GAMBAR 6.37	SEBARAN KASUS DIFTERI MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	208
GAMBAR 6.38	KASUS KEMATIAN DIFTERI DI INDONESIA TAHUN 2021	209
GAMBAR 6.39	PENCAPAIAN NON POLIO AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK UMUR< 15 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 DAN 2021	211
GAMBAR 6.40	CAPAIAN SURVEILANS AFP DI INDONESIA TAHUN 2017-2021	212
GAMBAR 6.41	NON POLIO AFP RATE PER 100.000 PENDUDUK< 15 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2021	212
GAMBAR 6.42	PENCAPAIAN SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 DAN 2021	213
GAMBAR 6.43	PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT AFP MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	214
GAMBAR 6.44	INCIDENCE RATE PER 100.000 PENDUDUK DEMAM BERDARAH DENGUE TAHUN 2012-2021	215
GAMBAR 6.45	ANGKA KESAKITAN (INCIDENCE RATE/IR) DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	216
GAMBAR 6.46	CASE FATALITY RATE (%) DEMAM BERDARAH DENGUE TAHUN 2012-2021	217

GAMBAR 6.47	*CASE FATALITY RATE* DEMAM BERDARAH DENGUE MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	217
GAMBAR 6.48	JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD DI INDONESIA TAHUN 2011-2021	218
GAMBAR 6.49	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN IR DBD < 49 PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2021	219
GAMBAR 6.50	JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA TAHUN 2012-2021	220
GAMBAR 6.51	JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2021	222
GAMBAR 6.52	JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	223
GAMBAR 6.53	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA YANG BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1% MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	224
GAMBAR 6.54	CAKUPAN POPM FILARIASIS TAHUN 2011-2021	225
GAMBAR 6.55	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	226
GAMBAR 6.56	PETA ENDEMISITAS MALARIA TAHUN 2021	227
GAMBAR 6.57	ANGKA KESAKITAN MALARIA (ANNUAL PARACITE INCIDENCE /API) PER 1.000 PENDUDUK TAHUN 2011-2021	228
GAMBAR 6.58	ANGKA KESAKITAN MALARIA (API) PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	228
GAMBAR 6.59	PERSENTASE PENGOBATAN ACT MENURUT PROVINSI TAHUN 2021	229
GAMBAR 6.60	SITUASI RABIES DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2021	230
GAMBAR 6.61	PERSENTASE PEMBERIAN VAR PADA KASUS GHPR DI INDONESIA TAHUN 2021	231
GAMBAR 6.62	JUMLAH KEMATIAN AKIBAT RABIES (LYSSA) DI INDONESIA TAHUN 2021	232
GAMBAR 6.63	PROPORSI KEMATIAN AKIBAT RABIES (LYSSA) TERHADAP KASUS GHPR (%) DI INDONESIA TAHUN 2021	232
GAMBAR 6.64	SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2021	233
GAMBAR 6.65	JUMLAH KASUS LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA TAHUN 2020 – 2021	233
GAMBAR 6.66	PERSENTASE KABUPATEN/ KOTA MEMILIKI 25% PUSKESMAS MELAKSANAKAN SURVEILANS VEKTOR DI INDONESIA TAHUN 2021	235
GAMBAR 6.67	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN PANDU PTM DI > 80% PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2021	238
GAMBAR 6.68	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI INDONESIA TAHUN 2021	239
GAMBAR 6.69	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN LAYANAN UBM DI INDONESIA TAHUN 2021	240
GAMBAR 6.70	PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM (IVA) DAN PAYUDARA TAHUN 2019-2021	242
GAMBAR 6.71	HASIL PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DAN KANKER PAYUDARA PADA PEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2019-2021	243
GAMBAR 6.72	PERSENTASE DESA MELAKSANAKAN POSBINDU DI INDONESIA TAHUN 2021	244
GAMBAR 6.73	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI KESEHATAN JIWA DAN NAPZA TAHUN 2021	246

GAMBAR 6.74 PERSENTASE KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI BENCANA DI INDONESIA TAHUN 2021 249
GAMBAR 6.75 JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA TAHUN 2021 250
GAMBAR 6.76 JUMLAH KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA ALAM DI INDONESIA TAHUN 2021 250
GAMBAR 6.77 PERSENTASE KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA NON ALAM DI INDONESIA TAHUN 2021 251
GAMBAR 6.78 JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 252
GAMBAR 6.79 CAPAIAN PEMERIKSAAN JEMAAH HAJI MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN TAHUN 2021 255
GAMBAR 6.80 JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2021 256
GAMBAR 6.81 10 PENYAKIT RISIKO TINGGI TERBANYAK PADA JEMAAH HAJI REGULER TAHUN 2021 257
GAMBAR 6.82 PROPORSI PENGUKURAN KEBUGARAN JEMAAH HAJI REGULER TAHUN 2021 257

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

GAMBAR 7.1 PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR TAHUN 2021 259
GAMBAR 7.2 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK TAHUN 2021 261
GAMBAR 7.3 PROPORSI PENGGUNAAN JENIS JAMBAN SEHAT DI INDONESIA TAHUN 2021 262
GAMBAR 7.4 PERSENTASE KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) TAHUN 2021 263
GAMBAR 7.5 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK TAHUN 2021 264
GAMBAR 7.6 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT TIPE DAERAH TAHUN 2019-2021 265
GAMBAR 7.7 PERSENTASE DESA MELAKSANAKAN STBM MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 266
GAMBAR 7.8 PERSENTASE DESA/KELURAHAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021 267
GAMBAR 7.9 PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR TAHUN 2021 269
GAMBAR 7.10 PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAHAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT SESUAI STANDAR TAHUN 2021 271
GAMBAR 7.11 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA SEHAT TAHUN 2021 273
GAMBAR 7.12 PERSENTASE FASYANKES YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR TAHUN 2021 275
GAMBAR 7.13 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT TAHUN 2021 277
GAMBAR 7.14 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI 279

MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
GAMBAR 7.15 PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI MENURUT TIPE DAERAH TAHUN 2019-2021 280

DAFTAR TABEL

BAB I. DEMOGRAFI

TABEL 1.1	PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2021	7
TABEL 1.2	PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA 2018-2021 (juta orang)	12

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

TABEL 2.1	PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM BERDASARKAN PENYELENGGARAAN DI INDONESIA TAHUN 2017 – 2021	41

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN

TABEL 4.1	TOTAL BELANJA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2012-2019	96
TABEL 4.2	JUMLAH KASUS DAN BIAYA KATASTROPIK DALAM PROGRAM JKN TAHUN 2021	106

BAB VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

TABEL 6.1	JUMLAH KEJADIAN BENCANA DAN JUMLAH KORBAN YANG DITIMBULKAN TAHUN 2021	253

BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

TABEL 7.1	PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN UNTUK MINUM DAN TIPE DAERAH TAHUN 2021	260

DAFTAR ISI

Tim Penyusun i

Kata Pengantar ii

Kata Sambutan iii

Daftar Gambar iv

Daftar Tabel xv

Daftar Isi xvi

Daftar Lampiran xxi

BAB I. DEMOGRAFI 1

A. KEADAAN PENDUDUK 1

B. KEADAAN EKONOMI 7

C. KEADAAN PENDIDIKAN 14

D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 17

BAB II FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM 19

A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT 22

1. Akreditasi Puskesmas 24

2. Perkembangan Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap 24

3. Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan 25

4. Pelaksanaan Kesehatan Kerja, Pengukuran dan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani 27

5. Pelayanan Kesehatan Tradisional 31

B. KLINIK, PRAKTIK PERSEORANGAN, UNIT TRANSFUSI DARAH, DAN LABORATORIUM 34

1. Klinik 34

2. Praktik Mandiiri Tenaga Kesehatan 36

3. Unit Tranfusi Darah 37

C. LABORATORIUM KESEHATAN 38

D. RUMAH SAKIT 40

1. Jenis Rumah Sakit 41

2. Tipe Rumah Sakit 42

3. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit 43

4. Akreditasi Rumah Sakit 45
E. KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN 47
1. Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial 47
2. Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial 48
3. Persentase Puskesmas dengan ketersediaan Vaksin IDL (Imunisasi Dasar Lengkap) 50
F. UPAYA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN 51
Sarana dan Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan 51
G. UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM) 53
1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) 53
2. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) 54

BAB III SDM KESEHATAN 56
A. JUMLAH TENAGA KESEHATAN 57
1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas 58
2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit 64
3. Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal 66
B. REGISTRASI TENAGA KESEHATAN 68
C. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN 72
1. Tenaga Kesehatan dengan Status Pegawai Tidak Tetap (PTT) 72
2. Tenaga Kesehatan dengan Status Penugasan Khusus 73
3. Program Internsip Dokter 77
4. Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) 78
D. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN 79
1. Jumlah Lulusan Poltekkes 80
2. Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi 83

BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN 86
A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN 87
B. DANA DEKONSENTRASI DAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN TAHUN 2020 90
C. BELANJA KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN 94
1. Total Belanja Kesehatan/*Total Health Expenditure* (THE) 95
2. Jaminan Kesehatan 97

BAB V KESEHATAN KELUARGA 107
A. KESEHATAN IBU 108
1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 110
2. Pelayanan Imunisasi Tetanus Toksoid Difteri bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil 114
3. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Ibu Hamil 116
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 117
5. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas 118
6. Puskesmas Melaksanakan Kelas Ibu Hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) 120
7. Pelayanan Kontrasepsi 122
8. Pemeriksaan HIV dan Hepatitis B pada Ibu Hamil 125
B. KESEHATAN ANAK 130
1. Pelayanan Kesehatan Neonatal 132
2. PelayananKesehatanBayi,AnakBalitadanPrasekolah 136
3. Imunisasi 141
4. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah 150
C. GIZI 154
1. Status Gizi Balita 154
2. Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Gizi 162

BAB VI PENGENDALIAN PENYAKIT 171
A. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG 172
1. Tuberkulosis 172
2. HIV dan AIDS 179
3. Pneumonia 182
4. Hepatitis 185
5. Diare 187
6. Kusta 188
7. Coronavirus Diseases (COVID-19) 192
B. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) 201
1. Tetanus Neonatrum 201
2. Campak 203

3. Difteri 207
4. Polio dan *AFP (Acute Flaccid Paralysis*/Lumpuh Layu Akut) 209
C. PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOSIS 214
1. Demam Berdarah Dengue (DBD) 214
2. Chikungunya 220
3. Pengendalian Faktor Risiko DBD dan Chikungunya 221
4. Filariasis 221
5. Malaria 225
6. Rabies 230
7. Leptospirosis 232
8. Pengendalian Vektor Terpadu 234
D. PENYAKIT TIDAK MENULAR 236
1. Jumlah Kabupaten/Kota Melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM di > 80% Puskesmas 237
2. PengendalianKonsumsiTembakau 239
3. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara 241
4. Desa Melaksanakan Posbindu 243
5. Deteksi Dini Gangguan Indera 244
E. KESEHATAN JIWA DAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA) 245
1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa Dan Penyalahgunaan NAPZA 245
2. Penyalahguna Napza yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medis 247
3. Pelayanan Kesehatan Jiwa 247
F. DAMPAK KESEHATAN AKIBAT BENCANA 248
G. PELAYANAN KESEHATAN HAJI 253
1. Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji 254
2. Kondisi Jemaah Haji Indonesia 256
3. Pola Morbiditas Dan Kebugaran Jemaah Haji 256

BAB VII KESEHATAN LINGKUNGAN 257
A. AIR MINUM 258
B. AKSES SANITASI LAYAK 262

C. SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) 265
D. TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN
PENGAWASAN SESUAI STANDAR 268
E. TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) 270
F. KABUPATEN/KOTA SEHAT 272
G. PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS 274
H. GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) 276
I. PERUMAHAN 278
Daftar Pustaka 283
Daftar Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I. DEMOGRAFI

LAMPIRAN 1	LUAS WILAYAH, JUMLAH KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, KELURAHAN/ DESA, JUMLAH PENDUDUK, DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 2.a	JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2021
LAMPIRAN 2.b	JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2020-2021
LAMPIRAN 2.c	JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK TERTENTU BERDASARKAN JENIS KELAMIN TAHUN 2021
LAMPIRAN 3.a	JUMLAH PENDUDUK MISKIN, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, DAN GARIS KEMISKINAN TAHUN 2001-2021
LAMPIRAN 3.b	GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI DAN TIPE DAERAH TAHUN 2021
LAMPIRAN 3.c	INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 3.d	INDEKS GINI MENURUT PROVINSI TAHUN 2016 - 2021
LAMPIRAN 3.e	PERSENTASE PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT KELOMPOK KOMODITAS DAN DAERAH TEMPAT TINGGAL 2021
LAMPIRAN 3.f	RATA-RATA PENGELUARAN BUKAN MAKANAN PER KAPITA PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 3.g	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 - 2021
LAMPIRAN 3.h	RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 - 2021
LAMPIRAN 3.i	ANGKA MELEK HURUF (PERSENTASE PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF) MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2017 - 2021
LAMPIRAN 3.j	ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 - 2021
LAMPIRAN 3.k	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2017 - 2021
LAMPIRAN 3.k	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2021
LAMPIRAN 3.l	ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2016 - 2020
LAMPIRAN 3.m	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2017 - 2021
LAMPIRAN 3.n	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PERINGKAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2017-2021
LAMPIRAN 3.o	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONEN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020-2021

BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

LAMPIRAN 4.a	JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI TAHUN 2017 - 2021
LAMPIRAN 4.b	JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP PER PROVINSI TAHUN 2017 - 2021
LAMPIRAN 4.c	RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN TAHUN 2021
LAMPIRAN 4.d	AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 4.e	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN JENIS TENAGA KESEHATAN (9 NAKES) SESUAI DENGAN STANDAR (MINIMAL) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 4.f	PERSENTASE PUSKESMAS TANPA DOKTER MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 4.g	JUMLAH PUSKESMAS YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 4.h	JUMLAH KLINIK PRATAMA DAN KLINIK UTAMA TEREGISTRASI MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 4.i	JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 4.j	JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN PADA PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 4.k	JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DAN PENYELENGGARA DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 8.a	JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT JENIS, KEPEMILIKAN, DAN PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 8.b	JUMLAH RUMAH SAKIT DAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT MENURUT KELAS RUMAH SAKIT DAN PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 8.c	JUMLAH RUMAH SAKIT DAN RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 - 2021
LAMPIRAN 8.d	JUMLAH RUMAH SAKIT DAN TEMPAT TIDUR RS LAPANGAN/ RS DARURAT COVID-19 MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 8.e	AKREDITASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 8.f	PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS LAINNYA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 8.g	JUMLAH RUMAH SAKIT PEMERINTAH YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRASI MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 8.h	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 8.i	JUMLAH PELAKSANAAN KESEHATAN KERJA, PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN KEBUGARAN JASMANI MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 9.a	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 9.b	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 9.c	PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL (IMUNISASI DASAR LENGKAP) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 9.d	JUMLAH SARANA PRODUKSI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 9.e	JUMLAH SARANA DISTRIBUSI BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

LAMPIRAN 10 PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN PEMBINAAN POSYANDU AKTIF, KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 80% POSYANDU AKTIF DAN JUMLAH POSBINDU PTM MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

BAB III. SDM KESEHATAN

LAMPIRAN 11.a JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 11.b JUMLAH TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 11.c JUMLAH TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 11.d JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 11.e KECUKUPAN DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN DI PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 11.f JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL* MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 11.g JUMLAH DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2021
LAMPIRAN 11.h JUMLAH PESERTA PENUGASAN KHUSUS RESIDEN DOKTER SPESIALIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019- 2021
LAMPIRAN 11.i JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT BERBASIS TIM BATCH XV-XVI (PERIODE I-III TAHUN 2021)
LAMPIRAN 11.j JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA TIM NUSANTARA SEHAT (BATCH XV SAMPAI DENGAN BATCH XVI/ PERIODE I SAMPAI DENGAN II) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 11.k JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN BARU NUSANTARA SEHAT INDIVIDU PERIODE I-V TAHUN 2021
LAMPIRAN 11.l JUMLAH PENEMPATAN BARU TENAGA KESEHATAN PADA NUSANTARA SEHAT INDIVIDU (PERIODE I-V TAHUN 2021) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 11.m JUMLAH DOKTER PESERTA INTERNSIP MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 11.n JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS (PGDS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 12.a JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 12.b JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI BARU TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 12.c JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI ULANG TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 12.d JUMLAH BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI PER 31 DESEMBER 2021
LAMPIRAN 13.a JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 13.b JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 13.c JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 14.a JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2021

LAMPIRAN 14.b JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 14.c JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIK DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 15.a JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 15.b JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 15.c JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 16.a JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 16.b JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 16.c JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 16.d JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 16.e JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 16.f JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 16.g JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III POLTEKKES MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2021
LAMPIRAN 16.h JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III RPL (REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU) POLTEKKES MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2021
LAMPIRAN 16.i JUMLAH LULUSAN PROGRAM DIPLOMA IV POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2021
LAMPIRAN 16.j JUMLAH LULUSAN PROGRAM PROFESI POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2021
LAMPIRAN 16.k JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI* MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN DAN PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 16.l JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

BAB IV PEMBIAYAAN KESEHATAN

LAMPIRAN 17.a CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) TAHUN 2021
LAMPIRAN 17.b FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2021
LAMPIRAN 17.c FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2021
LAMPIRAN 17.d FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN2021
LAMPIRAN 19.a ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021
LAMPIRAN 19.b ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT ESELON I TAHUN 2021
LAMPIRAN 19.c ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN MENURUT JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021

LAMPIRAN 19.d ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN ESELON 1 KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2021
LAMPIRAN 19.e ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT PROVINSITAHUNANGGARAN 2021
LAMPIRAN 19.f ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

BAB V KESEHATAN KELUARGA

LAMPIRAN 20 JUMLAH KELAHIRAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 21 JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 - 2021
LAMPIRAN 22 JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DAN PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 23.a CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 23.b PERSENTASE PUSKESMAS* MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) SERTA JUMLAH RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 24 CAKUPAN IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 25 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 26 PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 27.a PERSENTASE REMAJA PUTRI DAN IBU HAMIL MENDAPAT TABLET TAMBAH DARAH (TTD) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 27.b PERSENTASE BALITA KURUS DAN IBU HAMIL RISIKO KEK* MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 28.a JUMLAH PUS PESERTA KB BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI YANG SEDANG DIGUNAKAN TAHUN 2021
LAMPIRAN 28.b JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) PESERTA KELUARGA BERENCANA MODERN MENURUT TEMPAT PELAYANAN DAN PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 29 CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 30.a PEMERIKSAAN HIV IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 30.b PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) DAN HASILNYA MENURUT PROVINSI TAHUN 2022
LAMPIRAN 31 JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 32.a JUMLAH KEMATIAN NEONATAL DAN POST NEONATAL MENURUT PENYEBAB UTAMA DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 32.b JUMLAH KEMATIAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 33 BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN2021
LAMPIRAN 34 CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 35 PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD) DAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

LAMPIRAN 36 CAKUPANDESA/KELURAHANUNIVERSALCHILDIMMUNIZATION (UCI) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 37 CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0 -7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 38.a *CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4*, CAMPAK RUBELA, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021*
LAMPIRAN 38.b DROP OUT RATE CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HiB(1) - CAMPAK RUBELA DAN CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3) PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019-2021
LAMPIRAN 38.c PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019-2021
LAMPIRAN 39.a CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK RUBELA 2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 39.b CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 40 CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 41 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 42 JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 43.a PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 43.b PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 43.c PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 43.d PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 43.e PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 43.f PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 44 CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, DAN SMA/MA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN2021

BAB VI PENGENDALIAN PENYAKIT

LAMPIRAN 51.a JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK, *CASE NOTIFICATION RATE* (CNR) PER 100.000 PENDUDUK DAN *TREATMENT COVERAGE* (TC) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 51.b JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS SEMUA TIPE MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 51.c JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2021

LAMPIRAN 52	ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 53.a	PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 53.b	BALITA BATUK/KESUKARAN BERNAFAS YANG DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR DAN KABUPATEN/KOTA DENGAN 50% PUSKESMAS MELAKUKAN TATALAKSANA STANDAR MINIMAL 60% MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 53.c	KASUS KONFIRMASI, SEMBUH, DAN MENINGGAL COVID-19 MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 53.d	JUMLAH LABORATORIUM DAN PEMERIKSAAN SPESIMEN COVID-19 MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 53.e	KASUS KONFIRMASI COVID-19 BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 53.f	CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 MENURUT USIA BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 53.g	CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 MENURUT USIA BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 53.h	CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 DOSIS 2 BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 54	JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 55.a	JUMLAH KASUS BARU HIV MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 - 2021
LAMPIRAN 55.b	JUMLAH KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 55.c	JUMLAH KASUS KUMULATIF AIDS MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 55.d	JUMLAH KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR TAHUN 2021
LAMPIRAN 55.e	JUMLAH KASUS BARU DAN KASUS KUMULATIF AIDS MENURUTPROVINSI SAMPAIDENGANDESEMBER2021
LAMPIRAN 55.f	JUMLAH DAN PERSENTASE KASUS AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIKAN (IDU) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 56	KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 57	KASUS BARU KUSTA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 58	KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, DAN PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 59.a	JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS DAN PROVINSI TAHUN2021
LAMPIRAN 59.b	PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (RELEASE FROM TREATMENT /RFT) MENURUT PROVINSI TAHUN2021
LAMPIRAN 60.a	PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 60.b	PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) DAN HASILNYA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 61	KASUS AFP (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA <15 TAHUN DAN PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 62.a	JUMLAH PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 62.b	JUMLAH KASUS TETANUS NEONATORUM DAN FAKTOR RISIKO MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

LAMPIRAN 62.c	JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 62.d	JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK DAN KASUS SUSPEK CAMPAK YANG DIVAKSINASI MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 62.e	FREKUENSI KLB DAN JUMLAH KASUS PADA SUSPEK KLB CAMPAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 62.f	DISTRIBUSI KLB CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 63.a	KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI <24 JAM MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 63.b	JUMLAH KEJADIAN KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 63.c	JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA TAHUN 2021
LAMPIRAN 63.d	JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 63.e	JUMLAH KEJADIAN BENCANA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 64.a	JUMLAH JEMAAH HAJI SEBELUM KEBERANGKATAN MENURUT JENIS DAN PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 64.b	JUMLAH JAMAAH HAJI BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 64.c	JUMLAH JEMAAH DAN CAPAIAN PEMERIKSAAN JAMAAH HAJI REGULER SEBELUM KEBERANGKATAN MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN TAHUN 2021
LAMPIRAN 64.d	10 PENYAKIT RISIKO TINGGI TERBANYAK PADA JAMAAH HAJI REGULER TAHUN2021
LAMPIRAN 64.e	HASIL PENGUKURAN KEBUGARAN JEMAAH HAJI REGULER MENURUT PROVINSI TAHUN2021
LAMPIRAN 65.a	KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 65.b	JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERJANGKIT DEMAM BERDARAH DENGUE MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 - 2021
LAMPIRAN 66.a	KESAKITAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 66.b	JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN API <1 DAN YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 66.c	*ANNUAL PARASITE INSIDENCE* (API) MALARIA PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2017- 2021
LAMPIRAN 67.a	PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 67.b	JUMLAH KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA, BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1%, DAN MASIH MELAKSANAKAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL (POPM) FILARIASIS SERTA ELIMINASI FILARIASIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 67.c	SITUASI RABIES MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2019 - 2021
LAMPIRAN 70.a	REKAPITULASI DETEKSI DINI KANKER SERVIKS (IVA) DAN KANKER PAYUDARA MENURUT PROVINSI TAHUN 2019-2021
LAMPIRAN 70.b	JUMLAH DESA YANG MELAKSANAKAN POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2021
LAMPIRAN 70.c	KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 70.d	KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI ≥40% PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN UPAYA BERHENTI MEROKOK (UBM) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

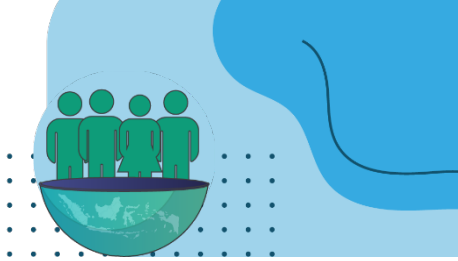
LAMPIRAN 70.e JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN PELAYANAN TERPADU (PANDU) PTM DI ≥80% PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 70.f JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI GANGGUAN INDERA PADA ≥40% POPULASI MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 71.a JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI KESEHATAN JIWA DAN NAPZA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021
LAMPIRAN 71.b JUMLAH PENYALAHGUNA NAPZA YANG MENDAPAT LAYANAN REHABILITASI MEDIS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

BAB VII KESEHATAN LINGKUNGAN

LAMPIRAN 72.a PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 72.b PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019-2021
LAMPIRAN 73.a JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 73.b PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2019-2021
LAMPIRAN 74 PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 75 PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM(TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 76.a PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 76.b JUMLAH KABUPATEN/ KOTA SEHAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 76.c JUMLAH FASYANKES YANG MEMILIKI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI TAHUN 2021
LAMPIRAN 76.d PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS) TAHUN 2021
LAMPIRAN 76.e PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019-2021



Bab I.
DEMOGRAFI



BAB I. DEMOGRAFI

Letak astronomis Indonesia yang berada di antara 6° Lintang Utara (LU) sampai 11° Lintang Selatan (LS) dan 95° sampai 141° Bujur Timur (BT), memperlihatkan posisi negara Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa. Selain itu, secara geografis, Indonesia terletak diantara Benua Australia dan Benua Asia, serta berada diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari 16.772 pulau (sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022), dengan luas wilayah sebesar 1.892.555,5 km^2 yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Banyaknya pulau yang ada di Indonesia sedikit banyak berpengaruh terhadap banyaknya suku, budaya, dan bahasa, yang dapat menimbulkan tantangan tersendiri dalam upaya pemerintah untuk memberdayakan masayarakat agar dapat hidup sehat.

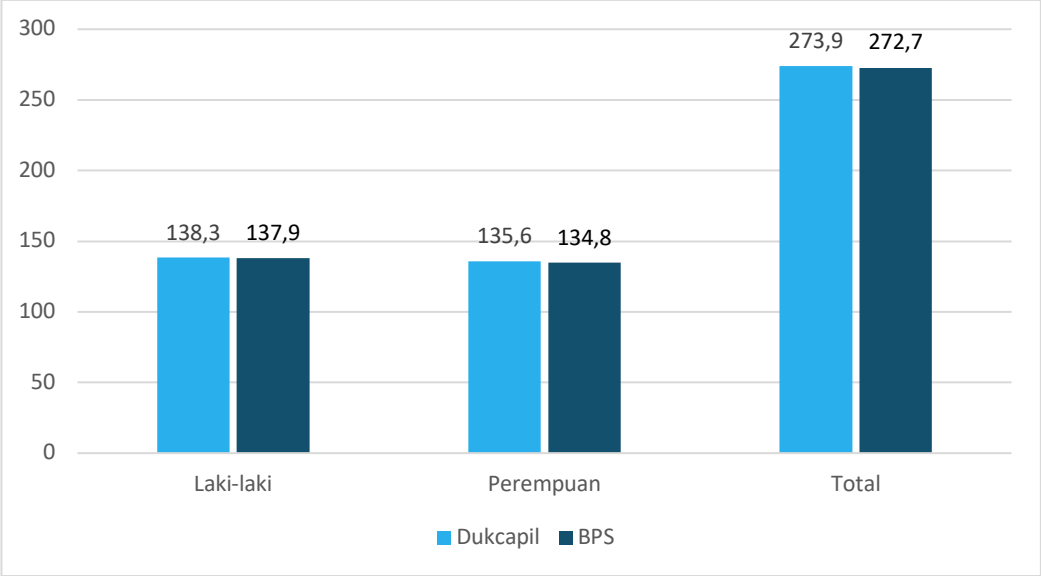
Letak Indonesia yang berada di sekitar garis khatulistiwa menjadikan Indonesia memiliki iklim tropis. Iklim dengan curah hujan dan paparan sinar matahari yang lebih banyak dibandingkan wilayah dengan iklim lain ini memberikan berkah bagi beragam tanaman pangan dan juga hutan di Indonesia, meski deforestasi hutan masih terus terjadi hingga saat ini. Deforestasi hutan yang terjadi akan mempengaruhi lingkungan hidup dan pada akhirnya juga akan menimbulkan dampak pada Kesehatan penduduk.

Secara administratif, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi tersebut dibagi atas kabupaten dan kota. Daerah kabupaten dan kota dibagi atas kecamatan dan kecamatan dibagi atas kelurahan dan/desa. Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021, Indonesia terbagi atas 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 7.266 kecamatan, 8.506 kelurahan, dan 74.961 desa (Lampiran 1).

A. KEADAAN PENDUDUK

Menurut Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia pada 31 Desember 2021 yaitu sebanyak 273.879.750 jiwa yang terdiri dari 138.303.472 jiwa penduduk laki-laki dan 135.576.278 jiwa penduduk perempuan. Sedangkan menurut angka proyeksi dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2021 yaitu 272.682.515 jiwa yang terdiri dari 137.871.054 jiwa penduduk laki-laki dan 134.811.461 jiwa penduduk perempuan. Gambar 1.1 memperlihatkan jumlah penduduk di Indonesia tahun 2021 berdasarkan jenis kelamin.

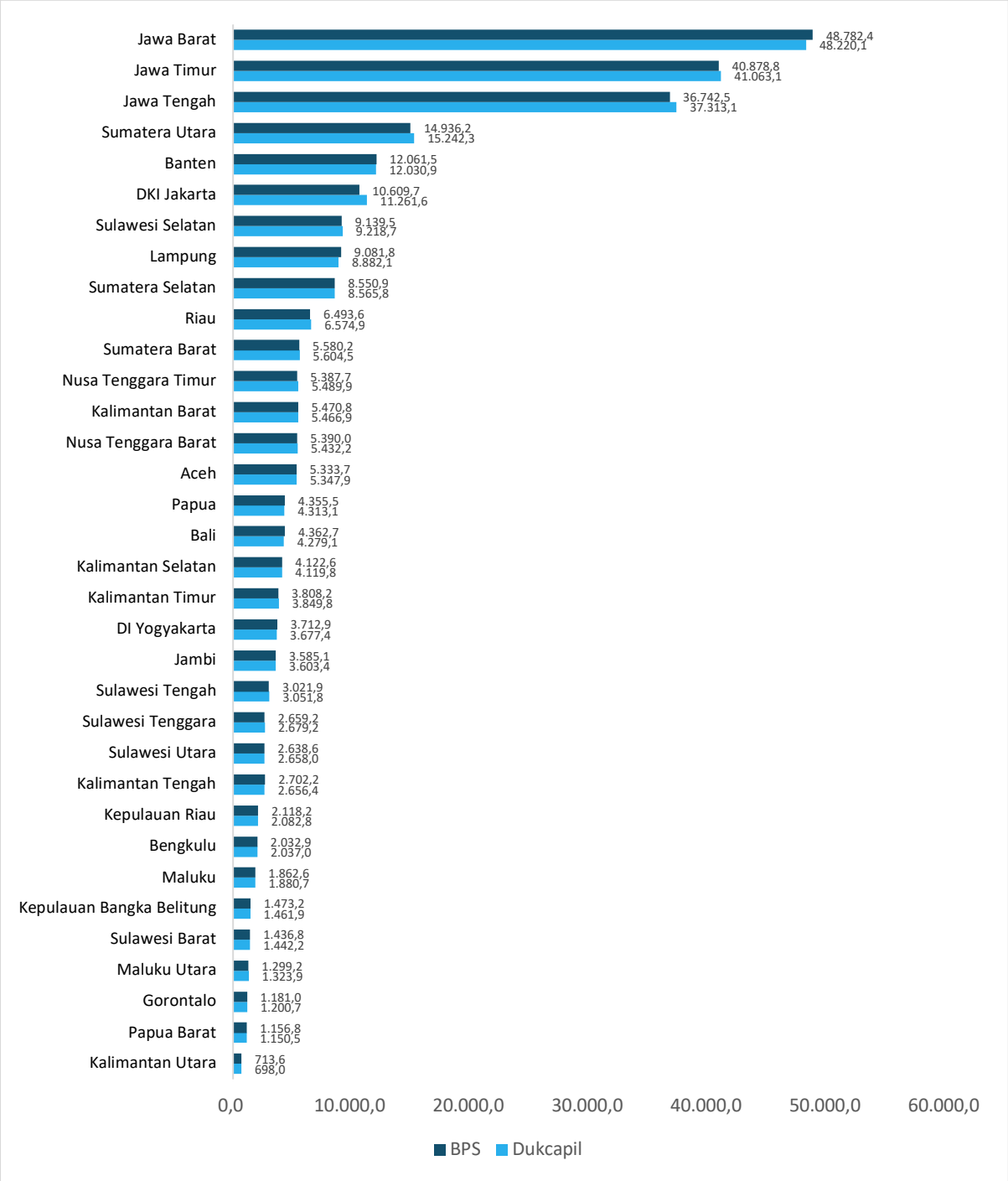
GAMBAR 1.1
JUMLAH PENDUDUK INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN (DALAM JUTAAN)
TAHUN 2021



Sumber: Jumlah Penduduk 31 Desember 2021, Kemendagri, 2022 (https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id)
Jumlah Penduduk Proyeksi Interim 2020-2023, BPS 2022

Berdasarkan hasil proyeksi, jumlah penduduk paling banyak di Indonesia terdapat di Provinsi Jawa Barat, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Provinsi Kalimantan Utara. Secara rinci data estimasi jumlah penduduk per provinsi dapat dilihat pada Gambar 1.2.

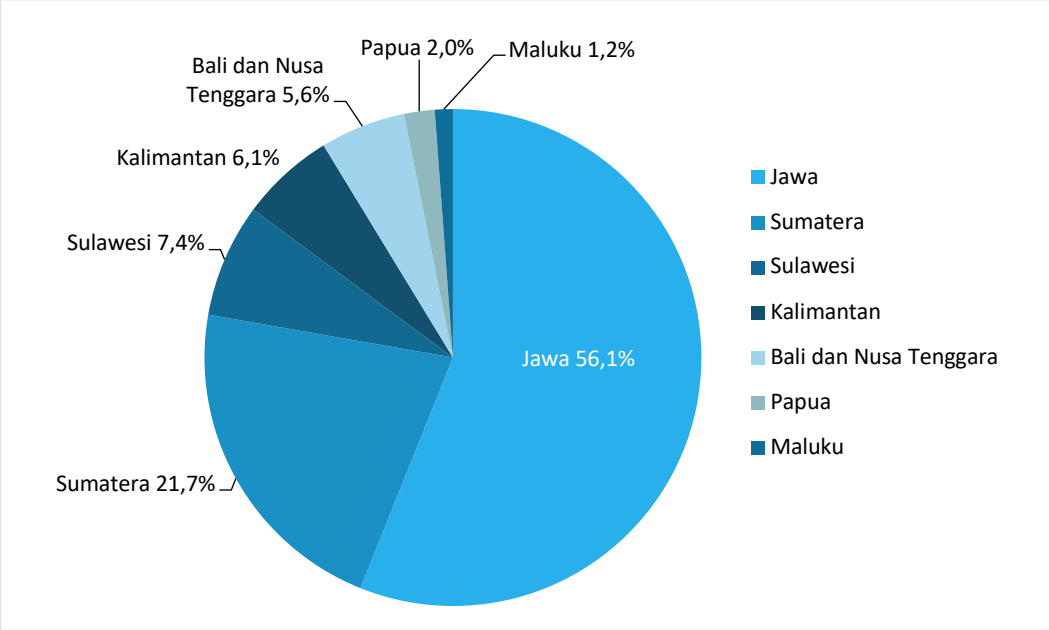
GAMBAR 1.2
JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI (DALAM RIBUAN)
TAHUN 2021



Sumber: Jumlah Penduduk 31 Desember 2021, Kemendagri, 2022 (https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id)
Jumlah Penduduk Proyeksi Interim 2020-2023, BPS 2022

Pulau Jawa merupakan pulau dengan populasi penduduk terbanyak dibandingkan dengan pulau lainnya di Indonesia (56,1%). Daerah timur yaitu Pulau Maluku (1,2%) dan Papua (2,0%) merupakan pulau di Indonesia dengan populasi penduduk paling sedikit. Data mengenai persebaran populasi penduduk per pulau-pulau besar di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1.3.

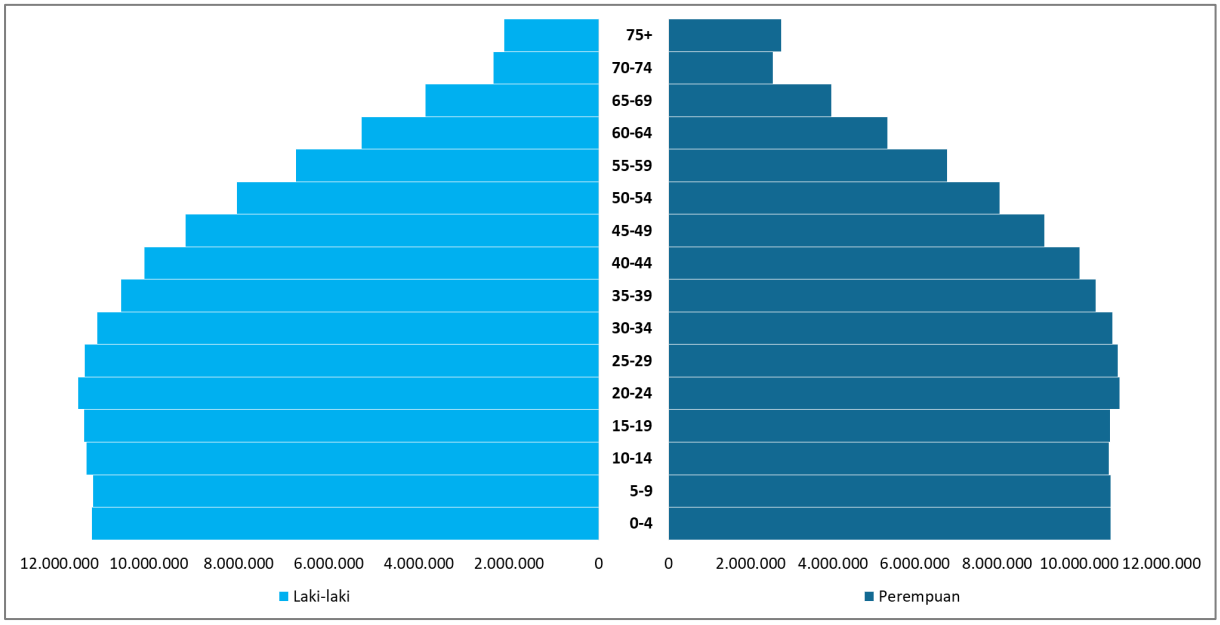
GAMBAR 1.3
PERSENTASE PERSEBARAN PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2021



Sumber: Jumlah Penduduk 31 Desember 2021, Kemendagri, 2022
(https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id)

Dalam piramida penduduk, terdapat dua sumbu, yaitu sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Sumbu vertikal menggambarkan kelompok umur penduduk dari nol sampai dengan 75 tahun lebih dengan interval lima tahunan dengan jumlah penduduk laki-laki digambarkan di sisi sebelah kiri dan perempuan di sisi sebelah kanan. Sumbu horizontal menggambarkan jumlah penduduk. Piramida tersebut merupakan gambaran struktur penduduk yang terdiri dari struktur penduduk muda, dewasa, dan tua. Struktur penduduk ini menjadi dasar bagi kebijakan kependudukan, sosial, budaya, dan ekonomi.

GAMBAR 1.4
PIRAMIDA PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2021

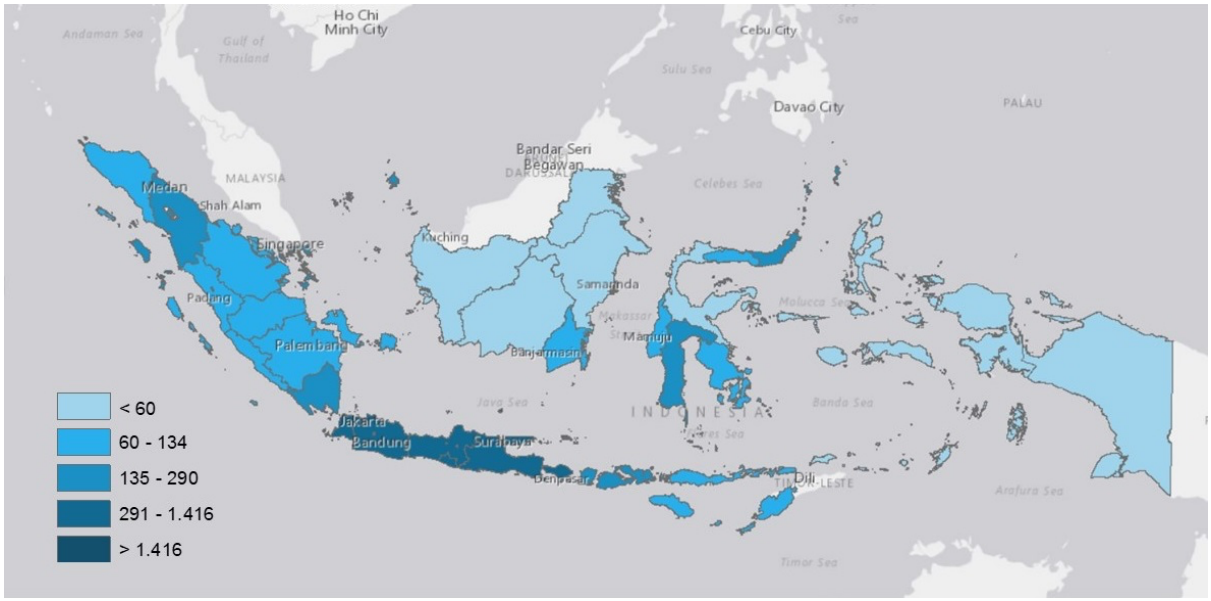


Sumber: Jumlah Penduduk Proyeksi Interim 2020-2023, BPS 2022

Piramida penduduk Indonesia pada Gambar 1.4 berbentuk kerucut dengan alas yang lebar dan puncak yang meruncing. Hal ini menunjukkan bahwa struktur penduduk di Indonesia termasuk struktur penduduk muda. Usia 0-14 tahun (usia muda) lebih banyak jumlahnya dibandingkan usia di atasnya. Bagian atas pada piramida tersebut yang lebih pendek bahwa menunjukkan angka kematian yang masih tinggi pada penduduk usia tua.

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah dapat dipelajari dengan menggunakan ukuran kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk menujukkan tingkat persebaran penduduk di suatu wilayah. Angka kepadatan penduduk menunjukkan rata-rata jumlah penduduk per 1 kilometer persegi. Semakin besar angka kepadatan penduduk menunjukkan bahwa semakin banyak penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat permukiman, pusat peradaban, pusat pemerintahan, dan pusat aktivitas sosial ekonomi. Rata-rata kepadatan penduduk di Indonesia tahun 2021 berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yaitu sebanyak 145 jiwa/km^2. Kepadatan penduduk berguna sebagai acuan dalam rangka mewujudkan pemerataan dan persebaran penduduk. Kepadatan penduduk menurut provinsi tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 1.

GAMBAR 1.5
PETA PERSEBARAN KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM^2) DI INDONESIA
TAHUN 2021



Sumber data penduduk per 31 Desember 2021: https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id

Gambar 1.5 memperlihatkan kepadatan penduduk di Indonesia yang tidak merata. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Pulau Jawa dengan Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi dengan kepadatan penduduk tertinggi (17.031 jiwa/km^2). Provinsi dengan kepadatan penduduk terendah yaitu di Provinsi Kalimantan Utara yaitu 10 jiwa/km^2 (data selengkapnya dapat dilihat di Lampiran 1).

Beberapa cara yang telah dilakukan pemerintah dalam rangka pemerataan penduduk, antara lain: (1) transmigrasi atau program memindahkan penduduk dari tempat yang padat penduduk ke tempat yang masih jarang penduduknya; (2) pemerataan pembangunan terutama di wilayah timur Indonesia; (3) menyosialisasikan program keluarga berencana dan menunda usia pernikahan pertama.

Indikator yang sering digunakan untuk mengetahui produktivitas penduduk yaitu Angka Beban Ketergantungan (ABK) atau *Dependency Ratio*. Angka Beban Ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk berumur 0-14 tahun ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (penduduk angkatan kerja). Angka ini digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan perekonomian suatu negara. Semakin tinggi persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan yang tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Angka Beban Ketergantungan penduduk Indonesia pada tahun 2021 sebesar 44,34%. Hal ini berarti bahwa 100 penduduk Indonesia yang produktif, di samping menanggung dirinya sendiri, juga menanggung kurang lebih 45 orang yang tidak produktif. Angka ini berkurang dari tahun sebelumnya,

dimana pada tahun lalu 100 penduduk produktif menanggung 47 orang penduduk yang tidak produktif.

Tabel 1.1 memperlihatkan data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2021 berdasarkan jenis kelamin. Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan diperlukan untuk penyusunan perencanaan dan evaluasi hasil pencapaian upaya kesehatan yang telah dilaksanakan. Data penduduk sasaran program pembangunan kesehatan tahun 2021 terdapat pada Lampiran 2.a.

TABEL 1.1
PENDUDUK SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN DI INDONESIA
TAHUN 2021

No	Sasaran Program	Kelompok Umur/Formula	Jenis Kelamin		Jumlah
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Bayi	0 Tahun	2.273.236	2.174.781	4.448.017
2	Batita (Bawah Tiga Tahun)	0 – 2 Tahun	6.772.794	6.463.162	13.235.956
3	Anak Balita	1 – 4 Tahun	9.007.072	8.590.172	17.597.244
4	Balita (Bawah Lima Tahun)	0 – 4 Tahun	11.280.308	10.764.953	22.045.261
5	Pra Sekolah	5 – 6 Tahun	4.495.947	4.310.121	8.806.068
6	Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat	7 Tahun	2.247.035	2.156.055	4.403.090
7	Anak Usia SD/Setingkat	7 – 12 Tahun	13.570.550	12.904.399	26.474.949
8	Penduduk Usia Muda	< 15 Tahun	33.922.823	32.263.373	66.186.196
9	Penduduk Usia Produktif	15 – 64 Tahun	95.629.734	93.285.510	188.915.244
10	Penduduk Usia Non Produktif	≥ 65 Tahun	8.318.497	9.262.578	17.581.075
11	Penduduk Usia Lanjut	≥ 60 Tahun	13.599.306	14.599.553	28.198.859
12	Penduduk Usia Lanjut Risiko Tinggi	≥ 70 Tahun	4.457.944	5.294.626	9.752.570
13	Wanita Usia Subur (WUS)	15 – 49 Tahun	-	73.095.757	73.095.757
	WUS Imunisasi	15 – 39 Tahun	-	53.922.808	53.922.808

Sumber: Jumlah Penduduk Proyeksi Interim 2020-2023, BPS 2022

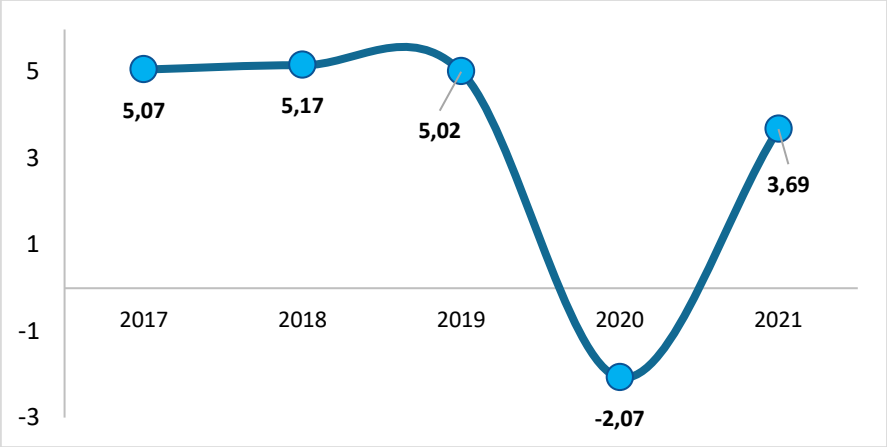
B. KEADAAN EKONOMI

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDB harga berlaku nominal menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu negara. Nilai PDB yang besar menunjukkan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Perekonomian Indonesia pada tahun 2021 yang diukur berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp62,2 juta atau US$4.349,5.

Ekonomi Indonesia tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,69%, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46%. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2021 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi ekonomi sebesar 57,89% dan kinerja ekonomi yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,66%.

GAMBAR 1.6
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (DALAM %)
TAHUN 2017 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Sejak COVID-19 menyebar ke seluruh dunia dan menginfeksi penduduk dengan cepat, badan Kesehatan dunia WHO menyatakan bahwa penyakit ini merupakan pandemi. Akibatnya, hampir seluruh negara di dunia memberlakukan pembatasan mobilitas dan interaksi masyarakat. Hal itu secara umum berdampak negatif terhadap perekonomian di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang sempat mengalami kontraksi ekonomi yang sangat buruk pada tahun 2020. Keadaan perekonomian yang tidak baik juga akan berakibat kepada kemiskinan pada suatu negara.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh World Bank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Angka kemiskinan dapat diukur menggunakan tingkat pendapatan, tingkat pengeluaran, juga kombinasi keduanya. Indonesia termasuk negara yang mengukur data kemiskinan menggunakan tingkat pengeluaran per kapita dengan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Pengukuran angka kemiskinan menggunakan metode garis kemiskinan pengeluaran, baik garis kemiskinan bukan makanan maupun garis kemiskinan makanan. Garis kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Jadi

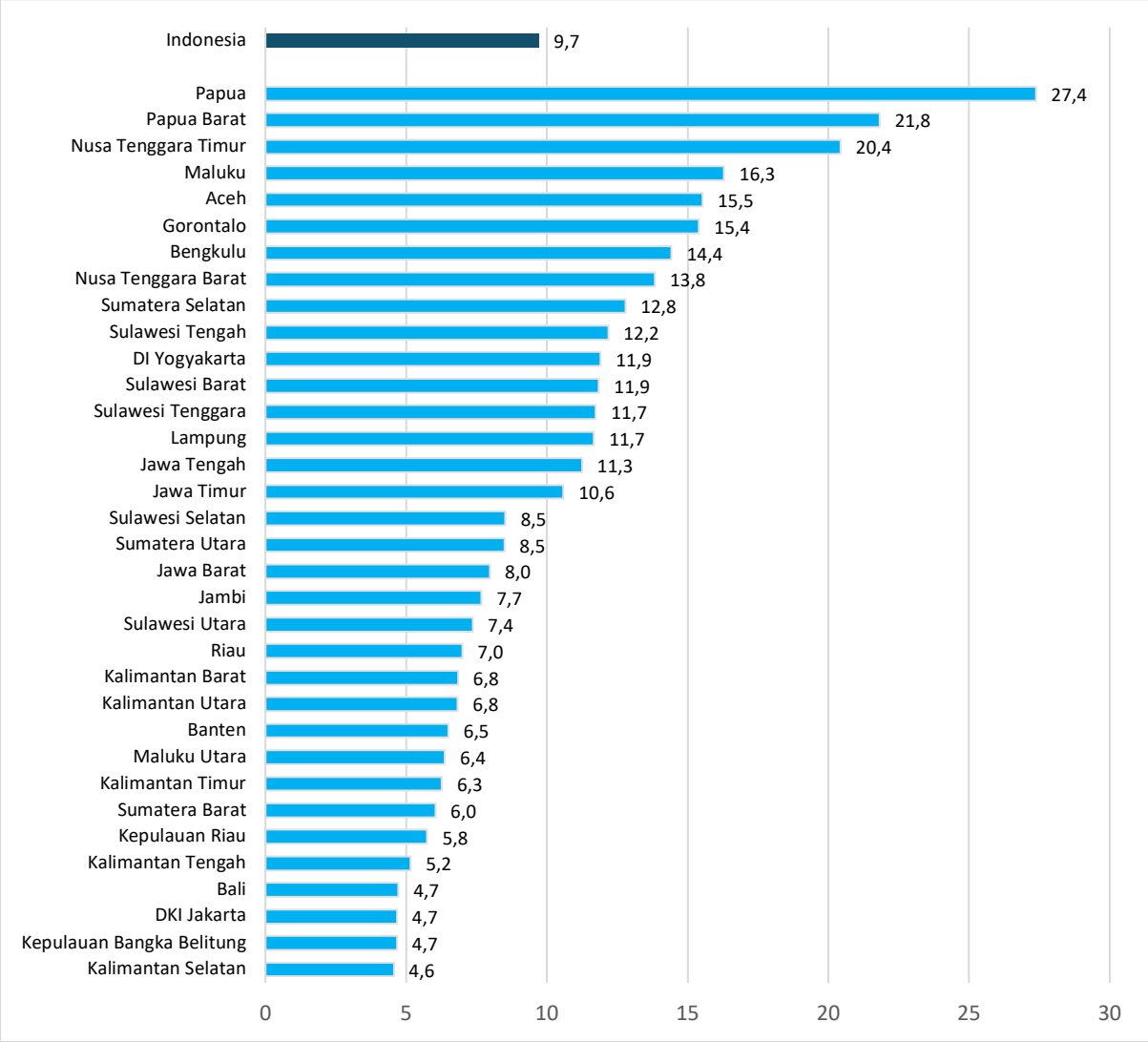
Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, menurun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap September 2020. Persentase penduduk miskin pada September 2021 sebesar 9,71 persen, menurun 0,43 persen poin terhadap Maret 2021 dan menurun 0,48 persen poin terhadap September 2020. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2021 sebesar 7,89 persen, turun menjadi 7,60 persen pada September 2021. Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2021 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,53 persen pada September 2021. Data mengenai jumlah penduduk miskin dan persentasenya secara rinci dapat dilihat pada lampiran 3.a dan 3.b.

Dari Gambar 1.7, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021, persentase kemiskinan secara umum di Indonesia yaitu sebesar 9,7%. Persentase kemiskinan terendah yaitu di Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 4,6%, sementara tertinggi yaitu di Provinsi Papua yang pada 2021 mencapai angka sebesar 27,4%.

GAMBAR 1.7

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

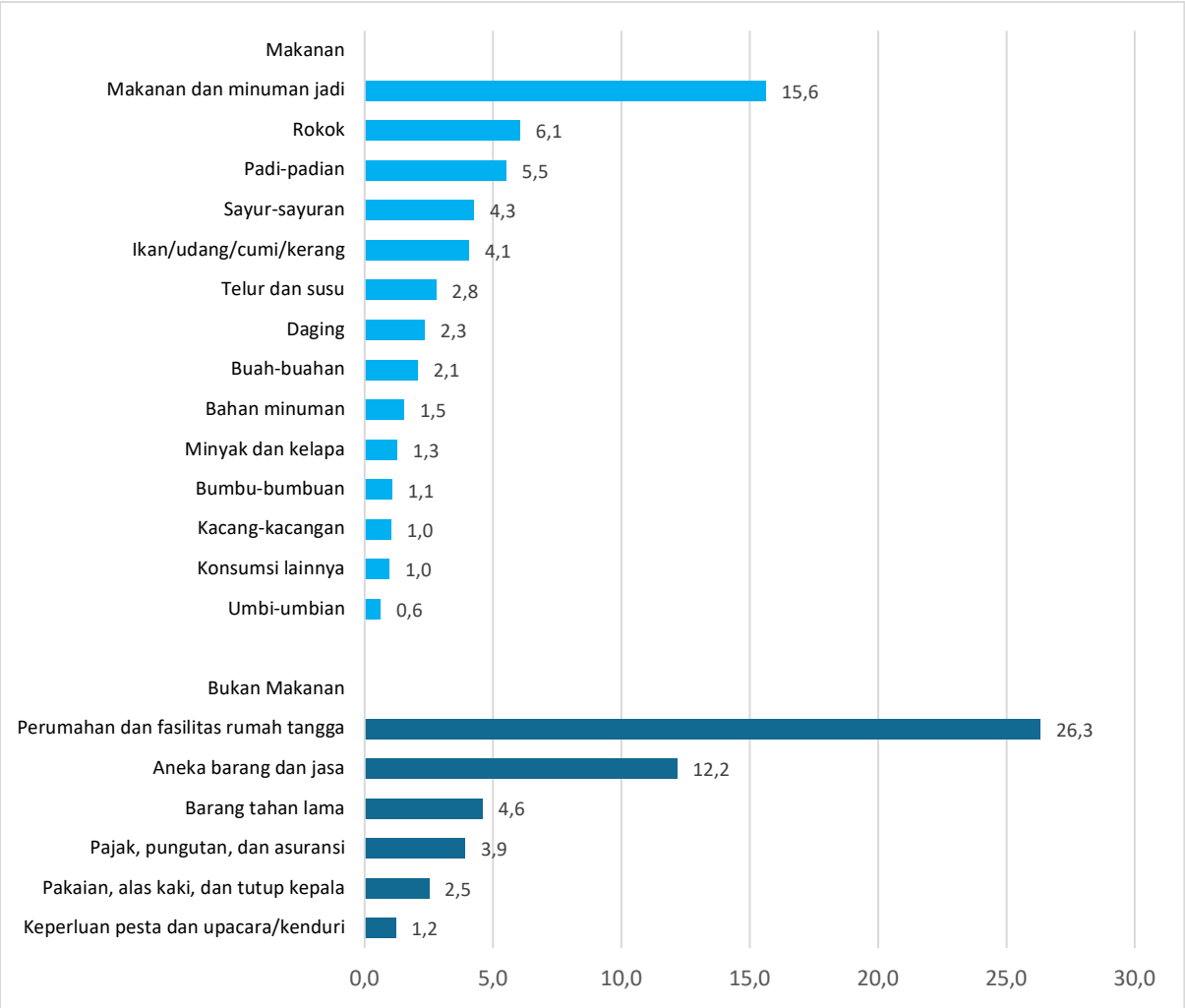
Selain jumlah penduduk miskin, yang penting diketahui lainnya adalah indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran setiap penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Secara nasional, indeks kedalaman kemiskinan tahun 2021 adalah sebesar 1,67, menurun 0,04 poin dari kondisi Maret pada tahun yang sama. Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Secara nasional, indeks keparahan kemiskinan pada periode yang sama nilainya tetap, yaitu sebesar 0,42. Data mengenai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan secara lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 3.c.

Salah satu alat ukur untuk menggambarkan ketimpangan pendapatan adalah Koefisien Gini/ Indeks Gini (Gini Ratio). Indeks Gini adalah suatu koefisien yang menunjukkan tingkat ketimpangan atau kemerataan distribusi pendapatan secara menyeluruh. Koefisien Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti terdapat kemerataan sempurna pada distribusi pendapatan (pemerataan sempurna), sedangkan apabila bernilai 1 berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna (ketimpangan sempurna). Pada September tahun 2021, nilai Indeks Gini Indonesia adalah 0,381. Angka ini menurun 0,003 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio pada Maret 2021 yang sebesar 0,384 dan menurun 0,004 poin dibandingkan dengan Gini Ratio September 2020 yang sebesar 0,385. Rincian mengenai Indeks Gini secara detail dapat dilihat pada Lampiran 3.d.

Pendapatan yang diterima oleh keluarga dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan keluarga tersebut. Namun informasi mengenai pendapatan rumah tangga yang akurat sulit diperoleh, sehingga dilakukan pendekatan melalui data pengeluaran rumah tangga. Data pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan, kedua kelompok tersebut dapat menggambarkan bagaimana rumah tangga mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya.

GAMBAR 1.8

PERSENTASE RATA-RATA PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN TAHUN 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Berdasarkan hasil Susenas pada bulan Maret 2021, persentase rata-rata pengeluaran per kapita sebulan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan hampir sama besar, yaitu 49,25% untuk pengeluaran makanan dan 50,75% untuk pengeluaran bukan makanan. Dari Gambar 1.8 terlihat bahwa tiga pengeluaran terbesar yaitu untuk perumahan dan fasilitas rumah tangga (26,3%), makanan dan minuman jadi (15,6%) dan pengeluaran untuk aneka barang dan jasa (12,2%).

Berdasarkan konsep *The Labor Force Concept* yang disarankan oleh International Labor Organization (ILO), penduduk terbagi atas dua kelompok, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Selanjutnya, penduduk usia kerja dibedakan pula menjadi dua kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya, yaitu kelompok Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Kelompok angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja (aktif bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja) dan pengangguran (penduduk yang sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha, sudah memiliki

pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/putus asa). Sedangkan kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk sedang bersekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Kondisi ketenagakerjaan Indonesia dapat dilihat pada gambar 1.2. Jumlah angkatan kerja dan jumlah penduduk yang bekerja mengalami penurunan. Jumlah angkatan kerja pada periode Februari 2020 sebanyak 140,2 juta orang menjadi 139,8 juta orang pada periode Februari 2021. Sedangkan pada periode Agustus jumlahnya mengalami kenaikan, yaitu 138,2 juta penduduk pada Agustus 2020 menjadi 140,2 juta penduduk pada Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami penurunan pada periode Februari dan mengalami kenaikan pada periode Agustus, dimana dari 69,21% menjadi 68,08% pada Februari dan dari 67,77% mejadi 67,80% pada periode Agustus. TPAK merupakan persentase jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Indikator ini mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah dan menunjukkan besaran relatif suplai tenaga kerja yang tersedia untuk produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Jumlah pengangguran terbuka nilainya fluktuatif tiap periode dan tahunnya. Pada periode februari 2021 jumlah pengangguran terbuka adalah 8,8 juta orang, jumlah ini mengalami penurunan dari Agustus 2020 yang sebanyak 9,76 juta penduduk. Meski demikian, dari kurun waktu Februari 2021 ke Agustus 2021 jumlahnya meningkat menjadi 9,1 juta orang.

TABEL 1.2
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA (JUTA ORANG) TAHUN 2018-2021

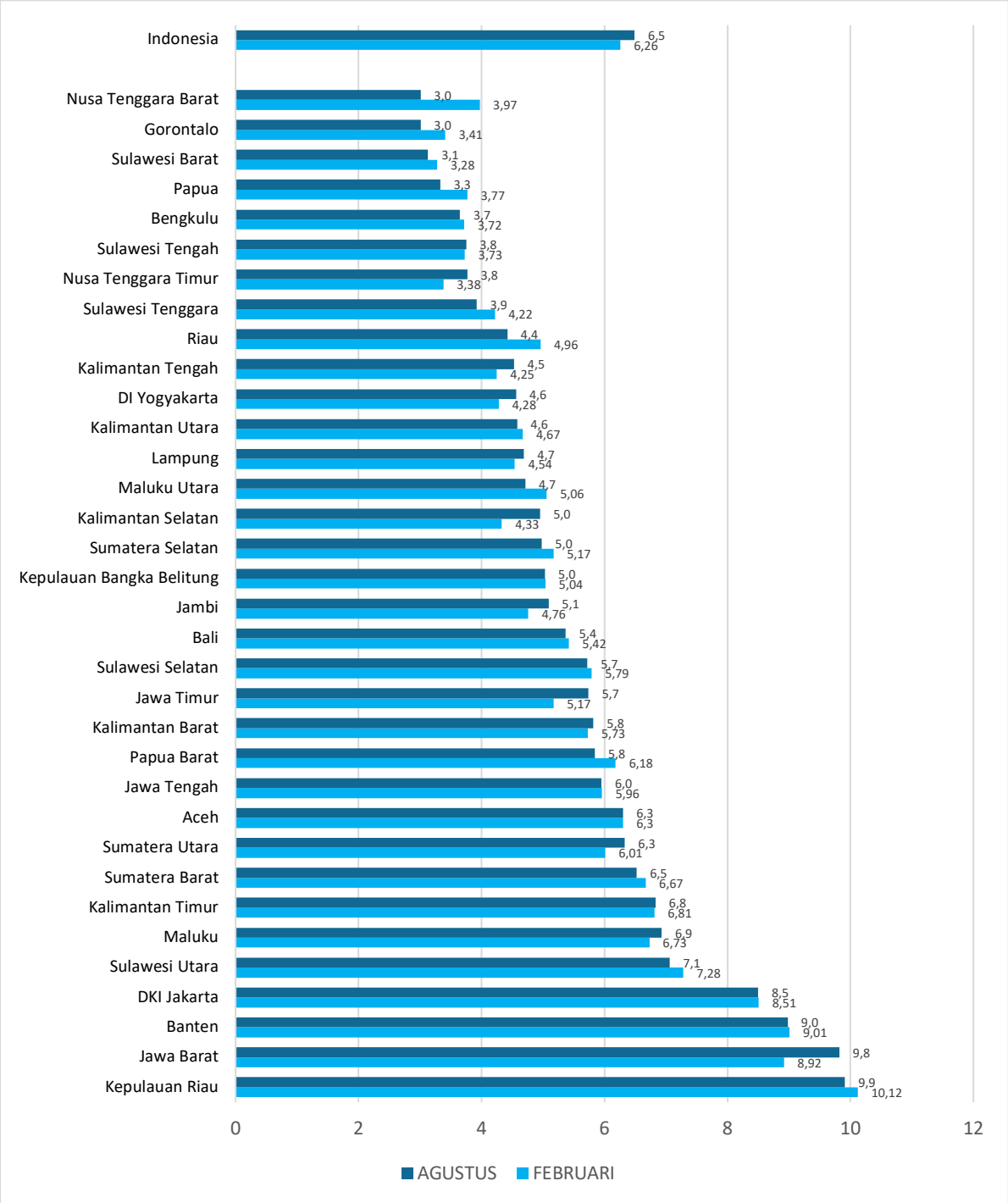
Angkatan Kerja	2018		2019		2020		2021	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Jumlah Angkatan Kerja	133,94	131,01	136,18	133,56	140,22	138,22	139,8	140,2
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,2	67,26	69,37	67,53	69,21	67,77	68,08	67,80
Jumlah Penduduk yang Bekerja	127,07	124,01	131,69	128,75	133,29	128,45	131,1	131,1
Jumlah Pengangguran Terbuka	6,87	7,00	6,89	7,10	6,92	9,76	8,8	9,1
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,13	5,34	5,01	5,28	4,94	7,07	6,26	6,49

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Untuk Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia juga mengalami fluktuasi pada periode tahun 2020-2021, dimana pada periode Agustus 2020 TPT tercatat sebesar 7,07% turun menjadi 6,26% pada Februari 2021. Sebaliknya, TPT pada Agustus 2021 mengalami kenaikan menjadi 6,49% Jika dibandingkan dengan TPT pada Februari 2021. Tingginya TPT biasanya seiring dengan

pertambahan jumlah penduduk serta tidak didukung oleh tersedianya lapangan kerja baru atau keengganan untuk menciptakan lapangan kerja (minimal) untuk dirinya sendiri atau memang tidak memungkinkan untuk mendapatkan lapangan kerja atau tidak memungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja.

GAMBAR 1.9
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PER PROVINSI
TAHUN 2021



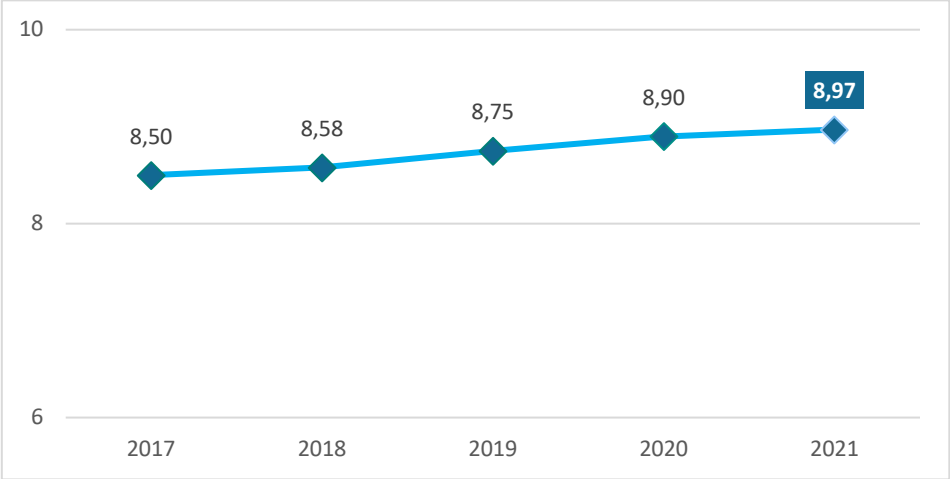
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

C. KEADAAN PENDIDIKAN

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan semangat pemerintah dalam mewujudkan wajib belajar 9 tahun. Meski pada prakteknya, pada setiap daerah tergantung kesiapan dan kemampuan daerah yang dapat diatur pada peraturan daerah masing-masing. Tingkat pendidikan masyarakat dapat diukur dengan berbagai indikator, salah satu indikator yang secara sensitif dapat mengukur tingkat pendidikan masyarakat yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Dari Gambar 1.10, dapat kita lihat bahwa RLS penduduk Indonesia yang berumur 15 tahun ke atas pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, meskipun belum dapat memenuhi target program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan RLS terjadi setiap tahun seperti terlihat pada Gambar 1.10 yaitu RLS pada tahun 2017 sebesar 8,50 tahun menjadi 8,97 tahun pada 2021.

GAMBAR 1.10
RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS (DALAM TAHUN)
TAHUN 2017 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Jika dilihat per provinsi, Rata-rata Lama Sekolah yang paling rendah terdapat di Provinsi Papua (7,05 tahun) dan yang tertinggi di Provinsi DKI Jakarta (11,20 tahun). Sebanyak 21 (dua puluh satu) provinsi telah mencapai program wajib belajar 9 tahun. Rincian data mengenai Rata-rata Lama Sekolah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 3.h.

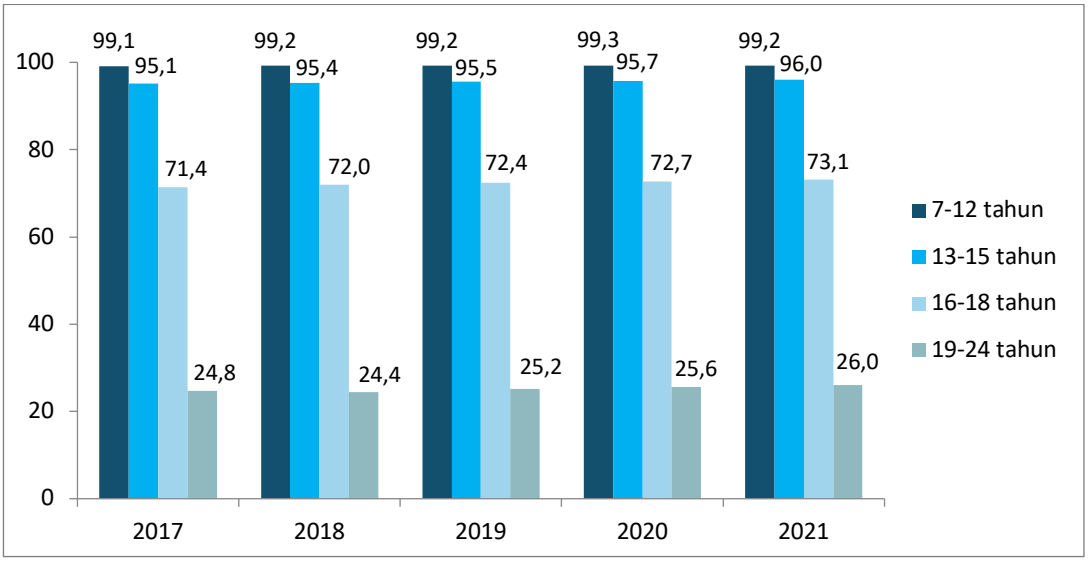
Kemampuan penduduk dalam membaca dan menulis merupakan kemampuan yang mendasar. Kemampuan baca tulis tersebut dapat dilihat berdasarkan indikator Angka Melek Huruf (AMH). Ukuran AMH digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk di suatu wilayah yang memiliki kemampuan dasar untuk memperluas akses informasi, sehingga bertambah pengetahuan dan keterampilan mereka, yang pada akhirnya penduduk tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup diri, keluarga, maupun negaranya di berbagai bidang kehidupan. AMH merupakan persentase penduduk berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Berdasarkan jenis kelamin, pada tahun 2021 AMH laki-laki (97,4 %) lebih tinggi daripada AMH perempuan (94,7%). Secara rinci, AMH (persentase penduduk

berumur 15 tahun ke atas yang melek huruf) menurut provinsi dan jenis kelamin dapat dilihat pada Lampiran 3.j.

Angka partisipasi sekolah adalah indikator pendidikan yang mengukur tingkat partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur sekolah atau jenjang pendidikan tertentu. Ada tiga jenis indikator yang memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah yaitu Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), dan Angka Partisipasi Murni (APM).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS yang tinggi menunjukkan tingginya partisipasi sekolah dari penduduk usia tertentu. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Nilai APS merupakan persentase jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dibagi dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. APS secara umum dikategorikan menjadi 3 kelompok umur, yaitu 7-12 tahun mewakili umur setingkat SD, 13-15 tahun mewakili umur setingkat SMP/MTs, 16-18 tahun mewakili umur setingkat SMA/SMK dan 19-24 tahun mewakili umur setingkat perguruan tinggi.

GAMBAR 1.11
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH
TAHUN 2017 – 2021



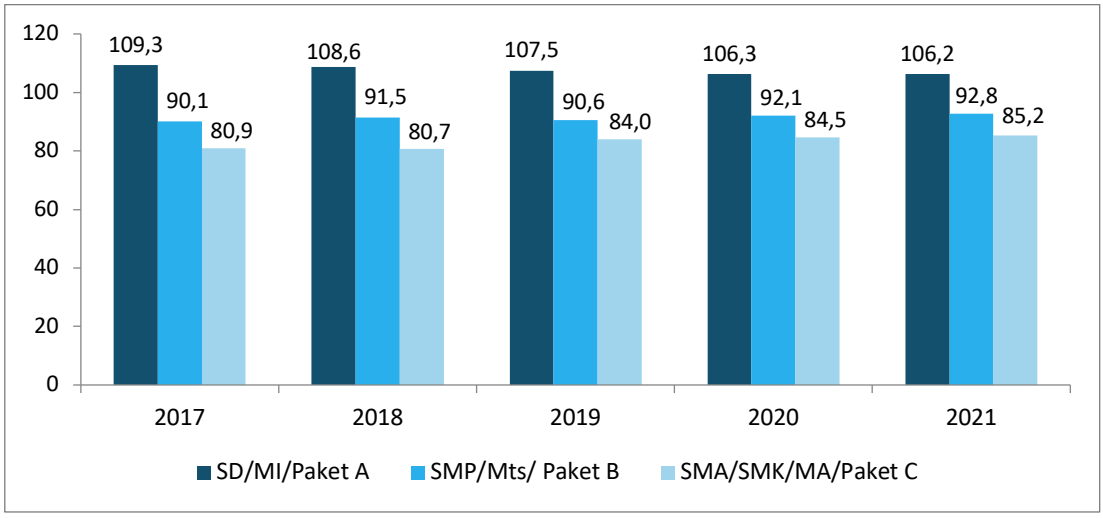
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Seperti dapat dilihat pada Gambar 1.11, persentase APS di setiap kelompok umur mengalami peningkatan sejak tahun 2017 hingga 2021. Semakin tinggi kelompok umur, semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya. Hal ini dimungkinkan karena usia pada kelompok umur yang tinggi (16-18 tahun dan 19-24 tahun) masuk ke dalam angkatan kerja, sehingga sebagian penduduk memilih untuk bekerja daripada meneruskan pendidikannya dengan beragam alasan. Peningkatan persentase APS pada kelompok umur 7-12 tahun (setara SD/sederajat) dan pada kelompok umur 13-15 tahun (setara SMP/sederajat) yang tidak terlalu banyak dimungkinkan karena adanya program wajib belajar 9 tahun, dan juga karena persentasinya yang memang sudah cukup tinggi sejak awal (terutama pada kelompok umur 7-12 tahun).

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Jika jumlah populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang tertentu melebihi jumlah anak pada batas usia sekolah sesuai jenjang yang bersesuaian, maka nilai APK pada jenjang tersebut akan lebih dari 100. Hal ini disebabkan karena adanya siswa yang sekolah walaupun usianya belum mencapai usia sekolah yang bersesuaian, siswa yang telat masuk sekolah, atau banyaknya pengulangan kelas pada siswa. Secara umum, APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.

Nilai APK (Gambar 1.12) untuk SD/MI tahun 2017-2021 melebihi 100% yang menunjukkan masih adanya penduduk yang terlalu cepat sekolah (penduduk usia di bawah 7 tahun yang sudah bersekolah) atau terlambat bersekolah (penduduk usia lebih dari 12 tahun masih bersekolah di SD/sederajat). Meski demikian, dari tahun ke tahun nilainya semakin turun mendekati 100%, hal ini berarti penduduk yang bersekolah di SD/sederajat semakin banyak yang sesuai dengan peruntukan umurnya. Gambar 1.12 menunjukan bahwa dari tahun 2017 hingga tahun 2021 nilai APK untuk SMP/sederajat dan nilai APK untuk SMA/sederajat mengalami kenaikan. Secara umum APK penduduk perempuan pada kelompok sekolah yang lebih tinggi lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Hal ini menunjukan lebih banyak penduduk perempuan yang melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Rincian APK menurut provinsi dan jenis kelamin tahun 2021 terdapat pada Lampiran 3.l.

GAMBAR 1.12
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI KASAR
TAHUN 2017 – 2021

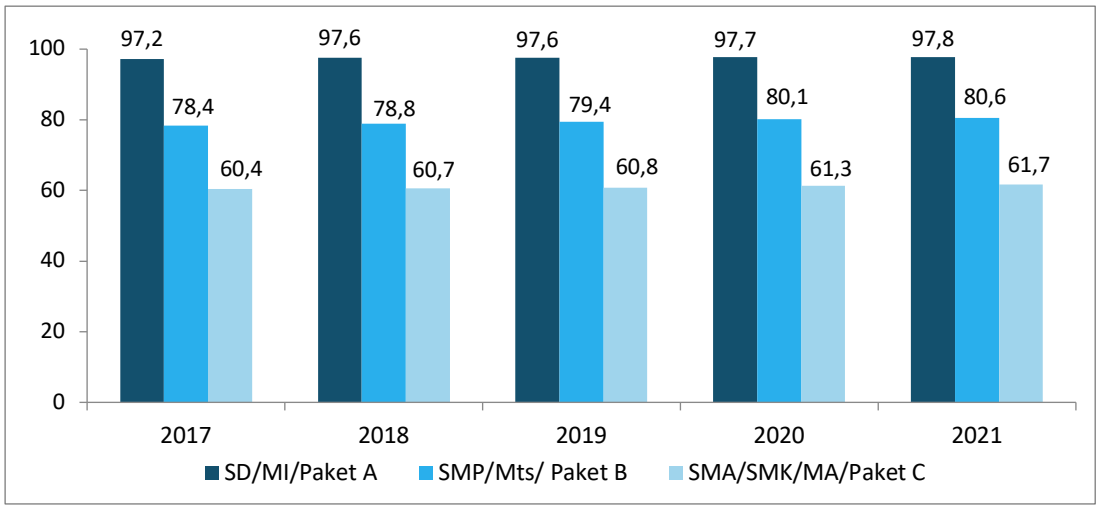


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dengan usianya, dinyatakan dalam persen. APM bertujuan untuk mengukur ketepatan usia penduduk dalam berpartisipasi untuk mengenyam suatu jenjang pendidikan tertentu. Jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator pendidikan yang lebih baik karena memperhitungkan juga partisipasi penduduk

kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. Secara umum, APM di setiap kelompok umur sekolah mengalami kenaikan sejak 2017 hingga 2021.

GAMBAR 1.13
PERSENTASE ANGKA PARTISIPASI MURNI PENDIDIKAN
TAHUN 2017 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

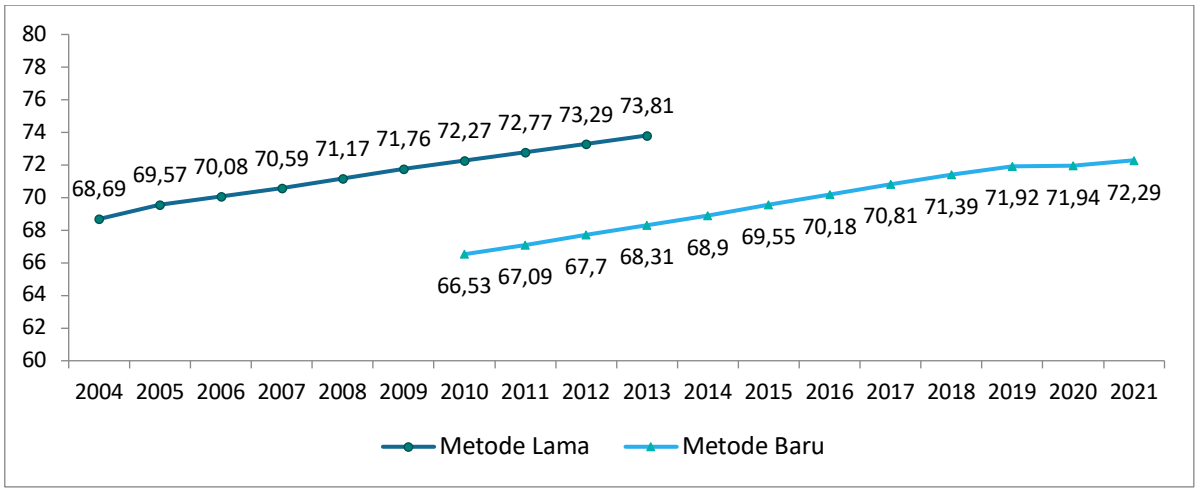
D. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

IPM diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan di suatu wilayah/negara. IPM dibentuk dari 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat; (2) Pengetahuan; dan (3) Standar hidup layak. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan di suatu wilayah dalam jangka panjang.

Pembangunan manusia Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun baik dilakukan dengan metode pengukuran lama maupun metode baru. Pandemi COVID-19 yang terjadi sejak tahun 2020 hingga sekarang sedikit banyak telah membawa pengaruh terhadap pembangunan manusia di dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini terlihat dari perlambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021 jika dibandingkan tahun sebelumnya. Setelah sempat tertekan pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, IPM Indonesia tahun 2021 tercatat mulai mengalami perbaikan. Pertumbuhan IPM Indonesia pada tahun 2021 sebesar 0,49%. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan pertumbuhan pada periode tahun sebelumnya yang sebesar 0,03%, tetapi masih lebih rendah jika dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2019 yang sebesar 0,74%. Perbaikan IPM Indonesia pada tahun 2021 terutama didorong oleh peningkatan dimensi standar hidup layak yang diwakili oleh variabel pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

IPM Indonesia pada tahun 2021 tercatat sebesar 72,29, meningkat 0,35 poin jika dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Peningkatan IPM 2021 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Hal ini berbeda dengan peningkatan IPM 2020 yang hanya didukung oleh peningkatan pada dimensi umur panjang dan hidup sehat dan dimensi pengetahuan, sedangkan dimensi standar hidup layak mengalami penurunan. Pada 2021, dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) meningkat 1,30 persen. Pada dimensi pendidikan, penduduk berusia 7 tahun memiliki harapan lama sekolah (dapat menjalani pendidikan formal) selama 13,08 tahun, atau hampir setara dengan lamanya waktu untuk menamatkan pendidikan hingga setingkat Diploma I. Angka ini meningkat 0,10 tahun dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 12,98 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,06 tahun, dari 8,48 tahun menjadi 8,54 tahun pada tahun 2021. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada tahun 2021 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 71,57 tahun, lebih lama 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.

GAMBAR 1.14
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA
TAHUN 2004 – 2021

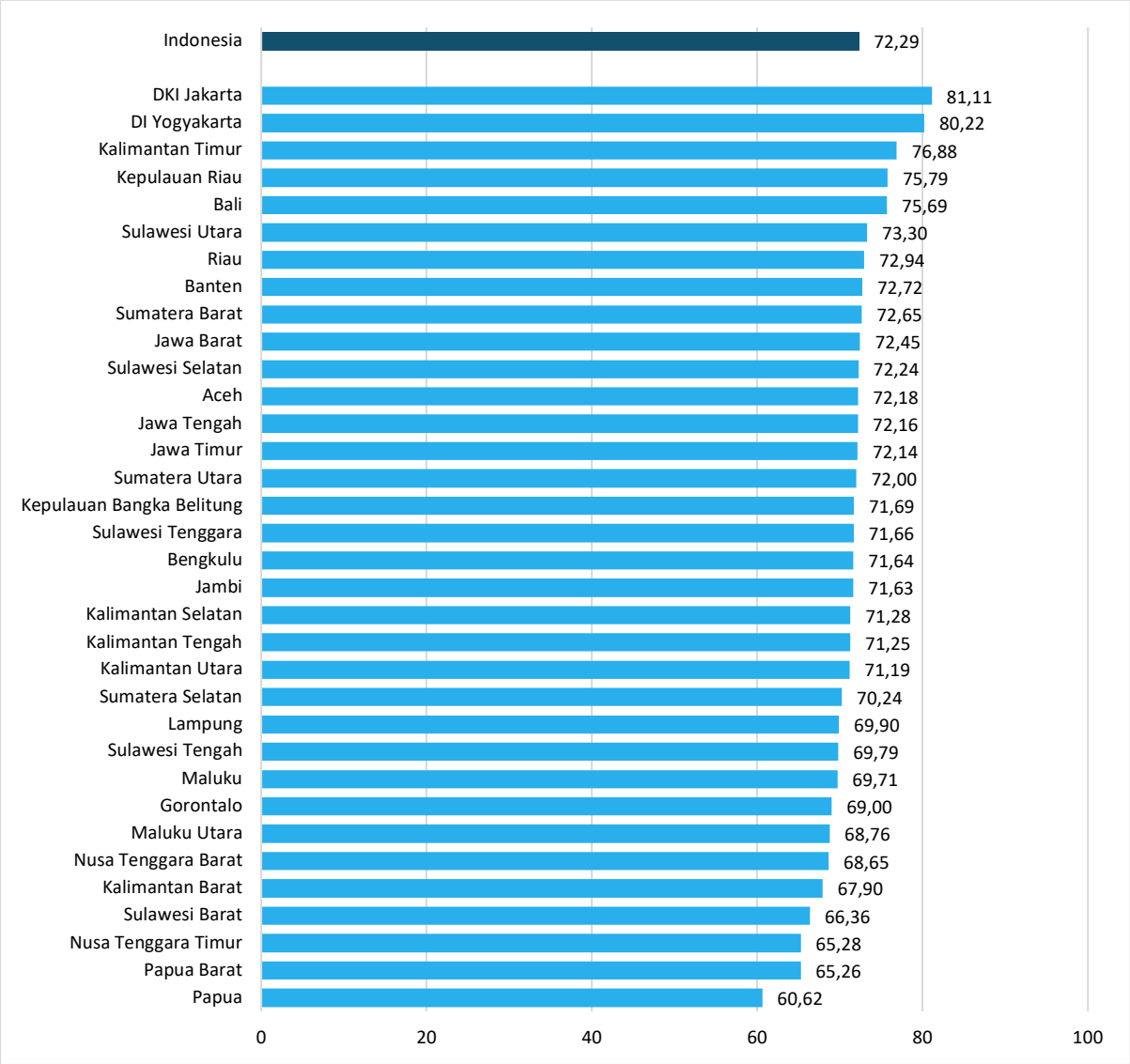


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Penilaian IPM terbagi menjadi 4 (empat) kategori, yaitu: (1) sangat tinggi (IPM≥80); (2) tinggi (70≤IPM<80); (3) sedang (60≤IPM<70); dan rendah (IPM<60). Pada tahun 2021, Provinsi DKI Jakarta (81,11) dan Provinsi DI Yogyakarta (80,22) memiliki nilai IPM kategori sangat tinggi. Terdapat 21 provinsi dengan kategori IPM tinggi dan 11 provinsi masuk dalam kaegori IPM sedang.

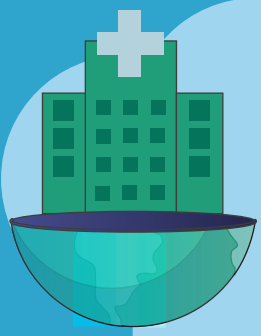
Provinsi dengan peringkat IPM tertinggi adalah DKI Jakarta. Sejak pertama kali dihitung hingga tahun 2021, capaian IPM Provinsi DKI Jakarta selalu paling tinggi diantara provinsi lainnya. Ketersediaan sarana kesehatan, pendidikan dan perekonomian, serta kemudahan akses terhadap semua sarana tersebut membuat Provinsi DKI Jakarta lebih unggul dibandingkan wilayah lainnya di Indonesia. Kondisi ini menjadi salah satu faktor pendorong tingginya capaian pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta setiap tahun.

GAMBAR 1.15
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

***



Bab II.

FASYANKES DAN UKBM



BAB II. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN UKBM

Derajat kesehatan masyarakat suatu negara salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Bab ini akan membahas tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terdiri dari FKTP/Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Puskesmas, klinik pratama, praktik mandiri tenaga kesehatan), Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, FKTRL/Fasilitas Kesehatan Tingkat Rujukan Lanjut (rumah sakit umum dan rumah sakit khusus), dan Fasilitas Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

Pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 Tahun 2019 adalah proses untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan, potensi dan sosial budaya setempat.

Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat

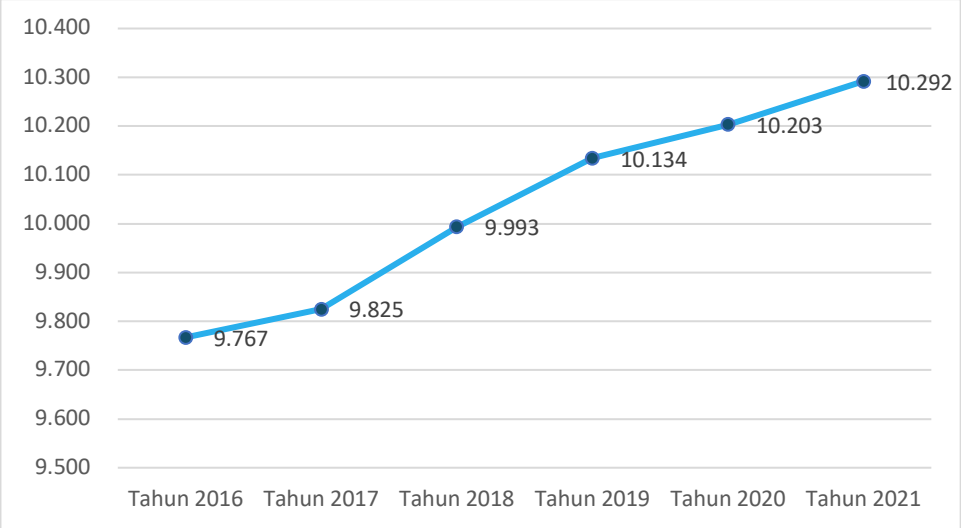
(UKBM) sebagai wahana pemberdayaan masyarakat yang dibentuk atas dasar kebutuhan masyarakat yang dikelola oleh, dari, untuk dan bersama masyarakat, dengan bimbingan dari petugas puskesmas, lintas sektor dan lembaga terkait lainnya untuk melaksanakan kegiatan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan mandiri dalam bidang Kesehatan (UU Nomor 36 Tahun 2009). Peraturan tersebut memposisikan masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan melainkan yang lebih penting sebagai subyek pembangunan Kesehatan yang dapat mengambil keputusan dalam mengadopsi inovasi di bidang Kesehatan. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat dilakukan dengan tahap: a. pengenalan kondisi desa/kelurahan; b. survei mawas diri; c. musyawarah di desa/kelurahan; d. perencanaan partisipatif; e. pelaksanaan kegiatan; dan f. pembinaan kelestarian. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat didampingi oleh Tenaga Pendamping yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, swasta, perguruan tinggi, dan/atau anggota masyarakat. Tenaga Pendamping dimaksud harus memiliki kemampuan sebagai Tenaga Pendamping yang didapat melalui pelatihan. Pada bab II ini, UKBM yang akan diulas adalah Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) dan Posbindu PTM (Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular).

A. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas menyebutkan bahwa puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Total jumlah puskesmas di Indonesia sampai dengan Desember 2021 adalah 10.292 puskesmas, yang terdiri dari 4.201 puskesmas rawat inap dan 6.091 puskesmas non rawat inap. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2020 yaitu sebanyak 10.205, dengan jumlah puskesmas rawat inap sebanyak 4.119 puskesmas dan puskesmas non rawat inap sebanyak 6.086 puskesmas. Data mengenai jumlah puskesmas ini dapat dilihat secara lengkap pada Lampiran 4.a dan 4.b.

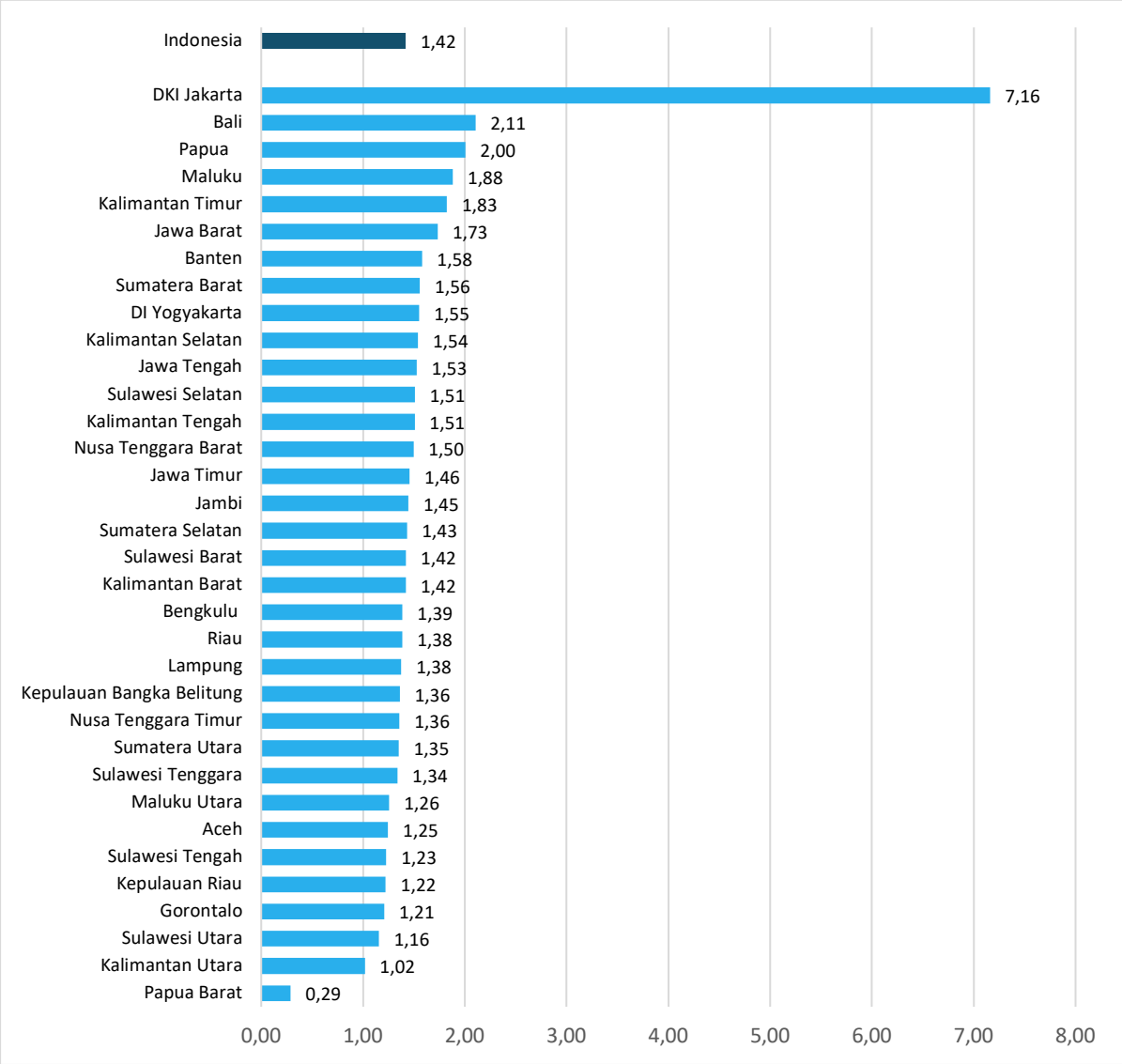
GAMBAR 2.1
JUMLAH PUSKESMAS DI INDONESIA
TAHUN 2016 – 2021



Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2022

Perkembangan jumlah puskesmas sejak tahun 2016, dimana jumlahnya semakin meningkat, dari 9.767 unit menjadi 10.292 puskesmas pada tahun 2021. Peningkatan jumlah puskesmas tersebut menggambarkan upaya pemerintah dalam pemenuhan akses terhadap pelayanan kesehatan primer. Pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan primer dapat dilihat secara umum dari rasio puskesmas terhadap kecamatan. Rasio puskesmas terhadap kecamatan pada tahun 2021 sebesar 1,4. Hal ini menggambarkan bahwa rasio ideal puskesmas terhadap kecamatan yaitu minimal 1 puskesmas di 1 kecamatan, secara nasional sudah terpenuhi, tetapi perlu diperhatikan distribusi dari puskesmas tersebut di seluruh kecamatan.

GAMBAR 2.2
RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN DI INDONESIA
TAHUN 2021



Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2022; Kementerian Dalam Negeri, 2021

Rasio puskesmas per kecamatan tersebut dapat menggambarkan kondisi aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kesehatan primer. Selain ketersediaan minimal 1 puskesmas di setiap kecamatan, aksesibilitas masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya kondisi geografis, luas wilayah, ketersediaan sarana dan prasarana dasar, sosial ekonomi dan kemajuan suatu daerah. Sebagai contoh, provinsi dengan rasio terendah di Provinsi Papua Barat. Hal ini menggambarkan bahwa akses masyarakat di provinsi tersebut terhadap fasilitas pelayanan kesehatan primer masih belum ideal. Rasio di bawah 1 menunjukkan bahwa belum semua kecamatan memiliki puskesmas dan adanya kondisi geografis yang sulit dan rata-rata tingkat sosial ekonomi masyarakat yang rendah di daerah tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan lagi. Data mengenai rasio puskesmas per kecamatan setiap provinsi dapat dilihat pada Lampiran 4.c.

1. Akreditasi Puskemas

Permenkes No. 43 Tahun 2019 menyatakan akreditasi puskesmas yang selanjutnya disebut akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan puskesmas, setelah dilakukan penilaian bahwa puskesmas telah memenuhi standar akreditasi. Dengan akreditasi puskesmas diharapkan dapat membangun sistem tata kelola yang lebih baik secara bertahap dan berkesinambungan melalui perbaikan tata kelola:

1. manajemen secara institusi;
2. manajemen program;
3. manajemen risiko; dan
4. manajemen mutu.

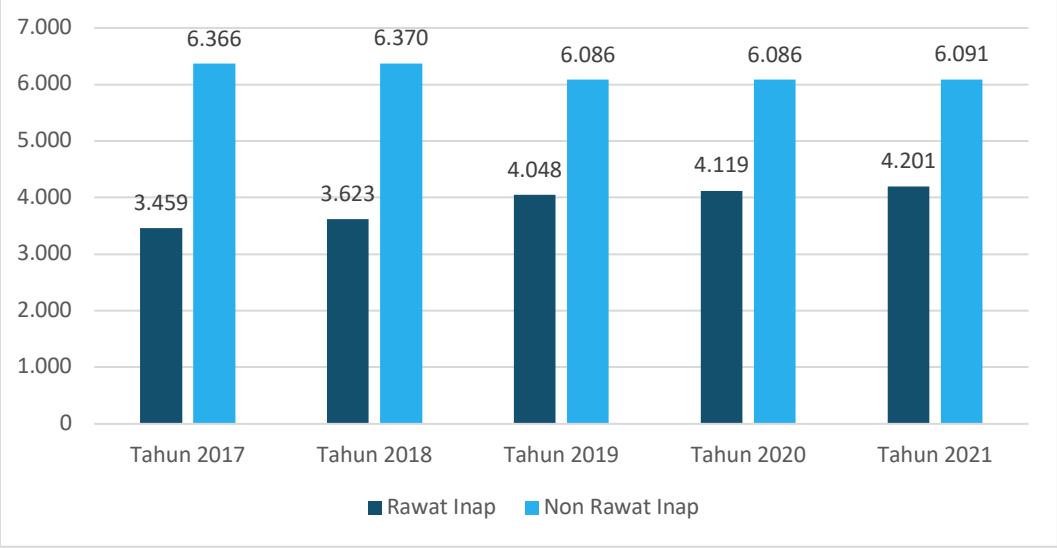
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Pasal 57 menyatakan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan puskesmas wajib dilakukan akreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.

Data Akreditasi Puskesmas tahun 2021 sama dengan 2020, dimana terdapat 9.153 Puskesmas yang telah terakreditasi atau sekitar 89,69% dari 10.205 Puskesmas. Berdasarkan SE No. HK.02.01/MENKES/455/2020 tentang Perizinan Dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), tidak ada pelaksanaan akreditasi puskesmas karena masih dalam kondisi pandemi Covid-19.

2. Perkembangan Puskesmas Rawat Inap dan Non Rawat Inap

Puskesmas berdasarkan kemampuan pelayanan dibagi atas dua kategori yaitu puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap. Berikut disajikan perkembangan jumlah puskesmas rawat inap dan non rawat inap dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

GAMBAR 2.3
JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP DI INDONESIA
TAHUN 2017 – 2021



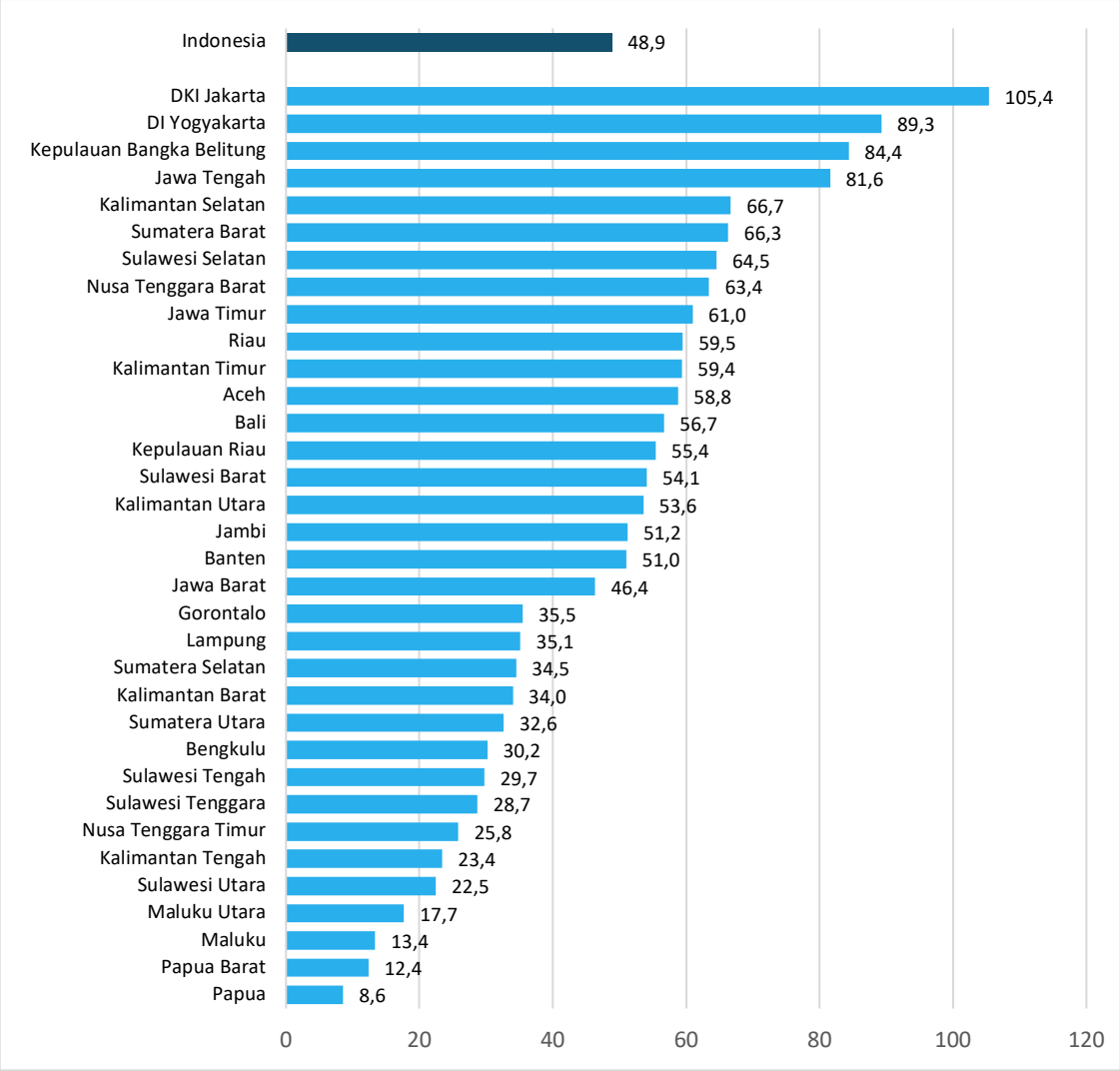
Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2022

Jumlah puskesmas rawat inap selama lima tahun terakhir terus meningkat, yaitu sebanyak 3.459 unit pada tahun 2017, lalu meningkat menjadi 4.201 unit pada tahun 2021 (Gambar 2.4). Puskesmas non rawat inap cenderung mengalami penurunan jumlah puskesmasnya berdasarkan status pada tahun 2017, yaitu 6.366 dan pada tahun 2021 sebanyak 6.091. Gambaran lebih rinci tentang jumlah dan jenis puskesmas menurut provinsi terdapat pada Lampiran 4.b.

3. Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan

Berdasarkan data dari Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK), hanya 48,9% puskesmas yang telah memiliki 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan (nakes) sesuai yaitu: (1) dokter atau dokter layanan pimer; (2) dokter gigi; (3) perawat; (4) bidan; (5) tenaga kesehatan masyarakat; (6) tenaga sanitasi lingkungan; (7) ahli teknologi laboratorium medik; (8) tenaga gizi; dan (9) tenaga kefarmasian. Puskesmas dikatakan cukup atau memenuhi jika setidaknya ada 1 (satu) orang dari masing-masing jenis nakes tersebut.

GAMBAR 2.4
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN 9 (SEMBILAN) SESUAI STANDAR JENIS TENAGA KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



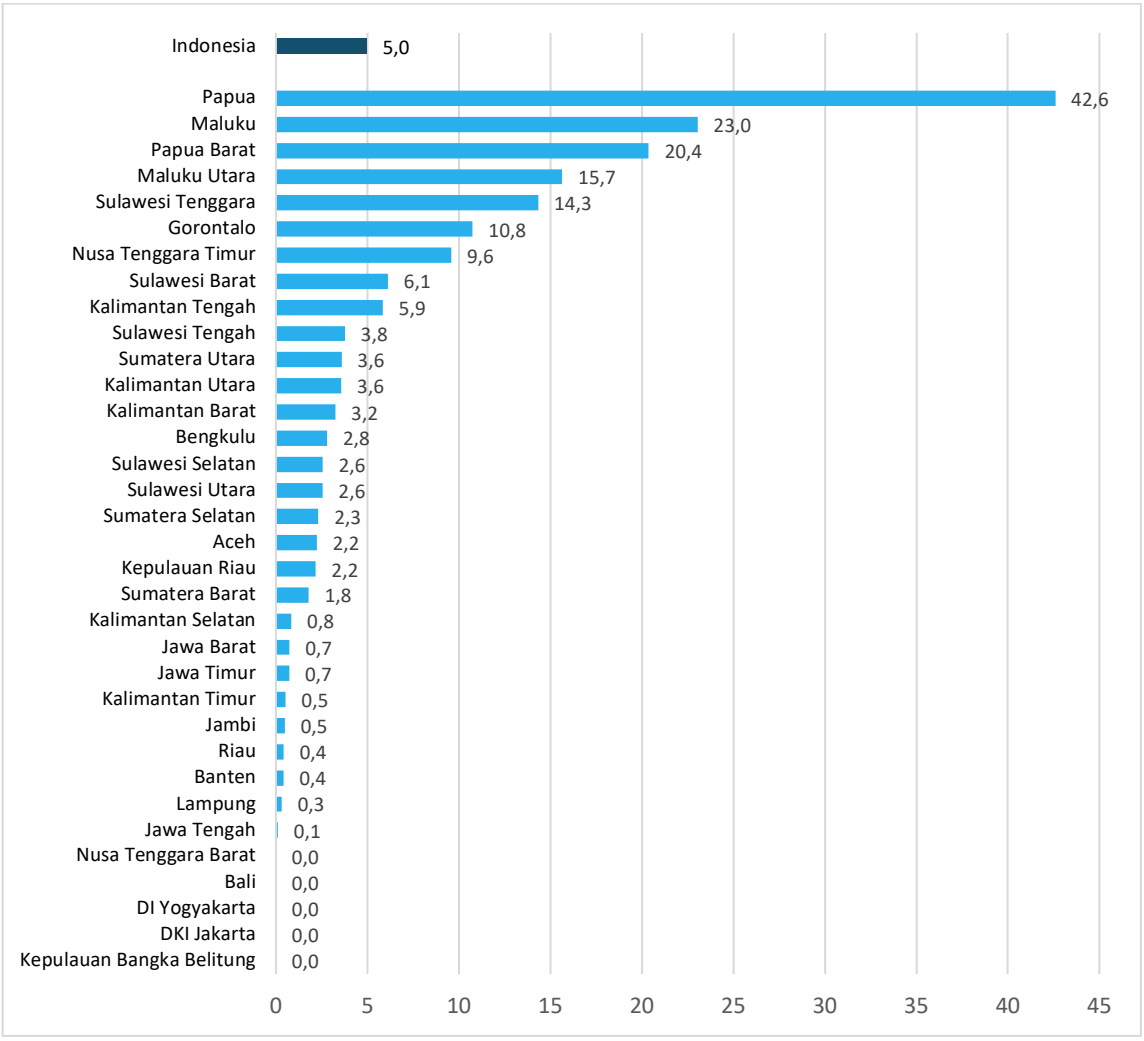
Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Berdasarkan gambar 2.4, persentase provinsi dengan puskesmas yang memenuhi 9 (sembilan) jenis nakes paling tinggi berdasarkan gambar 2.4 adalah provinsi DKI Jakarta (105,4%), diikuti oleh provinsi DI Yogyakarta (89,3%) dan provinsi Kepulauan Bangka Belitung (84,4%). Sedangkan persentase provinsi dengan puskesmas yang memenuhi 9 (sembilan) jenis nakes paling rendah adalah provinsi Papua (8,6%), diikuti oleh provinsi Papua Barat (12,4%), dan provinsi Maluku (13,4%). Rincian lengkap mengenai persentase puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan (nakes) dapat dilihat di Lampiran 4.e.

Derajat kesehatan masyarakat mulai membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kematian ibu dan bayi masih tinggi. Kapasitas tenaga kesehatan, sistem rujukan maternal, dan tata laksana pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta pelayanan kesehatan reproduksi belum berjalan optimal. Distribusi tenaga kesehatan khususnya dokter belum ada di semua puskesmas.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK), di tahun 2021 masih terdapat 5,0% puskesmas tanpa dokter. Kementerian Kesehatan mengadakan program Nusantara Sehat (tim dan individu) sejak tahun 2015 dalam rangka pemerataan distribusi tenaga kesehatan.

GAMBAR 2.5
PERSENTASE PUSKESMAS TANPA DOKTER
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Provinsi dengan persentase puskesmas tanpa dokter tertinggi berdasarkan gambar 2.5 adalah provinsi Papua (42,6%), diikuti oleh provinsi Maluku (23,0%) dan provinsi Papua Barat (20,4%). Sedangkan provinsi dimana seluruh puskesmas di wilayahnya memiliki dokter adalah Provinsi Bali, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, dan Kepulauan Bangka Belitung. Rincian lengkap mengenai persentase puskesmas tanpa dokter dapat dilihat di Lampiran 4.f.

4. Pelaksanaan Kesehatan Kerja, Pengukuran dan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani

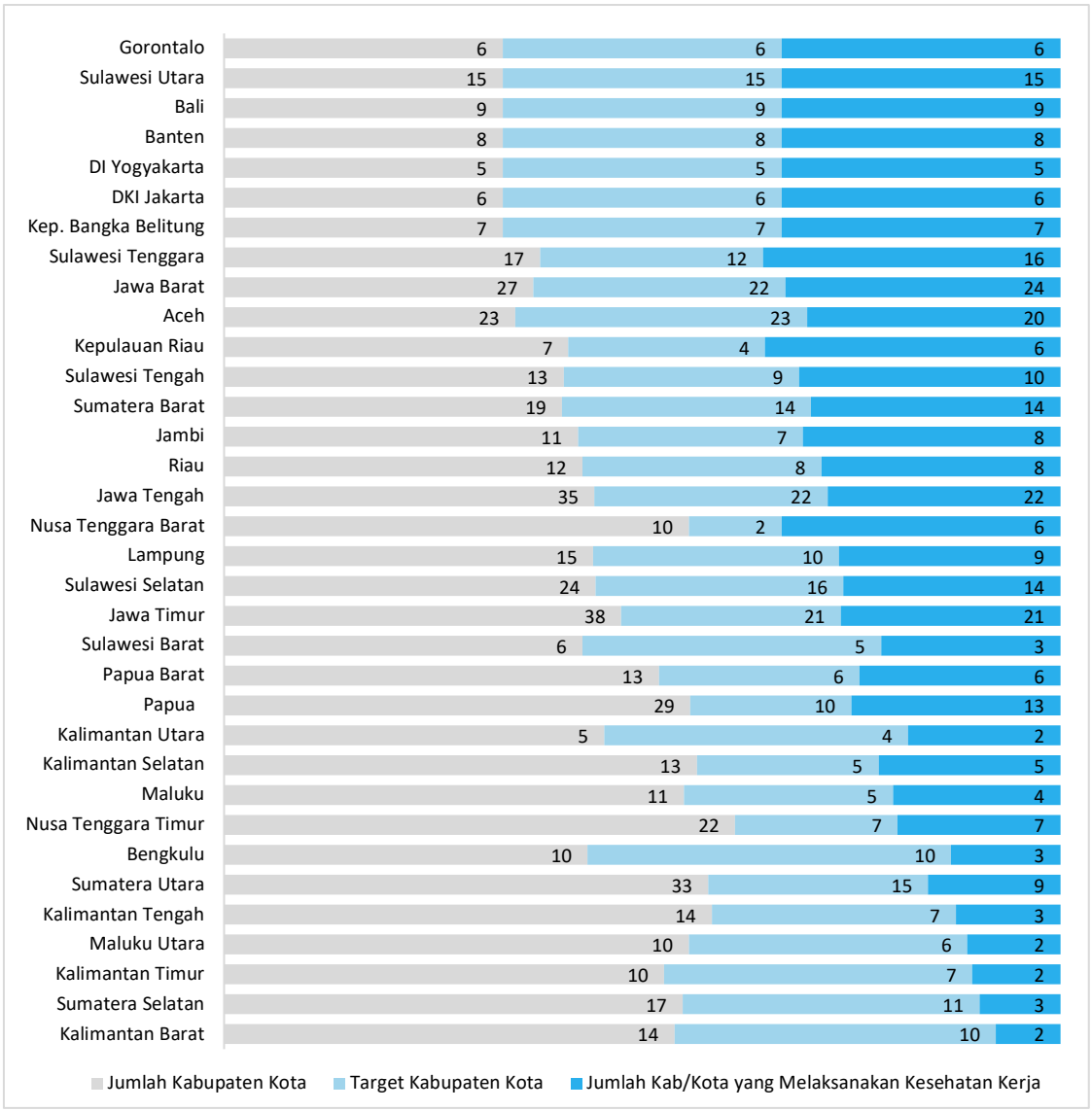
Upaya kesehatan kerja ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan oleh pekerjaan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 164-166 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Upaya kesehatan kerja meliputi pekerja sektor formal (usaha besar dan menengah) maupun sektor informal (usaha mandiri/individu, rumah tangga, mikro dan kecil).

Selain itu, pemerintah memberikan dorongan dan bantuan untuk perlindungan pekerja melalui pengelola tempat kerja melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan bagi pekerja. Sedangkan pada pasal 80-81, upaya kesehatan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani masyarakat, yang menjadi dasar dalam peningkatan prestasi belajar, kerja dan olahraga.

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 dalam pasal 3 mengamanatkan penyelenggaraan Kesehatan Kerja ditujukan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja, dan dipenuhi oleh pengurus atau pengelola tempat kerja dan pemberi kerja di semua tempat kerja. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Kesehatan Kerja secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan kerja dilaksanakan sesuai dengan standar kesehatan kerja.

Pada tahun 2021, indikator Rencana Strategis Kementerian Kesehatan terkait Kesehatan Kerja dan Olahraga adalah jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja dan jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga.

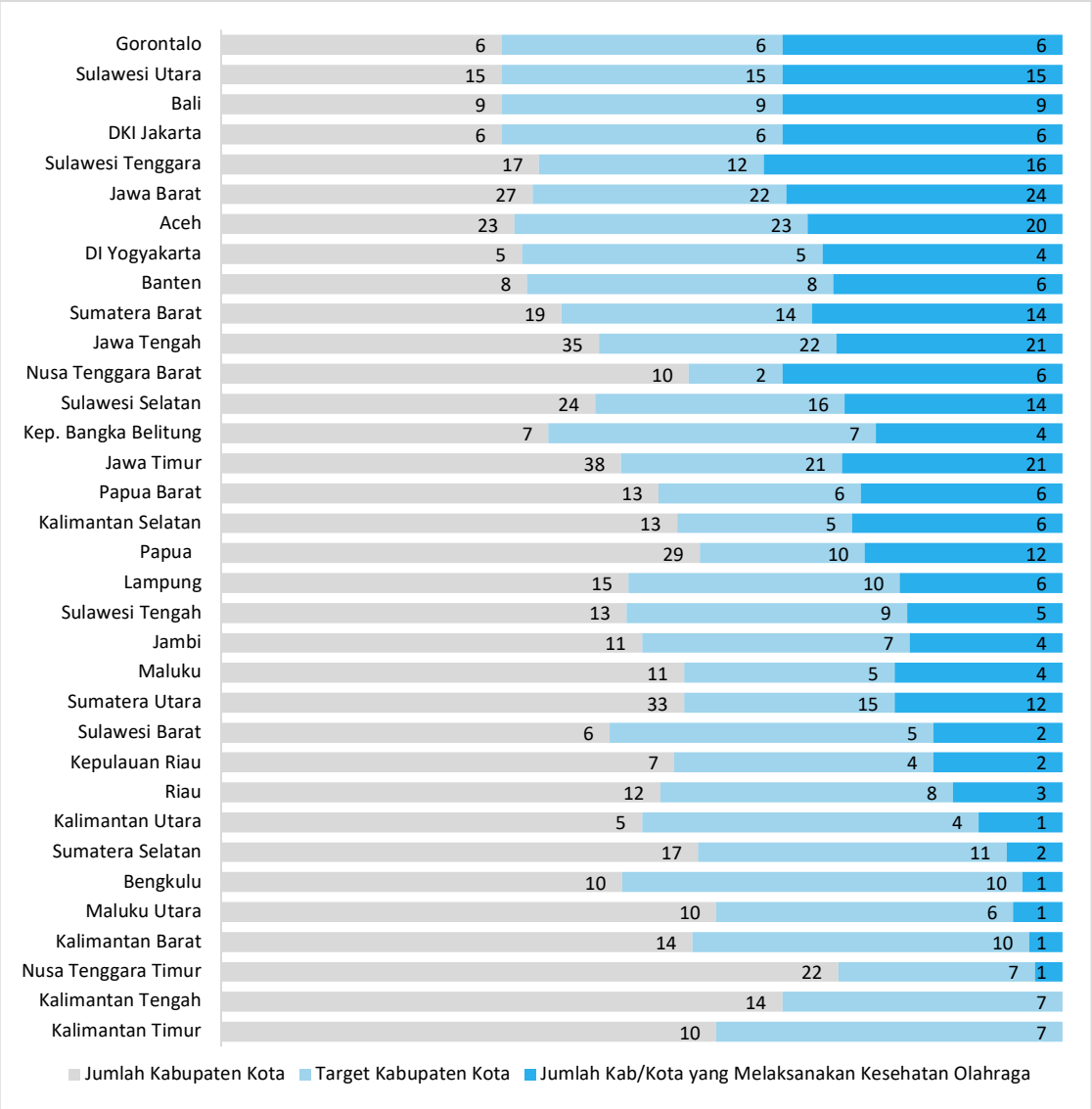
GAMBAR 2.6
JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN KERJA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kemenkes RI, 2022

Berdasarkan gambar 2.6, terdapat 21 provinsi telah mencapai atau melebihi target jumlah kabupaten/kota melaksanakan kesehatan kerja yang ditetapkan yaitu sebesar 65% dari jumlah seluruh kabupaten/kota. Provinsi dengan Kabupaten/Kota yang mencapai target antara lain: Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Papua Barat. Provinsi yang masih jauh di bawah target dengan jumlah capaian terendah, yaitu Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara sebanyak dua kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan kerja. Terdapat 7 provinsi dengan seluruh kabupaten/kota telah melaksanakan kesehatan kerja, yaitu Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Bali, Banten, DI Yogyakarta DKI Jakarta dan Kepulauan Bangka Belitung.

GAMBAR 2.7
JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN OLAHRAGA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia Kementerian Kesehatan RI, 2022

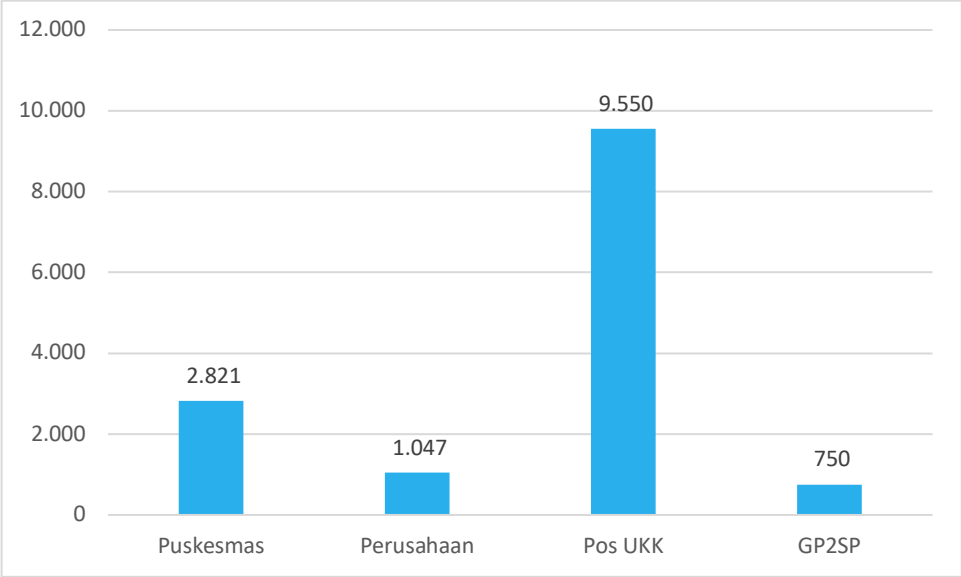
Berdasarkan gambar 2.7, terdapat 12 provinsi telah mencapai target 65% dari jumlah seluruh kabupaten/kota, yaitu Provinsi Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Papua Barat, dan Papua. Sedangkan provinsi yang belum memenuhi kriteria kabupaten/kota yang melaksanakan kesehatan olahraga (minimal 30% puskesmas melaksanakan kesehatan olahraga) yaitu Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku Utara. Terdapat 2 (dua) provinsi yang capaian masih 0% yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Data selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 8.h.

Puskesmas menyelenggarakan kesehatan kerja dan/atau memberikan pelayanan kesehatan bagi pekerja di wilayah kerjanya, diantaranya melalui Pos Upaya Kesehatan Kerja

(Pos UKK). Selain itu upaya kesehatan kerja juga dilakukan melalui pembentukan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif (GP2SP), upaya kesehatan kerja juga diimplementasikan di perusahaan, GP2SP merupakan upaya dari pemerintah, masyarakat, maupun pemberi kerja dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggalang dan berperan serta guna meningkatkan kepedulian dan mewujudkan upaya memperbaiki kesehatan pekerja/buruh perempuan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kualitas generasi penerus dalam implementasinya.

Pada tahun 2021, di Indonesia terdapat 2.821 puskesmas, 1.047 perusahaan, 9.550 Pos Upaya Kesehatan Kerja (Pos UKK), dan 750 GP2SP yang menyelenggarakan kesehatan kerja dan/atau memberikan pelayanan kesehatan kerja di tempat kerja.

GAMBAR 2.8
JUMLAH PELAKSANAAN KESEHATAN KERJA DI TEMPAT KERJA DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kemenkes RI, 2022

Standar Kesehatan Kerja dalam upaya peningkatan kesehatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 meliputi:

a) peningkatan pengetahuan kesehatan;
b) pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat;
c) pembudayaan keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat kerja
d) penerapan gizi kerja; dan
e) peningkatan kesehatan fisik dan mental.

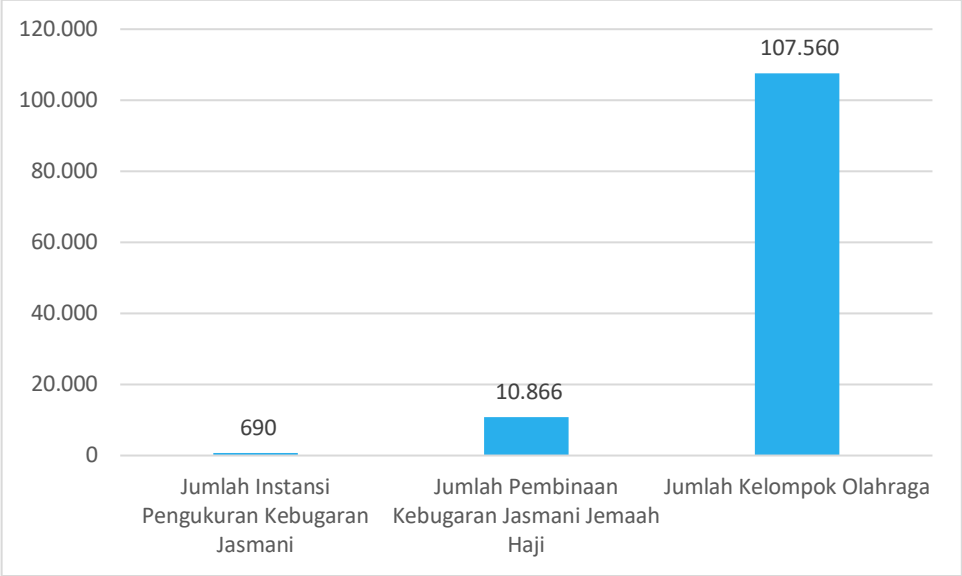
Peningkatan kesehatan fisik adalah peningkatan kemampuan tubuh seseorang untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti dengan melakukan aktivitas fisik yang baik, benar, terukur, dan teratur, guna mencapai kebugaran jasmani.

Dari gambar 2.9, pada tahun 2021 di Indonesia, jumlah instansi pemerintah yang melaksanakan pengukuran kebugaran jasmani sebanyak 690 instansi, jumlah pembinaan pemeriksaan kebugaran jasmani bagi jemaah haji sebanyak 10.866 jemaah, dan jumlah

kelompok olah raga sebanyak 107.560 kelompok. Gambaran lebih rinci tentang pelaksanaan kesehatan kerja, pengukuran dan pemeriksaan kebugaran menurut provinsi terdapat pada Lampiran 8.i.

Jumlah pelaksanaan pengukuran kebugaran pada tahun 2021 berbeda cukup signifikan dibandingkan dengan jumlah pelaksanaan pada tahun 2020, yaitu menurunnya jumlah instansi pengukuran kebugaran jasmani dan pembinaan kebugaran jasmani jemaah haji, serta meningkatnya jumlah kelompok olahraga. Hal tersebut dipengaruhi oleh adaptasi kegiatan kebugaran jasmani menjadi kegiatan mandiri oleh kelompok pekerja (instansi pemerintah), serta dipengaruhi ketidakpastian waktu keberangkatan Calon Jemaah Haji. Sedangkan peningkatan jumlah pembinaan kelompok olahraga disebabkan oleh penandatanganan kerja sama dengan 6 induk olahraga masyarakat di awal tahun 2020.

GAMBAR 2.9
JUMLAH PELAKSANAAN KESEHATAN OLAHRAGA DI INDONESIA
TAHUN 2021



Sumber: Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kemenkes RI, 2022

5. Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Pelayanan kesehatan tradisional berperan dalam siklus kehidupan atau *continuum of care* sejak dalam masa kandungan sampai usia lanjut, diberikan baik dengan metode keterampilan maupun ramuan. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional menyatakan bahwa jenis pelayanan kesehatan tradisional dibagi menjadi pelayanan kesehatan tradisional empiris, pelayanan kesehatan tradisional komplementer, dan pelayanan kesehatan tradisional integrasi, dan pelayanan kesehatan

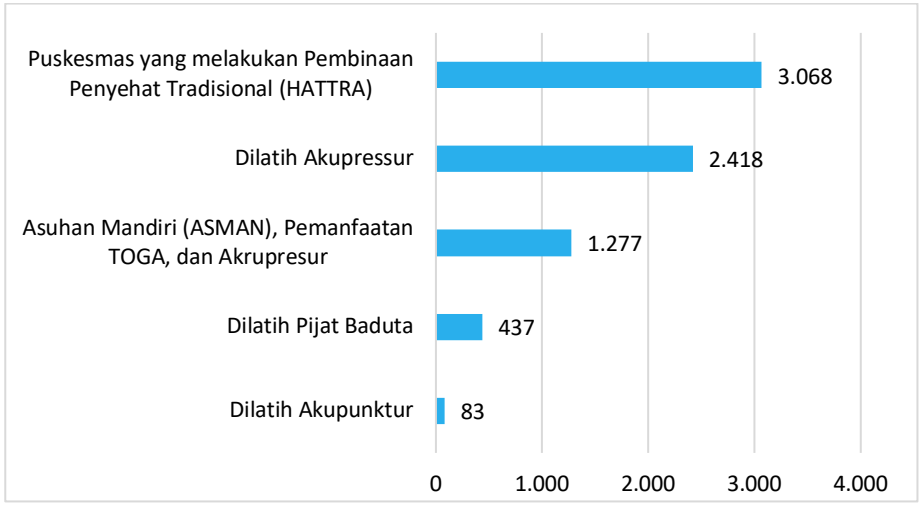
tradisional yang dimaksud harus dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 tahun 2018 tentang Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer serta peraturan lain yang mendukung.

Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai potensi yang cukup besar dan perlu mendapat perhatian yang serius sebagai bagian dari pembangunan kesehatan nasional. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 telah menetapkan indikator pencapaian target pembinaan pelayanan kesehatan tradisional, yaitu jumlah puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional, jumlah rumah sakit pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan tradisional integrasi, dan jumlah griya sehat di kabupaten/kota.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dapat diselenggarakan di puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (griya sehat). Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024, puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional adalah puskesmas yang melakukan pelayanan kesehatan tradisional, pembinaan kelompok asuhan mandiri, pendataan dan pembinaan penyehat tradisional, dan memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam bentuk Tanaman Obat Keluarga (TOGA). Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional pada tahun 2021 sebanyak 262 puskesmas dari 10.134 puskesmas (2,6%) yang berada di 14 provinsi, yaitu Provinsi Jambi, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Rumah Sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional integrasi pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 merupakan rumah sakit yang telah memiliki Surat Keputusan (SK) Direktur Rumah Sakit tentang Penetapan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi. Jumlah rumah sakit pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional integrasi pada tahun 2021 sebanyak 16 rumah sakit dari 1.071 rumah sakit pemerintah (1,5%) yang berada di 9 provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua.

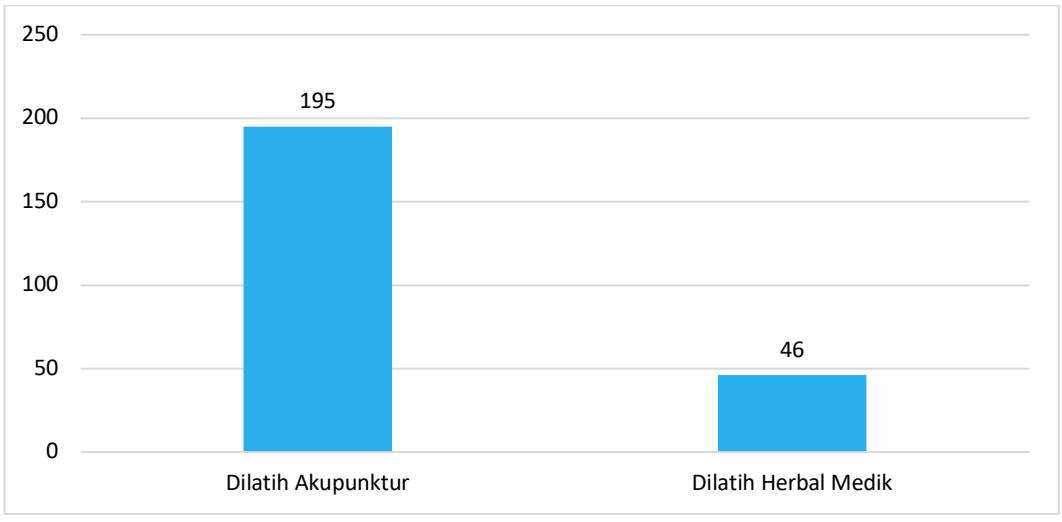
GAMBAR 2.10
PUSKESMAS YANG MENYELENGGARAKAN HATTRA, ASMAN, DAN PELATIHAN NAKES DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Data tahun 2021, puskesmas yang telah melakukan pembinaan penyehat tradisional (HATTRA) sebanyak 3.068 puskesmas. Seperti tahun sebelumnya pada tahun 2020, Provinsi Sulawesi Barat belum terdapat puskesmas yang melakukan pembinaan penyehatan tradisional (HATTRA). Sedangkan puskesmas yang melakukan pembinaan Asuhan Mandiri Kesehatan Tradisional sebanyak 1.277 puskesmas. Untuk pelatihan di bidang Kesehatan Tradisional, sebanyak 2.418 puskesmas memiliki tenaga yang sudah dilatih akupressur, 437 Puskesmas memiliki tenaga dilatih pijat baduta, dan 83 puskesmas memiliki tenaga yang dilatih akupunktur. Secara rinci, data mengenai puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran 4.g.

GAMBAR 2.11
JUMLAH RUMAH SAKIT PEMERINTAH DENGAN TENAGA KESEHATAN YANG SUDAH DILATIH DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Data tahun 2021, rumah sakit pemerintah dengan tenaga kesehatan yang sudah dilatih akupunktur sebanyak 195 rumah sakit. Sedangkan rumah sakit pemerintah dengan tenaga kesehatan yang sudah dilatih herbal medik sebanyak 46 rumah sakit. Secara rinci, data mengenai rumah sakit yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional integrasi tahun 2021 dapat dilihat pada lampiran 8.g.

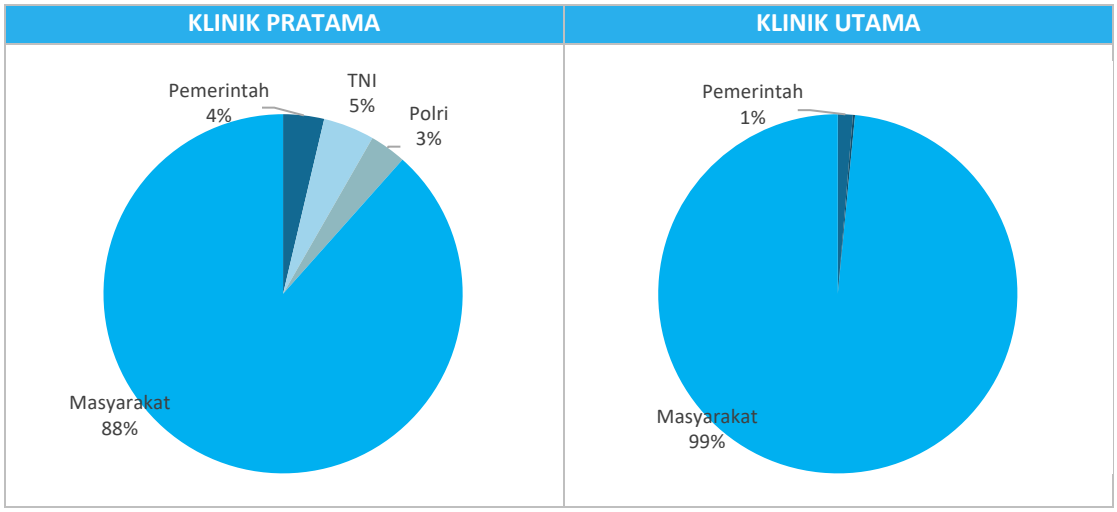
B. KLINIK, PRAKTIK PERSEORANGAN, UNIT TRANSFUSI DARAH, DAN LABORATORIUM

1. Klinik

Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialistik secara komprehensif, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Pada tahun 2021, Kementerian Kesehatan telah melakukan registrasi fasyankes melalui aplikasi berbasis website pada alamat registrasifasyankes.kemkes.go.id. Berdasarkan data pada aplikasi tersebut, terdapat 7.614 klinik teregistrasi di Indonesia yang dimiliki oleh Pemerintah (Kementerian/Lembaga dan daerah), TNI, Polri, dan masyarakat.

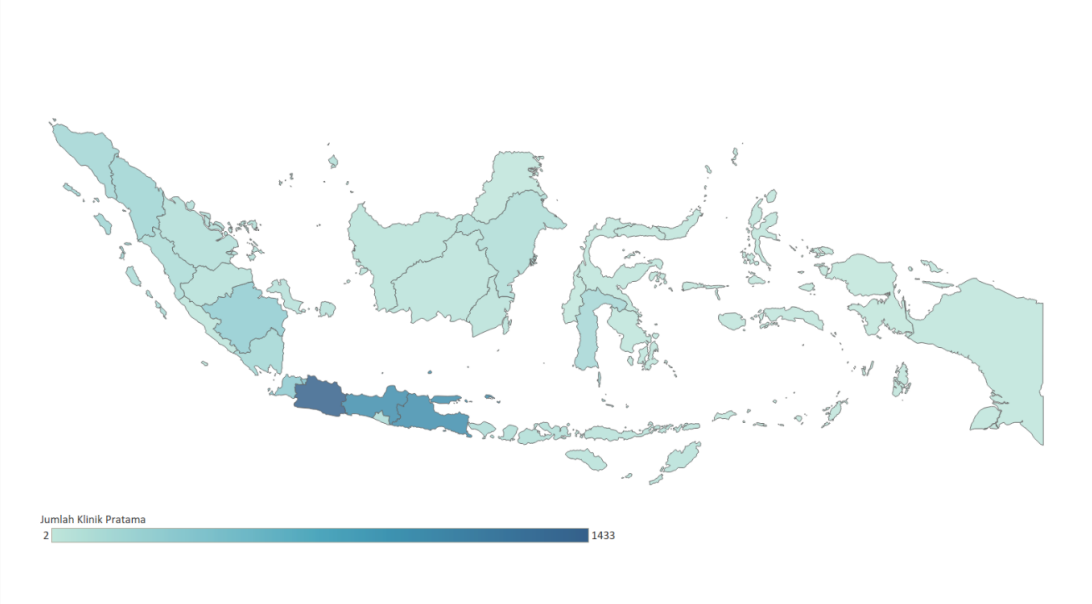
Berdasarkan kemampuan pelayanan klinik, terdapat 6.572 klinik pratama dan 1.042 klinik utama. Provinsi dengan jumlah klinik paling banyak adalah Provinsi Jawa Barat, yaitu 1.623 klinik yang terdiri atas 1.433 klinik pratama dan 190 klinik utama. Sedangkan provinsi dengan jumlah klinik paling sedikit adalah Provinsi Papua Barat, yaitu 2 klinik pratama dan 2 klinik utama. Data mengenai klinik secara lengkap dapat dilihat pada gambar 2.12 dan lampiran 4.h.

GAMBAR 2.12
PROPORSI KLINIK TEREGISTRASI MENURUT KEPEMILIKAN
DI INDONESIA TAHUN 2021



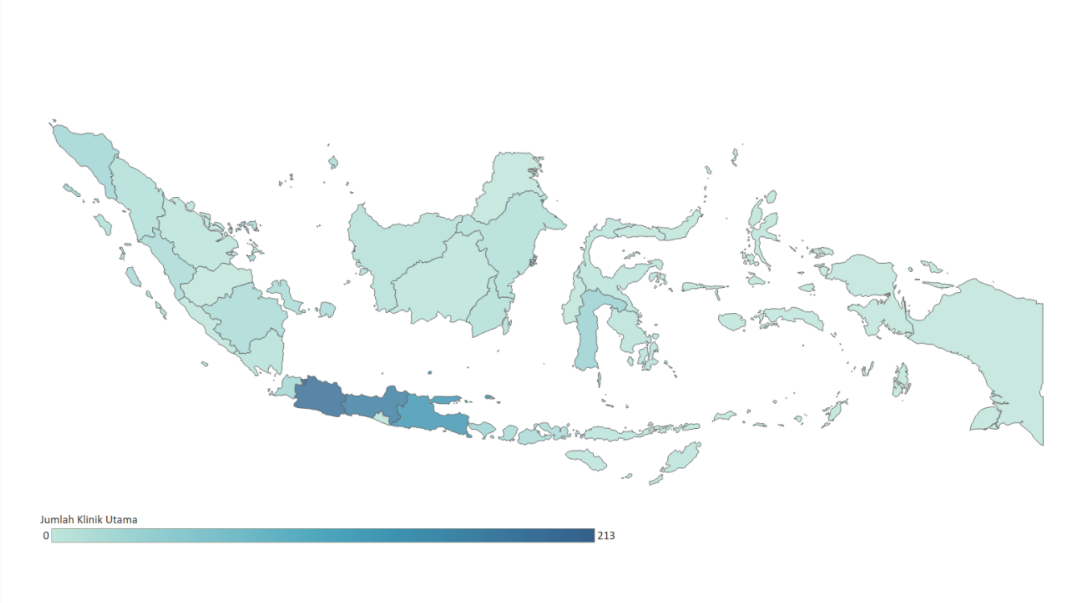
Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

GAMBAR 2.13
JUMLAH KLINIK PRATAMA TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

GAMBAR 2.14
JUMLAH KLINIK UTAMA TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2021



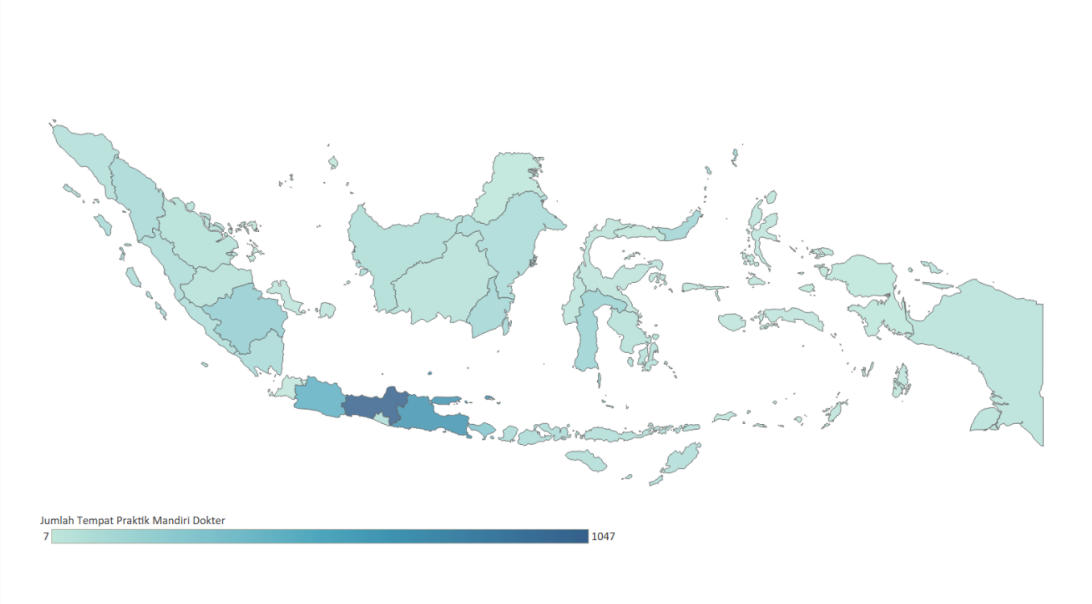
Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

2. Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi

Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan. Dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia dan SIP (Surat Izin Praktik) yang diberikan dinas kesehatan kabupaten/kota kepada dokter dan dokter gigi yang memenuhi persyaratan.

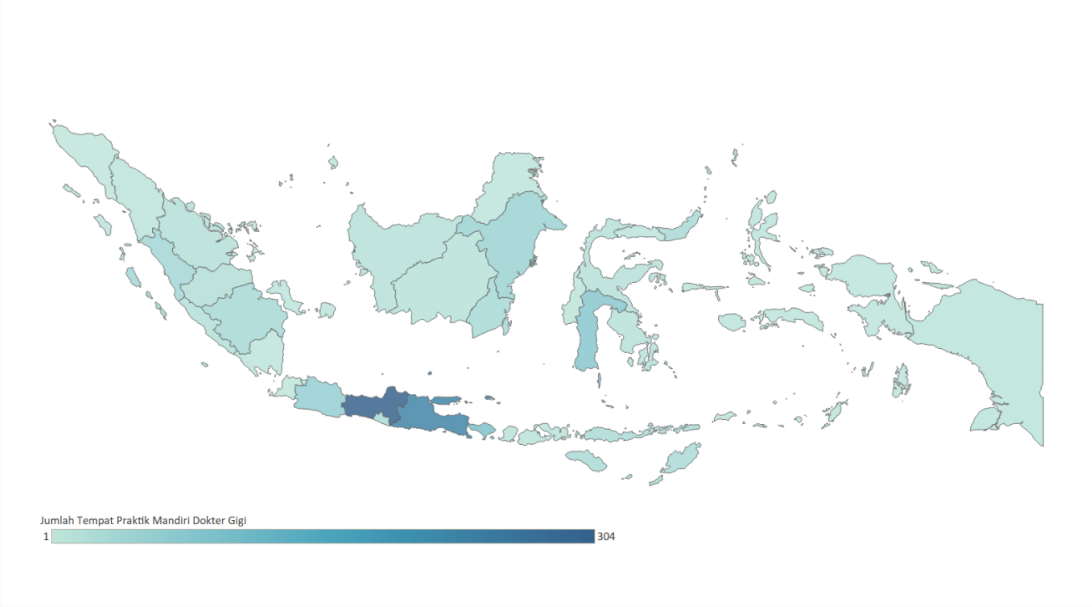
Pada tahun 2021, terdapat 4.851 tempat praktik mandiri dokter dan 1.190 tempat praktik mandiri dokter gigi yang bekerja sama dengan BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan. Provinsi yang memiliki jumlah tempat praktik mandiri dokter dan tempat praktik mandiri dokter gigi yang bekerja sama dengan BPJS paling banyak adalah Provinsi Jawa Tengah, dengan 1.047 tempat praktik mandiri dokter dan 304 tempat praktik mandiri dokter gigi. Sedangkan yang paling sedikit adalah Provinsi Banten, dengan 7 tempat praktik mandiri dokter dan 1 tempat praktik mandiri dokter gigi. Data mengenai tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi ini dapat dilihat pada lampiran 4.i.

GAMBAR 2.15
JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2022 (Data BPJS Kesehatan)

GAMBAR 2.16
JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021



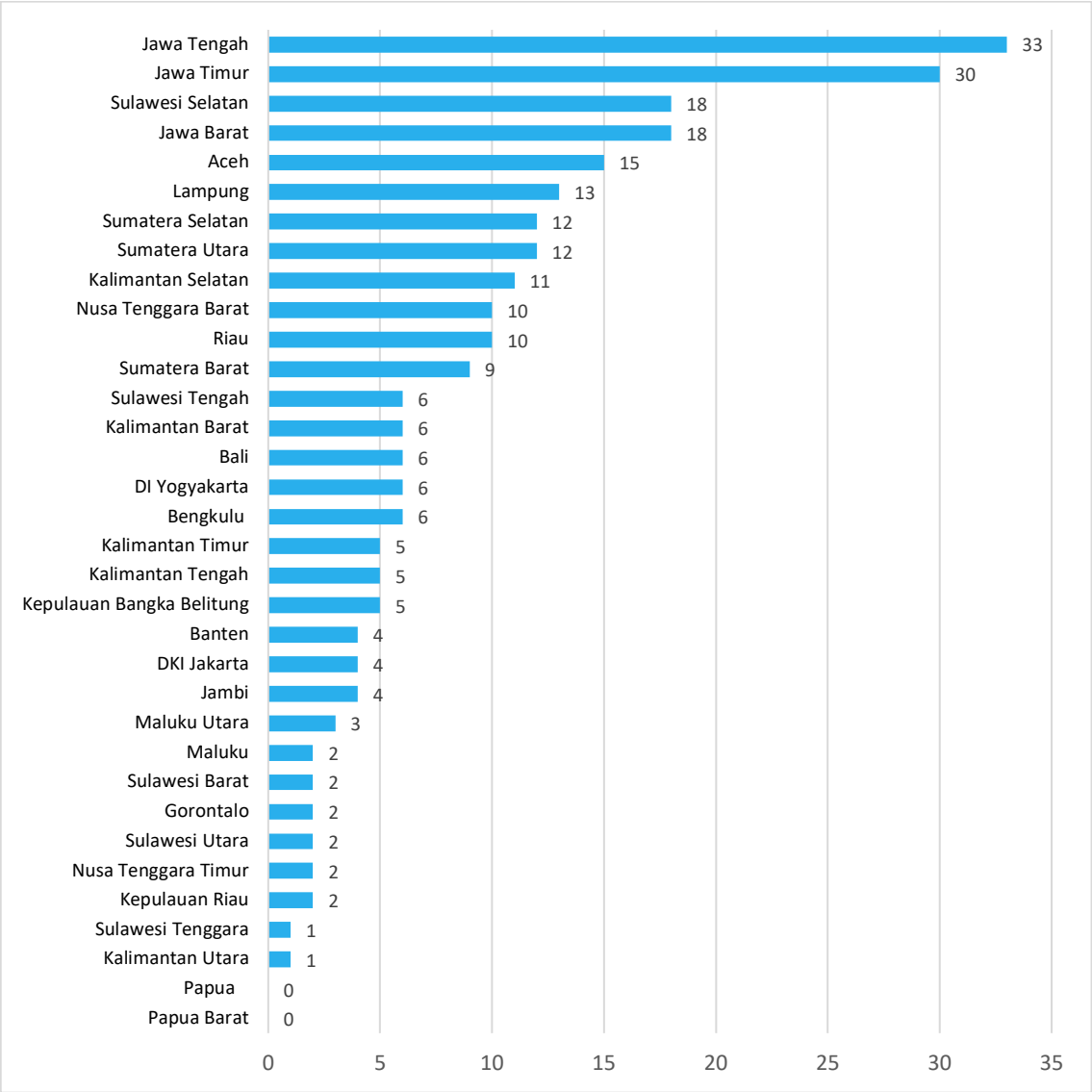
Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2022 (Data BPJS Kesehatan)

3. Unit Transfusi Darah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, Unit Transfusi Darah (UTD) adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. Berdasarkan data dari aplikasi registrasi fasyankes, terdapat 265 UTD teregistrasi di Indonesia yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan Palang Merah Indonesia (PMI).

Pada tahun 2021, provinsi dengan total jumlah UTD teregistrasi paling banyak yaitu Provinsi Jawa Tengah (33 UTD), sementara itu Provinsi Papua Barat dan Papua tidak memiliki UTD teregistrasi. Provinsi yang paling banyak memiliki UTD teregistrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah adalah Provinsi Sulawesi Selatan (15 UTD), sedangkan provinsi yang paling banyak memiliki UTD teregistrasi yang diselenggarakan oleh PMI adalah Provinsi Jawa Tengah (33 UTD). Tiga provinsi tidak memiliki UTD teregistrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah, yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Papua Barat, dan Papua. Lima provinsi tidak memiliki UTD teregistrasi yang diselenggarakan oleh PMI, yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Data selengkapnya mengenai UTD teregistrasi dapat dilihat pada Gambar 2.17 dan lampiran 4.k.

GAMBAR 2.17
JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

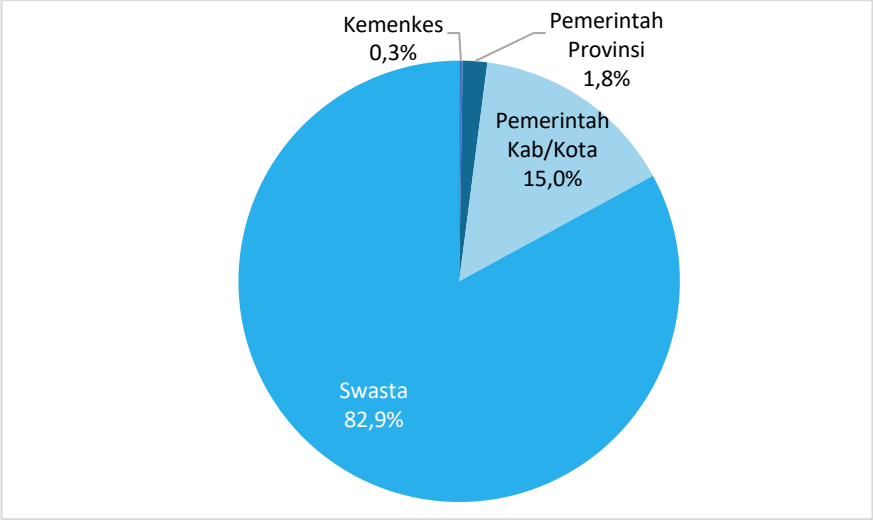
C. LABORATORIUM KESEHATAN

Laboratorium kesehatan merupakan salah satu sarana penunjang dalam pelaksanaan upaya pelayanan kesehatan. Laboratorium kesehatan diperlukan untuk memeriksa, menganalisa, menguraikan, dan mengidentifikasi bahan dalam penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, dan kondisi kesehatan tertentu.

Jumlah laboratorium kesehatan terbanyak dimiliki oleh swasta, yaitu sebanyak 1.297 laboratorium yang sudah terakreditasi 177. Kepemilikan laboratorium kesehatan terbanyak ke dua yaitu laboratorium pemerintah kabupaten/kota, yakni sebanyak 235 laboratorium, sudah terakreditasi sebanyak 137. Kepemilikan laboratorium kesehatan terbanyak ke tiga yaitu laboratorium

milik pemerintah provinsi, yakni sebanyak 28 laboratorium. Laboratorium kesehatan yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan menjadi pengampu dari laboratorium kesehatan yang tersebar di Indonesia.

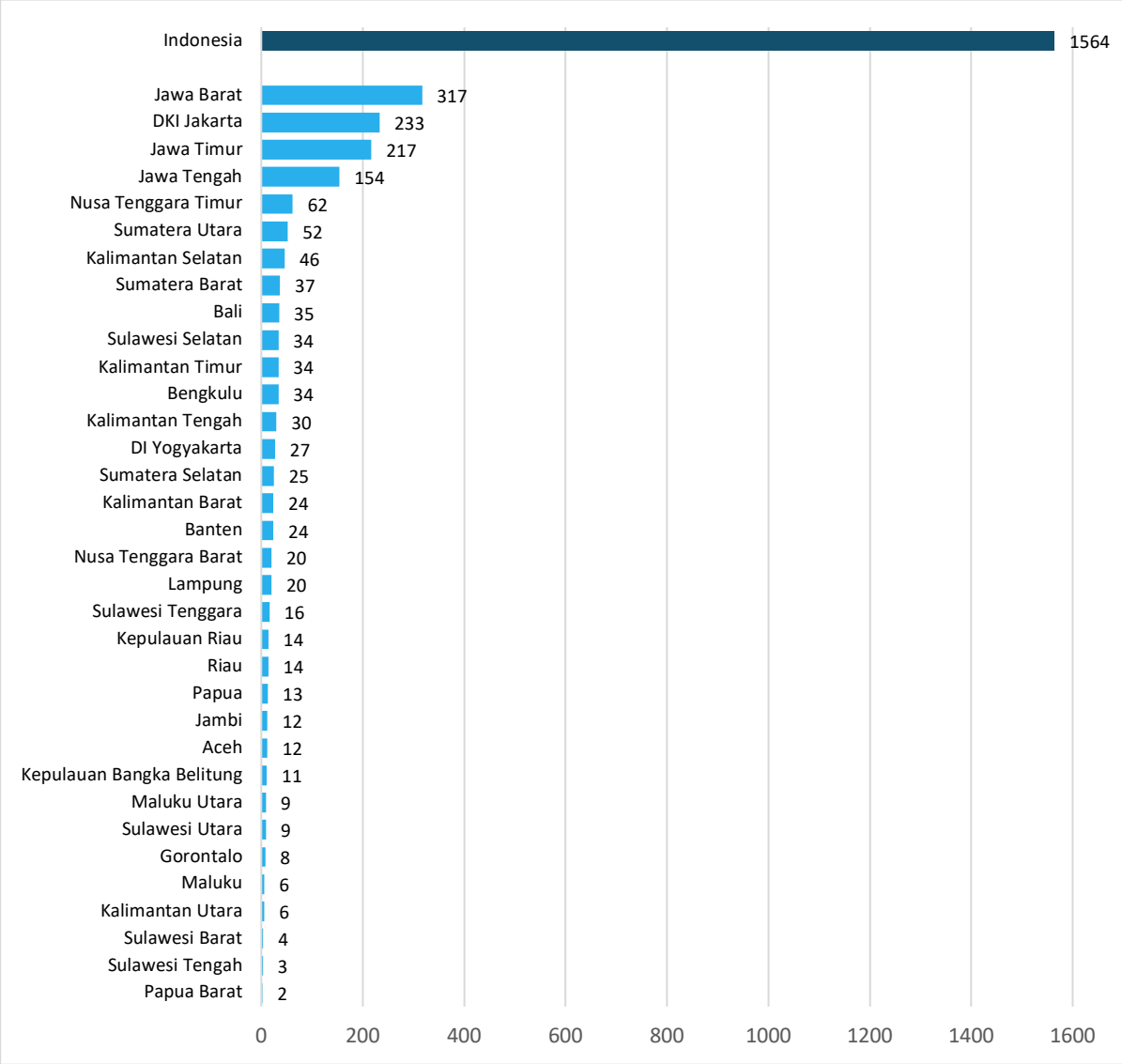
GAMBAR 2.18
JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI
TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Provinsi Jawa Barat memiliki jumlah laboratorium kesehatan terbanyak, yaitu sebanyak 317 laboratorium. Provinsi terbanyak kedua yaitu Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah laboratorium kesehatan sebanyak 233, dan terbanyak ketiga yaitu Provinsi Jawa Timur (217 laboratorium). Sebanyak 3 provinsi memiliki laboratorium paling sedikit, yaitu Provinsi Papua Barat (2 laboratorium), Sulawesi Tengah (3 laboratorium), dan Sulawesi Barat (4 laboratorium).

GAMBAR 2.19
JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2022

D. RUMAH SAKIT

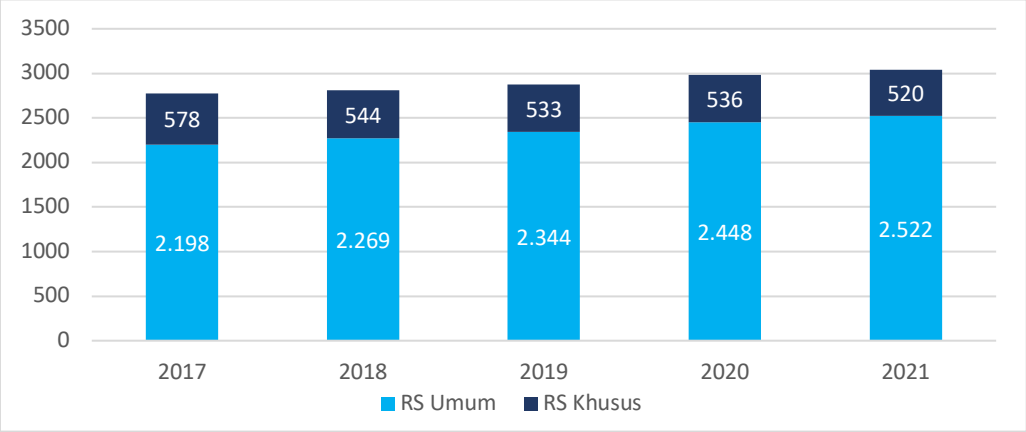
Sebagai upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat selain dilakukan upaya promotif dan preventif, diperlukan juga upaya kuratif dan rehabilitatif. Selain menyediakan upaya kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif, rumah sakit yang juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan kesehatan rujukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit diklasifikasikan atau di kelompokkan kelasnya berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber data manusia.

1. Jenis Rumah Sakit

Rumah sakit yang teregistrasi di Kementerian Kesehatan diselenggarakan oleh berbagai instansi atau Lembaga, antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/POLRI, BUMN, dan swasta. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, rumah sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus.

Selama tahun 2017-2021 jumlah rumah sakit di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 9,6%. Pada tahun 2017 jumlah rumah sakit sebanyak 2.776 meningkat menjadi 3.042 pada tahun 2021. Jumlah rumah sakit di Indonesia sampai dengan tahun 2021 terdiri dari 2.522 Rumah Sakit Umum (RSU) dan 520 Rumah Sakit Khusus (RSK). Perkembangan jumlah rumah sakit umum dan rumah sakit khusus dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada Gambar 2.20.

GAMBAR 2.20
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DI INDONESIA TAHUN 2017 – 2021



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

TABEL 2.1
PERKEMBANGAN JUMLAH RUMAH SAKIT UMUM BERDASARKAN PENYELENGGARAAN DI INDONESIA TAHUN 2017 – 2021

No	Penyelenggara	2017	2018	2019	2020	2021
PEMERINTAH PUSAT		**240**	**228**	**228**	**230**	**236**
1	Kementerian Kesehatan	14	15	18	19	19
2	TNI/POLRI	164	158	159	160	164
3	Kementerian Lain dan BUMN	62	55	51	51	53
PEMERINTAH DAERAH		**672**	**705**	**732**	**773**	**790**
1	Pemerintah Provinsi	87	91	92	97	96
2	Pemerintah Kabupaten/Kota	585	614	640	676	694
SWASTA		**1.286**	**1.336**	**1.384**	**1.445**	**1.496**
Total Keseluruhan		**2.198**	**2.269**	**2.344**	**2.448**	**2.522**

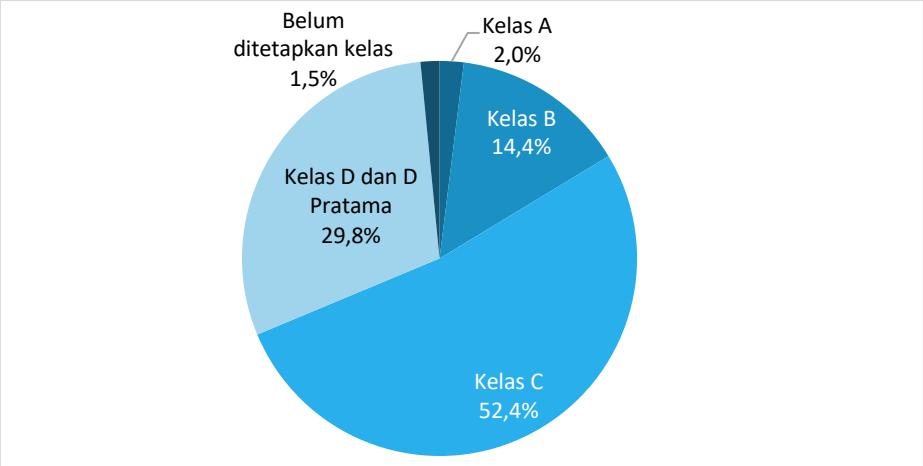
Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Pada tahun 2021 rumah sakit yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sebanyak 36 RS (1,2%), Kementerian Lain dan BUMN 63 RS (2,1%), TNI/POLRI 168 RS (5,5%), Pemerintah Daerah 847 RS (27,8%), sedangkan swasta menyelenggarakan rumah sakit terbanyak 1.928 RS (63,4%). Sebagian besar merupakan RS Umum, dengan rincian per penyelenggara sesuai tabel 2.1 di atas. Adapun rincian jumlah rumah sakit menurut jenis, kepemilikan, dan provinsi dapat dilihat pada Lampiran 8.a.

2. Tipe Rumah Sakit

Rumah sakit dikelompokkan berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia menjadi Kelas A, Kelas B, Kelas C, dan Kelas D. Jumlah rumah sakit (RS) di Indonesia menurut kelas terbanyak yaitu tipe C (1.593 RS) sebesar 52,4%, kemudian kelas D dan D Pratama (905 RS) sebesar 29,8%, kelas B (437 RS) sebesar 14,4%, dan kelas A (60 RS) sebesar 2,0%, sedangkan selebihnya sebesar 1,5% merupakan RS yang belum ditetapkan kelas (47 RS).

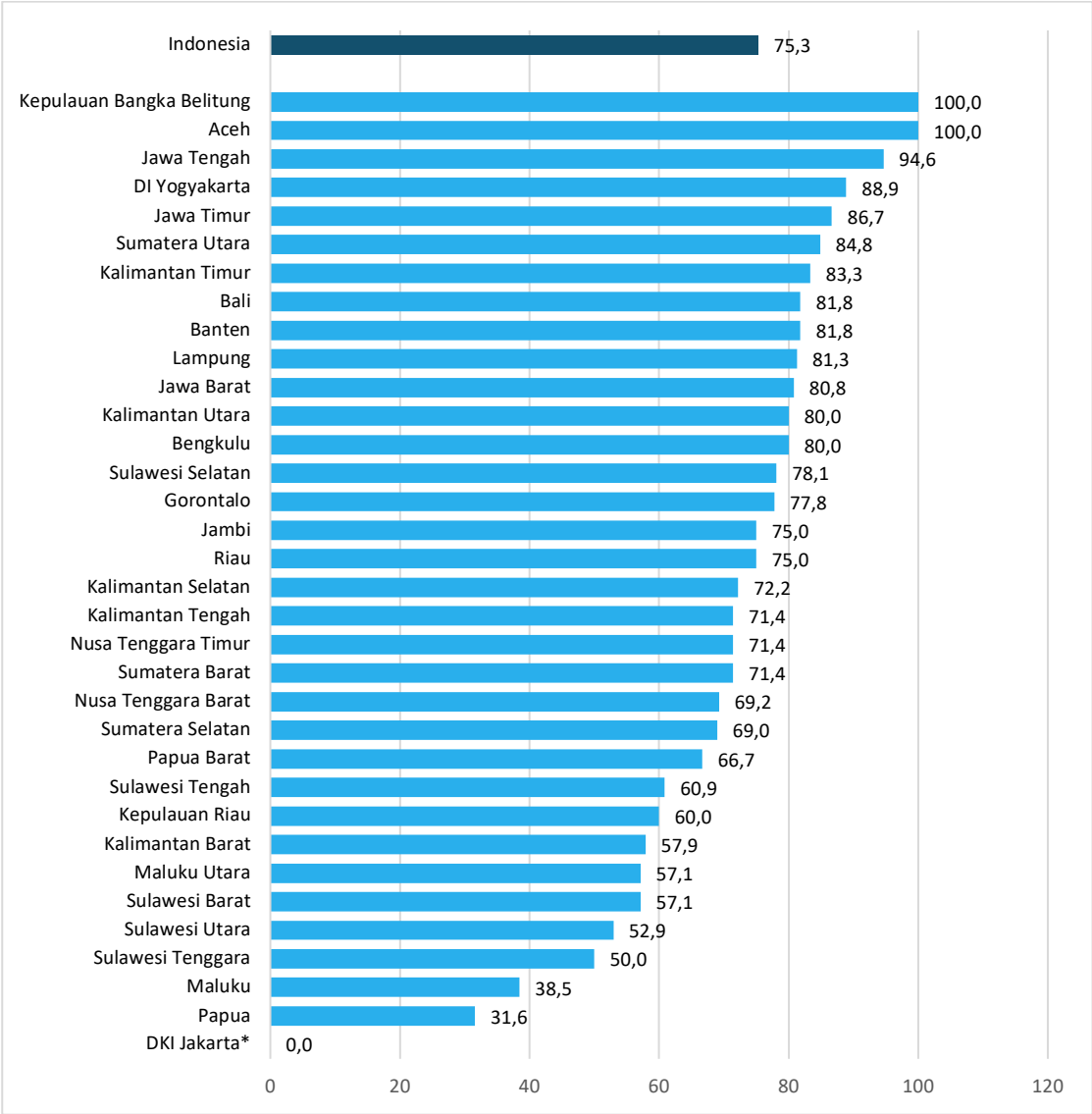
GAMBAR 2.21
JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT KELAS TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2022

Persentase rumah sakit kabupaten/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang tahun 2021 sebesar 75,3%. Provinsi Aceh dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki presentase tertinggi, yaitu 100% atau seluruh rumah sakit kabupaten/kota kelas C memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Maluku (38,5%) dan Papua (31,6%). Provinsi DKI Jakarta tidak ada data. Rincian per provinsi dapat dilihat pada lampiran 8.f.

GAMBAR 2.22
PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS PENUNJANG TAHUN 2021

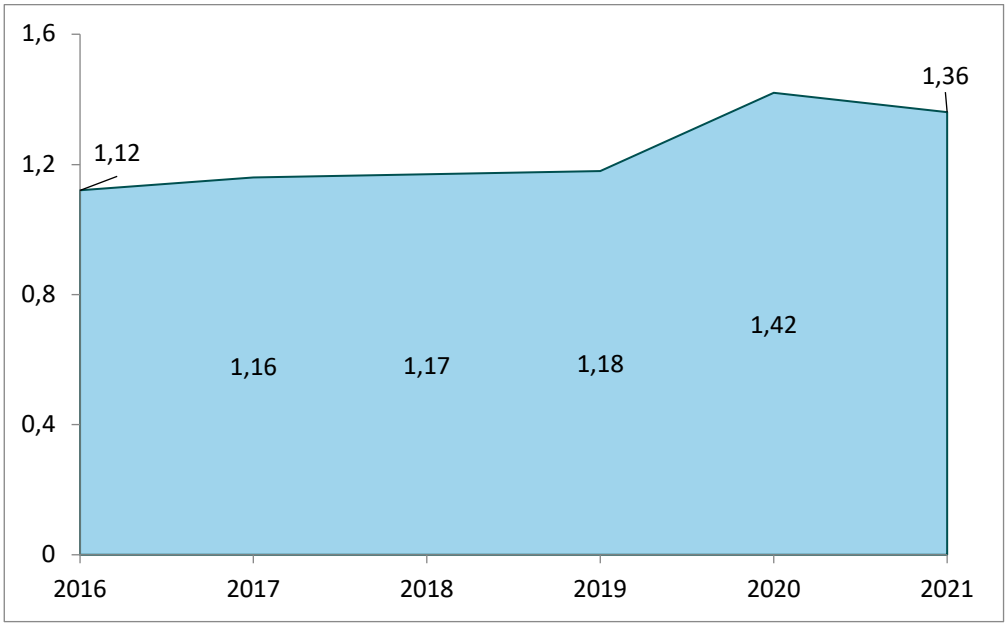


Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

3. Rasio Tempat Tidur Rumah Sakit

Dalam standar WHO, standar terpenuhi atau tidaknya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan rujukan dan perorangan di suatu wilayah dapat dilihat dari rasio tempat tidur terhadap 1.000 penduduk. Standar WHO adalah 1 tempat tidur untuk 1.000 penduduk. Rasio tempat tidur di rumah sakit di Indonesia sejak tahun 2016 hingga 2021 yaitu lebih dari 1 per 1.000 penduduk. Sehingga, jumlah tempat tidur di Indonesia sudah tercukupi menurut standar WHO. Rasio tempat tidur rumah sakit di Indonesia sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada gambar berikut.

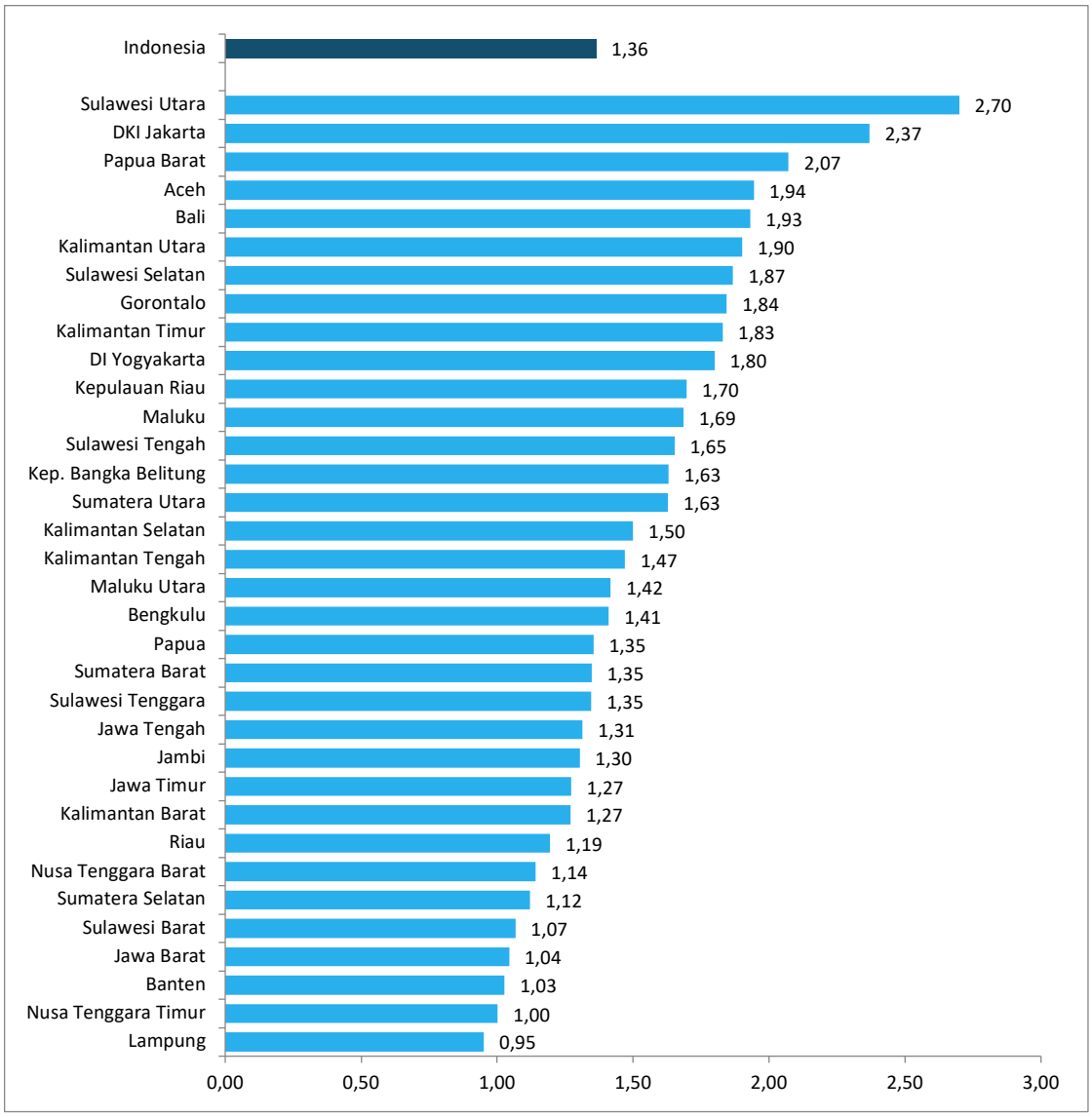
GAMBAR 2.23
RASIO JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2016 - 2021



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2022

Secara nasional, rasio jumlah tempat tidur terhadap 1.000 penduduk di Indonesia pada tahun 2021 telah mencapai standar minimal dari WHO. Meskipun demikian, terdapat 1 provinsi yang rasio tempat tidurnya belum memenuhi standar WHO, yaitu Provinsi Lampung (0,9).

GAMBAR 2.24
RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK DI INDONESIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2022

4. Akreditasi Rumah Sakit

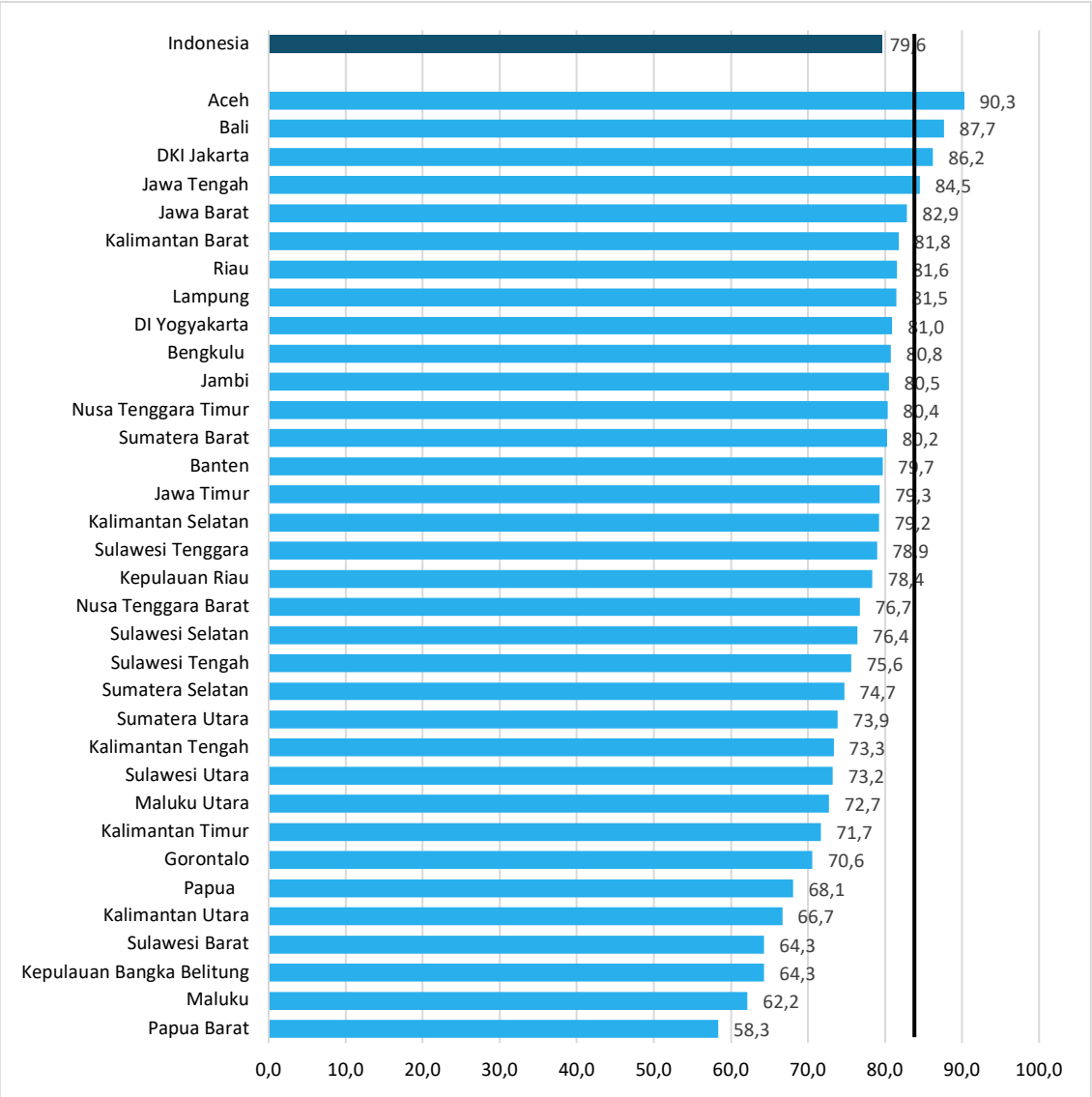
Dalam RPJMN 2020-2024, salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah pemerataan pelayanan kesehatan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, baik pada fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Indikator sasaran strategis yang ingin dicapai adalah 100% RS terakreditasi pada tahun 2024.

Berdasarkan tingkat akreditasi maka tingkat akreditasi perdana 26%, dasar 8,4%, madya 15,5%, utama 13,4%, paripurna 36,5%, dan hanya akreditasi internasional JCI sebanyak 0,2%.

Persentase RS terakreditasi tertinggi adalah Provinsi Aceh sebesar 90,28% dan terendah di Provinsi Papua Barat sebesar 60,87%. Capaian rumah sakit yang terakreditasi pada tahun

2021 sebagaimana terlihat pada Gambar 2.25 dibawah untuk rincian data selengkapnya terdapat pada Lampiran 8.e.

GAMBAR 2.25
PERSENTASE RUMAH SAKIT TERAKREDITASI DI INDONESIA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI, 2022

Dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/455/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan pada Masa Pandemi COVID-19, maka kegiatan persiapan dan survei akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan mulai dilakukan setelah status bencana nasional dicabut oleh Pemerintah. Penghentian sementara proses akreditasi rumah sakit menyebabkan berkurangnya jumlah RS terakreditasi pada tahun 2021. Perlu dilakukan upaya lain untuk menjamin mutu fasilitas pelayanan kesehatan pada masa pandemi COVID-19, antara lain melalui pernyataan komitmen RS untuk menjaga dan melakukan

upaya peningkatan mutu, pemantauan dan evaluasi kesiapan RS pada masa pandemi COVID-19 serta pemantauan dan evaluasi mutu RS pada masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

E. KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN

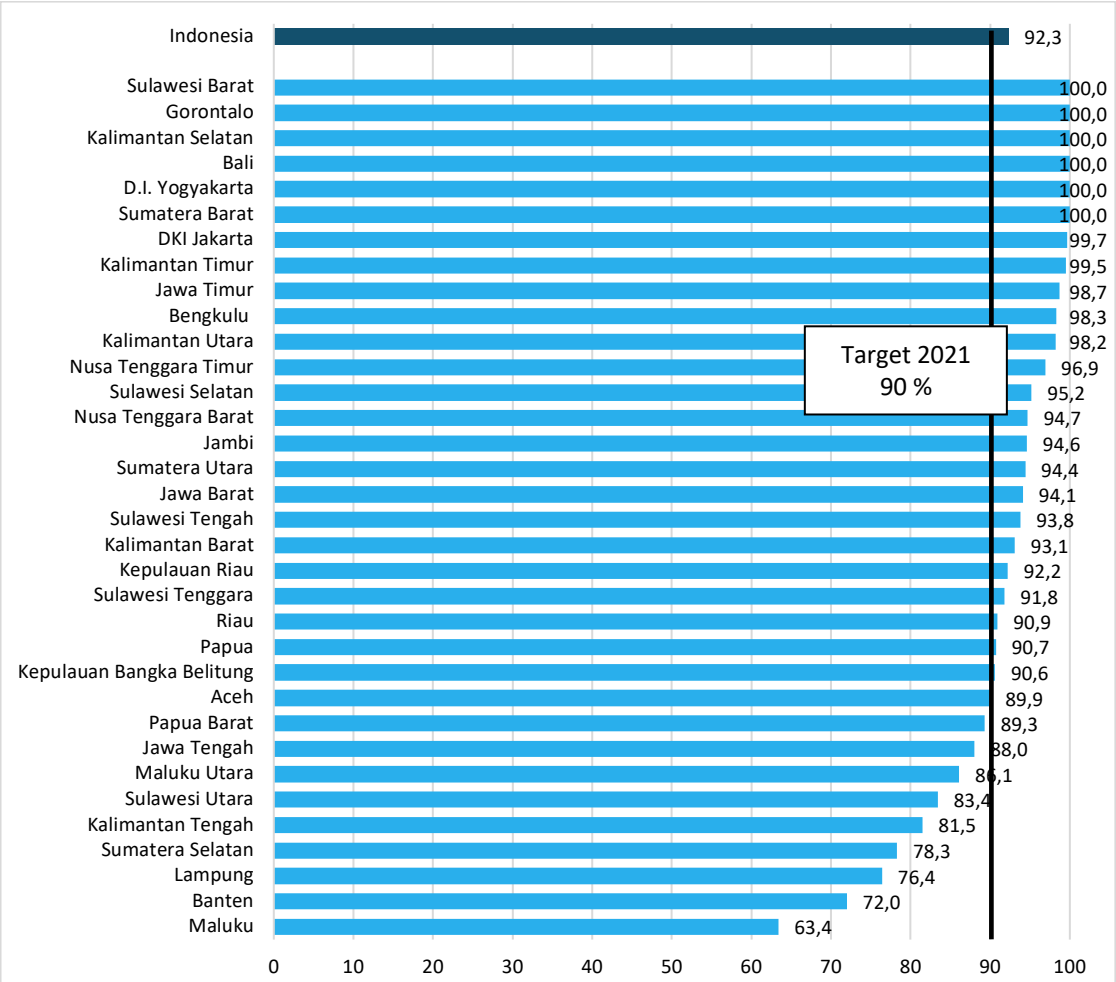
1. Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial

Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan untuk menjamin akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah. Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator sasaran strategis dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan pencapaian upaya tersebut. Adapun indikator sasaran strategis tersebut yaitu persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial. Definisi operasional dari indikator tersebut adalah persentase puskesmas yang memiliki ketersediaan minimal 80% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan.

Pemantauan dilakukan terhadap 40 item obat yang dianggap esensial dan harus tersedia di pelayanan kesehatan dasar. Obat-obat yang dipilih sebagai obat indikator merupakan obat pendukung program tuberkulosis, malaria, kesehatan keluarga, gizi, dan imunisasi serta obat pelayanan kesehatan dasar esensial yang terdapat di dalam Formularium Nasional. Pada tahun 2021, realisasi indikator persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial sebesar 92,3%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 90% sehingga menghasilkan persentase realisasi sebesar 102,6%. Hasil tersebut diperoleh dari periode pelaporan bulan November 2021 di mana jumlah puskesmas yang melapor sebanyak 9.275 puskesmas dari 10.177 puskesmas di Indonesia (91,1%), dengan jumlah puskesmas yang memiliki 80% obat esensial sebanyak 8.564 puskesmas.

Capaian tertinggi persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial pada tahun 2021 sebesar 100% dan dicapai oleh 6 (enam) provinsi, yaitu Sumatera Barat, D.I. Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Gorontalo dan Sulawesi Barat. Terdapat 10 (sepuluh) provinsi yang belum mencapai target indikator tahun 2021 sebesar 90% yaitu Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Papua Barat. Rincian data persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial menurut provinsi terdapat pada Lampiran 9.a.

GAMBAR 2.26
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL
TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

2. Persentase Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial

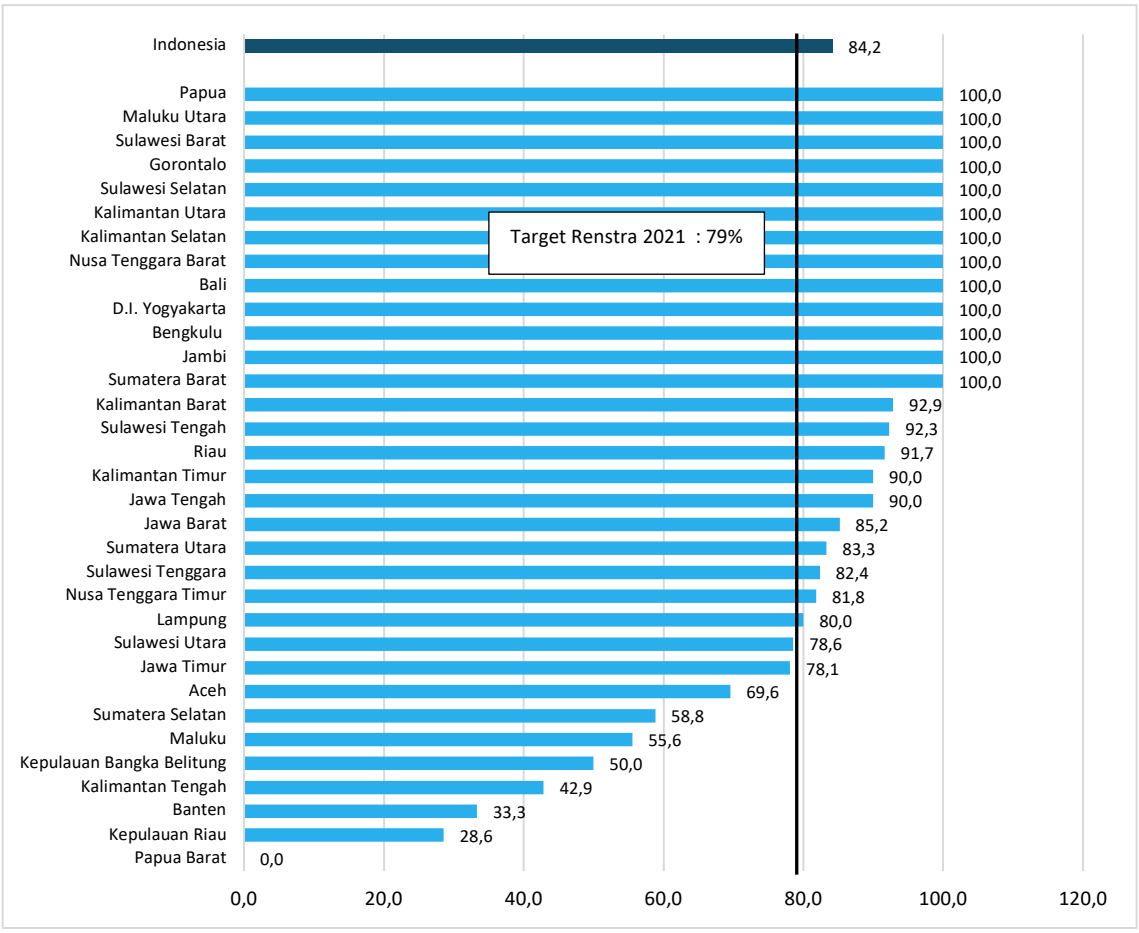
Program Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang merupakan salah satu program di Kementerian Kesehatan berperan dalam mendukung kebijakan nasional pembangunan kesehatan dalam hal menjamin akses, kemandirian dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan, yang salah satunya diindikasikan oleh kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial. Indikator ini bertujuan untuk memantau ketersediaan obat esensial di tingkat kabupaten/kota. Adapun definisi operasional dari indikator persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial adalah persentase kabupaten/kota yang memiliki ketersediaan minimal 85% dari 40 item obat indikator pada saat dilakukan pemantauan.

Pada tahun 2021, realisasi indikator persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial sebesar 84,2%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 79% sehingga menghasilkan persentase realisasi sebesar 106,6%. Hasil tersebut diperoleh dari periode pelaporan bulan November 2021 di mana jumlah kabupaten/kota yang memiliki ketersediaan minimal 85% obat essensial (40 item obat

indikator) sebanyak 383 kabupaten/kota dari 455 kabupaten/kota yang melapor. Hal tersebut menunjukkan tingkat pelaporan kabupaten/kota sebesar 88,5% dari 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Capaian tertinggi persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial pada tahun 2021 yakni sebesar 100% dan dicapai oleh 13 (tiga belas) provinsi, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, D.I. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku Utara, dan Papua. Terdapat satu provinsi yang tidak mengirimkan laporan hingga batas waktu yang ditetapkan, yaitu Provinsi Papua Barat. Pengukuran indikator kinerja ini dilakukan di 33 Provinsi mengecualikan Provinsi DKI Jakarta. Hal ini disebabkan karena lokus pengukuran indikator ini adalah Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota sebagai tempat diselenggarakannya fungsi manajemen pengelolaan obat di kabupaten/kota. Akan tetapi Provinsi DKI Jakarta memiliki bentuk pemerintahan daerah khusus yang berbeda dari provinsi lainnya yang berdampak kepada organisasi institusi kesehatan. Fungsi manajemen pengelolaan obat sebagian besar dilaksanakan oleh Puskesmas Kecamatan karena telah berstatus BLUD sementara Sudinkes yang setingkat dengan Dinkes Kab/Kota hanya melakukan pengelolaan obat dan vaksin program. Rincian data kabupaten/kota dengan ketersediaan obat esensial menurut provinsi terdapat pada Lampiran 9.b.

GAMBAR 2.27
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL
TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI, 2022

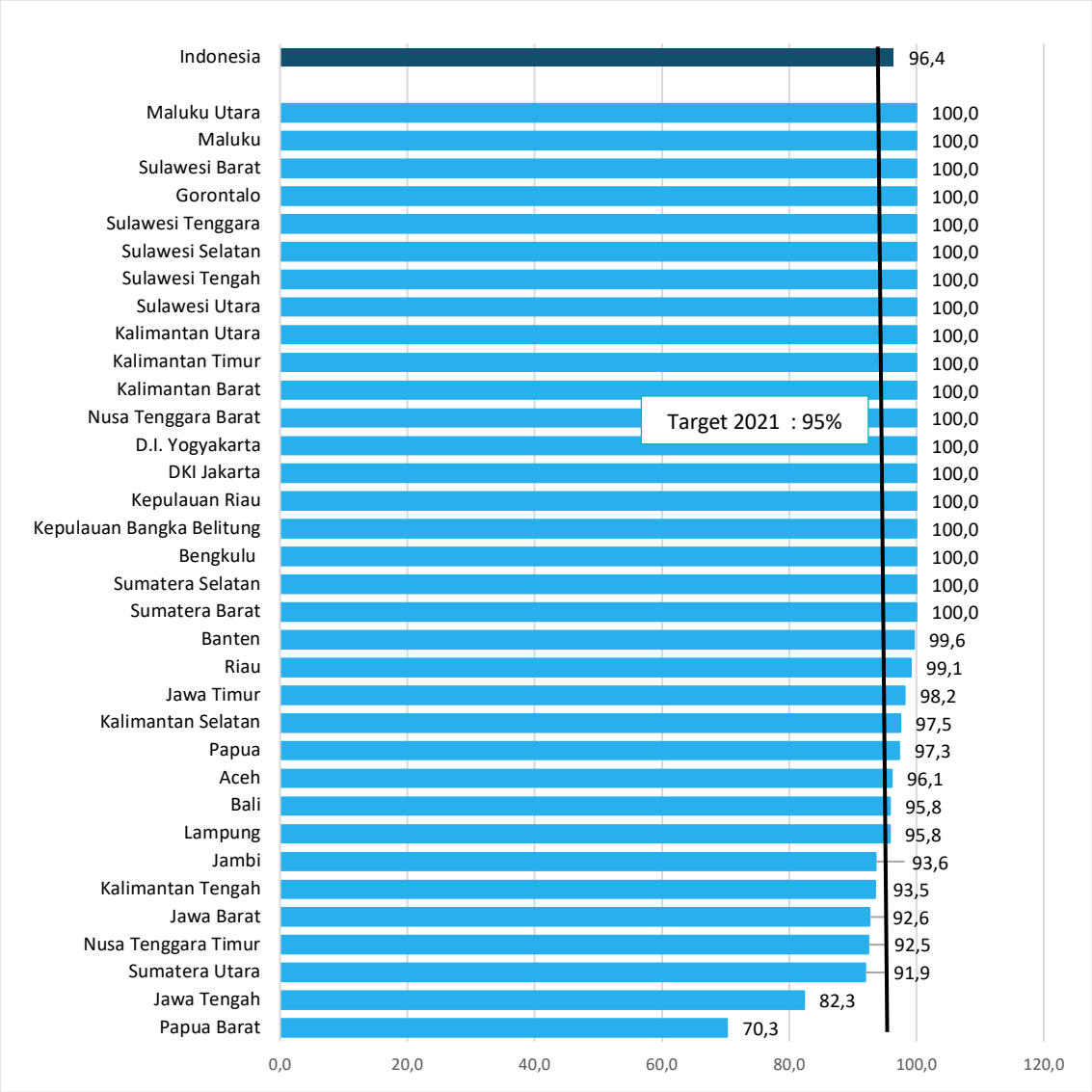
3. Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Vaksin Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)

Memastikan ketersediaan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan terutama di puskesmas merupakan salah satu strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan upaya meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan. Upaya tersebut diindikasikan dengan indikator kinerja persentase puskesmas dengan ketersediaan vaksin Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) yang bertujuan untuk memantau ketersediaan vaksin IDL di tingkat puskesmas. Adapun definisi operasional dari indikator persentase puskesmas dengan ketersediaan vaksin Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) adalah persentase puskesmas yang memiliki vaksin IDL terdiri dari Vaksin Hepatitis B, Vaksin BCG (*Bacillus Calmette-Guérin*), Vaksin DPT-HB-HIB (Difteri, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, *Haemophilus Influenza* tipe B), Vaksin Polio, Vaksin Campak/Campak Rubella pada saat dilakukan pemantauan.

Pada tahun 2021, realisasi indikator persentase puskesmas dengan ketersediaan vaksin Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sebesar 96,4%, melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024 yaitu sebesar 95% sehingga menghasilkan persentase realisasi sebesar 101,5%. Hasil tersebut diperoleh dari periode pelaporan bulan November 2021 di mana jumlah puskesmas yang memiliki vaksin IDL yang terdiri dari Vaksin Hepatitis B, Vaksin BCG, Vaksin DPT-HB-HIB, Vaksin Polio, dan Vaksin Campak/Campak Rubella sebanyak 8.908 puskesmas dari 9.241 puskesmas yang melapor. Hal tersebut menunjukkan tingkat pelaporan puskesmas sebesar 90,8% dari 10.176 puskesmas di Indonesia. Total puskesmas yang dipantau merupakan puskesmas yang digunakan pada saat perencanaan di awal tahun, sehingga jumlahnya berbeda dengan jumlah puskesmas semester 2 tahun 2021 yang dipublikasikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi.

Capaian tertinggi persentase puskesmas dengan ketersediaan vaksin IDL pada tahun 2021 yakni sebesar 100% dan dicapai oleh 19 provinsi. Namun, terdapat 7 provinsi dengan capaian persentase puskesmas dengan ketersediaan vaksin IDL dibawah target nasional yakni Provinsi Jambi, Kalimantan Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Papua Barat.

GAMBAR 2.28
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL
TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

F. SARANA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

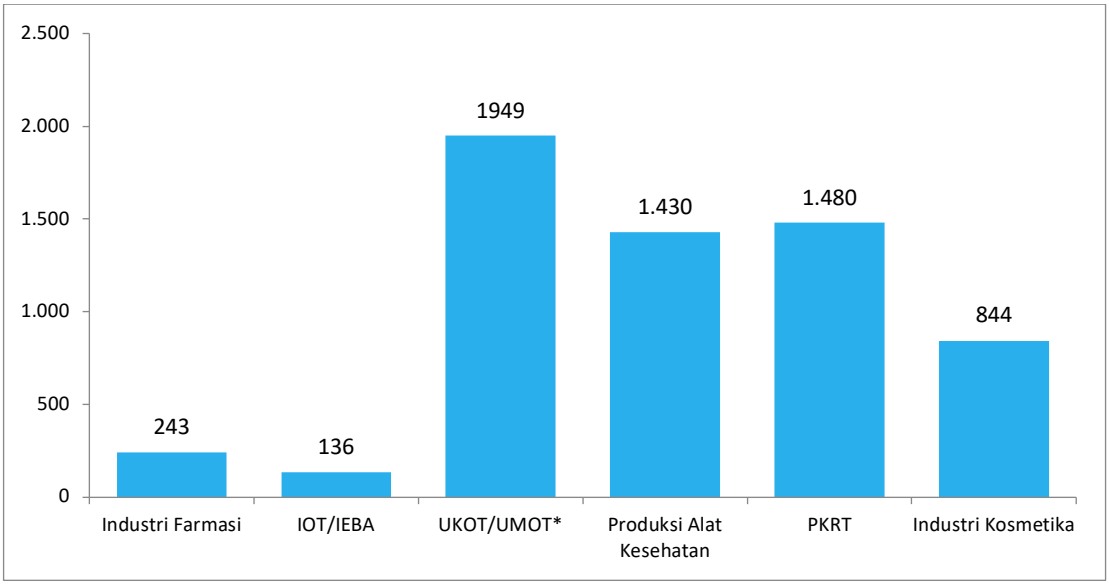
1. Sarana Produksi dan Distribusi Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Cakupan sarana produksi bidang kefarmasian dan alat kesehatan menggambarkan tingkat ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang melakukan upaya produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan. Sarana produksi di bidang kefarmasian dan alat kesehatan antara lain Industri Farmasi, Industri Obat Tradisional (IOT), Usaha Kecil Obat Tradisional/Usaha Mikro Obat Tradisional (UKOT/UMOT), Produksi Alat Kesehatan (Alkes), dan Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), dan Industri Kosmetika.

Jika ditelaah, sarana produksi dan distribusi di Indonesia masih menunjukkan adanya ketimpangan dalam hal persebaran jumlah. Sebagian besar sarana produksi maupun distribusi berlokasi di Pulau Sumatera dan Jawa sebesar 95,4% sarana produksi dan 77,8% sarana distribusi. Ketersediaan ini terkait dengan sumber daya yang dimiliki dan kebutuhan pada wilayah setempat. Kondisi ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dalam kebijakan untuk mengembangkan jumlah sarana produksi dan distribusi kefarmasian dan alat kesehatan di wilayah Indonesia lainnya, sehingga terjadi pemerataan jumlah sarana tersebut di seluruh Indonesia. Selain itu, hal ini bertujuan untuk membuka akses keterjangkauan masyarakat terhadap sarana kesehatan di bidang kefarmasian dan alat kesehatan.

Pada tahun 2021 terdapat 6.082 sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan di Indonesia. Provinsi dengan jumlah sarana produksi terbanyak adalah Jawa Barat, yaitu sebanyak 1.972 sarana. Hal ini dapat disebabkan karena Jawa Barat memiliki populasi yang besar dan wilayah yang luas. Namun, terdapat 5 provinsi yang tidak memiliki sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan. Rincian jumlah sarana produksi kefarmasian dan alat kesehatan berdasarkan jenis pada tahun 2021 terdapat pada Gambar 2.29 berikut.

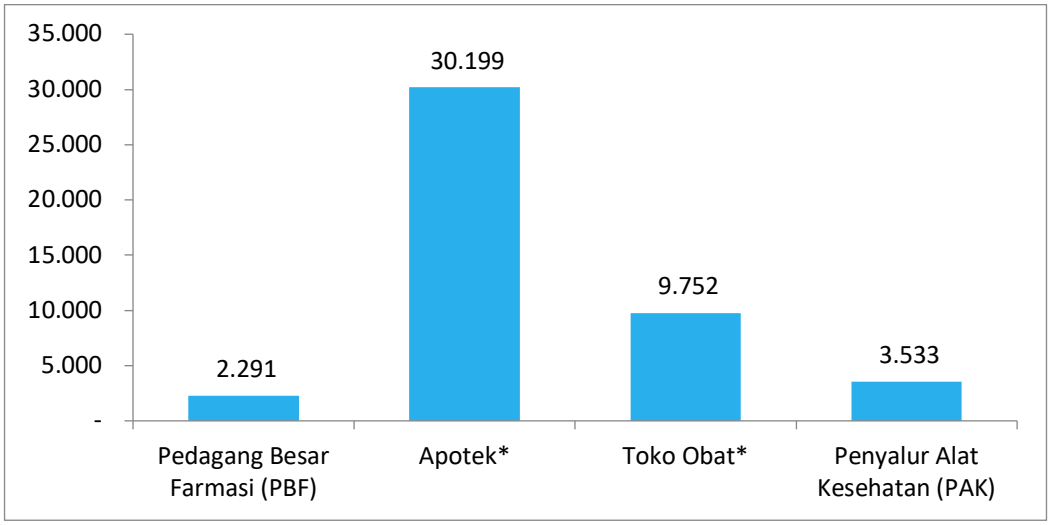
GAMBAR 2.29
JUMLAH SARANA PRODUKSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA
TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2022
Keterangan: *) Data tahun 2020

Sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan yang dipantau jumlahnya oleh Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan antara lain Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Toko Obat, dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK). Jumlah sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 49.511 sarana. Provinsi dengan jumlah sarana distribusi terbanyak adalah Jawa Barat, yaitu sebanyak 8.222 sarana. Gambar 2.30 berikut menyajikan jumlah sarana distribusi kefarmasian dan alat kesehatan pada tahun 2021.

GAMBAR 2.30
JUMLAH SARANA DISTRIBUSI KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2022
Keterangan: *) Data tahun 2020

G. UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT (UKBM)

1. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

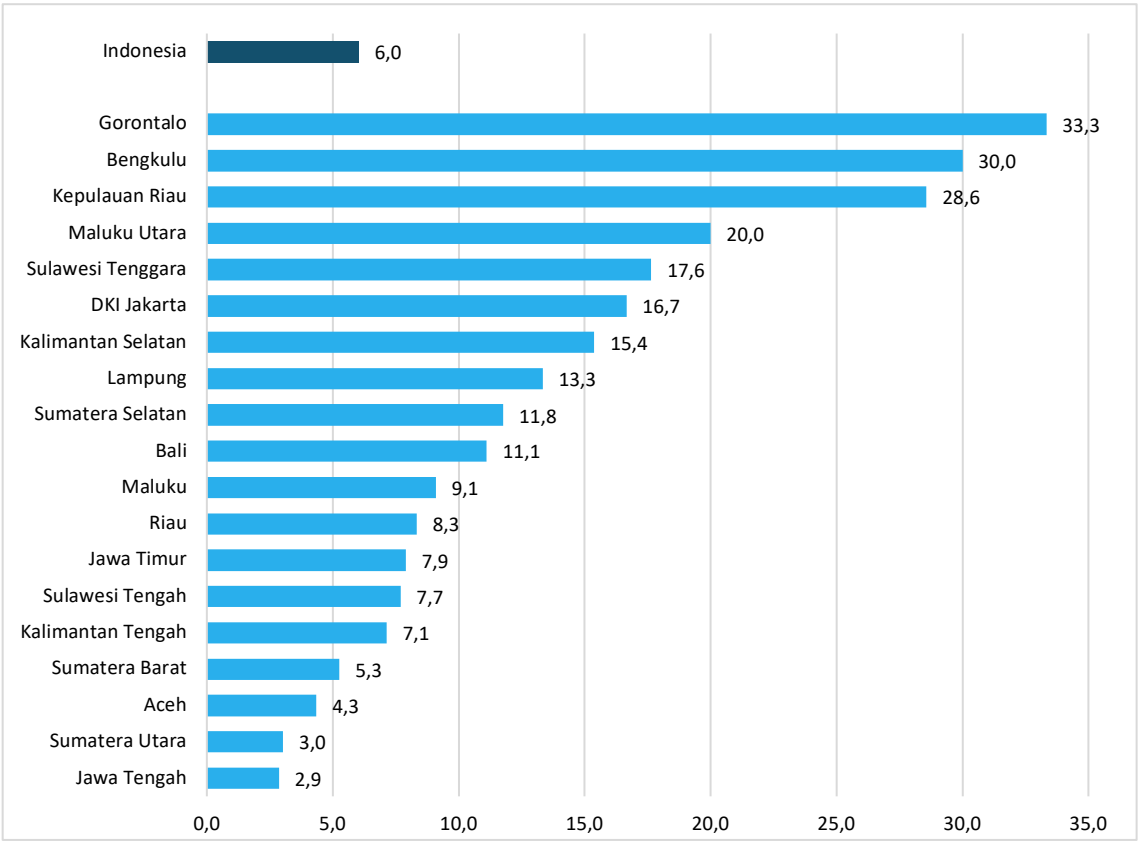
Salah satu bentuk UKBM adalah posyandu (pos pelayanan terpadu). Posyandu merupakan lembaga kemasyarakatan yang mewadahi pemberdayaan masyarakat dalam pelayanan sosial dasar dan pelaksanaannya dapat disinergikan dengan layanan lainnya sesuai potensi daerah. Secara kelembagaan posyandu merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan. Sasaran posyandu adalah bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, dan pasangan usia subur sesuai Buku Pedoman Pengelolaan Umum Posyandu tahun 2011.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, posyandu merupakan salah satu bentuk UKBM. Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat berbentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang diprakarsai oleh masyarakat dan dikelola oleh masyarakat bersama Pemerintah Desa/Kelurahan guna memberikan kemudahan memperoleh pelayanan kesehatan masyarakat. Posyandu aktif adalah posyandu yang memenuhi kriteria:

1) Melakukan kegiatan rutin posyandu minimal 8 kali/tahun
2) Memiliki minimal 5 orang kader
3) Sebanyak 3 dari 4 layanan di posyandu memenuhi cakupan minimal 50% sasaran sebanyak 8 bulan dalam satu tahun

Pada tahun 2021, terdapat 31 kabupaten/kota (6,0%) yang memiliki minimal 80% posyandu aktif di seluruh Indonesia dari 15 provinsi yang melapor. Data posyandu secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 10.

GAMBAR 2.31
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 80 PERSEN POSYANDU AKTIF MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2021



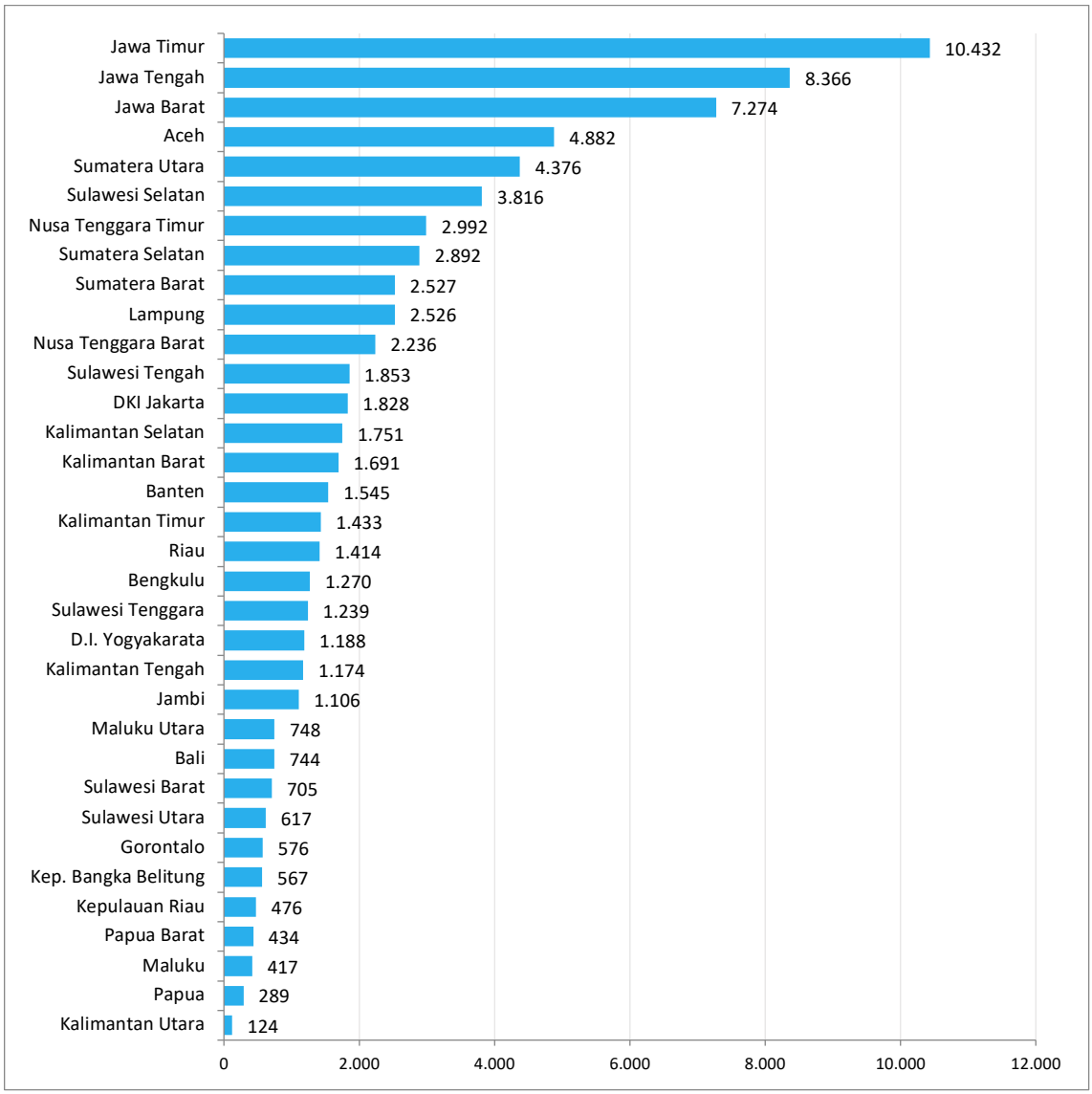
Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

2. Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM)

Pergeseran tipe penyakit penyebab kematian terbanyak di Indonesia dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular menjadikan peran Posbindu PTM menjadi sangat penting. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular, masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok berperan aktif dalam Penanggulangan PTM. Peran serta masyarakat yang dimaksud dapat dilaksanakan melalui kegiatan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) dengan membentuk dan mengembangkan Pos Pembinaan Terpadu PTM (Posbindu PTM). Pada Pos Pembinaan Terpadu PTM (Posbindu PTM) dapat dilaksanakan kegiatan deteksi dini, monitoring dan tindak lanjut dini faktor risiko PTM secara mandiri dan berkesinambungan di bawah pembinaan Puskesmas.

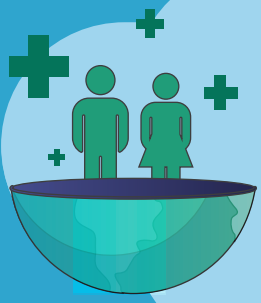
Pada tahun 2021 di Indonesia terdapat 75.508 Posbindu PTM. Provinsi dengan jumlah Posbindu PTM terbanyak yaitu Jawa Timur dengan 10.432 Posbindu PTM dan yang terendah yaitu Kalimantan Utara (124 Posbindu PTM). Data posbindu PTM secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 10.

GAMBAR 2.32
JUMLAH POSBINDU PTM MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

***



Bab III.
SDM KESEHATAN

BAB III. SDM KESEHATAN

Sumber daya manusia kesehatan (SDMK) merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan kesehatan. SDMK diperlukan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang optimal dan juga sebagai pelaksana upaya dan pelayanan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan (termasuk tenaga kesehatan strategis) dan tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan.

Pada bab ini, pembahasan mengenai SDMK mencakup tenaga kesehatan, baik di seluruh fasilitas kesehatan, maupun secara rinci di puskesmas dan rumah sakit, registrasi tenaga kesehatan, pendayagunaan tenaga kesehatan, serta lulusan tenaga kesehatan.

A. JUMLAH TENAGA KESEHATAN

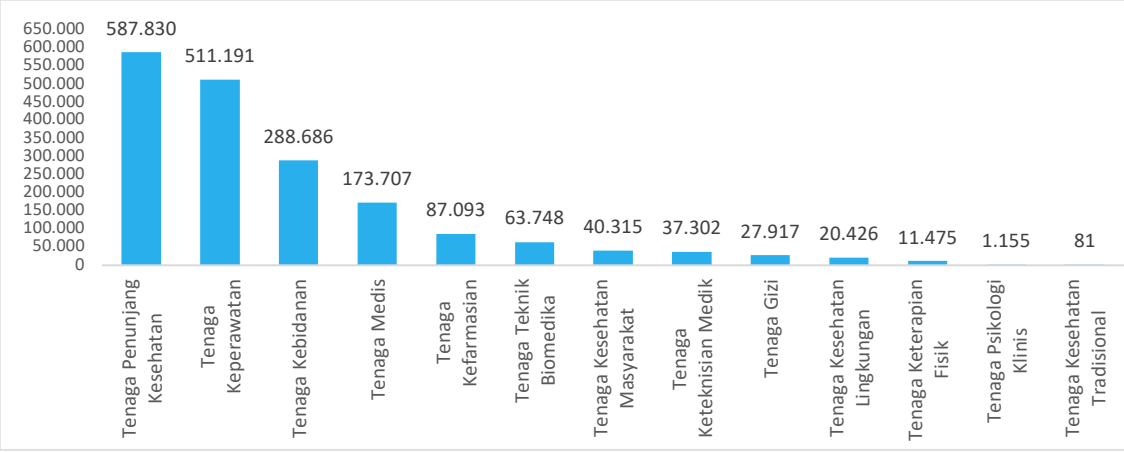
Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan).

Berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi, jumlah SDMK di fasyankes di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 1.850.926 orang yang terdiri dari 1.251.621 orang tenaga kesehatan (68,2%) dan 587.830 orang tenaga penunjang kesehatan (31,8%). Jumlah SDMK tahun 2021 ini mengalami kenaikan lebih dari 25% dibandingkan tahun 2020 (Sumber: SISDMK—Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan—diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan).

Proporsi tenaga kesehatan terbanyak yaitu tenaga keperawatan sebanyak 40,5% dari total tenaga kesehatan, sedangkan proporsi tenaga kesehatan yang paling sedikit yaitu tenaga kesehatan tradisional sebesar 0,01%.

GAMBAR 3.1

REKAPITULASI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2021

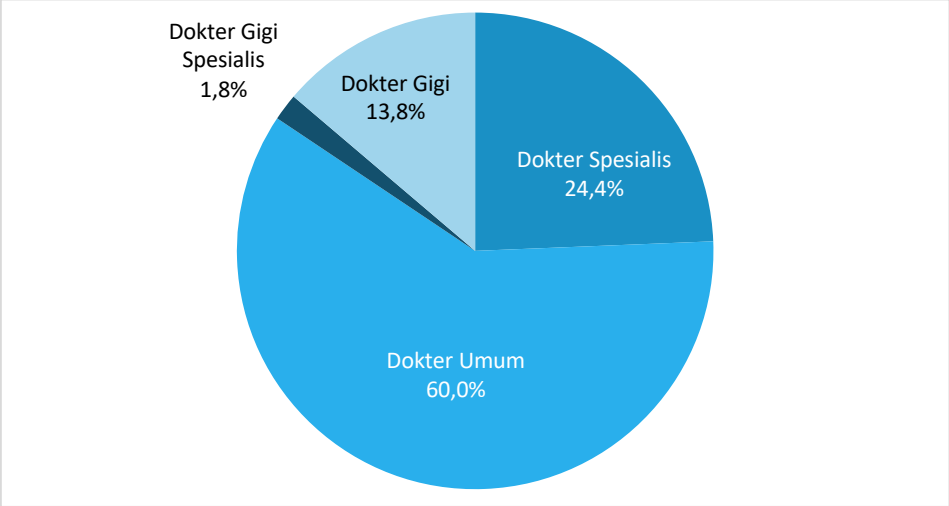


Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Berdasarkan fungsinya, yaitu memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, jumlah tenaga medis di Indonesia sebanyak 173.707 orang, dengan proporsi tertinggi yaitu dokter umum sebesar 60%.

Sebanyak 63% dari total tenaga medis berada di Pulau Jawa-Bali dengan jumlah terbanyak tersebar di Provinsi DKI Jakarta (24.235 orang), Jawa Timur (24.085 orang), dan Jawa Barat (23.592 orang). Sedangkan provinsi dengan tenaga medis paling sedikit tersebar di Sulawesi Barat (485 orang), Kalimantan Utara (558 orang), dan Gorontalo (627 orang).

GAMBAR 3.2
PROPORSI TENAGA MEDIS DI INDONESIA TAHUN 2021



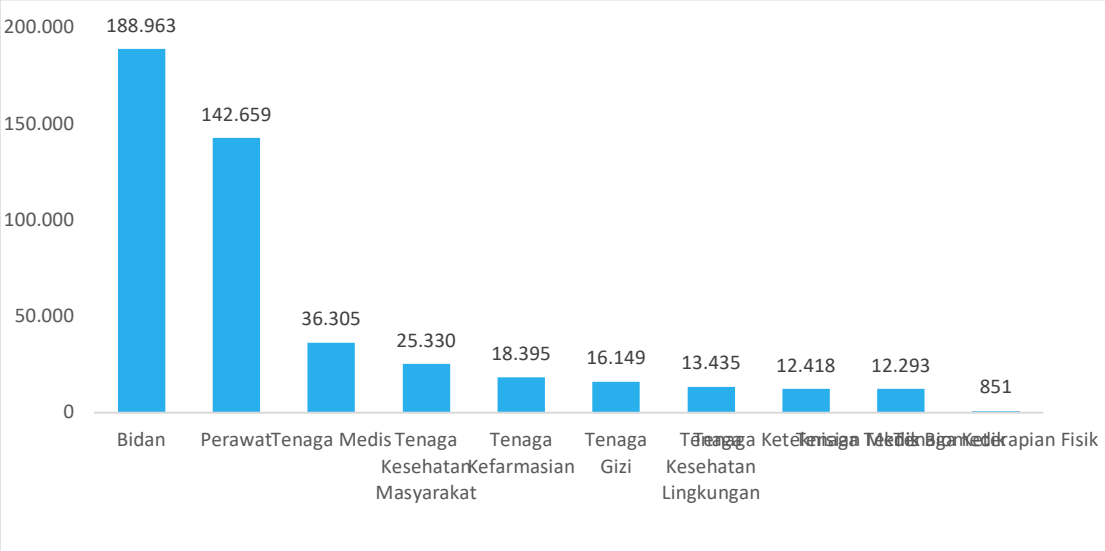
Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen TenagaKesehatan, Kemenkes RI, 2022

1. Tenaga Kesehatan di Puskesmas

Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Untuk mendukung fungsi dan tujuan puskesmas diperlukan sumber daya manusia kesehatan baik tenaga kesehatan maupun tenaga penunjang kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas, jenis tenaga kesehatan yang ada di puskesmas paling sedikit terdiri dari dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga promosi kesehatan masyarakat dan ilmu perilaku, tenaga kesehatan lingkungan, nutrisionis, tenaga apoteker dan/atau tenaga teknis kefarmasian, dan ahli teknologi laboratorium medik.

GAMBAR 3.3
JUMLAH TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Pada tahun 2021 jumlah tenaga kesehatan di Indonesia yang bertugas di puskesmas sebanyak 453.529 orang dengan proporsi terbanyak bidan yaitu sebesar 41,7% (188.963 orang), sedangkan proporsi terendah tenaga keterapian fisik sebesar 0,18% (851 orang).

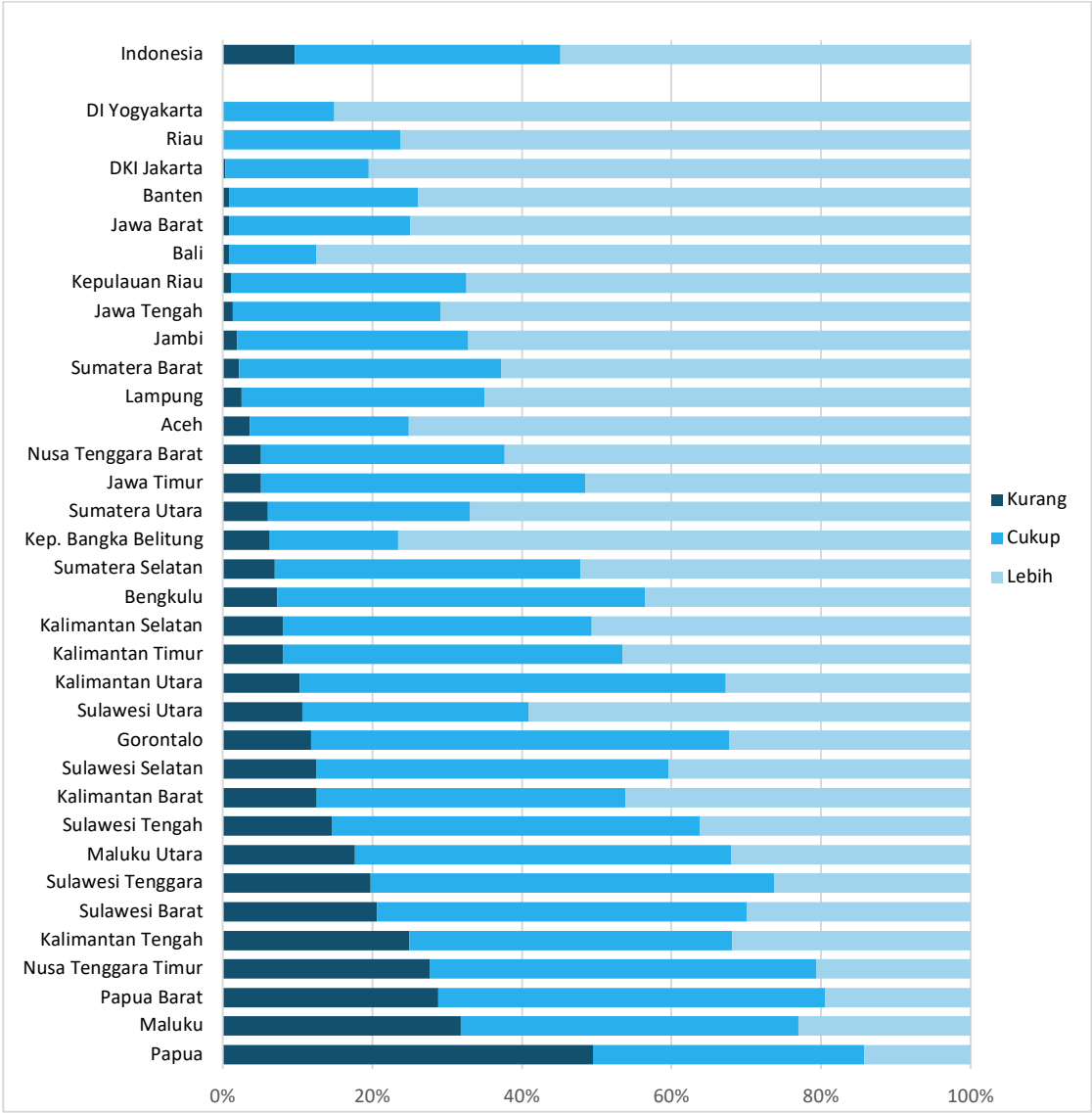
Jumlah dan jenis tenaga kesehatan puskesmas dihitung berdasarkan analisis beban kerja dengan mempertimbangkan beberapa hal, yaitu jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerjanya, dan pembagian waktu kerja.

a. Kecukupan Dokter di Puskesmas

Kecukupan tenaga kesehatan di puskesmas diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019. Peraturan Menteri Kesehatan tersebut membedakan antara puskesmas rawat inap dan puskesmas non rawat inap, yaitu pada puskesmas non rawat inap, minimal satu orang dokter baik di kawasan perkotaan, perdesaan, maupun kawasan terpencil dan sangat terpencil. Sementara pada puskesmas rawat inap minimal dua orang dokter baik pada kawasan perdesaan, maupun kawasan terpencil dan sangat terpencil.

Secara nasional terdapat 9,6% puskesmas yang kekurangan dokter, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 (12,5%). Sebanyak 35,5% puskesmas dengan status jumlah dokter cukup, dan 54,9% puskesmas yang memiliki jumlah dokter melebihi standar kebutuhan minimal.

GAMBAR 3.4
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021



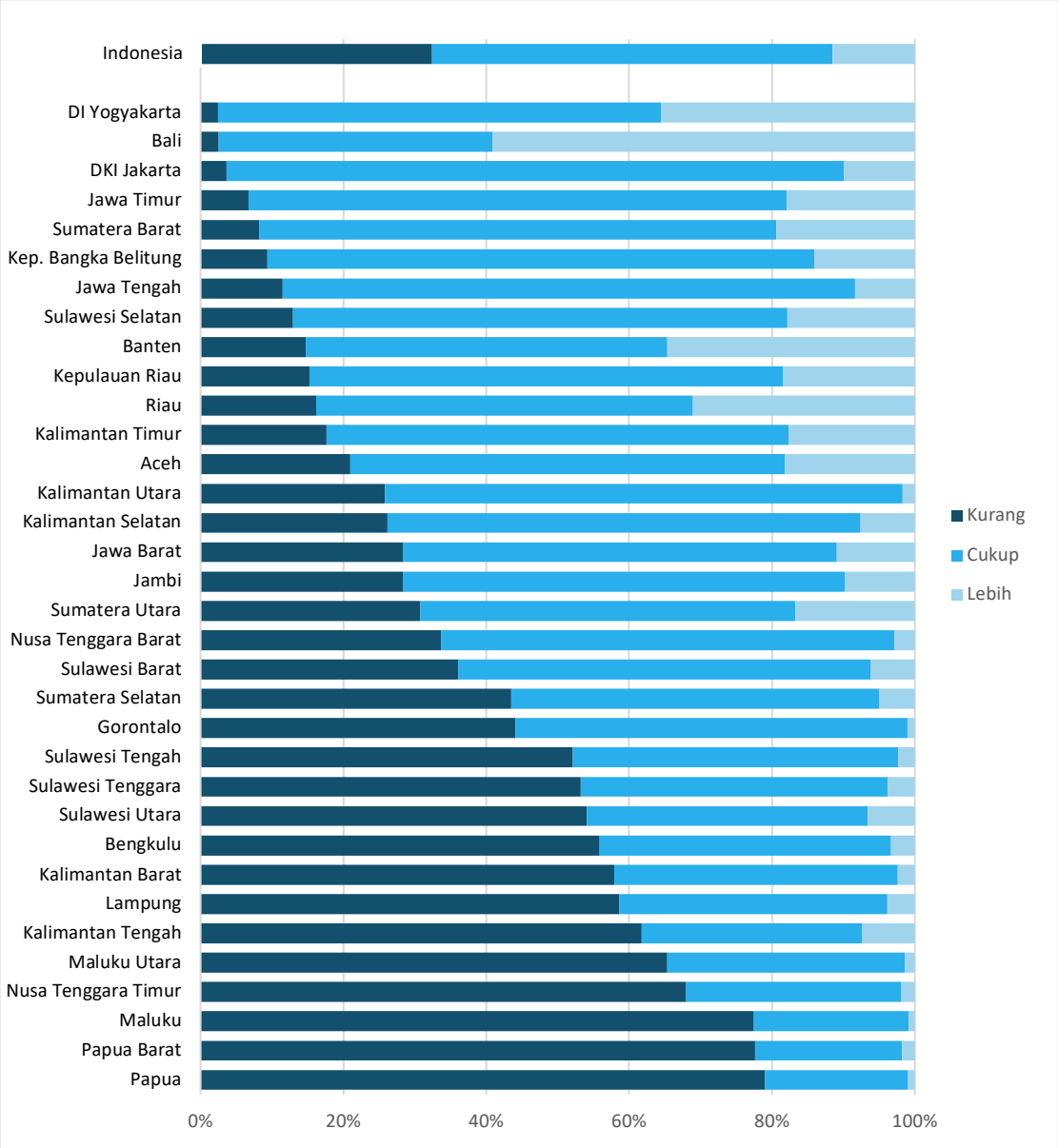
Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Dilihat dari proporsi puskesmas dengan ketersediaan dokter sesuai standar minimal, terdapat enam provinsi yang memiliki persentase puskesmas dengan ketersediaan dokter sesuai standar kurang dari 80% yaitu Papua, Maluku, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Barat. Artinya, keenam provinsi tersebut memiliki persentase puskesmas kekurangan dokter terbanyak. Papua merupakan provinsi tertinggi dengan persentase puskesmas kekurangan dokter sebesar 49,5%, walaupun telah mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 57,4%. Sedangkan, seluruh puskesmas di D.I. Yogyakarta dan Riau memiliki jumlah dokter sesuai standar minimal.

b. Kecukupan Dokter Gigi di Puskesmas

Sesuai peraturan yang sama, standar kecukupan dokter gigi di puskesmas minimal satu orang, baik di puskesmas rawat inap maupun puskesmas non rawat inap, baik di wilayah perkotaan, perdesaan, maupun di kawasan terpencil dan sangat terpencil. Secara nasional, terdapat 32,4% puskesmas kekurangan dokter gigi. Sedangkan puskesmas dengan status jumlah dokter gigi cukup sebanyak 56,0% dan puskesmas dengan jumlah dokter gigi berlebih sebanyak 11,6%.

GAMBAR 3.5
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN DOKTER GIGI DI INDONESIA
TAHUN 2021



Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

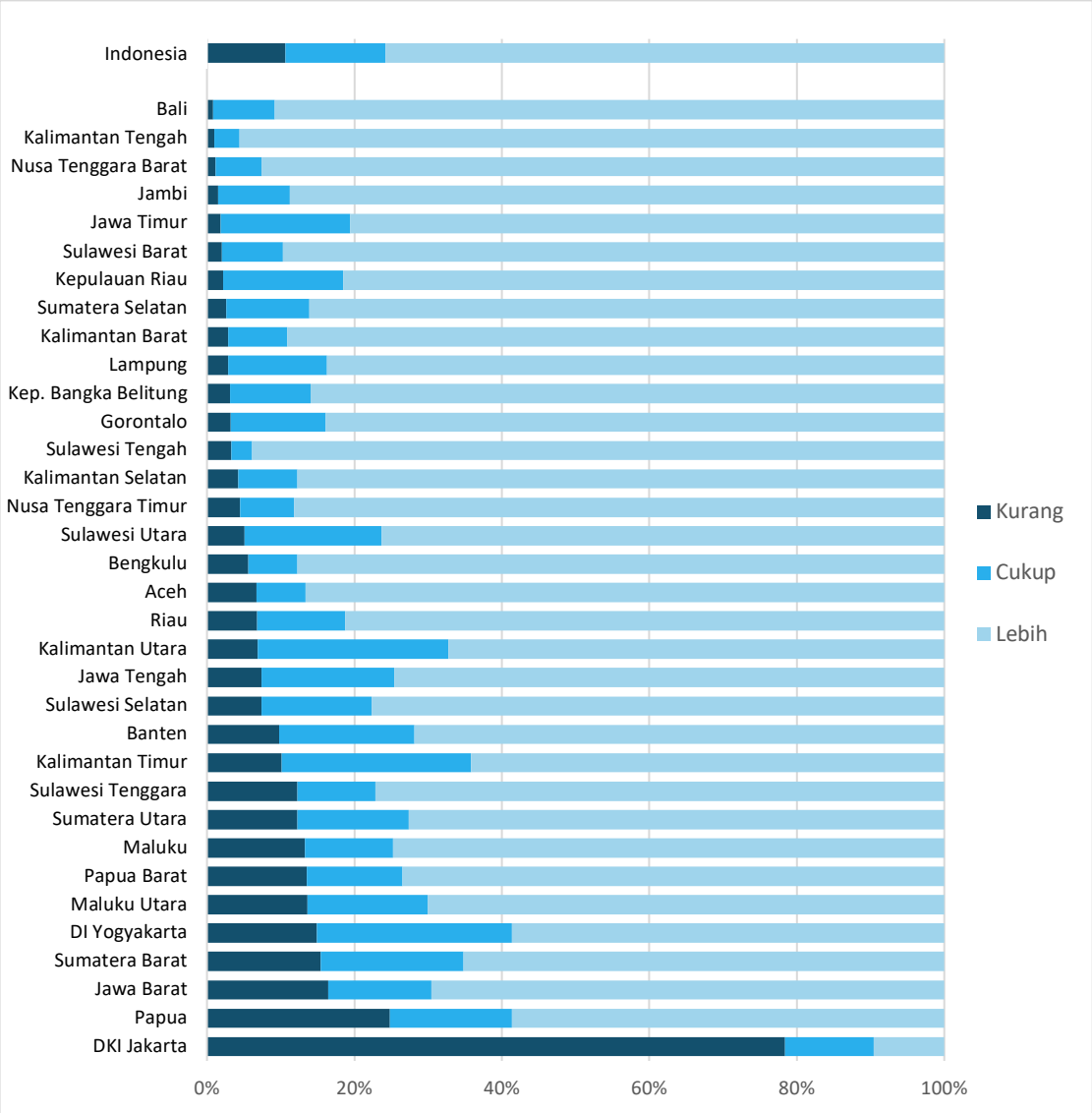
Dibandingkan dengan dokter, kekurangan dokter gigi di puskesmas jauh lebih tinggi. Dari 34 provinsi di Indonesia, lebih dari dua pertiganya (12 provinsi) memiliki persentase

puskesmas kekurangan dokter gigi lebih dari 50%. Provinsi dengan persentase puskesmas tertinggi kekurangan dokter gigi yaitu Papua (79,0%), Papua Barat (77,7%), dan Maluku (77,4%). Sebaliknya, provinsi tertinggi puskesmas yang memiliki dokter gigi sesuai standar minimal yaitu D.I. Yogyakarta, Bali, dan DKI Jakarta.

c. Kecukupan Perawat di Puskesmas

Suatu puskesmas dianggap memiliki perawat yang cukup apabila memiliki minimal lima perawat pada puskesmas non rawat inap dan minimal delapan perawat pada puskesmas rawat inap. Kondisi ini merupakan standar minimal di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil. Secara nasional, terdapat 89,4% puskesmas memiliki jumlah perawat sesuai standar minimal yang ditetapkan. Hanya 10,6% puskesmas yang tidak sesuai standar.

GAMBAR 3.6
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN PERAWAT DI INDONESIA
TAHUN 2021



Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

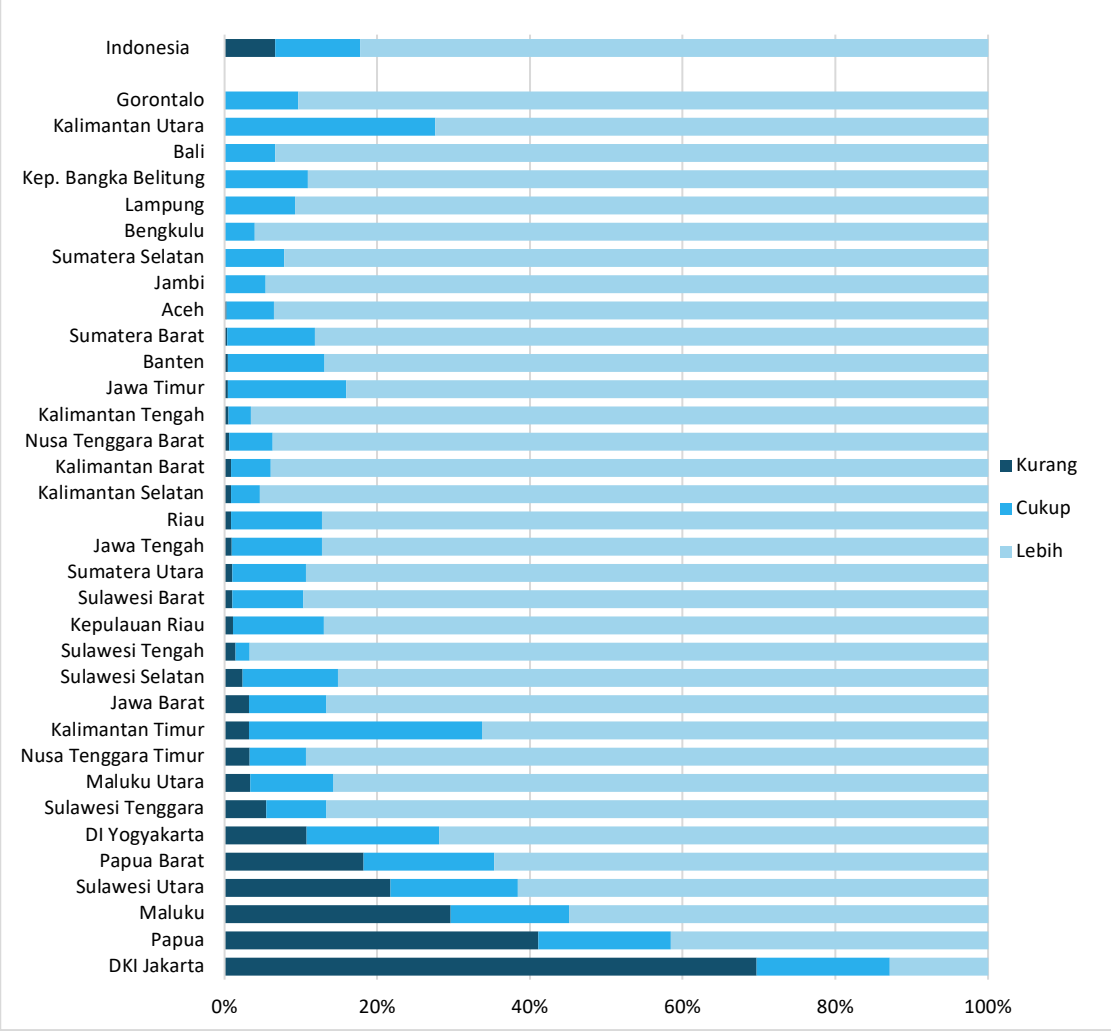
Pada Gambar 3.6 terlihat bahwa sebagian besar provinsi memiliki persentase puskesmas dengan kecukupan perawat sesuai standar, bahkan melebihi kecukupan. Namun, Provinsi DKI Jakarta merupakan persentase puskesmas dengan kekurangan perawat tertinggi (78,4%). Kekurangan ini dapat disebabkan sebagian besar puskesmas di Provinsi DKI Jakarta merupakan "puskesmas kelurahan" yang setara dengan Puskesmas Pembantu (Pustu) di provinsi lain, sehingga puskesmas-puskesmas tersebut kurang memperhatikan kecukupan jumlah tenaga perawat.

Pada tingkat provinsi, selain DKI Jakarta dan Papua, persentase puskesmas memiliki perawat sesuai standar lebih dari 80%. Dengan demikian, sebagian besar puskesmas di Indonesia memiliki distribusi perawat berlebih.

d. Kecukupan Bidan di Puskesmas

Jumlah bidan di puskesmas non rawat inap minimal empat orang dan di puskesmas rawat inap minimal tujuh orang. Kondisi ini berlaku di wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan terpencil dan sangat terpencil.

GAMBAR 3.7
PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KECUKUPAN BIDAN DI INDONESIA
TAHUN 2021



Sumber: Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Pada tahun 2021, sebagian besar provinsi memiliki persentase puskesmas dengan jumlah bidan kurang dari standar minimal di bawah 80%. DKI Jakarta merupakan provinsi tertinggi yang memiliki persentase puskesmas kekurangan bidan yaitu sebesar 69,7% puskesmas. Tingginya kekurangan bidang di DKI Jakarta ini memiliki penjelasan yang sama dengan pembahasan persentase puskesmas kekurangan perawat di DKI Jakarta sebelumnya.

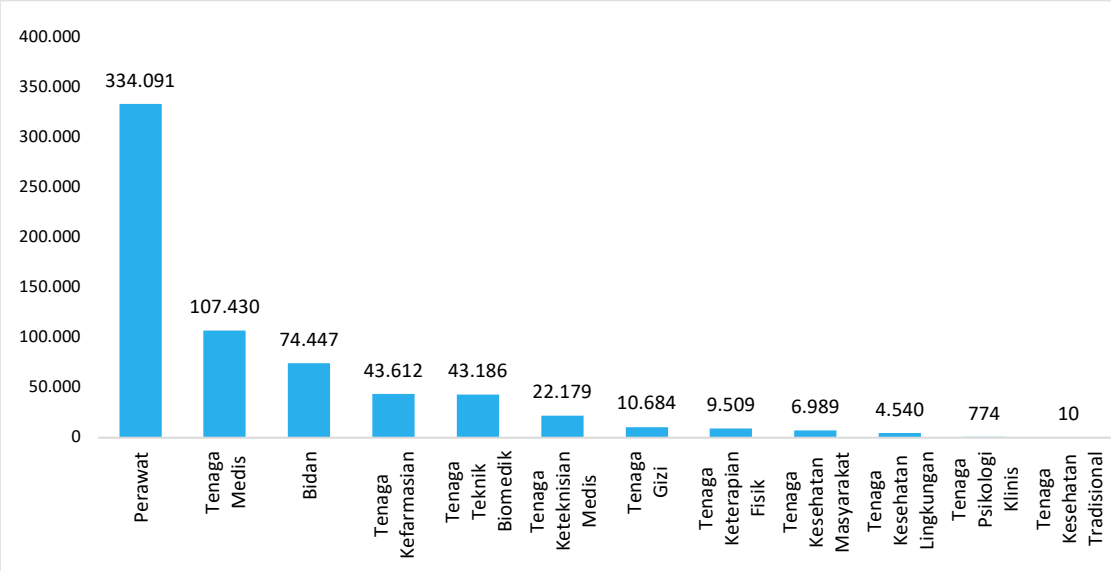
Secara nasional, puskesmas memiliki kecukupan bidan 93,4%. Bahkan sebagian besarnya memiliki perawat lebih dari standar minimal (82,2%). Hanya tiga provinsi yang memiliki persentase puskesmas dengan jumlah bidan tidak sesuai standar.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa salah satu permasalahan distribusi bidan di Indonesia adalah berlebihnya jumlah bidan di sebagian besar puskesmas sementara masih ada puskesmas yang memiliki kekurangan bidan. Rincian lengkap mengenai persentase puskesmas dengan kecukupan bidan dapat dilihat di Lampiran 11.e.

2. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit). SDMK di rumah sakit meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain dan tenaga non kesehatan. Gambar berikut ini menunjukkan distribusi jenis SDMK di rumah sakit tahun 2021.

GAMBAR 3.8
JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2021

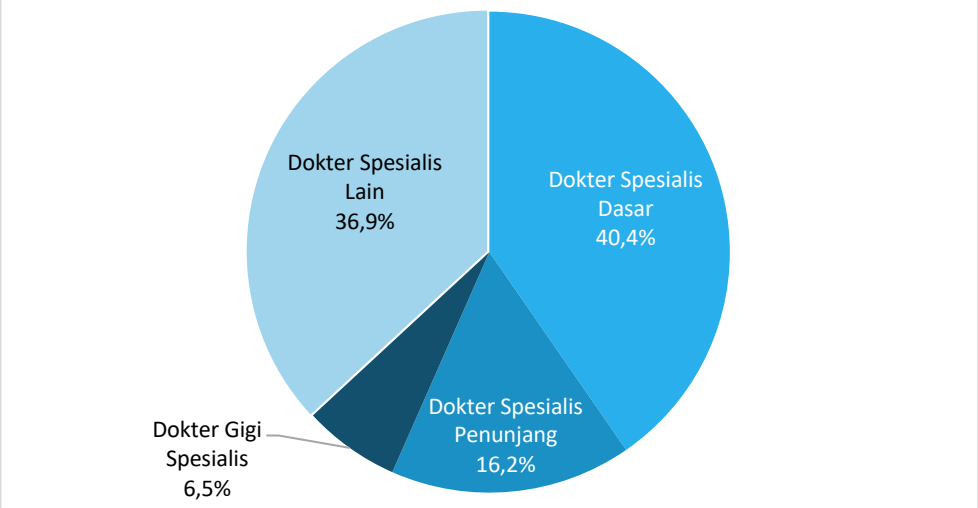


Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Dari seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit, sebanyak 657.451 orang merupakan tenaga kesehatan dan 343.661 orang tenaga penunjang kesehatan. Proporsi tenaga kesehatan terbesar yaitu perawat sebesar 50,8% dan tenaga medis sebesar 16,3%. Sedangkan proporsi tenaga kesehatan terendah yaitu tenaga kesehatan tradisional.

Lampiran 11.d membagi spesialis menjadi 4 kelompok besar yaitu dokter spesialis dasar, dokter spesialis penunjang, dokter gigi spesialis, dan spesialis lain. Dokter spesialis dasar terdiri dari spesialis penyakit dalam, spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis anak, dan spesialis bedah. Sementara spesialis penunjang terdiri dari spesialis radiologi, spesialis anastesi, spesialis patologi klinik, spesialis patologi anatomi, dan spesialis rehabilitasi medik.

GAMBAR 3.9
PROPORSI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Pada tahun 2021, jumlah dokter spesialis di rumah sakit di Indonesia sebanyak 43.558 orang, jumlah ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 44.158 orang. Proporsi terbesar yaitu dokter spesialis dasar (40,4%) dan proporsi terkecil yaitu dokter gigi spesialis (6,5%). Sedangkan menurut jenis spesialisasinya, dokter spesialis terbanyak yaitu dokter spesialis penyakit dalam (12,0%).

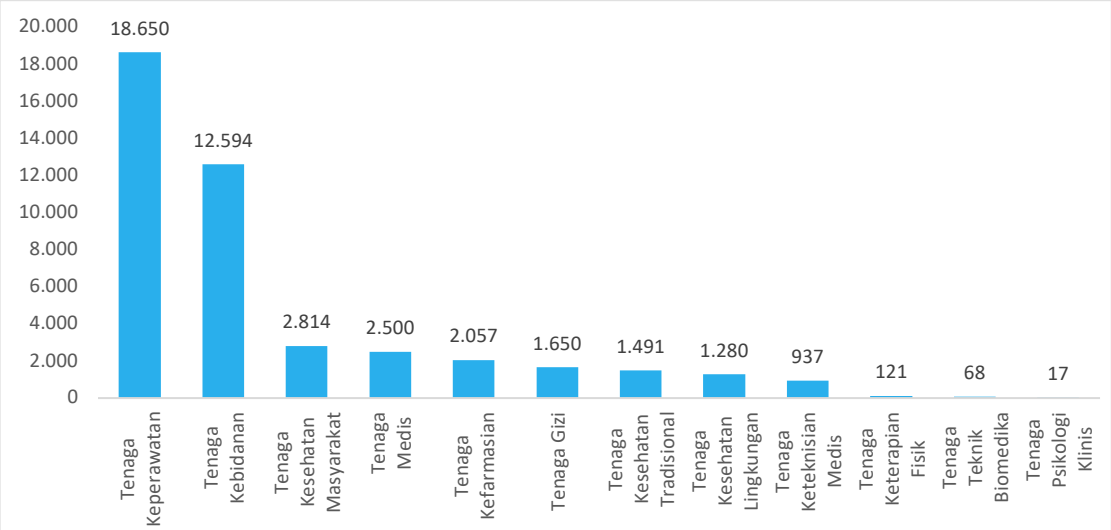
Provinsi dengan jumlah dokter spesialis terbanyak yaitu DKI Jakarta (6.644 orang), Jawa Barat (6.476 orang), dan Jawa Timur (5.991 orang). Sedangkan provinsi dengan jumlah dokter spesialis paling sedikit yaitu Sulawesi Barat (122 orang) dan Papua Barat (131 orang).

3. Tenaga Kesehatan di Daerah Tertinggal

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 pemerintah pusat telah menetapkan daerah tertinggal sebagai sasaran utama pembangunan. Hal itu dilakukan sebagai upaya percepatan pembangunan daerah. Suatu daerah ditetapkan sebagai Daerah Tertinggal berdasarkan kriteria: perekonomian masyarakat; sumber daya manusia; sarana dan prasarana; kemampuan keuangan daerah; aksesibilitas; dan karakteristik daerah.

Daerah tertinggal meliputi 62 kabupaten/kota yang berada di sebelas provinsi. Pemenuhan SDMK di Daerah Tertinggal tidak hanya membutuhkan peran pusat tetapi juga peran dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota dengan menganalisis kebutuhan wilayahnya dan mengajukannya kepada pemerintah pusat.

GAMBAR 3.10
DISTRIBUSI JUMLAH TENAGA KESEHATAN
DI DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2021

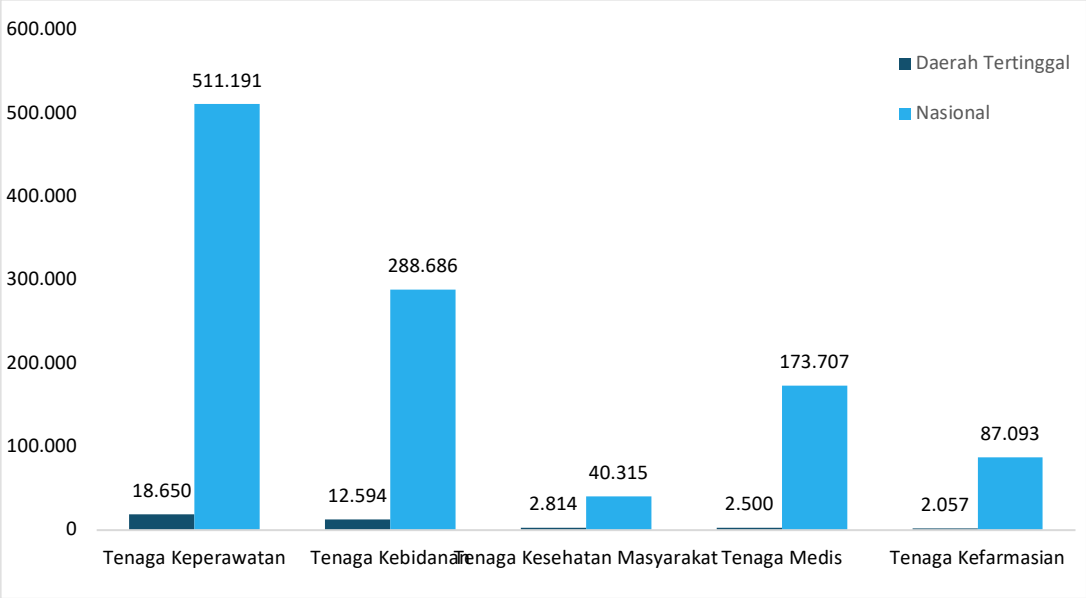


Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Distribusi tenaga kesehatan tertinggi pada daerah tertinggal yaitu tenaga keperawatan sebesar 42,2% dan tenaga kebidanan sebesar 28,5%. Sedangkan terendah yaitu tenaga psikologi klinis, tenaga teknik biomedik, dan tenaga keterapian fisik.

Gambar berikut ini memperihatkan perbandingan jumlah tenaga kesehatan di daerah tertinggal terhadap jumlah nasional.

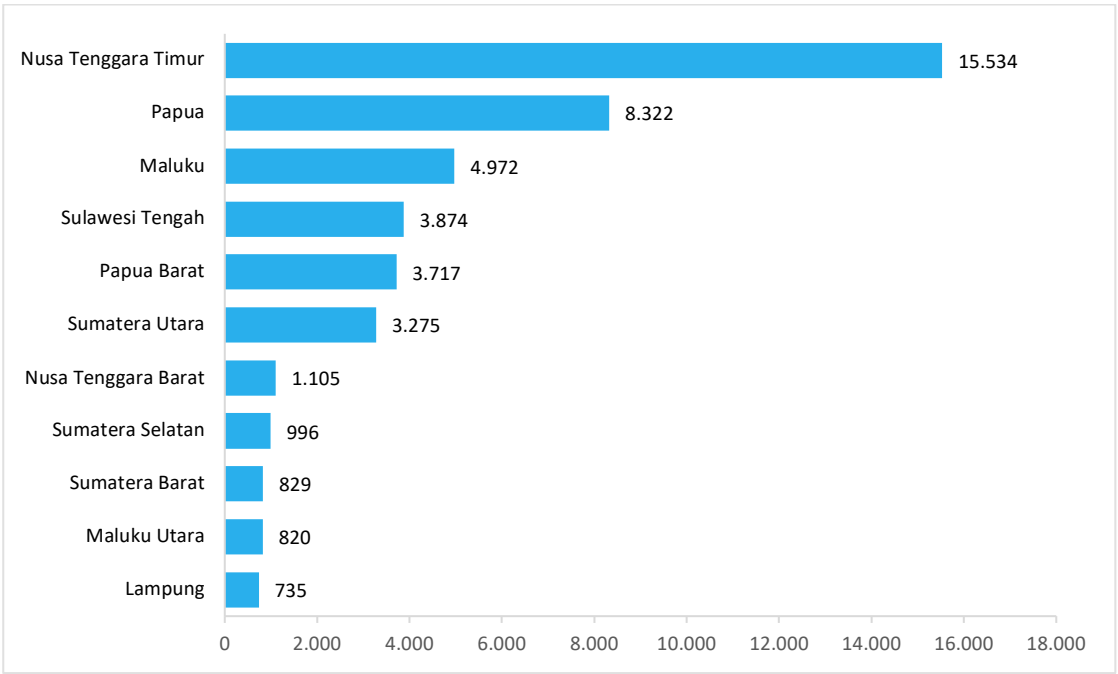
GAMBAR 3.11
PERBANDINGAN JUMLAH BEBERAPA TENAGA KESEHATAN
DI DAERAH TERTINGGAL TERHADAP JUMLAH NASIONAL TAHUN 2021



Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Proporsi kabupaten dengan kategori Daerah Tertinggal sebesar 12,1% dari total kabupaten/kota. Sebaran SDMK di Daerah Tertinggal tersebut sebesar 3,9% (44.179) terhadap total SDMK secara nasional. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebanyak 31.374 orang.

GAMBAR 3.12
SEBARAN JUMLAH SDMK DAERAH TERTINGGAL
DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber : Sumber: SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

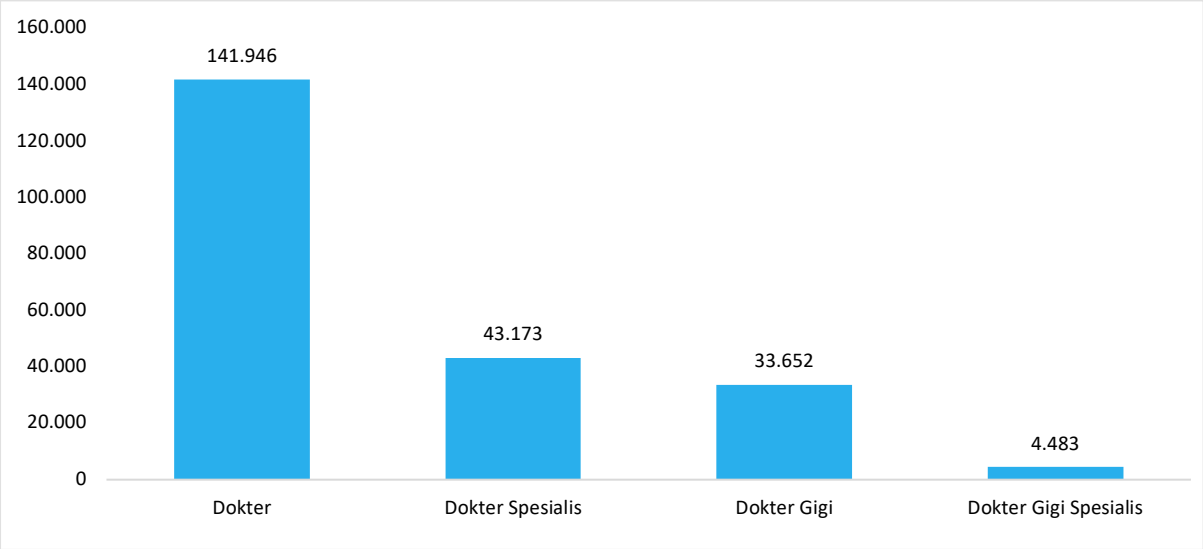
Provinsi dengan jumlah SDMK di Daerah Tertinggal terbanyak yaitu Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 15.534 orang yang tersebar di 13 jumlah kabupaten. Rincian lengkap mengenai jumlah SDMK di Daerah Tertinggal tahun 2021 dapat dilihat di Lampiran 11.f.

B. REGISTRASI TENAGA KESEHATAN

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan pada Pasal 44 mengatur setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang berlaku selama lima tahun dan dapat diregistrasi ulang. STR diterbitkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan setelah tenaga kesehatan yang mengajukan dianggap telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Registrasi dokter dan dokter gigi dikelola oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI). Hal ini sesuai dengan Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi. Registrasi ini bertujuan agar KKI memiliki pencatatan resmi terhadap dokter dan dokter gigi yang telah memiliki STR dokter/dokter gigi serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter, dan dokter gigi.

GAMBAR 3.13
JUMLAH TENAGA MEDIS YANG MEMILIKI STR
PER 31 DESEMBER 2021



Sumber: Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, 2022

Sampai dengan 31 Desember 2021 jumlah tenaga medis yang memiliki STR aktif sebanyak 223.254 orang. Jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 233.064 orang. Tenaga dokter merupakan tenaga medis yang paling banyak memiliki STR, yaitu sejumlah 141.946 orang. Sedangkan yang terendah yaitu dokter gigi spesialis sebanyak 4.483 orang. Rincian lengkap mengenai jumlah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang memiliki STR dapat dilihat di Lampiran 11.g.

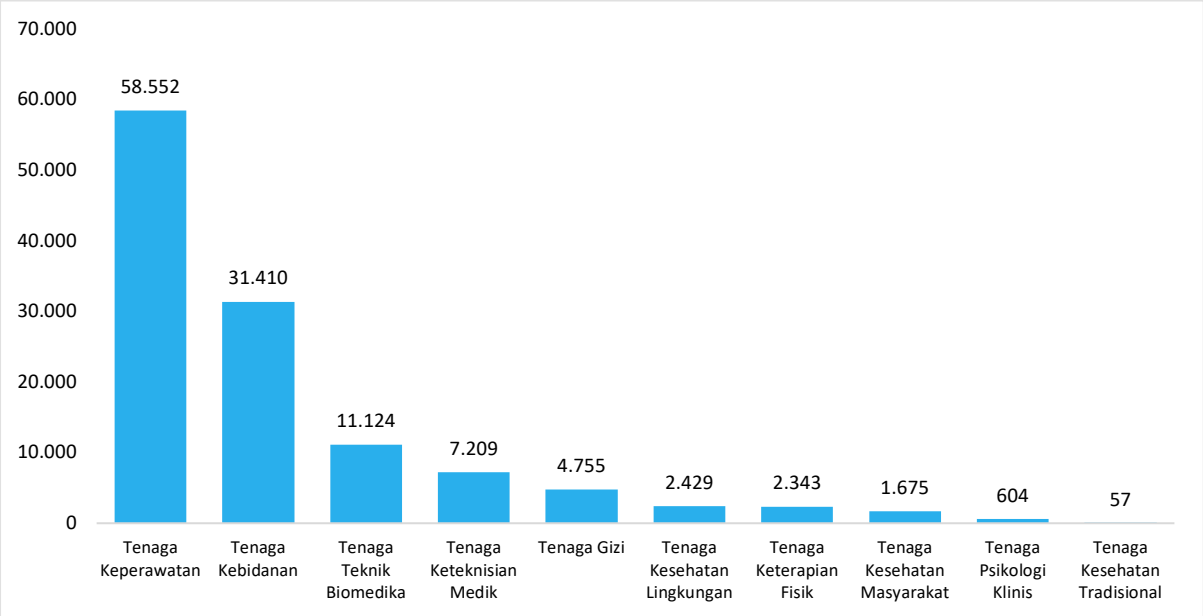
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 pasal 2 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan mengatur kewenangan lembaga Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) untuk

mengelola registrasi tenaga kesehatan selain tenaga dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis. Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki izin dari pemerintah. Untuk memperoleh izin dari pemerintah diperlukan STR yang diterbitkan oleh KTKI dan berlaku secara nasional selama lima tahun. Tenaga Kesehatan harus melakukan registrasi ulang (re-registrasi) setelah memenuhi syarat setelah lima tahun dari registrasi sebelumnya. Terdapat 27 jenis profesi kesehatan yang dapat diterbitkan STR.

Penerbitan STR terdiri dari pengajuan baru dan registrasi ulang bagi pemilik STR yang masa berlakunya telah habis. STR baru yang diterbitkan pada tahun 2021 sebanyak 120.158 surat. Jumlah penerbitan STR baru ini mengalami kenaikan 40% dibandingkan tahun 2020 (72.143 surat). Kenaikan ini dapat disebabkan adanya kebijakan pengangkatan dan penempatan tenaga relawan bidang kesehatan untuk penanganan pandemi covid-19 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/Menkes/4765/2021. Salah satu syarat menjadi relawan tersebut yaitu kepemilikan STR.

Proporsi terbanyak STR yang diterbitkan pada tahun 2021 yaitu tenaga keperawatan (48,7%) dan tenaga kebidanan (26,1%).

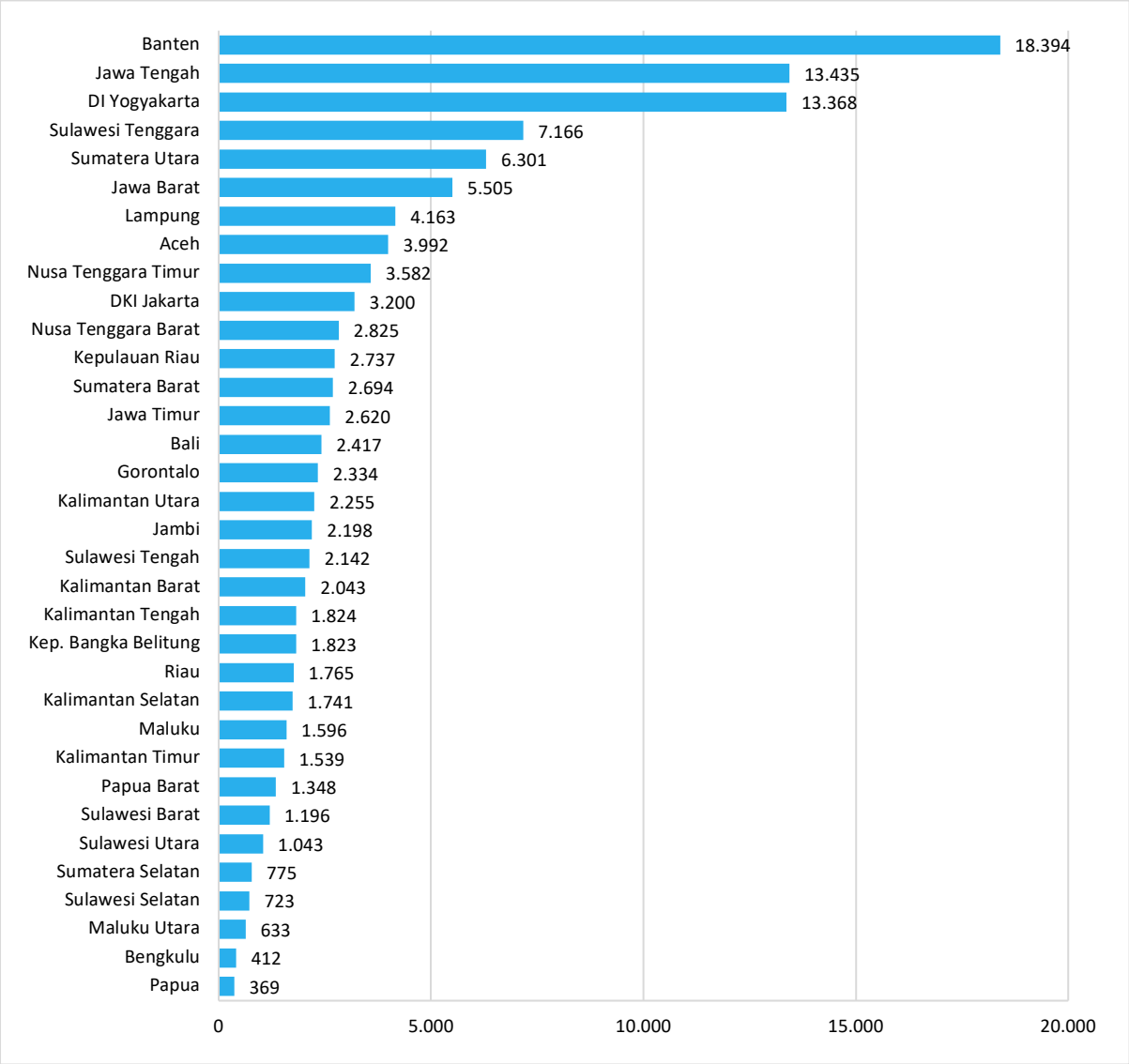
GAMBAR 3.14
JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2021



Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2022

Berdasarkan distribusi penerbitan STR tenaga kesehatan berdasarkan wilayah, sama seperti tahun sebelumnya, provinsi dengan tenaga kesehatan terbanyak yang melakukan registrasi baru yaitu Banten (18.394), Jawa Tengah (13.435), dan DI Yogyakarta (13.368) orang. Secara umum provinsi-provinsi tersebut memiliki lulusan tenaga kesehatan terbanyak, oleh karena itu jumlah tenaga kesehatan yang melakukan registrasi baru juga relatif lebih banyak dibandingkan provinsi lainnya.

GAMBAR 3.15
JUMLAH PENERBITAN STR BARU MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

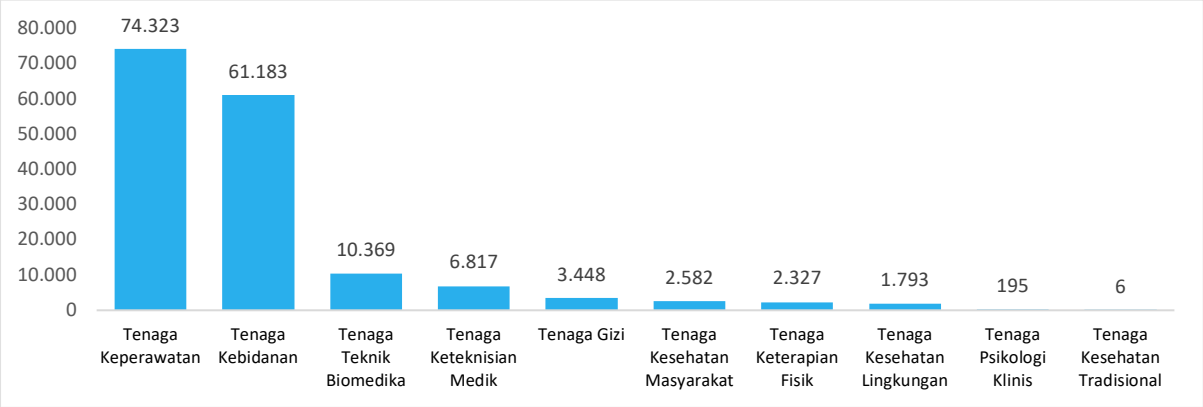


Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2022

Registrasi ulang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan surat tanda registrasi yang telah habis masa berlaku. Jumlah tenaga kesehatan yang melakukan registrasi ulang tahun 2021 sebanyak 163.043, meningkat jika dibandingakan dengan tahun 2020 yang sebanyak 141.406 orang.

Dibandingkan tenaga kesehatan yang lain, jumlah tenaga keperawatan dan kebidanan yang melakukan registrasi ulang merupakan yang tertinggi yaitu tenaga keperawatan sebesar 45,6% dan tenaga kebidanan sebesar 37,5%. Sedangkan tenaga kesehatan terendah yang melakukan registrasi ulang yaitu tenaga kesehatan tradisional sebesar 0,0%.

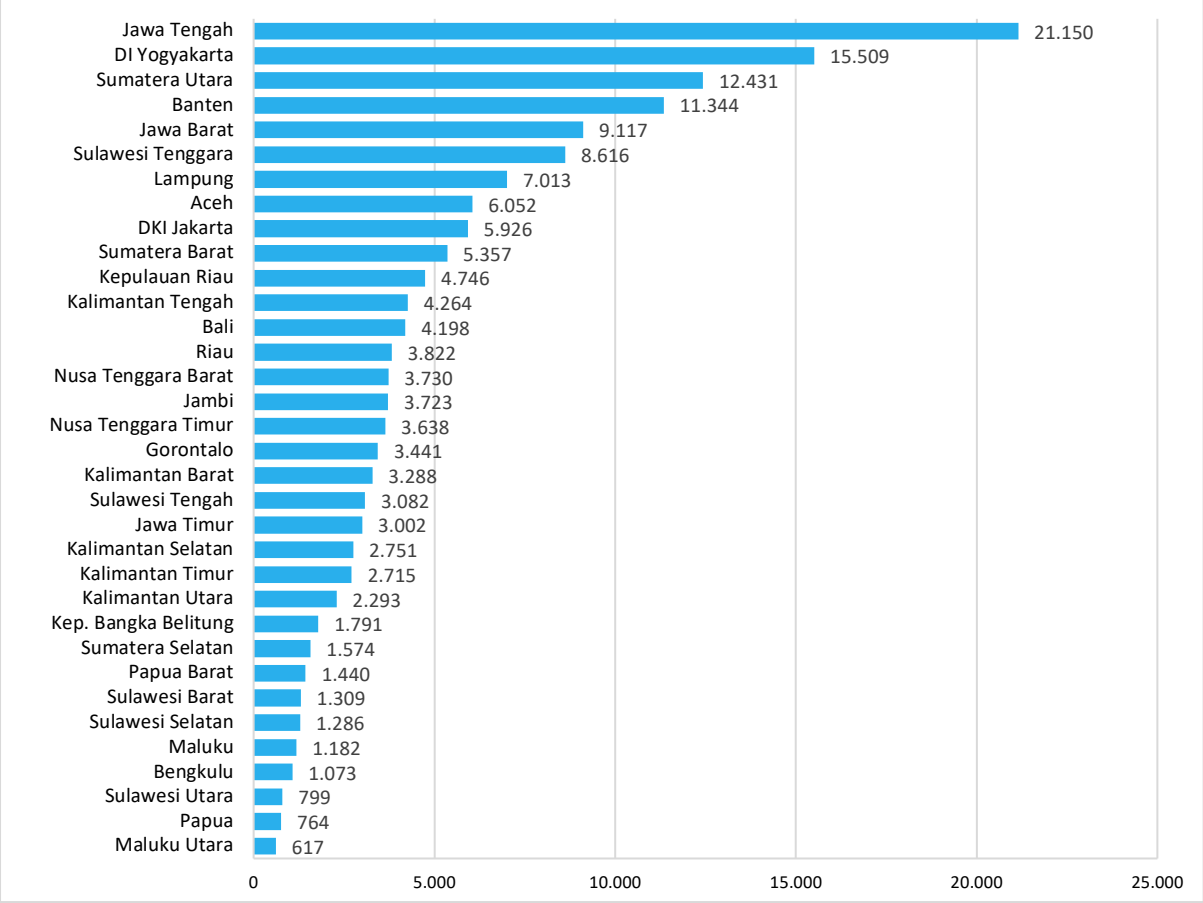
GAMBAR 3.16
JUMLAH PENERBITAN STR ULANG MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2021



Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2022

Berdasarkan wilayah, provinsi dengan tenaga kesehatan terbanyak yang melakukan registrasi ulang yaitu Jawa Tengah sebanyak 21.150 orang dan DI Yogyakarta sebanyak 15.509 orang. Provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang merupakan provinsi dengan jumlah tenaga kesehatan terbanyak yang melakukan registrasi baru maupun registrasi ulang. Rincian lengkap mengenai jumlah penerbitan STR baru dan STR ulang tenaga kesehatan dapat dilihat di Lampiran 12.b dan 12.c.

GAMBAR 3.17
JUMLAH PENERBITAN STR ULANG MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes RI, 2022

C. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN

1. Tenaga Kesehatan dengan Status Pegawai Tidak Tetap

Pengangkatan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dalam jangka waktu tertentu bertujuan untuk mendukung tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013). Pengangkatan dan penempatan dokter dan bidan sebagai PTT dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Kesehatan melalui Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan, dan dapat dilaksanakan pula oleh pemerintah daerah, dalam hal ini gubernur dan bupati/walikota.

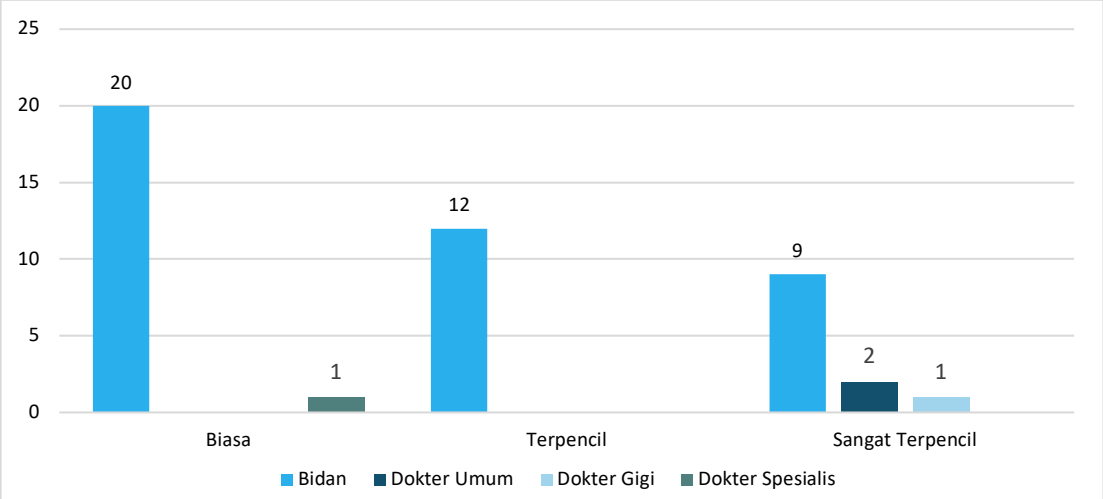
Pengangkatan dan penempatan PTT dilakukan untuk tenaga dokter dan bidan. Tenaga dokter yang dimaksud adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan dokter PTT dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, daerah bermasalah kesehatan, daerah rawan konflik; rumah sakit provinsi sebagai dokter brigade siaga bencana; dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) pada wilayah terpencil dan sangat terpencil. Masa penugasan dokter PTT adalah satu tahun untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; dua tahun untuk dokter atau dokter gigi yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria terpencil dan sangat terpencil; dan tiga tahun untuk dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang ditugaskan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan kriteria biasa. Dokter PTT dapat diangkat kembali atau diperpanjang paling banyak untuk satu kali masa penugasan.

Penempatan bidan PTT hanya dapat dilakukan untuk ditempatkan sebagai bidan di desa dengan kriteria biasa, terpencil, atau sangat terpencil. Bidan PTT ditugaskan selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali atau diperpanjang paling banyak dua kali masa penugasan.

Sesuai dengan kebijakan Menteri Kesehatan dalam surat edaran nomor KP.01.02/Menkes/203/2016 tanggal 8 April 2016 tentang Pengangkatan Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT, tidak ada lagi pengangkatan baru tenaga kesehatan dengan status PTT Kementerian Kesehatan sejak tahun 2016. Hal ini disebabkan kebutuhan tenaga kesehatan di daerah tidak hanya jenis tenaga kesehatan dokter, dokter gigi, atau bidan, tetapi juga jenis tenaga kesehatan yang mendukung upaya promotif dan preventif. Sebagai upaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan tersebut, Kementerian Kesehatan melakukan terobosan dengan program Nusantara Sehat berbasis tim dan individu yang diselenggarakan mulai tahun 2015.

Jumlah tenaga kesehatan yang masih bertugas PTT Kementerian Kesehatan per 31 Desember 2021 berjumlah 45 orang dengan rincian 41 orang bidan, 2 orang dokter umum, 1 orang dokter gigi, dan 1 orang dokter spesialis. Sementara itu, berdasarkan kriteria wilayah, terdapat 21 orang tenaga kesehatan di wilayah biasa, 12 orang di wilayah terpencil, dan 12 orang di wilayah sangat terpencil.

GAMBAR 3.18
JUMLAH TENAGA KESEHATAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP AKTIF KEMENTERIAN KESEHATAN MENURUT KRITERIA WILAYAH DI INDONESIA PER 31 DESEMBER 2021



Sumber: Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Kemenkes RI, 2022

2. Tenaga Kesehatan dengan Status Penugasan Khusus

a. Penugasan Khusus Tenaga Residen

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan, Penugasan khusus merupakan pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK), Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK), serta rumah sakit kelas C dan rumah sakit kelas D di kabupaten yang memerlukan pelayanan medik spesialistik. Jenis tenaga kesehatan yang diangkat dalam penugasan khusus adalah residen.

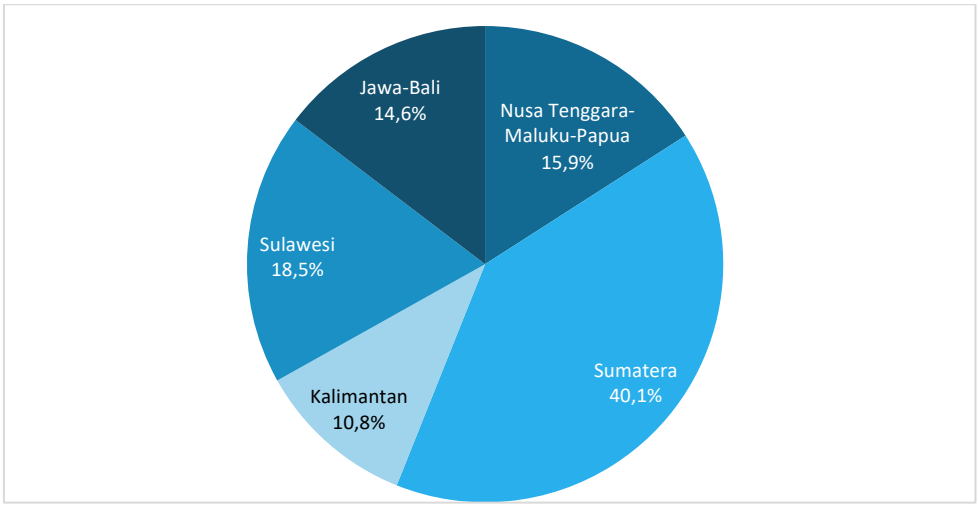
Residen adalah dokter/dokter gigi yang sedang menempuh pendidikan dokter spesialis/dokter gigi spesialis. Residen dalam penugasan khusus terdiri dari residen senior (pembiayaan pendidikan secara mandiri) dan residen pasca jenjang I (pembiayaan pendidikan dari Kementerian Kesehatan). Residen senior ditugaskan antara tiga sampai dengan enam bulan, sedangkan residen pasca jenjang I ditugaskan selama enam bulan.

Pada tahun 2021, jumlah dokter spesialis dalam penugasan khusus sebagai residen di Indonesia adalah 157 orang. Tren jumlah penugasan khusus residen selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan yaitu 339 orang pada tahun 2019 menjadi 129 di tahun 2020 dan mengalami kenaikan sedikit di tahun 2021 menjadi 157 orang. Hal ini disebabkan oleh sebagian lokus penugasan residen sudah terisi oleh tenaga dokter spesialis dari program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS). Program penugasan khusus residen masih berlanjut hingga tahun 2024.

Proporsi penugasan khusus residen dokter spesialis terbesar pada tahun 2021 adalah regional Sumatera sebesar 40,1%, diikuti oleh regional Nusa Tenggara-Maluku-Papua sebesar 15,9%, dan Kalimantan sebesar 10,8%. Residen dokter spesialis terbanyak terdapat di Provinsi

Sumatera Utara (32 orang). Sebanyak 7 provinsi tidak terdapat residen dokter spesialis pada tahun 2021. Rincian lengkap mengenai jumlah peserta penugasan khusus residen dokter spesialis dapat dilihat di Lampiran 11.h.

GAMBAR 3.19
PROPORSI RESIDEN DOKTER SPESIALIS BERDASARKAN REGIONAL WILAYAH PADA TAHUN 2021



Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

b. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Nusantara Sehat

Pada tahun 2015, Kementerian Kesehatan meluncurkan program penugasan khusus tenaga kesehatan Nusantara Sehat. Penugasan khusus ini meliputi penugasan khusus tenaga kesehatan berbasis tim (*team based*) dan individu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, fungsi program Nusantara Sehat adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, program penugasan khusus ini dilaksanakan untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan, menangani masalah kesehatan sesuai dengan kebutuhan daerah, meningkatkan retensi tenaga kesehatan yang bertugas, memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, menggerakkan pemberdayaan masyarakat, mewujudkan pelayanan kesehatan terintegrasi, serta meningkatkan dan melakukan pemerataan pelayanan kesehatan.

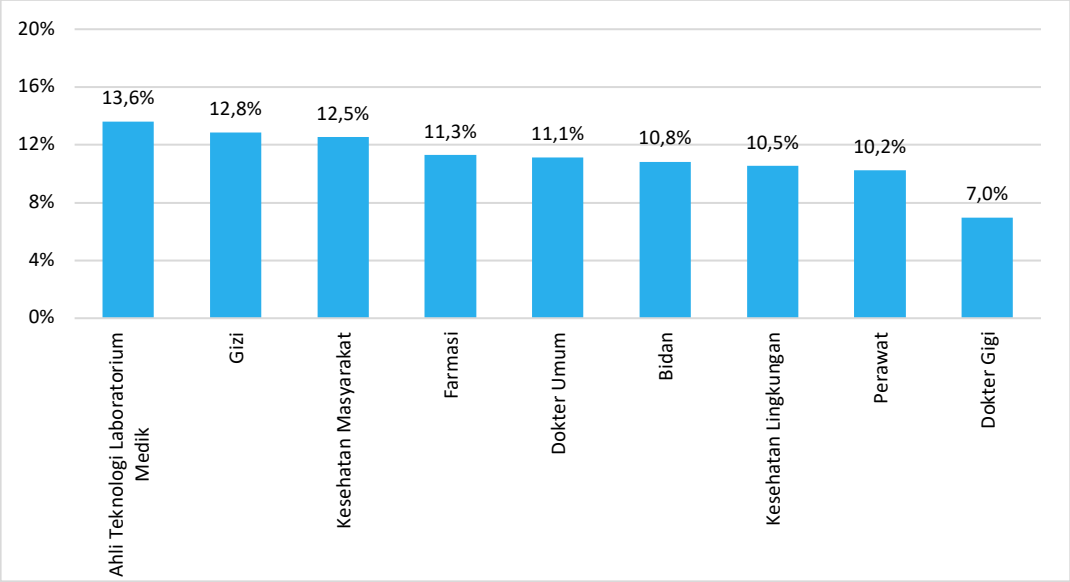
1. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Tim (Nusantara Sehat Tim)

Penugasan Tenaga kesehatan Nusantara Sehat berbasis tim (tim NS) akan ditempatkan di puskesmas daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan masa tugas selama 2 tahun. Tim NS minimal terdiri dari lima jenis tenaga kesehatan dari sembilan jenis tenaga di puskesmas, yaitu dokter, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi laboratorium medik, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat.

Penempatan Nusantara Sehat berbasis tim sampai dengan tahun 2021 telah dilaksanakan sebanyak 16 batch. Batch I-II dilaksanakan pada tahun 2015, dengan penempatan di 120 puskesmas. Batch III-V dilaksanakan pada tahun 2016, dengan penempatan di 131 puskesmas. Batch VI-VIII dilaksanakan pada tahun 2017 dengan penempatan di 188 puskesmas. Batch IX-XI dilaksanakan pada tahun 2018 dengan penempatan di 156 puskesmas. Batch XII-XIV dilaksanakan pada tahun 2019 dengan penempatan di 173 puskesmas. Batch XV-XVI dilaksanakan tahun 2020 dengan penempatan tim NS yang masih aktif pada 32 puskesmas, 22 kabupaten/kota, dan 11 provinsi. Batch XVII-XIX dilaksanakan di tahun 2021 dengan penempatan di 104 puskesmas, 52 kabupaten/kota, dan 17 provinsi. Rincian lengkap mengenai penempatan Tim Nusantara Sehat dapat dilihat di Lampiran 11.i.

Jenis tenaga kesehatan yang paling banyak ditempatkan di tahun 2021 adalah Ahli Teknologi Laboratorium Medik yaitu sebanyak 88 orang (13,6%), sedangkan jenis tenaga yang paling sedikit adalah dokter gigi sebanyak 45 orang (7%). Provinsi dengan penempatan tim NS terbanyak adalah Papua Barat (142 orang), sedangkan provinsi dengan penempatan paling sedikit adalah Kalimantan Barat (6 orang). Sebanyak 12 provinsi tidak mendapatkan penempatan tim NS pada tahun 2021. Rincian lengkap mengenai jumlah penempatan tenaga kesehatan pada Tim Nusantara Sehat dapat dilihat di Lampiran 11.j.

GAMBAR 3.20
PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA TIM NUSANTARA SEHAT
TAHUN 2021



Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

2. Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Berbasis Individu (Nusantara Sehat Individu)

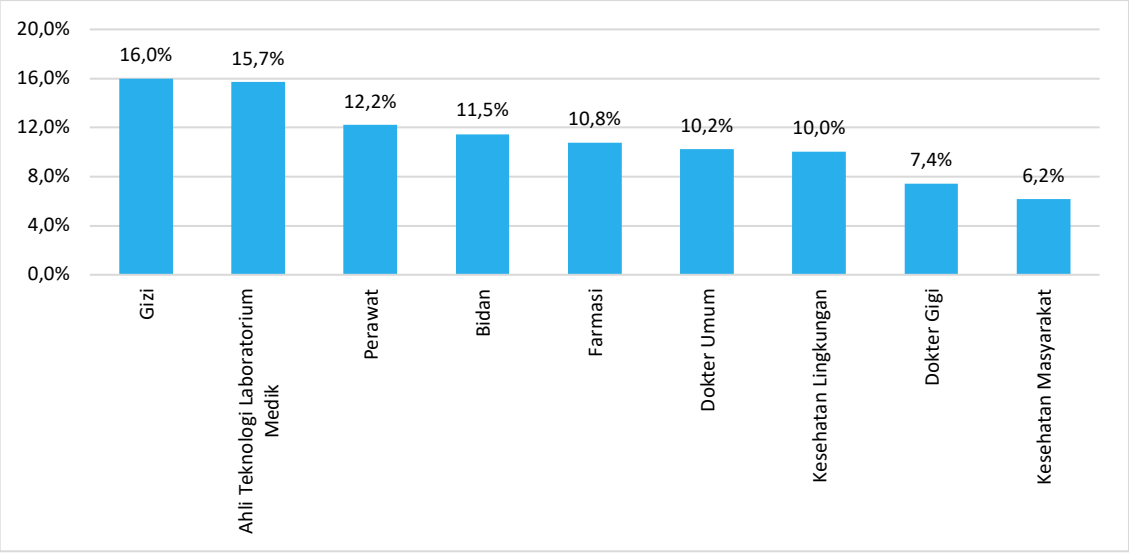
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat, Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Individual dilakukan secara perorangan yang terdiri atas dokter, dokter gigi, perawat, bidan, ahli teknologi laboratorium medik, terapis gigi dan mulut, dan jenis tenaga

kesehatan yang masuk dalam kelompok tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga kefarmasian, dan tenaga kesehatan masyarakat. NS Individu akan ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan maupun daerah lain untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat selama 2 tahun dengan evaluasi pada 1 tahun pertama penugasan.

Penempatan NS Individu sampai dengan tahun 2021 sudah dilakukan sebanyak 36 periode, dengan penempatan di 514 kabupaten/kota pada 34 provinsi. Rincian lengkap mengenai penempatan Nusantara Sehat Individu dapat dilihat di Lampiran 11.k.

Jenis tenaga kesehatan yang paling banyak ditempatkan pada tahun 2021 adalah tenaga gizi yaitu sebanyak 568 orang (16%), diikuti oleh tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebanyak 558 orang (15,7%), sedangkan jenis tenaga kesehatan yang paling sedikit adalah tenaga Kesehatan masyarakat 219 orang (6,2%). Tenaga psikologi klinis dan elektromedik tidak ada di tahun 2021. Provinsi dengan penempatan NS individu terbanyak pada tahun 2021 adalah Sulawesi Tenggara yaitu 365 orang, sedangkan provinsi dengan penempatan NS individu paling sedikit adalah Banten yaitu sebanyak 4 orang. Provinsi DKI Jakarta tidak mendapatkan penempatan NS individu pada tahun 2021. Rincian lengkap mengenai jumlah penempatan tenaga kesehatan pada NS individu dapat dilihat di Lampiran 11.l.

GAMBAR 3.21
PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA NUSANTARA SEHAT INDIVIDU
TAHUN 2021



Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

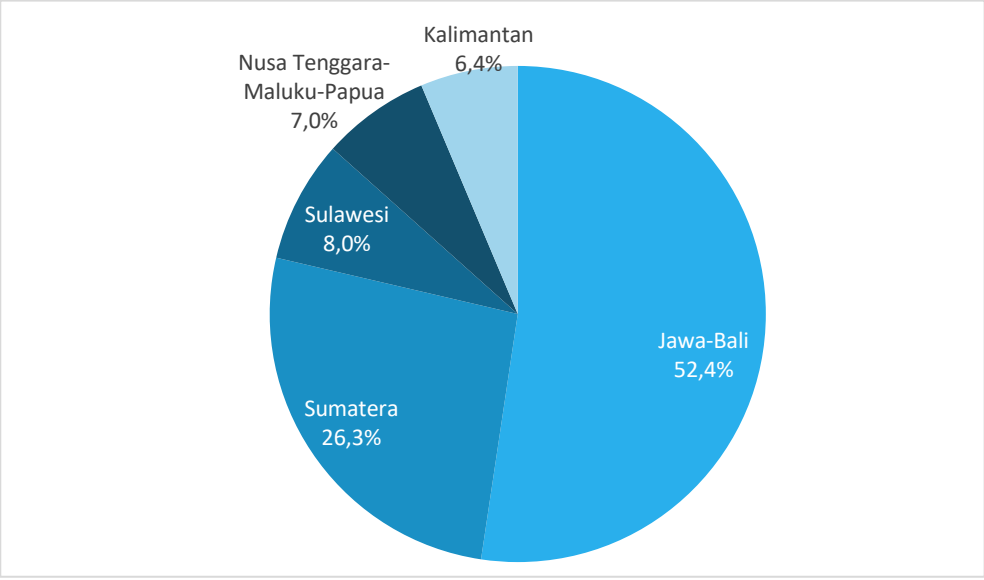
Pemerintah daerah dapat memberdayakan tenaga kesehatan pasca Nusantara Sehat berdasarkan kompetensi, standar ketenagaan, dan kebutuhan daerah sehingga tercapai kemandirian pemenuhan tenaga kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Program Internsip Dokter

Program internsip adalah proses pemantapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2017). Program internsip wajib diikuti oleh dokter yang baru lulus program studi pendidikan dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan/atau mengikuti pendidikan dokter spesialis. Dokter peserta program internsip harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) untuk kewenangan internsip yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) dan Surat Izin Praktek (SIP) Internsip yang dikeluarkan oleh kepala dinas kabupaten/kota. STR untuk kewenangan internsip dan SIP internsip hanya berlaku selama menjalani internsip. Dokter peserta program internsip ikatan dinas ditempatkan selama satu tahun dan wajib melaksanakan tugas pasca internsip di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk Kementerian Kesehatan.

Pemberangkatan dokter peserta internsip dilakukan sebanyak enam kali dalam satu tahun. Jumlah dokter peserta internsip yang diberangkatkan pada bulan Februari 2021 sebanyak 2.937 orang, bulan Mei sebanyak 2.512 orang, bulan Juli untuk Angkatan Khusus Tahap I dan II sebanyak 403 orang, bulan Agustus sebanyak 1.607 orang, dan bulan November sebanyak 3.307 orang. Secara regional, proporsi terbesar dokter peserta internsip yaitu regional Jawa-Bali (5.638 orang) dengan jumlah dokter peserta internsip terbanyak adalah Jawa Barat (1.256 orang). Provinsi dengan jumlah dokter peserta internship paling sedikit adalah Kalimantan Utara yaitu 19 orang. Rincian lengkap mengenai jumlah dokter peserta internsip tahun 2021 dapat dilihat di Lampiran 11.m.

GAMBAR 3.22
PROPORSI DOKTER PESERTA INTERNSIP TAHUN 2021



Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

4. Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS)

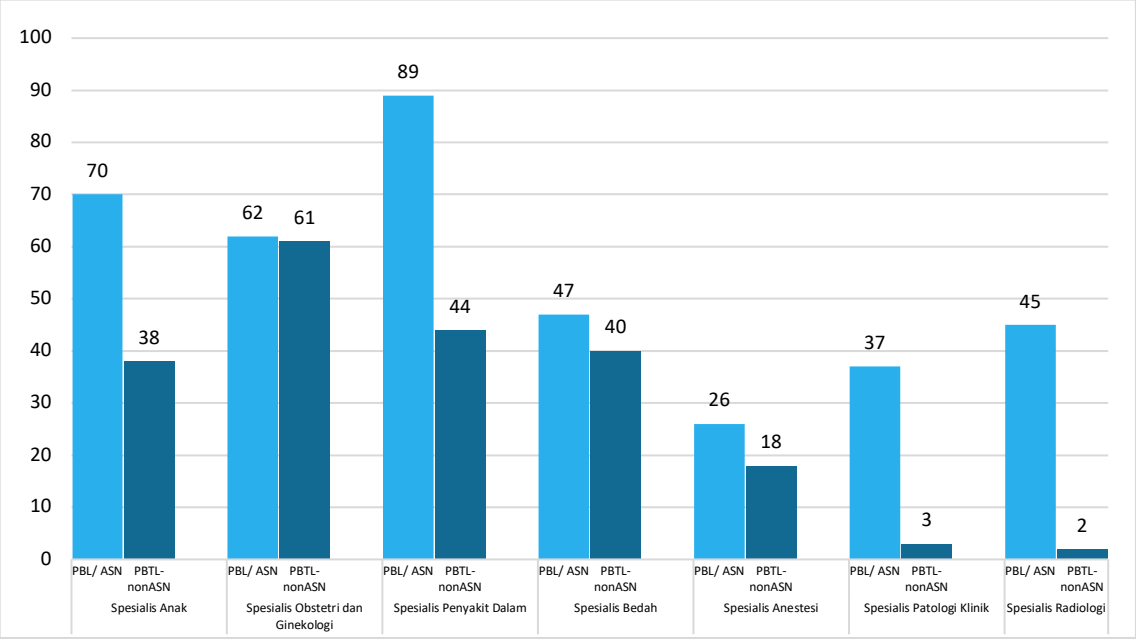
Pendayagunaan dokter spesialis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pelayanan kesehatan spesialistik, pemerataan pelayanan Kesehatan spesialistik, peningkatan mutu pelayanan kesehatan di daerah, dan mendukung pelaksanaan pendekatan keluarga pada pelayanan Kesehatan tingkat rujukan. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden RI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis, maka Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Wajib Kerja Dokter Spesialis dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Peraturan tersebut juga mencantumkan bahwa Peserta PGDS menerima bantuan biaya pendidikan.

Pada tahun 2021, sebanyak 582 dokter spesialis ditempatkan di RS milik pemerintah di 34 provinsi, termasuk juga RS milik institusi TNI/POLRI yang mengikuti program PGDS. Peserta PGDS terbagi menjadi peserta Peserta Bantuan Langsung (PBL)/ASN dan peserta Peserta Bantuan Tidak Langsung (PBTL) dan non ASN. Peserta Bantuan Langsung adalah peserta yang menerima bantuan biaya Pendidikan yang bersumber dari APBN/APBD serta bantuan Pemerintah Pusat melalui fakultas kedokteran dan RS yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter spesialis. Peserta dengan status aparatur sipil negara bantuan biaya pendidikan diberikan melalui tugas belajar. Peserta penerima bantuan tidak langsung merupakan peserta yang mendapat bantuan pendidikan dari Pemerintah Pusat melalui fakultas kedokteran dan RS yang menyelenggarakan pendidikan profesi dokter spesialis.

Sekitar 64,6% dari peserta PGDS merupakan peserta PBL/ASN yaitu sebanyak 376 orang, sedangkan peserta PBTL-non ASN sebanyak 206 orang. Provinsi dengan penempatan tenaga kesehatan pada PGDS terbanyak adalah Jawa Timur yaitu sebanyak 35 orang. Provinsi dengan penempatan paling sedikit adalah DKI Jakarta, Banten, dan Gorontalo yaitu sebanyak 5 orang. Terdapat Provinsi yang tidak ada penempatan tenaga Kesehatan PGDS yaitu Sulawesi Barat.

Jenis spesialisasi terbanyak pada penempatan PGDS tahun 2021 adalah dokter spesialis penyakit dalam (133 orang), sedangkan jenis spesialisasi paling sedikit adalah dokter spesialis patologi klinik (40 orang). Rincian lengkap mengenai jumlah penempatan tenaga kesehatan pada PGDS tahun 2021 dapat dilihat di Lampiran 11.n.

GAMBAR 3.23
PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA
PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS TAHUN 2021



Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

D. INSTITUSI PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN

Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan mengamanatkan bahwa tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimal Diploma III kecuali tenaga medis. Pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu, sesuai dengan standar profesi, dan standar pelayanan profesi. Penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang kesehatan harus memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan dan dinamika kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar negeri, keseimbangan antara kemampuan produksi tenaga kesehatan dan sumber daya yang tersedia, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Institusi pendidikan tenaga kesehatan selain tenaga medis terdiri dari Politeknik Kesehatan (Poltekkes) dan Non Politeknik Kesehatan (Non Poltekkes). Kementerian Kesehatan bertanggung jawab terhadap pembinaan teknis institusi Poltekkes sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 507/E/O/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebanyak 38 Poltekkes Kementerian Kesehatan tersebar di 33 provinsi. Poltekkes Kemenkes memiliki 502 program studi yang terdiri dari 297 program studi strata Diploma III (293 program studi

reguler dan 4 program studi PJJ), 153 program studi strata Sarjana Terapan, 48 program studi pendidikan profesi, dan 4 program studi Magister Terapan. Kelompok jurusan di Poltekkes terdiri dari:

1. Keperawatan, yang terdiri dari Keperawatan dan Keperawatan Gigi;
2. Kebidanan;
3. Kefarmasian, yang terdiri dari Farmasi serta Analis Farmasi dan Makanan,
4. Kesehatan Tradisional;
5. Kesehatan Lingkungan;
6. Gizi;
7. Kesehatan Masyarakat, yang terdiri dari Promosi Kesehatan;
8. Keterapian Fisik, yang terdiri dari Fisioterapi, Okupasi Terapi, Terapi Wicara, dan Akupunktur dan Pengobatan Herbal;
9. Keteknisian Medis, yang terdiri dari Teknik Gigi, Kesehatan Gigi, Keperawatan Anestesiologi, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Teknologi Bank Darah;
10. Teknik Biomedika, yang terdiri dari Teknologi Laboratorium Medis, Teknik Radiodiagnostik dan Radioterapi, Teknik Elektromedik, dan Ortotik Prostetik.
11. Lainnya (Asuransi Kesehatan)

Dalam rangka memenuhi kualifikasi pendidikan minimal Diploma III bagi tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan mengadakan program percepatan pendidikan tenaga kesehatan melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau informal, dan/atau pengalaman kerja.

Program studi yang diselenggarakan dalam Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan pada tahun 2021 terdiri dari 9 program studi Diploma III bidang kesehatan yaitu Kebidanan, Farmasi, Keperawatan, Terapi Gigi dan Mulut atau Kesehatan Gigi, Teknologi Laboratorium Medik, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan Transfusi Darah. Pada tahun 2021, ada 5 program studi dari RPL yang memiliki lulusan, yaitu Keperawatan, Kebidanan, Farmasi, Teknologi Laboratorium Medis, dan Rekam dan Informasi Kesehatan. Penyelenggara RPL adalah perguruan tinggi kesehatan yang ditunjuk oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pada tahun 2018 sesuai dengan Kepmenristekdikti Nomor 181/M/KPT/2018 baik Poltekkes Kemenkes maupun perguruan tinggi kesehatan milik swasta dengan jumlah total 496 program studi yang pelaksanaannya dilakukan di seluruh Poltekkes Kemenkes dan 50 PTN/PTS lainnya. Masa studi RPL terdiri dari 2- 3 semester.

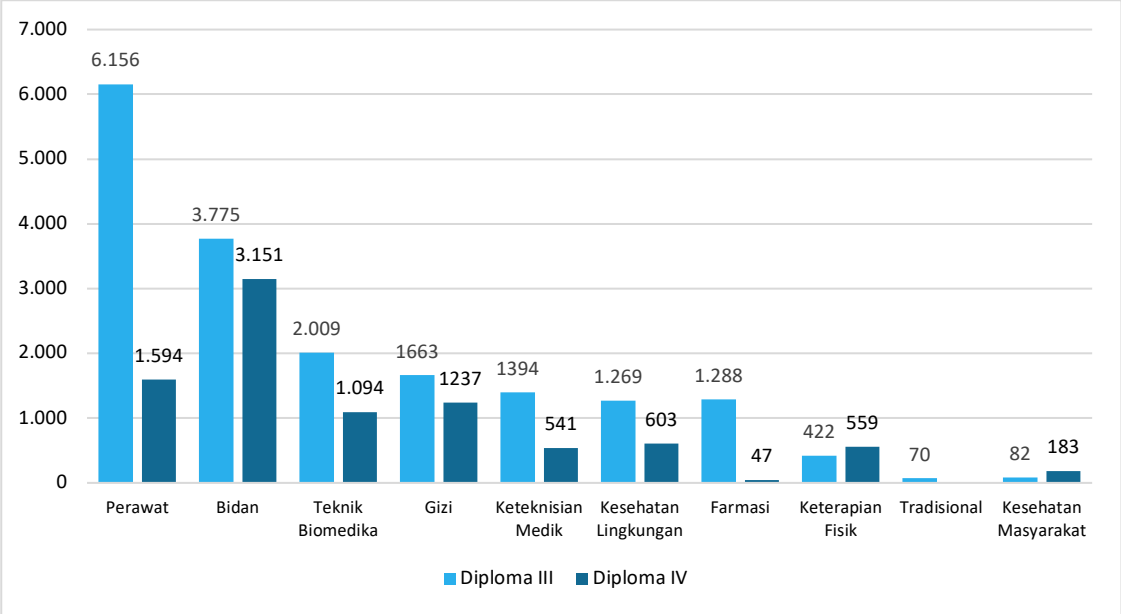
Selain jenjang Diploma, Poltekkes juga membuka program studi Magister Terapan dan Profesi. Program studi Magister Terapan dibuka di Poltekkes Semarang dengan program studi Magister Terapan Kebidanan, Keperawatan, Magister Terapan Terapis Gigi dan Mulut, dan Magister Terapan Teknik Biomedika (*Imaging Diagnostic*). Sementara itu, untuk program studi profesi yang dibuka adalah Profesi Bidan, Ners, Dietisien, dan Fisioterapi.

1. Jumlah Lulusan Poltekkes

Jumlah lulusan Poltekkes pada tahun 2021 sebanyak 29.771 orang, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 34.687 orang. Jumlah lulusan poltekkes tahun 2021 terdiri dari lulusan diploma (18.128 orang regular, dan 328 orang RPL), 9.009 orang

lulusan diploma IV, 2.214 orang lulusan pendidikan profesi, dan 92 orang lulusan magister terapan. Program studi Keperawatan memiliki lulusan terbanyak, yaitu 6.156 orang lulusan Diploma III dan 1.594 orang lulusan Diploma IV. Sementara itu, Teknologi Bank Darah merupakan program studi dengan lulusan paling sedikit, yaitu sebanyak 69 orang. Secara umum, lulusan Diploma III lebih banyak dibandingkan dengan Diploma IV untuk hampir semua program studi, kecuali pada program studi Keterapian Fisik dengan jumlah lulusan 422 orang lulusan Diploma III dan 559 orang lulusan Diploma IV. Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan program Diploma III dan Diploma IV Poltekkes dapat dilihat pada Lampiran 16.g dan Lampiran 16.i.

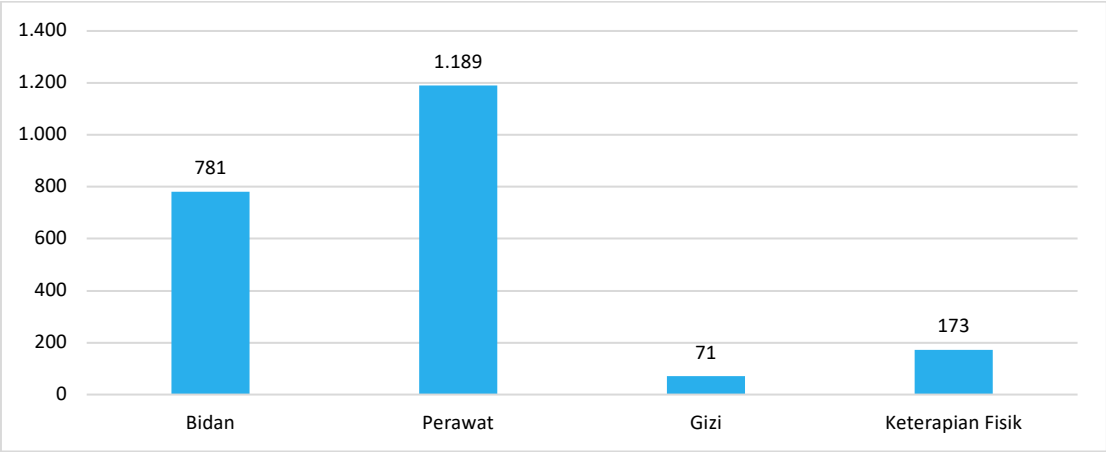
GAMBAR 3.24
JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV POLITEKNIK KESEHATAN MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2021



Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Selain jenjang diploma, pada tahun 2021 Poltekkes juga menghasilkan lulusan program profesi sebanyak 2.214 orang dengan rincian 781 orang lulusan Profesi Bidan, 1.189 orang lulusan Profesi Ners, 71 orang Profesi Dietisien, dan 173 orang lulusan Profesi Fisioterapi. Program studi Magister Terapan di Poltekkes Semarang pada tahun 2021 menghasilkan 92 lulusan dengan rincian 53 orang lulusan Magister Terapan Kebidanan, 14 orang lulusan Magister Terapan Keperawatan, 18 orang lulusan Magister Terapan Terapis Gigi dan Mulut, dan 7 orang Magister Terapan Imaging Diagnostik. Rincian mengenai jumlah lulusan program profesi di Poltekkes dapat dilihat pada Lampiran 16.j.

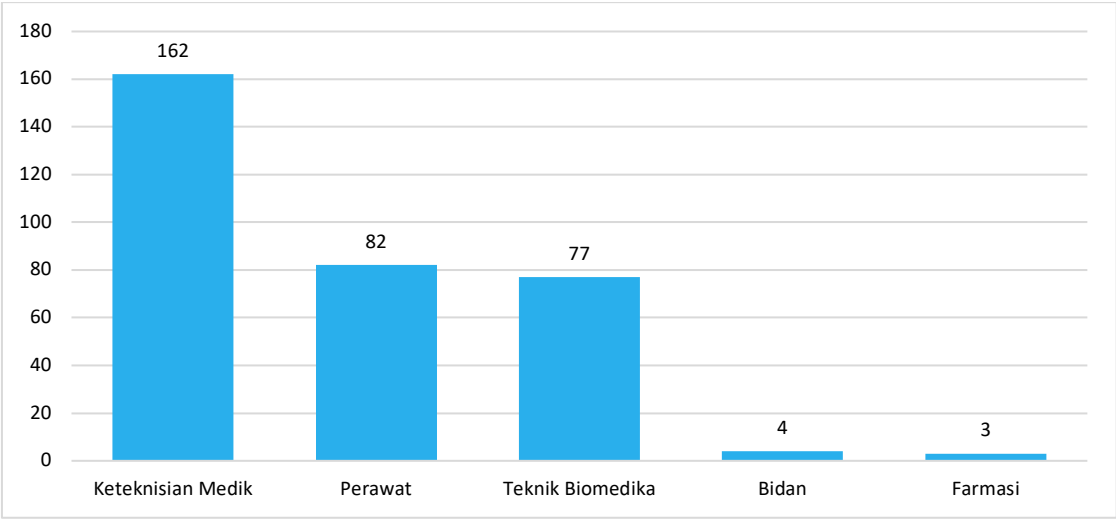
GAMBAR 3.25
JUMLAH LULUSAN PROGRAM PROFESI POLITEKNIK KESEHATAN
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2021



Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Poltekkes Kemenkes RI menyelenggarakan program RPL bagi tenaga kesehatan yang masih berpendidikan SMA/Sederajat, Diploma I dan Diploma II yang akan ditingkatkan kualifikasinya menjadi Diploma III. Pada tahun 2021, Poltekkes telah menghasilkan lulusan program studi Diploma III RPL sebanyak 328 orang. Program studi dengan jumlah lulusan terbanyak pada tahun 2021 adalah rekam medis dan informasi kesehatan yaitu sebanyak 162 orang, sedangkan program studi dengan jumlah lulusan paling sedikit adalah farmasi yaitu sebanyak 3 orang. Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan program Diploma III RPL Poltekkes dapat dilihat pada Lampiran 16.h.

GAMBAR 3.26
JUMLAH LULUSAN DIPLOMA III REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2021



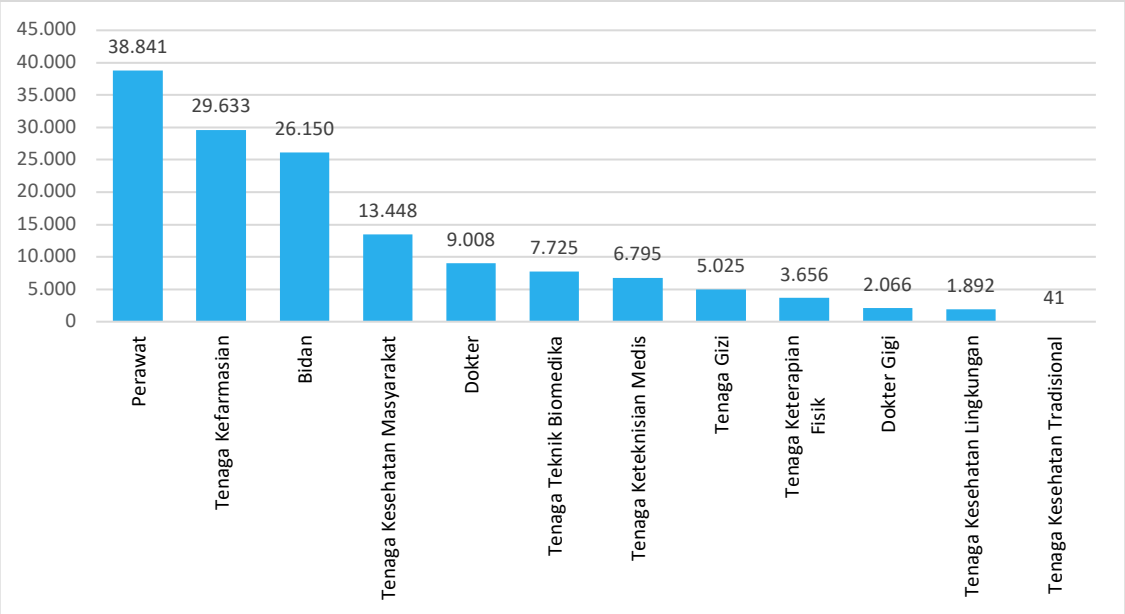
Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

2. Jumlah Lulusan Perguruan Tinggi

Sebagai upaya mencapai sumber daya manusia Indonesia yang unggul, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan membina dan mengembangkan perguruan tinggi di bawah kewenangannya. Sampai dengan 31 Desember 2021, terdapat sebanyak 1.629.040 lulusan dari 29.831 program studi di 4.481 lembaga perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia. Perguruan tinggi terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Perguruan Tinggi Agama (PTA), dan Perguruan Tinggi Kementerian dan Lembaga (PTK/L). Jenjang pendidikan yang ada di perguruan tinggi terdiri dari D1, D2, D3, D4, S1, Profesi, Spesialis 1, Spesialis 2, S2, S2 Terapan, dan S3. Perguruan tinggi, khususnya di bidang kesehatan diharapkan dapat mencetak lulusan sumber daya manusia Kesehatan yang mampu dan siap bekerja sebagai tenaga kesehatan yang unggul dan kompeten.

Berdasarkan perguruan tinggi pada kelompok bidang kesehatan dan bidang lain terkait kesehatan dengan jenjang D3, D4, S1, S2, S3, Spesialis, dan Profesi, jumlah lulusan tenaga kesehatan pada tahun 2021 sebanyak 182.413 orang. Menurut rumpun tenaga kesehatan, jumlah lulusan perguruan tinggi terbanyak adalah perawat, yaitu sejumlah 38.841 orang, diikuti oleh tenaga kefarmasian (29.633 orang), dan bidan (26.150 orang). Jumlah lulusan perguruan tinggi paling sedikit adalah tenaga kesehatan tradisional yaitu sejumlah 41 orang.

GAMBAR 3.27
JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI
MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2021

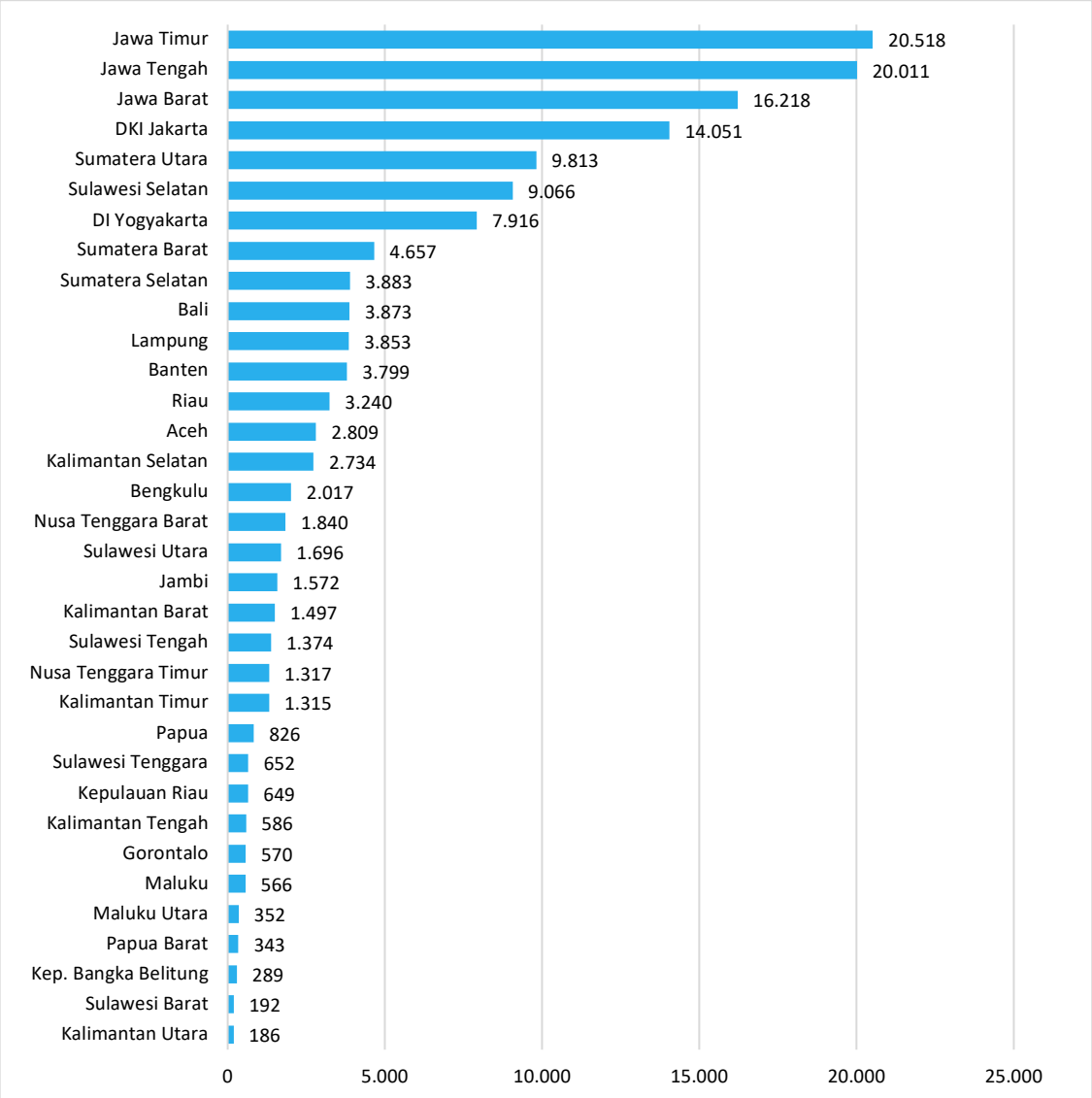


Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Berdasarkan provinsi, dapat dilihat bahwa lulusan perguruan tinggi bidang kesehatan terbanyak berada di Provinsi Jawa Timur sejumlah 20.518 orang, diikuti oleh Provinsi Jawa Tengah sejumlah 20.011 orang, dan Jawa Barat sejumlah 16.218 orang. Provinsi dengan jumlah lulusan perguruan tinggi bidang kesehatan paling sedikit adalah Kalimantan Utara yaitu

sebanyak 186 orang. Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan perguruan tinggi menurut jenis tenaga kesehatan dan provinsi tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 16.k.

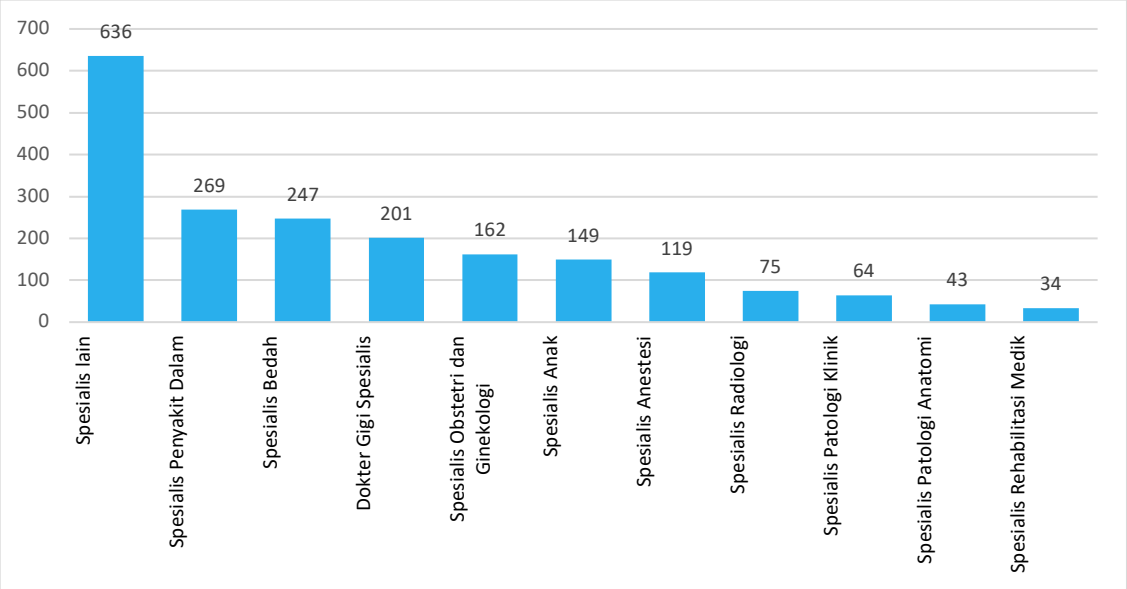
GAMBAR 3.28
JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Jumlah lulusan perguruan tinggi untuk dokter spesialis dan dokter gigi spesialis tahun 2021 sebanyak 1.999 orang yang tersebar di 13 provinsi di Indonesia. Lulusan dokter spesialis terbanyak adalah dokter spesialis penyakit dalam sejumlah 269 orang, diikuti oleh dokter spesialis bedah sejumlah 247 orang. Sementara itu, dokter spesialis lain, di luar yang disebutkan bidang spesialisasi secara spesifik berjumlah 636 orang dan dokter gigi spesialis berjumlah 201 orang. Dokter spesialis lulusan tahun 2021 yang paling sedikit adalah dokter spesialis rehabilitasi medik sejumlah 34 orang.

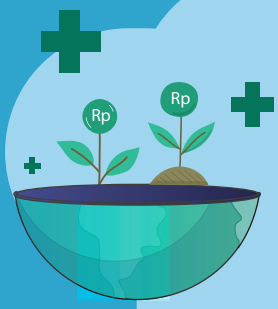
GAMBAR 3.29
JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI
DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS TAHUN 2021



Sumber: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

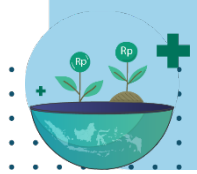
Rincian lebih lengkap mengenai jumlah lulusan perguruan tinggi dokter spesialis dan dokter spesialis gigi menurut provinsi tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 16.l.

***



Bab IV.
PEMBIAYAAN KESEHATAN

BAB IV. PEMBIAYAAN KESEHATAN



Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Dengan demikian, unsur ekonomis merupakan salah satu aspek yang dipentingkan dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan di Indonesia.

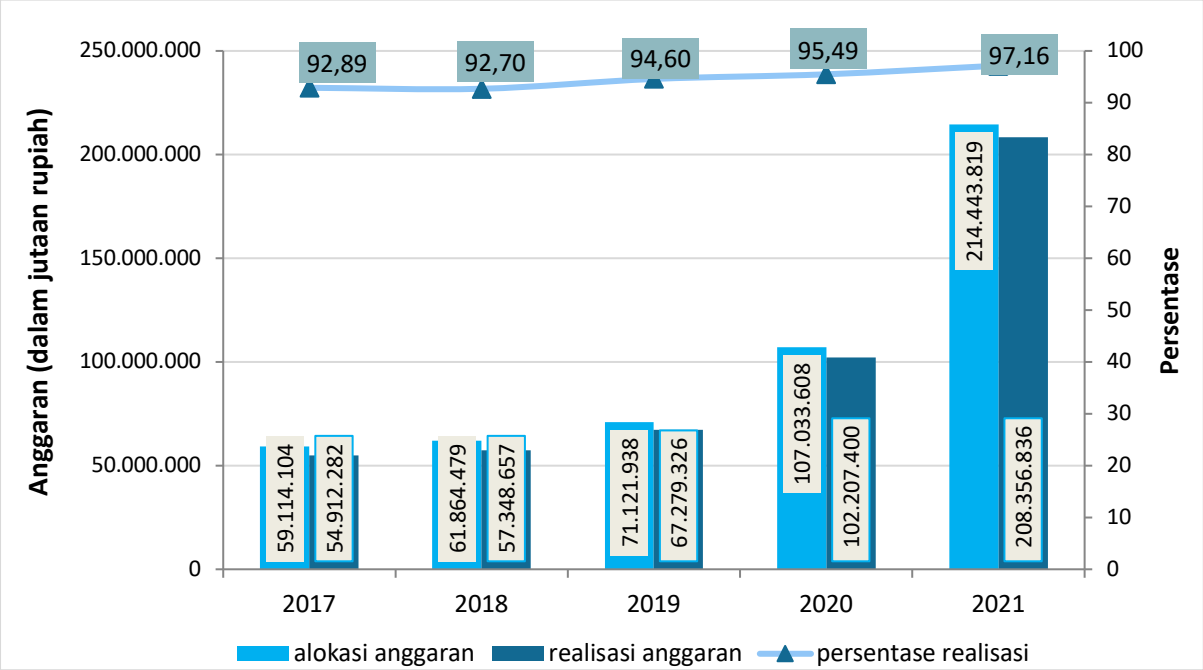
Selain itu, di dalam Undang-Undang yang sama juga disebutkan bahwa pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan termanfaatkan. Pembiayaan kesehatan merupakan besarnya dana yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.

Anggaran kesehatan dapat dikatakan sebagai instrumen pemerintah dalam pemenuhan hak-hak kesehatan bagi warga negara (Ansar, 2017). Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan sumber lain. Di dalam bab ini hanya akan dibahas mengenai alokasi dan realisasi anggaran kesehatan bersumber dari pemerintah, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, juga dijelaskan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

A. ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN

Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 ini memiliki alokasi anggaran sebesar 214 triliun rupiah dengan realisasi sebesar 208 triliun rupiah. Alokasi anggaran tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 107 triliun rupiah jika dibandingkan dengan tahun 2020. Dibandingkan dengan persentase realisasi tahun sebelumnya, tahun 2021 juga mengalami kenaikan, dimana persentase realisasi anggaran Kementerian Kesehatan pada tahun 2021 sebesar 97,16%, naik dari tahun 2020 sebesar 95,49%.

GAMBAR 4.1
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
TAHUN 2017-2021

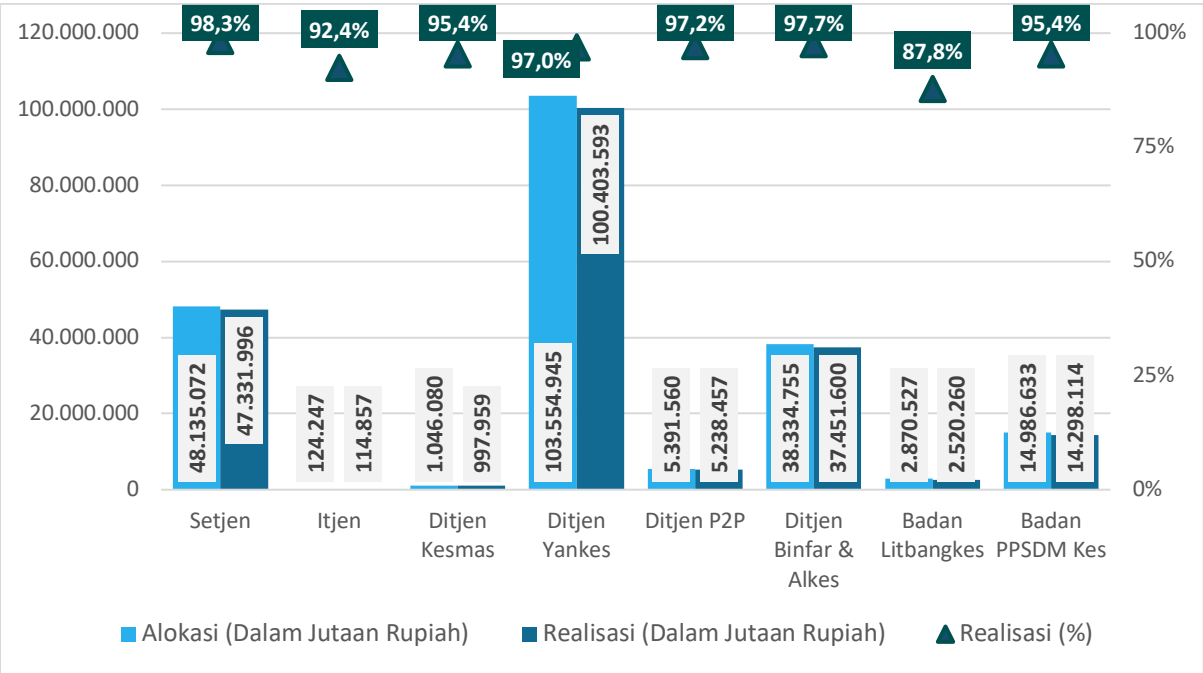


Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2022

Gambar 4.1 menunjukkan peningkatan alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan dari tahun 2017-2021, dengan alokasi tertinggi yaitu pada tahun 2021.

Distribusi anggaran berdasarkan alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut unit Eselon I (Gambar 4.2) menunjukkan bahwa alokasi terbesar terdapat pada Ditjen Yankes sebesar 103,5 triliun rupiah, sedangkan alokasi terendah pada Inspektorat Jenderal sebesar 124,2 miliar rupiah. Unit Eselon I dengan persentase realisasi anggaran tertinggi adalah Sekretariat Jenderal sebesar 98,3%, sedangkan realisasi terendah adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Badan Litbangkes) dengan persentase realisasi sebesar 87,8%. Data dan informasi mengenai alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut eselon I pada tahun 2021 selengkapnya terdapat pada Lampiran 19.b.

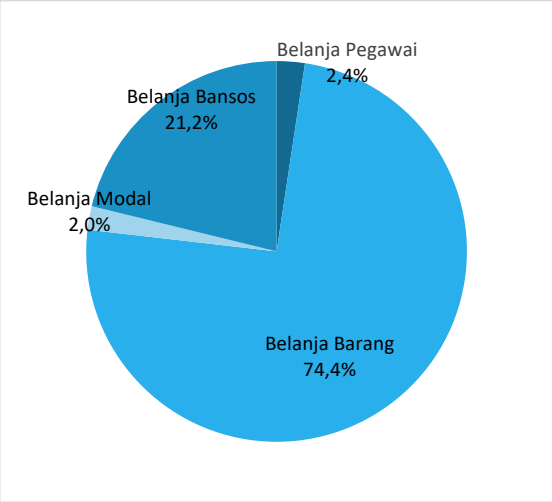
GAMBAR 4.2
ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT UNIT ESELON I
TAHUN 2021



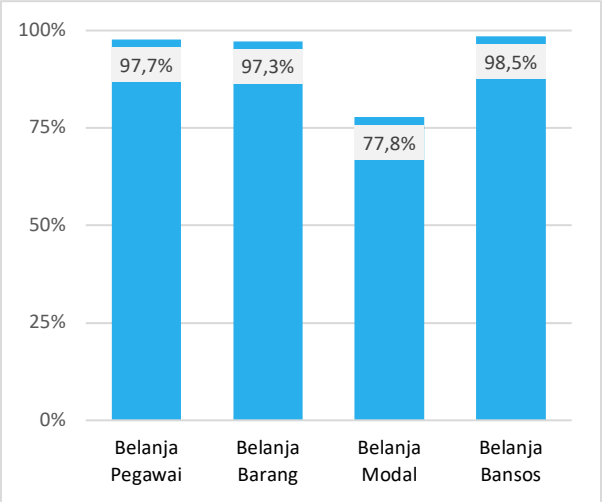
Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2022

Dari keseluruhan alokasi anggaran Kementerian Kesehatan sebesar 214,4 triliun rupiah, sebanyak 45,4 triliun rupiah atau sebesar 21,18% merupakan dana untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimasukkan dalam alokasi anggaran Sekretariat Jenderal. Dana tersebut diwujudkan melalui anggaran Belanja Bantuan Sosial (Bansos) Kementerian Kesehatan. Pada anggaran Kementerian Kesehatan yang terbesar berikutnya dialokasikan untuk belanja barang, sebesar 74,4%, serta belanja pegawai dan belanja modal sebesar masing-masing 2,0%. Untuk persentase realisasi anggaran Kementerian Kesehatan berdasarkan jenis belanja yang paling tinggi adalah belanja bansos sebesar 98,5% dan yang paling rendah adalah belanja modal sebesar 57,9% (Gambar 4.3 dan 4.4). Rincian alokasi dan realisasi anggaran Kementerian Kesehatan RI menurut jenis belanja tahun anggaran 2021 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 19.C.

GAMBAR 4.3
PERSENTASE ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2021



GAMBAR 4.4
PERSENTASE REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN BERDASARKAN JENIS BELANJA TAHUN 2021



Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2022

B. DANA DEKONSENTRASI DAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2021

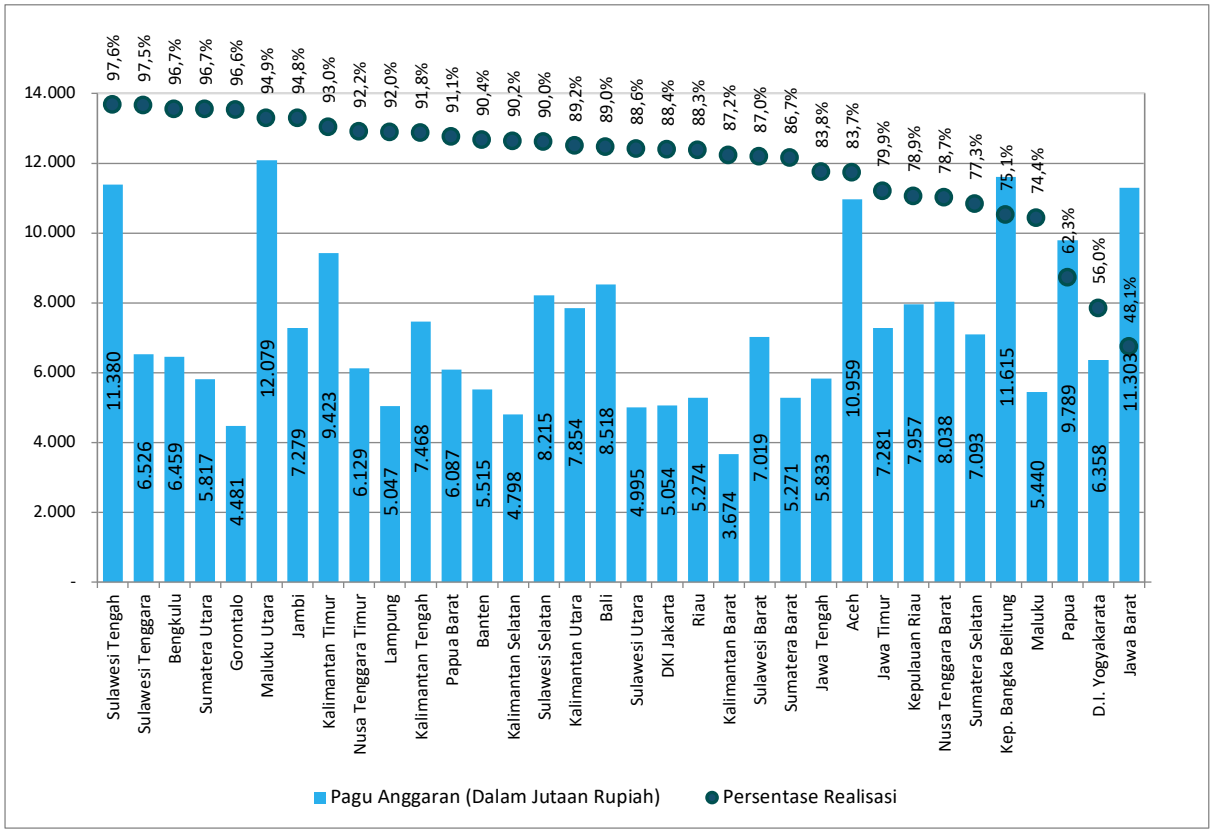
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 248/PMK.07/2010, untuk mendukung pencapaian pembangunan yang menjadi fokus/prioritas nasional, serta meningkatkan peran provinsi dalam kerangka *good governance* dalam mengawal pelaksanaan program kementerian/lembaga (K/L) di daerah dan untuk menjamin tersedianya dana bagi pelaksanaan pelimpahan wewenang tersebut, pemerintah melalui K/L mengatur pemberian dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan tersebut, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Sedangkan dana dekonsentrasi merupakan dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Dalam upaya percepatan pencapaian tujuan dan target program kesehatan inilah dana dekonsentrasi diberikan. Pendanaan dalam rangka dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat non fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap. Kegiatan non fisik yang dimaksud antara lain: sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, workshop, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, maka sebagian kecil dana dekonsentrasi dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan atau pengadaan input berupa pengadaan barang/jasa dan penunjang lainnya. Namun demikian, dana dekonsentrasi bukanlah merupakan dana utama dalam penyelenggaraan kegiatan kesehatan di daerah, sehingga pemerintah daerah tetap berkewajiban

mengalokasikan dana bidang kesehatan sesuai amanat Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pemanfaatan dana dekonsentrasi harus dilakukan dengan cermat agar terpadu dengan kegiatan yang berasal dari sumber anggaran lainnya agar tidak terjadi duplikasi kegiatan. Setiap tahunnya diterbitkan petunjuk teknis untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam memanfaatkan dana dekonsentrasi dari pemerintah pusat. Data dan informasi yang lebih rinci mengenai alokasi dan realisasi anggaran dekonsentrasi Kementerian Kesehatan menurut provinsi tahun anggaran 2021 disajikan pada Lampiran 19.e.

Berdasarkan grafik yang disajikan pada gambar 4.5, dapat dilihat bahwa realisasi dana dekonsentrasi paling tinggi oleh Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 97,6%, sedangkan realisasi terendah adalah Provinsi Jawa Barat sebesar 48,1%. Masih perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terutama mengenai penyebab rendahnya penyerapan anggaran dekonsentrasi pada beberapa provinsi, termasuk analisis mengenai kecukupan alokasi anggaran dekonsentrasi pada setiap program di tiap provinsi itu sendiri.

GAMBAR 4.5
REALISASI DANA DEKONSENTRASI KESEHATAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2021



Sumber: Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2022

Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan yang selanjutnya disingkat DAK Bidang Kesehatan adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan fisik dan non fisik yang merupakan urusan kesehatan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK terbagi menjadi dua, yaitu DAK fisik dan DAK non fisik. Panduan pemanfaatan DAK bidang kesehatan tahun 2021 diatur dalam

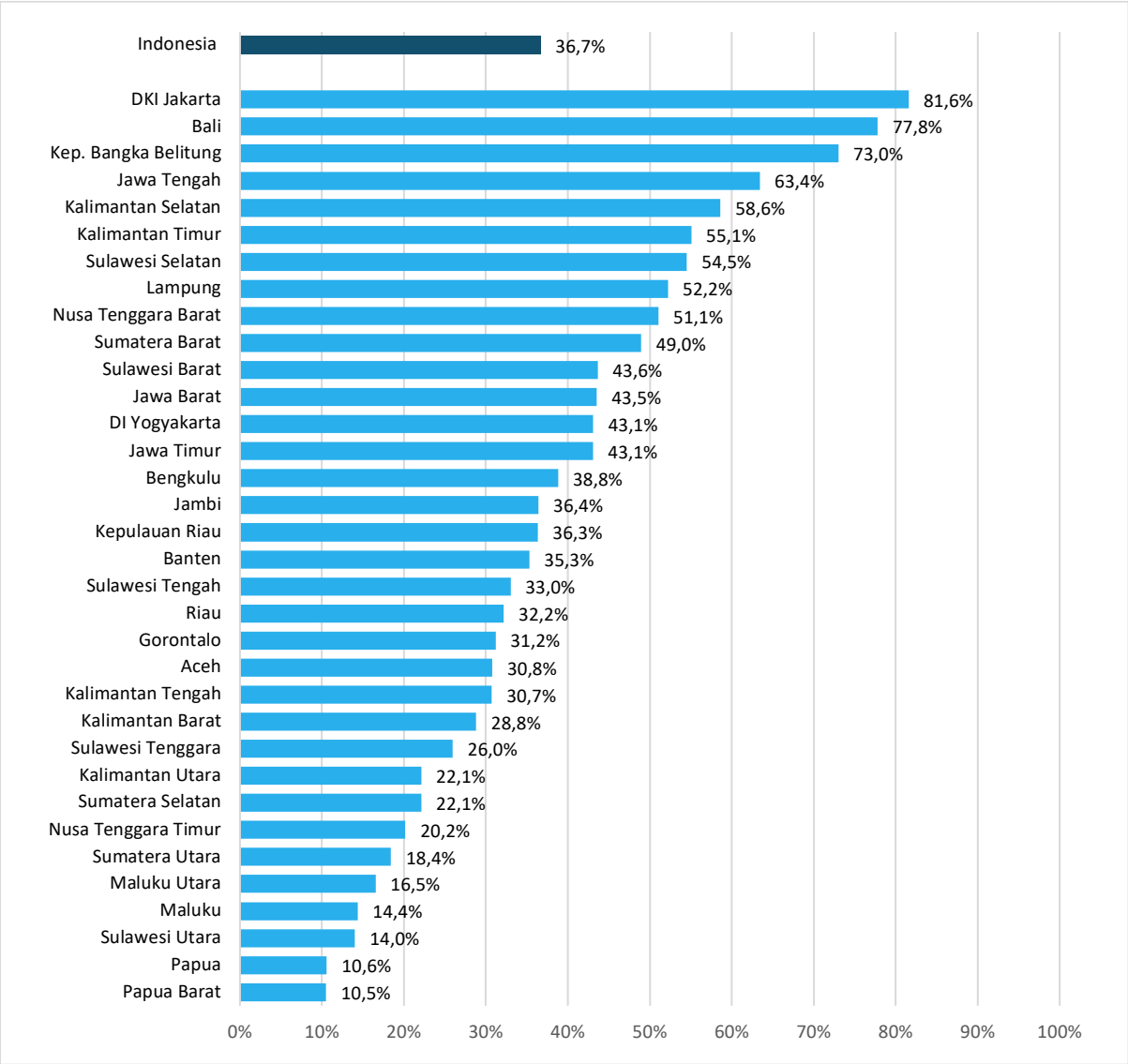
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 Dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus non fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021.

DAK fisik bidang kesehatan diarahkan untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti: penyediaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan puskesmas, pengadaan perangkat Sistem Informasi Kesehatan (SIK), penyediaan alat dan bahan pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan, kelanjutan rumah sakit dan puskesmas yang belum operasional, penguatan laboratorium kesehatan daerah, pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, dan/atau renovasi gedung sarana rumah sakit daerah provinsi/kabupaten/kota, penyediaan alat Kesehatan dan prasarana di rumah sakit, dan peningkatan atau pembangunan unit transfusi darah termasuk pemenuhan peralatan, sarana dan prasarana di rumah sakit daerah provinsi/ kabupaten/kota, penyediaan obat dan bahan medis habis pakai di tingkat daerah kabupaten/kota, pembangunan, rehabilitasi, dan penyediaan sarana prasarana instalasi farmasi provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan DAK non fisik bidang kesehatan terdiri atas: Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), Jaminan Persalinan (Jampersal), akreditasi puskesmas, dan pengawasan obat dan makanan.

Pelaporan DAK bidang kesehatan disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Kesehatan, Menteri Keuangan, dan Menteri Dalam Negeri secara berkala (triwulan serta laporan tahunan). Sedangkan untuk data realisasi penggunaan anggaran dilaporkan melalui mekanisme yang berbeda, yaitu DAK fisik menggunakan aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) dan DAK non fisik menggunakan aplikasi e-Renggar.

Pada tahun 2021, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik 2021 secara nasional sebesar 36,7% dengan realisasi tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (81,6%) dan terendah adalah Provinsi Papua Barat (10,5%), seperti tampak pada Gambar 4.6 berikut.

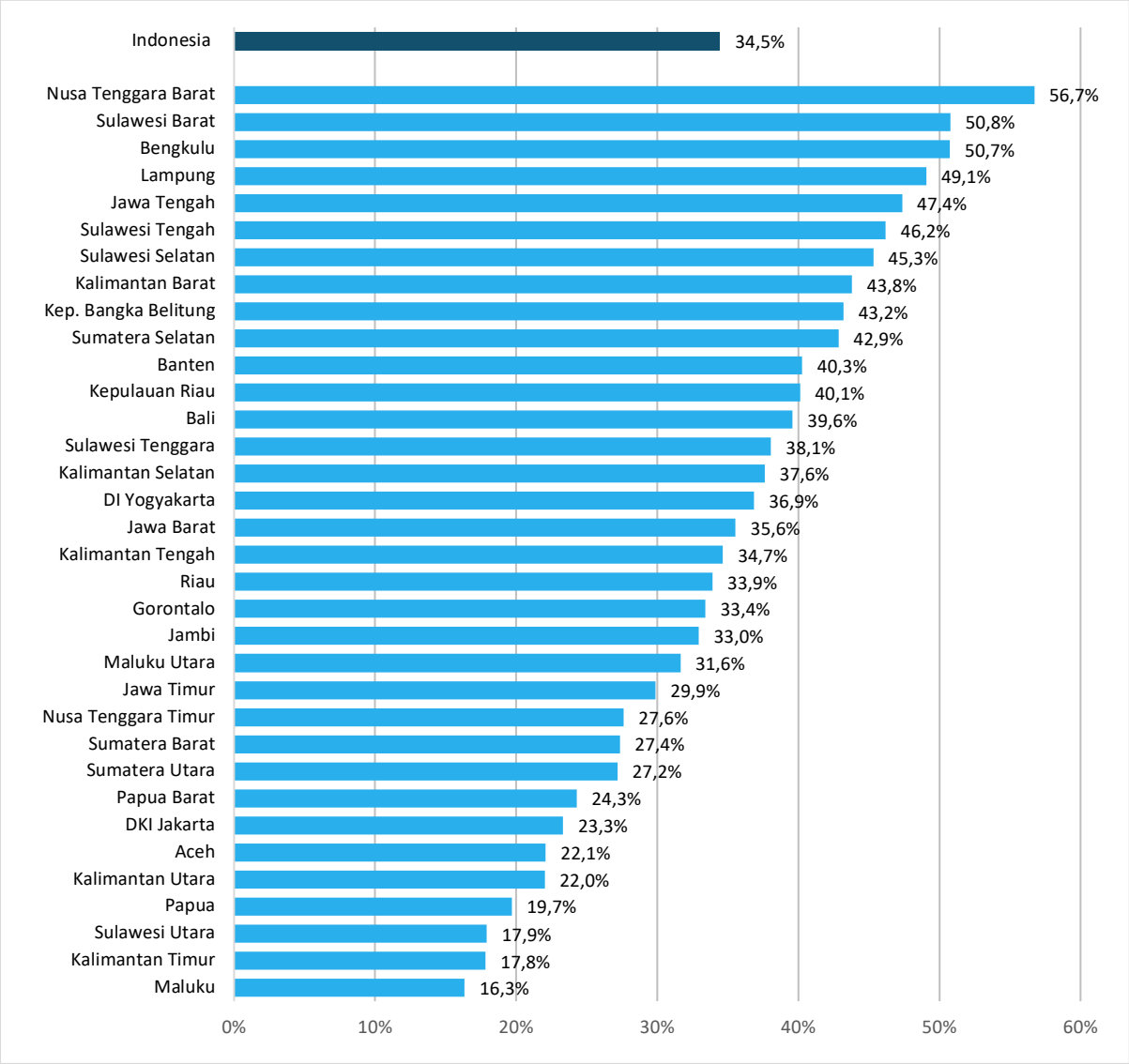
GAMBAR 4.6
REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN DAN KB MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2022

Untuk realisasi DAK non fisik Tahun 2021 secara nasional adalah 34,5% dengan realisasi tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (56,7%) dan terendah adalah Provinsi Maluku (16,3%) seperti tampak pada Gambar 4.7.

GAMBAR 4.7
REALISASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BIDANG KESEHATAN
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2021



Sumber: Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes RI, 2022

C. BELANJA KESEHATAN DAN JAMINAN KESEHATAN

Sesuai dengan amanat yang tercakup dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009, bahwa alokasi belanja di bidang Kesehatan merupakan sesuatu yang mutlak dipenuhi (*mandatory spending*). Pasal 171 dalam undang undang tersebut menyatakan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran Kesehatan sebesar minimal 5% dari APBN diluar gaji, sementara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota mengalokasikan anggaran Kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD diluar gaji. Penggunaan anggaran di bidang Kesehatan diharapkan seoptimal mungkin dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan bidang Kesehatan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur besar belanja Kesehatan di suatu negara adalah *National Health Accounts* atau NHA. NHA adalah pendekatan yang sistematik dan konprehensif yang digunakan untuk memonitor besaran pengeluaran kesehatan di suatu negara, mencakup aliran dana kesehatan, distribusi dan penggunaannya. NHA diperlukan untuk menjawab pertanyaan isu-isu pembiayaan kesehatan seperti kecukupan (*sufficiency*), pemerataan (*equity*), efisiensi (*efficiency*), efektifitas (*effectiveness*), dan keberlanjutan (*sustainability*) terkait kebijakan alokasi sumber daya kesehatan, baik dari sisi *supply* maupun *demand* dalam mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (*Universal Health Coverage*/*UHC*).

Indonesia telah memproduksi NHA menggunakan metode *System of Health Accounts* (*SHA*) 2011 yang merupakan metode standar internasional, sehingga dapat melihat posisi Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara. Data NHA juga telah didistribusikan secara global dalam *World Health Report* yang terpublikasi setiap tahunnya oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sebagai negara dengan kebijakan *single payer* (hanya ada satu pengumpul premi dan sekaligus berfungsi sebagi badan penyelenggara) terbesar di dunia, banyak negara memberi perhatian pada pembiayaan kesehatan di Indonesia untuk penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam rangka menuju *UHC*. Dari data NHA tahun 2018, terdapat beberapa hal yang masih perlu ditingkatkan, diantaranya penguatan pendanaan untuk menunjang upaya preventif dan promotif, termasuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), edukasi kesehatan untuk pola hidup bersih sehat, imunisasi, *surveilance*, skrining, pengadaan pola makan tambahan, dan lain-lain. Penguatan pendanaan untuk layanan di FKTP serta pendanaan preventif-promotif akan membangun sistem layanan Kesehatan yang lebih kokoh terhadap berbagai kejadian tidak terduga termasuk adanya pandemik COVID-19.

1. Total Belanja Kesehatan Indonesia/*Total Health Expenditure* (*THE*)

Estimasi NHA 2018 menghasilkan angka total belanja kesehatan Indonesia yang mencakup *Current Health Expenditure* (*CHE*) dan belanja investasi. *CHE* merupakan seluruh belanja kesehatan di luar belanja investasi (belanja modal), baik berupa belanja untuk pelayanan Kesehatan perorangan maupun komunitas, juga termasuk tata kelola administrasi sistem kesehatan. Belanja investasi merupakan belanja komoditas barang dan jasa yang memiliki masa guna lebih dari satu tahun, seperti infrastruktur kesehatan (bangunan, mesin, teknologi informasi, dan lain-lain), belanja untuk pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan, serta untuk penelitian dan pengembangan kesehatan. Keterbatasan akses pada sumber data skema non-publik (swasta) menyebabkan saat ini belanja investasi di Indonesia belum dapat terpotret secara utuh, khususnya pada sektor non-publik yang baru mencakup sebagian belanja yang terdapat pada skema Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT).

Indikator umum yang digunakan untuk mengukur belanja kesehatan di suatu negara pada skala internasional saat ini adalah CHE, karena menggambarkan konsumsi akhir yang dapat dinikmati dalam setahun. Namun, dalam publikasi ini, indikator yang akan digunakan adalah THE. Hal tersebut dilakukan untuk mengakomodasi belanja kesehatan pemerintah yang juga dibelanjakan untuk investasi di bidang kesehatan.

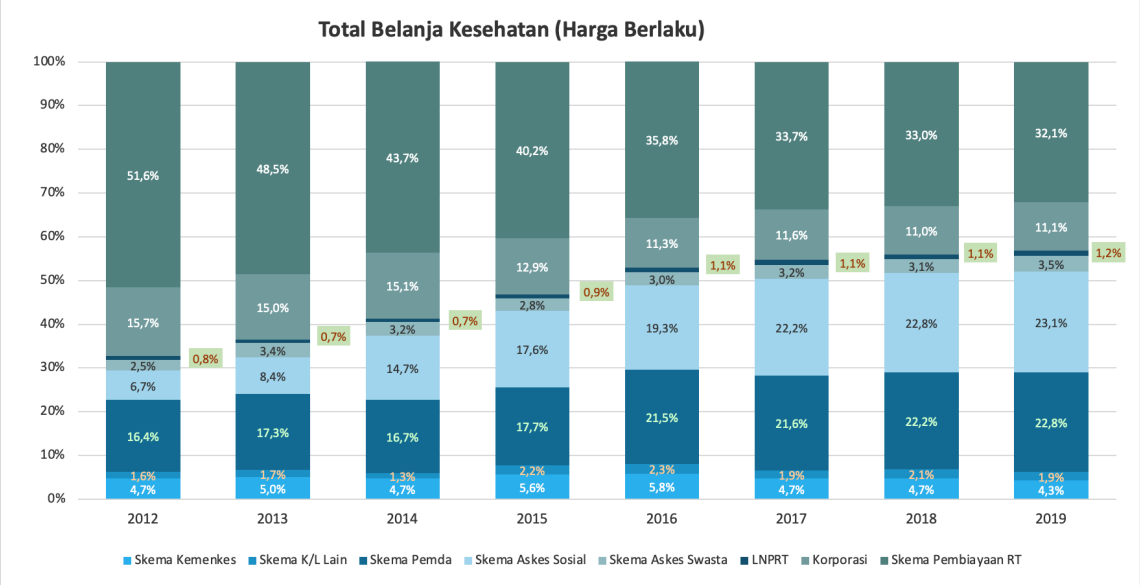
TABEL 4.1
TOTAL BELANJA KESEHATAN INDONESIA
TAHUN 2012-2019

Tahun	Total Belanja Kesehatan (Triliun Rp)	Belanja Kesehatan per Kapita (Rp)	Belanja Kesehatan per Kapita (US $)	% THE terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
2012	260,7	1.062.079	113	3,0
2013	287,5	1.155.370	110	3,0
2014	324,6	1.287.409	109	3,1
2015	358,3	1.402.747	105	3,1
2016	399,3	1.543.512	116	3,2
2017	432,9	1.618.548	121	3,1
2018	454,1	1.713.534	120	3,1
2019	490,3	1.828.862	129	3,1

Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Tabel 4.1 di atas menunjukkan total belanja kesehatan Indonesia selama tahun 2012-2019 menunjukkan terdapat peningkatan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terjadi peningkatan belanja kesehatan hampir 2 (dua) kali lipat, dari Rp260,7 triliun pada tahun 2012 menjadi Rp490,3 triliun pada tahun 2019. Proporsi belanja kesehatan terhadap PDB hanya mengalami fluktuasi kenaikan sebesar 0,1% yaitu dari 3,0% di tahun 2012 menjadi 3,1% di tahun 2019, namun meski demikian belanja kesehatan perkapita mengalami kenaikan dari tahun 2012 sebesar Rp1.062.072 (US $113) menjadi Rp1.828.862 (US $129) di tahun 2019.

GAMBAR 4.8
PROPORSI BELANJA KESEHATAN MENURUT SKEMA PENDANAAN
TAHUN 2012-2019



Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Gambar 4.8 di atas menunjukkan proporsi belanja kesehatan menurut skema pendanaan Kesehatan yang meliputi sektor publik (skema Kementerian Kesehatan, Kementerian/Lembaga lainnya, Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), Asuransi Kesehatan Sosial (JKN) dan sektor non-publik (skema Asuransi Kesehatan Swasta, Lembaga Non-Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT), Korporasi, dan Pembiayaan Rumah Tangga). Porsi belanja skema asuransi kesehatan sosial terhadap total belanja kesehatan menunjukkan peran dan komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan untuk masyarakat di negara tersebut. Selain itu menunjukkan bahwa peningkatan porsi belanja pada skema asuransi kesehatan sosial seiring dengan penurunan pada porsi skema pembiayaan dari kantong rumah tangga. Tren belanja kesehatan pada skema pembiayaan dari kantong rumah tangga yang cenderung menurun secara proporsi sejak tahun 2012 hingga tahun 2019 harus dimonitor secara terus menerus. Namun meskipun secara proporsi skema pembiayaan dari kantong rumah tangga menurun (dari 51,6% pada tahun 2012 menjadi 32,1% pada tahun 2019), namun secara nominal mengalami kenaikan dari tahun 2012–2019 (dari Rp134,6 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp157,5 triliun pada tahun 2019). Hal ini merupakan dampak langsung dari pertumbuhan pasar di sektor kesehatan.

Belanja kesehatan pada awalnya didominasi pendanaan sektor non-publik, terutama yang berasal dari kontribusi pembiayaan rumah tangga. Meskipun begitu, pendanaan dari sektor publik setiap tahunnya mengalami peningkatan baik dari proporsi maupun dari jumlahnya, dimana pada tahun 2012 sebesar 29,4 persen (Rp76,7 triliun) dari total belanja nasional dan tahun 2019 sebesar 52,1 persen (Rp255,5 triliun). Tren peningkatan ini terutama terjadi pada skema JKN dan skema pemerintah daerah (Pemda), sementara skema Kementerian Kesehatan (Kemenkes) cenderung menurun dan skema K/L lainnya relatif stabil selama tahun 2014-2019.

Salah satu yang menunjukan tren kenaikan adalah belanja kesehatan pada skema Pemda, baik provinsi maupun kabupaten/kota cenderung meningkat selama tahun 2012-2019. Peningkatan jumlah belanja kesehatan Pemda diharapkan memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk dapat membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan program-program vertikal yang menjadi indikator kinerja kesehatan nasional. Peran besar daerah dalam mengelola pembiayaan kesehatan tentu saja melahirkan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karenanya, pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab tersebut memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dimulai dari proses perencanaan hingga evaluasi program/kegiatan. Mengingat capaian indikator kesehatan menjadi ukuran penting kinerja Kemenkes sebagai *focal point* sektor kesehatan, maka perlu dilaksanakan juga proses monitoring dan evaluasi terhadap dana transfer dari pusat ke daerah. Hal ini bertujuan agar pendanaan kesehatan yang telah dialokasikan dapat digunakan secara efektif dan efisien, serta berdampak positif pada pembangunan sektor kesehatan.

2. Jaminan Kesehatan

Dasar hukum yang paling utama adanya jaminan kesehatan adalah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H, yaitu:

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan;

2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat.

Selain itu, dasar hukum adanya Jaminan Kesehatan juga tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 yaitu:

1. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara;
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan;
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Atas dasar itulah, maka diterbitkan Undang-Undang No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang salah satu programnya adalah Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Menurut Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Jaminan Kesehatan (JKN) adalah program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Prinsip asuransi sosial yang dimaksud meliputi :

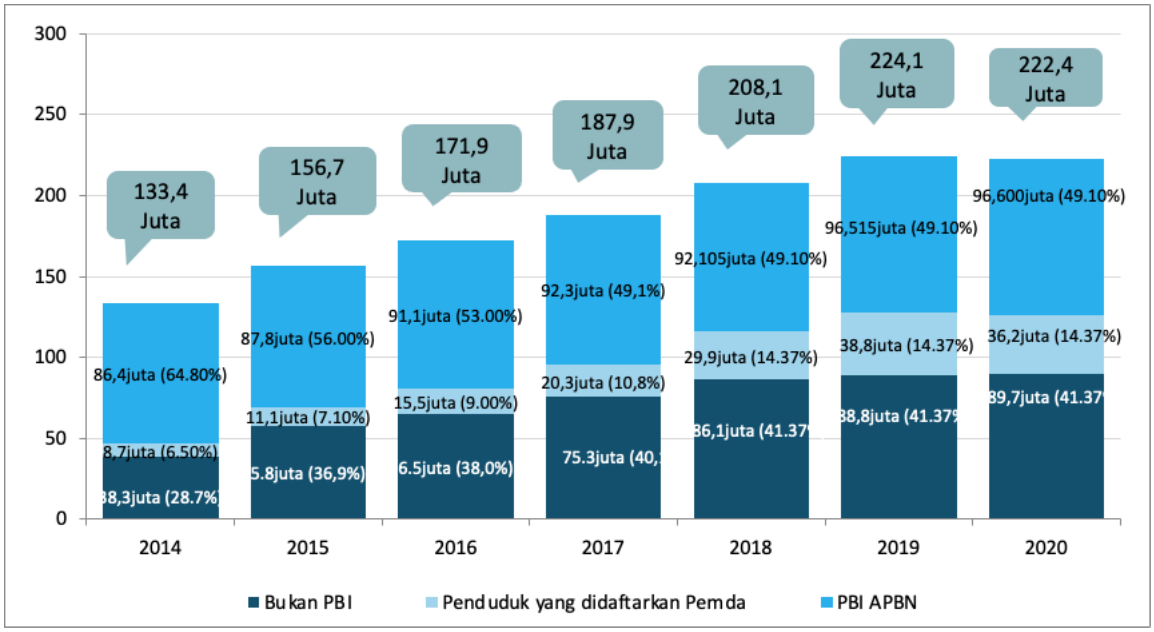
1. Kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah;
2. Kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif;
3. Iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan;
4. Bersifat nirlaba.

Sedangkan prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak berkaitan dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya. Pelaksanaan JKN di Indonesia diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kepesertaan dalam BPJS Kesehatan terdiri dari 2 kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. PBI Jaminan Kesehatan.
   Penerima Bantuan Iuran (PBI) adalah peserta Jaminan Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagaimana diamanatkan Undang-Undang SJSN yang iurannya sebagai peserta program Jaminan Kesehatan dibayari oleh pemerintah. Peserta PBI adalah fakir miskin yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diatur melalui Peraturan Pemerintah.
2. Bukan PBI jaminan kesehatan.
   Peserta bukan PBI jaminan kesehatan terdiri dari:
   - Pekerja penerima upah dan anggota keluarganya
   - Pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya
   - Bukan pekerja dan anggota keluarganya

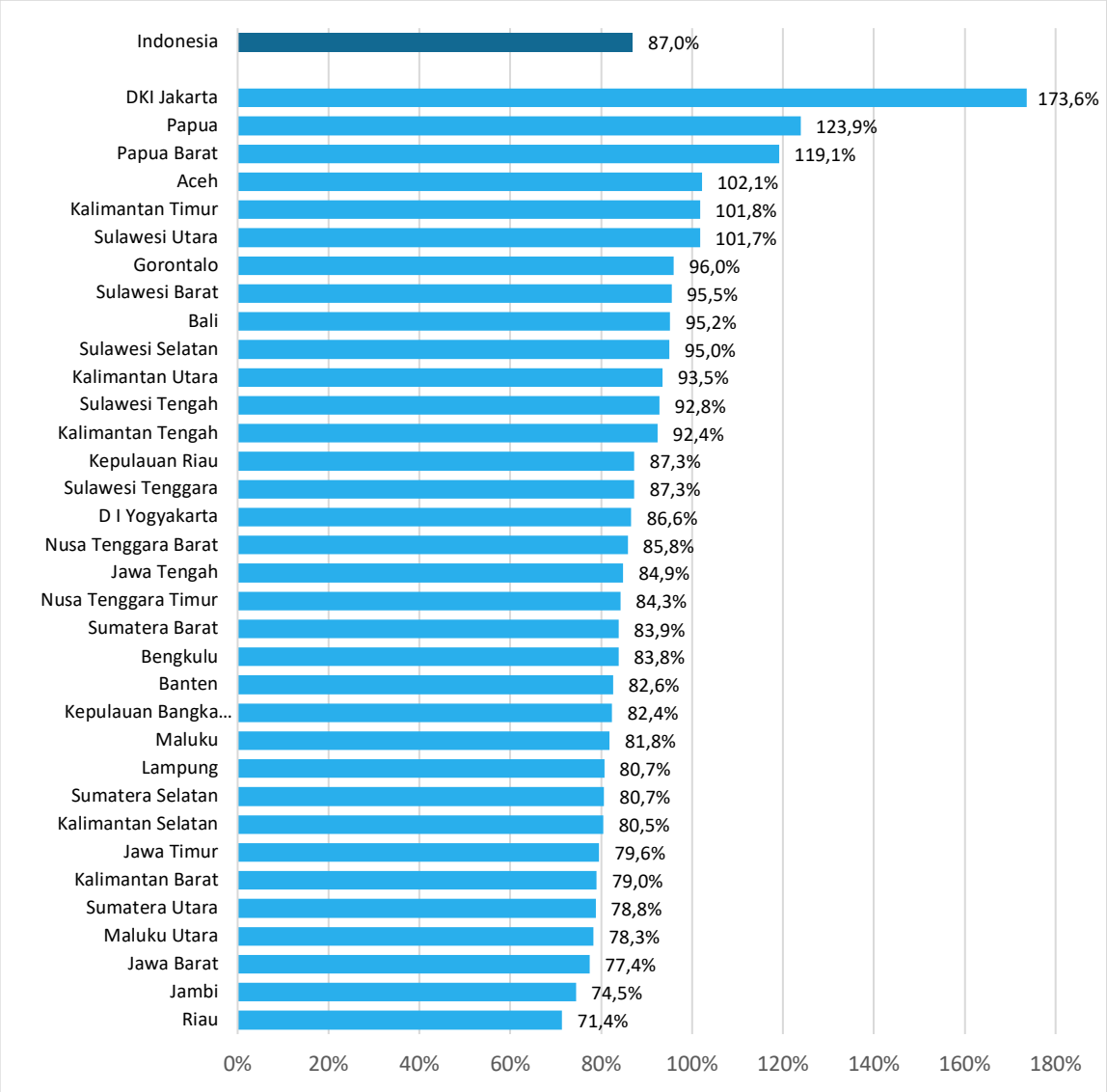
GAMBAR 4.9
PERKEMBANGAN CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) TAHUN 2014-2020



Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2021

Pada Tahun 2020, proporsi kepesertaan terbanyak berasal dari segmen PBI (APBN) sebesar 49,10%. Akan tetapi, pertumbuhan peserta paling signifikan dari tahun ke tahun terjadi pada segmen non-PBI. Sampai dengan akhir tahun 2020, jumlah cakupan kepesertaan JKN/KIS mencapai 222,4 juta jiwa, dimana terjadi penurunan jumlah kepesertaan dibandingkan dengan jumlah kepesertaan tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian kontribusi iuran pada segmen Penduduk yang didaftarkan oleh Pemda sehingga adanya keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam membayarkan iuran. Pada tahun 2020 juga diketahui bersama dengan adanya pandemi *Coronavirus disease* 2019 (Covid-19) yang berdampak juga pada kemampuan membayar iuran oleh peserta segmen PBPU/BP.

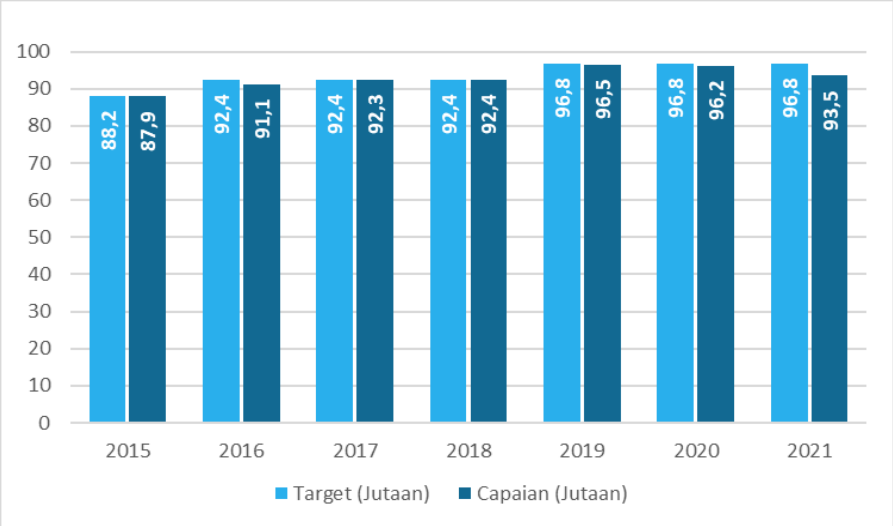
GAMBAR 4.10
CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
DI INDONESIA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021



Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Pada tahun 2021 sebanyak 87,0% penduduk Indonesia telah menjadi peserta jaminan Kesehatan nasional (JKN) dimana terdapat 6 (empat) provinsi yang telah mencapai kepesertaan semesta/*Universal Health Coverage* (*UHC*), yaitu Provinsi DKI Jakarta, Papua, Papua Barat, Kalimantan Timur, Aceh, dan Sulawesi Utara. Cakupan kepesertaan JKN terbanyak yaitu pada penduduk Provinsi DKI Jakarta (173,6%), sedangkan cakupan kepesertaan JKN terendah yaitu pada penduduk Provinsi Riau (71,4%). Jumlah kepesertaan yang melebihi 100% dikarenakan pencatatan dalam cakupan kepesertaan didasarkan pada kinerja Kantor Cabang, tidak semua berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau alamat peserta. Data cakupan kepesertaan JKN di Indonesia menurut provinsi selengkapnya dapat dilihat di lampiran 17.a.

GAMBAR 4.11
TARGET DAN CAPAIAN PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2015-2021

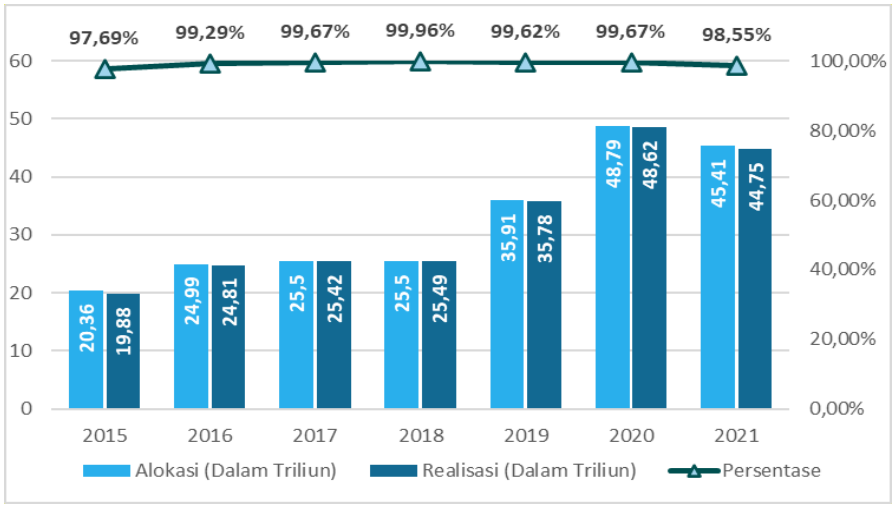


Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Pada Tahun 2020, Menteri Sosial menetapkan fakir miskin dan orang tidak mampu berdasarkan basis data terpadu sebanyak 96,8 juta jiwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020. Penetapan ini termasuk bayi dari PBI Jaminan Kesehatan yang dilahirkan pada tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang saat ini telah diubah menjadi Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu dilakukan verifikasi dan validasi perubahan data PBI Jaminan Kesehatan setiap bulannya.

GAMBAR 4.12
ALOKASI DAN REALISASI PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2015-2021

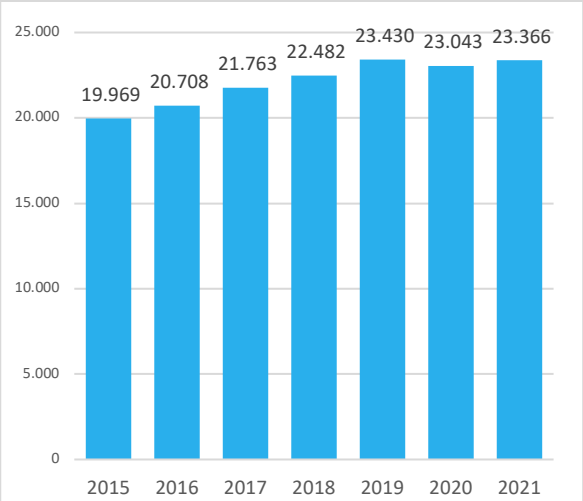


Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

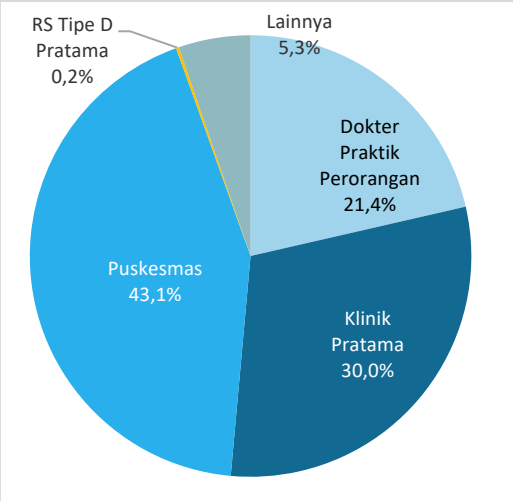
Alokasi anggaran untuk iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) disesuaikan dengan regulasi yang ada. Telah terjadi perubahan besaran iuran peserta PBI dari tahun 2015 sampai dengan 2021. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, terjadi perubahan pada besaran iuran, diantaranya yaitu iuran Kelas III Tahun 2020 sebesar Rp25.500 (Rp42.000 dikurangi subsidi Pemerintah Rp16.500), tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp35.000, serta besaran iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan yaitu sebesar Rp42.000 per orang per bulan yang sepenuhnya dibayar oleh Pemerintah. Adapun Perpres tersebut merupakan Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 yang tertuang dalam Pasal 34 dan sejalan dengan putusan Mahkamah Agung No. 7P/HUM/2020.

Realisasi pembayaran iuran PBI Jaminan Kesehatan pada tahun 2015 dan 2021 sebesar 97,7% dan 98,5% dari alokasi yang dianggarkan merupakan persentase terendah dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir.

GAMBAR 4.13
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2015-2021



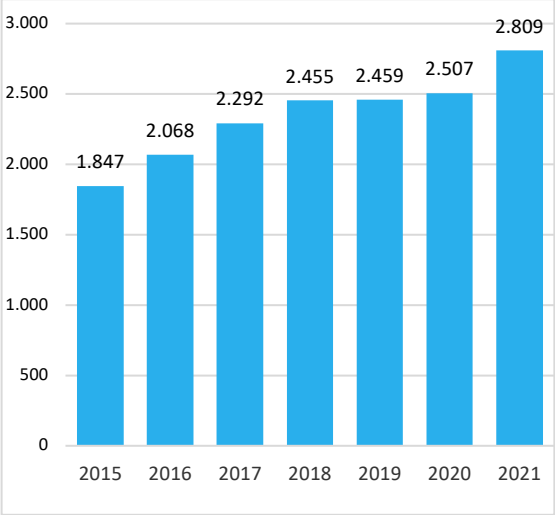
GAMBAR 4.14
PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP) BEKERJA SAMA DENGAN BPJS TAHUN 2021



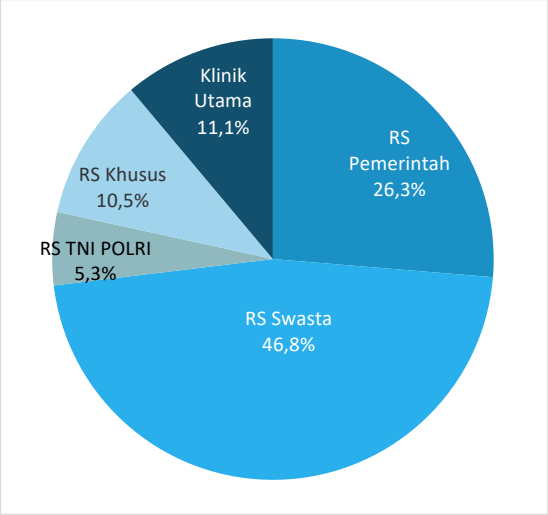
Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Jumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang bekerjasama dengan BPJS pada tahun 2021 mengalami peningkatan, dari sebanyak 19.969 faskes pada tahun 2015 menjadi 23.366 faskes pada tahun 2021. Jenis FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terbanyak adalah Puskesmas yaitu sebesar 43,1%, kemudian Klinik Pratama sebesar 30,0%, lalu kemudian dokter praktik perorangan sebesar 21,4%. Data dan informasi yang lebih rinci mengenai FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 17.b.

GAMBAR 4.15
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT (FKRTL) BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2021



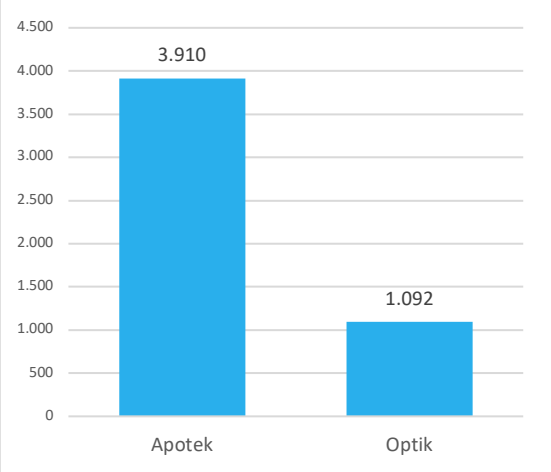
GAMBAR 4.16
PERSENTASE FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT (FKRTL) BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2021



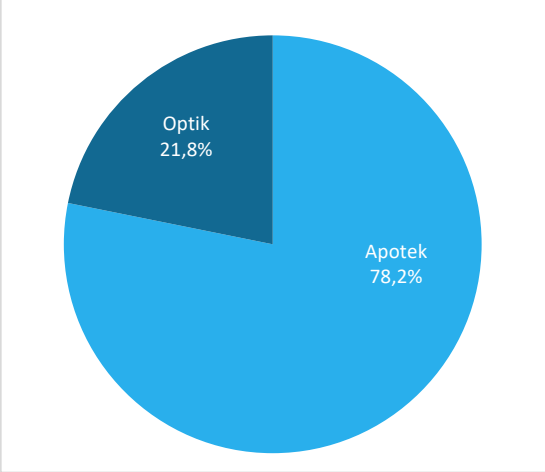
Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Sama dengan halnya FKTP, perkembangan FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan terjadi peningkatan dari sebanyak 1.847 faskes pada tahun 2015 menjadi 2.809 faskes pada tahun 2021. Jenis FKRTL terbanyak adalah RS Swasta, yaitu sebesar 46,8%, RS Pemerintah (26,3%), dan RS Khusus sebesar 10,5% dari seluruh FKRTL yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

GAMBAR 4.17
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG YANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2021



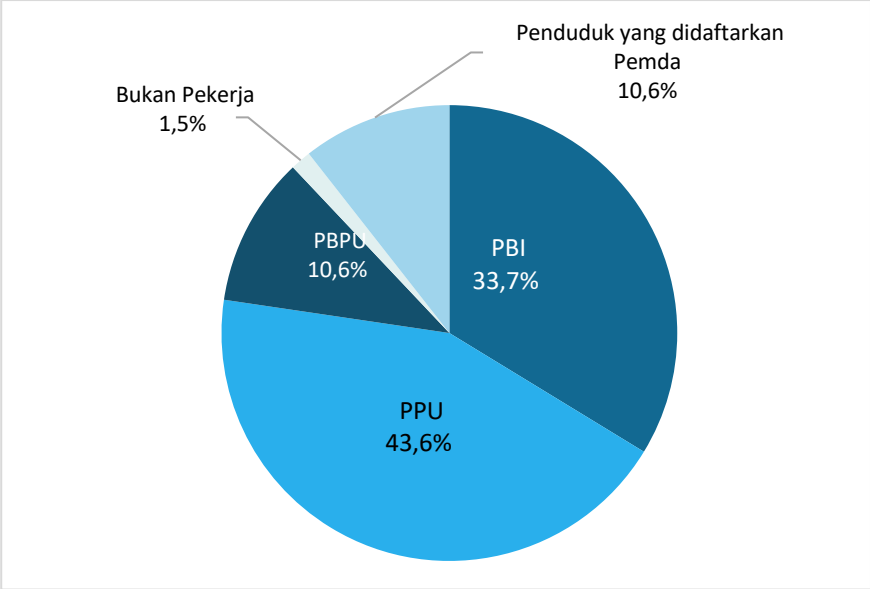
GAMBAR 4.18
PERSENTASE FASILTAS KESEHATAN PENUNJANG BEKERJASAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2021



Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Selain FKTP dan FKRTL yang berkerja sama dengan BPJS Kesehatan, pada tahun 2021 terdapat provider fasilitas kesehatan penunjang yaitu apotek dan optik. Terdapat 3.910 apotek yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan atau sebesar 78,2% dan 1.092 optik atau sebesar 21,8% dari jumlah provider penunjang yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

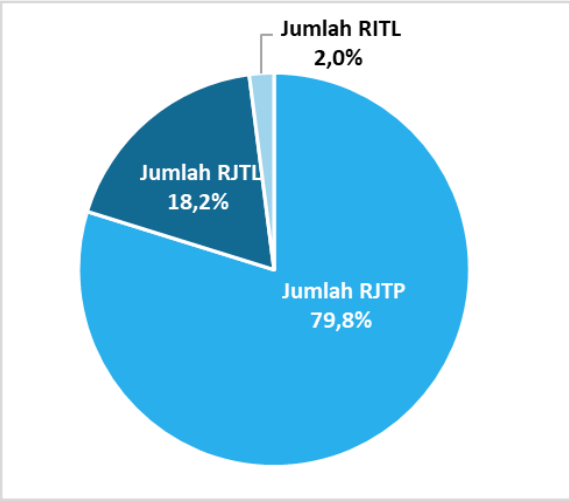
GAMBAR 4.19
PENDAPATAN IURAN BPJS KESEHATAN BERDASARKAN SEGMEN KEPESERTAAN
TAHUN 2021



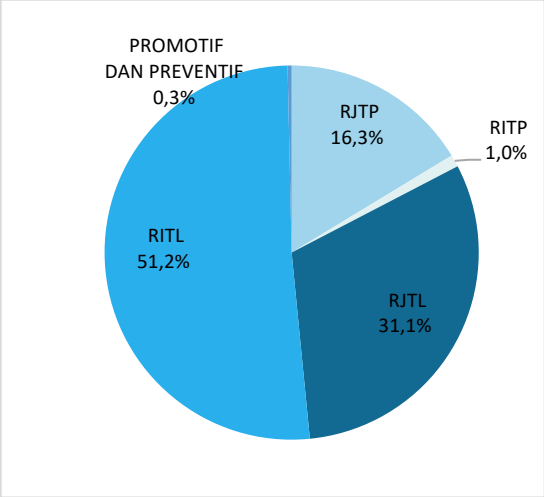
Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Total pendapatan iuran sampai dengan bulan 31 Desember 2020 adalah Rp138,5 triliun, dimana pendapatan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan segmen kepesertaan terbesar yaitu pada segmen PPU atau Pekerja Penerima Upah sebesar Rp60,9 triliun atau sekitar 43,6%, terbanyak ke dua dari segmen PBI atau Penerima Bantuan Iuran sebesar Rp47,1 triliun atau sekitar 33,7%. Sedangkan pendapatan iuran BPJS Kesehatan berdasarkan segmen kepesertaan terendah yaitu pada segmen BP atau Bukan Pekerja sebesar Rp2,0 triliun atau hanya sekitar 1,5% dari total pendapatan iuran.

GAMBAR 4.20
PEMANFAATAN PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JKN TAHUN 2021



GAMBAR 4.21
BIAYA MANFAAT PROGRAM JKN TAHUN 2021



Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Pada tahun 2021, jumlah pelayanan Kesehatan yang paling banyak dimanfaatkan oleh peserta BPJS Kesehatan adalah RJTP atau Rawat Jalan Tingkat Pertama, yaitu sebesar 79,8%. Sedangkan yang paling sedikit dimanfaatkan oleh peserta BPJS Kesehatan adalah RITL atau Rawat Inap Tingkat Lanjut sebesar 2,0%. Meski RITL dari segi jumlah merupakan yang paling sedikit dimanfaatkan oleh peserta BPJS Kesehatan, tetapi bila dari segi pembiayaan merupakan yang terbesar pemanfaatannya, yaitu sebesar 51,2% dari seluruh pembiayaan pelayanan kesehatan. Sedangkan pembiayaan terendah adalah untuk program promotif dan preventif, yaitu sebesar 0,3%. Angka ini memperlihatkan bahwa pembiayaan BPJS Kesehatan saat ini masih terkonsentrasi pada segi kuratif atau pengobatan, sedangkan untuk promotif dan preventif hanya mengambil sedikit sekali porsi dari pembiayaan BPJS Kesehatan.

Sampai dengan akhir Desember 2021, terdapat delapan penyakit katastropik dalam pembiayaan BPJS Kesehatan. Penyakit katastropik merupakan penyakit yang membutuhkan biaya tertinggi dalam pelayanan Kesehatan JKN. Penyakit dengan biaya terbanyak yaitu penyakit jantung, yang membutuhkan hampir 8,6 triliun rupiah untuk pembiayannya. Penyakit jantung juga merupakan jumlah kasus penyakit yang terbanyak dibiayai oleh BPJS Kesehatan, yaitu sebanyak 12.934.931 kasus. Sedangkan penyakit katastropik dengan biaya terendah yaitu Sirosis Hepatis, yang dibiayai BPJS Kesehatan sebesar lebih dari 238,4 milyar rupiah dengan kasus sebanyak 160.152 kasus. Meskipun demikian, jika dilihat dari rata-rata pembiayaan per kasus, tiga teratas penyakit dengan biaya terbesar per kasus merupakan penyakit terkait kelainan pada darah, yaitu Hemofilia, Leukemia, dan Thalasemia.

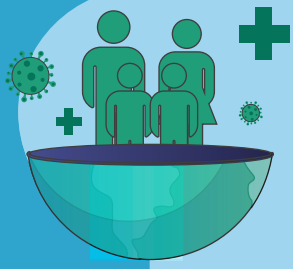
TABEL 4.2

JUMLAH KASUS DAN BIAYA KATASTROPIK DALAM PROGRAM JKN TAHUN 2021

No	Katastx`ropik	Realisasi s/d 31 Desember 2021		
		Kasus	Biaya	Rata-rata Biaya Per Kasus
1	Jantung	12.934.931	8.671.706.289.303	670.410
2	Kanker	2.595.520	3.500.655.437.003	1.348.730
3	Strok	1.992.014	2.163.344.987.900	1.086.009
4	Gagal Ginjal	1.417.104	1.781.134.745.860	1.256.884
5	Thalasemia	281.577	604.616.997.602	2.147.253
6	Hemofilia	98.225	590.659.296.753	6.013.330
7	Leukemia	137.749	364.611.205.552	2.646.925
8	Sirosis Hepatis	160.152	238.497.880.605	1.489.197
Total		**19.617.272**	**17.915.226.840.578**	

Sumber: Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

***



Bab V.

KESEHATAN KELUARGA



V. KESEHATAN KELUARGA

Pembangunan keluarga dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Selain lingkungan yang sehat, kondisi kesehatan dari tiap anggota keluarga sendiri juga merupakan salah satu syarat dari keluarga yang berkualitas. Keluarga berperan terhadap optimalisasi pertumbuhan, perkembangan, dan produktivitas seluruh anggotanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi dan menjamin kesehatan anggota keluarga. Di dalam komponen keluarga, ibu dan anak merupakan kelompok rentan. Hal ini terkait dengan fase kehamilan, persalinan dan nifas pada ibu dan fase tumbuh kembang pada anak. Hal ini yang menjadi alasan pentingnya upaya kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia.

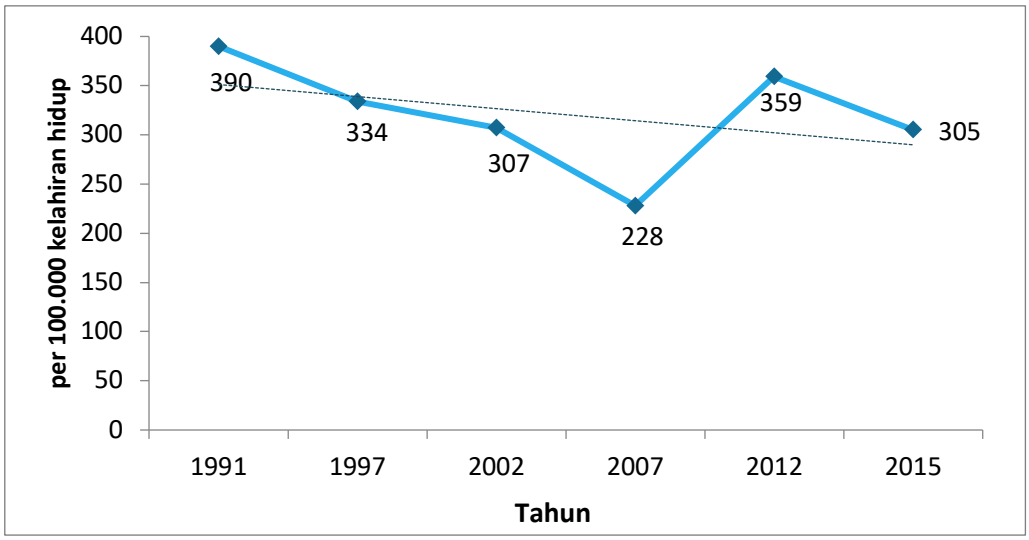
Ibu dan anak merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Ibu dan anak merupakan kelompok rentan terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya secara umum, sehingga penilaian terhadap status kesehatan dan kinerja upaya kesehatan ibu dan anak penting untuk dilakukan.

A. KESEHATAN IBU

Keberhasilan program kesehatan ibu dapat dinilai melalui indikator utama Angka Kematian Ibu (AKI). Kematian ibu dalam indikator ini didefinisikan sebagai semua kematian selama periode kehamilan, persalinan, dan nifas yang disebabkan oleh pengelolaannya tetapi bukan karena sebab lain seperti kecelakaan atau insidental. AKI adalah semua kematian dalam ruang lingkup tersebut di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Secara umum terjadi penurunan kematian ibu selama periode 1991-2015 dari 390 menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun terjadi kecenderungan penurunan angka kematian ibu, angka ini tidak berhasil mencapai target MDGs yang harus dicapai yaitu sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) tahun 2015 memperlihatkan angka kematian ibu tiga kali lipat dibandingkan target MDGs. Gambaran AKI di Indonesia dari tahun 1991 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 5.1 berikut ini.

GAMBAR 5.1
ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP
TAHUN 1991 – 2015

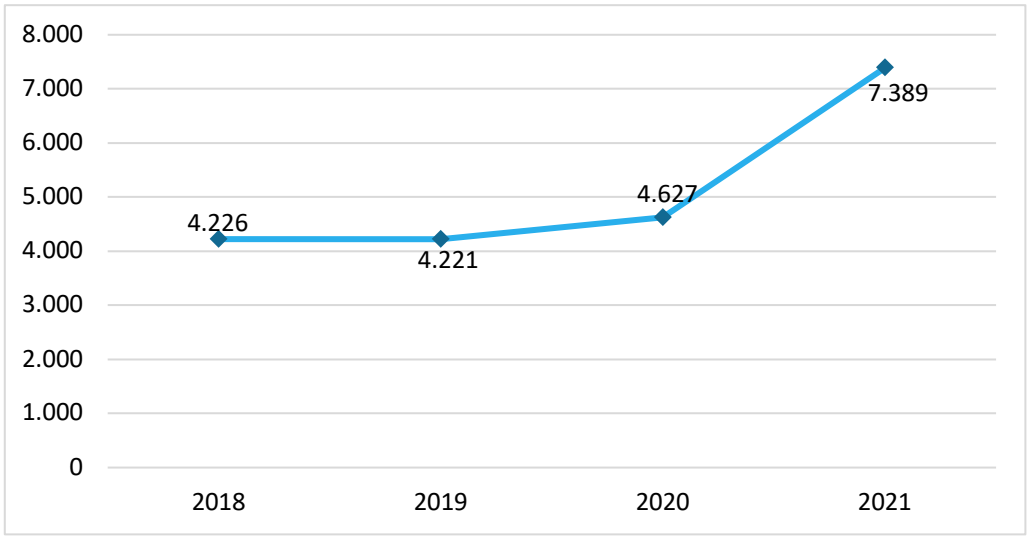


Sumber: BPS, SDKI 1991-2012

*AKI tahun 2015 merupakan hasil SUPAS 2015

Jumlah kematian ibu yang dihimpun dari pencatatan program kesehatan keluarga di Kementerian Kesehatan meningkat setiap tahun. Pada tahun 2021 menunjukkan 7.389 kematian di Indonesia. Jumlah ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2020 sebesar 4.627 kematian.

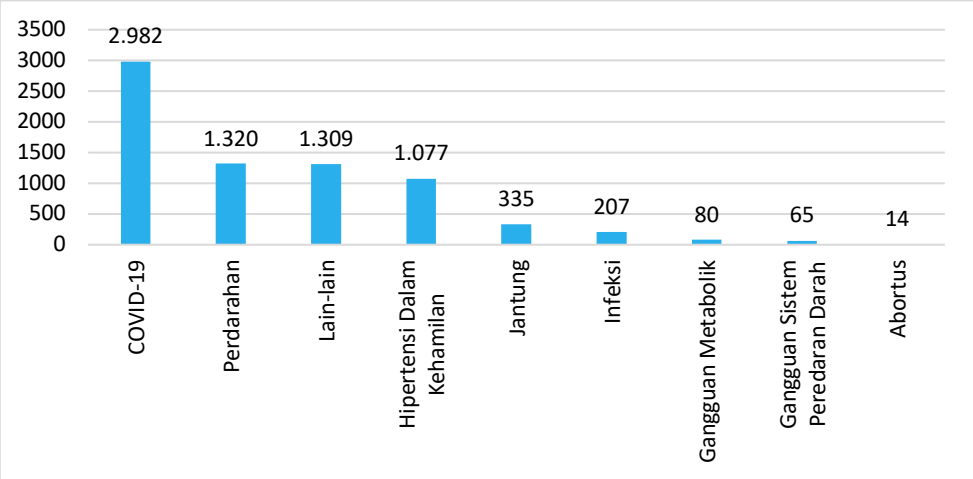
GAMBAR 5.2
JUMLAH KEMATIAN IBU DI INDONESIA
TAHUN 2018 – 2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Berdasarkan penyebab, sebagian besar kematian ibu pada tahun 2021 terkait COVID-19 sebanyak 2.982 kasus, perdarahan sebanyak 1.330 kasus, dan hipertensi dalam kehamilan sebanyak 1.077 kasus. Jumlah kematian ibu menurut provinsi disajikan pada Lampiran 21.

GAMBAR 5.3
JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB
TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana (KB) termasuk KB pasca persalinan.

Pada bagian berikut, gambaran upaya kesehatan ibu yang disajikan terdiri dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan imunisasi Tetanus Difteri bagi Wanita Usia Subur (WUS), pemberian tablet tambah darah, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan ibu nifas, puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), pelayanan kontrasepsi/Keluarga Berencana (KB), dan pemeriksaan HIV serta Hepatitis B.

1. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Ibu hamil mendapat pelayanan oleh tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Pelayanan ini dilakukan selama rentang usia kehamilan ibu yang jenis pelayanannya dikelompokkan sesuai usia kehamilan menjadi trimester pertama, trimester kedua, dan trimester ketiga. Pelayanan kesehatan ibu hamil yang diberikan harus memenuhi jenis pelayanan sebagai berikut.

1. Penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.
2. Pengukuran tekanan darah.
3. Pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA).
4. Pengukuran tinggi puncak rahim (*fundus uteri*).
5. Penentuan status imunisasi tetanus dan pemberian imunisasi tetanus sesuai status imunisasi.
6. Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan.
7. Penentuan presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ).
8. Pelaksanaan temu wicara (pemberian komunikasi interpersonal dan konseling, termasuk KB pasca persalinan).

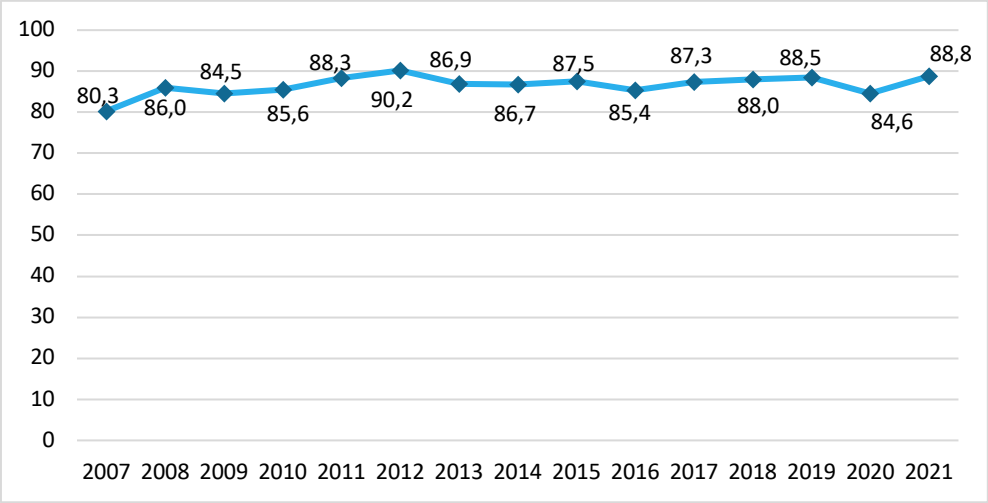
9. Pelayanan tes laboratorium sederhana, minimal tes hemoglobin (Hb) darah, pemeriksaan protein urin dan pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan sebelumnya).
10. Tatalaksana kasus sesuai indikasi.

Pelayanan kesehatan ibu hamil atau antenatal harus memenuhi frekuensi minimal enam kali pemeriksaan kehamilan dan dua kali pemeriksaan oleh dokter. Pemeriksaan kesehatan ibu hamil dilakukan minimal satu kali pada trimester pertama (usia kehamilan 0-12 minggu), dua kali pada trimester kedua (usia kehamilan 12-24 minggu), dan tiga kali pada trimester ketiga (usia kehamilan 24 minggu sampai menjelang persalinan), serta minimal dua kali diperiksa oleh dokter saat kunjungan pertama di trimester satu dan saat kunjungan ke lima di trimester tiga. Standar waktu pelayanan tersebut dianjurkan untuk menjamin perlindungan terhadap ibu hamil dan janin berupa deteksi dini faktor risiko, pencegahan, dan penanganan dini komplikasi kehamilan.

Penilaian terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil dapat dilakukan dengan melihat cakupan K1, K4, dan K6. Cakupan K1 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal pertama kali oleh tenaga kesehatan, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Cakupan K4 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit empat kali sesuai jadwal yang dianjurkan di tiap trimester, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Sedangkan, cakupan K6 adalah jumlah ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai dengan standar paling sedikit enam kali pemeriksaan serta minimal dua kali pemeriksaan dokter sesuai jadwal yang dianjurkan pada tiap semester, dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun. Indikator tersebut memperlihatkan akses pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan.

Gambar berikut ini menampilkan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2021.

GAMBAR 5.4
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4 DI INDONESIA
TAHUN 2007 – 2021

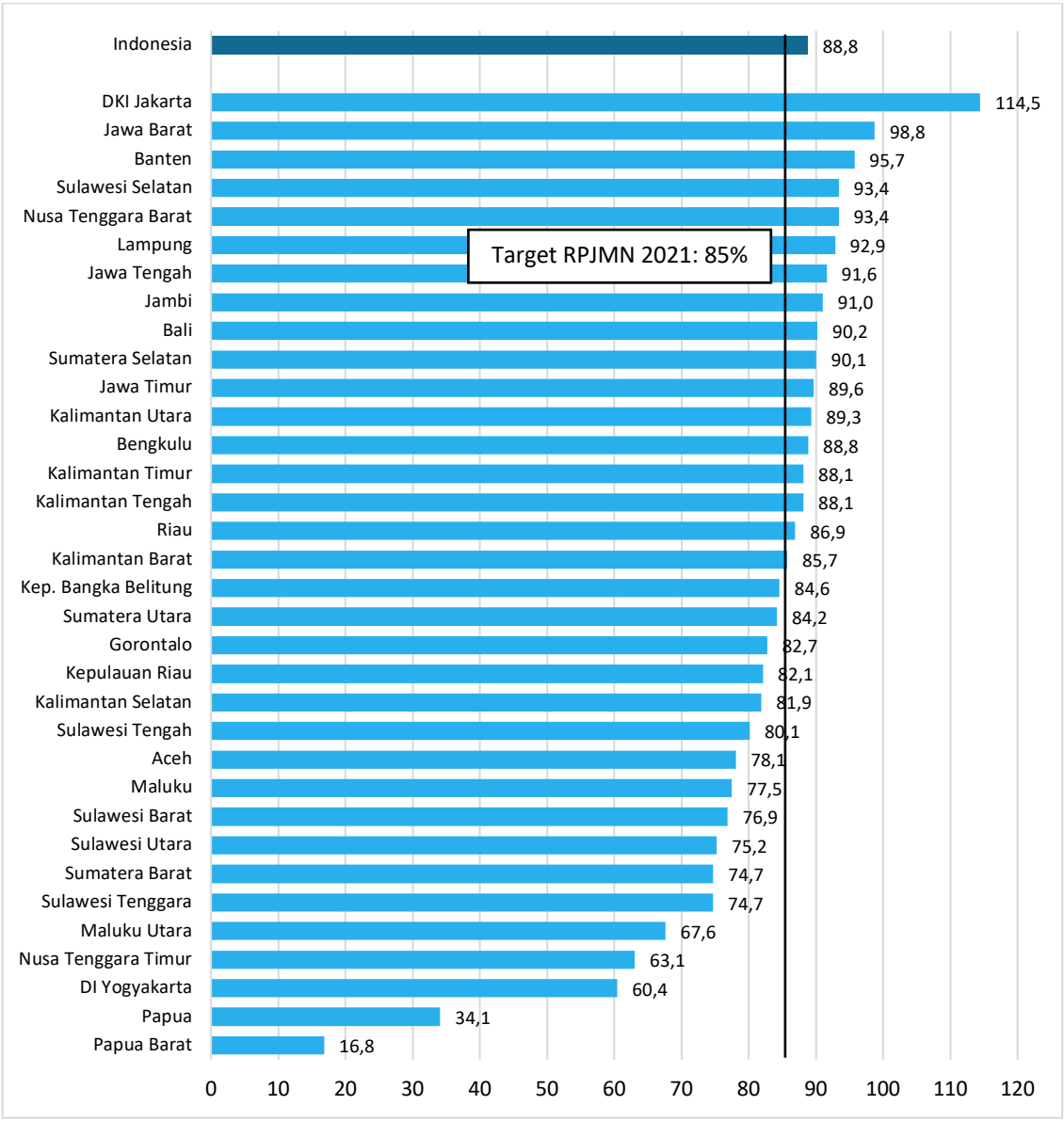


Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Sejak tahun 2007 sampai dengan 2021 cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2021 angka K4 sebesar 88,8%, angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan cakupan K4 dapat dipengaruhi adanya adaptasi baru pada situasi pandemi COVID-19 di tahun 2021, karena pada satu tahun sebelumnya masih banyak pembatasan hampir ke semua layanan rutin termasuk pelayanan kesehatan ibu, seperti ibu hamil menjadi enggan ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya karena takut tertular, adanya anjuran menunda pemeriksaan kehamilan dan kelas ibu hamil, serta adanya ketidaksiapan layanan dari segi tenaga dan sarana prasarana termasuk Alat Pelindung Diri (APD).

Gambaran cakupan kunjungan ibu hamil K4 pada tahun 2021 menurut provinsi disajikan pada gambar berikut ini.

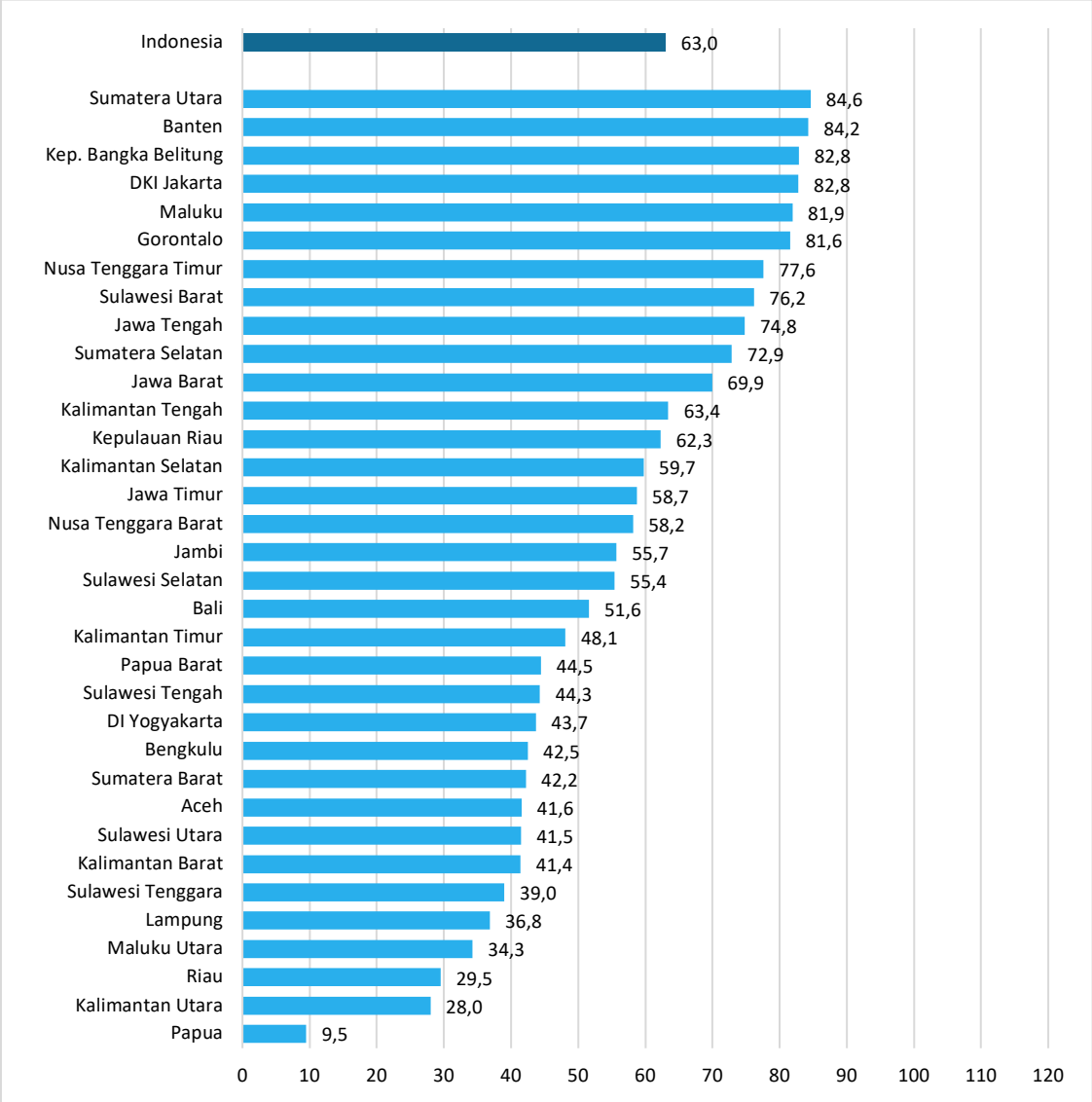
GAMBAR 5.5
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K4
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Pelayanan kesehatan ibu hamil (K4) pada tahun 2021 menunjukkan secara nasional telah mencapai target RPJMN 2021 sebesar 88,8% dari target 85%. Terdapat 17 provinsi yang telah mencapai target RPJMN 85%. Gambaran provinsi tertinggi terdapat di DKI Jakarta sebesar 114,5%, diikuti oleh Jawa Barat sebesar 98,8% dan Banten sebesar 95,7%. Terdapat dua provinsi dengan capaian kurang dari 50%, yaitu Papua dan Papua Barat. Cakupan yang melebihi 100% dikarenakan data sasaran yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan data sasaran riil yang didapatkan.

GAMBAR 5.6
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL K6
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Gambar diatas menunjukan pelayanan kesehatan ibu hamil (K6) pada tahun 2021 di Indonesia sebesar 63% dengan provinsi tertinggi yaitu Provinsi Sumatera Utara sebesar 84,6%, diikuti Banten sebesar 84,2%, dan Kepulauan Bangka Belitung sebesar 82,8%.

Selain akses ke fasilitas pelayanan kesehatan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah kualitas pelayanan yang harus ditingkatkan, di antaranya pemenuhan semua komponen pelayanan kesehatan ibu hamil harus diberikan saat kunjungan. Data dan informasi lebih rinci menurut provinsi mengenai pelayanan kesehatan ibu hamil K1, K4, dan K6 terdapat pada Lampiran 23.a.

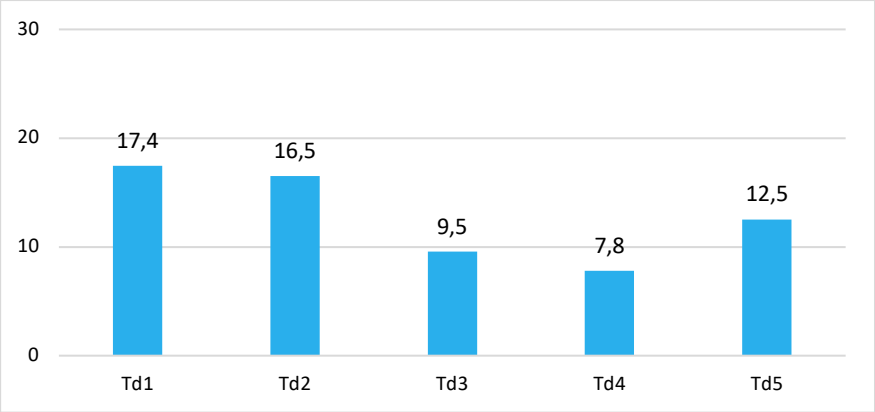
2. Pelayanan Imunisasi Tetanus Difteri bagi Wanita Usia Subur (WUS)

Infeksi tetanus merupakan salah satu penyebab kematian ibu dan kematian bayi. Kematian karena infeksi tetanus ini merupakan akibat dari proses persalinan yang tidak aman/steril atau berasal dari luka yang diperoleh ibu hamil sebelum melahirkan. Sebagai upaya mengendalikan infeksi tetanus yang merupakan salah satu faktor risiko kematian ibu dan bayi serta memberikan perlindungan tambahan terhadap penyakit difteri, maka dilaksanakan program imunisasi Tetanus Difteri (Td) bagi Wanita Usia Subur (WUS). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi mengamanatkan bahwa wanita usia subur (khususnya ibu hamil) merupakan salah satu kelompok populasi yang menjadi sasaran imunisasi lanjutan. Imunisasi lanjutan merupakan ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan dan untuk memperpanjang usia perlindungan.

Wanita usia subur yang menjadi sasaran imunisasi Td berada pada kelompok usia 15-39 tahun yang terdiri dari WUS hamil (ibu hamil) dan tidak hamil. Imunisasi Td pada WUS diberikan sebanyak 5 dosis dengan interval tertentu, berdasarkan hasil *screening* penilaian status T yang dimulai saat imunisasi dasar bayi, lanjutan baduta, lanjutan BIAS serta calon pengantin atau pemberian vaksin mengandung "T" pada kegiatan imunisasi lainnya. Imunisasi lanjutan pada WUS salah satunya dilaksanakan pada waktu melakukan pelayanan antenatal, atau pelayanan kesehatan di posyandu.

Screening status "T" pada WUS harus dilakukan sebelum pemberian vaksin. Pemberian imunisasi Td tidak perlu dilakukan bila hasil screening menunjukkan status WUS telah mencapai T5, yang dibuktikan dengan buku KIA, rekam medis, kohort atau buku register imunisasi lainnya. Kelompok ibu hamil yang sudah mendapatkan imunisasi Td2 sampai dengan Td5 dikatakan mendapatkan imunisasi Td2+. Gambar 5.7 memperlihatkan cakupan imunisasi Td1- Td5 pada ibu hamil.

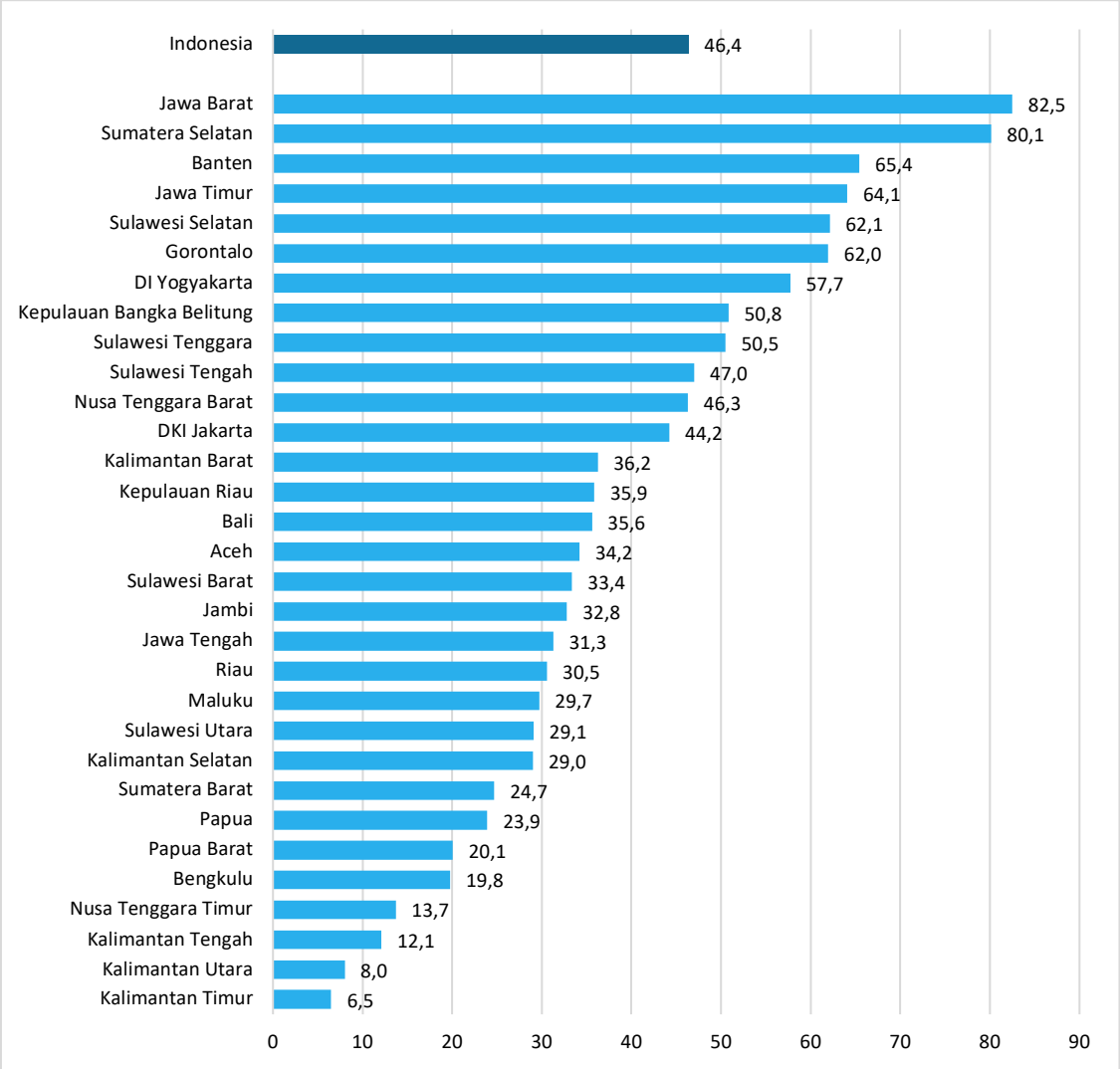
GAMBAR 5.7
CAKUPAN IMUNISASI Td1-Td5 PADA IBU HAMIL
DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Cakupan imunisasi Td1 sampai Td5 pada ibu hamil tahun 2021 masih sangat rendah yaitu kurang dari 20%. Cakupan Td5 sebesar 12,5%, menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 15,8%.

GAMBAR 5.8
CAKUPAN IMUNISASI Td2+ PADA IBU HAMIL DI INDONESIA
TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Cakupan imunisasi Td2+ pada ibu hamil tahun 2021 sebesar 46,4%. Cakupan ini lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sebesar 54,7%, dan juga lebih rendah dibandingkan cakupan pelayanan ibu hamil K4 yang sebesar 88,8%. Sedangkan Td2+ merupakan prasyarat pelayanan kesehatan ibu hamil K4.

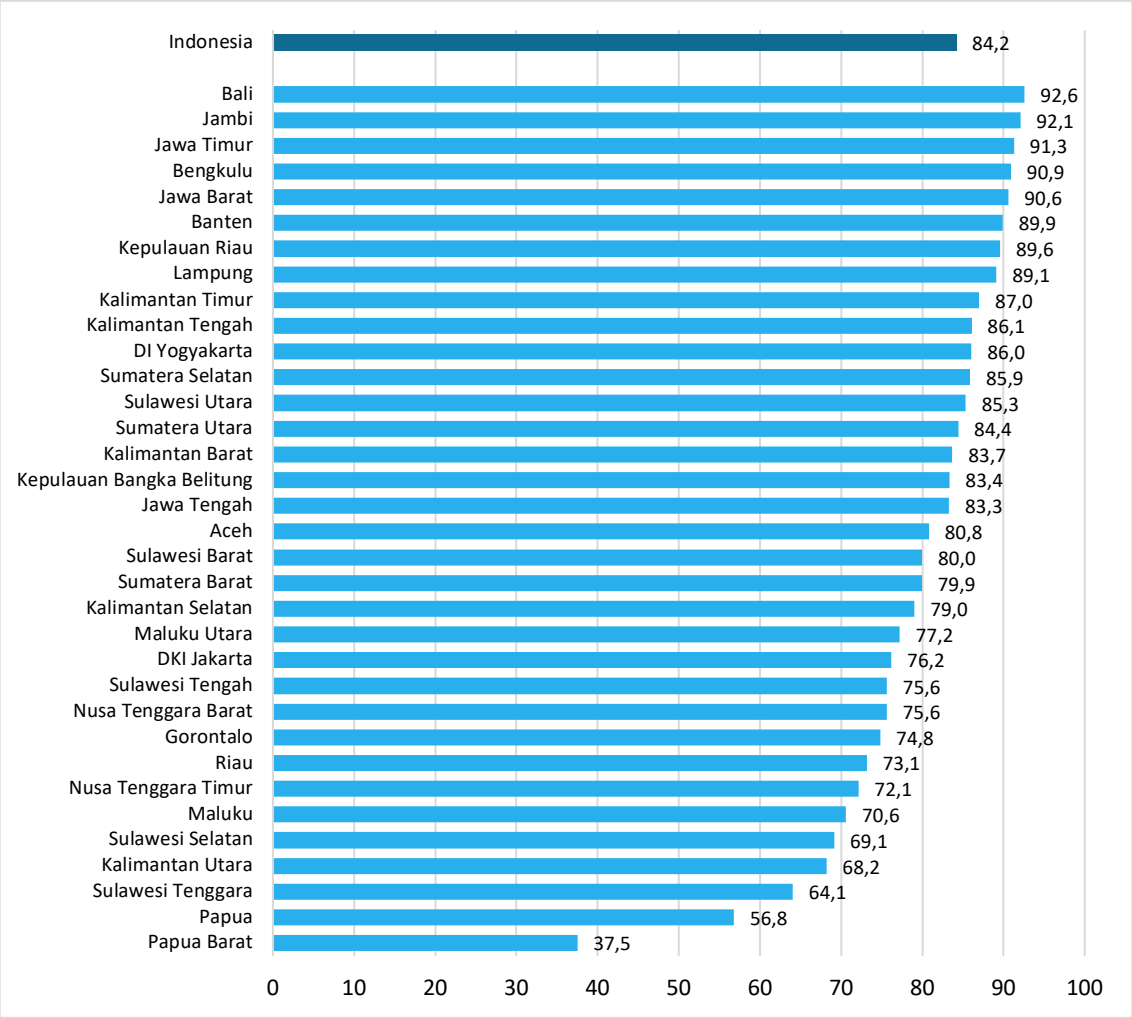
Berdasarkan distribusi provinsi, Provinsi Jawa Barat memiliki cakupan tertinggi sebesar 82,5% diikuti oleh Sumatera Selatan sebesar 80,1%, dan Banten sebesar 65,4%. Sedangkan Provinsi Sumatera Utara, Lampung, dan Maluku Utara tidak mengirimkan laporan sehingga tidak ada data cakupan imunisasi Td2+. Provinsi dengan cakupan rendah yaitu Kalimantan Timur sebesar 6,5%, Kalimantan Utara sebesar 8%, dan Kalimantan tengah sebesar 12,1%. Informasi lebih rinci mengenai imunisasi Td pada wanita usia subur terdapat pada Lampiran 24-26.

3. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) pada Ibu Hamil

Anemia pada ibu hamil dapat meningkatkan risiko kelahiran prematur, kematian ibu dan anak, serta penyakit infeksi. Anemia defisiensi besi pada ibu dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin/bayi saat kehamilan maupun setelahnya. Hasil Riskesdas 2018 menyatakan bahwa di Indonesia sebesar 48,9% ibu hamil mengalami anemia. Sebanyak 84,6% anemia pada ibu hamil terjadi pada kelompok umur 15-24 tahun. Untuk mencegah anemia setiap ibu hamil diharapkan mendapatkan TTD minimal 90 Tablet selama kehamilan.

Cakupan pemberian TTD minimal 90 Tablet pada ibu hamil di Indonesia tahun 2021 adalah 84,2%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 83,6%. Provinsi dengan cakupan tertinggi pemberian TTD pada ibu hamil adalah Provinsi Bali sebesar 92,6%, Jambi sebesar 92,1%, dan Jawa Timur sebesar 91,3%. Sedangkan Provinsi dengan capaian terendah adalah Papua Barat sebesar 37,5%, Papua sebesar 56,8%, dan Sulawesi Tenggara 64,1%. Cakupan pemberian TTD pada ibu hamil selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 27.a.

GAMBAR 5.9
CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2022

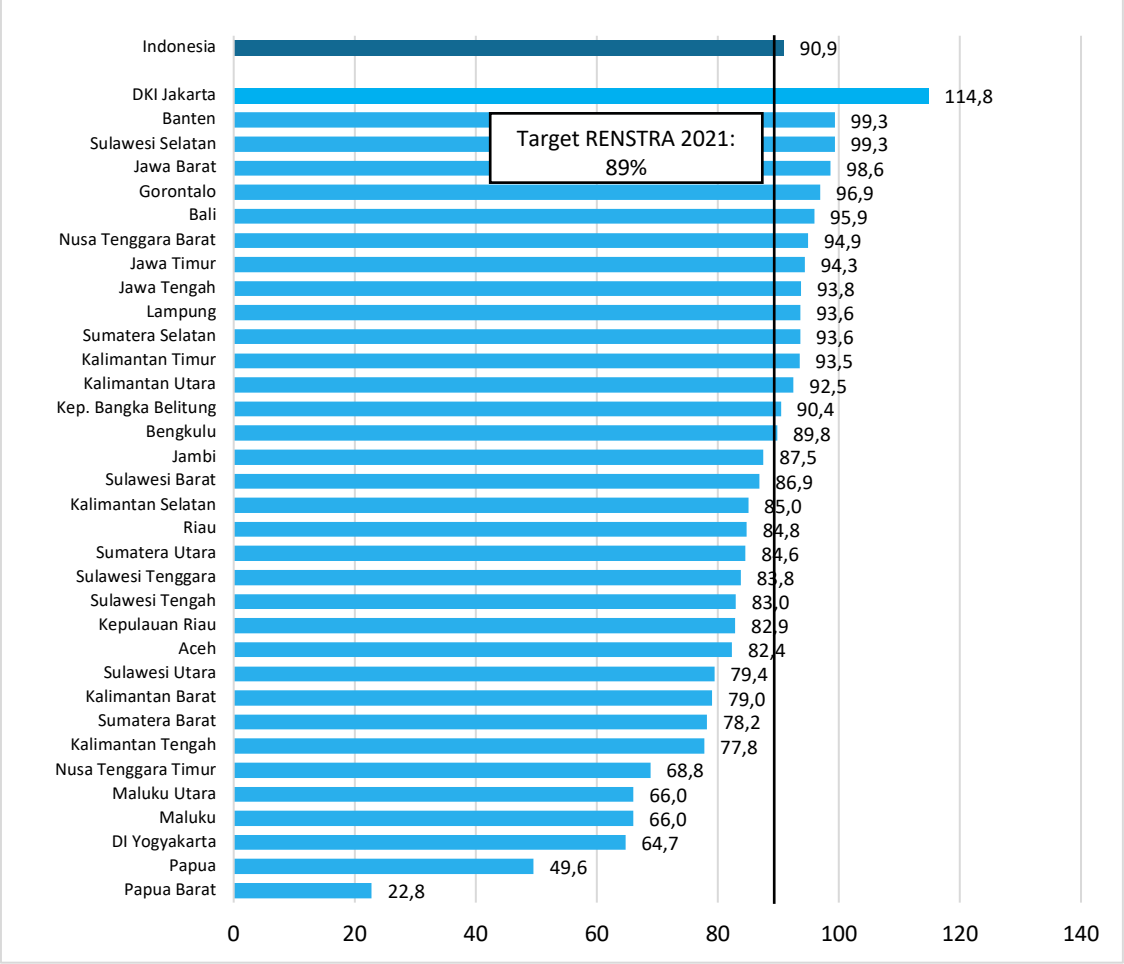
4. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Selain pada masa kehamilan, upaya lain yang dilakukan untuk menurunkan kematian ibu dan kematian bayi yaitu dengan mendorong agar setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten yaitu dokter spesialis kebidanan dan kandungan (SpOG), dokter umum, bidan, dan perawat dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Keberhasilan program ini diukur melalui indikator persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam rangka menjamin ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar, sejak tahun 2015 setiap ibu bersalin diharapkan melakukan persalinan dengan ditolong oleh tenaga kesehatan yang kompeten di fasilitas pelayanan kesehatan. Oleh sebab itu, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2020-2024 menetapkan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan (PF) sebagai salah satu indikator upaya kesehatan keluarga, menggantikan indikator pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN).

Gambar 5.10 menyajikan cakupan persalinan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan di 34 provinsi di Indonesia tahun 2021.

GAMBAR 5.10
CAKUPAN PERSALINAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2021 di Indonesia sebesar 90,9%. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2020 sebesar 86% yang belum mencapai target RENSTRA 2020. Namun demikian, pada tahun 2021 indikator ini telah memenuhi target RENSTRA 2021 sebesar 90,92% terhadap target 89%.

Peningkatan cakupan pelayanan persalinan di fasilitas kesehatan pada tahun 2021 yang cukup signifikan merupakan dampak dari upaya yang dilakukan untuk peningkatan pelayanan di masa adaptasi kesehatan baru. Harus diakui bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak besar pada terganggunya sistem pelayanan publik termasuk sistem pelayanan kesehatan. Pandemi COVID-19 menyebabkan segala sumber daya pelayanan kesehatan dikerahkan untuk fokus menangani dampak ini. Terutama di daerah, semua tenaga kesehatan di fokuskan untuk *testing*, *tracing*, dan vaksinasi serta optimalisasi tempat tidur untuk penanganan COVID-19, sehingga berdampak juga pada pelayanan ibu bersalin oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Namun, pada tahun 2021 ini terjadi penurunan jumlah kasus COVID-19 serta cakupan vaksinasi COVID-19 yang meningkat sehingga masyarakat lebih dapat mengakses fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan dapat kembali fokus dalam melayani persalinan di fasilitas kesehatan.

Provinsi dengan cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan tertinggi yaitu DKI Jakarta sebesar 114,8%, Banten sebesar 99,3%, dan Sulawesi Selatan sebesar 99,3%. Cakupan yang melebihi 100% ini karena data sasaran yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan data riil/realisasi yang didapatkan.

5. Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas

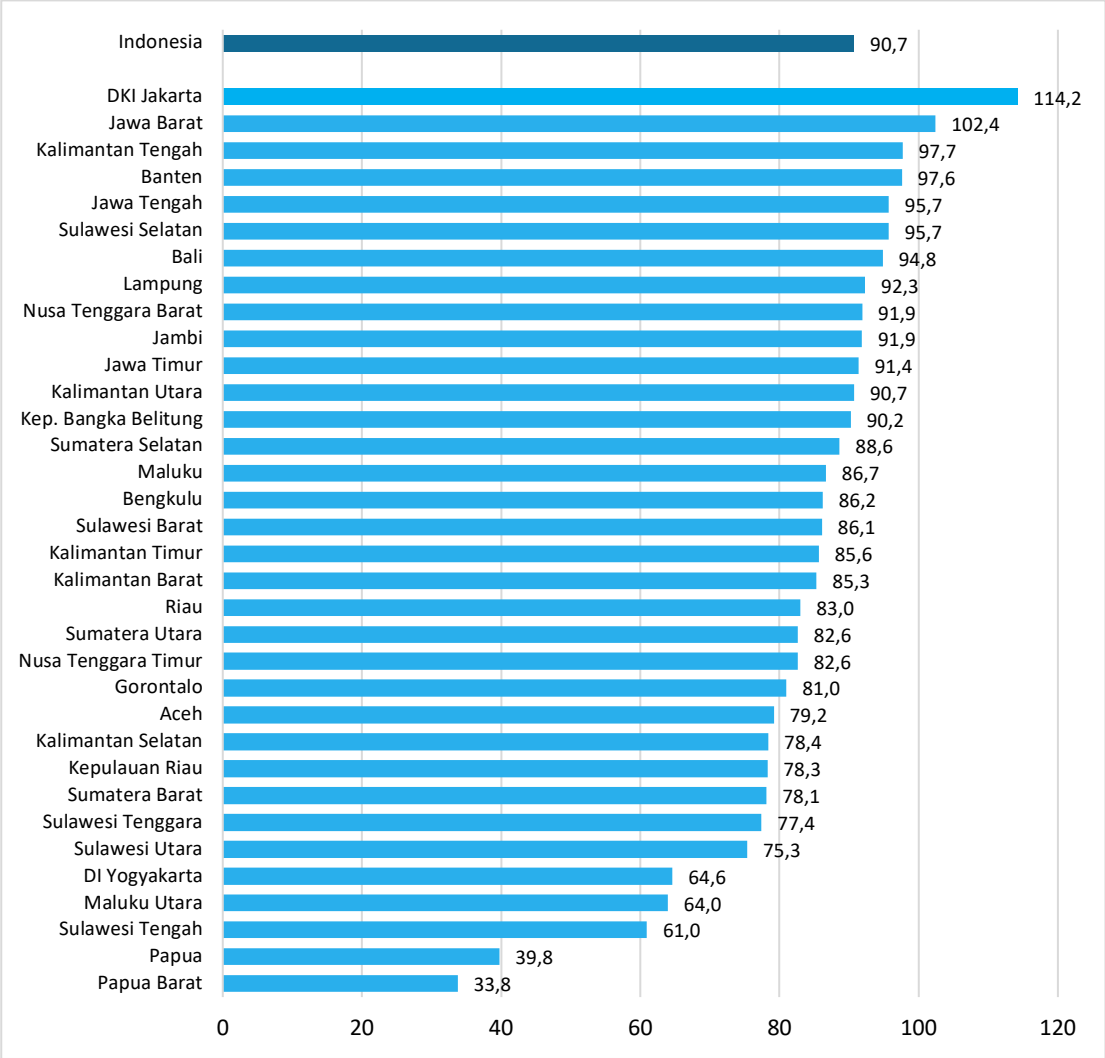
Pelayanan kesehatan ibu nifas harus dilakukan minimal empat kali dengan waktu kunjungan ibu dan bayi baru lahir bersamaan, yaitu pada enam jam sampai dengan dua hari setelah persalinan, pada hari ketiga sampai dengan hari ke tujuh setelah persalinan, pada hari ke delapan sampai dengan hari ke 28 setelah persalinan, dan pada hari ke 29 sampai dengan 42 hari setelah persalinan. Jenis pelayanan kesehatan ibu nifas yang diberikan terdiri dari:

1. Anamnesis;
2. Pemeriksaan tekanan darah, nadi, respirasi dan suhu;
3. Pemeriksaan tanda-tanda anemia;
4. Pemeriksaan tinggi *fundus uteri*;
5. Pemeriksaan kontraksi *uteri*;
6. Pemeriksaan kandung kemih dan saluran kencing;
7. Pemeriksaan *lokhia* dan perdarahan;
8. Pemeriksaan jalan lahir;
9. Pemeriksaan payudara dan pendampingan pemberian ASI Ekslusif;
10. Identifikasi risiko tinggi dan komplikasi pada masa nifas;
11. Pemeriksaan status mental ibu;
12. Pelayanan kontrasepsi pasca persalinan;
13. Pemberian KIE dan konseling;
14. Pemberian kapsul vitamin A.

Ibu bersalin yang telah melakukan kunjungan nifas sebanyak empat kali dapat dihitung telah melakukan kunjungan nifas lengkap (KF lengkap).

Cakupan kunjungan nifas menurut provinsi di Indonesia terdapat pada Gambar 5.11 berikut ini.

GAMBAR 5.11
CAKUPAN KUNJUNGAN NIFAS LENGKAP DI INDONESIA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Cakupan kunjungan KF lengkap di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 90,7%. Provinsi dengan cakupan tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta sebesar 114,2%, Jawa Barat sebesar 102,4%, dan Kalimantan Tengah sebesar 97,7%. Sedangkan Papua Barat, Papua, dan Sulawesi tengah memiliki cakupan terendah. Cakupan yang melebihi 100% dikarenakan data sasaran yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan data riil yang didapatkan.

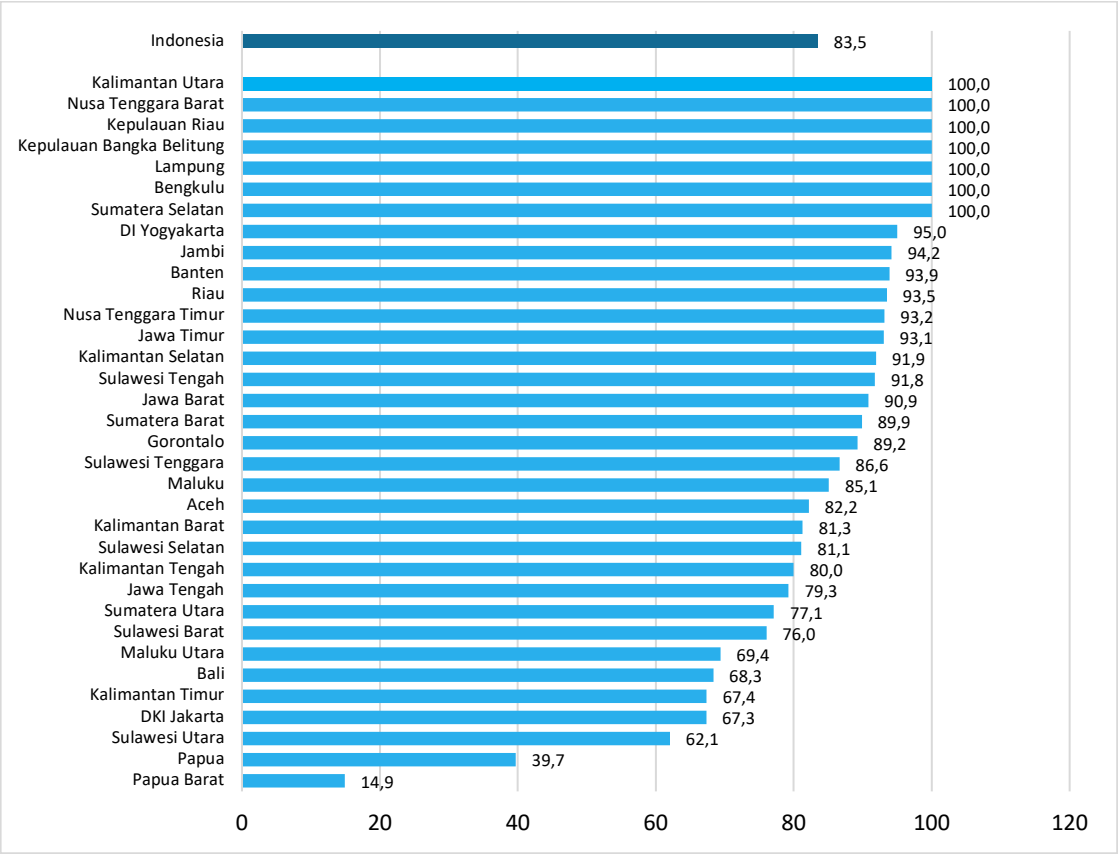
6. Puskesmas Melaksanakan Kelas Ibu Hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K)

Penurunan kematian ibu dan anak tidak dapat lepas dari peran pemberdayaan masyarakat, salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Kementerian Kesehatan menetapkan indikator persentase puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil dan persentase puskesmas melaksanakan orientasi P4K sebagai upaya menurunkan kematian ibu dan kematian anak.

Kelas ibu hamil merupakan sarana bagi ibu hamil dan keluarga untuk belajar bersama tentang kesehatan ibu hamil yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dalam kelompok. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu dan keluarga mengenai kehamilan, persalinan, nifas, KB pasca persalinan, pencegahan komplikasi, perawatan bayi baru lahir dan aktivitas fisik atau senam ibu hamil.

Cakupan puskesmas melaksanakan kelas ibu hamil didapatkan dengan menghitung puskesmas yang telah melaksanakan kelas ibu hamil dibandingkan dengan jumlah seluruh puskesmas di wilayah kabupaten/kota. Puskesmas dikatakan telah melaksanakan kelas ibu hamil apabila telah melakukan kelas ibu hamil minimal dilaksanakan di 50% desa atau kelurahan.

GAMBAR 5.12
PUSKESMAS MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021



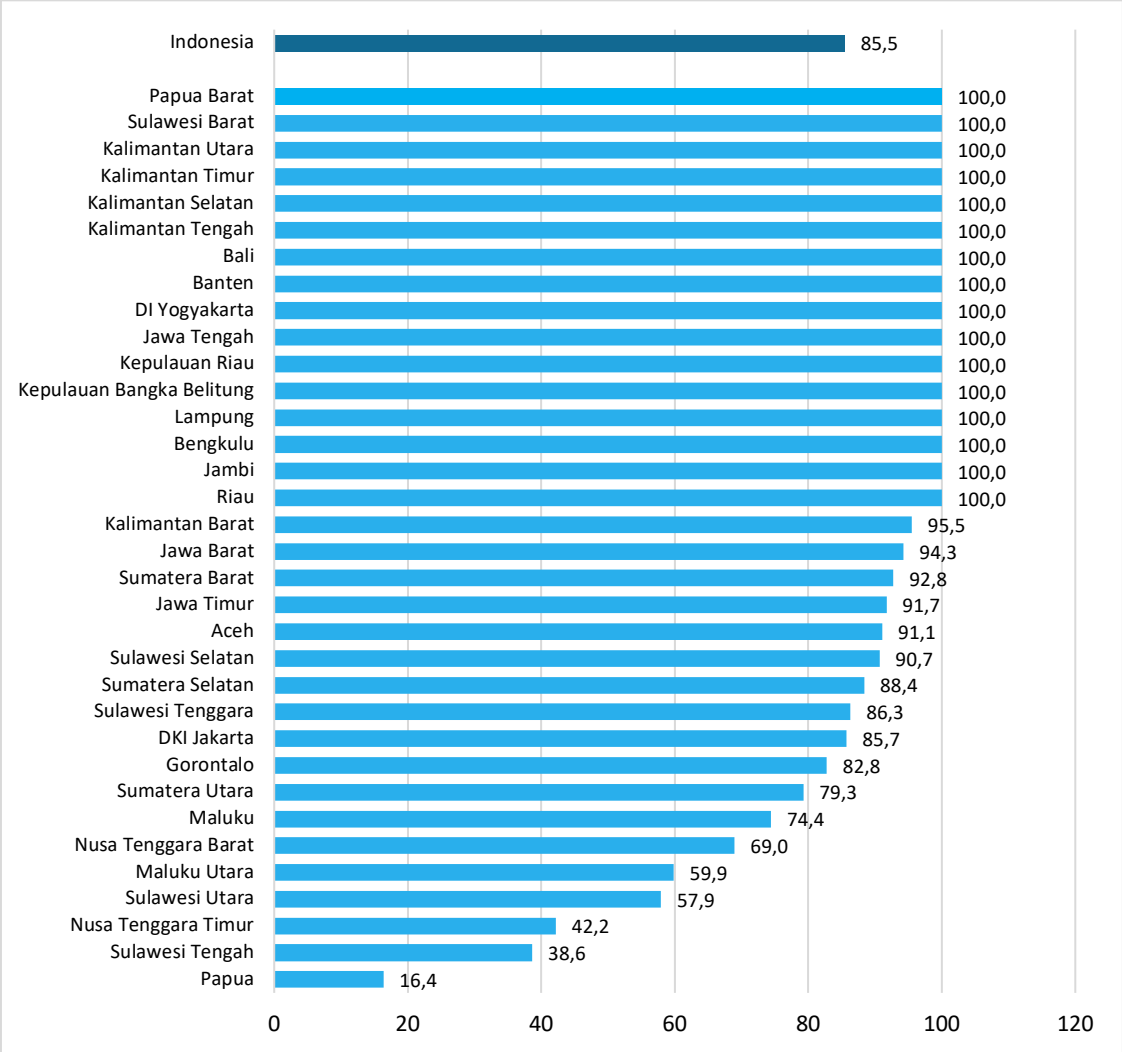
Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Pada tahun 2021 terdapat 83,5% puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 sebesar 69,9%. Terdapat tujuh provinsi dengan capaian 100% yaitu, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Bengkulu. Sedangkan Provinsi Papua Barat memiliki capaian terendah sebesar 14,9%, diikuti oleh Papua (39,7%) dan Sulawesi Utara (62,1%).

P4K merupakan suatu program yang dijalankan untuk mencapai target penurunan AKI. Program ini menitikberatkan pemberdayaan masyarakat dalam monitoring terhadap ibu hamil, bersalin, dan nifas.

Indikator puskesmas melaksanakan orientasi P4K menghitung persentase puskesmas yang melaksanakan orientasi P4K. Adapun yang dimaksud orientasi tersebut adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh puskesmas dengan mengundang kader dan/atau bidan desa dari seluruh desa yang ada di wilayahnya dalam rangka memberikan pembekalan untuk meningkatkan peran aktif suami, keluarga, ibu hamil serta masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas.

GAMBAR 5.13
PUSKESMAS MELAKSANAKAN ORIENTASI PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Pada tahun 2021 sebanyak 85,5% puskesmas teregistrasi telah melaksanakan orientasi P4K. Persentase ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebanyak 53,9% puskesmas telah melakukan orientasi P4K. Sebanyak 16 provinsi memiliki capaian 100% yang artinya seluruh puskesmas di wilayah tersebut telah melakukan orientasi P4K, provinsi tersebut yaitu Riau, Kalimantan tengah, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Papua Barat, Jambi, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Bali, Banten, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, dan Bengkulu.

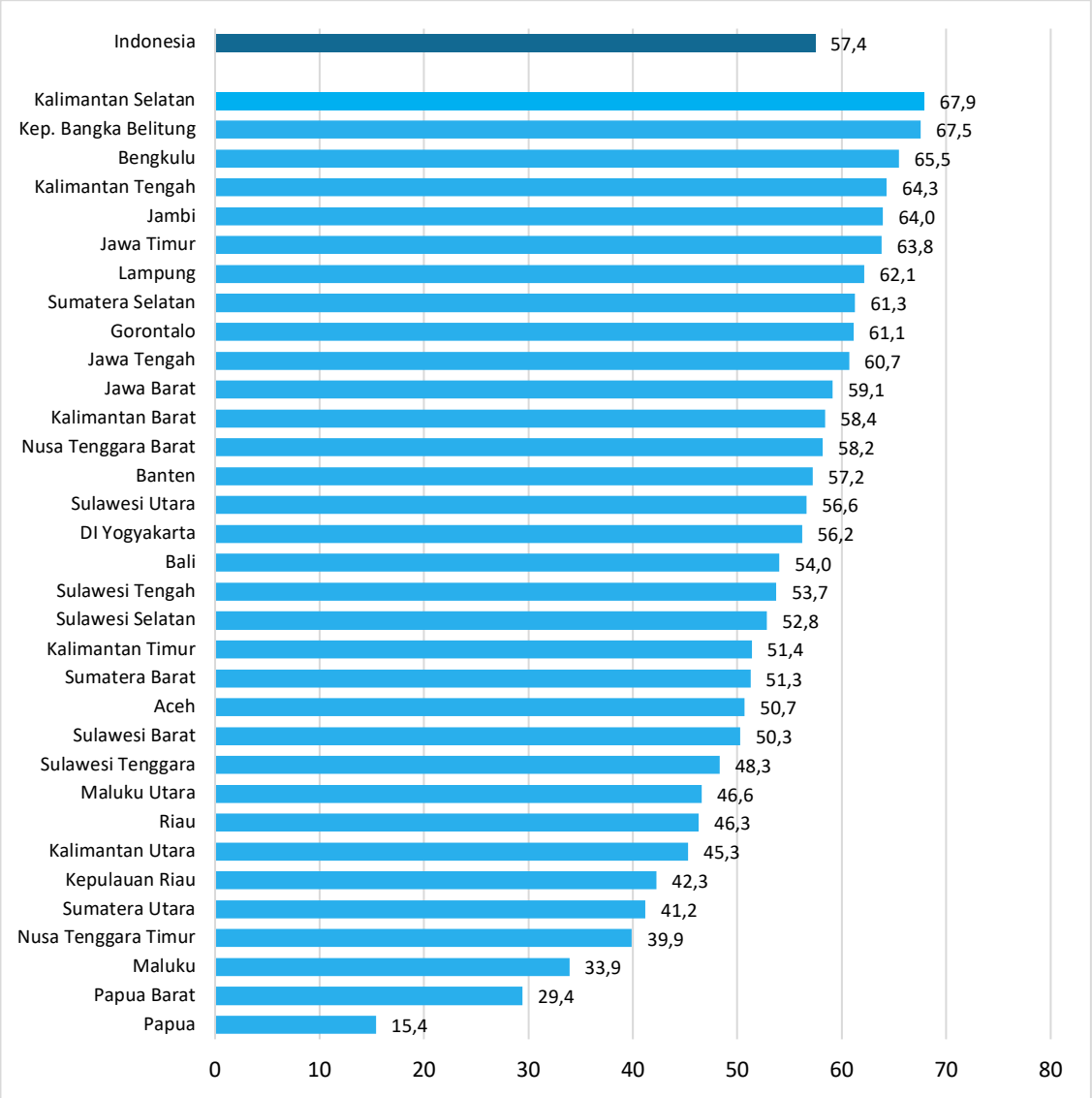
7. Pelayanan Kontrasepsi

Keluarga Berencana selanjutnya disingkat dengan KB, adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. KB merupakan salah satu strategi untuk mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu melalui:

1. Mengatur waktu, jarak dan jumlah kehamilan;
2. Mencegah atau memperkecil kemungkinan seorang perempuan hamil mengalami komplikasi yang membahayakan jiwa atau janin selama kehamilan, persalinan dan nifas;
3. Mencegah terjadinya kematian pada seorang perempuan yang mengalami komplikasi selama kehamilan, persalinan dan nifas.

Peserta KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini sedang menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. PUS peserta KB terdiri dari peserta KB modern (mengunakan alat/obat/cara KB berupa steril wanita (MOW), steril pria (MOP), IUD/AKDR). Implan/susuk, suntik, pil, kondom dan Metode Amenore Laktasi (MAL) dan peserta KB tradisional (menggunakan alat/obat/cara KB berupa pantang berkala, senggama terputus, dan alat/obat/cara KB tradisional lainnya).

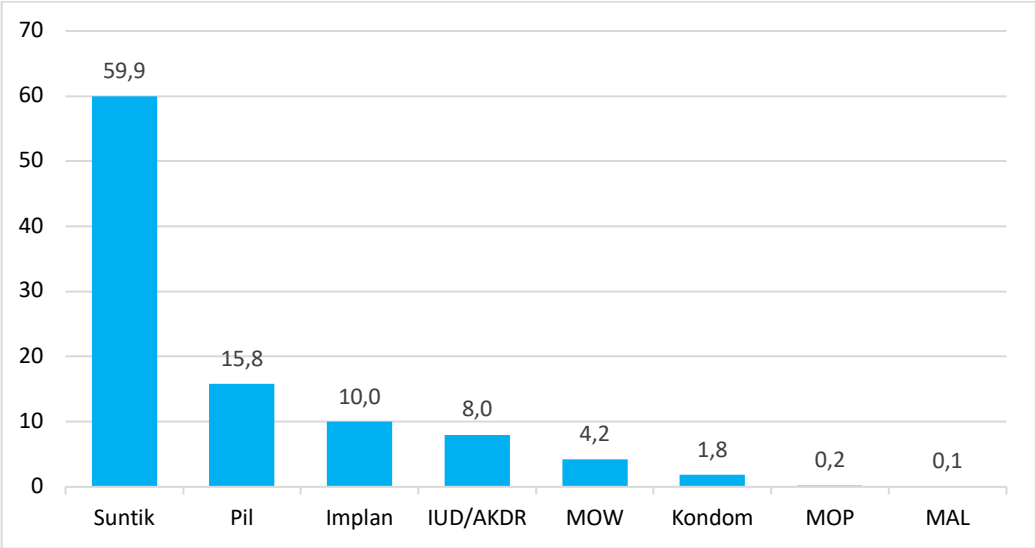
GAMBAR 5.14
PREVALENSI PUS PESERTA KB MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021



Sumber: Pendataan Keluarga Tahun 2021, BKKBN, 2022

Menurut hasil pendataan keluarga tahun 2021, BKKBN, menunjukkan bahwa angka prevalensi PUS peserta KB di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 57,4%. Berdasarkan distribusi provinsi, angka prevalensi pemakaian KB tertinggi adalah Kalimantan Selatan (67,9%), Kepulauan Bangka Belitung (67,5%), dan Bengkulu (65,5%), sedangkan terendah adalah Papua (15,4%), Papua Barat (29,4%) dan Maluku (33,9%). Sedangkan, Provinsi DKI Jakarta tidak terdata dalam grafik diatas dikarenakan data yang bersumber dari CARIK JAKARTA belum terintegrasi ke dalam data hasil pendataan keluarga tahun 2021, BKKBN.

GAMBAR 5.15
PUS PESERTA KB MODERN MENURUT METODE KONTRASEPSI
TAHUN 2021



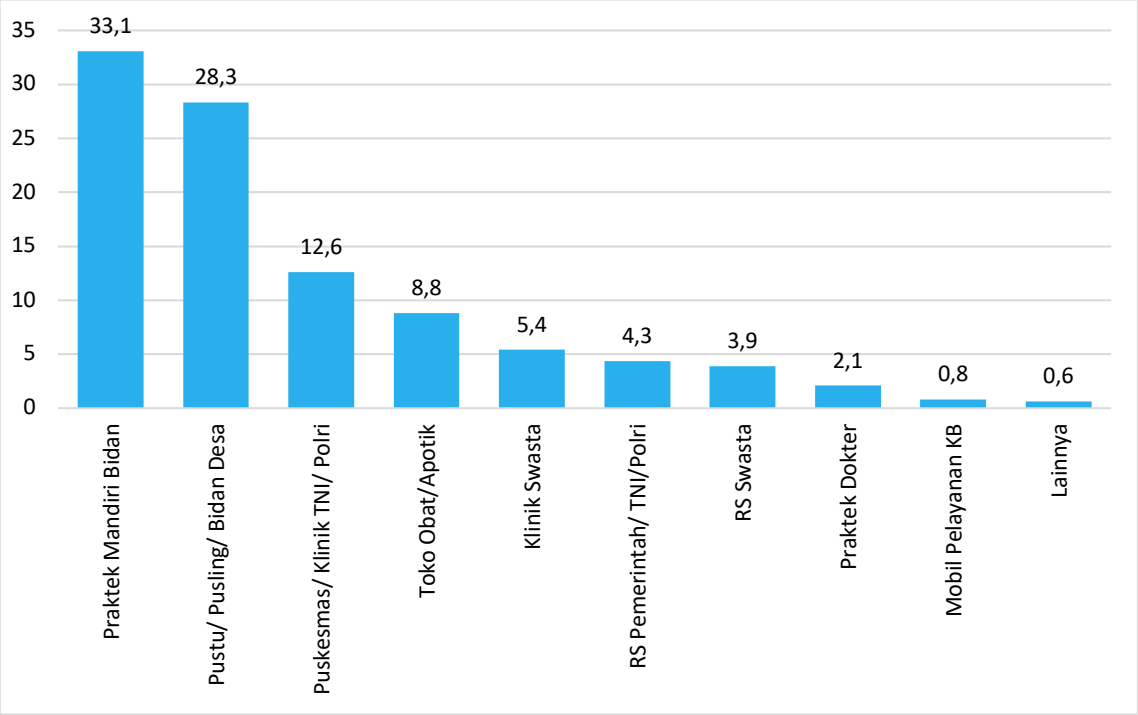
Sumber: BKKBN, 2022

Keterangan:
MOW = Metode Operasi Wanita
MOP = Metode Operasi Pria
IUD/AKDR = *Intra Uterine Device*/Alat Kontrasepsi Dalam Rahim
MAL = Metode Amenore Laktasi

Pola pemilihan jenis metode kontrasepsi modern pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sebagian besar akseptor memilih menggunakan suntik sebesar 59,9%, diikuti pil sebesar 15,8%. Pola ini terjadi setiap tahun, dimana peserta KB lebih banyak memilih metode kontrasepsi jangka pendek dibandingkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Jika dilihat dari efektivitas, kedua jenis alat/obat/cara KB ini (suntik dan pil) termasuk Metode Kontrasepsi Jangka Pendek sehingga tingkat efektifitas dalam pengendalian kehamilan lebih rendah dibandingkan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). MKJP merupakan kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama, lebih dari dua tahun, efektif dan efisien untuk tujuan pemakaian menjarangkan kelahiran lebih dari tiga tahun atau mengakhiri kehamilan pada PUS yang sudah tidak ingin menambah anak lagi. Alat/obat/cara KB yang termasuk MKJP yaitu IUD/AKDR, Implan, MOP dan MOW.

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana. Pelayanan kesehatan dalam keluarga berencana dimaksudkan untuk pengaturan kehamilan bagi pasangan usia subur untuk membentuk generasi penerus yang sehat dan cerdas. PUS bisa mendapatkan pelayanan kontrasepsi di tempat-tempat yang melayani program KB. Gambaran mengenai tempat pelayanan KB di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 5.16 berikut ini.

GAMBAR 5.16
JUMLAH PUS PESERTA KB MODERN MENURUT TEMPAT PELAYANAN DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber : Pendataan Keluarga, BKKBN, 2022

Berdasarkan tempat pelayanan KB, PUS paling banyak dilayani oleh praktek mandiri bidan sebesar 33,1%, kemudian Pustu/Pusling/Bidan Desa (28,3%), dan Puskesmas/Klinik TNI/Polri (12,6%).

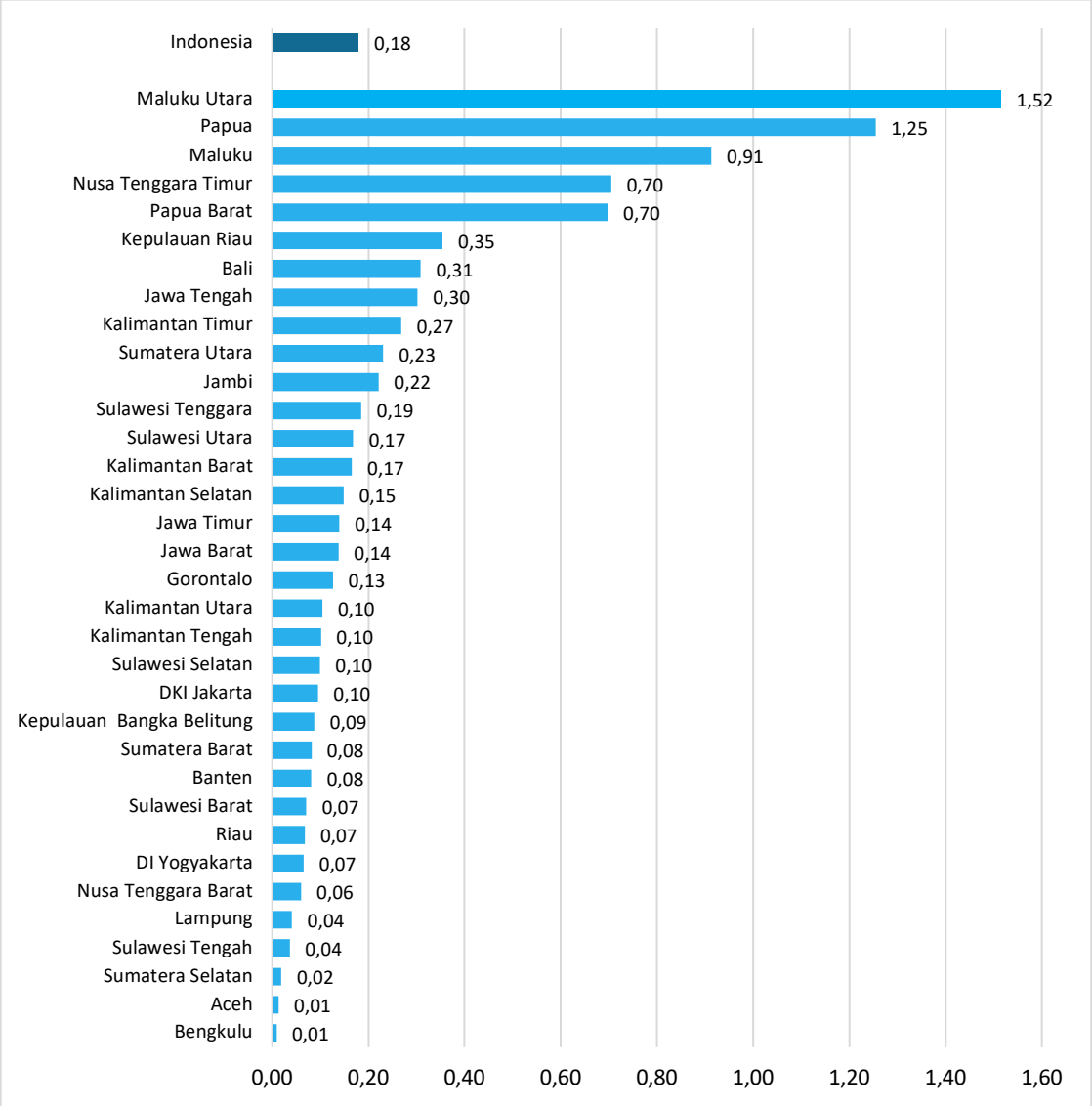
8. Pemeriksaan HIV dan Hepatitis B pada Ibu Hamil

a. HIV

Tujuan pemeriksaan HIV pada ibu hamil adalah untuk mencegah terjadinya kasus HIV pada bayi yang dilahirkan oleh ibu dengan HIV. Penularan HIV dari ibu ke bayi dapat terjadi selama masa kehamilan, saat persalinan dan selama menyusui. Infeksi HIV pada bayi dapat menyebabkan kesakitan, kecacatan dan kematian sehingga berdampak buruk pada kelangsungan dan kualitas hidup anak.

Selama tahun 2021 terdapat 2.485.430 ibu hamil yang di periksa HIV di Indonesia. Dari pemeriksaan tersebut di dapatkan 4.466 (0,18%) ibu hamil yang positif HIV. Provinsi dengan persentase ibu hamil yang positif HIV tertinggi adalah Provinsi Maluku Utara sebesar 1,52%, Papua sebesar sebesar 1,25% dan Maluku sebesar 0,91%. Data selengkapnya dapat di lihat pada Lampiran 30.b

GAMBAR 5.17
PERSENTASE IBU HAMIL YANG POSITIF HIV MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

b. Hepatitis B

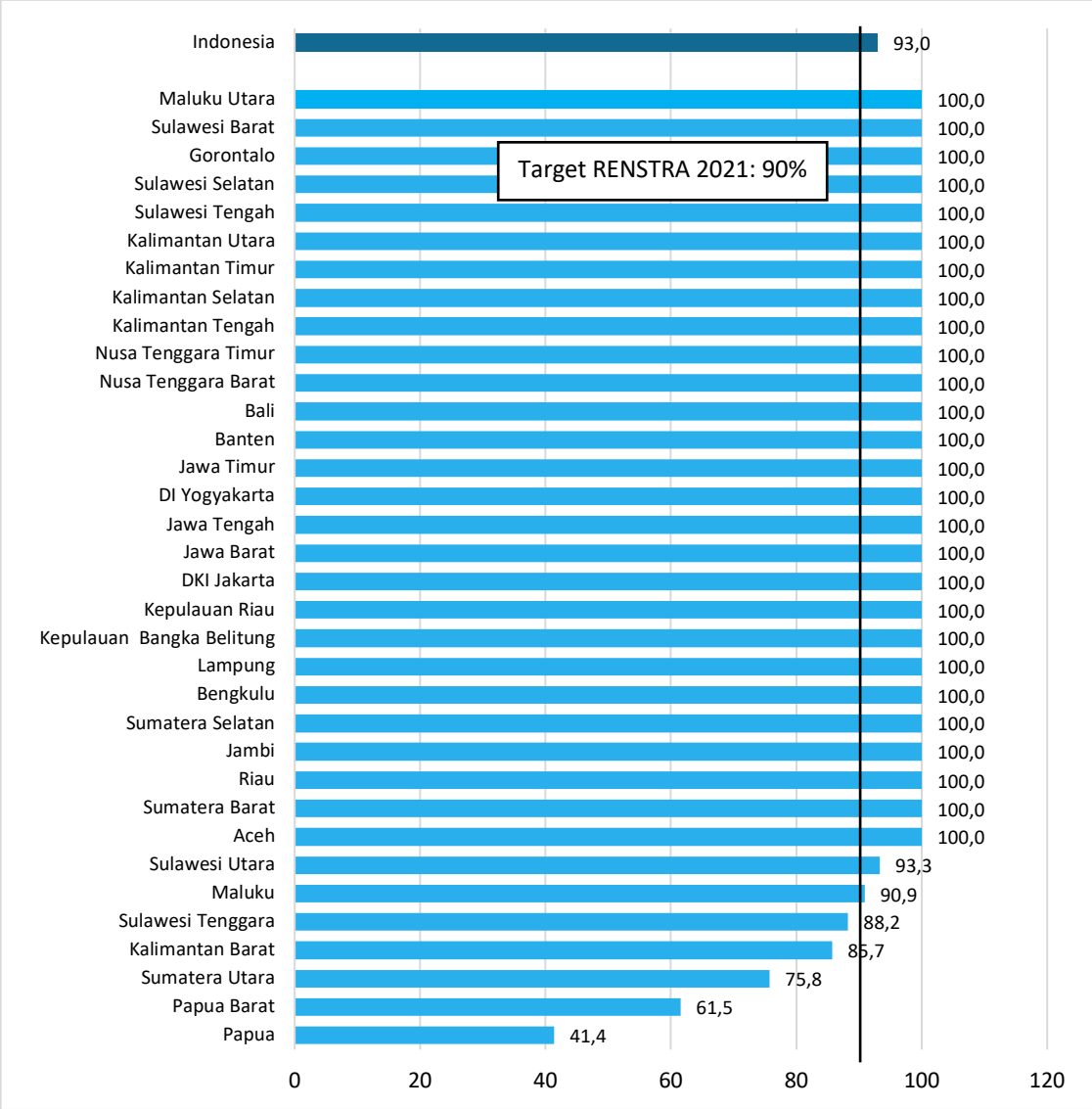
Penularan virus hepatitis B secara umum terjadi secara vertikal (dari ibu yang positif menderita hepatitis B kepada bayinya) dan horizontal (dari individu yang positif menderita hepatitis B kepada individu lainnya). Pada daerah endemik seperti Indonesia penularan hepatitis B umumnya terjadi secara vertikal terutama saat masa perinatal dan 95% bayi yang tertular saat masa perinatal akan menjadi hepatitis B kronik.

Untuk mencegah penularan dari ibu ke anak tersebut telah dilakukan upaya-upaya pencegahan, diantaranya dengan melakukan Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) pada ibu hamil menggunakan tes cepat/*Rapid Diagnostic Test* (RDT) Hepatitis B *Surface Antigen* (HBsAg). HBsAg merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus hepatitis B yang memberikan arti adanya infeksi hepatitis B. DDHB bertujuan menemukan sedini mungkin ibu hamil terinfeksi

hepatitis B (HBsAg Reaktif), kemudian ditindaklanjuti dengan serangkaian upaya terhadap bayi dari ibu terdeteksi HBsAg Reaktif tersebut yang didahului dengan pemberian vitamin K1 kemudian Vaksin Hepatitis B (HB0) dan HBIg (Hepatitis B Imunoglobulin) sebelum 24 Jam kelahiran. HBIg merupakan serum antibodi spesifik hepatitis B yang memberikan perlindungan langsung kepada bayi.

Pelaksanaan DDHB pada kelompok berisiko/ibu hamil telah dilakukan sejak tahun 2013 dengan uji coba di satu provinsi yaitu DKI Jakarta pada 5.000 ibu hamil, pelaksanaan DDHB terus diperluas secara bertahap ke seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan DDHB Tahun 2021 menurut provinsi tergambar pada grafik di bawah ini.

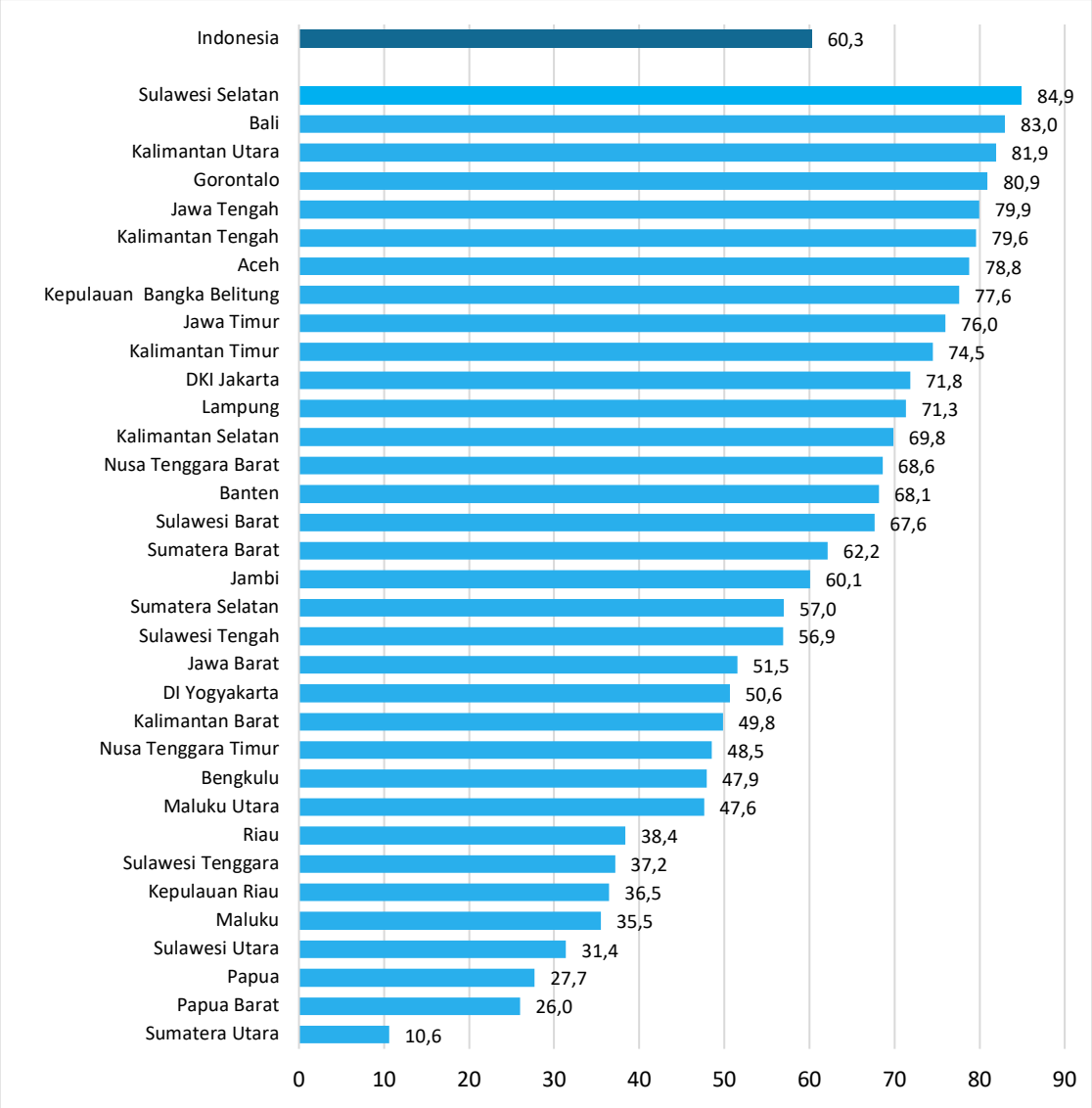
GAMBAR 5.18
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Target RENSTRA untuk kabupaten/kota yang melaksanakan DDHB tahun 2021 sebesar 90% (462 kabupaten/kota). Tahun 2021 DDHB pada ibu hamil/kelompok berisiko telah dilaksanakan di 478 kabupaten/kota atau sebesar 93% yang tersebar di 34 Provinsi. Terdapat 29 Provinsi yang sudah mencapai target. Provinsi dengan capaian tertinggi (100%) sebesar 27 provinsi sedangkan terdapat lima provinsi yang belum mencapai target, antara lain Papua (41,4%), Papua Barat (61,5%), Sumatera Utara (75,8%), Kalimantan Barat (85,7%), dan Sulawesi Tenggara (88,2%).

GAMBAR 5.19
PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



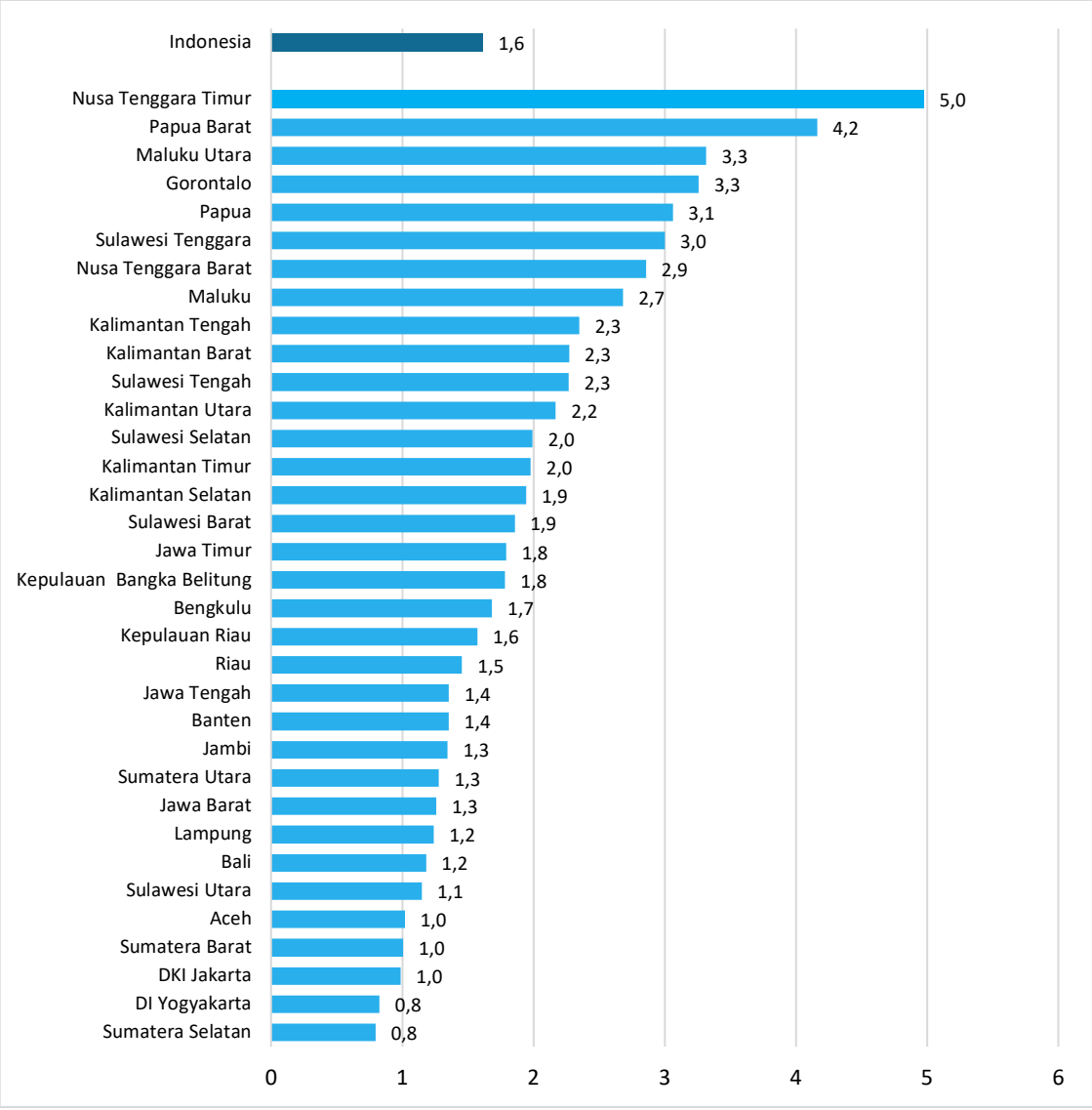
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Presentase ibu hamil melaksanakan DDHB pada tahun 2021 menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 5.19. Pada tahun 2021 sebesar 60,3% ibu hamil melaksanakan DDHB dari jumlah sasaran ibu hamil tahun 2021 sebanyak 4.887.405 ibu hamil. Provinsi dengan capaian tertinggi yaitu Sulawesi Selatan sebesar 84,9%, Bali sebesar 83%, dan Kalimantan Utara sebesar 81,9%.

Jumlah Ibu hamil yang diperiksa hepatitis B dengan menggunakan RDT HBsAg tahun 2021 yaitu sebanyak 2.946.013 orang atau sebanyak 60,3% dari ibu hamil yang menjadi sasaran. Capaian ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 2.682.297 atau 51,4% ibu hamil yang terjangkau oleh pemeriksaan.

Hasil pemeriksaan RDT HBsAg tahun 2021 menemukan sebanyak 47.550 atau 1,6% ibu hamil menunjukkan hasil reaktif.

GAMBAR 5.20
PERSENTASE IBU HAMIL HBSAG REAKTIF
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

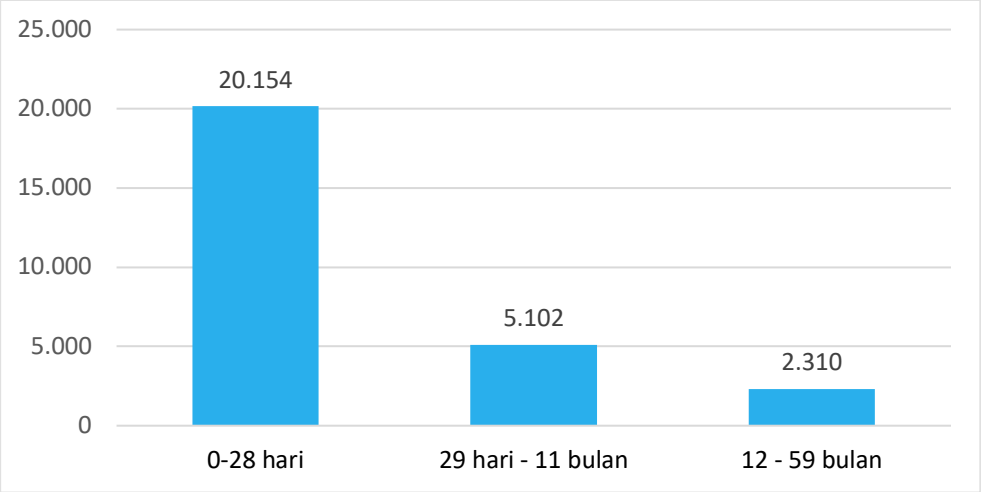
Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 1,6% ibu hamil yang menunjukkan hasil pemeriksaan HBsAg reaktif. Angka ini menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu 1,7% ibu hamil yang dinyatakan reaktif.

Distribusi provinsi memperlihatkan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persentase tertinggi sebesar 5%, diikuti oleh provinsi Papua Barat (4,2%) dan Maluku Utara (3,3%). Data/informasi terkait penyakit hepatitis B menurut provinsi terdapat pada Lampiran 30.c.

B. KESEHATAN ANAK

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini menyebabkan perlu dilakukan upaya kesehatan anak secara terpadu, menyeluruh, dan berkesinambungan. Upaya kesehatan anak dilaksanakan sejak janin dalam kandungan hingga anak berusia 18 tahun. Salah satu tujuan upaya kesehatan anak adalah menjamin kelangsungan hidup anak melalui upaya menurunkan angka kematian bayi baru lahir, bayi dan balita.

GAMBAR 5.21
JUMLAH KEMATIAN BALITA (0 – 59 BULAN) MENURUT KELOMPOK UMUR DI INDONESIA TAHUN 2021

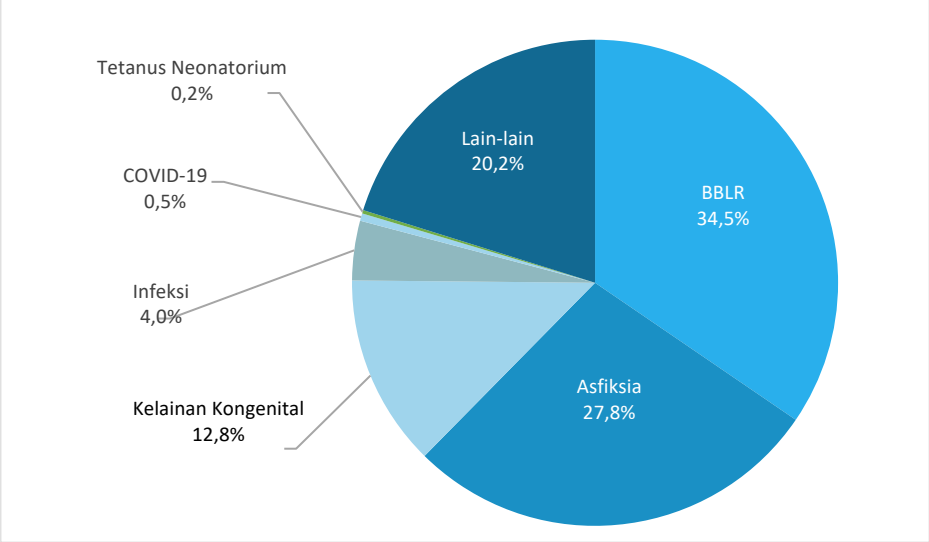


Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Tren kematian anak dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Data yang dilaporkan kepada Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak melalui *https://komdatkesmas.kemkes.go.id* menunjukkan jumlah kematian balita pada tahun 2021 sebanyak 27.566 kematian balita, menurun dibandingkan tahun 2020, yaitu sebanyak 28.158 kematian. Dari seluruh kematian balita, 73,1% diantaranya terjadi pada masa neonatal (20.154 kematian). Dari seluruh kematian neonatal yang dilaporkan, sebagian besar diantaranya (79,1%) terjadi pada usia 0-6 hari, sedangkan kematian pada usia 7-28 hari sebesar 20,9%. Sementara itu, kematian pada masa post neonatal (usia 29 hari-11 bulan)

sebesar 18,5% (5.102 kematian) dan kematian anak balita (usia 12-59 bulan) sebesar 8,4% (2.310 kematian).

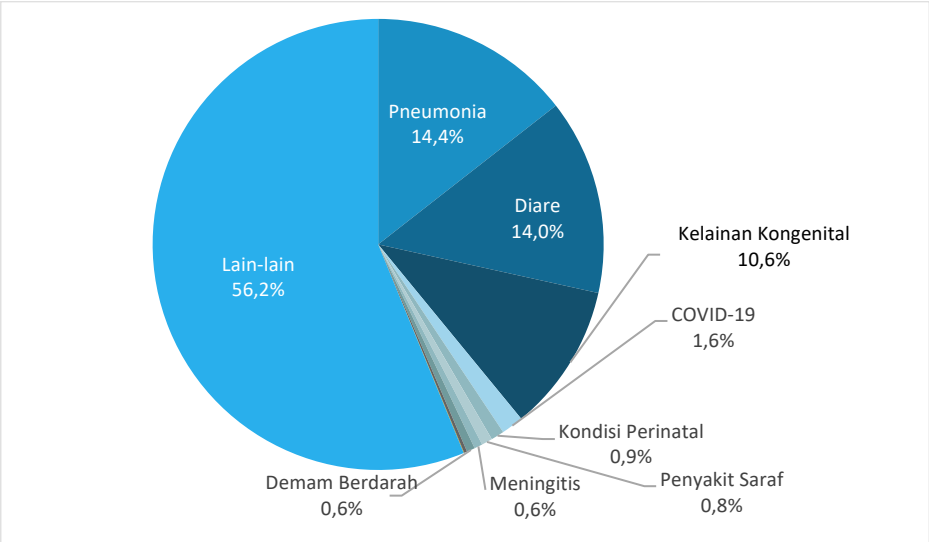
GAMBAR 5.22
PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN NEONATAL (0-28 HARI)
DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Penyebab kematian neonatal terbanyak pada tahun 2021 adalah kondisi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) sebesar 34,5% dan asfiksia sebesar 27,8%. Penyebab kematian lain di antaranya kelainan kongenital, infeksi, COVID-19, tetanus neonatorium, dan lain-lain.

GAMBAR 5.23
PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN POST NEONATAL (29 HARI-11 BULAN)
DI INDONESIA TAHUN 2021

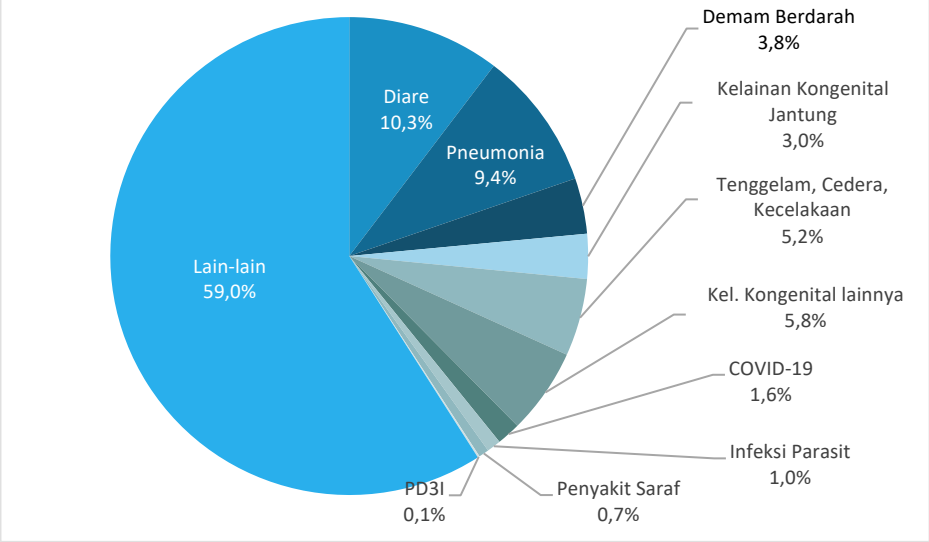


Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Penyakit infeksi masih merupakan penyebab kematian terbanyak pada masa post neonatal. Pada tahun 2021, pneumonia dan diare masih menjadi penyebab kematian terbanyak pada masa post

neonatal, yaitu sebesar 14,4% kematian karena pneumonia dan 14% kematian karena diare. Selain itu, kelainan kongenital menyebabkan kematian sebesar 10,6%. Penyebab kematian lain di antaranya adalah COVID-19, kondisi perinatal, penyakit saraf, meningitis, demam berdarah, dan lain-lain. Penyebab utama kematian pada masa neonatal dan post neonatal lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 32.a.

GAMBAR 5.24
PROPORSI PENYEBAB KEMATIAN ANAK BALITA (12-59 BULAN)
DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Penyebab utama kematian terbanyak pada kelompok anak balita (12-59 bulan) adalah diare sebesar 10,3% dan pneumonia sebesar 9,4%. Penyebab kematian lainnya, yaitu demam berdarah, kelainan kongenital jantung, tenggelam, cedera, kecelakaan, kelainan kongenital lainnya, COVID-19, infeksi parasit, dan penyebab lainnya. Penyebab utama kematian pada anak balita lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran 32.b.

Upaya kesehatan anak yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 dilakukan melalui pelayanan kesehatan janin dalam kandungan, kesehatan bayi baru lahir, kesehatan bayi, anak balita, dan prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, dan perlindungan kesehatan anak.

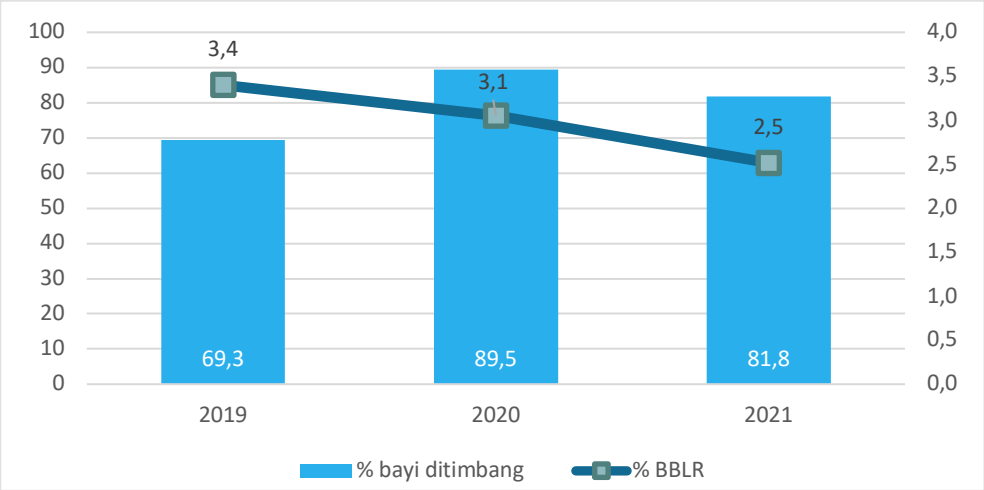
Dalam Profil Kesehatan Indonesia ini data dan informasi mengenai upaya kesehatan anak disajikan dalam indikator kesehatan anak yang meliputi: pelayanan kesehatan neonatal, imunisasi rutin pada anak, dan pelayanan kesehatan pada anak sekolah.

1. Pelayanan Kesehatan Neonatal

Pada masa neonatal (0-28 hari) terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim dan terjadi pematangan organ hampir pada semua sistem. Bayi hingga usia kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggi dan berbagai masalah kesehatan bisa muncul, sehingga tanpa penanganan yang tepat, bisa berakibat fatal. Beberapa upaya kesehatan dilakukan untuk mengendalikan risiko pada kelompok ini, di antaranya dengan mengupayakan agar persalinan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, serta menjamin tersedianya pelayanan kesehatan sesuai

standar pada kunjungan bayi baru lahir. Kunjungan neonatal idealnya dilakukan 3 kali, yaitu pada umur 6-48 jam, umur 3-7 hari, dan umur 8-28 hari.

GAMBAR 5.25
BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR)
DI INDONESIA TAHUN 2018-2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Salah satu pelayanan yang dilakukan pada bayi baru lahir adalah penimbangan. Berdasarkan data yang dilaporkan dari 34 provinsi kepada Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, pada tahun 2021 terdapat 3.632.252 bayi baru lahir yang dilaporkan ditimbang berat badannya (81,8%). Sementara itu, dari bayi baru lahir yang ditimbang terdapat 111.719 bayi BBLR (2,5%). Jumlah bayi BBLR ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 129.815 bayi (3,1%).

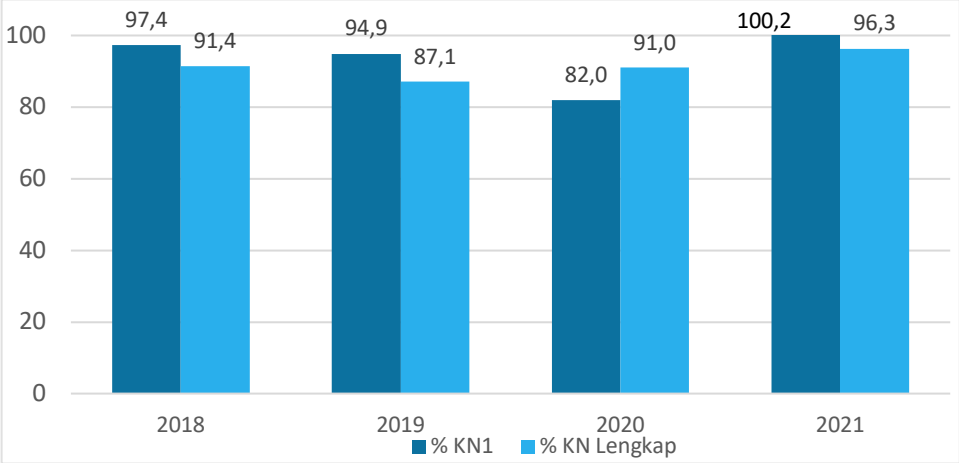
Kondisi bayi BBLR disebabkan oleh kondisi ibu saat hamil (kehamilan remaja, malnutrisi, dan komplikasi kehamilan), bayi kembar, janin memiliki kelainan atau kondisi bawaan, dan gangguan pada plasenta yang menghambat pertumbuhan bayi (*intrauterine growth restriction*). Bayi BBLR tanpa komplikasi dapat mengejar ketertinggalan berat badan seiring dengan pertambahan usia. Namun, bayi BBLR memiliki risiko lebih besar untuk *stunting* dan mengidap penyakit tidak menular saat dewasa, seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Rincian data mengenai bayi BBLR dapat dilihat pada Lampiran 33.

Indikator yang menggambarkan upaya kesehatan yang dilakukan untuk mengurangi risiko kematian pada periode neonatal (0-28 hari), yaitu cakupan kunjungan neonatal. Upaya ini untuk mendeteksi sedini mungkin masalah kesehatan yang dapat menyebabkan kematian bayi baru lahir. Upaya ini juga bertujuan untuk memastikan pelayanan yang seharusnya diperoleh bayi baru lahir dapat terlaksana. Pelayanan pada kunjungan ini dilakukan dengan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM), antara lain meliputi termasuk konseling perawatan bayi baru lahir, ASI eksklusif, pemberian vitamin K1 injeksi (bila belum diberikan) dan Hepatitis B0 injeksi (bila belum diberikan).

Indikator cakupan kunjungan neonatal diukur pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Indikator ini merupakan pengembangan dari

cakupan persentase kunjungan neonatal pertama (KN1) dari Renstra Tahun 2015-2019. Cakupan kunjungan neonatal dihitung berdasarkan jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan sesuai standar paling sedikit tiga kali, dengan distribusi waktu 1 kali pada periode 6-48 jam, 1 kali pada hari ke-3 sampai dengan hari ke-7, dan 1 kali pada hari ke-8 sampai dengan hari ke-28 setelah lahir, dibandingkan jumlah seluruh bayi baru lahir usia 0-28 hari di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu, dikalikan dengan 100%.

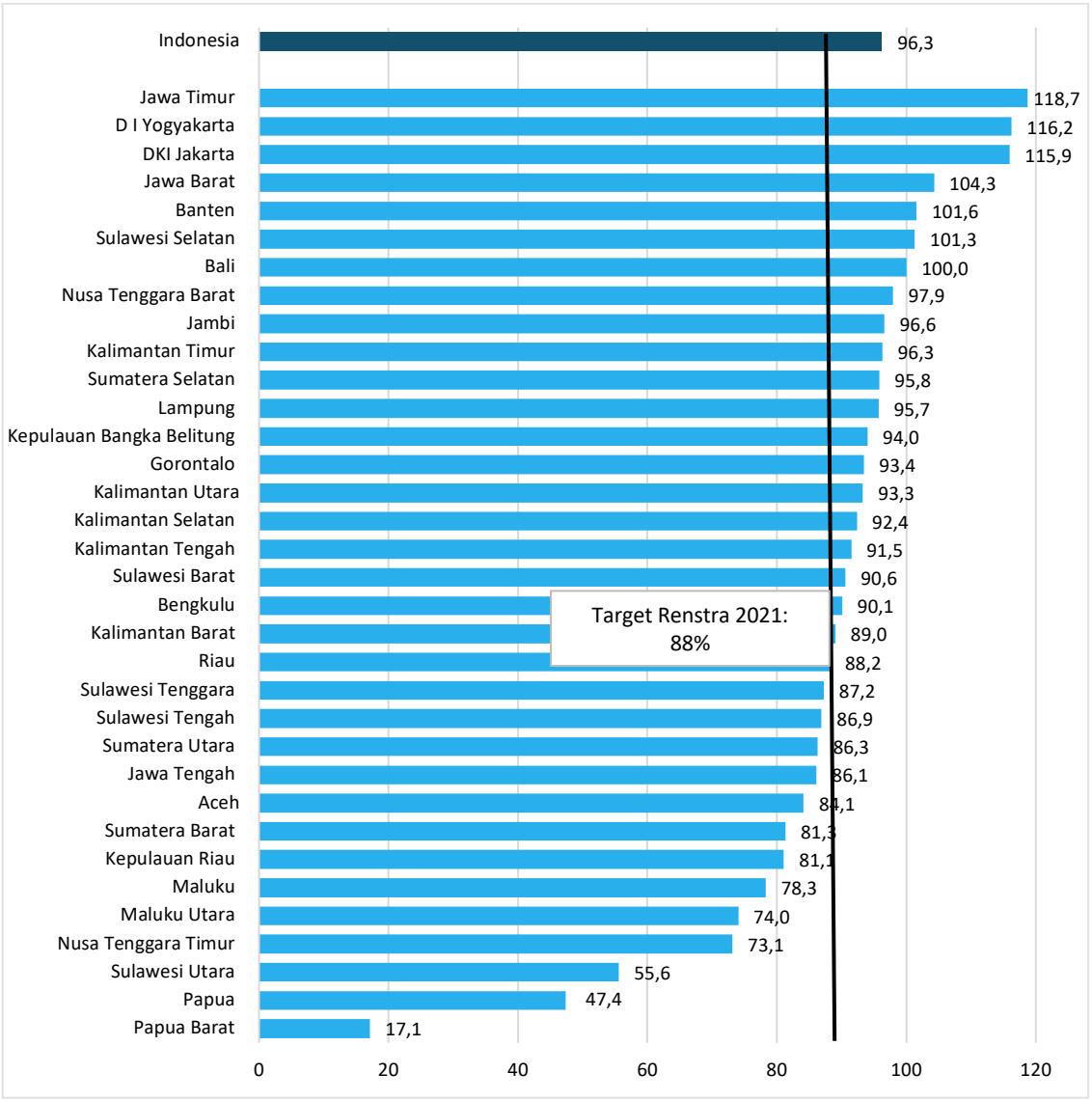
GAMBAR 5.26
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL PERTAMA (KN1) DAN KN LENGKAP DI INDONESIA TAHUN 2018-2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Jika dilihat tren beberapa tahun terakhir, cakupan KN1 menurun dari tahun 2018 sampai 2020, namun meningkat pada tahun 2021, yaitu 100,2%. Sementara itu, cakupan KN lengkap menurun pada tahun 2018 dan 2019, namun kembali meningkat pada tahun 2020 dan 2021. Cakupan KN lengkap tahun 2021 sebesar 96,3%. Angka ini sudah mencapai target Renstra tahun 2021, yaitu sebesar 88%. Sejumlah 24 provinsi (70,6%) telah memenuhi target tersebut. Cakupan KN lengkap menurut provinsi dapat dilihat pada Gambar 5.26.

GAMBAR 5.27
CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL 3 KALI (KN LENGKAP)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Hasil capaian nasional per provinsi masih terdapat disparitas cakupan KN lengkap antar provinsi yang berkisar antara 17,1% di Papua Barat dan 118,7% di Jawa Timur. Beberapa provinsi mendapatkan cakupan lebih dari 100% dikarenakan data sasaran yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan data sasaran riil. Provinsi dengan cakupan lebih dari 100%, yaitu Jawa Timur, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Selatan dan Bali. Rincian data cakupan KN1 dan KN lengkap dapat dilihat pada Lampiran 34.

2. Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita dan Prasekolah

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Bayi, Anak Balita dan Prasekolah pasal 21, pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah dilakukan melalui pemberian ASI Eksklusif hingga usia 6 bulan, pemberian ASI hingga 2 (dua) tahun, pemberian Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP ASI) mulai usia 6 (enam) bulan, pemberian imunisasi dasar lengkap bagi bayi, pemberian imunisasi lanjutan DPT/HB/Hib pada anak usia 18 bulan dan imunisasi campak pada anak usia 24 bulan, pemberian vitamin A, upaya pola mengasuh anak, pemantauan pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemantauan gangguan tumbuh kembang, Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS), serta merujuk kasus yang tidak dapat ditangani dalam kondisi stabil dan tepat waktu ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu.

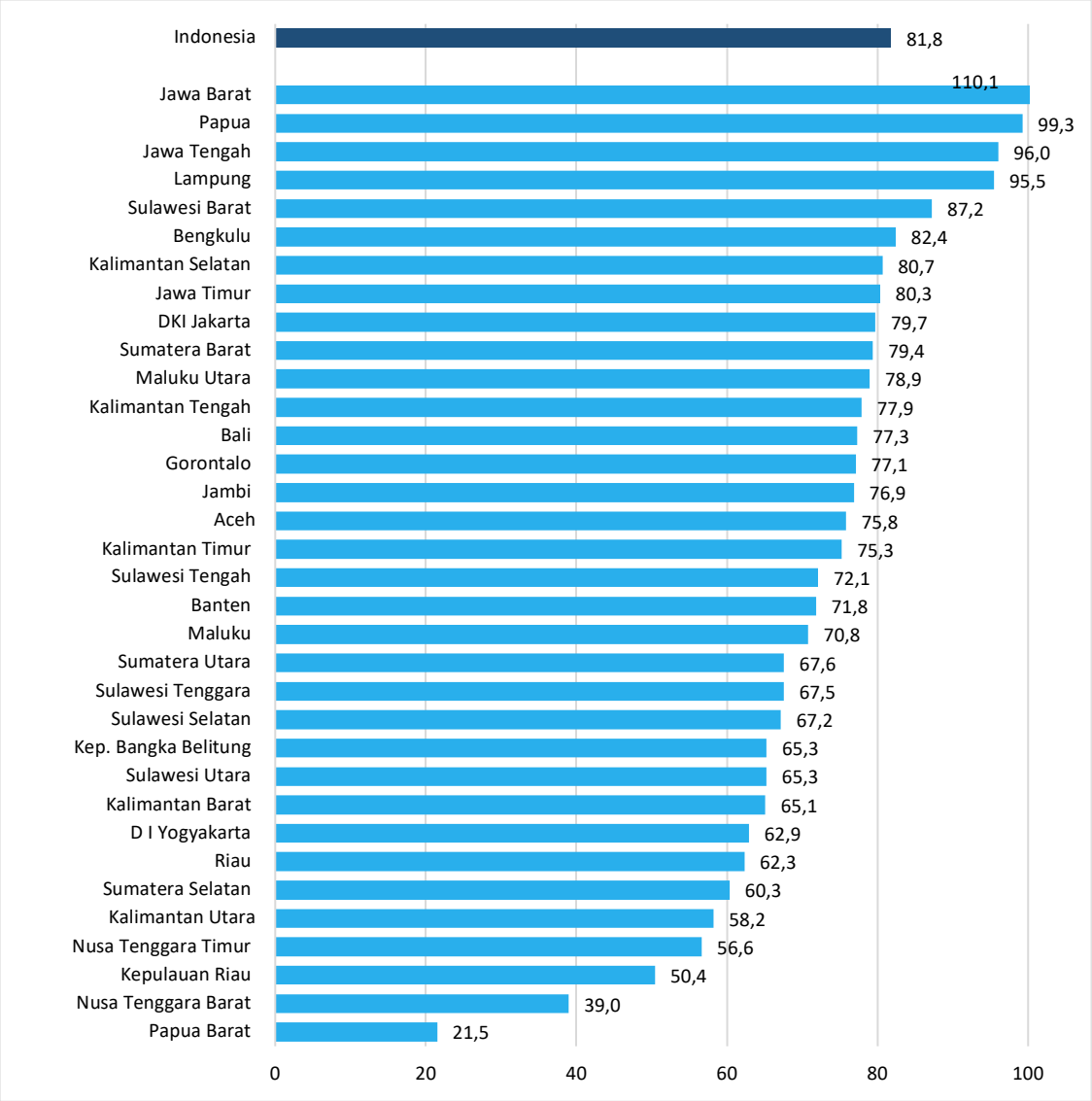
Kegiatan pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama dengan kader posyandu, guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)/Taman Kanak-kanak (TK)/Raudhatul Athfal (RA) dengan minimal pelayanan kesehatan balita meliputi penimbangan berat badan, pengukuran panjang badan/tinggi badan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A (usia 6-59 bulan), imunisasi dasar lengkap dan pelayanan balita sakit dengan pendekatan MTBS.

Pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah bertujuan untuk menurunkan terjadinya kematian bayi dan balita, meningkatkan kualitas hidup balita (menurunkan prevalensi stunting dan wasting melalui upaya pemenuhan layanan esensial sebagai pencegahan penyakit, deteksi dini risiko penyakit pada bayi, anak balita dan agar dapat ditindaklanjuti secara dini dan tepat. Hasil dari pelayanan kesehatan di posyandu, PAUD/TK/RA, puskesmas, RS serta fasilitas kesehatan lainnya dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi bagi puskesmas agar pelaksanaan peningkatan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah dapat lebih tepat sasaran dan tujuan.

Untuk menurunkan terjadinya kematian bayi dan balita, perlu dioptimalkan penggunaan buku KIA oleh ibu yang memiliki balita melalui pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Buku KIA adalah *home-base record* untuk memastikan *continuum of care (COC)* ibu dan anak serta panduan bagi keluarga dan penyedia layanan kesehatan untuk mendeteksi masalah kesehatan melalui kegiatan *monitoring* kesehatan.

Berdasarkan data Komdat Kesmas, persentase balita memiliki Buku KIA di Indonesia pada tahun 2021 adalah 81,8%. Hasil capaian nasional per provinsi menunjukkan masih terdapat disparitas cakupan persentase balita memiliki Buku KIA antar provinsi, yang berkisar antara 21,5% di Papua Barat dan 110,1 % di Jawa Barat. Provinsi dengan cakupan persentase balita memiliki Buku KIA tinggi, yaitu 110,1 % di Jawa Barat, Papua 99,3%, Jawa Tengah 96% dan Lampung 95,5%. Cakupan balita memiliki Buku KIA di Jawa Barat lebih dari 100%, hal ini dikarenakan jumlah balita riil di Provinsi Jawa Barat lebih banyak dibandingkan sasaran estimasi balita yang terdapat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/5675/2021 tentang Data Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan 2021-2025. Provinsi dengan cakupan persentase balita memiliki buku KIA terendah adalah Papua Barat (21,5%), Nusa Tenggara Barat (39%),dan Kepulauan Riau (50,4%).

GAMBAR 5.28
BALITA MEMILIKI BUKU KIA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



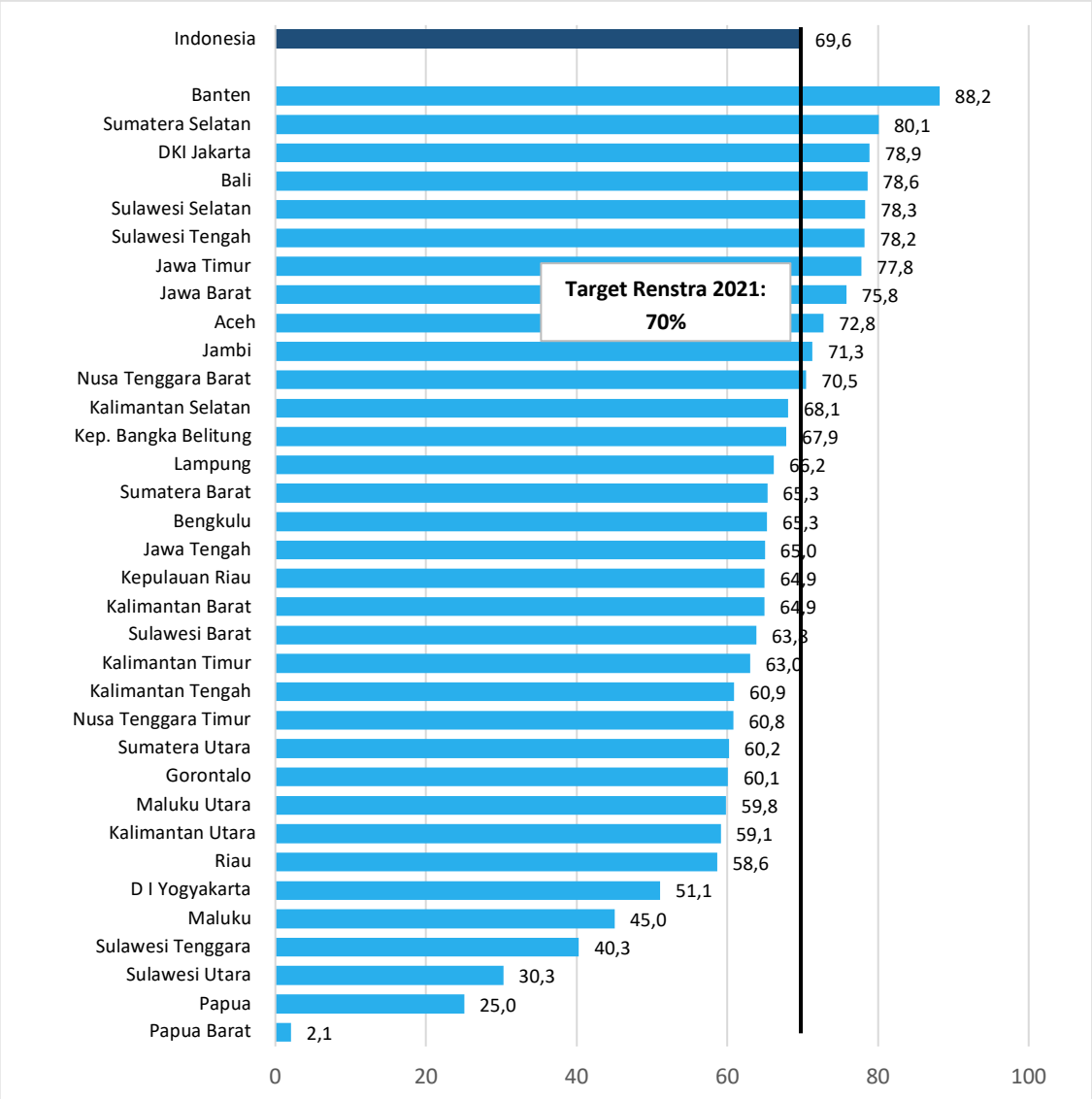
Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Secara nasional cakupan pelayanan kesehatan bayi, anak balita dan prasekolah cenderung menurun dibandingkan tahun 2021, hal ini disebabkan karena dampak pandemi COVID-19. Upaya pemenuhan layanan esensial utama usia bayi dan balita adalah pemberian ASI Eksklusif, Vitamin A dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan.

Pada Gambar 5.29 dapat dilihat bahwa persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia pada tahun 2021 adalah sebesar 69,6%. Sementara target Renstra Tahun 2021 adalah 70%. Tidak tercapainya target Cakupan Kunjungan Persentase Balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya sebagai dampak pandemi COVID 19. Pada masa pandemi COVID-19, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan yang selama ini dilaksanakan di Posyandu banyak terhenti sesuai level situasi kab/kota (data *rapid assessment*)

Hasil capaian nasional per provinsi masih terdapat disparitas cakupan persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan antar provinsi yang berkisar antara 2,1% di Papua Barat dan 88,2% di Banten. Provinsi dengan cakupan persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan tinggi, yaitu Banten (88,2%), Sumatera Selatan (80,1%), DKI Jakarta (78,9%), Bali (78,6%)dan Sulawesi Selatan (78,3%), Sulawesi Tengah (78,2%) dan Jawa Timur (77,8%). Provinsi dengan cakupan persentase balita dipantau pertumbuhan dan perkembangan terendah adalah Papua Barat (2,1%), Papua (25%) dan Sulawesi Utara (30,3%).

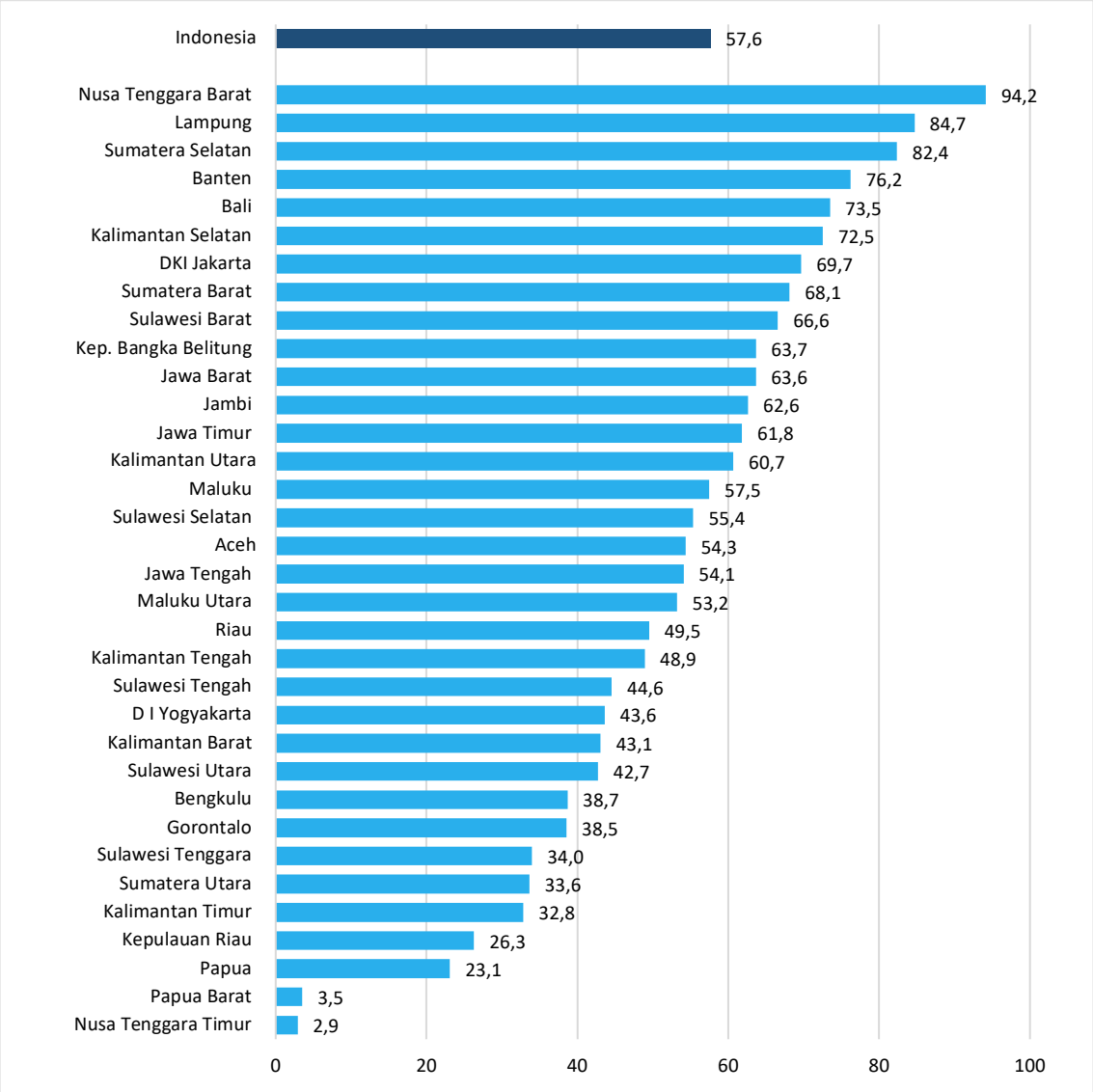
GAMBAR 5.29
BALITA DIPANTAU PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Pemantauan Pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia dilakukan berjenjang mulai dari tingkat keluarga/masyarakat dengan menggunakan *checklist* perkembangan Buku KIA. Hasil pemeriksaan perkembangan melalui Buku KIA dengan interpretasi tidak lengkap, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pertumbuhan dan perkembangan melalui kegiatan Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang Anak (SDIDTK) di Puskesmas.

GAMBAR 5.30
BALITA DILAYANI SDIDTK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



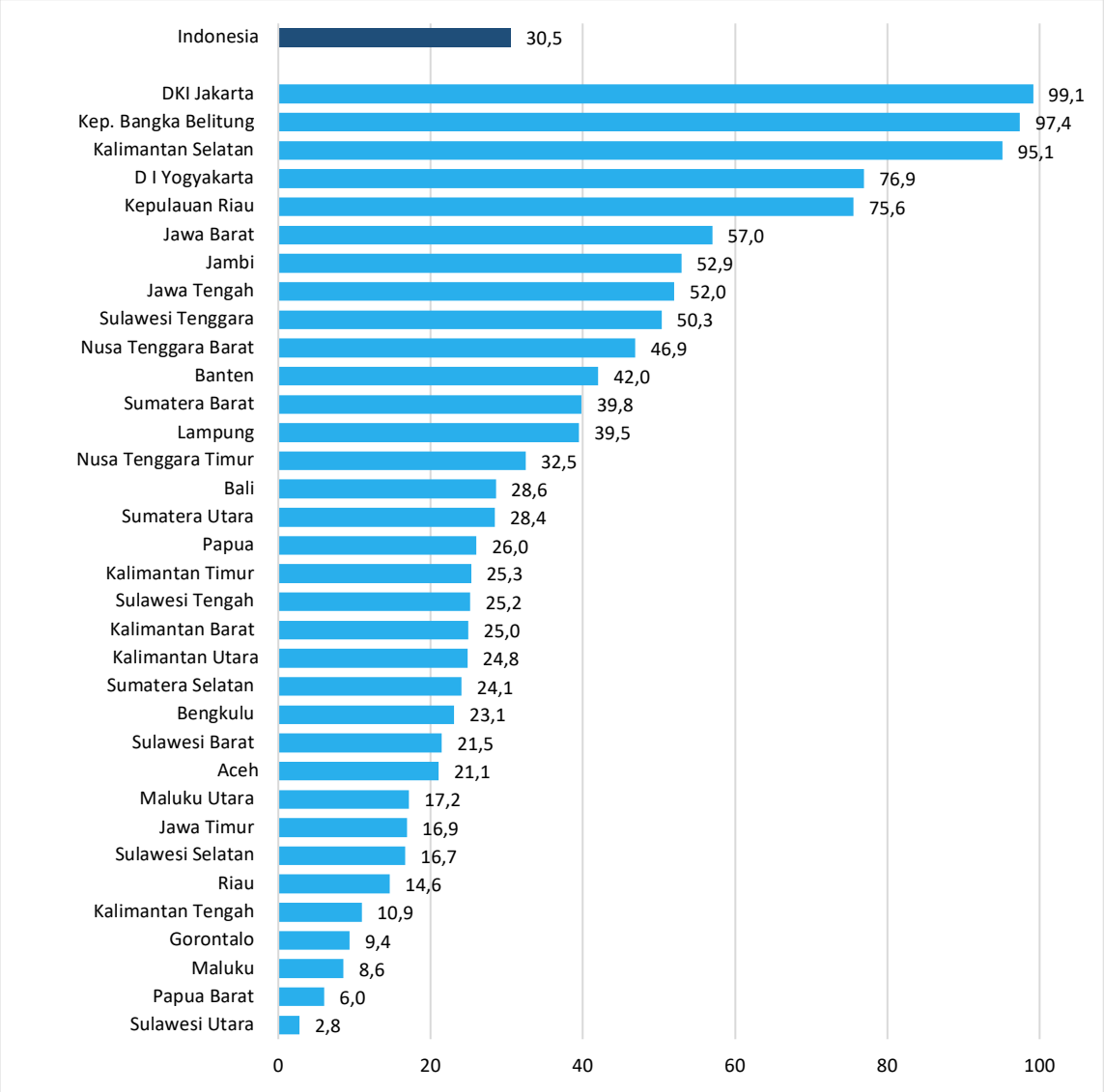
Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Persentase balita dilayani SDIDTK tingkat nasional tahun 2021 sebesar 57,6%. Hasil capaian nasional per provinsi cakupan balita dilayani SDIDTK masih terdapat disparitas yang sangat besar antar provinsi, yaitu berkisar antara 2,9% di Nusa Tenggara Timur dan 94,2% di Nusa Tenggara Barat. Provinsi dengan cakupan balita dilayani SDIDTK tinggi, yaitu Nusa Tenggara Barat (94,2%), Lampung (84,7%), Sumatera Selatan (82,4%), dan Banten (76,2%).

Provinsi dengan cakupan balita dilayani SDIDTK terendah adalah Papua Barat (2,9%), Papua Barat (3,5%), Papua (23,1%) dan Kepulauan Riau (26,3%).

Sebagai tindak lanjut dari upaya deteksi faktor risiko dan penyakit, maka dilakukan penanganan bayi dan balita sakit dengan pendekatan MTBS di Puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya.

GAMBAR 5.31
BALITA DILAYANI MTBS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Persentase balita dilayani MTBS tingkat nasional tahun 2021 sebesar 30,5%. Disparitas cakupan balita dilayani MTBS antar provinsi berkisar antara 2,8% di Sulawesi Utara dan 99,1% di DKI Jakarta. Provinsi dengan cakupan balita dilayani MTBS tinggi, yaitu DKI Jakarta (99,1%), Kepulauan Bangka Belitung (97,4%), Kalimantan Selatan (95,1%), D.I. Yogyakarta (76,9%), dan Kepulauan Riau (75,6%). Provinsi dengan cakupan balita dilayani MTBS terendah adalah Sulawesi Utara (2,8%), Papua (6%), Maluku (8,6%), Gorontalo (9,4%) dan Kalimantan Tengah

(10,9%). Rincian lengkap mengenai cakupan pelayanan kesehatan balita dan anak prasekolah dapat dilihat pada Lampiran 42.

3. Imunisasi

Pemberian imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang terbukti paling *cost-effective* serta berdampak positif untuk mewujudkan derajat kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Imunisasi tidak hanya melindungi seseorang tetapi juga masyarakat, dengan memberikan perlindungan komunitas atau yang disebut dengan *herd immunity*. Arah pembangunan kesehatan saat ini menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif tanpa meninggalkan aspek kuratif dan rehabilitatif. Salah satu upaya preventif adalah dilaksanakannya program imunisasi. Pemberian imunisasi dapat mencegah dan mengurangi kejadian kesakitan, kecacatan, dan kematian akibat Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I) yang diperkirakan sebanyak 2 hingga 3 juta kematian tiap tahunnya.

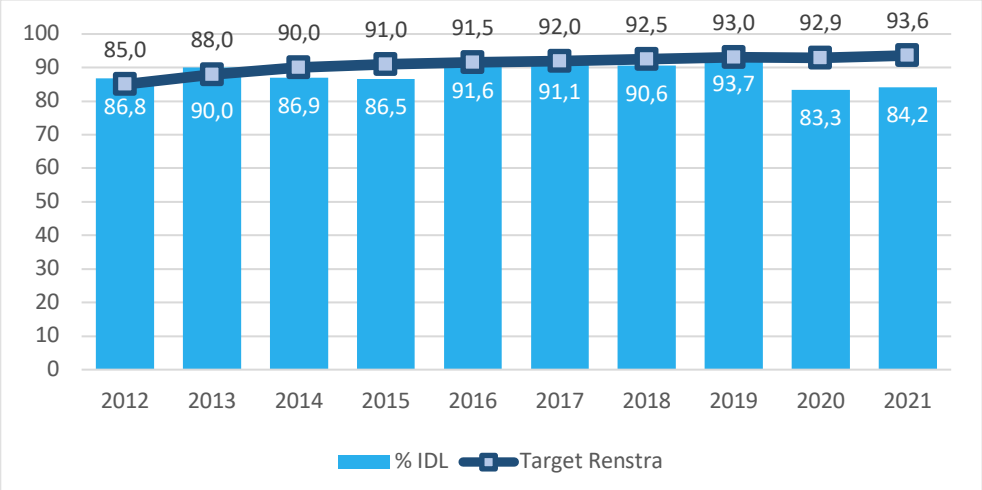
Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Beberapa penyakit menular yang termasuk ke dalam PD3I, antara lain Hepatitis B, TBC, difteri, pertusis, tetanus, polio, campak rubela, radang selaput otak dan radang paru-paru.

Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh imunisasi dasar sesuai dengan ketentuan. Pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Ketentuan mengenai penyelenggaraan imunisasi ini tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017. Selanjutnya akan dibahas program imunisasi yang dilakukan pemerintah, yaitu:

a. Imunisasi Dasar pada Bayi

Di Indonesia, setiap bayi usia 0-11 bulan wajib mendapatkan imunisasi dasar lengkap, yang terdiri dari 1 dosis Hepatitis B, 1 dosis BCG, 3 dosis DPT-HB-HiB, 4 dosis polio tetes atau *Oral Polio Vaccine (OPV),* 1 dosis polio suntik atau *Inactivated Polio Vaccine (IPV)* dan 1 dosis Campak Rubela. Penentuan jenis imunisasi dan jadwal pemberian ini didasarkan atas kajian ahli dan analisis epidemiologi atas penyakit-penyakit yang timbul. Untuk beberapa daerah terpilih sesuai kajian epidemiologi, analisis beban penyakit dan rekomendasi ahli, ada tambahan imunisasi tertentu, yaitu *Pneumococcal Conjugate Vaccine* (*PCV*) dan *Japanese Encephalitis*. Implementasi pemberian imunisasi tersebut belum berlaku secara nasional, sehingga tidak diperhitungkan sebagai komponen imunisasi dasar lengkap pada bayi.

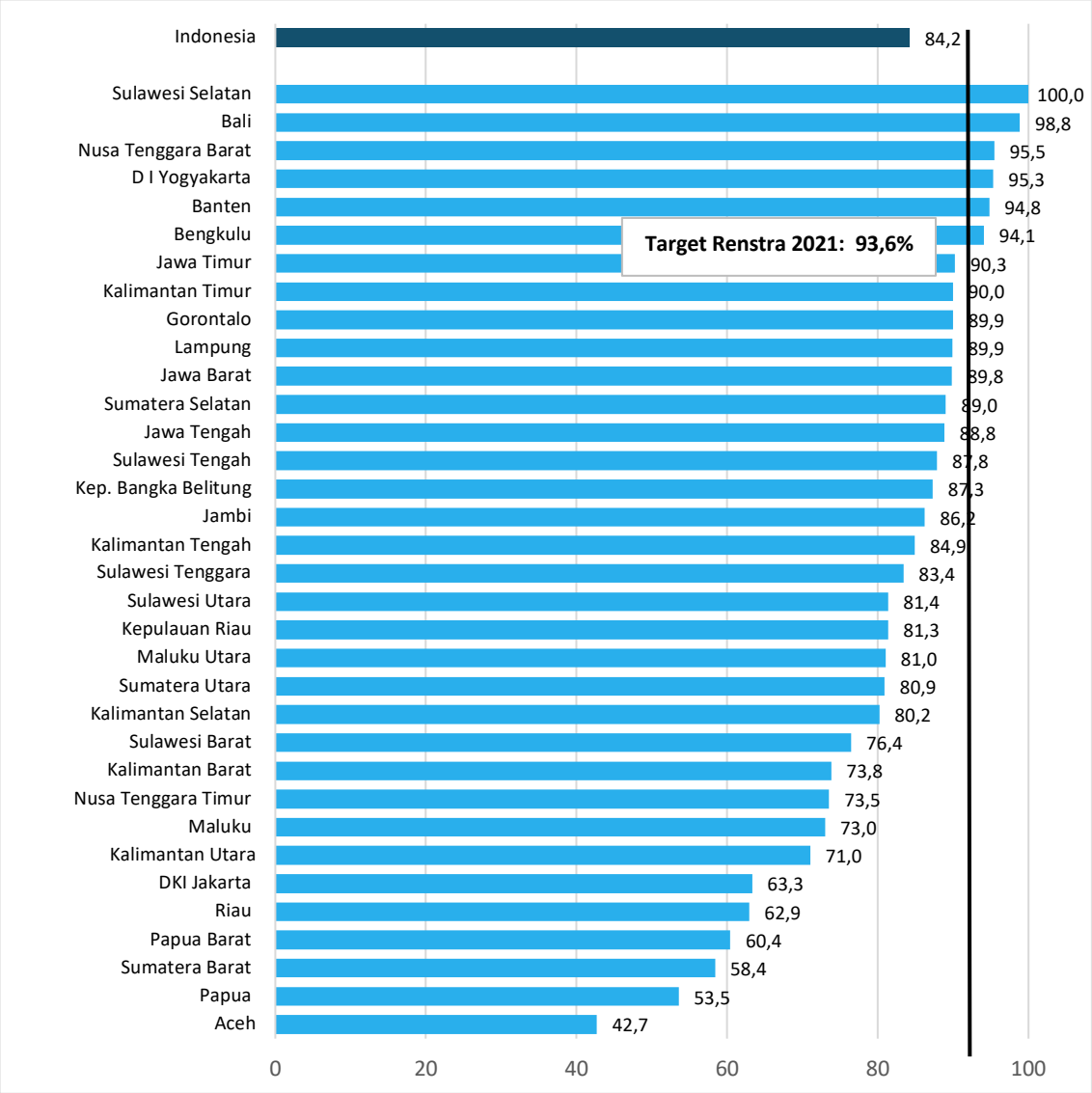
GAMBAR 5.32
CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI
DI INDONESIA TAHUN 2012-2021



Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Pada tahun 2021, cakupan imunisasi dasar lengkap secara nasional sebesar 84,2% (Gambar 5.31). Angka ini belum memenuhi target Renstra tahun 2021, yaitu 93,6%. Cakupan imunisasi dasar lengkap pada tahun 2021 hampir sama dengan tahun 2020. Rendahnya cakupan ini dikarenakan pelayanan pada fasilitas kesehatan dioptimalkan untuk pengendalian pandemi COVID-19. Jika dilihat menurut provinsi, terdapat 6 provinsi yang dapat mencapai target Renstra tahun 2021, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta, Banten dan Bengkulu.

GAMBAR 5.33
CAKUPAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Pada gambar di atas, diketahui bahwa provinsi dengan cakupan imunisasi dasar lengkap tertinggi adalah Provinsi Sulawesi Selatan (100,0%), Bali (98,8%), Nusa Tenggara Barat (95,5%) dan DI Yogyakarta (95,3%). Sedangkan provinsi dengan capaian terendah, yaitu Aceh (42,7%). Rincian data mengenai imunisasi dasar pada bayi tahun 2021 terdapat pada Lampiran 39.a.

b. Angka *Drop Out* Cakupan Imunisasi DPT/HB/HiB1-Campak

Setiap anak yang sudah mendapat kesempatan pertama imunisasinya, harus menyelesaikan rangkaian dosis sesuai jadwal agar kekebalan tubuh yang didapat melalui imunisasi dapat terbentuk secara optimal. Jika anak tersebut tidak menyelesaikannya secara lengkap maka disebut sebagai *Drop Out (DO)*. Angka *DO* ini menjadi indikator pemanfaatan

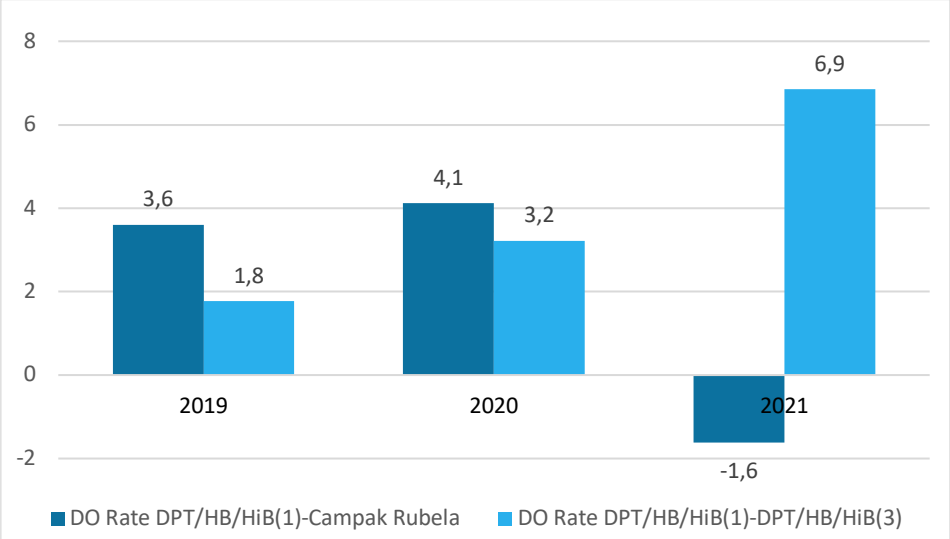
layanan imunisasi. Pemanfaatan layanan imunisasi adalah kesempatan masyarakat menggunakan fasilitas kesehatan untuk mendapatkan layanan imunisasi.

Untuk mengetahui angka *DO* pada bayi, dapat dilakukan penghitungan menggunakan *DO* imunisasi DPT-HB-Hib1 ke DPT-HB-Hib3 atau *DO* imunisasi DPT-HB-Hib1 ke Campak Rubela 1. Angka *DO* imunisasi DPT-HB-Hib1 ke DPT-HB-Hib3 diperoleh dengan menghitung selisih cakupan imunisasi DPT-HB-Hib1 dengan cakupan imunisasi DPT-HB-Hib3. Sedangkan, angka *DO* imunisasi DPT-HB-Hib1 ke Campak Rubela 1 diperoleh dengan menghitung selisih cakupan imunisasi DPT-HB-Hib1 dengan cakupan imunisasi Campak Rubela 1. Pemanfaatan layanan imunisasi dianggap baik apabila angka *DO* <5%, sehingga angka *DO* dari DPT-HB-Hib1 ke DPT-HB-Hib3 atau DPT-HB-Hib1 ke Campak Rubela 1 diharapkan tidak melebihi 5%.

Pada tahun 2019 sampai dengan 2020, angka *DO* DPT-HB-Hib1 dengan Campak Rubela 1 berada di bawah batas maksimal 5%, tetapi cenderung mengalami peningkatan. Kecenderungan tahun 2019 dan 2020 angka *DO* kembali meningkat. Hingga pada tahun 2021, angka *DO* DPT-HB-Hib1 dengan Campak Rubela 1 berada di ambang batas minimal (nilai minus). Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anak yang diimunisasi Campak Rubela 1 lebih banyak dibandingkan jumlah anak yang diimunisasi DPT-HB-Hib1. Pada saat anak memasuki usia 9 bulan, orang tua mudah untuk mengingat jadwal imunisasi Campak Rubela 1, sehingga cenderung membawa anaknya untuk imunisasi. Selain itu, efek samping DPT-HB-Hib1 seringkali menyebabkan orang tua melewatkan jadwal imunisasi tersebut.

Tren angka *DO* imunisasi DPT-HB-Hib1 ke DPT-HB-Hib3 cenderung meningkat sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Angka *DO* tahun 2021 melewati batas maksimum yang telah ditetapkan dan merupakan yang tertinggi dalam 3 tahun terakhir, yaitu sebesar 6,9%. Hal ini disebabkan karena terbatasnya jadwal pelayanan imunisasi, baik di puskesmas maupun posyandu akibat pandemi COVID-19, menurunnya kunjungan sasaran untuk mendapatkan layanan imunisasi, dan keterbatasan jumlah vaksin di beberapa tempat karena menurunnya kapasitas penyimpanan rantai dingin.

GAMBAR 5.34
ANGKA *DROP OUT (DO)* IMUNISASI PADA BAYI
TAHUN 2019-2021



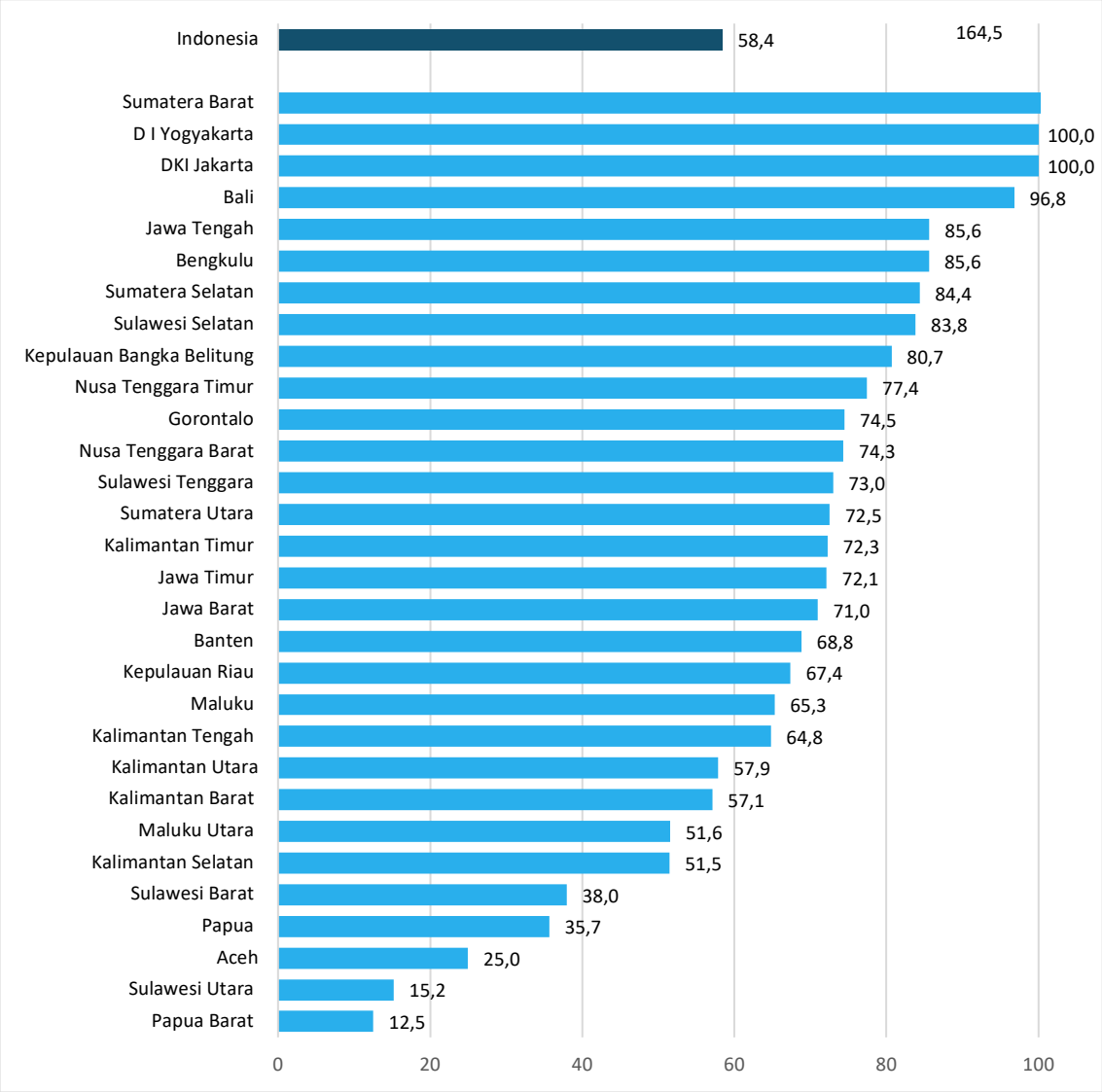
Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Rincian data lengkap mengenai angka *DO* cakupan imunisasi DPT-HB-Hib1 ke DPT-HB-Hib3 dan imunisasi DPT-HB-Hib1 ke Campak Rubela 1 pada tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Lampiran 39.b.

c. Desa/Kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)*

Pada tahun 2021 cakupan desa *UCI* di Indonesia sebesar 58,4%. Cakupan ini sedikit menurun dibandingkan dengan cakupan tahun sebelumnya, yaitu 59,2%. Hal ini dikarenakan perubahan jumlah desa/kelurahan yang dijadikan denominator. Terdapat tiga provinsi yang telah mencapai 100% cakupan desa/kelurahan *UCI,* yaitu Provinsi Sumatera Barat, DI Yogyakarta dan DKI Jakarta. Sampai dengan tanggal 1 April 2021 terdapat 4 provinsi yang belum mengirimkan data *UCI*, yaitu Sulawesi Tengah, Lampung, Jambi dan Riau. Rincian lengkap mengenai cakupan desa/kelurahan *UCI* pada tahun 2021 menurut provinsi terdapat pada Lampiran 37.

GAMBAR 5.35
CAKUPAN DESA/KELURAHAN *UCI* MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

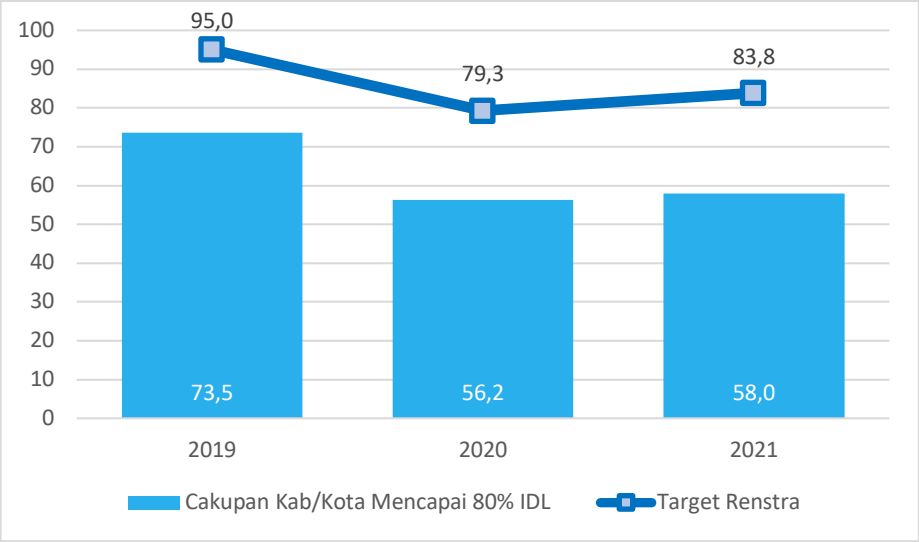


Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

d. Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap pada Bayi

Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi merupakan salah satu indikator pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan, dengan target Renstra 83,8% pada tahun 2021.

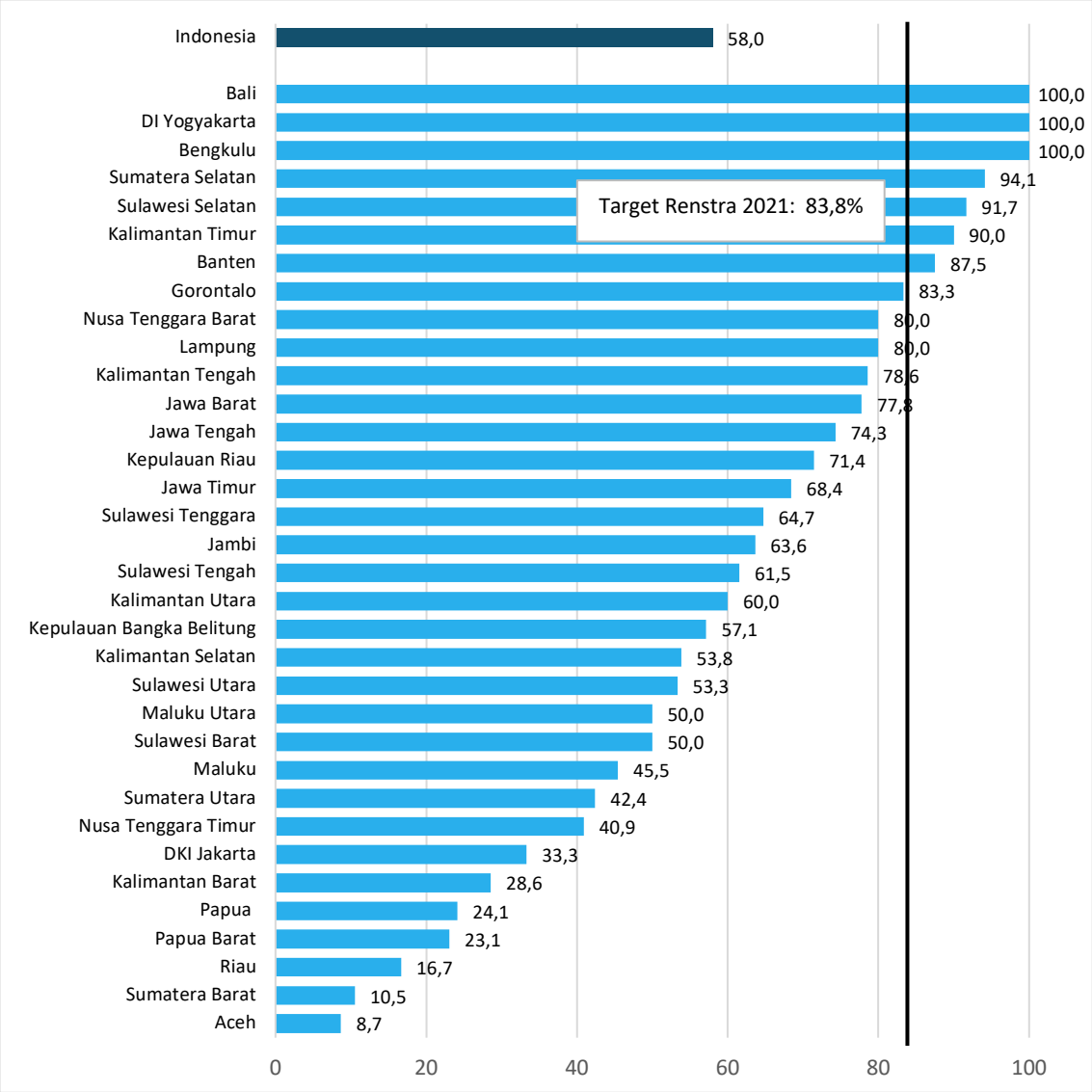
GAMBAR 5.36
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG
MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI
TAHUN 2019-2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi selama tiga tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2020 cenderung menurun, namun sedikit meningkat pada tahun 2021, yaitu sebesar 58,0%. Kesenjangan capaian dibandingkan target yang ditetapkan semakin besar setiap tahunnya.

GAMBAR 5.37
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



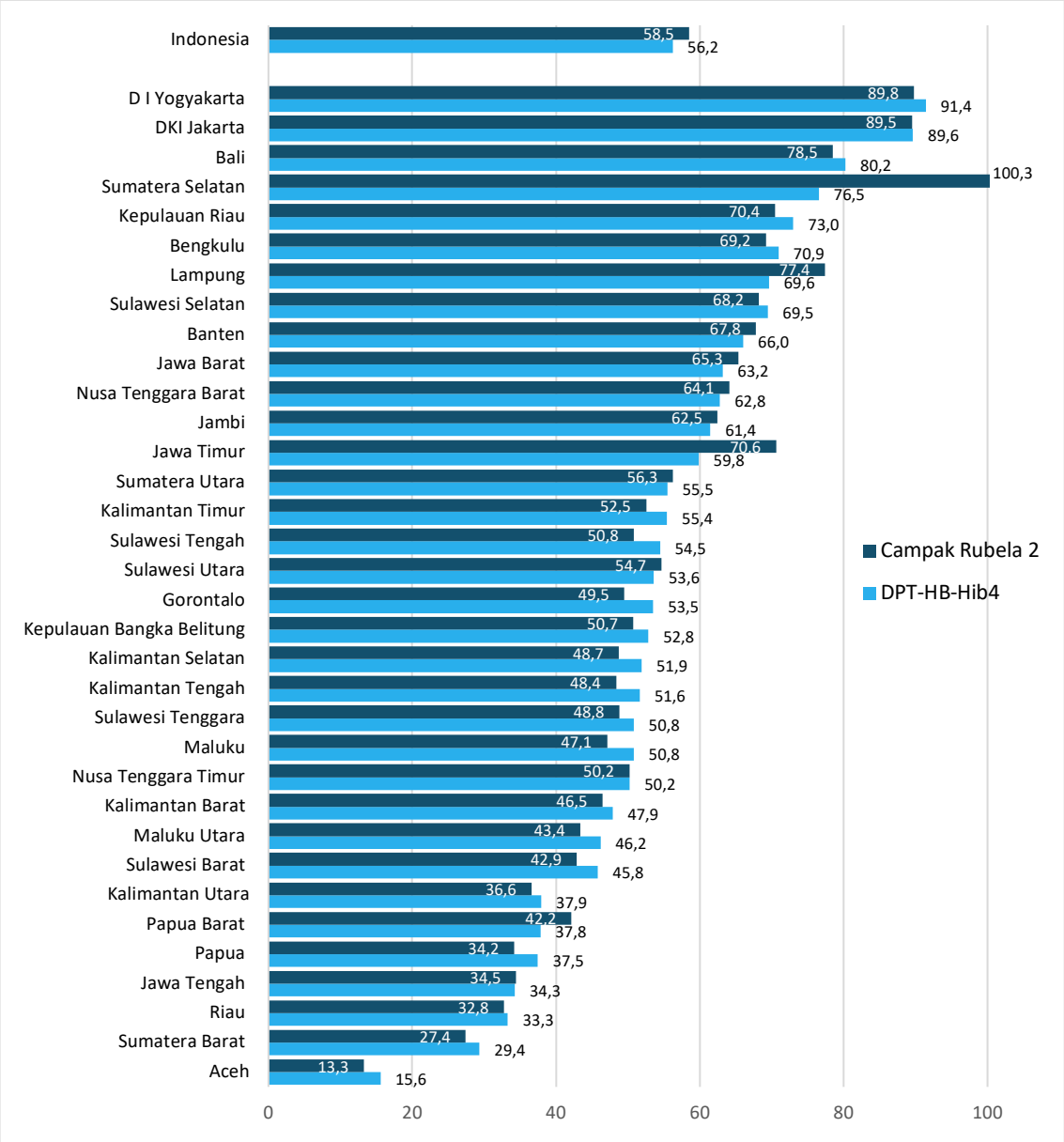
Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa terdapat 6 provinsi dengan kabupaten/kotanya telah mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi yang mencapai target Renstra 2021, yaitu Provinsi Bali, DI Yogyakarta, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, dan Banten. Provinsi dengan persentase terendah adalah Aceh, yaitu 8,7% kabupaten/kota mencapai minimal 80% cakupan imunisasi dasar lengkap. Rincian lengkap mengenai persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada Lampiran 39.c.

e. Imunisasi Lanjutan pada Anak Baduta

Imunisasi lanjutan pada anak baduta (bawah dua tahun) diperlukan untuk mempertahankan tingkat kekebalan sehingga dapat memberikan perlindungan dengan optimal. Beberapa jenis imunisasi dasar yang diberikan pada saat bayi memerlukan dosis lanjutan (*booster*) untuk meningkatkan kekebalannya, salah satunya melalui pemberian imunisasi lanjutan pada usia 18 bulan. Perlindungan optimal dari pemberian imunisasi lanjutan ini hanya didapat apabila anak tersebut telah mendapat imunisasi dasar secara lengkap. Karena itu, sejak tahun 2014, secara nasional program imunisasi lanjutan masuk ke dalam program imunisasi rutin dengan memberikan masing-masing 1 dosis DPT-HB-HiB dan Campak Rubela kepada anak usia 18-24 bulan.

GAMBAR 5.38
CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-HIB4 DAN CAMPAK RUBELA 2 PADA ANAK BADUTA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



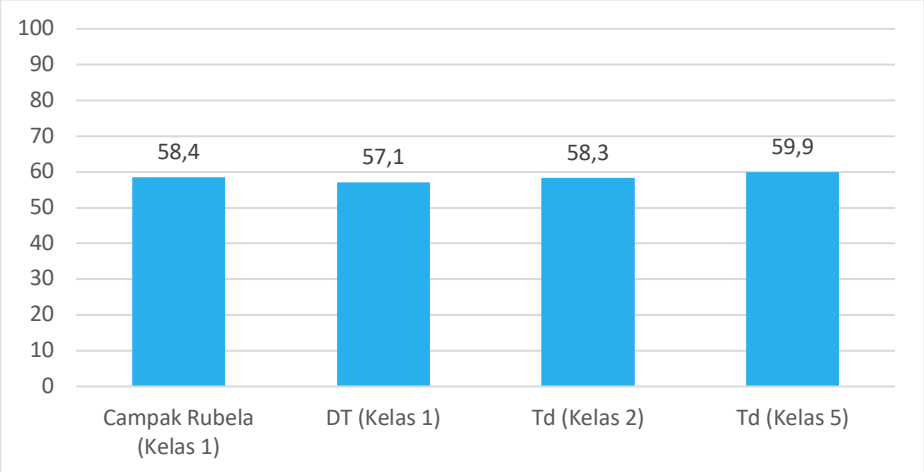
Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Secara nasional cakupan imunisasi DPT-HB-Hib4 dan Campak Rubela 2 pada anak usia 18-24 bulan tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020. Cakupan imunisasi DPT-HB-Hib4 tahun 2021 sebesar 56,2% menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 67,8%, sedangkan cakupan imunisasi Campak Rubela 2 tahun 2021 sebesar 58,5% menurun dibandingkan tahun 2020 sebesar 64,7%. Cakupan imunisasi DPT-HB-Hib4 dan Campak Rubela 2 menurut provinsi sangat bervariasi, dimana sebagian besar provinsi belum mencapai target tahun 2021. Provinsi Sumatera Selatan memiliki cakupan imunisasi Campak Rubela 2 tertinggi, yaitu 100,3%, sedangkan Provinsi DI Yogyakarta memiliki cakupan imunisasi DPT-HB-Hib4 tertinggi sebesar 91,4%. Provinsi dengan cakupan imunisasi DPT-HB-Hib4 dan Campak Rubela 2 terendah, yaitu Provinsi Aceh. Rincian lengkap mengenai cakupan imunisasi lanjutan DPT-HB-HiB4 dan Campak Rubela 2 pada anak baduta dapat dilihat pada Lampiran 40.a.

f. Imunisasi Anak Sekolah

Selain imunisasi lanjutan pada baduta, untuk mempertahankan tingkat kekebalan pada anak sehingga dapat terlindungi dari Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I), juga dilakukan imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah. Pelaksanaan imunisasi lanjutan pada anak usia sekolah dilakukan melalui kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang terintegrasi dengan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dengan sasaran anak usia sekolah dasar (SD). Jenis imunisasi yang diberikan pada pelaksanaan BIAS, yaitu Campak Rubela, Tetanus dan Difteri. Pada daerah tertentu yang menjadi lokus pelaksanaan program demonstrasi imunisasi *Human Papilloma Virus (HPV)*, imunisasi *HPV* ditambahkan pada kegiatan BIAS dengan sasaran siswa perempuan kelas 5 dan 6. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, pelaksanaan imunisasi pada anak sekolah diberikan pada anak SD/MI/sederajat usia kelas 1 (Campak Rubela dan DT), kelas 2 (Td) dan kelas 5 (Td). Pada masa pandemi COVID-19, pelaksanaan BIAS menjadi sangat terpengaruh dan tidak dapat berjalan dengan baik karena tidak adanya pelaksanaan belajar mengajar secara tatap muka di sekolah.

GAMBAR 5.39
CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH
DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Cakupan imunisasi pada pelaksanaan BIAS tahun 2021 jauh di bawah target sebesar 95%. Cakupan imunisasi Campak Rubela pada anak usia kelas 1 sebesar 58,4%, cakupan imunisasi DT sebesar 57,1%, cakupan imunisasi Td pada anak usia kelas 2 sebesar 58,3%. Cakupan imunisasi Td pada anak usia kelas 5 sebesar 59,9%. Rincian cakupan imunisasi anak sekolah menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 40.b.

4. Pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak pasal 28, pelayanan kesehatan anak usia sekolah dan remaja dilakukan melalui usaha kesehatan sekolah dan pelayanan kesehatan peduli remaja. Kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) merupakan kegiatan lintas sektor, yang meliputi berbagai upaya antara lain penjaringan kesehatan dan pemeriksaan berkala, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri, pembinaan kantin sekolah sehat, imunisasi, dan pembinaan kader kesehatan sekolah.

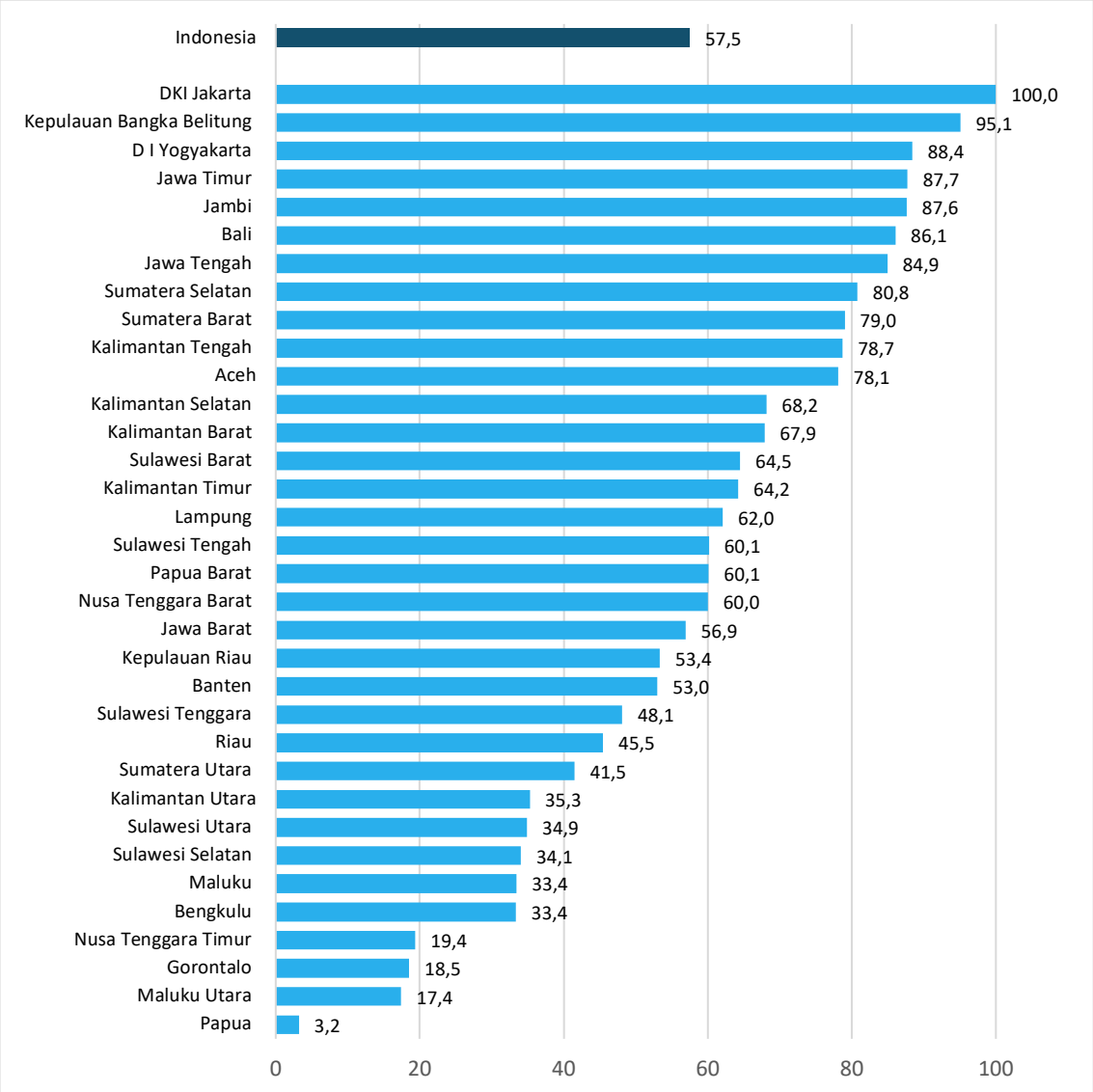
Kegiatan pelayanan kesehatan yang dilakukan di sekolah dilaksanakan oleh tenaga kesehatan bersama dengan kader kesehatan sekolah, dengan minimal dilakukan pemeriksaan status gizi (tinggi badan dan berat badan), pemeriksaan gigi, pemeriksaan tajam penglihatan, dan pemeriksaan tajam pendengaran.

Pelayanan kesehatan anak usia sekolah bertujuan untuk mendeteksi dini risiko penyakit pada anak sekolah agar dapat ditindaklanjuti secara dini, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal, sehingga dapat menunjang proses belajar mereka dan pada akhirnya menciptakan anak usia sekolah yang sehat dan berprestasi.

Hasil dari pelayanan kesehatan di sekolah juga dapat dipergunakan sebagai bahan perencanaan dan evaluasi UKS bagi puskesmas, sekolah dan Tim Pembina UKS (TP UKS) agar pelaksanaan peningkatan kesehatan anak sekolah dapat lebih tepat sasaran dan tujuan.

Secara nasional cakupan pelayanan kesehatan peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA tahun 2021 menurun dibandingkan tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan tenaga kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan lebih memprioritaskan pada penanganan pasien COVID-19. Di sisi lain, adanya pembatasan kegiatan masyarakat mengakibatkan pembelajaran peserta didik dilakukan dari rumah, sehingga mengakibatkan sulitnya pelaksanaan pelayanan kesehatan anak usia sekolah. Walaupun demikian, penyesuaian pelayanan kesehatan secara *online* dan terjadwal telah dilakukan untuk memastikan pelayanan kesehatan pada anak usia sekolah tetap tersedia.

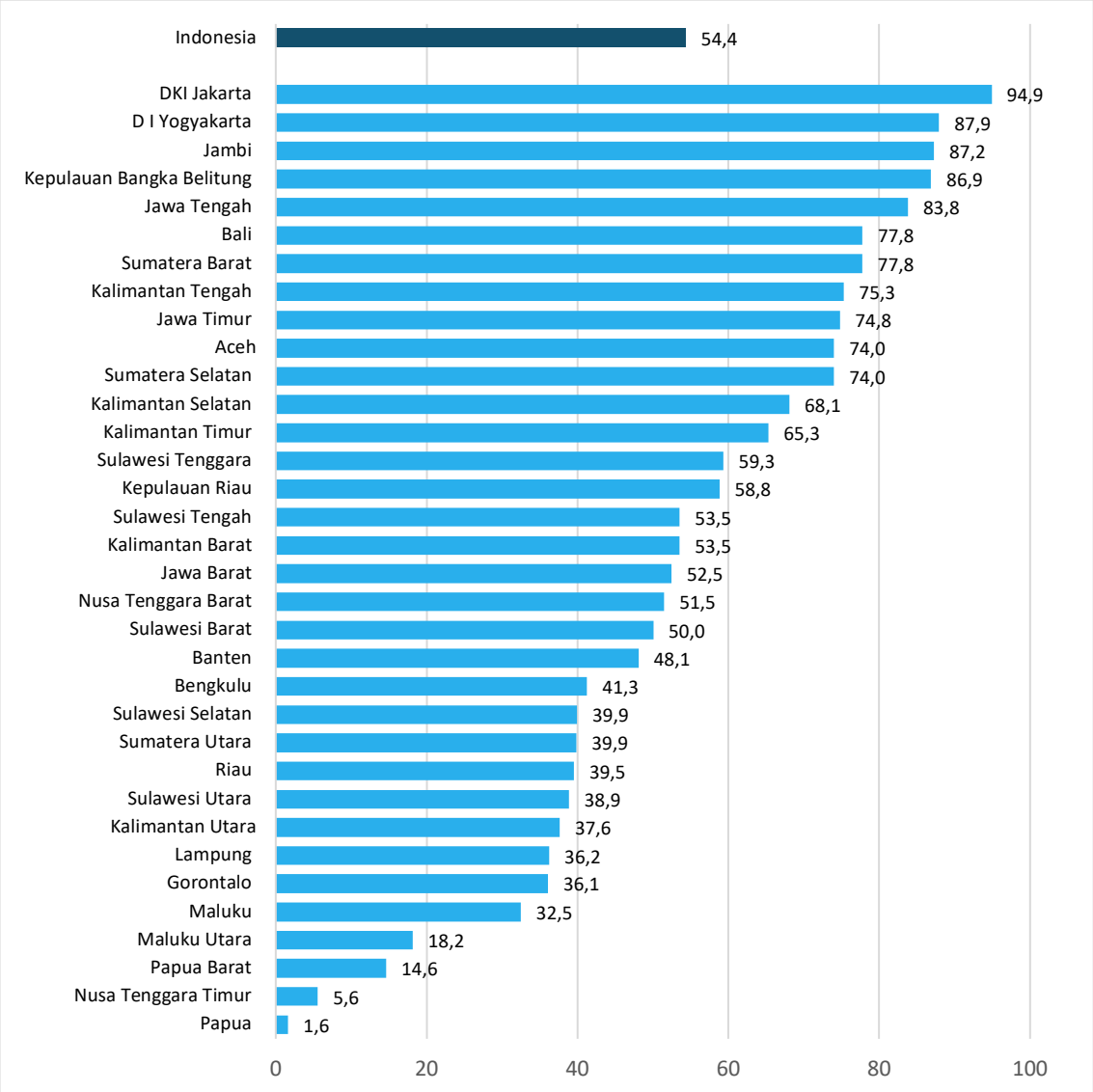
GAMBAR 5.40
CAKUPAN SEKOLAH SD/MI
YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Cakupan sekolah SD/MI yang melakukan pelayanan kesehatan di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 57,5% (Gambar 5.39). DKI Jakarta merupakan provinsi dengan cakupan pelayanan kesehatan anak usia SD/MI tertinggi, yaitu 100%. Hal ini dikarenakan adanya penerapan pemeriksaan kesehatan pada peserta didik secara *online* yang dilakukan di seluruh sasaran peserta didik setingkat SD/MI. Provinsi lainnya dengan cakupan SD/MI yang telah melakukan pelayanan kesehatan lebih dari 80%, yaitu Kepulauan Bangka Belitung, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Jambi, Bali, Jawa Tengah dan Sumatera Selatan. Provinsi dengan cakupan terendah sekolah SD/MI yang melakukan pelayanan kesehatan adalah Papua (3,2%).

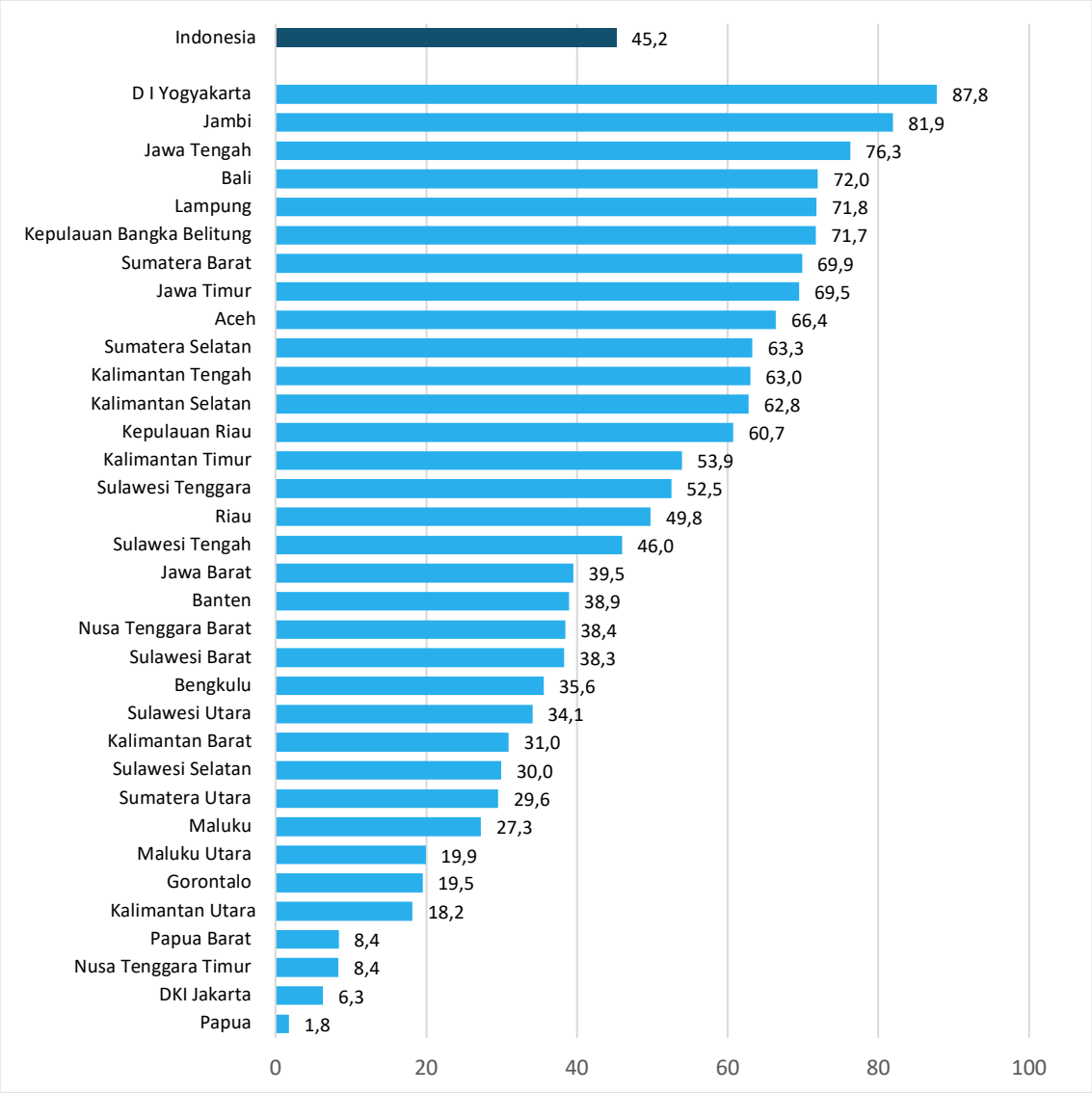
GAMBAR 5.41
CAKUPAN SEKOLAH SMP/MTS
YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Cakupan sekolah SMP/MTs yang melakukan pelayanan kesehatan di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 54,4% (Gambar 5.40). DKI Jakarta memiliki cakupan tertinggi untuk sekolah SMP/MTs yang telah melakukan pelayanan kesehatan peserta didik, yaitu sebesar 94,9%, sedangkan provinsi dengan cakupan SMP/MTs yang telah melakukan pelayanan kesehatan lebih dari 80%, yaitu DI Yogyakarta, Jambi, Kepulauan Bangka Belitung dan Jawa Tengah. Provinsi dengan cakupan terendah sekolah SMP/MTs yang melakukan pelayanan kesehatan, yaitu Papua (1,6%).

GAMBAR 5.42
CAKUPAN SEKOLAH SMA/MA
YANG MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Cakupan sekolah SMA/MA yang melakukan pelayanan kesehatan di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 45,2% (Gambar 5.41). DI Yogyakarta memiliki cakupan tertinggi untuk sekolah SMA/MA yang telah melakukan pelayanan kesehatan, yaitu sebesar 87,8%, sedangkan provinsi lainnya dengan cakupan lebih dari 80%, yaitu Jambi. Provinsi dengan cakupan terendah, yaitu Papua (1,8%). Rincian lengkap mengenai cakupan pelayanan kesehatan peserta didik SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dapat dilihat pada Lampiran 45.

C. GIZI

Subbab gizi berisi status gizi balita beserta pencegahan dan penanganan masalah gizi, diantaranya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia sampai dengan 6 bulan, pemberian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan, pemberian tablet tambah darah pada remaja putri, serta pemberian makanan tambahan pada ibu hamil kurang energi kronik dan balita gizi kurang.

1. Status Gizi Balita

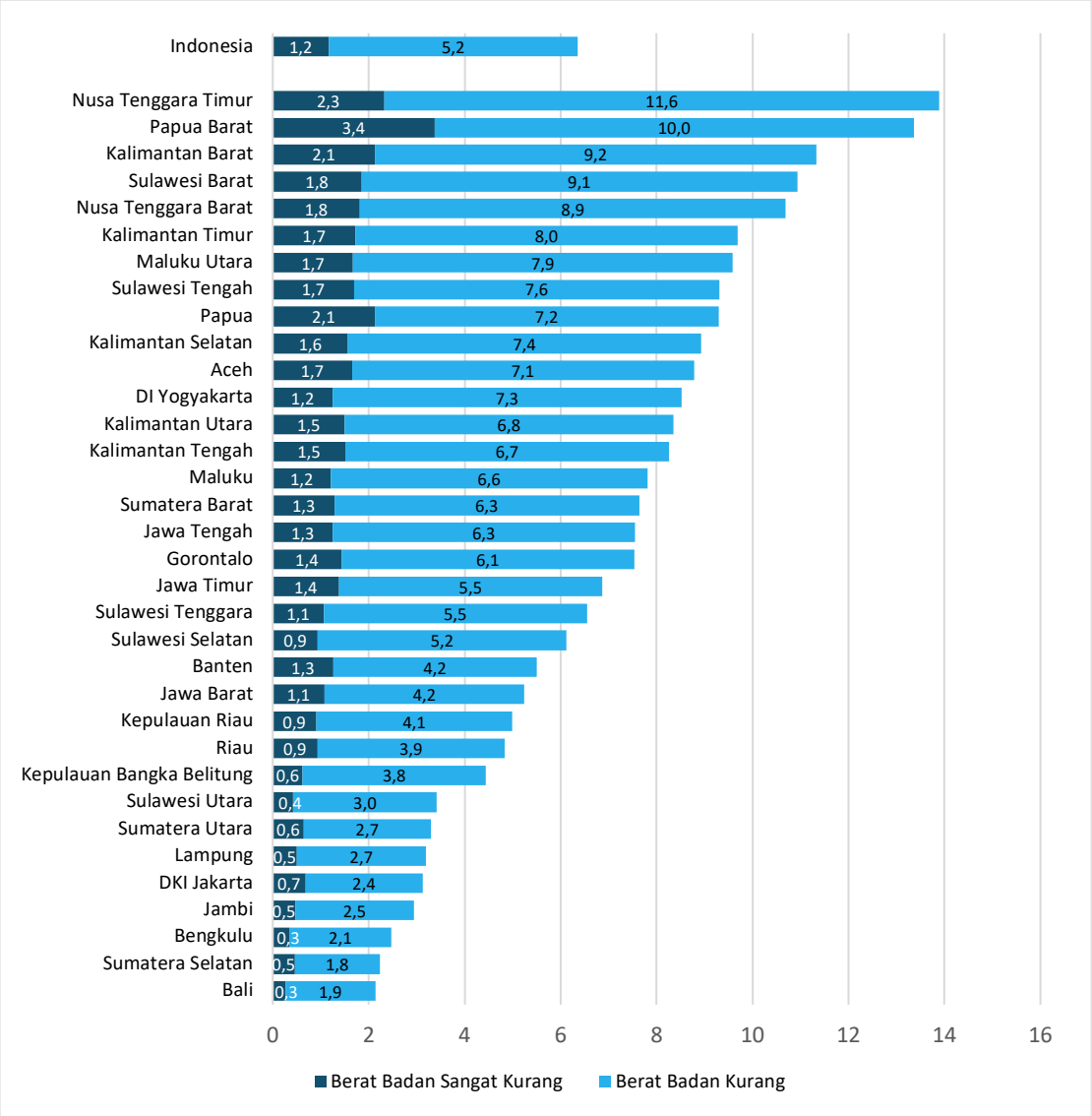
Pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak, telah diatur standar antropometri yang digunakan untuk mengukur atau menilai status gizi anak. Standar antropometri yang digunakan Program Surveilans Gizi terdiri atas indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U), Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut Umur (PB/U atau TB/U), dan Berat Badan menurut Panjang Badan atau Tinggi Badan (BB/PB atau BB/TB). Klasifikasi penilaian status gizi berdasarkan Indeks Antropometri sesuai dengan kategori status gizi pada WHO *Child Growth Standards* untuk anak usia 0-5 tahun dan *The WHO Reference* 2007 untuk anak 5-18 tahun.

Berdasarkan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), didapatkan persentase *underweight* (berat badan kurang dan sangat kurang) pada balita sebesar 17%. Sementara berdasarkan data Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPBGM) melalui Surveilans Gizi Tahun 2021, didapatkan balita dengan berat badan sangat kurang sebesar 1,2% dan berat badan kurang sebesar 6,1% yang digambarkan pada gambar 5.44. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Bali.

Baduta berat badan sangat kurang sebesar 1,2% dan baduta berat badan kurang sebesar 5,2% tergambar pada gambar 5.43. Provinsi dengan presentase berat badan sangat kurang dan berat badan kurang tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur, sedangkan provinsi terendah adalah Provinsi Bali.

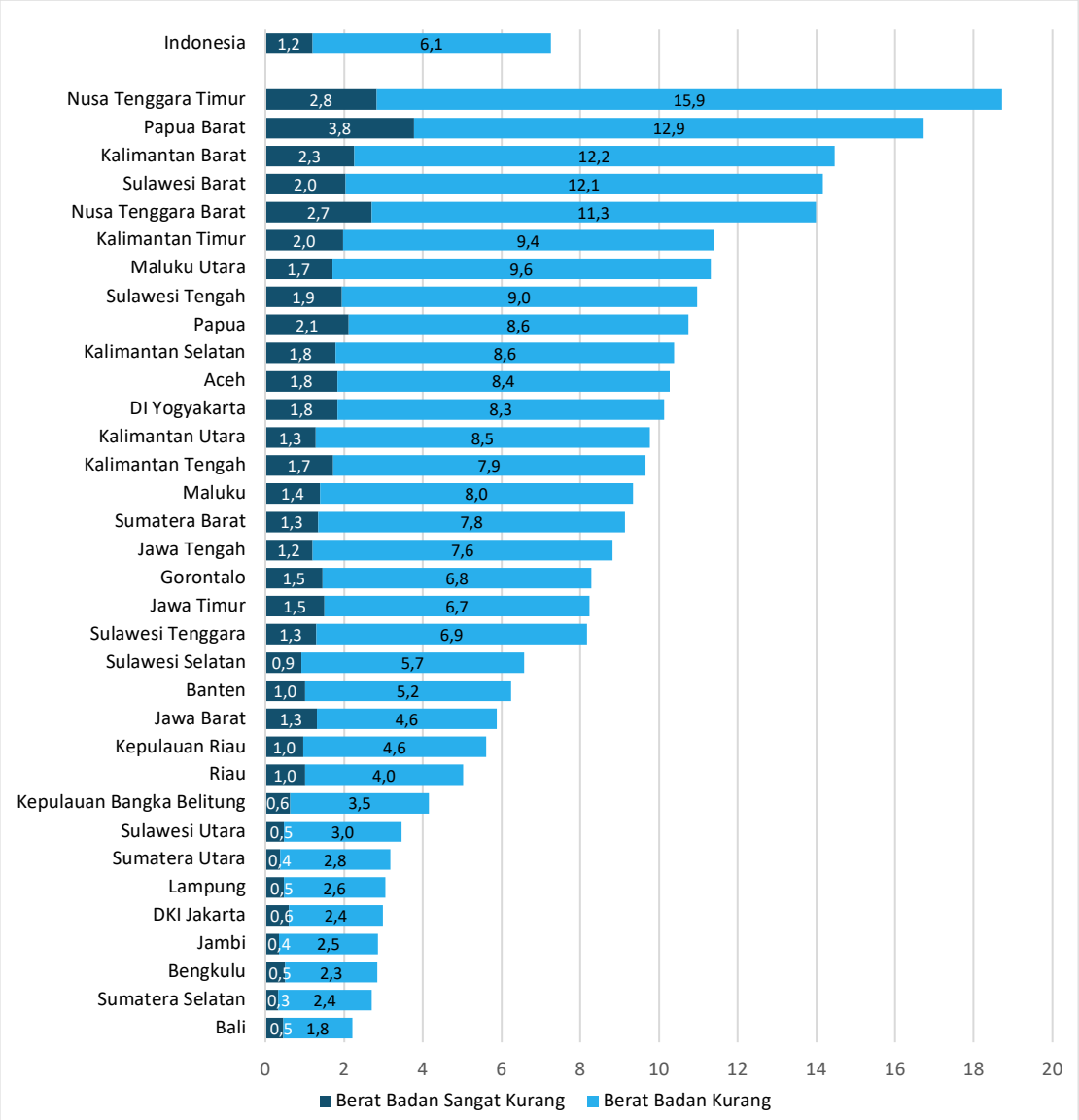
Perbedaan data SSGI dengan data e-PPBGM adalah data SSGI berasal dari survei yang menyasar rumah tangga dengan anak balita, sementara data yang ada di e-PPGBM berasal dari penginputan data yang dilakukan oleh petugas gizi puskesmas berdasarkan hasil penimbangan di posyandu setiap bulannya. Sehingga, data e-PPGBM dapat dilihat secara kohort hingga ke tingkat individu berdasarkan nama dan alamatnya (*by name* & *by address*).

GAMBAR 5.43
PERSENTASE BERAT BADAN SANGAT KURANG DAN BERAT BADAN KURANG PADA BADUTA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

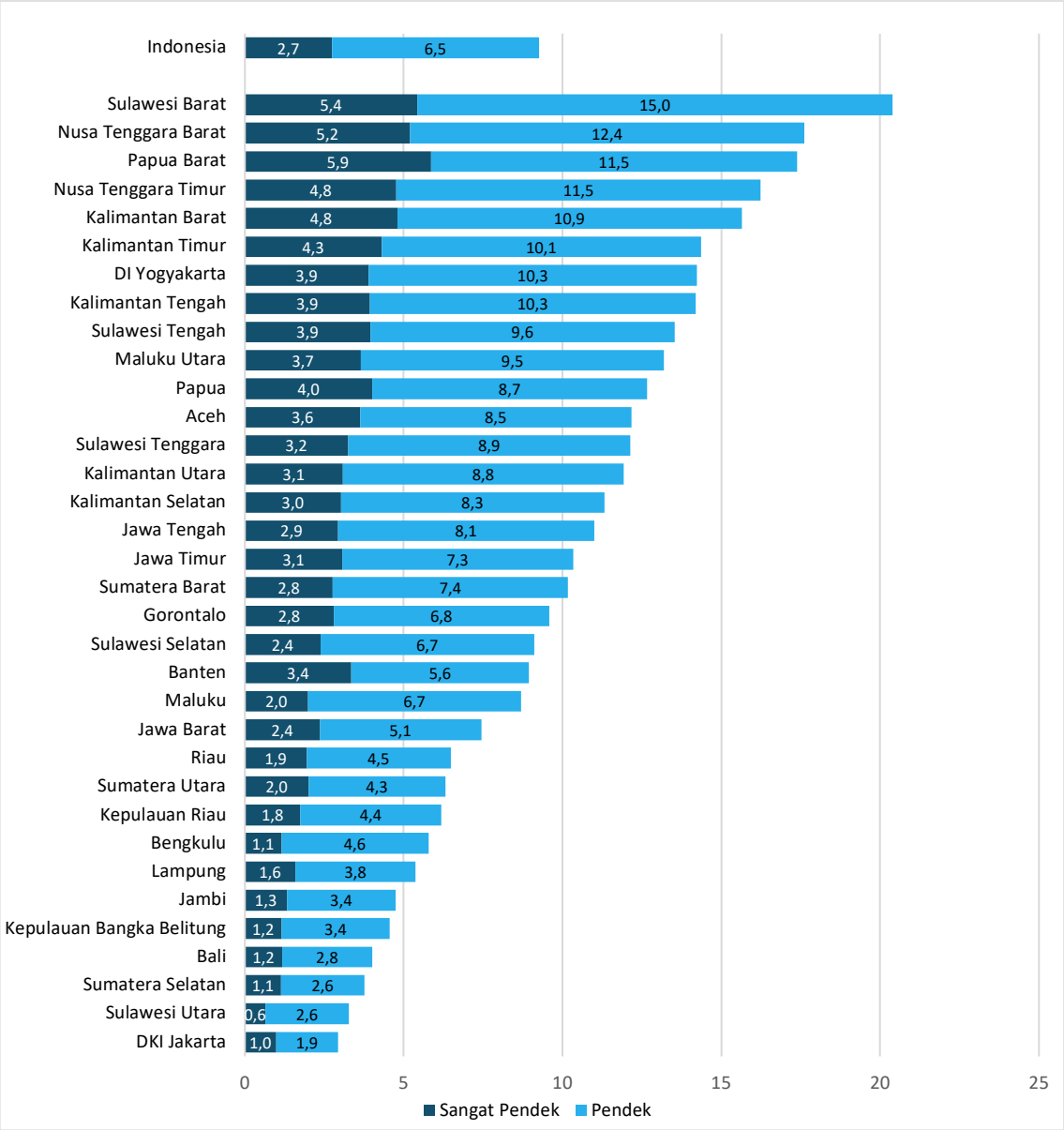
GAMBAR 5.44
PERSENTASE BERAT BADAN SANGAT KURANG DAN BERAT BADAN KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Kekurangan gizi pada balita berdasarkan indeks Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) meliputi kategori sangat pendek dan pendek. SSGI tahun 2021 menyatakan bahwa persentase *stunted* (sangat pendek dan pendek) sebesar 24,4%. Sedangkan data e-PPBGM sebesar 2,7% baduta sangat pendek dan 6,5% baduta pendek. Provinsi dengan persentase tertinggi sangat pendek dan pendek pada baduta adalah Sulawesi Barat, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah DKI Jakarta.

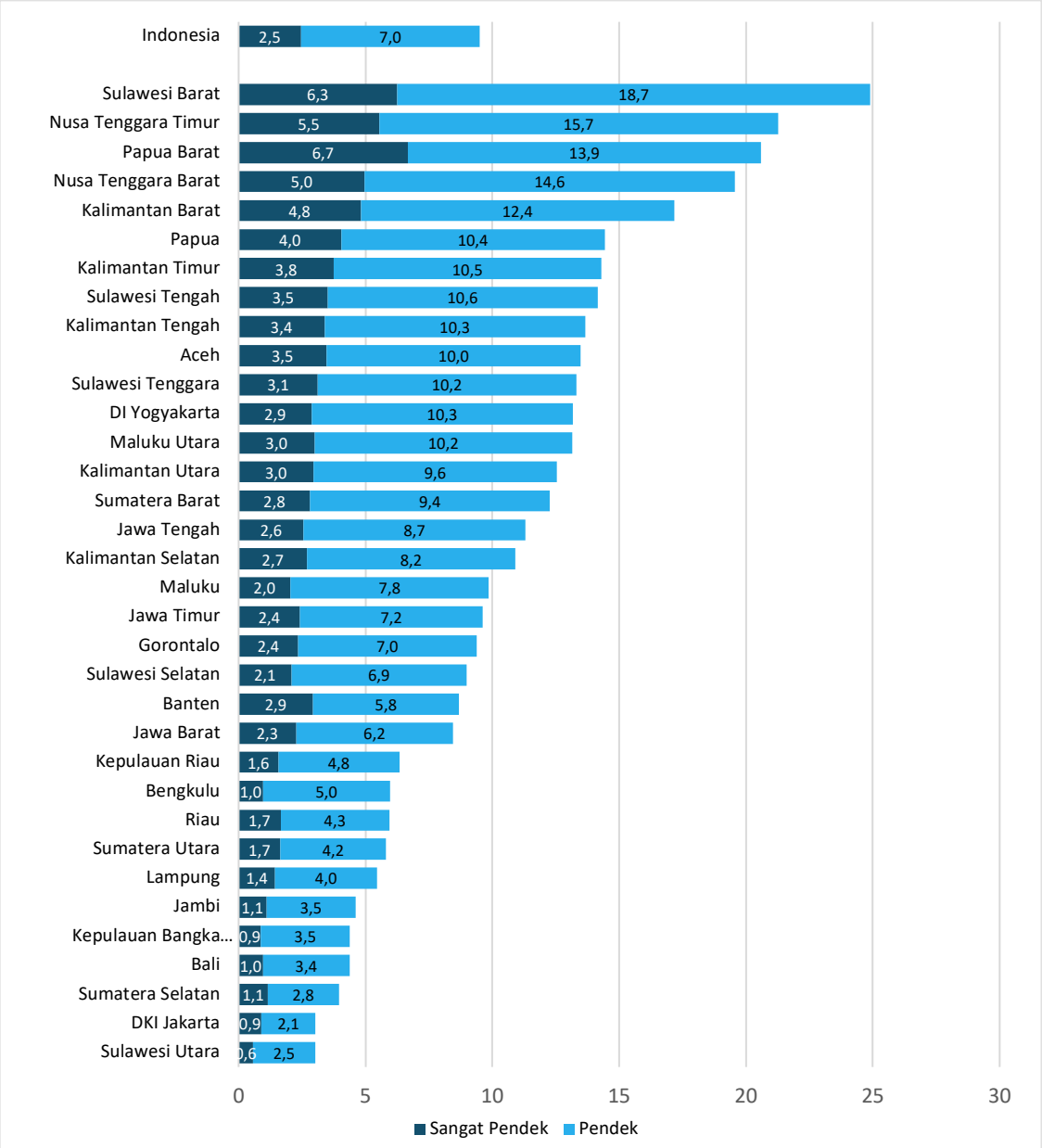
GAMBAR 5.45
PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BADUTA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Untuk usia balita, sebesar 2,5% balita sangat pendek dan sebesar 7,0% balita pendek. Provinsi dengan persentase tertinggi sangat pendek dan pendek pada balita adalah Sulawesi Barat, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Sulawesi Utara.

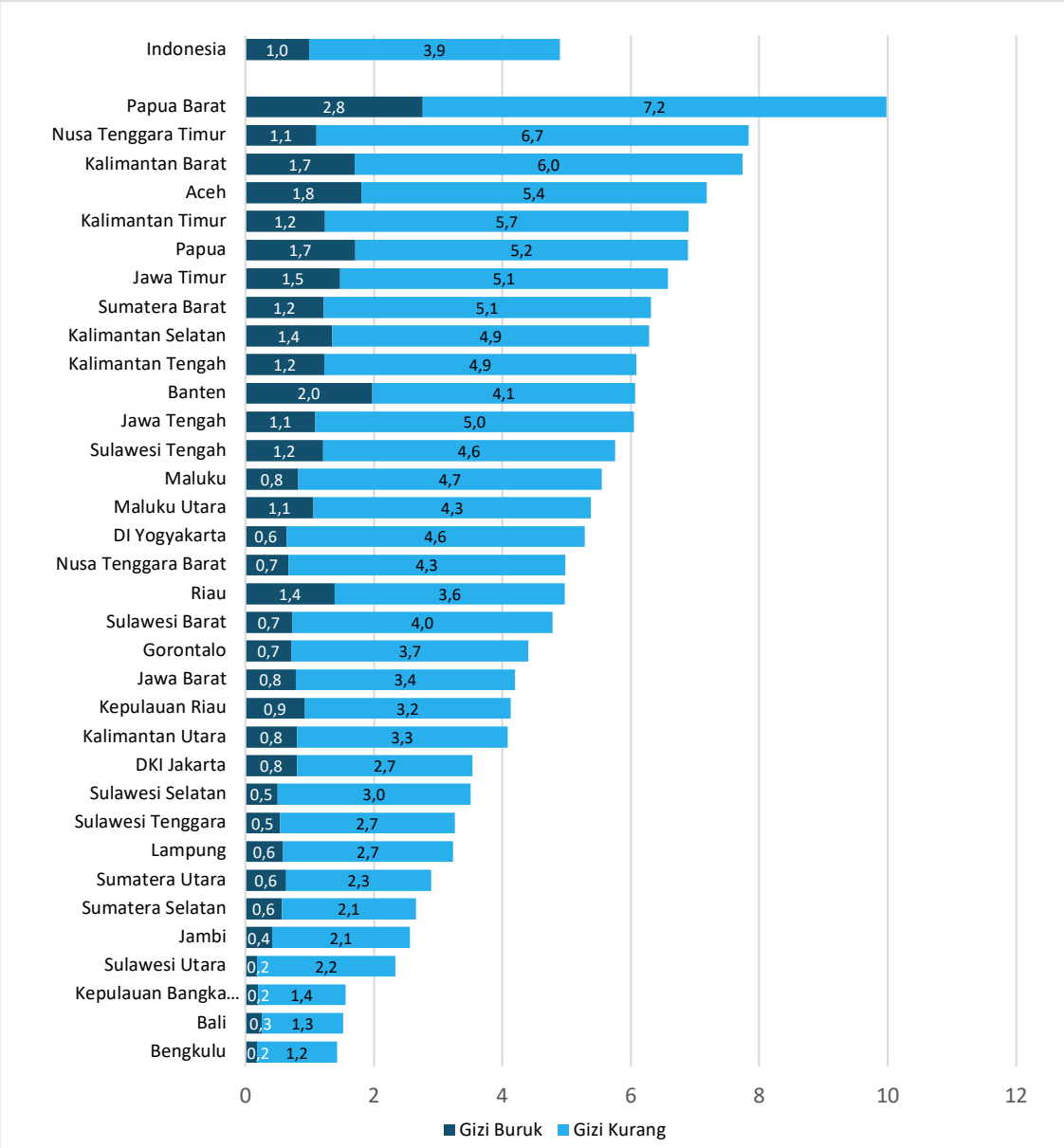
GAMBAR 5.46
PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Kekurangan gizi pada baduta berdasarkan indeks Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) meliputi kategori gizi buruk dan gizi kurang. SSGI tahun 2021 menyatakan sebesar 7,0% baduta *wasted* (gizi buruk dan gizi kurang). Menurut e-PPBGM didapatkan sebesar 1,0% baduta gizi buruk dan sebesar 3,9% baduta gizi kurang. Provinsi dengan persentase tertinggi gizi buruk dan gizi kurang pada baduta adalah Papua Barat, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Bengkulu.

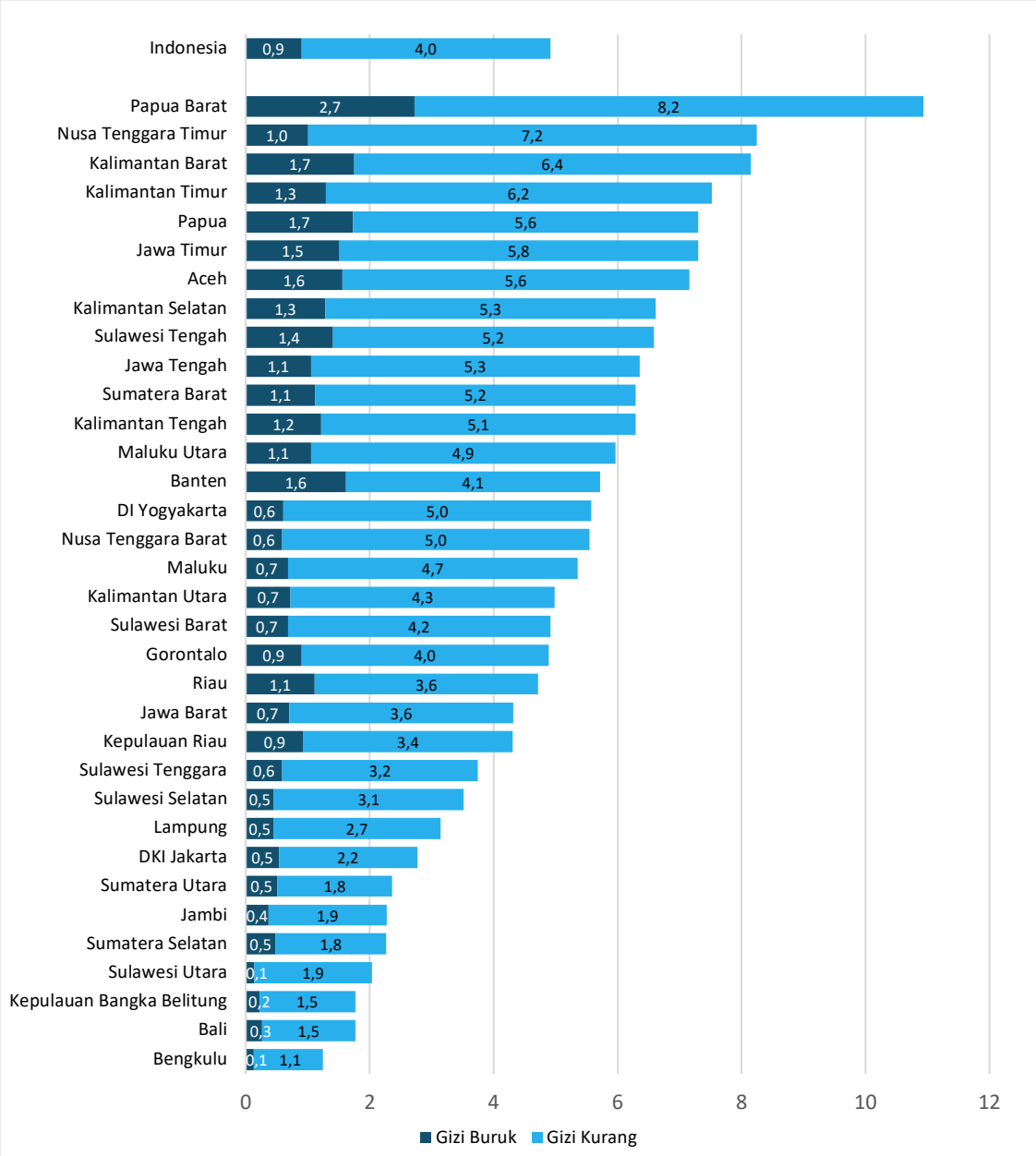
GAMBAR 5.47
PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BADUTA 0-23 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Balita dengan pengukuran indeks Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) sebesar 0,9% balita gizi buruk dan sebesar 4,0% balita gizi kurang. Provinsi dengan persentase tertinggi gizi buruk dan gizi kurang pada balita adalah Papua Barat, sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Provinsi Bengkulu.

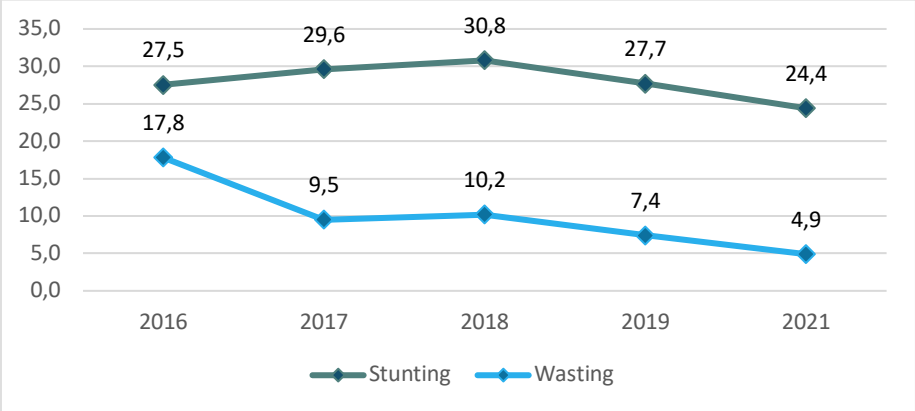
GAMBAR 5.48
PERSENTASE GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

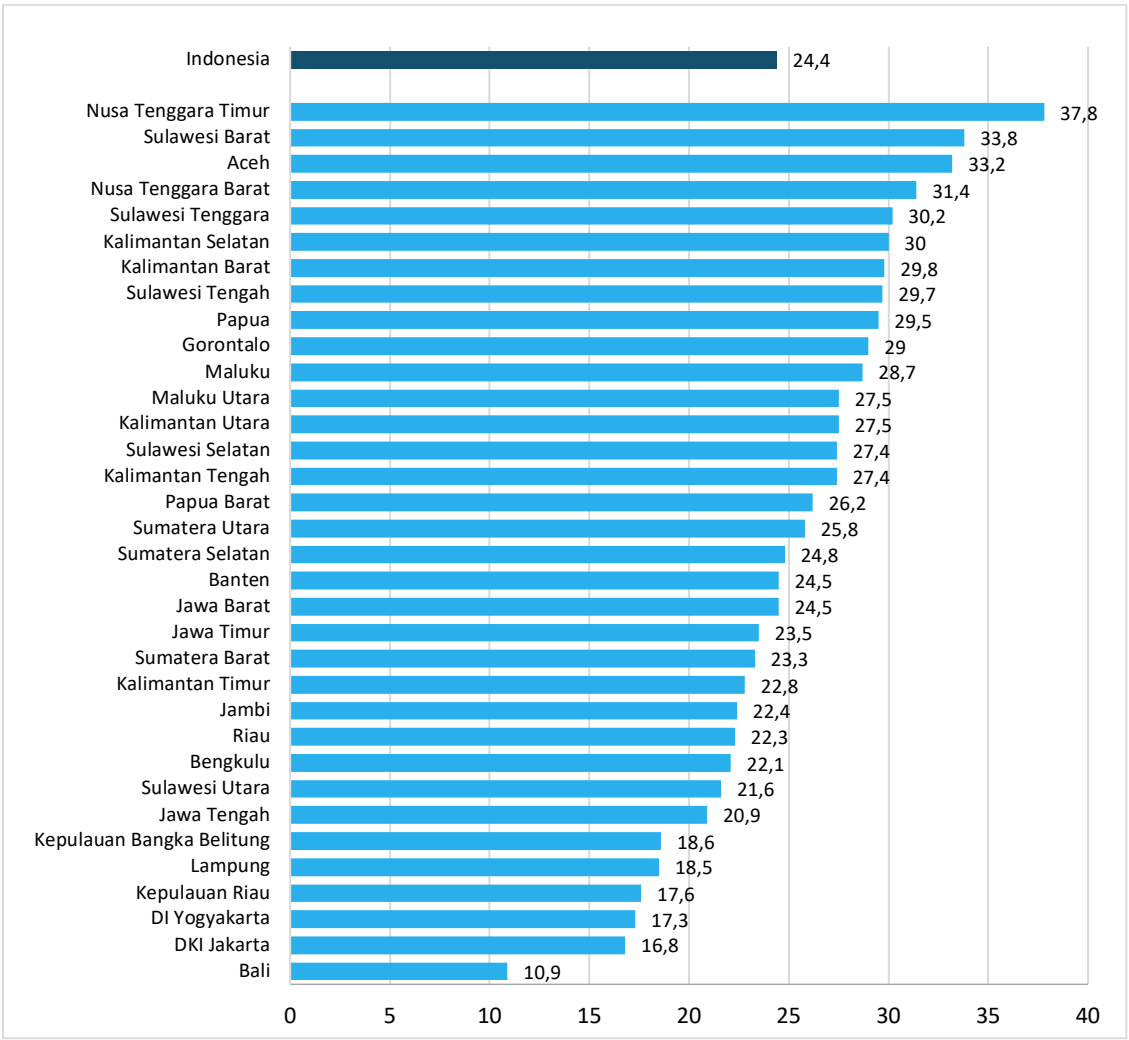
Pada gambar 5.49 terlihat bahwa persentase *stunting* (sangat pendek dan pendek) dan *wasting* (gizi buruk dan gizi kurang) pada balita usia 0-59 bulan sejak 2016 – 2021 cenderung mengalami penurunan. Hal ini tentu menjadi sebuah langkah yang baik dalam upaya mencapai target RPJMN 2020 – 2024 untuk penurunan angka *stunting* dan *wasting*.

GAMBAR 5.49
PERSENTASE SANGAT PENDEK DAN PENDEK DAN GIZI BURUK DAN GIZI KURANG PADA BALITA 0-59 BULAN DI INDONESIA TAHUN 2016-2021



Sumber: Balitbangkes Kemenkes PSG (tahun 2016-2017), Riskesdas (tahun 2018), SSGBI 2019, dan SSGI 2021

GAMBAR 5.50
GRAFIK PROPORSI SANGAT PENDEK DAN PENDEK (TB/U) PADA BALITA MENURUT PROVINSI, SSGI 2021



Sumber: BKPK, Kemenkes RI, 2022

Berdasarkan gambar 5.50 hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) oleh BKPK Kemenkes Republik Indonesia tahun 2021, diketahui bahwa proporsi stunting tertinggi terdapat di Nusa Tenggara Timur (37,8%), Sulawesi Barat (33,8%), dan Aceh (33,2%).

D. Upaya Pencegahan dan Penanganan Masalah Gizi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi, perlu dilakukan perbaikan gizi perseorangan dan gizi masyarakat dalam upaya penerapan gizi seimbang. Setiap keluarga harus mampu mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi setiap anggota keluarganya. Adapun upaya yang dilakukan untuk mengenal, mencegah, dan mengatasi masalah gizi yaitu dengan cara menimbang berat badan secara teratur, memberikan ASI saja kepada bayi sejak lahir sampai umur 6 bulan (ASI Eksklusif), menu makanan yang bervariasi, menggunakan garam beryodium, dan pemberian suplemen gizi sesuai anjuran petugas kesehatan. Suplemen gizi yang diberikan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi, meliputi kapsul vitamin A, tablet tambah darah (TTD), makanan tambahan untuk ibu hamil, anak balita, dan anak usia sekolah, makanan pendamping ASI, dan bubuk multi vitamin dan mineral.

a. Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif

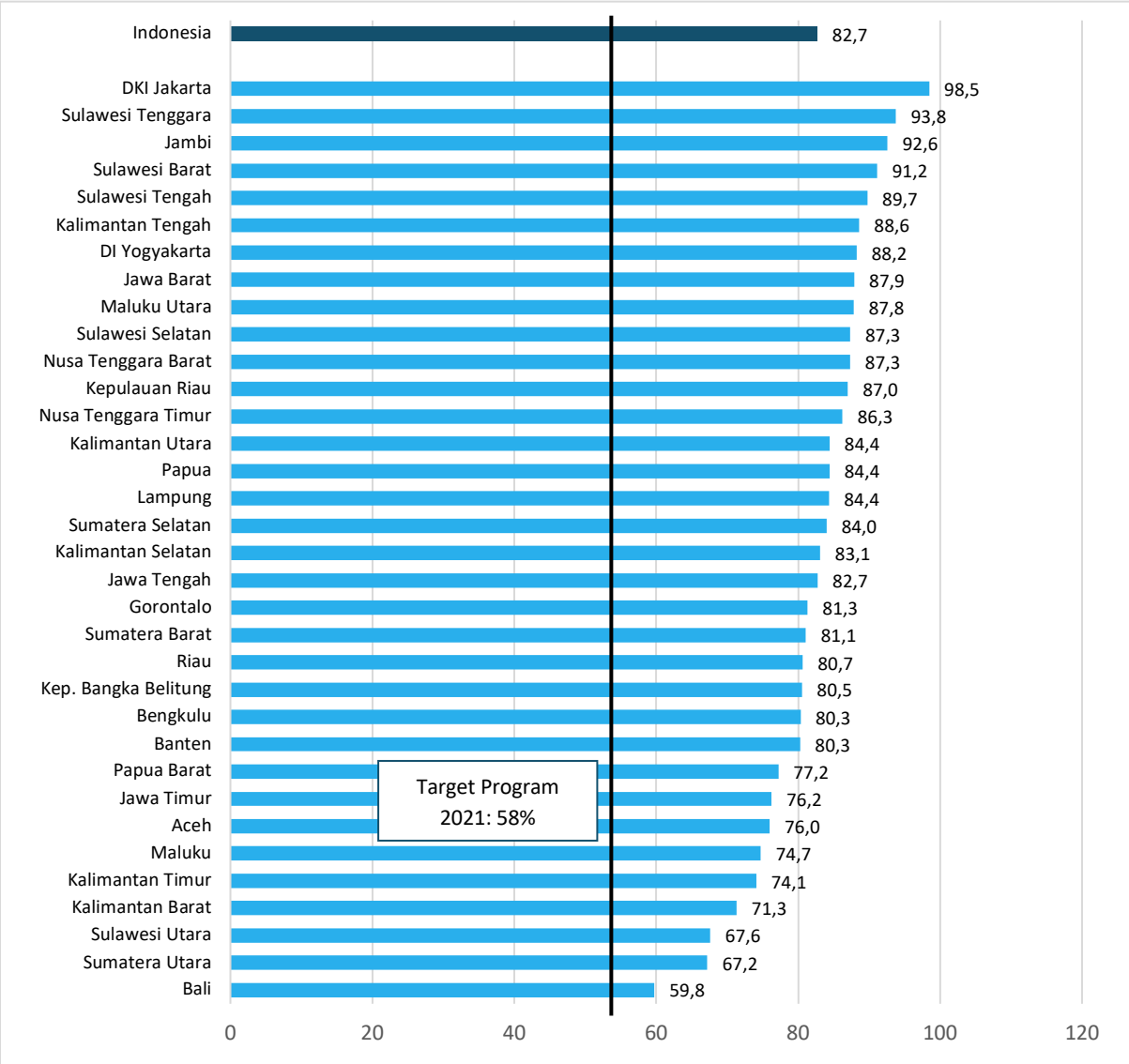
Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan proses menyusu yang dimulai segera setelah lahir dengan cara kontak kulit ke kulit antara bayi dengan ibunya dan berlangsung minimal 1 (satu) jam. Beberapa manfaat IMD di antaranya, mengurangi angka kematian bayi, membantu pernafasan dan detak jantung bayi lebih stabil, bayi mendapatkan zat kekebalan tubuh dan zat penting lainnya, dan merangsang pengaliran ASI dari payudara. Inisiasi Menyusu Dini juga akan sangat membantu dalam keberlangsungan pemberian ASI eksklusif (ASI saja) dan lama menyusui.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, ASI Ekslusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral).

ASI (Air Susu Ibu) adalah sumber asupan nutrisi bagi bayi baru lahir, yang mana ASI ini bersifat eksklusif sebab pemberiannya berlaku pada bayi berusia 0 bulan sampai 6 bulan. Dalam fase ini harus diperhatikan dengan benar mengenai pemberian dan kualitas ASI, supaya tak mengganggu tahap perkembangan si kecil selama enam bulan pertama semenjak hari pertama lahir (HPL), mengingat periode tersebut merupakan masa periode emas perkembangan anak sampai menginjak usia 2 tahun.

Pada tahun 2021, secara nasional persentase bayi baru lahir yang mendapat IMD yaitu sebesar 82,7%. Provinsi dengan persentase tertinggi bayi baru lahir mendapat IMD adalah DKI Jakarta (98,5%) sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Bali (59,8%). Target nasional IMD tahun 2021 sebesar 58%, sehingga seluruh provinsi telah melewati target.

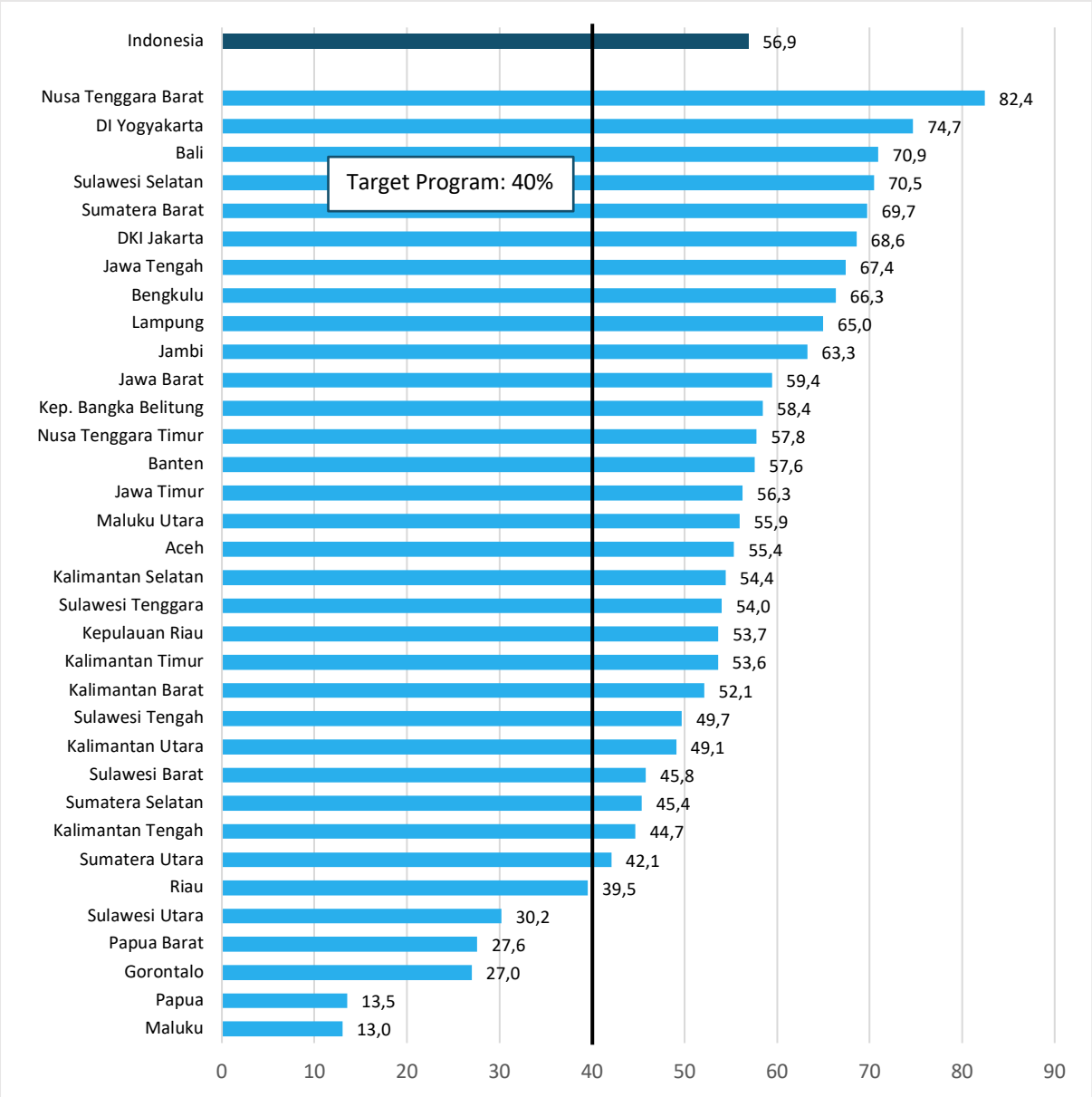
GAMBAR 5.51
CAKUPAN BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI 2022

Secara nasional, cakupan bayi mendapat ASI eksklusif tahun 2021 yaitu sebesar 56,9%. Angka tersebut sudah melampaui target program tahun 2021 yaitu 40%. Persentase tertinggi cakupan pemberian ASI eksklusif terdapat pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (82,4%), sedangkan persentase terendah terdapat di Provinsi Maluku (13,0%). Terdapat lima provinsi yang belum mencapai target program tahun 2021, yaitu Maluku, Papua, Gorontalo, Papua Barat, dan Sulawesi Utara. Cakupan bayi mendapat ASI eksklusif selengkapnya dapat dilihat pada gambar 5.52.

GAMBAR 5.52
CAKUPAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



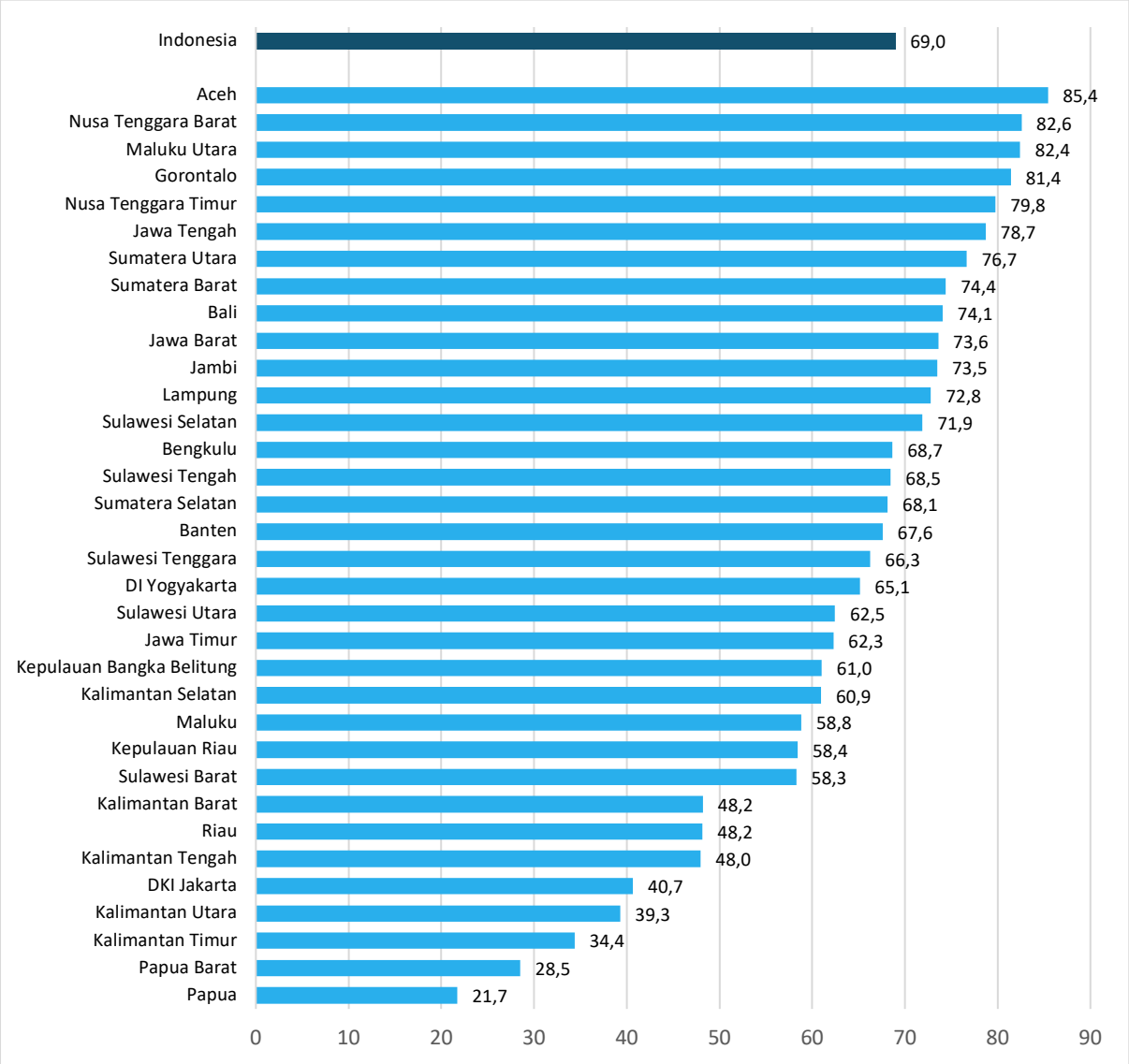
Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

b. Penimbangan Balita

Pemantauan pertumbuhan balita adalah bagian dari kegiatan rutin pemantauan pertumbuhan dan perkembangan pada pelayanan gizi dan kesehatan di puskesmas. Pemantauan pertumbuhan balita juga berfungsi sebagai alat deteksi dini gangguan pertumbuhan pada balita. Salah satu rangkaian kegiatan dalam pemantauan pertumbuhan adalah penimbangan balita. Melalui penimbangan balita tersebut dapat diketahui status gizi balita yang bermasalah sehingga dapat dilakukan intervensi sesuai dengan permasalahannya.

Persentase rata-rata balita yang ditimbang di Indonesia pada tahun 2021 adalah 69,0% anak per bulan. Jumlah ini meningkat dari tahun 2020 sebesar 61,3% anak per bulan. Persentase tertinggi terdapat di Provinsi Aceh yaitu sebesar 85,4%, sedangkan persentase terendah terdapat di Provinsi Papua yaitu sebesar 21,7%. Data lebih lengkap mengenai rata-rata balita yang ditimbang per bulan dapat dilihat di gambar 5.53.

GAMBAR 5.53
PERSENTASE RERATA BALITA DITIMBANG PER BULAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

c. Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A Balita Usia 6–59 Bulan

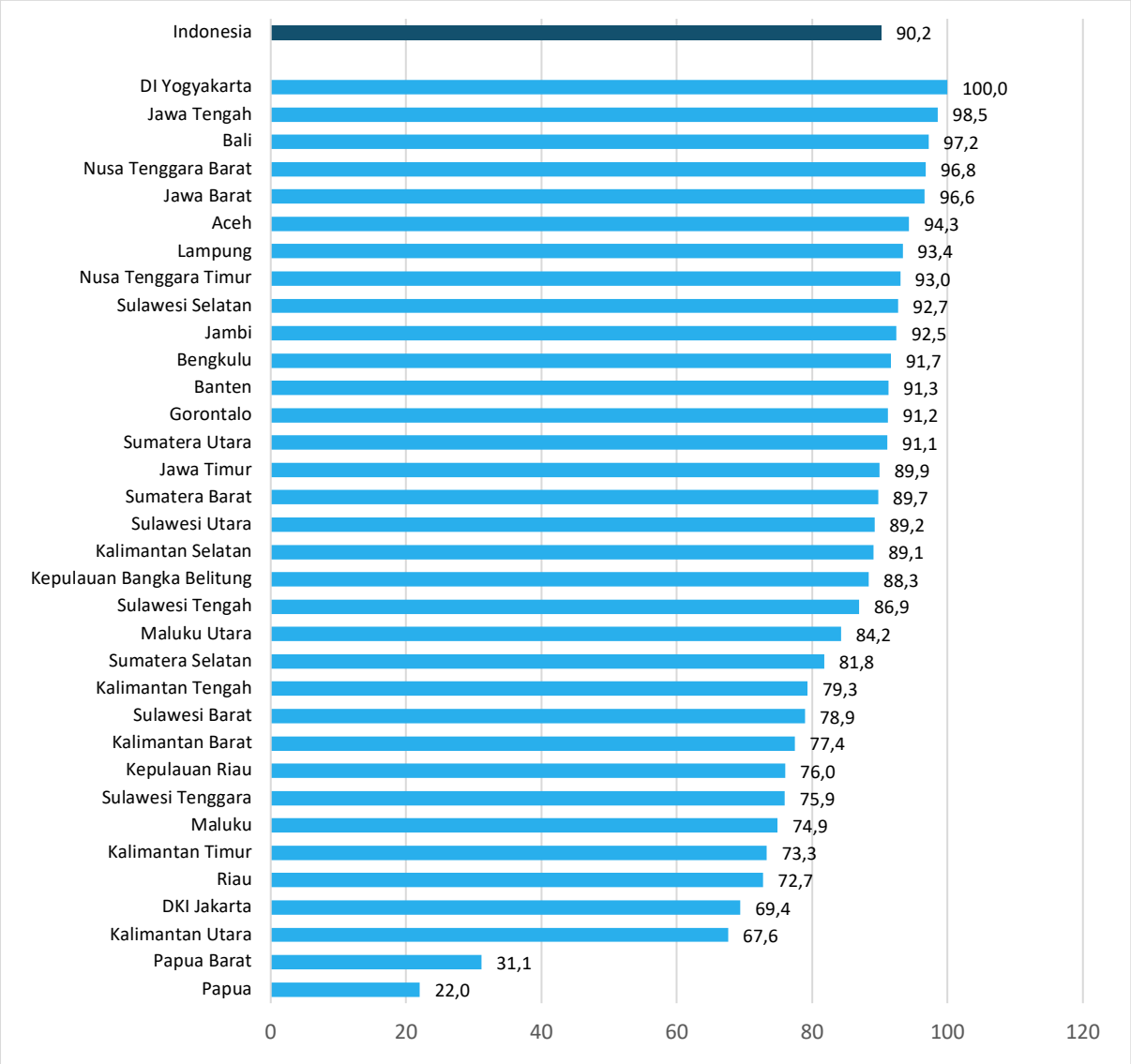
Vitamin A merupakan zat gizi penting yang terlibat dalam pembentukan, produksi, dan pertumbuhan sel darah merah, sel limfosit, antibodi juga integritas sel epitel pelapis tubuh. Adapun vitamin A juga bisa mencegah rabun senja, xeroftalmia, kerusakan kornea dan kebutaan serta mencegah anemia pada ibu nifas. Sedangkan apabila anak kekurangan vitamin A, maka anak bisa menjadi rentan terserang penyakit infeksi seperti infeksi saluran pernafasan atas, campak, dan diare.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita, dan Ibu Nifas, kapsul vitamin A merupakan kapsul lunak dengan ujung (*nipple*) yang dapat digunting, tidak transparan (*opaque*), dan mudah untuk dikonsumsi, termasuk dapat masuk ke dalam mulut balita. Kapsul vitamin A bagi bayi usia 6–11 bulan berwarna biru dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 100.000 IU, sedangkan kapsul vitamin A untuk anak balita usia 12-59 bulan dan ibu nifas berwarna merah dan mengandung retinol (palmitat/asetat) 200.000 IU.

Sesuai dengan Panduan Manajemen Suplementasi Vitamin A waktu pemberian kapsul vitamin A pada bayi dan anak balita dilaksanakan serentak setiap bulan Februari dan Agustus. Frekuensi pemberian vitamin A pada bayi 6-11 bulan adalah 1 kali sedangkan pada anak balita 12-59 bulan sebanyak 2 kali.

Cakupan pemberian vitamin A pada balita di Indonesia tahun 2021 yaitu sebesar 90,2%. Provinsi dengan persentase tertinggi cakupan pemberian vitamin A adalah DI Yogyakarta (100,0%), sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua (22,0%).

GAMBAR 5.54
CAKUPAN PEMBERIAN KAPSUL VITAMIN A PADA BALITA (6-59 BULAN)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

d. Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri

Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan yang dapat terjadi pada semua kelompok umur mulai dari balita sampai usia lanjut. Remaja putri (rematri) rentan menderita anemia dikarenakan siklus menstruasi setiap bulan. Anemia dapat menyebabkan penurunan daya tahan tubuh dan produktivitas. Anemia yang terjadi pada rematri juga dapat berisiko pada saat hamil dan akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensi menimbulkan komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan menyebabkan kematian ibu dan anak.

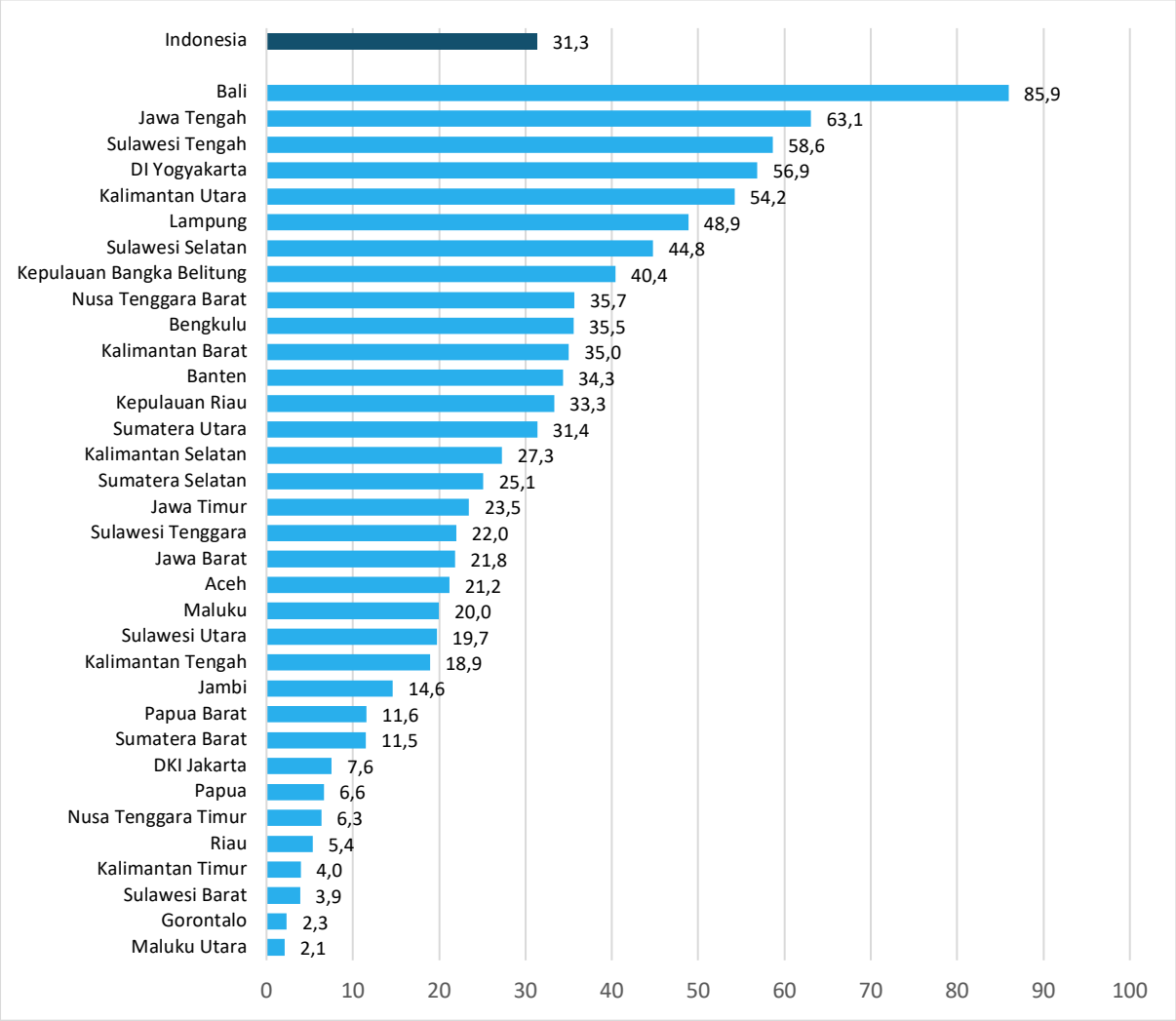
Penanganan dan pencegahan anemia dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin dan mineral yang menunjang pembentukan sel darah merah sebagai

pencegahan, fortifikasi bahan makanan dengan zat besi, dan suplementasi zat besi. Konsumsi makanan beraneka ragam dan kaya akan zat besi, folat, vitamin B12, dan vitamin C seperti yang terdapat pada hati, daging, kacang-kacangan, sayuran berwarna hijau gelap, buah-buahan, dsb. Namun tidak semua masyarakat dapat mengonsumsi makanan tersebut, sehingga diperlukan asupan zat besi tambahan yang diperoleh dari tablet tambah darah (TTD).

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Nomor HK.03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur, pemberian TTD pada remaja putri dilakukan melalui UKS/M di institusi Pendidikan (SMP dan SMA atau yang sederajat) dengan menentukan hari minum TTD bersama. Dosis yang diberikan adalah satu tablet setiap minggu selama sepanjang tahun.

Cakupan pemberian TTD pada remaja putri di Indonesia pada tahun 2021 adalah 31,3%. Provinsi dengan persentase tertinggi cakupan pemberian TTD pada remaja putri adalah Bali (85,9%), sedangkan persentase terendah adalah Maluku Utara (2,1%).

GAMBAR 5.55
CAKUPAN PEMBERIAN TABLET TAMBAH DARAH (TTD) PADA REMAJA PUTRI MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

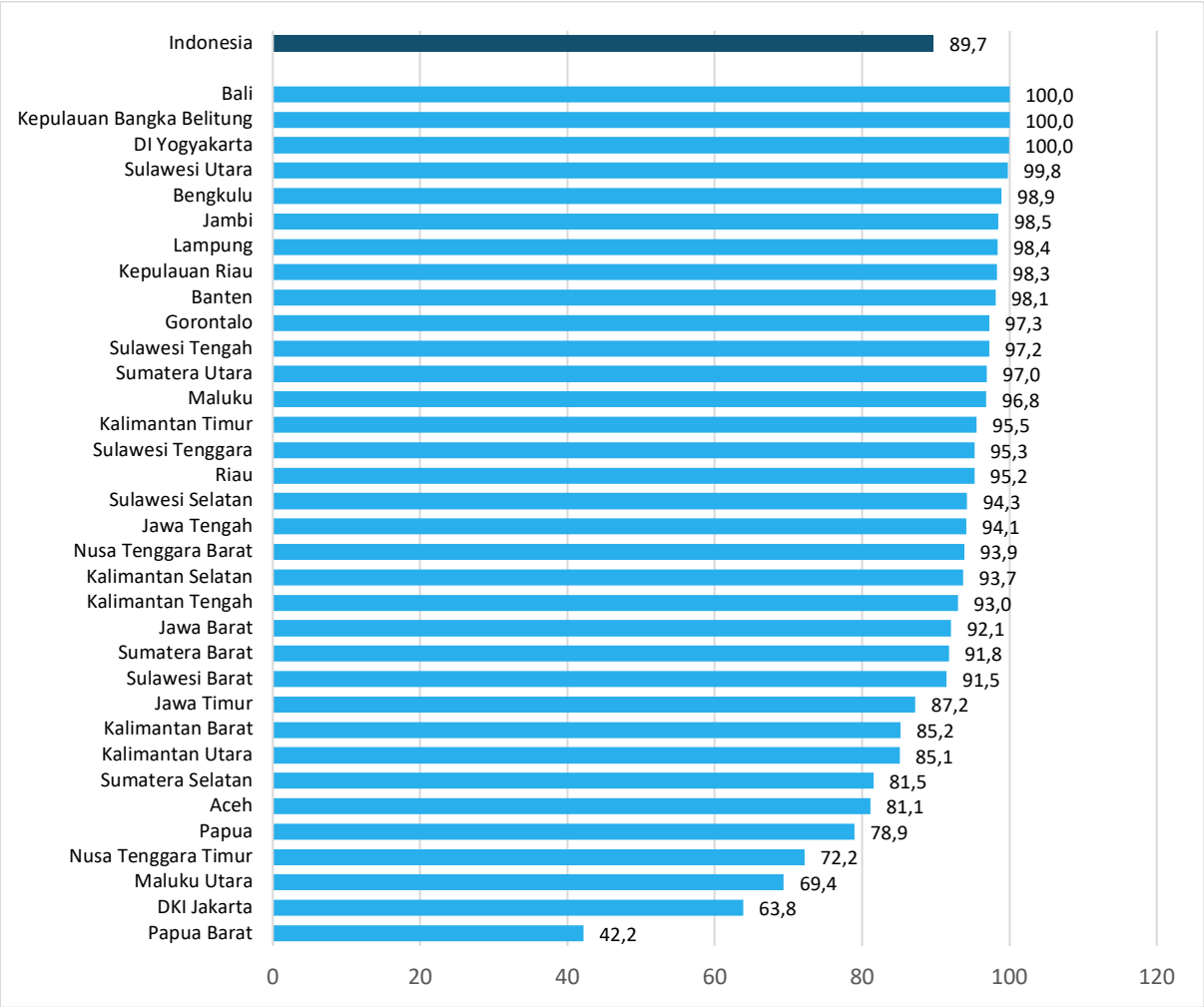
e. Pemberian Makanan Tambahan pada Ibu Hamil KEK dan Balita Gizi Kurang

Ibu hamil dengan masalah gizi dan kesehatan berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan ibu dan bayi serta kualitas bayi yang dilahirkan. Kondisi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) berisiko menurunkan kekuatan otot yang membantu proses persalinan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya partus lama dan perdarahan pasca salin, bahkan kematian ibu. Risiko pada bayi dapat mengakibatkan terjadi kematian janin (keguguran), prematur, lahir cacat, Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR) bahkan kematian bayi.

Salah satu upaya yang dilakukan pada ibu hamil KEK berupa Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan gizi ibu selama masa kehamilan. PMT bukan berarti mengganti asupan dari makanan utama, tetapi menambah asupan kebutuhan gizi.

Cakupan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK di Indonesia tahun 2021 adalah 89,7%. Provinsi dengan cakupan tertinggi pemberian makanan tambahan pada ibu hamil KEK adalah Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan DI Yogyakarta sebesar 100,0%. Sedangkan Provinsi dengan capaian terendah adalah Papua Barat sebesar 42,2%.

GAMBAR 5.56
CAKUPAN IBU HAMIL KEK MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN (PMT)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

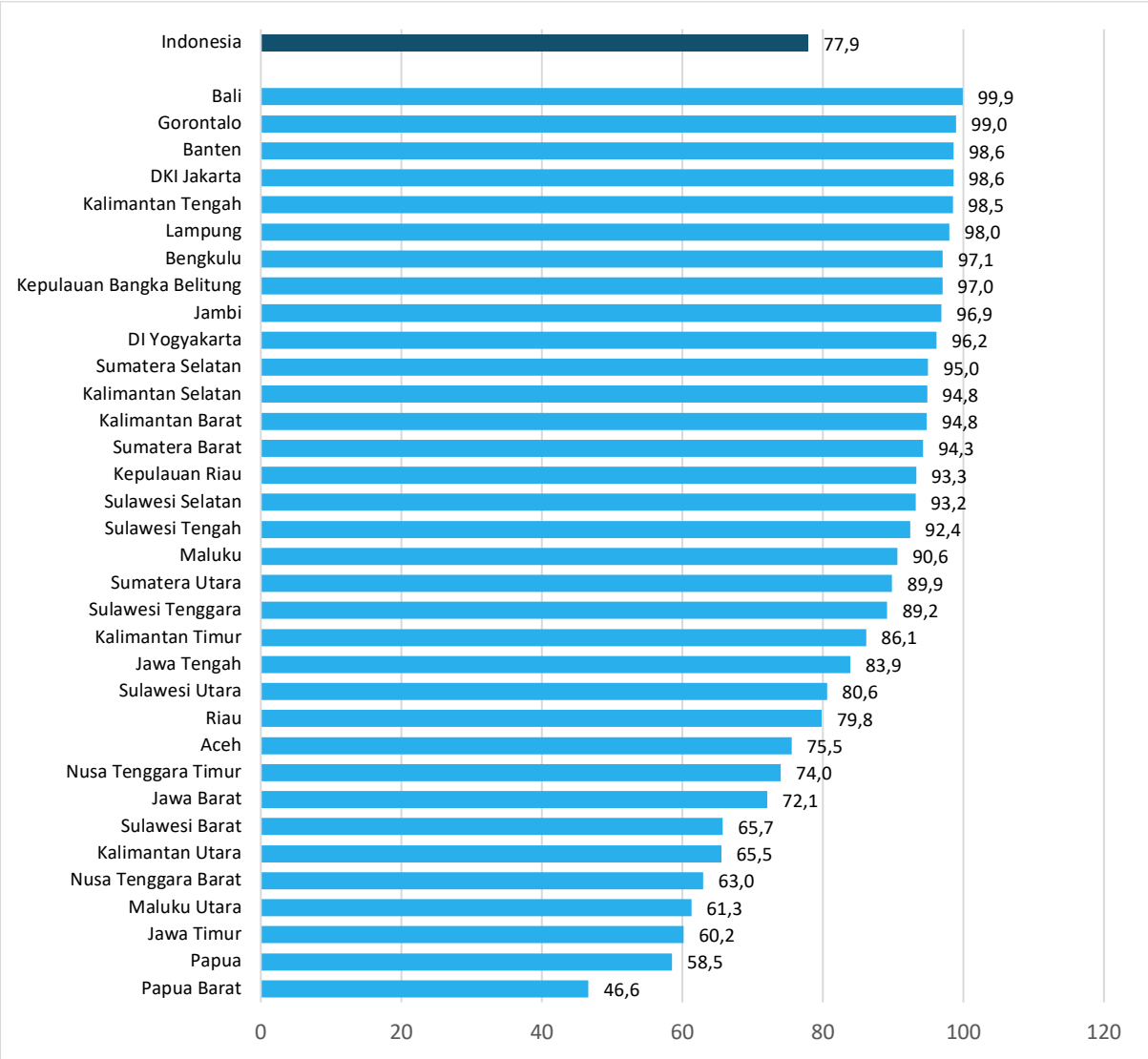


Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

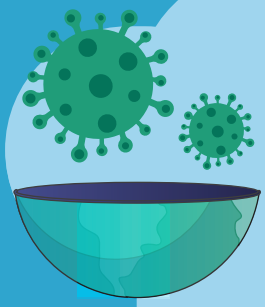
Selain pada Ibu Hamil KEK, PMT juga dilakukan pada balita gizi kurang yang termasuk dalam kelompok rawan gizi yang membutuhkan suplementasi gizi. Pemberian makanan tambahan diberikan pada balita usia 6 bulan ke atas selama 90 hari berturut-turut dengan status gizi kurang. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dapat diberikan berupa makanan tambahan lokal maupun pabrikan seperti biskuit. Bila status gizi anak membaik (dinilai dari kenaikan berat badan dan nilai z-score berat badan menurut tinggi badan telah mencapai minus 2 standar deviasi (-2 SD) atau lebih atau sesuai dengan perhitungan, maka makanan tambahan balita gizi kurang dihentikan. Selanjutnya balita tersebut dapat mengkonsumsi makanan keluarga yang memenuhi gizi seimbang serta dilakukan pemantauan berat badan secara rutin agar status gizi balita tidak kembali menjadi gizi kurang.

Persentase balita gizi kurang mendapat makanan tambahan di Indonesia tahun 2021 adalah 77,9%. Provinsi dengan persentase tertinggi balita gizi kurang mendapat makanan tambahan adalah Bali dengan capaian 99,9% sedangkan persentase terendah adalah Papua Barat dengan capaian 46,6%.

GAMBAR 5.57
CAKUPAN BALITA GIZI KURANG MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022



Bab VI.

PENGENDALIAN PENYAKIT

VI. PENGENDALIAN PENYAKIT

Pengendalian penyakit yang akan dibahas pada bab ini yaitu pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Pengendalian penyakit sebagai upaya penurunan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit mempunyai peranan penting untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat.

Penyakit menular meliputi penyakit menular langsung, penyakit yang dapat dikendalikan dengan imunisasi dan penyakit yang ditularkan melalui binatang. Sedangkan penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

A. PENYAKIT MENULAR LANGSUNG

1. Tuberkulosis

Tuberkulosis (TBC) saat ini masih merupakan masalah kesehatan masyarakat baik di Indonesia maupun internasional sehingga menjadi salah satu tujuan pembangunan kesehatan berkelanjutan (SDGs).

Tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman *Mycobacterium tuberculosis*. Kuman tersebut menyebar dari penderita TBC melalui udara. Kuman TBC ini biasanya menyerang organ paru bisa juga diluar paru (*extra* paru). Hampir seperempat penduduk dunia terinfeksi dengan kuman *Mycobacterium tuberculosis*, sekitar 89% TBC diderita oleh orang dewasa, dan 11% diderita oleh anak-anak. Sampai saat ini (Pandemi COVID-19), TBC masih merupakan penyebab kematian tertinggi setelah HIV/AIDS, dan merupakan salah satu dari 20 penyebab utama kematian di seluruh dunia. Indonesia berada pada peringkat ke-3 dengan penderita TBC tertinggi di dunia setelah India dan China. Secara global, diperkirakan 9,9 juta orang menderita TBC pada tahun 2020. *(WHO, Global Tuberculosis Report, 2021).*

Jumlah kematian akibat Tuberkulosis secara global pada tahun 2020 sebesar 1,3 juta, hal ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar 1,2 juta.

Beban penyakit yang disebabkan oleh tuberkulosis dapat diukur antara lain dengan insiden kasus dan mortalitas/kematian, seperti yang dijelaskan di bawah ini.

a. Insiden Tuberkulosis

Menurut *Global Tuberculosis Report* tahun 2021, pada tahun 2020 angka insiden TBC di Indonesia sebesar 301 per 100.000 penduduk, menurun jika dibandingkan dengan angka insidens TBC tahun 2019 yaitu sebesar 312 per 100.000 penduduk. Sedangkan angka kematian TBC tahun 2019 dan 2020 masih sama yaitu sebesar 34 per 100.000 penduduk.

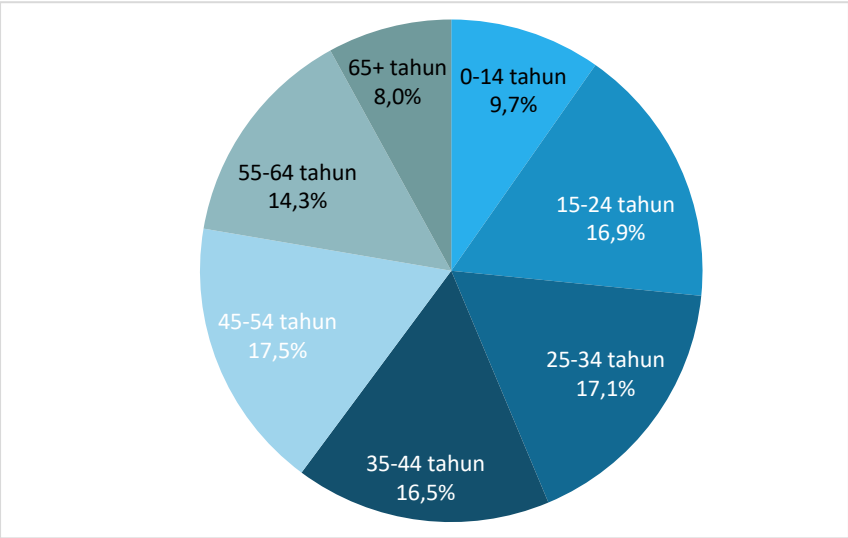
b. Kasus Tuberkulosis Ditemukan

Pada tahun 2021 jumlah kasus tuberkulosis yang ditemukan sebanyak 397.377 kasus, meningkat bila dibandingkan semua kasus tuberkulosis yang ditemukan pada tahun 2020 yaitu sebesar 351.936 kasus. Jumlah kasus tertinggi dilaporkan dari provinsi dengan jumlah penduduk

yang besar yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kasus tuberkulosis di ketiga provinsi tersebut menyumbang angka sebesar 44% dari jumlah seluruh kasus tuberkulosis di Indonesia.

Jika dibandingkan dari jenis kelamin, jumlah kasus pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan baik secara nasional maupun provinsi. Secara nasional jumlah kasus pada laki-laki sebesar 57,5% dan 42,5% pada perempuan.

GAMBAR 6.1
PROPORSI KASUS TUBERKULOSIS MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2021



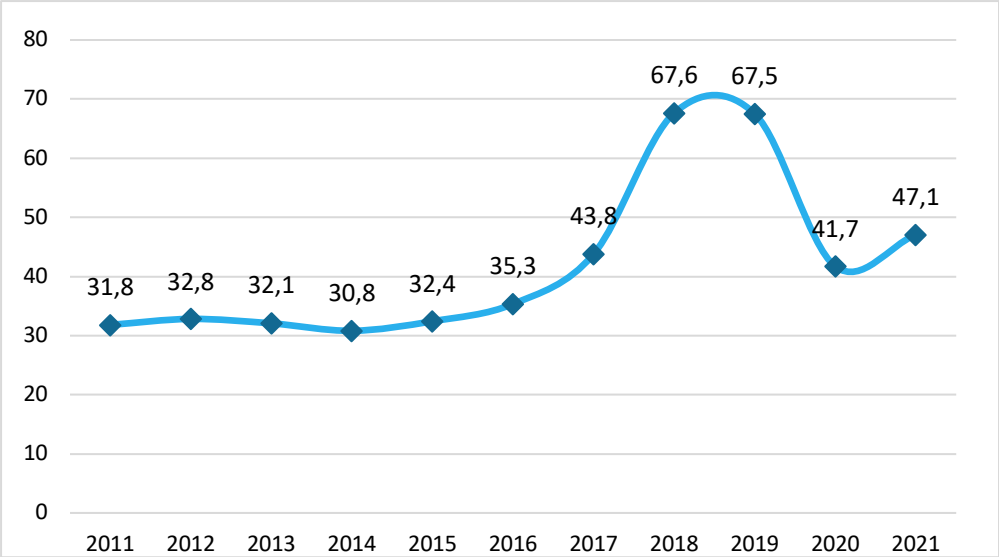
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Gambar 6.1 menunjukan bahwa pada tahun 2021 kasus TBC terbanyak ditemukan pada kelompok umur 45 – 54 tahun yaitu sebesar 17,5%, diikuti kelompok umur 25 – 34 tahun sebesar 17,1% dan 15 – 24 tahun 16,9%.

c. Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*/TC)

Treatment Coverage (TC) adalah jumlah kasus TBC yang diobati dan dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus TBC pada tahun yang sama dan dinyatakan dalam persentase. TC menggambarkan seberapa banyak kasus tuberkulosis yang terjangkau oleh program.

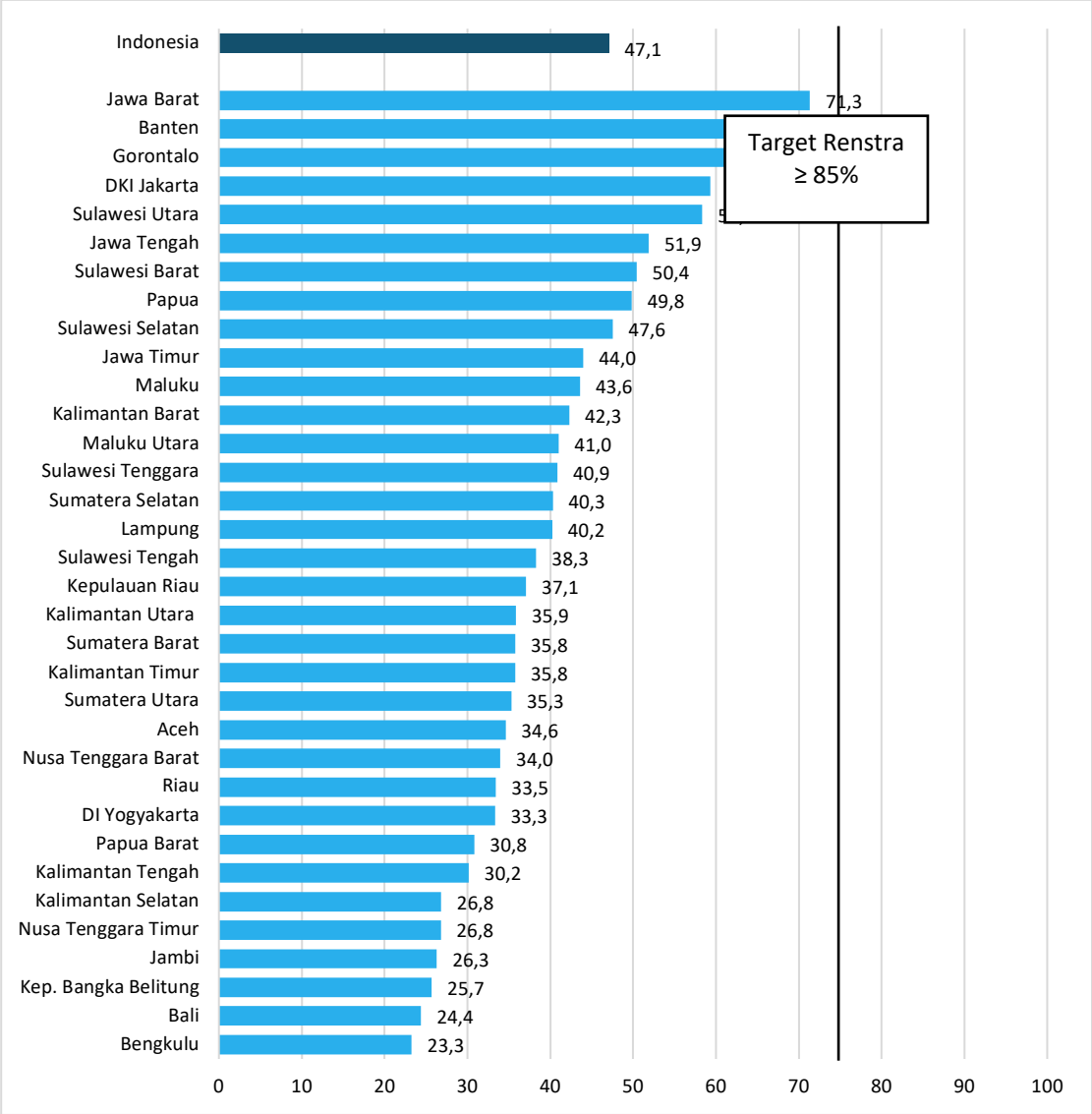
GAMBAR 6.2
***TREATMENT COVERAGE* (*TC*)**
TAHUN 2011-2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022.

Gambar 6.2. menunjukkan bahwa TC kasus tuberkulosis pada tahun 2021 sebesar 47,1% , meningkat jika dibandingkan tahun 2020. TC tertinggi terlihat di tahun 2018 yaitu sebesar 67,6%. TC pada tahun 2021 di Indonesia belum mencapai target TC yang diharapkan yaitu sebesar 49% (*WHO, Global Tuberculosis Report,* 2021).

GAMBAR 6.3
***TREATMENT COVERAGE* (*TC*) MENURUT PROVINSI**
TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

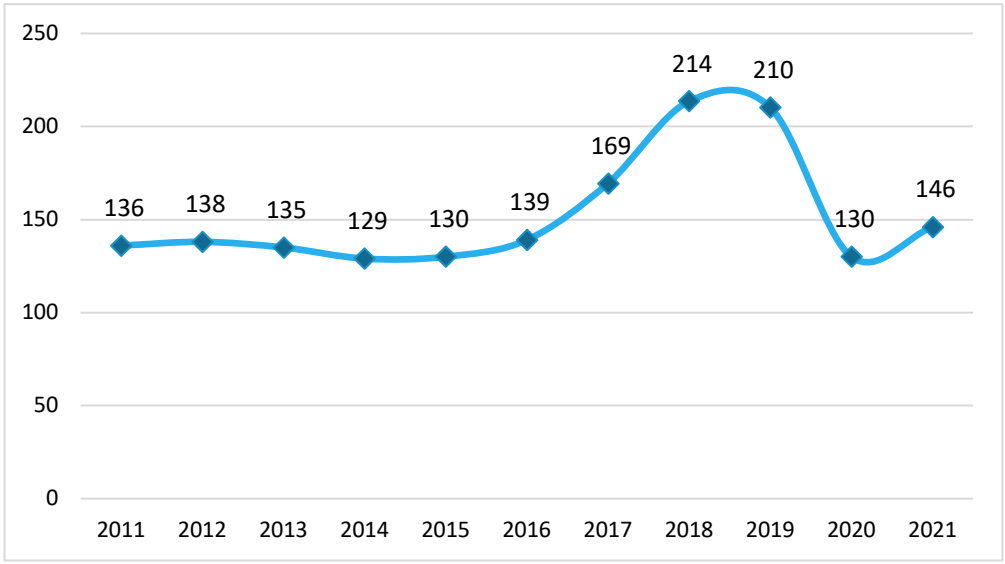
Gambar 6.3 menunjukan bahwa belum ada provinsi yang mencapai angka TC ≥85% pada tahun 2021. Namun, provinsi dengan TC tertinggi adalah Jawa Barat 71,3% dan Banten sebesar 70,5%.

d. Angka Notifikasi Semua Kasus Tuberkulosis atau *Case Notification Rate (CNR)*

Case Notification Rate (CNR) adalah jumlah semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan di antara 100.000 penduduk yang ada di suatu wilayah tertentu. Angka ini apabila dikumpulkan serial, akan menggambarkan kecenderungan (tren) meningkat atau menurunnya penemuan kasus dari tahun ke tahun di suatu wilayah. Gambar 6.4 menunjukkan angka notifikasi semua kasus tuberkulosis per 100.000 penduduk dari tahun 2011-2021 yang secara

nasional memperlihatkan kecenderungan peningkatan CNR sampai tahun 2018 dan menurun pada tahun 2019 dan 2020.

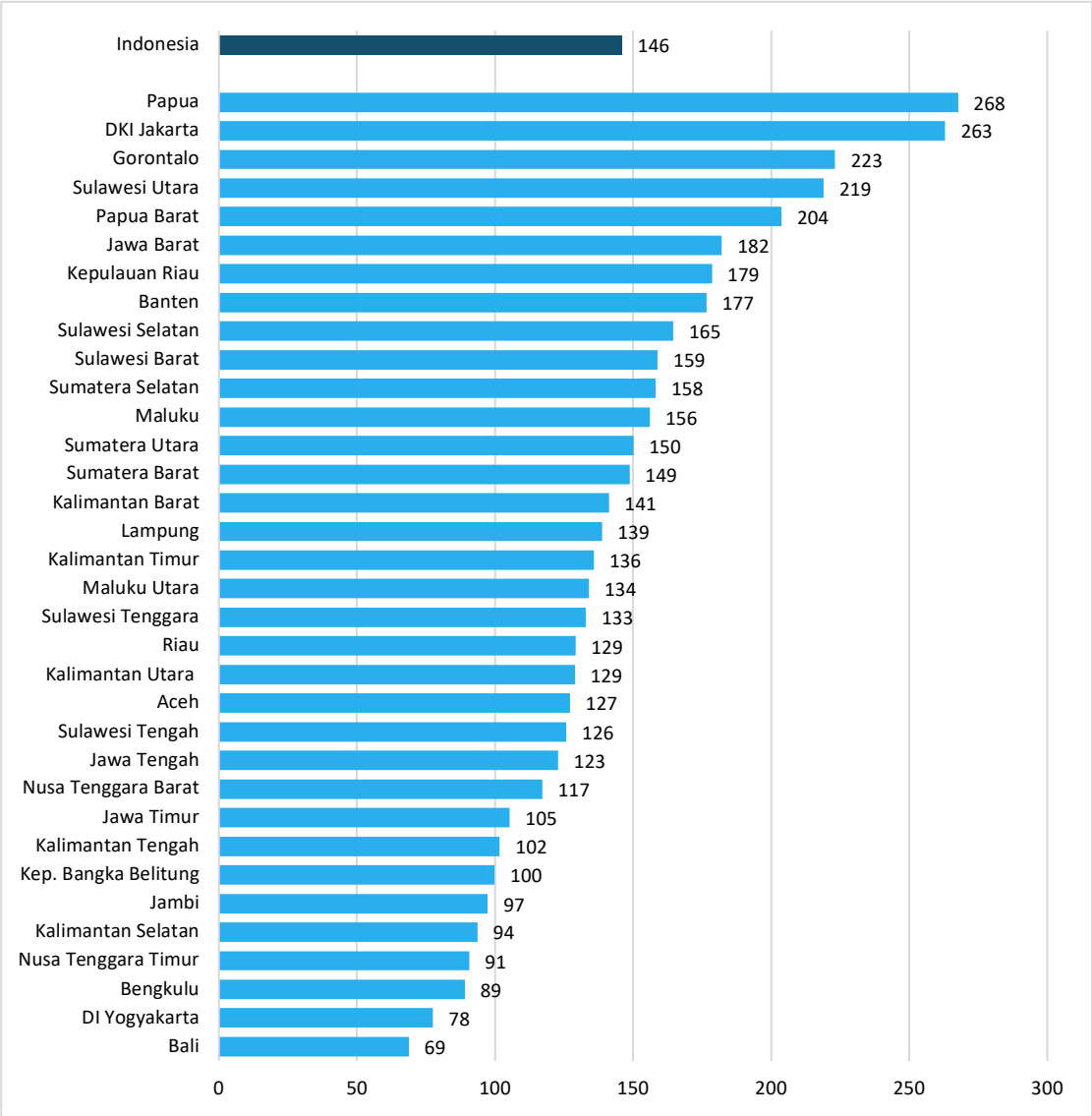
GAMBAR 6.4
ANGKA NOTIFIKASI SEMUA KASUS TUBERKULOSIS
PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2011-2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

CNR semua kasus TBC menurut provinsi tahun 2021 bervariasi antara 69-268 per 100.000 penduduk, dengan CNR tertinggi di Provinsi Papua dan terendah di Provinsi Bali.

GAMBAR 6.5
ANGKA NOTIFIKASI SEMUA KASUS TUBERKULOSIS
PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

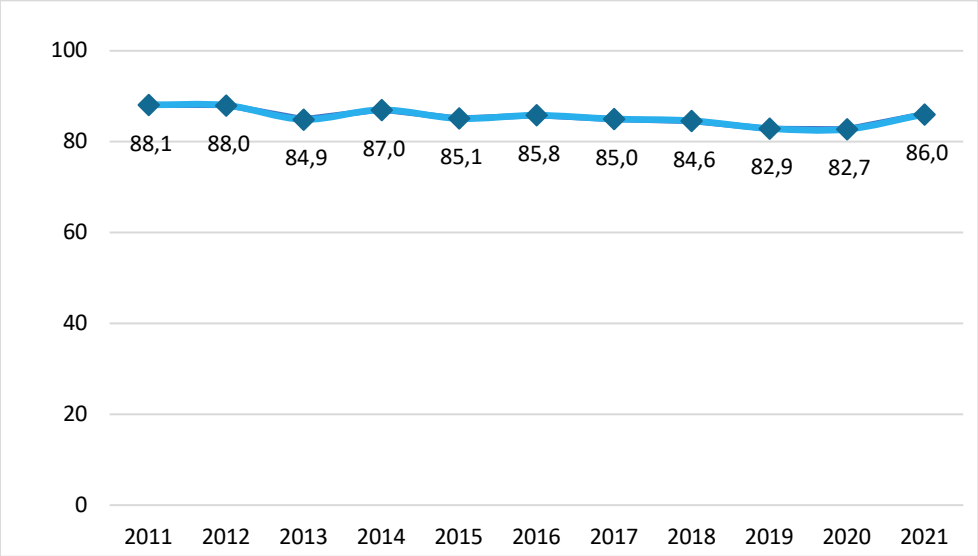


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

e. Angka Keberhasilan Pengobatan

Angka keberhasilan pengobatan *(Success Rate)* merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan yaitu jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TBC yang diobati dan dilaporkan.

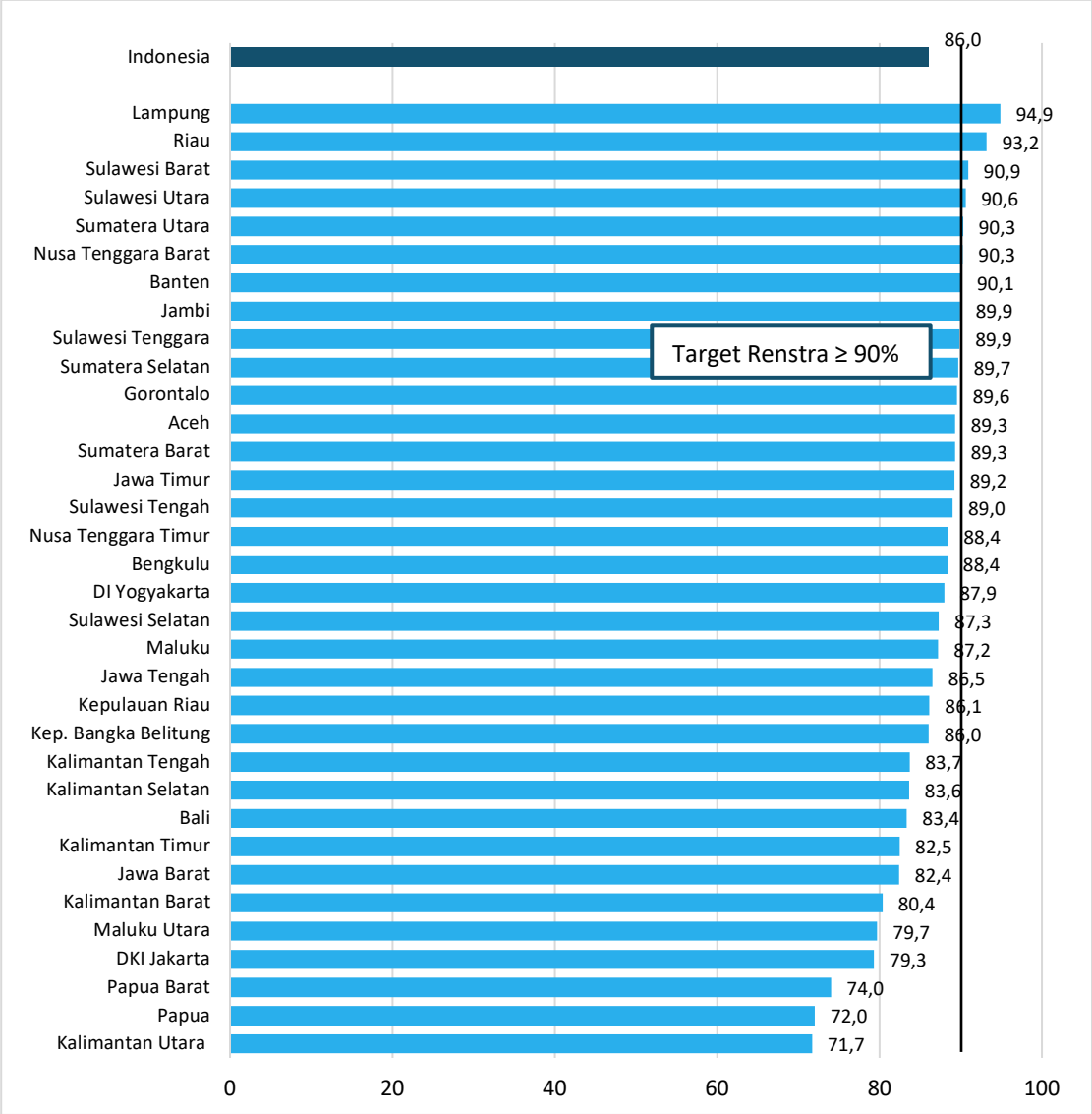
GAMBAR 6.6
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS
DI INDONESIA TAHUN 2011-2021



Sumber: Ditjen P2PL, Kemenkes RI, 2021

Jika merujuk pada target yang ditetapkan renstra Kementerian Kesehatan untuk indikator ini pada tahun 2021 yaitu sebesar 85%, maka secara nasional angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis sudah tercapai (86,0%).

GAMBAR 6.7
ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN PASIEN TUBERKULOSIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Provinsi yang mencapai angka keberhasilan pengobatan semua kasus tuberkulosis minimal 90% pada tahun 2021 sebanyak 7 provinsi, yaitu Lampung (94,9%), Riau (93,2%), Sulawesi Barat (90,9%), Sulawesi Utara (90,6%), Sumatera Utara (90,3%), Nusa Tenggara Barat (90,3%) Banten (90,1%).

2. HIV dan AIDS

Human Immunodeficiency Virus (HIV) adalah virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Infeksi tersebut menyebabkan penderita mengalami penurunan kekebalan sehingga sangat mudah untuk terinfeksi berbagai macam penyakit lain. Sedangkan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) adalah

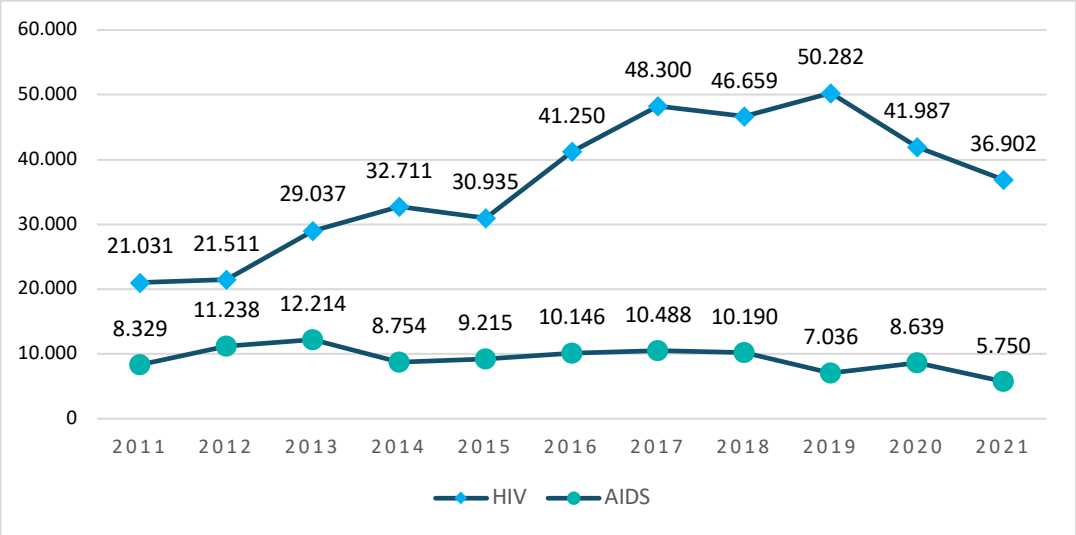
sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Orang yang terinfeksi HIV memerlukan pengobatan Antiretroviral (ARV) untuk menekan jumlah virus HIV di dalam tubuh. Virus yang tertekan (tersupresi) tidak berpotensi menular kepada orang lain, dan orang dengan HIV akan memiliki kualitas hidup yang baik. Penemuan kasus pada stadium awal dan segera mendapatkan pengobatan ARV, membuat seseorang tidak jatuh pada HIV stadium lanjut (AIDS). Pada HIV stadium lanjut (AIDS) terjadi potensi masuknya infeksi-infeksi lainnya yang dikenal dengan infeksi oportunistik. Program pengendalian HIV di Indonesia bertujuan untuk:

1. menurunkan hingga meniadakan infeksi baru;
2. menurunkan hingga meniadakan kematian terkait AIDS;
3. menurunkan stigma dan diskriminasi.

Estimasi jumlah orang dengan HIV di Indonesia pada tahun 2020 sebanyak 543.100 orang dengan jumlah infeksi baru sebanyak 29.557 orang dan kematian sebanyak 30.137 orang (Hasil Pemodelan Spectrum 2020).

Dari Gambar 6.8 terlihat jumlah kasus HIV positif yang dilaporkan dari tahun ketahun cenderung meningkat. Namun, pada tahun 2021 jumlah kasus HIV positif merupakan yang terendah sejak empat tahun terakhir, yaitu dilaporkan sebanyak 36.902 kasus. Sebaliknya, dibandingkan rata-rata 8 tahun sebelumnya, jumlah kasus baru AIDS cenderung menurun, pada tahun 2021 dilaporkan sebanyak 5.750 kasus.

GAMBAR 6.8
JUMLAH KASUS HIV POSITIF DAN AIDS YANG DILAPORKAN DI INDONESIA TAHUN 2011-2021

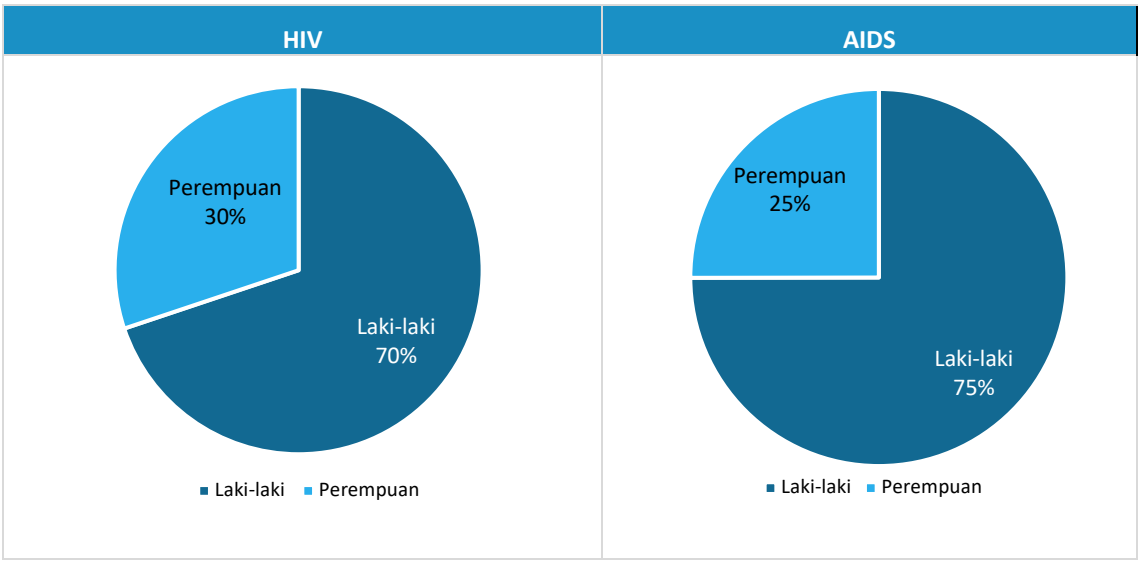


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Penurunan kasus HIV dan AIDS pada di tahun 2020 dan 2021 dikarenakan terjadi pandemi COVID 19, dimana banyak tenaga kesehatan di layanan membantu penanganan COVID-19, sementara di tahun 2021 tenaga kesehatan di layanan membantu pemberian vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat.

Pada HIV dan AIDS, proporsi kasus kelompok laki-laki lebih besar lebih dari dua kali lipat dibandingkan pada kelompok perempuan seperti digambarkan pada Gambar 6.9 berikut ini.

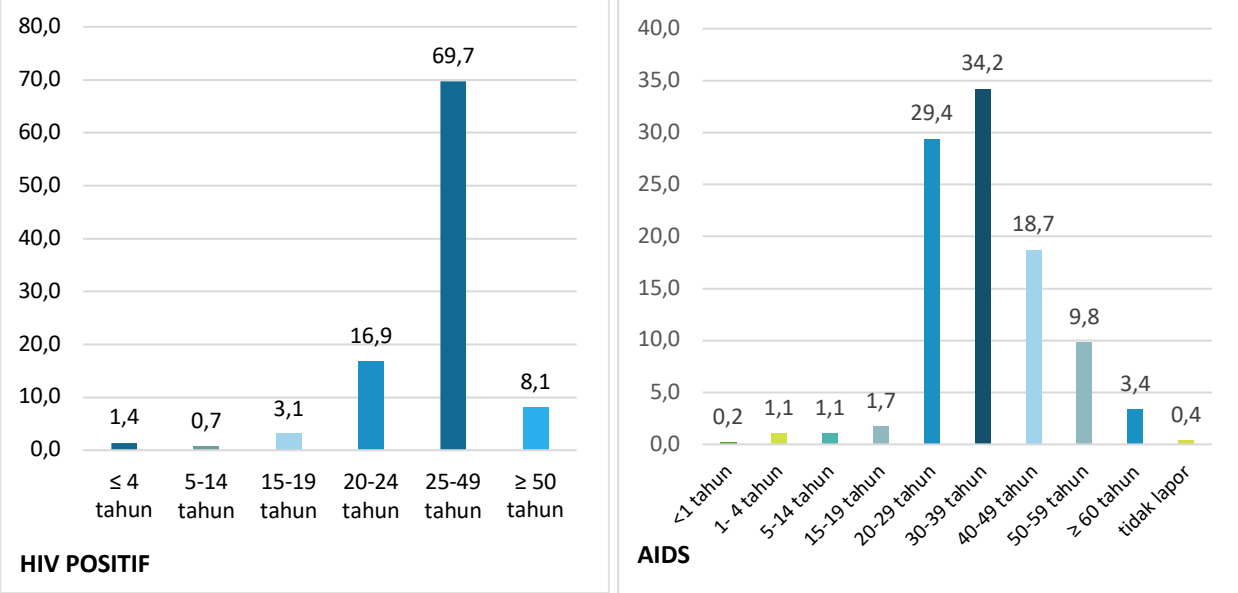
GAMBAR 6.9
PROPORSI KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Persentase kasus HIV positif dan AIDS tahun 2021 menurut kelompok umur seperti digambarkan pada Gambar 6.10 berikut ini.

GAMBAR 6.10
PERSENTASE KASUS HIV POSITIF DAN AIDS MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Sebagian besar sebaran kasus HIV dan AIDS terdapat pada kelompok umur produktif 15-49 tahun. Sementara itu masih ditemukan kasus HIV dan AIDS pada kelompok usia di bawah 4 tahun yang menunjukkan penularan HIV dari ibu ke anak. Dalam rangka mencapai tujuan nasional dan global *triple elimination* (eliminasi HIV, hepatitis B, dan sifilis) pada bayi, penularan HIV dari ibu ke anak diharapkan akan terus menurun di tahun selanjutnya.

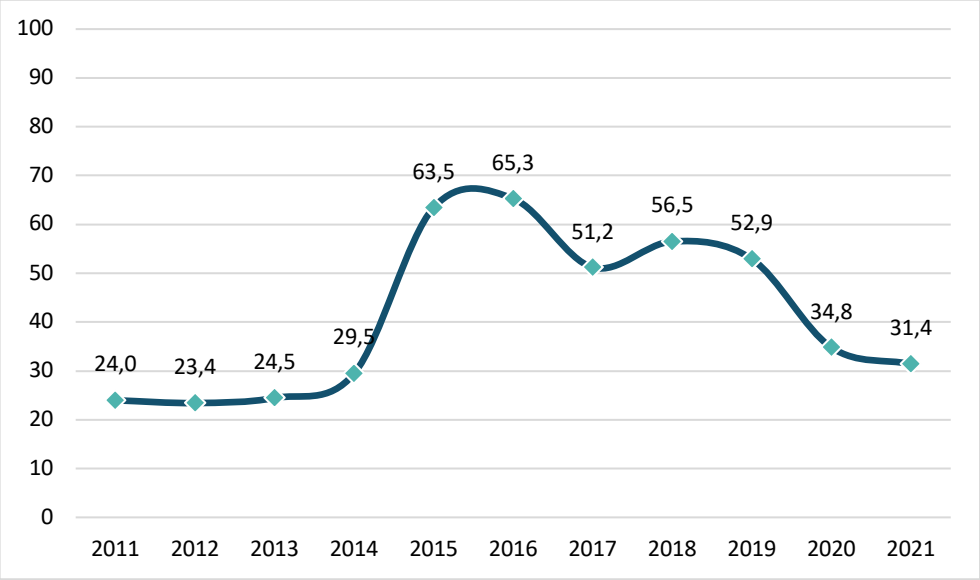
3. Pneumonia

Pneumonia adalah infeksi akut yang mengenai jaringan paru-paru (alveoli) yang dapat disebabkan oleh berbagai mikroorganisme seperti virus, jamur dan bakteri. Sampai saat ini program dalam pengendalian pneumonia lebih diprioritaskan pada pengendalian pneumonia balita. Pneumonia pada balita ditandai dengan batuk dan atau tanda kesulitan bernapas yaitu adanya nafas cepat, kadang disertai tarikan dinding dada bagian bawah kedalam (TDDK), dengan batasan napas cepat berdasarkan usia penderita:

- < 2 bulan : ≤ 60/menit,
- 2 - < 12 bulan : ≤ 50/menit,
- 1 - < 5 tahun : ≤ 40/menit.

Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengendalikan penyakit ini yaitu dengan meningkatkan penemuan pneumonia pada balita. Berikut cakupan penemuan kasus pneumonia pada balita di Indonesia pada tahun 2011-2021 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

GAMBAR 6.11
CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA (%)
DI INDONESIA TAHUN 2011-2021



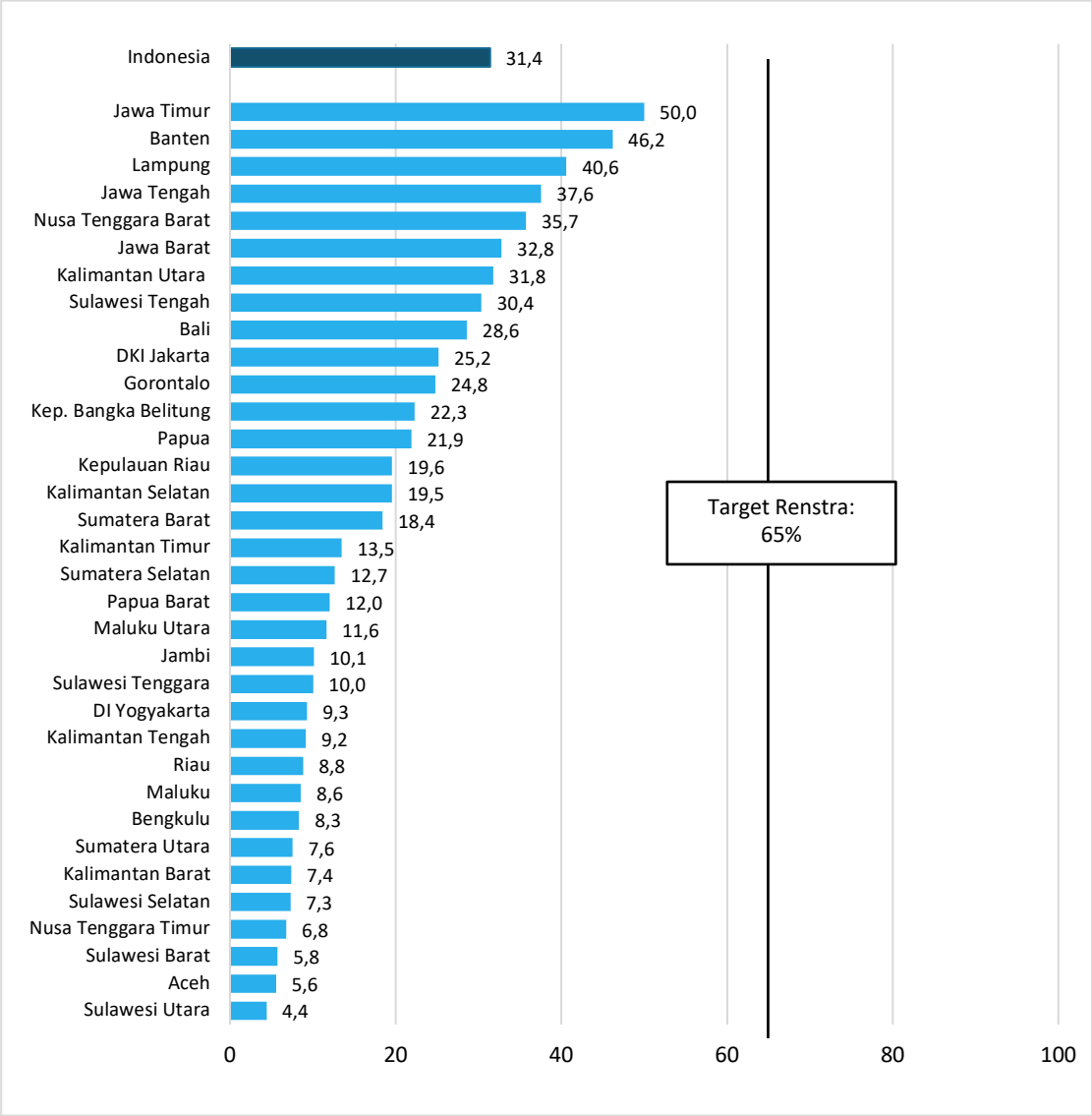
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Cakupan penemuan pneumonia pada balita selama 11 tahun terakhir terlihat cukup fluktuatif. Cakupan tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 65,3%. Pada tahun 2015-2019 adanya perubahan angka perkiraan kasus dari 10% menjadi 3,55%, hal ini menyebabkan pada

tahun tersebut cakupannya tinggi. Penurunan yang cukup signifikan terlihat ditahun 2020-2021 jika dibandingkan dengan cakupan 5 tahun terakhir, penurunan ini di sebabkan dampak dari pandemi COVID-19, dimana adanya stigma pada penderita COVID-19 yang berpengaruh pada penurunan jumlah kunjungan balita batuk atau kesulitan bernapas di puskesmas.

Pada tahun 2019 jumlah kunjungan balita batuk atau kesulitan bernapas sebesar 7,047,834 kunjungan, pada tahun 2020 menjadi 4,972,553 kunjungan, terjadi penurunan 30% dari kunjungan tahun 2019, dan tahun 2021 menurun kembali menjadi 4.432.177 yang pada akhirnya berdampak pada penemuan pneumonia balita.

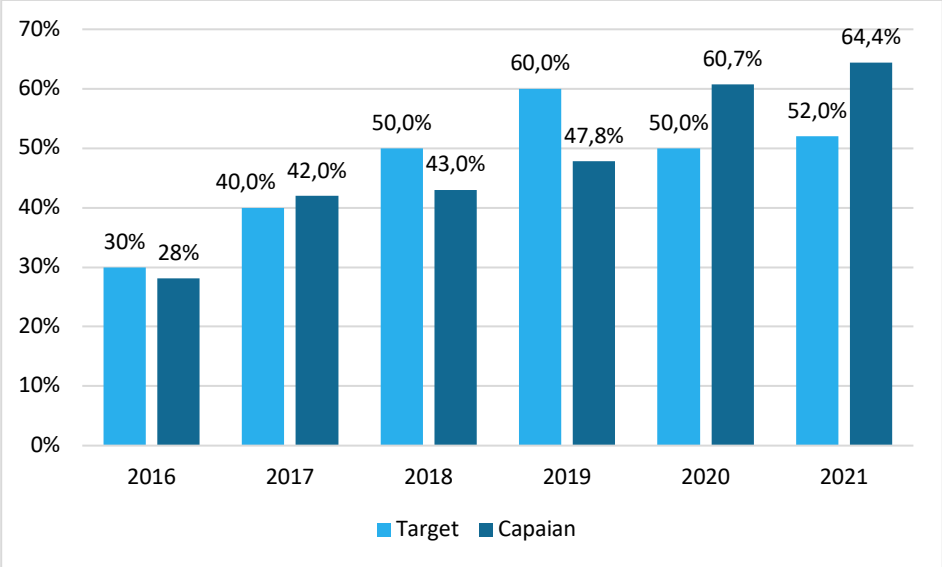
GAMBAR 6.12
CAKUPAN PENEMUAN PNEUMONIA PADA BALITA (%)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Pada tahun 2021 secara nasional cakupan pneumonia pada balita sebesar 31,4%, dan provinsi belum mencapai target penemuan sebesar 65%. Provinsi dengan cakupan penemuan pneumonia pada balita tertinggi berada di Jawa Timur (50,0), Banten (46,2%), dan Lampung (40,6%).

GAMBAR 6.13
CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KABUPATEN/ KOTA YANG 50% PUSKESMASNYA MELAKSANAKAN TATALAKSANA STANDAR PNEUMONIA 2016-2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Indikator Renstra yang digunakan pada tahun 2021 yaitu persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melaksanakan pemeriksaan dan tatalaksana standar pneumonia sesuai standar sebesar 52%, baik melalui pendekatan MTBS (Manajemen Terpadu Balita Sakit), maupun program Pencegahan dan Pengendalian ISPA. Pada tahun 2021 Persentase kabupaten/kota yang 50% puskesmasnya melakukan tatalaksana standar pneumonia sebesar 64,4% yang berarti sudah mencapai target renstra tahun 2021 yaitu sebesar 52%.

Tahun 2021 terdapat tujuh Provinsi yang seluruh (100%) Kab//Kotanya yang 50% Puskesmasnya yang melakukan tatalaksana standar pneumonia yaitu: Jambi, Bangka Belitung, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Bali, NTB.

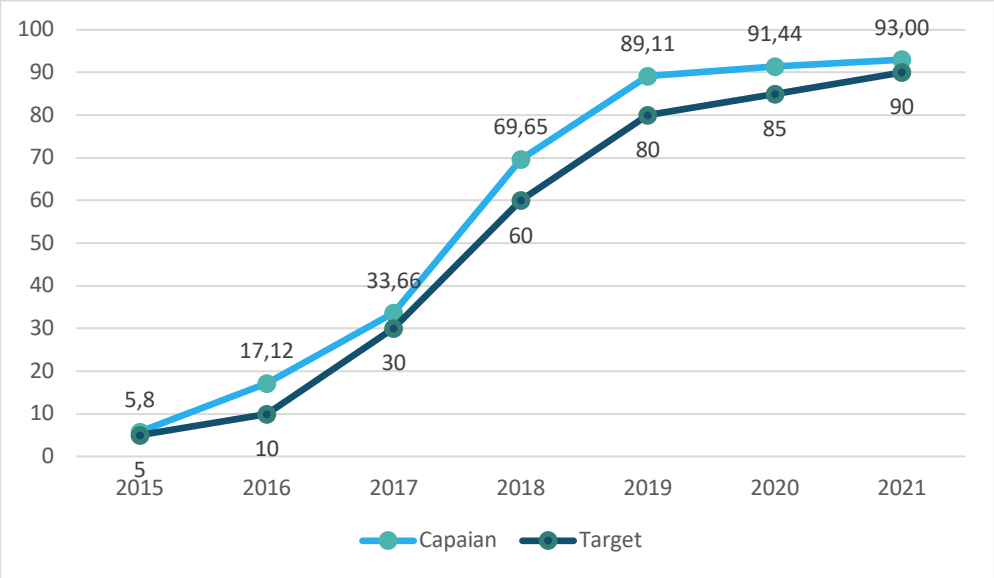
Pada tahun 2021 angka kematian akibat pneumonia pada balita sebesar 0,16%. Angka kematian akibat Pneumonia pada kelompok bayi lebih tinggi hampir dua kali lipat dibandingkan pada kelompok anak umur 1 – 4 tahun. Cakupan penemuan pneumoni dan kematiannya menurut provinsi dan kelompok umur pada tahun 2020 dapat dilihat pada Lampiran 53a dan 53b.

4. Hepatitis

Hepatitis merupakan peradangan hati yang dapat berkembang menjadi fibrosis, sirosis atau kanker hati. Hepatitis disebabkan oleh berbagai faktor, seperti infeksi virus, zat beracun, dan penyakit autoimun. Penyebab paling umum Hepatitis adalah infeksi Virus Hepatitis A, B, C, D dan E. Untuk Hepatitis A dan Hepatitis E, besaran masalah tidak diketahui dengan pasti. Namun mengingat kondisi sanitasi lingkungan, higiene dan sanitasi pangan, serta perilaku hidup bersih dan sehat yang belum optimal, maka masyarakat Indonesia merupakan kelompok berisiko untuk tertular Hepatitis A dan Hepatitis E. Laporan yang diterima oleh Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa setiap tahun selalu terjadi KLB Hepatitis A, sedangkan untuk Hepatitis E jarang dilaporkan di Indonesia. Hasil RISKESDAS tahun 2018 memperlihatkan prevalensi hepatitis berdasarkan riwayat diagnosis dokter sebesar 0,39% dengan disparitas antar provinsi sebesar 0,18% (Kep. Bangka Belitung) dan 0,66% (Papua). Berdasarkan kelompok umur, hepatitis menyebar hampir merata pada seluruh kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan tempat tinggal.

Program Nasional dalam Pencegahan dan Pengendalian Virus Hepatitis B saat ini fokus pada pencegahan Penularan Ibu ke Anak (PPIA) karena 95% anak berisiko tertular Hepatitis B kronik dari ibunya yang Positif Hepatitis B. Pelaksanaan Deteksi dini Hepatitis B (DDHB) pada kelompok berisiko/ibu hamil telah dilakukan sejak tahun 2013 dengan uji coba di satu provinsi yaitu DKI Jakarta pada 5000 ibu hamil, pelaksanaan terus diperluas secara bertahap hingga pada tahun 2017 kegiatan ini telah dilaksanakan di 34 provinsi (173 Kab/kota), dan di tahun yang sama juga program DDHB berkolaborasi dan berinteraksi dalam pelayanan Pencegahan Penularan dari Ibu ke Anak (PPIA) HIV, Sifilis dan Hepatitis B.

GAMBAR 6.14
TARGET DAN CAPAIAN INDIKATOR PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) TAHUN 2015-2021

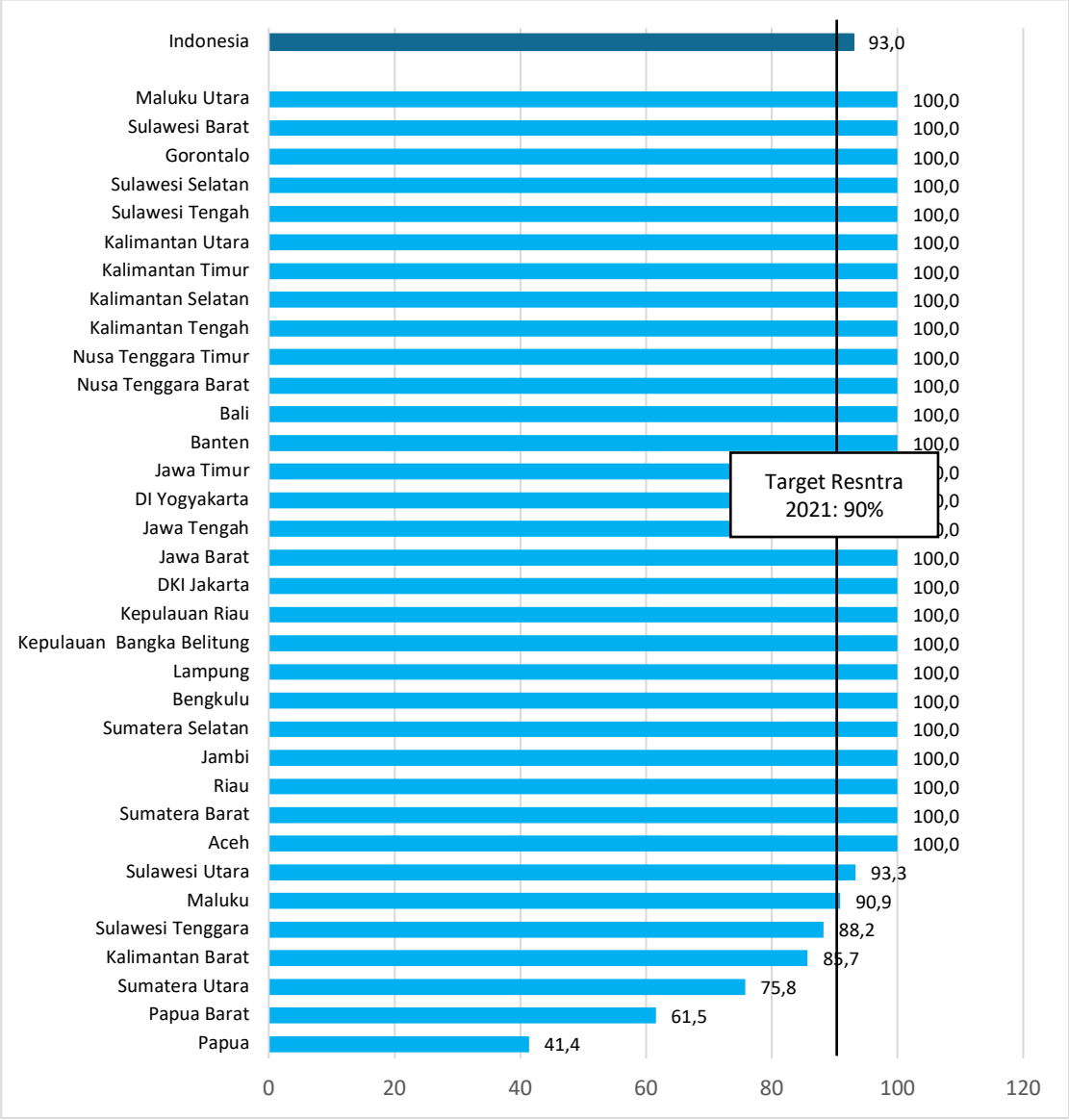


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Gambar 6.14 menunjukkan kenaikan target per tahun yang diikuti dengan kenaikan capaian target indikator. Pada tahun 2021 capaian indikator telah mencapai target Renstra tahun 2021 (90%), yaitu 93,0%. Selama tujuh tahun berturut-turut sejak dilaksanakan, indikator Renstra tersebut selalu mencapai target.

Pada Gambar 6.15 dapat dilihat sebanyak 27 dari 34 provinsi telah 100% kabupaten/kotanya melaksanakan deteksi dini hepatitis B, sedangkan sebanyak 5 provinsi yaitu Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, Papua Barat, dan Papua belum mencapai target Renstra tahun 2021.

GAMBAR 6.15
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

5. Diare

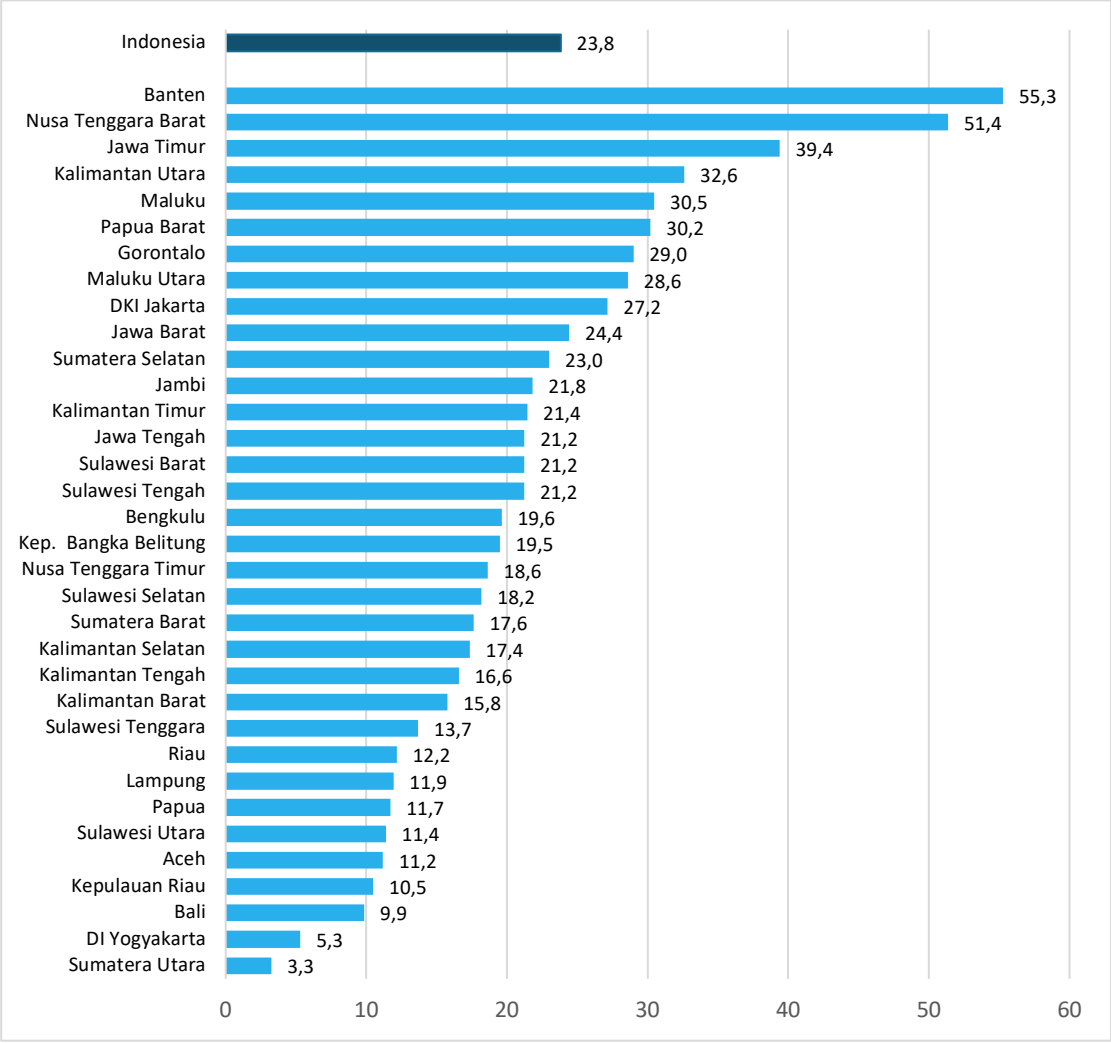
Penyakit Diare merupakan penyakit endemis yang berpotensi menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan masih menjadi penyumbang angka kematian di Indonesia terutama pada balita.

Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 memperlihatkan prevalensi diare untuk semua kelompok umur sebesar 8 %, balita sebesar 12,3 %, dan pada bayi sebesar 10,6%. Sementara pada Sample Registration System tahun 2018, diare tetap menjadi salah satu penyebab utama kematian pada neonatus sebesar 7% dan pada bayi usia 28 hari sebesar 6%.

a. Cakupan Pelayanan Penderita Diare

Sasaran pelayanan penderita diare pada balita yang datang ke sarana kesehatan ditargetkan oleh program sebesar 20% dari perkiraan jumlah penderita diare pada balita. Sedangkan sasaran pelayanan penderita diare pada semua umur ditargetkan sebesar 10% dari perkiraan jumlah penderita diare semua umur.

GAMBAR 6.16
CAKUPAN PELAYANAN PENDERITA DIARE BALITA (%)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Pada tahun 2021 cakupan pelayanan penderita diare pada semua umur sebesar 33,6% dan pada balita sebesar 23,8% dari sasaran yang ditetapkan. Disparitas antar provinsi untuk cakupan pelayanan penderita diare semua umur adalah antara 6,7% (Sumatera Utara) dan Banten (68,6%). Sedangkan disparitas antar provinsi untuk cakupan pelayanan penderita diare balita adalah antara 3,3% (Sumatera Utara) dan Banten (55,3%).

b. Penggunaan Oralit dan Zink

LINTAS DIARE (Lima Langkah Tuntaskan Diare) menganjurkan bahwa semua penderita diare harus mendapatkan oralit maka target penggunaan oralit adalah 100% dari semua kasus diare yang mendapatkan pelayanan di puskesmas. Tahun 2021 secara nasional penggunaan oralit pada semua umur maupun balita masih di bawah 100%, pada semua umur 90,1% dan pada balita 91,2%.

Tidak tercapainya target tersebut disebabkan pemberi layanan di Puskesmas belum memberikan oralit sesuai standar tata laksana yaitu sebanyak 6 bungkus/penderita diare. Selain itu, masyarakat masih belum mengetahui tentang manfaat oralit sebagai cairan yang harus diberikan pada setiap penderita diare untuk mencegah terjadinya dehidrasi.

Selain oralit, balita juga diberikan zink yang merupakan mikronutrien yang berfungsi untuk mengurangi lama dan tingkat keparahan diare, mengurangi frekuensi buang air besar, mengurangi volume tinja serta mencegah terjadinya diare berulang diare pada tiga bulan berikutnya. Penggunaan zink selama 10 hari berturut-turut pada saat balita diare merupakan terapi diare balita. Pada tahun 2021 cakupan pemberian zink pada balita diare sebesar 90,7%.

6. Kusta

Kusta merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri , *Mycobacterium leprae*. Penyakit kusta bersifat kronis, menyerang kulit, saraf tepi dan organ tubuh lain kecuali saraf pusat. Penatalaksanaan kusta yang buruk dapat mengakibatkan kecacatan, pada mata, tangan dan kaki.

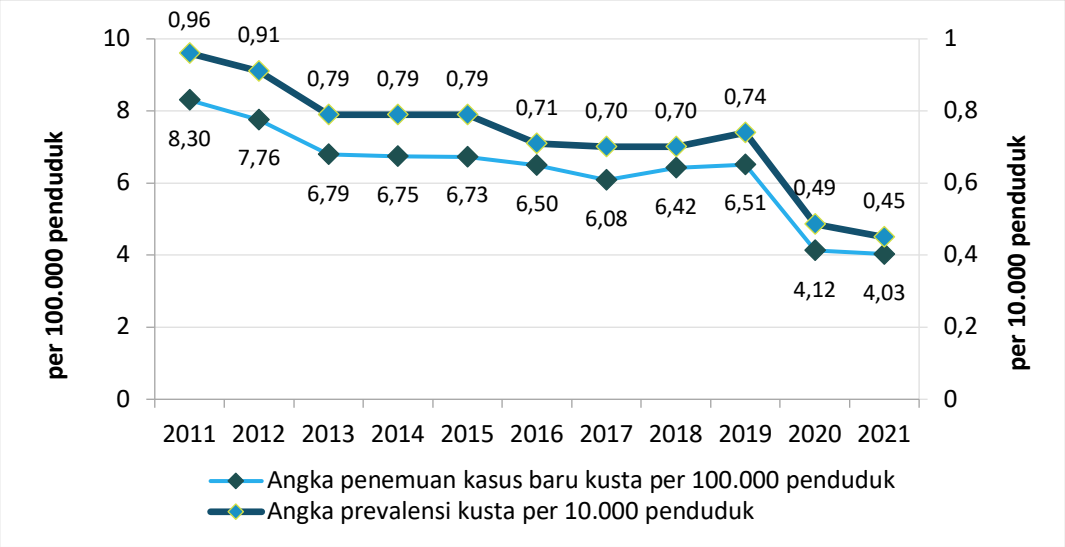
a. Angka Prevalensi dan Angka Penemuan Kasus Baru

Sejak tahun 2000 Indonesia dinyatakan telah mencapai status eliminasi kusta dengan angka prevalensi kusta tingkat nasional sebesar 0,9 per 10.000 penduduk. Angka prevalensi kusta di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 0,45 kasus per 10.000 penduduk dan angka penemuan kasus baru sebesar 4,03 kasus per 100.000 penduduk. Tren Angka kejadian dapat dilihat pada Gambar 6.17. Selama sepuluh tahun terakhir terlihat rasio prevalensi angka penemuan kasus kusta baru tren relatif menurun.

Tahun 2021, pandemi COVID-19 masih terjadi, hal ini menyebabkan deteksi dini kasus di masyarakat berjalan kurang optimal akibat adanya pembatasan kegiatan mengumpulkan masyarakat. Selain itu, sebagian besar sumber daya kesehatan juga difokuskan pada penanggulangan dan vaksinasi COVID-19, sehingga program berjalan kurang maksimal dan penemuan kasus baru mengalami penurunan.

Pada tahun 2021 dilaporkan terdapat 10.976 kasus baru kusta yang 89% di antaranya merupakan kusta tipe *Multi Basiler* (MB).

GAMBAR 6.17
ANGKA PREVALENSI DAN ANGKA PENEMUAN KASUS BARU KUSTA (NCDR)
TAHUN 2011-2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Provinsi dinyatakan telah mencapai eliminasi jika angka prevalensi <1 per 10.000 penduduk. Berikut perubahan peta eliminasi tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2021 sebanyak dua puluh delapan provinsi telah mencapai eliminasi kusta, bertambah dua provinsi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Sedangkan provinsi yang belum mencapai eliminasi pada tahun 2021 yaitu Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua.

GAMBAR 6.18
PETA ELIMINASI KUSTA PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2020 DAN 2021





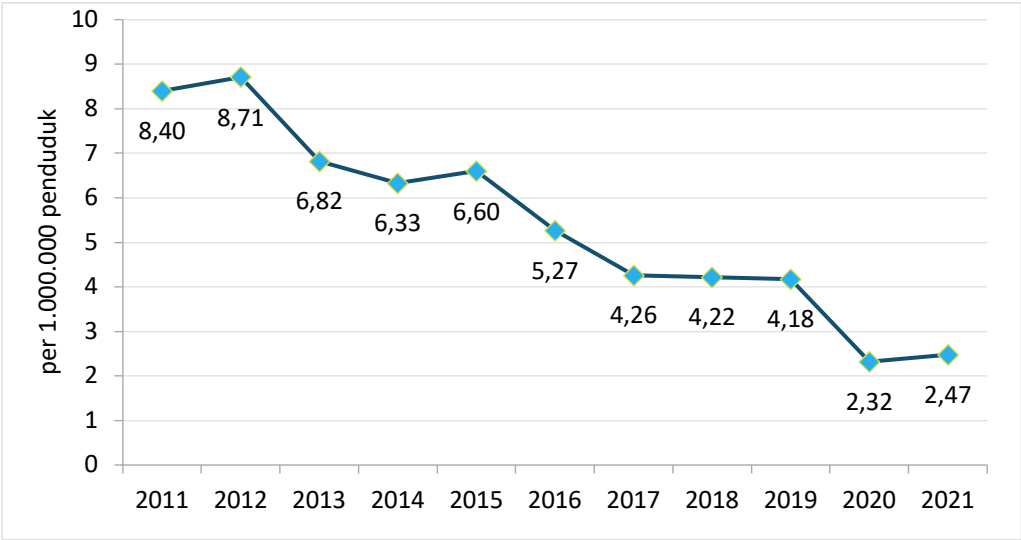
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Seluruh provinsi yang belum mencapai eliminasi kusta terdapat di sebagian Indonesia Bagian Tengah dan seluruh Indonesia Bagian Timur

b. Angka cacat tingkat 2

Peningkatan deteksi kasus sejak dini diperlukan dalam pengendalian kasus kusta. Salah satu indikator yang digunakan untuk menunjukkan keberhasilan dalam mendeteksi kasus baru kusta secara dini adalah angka cacat tingkat 2. Pada tahun 2021 angka cacat tingkat 2 sebesar 2,47 per 1.000.000 penduduk, angka ini cenderung menurun setiap tahunnya. Hal tersebut menggambarkan kegiatan penemuan kasus semakin ke arah dini dan kecacatan dapat dicegah.

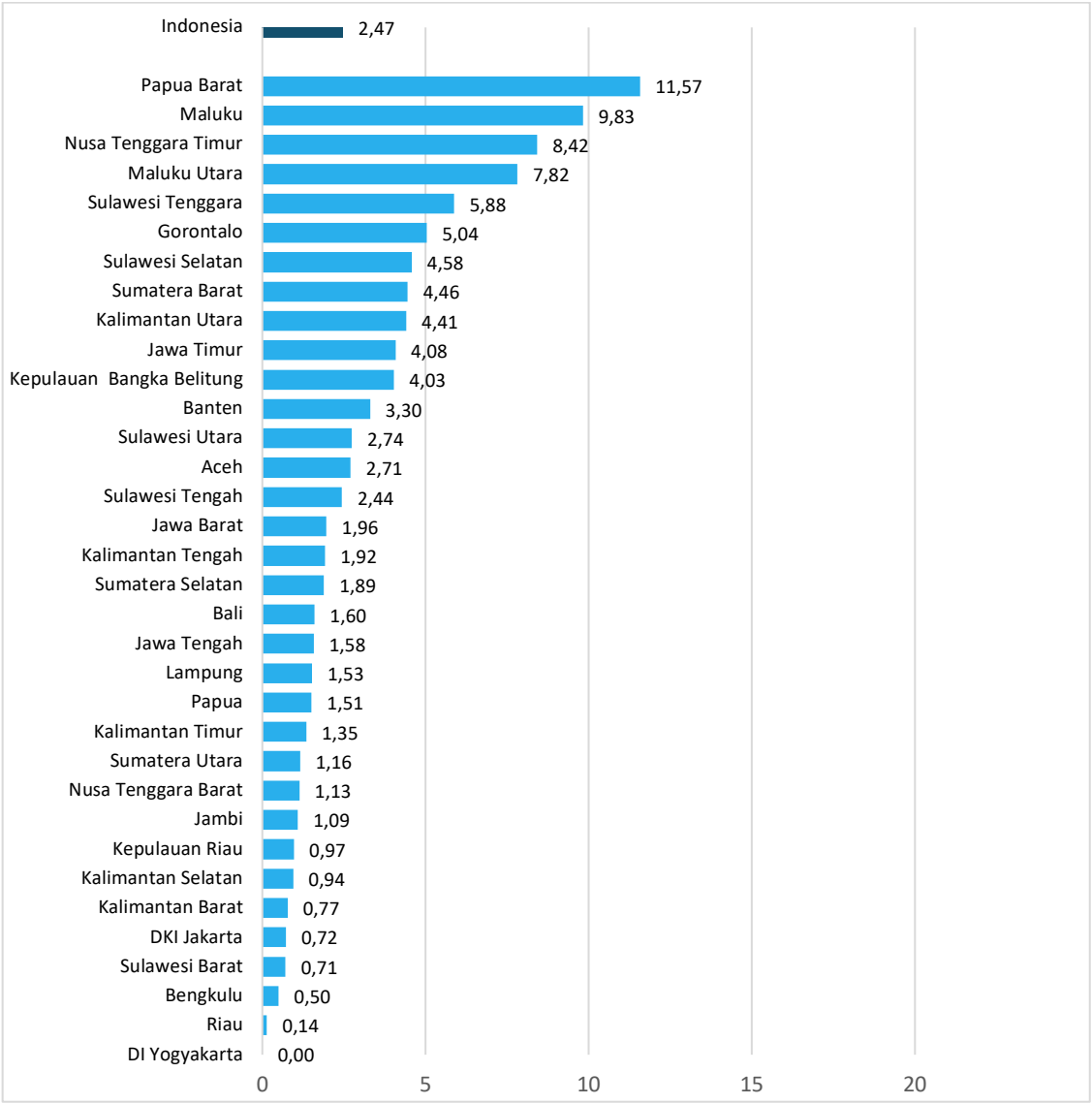
GAMBAR 6.19
ANGKA CACAT TINGKAT 2 PENDERITA KUSTA BARU PER 1.000.000 PENDUDUK
TAHUN 2011-2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Tidak ditemukan kasus kusta baru dengan cacat tingkat 2 di Provinsi DI Yogyakarta sedangkan di Angka Cacat Tingkat 2 di Provinsi Papua Barat paling tinggi yaitu 11,57 per 1.000.000 penduduk.

GAMBAR 6.20
ANGKA CACAT TINGKAT 2 KUSTA PER 1.000.000 PENDUDUK
PER PROVINSI TAHUN 2021

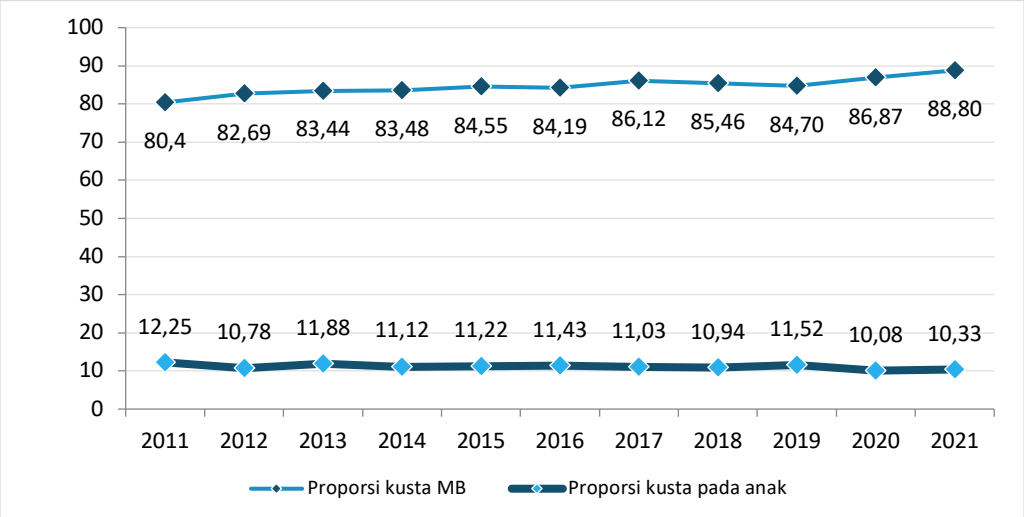


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

c. Proporsi kusta Multibasiler (MB) dan Proporsi Kusta Baru Pada Anak

Proporsi kusta MB dan proporsi kusta pada anak (0-14 tahun) di antara kasus baru memperlihatkan adanya sumber penularan tersembunyi serta tingginya tingkat penular di masyarakat.

GAMBAR 6.21
PROPORSI KUSTA MB DAN PROPORSI KUSTA PADA ANAK
TAHUN 2011-2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Tidak banyak terjadi perubahan proporsi kusta MB selama periode 2011-2021. Kasus kusta tipe MB masih mendominasi di Indonesia menunjukkan banyaknya sumber penularan di masyarakat. Provinsi dengan proporsi kusta MB tertinggi pada tahun 2021 yaitu Kalimantan Barat (97%), DI Yogyakarta (96%), dan Sulawesi Tenggara (96%)

Begitu juga dengan proporsi kusta anak pada periode yang sama tidak banyak mengalami perubahan. Provinsi dengan proporsi kusta pada anak tertinggi yaitu Papua Barat (25,86%), Papua (23,57%), dan Kepulauan Riau (21,88%). Data atau informasi terkait penyakit kusta menurut provinsi terdapat pada Lampiran 57 sampai Lampiran 59.b.

7. *Coronavirus disease* (COVID-19)

Coronavirus disease (COVID-19) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan yaitu *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Kasus COVID-19 dilaporkan pertama kali pada tanggal 31 Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Sejak saat itu, penyakit ini menyebar ke seluruh dunia dan pada tanggal 11 Maret 2020 WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi.

Infeksi COVID-19 dapat menimbulkan gejala ringan,sedang atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu >38°C), batuk, nyeri tenggorok, kongesti hidung, sakit kepala, dan kesulitan bernafas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, fatigue, mialgia, hilang penciuman dan pembauan atau ruam kulit, gejala gastrointestinal seperti diare dan gejala saluran nafas lain. Pada kasus berat perburukan secara cepat dan progresif, seperti ARDS, syok septik, asidosis metabolik yang sulit dikoreksi dan beberapa pasien, gejala yang muncul ringan, bahkan tidak disertai demam. Kebanyakan pasien memiliki prognosis baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal. Orang lanjut usia dan dengan

kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung, dan paru, diabetes dan kanker berisiko lebih besar mengalami keparahan.

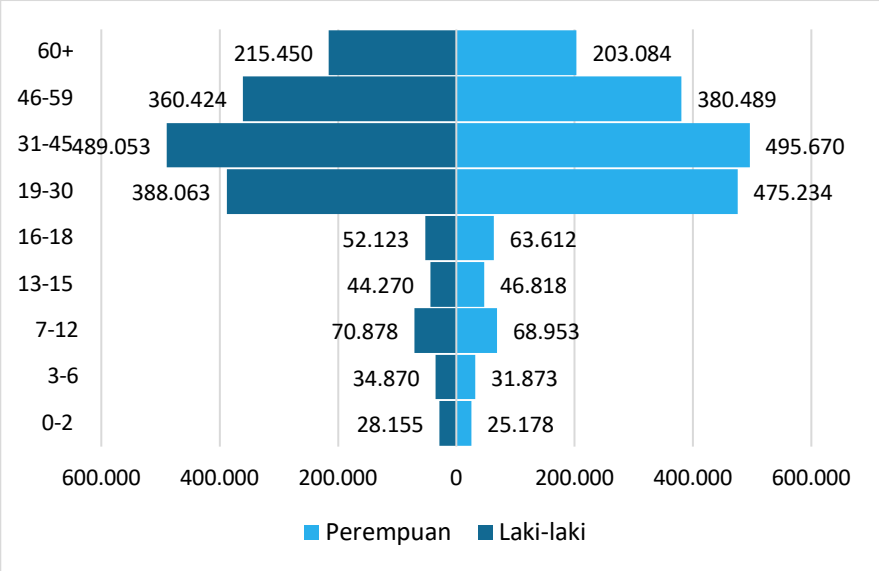
COVID-19 ditularkan melalui droplet, penularan terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat (dalam 1 meter) dengan seseorang yang memiliki gejala pernafasan (misalnya: batuk atau bersin) sehingga droplet berisiko mengenai mukosa (mulut dan hidung) atau konjungtiva (mata). Penularan juga dapat terjadi melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi droplet di sekitar orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, penularan virus COVID-19 dapat terjadi melalui kontak langsung dengan orang yang terinfeksi dan kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang digunakan pada orang yang terinfeksi.

Kebijakan penanggulangan wabah penyakit menular diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit Menular, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penangulangan Wabah Penyakit Menular, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangan. Dan dalam rangka upaya penanggulangan dini wabah COVID-19, Menteri Kesehatan telah mengeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor K.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya. Penetapan didasari oleh pertimbangan bahwa infeksi Novel Coronavirus (infeksi 2019-nCoV) telah dinyatakan WHO sebagai Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/*Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC).

a. Kasus Konfirmasi COVID-19

Sejak pertama kali diumukan adanya kasus COVID-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sampai 31 Desember 2021, tercatat kasus konfirmasi di Indonesia sebesar 4.262.720 kasus dengan 4.292 kasus aktif. Jumlah kasus konfirmasi tertinggi dilaporkan dari Provinsi DKI Jakarta (865.297), Jawa Barat (708.852), dan Jawa Tengah (486.916).

GAMBAR 6.22
KASUS KONFIRMASI COVID-19 MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN TAHUN 202



Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2022

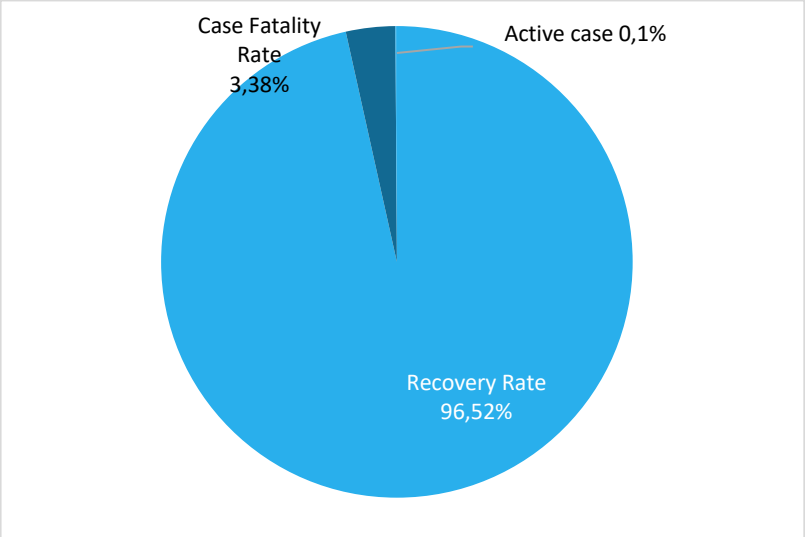
Gambar diatas menunjukan bahwa jumlah kasus konfirmasi COVID-19 pada jenis kelamin secara keseluruhan dan pada setiap kelompok umur tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Namun, kasus konfirmasi COVID-19 terbanyak yaitu pada jenis kelamin perempuan.

Berdasarkan kelompok umur, kasus COVID-19 terbanyak diderita pada kelompok umur 31 – 45 tahun (984.723), 19 – 30 tahun (863.297), dan 46 – 59 tahun (740.913), baik jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Namun, perlu diperhatikan bahwa, data diatas merupakan distribusi jenis kelamin dan kelompok umur dari identitas yang dilaporkan lengkap pada sistem *New All Record.*

b. Angka Kesembuhan (*Recovery Rate*/RR) dan Angka Kematian (*Case Fatality Rate*/CFR) COVID-19

Recovery Rate (RR) merupakan jumlah kasus COVID-19 yang sembuh dibagi dengan jumlah kasus COVID-19 yang terkonfirmasi. Sedangkan, *Case Fatality Rate* (CFR) merupakan perhitungan dari jumlah kasus COVID-19 yang meninggal dibagi dengan jumlah kasus COVID-19 yang terkonfirmasi.

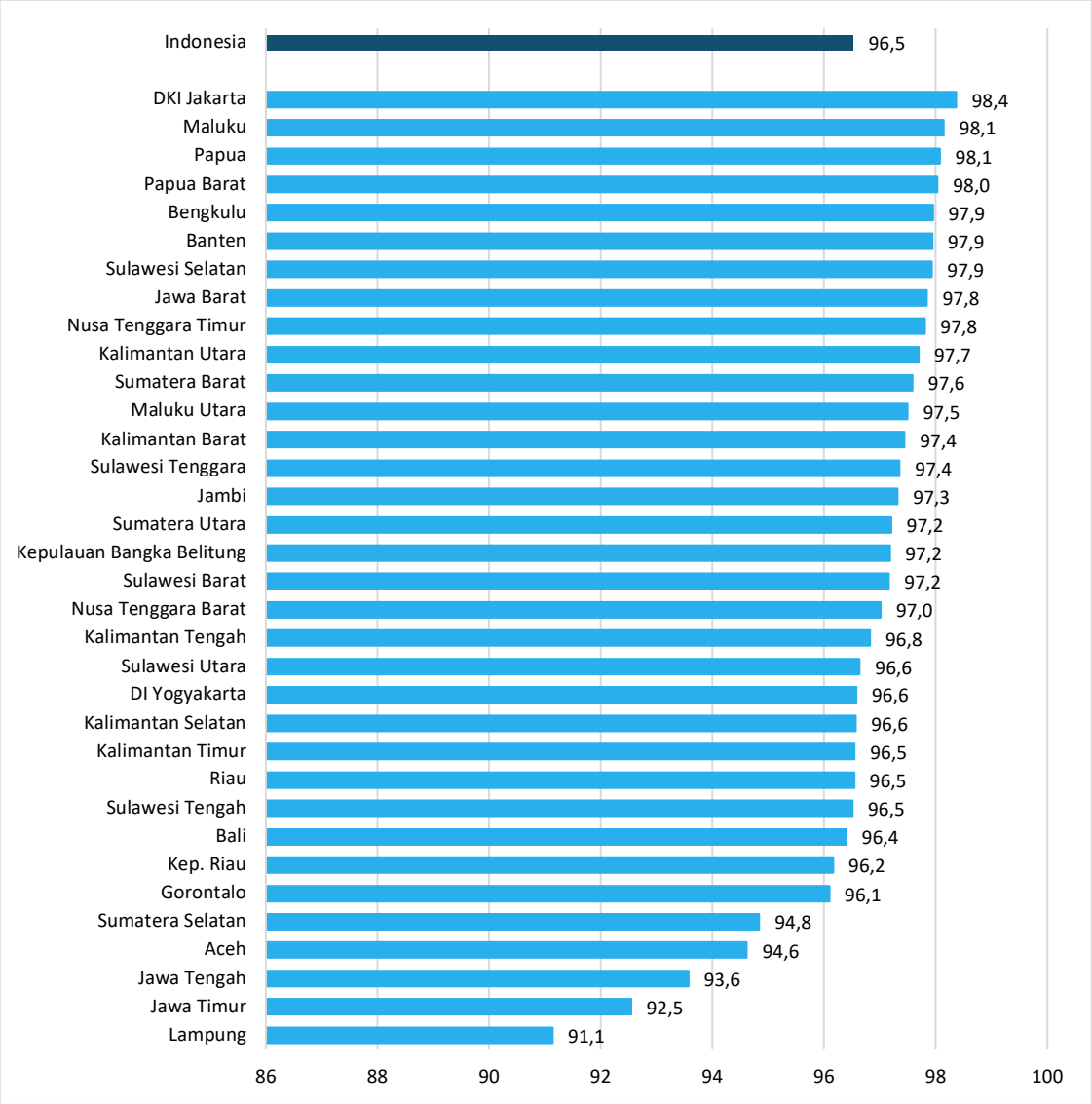
GAMBAR 6.23
***RECOVERY RATE* (RR), *CASE FATALITY RATE* (CFR) dan PERSENTASE KASUS AKTIF COVID-19**
TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Gambar diatas menunjukan bahwa sampai 31 Desember 2021 RR di Indonesia sebesar 96,25% dengan total kasus sembuh sebanyak 4.114.334 dan CFR sebesar 3,38% dengan total kasus meninggal 144.094.

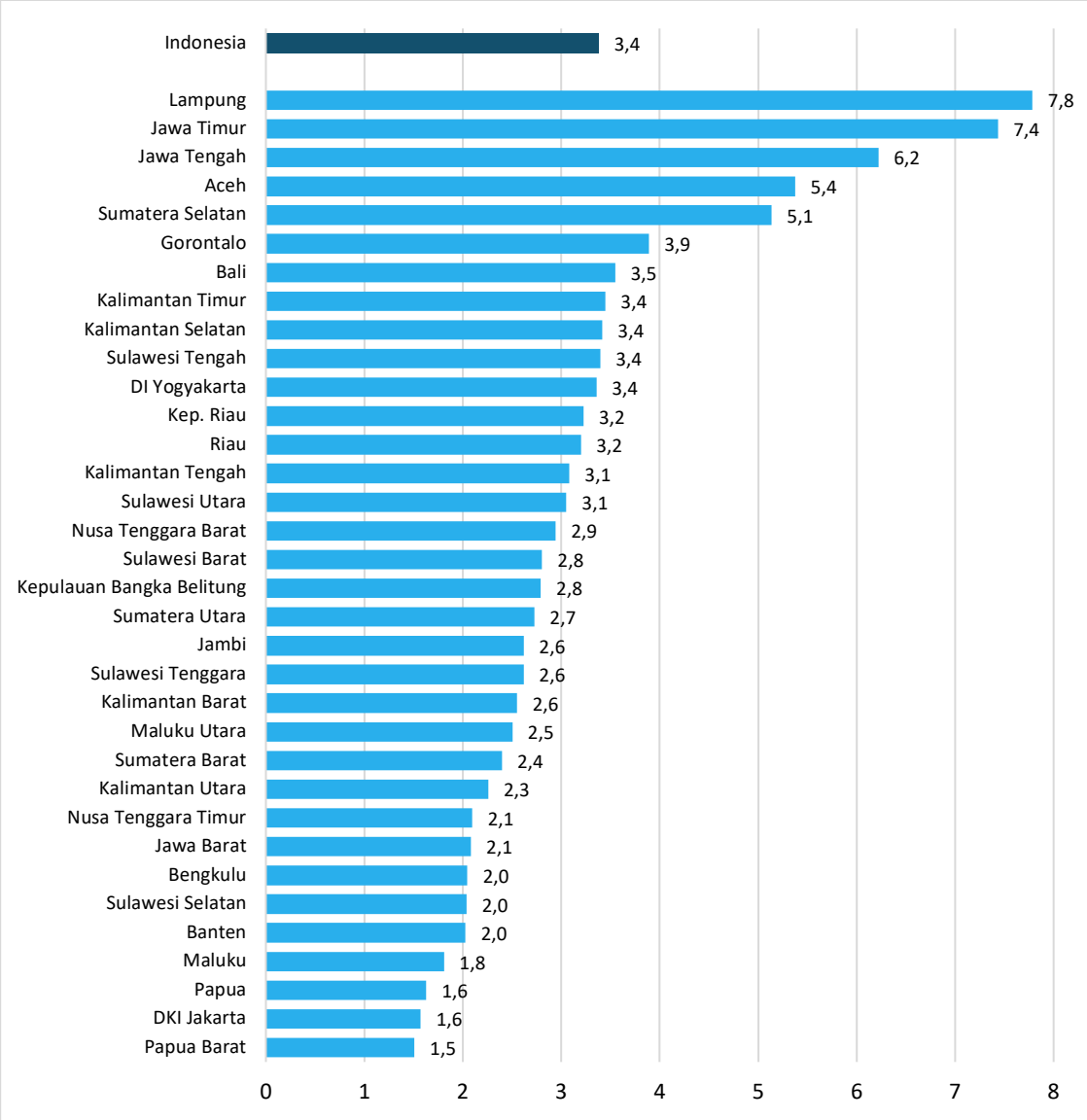
GAMBAR 6.24
***RECOVERY RATE* COVID-19 MENURUT PROVINSI**
TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2PL, Kemenkes RI, 2022

Provinsi dengan RR tertinggi yaitu Provinsi DKI Jakarta (98,4%), Maluku (98,1%), Papua (98,1%) dan Papua Barat (98,0%). Sedangkan, provinsi dengan RR terendah yaitu Lampung (91,1%), Jawa Timur (92,5%), dan Jawa Tengah (93,6%),

GAMBAR 6.25
***CASE FATALITY RATE* COVID-19 MENURUT PROVINSI**
TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

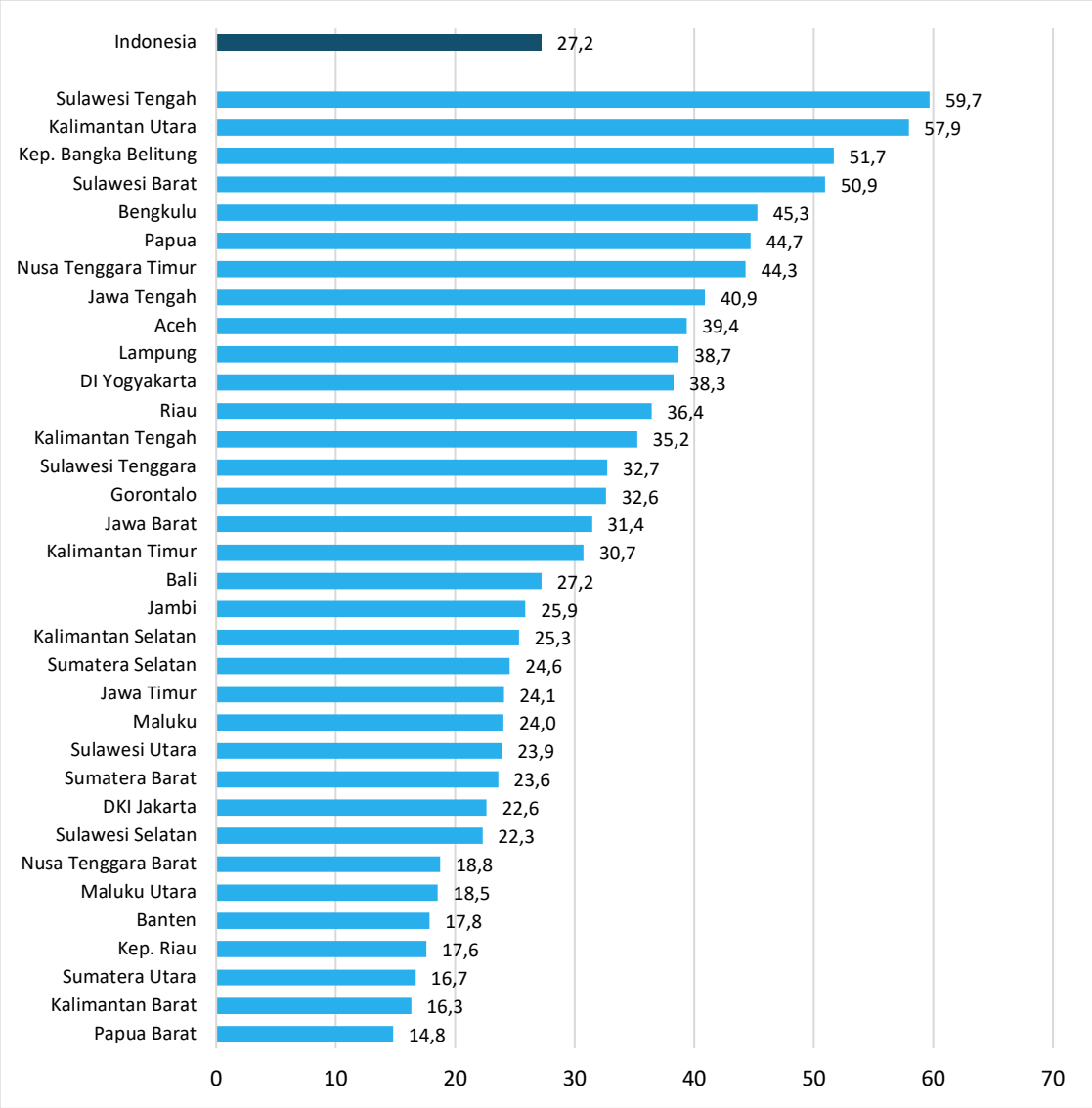
Provinsi dengan CFR lebih besar dibandingkan angka Nasional adalah Lampung (7,8%), Jawa Timur (7,4%), Jawa Tengah (6,2%), Aceh (5,4%), Sumatera Selatan (5,1%), Gorontalo (3,9%), dan Bali (3,5%).

c. *Positivity Rate* COVID-19

Positivity rate dihitung dengan membandingkan jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 dibagi dengan jumlah orang yang dites COVID-19. *Positivity rate* yang direkomendasikan WHO sebesar ≤ 5%. *Positivity rate* dapat memberikan indikasi seberapa luas penularan di komunitas atau di area tempat testing dilakukan. *Positivity rate* yang tinggi menunjukan transmisi penularan yang tinggi dan kemungkinan masih banyak orang dengan virus corona di komunitas yang belum di tes. Hal ini juga dapat terjadi jika hanya sebagian dari komunitas dengan risiko

besar yang dites, dan kemungkinan lainnya yaitu, adanya proses pelaporan yang tertunda atau mengganggu hasil dari *positivity rate*, misalnya dengan memprioritaskan pelaporan hasil tes positif daripada hasil negatif.

GAMBAR 6.26
***POSITIVITY RATE* COVID-19 MENURUT PROVINSI**
TAHUN 2021



Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, 2022

Gambar diatas menunjukan bahwa *positivity rate* secara nasional dan provinsi belum mencapai rekomendasi WHO sebesar ≤ 5%. *Positivity rate* nasional sebesar 27,22%, sedangkan provinsi dengan positivity rate terendah yaitu Provinsi Papua Barat (14,80%), Kalimantan Barat (16,30%), dan Sumatera Utara (16,67%).

Sampai saat ini, situasi COVID-19 di tingkat global maupun nasional masih dalam risiko sangat tinggi. Untuk menekan penyebaran virus dan untuk menanggulangi pandemi salah satu kebijakan yang dilakukan adalah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

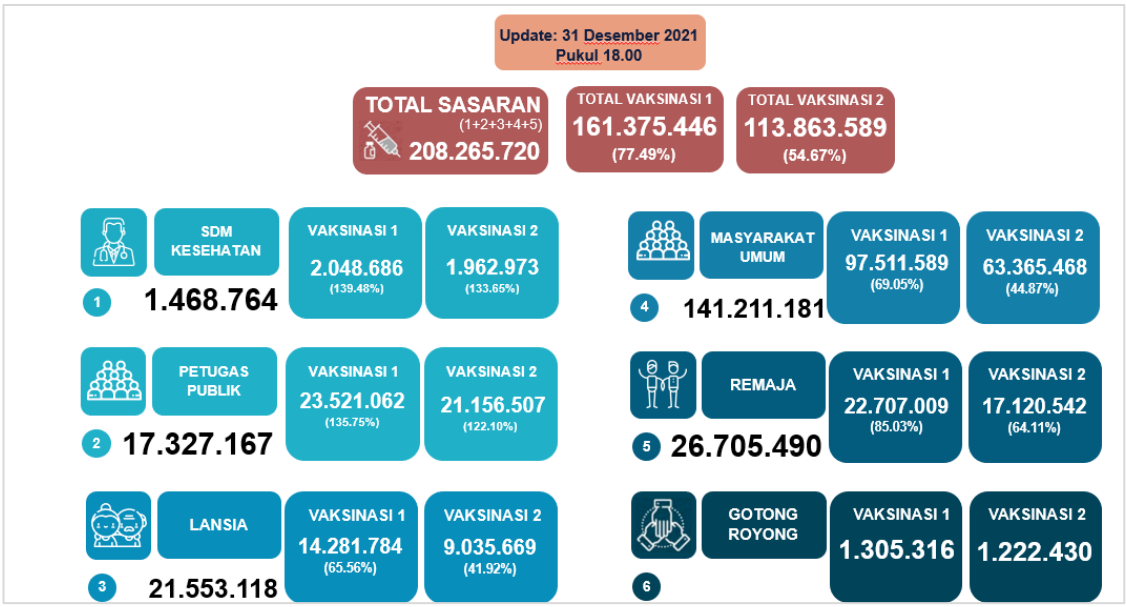
Masyarakat (PPKM). PPKM adalah kebijakan Pemerintah Indonesia sejak awal tahun 2021 untuk menangani pandemi Covid-19 di Indonesia. Sebelum pelaksanaan PPKM, pemerintah telah melaksanakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang berlangsung di sejumlah wilayah di Indonesia. PPKM berlangsung di beberapa wilayah yang menjadi titik penyebaran infeksi Covid-19, yakni di Pulau Jawa dan Bali. Pemerintah Indonesia pertama kali menerapkan PPKM pada tanggal 11 hingga 25 Januari 2021. PPKM selama dua pekan ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 1 Tahun 2021 dan diberlakukan di wilayah Jawa dan Bali. Kemudian PPKM meluas di provinsi non-JABAL. PPKM diperpanjang setiap dua minggu.

Selain itu kita juga harus menerapkan Protokol kesehatan 5M (mencuci tangan,memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas) untuk mencegah serta mengurangi angka penyebaran kasus.

7. Vaksinasi COVID-19

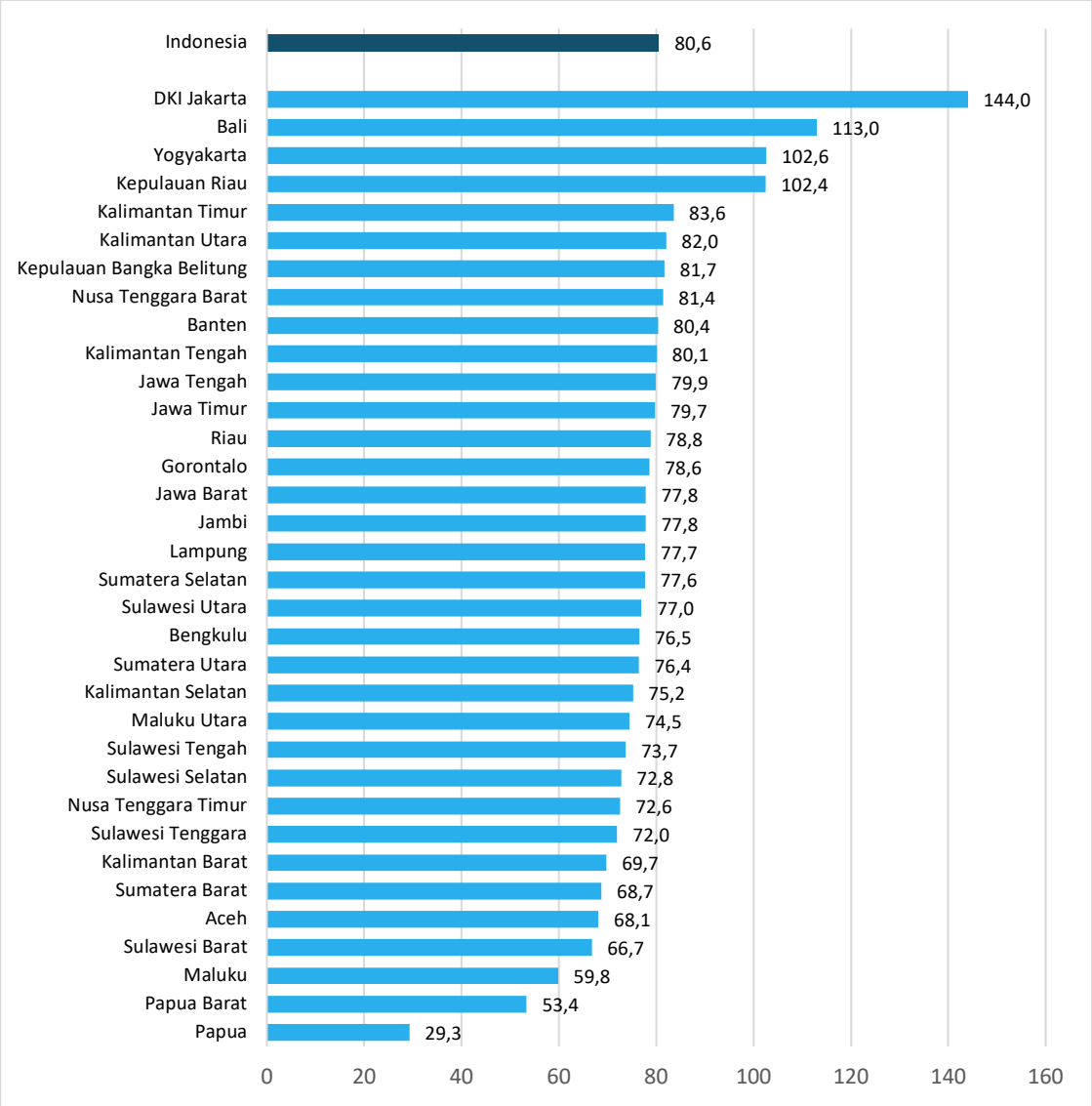
Untuk memutus rantai penularan COVID-19, selain melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, diperlukan upaya untuk meningkatkan imunitas masyarakat. Vaksinasi bertujuan untuk meningkatkan kekebalan kelompok (*herd immunity*). Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 telah dilaksanakan sejak tanggal 13 Januari 2021 dengan total sasaran 208.265.720 orang usia >12 tahun dan diharapkan dapat selesai pada akhir tahun 2021.

GAMBAR 6.27
SITUASI VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber : Dashboard KPPEN 31 Desember 2021, pukul 18.00 WIB

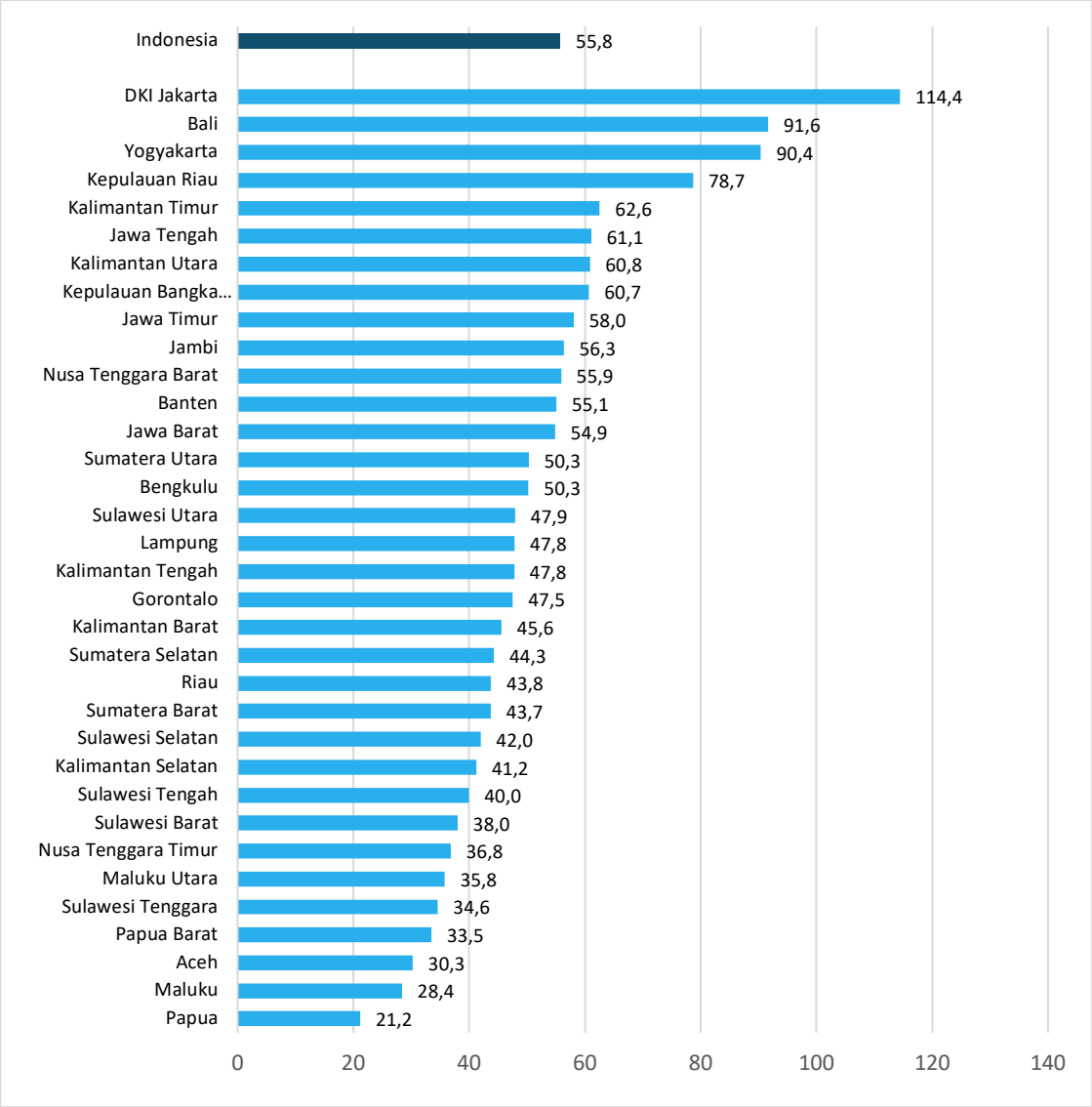
GAMBAR 6.28.
CAPAIAN VAKSINASI DOSIS PERTAMA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: KPCPEN, akses 18 Mei 2022 pukul 18.00, Data filter per 31 Desember 2021

Gambar diatas menunjukkan capaian vaksinasi dosis 1 secara nasional dan provinsi. Capaian vaksinasi dosis 1 nasional sebesar 80,6%. Terdapat 8 provinsi dengan capaian vaksinasi dosis 1 yg melebihi nasional yaitu DKI Jakarta (114,0%), Bali (113,0%), Yogyakarta (102,6%), Kepulauan Ria (102,4%), Kalimantan Timur (83,6%), Kaliman Utara (82,0), Kepulauan Bangka Belitung (81,7%), dan Nusa Tenggara Barat (81,4%).

GAMBAR 6.29.
CAPAIAN VAKSINASI DOSIS KEDUA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: KPCPEN, akses 18 Mei 2022 pukul 18.00, Data filter per 31 Desember 2021

Gambar diatas menunjukkan capaian vaksinasi dosis 2 secara nasional dan provinsi. Capaian vaksinasi dosis 2 nasional sebesar 55,8%. Lima provinsi dengan capaian vaksinasi dosis kedua tertinggi yaitu DKI Jakarta (114,4%), Bali (91,6%), Yogyakarta (90,4%), Kepulauan Riau (78,7%), dan Kalimantan Timur (62,6%).

B. PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)

PD3I adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah melakukan berbagai upaya dalam mencegah dan mengendalikan PD3I. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

a. Meningkatkan cakupan imunisasi dasar dan lanjutan, karena imunisasi merupakan pencegahan spesifik dari PD3I;
b. Melakukan bimbingan teknis dan supervisi program surveilans dan Imunisasi;
c. Melaksanakan peningkatan kapasitas petugas surveilans PD3I dalam rangka meningkatkan performance surveilans *AFP* dan Campak-Rubella serta pengendalian Difteri;
d. Menyusun, menyediakan, dan mendistribusikan petunjuk teknis surveilans PD3I
e. Menyediakan dan mendistribusikan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) surveilans PD3I;
f. Melakukan sosialisasi terkait PD3I kepada lintas program dan lintas sektor terkait serta organisasi profesi (IDI, IDAI, IBI, PPNI, PEAI dll)
g. Melaksanakan pertemuan rutin dengan Komisi Ahli (Komli) Difteri, Komli Campak-Rubella/CRS, Komli surveilans AFP dan Komli Eradikasi Polio (ERAPO), untuk mendapatkan rekomendasi dalam rangka pencapai target eradikasi polio, eliminasi campak-rubela/CRS serta pengendalian difteri dan strategi penanggulangan KLB.
h. Melaksanakan pertemuan jejaring laboratorium Difteri, Campak-Rubella/CRS, dan Polio;
i. Melakukan pendampingan Penyelidikan Epidemiologi penyakit potensial KLB termasuk PD3I ke daerah-daerah.

Berikut penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi:

1. *Tetanus Neonatrum*

Tetanus neonatorum (*TN*) merupakan penyakit tetanus yang menyerang bayi yang baru lahir. Penyebab utama adalah infeksi bakteri *Clostridium tetani*, yaitu bakteri yang dapat menghasilkan racun yang dapat menyerang otak dan sistem saraf pusat. Bakteri ini biasa ditemukan di tanah, debu, dan kotoran hewan. Bakteri *Clostridium tetani* bisa menginfeksi seseorang, melalui luka goresan, sobekan, atau luka tusukan yang disebabkan oleh benda-benda yang terkontaminasi. Pada bayi yang baru lahir, tetanus neonatorum terjadi akibat bakteri ini masuk ke dalam tubuh bayi melalui praktik persalinan yang tidak *higienis*, seperti memotong dan merawat tali pusar yang tidak bersih atau steril.

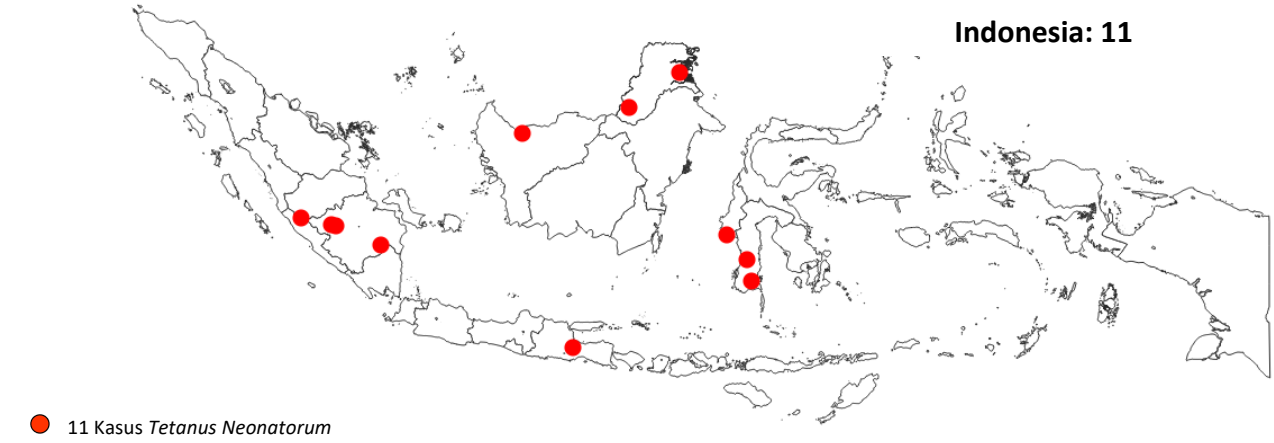
Jumlah kasus *TN* meningkat pada tahun 2021, yaitu sebesar 11 kasus, dimana sebelumnya terdapat 4 kasus pada tahun 2020. *Case Fatality Rate (CFR)* meningkat menjadi 82% pada tahun 2021 dimana sebelumnya tahun 2020 *CFR* sebesar 50%. Sebaran kasus *TN* tahun 2021 terdapat di 7 provinsi yaitu Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Dari 7 provinsi, 5 provinsi terdapat kasus TN meninggal yaitu Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Sulawesi Barat. Jumlah kasus *TN* pada tahun 2021 terbanyak terjadi di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebanyak 3 kasus, dengan *CFR* sebesar 100%. Penyebaran kasus *TN* dapat dilihat pada Gambar 6.30 di bawah ini.

GAMBAR 6.30
DISTRIBUSI KASUS *TETANUS NEONATORUM* PER PROVINSI
TAHUN 2020 dan 2021

TAHUN 2020



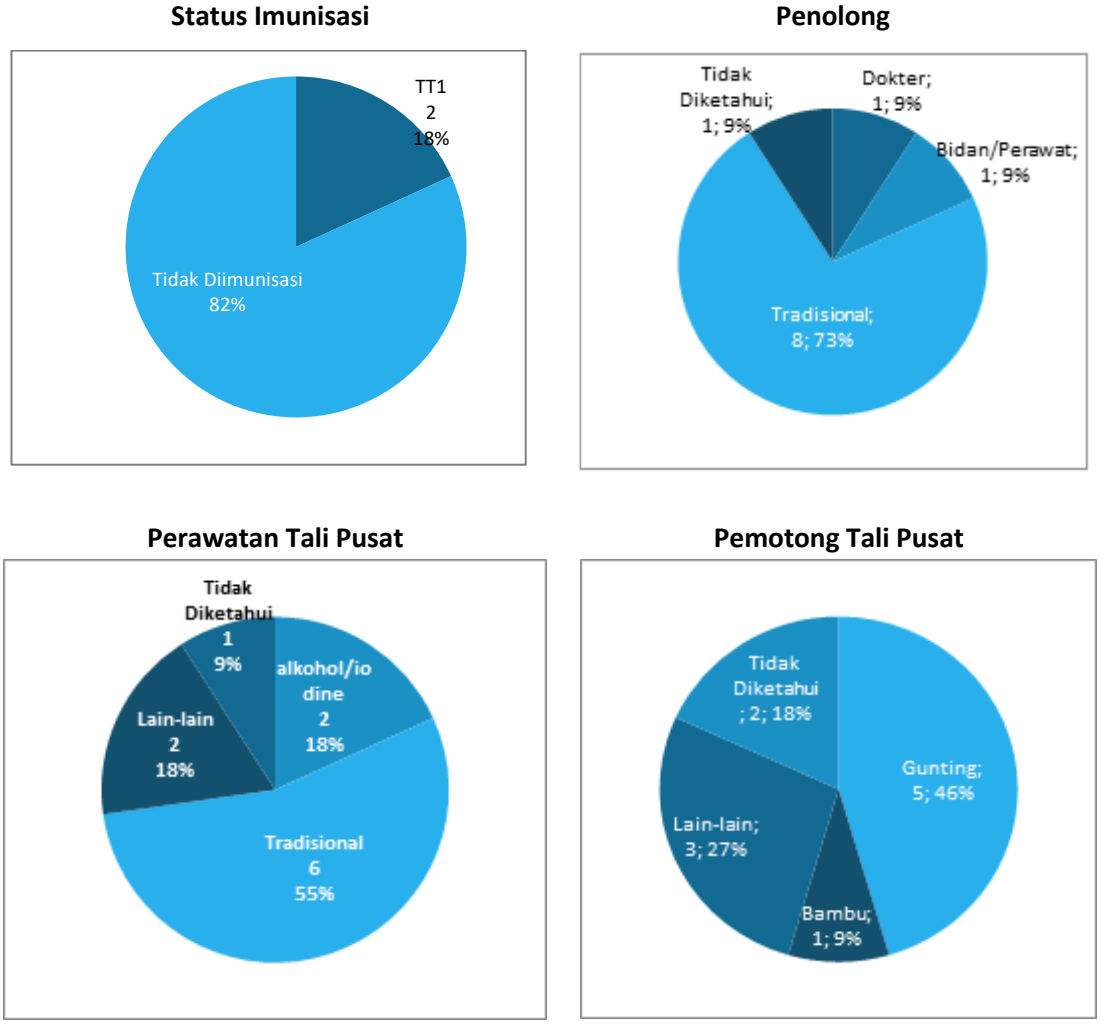
TAHUN 2021



Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Berdasarkan faktor risiko terjadinya kasus TN, dari 11 kasus tahun 2021, sebanyak 9 kasus (82%) tidak diimunisasi. Berdasarkan penolong persalinan pada kasus TN, 8 kasus (73%) ditolong dukun/penolong tradisional, 1 kasus (9%) ditolong dokter, 1 kasus (9%) ditolong bidan/perawat dan 1 kasus (9%) tidak diketahui riwayat penolong persalinannya. Berdasarkan faktor risiko perawatan tali pusat diketahui sebanyak 55% (6 kasus) menggunakan cara tradisional dan 8% (2) kasus menggunakan alkohol. Sedangkan berdasarkan pemotongan tali pusat, sebanyak 5 kasus (46%) menggunakan gunting, 1 kasus (9%) dengan bambu, 3 kasus (27%) alat pemotong lainnya, dan 2 kasus (18%) tidak diketahui.

GAMBAR 6.31
PROPORSI KASUS *TETANUS NENONATORUM* MENURUT FAKTOR RISIKO
TAHUN 2021



Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

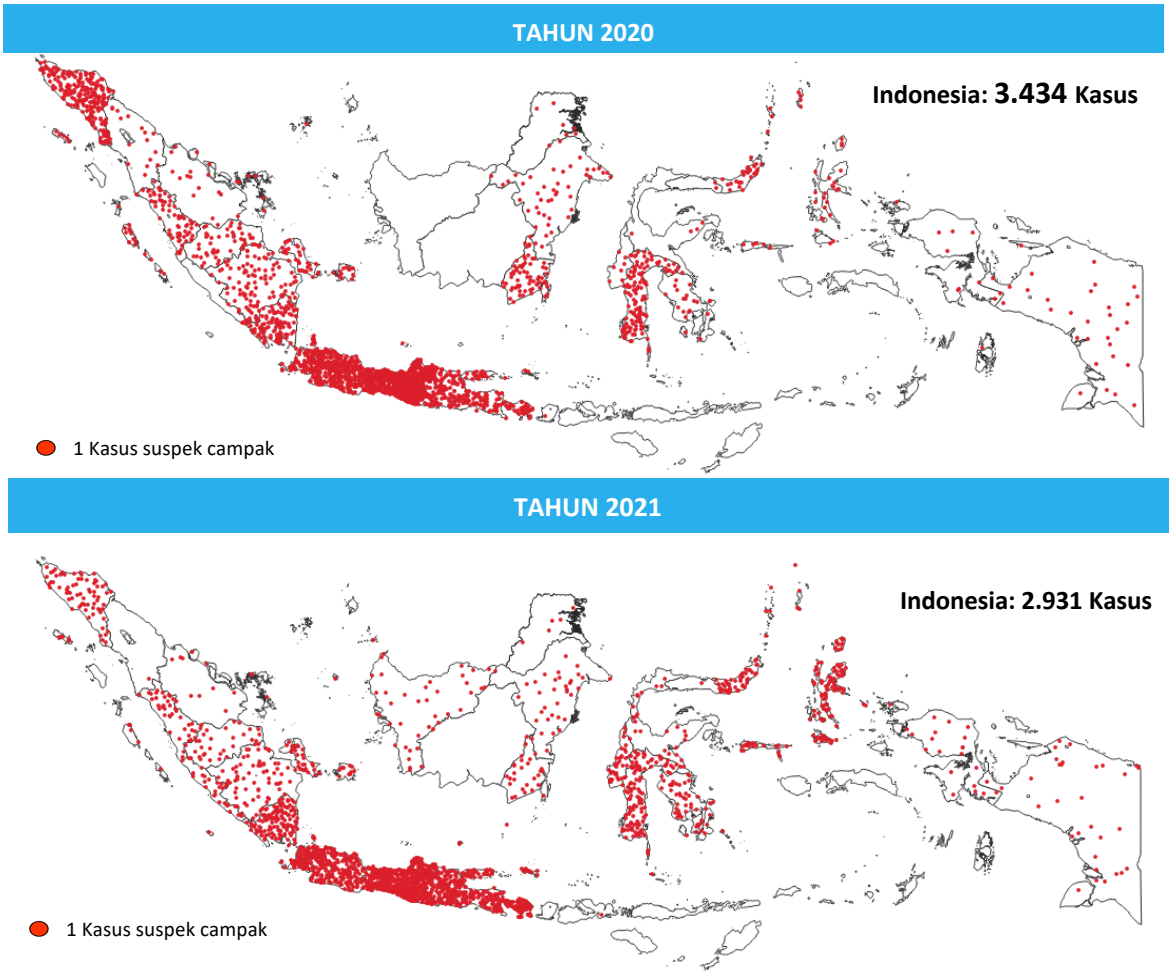
2. Campak

Penyakit campak merupakan penyakit yang sangat menular. Campak menjadi penyebab penting kematian anak-anak di seluruh dunia. Kelompok anak usia pra sekolah dan usia SD merupakan kelompok rentan tertular penyakit campak. Penyakit campak disebabkan oleh virus dari *genus Morbillivirus* dan termasuk golongan *Paramyxovirus*. Campak disebut juga morbili atau *measles*. Campak ditularkan melalui udara yang terkontaminasi droplet dari hidung, mulut, atau tenggorokan orang yang terinfeksi. Gejala awal biasanya muncul 10-12 hari setelah infeksi, termasuk demam tinggi, pilek, mata merah, dan bintik-bintik putih kecil di bagian dalam mulut. Beberapa hari kemudian, ruam berkembang, mulai pada wajah dan leher bagian atas dan secara bertahap menyebar ke bawah. Campak berat mungkin terjadi pada anak-anak yang menderita kurang gizi, terutama pada mereka yang kekurangan vitamin A, atau yang sistem kekebalan tubuhnya telah dilemahkan oleh penyakit lain. Komplikasi yang paling serius termasuk kebutaan, *ensefalitis* (infeksi yang menyebabkan pembengkakan otak), diare berat

dan dehidrasi, serta infeksi pernafasan berat seperti *pneumonia*. Seseorang yang pernah menderita campak akan mendapatkan kekebalan terhadap penyakit tersebut seumur hidupnya.

Pada tahun 2020 penyebaran kasus suspek campak hampir terdapat di seluruh Indonesia, hanya 3 provinsi yang tidak terdapat kasus suspek campak. Pada tahun 2021, terdapat 2.931 kasus suspek campak, menurun jika dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 3.434 kasus. Kasus suspek campak terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Tengah (493 kasus), DKI Jakarta (489 kasus), dan Jawa Timur (366 kasus).

GAMBAR 6.32
SEBARAN KASUS SUSPEK CAMPAK DI INDONESIA
TAHUN 2020 DAN 2021

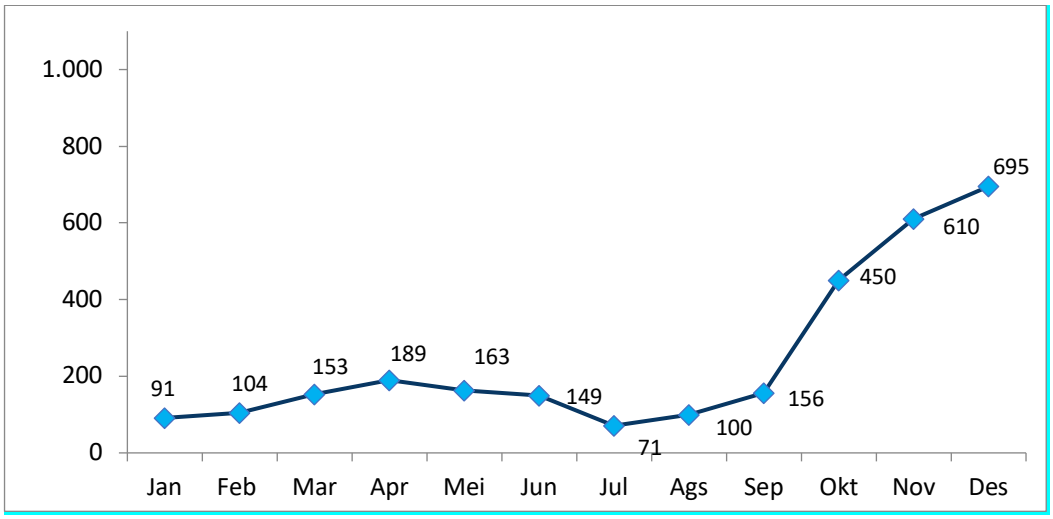


Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Suspek campak pada tahun 2021 tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, dengan *Incidence Rate* (*IR*) sebesar 0,48 per 100.000 penduduk. Angka tersebut menurun jika dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 1,14 per 100.000 penduduk. Penurunan jumlah kasus suspek campak pada tahun 2021 seiring dengan penemuan kasus suspek campak yang menurun dilaporkan oleh provinsi dikarenakan adanya pandemi Covid 19.

Jika dilihat distribusi kasus suspek campak per bulan pada tahun 2021 (Gambar 6.33), dapat diketahui bahwa tren kasus suspek campak cenderung rendah pada awal tahun dan meningkat pada bulan Oktober, November dan Desember. Jumlah kasus suspek campak tertinggi pada bulan Desember (695 kasus), sedangkan jumlah terendah terdapat pada bulan Juli (71 kasus). Penurunan jumlah kasus ini antara lain disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan tenaga surveilans di semua level fokus pada penanggulangan pandemi Covid-19 sehingga program surveilans lainnya termasuk surveilans PD3I tidak dapat berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan.

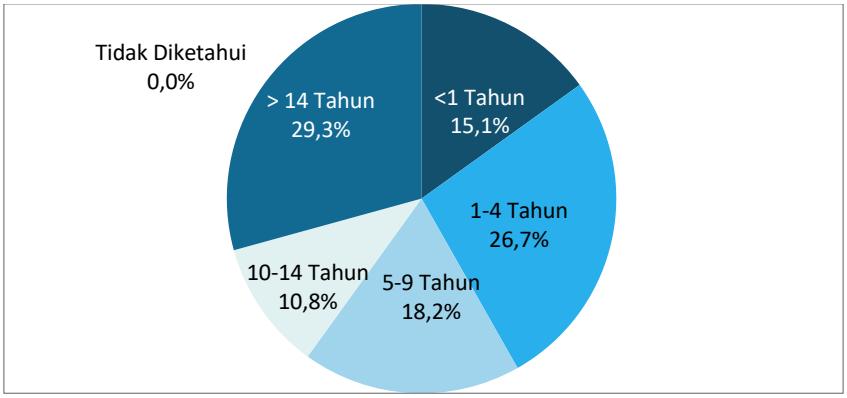
GAMBAR 6.33
JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK PER BULAN
DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Proporsi kasus suspek campak terbesar terdapat pada kelompok umur >14 tahun (29,3%) dan urutan kedua terdapat pada kelompok umur 1-4 tahun (26.7%), sedangkan proporsi kasus suspek terendah terdapat pada kelompok umur 10-14 tahun dan suspek dengan umur yang tidak diketahui, dengan persentase masing-masing sebesar 10,8% dan 0%. Gambar 6.32 memperlihatkan proporsi kasus suspek campak per kelompok umur. Rincian kasus suspek campak menurut provinsi dapat dilihat pada Lampiran 62.a, 62.c, dan 62.d.

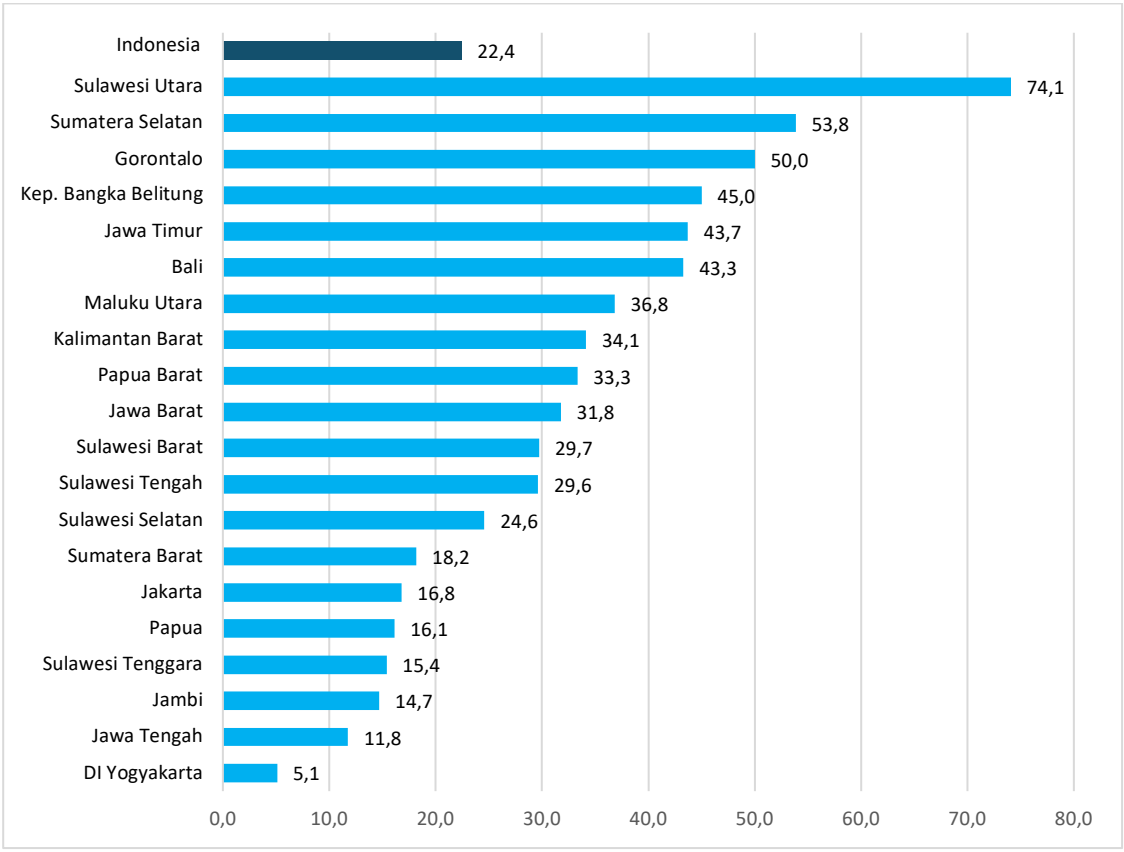
GAMBAR 6.34
PROPORSI SUSPEK CAMPAK BERDASARKAN UMUR DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Proporsi suspek campak yang divaksinasi secara nasional sebesar 22,4%. Sedangkan provinsi dengan persentase kasus suspek tertinggi urutan pertama terjadi di Provinsi Sulawesi Utara, Sumatera Selatan dan Gorontalo. Provinsi dengan proporsi terendah yaitu DI Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jambi. Gambar 6.35 memperlihatkan persentase kasus suspek campak terhadap kasus suspek campak yang divaksinasi menurut provinsi.

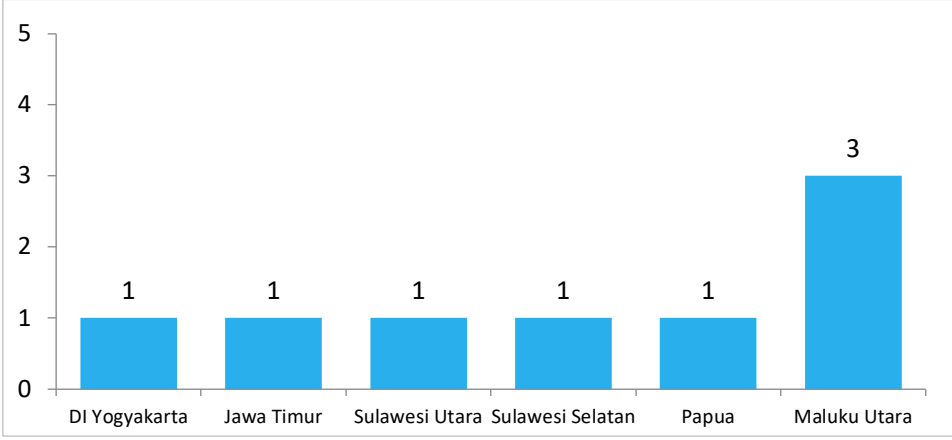
GAMBAR 6.35
PERSENTASE SUSPEK CAMPAK YANG DIVAKSINASI MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Apabila terjadi 5 atau lebih kasus suspek campak dalam waktu 4 minggu berturut-turut yang terjadi secara mengelompok, dan telah dibuktikan adanya hubungan epidemiologis di suatu daerah, maka daerah tersebut dinyatakan KLB suspek campak. Pada tahun 2021, dari 2.931 kasus suspek campak terdapat 75 kasus dengan kejadian 8 KLB suspek campak. Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 yang terjadi sebanyak 6 KLB suspek campak.

GAMBAR 6.36
FREKUENSI KLB SUSPEK CAMPAK
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

KLB suspek campak terdapat di Provinsi Maluku Utara, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta. Semua KLB suspek campak yang terjadi pada tahun 2021 dilaporkan tidak ada kematian. Frekuensi dan jumlah kasus pada KLB suspek campak menurut provinsi secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 62.e.

Sebaran KLB suspek campak berdasarkan konfirmasi laboratorium dari 73 total darah (serum) sampel yang dilaporkan pada tahun 2021, terdapat 4 kasus campak, 58 kasus rubella, 6 kasus gabungan (campak dan rubella), 7 kasus negatif, dan tidak terdapat kasus pending/menunggu konfirmasi laboratorium.

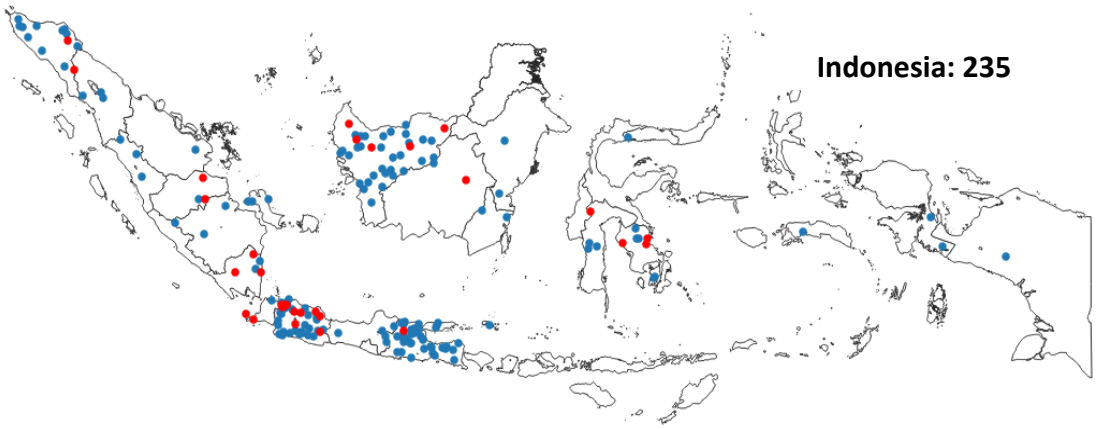
3. Difteri

Difteri adalah salah satu penyakit yang sangat menular yang dapat dicegah dengan imunisasi, disebabkan oleh bakteri *Corynebacterium diptheriae strain toksigenik*. Penularan terjadi secara droplet (percikan ludah) dari batuk, bersin, muntah, melalui alat makan, atau kontak erat langsung dari lesi di kulit. Apabila tidak diobati dan kasus tidak mempunyai kekebalan, angka kematian sekitar 50%, sedangkan dengan terapi angka kematiannya sekitar 10% (*CDC Manual for the Surveilan of Vaccine Preventable Diseases*, 2017). Angka kematian Difteri rata rata 5 – 10% pada anak usia kurang 5 tahun dan 20% pada dewasa diatas 40 tahun (CDC Atlanta, 2016).

Difteri merupakan jenis penyakit menular yang dapat menimbulkan KLB/Wabah seperti tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 1501 tahun 2010. Setiap satu kasus suspek difteri dengan gejala *faringitis, tonsilitis, laringitis, trakeitis*, atau kombinasinya disertai demam atau tanpa demam dan adanya *pseudomembran* putih keabu-abuan yang sulit lepas, mudah berdarah apabila dilepas atau dilakukan manipulasi harus dilaporkan dalam 24 jam dan dilakukan segera penanggulangan untuk memutuskan rantai penularan. Kegiatan penanggulangan KLB Difteri dilakukan dengan melibatkan program-program terkait yaitu surveilans epidemiologi, program imunisasi, klinisi, laboratorium dan program kesehatan lainnya serta lintas sektor terkait (Pedoman Surveilans Difteri, 2019).

Kasus Difteri pada tahun 2021 menyebar hampir semua wilayah di Indonesia. Jumlah kasus difteri pada tahun 2021 sebanyak 235 kasus, jumlah kematian sebanyak 25 kasus, dengan *CFR* sebesar 11%. Jumlah kasus Difteri tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 (259 kasus). Jumlah kematian akibat Difteri mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan tahun sebelumnya (13 kasus). *CFR* pada tahun 2021 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2020 (5,02%). Jumlah kasus terbanyak terdapat di Provinsi Jawa Timur sebanyak 59 kasus, Kalimantan Barat 49 kasus dan Jawa Barat 33 kasus, sementara itu pada tahun 2021 terdapat 11 provinsi tidak ditemukan kasus Difteri.

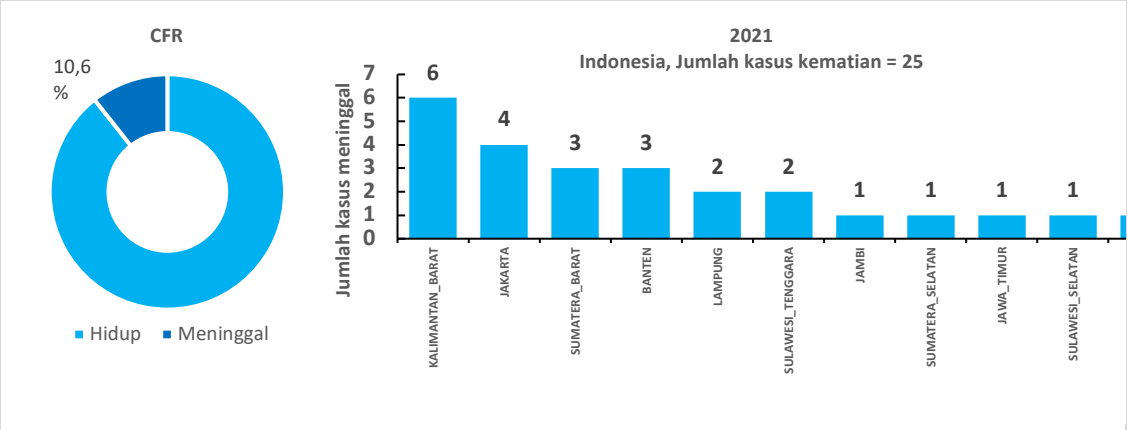
GAMBAR 6.37
SEBARAN KASUS DIFTERI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021



Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Kematian kasus akibat difteri tahun 2021 sebanyak 25 kematian dengan *CFR* sebesar 11%. Kasus kematian difteri terjadi di 11 provinsi, dengan urutan kematian terbanyak di Provinsi Kalimantan Barat (6 kasus), Provinsi DKI Jakarta(4 kasus), Sumatera Barat dan Banten masing-masing 3 kasus. Hal ini kemungkinan terjadi karena penderita kemungkinan tidak pernah mendapatkan imunisasi difteri atau imunisasi tidak lengkap sehingga memperburuk kondisi karena penderita tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit difteri.

GAMBAR 6.38
KASUS KEMATIAN DIFTERI DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

KLB Difteri terjadi jika suatu wilayah kab/kota dinyatakan KLB Difteri jika ditemukan satu suspek Difteri dengan konfirmasi laboratorium kultur positif atau jika ditemukan suspek Difteri yang mempunyai hubungan epidemiologi dengan kasus kultur positif.

Kebijakan dalam penanggulangan Difteri antara lain:

1. Setiap Kejadian Luar Biasa (KLB) harus dilakukan penyelidikan dan penanggulangan sesegera mungkin untuk menghentikan penularan dan mencegah komplikasi dan kematian
2. Dilakukan tatalaksana kasus di rumah sakit dengan menerapkan prinsip kewaspadaan seperti menjaga kebersihan tangan, penempatan kasus di ruang tersendiri /isolasi, dan mengurangi kontak erat kasus dengan orang lain
3. Setiap suspek Difteri dilakukan pemeriksaan laboratorium dengan kultur
4. Setiap kontak erat diberi kemoprofilaksis
5. Kontak erat diberikan imunisasi pada saat penyelidikan epidemiologi
6. Pengambilan spesimen pada kontak erat dapat dilakukan jika diperlukan sesuai dengan kajian epidemiologi
7. Setiap suspek Difteri dilakukan *Outbreak Response Immunization* (*ORI*) atau respon pemberian imunisasi pada KLB sesegera mungkin. Sebaiknya luas wilayah *ORI* dilakukan untuk satu (1) kabupaten/kota tetapi jika tidak memungkinkan karena sesuatu hal maka *ORI* minimal dilakukan satu (1) kecamatan dengan sasaran sesuai kajian epidemiologi dan interval *ORI* 0-1-6 bulan
8. *ORI* dilanjutkan sampai selesai walaupun status KLB Difteri di suatu wilayah kabupaten/kota dinyatakan telah berakhir.

4. Polio dan *Acute Flaccid Paralysis (AFP)*/Lumpuh Layu Akut

Polio merupakan penyakit yang sangat menular dan disebabkan oleh virus. Penyakit ini menyerang sistem syaraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan total hanya dalam hitungan jam. Virus ini terutama ditularkan dari orang ke orang melalui fekal-oral. Gejala awal yang terjadi adalah demam, kelelahan, sakit kepala, muntah, kekakuan pada leher, dan nyeri pada tungkai. 1 dari 200 infeksi menyebabkan kelumpuhan permanen (biasanya di bagian tungkai).

Diantara mereka yang lumpuh, 5% hingga 10% akan berakhir pada kematian karena kelumpuhan terjadi pada otot-otot pernapasan mereka.

Pada bulan Mei 2012, sidang World Health Assembly (WHA) mendeklarasikan bahwa pencapaian eradikasi polio merupakan kedaruratan kesehatan masyarakat global dan menetapkan agar Direktur Jenderal WHO menyusun strategi eradikasi polio yang komprehensif. Dokumen Rencana Strategis 2013-2018 dan Inisiatif Pencapaian Eradikasi Polio Global, telah disetujui oleh Badan Eksekutif WHO pada Januari 2013. Dalam rencana strategis tersebut dibutuhkan komitmen global bahwa setiap negara perlu melaksanakan strategis yaitu Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, penggantian dari *trivalent Oral Polio Vaccine* (*tOPV*) menjadi *bivalent Oral Polio Vaccine* (*bOPV*), introduksi *Inactivated Polio Vaccine* (IPV), dan penarikan seluruh vaksin polio oral (OPV), surveilans *AFP* (*Acute Flaccid Paralysis*), dan pengamanan virus polio di laboratorium (*Laboratory Containment*). Sebagai kelanjutannya, WHO juga telah menyusun Rencana Strategis 2019 – 2023 yang berisi 3 tujuan utama yaitu eradikasi, integrasi serta sertifikasi dan pengamanan Virus Polio.

Pada bulan November 2018, dilaporkan satu kasus polio akibat VDPV tipe 1 di Yahukimo, Papua. Penyelidikan yang dilakukan selanjutnya menemukan bahwa dua spesimen tinja dari anak sehat di sekitar kasus juga positif untuk jenis virus yang sama, yang membuktikan bahwa virus tersebut bersirkulasi sehingga kondisi ini dinyatakan sebagai KLB. Sebagai respon, dilakukan sub PIN di Papua dan Papua Barat dengan menggunakan *bOPV*. KLB polio akibat VDPV bisa terjadi di mana saja bila cakupan imunisasi polio rendah selama bertahun-tahun. Untuk menghindari kasus serupa, imunisasi polio harus dijaga tetap tinggi (lebih dari 95% anak diimunisasi) dan merata, dan semua kasus lumpuh layuh mendadak (*AFP*) harus ditemukan secara dini dan dilaporkan.

Penemuan adanya transmisi virus polio liar dapat dilakukan melalui surveilans AFP, dimana semua kasus lumpuh layuh akut pada anak usia <15 tahun (yang merupakan kelompok rentan terhadap penyakit polio) diamati. Surveilans AFP merupakan indikator sensitivitas deteksi virus polio liar. Surveilans *AFP* juga penting untuk dokumentasi mengenai tidak adanya virus polio liar sebagai syarat sertifikasi bebas polio.

Kasus lumpuh layuh akut yang terjadi secara akut (mendadak), bukan disebabkan oleh ruda paksa yang diduga kasus polio sampai dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium bukan kasus polio adalah definisi dari nonpolio *AFP*. Kementerian Kesehatan menetapkan target non polio *AFP rate* sebesar minimal 2/100.000 populasi penduduk usia <15 tahun. Pada tahun 2021, secara nasional *non polio AFP rate* sebesar 1,4/100.000 populasi penduduk <15 tahun. Hal itu mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 0,6/100.000 populasi penduduk <15 tahun.

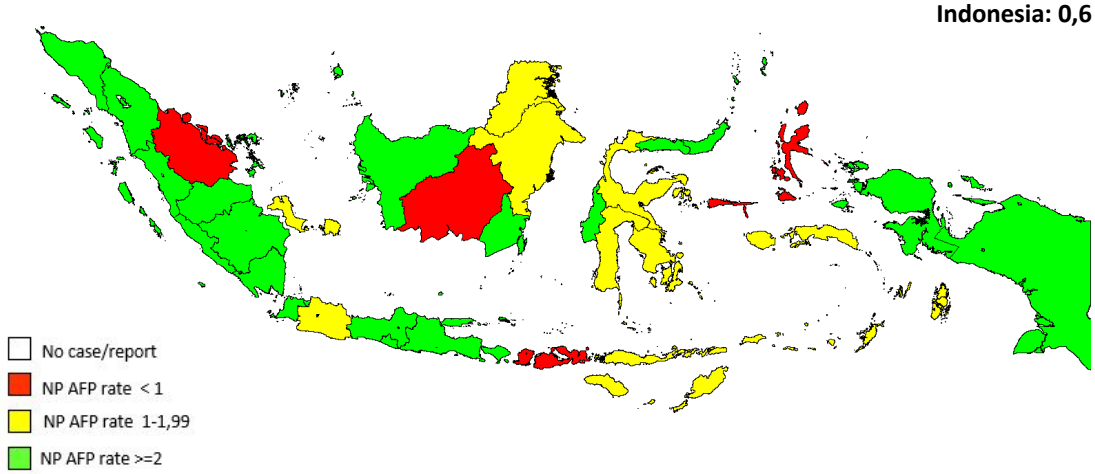
Pada tahun 2021 ditemukan kasus NonPolio *AFP* hampir di seluruh provinsi di Indonesia, kecuali Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo yang tidak ada kasus. Terdapat 16 Provinsi yang sudah mencapai standar minimal penemuan *non polio AFP rate* sebesar ≥2 per 100.000 penduduk berusia kurang dari 15 tahun.

GAMBAR 6.39

PENCAPAIAN *NON POLIO AFP RATE* PER 100.000 PENDUDUK UMUR< 15 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 DAN 2021

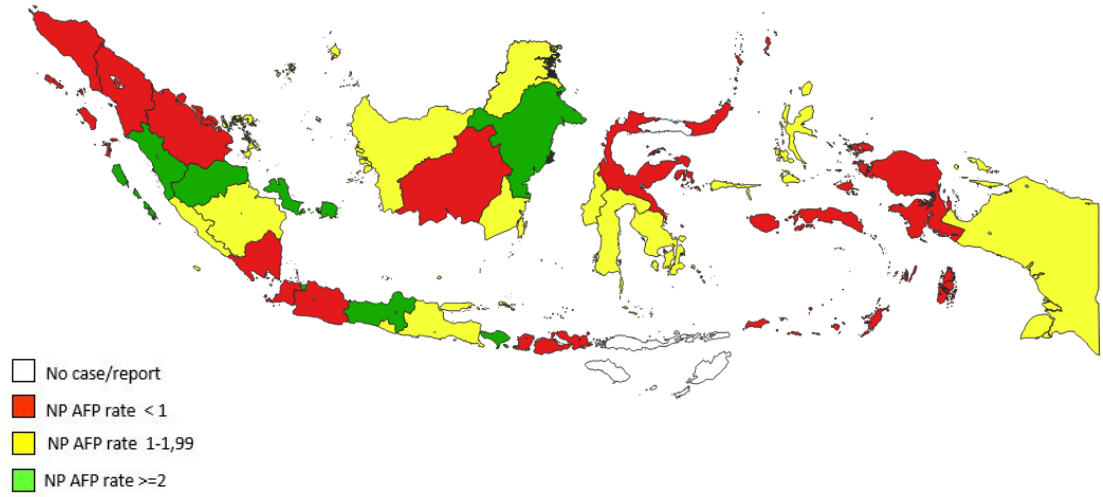
TAHUN 2020

Indonesia: 0,6



TAHUN 2021

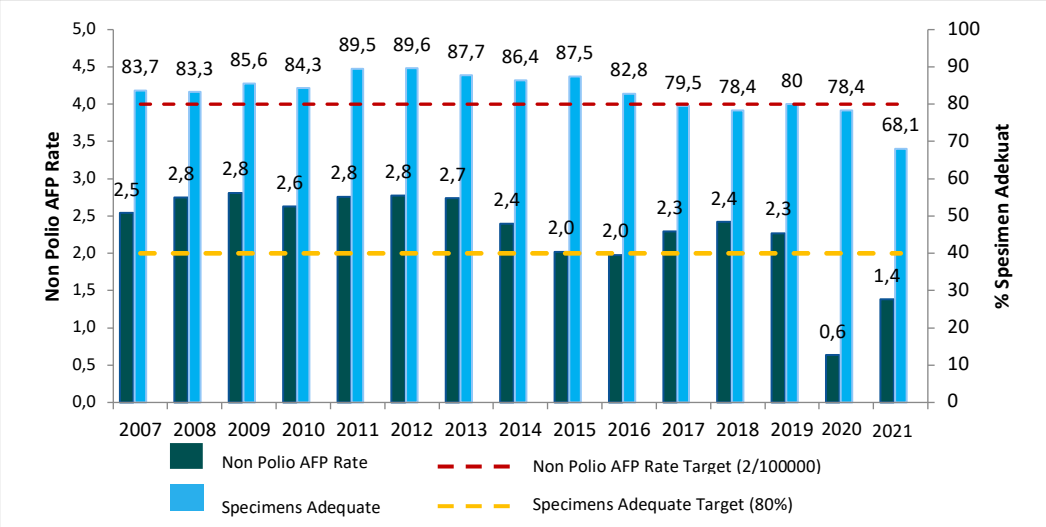
Indonesia: 1,4



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Sejak tahun 2007 hingga 2019, secara umum target *Non Polio AFP rate* sebesar 2 per 100.000 penduduk berusia <15 tahun telah tercapai. Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,4/100.000 penduduk berusia <15 tahun walaupun terjadi peningkatan dari tahun 2020. Persentase spesimen adekuat yang secara umum sejak tahun 2007-2017 telah mencapai target sebesar 80%. Pada tahun 2018, 2020 dan 2021 capaian kinerja berada sedikit di bawah target (79,5%, 78,4%, dan 68,1%). Pada tahun 2019 standar minimal spesimen adekuat sebesar ≥80% telah dapat dipenuhi, dapat dilihat pada Gambar 6.40.

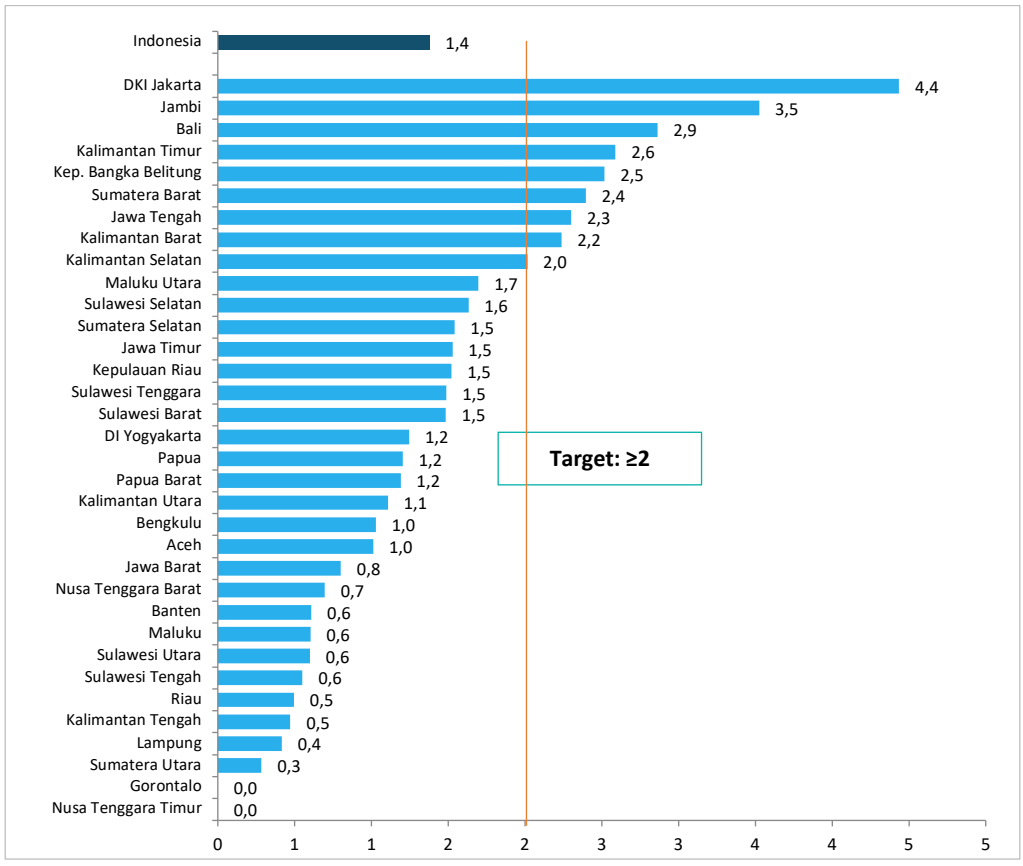
GAMBAR 6.40
CAPAIAN SURVEILANS AFP DI INDONESIA TAHUN 2007-2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Provinsi DKI Jakarta dan Jambi merupakan provinsi *dengan non polio AFP rate* per 100.000 penduduk umur <15 tahun tertinggi, yaitu sebesar 4,4 dan 3,5 per 100.000 penduduk, sedangkan provinsi terendah yaitu Sumatera Utara dan Lampung yaitu sebesar 0,3 dan 0,4 per 100.000 penduduk umur <15 tahun.

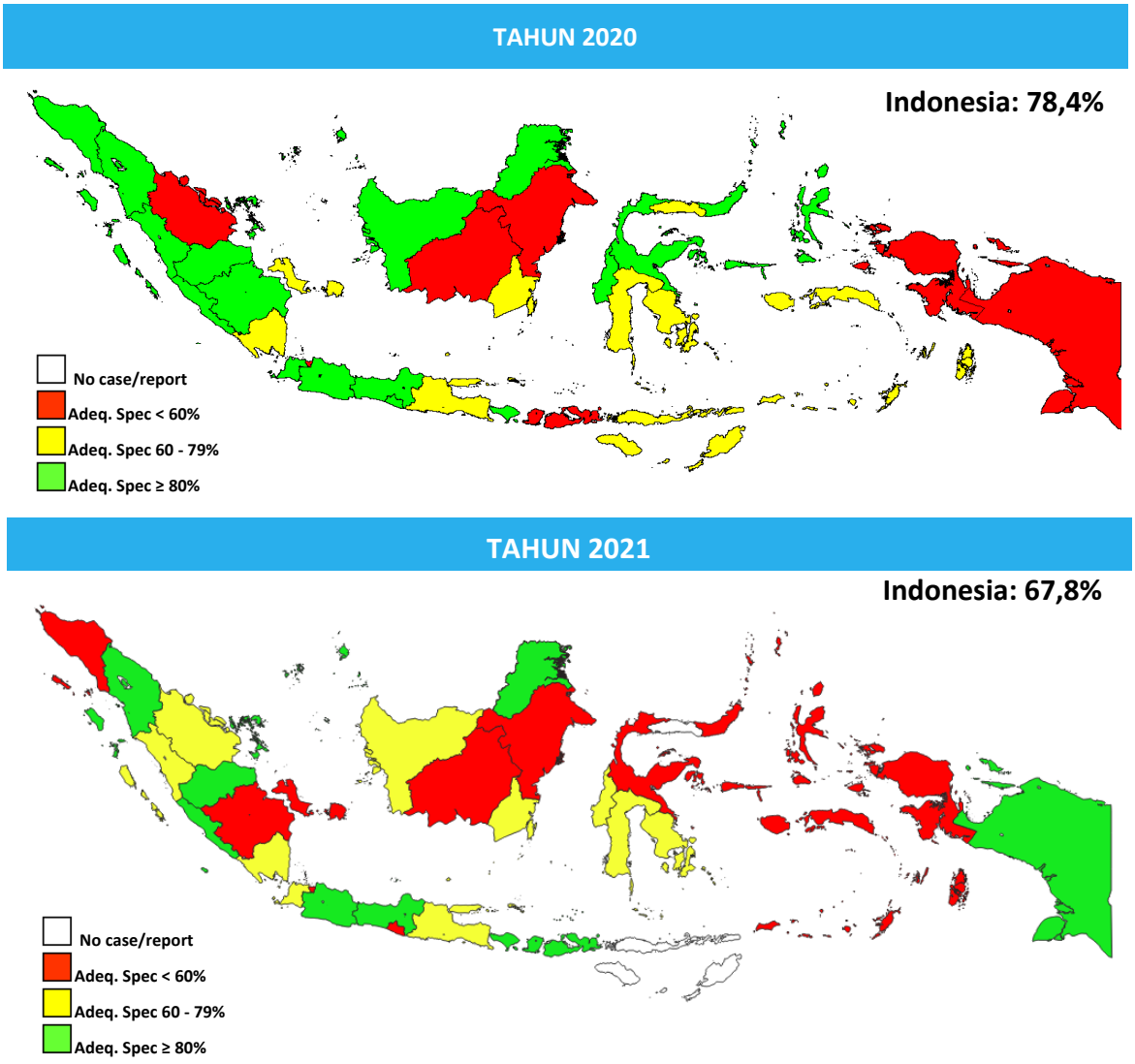
GAMBAR 6.41
NON POLIO *AFP RATE* PER 100.000 PENDUDUK< 15 TAHUN
DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2022

Pemeriksaan spesimen tinja dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya virus polio liar pada kasus AFP yang ditemukan dalam kegiatan surveilans AFP. Semua kasus AFP seharusnya dilakukan pemeriksaan klinis dan investigasi virologi, dan setidaknya 80% kasus AFP harus memenuhi standar spesimen adekuat dengan persyaratan yaitu volume cukup 8-10 gr, spesimen kondisi baik (tidak bocor, suhu dingin 4-8 ^{0}C), dua spesimen didapatkan ≤14 hari setelah munculnya kelumpuhan dengan jeda minimal 24 jam antara sampel 1 dan 2.

GAMBAR 6.42
PENCAPAIAN SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020 DAN 2021

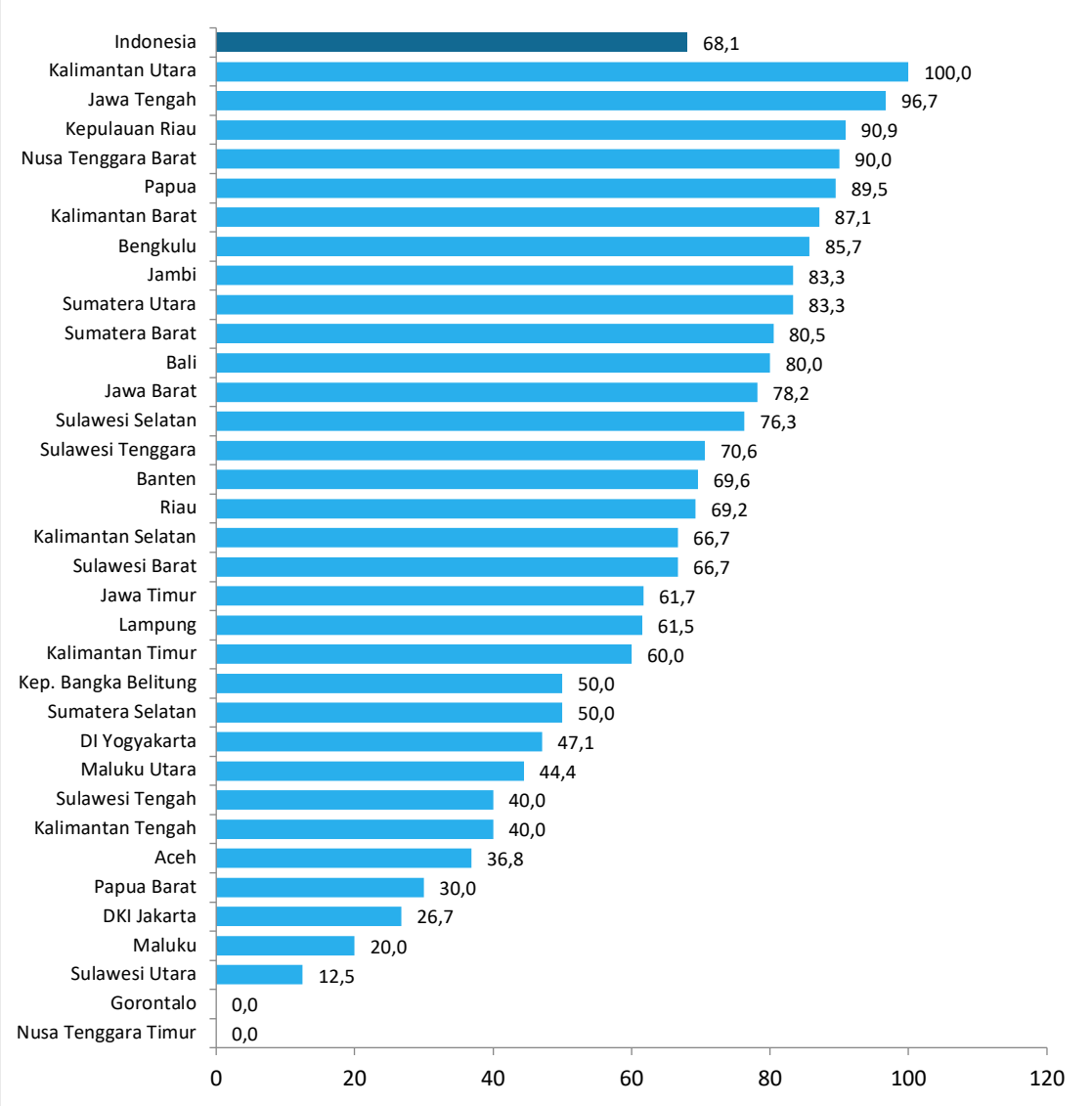


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Persentase spesimen adekuat di Indonesia pada tahun 2021 belum mencapai target (80%) yang diharapkan hanya sebesar 67,8%. Meskipun demikian, sebanyak 11 provinsi telah mencapai standar spesimen adekuat pada tahun 2021, sedangkan 23 provinsi lainnya belum mencapai standar. Persentase spesimen adekuat *AFP* menurut provinsi tahun 2021 dapat

dilihat pada Gambar 6.42. Informasi lebih rinci mengenai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi menurut provinsi dan kelompok umur dapat dilihat pada Lampiran 61-63.

GAMBAR 6.43
PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT AFP
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

C. PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOSIS

1. Demam Berdarah Dengue (DBD)

Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan disebarkan oleh vektor. Virus yang menyebabkan penyakit ini adalah Dengue. Kasus DBD pertama di Indonesia dilaporkan di Surabaya pada tahun 1968. Sejak pertama kali ditemukan kasus ini terus menunjukkan peningkatan setiap tahun.

Vektor penular penyakit ini berasal dari jenis nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*. Karakteristik vektor penular menentukan persebaran dan waktu kejadian infeksi. Habitat nyamuk *Aedes* pada umumnya berada di wilayah dengan iklim tropis, curah hujan tinggi, serta suhu panas dan lembap. Nyamuk *Aedes* menyukai genangan atau tempat penampungan air seperti selokan, vas atau pot tanaman, tempat minum hewan peliharaan, kolam renang, atau tempat sampah sebagi tempat perindukan. Karakteristik dan perilaku vektor tersebut dapat menjelaskan adanya kecenderungan peningkatan kasus DBD pada musim penghujan seiring dengan bermunculannya tempat perindukan. Selain mempengaruhi banyaknya kasus, karakteristik dan perilaku nyamuk *Aedes* juga menjadi landasan upaya pengendalian penyakit DBD melalui intervensi lingkungan dan perilaku individu dan masyarakat. Upaya pengendalian tersebut di antaranya melalui kampanye 3M dan 3M plus.

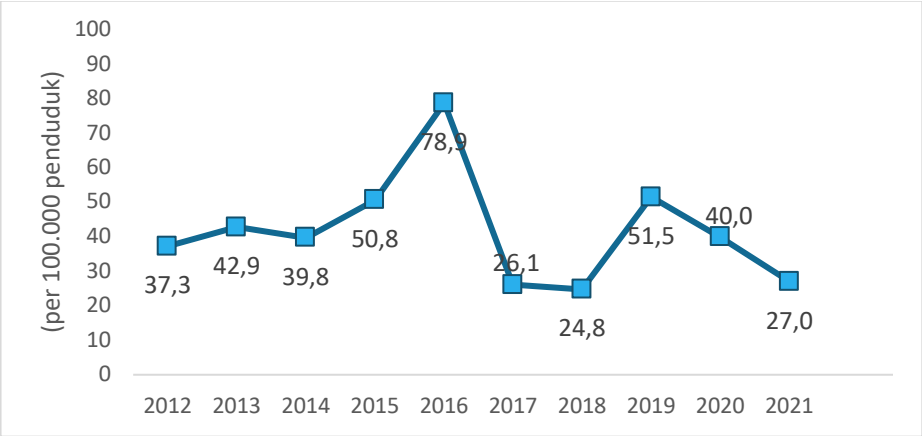
a. Kesakitan dan Kematian Akibat DBD

Diagnosa kasus DBD ditegakkan dengan anamnesis perjalanan penyakit, gejala klinis, pemeriksaan fisik termasuk tanda vital dan tanda perdarahan, serta pemeriksaan penunjang konfirmasi diagnosis. Pasien terduga DBD akan menjalani pemeriksaan laboratorium yang megindikasikan penurunan trombosit < 100.000/mm3 dan adanya kebocoran plasma yang ditandai dengan peningkatan hematokrit > 20%.

Pada tahun 2021 terdapat 73.518 kasus DBD dengan jumlah kematian sebanyak 705 kasus. Kasus maupun kematian akibat DBD mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu sebesar 108.303 kasus dan 747 kematian.

Dalam pengendalian penyakit DBD, digunakan beberapa indikator untuk kegiatan pemantauan. Dua indikator utama yang digunakan adalah *Incidence Rate* per 100.000 penduduk dan *Case Fatality Rate*.

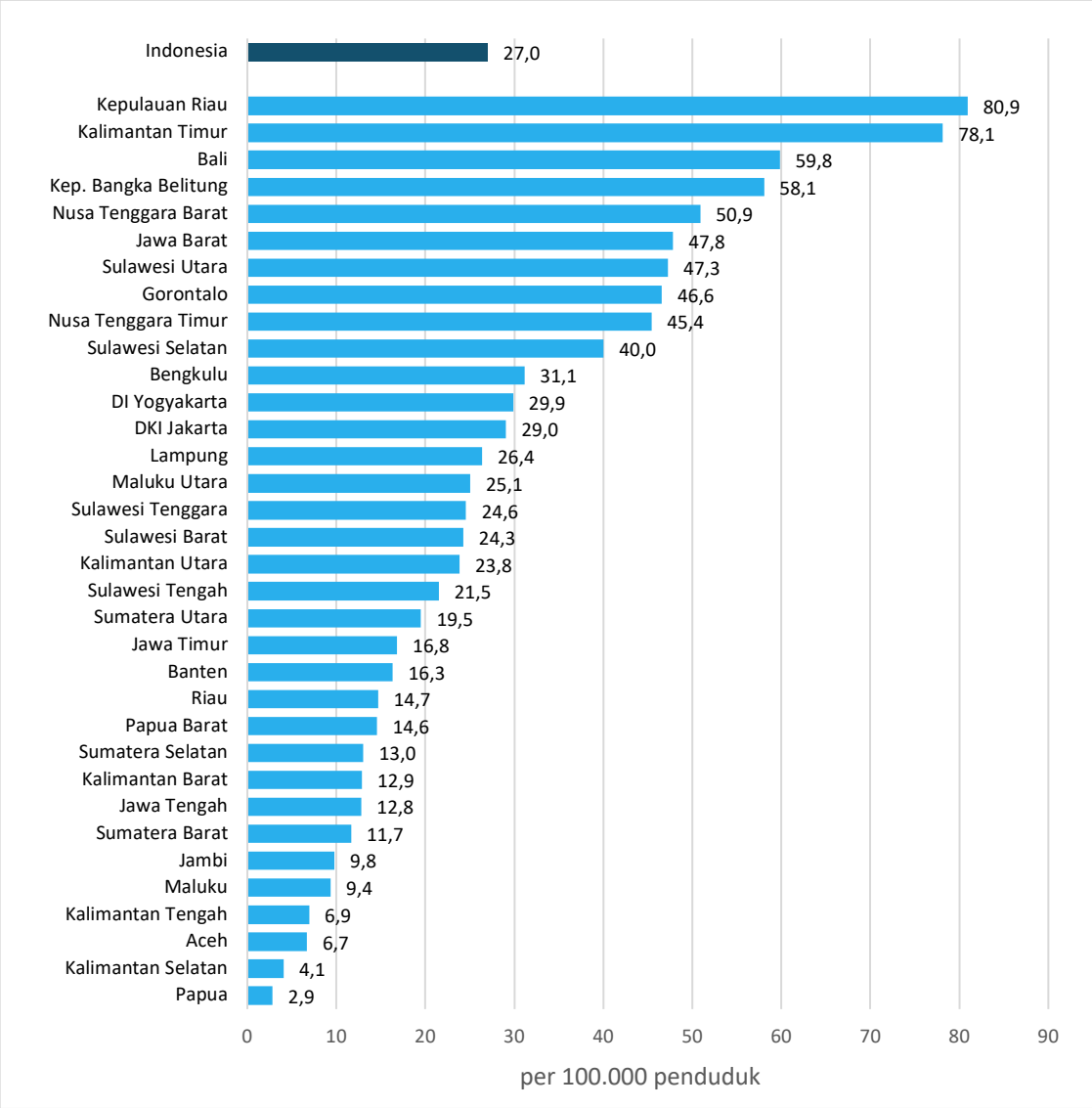
GAMBAR 6.44
***INCIDENCE RATE* PER 100.000 PENDUDUK**
DEMAM BERDARAH DENGUE TAHUN 2012-2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Incidence Rate DBD per 100.000 penduduk menunjukkan kecenderungan penurunan dari 51,5 pada tahun 2019, menjadi 40 dan 27 pada tahun 2020 dan 2021.

GAMBAR 6.45
ANGKA KESAKITAN (*INCIDENCE RATE*/IR) DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) PER 100.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

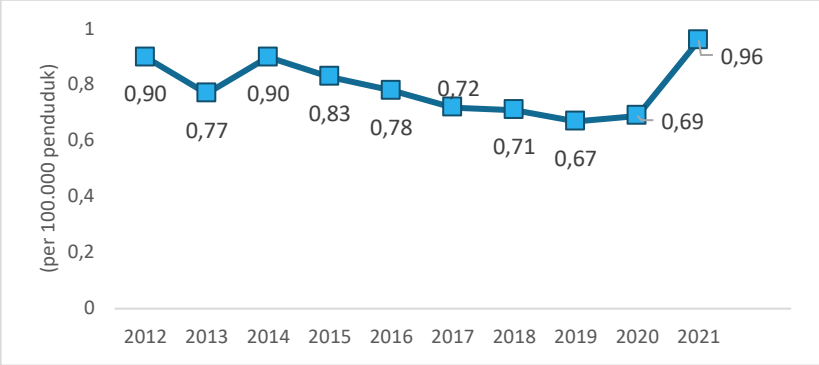


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2021

Pada tahun 2021, Provinsi Kepulauan Riau memiliki IR DBD tertinggi sebesar 80,9 per 100.000 penduduk, diikuti oleh Kalimantan Timur dan Bali masing-masing sebesar 78,1 dan 59,8 per 100.000 penduduk. Secara Nasional IR DBD Tahun 2021 sebesar 27 per 100.000 penduduk, angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan target nasional sebesar ≤ 49 per 100.000 penduduk.

Kasus DBD yang terlambat mendapatkan perawatan dapat menyebabkan fatalitas seperti kematian. Proporsi kematian terhadap seluruh kasus DBD atau yang dikenal dengan *Case Fatality Rate* (CFR) juga dapat digunakan untuk menilai keberhasilan pengendalian DBD.

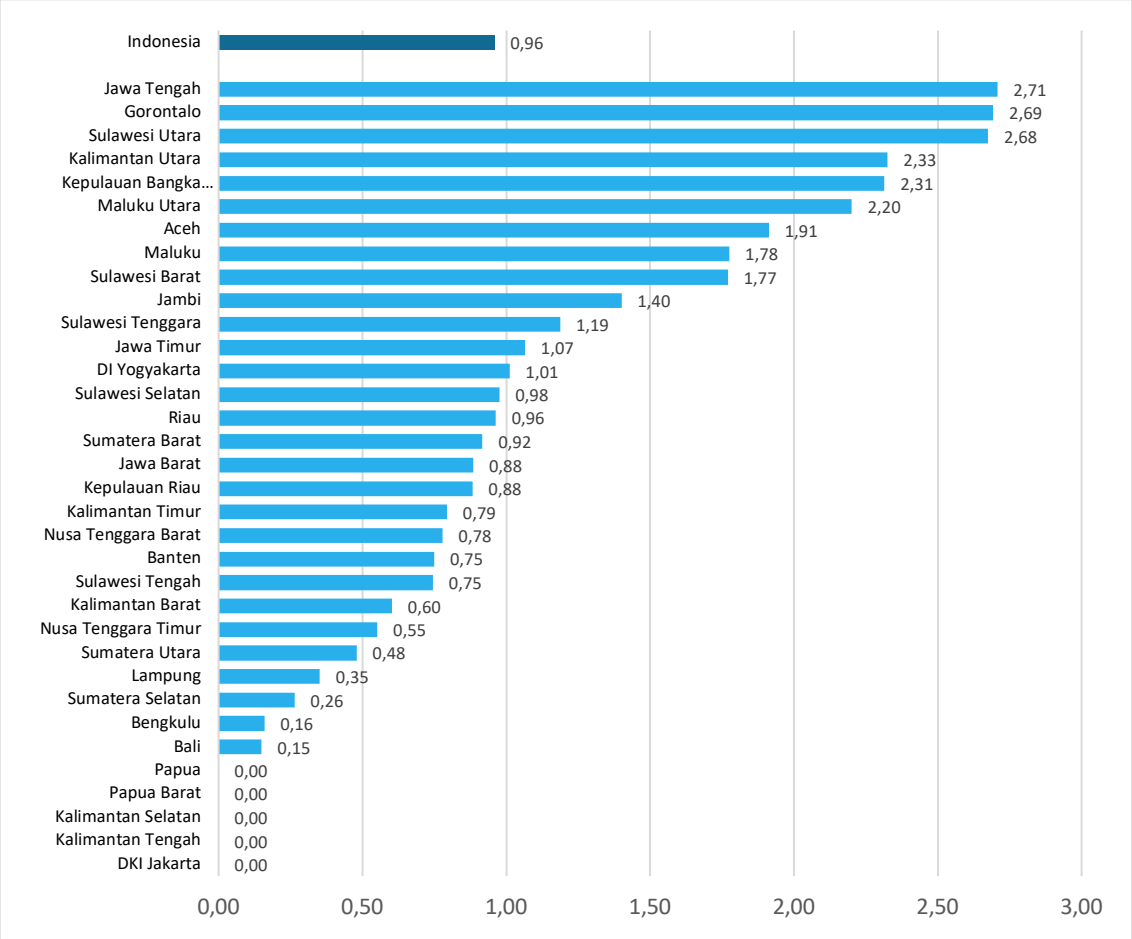
GAMBAR 6.46
***CASE FATALITY RATE* (%)**
DEMAM BERDARAH DENGUE TAHUN 2012-2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

CFR DBD di Indonesia menunjukkan kecenderungan penurunan dalam kurun waktu 2012-2020, yaitu dari 0,9% menjadi 0,69%. Namun demikian, angka ini meningkat menjadi 0,96% pada tahun 2021. Peningkatan ini dapat menjadi evaluasi bagi perawatan pasien DBD baik dari sisi ketepatan waktu penanganan maupun kualitas pelayanan kesehatan.

GAMBAR 6.47
***CASE FATALITY RATE* DEMAM BERDARAH DENGUE**
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

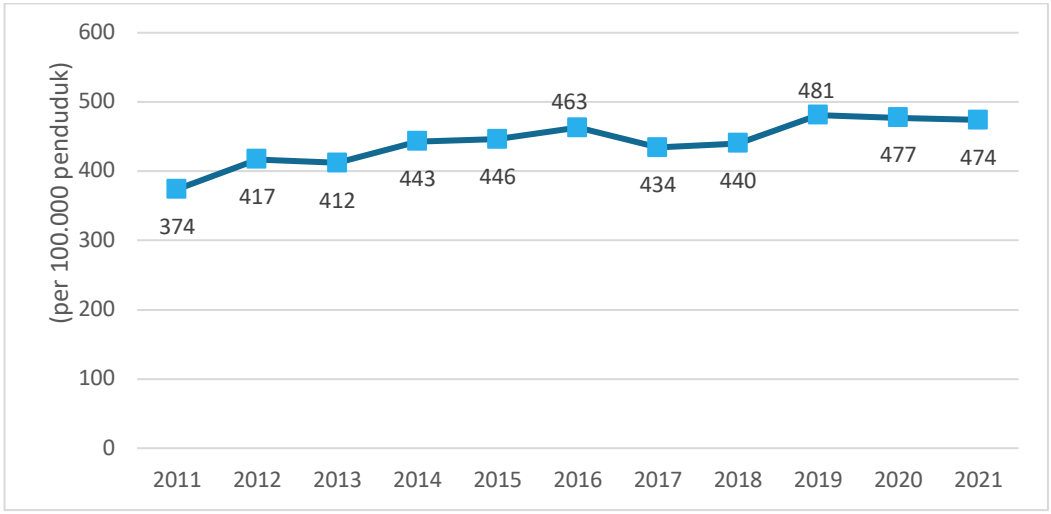
Secara nasional CFR DBD tahun 2021 mencapai 0,96%. CFR ini melebihi batas 0,7% yang telah ditetapkan pada target Strategi Nasional Penanggulangan Dengue. Meskipun CFR pada tahun 2021 meningkat dibandingkan periode sebelumya, besarannya berada di bawah 1% yang artinya masih berada pada kategori rendah. CFR dinilai tinggi jika melampaui angka 1%.

Terdapat 13 provinsi atau 38,2% provinsi memiliki CFR di atas 1%. Pertolongan segera untuk mencegah dan mengurangi keparahan dan komplikasi yang menyebabkan kematian diperlukan untuk menurunkan CFR. Diperlukan upaya tindak lanjut tatalaksana kasus yg adequat, edukasi dan informasi kepada masyarakat tentang bahaya Dengue untuk mencegah keterlambatan penanganan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan untuk dapat secara dini mengenali gejala dan tanda bahaya Dengue.

b. Kabupaten/Kota Terjangkit DBD

Penyebaran kasus DBD di Indonesia dapat dipantau melalui banyaknya kabupaten/kota dengan status terjangkit DBD. Pada tahun 2021 terdapat 474 (92,2%) kabupaten/kota yang terjangkit DBD di Indonesia.

GAMBAR 6.48
JUMLAH KABUPATEN/KOTA TERJANGKIT DBD
DI INDONESIA TAHUN 2011-2021

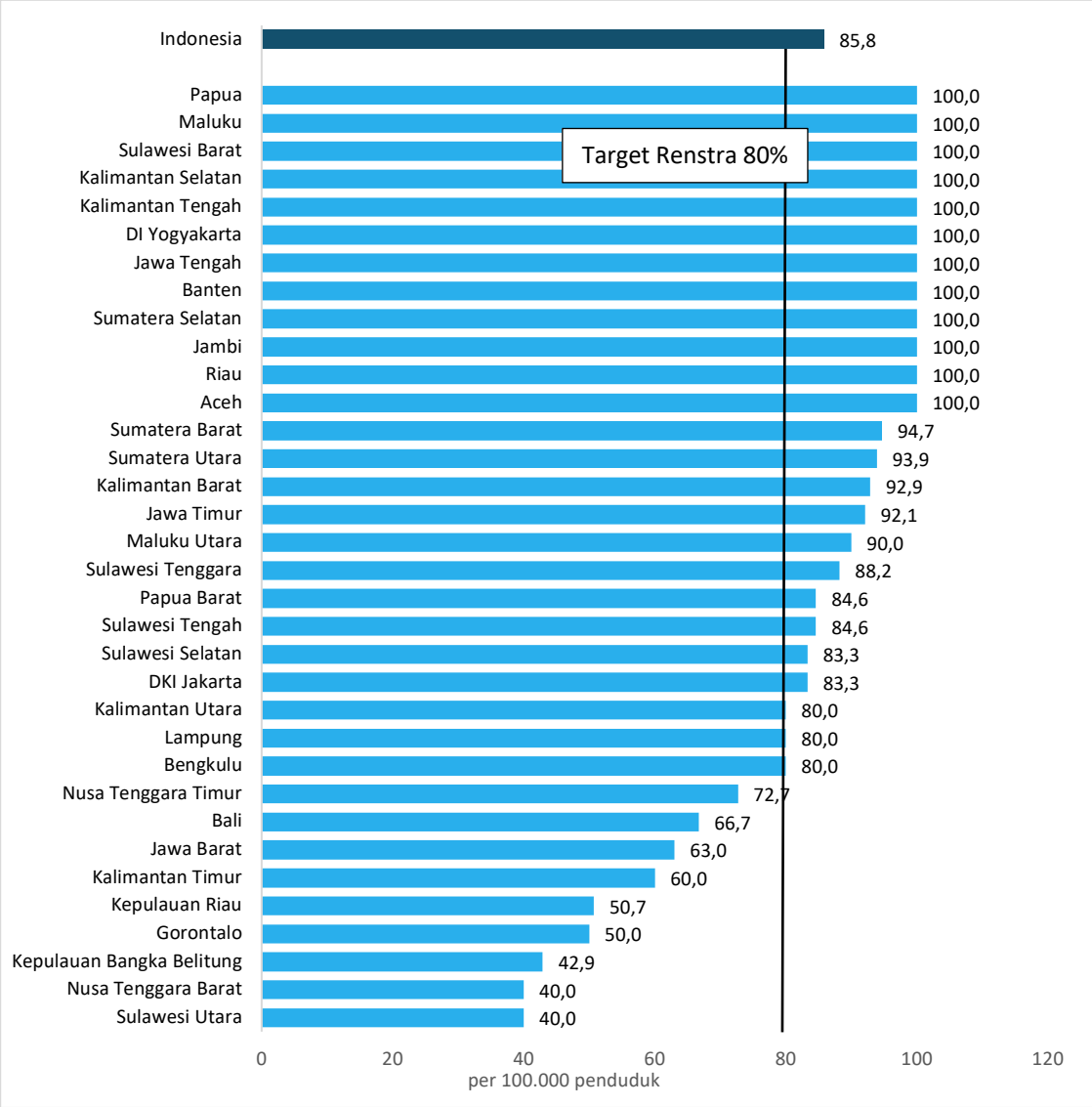


Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2022

Sejak tahun 2011 sampai dengan 2021 jumlah kabupaten/kota terjangkit DBD cenderung mengalami peningkatan, walaupun sedikit penurunan terjadi dari 477 pada tahun 2020 menjadi 474 kabupaten/kota pada tahun 2021.

Salah satu indikator Rencana Strategis tahun 2020-2024, yaitu persentase kabupaten/kota yang memiliki IR DBD < 49 per 100.000 penduduk. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, terdapat 441 kabupaten/kota (85,8%) yang mencapai IR DBD <49/100.000 penduduk. Data tersebut menunjukkan bahwa target program tahun 2021 sebesar 80% kabupaten/kota dengan IR DBD <49 per 100.000 penduduk telah tercapai.

GAMBAR 6.49
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN IR DBD < 49 PER 100.000 PENDUDUK DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2022

Pada gambar 6.49 diketahui bahwa terdapat 9 provinsi pada tahun 2021 yang tidak memenuhi target. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2020 ketika terdapat 12 provinsi yang tidak memenuhi target nasional.

c. Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada Dengue

Penyelidikan Epidemiologi (PE) pada Dengue adalah upaya penyelidikan penularan penyakit Dengue yang meliputi kegiatan pencarian atau identifikasi kasus Dengue dan/atau kasus suspek infeksi Dengue lainnya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular Dengue di tempat tinggal penderita dan rumah/bangunan sekitarnya, termasuk tempat-tempat umum yang berada dalam radius sekurang-kurangnya 100 meter. PE harus dilakukan dalam waktu 1 x 24 jam setelah adanya laporan kasus atau terduga Dengue. PE bertujuan untuk mengetahui

potensi penularan dan penyebaran Dengue lebih lanjut serta tindakan penanggulangan yang perlu dilakukan di wilayah sekitar tempat tinggal penderita atau fokus penularan.

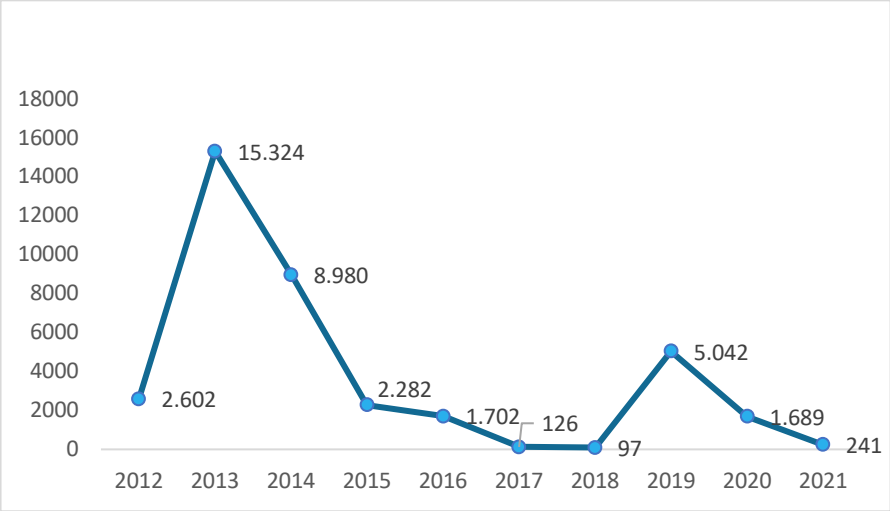
2. Chikungunya

Gejala utama demam Chikungunya (demam chik) adalah demam mendadak, nyeri pada persendian, terutama pada sendi lutut, pergelangan, jari kaki, tangan, tulang belakang, serta ruam pada kulit. Demam chik ini ditularkan oleh nyamuk *Aedes albopictus* dan *Aedes aegypti* yang juga merupakan nyamuk penular penyakit DBD. Demam chik ini terutama dijumpai di daerah tropis/subtropis dan sering menimbulkan epidemi. Beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya demam chik yaitu rendahnya status kekebalan kelompok masyarakat dan kepadatan populasi nyamuk penular karena banyaknya tempat perindukan nyamuk yang biasanya terjadi pada musim penghujan.

a. Kesakitan dan Kematian akibat Chikungunya

Pada tahun 2021 ditemukan kasus demam Chikungunya sebanyak 241 kasus, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2020 sebesar 1.689 kasus. Tidak ada kematian akibat Chikungunya di tahun 2021 maupun tahun 2020. Hanya tiga provinsi yang melaporkan data Chikungunya pada tahun 2021. Hal ini berbeda dengan tahun 2020 ketika terdapat lima provinsi yang melaporkan Chikungunya. Ketiga provinsi yang melaporkan kasus pada tahun 2021 yaitu Jawa Barat sebanyak 42 kasus, Jawa Tengah sebanyak 188 kasus, dan Bali sebanyak Bali 11 kasus. Pada tahun tersebut juga dilaporkan adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) Chikungunya di Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat sebanyak 19 kasus. Jumlah kasus Chikungunya pada tahun 2012-2021 disajikan pada gambar berikut.

GAMBAR 6.50
JUMLAH KASUS CHIKUNGUNYA DI INDONESIA
TAHUN 2012-2021



Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2022

Sampai dengan saat ini belum pernah dilaporkan adanya kematian akibat chikungunya. Faktor penyebab meningkatnya kasus antara lain kondisi cuaca yang relatif lembab dengan curah hujan yang tinggi dan periode waktu hujan yang panjang, adanya imunitas pada daerah yang pernah terjangkit.

b. Penyelidikan Epidemiologi Pada Chikungunya

Penyelidikan epidemiologi (PE) pada Chikungunya adalah kegiatan pencarian penderita atau terduga demam chikungunya dan pemeriksaan jentik nyamuk penular di tempat tinggal penderita dan rumah/bangunan sekitar, termasuk tempat-tempat umum dalam radius sekurang-kurangnya 100 meter. PE bertujuan untuk mengetaui potensi dan penyebaran Chikungunya lebih lanjut serta tindakan penanggulangan yang perlu dilakukan di wilayah sekitar tempat tinggal penderita.

3. Pengendalian Faktor Risiko DBD dan Chikungunya

Pengendalian faktor risiko yang paling efektif adalah pengendalian vektor terpadu baik secara fisik, kimiawi dan biologi dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam melakukan Pengendalian Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus. PSN 3M Plus merupakan upaya pemberantasan sarang nyamuk secara terus menerus dan berkesinambugan melalui Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J).

Kegiatan PSN 3M meliputi menguras bak mandi atau bak penampungan air, menutup rapat-rapat tempat penampungan air dan memanfaatkan Kembali atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan jentik nyamuk.

Kegiatan Plus meliputi: mengganti air vas bunga, tempat minum burung atau tempat-tempat lainnya yang sejenis seminggu sekali, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancer atau rusak, menutup lubang-lubang pada potongan bambu atau pohon, dan lainnya, menaburkan bubuk larvasida, misalnya di tempat-tempat yang sulit dikuras atau di daerah yang sulit air, memelihara ikan pemakan jentik di kolam atau bak penampungan air, memasang kawat kasa, menghindari kebiasaan menggantung pakaian dalam kamar, mengupayakan pencahayaan dan ventilasi ruang yang memadai, menggunakan kelambu, memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk, dan cara spesifik lainnya di masing-masing daerah.

Keberhasilan kegiatan PSN 3M Plus antara lain dapat diukur dengan angka bebas jentik (ABJ). Jika ABJ ≥ 95% diharapkan penularan DBD dan Chikungunya dapat dicegah atau dikurangi. Upaya pemberantasan vektor penyakit DBD dan Chikungunya hanya dapat berhasil apabila seluruh masyarakat berperan secara aktif dalam melakukan kegiatan PSN 3M Plus melalui gerakan 1 Rumah 1 Jumantik.

4. Filariasis

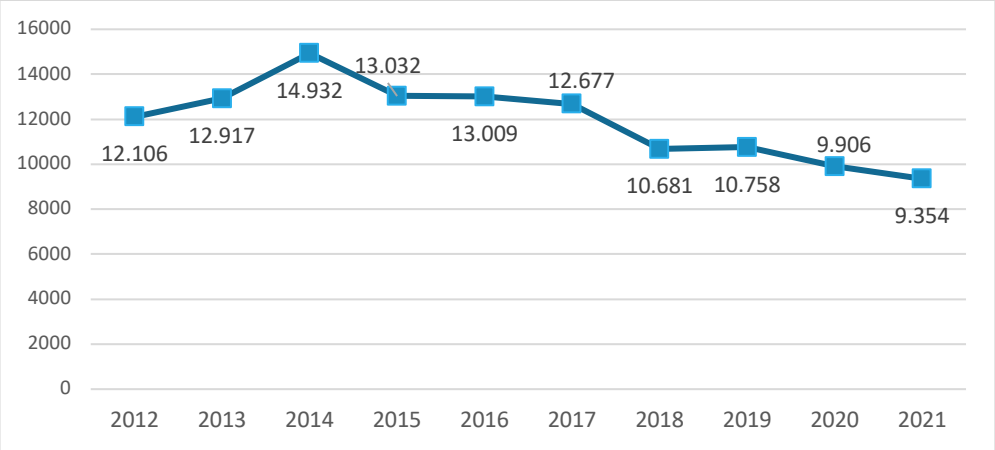
Filariasis merupakan penyakit kronis yang disebabkan oleh cacing Filaria dan ditularkan dengan perantara nyamuk. Cacing Filaria yang masuk ke dalam tubuh manusia melalui gigitan nyamuk akan menginfeksi jaringan limfe. Setelah masuk ke dalam jaringan limfe, cacing Filaria yang masing mikroFilaria akan tumbuh menjadi cacing dewasa yang kemudian menyebabkan pembengkakan di kaki, tungkai, payudara, lengan dan organ genital. Cacing penyebab Filaria

yang tersebar di Indonesia terdiri dari tiga spesies yaitu *Wuchereria bancrofti*, *Brugia malayi* dan *Brugia timori*.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melalui roadmap *Neglected Tropical Diseases* (NTD) 2021 menetapkan eliminasi Filariasis pada tahun 2030. Diperkirakan saat ini terdapat 1,3 miliar penduduk yang berisiko tertular penyakit Filariasis di dunia. Jumlah tersebut tersebar di lebih dari 83 negara dan 60% kasus tersebut terdapat di Asia Tenggara.

Di Indonesia, pada tahun 2021 terdapat 9.354 kasus kronis Filariasis yang tersebar di 34 Provinsi. Angka ini terlihat menurun dari data tahun sebelumnya karena dilaporkan beberapa kasus meninggal dunia dan adanya perubahan diagnosis sesudah dilakukan validasi data/konfirmasi kasus klinis kronis yang dilaporkan tahun sebelumnya. Grafik berikut menggambarkan kondisi kasus Filariasis di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir.

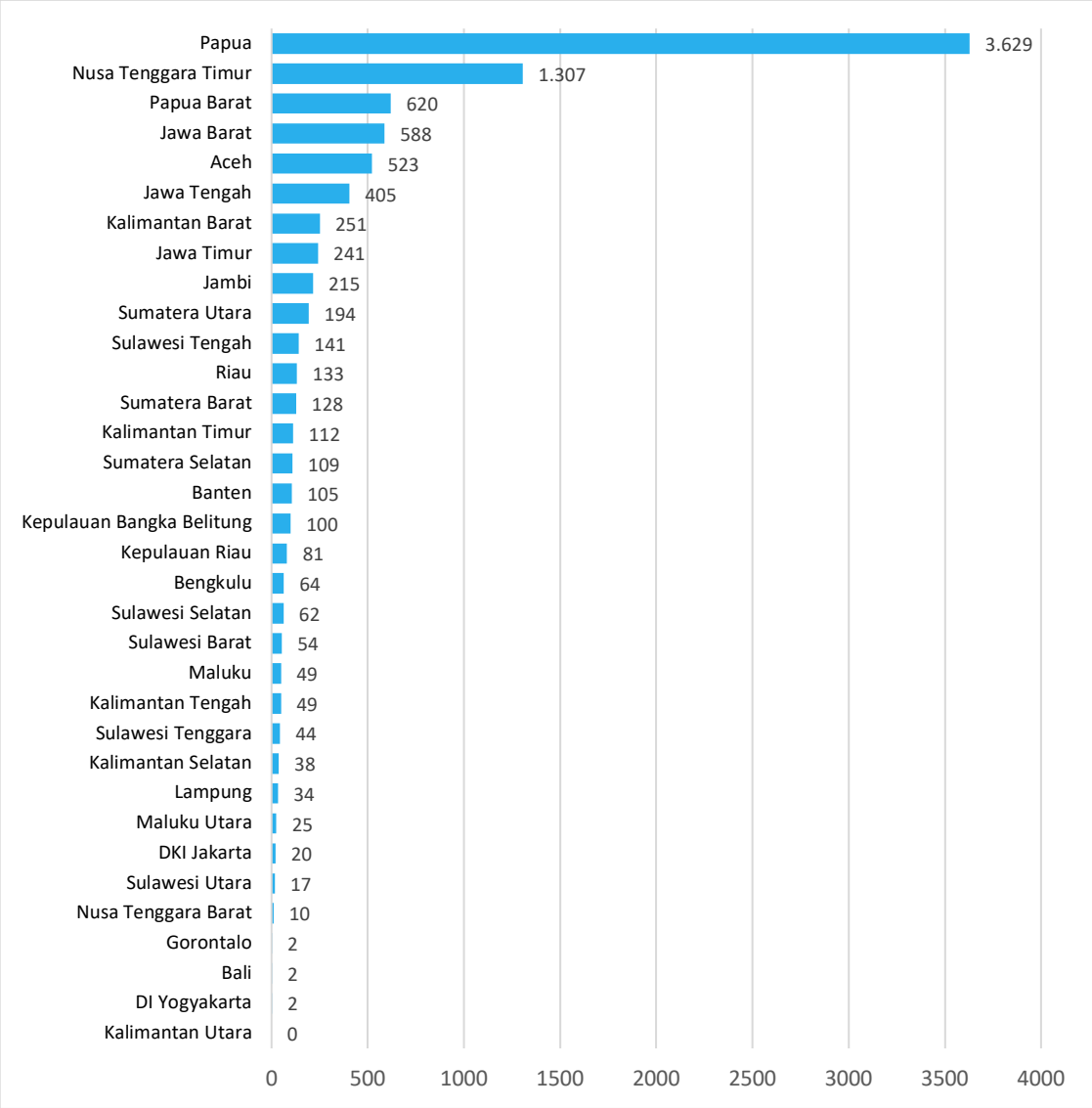
GAMBAR 6.51
JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS DI INDONESIA TAHUN 2011 – 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Provinsi dengan kasus tertinggi terdapat di wilayah timur Indonesia, yaitu Papua sebanyak 3.629, Nusa Tenggara Timur 1.307 kasus, dan Papua Barat sebanyak 620 kasus. Provinsi dengan kasus Filariasis < 5 kasus yaitu Gorontalo, Bali, DI Yogyakarta, dan Kalimantan Utara.

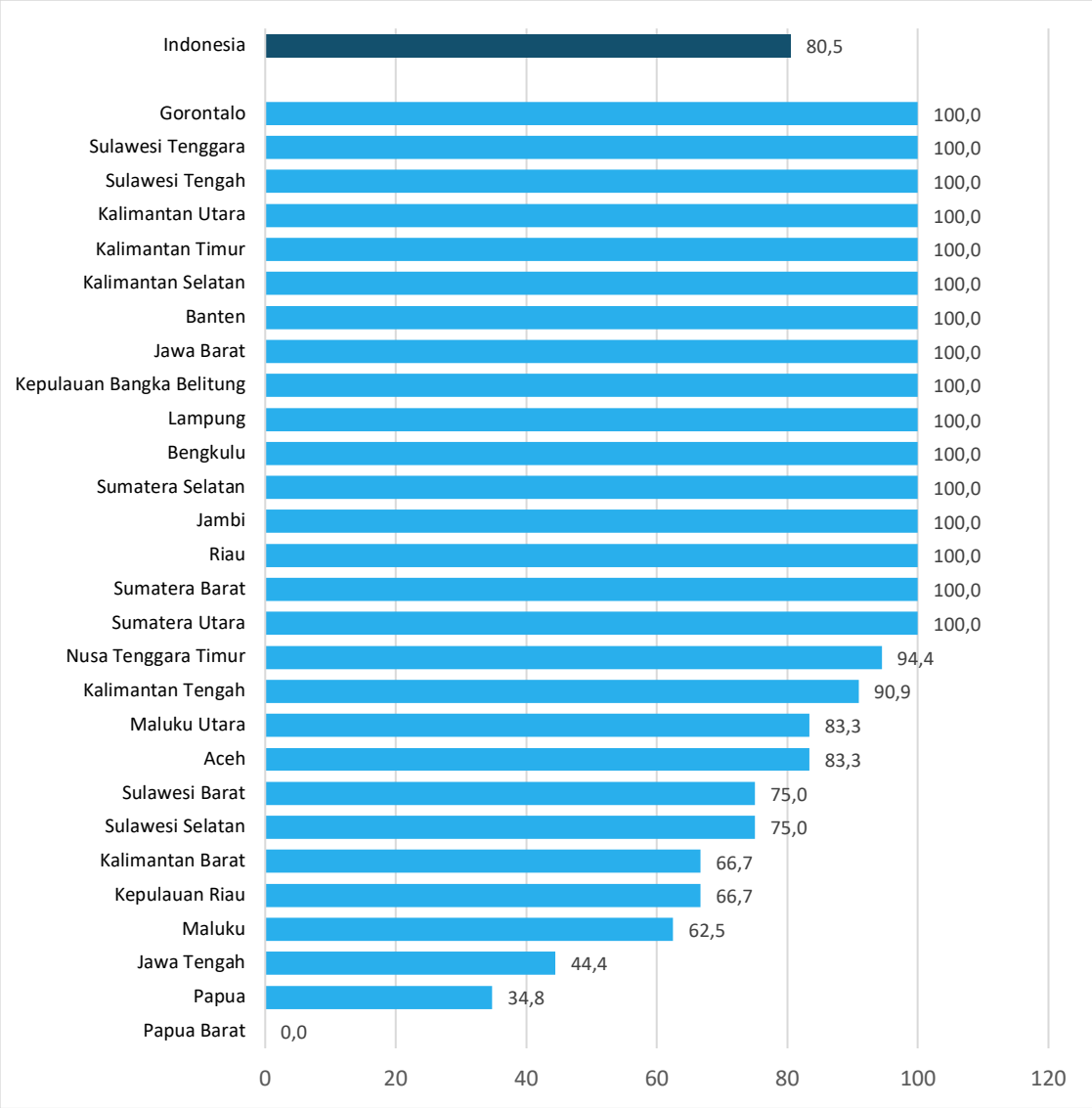
GAMBAR 6.52
JUMLAH KASUS KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Keberhasilan program pengendalian Filariasis dapat diketahui di antaranya dengan melihat jumlah kabupaten/kota yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1%. Pada tahun 2021 terdapat sebanyak 236 kabupaten/kota (45,9%) yang merupakan wilayah endemis Filariasis yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia. Dengan demikian, terdapat 6 provinsi yang tidak memiliki kabupaten/kota endemis sehingga provinsi tersebut ditetapkan sebagai provinsi non-endemis Filariasis. Keenam provinsi tersebut yaitu DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara.

GAMBAR 6.53
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA
YANG BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1%
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

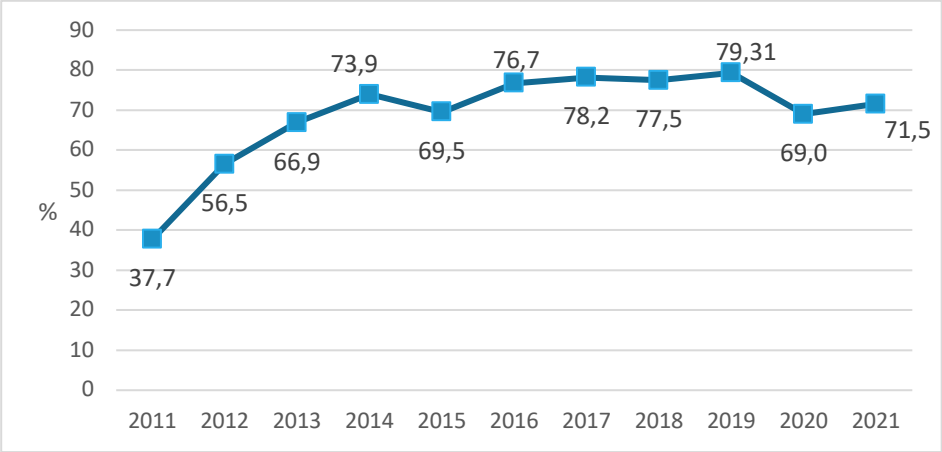
Indikator keberhasilan pengendalian Filariasis yang telah ditetapkan Kementerian Kesehatan yaitu jumlah kabupaten/kota endemis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi <1%. Jumlah kabupaten/kota endemis yang berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi <1% sebanyak 190 kabupaten/kota pada tahun 2021. Dengan demikian capaian indikator kinerja tersebut telah memenuhi target indikator yaitu 190 dari 236 kabupaten/kota endemis. Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat 1 provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya belum berhasil menurunkan angka mikrofilaria < 1% yaitu Papua Barat.

Upaya lain dari pengendalian penyakit Filariasis adalah Pemberian Obat Pencegahan Massal (POPM) Filariasis. Pada tahun 2021 tidak semua provinsi melaksanakan POPM Filariasis karena termasuk daerah non-endemis atau seluruh kabupaten/kota endemis di provinsi tersebut sedang berada pada fase surveilans pasca POPM Filariasis. Sebanyak enam provinsi

merupakan daerah non-endemis dan pada 12 provinsi seluruh kabupaten/kota endemisnya sedang menjalani surveilans pasca POPM Filariasis.

Pada tahun 2021 sebanyak 33 (13,9%) kabupaten/kota endemis Filariasis yang seharusnya masih melaksanakan POPM Filariasis. Namun demikian, hanya 32 kabupaten/kota yang melaksanakan POPM Filariasis di tahun 2021. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan tahun 2020 yang sebanyak 74 kabupaten/kota. Penurunan jumlah ini disebabkan beberapa kabupaten/kota endemis Filariasis sudah menyelesaikan putaran POPM Filariasis dan masuk pada masa surveilans pasca POPM Filariasis. Selain itu, terdapat 1 kabupaten yang menunda pelaksanaan POPM Filariasis karena sedang melaksanakan survei Midterm dan obat Ivermectin untuk POPM belum tersedia.

GAMBAR 6.54
CAKUPAN POPM FILARIASIS
TAHUN 2011-2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Cakupan POPM Filariasis mencerminkan tingginya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi memutus rantai penularan Filariasis melalui pemberian obat pencegahan massal. Selama periode tahun 2011 sampai 2019 tren cakupan penduduk minum obat Filariasis di kabupaten/kota endemis yang masih melaksanakan POPM Filariasis cenderung meningkat. Namun demikian, cakupan tersebut menurun menjadi 71,5% pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, POPM Filariasis dilakukan di 28 kabupaten/kota menggunakan obat Diethylcarbamazine (DEC) dan Albendazole. Sebanyak 4 kabupaten/kota menggunakan 3 macam kombinasi obat yaitu kombinasi DEC, Albendazole dan Ivermectine yaitu di Mamuju, Biak Numfor, Kota Sorong dan Kota Pekalongan.

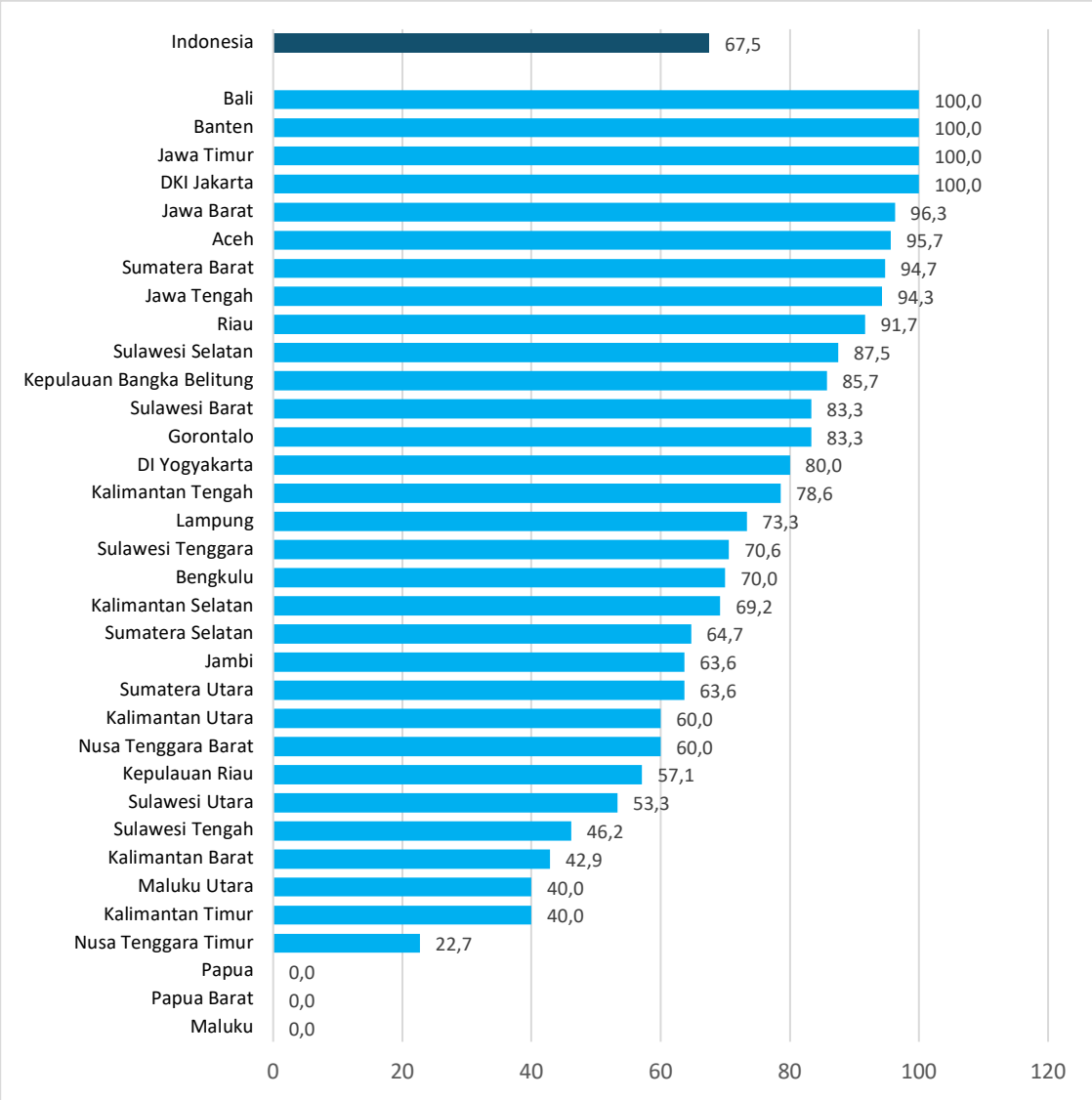
5. Malaria

Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh mikroorganisme yang disebut *Plasmodium*. *Plasmodium* menginfeksi manusia melalui vektor penular nyamuk *Anopheles*. Bersama dengan HIV AIDS dan Tuberkolusis, pengendalian malaria menjadi bagian dari tujuan *Sustainable Development Goals (SDGs)* sebagai tujuan global yang harus dicapai sampai dengan tahun 2030. Terkait dengan pengendalian Malaria di Indonesia, Kementerian Kesehatan telah menetapkan target program eliminasi malaria agar seluruh wilayah di Indonesia bebas dari

malaria selambat-lambatnya tahun 2030. Target ini sejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang "Eliminasi Malaria di Indonesia".

Pada tahun 2021, terdapat empat provinsi yang ditetapkan sebagai wilayah bebas malaria, yaitu DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, dan Banten. Selain itu, terdapat tiga provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya belum berstatus eliminasi malaria, yaitu Maluku, Papua Barat, dan Papua. Namun demikian, terdapat beberapa kabupaten di tiga provinsi tersebut yang memiliki status endemis rendah. Dengan adanya intervensi yang efektif status tersebut bisa ditingkatkan menjadi bebas malaria.

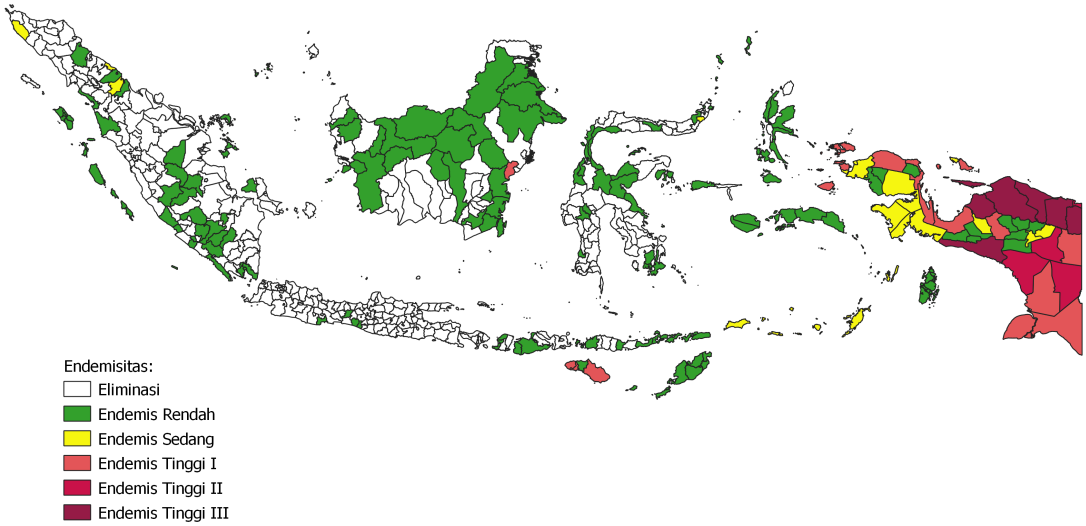
GAMBAR 6.55
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Eliminasi malaria dapat diupayakan melalui peningkatan persentase konfirmasi kesediaan darah dan persentase pengobatan standar. Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 sebanyak 67,5% kabupaten/kota di Indonesa atau sebanyak 347 kabupaten/kota telah berstatus bebas malaria. Jumlah kabupaten/kota dengan status bebas malaria pada tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 318 kabupaten/kota.

GAMBAR 6.56
PETA ENDEMISITAS MALARIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

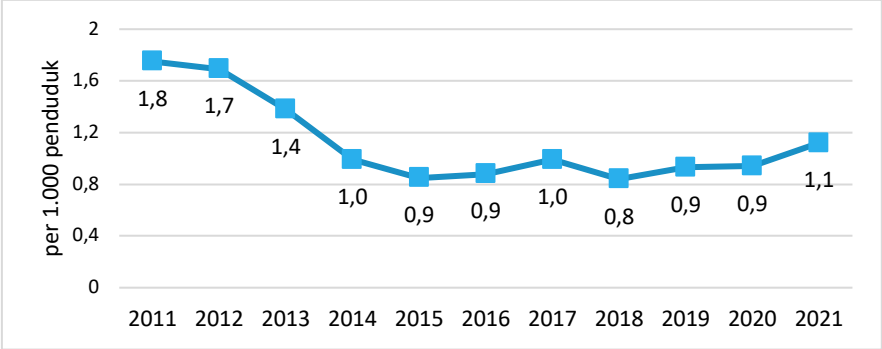
Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar kabupaten/kota berstatus eliminasi malaria tersebar di wilayah Indonesia bagian barat. Sebagian besar kabupaten/kota dengan status endemis tinggi terdapat Papua dan Papua Barat. Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Timur masih memiliki 3 kabupaten dan 1 kabupaten berstatus endemis tinggi.

Penentuan stratifikasi endemisitas di antaranya ditentukan berdasarkan nilai API. Wilayah endemis rendah jika API <1, endemis sedang jika API sebesar 1-5, dan endemis tinggi jika API >5. Pada tahun 2021 terdapat 347 kabupaten/kota (67,5%) bebas malaria, 124 kabupaten/kota (24,2%) berstatus endemis rendah, 17 kabupaten/kota (3,3%) berstatus endemis sedang, dan 26 kabupaten/kota (5%) berstatus endemis tinggi.

a. Angka Kesakitan Malaria

Morbiditas malaria dapat diketahui dengan menilai indik*ator Annual Parasite Incidence* (API) per 1.000 penduduk. Indikator ini diperoleh dengan menghitung proporsi antara pasien positif malaria terhadap penduduk berisiko di wilayah tertentu. Indonesia berhasil menekan API menjadi kurang dari 1 sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Namun demikian, pada tahun 2021 API meningkat hingga 1,1 per 1.000 penduduk.

GAMBAR 6.57
ANGKA KESAKITAN MALARIA (*ANNUAL PARACITE INCIDENCE /API*)
PER 1.000 PENDUDUK TAHUN 2011-2021

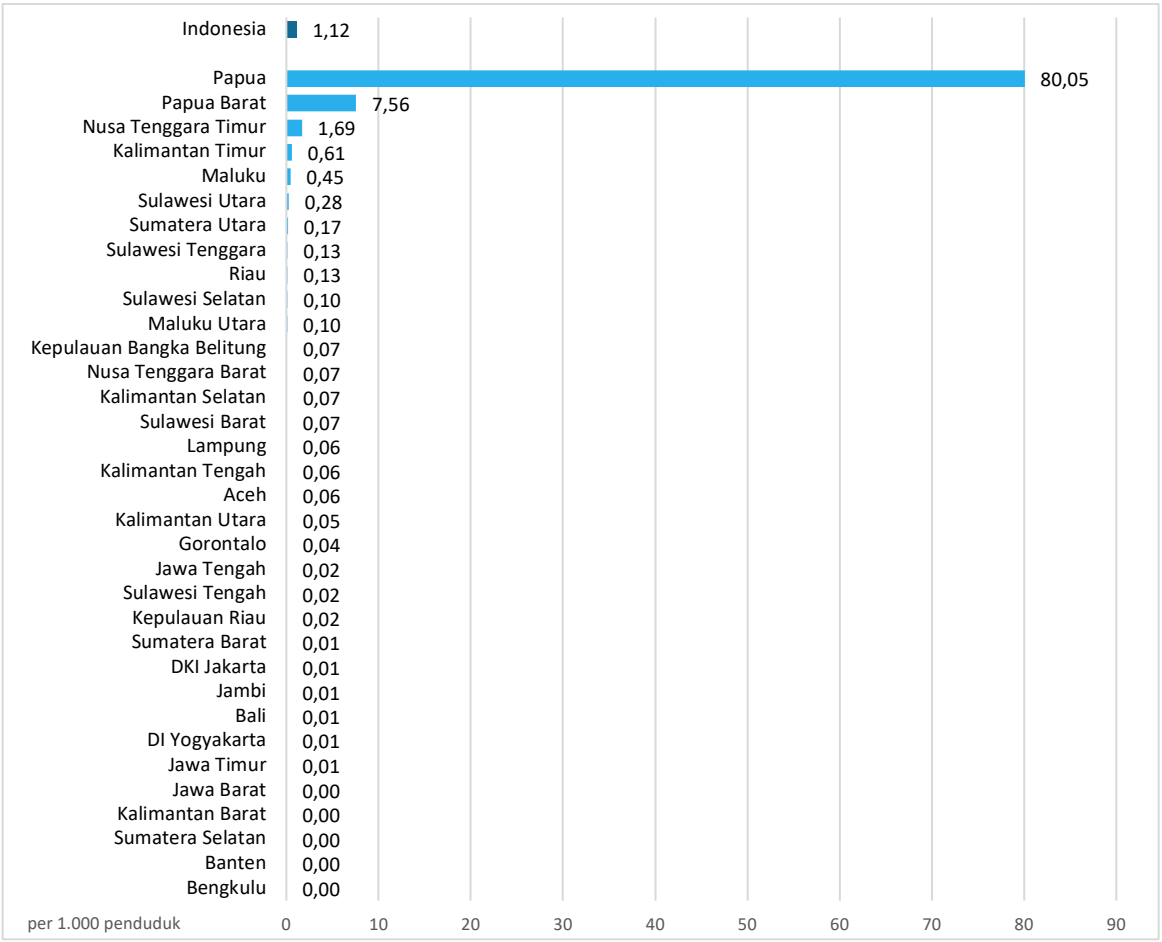


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Dari seluruh kasus malaria yang dilaporkan, sebanyak 95,8% di antaranya telah terkonfirmasi laboratorium, sebanyak 68,6% diperiksa secara mikroskopis dan 31,4% menggunakan *Rapid Diagnostic Test* (RDT).

API pada tingkat nasional dan provinsi di tahun 2021 disajikan pada gambar berikut.

GAMBAR 6.58
ANGKA KESAKITAN MALARIA (API)
PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

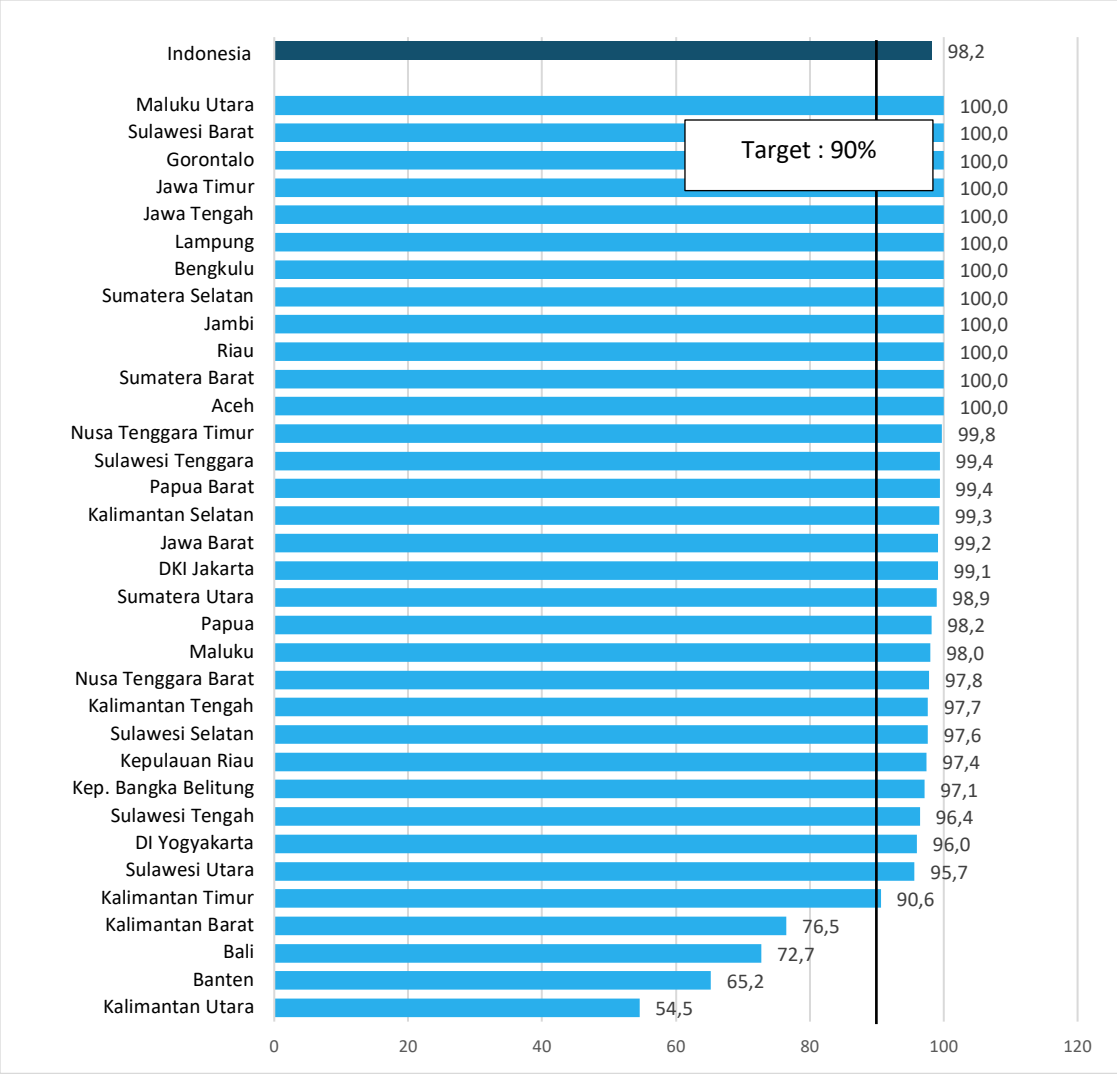
Provinsi Papua, Papua Barat, dan Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi dengan API malaria tertinggi. Hal ini sejalan dengan banyaknya kabupaten/kota di provinsi tersebut dengan status endemis tinggi.

Tingginya API di Provinsi Papua sebesar 80,05 per 1.000 penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan seluruh provinsi, dapat menggambarkan kontribusi yang signifikan terhadap API di tingkat nasional. Sebanyak 91,2% provinsi di Indonesia telah mampu menekan API malaria hingga kurang dari 1 per 1.000 penduduk.

b. Pengobatan Malaria

Pengobatan malaria yang terstandar dan dinilai efektif sampai saat ini masih menggunakan *Artemicinin-based Combination Therapy* (ACT). Pemberian ACT dilakukan pada 24 jam pertama pasien panas dan obat harus diminum habis. Pemerintah menetapkan target persentase pengobatan ACT sebesar 90%.

GAMBAR 6.59
PERSENTASE PENGOBATAN ACT MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar provinsi memenuhi target 90%, yaitu sebanyak 25 provinsi (73,5%). Terdapat empat provinsi dengan persentase kurang dari 90%, yaitu Kalimantan Utara, Banten, Bali, dan Kalimantan Barat.

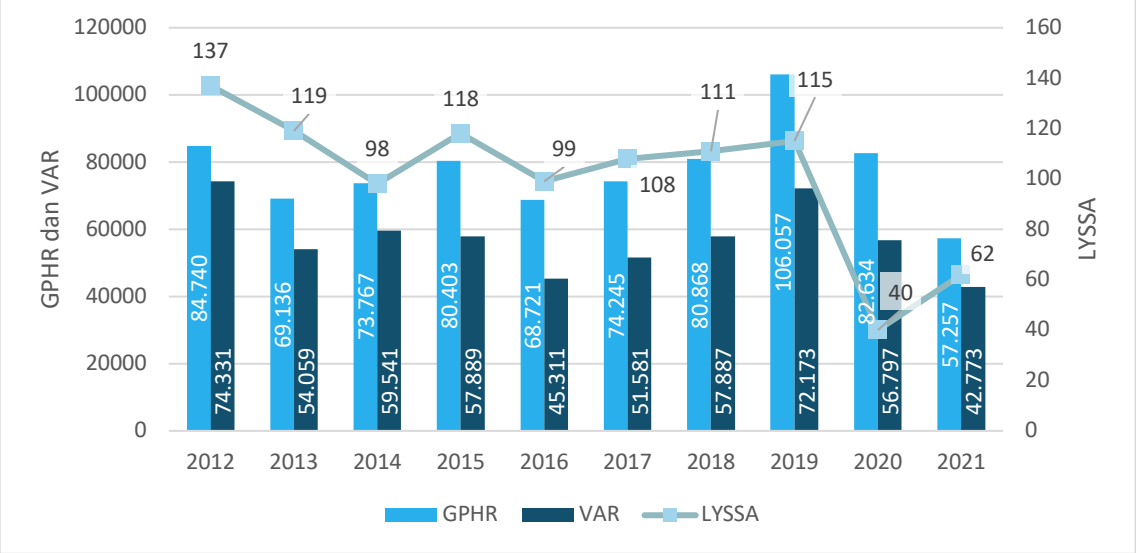
Data dan informasi lebih rinci tentang penyakit Malaria terdapat pada Lampiran 66.a, 66.b, dan 66.c.

6. Rabies

Rabies merupakan penyakit menular disebabkan oleh virus dari golongan *Rhabdovirus.* Penyakit ini ditularkan melalui gigitan hewan penular seperti anjing, kucing, kelelawar, kera, musang dan serigala. Selain bagi manusia, rabies dapat menyebabkan kesakitan dan kematian bagi hewan penular tersebut.

Sampai dengan tahun 2021 terdapat 8 provinsi yang telah dinyatakan sebagai wilayah bebas Rabies, yaitu yaitu Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Papua Barat, dan Papua. Permasalahan Rabies dapat diketahui melalui kasus Gigitan Hewan Penular Rabies (GHPR), pemberian Vaksin Anti Rabies (VAR), dan kasus kematian (LYSSA). Kasus GHPR yang dilaporkan akan diarahkan untuk mendapatkan VAR. Kasus yang GHPR yang mengalami kematian dan ditemukan adanya sero positif pada hewan penularnya menjadi landasan penentuan daerah rabies.

GAMBAR 6.60
SITUASI RABIES DI INDONESIA
TAHUN 2011 – 2021

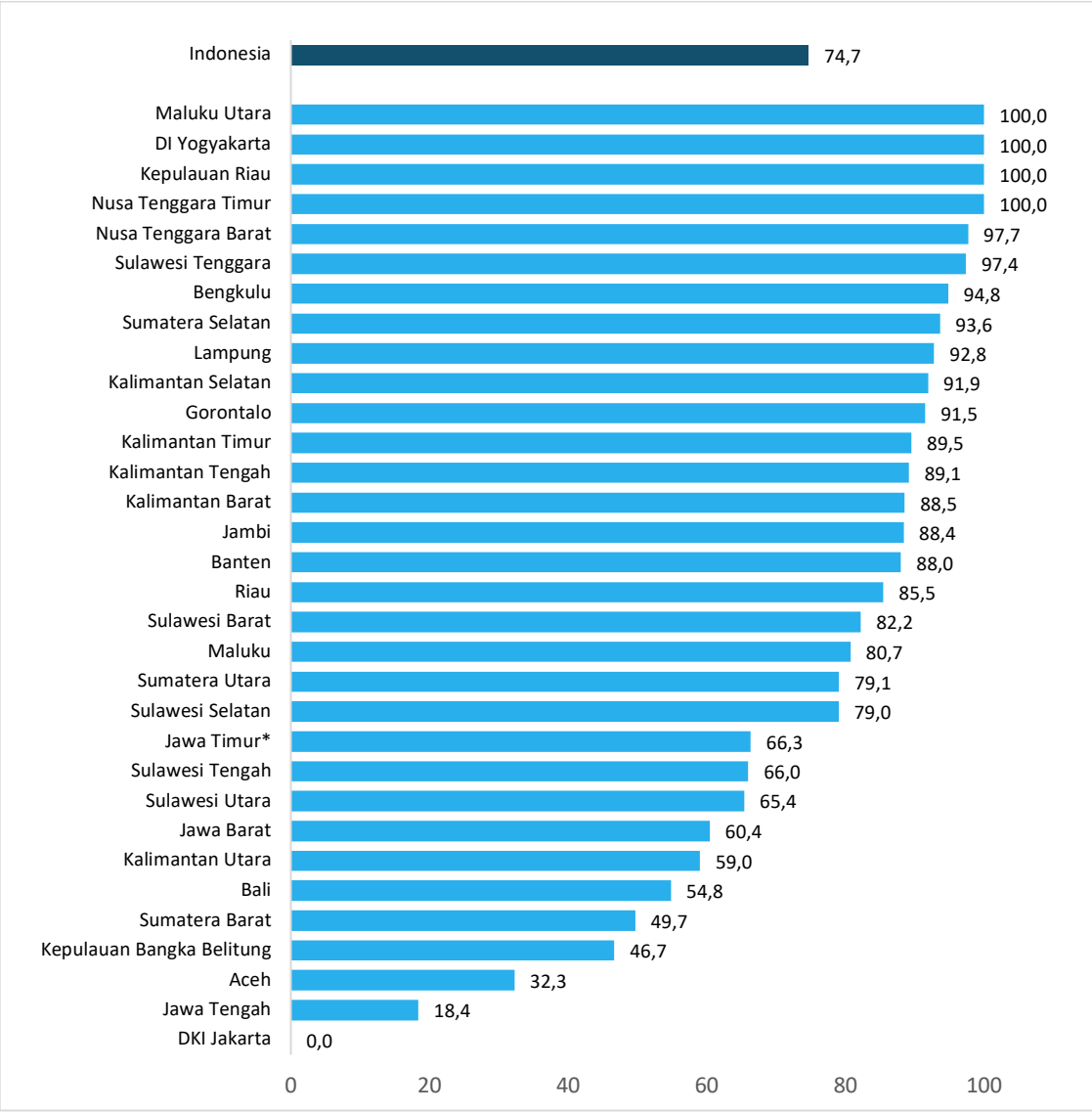


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Berdasarkan grafik kecenderungan GHPR, VAR dan LYSSA yang disajikan di atas, kasus GHPR tertinggi dilaporkan pada tahun 2019 sebesar 106.057 kasus. Kasus GHPR pada tahun 2021 menunjukkan penurunan menjadi 57.257 kasus. Kasus VAR yang dilaporan pada tahun 2021 juga mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 56.797 menjadi 42.773 kasus. Berbeda dengan GHPR dan VAR, kasus kematian (LYSSA) meningkat dari 40 menjadi 62 kasus.

Kasus GHPR tertinggi paling banyak dilaporkan oleh Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Kasus GHPR harus segara mendapatkan tatalaksana, di antaranya dengan pemberian VAR. Berikut ini disajikan persentase pemberian VAR terhadap kasus GHPR.

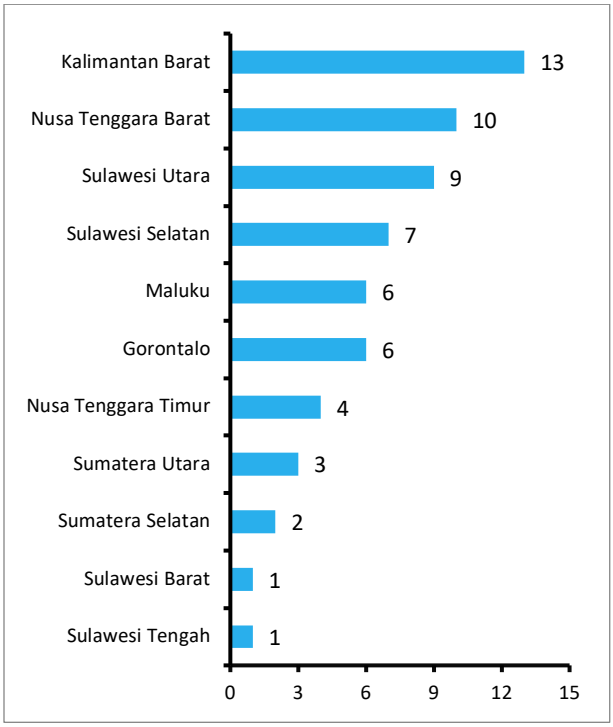
GAMBAR 6.61
PERSENTASE PEMBERIAN VAR PADA KASUS GHPR
DI INDONESIA TAHUN 2021



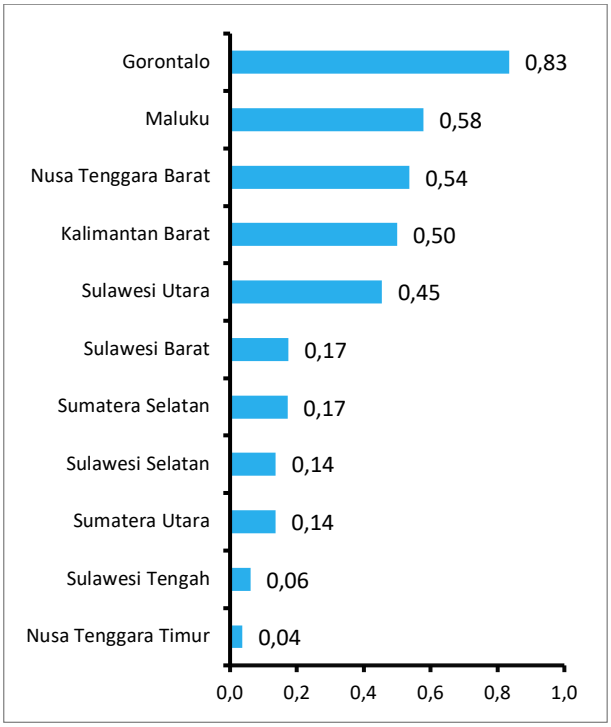
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Terdapat empat provinsi dengan capaian VAR 100%, yaitu Maluku Utara, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Aceh memiliki persentase VAR terendah, bahkan di Provinsi DKI Jakarta tidak ada kasus GHPR yang mendapatkan VAR. Provinsi Bali dan Sulawesi Selatan yang melaporkan kasus GHPR tertinggi memiliki persentase 54,8% dan 79%. Dengan tingginya kasus GHPR di kedua provinsi tersebut, diperlukan capaian VAR yang tinggi. Penatalaksanaan kasus yang efektif dan pemberian VAR dapat mencegah kematian karena Rabies.

GAMBAR 6.62
JUMLAH KEMATIAN AKIBAT RABIES (LYSSA) DI INDONESIA TAHUN 2021



GAMBAR 6.63
PROPORSI KEMATIAN AKIBAT RABIES (LYSSA) TERHADAP KASUS GHPR (%) DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

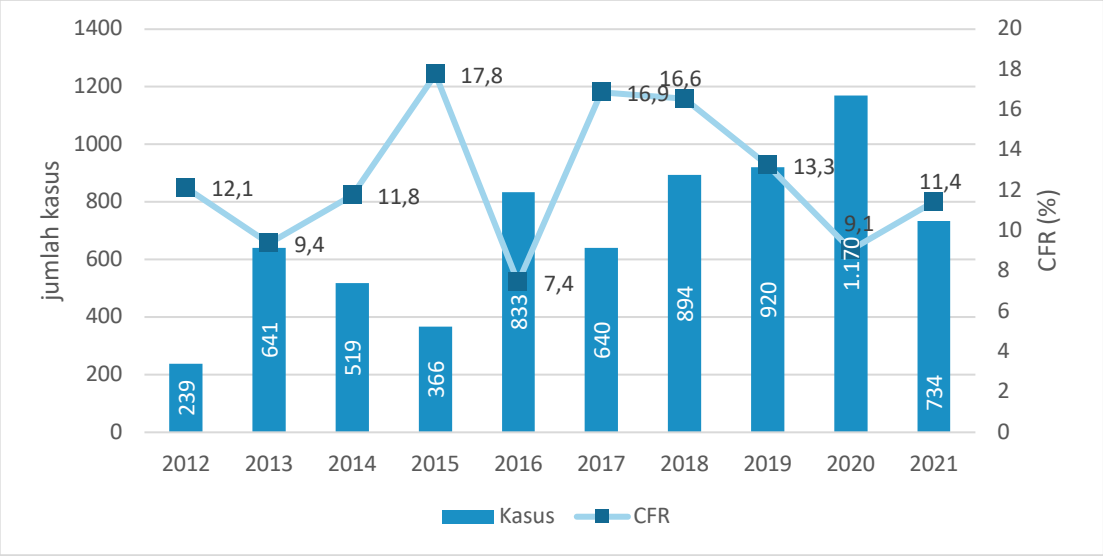
Provinsi Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Utara melaporkan kasus kematian akibat Rabies tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Namun demikian, jika dilihat berdasarkan proporsi LYSSA terhadap kasus GHPR, Provinsi Gorontalo, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat menempati posisi teratas dengan persentase di atas 0,5%. Jika dibandingkan dengan persentase VAR terhadap kasus GHPR, Provinsi Gorontalo, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat memiliki persentase di atas 80%. Tingginya kematian di provinsi-provinsi tersebut bisa diakibatkan keterlambatan penatalaksanaan kasus dan pemberian VAR.

7. Leptospirosis

Leptospirosis adalah penyakit menular yang disebabkan bakteri *Leptospira sp*. Penyakit ini ditularkan melalui kontak langsung atau tidak langsung antara manusia dengan urine hewan yang telah terinfeksi bakteri Leptospira. Tingginya biaya pemeriksaan laboratorium dan metode diagnosis menyebabkan tidak semua kasus dapat terlaporkan.

Pada tahun 2021 ditemukan adanya 734 kasus Leptospirosis di Indonesia yang dilaporkan oleh delapan provinsi, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur. Dari sejumlah kasus yang dilaporkan tersebut, terdapat 84 kasus meninggal dengan *Case Fatality Rate* (CFR) sebesar 11,4%.

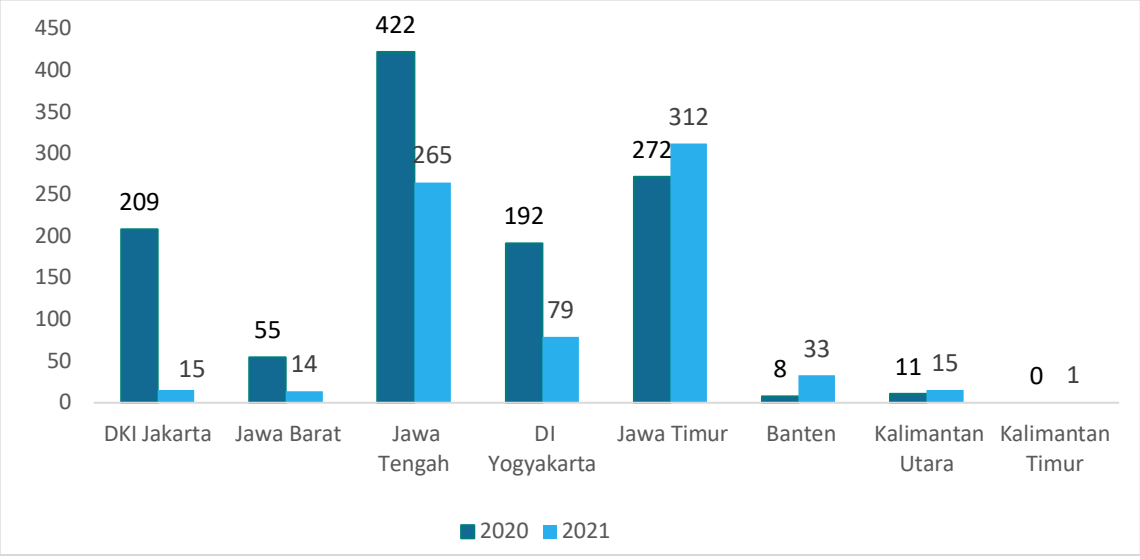
GAMBAR 6.64
SITUASI LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA
TAHUN 2011 – 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Kasus Leptospirosis menurun dibandingkan tahun 2020 yaitu dari 1.170 menjadi 734 kasus di tahun 2021. Sedangkan CFR meningkat dari 9,1% menjadi 11,4%. Meskipun CFR secara nasional meningkat, namun rata-rata CFR dari provinsi yang melaporkan kasus cenderung lebih rendah dibandingkan tahun 2020.

GAMBAR 6.65
JUMLAH KASUS LEPTOSPIROSIS DI INDONESIA
TAHUN 2020 – 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Provinsi Jawa Timur, Banten, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur melaporkan peningkatan kasus. Sedangkan Penurunan kasus yang signifikan terjadi di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta.

Meskipun menunjukkan penurunan kasus, Provinsi Jawa Tengah melaporkan kasus yang tinggi pada tahun 2021. Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah menjadi penyumbang terbesar terhadap seluruh kasus di Indonesia yaitu masing-masing sebesar 42,5% dan 36,1%.

Kasus dan kematian akibat Leptospirosis memerlukan upaya pengendalian yang selama ini dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Penyediaan NSPK Pengendalian Leptospirosis,
2. Penyediaan media Komunikasi, Informasi dan Edukasi,
3. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia baik melalui pelatihan, sosialisasi, orientasi dan *workshop*,
4. Penguatan surveilans zoonosis berbasis laboratorium seperti Surveilans Sentinel Leptospirosis di berbagai daerah seperti DKI Jakarta, Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
5. Penguatan tata laksana sesuai standar dan prosedur,
6. Peningkatan sistem kewaspadaan dini dan respon cepat penanggulangan KLB,
7. Pengendalian faktor risiko secara terpadu yang terdiri dari lintas program dan lintas sektor meliputi sektor kesehatan hewan dan kesehatan satwa liar,
8. Penyediaan logistik (*Rapid Diagnostik Test*).

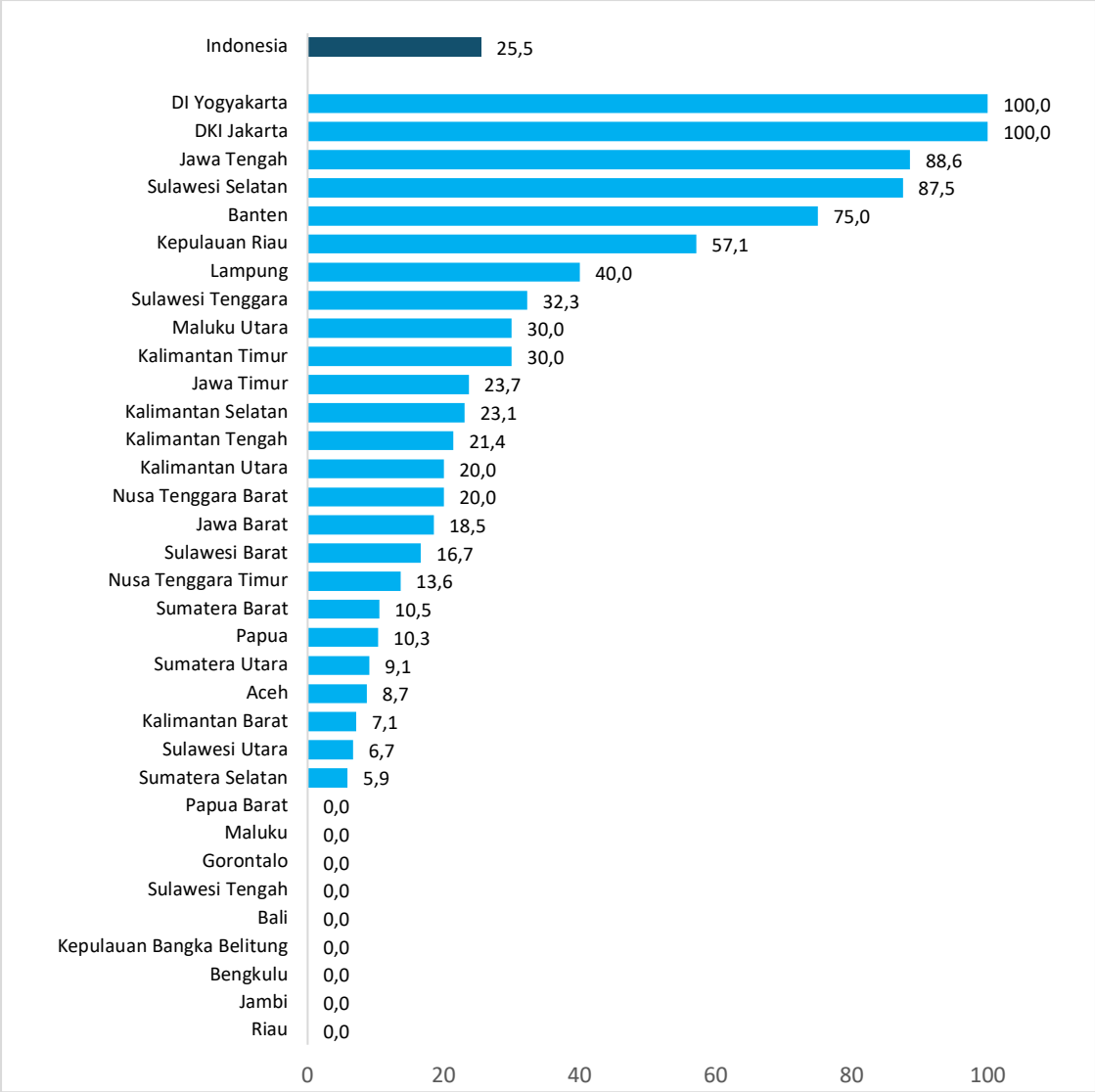
8. Pengendalian Vektor Terpadu

Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit adalah semua kegiatan atau tindakan yang ditujukan untuk menurunkan populasi vektor dan binatang pembawa penyakit serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit tular vektor di suatu wilayah atau menghindari kontak masyarakat dengan vektor sehingga penularan vektor dapat dicegah. Pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit merupakan upaya preventif yang paling efektif dalam rangka pencegahan penyakit tular vektor dan zoonotik, karena penularan penyakit ini tidak akan terjadi apabila tidak ada vektor dan binatang pembawa penyakit.

Kementerian Kesehatan menetapkan persentase kabupaten/kota yang memiliki 25% pusesmas melaksanakan surveilans vektor sebagai indikator pengendalian vektor. Puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor yang dimaksud pada indikator tersebut adalah Puskesmas yang melaksanakan surveilans nyamuk *Aedes* dan/atau nyamuk *Anopheles* secara rutin setiap bulan yang dilaporkan melalui SILANTOR (Sistem Surveilans Vektor) berupa angka bebas jentik dan index habitat nasional.

Target indikator ini pada tahun 2021 adalah sebanyak 80 kabupaten/ kota yang memiliki 25% Puskesmas yang melaksanakan surveilans vektor. Pada tahun 2021 sebanyak 131 kabupaten/kota memiliki 25% puskesmas melaksanakan surveilans vektor.

GAMBAR 6.66
PERSENTASE KABUPATEN/ KOTA MEMILIKI 25% PUSKESMAS MELAKSANAKAN SURVEILANS VEKTOR DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa terdapat dua provinsi dengan capaian 100%, yaitu Provinsi DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Namun demikian, masih terdapat sembilan provinsi yang belum memiliki kabupaten/kota dengan 25% puskesmas melaksanakan surveilans vektor, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah, Riau, Papua Barat, Maluku, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Gorontalo, Bengkulu dan Bali.

Surveilans vektor merupakan dasar dari pengendalian vektor yang efektif dan efisien. Apabila hasil surveilans menunjukan populasi kepadatan vektor tinggi melebihi angka baku mutu yang diperbolehkan, maka harus segera dilakukan pengendalian vektor, sebelum terjadi penularan penyakit pada manusia.

D. PENYAKIT TIDAK MENULAR

Penyakit tidak menular atau penyakit non-infeksi telah menjadi bagian dari beban ganda epidemiologi di dunia sejak beberapa dekade terakhir. Berbeda dengan penyakit menular, penyakit ini tidak disebabkan oleh infeksi mikroorganisme seperti protozoa, bakteri, jamur, maupun virus. Badan kesehatan dunia (WHO) mengestimasikan bahwa penyakit ini menyebabkan sedikitnya terhadap 40 juta kematian tiap tahun di dunia. Jumlah tersebut setara dengan 70% kematian oleh seluruh penyebab pada tingkat global.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular (PTM) yang mengacu pada klasifikasi internasional penyakit *(International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*) mengelompokkan penyakit ini berdasarkan sistem dan organ tubuh menjadi 12 jenis penyakit yaitu:

1. Penyakit keganasan
2. Penyakit endokrin, nutrisi, dan metabolik
3. Penyakit sistem saraf
4. Penyakit sistem pernapasan
5. Penyakit sistem sirkulasi
6. Penyakit mata dan adnexa
7. Penyakit telinga dan mastoid
8. Penyakit kulit dan jaringan subkutanius
9. Penyakit sistem musculoskeletal dan jaringan penyambung
10. Penyakit sistem genitourinaria
11. Penyakit gangguan mental dan perilaku
12. Penyakit kelainan darah dan gangguan pembentukan organ darah.

Angka morbiditas penyakit tidak menular baik di tingkat global maupun nasional menujukkan kecenderungan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. WHO mengidentifikasi empat faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap peningkatan tersebut, yaitu konsumsi tembakau, kurangnya aktivitas fisik, penyalahgunaan alkohol, dan diet yang tidak sehat. Kemunculan COVID-19 sebagai *new-emerging disease* telah menyadarkan banyak pihak terhadap pentingnya pengendalian penyakit tidak menular, karena penyakit ini merupakan salah satu komorbid yang berperan dalam meningkatkan keparahan COVID-19.

Penanggulangan PTM diprioritaskan pada jenis penyakit yang menjadi masalah kesehatan masyarakat dengan beberapa kriteria, yaitu tingginya angka kematian atau kecacatan, tingginya angka kesakitan atau tingginya beban biaya pengobatan, dan memiliki faktor risiko yang dapat diubah.

Penanggulangan PTM melalui upaya kesehatan masyarakat terdiri dari upaya pencegahan dan pengendalian. Upaya pencegahan dilaksanakan melalui kegiatan promosi kesehatan, deteksi dini faktor risiko, dan perlindungan khusus yang menitikberatkan pada faktor risiko yang dapat diubah. Faktor risiko yang dapat diubah meliputi merokok, kurang aktivitas fisik, diet yang tidak sehat, konsumsi minuman beralkohol, dan lingkungan yang tidak sehat. Upaya pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan penemuan dini kasus dan tata laksana dini.

1. Jumlah Kabupaten/Kota Melakukan Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM di ≥ 80% Puskesmas

Berbagai upaya telah dilakukan untuk pencegahan dan pengendalian PTM di tingkat nasional, sejalan dengan pendekatan global dan regional. Salah satu program yang telah dan masih terus dilakukan oleh Kementerian Kesehatan adalah Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (PANDU PTM) di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Hal ini sebagai upaya dalam mendukung pencapaian target indikator Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024, yaitu meningkatnya kabupaten/kota yang melakukan pencegahan dan pengendalian PTM, dan mendukung pencapaian target SPM.

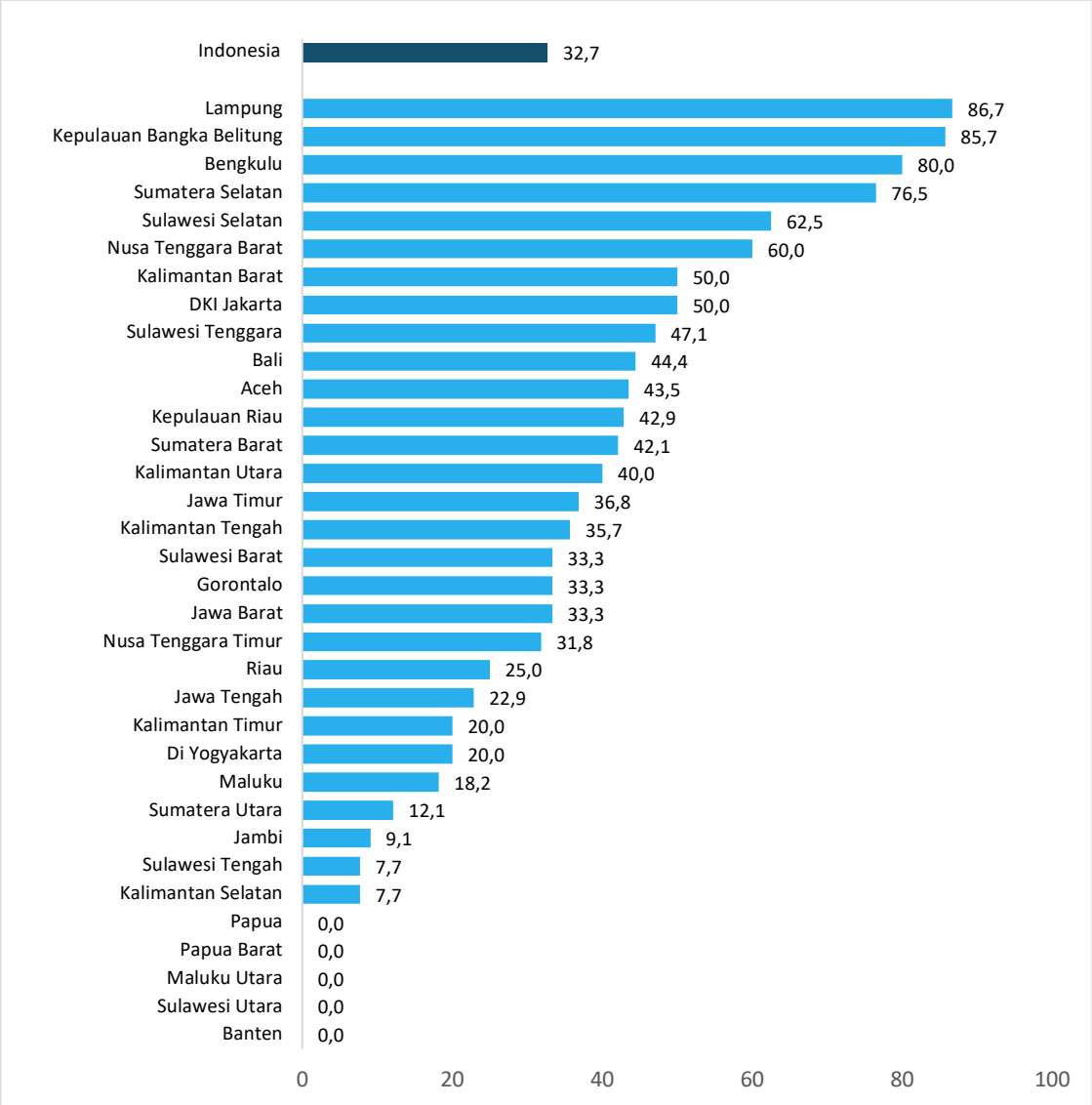
PANDU PTM di FKTP merupakan upaya pencegahan, pengendalian dan tatalaksana Hipertensi dan Diabetes Melitus serta PTM lainnya yang dilaksanakan secara komprehensif, terintegrasi dan berkelanjutan dengan pendekatan faktor risiko, menggunakan Algoritma PANDU PTM dan Tabel Prediksi risiko PTM.

Algoritma Pandu PTM merupakan alur pikir dalam melakukan pelayanan terpadu PTM di FKTP. Dalam algoritma dijelaskan tentang tahapan pelayanan bagi pengunjung puskesmas yang berusia 15 tahun keatas. Tahapan diawali dari identifikasi faktor risiko hingga diagnosis dan tata laksana yang dalam salah satu prosesnya menggunakan Tabel Prediksi Risiko PTM. Sedangkan dalam kaitan dengan tatalaksana penyakit yang bersifat spesifik, PANDU PTM tetap mengacu pada pedoman tata laksana penyakit yang berlaku.

Untuk memperkuat pelaksanaan PANDU PTM di daerah, Kementerian Kesehatan menetapkan indikator Renstra yaitu jumlah kabupaten/kota yang melakukan pelayanan terpadu (Pandu) penyakit tidak menular (PTM) di ≥ 80% puskesmas. Puskesmas Pandu PTM adalah Puskesmas yang melaksanakan pencegahan dan pengendalian PTM secara komprehensif dan terintegrasi melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP). Kabupaten/Kota dinilai telah menyelenggarakan PANDU PTM bila 80% atau lebih Puskesmas telah melakukan PANDU PTM.

Sampai dengan tahun 2021, sebanyak 168 kabupaten/kota atau 32,7% dari 514 kabupaten kota yang melakukan pelayanan terpadu PTM di ≥ 80% puskesmas. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2020 ketika hanya 13,6% kabupaten/kota yang telah menerapkan PANDU PTM.

GAMBAR 6.67
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA
MELAKSANAKAN PANDU PTM DI ≥ 80% PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

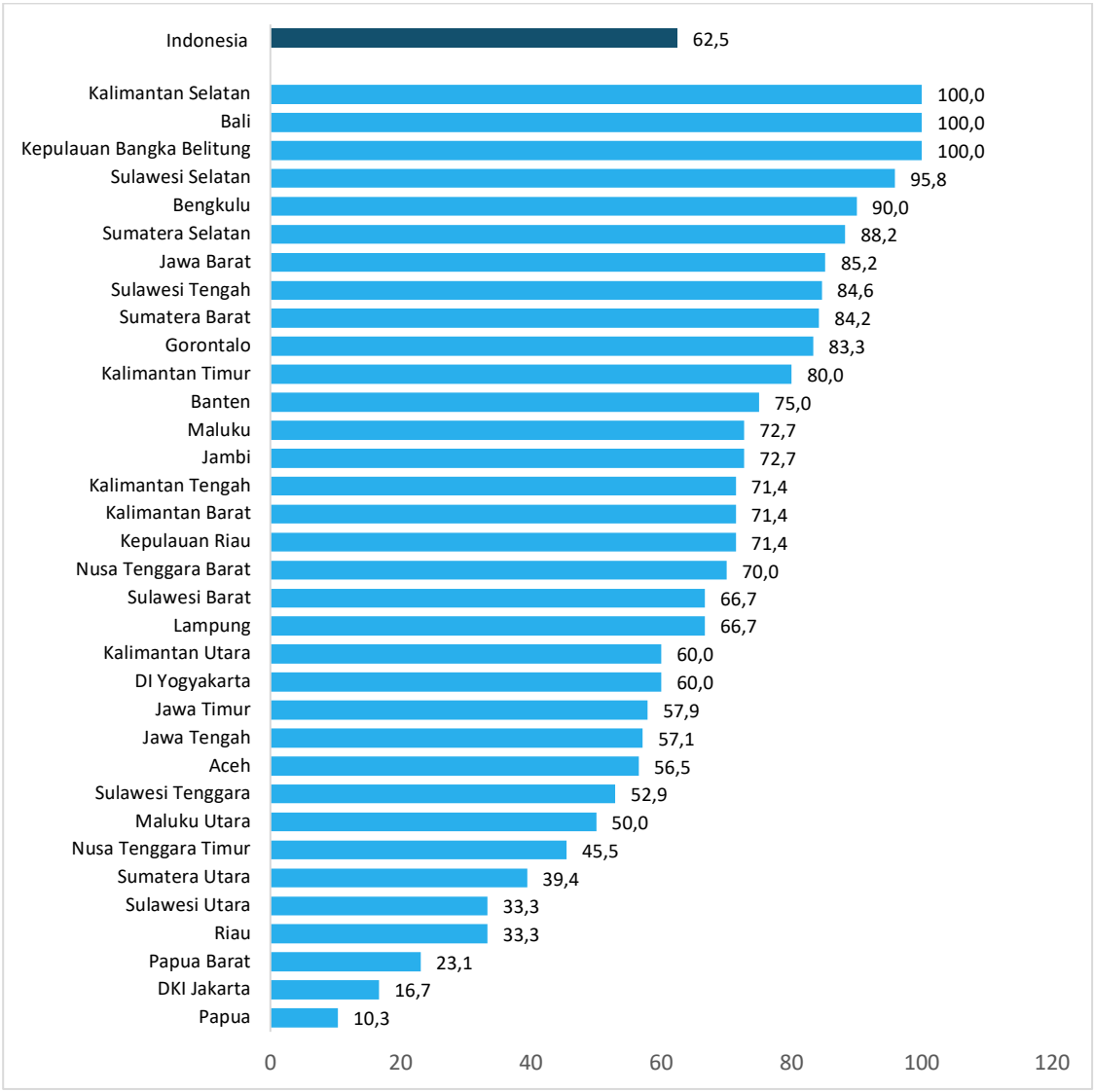
Terdapat lima provinsi yang tidak memiliki kabupaten dengan jumlah puskesmas menerapkan PANDU PTM ≥ 80%, yaitu Banten, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Sebanyak enam provinsi dengan capaian melebihi 50%, yaitu Provinsi Lampung, Kep. Bangka Belitung, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Sebagain besar wilayah di Indonesia, yaitu 23 provinsi atau 67,6% dari seluruh provinsi masih memiliki capaian kurang dari 50%. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masih diperlukan upaya untuk meningkatkan capaian indikator ini di sebagain besar provinsi.

2. Pengendalian Konsumsi Tembakau

Perilaku merokok merupakan salah satu faktor risiko yang diintervensi pada pengendalian penyakit tidak menular. Salah satu upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok yaitu melalui pengembangan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan mendorong terbentuknya peraturan dan kebijakan daerah serta implementasinya. Dengan indikator ini diharapkan dapat mendorong terciptanya manusia Indonesia yang sehat, bebas dari paparan asap rokok, berkualitas, dan produktif.

Untuk memperkuat implementasi KTR, Kementerian Kesehatan telah menetapkan indikator Renstra yaitu jumlah kabupaten/kota yang menerapkan KTR. Sebanyak 321 kabupaten/kota (62,5%) telah menerapkan KTR sampai dengan tahun 2021. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 285 kabupaten/kota.

GAMBAR 6.68
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI INDONESIA TAHUN 2021



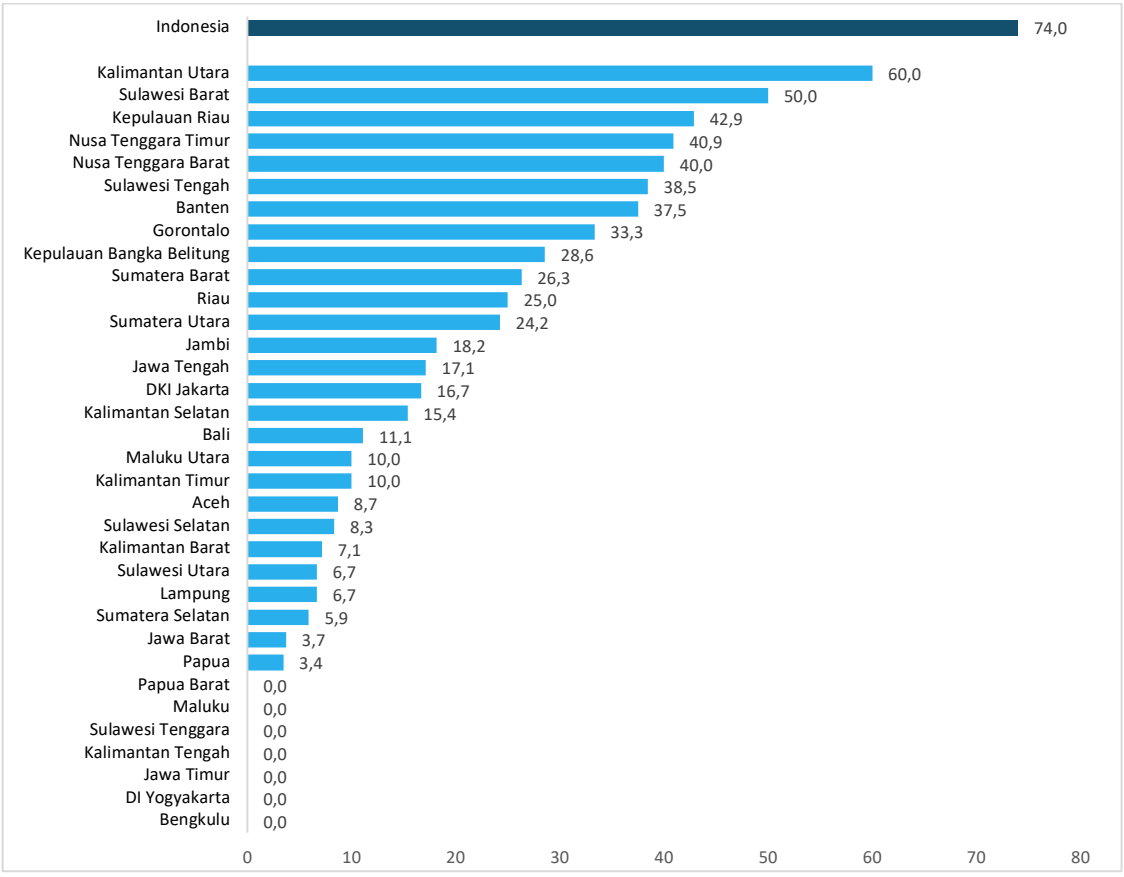
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Gambaran distribusi provinsi menunjukkan tiga provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya telah menerapkan KTR, yaitu Kalimantan Selatan, Bali, dan Kepulauan Bangka Belitung. Sebagain besar provinsi telah memiliki persentase melebihi 50%. Provinsi Papua memiliki capaian terendah sebesar 10,3%.

Meskipun terjadi peningkatan jumlah kabupaten/kota menerapkan KTR di tingkat nasional, namun jumlah ini belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 374 kabupaten/kota. Target yang tidak tercapai tersebut disebabkan belum semua pemerintah daerah kabupaten/kota memprioritaskan penerapan KTR yang terbukti masih rendahnya dukungan politis untuk penyusunan regulasi KTR. Upaya untuk meningkatkan capaian indikator ini tetap dilakukan melalui pengawasan secara berkesinambungan dan dibentuknya satuan tugas dalam implementasi kawasan tanpa rokok di daerah.

Selain penerapan KTR, pemerintah mengembangkan inovasi berupa Layanan Upaya Berhenti Merokok (UBM). Layanan ini merupakan upaya promotif, preventif dan tatalaksana pengendalian konsumsi rokok dengan membantu masyarakat untuk berhenti merokok dari gejala putus nikotin yang dilaksanakan di FKTP, salah satunya di puskesmas. Puskesmas layanan UBM adalah Puskesmas yang melaksanakan layanan konseling UBM dan melaporkan hasil kegiatan melalui Sistem Informasi PTM. Strategi ini ditempuh untuk menurunkan prevalensi perokok usia 10-18 tahun. Diharapkan, kabupaten/kota di Indonesia menyelenggarakan layanan UBM di ≥ 40% Puskesmas.

GAMBAR 6.69
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA
YANG MELAKSANAKAN LAYANAN UBM DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

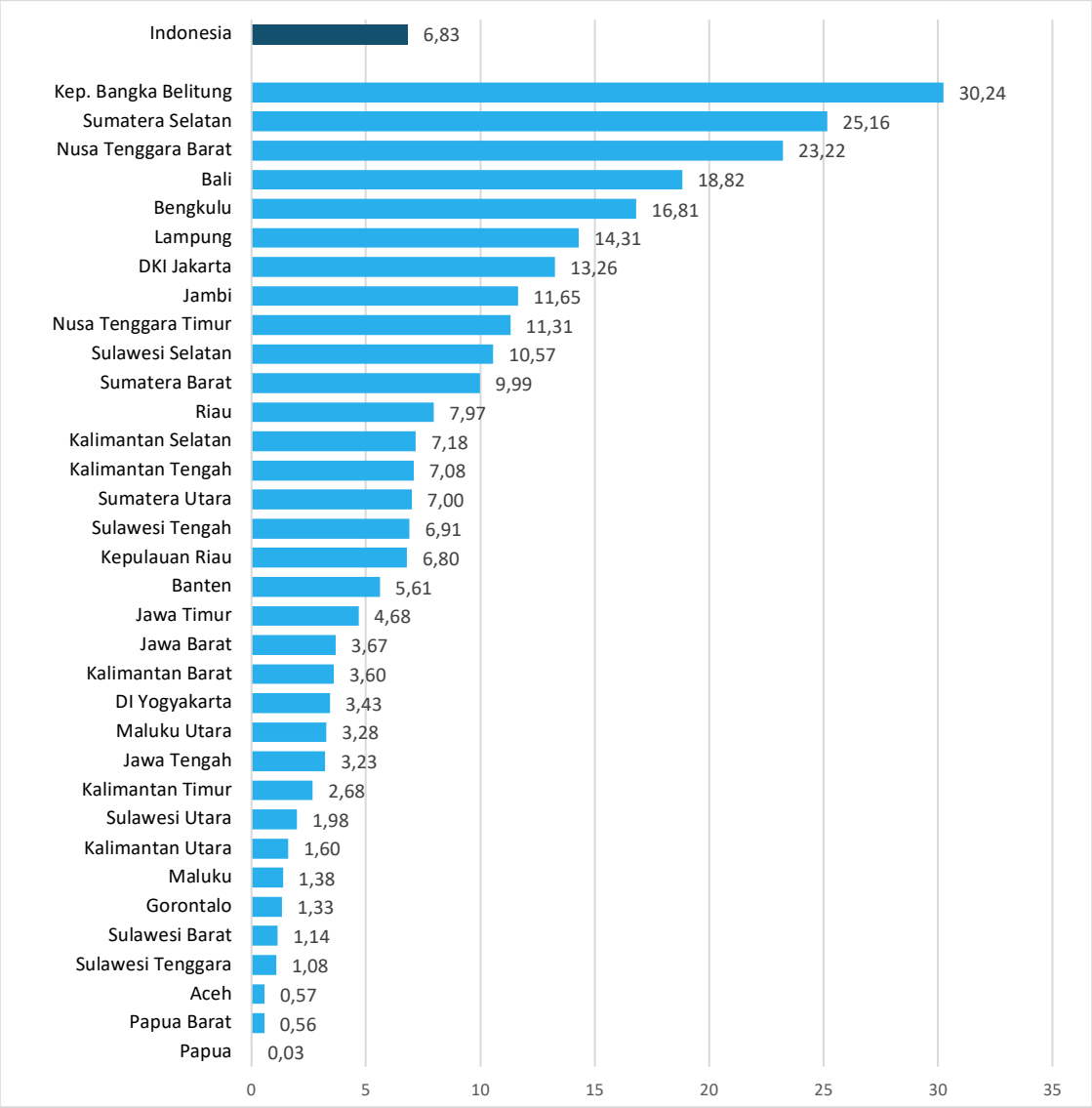
Pada tahun 2021, jumlah kabupaten/kota yang melaksanakan layanan UBM di ≥ 40% Puskesmas ada sebanyak 74 dari 100 kabupaten kota yang ditargetkan, artinya jumlah tersebut belum mencapai target indikator. Hal tersebut dikarenakan banyak daerah yang tidak menjalankan layanan UBM di masa pandemi COVID-19 dan rendahnya kepatuhan pelaporan kegiatan melalui SI PTM.

Sebanyak 79,4% atau 27 dari 34 provinsi telah menyelenggarakan layanan UBM walaupun masih belum optimal. Provinsi dengan kabupaten/kota terbanyak yang menyelenggarakan layanan UBM adalah Kalimantan Utara, namun disisi lain masih ada provinsi yang belum melaksanakan layanan UBM atau tidak melaporkan kegiatan melalui SI PTM seperti Papua Barat, Maluku, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, dan Bengkulu.

3. Deteksi Dini Kanker Leher Rahim dan Payudara

Kanker payudara dan kanker leher rahim merupakan dua kanker terbanyak di Indonesia. Kedua jenis kanker ini memiliki angka kematian yang tinggi yang disebabkan terlambatnya deteksi dini. Hampir 70 % pasien kanker dideteksi pada stadium lanjut. Hal ini sangat disayangkan, karena kanker leher rahim dapat ditemukan pada tahap sebelum kanker (lesi prakanker) dengan metode Inspeksi Visual Asam Asetat (IVA) atau *papsmear*. Deteksi dini kanker payudara dilakukan dengan metode Periksa Payudara Klinis (SADANIS), yaitu pemeriksaan klinis payudara yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Angka kematian dan tingginya biaya kesehatan dapat dikurangi dengan deteksi dini yang efektif.

GAMBAR 6.70
PERSENTASE PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM (IVA) DAN PAYUDARA TAHUN 2019-2021

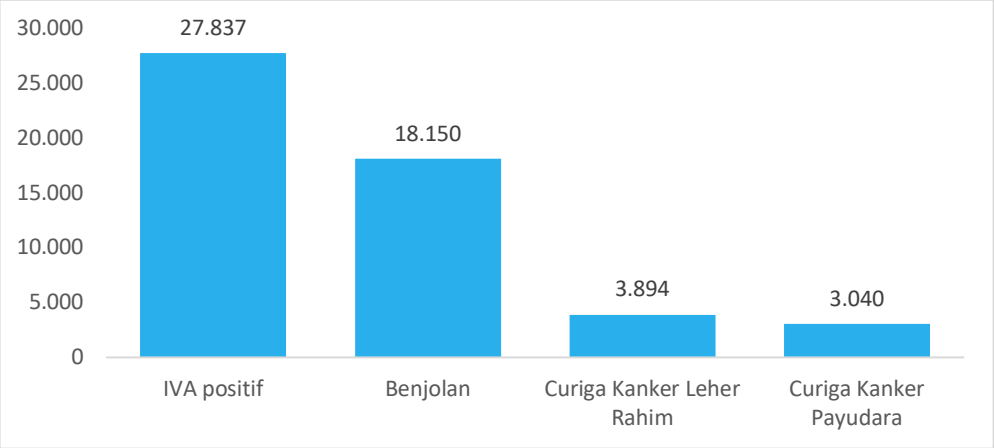


Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Sampai dengan tahun 2021, sebanyak 2.827.177 perempuan usia 30-50 tahun atau 6,83% dari sasaran telah menjalani deteksi dini kanker leher rahim dan kanker payudara dengan metode IVA dan SADANIS. Deteksi dini tertinggi dilaporkan oleh Provinsi Kep. Bangka Belitung sebesar 30,24%, diikuti oleh Sumatera Selatan sebanyak 25,16%, dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 23,22%. Sedangkan, provinsi dengan cakupan deteksi dini terendah yaitu Papua sebesar 0,03%, diikuti Papua Barat sebesar 0,56%, dan Aceh sebesar 0,57%.

Provinsi dengan cakupan deteksi dini yang rendah dikhawatirkan akan mengalami peningkatan angka kesakitan dan kematian akibat kanker leher rahim dan payudara. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk meningkatkan cakupan deteksi dini di wilayah dengan cakupan yang masih rendah.

GAMBAR 6.71
HASIL PEMERIKSAAN DETEKSI DINI KANKER LEHER RAHIM DAN KANKER PAYUDARA PADA PEREMPUAN USIA 30-50 TAHUN DI INDONESIA TAHUN 2019-2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Deteksi dini IVA dan SADANIS menjadi landasan untuk menentukan rujukan bagi pasien yang dicurigai memiliki kanker leher rahim maupun kanker payudara. Deteksi dini kanker leher Rahim dan payudara memiliki empat kategori hasil, yaitu IVA Positif, Benjolan, Curiga Kanker Leher Rahim, dan Curiga Kanker Payudara. Pada keempat hasil deteksi dini, IVA positif memiliki jumlah tertinggi sebesar 27.837.

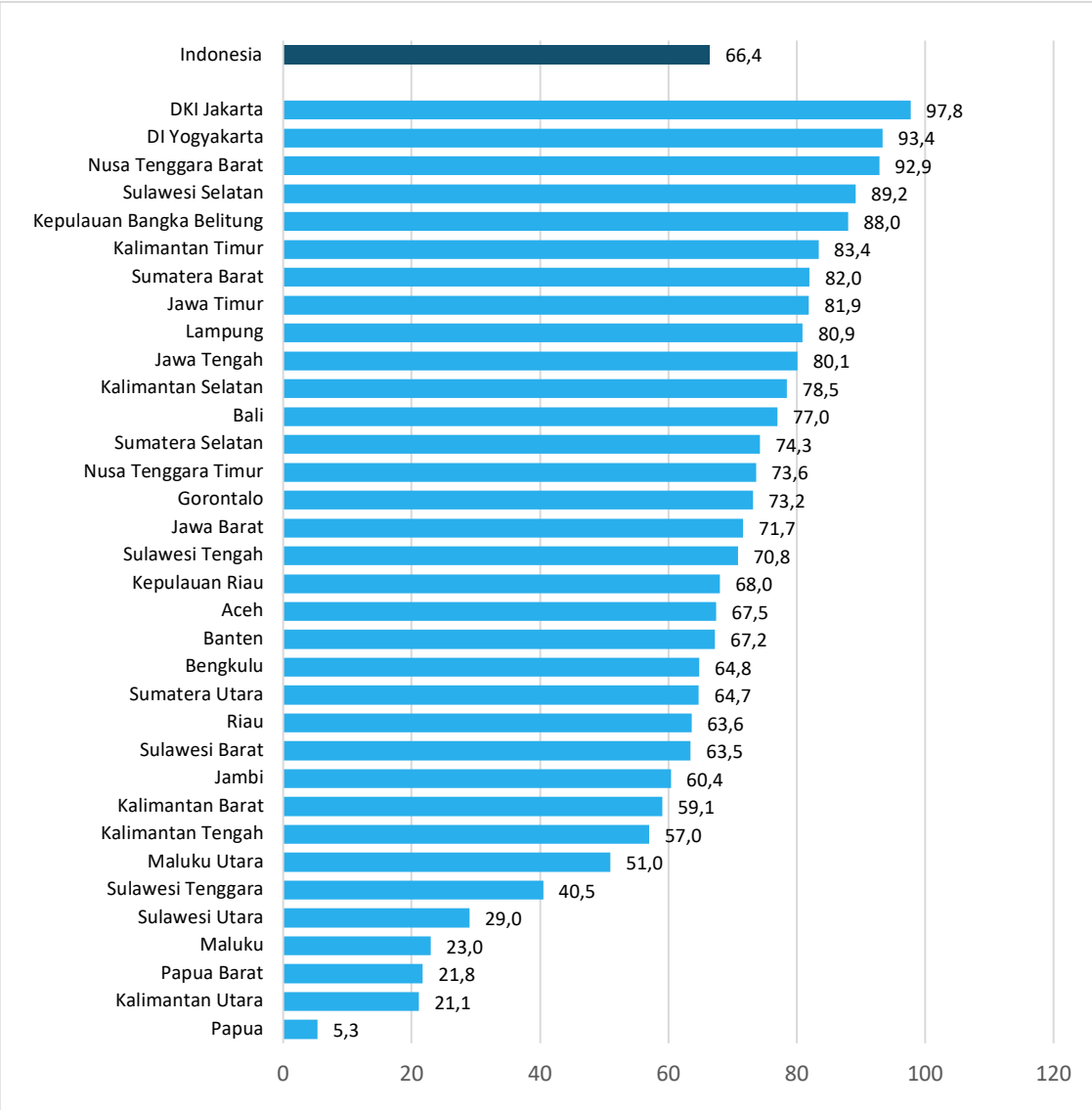
4. Desa Melaksanakan Posbindu

Posbindu merupakan salah satu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang berorientasi kepada upaya promotif dan preventif dalam pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan penilaian. Masyarakat dilibatkan sebagai agen pengubah sekaligus sumber daya yang menggerakkan Posbindu sesuai dengan kemampuan dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Posbindu berperan dalam pengendalian PTM melalui deteksi dini dan skrining faktor risiko penyakit tidak menular seperti pengukuran tekanan darah, pengukuran gula darah sewaktu, deteksi dini kanker, pengukuran berat badan (BB), tinggi badan (TB), lingkar perut, dan Indeks Massa Tubuh (IMT).

GAMBAR 6.72

PERSENTASE DESA MELAKSANAKAN POSBINDU DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Pada tahun 2021, dari 82.752 desa/kelurahan yang ditargetkan, sebanyak 54.986 desa/kelurahan di Indonesia yang memiliki Posbindu atau setara dengan 66,4% dari sasaran. Provinsi DKI Jakarta memiliki capaian tertinggi sebesar 97,8% desa/kelurahan memiliki Posbindu. Sedangkan Provinsi Papua memiliki persentase terendah sebesar 5,3%. Dari seluruh provinsi, sebagain besar memiliki capaian di atas 50%. Seluruh provinsi dengan capaian kurang dari 50% berada di wilayah timur Indonesia.

5. Deteksi Dini Gangguan Indera

Upaya penanggulangan gangguan indera dilaksanakan dengan mengutamakan upaya promotif dan preventif, tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Sejalan dengan enam pilar transformasi sistem kesehatan, khususnya untuk mewujudkan transformasi layanan primer pada pengendalian penyakit tidak menular, maka upaya deteksi dini gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran merupakan program utama dalam rangka penemuan

kasus secara dini. Upaya ini dilakukan agar kasus yang ditemukan segera mendapatkan intervensi atau penanganan dini untuk menekan angka kesakitan, kematian dan disabilitas akibat gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran.

Sasaran program mengacu pada siklus hidup dan pendekatan keluarga, sehingga pelaksanaan deteksi dini dilakukan terintegrasi dan berkolaborasi dengan berbagai lintas program dan lintas sektor terkait. Di era desentralisasi, deteksi dini gangguan indera diharapkan dapat dipenuhi oleh pemerintah kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan warganya.

Deteksi dini gangguan indera adalah kegiatan deteksi dini gangguan penglihatan dan atau gangguan pendengaran yang dilaksanakan untuk seluruh kelompok umur pada sedikitnya 40% penduduk di kabupaten/kota. Data deteksi dini ganguan indera diperoleh dari pencatatan dan pelaporan pada pelayanan kesehatan maupun dari kegiatan pengelola program di Kemenkes dan lintas sektor.

Kegiatan deteksi dini gangguan penglihatan dan pendengaran menyasar semua kelompok umur. Kegiatan ini ditetapkan melalui indikator Renstra yaitu jumlah kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada $\geq$ 40% penduduk. Pada tahun 2021, sebanyak 206 kabupaten/kota ditargetkan merealisasikan kegiatan ini.

Pada tahun 2021 terdapat 98 kabupaten/kota melaksanakan deteksi dini gangguan indera pada $\geq$ 40% penduduk atau sebesar 47,6% dari kabupaten/kota target. Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan tahun 2020 ketika hanya 7 kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini. Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah kabupaten/kota tertinggi yang melaksanakan deteksi dini, yaitu sebesar 24 kabupaten/kota. Terdapat 10 provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya belum melaksanakan deteksi dini pada $\geq$ 40% penduduk, yaitu Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sepuluh provinsi tersebut membutuhkan intervensi dari pemerintah pusat maupun daerah agar pada tahun-tahun berikutnya kegiatan deteksi dini gangguan indera dapat dilaksanankan.

E. KESEHATAN JIWA DAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA)

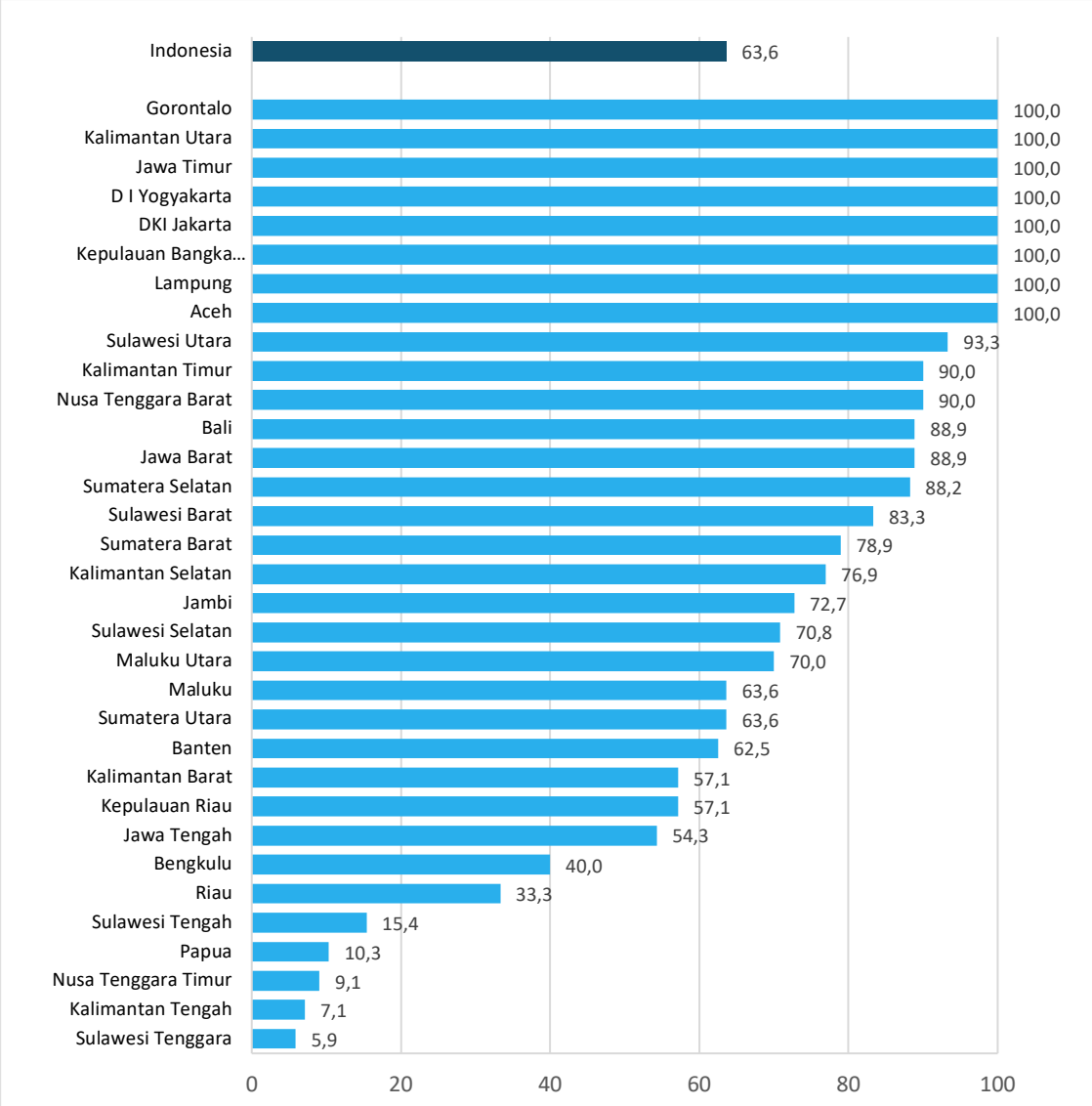
1. Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Masalah Kesehatan Jiwa Dan Penyalahgunaan NAPZA

Deteksi merupakan langkah awal yang penting untuk membawa orang yang sakit mendapatkan pertolongan medis. Semakin cepat suatu penyakit terdeteksi, dalam hal ini gangguan/penyakit jiwa, akan semakin cepat proses diagnosis dan semakin cepat pula pengobatan dapat dilakukan sehingga diharapkan akan memotong perjalanan penyakit dan mencegah hendaya (abnormalitas fungsi seseorang yang dikaitkan dengan perilaku) dan disabilitas.

Deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan penyalahguna NAPZA di lakukan terhadap seluruh kelompok usia dengan menggunakan instrumen *Strengths and Difficulties Questionnaire* (*SDQ*) untuk anak usia 4-18 tahun dan/atau *Self-Reporting Questionnaire* (*SRQ*)

20 untuk usia diatas 18 tahun, serta *Alcohol, Smoking and Substances Invovement Screening Test* (*ASSIST*) yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan/atau guru terlatih.

GAMBAR 6.73
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI KESEHATAN JIWA DAN NAPZA
TAHUN 2021



Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Dari 380 kabupaten/kota yang ditargetkan pada tahun 2021 terdapat 327 kabupaten/kota yang memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA. Menurut provinsi, terdapat 8 provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA yaitu Gorontalo, Kalimantan Utara, Jawa Timur, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung dan Aceh. Namun masih terdapat 1 dari 34

provinsi yang seluruh kabupaten/kotanya belum memiliki 25% puskesmas yang melaksanakan deteksi dini kesehatan jiwa dan penyalahgunaan NAPZA yaitu Provinsi Papua Barat.

2. Penyalahguna Napza yang Mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Medis

Penyalahguna NAPZA mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis di fasilitas Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yaitu puskesmas, rumah sakit umum, Badan Narkotika Nasional (BNN), POLRI, RSJ/RSKO, dan LAPAS/RUTAN. Berdasarkan peraturan No.HK.01.07/Menkes.701 Tahun 2018 terdapat sebanyak 754 IPWL dengan sebaran sebagai berikut: puskesmas sebanyak 310, RSU sebanyak 180, BNN sebanyak 142, POLRI sebanyak 77, RSJ/RSKO sebanyak 33, LAPAS/RUTAN sebanyak 12.

Pemerintah mentargetkan 10.000 orang penyalahguna NAPZA yang mendapat layanan rehabilitasi medis pada tahun 2021 dan berhasil dicapai 10.149 penyalahguna NAPZA yang mendapat layanan rehabilitasi medis dari 33 provinsi. Target dan capaian penyalahguna NAPZA yang mendapat layanan rehabilitasi medis merupakan penjumlahan kumulatif dari tahun sebelumnya.

3. Pelayanan Kesehatan Jiwa

a. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang Mendapatkan Layanan

ODGJ berat adalah orang yang didiagnosis oleh psikiater, dokter, psikolog klinis sebagai penderita Skizofrenia atau Psikosis Akut dan harus mendapat layanan dan penanganan di fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas, Klinik, RSU dengan Layanan Keswa, RSJ).

ODGJ berat mendapat pelayanan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan, berupa: pemeriksaan kesehatan jiwa (wawancara psikiatrik dan pemeriksaan status mental), memberikan informasi dan edukasi, tatalaksana pengobatan dan atau melakukan rujukan bila diperlukan.

Berdasarkan laporan dari dinas kesehatan tahun 2021 Persentase ODGJ berat yang mendapat layanan sebesar 65%. Dari 30 provinsi yang melaporkan, capaian yang diatas 100% sebanyak 6 provinsi yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Tengah.

b. Persentase Penderita Depresi Pada Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Mendapatkan Pelayanan

Depresi merupakan salah satu gangguan *mood* yang ditandai dengan:
Gejala mayor (gejala utama):

1. Afek (perubahan perasaan) depresif;
2. Kehilangan minat;
3. Kehilangan energi yang ditandai dengan cepat lelah
4. Gejala minor (gejala tambahan):
5. Konsentrasi atau perhatian yang berkurang;

6. Harga diri maupun kepercayaan diri yang berkurang;
7. Rasa bersalah atau rasa tidak berguna;
8. Memiliki pandangan tentang masa depan yang suram serta pesimistis;
9. Gagasan atau perbuatan membahayakan diri atau bunuh diri;
10. Tidur terganggu;
11. Nafsu makan berkurang;

Gejala tersebut berlangsung terus menerus selama kurun waktu minimal 2 minggu (PPDGJ III). Dikatakan mengalami gangguan depresi apabila memenuhi kriteria 2 gejala mayor ditambah dengan 3 gejala minor.

Secara umum, capaian indikator persentase penderita depresi pada penduduk di atas 15 tahun yang mendapat layanan pada tahun 2021 masih sangat rendah. Capaian seluruh provinsi kurang dari 10%. Dari sebanyak 30 provinsi yang melapor indikator persentase penderita depresi pada penduduk di atas 15 tahun yang mendapat layanan, tertinggi dicapai Provinsi Lampung, Jambi, dan Sumatera Barat masing-masing sebesar 1,9%, 1,5%, dan 1,2%.

c. Persentase Gangguan Mental Emosional Pada Penduduk Diatas 15 Tahun yang Mendapatkan Layanan

Gangguan mental emosional (GME) bukan diagnosis gangguan jiwa. GME adalah perubahan dalam pikiran, perasaan dan perilaku yang dapat menganggu aktivitas sehari-hari, tapi tidak dijumpai tanda dan gejala gangguan dalam daya nilai realita. Hendaya atau disfungsi dalam pekerjaan dan kehidupan sehari-hari juga tidak di temukan. Secara umum GME juga dapat diartikan adanya tekanan emosional atau masalah kesehatan jiwa.

Berdasarkan laporan hasil Riskesdas 2018 diketahui prevalensi GME pada penduduk Indonesia sebesar 9,8%. Hal tersebut menunjukkan masih tingginya masalah GME di Indonesia. Prevalensi tertinggi terjadi pada kelompok usia > 75 tahun sebesar 15,8% dan terendah pada usia 25 – 24 tahun sebesar 8,5%. Sedangkan menurut jenis kelamin prevalensi pada perempuan (12,1%) lebih tinggi dibanding laki-laki (7,6%). Meskipun tidak menyebabkan kematian secara langsung namun GME dapat mempengaruhi aktifitas sehari-hari yang berdampak terhadap menurunnya produktifitas.

Secara umum, capaian indikator persentase GME pada penduduk di atas 15 tahun yang mendapat layanan pada tahun 2021 masih sangat rendah. Capaian seluruh provinsi kurang dari 10%. Dari sebanyak 32 provinsi yang melapor indikator persentase GME pada penduduk di atas 15 tahun yang mendapat layanan, tertinggi dicapai Provinsi Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, dan Jambi masing-masing sebesar 2,5%, 2,0%, dan 1,9%.

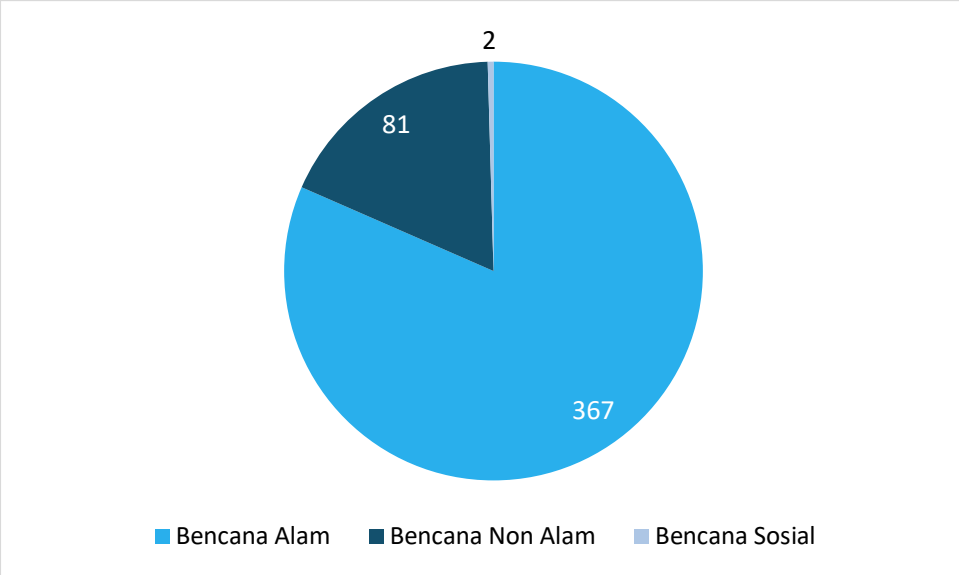
F. DAMPAK KESEHATAN AKIBAT BENCANA

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana dikategorikan menjadi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Sedangkan, bencana sosial

adalah bencana yang diakibatkan oleh manusia meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Di Indonesia terjadi 450 krisis kesehatan selama tahun 2021. Jumlah kejadian krisis kesehatan tahun 2021 menurun jika dibandingkan dengan kejadian tahun 2020, yaitu sebanyak 518 krisis kesehatan. Pada tahun 2017 terdapat definisi baru untuk krisis kesehatan pada Sistem Informasi Penanggulangan Krisis kesehatan, yaitu harus ada pernyataan kedaruratan oleh kepala daerah atau jumlah populasi terdampak minimal 50 orang dan terdapat korban/pengungsi.

GAMBAR 6.74
PERSENTASE KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI BENCANA
DI INDONESIA TAHUN 2021

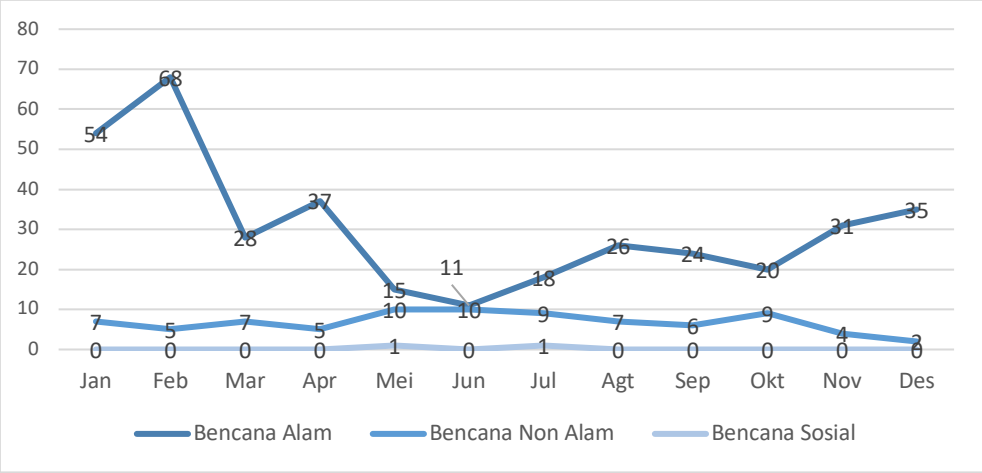


Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2022

Di Indonesia kejadian krisis kesehatan akibat bencana alam merupakan yang paling sering terjadi pada tahun 2021 dengan persentase 81,6%. Sisanya, sebanyak 18,0% bencana non alam dan 0,4% bencana sosial.

Pada tahun 2021, banjir merupakan krisis kesehatan yang sering terjadi seperti tahun sebelumnya. Frekuensi banjir sebanyak 208 kejadian (46,2%) dan meliputi 29 dari 34 provinsi di Indonesia. Kejadian terbesar kedua selama tahun 2021 adalah angin puting beliung sebanyak 46 kejadian (10,2%) yang meliputi 15 provinsi.

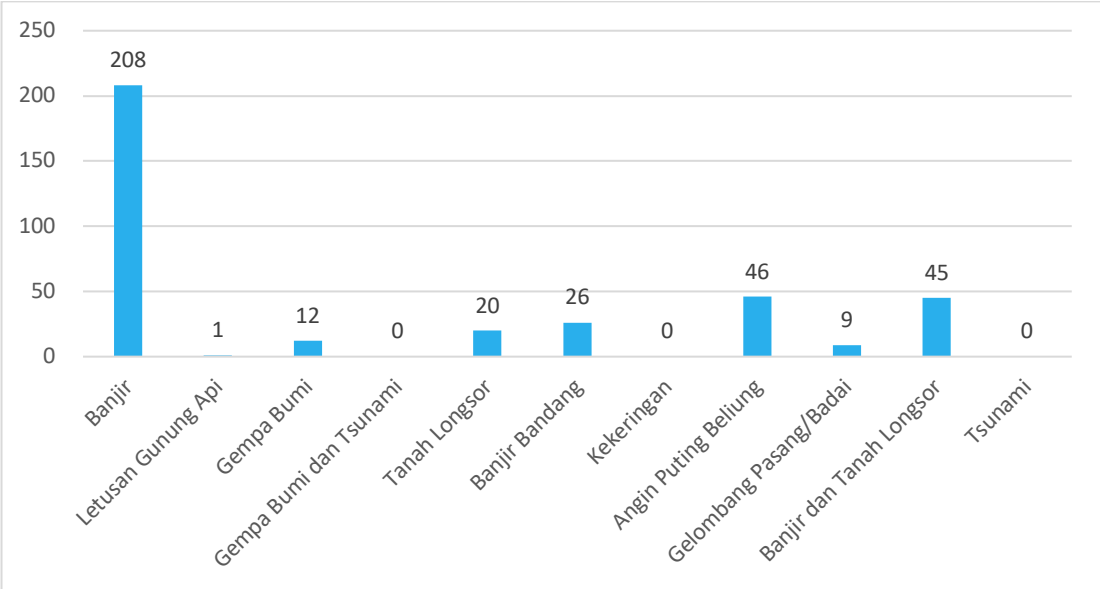
GAMBAR 6.75
JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT KATEGORI DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2022

Pada grafik di atas dapat dilihat bahwa jumlah krisis kesehatan akibat bencana alam tertinggi terjadi pada bulan Februari yang sebagian besarnya adalah banjir. Sedangkan jumlah bencana non alam tertinggi di bulan Juni-Juli yang sebagian besarnya adalah kebakaran, hal ini terjadi karena cuaca panas dan kering di musim kemarau. Selain itu, bencana sosial terjadi pada bulan Juli dan September. Secara keseluruhan, jumlah bencana terbanyak terjadi di bulan Februari dan terendah di bulan Juni.

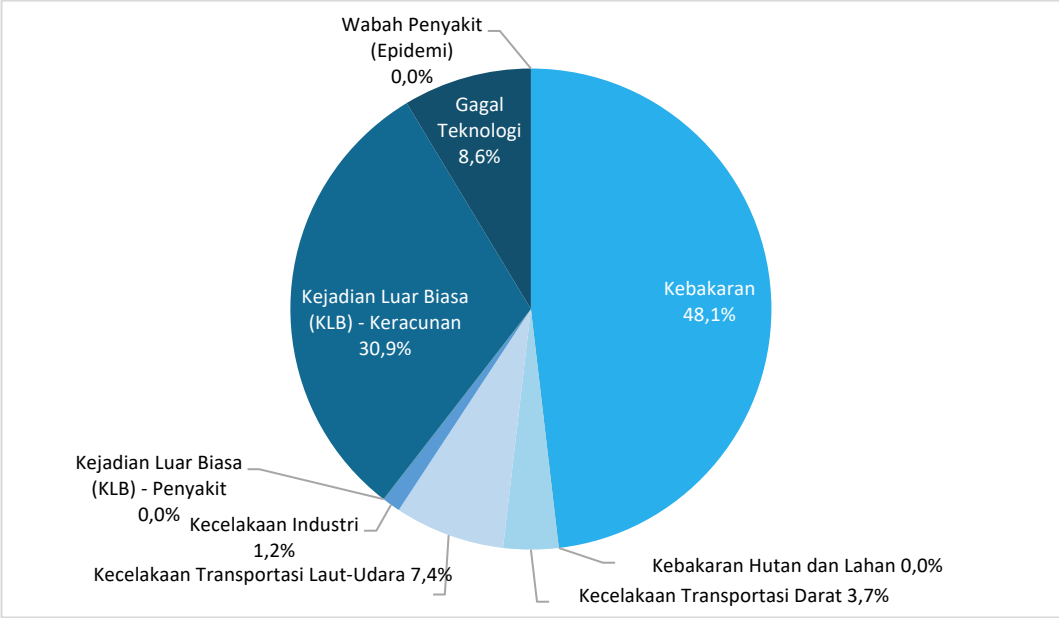
GAMBAR 6.76
JUMLAH KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA ALAM DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2022

Bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia tahun 2021 yaitu bencana banjir 208 bencana (46,2%) diikuti angin puting beliung 46 bencana (10,2%), dan banjir & tanah longsor 45 bencana (10,0%).

GAMBAR 6.77
PERSENTASE KRISIS KESEHATAN AKIBAT BENCANA NON ALAM
DI INDONESIA TAHUN 2021



Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2022

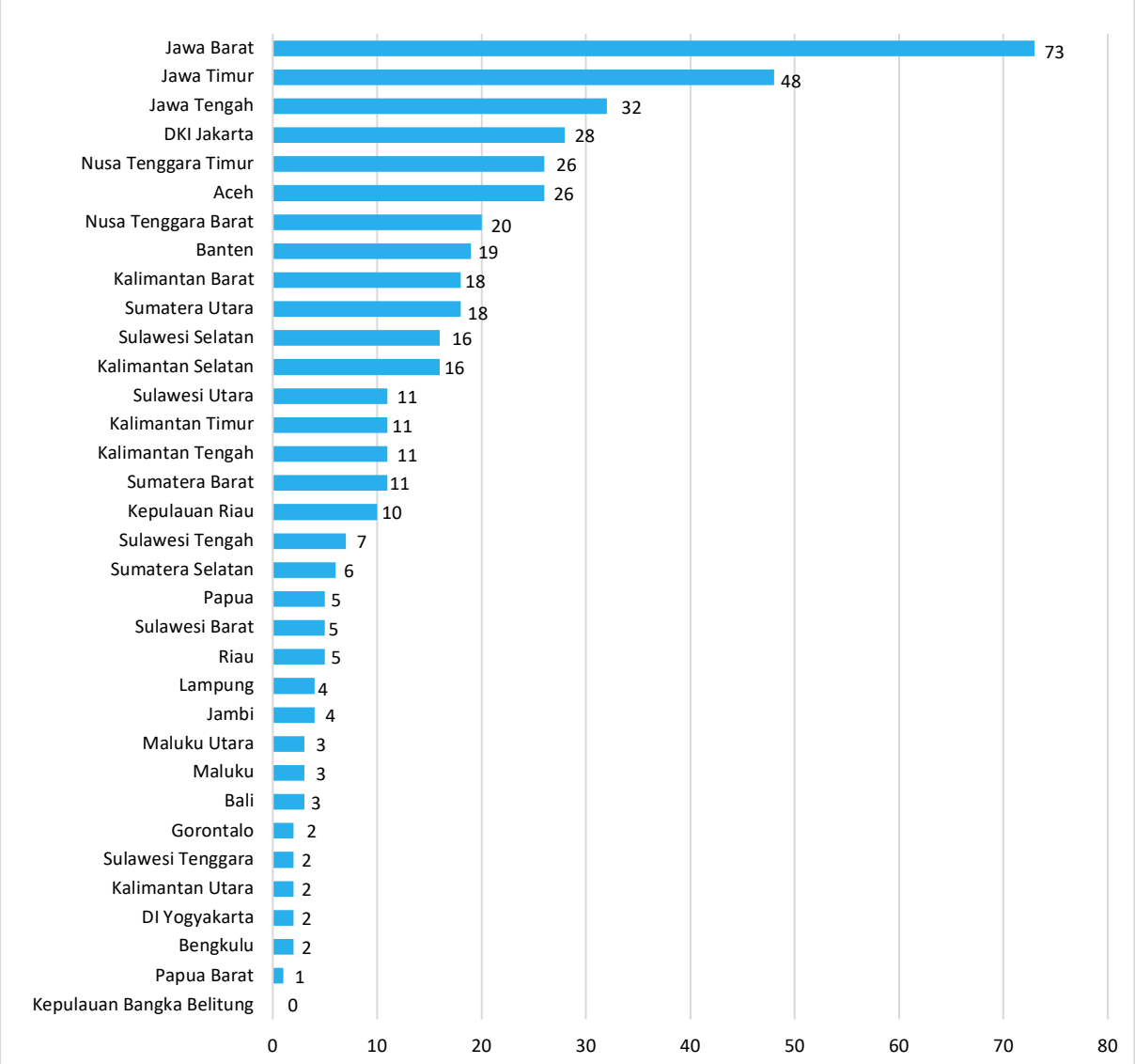
Bencana non alam yang paling sering terjadi di Indonesia pada tahun 2021 yaitu kebakaran hutan 48,1% dari total bencana non alam dan diikuti oleh kejadian luar biasa (KLB)-Keracunan (30,9%) dan gagal teknologi (8,6%).

Di antara ketiga jenis bencana, bencana sosial termasuk paling jarang terjadi dibandingkan dengan jenis bencana lainnya. Pada tahun 2021 terjadi 2 bencana sosial yaitu aksi teror dan sabotase.

GAMBAR 6.78

JUMLAH KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI

TAHUN 2021



Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes, 2022

Pada tahun 2021, Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang terbanyak mengalami kejadian bencana yaitu sebanyak 73 kejadian, diikuti Jawa Timur dengan 48 kejadian dan Jawa Tengah dengan 32 kejadian bencana, sedangkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada kejadian bencana. Pada tahun 2020, Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah juga termasuk provinsi dengan kejadian bencana terbanyak.

TABEL 6.1
JUMLAH KEJADIAN BENCANA DAN JUMLAH KORBAN YANG DITIMBULKAN
TAHUN 2021

No	Jenis Bencana	Frekuensi	Jumlah Provinsi	Meninggal	Luka Berat/ Rawat Inap	Luka Ringan/Rawat Jalan	Pengungsi
1	Banjir	208	29	124	178	35.702	395.041
2	Letusan Gunung Api	1	1	51	21	4.091	10.400
3	Gempa Bumi	12	8	121	304	10.637	109.538
4	Gempa Bumi dan Tsunami	0					
5	Tanah Longsor	20	7	50	4	27	3.392
6	Banjir Bandang	26	10	120	66	730	8.189
7	Kekeringan	0					
8	Angin Puting Beliung	46	15	4	20	77	329
9	Gelombang Pasang/Badai	9	5	7	0	92	3.012
10	Banjir dan Tanah Longsor	45	15	106	74	5.563	94.990
11	Tsunami	0					
Jumlah Bencana Alam		**367**	**90**	**583**	**667**	**56.919**	**624.891**
1	Kebakaran	39	14	42	14	133	8.152
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	0					
3	Kecelakaan Transportasi Darat	3	3	35	27	60	0
4	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	6	5	134	1	310	0
5	Kecelakaan Industri	1	1	1	6	30	940
6	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit	0					
7	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan	25	13	6	625	1.477	0
8	Gagal Teknologi	7	4	7	144	221	943
9	Wabah Penyakit (Epidemi)	0					
Jumlah Bencana Non Alam		**81**	**40**	**225**	**817**	**2.231**	**10.035**
1	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial						
2	Aksi Teror dan Sabotase	2	2	4	1	1	128
Jumlah Bencana Sosial		**2**	**2**	**4**	**1**	**1**	**128**
Indonesia		**450**		**812**	**1.485**	**59.151**	**635.054**

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes 2022

Pada tahun 2021, kejadian bencana yang paling banyak menyebabkan korban meninggal adalah bencana alam yaitu sebanyak 583 orang. Dari bencana alam tersebut, banjir dan gempa bumi menyebabkan kematian terbanyak sebesar 124 dan 121 orang. Sedangkan, bencana yang paling banyak menimbulkan luka berat/rawat inap yaitu bencana non alam sebanyak 817 dan luka ringan sebanyak 2.231 orang. Dari bencana non alam tersebut, KLB keracunan menyebabkan luka berat/rawat inap terbanyak sebesar 625 orang dan menyebabkan luka ringan terbanyak sebesar 1.477 orang. Bencana alam menyebabkan jumlah pengungsi paling banyak yaitu sebesar 624.891 pengungsi, dimana 395.041 pengungsi diantaranya disebabkan karena banjir.

G. PELAYANAN KESEHATAN HAJI

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya kepada jemaah haji agar dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran Agama Islam. Pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang diberikan kepada jemaah haji, bukan saja dari aspek umum dan ibadah, tetapi juga dari aspek kesehatan jemaah haji itu sendiri.

Dalam rangka menjamin kesiapan jemaah sebelum keberangkatan, diperlukan adanya kesiapan baik fisik, mental maupun spiritual. Sejak tahun tahun 2018, penyelenggaraan kesehatan haji Indonesia mulai menerapkan konsep *Istithaah* yang ditandai dengan terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang *Istithaah* Kesehatan Jemaah Haji. Permenkes ini membawa konsekuensi bahwa penyelenggaraan kesehatan haji mengedepankan pembinaan kesehatan untuk memperkuat pelayanan dan perlindungan kesehatan haji. Untuk itu upaya pembinaan sudah harus dilakukan sedini mungkin yang diawali dengan pemeriksaan kesehatan awal. Berbagai faktor risiko kesehatan dikendalikan melalui pembinaan kesehatan yang berjenjang sampai pada tahap penetapan *istithaah* kesehatan jemaah haji di tingkat kabupaten.

Penyelenggaraan kesehatan haji di Arab Saudi dilaksanakan oleh Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) dan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Bidang Kesehatan yang terdiri dari Tim Asistensi, Tim Manajerial, Tim Kuratif Rehabilitatif (TKR), Tim Promotif Preventif (TPP), Tim Gerak Cepat (TGC), serta Tim Pendukung Kesehatan (TPK). PPIH Arab Saudi Bidang Kesehatan dengan paradigma penguatan promotif dan preventif tanpa mengesampingkan pelayanan kesehatan (kuratif) serta pola pendekatan deteksi dini kasus kesehatan dan pelayanan *emergency* respon. Penyelenggaraan kesehatan haji dengan konsep tersebut merupakan konsep operasional kesehatan haji yang telah dilaksanakan pada tahun 2016 -2019.

1. PEMERIKSAAN KESEHATAN JEMAAH HAJI

Wabah penyakit COVID-19 yang awalnya hanya terjadi di Cina pada Desember 2019, kemudian dalam waktu singkat menyebar ke negara-negara lain di seluruh dunia, sehingga organisasi kesehatan dunia (World Health Organization/WHO) menetapkan status Pandemi COVID-19. Hal itu menyebabkan pemerintah Arab Saudi pada tahun 2020 dan 2021 menutup sementara pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah haji yang berasal dari luar negeri, ibadah haji hanya dibolehkan untuk penduduk yang bermukim di wilayah Arab Saudi. Meski demikian, pemerintah Indonesia terus berupaya untuk menyiapkan kesehatan dan kebugaran jemaah haji asal Indonesia selama status pandemi tahun 2020-2021 yang dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pembinaan kesehatan bagi jemaah haji.

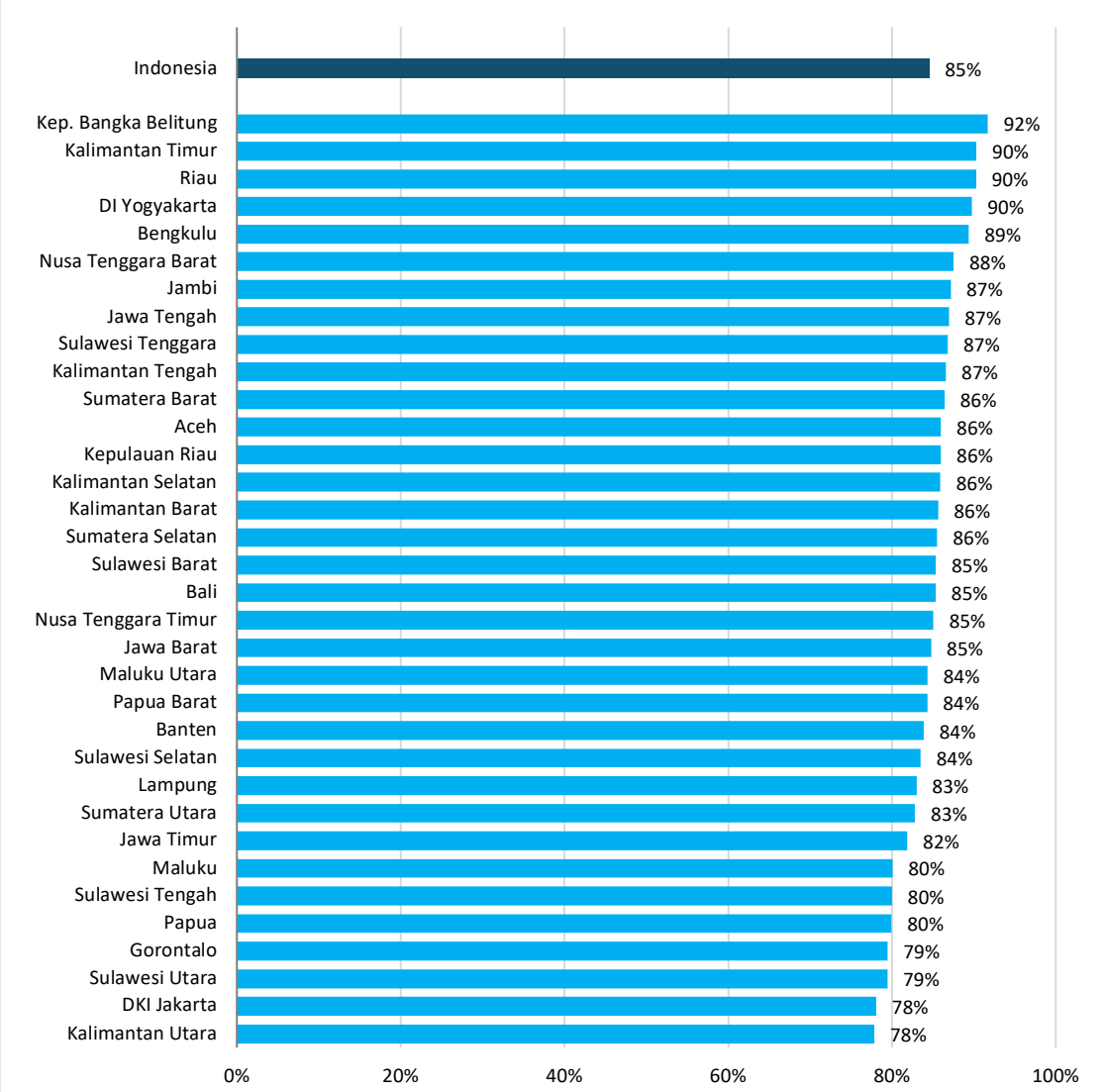
Indikator penyelenggaraan kesehatan haji adalah cakupan hasil pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji yang diinput ke dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu Bidang Kesehatan (Siskohatkes) 1 bulan sebelum operasional haji. Pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jemaah haji telah dimulai pada awal tahun 2021. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Istithaah Kesehatan Haji, terdapat tiga tahapan pemeriksaan kesehatan untuk jamaah haji. Setiap proses pemeriksaan dan pembinaan kesehatan jamaah haji menuju istithaah dilakukan oleh tim penyelenggara kesehatan haji di kabupaten/kota.

Pemeriksaan kesehatan tahap pertama merupakan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan kepada calon jamaah haji pada saat hendak mendaftar untuk memperoleh nomor porsi. Pemeriksaan ini menjadi pemeriksaan dasar jamaah haji yang dapat dilaksanakan di puskesmas atau klinik yang telah ditetapkan sebagai fasilitas pelayanan kesehatan untuk jamaah haji. Pemeriksaan tahap kedua dilakukan ketika jamaah haji berada dalam masa tunggu dan dilakukan paling lambat tiga bulan sebelum pemberangkatan, sedangkan pemeriksaan

tahap ketiga dilakukan untuk menetapkan status kesehatan jamaah haji laik atau tidak laik terbang merujuk kepada standar keselamatan penerbangan internasional dan/atau peraturan kesehatan internasional.

Pada tahun 2021 Kementerian Kesehatan melakukan pemeriksaan terhadap 195.142 calon jemaah dengan capaian pemeriksaan 85%. Provinsi dengan capaian tertinggi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 92% dan terendah adalah Kalimantan Utara dan DKI Jakarta sebesar 78%. Capaian hasil pemeriksaan pertama jemaah haji berdasarkan tempat pemeriksaan adalah sebagai berikut.

GAMBAR 6.79
CAPAIAN PEMERIKSAAN JEMAAH HAJI
MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN TAHUN 2021



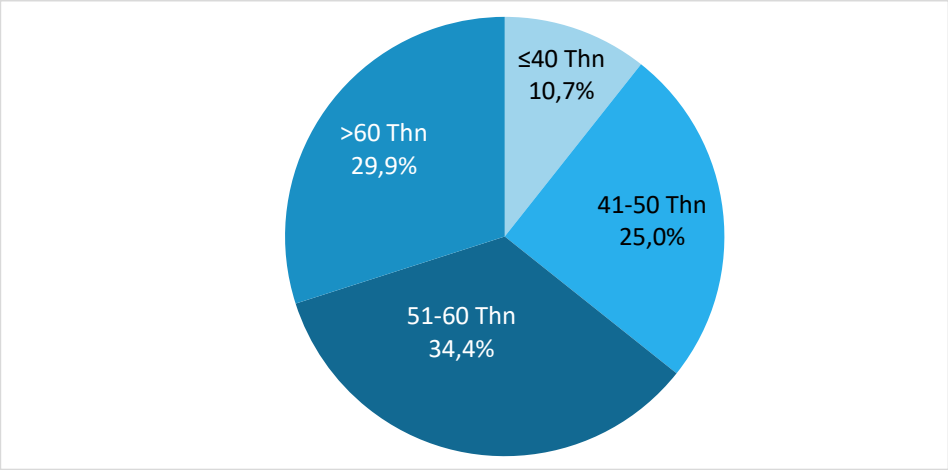
Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

Pemeriksaan terhadap calon jemaah haji tahun 2021 dilakukan sejak enam sampai satu bulan sebelum keberangkatan. Meski akhirnya tidak diberangkatkan, namun pemeriksaan kesehatan tetap dilakukan. Data dan informasi lebih rinci mengenai pemeriksaan jemaah haji terdapat pada Lampiran 64.c.

2. KONDISI JEMAAH HAJI INDONESIA

Jemaah haji Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 244.903 orang. Menurut kelompok umur, sebagian besar jemaah berada pada kelompok umur 51-60 tahun, yaitu sebanyak 84.143 jemaah (34,4%).

GAMBAR 6.80
JEMAAH HAJI INDONESIA MENURUT KELOMPOK UMUR TAHUN 2021



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

Gambaran jemaah haji menurut karakateristik umur menunjukkan bahwa persentase terbanyak jemaah haji yaitu pada kelompok usia 51-60 tahun (34,4%), >60 tahun (29,9%), dan 41-50 tahun (25,0%). Kelompok populasi pra-usila (usia lanjut) dan usila merupakan kelompok rentan terhadap kejadian kesakitan dan kematian selama penyelenggaran ibadah haji.

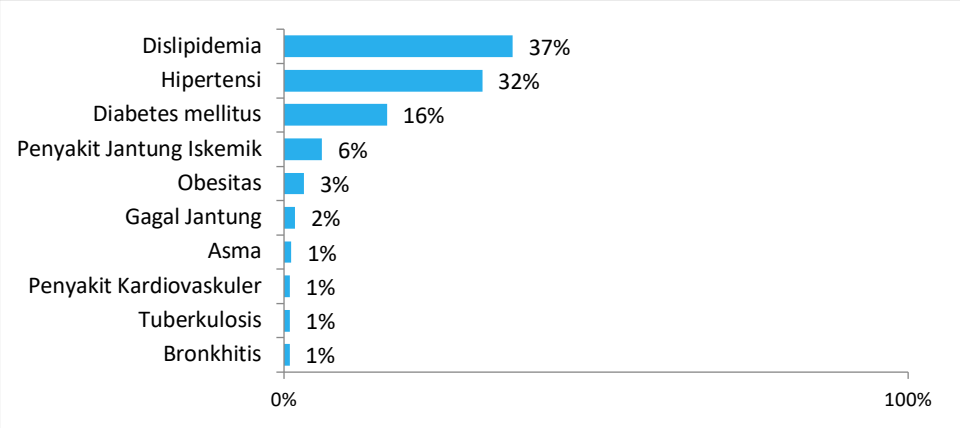
3. POLA MORBIDITAS DAN KEBUGARAN JEMAAH HAJI

Istithaah Kesehatan Jemaah Haji adalah kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jemaah haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pembinaan *istithaah* kesehatan haji yang merupakan kegiatan terpadu, terencana, terstruktur, dan terukur, diawali dengan pemeriksaan kesehatan pada saat mendaftar jemaah haji sampai masa keberangkatan ke Arab Saudi.

Melalui implementasi *istithaah*, faktor risiko kesehatan dapat diketahui sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan sejak dini. Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, jemaah haji tergolong risiko tinggi (risti) jika memenuhi tiga kriteria, yaitu berusia ≥60 tahun dengan penyakit, berusia <60 tahun dengan penyakit, dan berusia >60 tahun tanpa penyakit.

Selama masa pandemi COVID-19 tahun 2020 hingga tahun 2021, jemaah haji yang telah mendapatkan gilirannya untuk diberangkatkan tetap melakukan pemeriksaan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah. Hal ini dilakukan agar kondisi kesehatan jemaah dapat terus terpantau. Dari hasil pemeriksaan kesehatan, dapat dilihat distribusi sepuluh penyakit terbanyak yang diderita oleh jemaah haji Indonesia pada tahun 2021.

GAMBAR 6.81
10 PENYAKIT RISIKO TINGGI TERBANYAK PADA JEMAAH HAJI REGULER TAHUN 2021

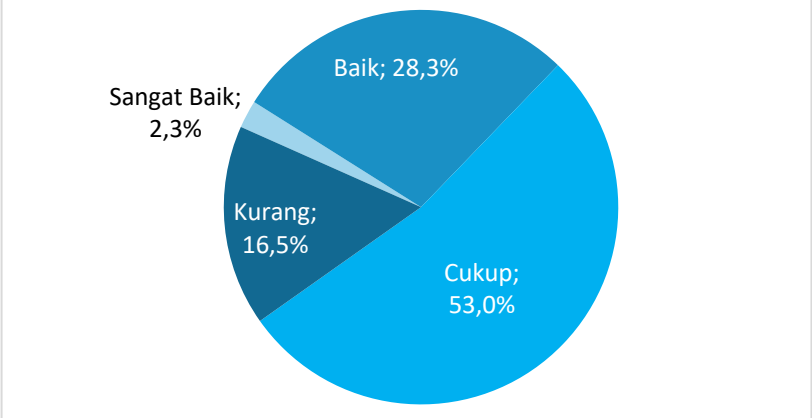


Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

Penyakit terbanyak yang diderita oleh jemaah haji Indonesia pada tahun 2021 yaitu dislipidemia (37%), hipertensi (32%) dan diabetes melitus (16%). Penyakit lainnya seperti penyakit jantung iskemik, obesitas, gagal jantung, dan asma, memiliki persentase dibawah 10%.

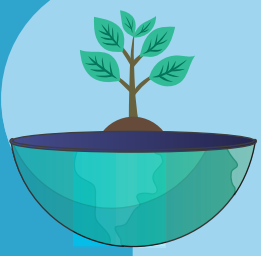
Selain berupaya untuk menekan angka kesakitan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan juga berupaya untuk melakukan pengukuran kebugaran jemaah haji. Pada tahun 2021, terdapat 121.399 jemaah haji yang dilakukan pengukuran kebugaran dari total seluruh jemaah haji reguler.

GAMBAR 6.82
PROPORSI PENGUKURAN KEBUGARAN JEMAAH HAJI REGULER TAHUN 2021



Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

Proporsi hasil pengukuran kebugaran terhadap jemaah haji diperoleh hasil sebanyak 53,0% jemaah memiliki status kebugaran cukup, 28,3% jemaah memiliki status kebugaran baik, 16,5% jemaah memiliki status kebugaran kurang baik, dan hanya 2,3% jemaah yang memiliki status kebugaran sangat baik. Data dan informasi lebih rinci terkait penyelenggaraan ibadah haji dapat dilihat pada lampiran 64.a-64.e.



Bab VII.
KESEHATAN LINGKUNGAN



BAB VII. KESEHATAN LINGKUNGAN

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menegaskan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum, harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan, diantaranya limbah (cair, padat, dan gas), sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan, vektor penyakit, zat kimia berbahaya, kebisingan yang melebihi ambang batas, radiasi, air yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi.

Menurut WHO, kesehatan lingkungan meliputi seluruh faktor fisik, kimia, dan biologi dari luar tubuh manusia dan segala faktor yang dapat mempengaruhi perilaku manusia. Kondisi dan kontrol dari kesehatan lingkungan berpotensial untuk mempengaruhi kesehatan. Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan menyatakan bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.

Kualitas lingkungan yang sehat ditentukan melalui pencapaian atau pemenuhan Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan. Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan ditetapkan pada media lingkungan yang meliputi air, udara, tanah, pangan, sarana dan bangunan, serta vektor dan binatang pembawa penyakit. Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban mewujudkan media lingkungan yang memenuhi Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan yang dilakukan oleh setiap pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Pencapaian tujuan penyehatan lingkungan merupakan akumulasi pelaksanaan kegiatan dari berbagai lintas sektor, peran swasta dan masyarakat dimana pengelolaan kesehatan lingkungan merupakan penanganan yang paling kompleks. Kegiatan tersebut sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu dari hulu yang berasal dari kebijakan dan pembangunan fisik dari berbagai lintas sektor ikut serta berperan (Perindustrian, Lingkungan Hidup, Pertanian, Pekerjaan Umum- Perumahan Rakyat dan lainnya) hingga ke hilir yaitu dampak kesehatan. Kementerian Kesehatan sendiri fokus kepada pengelolaan dampak kesehatan.

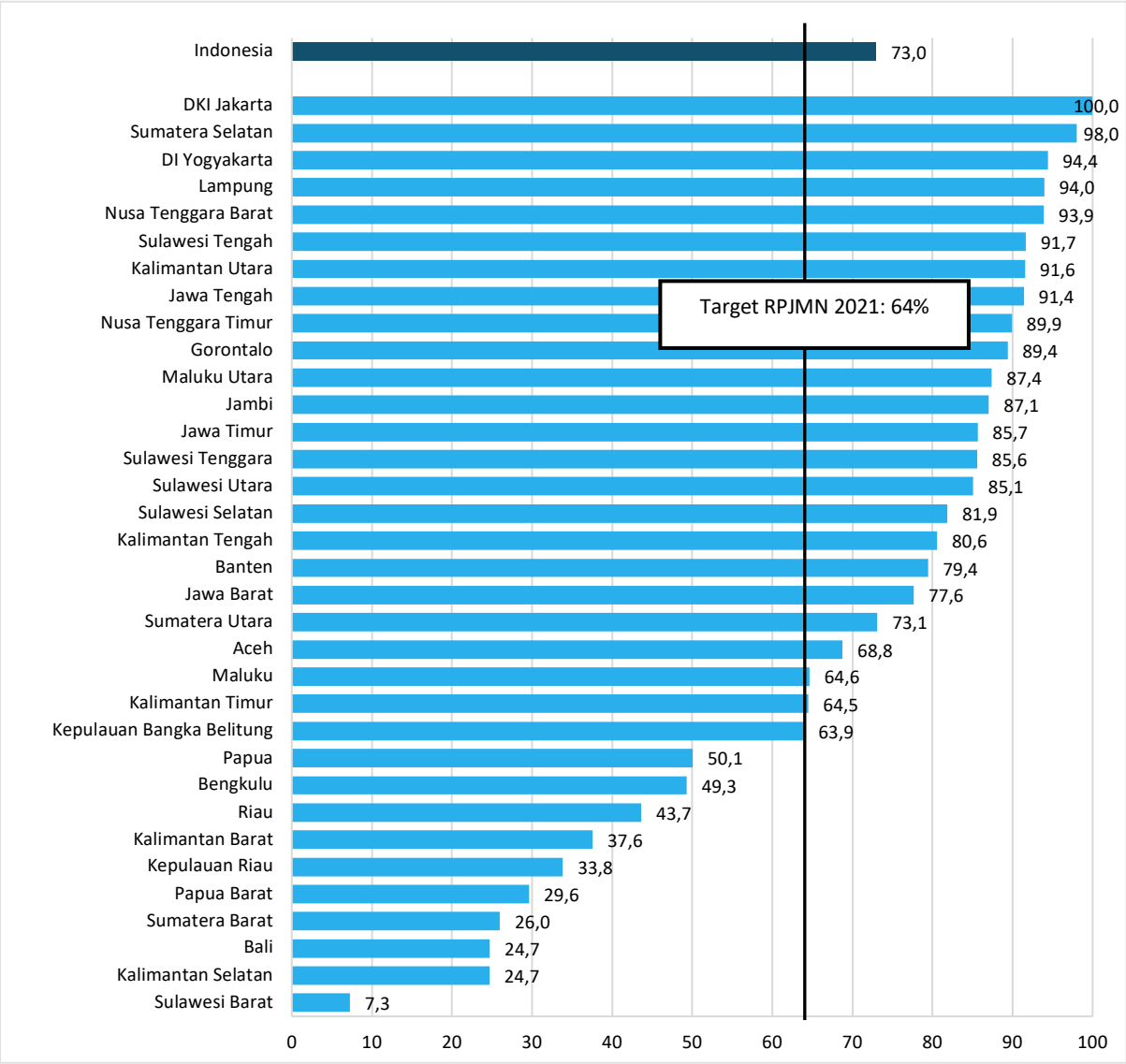
A. AIR MINUM

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum, air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi inspeksi sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium, rekomendasi, dan tindak lanjut. Kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dalam pengawasan kualitas air minum adalah Inspeksi Kesehatan

Lingkungan atau IKL. Pelaksanaan IKL dilakukan oleh tenaga sanitarian puskesmas, kader kesehatan lingkungan, atau kader lain di desa yang telah mendapatkan pelatihan praktis pemantauan kualitas sarana air minum.

Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat, diperlukan pengawasan kualitas air minum baik secara eksternal maupun internal. Pengawasan kualitas air minum secara eksternal dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) khusus untuk wilayah kerja KKP. Pengawasan secara internal dilakukan oleh pelaksana penyelenggara air minum yaitu Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, Badan Usaha Swasta, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau individual yang melakukan kegiatan penyediaan air minum.

GAMBAR 7.1
PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Pada tahun 2021, sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar sebanyak 25.918 sarana (73,0%). Provinsi dengan persentase tertinggi sarana air minum yang diawasi sesuai standar yaitu DKI Jakarta (100%), Sumatera Selatan (98,0%), dan DI Yogyakarta (94,4%). Sedangkan Provinsi terendah yaitu Sulawesi Barat (7,3%), Kalimantan Selatan dan Bali (24,7%) kemudian Sumatera Barat (26,0%). Persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar tersebut sudah memenuhi target RPJMN 2021 yaitu sebesar 64% (Gambar 7.1). Rincian lebih lengkap mengenai persentase sarana air minum yang diawasi/diperiksa kualitas air minumnya sesuai standar dapat dilihat di Lampiran 72.a.

Rumah tangga harus memiliki akses air minum layak dan bersih dalam mendukung kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kebutuhan air minum, tidak hanya dilihat dari kuantitasnya tetapi juga dari kualitas air minum. Pemenuhan kebutuhan air minum di rumah tangga dapat diukur dari akses air minum layak.

Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) yang dipublikasikan melalui Statistik Indonesia tahun 2022, konsep rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak adalah:

1. Jenis sumber air minum utama yang digunakan oleh rumah tangga meliputi leding, air terlindungi, dan air hujan. Air terlindungi mencakup sumur bor/pompa, sumur terlindung dan mata air terlindung;
2. Jenis sumber air minum utama yang digunakan oleh rumah tangga berupa air kemasan, maka rumah tangga dikategorikan memiliki akses air minum layak jika sumber air untuk mandi/cuci berasal dari leding, sumur bor/pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan.

TABEL 7.1

PERSENTASE RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR UTAMA YANG DIGUNAKAN UNTUK MINUM DAN TIPE DAERAH TAHUN 2021

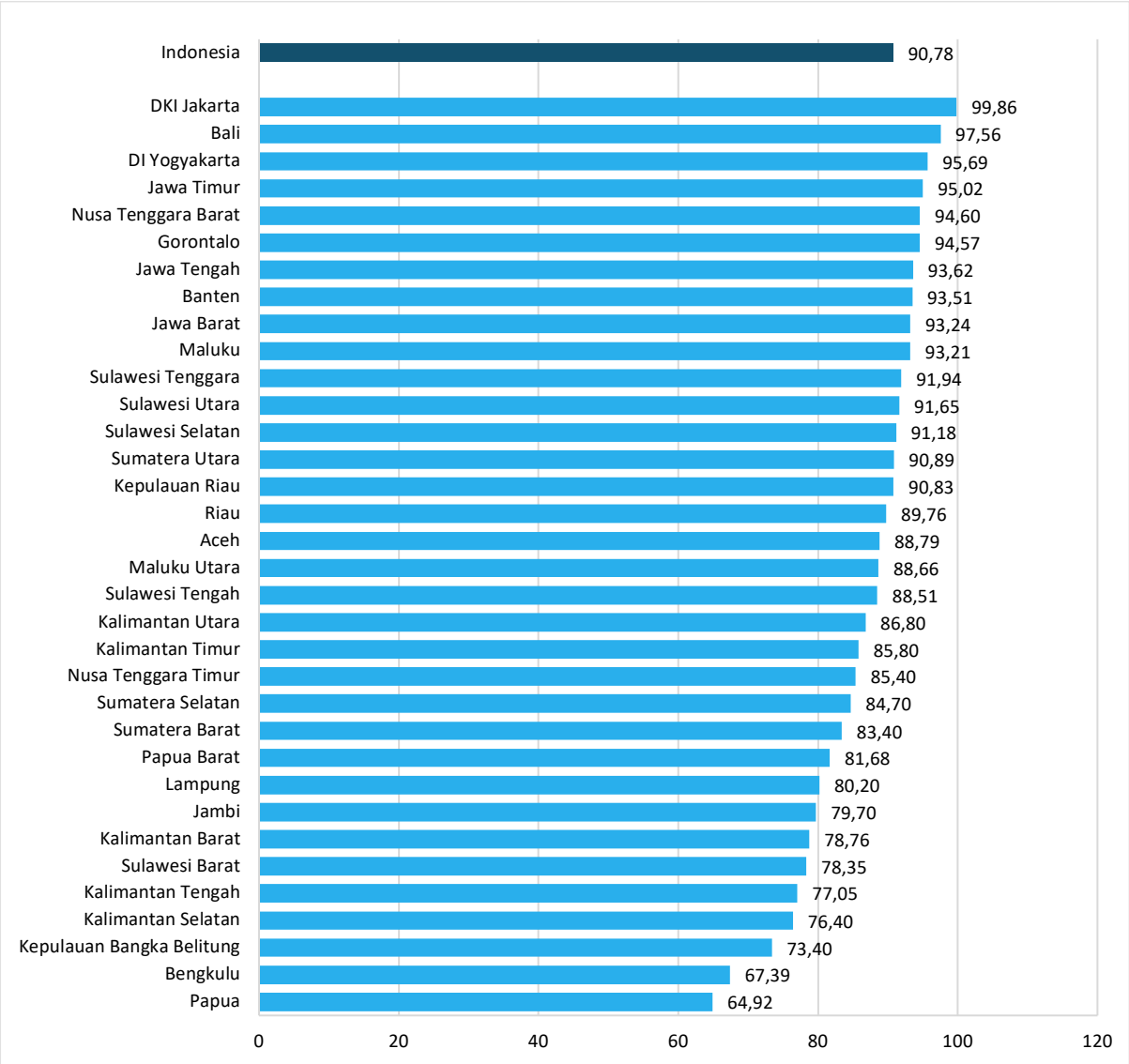
No	Sumber Air Minum	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
1	Air Kemasan Bermerk, Air Isi Ulang	52,93	21,28	39,27
2	Leding	10,74	6,44	8,88
3	Sumur Bor/Pompa	17,71	17,47	17,61
4	Sumur Terlindung	11,30	20,63	15,33
5	Sumur Tak Terlindung	1,14	5,01	2,81
6	Mata Air Terlindung, Mata Air Tak Terlindung	5,11	22,27	12,52
7	Air Permukaan	0,15	2,29	1,07
8	Air Hujan	0,85	4,52	2,44
9	Lainnya	0,06	0,10	0,07
Total		100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2021

Data dari BPS yang dipublikasikan melalui Statistik Kesejahteraan Rakyat, 2021, secara nasional menunjukkan sumber air minum utama yang paling banyak digunakan rumah tangga untuk minum adalah air kemasan bermerk, air isi ulang (39,27%), sumur bor/pompa (17,61%), dan sumur terlindung (15,33%). Daerah perkotaan air kemasan bermerk, air isi ulang merupakan sumber air minum utama rumah tangga yang paling banyak digunakan (52,93%) sedangkan daerah perdesaan

sumber air minum utama rumah tangga yang paling banyak digunakan mata air terlindung, mata air tak terlindung (22,27%). Secara rinci, data tersebut dapat dilihat pada tabel 7.1.

GAMBAR 7.2
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK
TAHUN 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2022

Secara nasional persentase rumah tangga dengan akses air minum layak sebesar 90,78% (Gambar 7.2). Provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga dengan akses air minum layak yaitu DKI Jakarta (99,86%), Bali (97,56%), dan DI Yogyakarta (95,69%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Papua (64,92%), Bengkulu (67,39%), dan Kepulauan Bangka Belitung (73,40%). Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 72.b.

B. AKSES SANITASI LAYAK

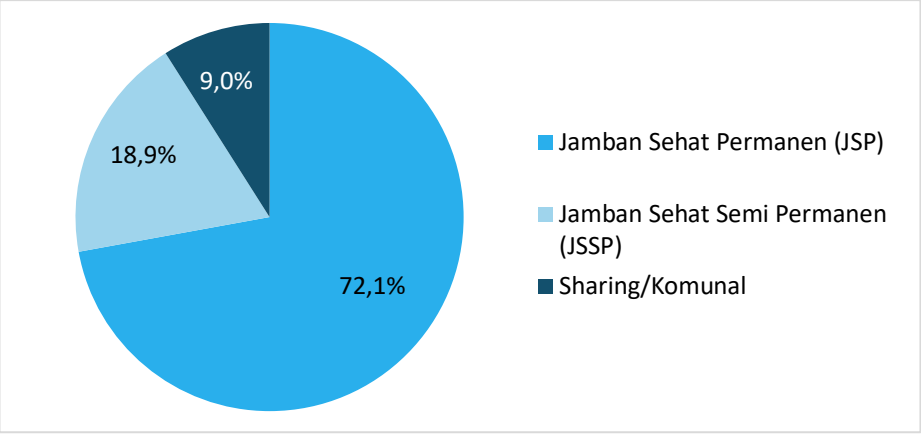
Sanitasi yang baik merupakan elemen penting yang menunjang kesehatan manusia. Definisi sanitasi dari WHO merujuk kepada penyediaan sarana dan pelayanan pembuangan limbah kotoran manusia seperti *urine* dan *faeces*. Istilah sanitasi juga mengacu kepada pemeliharaan kondisi higienis melalui upaya pengelolaan sampah dan pengolahan limbah cair. Sanitasi berhubungan dengan kesehatan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Buruknya kondisi sanitasi akan berdampak negatif di banyak aspek kehidupan, mulai dari turunnya kualitas lingkungan hidup masyarakat, tercemarnya sumber air minum bagi masyarakat, meningkatnya jumlah kejadian diare dan munculnya beberapa penyakit.

Menurut Panduan 5 Pilar STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), jamban sehat adalah jamban yang memenuhi kriteria bangunan dan persyaratan kesehatan. Persyaratan kesehatan yang dimaksud adalah tidak mengakibatkan terjadinya penyebaran bahan-bahan yang berbahaya bagi manusia akibat pembuangan kotoran manusia dan dapat mencegah vektor pembawa untuk menyebarkan penyakit pada pemakai dan lingkungan sekitarnya.

Bangunan jamban disebut sehat apabila memenuhi kriteria bangunan jamban sehat yang terdiri dari:

1. Bangunan atas jamban (dinding dan/atau atap)
   Bangunan atas jamban berfungsi untuk melindungi pengguna dari gangguan cuaca dan gangguan lainnya.
2. Bangunan tengah jamban
   Lubang pembungan kotoran berbentuk leher angsa. Pada daerah sulit air, lubang dapat dibuat tanpa kontruksi leher angsa tetapi harus diberi tutup. Lantai jamban terbuat dari bahan kedap air, tidak licin, dan memiliki saluran pembuangan air bekas ke sistem pembuangan air limbah (SPAL).
3. Bangunan bawah
   Bangunan bawah sebagai penampung, pengolah, dan pengurai kotoran/tinja. Bangunan bawah dapat berupa tangki septik dan cubluk. Cubluk hanya boleh digunakan di pedesaan dengan kepadatan penduduk rendah dan sulit air.

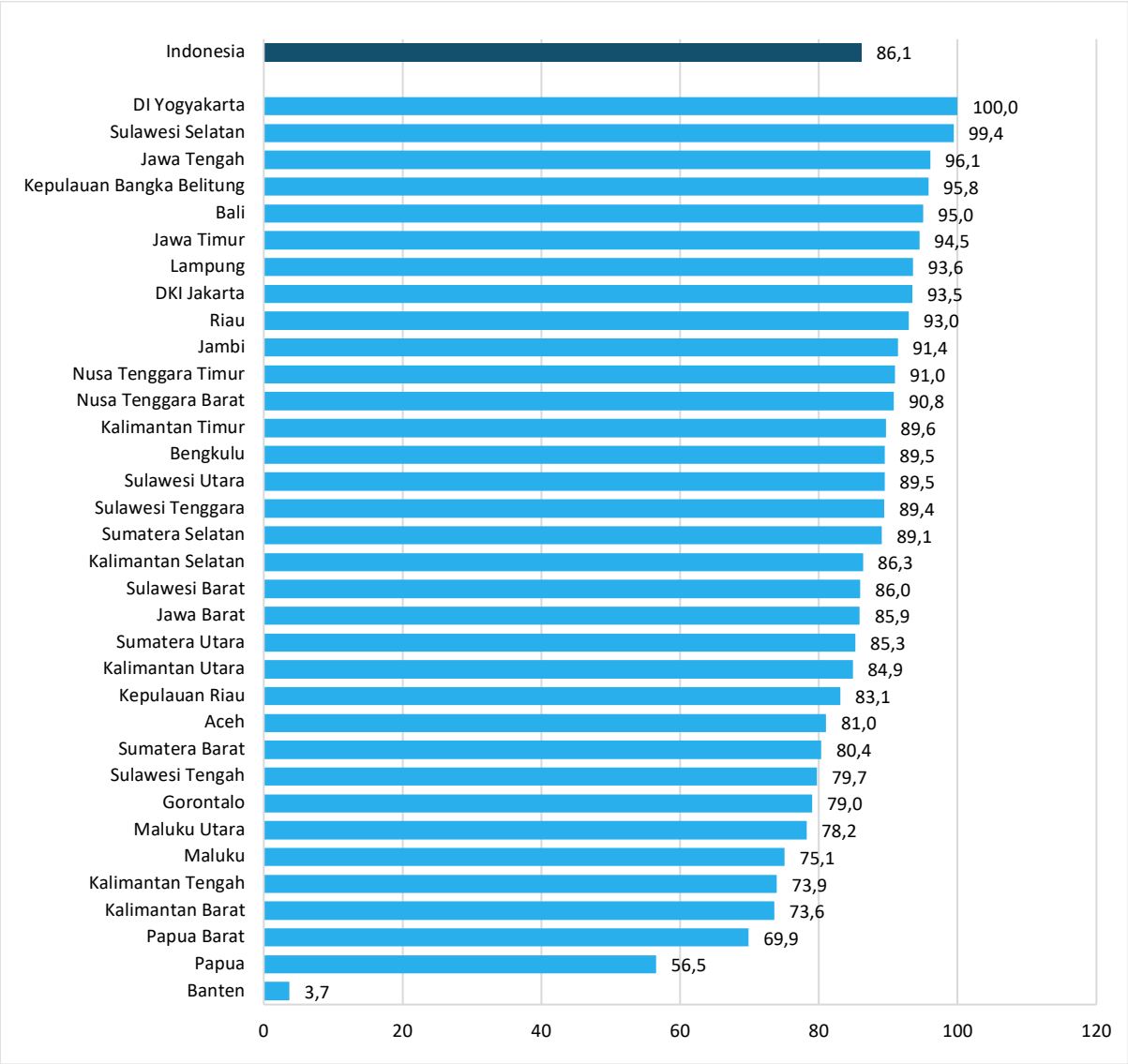
GAMBAR 7.3
PROPORSI PENGGUNAAN JENIS JAMBAN SEHAT DI INDONESIA
TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Sarana jamban sehat dapat diklasifikasi menjadi jamban *sharing*/komunal, jamban sehat semi permanen (JSSP), dan jamban sehat permanen (JSP). Jamban *sharing*/komunal merupakan jamban yang digunakan bersama dalam masyarakat (pengguna lebih dari satu keluarga). JSSP belum menggunakan konstruksi leher angsa tetapi memiliki tutup dan terletak di dalam rumah. JSP adalah jamban yang sudah menggunakan konstruksi leher angsa dan terletak di dalam rumah. Pada tahun 2021, 72,1% keluarga di Indonesia sudah menggunakan JSP (Gambar 7.3). Sisanya 18,9% menggunakan JSSP dan 9,0% menggunakan jamban *sharing*/komunal.

GAMBAR 7.4
PERSENTASE KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

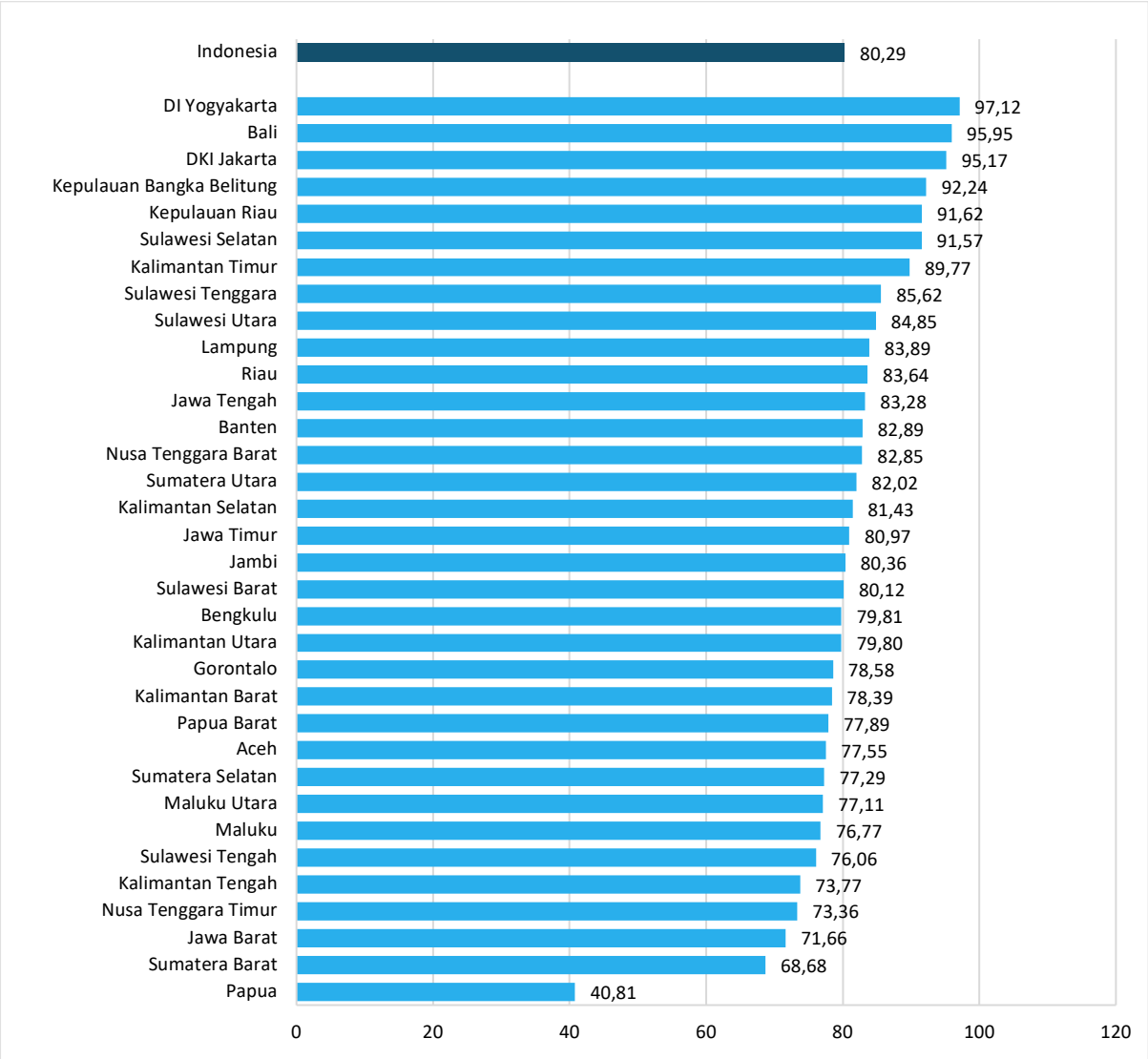
Persentase keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) di Indonesia tahun 2021 adalah 86,1%. Provinsi dengan persentase tertinggi keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) adalah DI Yogyakarta (100%), Sulawesi Selatan (99,4%), dan Jawa Tengah (96,1%). Provinsi dengan persentase terendah adalah Banten (3,7%), Papua

(56,5%), dan Papua Barat (69,9%). Rincian lengkap mengenai keluarga dengan akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat) dapat dilihat pada Lampiran 73.a.

Menurut BPS yang dipublikasikan melalui Statistik Indonesia 2022, definisi rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan, antara lain:

1. Kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik *(septic tank*) atau Instalasi/ Sistem Pengolahan Air Limbah (IPAL/SPAL), dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga lain tertentu, ataupun di MCK (Mandi, Cuci, Kakus) Komunal.
2. Untuk daerah perdesaan, dikatakan memiliki akses sanitasi layak, jika kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja ke tangki septik atau lubang tanah dan fasilitas sanitasi tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri, bersama dengan rumah tangga lain tertentu, ataupun di MCK Komunal.

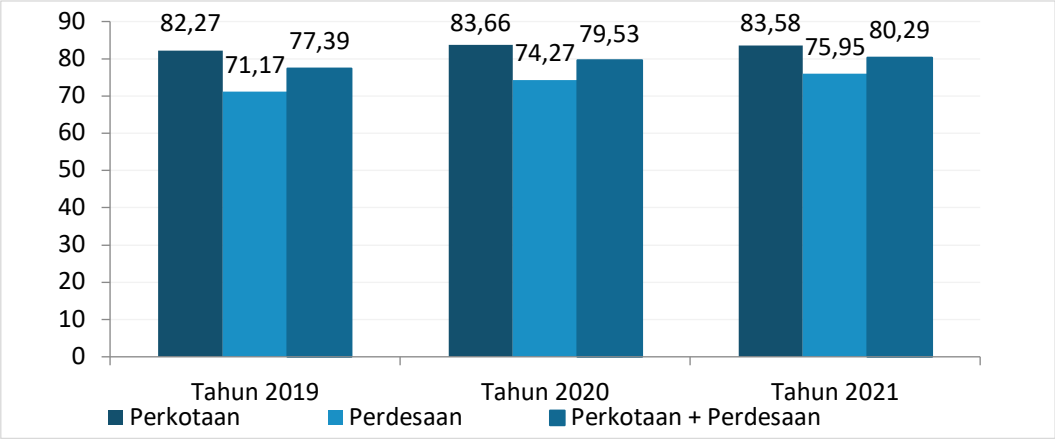
GAMBAR 7.5
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK
TAHUN 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2022

Secara nasional persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak sebesar 80,29% (Gambar 7.5). Provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tertinggi yaitu DI Yogyakarta (97,12%), Bali (95,95%), dan DKI Jakarta (95,17%). Sedangkan provinsi dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak terendah adalah Papua (40,81%), Sumatera Barat (68,68%), dan Jawa Barat (71,66%). Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak tahun 2019-2021 dapat dilihat pada Lampiran 73.b.

GAMBAR 7.6
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT TIPE DAERAH TAHUN 2019-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2019-2021

Gambar 7.6 menunjukkan persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menunjukkan peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2021 sebesar 2,9%. Jika dilihat menurut tipe daerah, persentase di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi daripada di perdesaan (83,58%) dan (75,95%). Selama periode ini, di daerah perdesaan mengalami peningkatan sebesar (4,78%) sedangkan daerah perkotaan (1,31%).

C. SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menyatakan bahwa STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan. Penyelenggaraan STBM bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada Pilar STBM yang bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan. Pilar STBM terdiri atas perilaku:

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS);
2. Cuci Tangan Pakai Sabun;
3. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
4. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
5. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014, strategi penyelenggaraan STBM meliputi 3 (tiga) komponen yang saling mendukung satu dengan yang lain, yang disebut dengan 3 Komponen Sanitasi Total adalah:

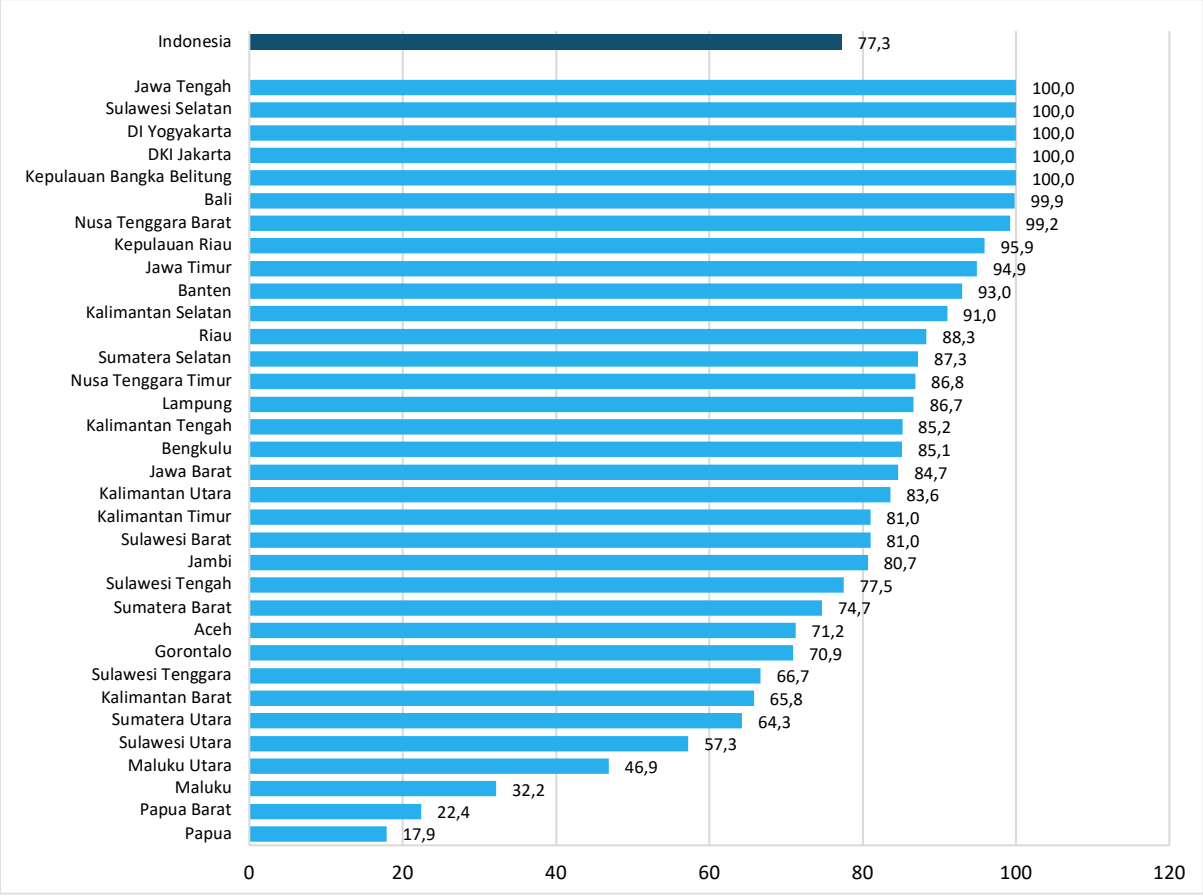
1. Penciptaan lingkungan yang kondusif *(enabling environment)*;
2. Peningkatan kebutuhan sanitasi *(demand creation)*;
3. Peningkatan penyediaan akses sanitasi *(supply improvement)*.

Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM adalah jumlah kumulatif desa/kelurahan yang terverifikasi melaksanakan STBM. Akumulasi jumlah desa/kelurahan yang terverifikasi sebagai desa/kelurahan melaksanakan STBM adalah desa/kelurahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemicuan STBM (upaya untuk menuju perubahan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan metode partisipatori berprinsip pada pendekatan *CLTS (Community-Led Total Sanitation)*.
2. Telah memiliki *natural leader* (anggota masyarakat baik individu maupun kelompok masyarakat yang memotori gerakan STBM di masyarakat tersebut).
3. Telah memiliki Rencana Kerja Masyarakat (RKM).

Pada tahun 2021, jumlah desa/kelurahan yang telah melaksanakan STBM sudah mencapai 64.495 dari total 83.441 desa/kelurahan di Indonesia. Jumlah desa/kelurahan di Indonesia berdasarkan Permendagri Nomor 72 Tahun 2019.

GAMBAR 7.7
PERSENTASE DESA MELAKSANAKAN STBM MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



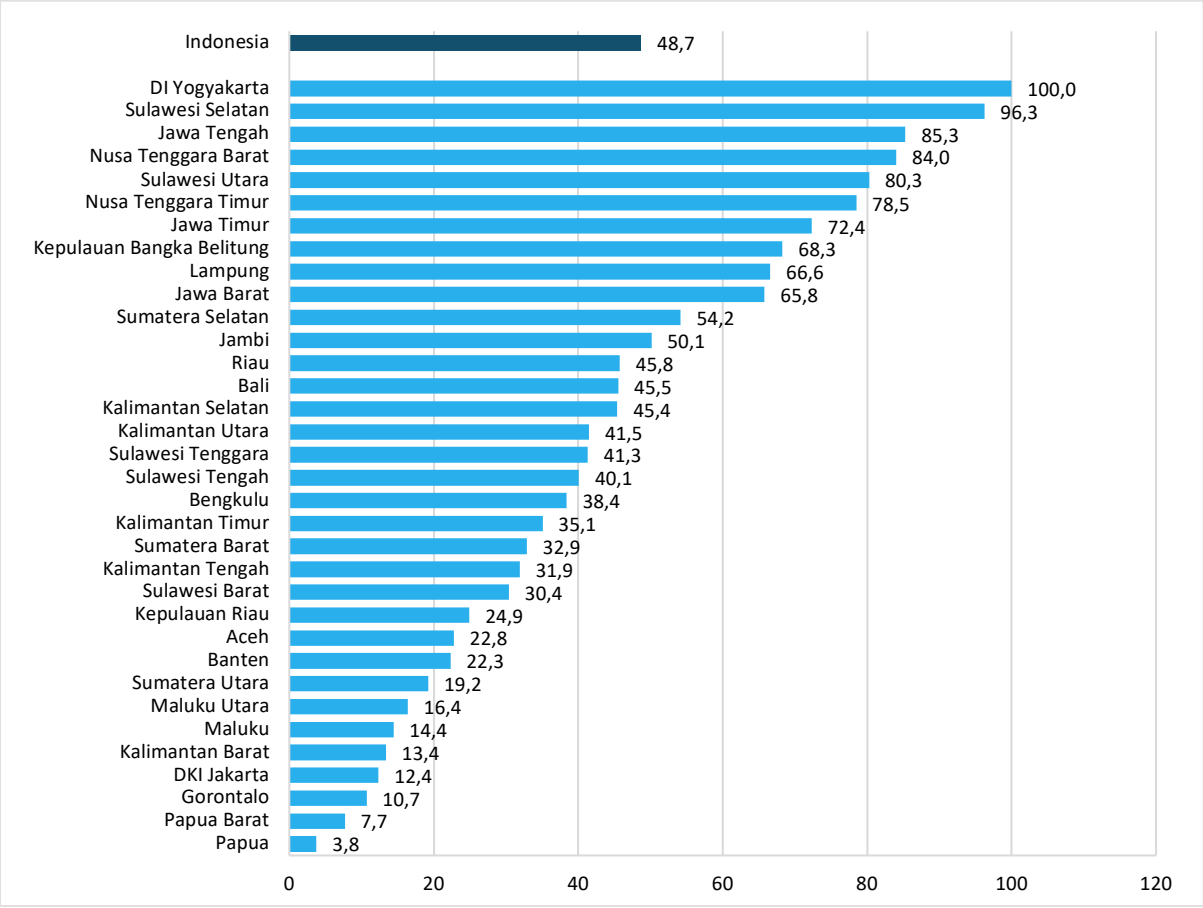
Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Secara nasional persentase desa/kelurahan yang melaksanakan STBM tahun 2021 adalah 77,3%, meningkat dari capaian tahun 2020 yaitu 73,1% (Gambar 7.7). Ada lima (5) provinsi yang telah mencapai 100% desa/kelurahan yang telah melaksanakan STBM yaitu Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Jawa Tengah. Sedangkan provinsi dengan persentase terendah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM adalah Papua (17,9%), Papua Barat (22,4%), dan Maluku (32,2%). Tiga (3) provinsi dengan realisasi desa/kelurahan yang melaksanakan STBM tertinggi yaitu Jawa Tengah (8.563), Jawa Timur (8.070) dan Jawa Barat (5.043). Rincian lengkap mengenai desa/kelurahan yang melaksanakan STBM tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 74.

Desa/Kelurahan Stop BABS (SBS) dalam pilar STBM dapat mencapai status SBS dengan indikator sebagai berikut:

1. Semua masyarakat telah BAB hanya di jamban yang sehat dan membuang tinja/kotoran bayi hanya ke jamban yang sehat (termasuk di sekolah).
2. Tidak terlihat tinja manusia di lingkungan sekitar.
3. Ada penerapan sanksi, peraturan atau upaya lain oleh masyarakat untuk mencegah kejadian BAB di sembarang tempat.
4. Ada mekanisme pemantauan umum yang dibuat masyarakat untuk mencapai 100% KK mempunyai jamban sehat.
5. Ada upaya atau strategi yang jelas untuk dapat mencapai sanitasi total.

GAMBAR 7.8
PERSENTASE DESA/KELURAHAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Secara nasional persentase desa/kelurahan SBS tahun 2021 adalah 48,7%. Provinsi dengan persentase desa/kelurahan SBS tertinggi yaitu DI Yogyakarta (100%), Sulawesi Selatan (96,3%), dan Jawa Tengah (85,3%). Provinsi dengan persentase terendah desa/kelurahan SBS adalah Papua (3,8%), Papua Barat (7,7%), dan Gorontalo (10,7%). Rincian lengkap mengenai desa/kelurahan SBS tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 74.

D. TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR

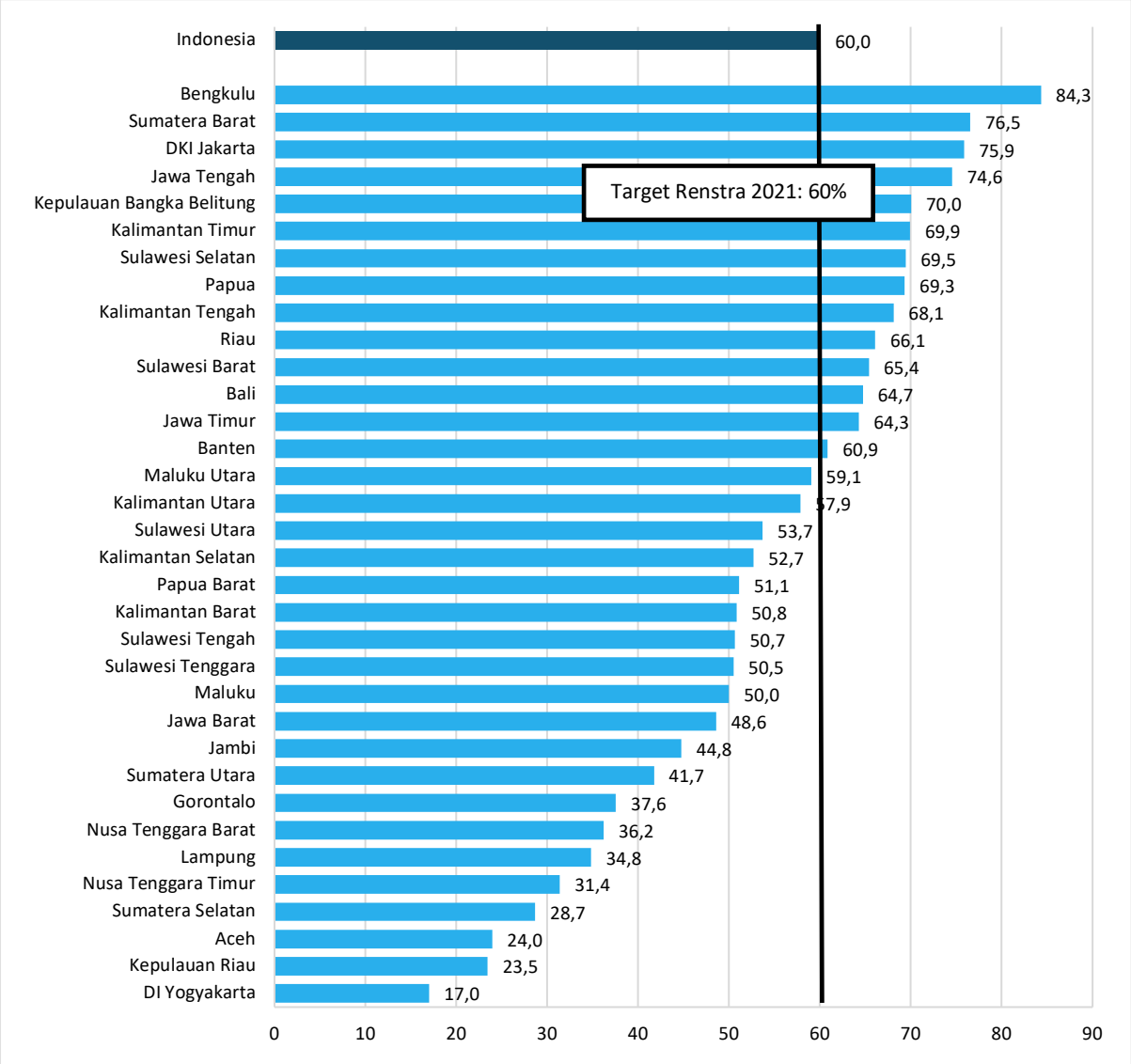
Tempat dan Fasilitas Umum (TFU) yang dilakukan pengawasan sesuai standar adalah TFU yang dilakukan pengawasan dengan menggunakan formulir Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) di wilayah Puskesmas dalam kurun waktu 1 tahun. TFU adalah lokasi, sarana, dan prasarana antara lain: fasilitas kesehatan; fasilitas pendidikan; tempat ibadah; hotel; rumah makan dan usaha lain yang sejenis; sarana olahraga; sarana transportasi darat, laut, udara, dan kereta api; stasiun dan terminal; pasar dan pusat perbelanjaan; pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara; dan tempat dan fasilitas umum lainnya. Ruang lingkup pengawasan pada TFU telah ditetapkan yaitu pada tiga lokus yang menjadi prioritas sesuai dengan indikator Renstra Direktorat Kesehatan Lingkungan tahun 2020 – 2024, Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan sesuai standar minimal pada 3 (tiga) lokus dari tempat dan fasilitas umum tersebut, yaitu:

1. Sekolah yang dimaksud adalah sekolah yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta yang terdiri dari SD/MI dan SMP/MTs yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama;
2. Puskesmas yang dimaksud adalah yang berada di wilayah kerjanya;
3. Pasar adalah pasar rakyat yang telah dilakukan revitalisasi dan terdaftar di Kementerian Perdagangan.

Pengawasan sesuai standar yang dimaksud adalah kunjungan untuk mengetahui faktor risiko kesehatan lingkungan dengan menggunakan formulir IKL melalui pengamatan fisik media lingkungan, pengukuran media lingkungan dan analisis risiko kesehatan lingkungan serta rekomendasi perbaikan.

TFU dinyatakan telah dilakukan pengawasan sesuai standar apabila telah dilakukan IKL dengan mengisi form yang sudah ditentukan dan melakukan pengukuran kualitas lingkungan dengan peralatan pendukung (Sanitarian Kit) yang tersedia di Puskesmas atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor risiko penyakit akibat lingkungan dan selanjutnya memberikan rekomendasi hasil pengawasan tersebut pada sektor terkait untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan dalam upaya mewujudkan TFU yang bersih, aman, nyaman dan sehat.

GAMBAR 7.9
PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM (TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Secara nasional persentase TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standar pada tahun 2021 adalah 60,0%. Angka ini sudah mencapai dari target Renstra tahun 2021 yaitu 60%. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Bengkulu (84,3%), Sumatera Barat (76,5%), dan DKI Jakarta (75,9%). Provinsi dengan capaian terendah DI Yogyakarta (17,0%), Kepulauan Riau (23,5%), dan Aceh (24,0%). Rincian lengkap tentang persentase TFU yang dilakukan pengawasan sesuai standar tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 75.

E. TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP)

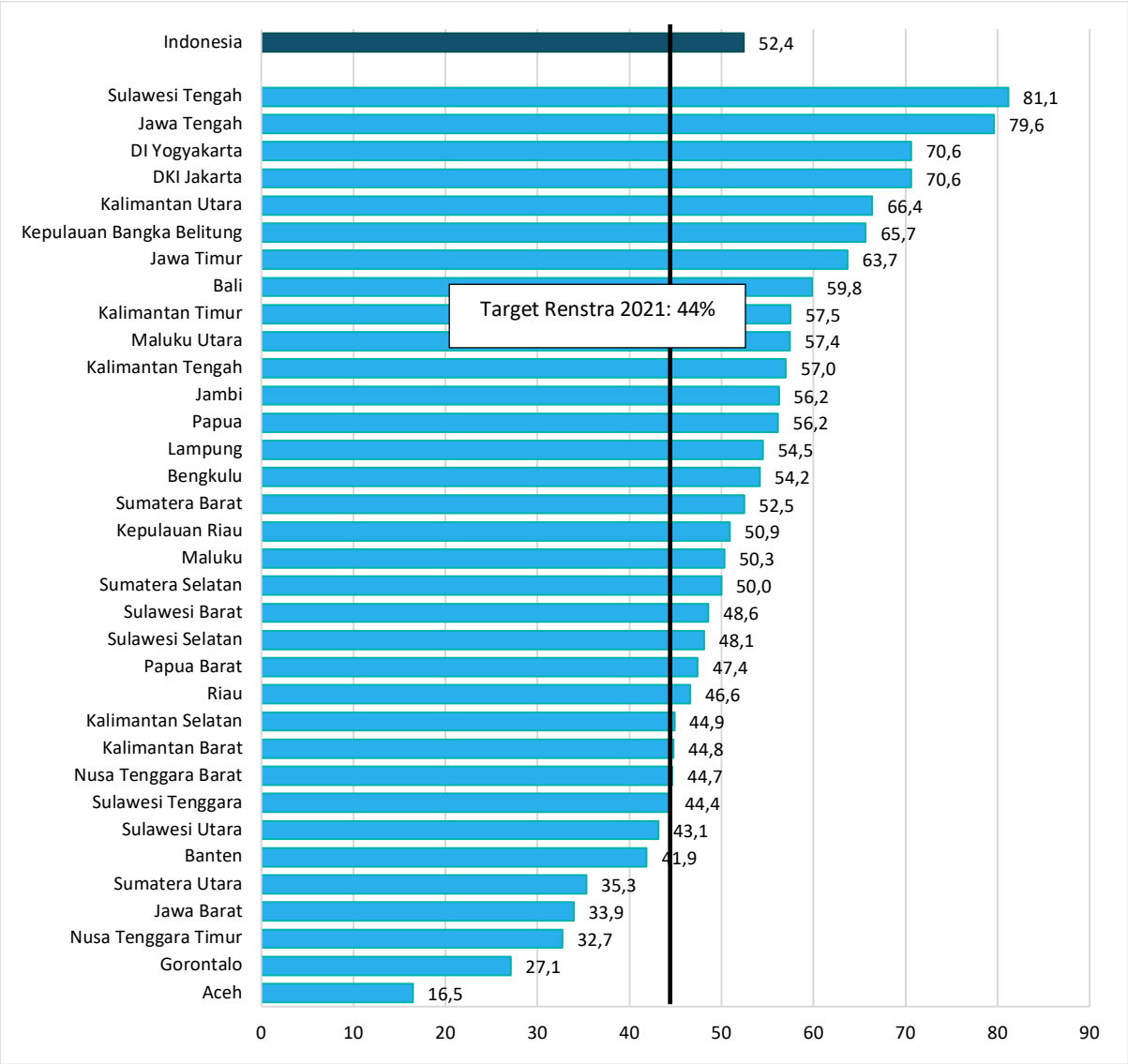
Pada tahun 2021, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan. Kedua peraturan tersebut diantaranya mengatur Standar Sertifikat Laik Hiegine Sanitasi (SLHS). Dalam Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 terdapat perubahan antara lain kategorisasi TPP dan formulir IKL.

Tempat Pengolahan Pangan siap saji yang selanjutnya disebut Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) adalah sarana produksi untuk menyiapkan, mengolah, mengemas, menyimpan, menyajikan dan/atau mengangkut pangan olahan siap saji baik yang bersifat komersial maupun non komersial. TPP yang menjadi sasaran prioritas pengawasan dan pembinaan adalah TPP komersial. TPP komersial adalah usaha penyediaan pangan siap saji yang memperdagangkan produknya secara rutin, yaitu jasa boga/katering, restoran, TPP tertentu dan Depot Air Minum (DAM), gerai pangan jajanan, gerai pangan jajanan keliling, dapur gerai pangan jajanan, dan sentra gerai pangan jajanan/kantin.

Dalam rangka memastikan TPP memenuhi syarat higiene sanitasi, maka perlu dilakukan IKL oleh petugas puskemas, TPP juga dapat melakukan penilaian mandiri terkait kondisi higiene sanitasinya dengan mengisi buku rapor yang sudah dikembangkan oleh Direktorat Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan agar TPP tersebut mendapatkan gambaran kondisi higiene sanitasi dan dapat melakukan perbaikan kualitas TPP secara mandiri sebelum petugas datang untuk melakukan IKL.

Apabila TPP memenuhi syarat berdasarkan hasil IKL maka dapat mengajukan sertifikat laik higiene sanitasi ke Dinas Kesehatan setempat dengan memenuhi persyaratan lainnya yaitu pemeriksaan sampel pangan dan penjamah pangan yang sudah dilatih higiene sanitasi pangan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat.

GAMBAR 7.10
PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAHAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT SESUAI STANDAR TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar secara nasional pada tahun 2021 adalah 52,4%. Capaian ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2021 untuk TPP yang memenuhi syarat sesuai standar yaitu sebesar 44%.

Provinsi dengan persentase tertinggi TPP yang memenuhi syarat sesuai standar adalah Sulawesi Tengah (81,1%), Jawa Tengah (79,6%), DKI Jakarta dan DI Yogyakarta (70,6%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Aceh (16,5%), Gorontalo (27,1%), dan Nusa Tenggara Timur (32,7%). Rincian lengkap tentang persentase TPP yang memenuhi syarat sesuai standar tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 76.a.

F. KABUPATEN/ KOTA SEHAT

Mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat, Kabupaten/Kota Sehat (KKS) adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.

Penyelenggaraan KKS dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkannya dilaksanakan melalui forum atau dengan memfungsikan lembaga masyarakat yang ada. Forum tersebut "Forum Kabupaten/Kota Sehat" atau sebutan lain yang serupa sampai tingkat kecamatan dan desa.

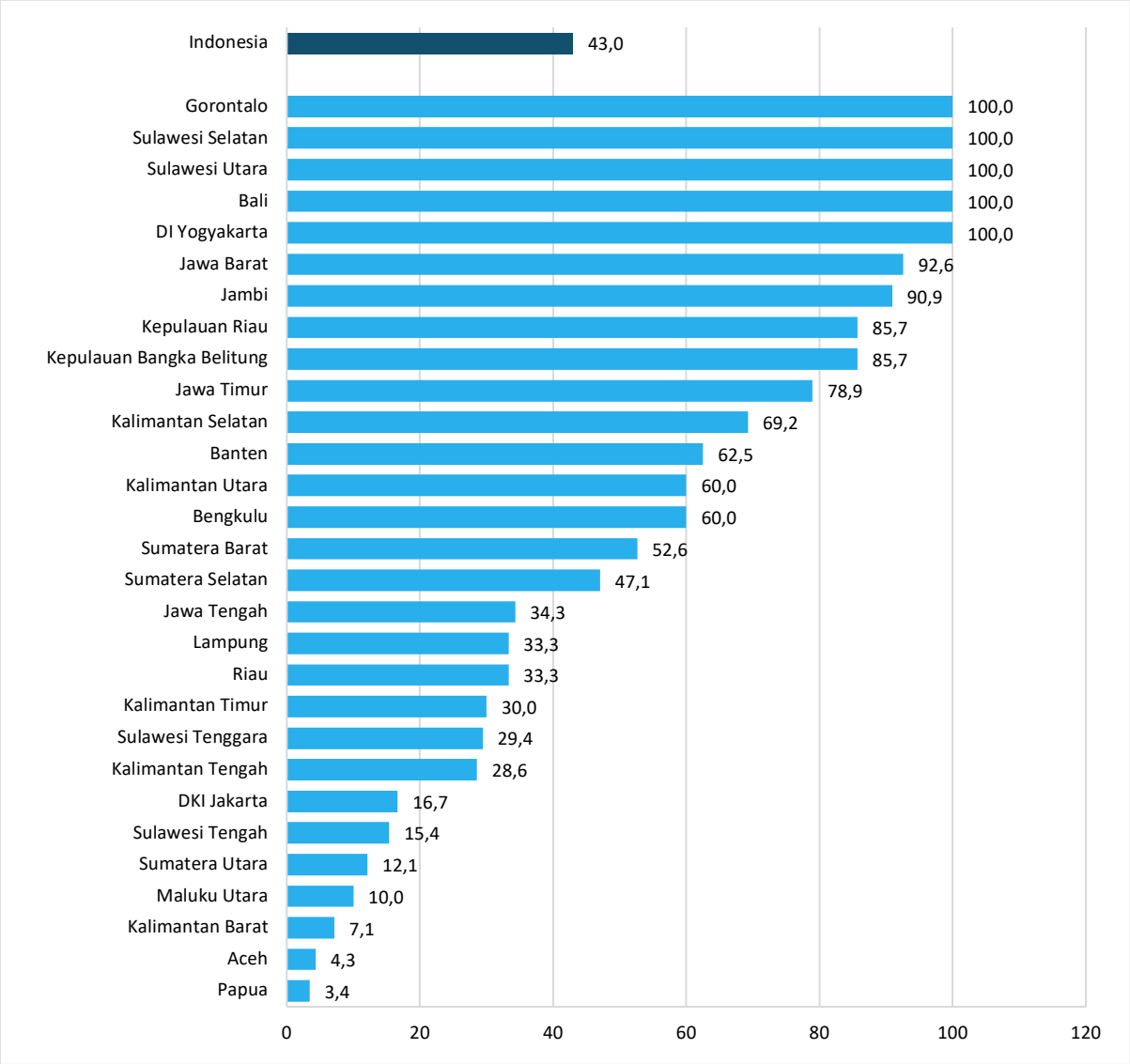
Berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus, tatanan KKS dikelompokkan menjadi:

1. kawasan permukiman, sarana, dan prasarana umum;
2. kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi;
3. kawasan industri dan perkantoran sehat;
4. kawasan pariwisata sehat;
5. ketahanan pangan dan gizi;
6. kehidupan masyarakat yang mandiri;
7. kehidupan sosial yang sehat.

Pengembangan KKS adalah bagian dari dinamika dan semangat warga, pemerintah daerah, serta lembaga legislatif di daerah tersebut. Pemerintah Pusat hanya berperan membina dan memfasilitasi potensial yang ada. Pencapaian KKS merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus menciptakan dan meningkatan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, budaya, mengembangkan ekonomi masyarakat dengan mengembangkan potensi-potensi masyarakat dengan cara memberdayakan mereka agar cepat saling mendukung dalam menerapkan fungsi-fungsi kehidupan dalam membangun potensi maksimal suatu Kota/Desa.

KKS yang memenuhi kriteria akan diberikan Penghargaan Kabupaten/Kota Sehat (Swasti Saba) dalam periode dua tahun sekali. Seleksi usulan Kabupaten/Kota yang akan mengikuti penghargaan ini dilakukan oleh Gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh Tim Pembina KKS Provinsi. Penghargaan ini terdiri dari 3 kategori, yaitu penghargaan Padapa diberikan kepada Kabupaten/Kota untuk taraf pemantapan, Wiwerda untuk taraf pembinaan, dan Wistara untuk taraf pengembangan.

GAMBAR 7.11
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA SEHAT
TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Pada tahun 2021, Kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan KKS sebanyak 221 kabupaten/kota (43,0%) (Gambar 7.11). Jumlah ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2021 yaitu 220 KKS. Kriteria menyelenggarakan KKS adalah:

1. laporan dari Tim Pembina KKS Provinsi;
2. SK Tim Pembina KKS;
3. SK Forum KKS;
4. Rencana Kerja Tim Pembina;
5. Rencana Kerja Forum KKS.

Ada 5 (lima) provinsi yang mencapai 100% dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat yaitu DI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Gorontalo. Provinsi dengan persentase penyelenggaraan KKS yang masih rendah adalah Papua (3,4%). Sedangkan sebanyak 5 (lima) Provinsi

tidak menyelenggarakan KKS yaitu Papua Barat, Maluku, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Rincian lengkap mengenai kabupaten/kota sehat tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 76.b.

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan KKS diantaranya:

1. Indikator perlu di update mengikuti perkembangan dalam pelaksanaan KKS;
2. Masih sulitnya koordinasi Lintas Sektor Kementerian/Lembaga terkait dalam merespon kerja sama dengan Kemenkes untuk mewujudkan KKS;
3. Kurangnya sosialisasi dan komitmen pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan akibat seringnya mutasi kepegawaian di daerah;
4. Kurang optimalnya fungsi tim pembina, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota serta;
5. Masih kurangnya advokasi kegiatan KKS di provinsi.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah mengembangkan jejaring dengan lintas sektor dan lintas program yang terkait dengan penyelenggaraan KKS.

G. PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS

Definisi limbah medis adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan medis dalam bentuk padat, cair, dan gas. Limbah medis padat adalah limbah padat yang terdiri dari limbah infeksius, limbah patologi, limbah benda tajam, limbah farmasi, limbah sitoksis, limbah kimiawi, limbah radioaktif, limbah kontainer bertekanan, dan limbah dengan kandungan logam berat tinggi. Limbah cair adalah semua buangan air termasuk tinja yang kemungkinan mengandung mikroorganisme, bahan kimia beracun, dan radiaktif yang berbahaya bagi kesehatan. Limbah gas adalah semua limbah yang berbentuk gas yang berasal dari kegiatan pembakaran seperti insinerator, dapur, perlengkapan generator, anestesi, dan pembuatan obat sitotoksik.

Pengelolaan limbah medis berbeda dengan limbah domestik atau limbah rumah tangga. Penempatan limbah medis dilakukan pada wadah yang sesuai dengan karakteristik bahan kimia, radioaktif, dan volumenya. Limbah medis yang telah terkumpul tidak diperbolehkan untuk langsung dibuang ke tempat pembuangan limbah domestik tetapi harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Untuk limbah medis yang berbentuk gas dilengkapi alat pereduksi emisi gas dan debu pada proses pembuangannya. Selain itu perlu dilakukan pula upaya minimalisasi limbah yaitu dengan mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan dengan cara mengurangi bahan *(reduce)*, menggunakan kembali *(reuse)*, dan daur ulang *(recycle)*. Penghijauan juga baik dilakukan untuk mengurangi polusi dari limbah yang berbentuk gas dan untuk menyerap debu.

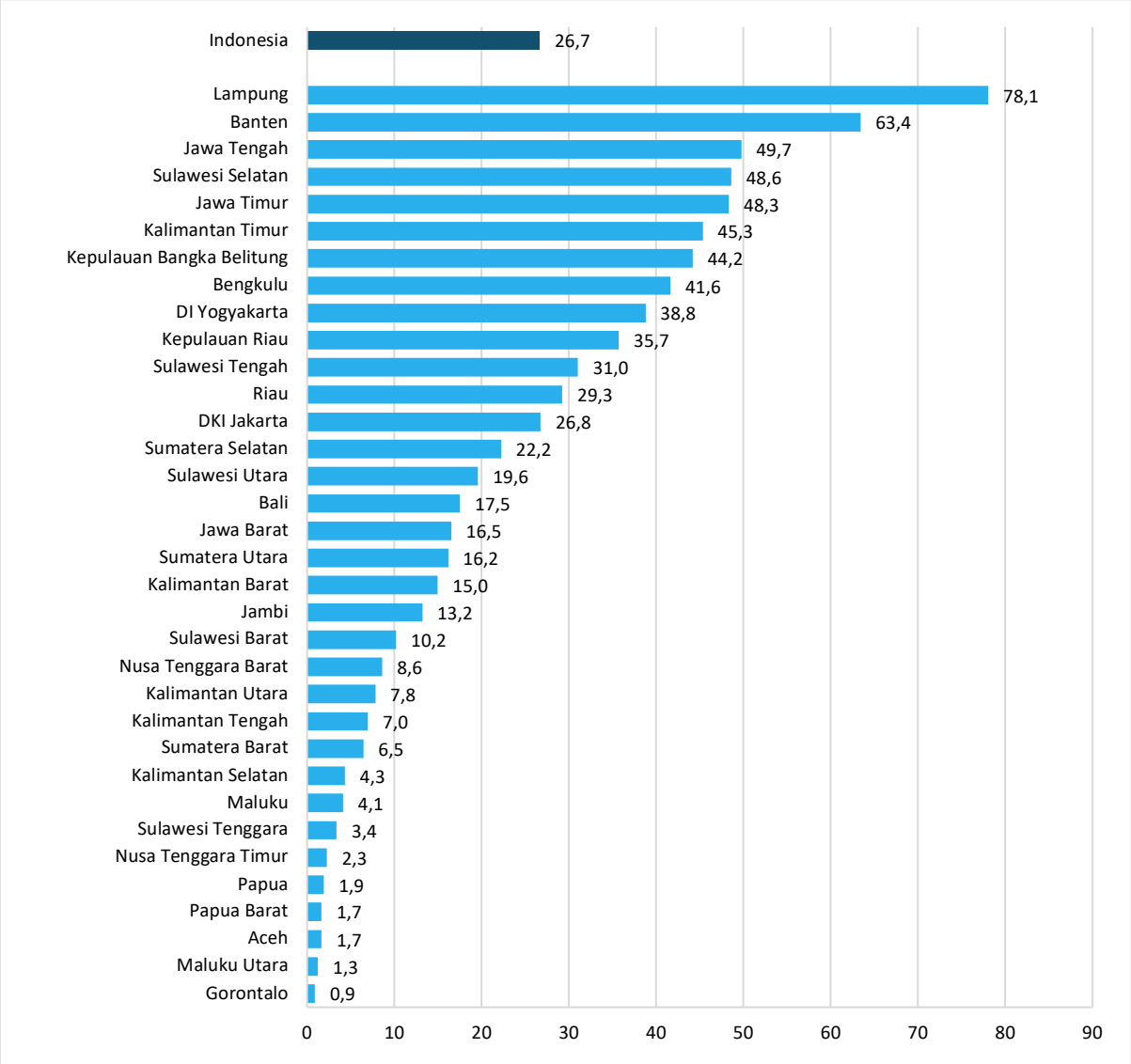
Tata laksana pengelolaan limbah medis sesuai standar tertuang dalam pedoman pelaksanaan penyehatan lingkungan rumah sakit yaitu Peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit yang di antaranya terdiri dari beberapa upaya disesuaikan dengan jenis limbah, upaya tersebut diantaranya:

1. Upaya minimisasi limbah;
2. Pemilahan, pewadahan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang;
3. Tempat penampungan sementara;
4. Transportasi (pengangkutan);
5. Pengolahan, pemusnahan, dan pembuangan akhir limbah cair dan limbah padat.

Definisi operasional Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang mengelola limbah medis adalah RS dan Puskesmas yang melakukan pemilahan, pewadahan, pengangkutan yang memenuhi syarat, penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPSLB3) yang berizin serta melakukan pengolahan secara mandiri sesuai persyaratan atau berizin dan/atau bekerja sama dengan jasa pengolah limbah B3 yang berizin.

Pada tahun 2021, jumlah Fasyankes (rumah sakit dan Puskesmas) yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar mencapai 3.421 dari total fasyankes 12.831.

GAMBAR 7.12
PERSENTASE FASYANKES YANG MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR TAHUN 2021



Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022; Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Secara nasional persentase Fasyankes (rumah sakit dan Puskesmas) yang melakukan pengelolaan limbah sesuai standar pada tahun 2021 adalah 26,7% (Gambar 7.12). Angka ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 18,9%. Provinsi dengan persentase tertinggi adalah Lampung

(78,1%), Banten (63,4%), dan Jawa Tengah (49,7%). Provinsi dengan persentase terendah adalah Gorontalo (0,9%), Maluku Utara (1,3%), Papua Barat dan Aceh (1,7%). Rincian lengkap mengenai persentase rumah sakit yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 76.c.

H. GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)

Sejak 2017, Pemerintah berinovasi dengan mengeluarkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017. GERMAS adalah perwujudan dari kebijakan berwawasan sehat dimana pelibatan lintas sektor diluar kesehatan menjadi kunci keberhasilan pembangunan kesehatan. Di era saat ini GERMAS menjadi salah satu strategi utama dalam pembangunan kesehatan melalui pembudayaan GERMAS.

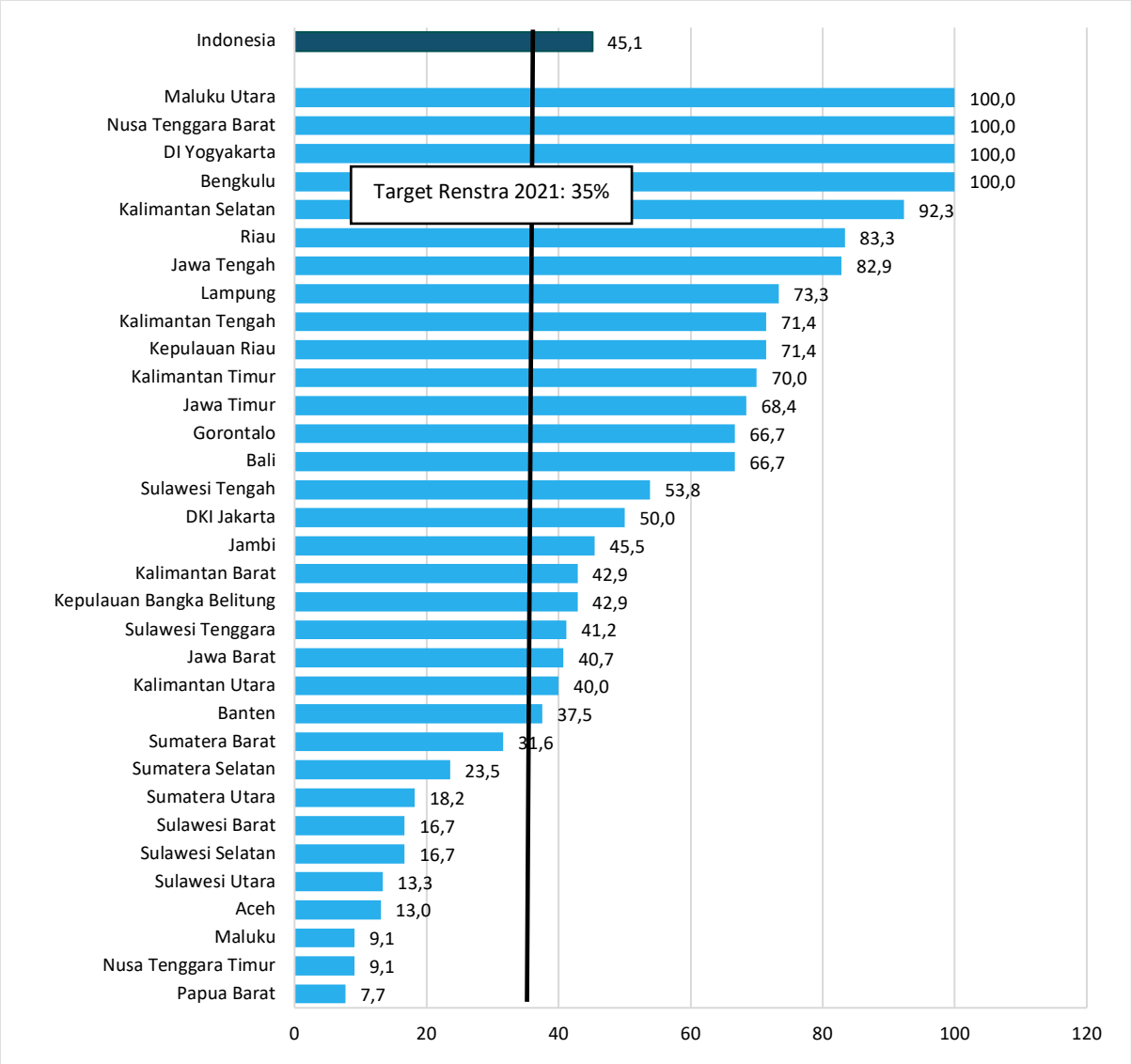
Strategi ini mengamanatkan setiap pihak terkait untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Perwujudan GERMAS dilaksanakan melalui peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan edukasi hidup sehat. Inpres ini juga mengamanatkan Menteri Kesehatan untuk melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, aktivitas fisik, dan meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas dan menyusun panduan pelaksanaan deteksi dini penyakit di instansi pemerintah dan swasta.

GERMAS tidak hanya dijalankan oleh Kementerian Kesehatan saja, tetapi juga lintas kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan profesi, serta ditunjang peran serta seluruh lapisan masyarakat dalam mempraktikkan pola hidup sehat. Pemerintah pusat maupun daerah menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, memantau dan mengevaluasi pelaksanaannya. Pelaksanaan GERMAS harus dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, dibutuhkan advokasi yang kuat kepada lintas sektor dan seluruh komponen masyarakat yang mampu menghasilkan pembangunan berwawasan Kesehatan.

Tujuan program GERMAS yaitu:

1. Menurunkan beban penyakit menular dan penyakit tidak menular, baik kematian maupun kecacatan;
2. Menghindarkan terjadinya penurunan produktivitas penduduk;
3. Menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan karena meningkatnya penyakit dan pengeluaran kesehatan serta;
4. Penguatan sistem kesehatan; pendekatan siklus hidup; Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan berfokus pada pemerataan layanan.

GAMBAR 7.13
PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT TAHUN 2021



Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Kabupaten/kota yang telah melaksanakan kebijakan Germas pada tahun 2021 sebanyak 232 kabupaten/kota (45,1%) (Gambar 7.13). Angka ini sudah memenuhi target Renstra tahun 2021 yaitu 35% kabupaten/kota melaksanakan Kebijakan Germas. Ada 4 (empat) provinsi yang mencapai 100% Kabupaten/Kota melaksanakan Kebijakan Germas yaitu Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, DI Yogyakarta dan Bengkulu. Provinsi dengan persentase kabupaten/kota melaksanakan Kebijakan Germas yang masih rendah adalah Papua Barat (7,7%), Nusa Tenggara Timur dan Maluku (9,1%) sedangkan Aceh (13,0%). Ada 1 provinsi yang belum melaksanakan Kebijakan Germas yaitu Papua. Rincian lengkap mengenai kabupaten/kota melaksanakan kebijakan Germas tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 76.d.

I. PERUMAHAN

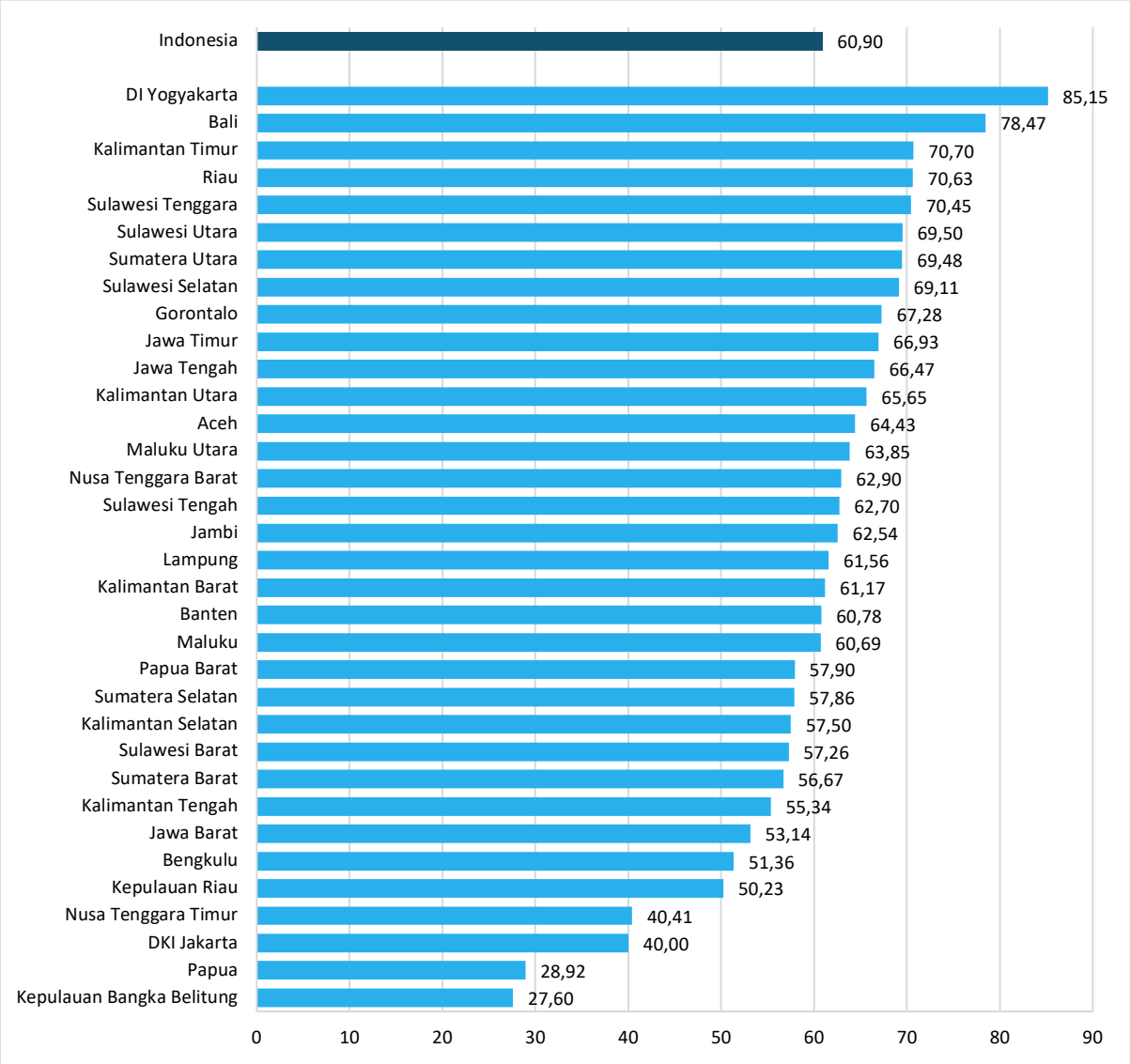
Mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni. Dalam pengertian yang luas, rumah bukan hanya sebuah bangunan (struktural), melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak dan sehat, dipandang dari berbagai segi kehidupan masyarakat. Rumah dapat diartikan sebagai tempat perlindungan, untuk menikmati kehidupan, beristirahat bersama keluarga. Rumah yang layak harus menjamin kepentingan keluarga salah satunya menjamin kesehatan keluarga.

Menurut WHO (World Health Organization), pengertian perumahan (*housing*) adalah suatu struktur fisik di mana orang menggunakannya untuk tempat berlindung, di mana lingkungan dari struktur tersebut termasuk juga semua fasilitas dan pelayanan yang diperlukan, perlengkapan yang berguna untuk kesehatan jasmani, rohani, dan keadaan sosial yang baik untuk keluarga dan individu. Rumah sehat merupakan salah satu sarana untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Rumah layak huni mendukung terciptanya rumah yang sehat. Menurut bps.go.id tahun 2022, definisi rumah layak huni memenuhi 4 (empat) kriteria yaitu:

1. Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m^2 perkapita *(sufficient living space);*
2. Memiliki akses terhadap air minum layak;
3. Memiliki akses terhadap sanitasi layak;
4. Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu atap terluas berupa beton/ genteng/ seng/ kayu/ sirap; dinding terluas berupa tembok/ plesteran anyaman bambu/ kawat, kayu/ papan dan batang kayu; dan lantai terluas berupa marmer/ granit/ keramik/ parket/ vinil/ karpet/ ubin/ tegel/ teraso/ kayu/ papan/ semen/ bata merah.

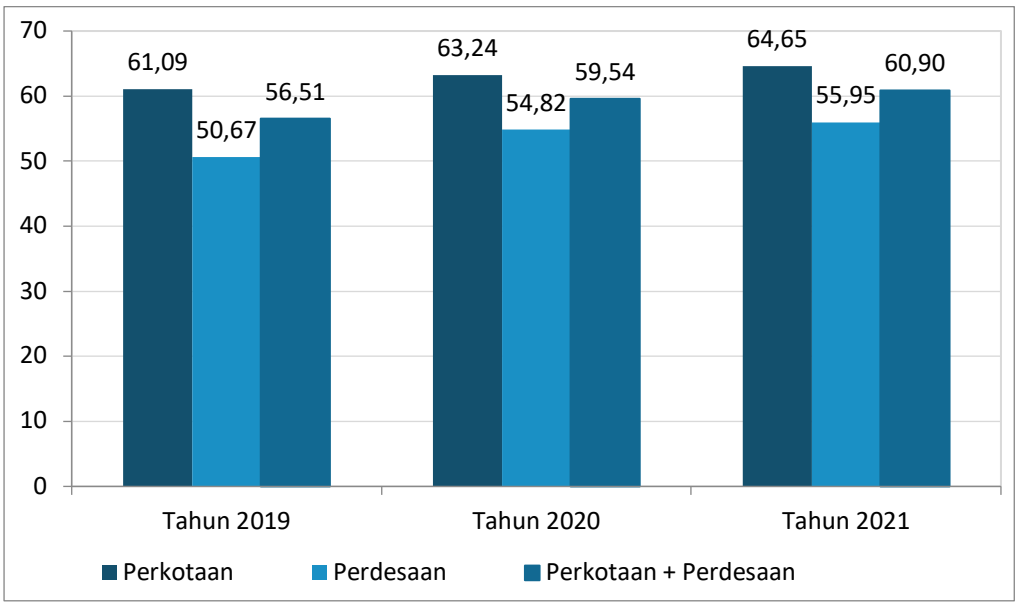
GAMBAR 7.14
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI MENURUT PROVINSI TAHUN 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2021

Secara nasional persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni sebesar 60,90% (Gambar 7.14). Provinsi dengan persentase tertinggi rumah tangga yang menempati rumah layak huni yaitu DI Yogyakarta (85,15%), Bali (78,47%) dan Kalimantan Timur (70,70%). Sedangkan provinsi dengan persentase terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung (27,60%), Papua (28,92%), dan DKI Jakarta (40,00%). Rincian lengkap tentang persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran 76.e.

GAMBAR 7.15
PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI MENURUT TIPE DAERAH TAHUN 2019-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2019-2021

Gambar 7.15 menunjukkan persentase rumah tangga yang menempati rumah layak huni pada tahun 2021 sebesar 60,90%. Selama periode tahun 2019 - 2021 mengalami peningkatan sebesar 4,39%. Persentase di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi daripada di perdesaan (64,65%) dan (55,95%).

***



DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Adioutomo, Sari Martiningsih dan Ghazy Mujahid. 2014. *Indonesia on The Threeshold of Population Ageing*. UNFPA Indonesia.
- Ansar. 2017. *Problematika Alokasi dan Distribusi Anggaran Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah.* Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 19, No 2. http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/view/6850
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. 2019. *Profil Keluarga Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Narkotika Nasional. 2017. *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba di 34 Provinsi Tahun 2017.* Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Badan Narkotika Nasional. 2017. *Indonesia: Narkoba dalam Angka Tahun 2017.* Jakarta: Badan Narkotika Nasional.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik RI.
- Badan Pusat Statistik, 2022. https://bps.go.id/indicator/29/1241/1/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-hunian-yang-layak-dan-terjangkau-menurut-provinsi.html (Akses 22 Maret 2022).
- Badan Pusat Statistik, 2022. https://bps.go.id/indicator/29/1242/1/persentase-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-hunian-yang-layak-dan-terjangkau-menurut-daerah-tempat-tinggal.html (Akses 20 April 2022)
- Badan Pusat Statistik, 2022. https://bps.go.id/indicator/29/1270/1/proporsi-rumah-tangga-yang-memiliki-akses-terhadap-layanan-sanitasi-layak-menurut-daerah-tempat-tinggal.html (Akses 20 April 2022).
- Republik Indonesia. 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- Kementerian Kesehatan RI. 2021. Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. Pedoman Penatalaksaan Pemberian Tablet Tambah Darah. Jakarta : Kementerian Kesehatan
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. Pedoman Penanggulangan Kekurangan Energi Kronik (KEK) Pada Ibu Hamil. Jakarta : Kementerian Kesehatan
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Anemia pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur (WUS). Jakarta : Kementerian Kesehatan
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

- Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
- Perpres Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
- Keputusan Menteri Kesehatan RI. No.HK.01.07/Menkes.701 Tahun 2018 tentang Penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pengampu dan Satelit Program Terapi Rumatan Metadona
- Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian Kesehatan. 2018. *Survei Demografi Kesehatan Indonesia 2017*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, 2019. *Laporan Pelaksanaan Integrasi SUSENAS Maret 2019 dan SSGBI Tahun 2019*, Jakarta : Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik, Kementerian Kesehatan, 2021. Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kementerian Kesehatan, 2013. *Dasar Hukum Jaminan Kesehatan*. Jakarta : Kementerian Kesehatan
- CDC. 2021. *COVID-19 Calculating Percent Positivitity*. [Online] Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/resources/calculating-percent-positivity.html [Accessed 17 Mei 2021].
- CDC. 2021. *COVID-19 Medical Conditions*. [Online] Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html [Accessed 17 Mei 2021].
- Kementerian Dalam Negeri. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri. 2018. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Kementerian Dalam Negeri. 2019. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2003. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/MENKES/SK/VII/2003 tentang Persyaratan Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2007. *Pedoman Surveilans Acute Flaccid Paralysis (AFP).* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2010. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2012. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33/MENKES/PER/2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. 2012. *Petunjuk Teknis Surveilans Campak.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengangkatan dan Penempatan Dokter dan Bidan Sebagai Pegawai Tidak Tetap*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan bagi Bangsa Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Geriatri di Rumah Sakit.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2014. P*eraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2022. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Puskesmas.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2015. *Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/117/2015 tentang Data Penduduk Sasaran program Pembangunan Kesehatan\ Tahun 2015-2019.* Jakarta: kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Surat Edaran Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.03.03/V/0595/2016 tentang Pemberian Tablet Tambah Darah pada Remaja Putri dan Wanita Usia Subur*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor KP.01.02/Menkes/203/2016 tentang Pengangkatan Dokter/Dokter Gigi/Bidan PTT*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Rencana Aksi Kesehatan Olah Raga Tahun 2016-2019*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI, 2016. *Roadmap STBM 2015-2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2016. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaran Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Internsip Dokter dan Dokter Gigi Indonesia*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 422 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019: Revisi I Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2017. *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2016*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Buku Saku Pemantauan Status Gizi Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2018. *Pedoman Surveilans dan Penanggulangan Difteri.* Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Riset Kesehatan Dasar 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan. 2019. *Profil Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2019. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2021*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Penilaian Status Gizi Anak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan RI. 2020. *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19) Revisi ke 5*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI
- Kementerian Kesehatan RI. 2021. *Laporan Perkembangan Kasus AIDS dan PIMS Triwulan IV Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Kesehatan.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa, Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat. Jakarta : Kementerian Keuangan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 507 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355 Tahun 2012.* Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2016. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2018. *Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No.181/M/KPT/2016*: *Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 113/M/KPT/2016 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau*. Jakarta: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI.
- Kementerian Sosial. 2020. *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1/Huk/2020 Tahun 2020 Tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020.* Jakarta: Kementerian Sosial

- Konsil Kedokteran Indonesia. 2011. *Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi*. Jakarta: Konsil Kedokteran Indonesia.
- Kurnianigsih, Titik (2012). *Belanja Fungsi Kesehatan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*. www.dpr.go.id
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Indonesia Tahun 2020-2024
- Pedoman dan Tatalaksana Covid-19 Edisi 2 Agustus 2020
- Pneumonia Covid-19 Diagnosis dan Penataksanaan di Indonesia, PDPI Tahun 2020
- Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan. 2021. *National Health Accounts Indonesia Tahun 2018*. Jakarta: Kementrian Kesehatan**.**
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia*. *Nomor 40 Tahun 2004* tentang *Sistem Jaminan Sosial Nasional.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2009. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 144*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2012. *Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Kesehatan Nomor 355 Tahun 2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.* Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 298*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan*. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014*, Nomor 184. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2017. *Instruksi Presiden Republik I Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.* Jakarta: Sekretariat Kabinet.
- Republik Indonesia. 2019. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara.

- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2020. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2021. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2021. *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4765/2021 Tahun 2021 tentang Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan untuk Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2021. *Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/455/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Perizinan dan Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan Penetapan Rumah Sakit Pendidikan pada Masa Pandemi COVID-19*, Jakarta : Kementerian Kesehatan.
- World Health Organization. 2008. *WHO-Recommended Standards for Surveillance of Selected Vaccine-Preventable Diseases.*
- World Health Organization. *Weekly Epidemiological Record*, 31 Agustus 2018.
- World Health Organization. 2018. *Best Practices in Active Surveillance for Polio Eradication.*
- World Health Organization. 2021. *Global Tuberculosis Report 2021.* Geneva: WHO
- https://www.bps.go.id/
- https://gis.dukcapil.kemendagri.go.id
- Kementerian Dalam Negeri. 2022. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Statistik Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Keadaan Angkatan Kerja di Indonesia, Agustus 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Berita Resmi Statistik No. 07/01/TH. XXV, 17 Januari 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik

* * *

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1

LUAS WILAYAH, JUMLAH KABUPATEN/KOTA, KECAMATAN, KELURAHAN/DESA, JUMLAH PENDUDUK, DAN KEPADATAN PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Luas Wilayah (km2)	Jumlah						Jumlah Penduduk				Kepadatan Penduduk (per km2)
			Kabupaten	Kota	Kabupaten + Kota	Kecamatan	Kelurahan	Desa	L	P	L+P	Rasio Jenis Kelamin	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	56.839,09	18	5	23	290	0	6.497	2.676.698	2.671.191	5.347.889	100,2	94
2	Sumatera Utara	72.460,61	25	8	33	455	693	5.417	7.638.329	7.603.968	15.242.297	100,5	210
3	Sumatera Barat	42.137,70	12	7	19	179	230	929	2.815.871	2.788.586	5.604.457	101,0	133
4	Riau	89.935,90	10	2	12	172	271	1.591	3.360.287	3.214.645	6.574.932	104,5	73
5	Jambi	49.008,73	9	2	11	144	165	1.399	1.834.066	1.769.373	3.603.439	103,7	74
6	Sumatera Selatan	86.769,34	13	4	17	241	395	2.853	4.364.258	4.201.556	8.565.814	103,9	99
7	Bengkulu	20.130,21	9	1	10	129	172	1.341	1.040.481	996.538	2.037.019	104,4	101
8	Lampung	33.575,41	13	2	15	229	205	2.435	4.547.517	4.334.590	8.882.107	104,9	265
9	Kepulauan Bangka Belitung	16.690,54	6	1	7	47	84	309	748.664	713.229	1.461.893	105,0	88
10	Kepulauan Riau	8.273,87	5	2	7	76	142	275	1.060.044	1.022.741	2.082.785	103,6	252
11	DKI Jakarta	661,23	1	5	6	44	267	-	5.655.534	5.606.061	11.261.595	100,9	17.031
12	Jawa Barat	37.040,04	18	9	27	627	645	5.312	24.423.410	23.796.684	48.220.094	102,6	1.302
13	Jawa Tengah	34.334,54	29	6	35	576	753	7.809	18.778.596	18.534.467	37.313.063	101,3	1.087
14	DI Yogyakarta	3.173,87	4	1	5	78	46	392	1.820.400	1.857.046	3.677.446	98,0	1.159
15	Jawa Timur	48.033,89	29	9	38	666	777	7.724	20.485.906	20.577.188	41.063.094	99,6	855
16	Banten	9.352,52	4	4	8	155	314	1.238	6.110.955	5.919.937	12.030.892	103,2	1.286
17	Bali	5.590,21	8	1	9	57	80	636	2.145.798	2.133.331	4.279.129	100,6	765
18	Nusa Tenggara Barat	19.677,04	8	2	10	117	145	1.005	2.706.822	2.725.387	5.432.209	99,3	276
19	Nusa Tenggara Timur	46.452,38	21	1	22	315	327	3.026	2.749.006	2.740.845	5.489.851	100,3	118
20	Kalimantan Barat	147.035,70	12	2	14	174	99	2.031	2.810.468	2.656.474	5.466.942	105,8	37
21	Kalimantan Tengah	153.413,06	13	1	14	136	139	1.432	1.372.773	1.283.669	2.656.442	106,9	17
22	Kalimantan Selatan	37.190,30	11	2	13	156	144	1.864	2.082.688	2.037.136	4.119.824	102,2	111
23	Kalimantan Timur	127.907,84	7	3	10	105	197	841	1.995.324	1.854.508	3.849.832	107,6	30
24	Kalimantan Utara	69.212,10	4	1	5	55	35	447	365.008	332.995	698.003	109,6	10
25	Sulawesi Utara	14.511,27	11	4	15	171	332	1.507	1.359.963	1.298.035	2.657.998	104,8	183
26	Sulawesi Tengah	61.237,50	12	1	13	175	175	1.842	1.566.691	1.485.063	3.051.754	105,5	50
27	Sulawesi Selatan	45.704,16	21	3	24	311	793	2.255	4.575.422	4.643.314	9.218.736	98,5	202
28	Sulawesi Tenggara	36.158,55	15	2	17	220	378	1.908	1.357.522	1.321.657	2.679.179	102,7	74
29	Gorontalo	12.045,91	5	1	6	77	72	657	605.977	594.686	1.200.663	101,9	100
30	Sulawesi Barat	16.589,43	6	0	6	69	73	575	732.436	709.789	1.442.225	103,2	87
31	Maluku	46.150,92	9	2	11	118	35	1.198	948.625	932.041	1.880.666	101,8	41
32	Maluku Utara	32.989,31	8	2	10	118	118	1.063	678.715	645.212	1.323.927	105,2	40
33	Papua Barat	99.505,67	12	1	13	218	95	1.742	599.890	550.578	1.150.468	109,0	12
34	Papua	312.767,13	28	1	29	566	110	5.411	2.289.328	2.023.758	4.313.086	113,1	14
Indonesia		**1.892.555,47**	**416**	**98**	**514**	**7.266**	**8.506**	**74.961**	**138.303.472**	**135.576.278**	**273.879.750**	**102,0**	**145**

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2022 (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022)

Lampiran 2.a

JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2021

No	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk			
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Rasio Jenis Kelamin
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	0 - 4	11.280.308	10.764.953	22.045.261	104,8
2	5 - 9	11.249.856	10.775.214	22.025.070	104,4
3	10 - 14	11.392.659	10.723.206	22.115.865	106,2
4	15 - 19	11.445.192	10.755.086	22.200.278	106,4
5	20 - 24	11.588.066	10.989.207	22.577.273	105,4
6	25 - 29	11.434.373	10.947.043	22.381.416	104,5
7	30 - 34	11.155.882	10.818.827	21.974.709	103,1
8	35 - 39	10.633.577	10.412.645	21.046.222	102,1
9	40 - 44	10.109.819	10.009.265	20.119.084	101,0
10	45 - 49	9.191.886	9.163.684	18.355.570	100,3
11	50 - 54	8.050.158	8.061.044	16.111.202	99,9
12	55 - 59	6.739.972	6.791.734	13.531.706	99,2
13	60 - 64	5.280.809	5.336.975	10.617.784	98,9
14	65 - 69	3.860.553	3.967.952	7.828.505	97,3
15	70 - 74	2.345.897	2.546.537	4.892.434	92,1
16	75+	2.112.047	2.748.089	4.860.136	76,9
Indonesia		**137.871.054**	**134.811.461**	**272.682.515**	**102,3**
Angka Beban Tanggungan *(Dependency Ratio)*				**44,34**	

Sumber : Jumlah Penduduk Proyeksi Interim 2020-2023, BPS 2022

Lampiran 2.b

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020 - 2021

No	Provinsi	Jumlah Penduduk (ribu)	
		2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Aceh	5.274,9	5.333,7
2	Sumatera Utara	14.799,4	14.936,2
3	Sumatera Barat	5.534,5	5.580,2
4	Riau	6.394,1	6.493,6
5	Jambi	3.548,2	3.585,1
6	Sumatera Selatan	8.467,4	8.550,9
7	Bengkulu	2.010,7	2.032,9
8	Lampung	9.007,8	9.081,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.455,7	1.473,2
10	Kepulauan Riau	2.064,6	2.118,2
11	DKI Jakarta	10.562,1	10.609,7
12	Jawa Barat	48.274,2	48.782,4
13	Jawa Tengah	36.516,0	36.742,5
14	DI Yogyakarta	3.668,7	3.712,9
15	Jawa Timur	40.665,7	40.878,8
16	Banten	11.904,6	12.061,5
17	Bali	4.317,4	4.362,7
18	Nusa Tenggara Barat	5.320,1	5.390,0
19	Nusa Tenggara Timur	5.325,6	5.387,7
20	Kalimantan Barat	5.414,4	5.470,8
21	Kalimantan Tengah	2.670,0	2.702,2
22	Kalimantan Selatan	4.073,6	4.122,6
23	Kalimantan Timur	3.766,0	3.808,2
24	Kalimantan Utara	701,8	713,6
25	Sulawesi Utara	2.621,9	2.638,6
26	Sulawesi Tengah	2.985,7	3.021,9
27	Sulawesi Selatan	9.073,5	9.139,5
28	Sulawesi Tenggara	2.624,9	2.659,2
29	Gorontalo	1.171,7	1.181,0
30	Sulawesi Barat	1.419,2	1.436,8
31	Maluku	1.848,9	1.862,6
32	Maluku Utara	1.282,9	1.299,2
33	Papua Barat	1.134,1	1.156,8
34	Papua	4.303,7	4.355,5
Indonesia		**270.203,9**	**272.682,5**

Sumber : * Hasil Sensus Penduduk 2020 (September), BPS 2022
**Jumlah Penduduk Proyeksi Interim 2020-2023, BPS 2022

Lampiran 2.c

JUMLAH PENDUDUK KELOMPOK TERTENTU BERDASARKAN JENIS KELAMIN
TAHUN 2021

No	Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Jumlah Bayi (0 tahun)	2.273.236	2.174.781	4.448.017
2	Jumlah Batita (0-2 tahun)	6.772.794	6.463.162	13.235.956
3	Jumlah Anak Balita (1 - 4 tahun)	9.007.072	8.590.172	17.597.244
4	Jumlah Balita (0 - 4 tahun)	11.280.308	10.764.953	22.045.261
5	Jumlah Anak Prasekolah (5 - 6 tahun)	4.495.947	4.310.121	8.806.068
6	Jumlah Anak Usia Kelas 1 SD/Setingkat (7 Tahun)	2.247.035	2.156.055	4.403.090
7	Jumlah Anak Usia SD/Setingkat (7 - 12 Tahun)	13.570.550	12.904.399	26.474.949
8	Jumlah Penduduk Usia Muda (<15 Tahun)	33.922.823	32.263.373	66.186.196
9	Jumlah Penduduk Usia Produktif (15-64 Tahun)	95.629.734	93.285.510	188.915.244
10	Jumlah Penduduk Usia Non Produktif (65+ Tahun)	8.318.497	9.262.578	17.581.075
11	Jumlah Wanita Usia Subur (15 - 49 tahun)		73.095.757	73.095.757
12	Jumlah Wanita Usia Subur Imunisasi (15-39 tahun)		53.922.808	53.922.808

Sumber : Jumlah Penduduk Proyeksi Interim 2020-2023, BPS 2022

Lampiran 3.a

JUMLAH PENDUDUK MISKIN, PERSENTASE PENDUDUK MISKIN, DAN GARIS KEMISKINAN
TAHUN 2001 - 2021

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (dalam Juta Orang)			Persentase Penduduk Miskin			Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	
		Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	2001	8,6	29,3	37,9	9,8	24,8	18,4	100.011,00	80.382,00
2	2002	13,3	25,1	38,4	14,5	21,1	18,2	130.499,00	96.512,00
3	2003	12,3	25,1	37,3	13,6	20,2	17,4	138.803,00	105.888,00
4	2004	11,4	24,8	36,2	12,1	20,1	16,7	143.455,00	108.725,00
5	2005	12,4	22,7	35,1	11,7	20,0	16,0	165.565,00	117.365,00
6	2006	14,5	24,8	39,3	13,5	21,8	17,8	174.290,00	130.584,00
7	2007	13,6	23,6	37,2	12,5	20,4	16,6	187.942,00	146.837,00
8	2008	12,8	22,2	35,0	11,7	18,9	15,4	204.895,99	161.830,79
9	2009	11,9	20,6	32,5	10,7	17,4	14,2	222.123,10	179.834,57
10	2010	11,1	19,9	31,0	9,9	16,6	13,3	232.989,00	192.353,83
11	Maret 2011	11,1	19,0	30,0	9,2	15,7	12,5	253.015,51	213.394,51
12	September 2011	11,0	18,9	29,9	9,1	15,6	12,4	263.593,84	223.180,69
13	Maret 2012	10,7	18,5	29,1	8,8	15,1	12,0	267.407,53	229.225,78
14	September 2012	10,5	18,1	28,6	8,6	14,7	11,7	277.381,99	240.441,35
15	Maret 2013	10,3	17,7	28,1	8,4	14,3	11,4	289.042,00	253.273,00
16	September 2013	10,6	17,9	28,6	8,5	14,4	11,5	308.826,00	275.779,00
17	Maret 2014	10,5	17,8	28,3	8,3	14,2	11,3	318.514,00	286.097,00
18	September 2014	10,4	17,4	27,7	8,2	13,8	11,0	326.853,00	296.681,00
19	Maret 2015	10,7	17,9	28,6	8,3	14,2	11,2	342.541,00	317.881,00
20	September 2015	10,6	17,9	28,5	8,2	14,1	11,1	356.378,00	333.034,00
21	Maret 2016	10,3	17,7	28,0	7,79	14,11	10,86	364.527,00	343.647,00
22	September 2016	10,5	17,3	27,8	7,73	13,96	10,70	372.114,00	350.420,00
23	Maret 2017	10,7	17,1	27,8	7,7	13,9	10,6	385.621,00	361.496,00
24	September 2017	10,3	16,3	26,6	7,3	13,5	10,1	400.995,00	370.910,00
25	Maret 2018	10,1	15,8	26,0	7,0	13,2	9,8	415.614,00	383.908,00
26	September 2018	10,1	15,5	25,7	6,9	13,1	9,7	425.770,00	392.154,00
27	Maret 2019	10,0	15,2	25,1	6,7	12,9	9,4	442.062,00	404.398,00
28	September 2019	9,9	14,9	24,8	6,6	12,6	9,2	458.380,00	418.515,00
29	Maret 2020	11,2	15,3	26,4	7,4	12,8	9,8	471.822,00	433.281,00
30	September 2020	12,0	15,5	27,6	7,9	13,2	10,2	475.477,00	437.902,00
31	Maret 2021	12,2	15,4	27,5	7,9	13,1	10,1	489.848,00	450.185,00
32	September 2021	11,9	14,6	26,5	7,6	12,5	9,7	502.730,00	464.474,00

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Lampiran 3.b

GARIS KEMISKINAN, JUMLAH, DAN PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT PROVINSI DAN TIPE DAERAH
TAHUN 2021

No	Provinsi	Semester II (September)								
		Perkotaan			Perdesaan			Total		
		Garis Kemiskinan (Rp/kapita/ bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/ bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/ bulan)	Jumlah (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	577.270,00	195,47	10,58	541.000,00	654,79	18,0	552.939,00	850,26	15,53
2	Sumatera Utara	556.437,00	725,04	8,68	513.987,00	548,03	8,3	537.310,00	1.273,07	8,49
3	Sumatera Barat	592.302,00	134,53	4,83	566.224,00	205,39	7,2	579.545,00	339,93	6,04
4	Riau	618.552,00	190,99	6,72	564.900,00	305,67	7,2	586.062,00	496,66	7,00
5	Jambi	598.178,00	126,10	10,50	479.006,00	153,75	6,3	517.722,00	279,86	7,67
6	Sumatera Selatan	491.658,00	393,38	11,99	446.678,00	723,23	13,3	463.251,00	1 116,61	12,79
7	Bengkulu	624.573,00	98,83	14,73	548.327,00	192,97	14,3	572.455,00	291,79	14,43
8	Lampung	535.133,00	236,48	8,50	472.918,00	770,54	13,2	492.620,00	1.007,02	11,67
9	Kepulauan Bangka Belitung	753.768,00	27,28	3,22	791.146,00	42,43	6,6	770.457,00	69,70	4,67
10	Kepulauan Riau	655.506,00	119,31	5,37	626.811,00	18,44	10,5	653.853,00	137,75	5,75
11	DKI Jakarta	715.052,00	498,29	4,67	-	-	-	715.052,00	498,29	4,67
12	Jawa Barat	438.642,00	2.951,07	7,48	433.041,00	1.053,79	9,8	437.604,00	4.004,86	7,97
13	Jawa Tengah	427.099,00	1.847,09	10,16	419.064,00	2.086,92	12,4	423.264,00	3.934,01	11,25
14	DI Yogyakarta	517.353,00	331,71	11,20	438.412,00	142,78	14,0	496.904,00	474,49	11,91
15	Jawa Timur	459.440,00	1.768,91	7,99	428.457,00	2.490,69	13,8	445.139,00	4.259,60	10,59
16	Banten	567.000,00	576,62	6,04	497.213,00	275,66	7,7	547.483,00	852,28	6,50
17	Bali	474.322,00	137,60	4,33	429.877,00	73,86	5,7	461.532,00	211,46	4,72
18	Nusa Tenggara Barat	452.855,00	387,67	14,54	430.381,00	347,64	13,1	441.711,00	735,30	13,83
19	Nusa Tenggara Timur	531.194,00	120,58	8,57	408.769,00	1.025,70	24,4	437.606,00	1.146,28	20,44
20	Kalimantan Barat	540.474,00	89,04	4,72	486.544,00	264,96	8,1	505.228,00	354,00	6,84
21	Kalimantan Tengah	499.553,00	57,86	5,08	537.135,00	83,17	5,2	522.879,00	141,03	5,16
22	Kalimantan Selatan	536.041,00	80,35	3,81	517.293,00	117,41	5,3	527.045,00	197,76	4,56
23	Kalimantan Timur	706.886,00	121,28	4,74	692.910,00	111,85	9,6	703.223,00	233,13	6,27
24	Kalimantan Utara	761.840,00	23,88	5,32	684.582,00	25,61	9,3	730.342,00	49,49	6,83
25	Sulawesi Utara	423.427,00	70,14	5,09	411.450,00	116,41	10,1	417.930,00	186,55	7,36
26	Sulawesi Tengah	516.374,00	86,67	8,82	500.351,00	294,54	13,7	505.608,00	381,21	12,18
27	Sulawesi Selatan	403.751,00	198,84	4,89	368.465,00	566,62	11,6	384.455,00	765,46	8,53
28	Sulawesi Tenggara	410.332,00	71,02	7,14	385.845,00	252,25	14,3	394.744,00	323,26	11,74
29	Gorontalo	401.219,00	21,51	4,06	398.806,00	163,09	24,4	400.504,00	184,60	15,41
30	Sulawesi Barat	382.292,00	27,72	9,72	384.598,00	138,27	12,4	384.084,00	165,99	11,85
31	Maluku	613.316,00	49,02	6,13	600.344,00	245,94	24,3	605.909,00	294,97	16,30
32	Maluku Utara	533.231,00	17,60	4,83	494.997,00	63,58	7,0	505.432,00	81,18	6,38
33	Papua Barat	683.148,00	28,19	6,44	629.885,00	193,10	33,5	652.521,00	221,29	21,82
34	Papua	643.071,00	49,23	4,94	582.157,00	895,26	36,50	600.795,00	944,49	27,38
Indonesia		**502.730,00**	**11.859,34**	**7,60**	**464.474,00**	**14.644,30**	**12,53**	**486.168,00**	**26.503,65**	**9,71**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Lampiran 3.c

INDEKS KEDALAMAN KEMISKINAN (P1) DAN INDEKS KEPARAHAN KEMISKINAN (P2) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Semester II (September)					
		Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) *			Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)**		
		Perkotaan	Perdesaan	Total	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	1,70	3,59	2,95	0,45	1,00	0,81
2	Sumatera Utara	1,40	1,51	1,45	0,34	0,43	0,38
3	Sumatera Barat	0,74	1,18	0,96	0,14	0,31	0,23
4	Riau	1,12	1,08	1,09	0,31	0,26	0,28
5	Jambi	1,81	0,74	1,09	0,38	0,15	0,23
6	Sumatera Selatan	2,17	2,42	2,33	0,60	0,66	0,64
7	Bengkulu	2,56	2,39	2,45	0,59	0,52	0,55
8	Lampung	1,25	2,13	1,85	0,24	0,45	0,38
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,44	0,71	0,56	0,11	0,12	0,11
10	Kepulauan Riau	0,88	1,82	0,95	0,20	0,47	0,22
11	DKI Jakarta	0,75	-	0,75	0,18	-	0,18
12	Jawa Barat	1,23	1,52	1,29	0,29	0,36	0,31
13	Jawa Tengah	1,75	2,15	1,94	0,42	0,50	0,46
14	DI Yogyakarta	2,05	2,11	2,06	0,56	0,45	0,53
15	Jawa Timur	1,10	2,16	1,58	0,21	0,47	0,33
16	Banten	1,14	1,36	1,20	0,32	0,39	0,34
17	Bali	0,71	0,88	0,76	0,15	0,23	0,17
18	Nusa Tenggara Barat	2,43	2,57	2,50	0,54	0,72	0,63
19	Nusa Tenggara Timur	1,40	5,93	4,79	0,38	1,79	1,44
20	Kalimantan Barat	0,62	1,24	1,02	0,12	0,31	0,24
21	Kalimantan Tengah	0,60	0,86	0,75	0,11	0,21	0,17
22	Kalimantan Selatan	0,47	0,62	0,55	0,08	0,11	0,10
23	Kalimantan Timur	0,88	1,38	1,04	0,22	0,26	0,23
24	Kalimantan Utara	0,79	1,07	0,89	0,17	0,18	0,17
25	Sulawesi Utara	0,73	1,42	1,04	0,16	0,28	0,22
26	Sulawesi Tengah	1,48	2,59	2,24	0,43	0,70	0,62
27	Sulawesi Selatan	0,63	2,03	1,40	0,14	0,50	0,34
28	Sulawesi Tenggara	1,31	3,02	2,40	0,35	0,88	0,69
29	Gorontalo	0,55	4,79	2,92	0,09	1,31	0,77
30	Sulawesi Barat	1,25	2,07	1,90	0,26	0,57	0,50
31	Maluku	0,92	5,52	3,49	0,19	1,75	1,06
32	Maluku Utara	0,96	0,93	0,94	0,28	0,17	0,20
33	Papua Barat	0,91	9,58	5,84	0,26	3,64	2,18
34	Papua	0,86	8,53	6,31	0,22	2,80	2,05
Indonesia		**1,23**	**2,25**	**1,67**	**0,29**	**0,59**	**0,42**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

*) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing - masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

**) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

***) DKI Jakarta tidak memiliki desa

Lampiran 3.d

INDEKS GINI MENURUT PROVINSI TAHUN 2016 - 2021

No	Provinsi	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	0,34	0,33	0,32	0,32	0,32	0,32
2	Sumatera Utara	0,31	0,34	0,31	0,32	0,31	0,31
3	Sumatera Barat	0,31	0,31	0,31	0,31	0,30	0,30
4	Riau	0,35	0,33	0,35	0,33	0,32	0,33
5	Jambi	0,35	0,33	0,34	0,32	0,32	0,32
6	Sumatera Selatan	0,36	0,37	0,34	0,33	0,34	0,34
7	Bengkulu	0,35	0,35	0,36	0,34	0,32	0,32
8	Lampung	0,36	0,33	0,33	0,33	0,32	0,31
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,29	0,28	0,27	0,27	0,26	0,25
10	Kepulauan Riau	0,35	0,36	0,34	0,34	0,33	0,34
11	DKI Jakarta	0,40	0,41	0,39	0,39	0,40	0,41
12	Jawa Barat	0,40	0,39	0,41	0,40	0,40	0,41
13	Jawa Tengah	0,36	0,37	0,36	0,36	0,36	0,37
14	DI Yogyakarta	0,43	0,44	0,42	0,42	0,44	0,44
15	Jawa Timur	0,40	0,42	0,37	0,37	0,36	0,36
16	Banten	0,39	0,38	0,37	0,37	0,37	0,36
17	Bali	0,37	0,38	0,36	0,37	0,37	0,38
18	Nusa Tenggara Barat	0,37	0,38	0,39	0,38	0,39	0,38
19	Nusa Tenggara Timur	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36	0,34
20	Kalimantan Barat	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,32
21	Kalimantan Tengah	0,35	0,33	0,34	0,34	0,32	0,32
22	Kalimantan Selatan	0,35	0,35	0,34	0,33	0,35	0,33
23	Kalimantan Timur	0,33	0,33	0,34	0,33	0,34	0,33
24	Kalimantan Utara	0,31	0,31	0,30	0,30	0,30	0,29
25	Sulawesi Utara	0,38	0,39	0,37	0,37	0,37	0,36
26	Sulawesi Tengah	0,35	0,35	0,32	0,33	0,32	0,33
27	Sulawesi Selatan	0,40	0,43	0,39	0,39	0,38	0,38
28	Sulawesi Tenggara	0,39	0,40	0,39	0,40	0,39	0,39
29	Gorontalo	0,41	0,41	0,42	0,41	0,41	0,41
30	Sulawesi Barat	0,37	0,34	0,37	0,37	0,36	0,37
31	Maluku	0,34	0,32	0,33	0,32	0,33	0,32
32	Maluku Utara	0,31	0,33	0,34	0,31	0,29	0,28
33	Papua Barat	0,40	0,39	0,39	0,39	0,38	0,37
34	Papua	0,40	0,40	0,40	0,39	0,40	0,40
Indonesia		**0,39**	**0,39**	**0,38**	**0,38**	**0,39**	**0,38**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Ket : Indeks Gini pada tahun 2021 merupakan Indeks Gini pada bulan September 2021

Lampiran 3.e

PERSENTASE PENGELUARAN PER KAPITA SEBULAN MENURUT KELOMPOK KOMODITAS DAN DAERAH TEMPAT TINGGAL 2021

No	Kelompok Barang	Persentase (%)		
		Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Padi-padian	4,37	7,82	5,52
2	Umbi-umbian	0,45	0,96	0,62
3	Ikan/udang/cumi/kerang	3,67	4,89	4,07
4	Daging	2,29	2,42	2,34
5	Telur dan susu	2,83	2,70	2,79
6	Sayur-sayuran	3,68	5,43	4,26
7	Kacang-kacangan	0,94	1,22	1,03
8	Buah-buahan	2,07	2,08	2,07
9	Minyak dan kelapa	1,06	1,70	1,27
10	Bahan minuman	1,27	2,09	1,54
11	Bumbu-bumbuan	0,95	1,33	1,07
12	Konsumsi lainnya	0,89	1,14	0,97
13	Makanan dan minuman jadi	16,29	14,32	15,63
14	Rokok	5,04	8,10	6,06
	Makanan	**45,81**	**56,20**	**49,25**
15	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	28,25	22,46	26,33
16	Aneka barang dan jasa	13,48	9,54	12,17
17	Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	2,39	2,75	2,51
18	Barang tahan lama	4,59	4,62	4,60
19	Pajak, pungutan, dan asuransi	4,29	3,17	3,92
20	Keperluan pesta dan upacara/kenduri	1,19	1,26	1,21
	Bukan Makanan	**54,19**	**43,80**	**50,75**
	Total Pengeluaran	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021 (Susenas Maret 2021)

Lampiran 3.f

RATA-RATA PENGELUARAN BUKAN MAKANAN PER KAPITA PER BULAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	Aneka komoditas dan jasa	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	Komoditas tahan lama	Pajak, pungutan dan asuransi	Keperluan pesta dan upacara/ kenduri	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Aceh	229.499	114.987	53.099	38.928	46.872	10.843	494.228
2	Sumatera Utara	266.349	142.308	33.606	39.623	43.715	9.304	534.905
3	Sumatera Barat	278.654	158.552	49.587	64.804	47.314	14.717	613.629
4	Riau	342.671	151.958	45.225	65.855	50.671	14.148	670.528
5	Jambi	299.454	114.768	40.877	55.876	43.530	12.001	566.507
6	Sumatera Selatan	281.167	114.361	27.887	42.801	37.563	13.596	517.376
7	Bengkulu	277.964	119.006	32.984	75.482	43.222	9.643	558.299
8	Lampung	247.265	115.799	28.988	48.588	39.851	10.124	490.615
9	Kepulauan Bangka Belitung	405.472	157.763	40.370	73.806	57.920	13.639	748.970
10	Kepulauan Riau	562.308	241.372	44.384	83.355	80.016	15.654	1.027.089
11	DKI Jakarta	826.264	348.886	45.862	61.408	116.417	13.660	1.412.497
12	Jawa Barat	357.781	171.738	33.601	63.228	49.958	18.971	695.276
13	Jawa Tengah	249.842	136.948	24.522	60.774	42.727	14.786	529.600
14	DI Yogyakarta	376.041	236.931	29.758	96.731	66.955	16.832	823.248
15	Jawa Timur	271.577	140.942	25.734	60.527	43.443	12.988	555.211
16	Banten	432.304	178.290	36.424	45.305	58.952	15.088	766.363
17	Bali	466.674	172.820	17.439	48.629	70.698	63.892	840.152
18	Nusa Tenggara Barat	269.412	131.348	34.485	73.943	38.720	11.742	559.650
19	Nusa Tenggara Timur	201.248	83.673	16.588	31.607	31.556	7.434	372.106
20	Kalimantan Barat	316.987	121.993	27.682	43.992	39.968	9.146	559.767
21	Kalimantan Tengah	372.721	141.885	30.485	68.611	51.961	17.019	682.681
22	Kalimantan Selatan	357.156	149.198	37.668	73.387	51.953	13.212	682.572
23	Kalimantan Timur	532.721	221.354	34.511	96.957	72.945	23.657	982.146
24	Kalimantan Utara	449.976	186.887	36.418	67.927	61.015	9.655	811.876
25	Sulawesi Utara	304.537	146.101	33.198	52.048	45.323	17.501	598.708
26	Sulawesi Tengah	294.020	102.343	27.861	53.086	45.704	16.382	539.396
27	Sulawesi Selatan	301.628	107.067	32.947	63.052	47.559	18.363	570.615
28	Sulawesi Tenggara	285.125	106.046	30.166	75.305	42.488	21.640	560.770
29	Gorontalo	314.513	125.147	35.600	73.305	50.526	16.970	616.061
30	Sulawesi Barat	218.220	78.020	28.061	63.392	38.482	13.175	439.349
31	Maluku	341.115	130.137	28.246	29.479	38.325	9.118	576.419
32	Maluku Utara	337.270	127.391	30.045	34.388	32.894	10.450	572.438
33	Papua Barat	446.979	167.377	27.315	43.325	46.810	17.372	749.178
34	Papua	376.494	112.144	23.482	24.879	30.225	8.375	575.598
Indonesia		**332.975**	**153.941**	**31.745**	**58.165**	**49.589**	**15.328**	**641.744**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Lampiran 3.g

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 - 2021

No	Provinsi	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Februari	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
		TPT (%)	TPT (%)	TPT (%)	TPT (%)	TPT (%)	TPT (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	5,48	6,17	5,40	6,59	6,30	6,30
2	Sumatera Utara	5,57	5,39	4,71	6,91	6,01	6,33
3	Sumatera Barat	5,38	5,38	5,25	6,88	6,67	6,52
4	Riau	5,36	5,76	4,92	6,32	4,96	4,42
5	Jambi	3,52	4,06	4,26	5,13	4,76	5,09
6	Sumatera Selatan	4,02	4,53	3,90	5,51	5,17	4,98
7	Bengkulu	2,41	3,26	3,08	4,07	3,72	3,65
8	Lampung	3,95	4,03	4,26	4,67	4,54	4,69
9	Kepulauan Bangka Belitung	3,32	3,58	3,35	5,25	5,04	5,03
10	Kepulauan Riau	7,02	7,50	5,98	10,34	10,12	9,91
11	DKI Jakarta	5,50	6,54	5,15	10,95	8,51	8,50
12	Jawa Barat	7,78	8,04	7,71	10,46	8,92	9,82
13	Jawa Tengah	4,19	4,44	4,20	6,48	5,96	5,95
14	DI Yogyakarta	2,89	3,18	3,38	4,57	4,28	4,56
15	Jawa Timur	3,77	3,82	3,60	5,84	5,17	5,74
16	Banten	7,55	8,11	7,99	10,64	9,01	8,98
17	Bali	1,22	1,57	1,25	5,63	5,42	5,37
18	Nusa Tenggara Barat	3,15	3,28	3,04	4,22	3,97	3,01
19	Nusa Tenggara Timur	2,98	3,14	2,64	4,28	3,38	3,77
20	Kalimantan Barat	4,06	4,35	4,47	5,81	5,73	5,82
21	Kalimantan Tengah	3,21	4,04	3,33	4,58	4,25	4,53
22	Kalimantan Selatan	3,41	4,18	3,67	4,74	4,33	4,95
23	Kalimantan Timur	6,65	5,94	6,72	6,87	6,81	6,83
24	Kalimantan Utara	5,84	4,49	5,71	4,97	4,67	4,58
25	Sulawesi Utara	5,17	6,01	5,34	7,37	7,28	7,06
26	Sulawesi Tengah	3,46	3,11	2,93	3,77	3,73	3,75
27	Sulawesi Selatan	5,10	4,62	5,70	6,31	5,79	5,72
28	Sulawesi Tenggara	2,88	3,52	3,10	4,58	4,22	3,92
29	Gorontalo	3,25	3,76	3,29	4,28	3,41	3,01
30	Sulawesi Barat	1,29	2,98	2,39	3,32	3,28	3,13
31	Maluku	6,61	6,69	6,71	7,57	6,73	6,93
32	Maluku Utara	4,96	4,81	4,09	5,15	5,06	4,71
33	Papua Barat	5,81	6,43	6,78	6,80	6,18	5,84
34	Papua	3,22	3,51	3,42	4,28	3,77	3,33
Indonesia		**4,98**	**5,23**	**4,94**	**7,07**	**6,26**	**6,49**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Lampiran 3.h

RATA-RATA LAMA SEKOLAH PENDUDUK BERUMUR 15 TAHUN KE ATAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 - 2021

No	Provinsi	2019	2020	2021
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(3)*
1	Aceh	9,59	9,71	9,77
2	Sumatera Utara	9,71	9,83	9,88
3	Sumatera Barat	9,22	9,34	9,46
4	Riau	9,35	9,47	9,52
5	Jambi	8,86	8,97	9,03
6	Sumatera Selatan	8,60	8,68	8,78
7	Bengkulu	9,08	9,20	9,26
8	Lampung	8,36	8,51	8,56
9	Kepulauan Bangka Belitung	8,35	8,49	8,54
10	Kepulauan Riau	10,13	10,22	10,38
11	DKI Jakarta	11,11	11,17	11,20
12	Jawa Barat	8,79	8,96	9,03
13	Jawa Tengah	8,03	8,19	8,26
14	DI Yogyakarta	9,83	9,95	10,04
15	Jawa Timur	8,11	8,31	8,37
16	Banten	9,07	9,22	9,29
17	Bali	9,19	9,31	9,45
18	Nusa Tenggara Barat	7,98	8,08	8,13
19	Nusa Tenggara Timur	7,98	8,09	8,20
20	Kalimantan Barat	7,80	7,90	8,00
21	Kalimantan Tengah	8,83	8,95	9,03
22	Kalimantan Selatan	8,59	8,69	8,74
23	Kalimantan Timur	9,88	9,99	10,09
24	Kalimantan Utara	9,24	9,30	9,40
25	Sulawesi Utara	9,63	9,74	9,83
26	Sulawesi Tengah	8,98	9,09	9,18
27	Sulawesi Selatan	8,73	8,86	8,95
28	Sulawesi Tenggara	9,25	9,41	9,52
29	Gorontalo	8,11	8,26	8,32
30	Sulawesi Barat	8,22	8,33	8,39
31	Maluku	10,03	10,20	10,25
32	Maluku Utara	9,32	9,42	9,51
33	Papua Barat	9,92	10,00	10,03
34	Papua	6,85	6,96	7,05
Indonesia		**8,75**	**8,90**	**8,97**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Lampiran 3.i

ANGKA MELEK HURUF (PERSENTASE PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS YANG MELEK HURUF)
MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2017 - 2021

No	Provinsi	Laki-laki					Perempuan					Laki-laki + Perempuan				
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	99,5	99,7	99,8	99,7	99,1	98,7	98,7	99,0	99,1	97,4	99,1	99,2	99,4	99,4	98,2
2	Sumatera Utara	99,8	99,8	99,9	99,8	99,5	99,4	99,4	99,4	99,5	98,8	99,6	99,6	99,6	99,6	99,2
3	Sumatera Barat	99,8	99,6	99,6	99,7	99,5	99,1	99,2	99,3	99,2	99,0	99,5	99,4	99,5	99,4	99,3
4	Riau	99,7	99,9	99,7	99,8	99,5	99,3	99,2	99,3	99,4	98,9	99,5	99,6	99,6	99,6	99,2
5	Jambi	99,7	99,6	99,8	99,3	98,7	98,9	98,4	98,3	98,9	97,5	99,3	99,0	99,1	99,1	98,1
6	Sumatera Selatan	99,8	99,8	99,7	99,7	99,3	99,2	99,2	99,4	99,4	98,3	99,5	99,5	99,6	99,5	98,8
7	Bengkulu	99,5	99,3	99,6	99,7	98,9	98,5	98,9	98,7	98,6	96,8	99,0	99,1	99,2	99,2	97,9
8	Lampung	99,3	99,2	99,2	99,3	98,5	97,8	97,3	97,5	97,7	96,0	98,5	98,2	98,4	98,5	97,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	99,0	99,0	99,5	99,1	99,1	97,9	97,7	97,8	98,2	97,1	98,5	98,4	98,7	98,7	98,1
10	Kepulauan Riau	99,4	99,6	99,5	99,7	99,3	99,0	98,9	99,1	98,9	98,9	99,2	99,3	99,3	99,3	99,1
11	DKI Jakarta	99,8	99,9	99,9	99,8	99,8	99,6	99,5	99,6	99,6	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7	99,7
12	Jawa Barat	99,3	99,3	99,3	99,5	99,3	98,3	98,1	98,2	98,2	97,9	98,8	98,7	98,8	98,9	98,6
13	Jawa Tengah	97,9	97,6	97,4	97,4	96,3	93,5	93,1	93,3	93,4	91,4	95,6	95,3	95,3	95,4	93,8
14	DI Yogyakarta	98,4	98,2	98,7	98,5	97,5	95,2	95,1	94,8	95,2	93,1	96,8	96,6	96,7	96,9	95,2
15	Jawa Timur	97,8	97,3	97,3	97,5	95,2	94,1	93,3	93,8	94,1	90,1	95,9	95,2	95,5	95,8	92,6
16	Banten	99,1	99,1	99,2	99,3	98,8	97,2	97,2	97,1	97,6	96,7	98,1	98,2	98,2	98,5	97,8
17	Bali	98,2	98,0	98,5	98,6	97,4	93,6	93,3	95,5	95,7	92,6	95,9	95,6	97,0	97,2	95,0
18	Nusa Tenggara Barat	94,1	93,8	93,8	92,7	91,0	87,3	86,3	86,3	87,6	84,0	90,5	89,8	89,9	90,1	87,4
19	Nusa Tenggara Timur	98,5	97,5	98,6	98,1	94,8	96,9	96,4	97,3	97,0	92,9	97,7	96,9	97,9	97,5	93,9
20	Kalimantan Barat	97,7	97,6	97,7	97,9	95,9	94,6	93,7	94,5	94,7	90,9	96,2	95,7	96,1	96,3	93,4
21	Kalimantan Tengah	99,8	99,7	99,8	99,9	99,3	99,1	99,3	99,1	99,0	98,8	99,5	99,5	99,5	99,5	99,1
22	Kalimantan Selatan	99,6	99,5	99,3	99,4	99,2	98,6	98,5	98,8	98,7	97,4	99,2	99,0	99,1	99,1	98,3
23	Kalimantan Timur	99,6	99,5	99,6	99,6	99,3	98,8	98,9	98,9	98,8	98,5	99,2	99,2	99,3	99,2	98,9
24	Kalimantan Utara	97,6	97,2	98,6	98,6	97,0	97,0	95,7	96,7	97,0	96,0	97,3	96,5	97,7	97,8	96,6
25	Sulawesi Utara	99,8	99,9	99,9	99,9	99,8	99,8	99,9	99,9	99,9	99,8	99,8	99,9	99,9	99,9	99,8
26	Sulawesi Tengah	99,6	99,5	99,9	99,8	98,8	99,0	99,4	99,3	99,4	97,7	99,3	99,5	99,6	99,6	98,3
27	Sulawesi Selatan	97,7	97,5	97,8	97,2	93,9	96,4	95,2	96,0	96,3	91,2	97,0	96,3	96,9	96,8	92,5
28	Sulawesi Tenggara	98,0	97,8	98,4	97,9	96,8	94,8	95,6	96,5	96,1	93,1	96,4	96,7	97,5	97,0	94,9
29	Gorontalo	99,0	99,2	99,3	99,4	98,8	99,2	99,5	99,7	99,5	98,7	99,1	99,3	99,5	99,5	98,8
30	Sulawesi Barat	95,7	96,4	96,9	97,4	95,1	95,0	93,6	95,2	93,1	91,1	95,4	94,9	96,1	95,3	93,1
31	Maluku	99,7	99,8	99,8	99,9	99,5	99,5	99,5	99,6	99,6	99,4	99,6	99,7	99,7	99,8	99,4
32	Maluku Utara	99,8	99,9	99,9	99,7	99,4	99,2	99,1	99,2	99,4	98,0	99,5	99,5	99,6	99,5	98,7
33	Papua Barat	99,7	99,5	99,5	99,3	98,7	99,6	98,7	99,3	99,0	97,1	99,6	99,1	99,4	99,2	97,9
34	Papua	97,0	98,6	99,1	99,2	81,3	96,5	98,0	98,2	97,5	76,2	96,8	98,3	95,7	98,5	78,9
Indonesia		**98,8**	**98,7**	**98,7**	**98,7**	**97,4**	**96,8**	**96,5**	**96,7**	**96,9**	**94,7**	**97,8**	**97,6**	**97,7**	**97,8**	**96,0**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Lampiran 3.j

ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 - 2021

No	Provinsi	2019				2020				2021			
		7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun	7 - 12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	99,8	98,5	83,3	32,5	99,8	98,5	83,3	32,5	99,7	98,4	83,3	32,6
2	Sumatera Utara	99,4	96,9	77,7	25,8	99,4	97,0	78,2	27,0	99,3	97,0	78,7	27,1
3	Sumatera Barat	99,5	96,2	83,6	35,7	99,6	96,6	83,7	36,0	99,6	96,6	84,1	36,4
4	Riau	99,4	95,4	77,3	28,2	99,5	95,5	77,4	28,4	99,7	95,7	77,8	28,8
5	Jambi	99,7	96,4	72,0	23,3	99,8	96,4	72,4	23,8	99,7	96,4	72,5	24,1
6	Sumatera Selatan	99,7	94,5	70,3	18,1	99,7	94,6	70,9	18,5	99,7	94,9	71,5	18,8
7	Bengkulu	99,8	97,2	79,4	30,7	99,8	97,5	79,7	30,0	99,8	97,5	79,8	30,5
8	Lampung	99,8	94,9	71,1	20,7	99,7	95,2	71,3	21,0	99,5	95,6	71,7	21,2
9	Kepulauan Bangka Belitung	99,8	92,9	67,8	17,0	99,7	93,3	67,8	17,5	99,5	93,2	68,2	18,0
10	Kepulauan Riau	99,5	98,5	84,0	19,0	99,6	98,8	84,6	19,7	99,6	98,9	84,4	19,8
11	DKI Jakarta	99,6	98,3	72,0	24,5	99,6	98,3	72,1	25,0	99,5	98,7	72,3	24,9
12	Jawa Barat	99,5	94,2	67,3	22,7	99,7	94,5	67,7	22,8	99,5	95,1	67,8	23,5
13	Jawa Tengah	99,8	96,1	69,7	22,4	99,7	96,4	70,1	22,4	99,7	96,8	70,8	23,6
14	DI Yogyakarta	99,9	99,6	89,0	51,9	99,9	99,5	89,0	51,8	99,7	99,4	89,6	51,4
15	Jawa Timur	99,7	97,4	72,7	24,8	99,5	97,7	73,1	25,8	99,4	97,8	74,1	26,3
16	Banten	99,4	95,8	68,7	21,4	99,4	95,8	68,8	21,6	99,5	96,8	68,9	21,6
17	Bali	99,7	97,7	82,8	27,9	99,6	98,2	83,0	28,7	99,7	98,2	84,0	29,0
18	Nusa Tenggara Barat	99,5	97,9	77,5	25,6	99,5	98,3	77,6	26,0	99,5	98,3	77,5	26,2
19	Nusa Tenggara Timur	98,5	95,1	75,4	29,3	98,6	95,3	75,5	29,5	98,4	95,3	75,8	30,5
20	Kalimantan Barat	98,5	92,9	68,4	23,7	98,6	92,9	69,0	24,1	98,6	93,1	69,4	24,6
21	Kalimantan Tengah	99,7	94,1	67,0	24,0	99,5	94,9	66,9	24,3	99,6	95,2	66,7	24,5
22	Kalimantan Selatan	99,5	92,8	69,2	24,3	99,5	93,0	69,4	24,6	99,4	93,5	69,3	24,7
23	Kalimantan Timur	99,7	98,8	81,8	29,9	99,7	99,1	81,9	29,7	99,6	98,9	82,0	29,9
24	Kalimantan Utara	98,8	96,5	76,1	23,1	98,9	96,5	76,1	23,8	98,7	96,5	76,5	25,0
25	Sulawesi Utara	99,4	95,2	74,0	22,6	99,6	95,3	74,1	23,2	99,4	95,4	73,9	23,7
26	Sulawesi Tengah	98,4	93,0	75,7	27,4	98,4	93,1	75,9	27,6	98,5	93,3	76,3	28,2
27	Sulawesi Selatan	99,2	93,2	70,9	34,4	99,3	93,3	70,9	34,5	99,3	93,6	71,2	35,1
28	Sulawesi Tenggara	99,1	94,8	74,0	31,3	99,1	95,0	74,5	31,8	99,2	95,1	75,0	32,0
29	Gorontalo	99,0	91,6	71,4	31,0	98,9	91,8	71,4	31,0	99,0	92,1	71,3	31,7
30	Sulawesi Barat	98,3	89,9	69,3	23,6	98,3	90,1	69,8	23,2	98,2	90,1	71,2	23,8
31	Maluku	99,6	97,3	79,7	38,6	99,5	97,4	79,9	38,6	99,5	97,7	79,7	39,0
32	Maluku Utara	99,0	97,0	76,4	31,2	99,0	97,2	76,8	31,4	98,8	97,0	77,0	31,2
33	Papua Barat	97,7	96,6	81,5	31,5	97,9	96,9	81,5	31,5	98,1	96,9	81,2	30,9
34	Papua	82,7	80,1	63,5	22,9	83,0	80,5	64,8	23,2	83,4	80,0	64,0	22,9
Indonesia		**99,2**	**95,5**	**72,4**	**25,2**	**99,3**	**95,7**	**72,7**	**25,6**	**99,2**	**96,0**	**73,1**	**26,0**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Lampiran 3.k

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2017 - 2021

No	Provinsi	2017			2018			2019			2020			2021		
		SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
1	Aceh	110,3	98,7	87,5	113,9	99,3	84,8	109,9	97,4	90,1	108,7	97,8	90,9	108,1	97,7	92,6
2	Sumatera Utara	109,5	90,7	93,6	111,1	90,0	91,6	109,5	90,4	94,0	108,5	91,7	94,7	107,9	91,9	96,8
3	Sumatera Barat	110,5	90,4	88,4	111,0	90,9	84,0	109,3	91,4	88,9	108,7	92,3	90,0	108,7	93,2	90,4
4	Riau	108,3	92,4	85,1	106,9	94,2	83,9	106,8	94,0	84,2	105,9	94,9	84,6	105,5	95,3	84,1
5	Jambi	112,4	86,4	83,5	112,0	87,6	78,9	111,1	87,3	82,5	109,4	88,9	83,7	109,5	89,0	84,5
6	Sumatera Selatan	112,1	89,1	83,4	114,1	86,5	77,4	113,3	87,0	80,9	111,6	88,8	81,7	111,4	89,4	82,3
7	Bengkulu	112,7	90,5	87,1	113,5	92,1	85,6	110,0	89,5	93,8	109,2	91,3	94,1	109,3	92,1	93,8
8	Lampung	109,8	91,0	85,2	110,1	94,2	81,6	107,4	91,1	85,7	105,9	92,6	85,8	105,6	93,1	88,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	110,6	84,5	82,9	111,2	85,9	82,2	108,4	85,3	87,1	107,4	88,2	87,2	107,2	88,4	86,5
10	Kepulauan Riau	106,8	90,5	95,8	107,3	92,4	91,0	107,6	92,8	86,7	106,3	94,0	87,5	106,6	94,1	86,3
11	DKI Jakarta	103,4	93,9	79,5	105,3	94,9	74,0	104,8	91,0	74,8	103,4	91,7	76,9	103,2	91,6	77,1
12	Jawa Barat	107,5	88,8	76,5	106,2	91,0	75,3	105,5	90,8	77,8	104,7	91,8	78,3	104,6	93,3	78,1
13	Jawa Tengah	108,4	91,1	84,4	108,2	92,0	84,2	107,7	91,7	86,8	106,3	93,2	86,8	106,4	94,0	86,7
14	DI Yogyakarta	106,3	94,8	93,4	105,8	97,0	87,4	106,2	95,0	89,1	106,0	95,4	89,3	105,2	95,5	90,5
15	Jawa Timur	106,8	92,2	81,4	106,7	94,9	79,1	105,6	94,2	84,8	104,4	96,4	85,2	104,5	97,2	87,6
16	Banten	109,6	91,1	75,9	109,5	91,7	71,7	107,9	91,6	72,9	107,2	92,8	73,4	106,9	94,9	75,7
17	Bali	104,4	96,3	90,0	103,0	96,1	87,7	103,5	97,3	88,0	102,9	97,4	88,7	103,1	98,7	89,9
18	Nusa Tenggara Barat	109,6	95,0	93,9	108,8	93,8	89,6	108,5	92,1	90,9	107,0	93,6	91,8	107,2	93,7	93,8
19	Nusa Tenggara Timur	114,1	91,4	78,8	116,6	88,5	77,8	115,0	87,8	84,6	113,4	89,9	84,7	113,6	90,8	86,4
20	Kalimantan Barat	115,1	81,2	82,5	117,0	83,0	79,3	112,6	83,3	82,5	111,5	85,2	84,5	111,0	85,5	85,2
21	Kalimantan Tengah	112,5	87,3	80,4	110,0	95,8	74,8	110,1	88,7	82,3	108,5	90,6	82,3	108,2	91,1	83,1
22	Kalimantan Selatan	110,3	85,7	77,4	110,2	86,2	75,7	108,7	83,8	78,9	107,3	86,3	79,1	107,1	86,0	80,8
23	Kalimantan Timur	108,1	91,5	99,5	108,0	92,6	96,1	106,8	91,0	95,0	105,8	92,2	95,2	105,3	92,0	95,5
24	Kalimantan Utara	103,9	98,1	87,7	102,3	103,0	89,2	101,2	98,3	97,9	100,5	101,5	98,3	99,8	100,9	96,6
25	Sulawesi Utara	108,7	88,5	91,7	109,0	88,5	82,3	108,2	89,2	86,6	106,6	90,6	86,8	106,6	90,5	86,2
26	Sulawesi Tengah	104,2	91,9	84,9	105,3	92,9	83,5	105,1	90,6	87,4	104,0	92,0	88,4	103,7	93,2	88,1
27	Sulawesi Selatan	109,6	84,0	83,1	110,3	87,0	81,7	108,5	84,2	86,1	107,0	86,2	86,4	106,9	86,8	87,1
28	Sulawesi Tenggara	112,1	88,1	80,0	110,8	85,2	84,8	109,3	85,3	86,8	108,0	87,1	87,7	108,2	87,5	89,5
29	Gorontalo	111,3	81,7	80,9	112,0	80,2	84,3	110,9	79,0	88,6	109,5	79,3	88,7	108,4	79,4	88,0
30	Sulawesi Barat	110,2	83,0	80,3	108,6	82,4	84,5	107,3	82,7	84,1	106,1	84,7	84,4	105,1	85,3	87,8
31	Maluku	112,1	95,0	89,7	112,3	95,6	87,2	112,2	90,4	95,3	110,1	91,1	96,0	110,8	90,6	95,7
32	Maluku Utara	113,1	87,1	91,6	113,7	91,1	88,0	109,7	86,5	93,2	108,7	88,3	93,4	108,1	88,0	95,0
33	Papua Barat	110,2	91,0	89,7	110,7	89,7	90,7	111,2	88,5	96,4	110,2	90,8	97,7	111,0	90,6	97,3
34	Papua	92,9	82,2	67,9	94,5	87,8	65,1	91,9	78,1	76,3	91,3	81,2	76,6	93,1	81,7	75,1
Indonesia		**108,5**	**90,2**	**82,8**	**108,6**	**91,5**	**80,7**	**107,5**	**95,7**	**84,0**	**97,7**	**92,1**	**84,5**	**106,2**	**92,8**	**85,2**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Lampiran 3.l

ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI DAN JENIS KELAMIN TAHUN 2021

No	Provinsi	Laki-laki				Perempuan				Laki-laki + Perempuan			
		SD/Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/Sederajat	PT (19-24)	SD/Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/Sederajat	PT (19-24)	SD/Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/Sederajat	PT (19-24)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	107,23	98,67	90,17	34,59	109,00	96,77	95,09	39,79	108,10	97,74	92,63	37,18
2	Sumatera Utara	107,74	93,05	93,38	23,55	107,98	90,71	100,23	28,84	107,85	91,87	96,75	26,12
3	Sumatera Barat	109,96	90,41	86,95	30,63	107,36	96,14	94,08	44,00	108,66	93,24	90,38	37,25
4	Riau	105,13	94,20	82,43	26,70	105,93	96,32	85,86	33,08	105,52	95,25	84,11	29,77
5	Jambi	110,40	87,98	85,14	22,75	108,55	90,00	83,82	29,16	109,48	88,96	84,47	25,93
6	Sumatera Selatan	110,66	90,21	79,24	21,36	112,14	88,65	85,50	23,00	111,39	89,44	82,30	22,18
7	Bengkulu	110,12	94,13	86,79	30,68	108,49	90,04	100,92	33,69	109,31	92,11	93,79	32,12
8	Lampung	104,97	93,62	83,69	17,85	106,32	92,65	93,64	19,23	105,63	93,12	88,38	18,53
9	Kepulauan Bangka Belitung	107,19	86,57	89,64	11,64	107,13	90,41	83,45	14,31	107,16	88,44	86,49	12,96
10	Kepulauan Riau	105,95	92,69	85,66	22,21	107,30	95,71	86,93	23,77	106,60	94,12	86,31	23,03
11	DKI Jakarta	102,84	94,66	75,05	32,95	103,52	88,53	79,08	32,36	103,17	91,56	77,08	32,65
12	Jawa Barat	104,33	95,00	76,44	20,70	104,83	91,60	79,84	22,63	104,57	93,33	78,10	21,65
13	Jawa Tengah	106,42	94,95	84,48	17,36	106,39	92,99	89,00	22,02	106,40	94,00	86,65	19,67
14	DI Yogyakarta	103,08	97,23	91,52	64,45	107,38	93,87	89,34	64,44	105,15	95,54	90,50	64,45
15	Jawa Timur	105,02	96,36	87,24	23,81	104,01	98,03	87,87	26,70	104,52	97,17	87,55	25,27
16	Banten	107,29	98,29	75,06	24,34	106,53	91,51	76,27	30,10	106,91	94,88	75,66	27,17
17	Bali	101,96	99,56	88,25	31,00	104,28	97,69	91,58	30,27	103,09	98,68	89,87	30,64
18	Nusa Tenggara Barat	107,10	93,04	96,20	27,29	107,37	94,39	91,29	26,31	107,23	93,72	93,75	26,79
19	Nusa Tenggara Timur	115,09	87,83	79,90	24,57	112,02	94,09	93,07	31,17	113,55	90,78	86,36	27,90
20	Kalimantan Barat	112,24	82,11	82,28	21,21	109,70	88,69	88,18	22,68	111,01	85,45	85,21	21,93
21	Kalimantan Tengah	108,64	91,66	86,38	21,97	107,78	90,47	79,82	22,06	108,21	91,07	83,07	22,01
22	Kalimantan Selatan	107,62	88,81	76,04	22,79	106,65	83,09	86,04	24,20	107,14	86,04	80,77	23,49
23	Kalimantan Timur	105,40	95,55	97,88	32,33	105,11	88,56	93,02	35,50	105,26	92,03	95,52	33,86
24	Kalimantan Utara	101,22	97,38	87,32	22,28	98,21	104,88	106,56	19,65	99,78	100,90	96,55	21,00
25	Sulawesi Utara	106,33	88,64	82,53	26,10	106,78	92,35	90,11	31,64	106,56	90,45	86,17	28,83
26	Sulawesi Tengah	105,78	88,72	84,35	29,81	101,60	98,21	91,55	38,25	103,68	93,17	88,06	33,92
27	Sulawesi Selatan	106,47	85,37	87,22	31,50	107,26	88,29	86,94	40,58	106,85	86,82	87,07	36,10
28	Sulawesi Tenggara	108,23	87,64	86,14	34,92	108,22	87,44	93,00	39,81	108,22	87,54	89,50	37,39
29	Gorontalo	105,56	76,74	80,20	23,23	111,44	82,04	96,44	40,81	108,44	79,37	87,97	31,84
30	Sulawesi Barat	106,10	82,06	85,25	21,69	104,05	88,36	90,29	29,29	105,09	85,27	87,81	25,40
31	Maluku	111,77	90,19	94,71	39,08	109,81	90,96	96,91	44,08	110,79	90,57	95,74	41,59
32	Maluku Utara	107,65	87,74	93,98	ü82	108,51	88,26	96,09	39,01	108,07	87,99	95,04	36,32
33	Papua Barat	111,04	91,78	92,11	27,99	110,99	89,16	102,87	31,64	111,02	90,55	97,25	29,81
34	Papua	91,59	84,38	7.834,00	17,46	94,71	78,87	71,66	17,05	93,07	81,68	75,05	17,27
Indonesia		**106,18**	**93,27**	**83,48**	**24,29**	**106,21**	**92,30**	**87,05**	**27,94**	**106,20**	**92,80**	**85,23**	**26,09**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Lampiran 3.m

ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2017 - 2021

No	Provinsi	2017			2018			2019			2020			2021		
		SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C	SD/MI/ Paket A	SMP/Mts/ Paket B	SM/SMK/ MA/Paket C
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
1	Aceh	98,5	86,3	70,2	99,1	86,4	70,3	99,1	86,5	70,4	99,0	86,9	70,7	99,0	87,0	70,8
2	Sumatera Utara	97,2	79,1	67,1	97,6	79,3	67,3	97,7	80,3	67,5	97,7	80,6	68,0	97,7	81,1	68,0
3	Sumatera Barat	98,6	76,5	67,3	98,7	77,1	67,5	98,7	78,1	68,5	98,8	78,4	68,9	98,8	78,8	69,0
4	Riau	97,1	78,9	63,0	97,3	79,1	63,5	97,3	79,9	63,6	97,7	80,5	64,0	97,9	80,5	64,0
5	Jambi	98,4	78,6	60,0	99,0	79,4	60,9	99,1	79,5	60,9	99,1	79,9	61,4	99,4	79,9	61,6
6	Sumatera Selatan	97,2	76,9	59,1	97,9	76,9	59,9	97,9	77,6	59,9	97,9	78,0	60,5	98,0	78,3	60,5
7	Bengkulu	98,6	77,9	65,3	98,6	78,0	65,5	98,7	78,8	65,5	98,7	79,8	65,8	98,6	80,3	66,1
8	Lampung	99,0	79,2	59,0	99,2	80,2	59,2	99,2	80,4	59,4	99,2	81,2	59,6	99,1	82,0	60,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	97,4	73,1	57,7	97,7	74,0	57,9	97,7	74,1	58,4	97,7	74,6	58,8	97,9	74,6	58,8
10	Kepulauan Riau	98,9	84,3	72,0	99,1	84,6	72,9	99,1	85,5	73,0	99,2	86,5	73,5	99,3	86,6	73,4
11	DKI Jakarta	97,6	80,7	59,5	98,0	80,8	60,0	98,1	81,7	60,2	98,1	82,5	60,4	98,2	83,0	60,5
12	Jawa Barat	98,1	80,3	57,2	98,3	81,0	57,3	98,3	81,3	57,5	98,4	82,1	57,9	98,4	82,9	58,6
13	Jawa Tengah	97,1	79,1	59,2	97,8	79,3	59,3	97,8	79,8	59,4	97,9	80,5	59,7	98,2	81,0	60,5
14	DI Yogyakarta	99,3	83,3	69,7	99,5	83,6	70,2	99,5	84,0	70,5	99,6	84,0	71,0	99,4	83,6	71,4
15	Jawa Timur	97,8	81,5	61,5	97,9	82,0	61,5	98,0	82,8	61,8	98,0	83,5	62,2	97,9	83,8	62,6
16	Banten	97,6	80,6	57,9	98,0	80,9	58,7	98,0	81,9	58,8	98,0	82,7	59,1	98,2	84,3	59,7
17	Bali	96,1	85,3	72,4	96,2	86,0	73,0	96,8	86,8	73,0	96,8	87,3	73,3	97,2	87,1	74,8
18	Nusa Tenggara Barat	98,1	83,6	65,7	98,9	83,9	65,8	98,9	83,9	66,0	98,8	85,0	66,8	98,8	85,3	67,1
19	Nusa Tenggara Timur	95,4	67,2	53,3	96,1	68,1	53,7	96,2	69,2	53,7	96,1	69,8	54,1	96,0	70,0	54,3
20	Kalimantan Barat	96,6	65,2	51,0	97,1	65,9	51,2	97,1	66,7	51,2	97,4	67,4	51,7	97,4	68,1	51,8
21	Kalimantan Tengah	98,9	76,1	53,9	99,1	76,7	53,7	99,1	77,7	53,8	99,1	78,5	54,1	99,0	78,8	54,3
22	Kalimantan Selatan	98,5	73,4	57,2	98,8	73,8	57,8	98,8	74,8	57,8	98,8	75,5	58,3	98,9	75,9	58,4
23	Kalimantan Timur	97,4	79,6	68,2	98,4	79,7	68,4	98,4	80,4	68,6	98,4	81,3	69,0	98,4	81,3	69,3
24	Kalimantan Utara	92,5	77,7	63,2	92,7	78,2	64,1	93,2	78,4	64,4	93,5	79,1	64,8	93,4	79,2	65,4
25	Sulawesi Utara	94,5	73,9	62,8	94,9	74,2	62,8	95,0	74,3	63,0	95,1	74,8	63,4	95,4	74,9	63,3
26	Sulawesi Tengah	92,8	72,3	63,8	92,8	73,2	64,3	93,2	73,8	64,7	93,2	74,4	65,0	93,3	75,0	65,4
27	Sulawesi Selatan	97,5	74,4	59,9	98,0	75,1	60,0	98,1	75,8	60,1	98,0	76,2	60,3	98,3	77,0	60,4
28	Sulawesi Tenggara	96,6	76,5	62,7	97,5	76,6	62,9	97,5	77,0	62,9	97,7	77,6	63,4	98,2	77,9	63,7
29	Gorontalo	97,5	69,2	56,8	98,4	69,3	57,4	98,4	70,3	57,5	98,5	70,7	57,9	98,7	71,2	58,2
30	Sulawesi Barat	95,5	69,4	57,5	95,8	69,4	57,6	95,9	69,4	57,6	95,8	70,0	58,1	95,7	70,0	59,8
31	Maluku	95,5	74,0	63,7	95,8	74,1	63,7	96,2	74,7	64,2	96,9	75,2	64,8	96,9	75,5	64,7
32	Maluku Utara	97,0	76,3	63,5	97,1	76,3	63,9	97,1	76,2	64,0	97,2	76,9	64,3	97,2	77,0	64,1
33	Papua Barat	93,6	68,9	62,7	93,7	69,1	63,1	93,8	69,9	63,2	93,9	70,5	63,6	94,1	70,5	63,5
34	Papua	78,8	56,1	43,5	79,1	57,1	44,3	79,2	57,2	44,3	79,3	58,0	44,7	80,4	57,9	44,4
Indonesia		**97,2**	**78,4**	**60,4**	**97,6**	**78,8**	**60,7**	**97,6**	**95,7**	**60,8**	**97,7**	**80,1**	**61,3**	**97,8**	**80,6**	**61,7**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Lampiran 3.n

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PERINGKAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2017-2021

No	Provinsi	2017		2018		2019		2020		2021	
		IPM	Peringkat	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(8)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Aceh	70,60	11	71,19	11	71,90	11	71,99	11	72,18	12
2	Sumatera Utara	70,57	12	71,18	12	71,74	12	71,77	12	72,00	15
3	Sumatera Barat	71,24	9	71,73	9	72,39	9	72,38	9	72,65	9
4	Riau	71,79	6	72,44	6	73,00	6	72,71	6	72,94	7
5	Jambi	69,99	16	70,65	17	71,26	17	71,29	17	71,63	19
6	Sumatera Selatan	68,86	23	69,39	23	70,02	23	70,01	23	70,24	23
7	Bengkulu	69,95	18	70,64	18	71,21	18	71,40	18	71,64	18
8	Lampung	68,25	24	69,02	24	69,57	24	69,69	24	69,90	24
9	Kepulauan Bangka Belitung	69,99	17	70,67	16	71,30	16	71,47	16	71,69	16
10	Kepulauan Riau	74,45	4	74,84	4	75,48	4	75,59	4	75,79	4
11	DKI Jakarta	80,06	1	80,47	1	80,76	1	80,77	1	81,11	1
12	Jawa Barat	70,69	10	71,30	10	72,03	10	72,09	10	72,45	10
13	Jawa Tengah	70,52	13	71,12	13	71,73	13	71,87	13	72,16	13
14	DI Yogyakarta	78,89	2	79,53	2	79,99	2	79,97	2	80,22	2
15	Jawa Timur	70,27	15	70,77	15	71,50	15	71,71	15	72,14	14
16	Banten	71,42	8	71,95	8	72,44	8	72,45	8	72,72	8
17	Bali	74,30	5	74,77	5	75,38	5	75,50	5	75,69	5
18	Nusa Tenggara Barat	66,58	29	67,30	29	68,14	29	68,25	29	68,65	29
19	Nusa Tenggara Timur	63,73	32	64,39	32	65,23	32	65,19	32	65,28	32
20	Kalimantan Barat	66,26	30	66,98	30	67,65	30	67,66	30	67,90	30
21	Kalimantan Tengah	69,79	21	70,42	21	70,91	21	71,05	21	71,25	21
22	Kalimantan Selatan	69,65	22	70,17	22	70,72	22	70,91	22	71,28	20
23	Kalimantan Timur	75,12	3	75,83	3	76,61	3	76,24	3	76,88	3
24	Kalimantan Utara	69,84	20	70,56	20	71,15	20	70,63	20	71,19	22
25	Sulawesi Utara	71,66	7	72,20	7	72,99	7	72,93	7	73,30	6
26	Sulawesi Tengah	68,11	26	68,88	25	69,50	25	69,55	25	69,79	25
27	Sulawesi Selatan	70,34	14	70,90	14	71,66	14	71,93	14	72,24	11
28	Sulawesi Tenggara	69,86	19	70,61	19	71,20	19	71,45	19	71,66	17
29	Gorontalo	67,01	28	67,71	28	68,49	28	68,68	28	69,00	27
30	Sulawesi Barat	64,30	31	65,10	31	65,73	31	66,11	31	66,36	31
31	Maluku	68,19	25	68,87	26	69,45	26	69,49	26	69,71	26
32	Maluku Utara	67,20	27	67,76	27	68,70	27	68,49	27	68,76	28
33	Papua Barat	62,99	33	63,74	33	64,70	33	65,09	33	65,26	33
34	Papua	59,09	34	60,06	34	60,84	34	60,44	34	60,62	34
Indonesia		**70,81**		**71,39**		**71,92**		**71,94**		**72,29**	

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Lampiran 3.o

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KOMPONEN MENURUT PROVINSI TAHUN 2020-2021

No	Provinsi	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp 000)		Capaian		Pertumbuhan
		2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020-2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	69,93	69,96	14,31	14,36	9,33	9,37	9.492	9.572	71,99	72,18	0,19
2	Sumatera Utara	69,10	69,23	13,23	13,27	9,54	9,58	10.420	10.499	71,77	72,00	0,23
3	Sumatera Barat	69,47	69,59	14,02	14,09	8,99	9,07	10.733	10.790	72,38	72,65	0,27
4	Riau	71,60	71,67	13,20	13,28	9,14	9,19	10.675	10.736	72,71	72,94	0,23
5	Jambi	71,16	71,22	12,98	13,04	8,55	8,60	10.392	10.588	71,29	71,63	0,34
6	Sumatera Selatan	69,88	69,98	12,45	12,54	8,24	8,30	10.652	10.662	70,01	70,24	0,23
7	Bengkulu	69,35	69,42	13,61	13,67	8,84	8,87	10.380	10.487	71,40	71,64	0,24
8	Lampung	70,65	70,73	12,65	12,73	8,05	8,08	9.982	10.038	69,69	69,90	0,21
9	Kepulauan Bangka Belitung	70,64	70,73	12,05	12,17	8,06	8,08	12.794	12.819	71,47	71,69	0,22
10	Kepulauan Riau	69,96	70,12	12,87	12,98	10,12	10,18	14.209	14.122	75,59	75,79	0,20
11	DKI Jakarta	72,91	73,01	12,98	13,07	11,13	11,17	18.227	18.520	80,77	81,11	0,34
12	Jawa Barat	73,04	73,23	12,50	12,61	8,55	8,61	10.845	10.934	72,09	72,45	0,36
13	Jawa Tengah	74,37	74,47	12,70	12,77	7,69	7,75	10.930	11.034	71,87	72,16	0,29
14	DI Yogyakarta	74,99	75,04	15,59	15,64	9,55	9,64	14.015	14.111	79,97	80,22	0,25
15	Jawa Timur	71,30	71,38	13,19	13,36	7,78	7,88	11.601	11.707	71,71	72,14	0,43
16	Banten	69,96	70,02	12,89	13,02	8,89	8,93	11.964	12.033	72,45	72,72	0,27
17	Bali	72,13	72,24	13,33	13,40	8,95	9,06	13.929	13.820	75,50	75,69	0,19
18	Nusa Tenggara Barat	66,51	66,69	13,70	13,90	7,31	7,38	10.351	10.377	68,25	68,65	0,40
19	Nusa Tenggara Timur	67,01	67,15	13,18	13,20	7,63	7,69	7.598	7.554	65,19	65,28	0,09
20	Kalimantan Barat	70,69	70,76	12,60	12,65	7,37	7,45	8.930	8.974	67,66	67,90	0,24
21	Kalimantan Tengah	69,74	69,79	12,66	12,74	8,59	8,64	11.154	11.182	71,05	71,25	0,20
22	Kalimantan Selatan	68,66	68,83	12,68	12,81	8,29	8,34	12.032	12.143	70,91	71,28	0,37
23	Kalimantan Timur	74,33	74,61	13,72	13,81	9,77	9,84	11.728	12.116	76,24	76,88	0,64
24	Kalimantan Utara	72,59	72,65	12,93	12,94	9,00	9,11	8.756	9.075	70,63	71,19	0,56
25	Sulawesi Utara	71,69	71,76	12,85	12,94	9,49	9,62	10.791	10.882	72,93	73,30	0,37
26	Sulawesi Tengah	68,69	68,83	13,17	13,23	8,83	8,89	9.335	9.378	69,55	69,79	0,24
27	Sulawesi Selatan	70,57	70,66	13,45	13,52	8,38	8,46	11.079	11.184	71,93	72,24	0,31
28	Sulawesi Tenggara	71,22	71,27	13,65	13,68	9,04	9,13	9.331	9.381	71,45	71,66	0,21
29	Gorontalo	68,07	68,19	13,08	13,11	7,82	7,90	10.020	10.157	68,68	69,00	0,32
30	Sulawesi Barat	65,06	65,25	12,77	12,86	7,89	7,96	9.168	9.153	66,11	66,36	0,25
31	Maluku	65,98	66,09	13,96	13,97	9,93	10,03	8.732	8.770	69,49	69,71	0,22
32	Maluku Utara	68,33	68,45	13,67	13,68	9,04	9,09	8.032	8.140	68,49	68,76	0,27
33	Papua Barat	66,02	66,14	12,91	13,13	7,60	7,69	8.086	7.929	65,09	65,26	0,17
34	Papua	65,79	65,93	11,08	11,11	6,69	6,76	6.954	6.955	60,44	60,62	0,18
Indonesia		**71,47**	**71,57**	**12,98**	**13,08**	**8,48**	**8,54**	**11.013**	**11.156**	**71,94**	**72,29**	**0,35**

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Lampiran 4.a

JUMLAH PUSKESMAS PER PROVINSI
TAHUN 2017 - 2021

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas				
		2017	2017	2018	2020	2021
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	341	348	359	359	360
2	Sumatera Utara	571	581	601	608	615
3	Sumatera Barat	269	275	275	276	279
4	Riau	215	216	228	231	234
5	Jambi	186	195	205	207	207
6	Sumatera Selatan	322	332	341	343	345
7	Bengkulu	180	180	179	179	179
8	Lampung	297	302	310	312	315
9	Kepulauan Bangka Belitung	63	64	64	64	64
10	Kepulauan Riau	74	83	86	88	93
11	DKI Jakarta	340	321	315	315	315
12	Jawa Barat	1.056	1.069	1.072	1.083	1.086
13	Jawa Tengah	876	881	878	878	880
14	DI Yogyakarta	121	121	121	121	121
15	Jawa Timur	963	967	968	968	971
16	Banten	233	242	243	245	245
17	Bali	120	120	120	120	120
18	Nusa Tenggara Barat	160	166	169	174	175
19	Nusa Tenggara Timur	372	381	402	410	421
20	Kalimantan Barat	241	244	246	246	247
21	Kalimantan Tengah	196	200	203	205	205
22	Kalimantan Selatan	230	233	235	236	237
23	Kalimantan Timur	179	183	186	187	188
24	Kalimantan Utara	49	56	55	55	56
25	Sulawesi Utara	189	193	195	195	198
26	Sulawesi Tengah	193	202	206	207	215
27	Sulawesi Selatan	451	458	459	461	469
28	Sulawesi Tenggara	274	284	290	292	293
29	Gorontalo	93	93	93	93	93
30	Sulawesi Barat	94	94	95	96	98
31	Maluku	199	208	209	215	222
32	Maluku Utara	129	134	147	147	147
33	Papua Barat	155	159	159	161	162
34	Papua	394	408	420	428	437
Indonesia		**9.825**	**9.993**	**10.134**	**10.205**	**10.292**

Sumber: Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, 2022

Lampiran 4.b

JUMLAH PUSKESMAS RAWAT INAP DAN NON RAWAT INAP PER PROVINSI
TAHUN 2017 - 2021

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas Rawat Inap					Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap				
		2017	2017	2018	2020	2021	2017	2017	2018	2020	2021
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Aceh	143	148	179	181	180	198	200	180	178	180
2	Sumatera Utara	163	175	184	188	191	408	406	417	420	424
3	Sumatera Barat	91	91	108	111	113	178	184	167	165	166
4	Riau	80	81	102	102	109	135	135	126	129	125
5	Jambi	71	74	81	88	92	115	121	124	119	115
6	Sumatera Selatan	95	95	98	113	114	227	237	243	230	231
7	Bengkulu	46	47	52	52	53	134	133	127	127	126
8	Lampung	115	119	136	140	156	182	183	174	172	159
9	Kepulauan Bangka Belitung	21	21	21	26	26	42	43	43	38	38
10	Kepulauan Riau	29	32	36	35	41	45	51	50	53	52
11	DKI Jakarta	30	28	28	6	6	310	293	287	309	309
12	Jawa Barat	185	186	291	299	299	871	883	781	784	787
13	Jawa Tengah	322	361	368	371	371	554	520	510	507	509
14	DI Yogyakarta	43	49	49	49	49	78	72	72	72	72
15	Jawa Timur	520	534	553	575	588	443	433	415	393	383
16	Banten	56	56	82	81	78	177	186	161	164	167
17	Bali	35	38	42	41	40	85	82	78	79	80
18	Nusa Tenggara Barat	110	111	122	142	143	50	55	47	32	32
19	Nusa Tenggara Timur	137	151	163	164	177	235	230	239	246	244
20	Kalimantan Barat	95	118	125	129	130	146	126	121	117	117
21	Kalimantan Tengah	73	75	88	86	87	123	125	115	119	118
22	Kalimantan Selatan	50	50	50	52	52	180	183	185	184	185
23	Kalimantan Timur	96	97	102	98	99	83	86	84	89	89
24	Kalimantan Utara	32	32	27	22	22	17	24	28	33	34
25	Sulawesi Utara	92	92	94	95	96	97	101	101	100	102
26	Sulawesi Tengah	79	84	102	104	104	114	118	104	103	111
27	Sulawesi Selatan	257	269	301	304	316	194	189	158	157	153
28	Sulawesi Tenggara	81	82	93	91	92	193	202	197	201	201
29	Gorontalo	26	28	32	26	27	67	65	61	67	66
30	Sulawesi Barat	45	45	58	60	61	49	49	37	36	37
31	Maluku	64	64	77	64	65	135	144	132	151	157
32	Maluku Utara	27	36	45	53	53	102	98	102	94	94
33	Papua Barat	45	44	44	45	45	110	115	115	116	117
34	Papua	105	110	115	126	126	289	298	305	302	311
Indonesia		**3.459**	**3.623**	**4.048**	**4.119**	**4.201**	**6.366**	**6.370**	**6.086**	**6.086**	**6.091**

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 4.c

RASIO PUSKESMAS PER KECAMATAN
TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kecamatan	Rasio Puskesmas per Kecamatan
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	360	289	1,2
2	Sumatera Utara	615	455	1,4
3	Sumatera Barat	279	179	1,6
4	Riau	234	169	1,4
5	Jambi	207	143	1,4
6	Sumatera Selatan	345	241	1,4
7	Bengkulu	179	129	1,4
8	Lampung	315	229	1,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	47	1,4
10	Kepulauan Riau	93	76	1,2
11	DKI Jakarta	315	44	7,2
12	Jawa Barat	1.086	627	1,7
13	Jawa Tengah	880	576	1,5
14	DI Yogyakarta	121	78	1,6
15	Jawa Timur	971	666	1,5
16	Banten	245	155	1,6
17	Bali	120	57	2,1
18	Nusa Tenggara Barat	175	117	1,5
19	Nusa Tenggara Timur	421	310	1,4
20	Kalimantan Barat	247	174	1,4
21	Kalimantan Tengah	205	136	1,5
22	Kalimantan Selatan	237	154	1,5
23	Kalimantan Timur	188	103	1,8
24	Kalimantan Utara	56	55	1,0
25	Sulawesi Utara	198	171	1,2
26	Sulawesi Tengah	215	175	1,2
27	Sulawesi Selatan	469	311	1,5
28	Sulawesi Tenggara	293	219	1,3
29	Gorontalo	93	77	1,2
30	Sulawesi Barat	98	69	1,4
31	Maluku	222	118	1,9
32	Maluku Utara	147	117	1,3
33	Papua Barat	162	560	0,3
34	Papua	437	218	2,0
Indonesia		**10.292**	**7.244**	**1,4**

Sumber: Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI, 2022;
Jumlah kecamatan berdasarkan Permendagri No. 137 tahun 2017.

Lampiran 4.d

AKREDITASI PUSKESMAS DI INDONESIA
TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas Terakreditasi	Jumlah Kabupaten/Kota yang Memiliki Puskesmas Terakreditasi	Persentase Puskesmas Terakreditasi (%)	Status Akreditasi Puskesmas				Jumlah Puskesmas Belum Terakreditasi
						Dasar	Madya	Utama	Paripurna	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	359	333	23	92,8	100	203	28	2	26
2	Sumatera Utara	604	559	33	92,5	236	293	29	1	45
3	Sumatera Barat	275	271	19	98,5	61	164	41	5	4
4	Riau	230	214	12	93,0	66	120	28	0	16
5	Jambi	206	188	11	91,3	54	112	19	3	18
6	Sumatera Selatan	341	333	17	97,7	90	196	42	5	8
7	Bengkulu	179	179	10	100,0	70	100	9	0	0
8	Lampung	310	296	15	95,5	25	208	59	4	14
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	7	100,0	8	36	19	1	0
10	Kepulauan Riau	86	83	7	96,5	20	42	20	1	3
11	DKI Jakarta	315	151	6	47,9	11	89	20	31	164
12	Jawa Barat	1.074	1.028	27	95,7	179	617	205	27	46
13	Jawa Tengah	878	873	35	99,4	97	467	270	39	5
14	DI Yogyakarta	121	121	5	100,0	0	43	64	14	0
15	Jawa Timur	968	963	38	99,5	72	530	316	45	5
16	Banten	243	231	8	95,1	44	138	47	2	12
17	Bali	120	120	9	100,0	13	66	31	10	0
18	Nusa Tenggara Barat	171	163	10	95,3	34	94	31	4	8
19	Nusa Tenggara Timur	410	367	22	89,5	166	180	21	0	43
20	Kalimantan Barat	246	230	14	93,5	68	133	24	5	16
21	Kalimantan Tengah	203	194	14	95,6	72	100	20	2	9
22	Kalimantan Selatan	236	233	13	98,7	73	125	32	3	3
23	Kalimantan Timur	186	182	10	97,8	36	102	38	6	4
24	Kalimantan Utara	55	55	5	100,0	21	24	9	1	0
25	Sulawesi Utara	195	169	15	86,7	76	73	19	1	26
26	Sulawesi Tengah	206	198	13	96,1	70	109	19	0	8
27	Sulawesi Selatan	461	454	24	98,5	80	235	118	21	7
28	Sulawesi Tenggara	291	263	17	90,4	94	140	27	2	28
29	Gorontalo	93	92	6	98,9	22	50	17	3	1
30	Sulawesi Barat	96	85	6	88,5	18	54	13	0	11
31	Maluku	212	156	11	73,6	69	77	10	0	56
32	Maluku Utara	147	113	10	76,9	42	64	6	1	34
33	Papua Barat	161	72	13	44,7	35	32	5	0	89
34	Papua	424	120	20	28,3	55	52	13	0	304
Indonesia		**10.166**	**9.153**	**505**	**90,0**	**2.177**	**5.068**	**1.669**	**239**	**1013**

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 4.e

PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN JENIS TENAGA KESEHATAN (9 NAKES) SESUAI DENGAN STANDAR (MINIMAL)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas		Total Puskesmas	% Memenuhi
		Belum Memenuhi	Memenuhi		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	148	211	359	58,77
2	Sumatera Utara	414	200	613	32,63
3	Sumatera Barat	94	185	279	66,31
4	Riau	98	138	232	59,48
5	Jambi	101	106	207	51,21
6	Sumatera Selatan	226	119	345	34,49
7	Bengkulu	125	54	179	30,17
8	Lampung	204	110	313	35,14
9	Kepulauan Bangka Belitung	10	54	64	84,38
10	Kepulauan Riau	42	51	92	55,43
11	DKI Jakarta		332	315	105,40
12	Jawa Barat	596	502	1.083	46,35
13	Jawa Tengah	163	717	879	81,57
14	DI Yogyakarta	13	108	121	89,26
15	Jawa Timur	379	592	971	60,97
16	Banten	120	125	245	51,02
17	Bali	52	68	120	56,67
18	Nusa Tenggara Barat	64	111	175	63,43
19	Nusa Tenggara Timur	315	108	418	25,84
20	Kalimantan Barat	163	84	247	34,01
21	Kalimantan Tengah	156	48	205	23,41
22	Kalimantan Selatan	79	158	237	66,67
23	Kalimantan Timur	76	111	187	59,36
24	Kalimantan Utara	28	30	56	53,57
25	Sulawesi Utara	153	44	196	22,45
26	Sulawesi Tengah	152	63	212	29,72
27	Sulawesi Selatan	170	302	468	64,53
28	Sulawesi Tenggara	209	84	293	28,67
29	Gorontalo	60	33	93	35,48
30	Sulawesi Barat	44	53	98	54,08
31	Maluku	195	29	217	13,36
32	Maluku Utara	121	26	147	17,69
33	Papua Barat	150	20	162	12,35
34	Papua	388	37	432	8,56
Indonesia		**5.308**	**5.013**	**10.260**	**48,86**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Keterangan:

*) Jumlah Puskesmas yang dipakai untuk perhitungan adalah jumlah puskesmas berdasarkan draft kodefikasi puskesmas dari Pusdatin per Juni 2021

**) Perhitungan prosentase adalah jumlah puskesmas yang memenuhi dibanding jumlah puskesmas per provinsi (berdasarkan draft kodefikasi puskesmas dari Pusdatin per Juni 2021)

Lampiran 4.f

PERSENTASE PUSKESMAS TANPA DOKTER
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas		Total Puskesmas *)	% Tanpa Dokter
		Belum Memenuhi	Memenuhi		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	8	351	359	2,23
2	Sumatera Utara	22	592	613	3,59
3	Sumatera Barat	5	274	279	1,79
4	Riau	1	235	232	0,43
5	Jambi	1	206	207	0,48
6	Sumatera Selatan	8	337	345	2,32
7	Bengkulu	5	174	179	2,79
8	Lampung	1	313	313	0,32
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	64	64	0,00
10	Kepulauan Riau	2	91	92	2,17
11	DKI Jakarta	0	332	315	0,00
12	Jawa Barat	8	1.090	1.083	0,74
13	Jawa Tengah	1	879	879	0,11
14	DI Yogyakarta	0	121	121	0,00
15	Jawa Timur	7	964	971	0,72
16	Banten	1	244	245	0,41
17	Bali	0	120	120	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	0	175	175	0,00
19	Nusa Tenggara Timur	40	383	418	9,57
20	Kalimantan Barat	8	239	247	3,24
21	Kalimantan Tengah	12	192	205	5,85
22	Kalimantan Selatan	2	235	237	0,84
23	Kalimantan Timur	1	186	187	0,53
24	Kalimantan Utara	2	56	56	3,57
25	Sulawesi Utara	5	192	196	2,55
26	Sulawesi Tengah	8	207	212	3,77
27	Sulawesi Selatan	12	460	468	2,56
28	Sulawesi Tenggara	42	251	293	14,33
29	Gorontalo	10	83	93	10,75
30	Sulawesi Barat	6	91	98	6,12
31	Maluku	50	174	217	23,04
32	Maluku Utara	23	124	147	15,65
33	Papua Barat	33	137	162	20,37
34	Papua	184	241	432	42,59
Indonesia		**508**	**9.813**	**10.251**	**4,96**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Keterangan:

*) Jumlah Puskesmas yang dipakai untuk perhitungan adalah jumlah puskesmas berdasarkan draft kodefikasi puskesmas dari Pusdatin per Juni 2021

**) Perhitungan prosentase adalah jumlah puskesmas yang belum memenuhi dibanding jumlah puskesmas per provinsi (berdasarkan draft kodefikasi puskesmas dari Pusdatin per Juni 2021)

Lampiran 4.g

JUMLAH PUSKESMAS YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Puskesmas dengan Tenaga Kesehatan yang Sudah Dilatih				Puskesmas yang melakukan Pembinaan Penyehat Tradisional (HATTRA)	Puskesmas yang melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Puskesmas yang melakukan Pembinaan Kelompok Asuhan Mandiri	Puskesmas yang memiliki RTH
					Dilatih Akupunktur	Dilatih Akupressur	Dilatih Pijat Baduta	Asuhan Mandiri (ASMAN), Pemanfaatan TOGA, dan Akrupresur				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	359		0,0	2	107		107	73			
2	Sumatera Utara	601		0,0	0	74		32	241			
3	Sumatera Barat	275		0,0	0	88	1	47	74			
4	Riau	228		0,0	3	111		36	18			
5	Jambi	205	1	0,5	3	73	41	42	100	3	13	12
6	Sumatera Selatan	341		0,0	0	72		28	81			
7	Bengkulu	179		0,0	0	31		20	50			
8	Lampung	310	25	8,1	3	81	1	38	267	31	126	224
9	Kepulauan Bangka Belitung	64		0,0	1	50		27	62	3		
10	Kepulauan Riau	86	14	16,3	4	58		39	52	14	14	14
11	DKI Jakarta	315	13	4,1	4	43		12	133	13	19	13
12	Jawa Barat	1.072	1	0,1	3	89	23	7	508	1	246	3
13	Jawa Tengah	878		0,0	3	142	305	39	40			
14	DI Yogyakarta	121		0,0	18	52		28	54			
15	Jawa Timur	968	102	10,5	10	196	21	167	148	118	301	272
16	Banten	243		0,0	7	96	15	36	26			
17	Bali	120	53	44,2	2	114	26	56	39	85	64	94
18	Nusa Tenggara Barat	169		0,0	0	80		53	141			
19	Nusa Tenggara Timur	402		0,0	0	73		34	29			
20	Kalimantan Barat	246		0,0	0	61		59	51			
21	Kalimantan Tengah	203		0,0	2	25	1	19	35	20	14	7
22	Kalimantan Selatan	235	3	1,3	5	15		28	198	3	3	3
23	Kalimantan Timur	186		0,0	2	41		42	151		73	
24	Kalimantan Utara	55	4	7,3	0	32		4	14	12	12	17
25	Sulawesi Utara	195		0,0	0	77		60	21			
26	Sulawesi Tengah	206	8	3,9	0	96		12	74	21	9	13
27	Sulawesi Selatan	459	22	4,8	4	122	2	21	75	33	24	24
28	Sulawesi Tenggara	290	2	0,7	1	70		43	37	7	2	15
29	Gorontalo	93		0,0	1	41		34	55			
30	Sulawesi Barat	95		0,0	1	29		1	0			
31	Maluku	209		0,0	1	98		37	114			
32	Maluku Utara	147	13	8,8	2	42	1	66	90	31	14	18
33	Papua Barat	159	1	0,6	1	24		2	17	1	1	1
34	Papua	420		0,0	0	15		1	0			
Indonesia		**10.134**	**262**	**2,6**	**83**	**2.418**	**437**	**1.277**	**3.068**	**396**	**935**	**730**

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Keterangan: Puskesmas yang menyelenggarakan menyelenggarakan yankestrad adalah puskesmas yang melakukan yankestrad, pembinaan kelompok asman, pendataan hattra, dan memiliki RTH dlm bentuk TOGA.

Lampiran 4.h

JUMLAH KLINIK PRATAMA DAN KLINIK UTAMA TEREGISTRASI MENURUT KEPEMILIKAN DAN PROVINSI TAHUN 2021

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah Klinik Pratama dan Klinik Utama									
		Pemerintah*		TNI		POLRI		Masyarakat		Jumlah	
		Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama	Klinik Pratama	Klinik Utama
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	11		21		11		150	29	193	29
2	Sumatera Utara	8		9		11		185	14	213	14
3	Sumatera Barat	5	1	6		15		106	18	132	19
4	Riau	1		2		1		96	6	100	6
5	Jambi	1		2		4		66	2	73	2
6	Sumatera Selatan	18		15		14		265	20	312	20
7	Bengkulu	2		2		4		29	3	37	3
8	Lampung	5		5		2		178	10	190	10
9	Kepulauan Bangka Belitung	6		3		6		53	19	68	19
10	Kepulauan Riau	4		6		1		78	21	89	21
11	DKI Jakarta	42	6	15		5		364	207	426	213
12	Jawa Barat	35	3	34	1	25		1339	186	1433	190
13	Jawa Tengah	17		37		26		894	166	974	166
14	DI Yogyakarta	6		6		5		108	8	125	8
15	Jawa Timur	16	1	45		20		900	129	981	130
16	Banten	5	1	3		2		325	26	335	27
17	Bali	2		4		8		105	33	119	33
18	Nusa Tenggara Barat	8		6		7		86	19	107	19
19	Nusa Tenggara Timur	4		3		6		47	6	60	6
20	Kalimantan Barat	5		8		2		39	12	54	12
21	Kalimantan Tengah	4		2		3		41	6	50	6
22	Kalimantan Selatan	9		5		2		42	13	58	13
23	Kalimantan Timur	3		8		4		100	14	115	14
24	Kalimantan Utara	4		2				11	2	17	2
25	Sulawesi Utara	3		3		1		9	1	16	1
26	Sulawesi Tengah			2		5		16	6	23	6
27	Sulawesi Selatan	9	1	28	1	17		118	33	172	35
28	Sulawesi Tenggara	3		4		1		17	7	25	7
29	Gorontalo	2				2		11		15	0
30	Sulawesi Barat			2				1	2	3	2
31	Maluku			6		3		7	1	16	1
32	Maluku Utara	3		2				12	4	17	4
33	Papua Barat							2	2	2	2
34	Papua	1	1	7		3		11	1	22	2
Indonesia		**242**	**14**	**303**	**2**	**216**	**0**	**5.811**	**1.026**	**6.572**	**1.042**

Sumber: Data Klinik Teregistrasi Januari 2022, Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Keterangan: * : Kementerian/Lembaga dan Daerah

Lampiran 4.i

JUMLAH TEMPAT PRAKTIK MANDIRI DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Tempat Praktik Mandiri Dokter Umum	Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Aceh	78	4
2	Sumatera Utara	128	8
3	Sumatera Barat	107	37
4	Riau	74	18
5	Jambi	68	19
6	Sumatera Selatan	225	34
7	Bengkulu	97	16
8	Lampung	117	5
9	Kepulauan Bangka Belitung	30	6
10	Kepulauan Riau	8	1
11	DKI Jakarta	16	1
12	Jawa Barat	466	60
13	Jawa Tengah	1047	304
14	D.I. Yogyakarta	103	31
15	Jawa Timur	682	227
16	Banten	7	1
17	Bali	301	91
18	Nusa Tenggara Barat	111	11
19	Nusa Tenggara Timur	89	29
20	Kalimantan Barat	91	14
21	Kalimantan Tengah	64	12
22	Kalimantan Selatan	150	32
23	Kalimantan Timur	114	48
24	Kalimantan Utara	28	5
25	Sulawesi Utara	151	31
26	Sulawesi Tengah	40	14
27	Sulawesi Selatan	182	77
28	Sulawesi Tenggara	67	13
29	Gorontalo	27	6
30	Sulawesi Barat	35	7
31	Maluku	32	6
32	Maluku Utara	31	8
33	Papua Barat	28	5
34	Papua	57	9
Indonesia		**4.851**	**1.190**

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2022 (Data BPJS)

Lampiran 4.j

JUMLAH LABORATORIUM KESEHATAN MENURUT KEPEMILIKAN
PADA PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Kepemilikan/Pengelola								Jumlah
		Sudah Terakreditasi				Belum Terakreditasi				
		Kemenkes	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten/Kota	Swasta	Kemenkes	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupatwn/Kota	Swasta	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh		1	2	1			4	4	12
2	Sumatera Utara		1	1	6			4	40	52
3	Sumatera Barat		1	6	2			1	27	37
4	Riau		1	3	1			3	6	14
5	Jambi		1	4	1			2	4	12
6	Sumatera Selatan	1		8	2			1	13	25
7	Bengkulu		1	2				3	28	34
8	Lampung		1	1	3			2	13	20
9	Kepulauan Bangka Belitung		1	3				1	6	11
10	Kepulauan Riau			1	1				12	14
11	DKI Jakarta	1		2	31		1		198	233
12	Jawa Barat		1	20	43			6	247	317
13	Jawa Tengah		1	28	21			6	98	154
14	DI Yogyakarta		1	2	4			3	17	27
15	Jawa Timur	1		19	23			12	162	217
16	Banten		1	7	10			1	5	24
17	Bali		1	3	4			2	25	35
18	Nusa Tenggara Barat		1	1	1			4	13	20
19	Nusa Tenggara Timur		1	2	1			6	52	62
20	Kalimantan Barat		1	4	2			1	16	24
21	Kalimantan Tengah		1	3	2			5	19	30
22	Kalimantan Selatan		1	2	2			2	39	46
23	Kalimantan Timur		1	2	8			4	19	34
24	Kalimantan Utara			2				1	3	6
25	Sulawesi Utara		1		1			2	5	9
26	Sulawesi Tengah		1		1				1	3
27	Sulawesi Selatan	1		5	4		1	11	12	34
28	Sulawesi Tenggara		1	1	1			7	6	16
29	Gorontalo		1	1	1			1	4	8
30	Sulawesi Barat			1			1		2	4
31	Maluku		1	1				1	3	6
32	Maluku Utara							2	7	9
33	Papua Barat								2	2
34	Papua		1						12	13
Indonesia		**4**	**25**	**137**	**177**		**3**	**98**	**1.120**	**1.564**

Sumber: Ditjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, 2022

Lampiran 4.k

JUMLAH UNIT TRANSFUSI DARAH TEREGISTRASI MENURUT PROVINSI DAN PENYELENGGARA DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah UTD		
		Pemerintah/ Pemerintah Daerah	Palang Merah Indonesia (PMI)	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	11	4	15
2	Sumatera Utara	8	4	12
3	Sumatera Barat	6	3	9
4	Riau	5	5	10
5	Jambi	3	1	4
6	Sumatera Selatan	7	5	12
7	Bengkulu	3	3	6
8	Lampung	5	8	13
9	Kepulauan Bangka Belitung	3	2	5
10	Kepulauan Riau	1	1	2
11	DKI Jakarta	2	2	4
12	Jawa Barat	2	16	18
13	Jawa Tengah		33	33
14	DI Yogyakarta	1	5	6
15	Jawa Timur	1	29	30
16	Banten	0	4	4
17	Bali	0	6	6
18	Nusa Tenggara Barat	7	3	10
19	Nusa Tenggara Timur	2		2
20	Kalimantan Barat	4	2	6
21	Kalimantan Tengah	3	2	5
22	Kalimantan Selatan	6	5	11
23	Kalimantan Timur	2	3	5
24	Kalimantan Utara		1	1
25	Sulawesi Utara	1	1	2
26	Sulawesi Tengah	4	2	6
27	Sulawesi Selatan	15	3	18
28	Sulawesi Tenggara	1		1
29	Gorontalo	1	1	2
30	Sulawesi Barat	1	1	2
31	Maluku	2		2
32	Maluku Utara	2	1	3
33	Papua Barat			0
34	Papua			0
Indonesia		**109**	**156**	**265**

Sumber: Data UTD Teregistrasi per Desember 2021, Ditjen Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 8.a

JUMLAH RUMAH SAKIT MENURUT JENIS, KEPEMILIKAN, DAN PROVINSI
TAHUN 2021

No	Fasilitas Kesehatan	Pemilikan/Pengelola													
		Kemenkes		Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		TNI/POLRI		BUMN/Kementerian Lain*		Swasta		Jumlah	
		RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus	RS Umum	RS Khusus
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1	Aceh	0	0	1	2	25	0	5	0	3	0	32	4	66	6
2	Sumatera Utara	1	0	2	4	36	0	9	0	10	1	138	21	196	26
3	Sumatera Barat	1	1	3	2	22	0	4	0	2	0	19	26	51	29
4	Riau	0	0	2	1	16	0	4	0	3	0	36	14	61	15
5	Jambi	0	0	1	1	14	0	2	0	0	0	21	2	38	3
6	Sumatera Selatan	2	0	1	4	30	0	4	0	3	0	28	15	68	19
7	Bengkulu	0	0	1	1	12	0	3	0	0	0	8	1	24	2
8	Lampung	0	0	2	1	16	0	2	0	0	0	40	19	60	20
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	1	1	11	0	1	0	0	0	10	3	23	4
10	Kepulauan Riau	0	0	2	0	11	0	3	0	1	0	14	5	31	5
11	DKI Jakarta	3	7	30	1	0	0	9	2	8	1	93	39	143	50
12	Jawa Barat	1	4	4	2	51	3	15	0	4	1	254	49	329	59
13	Jawa Tengah	3	3	4	3	56	1	11	0	3	1	202	37	279	45
14	DI Yogyakarta	1	0	0	2	9	0	3	0	0	1	47	18	60	21
15	Jawa Timur	0	1	10	4	61	0	24	1	5	2	218	74	318	82
16	Banten	1	0	2	0	12	0	3	0	1	0	75	29	94	29
17	Bali	1	0	1	2	15	0	3	0	1	0	41	9	62	11
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	2	2	16	0	2	0	0	0	17	4	37	6
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	1	1	25	0	5	0	0	0	22	2	53	3
20	Kalimantan Barat	0	0	1	1	21	0	5	0	1	0	17	7	45	8
21	Kalimantan Tengah	0	0	1	1	18	0	2	0	0	0	6	2	27	3
22	Kalimantan Selatan	0	0	2	2	15	0	4	0	2	0	19	8	42	10
23	Kalimantan Timur	0	0	3	2	17	1	4	0	1	0	22	10	47	13
24	Kalimantan Utara	0	0	1	0	8	0	2	0	1	0	0	0	12	0
25	Sulawesi Utara	2	0	3	2	15	1	4	0	0	2	21	3	45	8
26	Sulawesi Tengah	0	0	2	0	23	0	3	0	1	0	6	5	35	5
27	Sulawesi Selatan	2	1	3	4	36	1	7	1	1	1	41	22	90	30
28	Sulawesi Tenggara	0	0	1	1	17	0	2	0	1	0	16	0	37	1
29	Gorontalo	0	0	1	0	10	0	1	0	0	0	4	1	16	1
30	Sulawesi Barat	0	0	1	0	7	0	1	0	0	0	3	2	12	2
31	Maluku	1	0	2	1	17	0	4	0	0	0	8	0	32	1
32	Maluku Utara	0	0	2	1	12	0	2	0	0	0	4	1	20	2
33	Papua Barat	0	0	1	0	13	0	5	0	1	0	3	0	23	0
34	Papua	0	0	2	1	27	0	6	0	0	0	11	0	46	1
Indonesia		**19**	**17**	**96**	**50**	**694**	**7**	**164**	**4**	**53**	**10**	**1.496**	**432**	**2.522**	**520**

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2022 per 2 Januari 2022
Keterangan: *RS BUMN/KL termasuk RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet

Lampiran 8.b

JUMLAH RUMAH SAKIT DAN JUMLAH TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT
MENURUT KELAS RUMAH SAKIT DAN PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Kelas A			Kelas B			Kelas C			Kelas D dan Kelas D Pratama			Belum Ditetapkan Kelas		
		RS		TT	RS		TT	RS		TT	RS		TT	RS		TT
		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%		Jumlah	%	
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Aceh	2	2,8	1.370	10	13,9	2.532	34	47,2	4.647	25	34,7	2.020	1	1,4	42
2	Sumatera Utara	2	0,9	1.210	29	13,1	6.641	122	55,0	13.600	61	27,5	2.823	8	3,6	84
3	Sumatera Barat	2	2,5	992	6	7,5	866	51	63,8	4.637	17	21,3	1.044	4	5,0	19
4	Riau	1	1,3	537	6	7,9	1.809	44	57,9	4.825	25	32,9	1.267	0	0,0	0
5	Jambi	0	0,0	0	4	9,8	993	24	58,5	3.199	13	31,7	554	0	0,0	0
6	Sumatera Selatan	2	2,3	1.136	8	9,2	1.678	50	57,5	5.250	27	31,0	1.686	0	0,0	0
7	Bengkulu	0	0,0	0	2	7,7	573	15	57,7	1.707	9	34,6	564	0	0,0	0
8	Lampung	1	1,3	613	5	6,3	940	54	67,5	5.405	20	25,0	1.228	0	0,0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0,0	0	2	7,4	349	15	55,6	1.573	10	37,0	505	0	0,0	0
10	Kepulauan Riau	0	0,0	0	6	16,7	1.441	20	55,6	2.107	10	27,8	488	0	0,0	0
11	DKI Jakarta	17	8,8	5.966	71	36,8	12.135	77	39,9	5.748	25	13,0	1.325	3	1,6	48
12	Jawa Barat	8	2,1	1.991	70	18,0	18.733	231	59,5	26.607	76	19,6	4.736	3	0,8	231
13	Jawa Tengah	9	2,8	4.005	36	11,1	11.234	144	44,4	20.137	133	41,0	10.337	2	0,6	188
14	DI Yogyakarta	2	2,5	935	14	17,3	2.546	31	38,3	1.964	34	42,0	1.698	0	0,0	0
15	Jawa Timur	5	1,3	4.353	62	15,5	16.681	197	49,3	20.798	133	33,3	9.183	3	0,8	85
16	Banten	0	0,0	0	20	16,3	4.714	88	71,5	7.991	13	10,6	715	2	1,6	6
17	Bali	3	4,1	1.213	11	15,1	2.092	48	65,8	4.807	11	15,1	512	0	0,0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0,0	0	4	9,3	1.720	21	48,8	2.833	18	41,9	1.493	0	0,0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0,0	0	2	3,6	433	29	51,8	3.629	24	42,9	1.521	1	1,8	18
20	Kalimantan Barat	0	0,0	0	4	7,5	1.720	31	58,5	3.963	18	34,0	873	0	0,0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0,0	0	4	13,3	1.097	17	56,7	2.361	8	26,7	456	1	3,3	88
22	Kalimantan Selatan	2	3,8	939	6	11,5	1.360	31	59,6	3.610	13	25,0	569	0	0,0	0
23	Kalimantan Timur	1	1,7	170	6	10,0	2.197	33	55,0	3.237	20	33,3	1.182	0	0,0	0
24	Kalimantan Utara	0	0,0	0	1	8,3	304	5	41,7	802	6	50,0	265	0	0,0	0
25	Sulawesi Utara	1	1,9	844	4	7,5	888	31	58,5	3.850	15	28,3	1.224	2	3,8	27
26	Sulawesi Tengah	0	0,0	0	4	10,0	1.251	24	60,0	3.327	12	30,0	578	0	0,0	0
27	Sulawesi Selatan	2	1,7	1.913	29	24,2	6.590	62	51,7	7.087	24	20,0	1.120	3	2,5	11
28	Sulawesi Tenggara	0	0,0	0	2	5,3	628	15	39,5	2.181	19	50,0	883	2	5,3	0
29	Gorontalo	0	0,0	0	2	11,8	683	6	35,3	915	9	52,9	608	0	0,0	0
30	Sulawesi Barat	0	0,0	0	0	0,0	0	7	50,0	1.169	5	35,7	312	2	14,3	9
31	Maluku	0	0,0	0	4	12,1	884	8	24,2	1.126	20	60,6	1.033	1	3,0	0
32	Maluku Utara	0	0,0	0	1	4,5	334	7	31,8	760	12	54,5	656	2	9,1	49
33	Papua Barat	0	0,0	0	0	0,0	0	7	30,4	1.083	14	60,9	936	2	8,7	71
34	Papua	0	0,0	0	2	4,3	450	14	29,8	2.630	26	55,3	1.282	5	10,6	295
Indonesia		**60**	**2,0**	**28.187**	**437**	**14,4**	**106.496**	**1.593**	**52,4**	**179.565**	**905**	**29,8**	**55.676**	**47**	**1,5**	**1.271**

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2022 per 2 Januari 2022

Lampiran 8.c

JUMLAH RUMAH SAKIT DAN RASIO TEMPAT TIDUR RUMAH SAKIT PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2020 - 2021

No	Provinsi	2020				2021			
		Estimasi Jumlah Penduduk 2020	Total			Estimasi Jumlah Penduduk 2021	Total		
			RS	TT			RS	TT	
				Jumlah	Rasio			Jumlah	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Aceh	5.371.532	70	9.311	1,7	5.459.114	72,0	10.611	1,9
2	Sumatera Utara	14.562.549	222	24.838	1,7	14.954.028	222,0	24.358	1,6
3	Sumatera Barat	5.441.197	79	8.092	1,5	5.610.859	80,0	7.558	1,3
4	Riau	6.971.745	73	8.467	1,2	7.066.464	76,0	8.438	1,2
5	Jambi	3.624.579	42	4.701	1,3	3.641.279	41,0	4.746	1,3
6	Sumatera Selatan	8.470.683	87	10.583	1,2	8.702.628	87,0	9.750	1,1
7	Bengkulu	1.991.838	25	2.904	1,5	2.016.437	26,0	2.844	1,4
8	Lampung	8.447.737	80	8.391	1,0	8.609.884	80,0	8.186	1,0
9	Kep. Bangka Belitung	1.488.792	25	2.160	1,5	1.488.245	27,0	2.427	1,6
10	Kepulauan Riau	2.189.653	36	3.712	1,7	2.378.795	36,0	4.036	1,7
11	DKI Jakarta	10.557.810	193	32.284	3,1	10.645.542	193,0	25.222	2,4
12	Jawa Barat	49.316.712	377	54.137	1,1	50.103.251	388,0	52.298	1,0
13	Jawa Tengah	34.718.204	319	47.923	1,4	34.917.040	324,0	45.901	1,3
14	DI Yogyakarta	3.842.932	85	7.219	1,9	3.970.220	81,0	7.143	1,8
15	Jawa Timur	39.698.631	395	51.504	1,3	40.156.672	400,0	51.100	1,3
16	Banten	12.927.316	120	13.881	1,1	13.074.189	123,0	13.426	1,0
17	Bali	4.336.923	72	8.183	1,9	4.466.595	73,0	8.624	1,9
18	Nusa Tenggara Barat	5.070.385	39	4.510	0,9	5.298.471	43,0	6.046	1,1
19	Nusa Tenggara Timur	5.456.203	54	5.052	0,9	5.588.744	56,0	5.601	1,0
20	Kalimantan Barat	5.069.127	55	5.922	1,2	5.162.937	53,0	6.556	1,3
21	Kalimantan Tengah	2.714.859	28	3.885	1,4	2.722.168	30,0	4.002	1,5
22	Kalimantan Selatan	4.244.096	47	6.187	1,5	4.319.794	52,0	6.478	1,5
23	Kalimantan Timur	3.721.389	57	7.551	2,0	3.708.936	60,0	6.786	1,8
24	Kalimantan Utara	742.245	11	1.177	1,6	721.181	12,0	1.371	1,9
25	Sulawesi Utara	2.506.981	51	6.706	2,7	2.530.967	53,0	6.833	2,7
26	Sulawesi Tengah	3.054.023	40	4.833	1,6	3.120.863	40,0	5.156	1,7
27	Sulawesi Selatan	8.851.240	116	16.723	1,9	8.956.181	120,0	16.721	1,9
28	Sulawesi Tenggara	2.704.737	37	3.496	1,3	2.743.155	38,0	3.692	1,3
29	Gorontalo	1.202.631	16	2.335	1,9	1.195.883	17,0	2.206	1,8
30	Sulawesi Barat	1.380.256	13	1.496	1,1	1.396.749	14,0	1.490	1,1
31	Maluku	1.802.870	33	3.109	1,7	1.805.376	33,0	3.043	1,7
32	Maluku Utara	1.255.771	21	1.608	1,3	1.268.866	22,0	1.799	1,4
33	Papua Barat	959.617	20	2.160	2,3	1.008.698	23,0	2.090	2,1
34	Papua	3.379.302	47	4.508	1,3	3.438.243	47,0	4.657	1,4
Indonesia		**268.074.565**	**2.985**	**379.548**	**1,4**	**272.248.454**	**3.042,0**	**371.195**	**1,4**

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2022 per 2 Januari 2022

Ket : 1. Rumah Sakit yang telah memiliki kode RS
2. Estimasi Jumlah Penduduk 2021: Penduduk Sasaran Program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021 (BPS di Olah Pusdatin)
3. Rasio tempat tidur per 1.000 penduduk

Lampiran 8.d

JUMLAH RUMAH SAKIT DAN TEMPAT TIDUR RS LAPANGAN/ RS DARURAT COVID-19 MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Fasilitas Kesehatan	Jumlah RS	Jumlah TT
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Aceh	0	0
2	Sumatera Utara	0	0
3	Sumatera Barat	1	0
4	Riau	0	0
5	Jambi	0	0
6	Sumatera Selatan	0	0
7	Bengkulu	0	0
8	Lampung	1	50
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	0
10	Kepulauan Riau	1	920
11	DKI Jakarta	3	8286
12	Jawa Barat	3	567
13	Jawa Tengah	5	1216
14	DI Yogyakarta	3	200
15	Jawa Timur	45	3338
16	Banten	0	0
17	Bali	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0
20	Kalimantan Barat	2	290
21	Kalimantan Tengah	0	0
22	Kalimantan Selatan	1	266
23	Kalimantan Timur	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0
25	Sulawesi Utara	3	626
26	Sulawesi Tengah	1	57
27	Sulawesi Selatan	2	66
28	Sulawesi Tenggara	0	0
29	Gorontalo	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0
31	Maluku	4	520
32	Maluku Utara	0	0
33	Papua Barat	1	138
34	Papua	0	0
Indonesia		**77**	**16.540**

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2021 per 2 Januari 2022

Lampiran 8.e

AKREDITASI RUMAH SAKIT DI INDONESIA
TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Rumah Sakit	Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi	Rumah Sakit Swasta Terakreditasi	Total Rumah Sakit Terakreditasi	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	72	33	32	65	90,3
2	Sumatera Utara	222	46	118	164	73,9
3	Sumatera Barat	80	28	37	65	81,3
4	Riau	76	21	41	62	81,6
5	Jambi	41	16	17	33	80,5
6	Sumatera Selatan	87	32	33	65	74,7
7	Bengkulu	26	15	6	21	80,8
8	Lampung	80	18	48	66	82,5
9	Kepulauan Bangka Belitung	27	10	8	18	66,7
10	Kepulauan Riau	36	14	15	29	80,6
11	DKI Jakarta	193	55	114	169	87,6
12	Jawa Barat	388	69	255	324	83,5
13	Jawa Tengah	324	75	203	278	85,8
14	DI Yogyakarta	81	14	54	68	84,0
15	Jawa Timur	400	100	253	353	88,3
16	Banten	123	14	84	98	79,7
17	Bali	73	21	43	64	87,7
18	Nusa Tenggara Barat	43	18	15	33	76,7
19	Nusa Tenggara Timur	56	24	21	45	80,4
20	Kalimantan Barat	53	25	20	45	84,9
21	Kalimantan Tengah	30	19	3	22	73,3
22	Kalimantan Selatan	52	22	20	42	80,8
23	Kalimantan Timur	60	20	23	43	71,7
24	Kalimantan Utara	12	7	1	8	66,7
25	Sulawesi Utara	53	22	19	41	77,4
26	Sulawesi Tengah	40	21	10	31	77,5
27	Sulawesi Selatan	120	46	48	94	78,3
28	Sulawesi Tenggara	38	21	9	30	78,9
29	Gorontalo	17	8	4	12	70,6
30	Sulawesi Barat	14	8	1	9	64,3
31	Maluku	33	18	5	23	69,7
32	Maluku Utara	22	12	4	16	72,7
33	Papua Barat	23	11	3	14	60,9
34	Papua	47	26	6	32	68,1
Indonesia		**3.042**	**909**	**1.573**	**2.482**	**81,6**

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan (Direktorat Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan), Kemenkes RI, 2021

Lampiran 8.f

PERSENTASE RUMAH SAKIT KABUPATEN/KOTA KELAS C
YANG MEMILIKI 4 DOKTER SPESIALIS DASAR DAN 3 DOKTER SPESIALIS LAINNYA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Rumah Sakit Kabupaten/Kota Kelas C yang Melaporkan Data	Jumlah RS yang Memiliki 4 Dokter Spesialis Dasar dan 3 Dokter Spesialis Penunjang	Persentase
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	24	24	100,0
2	Sumatera Utara	33	28	84,8
3	Sumatera Barat	21	15	71,4
4	Riau	16	12	75,0
5	Jambi	16	12	75,0
6	Sumatera Selatan	29	20	69,0
7	Bengkulu	10	8	80,0
8	Lampung	16	13	81,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	8	8	100,0
10	Kepulauan Riau	10	6	60,0
11	DKI Jakarta*	0	0	0,0
12	Jawa Barat	52	42	80,8
13	Jawa Tengah	56	53	94,6
14	DI Yogyakarta	9	8	88,9
15	Jawa Timur	60	52	86,7
16	Banten	11	9	81,8
17	Bali	11	9	81,8
18	Nusa Tenggara Barat	13	9	69,2
19	Nusa Tenggara Timur	21	15	71,4
20	Kalimantan Barat	19	11	57,9
21	Kalimantan Tengah	14	10	71,4
22	Kalimantan Selatan	18	13	72,2
23	Kalimantan Timur	12	10	83,3
24	Kalimantan Utara	5	4	80,0
25	Sulawesi Utara	17	9	52,9
26	Sulawesi Tengah	23	14	60,9
27	Sulawesi Selatan	32	25	78,1
28	Sulawesi Tenggara	16	8	50,0
29	Gorontalo	9	7	77,8
30	Sulawesi Barat	7	4	57,1
31	Maluku	13	5	38,5
32	Maluku Utara	7	4	57,1
33	Papua Barat	9	6	66,7
34	Papua	19	6	31,6
Indonesia		**636**	**479**	**75,3**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 8.g

JUMLAH RUMAH SAKIT PEMERINTAH YANG TELAH MENYELENGGARAKAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL INTEGRASI MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Rumah Sakit Pemerintah	Jumlah RS Pemerintah yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi	Persentase RS Pemerintah yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi	Jumlah Rumah Sakit Pemerintah dengan Tenaga Kesehatan yang Sudah Dilatih	
					Dilatih Akupunktur	Dilatih Herbal Medik
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	34	3	8,8	7	2
2	Sumatera Utara	62		0,0	7	2
3	Sumatera Barat	33		0,0	4	3
4	Riau	26		0,0	8	3
5	Jambi	18		0,0	7	
6	Sumatera Selatan	44		0,0	6	1
7	Bengkulu	17		0,0	4	1
8	Lampung	20		0,0	6	1
9	Kepulauan Bangka Belitung	12		0,0	6	1
10	Kepulauan Riau	16		0,0	4	1
11	DKI Jakarta	61		0,0	2	
12	Jawa Barat	81		0,0	12	2
13	Jawa Tengah	82	3	3,7	14	5
14	DI Yogyakarta	15	1	6,7	7	
15	Jawa Timur	106	3	2,8	15	4
16	Banten	18		0,0	5	2
17	Bali	23	2	8,7	3	4
18	Nusa Tenggara Barat	20	1	5,0	5	1
19	Nusa Tenggara Timur	29		0,0	7	
20	Kalimantan Barat	31		0,0	5	1
21	Kalimantan Tengah	20		0,0	5	2
22	Kalimantan Selatan	25		0,0	2	2
23	Kalimantan Timur	27	1	3,7	6	2
24	Kalimantan Utara	10		0,0	1	
25	Sulawesi Utara	27		0,0	6	
26	Sulawesi Tengah	28		0,0	5	1
27	Sulawesi Selatan	53		0,0	6	1
28	Sulawesi Tenggara	22		0,0	5	
29	Gorontalo	11		0,0	5	1
30	Sulawesi Barat	9		0,0	4	1
31	Maluku	23	1	4,3	4	1
32	Maluku Utara	16		0,0	4	
33	Papua Barat	16		0,0	3	
34	Papua	36	1	2,8	5	1
Indonesia		**1.071**	**16**	**1,5**	**195**	**46**

Sumber: Ditjen. Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Keterangan: 1.) RS yang menyelenggarakan yankestrad integrasi merupakan RS yang telah memiliki SK Penetapan Penyelenggaraan Yankestrad Integrasi, 2)Jumlah tenaga kesehatan yang dilatih RS bisa lebih dari satu jenis pelatihan

Lampiran 8.h

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN KESEHATAN KERJA DAN KESEHATAN OLAHRAGA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten Kota	Target Kabupaten Kota	Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Kerja			Jumlah Kab/Kota yang Melaksanakan Kesehatan Olahraga		
				Capaian	Persentase (Target)	Persentase	Capaian	Persentase (Target)	Persentase
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Aceh	23	23	20	87	87	20	87,0	87,0
2	Sumatera Utara	33	15	9	60	27	12	80,0	36,4
3	Sumatera Barat	19	14	14	100	74	14	100,0	73,7
4	Riau	12	8	8	100	67	3	37,5	25,0
5	Jambi	11	7	8	114	73	4	57,1	36,4
6	Sumatera Selatan	17	11	3	27	18	2	18,2	11,8
7	Bengkulu	10	10	3	30	30	1	10,0	10,0
8	Lampung	15	10	9	90	60	6	60,0	40,0
9	Kep. Bangka Belitung	7	7	7	100	100	4	57,1	57,1
10	Kepulauan Riau	7	4	6	150	86	2	50,0	28,6
11	DKI Jakarta	6	6	6	100	100	6	100,0	100,0
12	Jawa Barat	27	22	24	109	89	24	109,1	88,9
13	Jawa Tengah	35	22	22	100	63	21	95,5	60,0
14	DI Yogyakarta	5	5	5	100	100	4	80,0	80,0
15	Jawa Timur	38	21	21	100	55	21	100,0	55,3
16	Banten	8	8	8	100	100	6	75,0	75,0
17	Bali	9	9	9	100	100	9	100,0	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	2	6	300	60	6	300,0	60,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	7	7	100	32	1	14,3	4,5
20	Kalimantan Barat	14	10	2	20	14	1	10,0	7,1
21	Kalimantan Tengah	14	7	3	43	21	0	0,0	0,0
22	Kalimantan Selatan	13	5	5	100	38	6	120,0	46,2
23	Kalimantan Timur	10	7	2	29	20	0	0,0	0,0
24	Kalimantan Utara	5	4	2	50	40	1	25,0	20,0
25	Sulawesi Utara	15	15	15	100	100	15	100,0	100,0
26	Sulawesi Tengah	13	9	10	111	77	5	55,6	38,5
27	Sulawesi Selatan	24	16	14	88	58	14	87,5	58,3
28	Sulawesi Tenggara	17	12	16	133	94	16	133,3	94,1
29	Gorontalo	6	6	6	100	100	6	100,0	100,0
30	Sulawesi Barat	6	5	3	60	50	2	40,0	33,3
31	Maluku	11	5	4	80	36	4	80,0	36,4
32	Maluku Utara	10	6	2	33	20	1	16,7	10,0
33	Papua Barat	13	6	6	100	46	6	100,0	46,2
34	Papua	29	10	13	130	45	12	120,0	41,4
Indonesia		**514**	**334**	**298**	**89**	**58**	**255**	**76,3**	**49,6**

Sumber: Laporan Provinsi s/d 15 Januari 2022, Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 8.i

JUMLAH PELAKSANAAN KESEHATAN KERJA, PENGUKURAN DAN PEMERIKSAAN KEBUGARAN JASMANI MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Pelaksanaan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja				Jumlah Instansi Pemerintah yang melaksanakan Pengukuran Kebugaran Jasmani	Jumlah Pembinaan Pemeriksaan Kebugaran Jasmani bagi Jemaah Haji	Jumlah Kelompok Olah Raga
		Puskesmas	Perusahaan	POS UKK	GP2SP			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	33	9	167	0	24	178	1.863
2	Sumatera Utara	132	56	313	4	51	232	4.149
3	Sumatera Barat	62	24	232	3	14	110	2.110
4	Riau	65	12	177	5	23	467	2.584
5	Jambi	95	21	285	11	19	241	2.177
6	Sumatera Selatan	58	27	310	11	18	217	6.035
7	Bengkulu	95	12	403	0	14	206	3.722
8	Lampung	118	30	322	18	25	434	6.409
9	Kep. Bangka Belitung	45	17	123	6	12	84	1.963
10	Kepulauan Riau	47	34	235	15	7	149	916
11	DKI Jakarta	235	17	277	105	7	31	3.765
12	Jawa Barat	303	156	883	158	67	1853	12.558
13	Jawa Tengah	224	64	763	251	44	1395	12.267
14	DI Yogyakarta	49	7	135	11	19	31	3.806
15	Jawa Timur	401	105	975	50	67	2175	14.413
16	Banten	167	32	359	45	20	1396	4.058
17	Bali	13	2	25	2	6	0	547
18	Nusa Tenggara Barat	35	9	287	1	4	157	920
19	Nusa Tenggara Timur	124	9	685	0	17	173	1.781
20	Kalimantan Barat	51	37	251	3	18	94	1.211
21	Kalimantan Tengah	38	4	127	19	17	252	632
22	Kalimantan Selatan	43	13	178	3	14	417	832
23	Kalimantan Timur	41	37	184	5	13	68	2.326
24	Kalimantan Utara	17	1	46	2	5	19	350
25	Sulawesi Utara	2	12	41	0	3	0	96
26	Sulawesi Tengah	96	16	298	0	15	119	2.808
27	Sulawesi Selatan	105	52	823	22	38	90	8.089
28	Sulawesi Tenggara	32	186	178	0	19	20	1.690
29	Gorontalo	29	16	80	0	20	45	1.444
30	Sulawesi Barat	41	6	178	0	8	91	876
31	Maluku	4	1	39	0	15	71	92
32	Maluku Utara	8	4	43	0	10	51	228
33	Papua Barat	4	0	17	0	3	0	157
34	Papua	9	19	111	0	34	0	686
Indonesia		**2.821**	**1.047**	**9.550**	**750**	**690**	**10.866**	**107.560**

Sumber: Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia, Kemenkes RI, 2022

Tabel 9.a

PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas*	Jumlah Puskesmas yang Melapor	Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial**	
				Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	357	357	321	89,9
2	Sumatera Utara	596	574	542	94,4
3	Sumatera Barat	275	275	275	100,0
4	Riau	232	232	211	90,9
5	Jambi	202	202	191	94,6
6	Sumatera Selatan	341	341	267	78,3
7	Bengkulu	179	179	176	98,3
8	Lampung	309	309	236	76,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	58	90,6
10	Kepulauan Riau	90	90	83	92,2
11	DKI Jakarta	329	328	327	99,7
12	Jawa Barat	1086	1086	1022	94,1
13	Jawa Tengah	878	250	220	88,0
14	D.I. Yogyakarta	121	121	121	100,0
15	Jawa Timur	968	872	861	98,7
16	Banten	245	168	121	72,0
17	Bali	120	120	120	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	170	170	161	94,7
19	Nusa Tenggara Timur	424	424	411	96,9
20	Kalimantan Barat	246	246	229	93,1
21	Kalimantan Tengah	200	200	163	81,5
22	Kalimantan Selatan	237	237	237	100,0
23	Kalimantan Timur	188	188	187	99,5
24	Kalimantan Utara	57	57	56	98,2
25	Sulawesi Utara	193	193	161	83,4
26	Sulawesi Tengah	210	210	197	93,8
27	Sulawesi Selatan	458	458	436	95,2
28	Sulawesi Tenggara	292	292	268	91,8
29	Gorontalo	93	93	93	100,0
30	Sulawesi Barat	96	96	96	100,0
31	Maluku	210	142	90	63,4
32	Maluku Utara	144	144	124	86,1
33	Papua Barat	159	149	133	89,3
34	Papua	408	408	370	90,7
Indonesia		**10.177**	**9.275**	**8.564**	**92,3**

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Keterangan: *) Jumlah Puskesmas sesuai perencanaan awal tahun Farmalkes

**) isi dengan jumlah Puskesmas yang memiliki obat esensial ≥80%

Tabel 9.b

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN KETERSEDIAAN OBAT ESENSIAL MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melapor	Kabupaten/Kota dengan Ketersediaan Obat Esensial*	
				Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	23	23	16	69,6
2	Sumatera Utara	33	30	25	83,3
3	Sumatera Barat	19	19	19	100,0
4	Riau	12	12	11	91,7
5	Jambi	11	11	11	100,0
6	Sumatera Selatan	17	17	10	58,8
7	Bengkulu	10	10	10	100,0
8	Lampung	15	15	12	80,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	6	3	50,0
10	Kepulauan Riau	7	7	2	28,6
11	DKI Jakarta	6	0	0	0,0
12	Jawa Barat	27	27	23	85,2
13	Jawa Tengah	35	10	9	90,0
14	D.I. Yogyakarta	5	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	32	25	78,1
16	Banten	8	6	2	33,3
17	Bali	9	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	10	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	18	81,8
20	Kalimantan Barat	14	14	13	92,9
21	Kalimantan Tengah	14	14	6	42,9
22	Kalimantan Selatan	13	13	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	10	9	90,0
24	Kalimantan Utara	5	5	5	100,0
25	Sulawesi Utara	15	14	11	78,6
26	Sulawesi Tengah	13	13	12	92,3
27	Sulawesi Selatan	24	24	24	100,0
28	Sulawesi Tenggara	17	17	14	82,4
29	Gorontalo	6	6	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	6	6	100,0
31	Maluku	11	9	5	55,6
32	Maluku Utara	10	10	10	100,0
33	Papua Barat	13	0	0	#DIV/0!
34	Papua	29	29	29	100,0
Indonesia		**514**	**455**	**383**	**84,2**

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Keterangan: *) isi dengan jumlah kabupaten/kota yang memiliki obat esensial ≥85%

Tabel 9.c

PERSENTASE PUSKESMAS DENGAN KETERSEDIAAN VAKSIN IDL (IMUNISASI DASAR LENGKAP)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas*	Jumlah Puskesmas yang Melapor	Puskesmas dengan Ketersediaan Vaksin IDL	
				Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	357	357	343	96,1
2	Sumatera Utara	596	484	445	91,9
3	Sumatera Barat	275	275	275	100,0
4	Riau	232	232	230	99,1
5	Jambi	202	202	189	93,6
6	Sumatera Selatan	341	341	341	100,0
7	Bengkulu	179	179	179	100,0
8	Lampung	309	309	296	95,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	64	100,0
10	Kepulauan Riau	90	90	90	100,0
11	DKI Jakarta	329	329	329	100,0
12	Jawa Barat	1086	1083	1003	92,6
13	Jawa Tengah	878	249	205	82,3
14	D.I. Yogyakarta	121	121	121	100,0
15	Jawa Timur	968	870	854	98,2
16	Banten	245	230	229	99,6
17	Bali	120	120	115	95,8
18	Nusa Tenggara Barat	170	170	170	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	424	424	392	92,5
20	Kalimantan Barat	246	246	246	100,0
21	Kalimantan Tengah	200	200	187	93,5
22	Kalimantan Selatan	237	237	231	97,5
23	Kalimantan Timur	188	188	188	100,0
24	Kalimantan Utara	57	57	57	100,0
25	Sulawesi Utara	193	193	193	100,0
26	Sulawesi Tengah	210	210	210	100,0
27	Sulawesi Selatan	458	458	458	100,0
28	Sulawesi Tenggara	292	292	292	100,0
29	Gorontalo	93	93	93	100,0
30	Sulawesi Barat	96	96	96	100,0
31	Maluku	209	142	142	100,0
32	Maluku Utara	144	144	144	100,0
33	Papua Barat	159	148	104	70,3
34	Papua	408	408	397	97,3
Indonesia		**10.176**	**9.241**	**8.908**	**96,4**

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Keterangan: *) Jumlah Puskesmas sesuai perencanaan awal tahun Farmalkes

Lampiran 9.d

JUMLAH SARANA PRODUKSI
BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Industri Farmasi	Industri Obat Tradisional/Ekstrak Bahan Alat (IOT/IEBA)	Usaha Kecil/Mikro Obat Tradisional (UKOT/UMOT)	Produksi Alat Kesehatan	Produksi Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Industri Kosmetika
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	0	0	5	2	4	5
2	Sumatera Utara	4	1	104	25	43	33
3	Sumatera Barat	1	0	10	0	2	6
4	Riau	0	0	3	0	2	2
5	Jambi	0	0	2	0	2	1
6	Sumatera Selatan	1	1	3	3	5	1
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	1
8	Lampung	0	0	13	2	7	5
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	3	19	5	4
11	DKI Jakarta	35	19	531	206	228	113
12	Jawa Barat	107	52	571	549	497	196
13	Jawa Tengah	22	17	242	177	128	96
14	D.I. Yogyakarta	1	1	44	27	22	28
15	Jawa Timur	41	16	204	191	213	155
16	Banten	31	22	79	214	278	118
17	Bali	0	2	31	5	22	48
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	12	4	4	6
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	6	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	5	2	1	3
21	Kalimantan Tengah	0	0	1	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	2	6	0	2	8
23	Kalimantan Timur	0	0	3	0	0	1
24	Kalimantan Utara	0	0	1	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	4	0	3	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	1	1	1
27	Sulawesi Selatan	0	2	37	3	10	11
28	Sulawesi Tenggara	0	0	2	0	0	1
29	Gorontalo	0	1	2	0	1	1
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	25	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0
34	Papua	0	0	0	0	0	0
Indonesia		**243**	**136**	**1.949**	**1.430**	**1.480**	**844**

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 9.e

JUMLAH SARANA DISTRIBUSI
BIDANG KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	Apotek	Toko Obat	Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	31	492	584	45
2	Sumatera Utara	91	1431	1501	189
3	Sumatera Barat	43	571	266	82
4	Riau	44	771	513	103
5	Jambi	34	418	172	45
6	Sumatera Selatan	60	614	193	119
7	Bengkulu	16	288	119	33
8	Lampung	46	655	114	110
9	Kepulauan Bangka Belitung	18	200	81	14
10	Kepulauan Riau	36	305	260	76
11	DKI Jakarta	353	2055	554	2486
12	Jawa Barat	360	4874	1720	1268
13	Jawa Tengah	272	3768	355	374
14	D.I. Yogyakarta	51	603	45	120
15	Jawa Timur	304	4250	490	577
16	Banten	115	1632	448	640
17	Bali	59	885	87	111
18	Nusa Tenggara Barat	26	530	104	32
19	Nusa Tenggara Timur	34	379	78	47
20	Kalimantan Barat	38	339	309	56
21	Kalimantan Tengah	9	153	54	12
22	Kalimantan Selatan	43	494	531	61
23	Kalimantan Timur	54	724	226	87
24	Kalimantan Utara	3	86	40	3
25	Sulawesi Utara	40	284	95	40
26	Sulawesi Tengah	25	437	204	30
27	Sulawesi Selatan	118	1329	275	164
28	Sulawesi Tenggara	29	489	73	34
29	Gorontalo	15	183	35	11
30	Sulawesi Barat	3	130	52	3
31	Maluku	14	175	86	24
32	Maluku Utara	6	145	19	7
33	Papua Barat	20	169	16	9
34	Papua	47	341	53	91
Indonesia		**2.457**	**30.199**	**9.752**	**7.103**

Sumber: Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Keterangan: *) Data tahun 2020

Lampiran 10

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN PEMBINAAN POSYANDU AKTIF, KABUPATEN/KOTA DENGAN MINIMAL 80% POSYANDU AKTIF DAN JUMLAH POSBINDU PTM MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

NO	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	% Kab/Kota Melaksanakan Pembinaan Posyandu Aktif*		% Kab/Kota dengan Minimal 80% Posyandu Aktif*		Jumlah Posbindu PTM**
			Capaian	Persentase	Capaian	Persentase	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	23	5	21,7	1	4	4.882
2	Sumatera Utara	33	7	21,2	1	3	4.376
3	Sumatera Barat	19	13	68,4	1	5	2.527
4	Riau	12	9	75,0	1	8	1.414
5	Jambi	11	5	45,5		-	1.106
6	Sumatera Selatan	17	9	52,9	2	12	2.892
7	Bengkulu	10	9	90,0	3	30	1.270
8	Lampung	15	13	86,7	2	13	2.526
9	Kep. Bangka Belitung	7	4	57,1		-	567
10	Kepulauan Riau	7	5	71,4	2	29	476
11	DKI Jakarta	6	5	83,3	1	17	1.828
12	Jawa Barat	27	12	44,4		-	7.274
13	Jawa Tengah	35	31	88,6	1	3	8.366
14	D.I. Yogyakarata	5	5	100,0		-	1.188
15	Jawa Timur	38	31	81,6	3	8	10.432
16	Banten	8	3	37,5		-	1.545
17	Bali	9	4	44,4	1	11	744
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0		-	2.236
19	Nusa Tenggara Timur	22	1	4,5		-	2.992
20	Kalimantan Barat	14	2	14,3		-	1.691
21	Kalimantan Tengah	14	11	78,6	1	7	1.174
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,0	2	15	1.751
23	Kalimantan Timur	10	5	50,0		-	1.433
24	Kalimantan Utara	5	-	-		-	124
25	Sulawesi Utara	15	3	20,0		-	617
26	Sulawesi Tengah	13	1	7,7	1	8	1.853
27	Sulawesi Selatan	24	9	37,5	-	-	3.816
28	Sulawesi Tenggara	17	6	35,3	3	18	1.239
29	Gorontalo	6	3	50,0	2	33	576
30	Sulawesi Barat	6	2	33,3		-	705
31	Maluku	11	2	18,2	1	9	417
32	Maluku Utara	10	7	70,0	2	20	748
33	Papua Barat	13	-	-		-	434
34	Papua	29	-	-		-	289
Indonesia		**514**	**245**	**47,7**	**31**	**6**	**75.508**

Sumber: *Komdat Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

**Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Keterangan: PTM: Penyakit Tidak Menular

Lampiran 11.a

JUMLAH TENAGA MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN
DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Dokter Spesialis			Dokter Umum			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*
1	Aceh	448	430	878	837	1.713	2.550	1.285	2.143	3.428	8	15	23	83	381	464	91	396	487
2	Sumatera Utara	1.233	853	2.086	2.140	3.493	5.633	3.373	4.346	7.719	33	65	98	334	1.169	1.503	367	1.234	1.601
3	Sumatera Barat	497	500	997	645	1.739	2.384	1.142	2.239	3.381	8	14	22	76	453	529	84	467	551
4	Riau	565	365	930	967	2.144	3.111	1.532	2.509	4.041	16	30	46	100	481	581	116	511	627
5	Jambi	230	172	402	407	894	1.301	637	1.066	1.703	5	10	15	55	205	260	60	215	275
6	Sumatera Selatan	523	476	999	899	1.728	2.627	1.422	2.204	3.626	12	24	36	94	298	392	106	322	428
7	Bengkulu	119	94	213	221	473	694	340	567	907	2	7	9	25	119	144	27	126	153
8	Lampung	450	245	695	696	1.428	2.124	1.146	1.673	2.819	7	15	22	47	212	259	54	227	281
9	Kep. Bangka Belitung	133	91	224	223	382	605	356	473	829	6	12	18	36	81	117	42	93	135
10	Kepulauan Riau	255	149	404	440	792	1.232	695	941	1.636	17	13	30	54	192	246	71	205	276
11	DKI Jakarta	3.563	3.214	6.777	4.270	8.271	12.541	7.833	11.485	19.318	252	568	820	822	3.275	4.097	1.074	3.843	4.917
12	Jawa Barat	3.480	2.592	6.072	5.475	8.679	14.154	8.955	11.271	20.226	152	331	483	538	2.345	2.883	690	2.676	3.366
13	Jawa Tengah	2.692	1.814	4.506	4.164	6.578	10.742	6.856	8.392	15.248	89	132	221	421	1.582	2.003	510	1.714	2.224
14	DI Yogyakarta	569	521	1.090	1.287	1.944	3.231	1.856	2.465	4.321	66	146	212	154	596	750	220	742	962
15	Jawa Timur	3.343	2.375	5.718	5.529	8.043	13.572	8.872	10.418	19.290	193	351	544	900	3.351	4.251	1.093	3.702	4.795
16	Banten	1.026	885	1.911	1.572	2.983	4.555	2.598	3.868	6.466	35	102	137	146	868	1.014	181	970	1.151
17	Bali	975	596	1.571	1.980	2.204	4.184	2.955	2.800	5.755	35	35	70	225	545	770	260	580	840
18	Nusa Tenggara Barat	238	186	424	479	781	1.260	717	967	1.684	7	14	21	37	157	194	44	171	215
19	Nusa Tenggara Timur	210	170	380	507	872	1.379	717	1.042	1.759	3	7	10	49	149	198	52	156	208
20	Kalimantan Barat	249	166	415	565	674	1.239	814	840	1.654	10	12	22	63	153	216	73	165	238
21	Kalimantan Tengah	159	138	297	339	490	829	498	628	1.126	6	8	14	36	107	143	42	115	157
22	Kalimantan Selatan	409	292	701	501	936	1.437	910	1.228	2.138	15	26	41	130	332	462	145	358	503
23	Kalimantan Timur	418	325	743	776	1.293	2.069	1.194	1.618	2.812	20	38	58	93	317	410	113	355	468
24	Kalimantan Utara	76	52	128	169	182	351	245	234	479	4	5	9	25	45	70	29	50	79
25	Sulawesi Utara	297	267	564	810	1.151	1.961	1.107	1.418	2.525	6	7	13	51	131	182	57	138	195
26	Sulawesi Tengah	140	160	300	330	607	937	470	767	1.237	1	4	5	43	125	168	44	129	173
27	Sulawesi Selatan	739	904	1.643	1.156	2.200	3.356	1.895	3.104	4.999	32	82	114	176	761	937	208	843	1.051
28	Sulawesi Tenggara	138	122	260	261	520	781	399	642	1.041	6	8	14	45	180	225	51	188	239
29	Gorontalo	80	70	150	146	259	405	226	329	555	2	2	4	14	54	68	16	56	72
30	Sulawesi Barat	47	64	111	77	192	269	124	256	380	3	7	10	15	80	95	18	87	105
31	Maluku	89	80	169	242	520	762	331	600	931	5	4	9	23	59	82	28	63	91
32	Maluku Utara	64	58	122	187	282	469	251	340	591	4	2	6	15	45	60	19	47	66
33	Papua Barat	80	51	131	183	339	522	263	390	653	0	0	0	18	52	70	18	52	70
34	Papua	162	146	308	382	620	1.002	544	766	1.310	3	7	10	28	83	111	31	90	121
Indonesia		**23.696**	**18.623**	**42.319**	**38.862**	**65.406**	**104.268**	**62.558**	**84.029**	**146.587**	**1.063**	**2.103**	**3.166**	**4.971**	**18.983**	**23.954**	**6.034**	**21.086**	**27.120**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 11.b

JUMLAH TENAGA MEDIS DI PUSKESMAS
DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Dokter Spesialis [a]			Dokter Umum			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	1	0	1	256	810	1.066	257	810	1.067	0	0	0	57	310	367	57	310	367
2	Sumatera Utara	3	4	7	594	1.404	1.998	597	1.408	2.005	0	3	3	94	522	616	94	525	619
3	Sumatera Barat	2	1	3	174	623	797	176	624	800	0	1	1	40	299	339	40	300	340
4	Riau	2	0	2	278	758	1.036	280	758	1.038	1	0	1	48	286	334	49	286	335
5	Jambi	0	0	0	154	407	561	154	407	561	0	0	0	35	133	168	35	133	168
6	Sumatera Selatan	0	6	6	200	551	751	200	557	757	0	1	1	53	148	201	53	149	202
7	Bengkulu	0	0	0	98	214	312	98	214	312	0	0	0	16	72	88	16	72	88
8	Lampung	0	1	1	255	621	876	255	622	877	0	0	0	20	144	164	20	144	164
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	79	151	230	79	151	230	0	0	0	23	46	69	23	46	69
10	Kepulauan Riau	2	0	2	127	300	427	129	300	429	0	0	0	23	87	110	23	87	110
11	DKI Jakarta	0	0	0	471	1.508	1.979	471	1.508	1.979	0	0	0	72	391	463	72	391	463
12	Jawa Barat	2	2	4	952	2.037	2.989	954	2.039	2.993	0	0	0	154	776	930	154	776	930
13	Jawa Tengah	0	0	0	933	1.762	2.695	933	1.762	2.695	0	0	0	147	712	859	147	712	859
14	DI Yogyakarta	0	0	0	131	410	541	131	410	541	0	2	2	14	160	174	14	162	176
15	Jawa Timur	0	0	0	870	1.764	2.634	870	1.764	2.634	0	3	3	203	944	1.147	203	947	1.150
16	Banten	0	0	0	237	646	883	237	646	883	0	0	0	44	286	330	44	286	330
17	Bali	0	0	0	291	358	649	291	358	649	0	0	0	79	203	282	79	203	282
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	183	327	510	183	327	510	0	0	0	24	99	123	24	99	123
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	225	401	626	225	401	626	0	0	0	38	103	141	38	103	141
20	Kalimantan Barat	0	0	0	235	280	515	235	280	515	0	1	1	22	86	108	22	87	109
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	136	226	362	136	226	362	0	0	0	20	70	90	20	70	90
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	144	364	508	144	364	508	0	0	0	51	143	194	51	143	194
23	Kalimantan Timur	0	0	0	167	353	520	167	353	520	0	1	1	37	160	197	37	161	198
24	Kalimantan Utara	0	0	0	56	81	137	56	81	137	0	0	0	16	28	44	16	28	44
25	Sulawesi Utara	0	5	5	171	427	598	171	432	603	0	0	0	28	79	107	28	79	107
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	132	266	398	132	266	398	0	0	0	27	83	110	27	83	110
27	Sulawesi Selatan	0	5	5	227	763	990	227	768	995	0	1	1	80	448	528	80	449	529
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	119	300	419	119	300	419	0	1	1	23	131	154	23	132	155
29	Gorontalo	0	0	0	43	126	169	43	126	169	0	0	0	9	44	53	9	44	53
30	Sulawesi Barat	0	0	0	41	133	174	41	133	174	0	0	0	10	65	75	10	65	75
31	Maluku	0	0	0	76	209	285	76	209	285	0	0	0	8	34	42	8	34	42
32	Maluku Utara	0	1	1	79	139	218	79	140	219	0	0	0	9	34	43	9	34	43
33	Papua Barat	0	0	0	85	165	250	85	165	250	0	0	0	5	31	36	5	31	36
34	Papua	0	0	0	139	260	399	139	260	399	0	0	0	14	51	65	14	51	65
Indonesia		**12**	**25**	**37**	**8.358**	**19.144**	**27.502**	**8.370**	**19.169**	**27.539**	**1**	**14**	**15**	**1.543**	**7.208**	**8.751**	**1.544**	**7.222**	**8.766**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 11.c

JUMLAH TENAGA MEDIS DI RUMAH SAKIT
DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Dokter Spesialis [a]			Dokter Umum			Total			Dokter Gigi Spesialis			Dokter Gigi			Total		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	448	433	881	596	935	1.531	1.044	1.368	2.412	8	15	23	31	77	108	39	92	131
2	Sumatera Utara	1.238	849	2.087	1.442	1.929	3.371	2.680	2.778	5.458	30	62	92	189	555	744	219	617	836
3	Sumatera Barat	494	481	975	420	952	1.372	914	1.433	2.347	8	13	21	26	108	134	34	121	155
4	Riau	560	367	927	495	915	1.410	1.055	1.282	2.337	14	28	42	43	146	189	57	174	231
5	Jambi	228	172	400	210	414	624	438	586	1.024	5	10	15	16	62	78	21	72	93
6	Sumatera Selatan	524	480	1.004	646	1.022	1.668	1.170	1.502	2.672	12	22	34	30	118	148	42	140	182
7	Bengkulu	120	91	211	111	249	360	231	340	571	2	7	9	8	38	46	10	45	55
8	Lampung	452	245	697	381	661	1.042	833	906	1.739	7	15	22	23	59	82	30	74	104
9	Kep. Bangka Belitung	132	90	222	110	171	281	242	261	503	7	12	19	9	19	28	16	31	47
10	Kepulauan Riau	254	149	403	216	337	553	470	486	956	15	11	26	14	42	56	29	53	82
11	DKI Jakarta	3.120	2.846	5.966	1.817	3.113	4.930	4.937	5.959	10.896	211	467	678	384	1.515	1.899	595	1.982	2.577
12	Jawa Barat	3.441	2.583	6.024	3.164	4.317	7.481	6.605	6.900	13.505	151	301	452	225	762	987	376	1.063	1.439
13	Jawa Tengah	2.539	1.658	4.197	2.027	2.984	5.011	4.566	4.642	9.208	87	119	206	157	515	672	244	634	878
14	DI Yogyakarta	562	516	1.078	1.002	1.148	2.150	1.564	1.664	3.228	57	108	165	97	237	334	154	345	499
15	Jawa Timur	3.226	2.285	5.511	3.325	4.166	7.491	6.551	6.451	13.002	168	312	480	379	1.206	1.585	547	1.518	2.065
16	Banten	1.028	898	1.926	870	1.545	2.415	1.898	2.443	4.341	39	94	133	39	234	273	78	328	406
17	Bali	950	583	1.533	1.396	1.501	2.897	2.346	2.084	4.430	34	31	65	62	168	230	96	199	295
18	Nusa Tenggara Barat	240	185	425	266	390	656	506	575	1.081	6	14	20	7	44	51	13	58	71
19	Nusa Tenggara Timur	212	172	384	279	454	733	491	626	1.117	3	7	10	9	45	54	12	52	64
20	Kalimantan Barat	252	165	417	289	356	645	541	521	1.062	9	11	20	30	52	82	39	63	102
21	Kalimantan Tengah	161	137	298	171	226	397	332	363	695	6	8	14	12	33	45	18	41	59
22	Kalimantan Selatan	321	232	553	265	369	634	586	601	1.187	14	25	39	35	60	95	49	85	134
23	Kalimantan Timur	421	318	739	352	594	946	773	912	1.685	17	36	53	28	66	94	45	102	147
24	Kalimantan Utara	77	52	129	81	85	166	158	137	295	4	5	9	5	13	18	9	18	27
25	Sulawesi Utara	299	267	566	627	690	1.317	926	957	1.883	6	7	13	27	64	91	33	71	104
26	Sulawesi Tengah	144	162	306	177	329	506	321	491	812	1	4	5	16	40	56	17	44	61
27	Sulawesi Selatan	726	878	1.604	885	1.361	2.246	1.611	2.239	3.850	32	84	116	93	299	392	125	383	508
28	Sulawesi Tenggara	138	124	262	151	222	373	289	346	635	6	7	13	21	53	74	27	60	87
29	Gorontalo	83	68	151	100	138	238	183	206	389	2	2	4	5	9	14	7	11	18
30	Sulawesi Barat	48	63	111	33	67	100	81	130	211	3	8	11	4	12	16	7	20	27
31	Maluku	88	82	170	142	298	440	230	380	610	5	4	9	9	13	22	14	17	31
32	Maluku Utara	69	58	127	97	142	239	166	200	366	4	2	6	6	12	18	10	14	24
33	Papua Barat	79	52	131	91	175	266	170	227	397	0	0	0	13	21	34	13	21	34
34	Papua	163	146	309	231	355	586	394	501	895	3	7	10	14	34	48	17	41	58
Indonesia		**22.837**	**17.887**	**40.724**	**22.465**	**32.610**	**55.075**	**45.302**	**50.497**	**95.799**	**976**	**1.858**	**2.834**	**2.066**	**6.731**	**8.797**	**3.042**	**8.589**	**11.631**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 11.d

JUMLAH DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS DI RUMAH SAKIT MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Dokter Spesialis Dasar				Dokter Spesialis Penunjang					Spesialis Lain	Dokter Gigi Spesialis	Total
		Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Spesialis Anak	Spesialis Bedah	Spesialis Radiologi	Spesialis Anestesi	Spesialis Patologi Klinik	Spesialis Patologi Anatomi	Spesialis Rehabilitasi Medik			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	140	100	95	75	28	59	42	12	5	325	23	904
2	Sumatera Utara	298	263	254	161	54	119	106	43	7	782	92	2.179
3	Sumatera Barat	123	107	99	84	24	54	58	20	4	402	21	996
4	Riau	124	133	106	71	35	53	38	17	7	343	42	969
5	Jambi	61	57	37	32	16	27	21	9	1	139	15	415
6	Sumatera Selatan	161	155	114	91	34	56	26	30	5	332	34	1.038
7	Bengkulu	28	35	22	26	6	15	13	4	1	61	9	220
8	Lampung	99	105	66	65	35	50	35	14	3	225	22	719
9	Kep. Bangka Belitung	28	33	25	17	12	11	13	5	1	77	19	241
10	Kepulauan Riau	37	51	45	41	18	31	19	9	1	151	26	429
11	DKI Jakarta	690	648	654	260	256	423	167	92	36	2.740	678	6.644
12	Jawa Barat	770	733	725	414	282	449	215	77	50	2.309	452	6.476
13	Jawa Tengah	552	476	426	340	188	326	142	56	26	1.665	206	4.403
14	DI Yogyakarta	142	96	126	70	52	62	45	18	4	463	165	1.243
15	Jawa Timur	632	610	526	377	253	366	218	104	29	2.396	480	5.991
16	Banten	253	267	230	125	78	156	67	16	13	721	133	2.059
17	Bali	185	201	167	127	52	104	27	31	7	632	65	1.598
18	Nusa Tenggara Barat	50	57	48	31	24	24	21	7	1	162	20	445
19	Nusa Tenggara Timur	66	61	44	52	20	34	23	8	4	72	10	394
20	Kalimantan Barat	57	54	51	47	20	32	16	5	3	132	20	437
21	Kalimantan Tengah	42	37	32	27	13	23	20	5	3	96	14	312
22	Kalimantan Selatan	76	71	55	33	23	38	30	6	1	220	39	592
23	Kalimantan Timur	84	97	75	55	34	64	30	13	7	280	53	792
24	Kalimantan Utara	13	14	18	13	6	8	7	3	1	46	9	138
25	Sulawesi Utara	106	69	76	47	21	36	16	3	5	187	13	579
26	Sulawesi Tengah	47	33	39	33	20	18	11	3	1	101	5	311
27	Sulawesi Selatan	208	177	143	128	91	97	83	34	6	637	116	1.720
28	Sulawesi Tenggara	36	28	31	20	16	23	16	1	0	91	13	275
29	Gorontalo	22	12	20	14	8	10	6	4	1	54	4	155
30	Sulawesi Barat	13	12	12	12	5	12	6	0	0	39	11	122
31	Maluku	23	22	20	22	10	15	9	4	0	45	9	179
32	Maluku Utara	20	16	18	18	5	11	8	0	0	31	6	133
33	Papua Barat	23	24	20	16	10	10	6	0	0	22	0	131
34	Papua	35	41	41	41	14	27	20	2	1	87	10	319
Indonesia		**5.244**	**4.895**	**4.460**	**2.985**	**1.763**	**2.843**	**1.580**	**655**	**234**	**16.065**	**2.834**	**43.558**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 11.e

KECUKUPAN DOKTER UMUM, DOKTER GIGI, PERAWAT DAN BIDAN DI PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Dokter Gigi			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Perawat			Persentase Puskesmas dengan Kecukupan Bidan		
		Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih	Cukup	Kurang	Lebih
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	21,2	3,6	75,1	60,9	20,9	18,2	6,7	6,7	86,6	6,1	0,3	93,6
2	Sumatera Utara	27,0	6,1	66,9	52,5	30,8	16,7	15,1	12,3	72,6	9,7	1,0	89,3
3	Sumatera Barat	35,1	2,2	62,7	72,4	8,2	19,4	19,4	15,4	65,2	11,5	0,4	88,2
4	Riau	23,8	0,0	76,2	52,8	16,2	31,1	11,9	6,8	81,3	11,9	0,9	87,2
5	Jambi	30,9	2,0	67,2	61,8	28,4	9,8	9,8	1,5	88,7	5,4	0,0	94,6
6	Sumatera Selatan	40,9	7,0	52,2	51,6	43,5	4,9	11,3	2,6	86,1	7,8	0,0	92,2
7	Bengkulu	49,2	7,3	43,6	40,8	55,9	3,4	6,7	5,6	87,7	3,9	0,0	96,1
8	Lampung	32,5	2,5	65,0	37,6	58,6	3,8	13,4	2,9	83,8	9,2	0,0	90,8
9	Kep. Bangka Belitung	17,2	6,3	76,6	76,6	9,4	14,1	10,9	3,1	85,9	10,9	0,0	89,1
10	Kepulauan Riau	31,5	1,1	67,4	66,3	15,2	18,5	16,3	2,2	81,5	12,0	1,1	87,0
11	DKI Jakarta	19,2	0,3	80,5	86,5	3,6	9,9	12,0	78,4	9,6	17,4	69,7	12,9
12	Jawa Barat	24,2	0,8	74,9	60,7	28,4	10,9	14,0	16,4	69,6	10,1	3,2	86,7
13	Jawa Tengah	27,8	1,4	70,9	80,1	11,5	8,4	18,0	7,4	74,6	11,8	0,9	87,3
14	DI Yogyakarta	14,9	0,0	85,1	62,0	2,5	35,5	26,4	14,9	58,7	17,4	10,7	71,9
15	Jawa Timur	43,4	5,1	51,5	75,4	6,7	17,9	17,6	1,9	80,5	15,6	0,4	84,0
16	Banten	25,3	0,8	73,9	50,6	14,7	34,7	18,4	9,8	71,8	12,7	0,4	86,9
17	Bali	11,7	0,8	87,5	38,3	2,5	59,2	8,3	0,8	90,8	6,7	0,0	93,3
18	Nusa Tenggara Barat	32,6	5,1	62,3	63,4	33,7	2,9	6,3	1,1	92,6	5,7	0,6	93,7
19	Nusa Tenggara Timur	51,7	27,7	20,6	30,1	68,0	1,9	7,3	4,5	88,2	7,3	3,3	89,3
20	Kalimantan Barat	41,3	12,6	46,2	39,7	57,9	2,4	8,1	2,8	89,1	5,3	0,8	93,9
21	Kalimantan Tengah	43,1	25,0	31,9	30,9	61,8	7,4	3,4	1,0	95,6	2,9	0,5	96,6
22	Kalimantan Selatan	41,4	8,0	50,6	66,2	26,2	7,6	8,0	4,2	87,8	3,8	0,8	95,4
23	Kalimantan Timur	45,5	8,0	46,5	64,7	17,6	17,6	25,7	10,2	64,2	30,5	3,2	66,3
24	Kalimantan Utara	56,9	10,3	32,8	72,4	25,9	1,7	25,9	6,9	67,2	27,6	0,0	72,4
25	Sulawesi Utara	30,3	10,6	59,1	39,4	54,0	6,6	18,7	5,1	76,3	16,7	21,7	61,6
26	Sulawesi Tengah	49,3	14,6	36,2	45,5	52,1	2,3	2,8	3,3	93,9	1,9	1,4	96,7
27	Sulawesi Selatan	47,1	12,5	40,3	69,2	13,0	17,8	14,9	7,4	77,7	12,5	2,3	85,1
28	Sulawesi Tenggara	53,9	19,8	26,3	43,0	53,2	3,8	10,6	12,3	77,1	7,8	5,5	86,7
29	Gorontalo	55,9	11,8	32,3	54,8	44,1	1,1	12,9	3,2	83,9	9,7	0,0	90,3
30	Sulawesi Barat	49,5	20,6	29,9	57,7	36,1	6,2	8,2	2,1	89,7	9,3	1,0	89,7
31	Maluku	45,1	31,9	23,0	21,7	77,4	0,9	11,9	13,3	74,8	15,5	29,6	54,9
32	Maluku Utara	50,3	17,7	32,0	33,3	65,3	1,4	16,3	13,6	70,1	10,9	3,4	85,7
33	Papua Barat	51,8	28,8	19,4	20,6	77,6	1,8	12,9	13,5	73,5	17,1	18,2	64,7
34	Papua	36,2	49,5	14,3	20,1	79,0	0,9	16,6	24,8	58,6	17,3	41,1	41,6
Indonesia		**35,5**	**9,6**	**54,9**	**56,0**	**32,4**	**11,6**	**13,6**	**10,6**	**75,8**	**11,2**	**6,6**	**82,2**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 11.f

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN DI DAERAH TERTINGGAL*
MENURUT JENIS TENAGA DAN PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/ Kota Daerah Tertinggal	Jumlah Tenaga Kesehatan																Tenaga Penunjang Kesehatan	Total SDM Kesehatan
			Dokter Spesialis	Dokter	Dokter Gigi Spesialis	Dokter Gigi	Tenaga Psikologi Klinis	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterapian Fisik	Tenaga Keteknisian Medis	Tenaga Teknik Biomedika	Tenaga Kesehatan Tradisional	Jumlah		
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*
1	Sumatera Utara	4	22	117	0	14	0	1.282	1.281	110	181	37	73	20	47	0	91	3.275	604	3.879
2	Sumatera Barat	1	7	28	0	11	0	376	246	39	44	11	26	3	17	0	21	829	492	1.321
3	Sumatera Selatan	1	9	45	1	6	0	327	425	57	40	22	20	3	14	0	27	996	206	1.202
4	Lampung	1	6	28	0	3	0	194	372	27	22	21	21	0	17	0	24	735	205	940
5	Nusa Tenggara Barat	1	12	66	1	10	1	441	282	92	32	19	37	1	51	0	60	1.105	400	1.505
6	Nusa Tenggara Timur	13	126	616	4	83	5	6.226	4.644	675	804	511	658	47	579	1	555	15.534	4.175	19.709
7	Sulawesi Tengah	3	39	136	0	24	6	1.379	1.248	231	399	148	104	9	49	0	102	3.874	685	4.559
8	Maluku	6	27	206	3	17	2	2.394	1.022	183	401	240	280	11	30	0	156	4.972	965	5.937
9	Maluku Utara	2	6	38	0	4	0	347	188	40	112	28	33	1	8	0	15	820	130	950
10	Papua Barat	8	51	202	0	14	0	1.695	952	180	221	59	160	10	42	0	131	3.717	981	4.698
11	Papua	22	88	387	2	41	3	3.989	1.934	423	558	184	238	16	83	67	309	8.322	2.596	10.918
Indonesia		**62**	**393**	**1.869**	**11**	**227**	**17**	**18.650**	**12.594**	**2.057**	**2.814**	**1.280**	**1.650**	**121**	**937**	**68**	**1.491**	**44.179**	**11.439**	**55.618**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022
*berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020

Lampiran 11.g

JUMLAH DOKTER UMUM, DOKTER SPESIALIS, DOKTER GIGI DAN DOKTER GIGI SPESIALIS
YANG MEMILIKI SURAT TANDA REGISTRASI MENURUT PROVINSI
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2021

No	Provinsi	Dokter	Dokter Gigi	Dokter Spesialis	Dokter Gigi Spesialis	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	3.918	764	908	44	5.634
2	Sumatera Utara	10.879	2.046	2.606	171	15.702
3	Sumatera Barat	3.738	1.062	1.059	41	5.900
4	Riau	4.826	914	883	52	6.675
5	Jambi	2.071	313	371	16	2.771
6	Sumatera Selatan	4.000	693	1.143	48	5.884
7	Bengkulu	1.003	154	168	8	1.333
8	Lampung	2.958	308	646	23	3.935
9	Kepulauan Bangka Belitung	566	136	184	17	903
10	Kepulauan Riau	1.206	315	333	22	1.876
11	DKI Jakarta	16.781	4.906	7.592	1.096	30.375
12	Jawa Barat	21.406	5.121	5.671	735	32.933
13	Jawa Tengah	13.631	2.626	4.196	261	20.714
14	DI Yogyakarta	3.975	1.094	1.597	333	6.999
15	Jawa Timur	16.631	4.975	5.903	878	28.387
16	Banten	7.205	2.120	1.915	232	11.472
17	Bali	4.673	1.215	1.800	75	7.763
18	Nusa Tenggara Barat	1.656	233	347	21	2.257
19	Nusa Tenggara Timur	1.085	223	224	10	1.542
20	Kalimantan Barat	1.518	243	342	22	2.125
21	Kalimantan Tengah	993	175	228	17	1.413
22	Kalimantan Selatan	1.632	450	504	33	2.619
23	Kalimantan Timur	2.158	553	685	59	3.455
24	Kalimantan Utara	291	73	92	12	468
25	Sulawesi Utara	2.717	313	708	15	3.753
26	Sulawesi Tengah	1.212	177	231	6	1.626
27	Sulawesi Selatan	5.338	1.735	1.962	183	9.218
28	Sulawesi Tenggara	918	237	199	13	1.367
29	Gorontalo	329	70	115	4	518
30	Sulawesi Barat	172	85	61	9	327
31	Maluku	586	81	116	9	792
32	Maluku Utara	307	55	74	6	442
33	Papua Barat	349	64	85	1	499
34	Papua	1.218	123	225	11	1.577
Indonesia		**141.946**	**33.652**	**43.173**	**4.483**	**223.254**

Sumber: Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia, 2022

Lampiran 11.h

JUMLAH PESERTA PENUGASAN KHUSUS RESIDEN DOKTER SPESIALIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2019- 2021

No	Provinsi	Jumlah Residen		
		2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	15	2	3
2	Sumatera Utara	34	2	32
3	Sumatera Barat	16	7	4
4	Riau	12	2	9
5	Jambi	5	1	5
6	Sumatera Selatan	8	4	0
7	Bengkulu	4	2	0
8	Lampung	6	1	3
9	Kepulauan Bangka Belitung	8	5	3
10	Kepulauan Riau	8	6	4
11	DKI Jakarta	0	0	0
12	Jawa Barat	27	5	2
13	Jawa Tengah	13	3	6
14	DI Yogyakarta	1	0	1
15	Jawa Timur	14	6	4
16	Banten	6	1	0
17	Bali	12	0	10
18	Nusa Tenggara Barat	11	4	1
19	Nusa Tenggara Timur	16	14	5
20	Kalimantan Barat	4	9	7
21	Kalimantan Tengah	5	7	4
22	Kalimantan Selatan	11	4	2
23	Kalimantan Timur	5	1	4
24	Kalimantan Utara	10	0	0
25	Sulawesi Utara	4	0	2
26	Sulawesi Tengah	14	12	10
27	Sulawesi Selatan	10	0	5
28	Sulawesi Tenggara	6	7	9
29	Gorontalo	3	0	0
30	Sulawesi Barat	2	0	3
31	Maluku	7	1	0
32	Maluku Utara	15	8	8
33	Papua Barat	12	4	5
34	Papua	15	11	6
Indonesia		**339**	**129**	**157**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 11.i

JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN NUSANTARA SEHAT BERBASIS TIM
BATCH XV-XVI (PERIODE I-III TAHUN 2021)

No	Provinsi	Batch XVII (Peride I Tahun 2021)		Batch XVIII (Periode II Tahun 2021)		Batch XIX (Periode II Tahun 2021)	
		Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	1	2	1	1		
2	Sumatera Utara	3	3	2	8		
3	Sumatera Barat	2	2				
4	Riau						
5	Jambi					2	2
6	Sumatera Selatan						
7	Bengkulu					2	2
8	Lampung			1	1	1	2
9	Kepulauan Bangka Belitung						
10	Kepulauan Riau						
11	Jawa Barat					1	5
12	Jawa Timur						
13	Nusa Tenggara Barat						
14	Nusa Tenggara Timur						
15	Kalimantan Barat					1	1
16	Kalimantan Tengah	1	3			2	3
17	Kalimantan Selatan						
18	Kalimantan Timur						
19	Kalimantan Utara	1	1			1	1
20	Sulawesi Utara					1	2
21	Sulawesi Tengah	1	3			3	3
22	Sulawesi Selatan	2	6			2	2
23	Sulawesi Tenggara	4	4	1	4	1	3
24	Gorontalo						
25	Sulawesi Barat						
26	Maluku	1	1	1	2	1	2
27	Maluku Utara						
28	Papua Barat	2	10	1	5	4	6
29	Papua			4	13	1	1
Indonesia		**18**	**35**	**11**	**34**	**23**	**35**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 11.j

JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA TIM NUSANTARA SEHAT (BATCH XV SAMPAI DENGAN BATCH XVI/ PERIODE I SAMPAI DENGAN II)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Tenaga									Total
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1	Aceh	1	3	3	3	1	2	2	2	2	19
2	Sumatera Utara	10	3	5	5	9	7	10	10	9	68
3	Sumatera Barat	1	1	2	2	1	1	2	2	0	12
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	2	1	1	1	1	2	2	2	2	14
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	1	1	1	0	2	2	2	2	2	13
8	Lampung	1	1	1	1	3	3	1	3	3	17
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jawa Barat	0	4	0	0	3	4	4	5	5	25
12	Jawa Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kalimantan Barat	1	0	1	1	1	1	0	0	1	6
16	Kalimantan Tengah	4	5	5	4	1	4	5	1	6	35
17	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Kalimantan Utara	2	1	1	2	1	1	1	2	0	11
20	Sulawesi Utara	2	0	1	2	1	2	0	2	1	11
21	Sulawesi Tengah	4	3	5	2	5	3	3	4	6	35
22	Sulawesi Selatan	7	6	4	5	4	5	6	7	7	51
23	Sulawesi Tenggara	10	6	11	6	6	7	6	8	9	69
24	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Maluku	3	3	4	4	4	5	3	3	4	33
27	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Papua Barat	15	7	14	21	17	19	12	18	19	142
29	Papua	8	0	7	11	13	13	9	12	12	85
Indonesia		**72**	**45**	**66**	**70**	**73**	**81**	**68**	**83**	**88**	**646**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 11.k

JUMLAH KABUPATEN/KOTA DAN PUSKESMAS PENEMPATAN BARU NUSANTARA SEHAT INDIVIDU
PERIODE I-V TAHUN 2021

No	Provinsi	Periode I		Periode II		Periode III		Periode IV		Periode V		Periode VI		Periode VII		Periode VIII		Periode IX	
		Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas	Jumlah Kabupaten/ Kota	Jumlah Puskesmas
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Aceh	7	11	9	32	0	0	3	6	11	51	9	17	10	34	10	29	10	36
2	Sumatera Utara	4	6	4	14	0	0	3	9	7	29	6	10	7	22	8	24	10	30
3	Sumatera Barat	1	3	6	25	2	6	0	0	6	29	9	17	9	27	8	14	11	37
4	Riau	8	16	2	2	0	0	3	3	7	19	6	15	7	20	5	9	7	26
5	Jambi	8	28	2	13	0	0	2	6	3	7	3	3	5	18	4	9	6	34
6	Sumatera Selatan	1	1	3	6	1	3	0	0	3	6	6	15	3	8	3	4	6	15
7	Bengkulu	7	9	3	4	5	15	0	0	9	39	5	7	5	11	8	16	9	30
8	Lampung	3	3	4	16	1	1	0	0	5	17	3	11	7	20	6	10	6	26
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	4
10	Kepulauan Riau	3	6	2	8	0	0	2	5	3	4	2	3	3	3	3	4	4	9
11	Jawa Barat	2	4	1	8	1	5	0	0	0	0	2	3	2	2	0	0	2	11
12	Jawa Tengah	1	1	1	4	0	0	0	0	1	16	1	1	1	3	2	8	1	10
13	Jawa Timur	1	1	1	2	2	3	0	0	1	3	1	3	1	1	2	3	1	2
14	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Nusa Tenggara Barat	1	1	2	6	0	0	0	0	2	6	1	2	2	2	1	1	2	5
16	Nusa Tenggara Timur	5	12	0	0	0	0	0	0	4	5	11	47	3	3	9	31	10	26
17	Kalimantan Barat	5	30	2	11	2	15	0	0	0	0	2	10	2	4	3	5	4	9
18	Kalimantan Tengah	4	12	3	10	2	3	0	0	3	6	3	4	2	2	4	5	3	6
19	Kalimantan Selatan	0	0	2	6	1	3	0	0	3	17	1	2	0	0	3	4	4	9
20	Kalimantan Timur	3	4	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0
21	Kalimantan Utara	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2	2	4
22	Sulawesi Utara	3	12	0	0	4	12	0	0	5	22	8	18	4	14	9	17	8	26
23	Sulawesi Tengah	8	19	0	0	4	19	0	0	4	7	3	5	3	6	4	10	7	32
24	Sulawesi Selatan	6	8	0	0	3	11	0	0	4	22	4	15	5	21	4	9	6	15
25	Sulawesi Tenggara	8	14	0	0	7	49	0	0	13	45	11	25	9	42	8	22	12	27
26	Gorontalo	3	5	0	0	4	7	0	0	4	11	2	4	3	4	5	13	5	8
27	Sulawesi Barat	2	2	0	0	3	8	0	0	2	7	2	3	1	1	2	2	2	5
28	Maluku	6	52	0	0	5	21	0	0	2	3	3	7	3	4	2	7	5	14
29	Maluku Utara	4	9	0	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2
30	Papua Barat	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	3	15
31	Papua	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		**110**	**281**	**50**	**170**	**49**	**187**	**13**	**29**	**105**	**376**	**106**	**249**	**100**	**275**	**119**	**263**	**149**	**473**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 11.l

JUMLAH PENEMPATAN BARU TENAGA KESEHATAN PADA NUSANTARA SEHAT INDIVIDU (PERIODE I-V TAHUN 2021)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Tenaga											Total
		Dokter Umum	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Farmasi	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan	Gizi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Psikologi Klinis	Elektromedik	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	19	51	13	12	33	6	44	64	54	0	0	296
2	Sumatera Utara	22	15	28	24	20	23	27	32	31	0	0	222
3	Sumatera Barat	37	14	61	21	20	16	33	43	24	0	0	269
4	Riau	11	5	30	26	17	4	20	39	17	0	0	169
5	Jambi	15	9	18	11	28	18	10	46	35	0	0	190
6	Sumatera Selatan	9	3	8	1	11	9	12	21	11	0	0	85
7	Bengkulu	30	13	10	13	23	0	31	34	39	0	0	193
8	Lampung	6	3	26	2	30	16	14	35	22	0	0	154
9	Kepulauan Bangka Belitung	1	1	3	1	1	0	3	3	2	0	0	15
10	Kepulauan Riau	4	3	10	7	7	7	3	10	15	0	0	66
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	3	12	0	0	4	0	8	9	10	0	0	46
13	Jawa Tengah	4	5	5	1	16	0	0	9	15	0	0	55
14	Jawa Timur	5	1	2	3	4	0	2	1	1	0	0	19
15	Banten	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4
16	Nusa Tenggara Barat	4	4	5	2	1	6	5	0	6	0	0	33
17	Nusa Tenggara Timur	45	22	7	47	12	8	7	20	7	0	0	175
18	Kalimantan Barat	6	6	30	41	19	15	12	29	8	0	0	166
19	Kalimantan Tengah	8	1	1	4	9	12	11	22	12	0	0	80
20	Kalimantan Selatan	12	4	7	9	7	12	1	2	3	0	0	57
21	Kalimantan Timur	0	0	4	4	0	0	0	4	2	0	0	14
22	Kalimantan Utara	0	1	1	1	0	1	1	3	4	0	0	12
23	Sulawesi Utara	3	7	24	26	19	20	7	22	40	0	0	168
24	Sulawesi Tengah	22	20	10	12	7	2	9	28	28	0	0	138
25	Sulawesi Selatan	22	15	22	22	9	9	11	37	16	0	0	163
26	Sulawesi Tenggara	40	29	56	59	31	13	42	24	71	0	0	365
27	Gorontalo	7	9	14	4	4	0	7	0	19	0	0	64
28	Sulawesi Barat	5	4	4	5	0	4	4	1	10	0	0	37
29	Maluku	17	2	21	43	39	7	16	21	47	0	0	213
30	Maluku Utara	3	4	2	0	1	1	10	1	1	0	0	23
31	Papua Barat	3	0	5	6	5	10	2	5	7	0	0	43
32	Papua	0	0	2	0	5	0	4	3	1	0	0	15
Indonesia		**363**	**263**	**433**	**407**	**382**	**219**	**356**	**568**	**558**	**0**	**0**	**3.549**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 11.m

JUMLAH DOKTER PESERTA INTERNSIP
MENURUT BULAN PEMBERANGKATAN DAN PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Pemberangkatan						Jumlah
		ANGKT I (FEBRUARI)	ANGKT II (MEI)	ANGKT KHUSUS TAHAP I (JULI)	ANGKT KHUSUS TAHAP II (JULI)	ANGKT III (AGUSTUS)	ANGKT IV (NOVEMBER)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	54	112	0	0	59	82	307
2	Sumatera Utara	179	166	0	0	90	170	605
3	Sumatera Barat	66	71	0	0	43	126	306
4	Riau	66	99	0	0	66	112	343
5	Jambi	48	44	0	0	59	59	210
6	Sumatera Selatan	36	87	0	0	122	66	311
7	Bengkulu	44	20	0	0	26	44	134
8	Lampung	73	67	0	0	47	80	267
9	Kepulauan Bangka Belitung	48	15	0	0	32	40	135
10	Kepulauan Riau	67	43	0	0	64	37	211
11	DKI Jakarta	298	180	121	115	39	83	836
12	Jawa Barat	276	318	0	119	91	452	1.256
13	Jawa Tengah	252	322	0	0	176	360	1.110
14	DI Yogyakarta	68	54	0	0	67	85	274
15	Jawa Timur	366	260	0	0	105	477	1.208
16	Banten	82	100	0	48	5	135	370
17	Bali	150	120	0	0	132	182	584
18	Nusa Tenggara Barat	67	18	0	0	34	55	174
19	Nusa Tenggara Timur	87	39	0	0	41	82	249
20	Kalimantan Barat	48	32	0	0	40	39	159
21	Kalimantan Tengah	12	16	0	0	21	49	98
22	Kalimantan Selatan	92	35	0	0	18	18	163
23	Kalimantan Timur	74	60	0	0	35	76	245
24	Kalimantan Utara	0	11	0	0	3	5	0
25	Sulawesi Utara	67	30	0	0	20	38	155
26	Sulawesi Tengah	51	29	0	0	15	29	124
27	Sulawesi Selatan	117	38	0	0	67	94	316
28	Sulawesi Tenggara	40	22	0	0	48	50	160
29	Gorontalo	6	15		0	10	43	74
30	Sulawesi Barat	5	1		0	7	15	28
31	Maluku	9	28		0	8	20	65
32	Maluku Utara	18	8		0	12	24	62
33	Papua	35	31		0	1	58	125
34	Papua Barat	36	21		0	4	22	83
Indonesia		**2.937**	**2.512**	**121**	**282**	**1.607**	**3.307**	**10.747**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 11.n

JUMLAH PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN PADA PENDAYAGUNAAN DOKTER SPESIALIS (PGDS)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Spesialis Anak		Spesialis Obstetri dan Ginekologi		Spesialis Penyakit Dalam		Spesialis Bedah		Spesialis Anestesi		Spesialis Patologi Klinik		Spesialis Radiologi		Total
		PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	PBL/ ASN	PBTL-nonASN	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
1	Aceh	5		4	1	13		1	1			2		2		29
2	Sumatera Utara	2		2	4	5		2	1			2				18
3	Sumatera Barat	2		4	3	2		2	2	2		2				19
4	Riau	1	3	1	1	1	2	2	3			1				15
5	Jambi	2		2			1		1			1		2		9
6	Sumatera Selatan	4	1	3		2			1			2	1	2		16
7	Bengkulu			2	3		2			1		2				10
8	Lampung	2	1	1	2	3	2	1	1	1	1	1				16
9	Kep. Bangka Belitung	2		2		3	1	1						1		10
10	Kepulauan Riau		1		5	1	3	1	1	1		1		1		15
11	DKI Jakarta			3		1		1								5
12	Jawa Barat		2		1	6	1	1	3		1	4		2		21
13	Jawa Tengah	1	1	3	4	3	1	3		3		3		4		26
14	DI Yogyakarta	3	1			1				1				1		7
15	Jawa Timur	4	3	3	3	9	1	2	3	2	1	1		3		35
16	Banten	2						1						2		5
17	Bali	2	1		2	1	2	1	1		1	1				12
18	Nusa Tenggara Barat	3	1	2	5	3	4	1	4		2	1	1	2		29
19	Nusa Tenggara Timur	5	2	2	5	2	6	3	1		3	1		3	1	34
20	Kalimantan Barat	2	3		2	2	1	1	2		1			1		15
21	Kalimantan Tengah	2	2	1	5		1		2	1	2			1		17
22	Kalimantan Selatan	2	2	1	1	1	2	1	1							11
23	Kalimantan Timur	1			1	3	1	1	1	3		2				13
24	Kalimantan Utara	1	1	1	1			1	1							6
25	Sulawesi Utara	1	2	2		2	1	2	1			1		2		14
26	Sulawesi Tengah	2	3	2	4	2	4		2	1				2		22
27	Sulawesi Selatan	5	1	4	1	6		5		1	2	3		3		31
28	Sulawesi Tenggara	1		3		3	3	1	2	1	1			1		16
29	Gorontalo			1	1	1	1		1							5
30	Sulawesi Barat															0
31	Maluku	2	4	4	3	1	2		4	1	1					22
32	Maluku Utara	3	2			1	1			1	1	1	1		1	12
33	Papua Barat	2		1	2	2		1						1		9
34	Papua	6	1	4	1		1	3			1	2		2		21
35	TNI/POLRI			4		9		8		6		3		7		37
Indonesia		**70**	**38**	**62**	**61**	**89**	**44**	**47**	**40**	**26**	**18**	**37**	**3**	**45**	**2**	**582**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 12.a

JUMLAH TENAGA KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Puskesmas				Rumah Sakit				Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya				Total			
		Perawat			Bidan	Perawat			Bidan	Perawat			Bidan	Perawat			Bidan
		L	P	L+P		L	P	L+P		L	P	L+P		L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Aceh	2.167	5.593	7.760	14.194	2.969	5.932	8.901	3.953	178	153	331	229	5.314	11.678	16.992	18.376
2	Sumatera Utara	2.003	5.320	7.323	16.256	3.729	10.656	14.385	5.232	321	534	855	827	6.053	16.510	22.563	22.315
3	Sumatera Barat	533	2.455	2.988	5.786	1.354	6.153	7.507	1.598	98	284	382	270	1.985	8.892	10.877	7.654
4	Riau	994	2.790	3.784	5.500	1.724	4.990	6.714	2.037	201	375	576	920	2.919	8.155	11.074	8.457
5	Jambi	1.056	2.487	3.543	5.190	1.138	3.032	4.170	1.258	164	251	415	332	2.358	5.770	8.128	6.780
6	Sumatera Selatan	1.571	4.648	6.219	10.477	1.957	6.579	8.536	2.612	238	393	631	541	3.766	11.620	15.386	13.630
7	Bengkulu	584	1.523	2.107	3.030	818	1.745	2.563	945	91	140	231	142	1.493	3.408	4.901	4.117
8	Lampung	1.698	2.622	4.320	7.638	2.372	4.247	6.619	1.851	289	354	643	598	4.359	7.223	11.582	10.087
9	Kep. Bangka Belitung	349	761	1.110	1.004	685	1.549	2.234	478	129	232	361	198	1.163	2.542	3.705	1.680
10	Kepulauan Riau	297	885	1.182	1.370	815	2.362	3.177	790	149	315	464	301	1.261	3.562	4.823	2.461
11	DKI Jakarta	521	1.491	2.012	1.926	6.607	25.489	32.096	3.737	1.026	2.127	3.153	1.620	8.154	29.107	37.261	7.283
12	Jawa Barat	4.707	6.265	10.972	16.346	14.548	33.085	47.633	8.700	1.481	2.672	4.153	4.750	20.736	42.022	62.758	29.796
13	Jawa Tengah	3.596	6.127	9.723	16.422	13.031	30.238	43.269	7.598	1.488	4.053	5.541	4.093	18.115	40.418	58.533	28.113
14	DI Yogyakarta	277	684	961	984	1.906	6.470	8.376	1.185	222	758	980	718	2.405	7.912	10.317	2.887
15	Jawa Timur	6.903	9.537	16.440	17.980	14.768	28.906	43.674	8.514	2.233	3.948	6.181	3.956	23.904	42.391	66.295	30.450
16	Banten	1.122	1.455	2.577	4.125	2.970	9.307	12.277	2.525	441	777	1.218	1.648	4.533	11.539	16.072	8.298
17	Bali	570	1.198	1.768	2.537	2.556	6.366	8.922	2.231	345	818	1.163	756	3.471	8.382	11.853	5.524
18	Nusa Tenggara Barat	1.981	3.021	5.002	4.679	1.793	3.006	4.799	1.379	278	374	652	190	4.052	6.401	10.453	6.248
19	Nusa Tenggara Timur	2.349	5.292	7.641	8.223	1.323	3.964	5.287	1.800	148	236	384	130	3.820	9.492	13.312	10.153
20	Kalimantan Barat	2.025	2.342	4.367	4.106	1.848	3.720	5.568	1.209	316	319	635	704	4.189	6.381	10.570	6.019
21	Kalimantan Tengah	1.615	2.182	3.797	3.133	1.115	2.140	3.255	872	244	198	442	289	2.974	4.520	7.494	4.294
22	Kalimantan Selatan	1.104	1.562	2.666	3.511	2.361	3.409	5.770	1.385	409	279	688	261	3.874	5.250	9.124	5.157
23	Kalimantan Timur	837	1.647	2.484	2.421	2.044	5.039	7.083	1.514	504	600	1.104	746	3.385	7.286	10.671	4.681
24	Kalimantan Utara	317	608	925	717	440	908	1.348	361	64	90	154	89	821	1.606	2.427	1.167
25	Sulawesi Utara	399	2.114	2.513	1.541	1.352	4.490	5.842	801	115	231	346	46	1.866	6.835	8.701	2.388
26	Sulawesi Tengah	1.062	2.394	3.456	4.289	1.237	3.267	4.504	1.463	183	202	385	68	2.482	5.863	8.345	5.820
27	Sulawesi Selatan	1.384	5.885	7.269	9.277	2.804	10.829	13.633	3.518	280	603	883	349	4.468	17.317	21.785	13.144
28	Sulawesi Tenggara	982	3.053	4.035	4.633	884	2.207	3.091	1.015	109	163	272	114	1.975	5.423	7.398	5.762
29	Gorontalo	292	745	1.037	1.197	532	1.295	1.827	562	48	65	113	61	872	2.105	2.977	1.820
30	Sulawesi Barat	495	1.461	1.956	2.763	352	975	1.327	602	24	43	67	50	871	2.479	3.350	3.415
31	Maluku	733	1.950	2.683	1.530	590	2.070	2.660	621	117	278	395	85	1.440	4.298	5.738	2.236
32	Maluku Utara	468	964	1.432	2.010	423	1.177	1.600	611	121	109	230	61	1.012	2.250	3.262	2.682
33	Papua Barat	780	1.485	2.265	1.529	489	1.171	1.660	493	97	57	154	45	1.366	2.713	4.079	2.067
34	Papua	1.628	2.714	4.342	2.639	1.088	2.696	3.784	997	130	129	259	89	2.846	5.539	8.385	3.725
Indonesia		**47.399**	**95.260**	**142.659**	**188.963**	**94.622**	**239.469**	**334.091**	**74.447**	**12.281**	**22.160**	**34.441**	**25.276**	**154.302**	**356.889**	**511.191**	**288.686**

Sumber : Sistem Informasi SDM Kesehatan diolah oleh Ditjen Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 12.b

JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI BARU TENAGA KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat				Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterapian Fisik				Tenaga Keteknisian Medik								Tenaga Teknik Biomedika					Tenaga Kesehatan Tradisional	Tenaga Psikologi Klinis	Total
				Kesehatan Masyarakat	Promosi Kesehatan	Epidemiolog Kesehatan	Pembimbing Kesehatan Kerja			Fisioterapi	Okupasi Terapis	Terapis Wicara	Akupunktur	Rekam Medis	Teknik Kardiovaskular	Teknisi Pelayanan Darah	Refraksionis Optisien	Teknisi Gigi	Penata Anestesi	Terapis Gigi dan Mulut	Audiologis	Radiografer	Elektromedis	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Fisikawan Medis	Ortotis Prostetik	Tradisional Komplementer		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
1	Aceh	1.954	1.500	0	14	17	0	57	83	15	0	0	0	36	0	3	25	0	0	151	0	37	28	67	0	2	1	2	3.992
2	Sumatera Utara	2.328	2.764	0	93	11	5	67	190	47	1	0	0	121	0	0	54	0	1	132	0	108	45	303	1	2	7	21	6.301
3	Sumatera Barat	1.166	744	2	5	8	1	160	186	59	1	16	0	114	0	4	34	0	5	61	0	33	12	73	4	1	0	5	2.694
4	Riau	772	675	0	8	7	4	43	43	40	1	0	0	32	0	0	12	1	3	54	0	13	1	50	0	0	0	6	1.765
5	Jambi	803	809	1	6	9	0	12	131	65	3	1	0	78	1	5	19	2	3	22	0	36	6	167	0	0	1	18	2.198
6	Sumatera Selatan	336	244	0	4	5	2	54	15	5	5	0	2	10	0	1	0	0	1	8	2	13	6	55	0	0	1	6	775
7	Bengkulu	203	100	0	7	1	0	2	28	11	0	3	1	8	1	2	3	0	1	4	0	7	3	21	1	0	1	4	412
8	Lampung	1.700	1.569	3	16	7	0	84	169	52	2	2	0	96	0	5	21	4	13	64	0	33	7	310	0	4	0	2	4.163
9	Kep. Bangka Belitung	657	655	0	82	2	3	40	114	3	0	3	1	55	0	0	7	0	6	3	0	19	7	163	0	1	0	2	1.823
10	Kepulauan Riau	1.222	829	0	11	6	2	121	105	38	3	2	0	41	0	2	60	37	7	58	2	52	15	115	1	4	0	4	2.737
11	DKI Jakarta	1.491	871	1	8	13	2	43	134	37	14	5	5	39	12	7	36	3	4	18	0	50	20	337	4	5	0	41	3.200
12	Jawa Barat	3.090	562	0	6	39	15	123	262	96	20	21	22	94	8	17	62	48	0	51	8	170	145	505	3	6	9	123	5.505
13	Jawa Tengah	6.979	2.703	0	132	81	18	239	591	204	39	44	14	482	3	16	143	10	40	184	0	211	69	1.091	6	10	6	120	13.435
14	DI Yogyakarta	7.205	1.701	1	55	102	23	253	461	351	75	59	51	1.191	0	78	63	1	18	167	1	396	142	854	9	67	2	42	13.368
15	Jawa Timur	1.181	423	0	3	10	3	85	141	60	6	2	3	210	0	17	6	1	39	74	0	38	35	235	0	0	0	48	2.620
16	Banten	10.153	3.917	1	26	39	5	302	791	275	20	11	44	654	0	22	74	21	5	124	1	173	98	1.523	12	11	25	67	18.394
17	Bali	1.411	312	0	2	4	0	41	179	61	0	1	1	10	0	2	3	0	0	63	0	46	16	245	0	1	1	18	2.417
18	Nusa Tenggara Barat	1.317	571	0	23	10	0	25	116	50	1	4	1	162	2	19	10	0	3	57	0	37	8	391	2	1	1	14	2.825
19	Nusa Tenggara Timur	1.792	1.197	5	40	17	0	82	130	16	0	0	0	44	0	13	1	3	0	75	0	14	10	140	0	0	0	3	3.582
20	Kalimantan Barat	823	643	0	8	17	4	43	133	21	1	0	0	76	0	4	3	0	2	105	0	29	6	121	0	1	0	3	2.043
21	Kalimantan Tengah	703	331	1	36	6	3	107	159	44	3	3	0	50	0	0	23	0	0	61	0	32	16	240	2	0	0	4	1.824
22	Kalimantan Selatan	756	470	0	22	22	1	37	58	34	4	2	1	37	4	0	32	0	1	7	1	19	9	210	1	1	1	11	1.741
23	Kalimantan Timur	765	473	0	7	4	0	13	83	17	5	1	0	14	0	4	4	0	0	9	0	24	5	104	0	0	0	7	1.539
24	Kalimantan Utara	1.315	509	0	13	177	0	40	50	9	2	1	0	12	0	0	4	0	0	33	0	25	0	62	1	0	0	2	2.255
25	Sulawesi Utara	529	302	0	7	16	4	5	56	1	0	0	0	38	0	1	0	0	4	5	0	14	0	61	0	0	0	0	1.043
26	Sulawesi Tengah	878	995	0	10	31	0	35	50	13	0	0	0	3	0	9	6	0	1	19	0	29	1	57	1	0	0	4	2.142
27	Sulawesi Selatan	240	387	0	0	3	0	22	32	3	0	0	0	5	0	1	0	1	1	3	0	8	0	16	0	0	0	1	723
28	Sulawesi Tenggara	3.177	2.690	0	16	50	2	144	113	133	0	0	1	151	24	0	10	12	1	186	0	124	31	291	0	0	0	10	7.166
29	Gorontalo	975	759	0	58	83	0	86	27	14	0	0	0	48	0	2	4	1	3	68	0	24	27	151	0	0	0	4	2.334
30	Sulawesi Barat	507	519	0	2	8	0	16	24	8	0	0	0	6	4	4	1	0	1	16	0	13	2	63	1	0	0	1	1.196
31	Maluku	906	474	0	7	9	1	10	41	6	0	2	0	9	2	0	3	1	1	19	0	16	0	87	0	0	0	2	1.596
32	Maluku Utara	321	215	0	1	6	1	8	19	4	0	0	0	3	0	4	4	0	0	2	0	6	4	31	0	0	1	3	633
33	Papua Barat	694	398	0	1	7	0	24	29	7	0	0	0	8	1	0	2	0	2	2	0	6	2	163	1	0	0	1	1.348
34	Papua	203	99	0	3	2	0	6	12	8	0	0	0	3	0	2	1	0	0	1	0	5	0	18	1	0	0	5	369
Indonesia		**58.552**	**31.410**	**15**	**732**	**829**	**99**	**2.429**	**4.755**	**1.807**	**206**	**183**	**147**	**3.940**	**62**	**244**	**730**	**146**	**166**	**1.906**	**15**	**1.860**	**776**	**8.320**	**51**	**117**	**57**	**604**	**120.158**

Sumber : Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, 2022

Keterangan: - registrasi baru adalah tenaga kesehatan yang baru teregistrasi pada tahun 2021

- tenaga kesehatan tradisional adalah gabungan dari praktisi kesehatan tradisional, tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional, dan tenaga kesehatan tradisional interkontinental

Lampiran 12.c

JUMLAH PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI ULANG TENAGA KESEHATAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kesehatan Masyarakat				Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keterapian Fisik				Tenaga Keteknisian Medik								Tenaga Teknik Biomedika					Tenaga Kesehatan Tradisional	Tenaga Psikologi Klinis	Total
				Kesehatan Masyarakat	Promosi Kesehatan	Epidemiolog Kesehatan	Pembimbing Kesehatan Kerja			Fisioterapi	Okupasi Terapis	Terapis Wicara	Akupunktur	Rekam Medis	Teknik Kardiovaskular	Teknisi Pelayanan Darah	Refraksionis Optisien	Teknisi Gigi	Penata Anestesi	Terapis Gigi dan Mulut	Audiologis	Radiografer	Elektromedis	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	Fisikawan Medis	Ortotis Prostetik	Tradisional Komplementer		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)
1	Aceh	2.245	2.808	0	93	25	0	143	103	39	0	0	0	47	0	1	20	0	12	110	0	38	71	293	1	0	0	3	6.052
2	Sumatera Utara	4.310	6.754	0	184	10	7	77	114	102	2	2	0	60	0	0	42	0	36	165	0	80	49	424	10	0	0	3	12.431
3	Sumatera Barat	2.184	2.188	0	37	9	3	62	115	47	3	0	0	260	0	0	29	7	28	51	0	49	20	257	1	0	0	7	5.357
4	Riau	1.470	1.813	0	33	2	3	48	52	34	1	0	0	23	0	0	12	3	7	96	0	31	7	186	1	0	0	0	3.822
5	Jambi	1.563	1.554	0	27	10	0	19	108	59	2	4	1	73	0	1	26	2	58	40	0	30	10	121	1	1	0	13	3.723
6	Sumatera Selatan	595	767	0	9	4	3	29	14	12	2	0	0	24	0	0	3	1	3	17	0	13	4	72	0	0	0	2	1.574
7	Bengkulu	500	300	0	7	0	1	12	42	17	0	2	1	19	0	1	8	0	17	44	0	16	2	83	0	0	0	1	1.073
8	Lampung	2.470	3.625	0	92	6	0	134	104	65	5	1	0	40	1	1	17	2	17	97	0	57	13	257	2	1	0	6	7.013
9	Kep. Bangka Belitung	858	681	0	30	1	5	16	39	8	0	0	0	2	0	0	7	0	13	10	0	8	6	107	0	0	0	0	1.791
10	Kepulauan Riau	1.843	2.346	0	35	1	0	46	77	16	5	2	2	19	0	0	12	0	6	75	0	58	2	196	2	0	0	3	4.746
11	DKI Jakarta	2.267	2.937	0	4	3	0	47	54	98	9	8	0	99	2	11	25	0	23	58	0	53	12	203	8	1	0	4	5.926
12	Jawa Barat	5.354	1.458	0	7	21	11	129	240	256	24	15	0	247	3	28	57	12	22	145	0	194	143	694	15	6	0	36	9.117
13	Jawa Tengah	10.669	7.344	0	127	33	14	150	268	256	51	23	3	421	1	14	92	5	101	244	0	257	96	956	9	0	0	16	21.150
14	DI Yogyakarta	7.756	4.140	0	407	81	2	174	344	337	83	31	20	625	0	14	25	3	86	252	0	277	85	720	18	9	0	20	15.509
15	Jawa Timur	1.831	463	0	28	8	2	36	81	58	22	12	2	179	0	9	15	2	13	57	0	36	29	81	0	3	6	29	3.002
16	Banten	5.987	3.467	0	91	15	1	61	146	135	32	17	27	467	0	12	37	7	35	130	0	85	280	262	9	15	0	26	11.344
17	Bali	2.529	972	0	8	1	0	61	104	14	7	3	7	15	0	2	2	4	8	42	0	93	17	307	0	0	0	2	4.198
18	Nusa Tenggara Barat	1.429	1.657	0	59	4	0	39	95	25	1	2	1	74	0	1	5	1	11	85	0	37	22	180	1	0	0	1	3.730
19	Nusa Tenggara Timur	1.299	1.632	0	69	15	0	29	152	12	0	0	0	50	0	5	9	1	0	94	0	23	8	240	0	0	0	0	3.638
20	Kalimantan Barat	1.369	1.340	0	27	8	4	32	113	29	3	1	0	42	0	2	4	0	8	101	0	19	7	173	0	0	0	6	3.288
21	Kalimantan Tengah	1.792	1.775	0	121	6	2	41	110	19	3	0	0	51	0	0	10	3	9	72	0	39	14	190	3	0	0	4	4.264
22	Kalimantan Selatan	1.411	869	0	46	4	0	21	34	34	7	0	2	17	0	0	3	2	34	26	0	21	5	213	0	0	0	2	2.751
23	Kalimantan Timur	1.324	970	0	17	2	1	11	73	11	5	1	0	12	0	0	5	1	13	40	0	31	5	190	0	0	0	3	2.715
24	Kalimantan Utara	1.281	681	0	24	13	0	11	106	17	0	0	0	5	0	4	3	0	20	26	0	10	9	81	0	1	0	1	2.293
25	Sulawesi Utara	468	171	0	14	22	0	7	74	3	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	2	0	32	0	0	0	0	799
26	Sulawesi Tengah	1.490	1.247	0	11	40	0	41	75	17	1	0	0	6	0	3	1	0	7	37	0	5	14	86	0	0	0	1	3.082
27	Sulawesi Selatan	409	774	0	1	7	0	18	13	5	0	1	0	1	0	0	0	1	1	10	0	3	8	34	0	0	0	0	1.286
28	Sulawesi Tenggara	4.072	3.192	0	52	66	2	152	121	90	1	0	0	86	1	0	6	6	54	196	0	63	20	427	6	0	0	3	8.616
29	Gorontalo	1.486	1.084	0	155	208	7	79	160	14	0	0	0	11	0	0	1	0	5	75	0	23	0	130	0	0	0	3	3.441
30	Sulawesi Barat	414	602	0	13	23	0	20	76	8	0	0	0	1	0	2	2	0	9	15	0	17	6	101	0	0	0	0	1.309
31	Maluku	485	434	0	8	12	0	33	86	9	0	0	0	4	0	1	1	0	0	22	0	4	0	83	0	0	0	0	1.182
32	Maluku Utara	244	196	0	2	5	0	5	105	5	0	0	0	1	0	2	0	0	1	13	0	4	0	34	0	0	0	0	617
33	Papua Barat	584	614	0	1	8	0	6	41	9	0	0	0	10	0	0	2	0	3	11	0	12	1	138	0	0	0	0	1.440
34	Papua	335	328	0	1	1	0	4	9	7	0	0	0	7	0	0	0	0	4	27	0	7	9	25	0	0	0	0	764
Indonesia		**74.323**	**61.183**	**0**	**1.840**	**674**	**68**	**1.793**	**3.448**	**1.867**	**269**	**125**	**66**	**2.998**	**8**	**114**	**482**	**63**	**666**	**2.486**	**0**	**1.695**	**974**	**7.576**	**87**	**37**	**6**	**195**	**163.043**

Sumber : Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, 2022

Keterangan: - registrasi ulang terdiri dari perpanjangan, naik level, alih profesi, dan rekognisi pembelajaran lampau.

- tenaga kesehatan tradisional adalah gabungan dari praktisi kesehatan tradisional, tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional, dan tenaga kesehatan tradisional interkontinental

Lampiran 12.d

JUMLAH BIDAN SEBAGAI PEGAWAI TIDAK TETAP (PTT) AKTIF MENURUT KRITERIA WILAYAH DAN PROVINSI PER 31 DESEMBER 2021

No	Provinsi	Jumlah Bidan sebagai PTT Aktif			
		Biasa	Terpencil	Sangat Terpencil	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1	2	0	3
2	Sumatera Utara	4	3	0	7
3	Sumatera Barat	0	0	1	1
4	Riau	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	1	0	1
8	Lampung	2	1	1	4
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	1	0	1
11	DKI Jakarta	0	0	0	0
12	Jawa Barat	5	0	0	5
13	Jawa Tengah	2	0	0	2
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0
15	Jawa Timur	5	0	0	5
16	Banten	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	1	0	1
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	1	2	1	4
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	1	0	1
29	Gorontalo	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	6	6
34	Papua	0	0	0	0
Indonesia		**20**	**12**	**9**	**41**

Sumber: Biro Kepegawaian, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 13.a

JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Lingkungan			Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	717	2,361	3,078	264	927	1,191	82	952	1,034
2	Sumatera Utara	523	2,168	2,691	224	482	706	89	1,085	1,174
3	Sumatera Barat	190	796	986	145	389	534	39	761	800
4	Riau	293	841	1,134	119	232	351	33	539	572
5	Jambi	249	575	824	154	309	463	46	430	476
6	Sumatera Selatan	425	1,428	1,853	140	563	703	70	709	779
7	Bengkulu	284	666	950	109	168	277	60	368	428
8	Lampung	277	614	891	201	419	620	78	548	626
9	Kep. Bangka Belitung	96	218	314	42	125	167	32	212	244
10	Kepulauan Riau	97	187	284	92	174	266	20	175	195
11	DKI Jakarta	138	437	575	269	436	705	122	1,116	1,238
12	Jawa Barat	917	1,983	2,900	524	1,100	1,624	224	2,103	2,327
13	Jawa Tengah	562	2,072	2,634	645	1,282	1,927	245	2,391	2,636
14	DI Yogyakarta	82	311	393	166	248	414	61	483	544
15	Jawa Timur	401	1,811	2,212	500	1,180	1,680	368	2,694	3,062
16	Banten	209	514	723	144	273	417	50	544	594
17	Bali	124	307	431	195	274	469	76	534	610
18	Nusa Tenggara Barat	230	480	710	181	378	559	138	712	850
19	Nusa Tenggara Timur	597	963	1,560	422	563	985	271	967	1,238
20	Kalimantan Barat	250	458	708	269	312	581	118	574	692
21	Kalimantan Tengah	175	331	506	108	148	256	70	459	529
22	Kalimantan Selatan	241	456	697	211	341	552	149	761	910
23	Kalimantan Timur	176	451	627	121	218	339	67	310	377
24	Kalimantan Utara	88	169	257	49	67	116	21	96	117
25	Sulawesi Utara	162	618	780	184	302	486	101	468	569
26	Sulawesi Tengah	554	1,471	2,025	209	374	583	71	421	492
27	Sulawesi Selatan	662	2,300	2,962	301	896	1,197	124	1,284	1,408
28	Sulawesi Tenggara	439	1,591	2,030	152	344	496	104	681	785
29	Gorontalo	131	575	706	67	164	231	76	394	470
30	Sulawesi Barat	125	440	565	80	146	226	28	267	295
31	Maluku	243	590	833	216	301	517	89	522	611
32	Maluku Utara	225	742	967	75	129	204	34	358	392
33	Papua Barat	129	350	479	74	75	149	35	286	321
34	Papua	345	685	1,030	214	221	435	89	433	522
Indonesia		**10,356**	**29,959**	**40,315**	**6,866**	**13,560**	**20,426**	**3,280**	**24,637**	**27,917**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 13.b

JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Lingkungan			Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	412	1,716	2,128	163	696	859	47	621	668
2	Sumatera Utara	313	1,460	1,773	109	347	456	56	618	674
3	Sumatera Barat	106	492	598	92	286	378	24	479	503
4	Riau	175	501	676	81	163	244	25	322	347
5	Jambi	152	362	514	70	222	292	34	282	316
6	Sumatera Selatan	273	925	1,198	84	385	469	43	406	449
7	Bengkulu	181	406	587	65	122	187	30	223	253
8	Lampung	215	458	673	144	310	454	63	367	430
9	Kep. Bangka Belitung	54	129	183	30	75	105	19	127	146
10	Kepulauan Riau	41	107	148	38	100	138	11	106	117
11	DKI Jakarta	36	228	264	116	237	353	31	376	407
12	Jawa Barat	496	1,293	1,789	320	806	1,126	116	1,025	1,141
13	Jawa Tengah	324	1,438	1,762	360	868	1,228	147	1,230	1,377
14	DI Yogyakarta	50	202	252	60	122	182	36	212	248
15	Jawa Timur	186	1,051	1,237	270	758	1,028	230	1,230	1,460
16	Banten	98	273	371	53	163	216	24	261	285
17	Bali	53	125	178	93	128	221	31	179	210
18	Nusa Tenggara Barat	160	333	493	107	291	398	110	477	587
19	Nusa Tenggara Timur	463	705	1,168	322	459	781	223	728	951
20	Kalimantan Barat	163	279	442	165	224	389	84	378	462
21	Kalimantan Tengah	118	216	334	76	104	180	47	292	339
22	Kalimantan Selatan	162	336	498	128	255	383	119	526	645
23	Kalimantan Timur	117	336	453	60	152	212	45	176	221
24	Kalimantan Utara	41	97	138	29	42	71	15	61	76
25	Sulawesi Utara	92	406	498	126	210	336	66	307	373
26	Sulawesi Tengah	297	803	1,100	125	239	364	54	274	328
27	Sulawesi Selatan	348	1,306	1,654	176	619	795	68	757	825
28	Sulawesi Tenggara	292	1,094	1,386	110	260	370	82	505	587
29	Gorontalo	66	375	441	41	110	151	45	243	288
30	Sulawesi Barat	81	332	413	65	119	184	26	177	203
31	Maluku	123	354	477	143	204	347	61	345	406
32	Maluku Utara	137	472	609	46	94	140	26	228	254
33	Papua Barat	68	208	276	50	52	102	26	205	231
34	Papua	203	416	619	145	151	296	61	281	342
Indonesia		**6,096**	**19,234**	**25,330**	**4,062**	**9,373**	**13,435**	**2,125**	**14,024**	**16,149**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 13.c

JUMLAH TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT, KESEHATAN LINGKUNGAN, DAN GIZI DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Kesehatan Masyarakat			Kesehatan Lingkungan			Gizi		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	163	415	578	72	186	258	28	319	347
2	Sumatera Utara	108	420	528	67	78	145	25	435	460
3	Sumatera Barat	39	127	166	35	70	105	15	257	272
4	Riau	62	170	232	14	39	53	8	201	209
5	Jambi	32	82	114	45	58	103	12	131	143
6	Sumatera Selatan	52	207	259	35	130	165	24	267	291
7	Bengkulu	44	145	189	29	24	53	21	131	152
8	Lampung	26	84	110	33	81	114	15	168	183
9	Kep. Bangka Belitung	14	42	56	6	30	36	11	79	90
10	Kepulauan Riau	19	35	54	22	47	69	9	69	78
11	DKI Jakarta	68	140	208	112	159	271	91	729	820
12	Jawa Barat	245	304	549	140	227	367	103	981	1,084
13	Jawa Tengah	54	169	223	184	303	487	81	1,032	1,113
14	DI Yogyakarta	4	39	43	74	98	172	20	251	271
15	Jawa Timur	91	378	469	162	344	506	123	1,341	1,464
16	Banten	48	118	166	35	65	100	22	265	287
17	Bali	28	77	105	59	95	154	43	326	369
18	Nusa Tenggara Barat	16	52	68	37	52	89	21	214	235
19	Nusa Tenggara Timur	50	133	183	58	74	132	41	221	262
20	Kalimantan Barat	28	90	118	53	41	94	25	165	190
21	Kalimantan Tengah	16	49	65	20	26	46	21	150	171
22	Kalimantan Selatan	35	56	91	49	68	117	28	231	259
23	Kalimantan Timur	16	50	66	34	40	74	21	130	151
24	Kalimantan Utara	20	29	49	9	15	24	6	34	40
25	Sulawesi Utara	37	109	146	35	61	96	32	149	181
26	Sulawesi Tengah	123	361	484	47	91	138	15	129	144
27	Sulawesi Selatan	136	496	632	62	164	226	45	485	530
28	Sulawesi Tenggara	47	216	263	21	48	69	16	137	153
29	Gorontalo	19	92	111	9	25	34	16	118	134
30	Sulawesi Barat	12	34	46	9	19	28	2	83	85
31	Maluku	39	101	140	35	57	92	19	138	157
32	Maluku Utara	43	148	191	13	15	28	5	109	114
33	Papua Barat	25	82	107	10	15	25	7	78	85
34	Papua	44	136	180	36	34	70	23	137	160
Indonesia		**1,803**	**5,186**	**6,989**	**1,661**	**2,879**	**4,540**	**994**	**9,690**	**10,684**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 14.a

JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik			Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			Keterapian Fisik			Keteknisian Medis		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	117	915	1,032	288	284	572	83	335	418	243	923	1,166
2	Sumatera Utara	253	1,444	1,697	365	493	858	148	256	404	245	904	1,149
3	Sumatera Barat	178	882	1,060	260	219	479	72	177	249	253	1,232	1,485
4	Riau	149	850	999	168	198	366	81	210	291	195	530	725
5	Jambi	175	711	886	98	94	192	38	122	160	102	474	576
6	Sumatera Selatan	181	1,038	1,219	219	255	474	66	240	306	241	888	1,129
7	Bengkulu	110	379	489	94	66	160	16	31	47	68	139	207
8	Lampung	217	817	1,034	222	179	401	56	111	167	191	456	647
9	Kep. Bangka Belitung	89	295	384	90	59	149	13	68	81	84	257	341
10	Kepulauan Riau	89	286	375	102	91	193	24	63	87	77	185	262
11	DKI Jakarta	1,132	3,081	4,213	1,215	1,005	2,220	569	860	1,429	1,012	2,297	3,309
12	Jawa Barat	1,314	4,323	5,637	1,380	986	2,366	507	1,091	1,598	1,711	3,440	5,151
13	Jawa Tengah	1,018	4,430	5,448	1,337	1,168	2,505	605	1,225	1,830	1,333	4,154	5,487
14	DI Yogyakarta	252	979	1,231	278	247	525	143	284	427	268	1,093	1,361
15	Jawa Timur	1,117	4,708	5,825	1,207	1,040	2,247	484	805	1,289	1,413	3,088	4,501
16	Banten	262	1,052	1,314	325	302	627	151	345	496	265	641	906
17	Bali	272	798	1,070	338	183	521	114	118	232	194	504	698
18	Nusa Tenggara Barat	244	831	1,075	229	146	375	56	132	188	338	551	889
19	Nusa Tenggara Timur	292	848	1,140	148	126	274	54	114	168	291	872	1,163
20	Kalimantan Barat	240	650	890	151	99	250	38	86	124	313	622	935
21	Kalimantan Tengah	162	489	651	132	65	197	29	55	84	144	292	436
22	Kalimantan Selatan	259	903	1,162	207	124	331	54	78	132	238	657	895
23	Kalimantan Timur	256	770	1,026	170	136	306	77	138	215	169	280	449
24	Kalimantan Utara	57	129	186	50	33	83	11	21	32	49	69	118
25	Sulawesi Utara	116	253	369	86	36	122	66	105	171	89	311	400
26	Sulawesi Tengah	121	327	448	79	73	152	17	70	87	95	179	274
27	Sulawesi Selatan	350	1,425	1,775	298	439	737	117	298	415	300	1,149	1,449
28	Sulawesi Tenggara	100	425	525	73	95	168	14	87	101	95	303	398
29	Gorontalo	73	130	203	42	41	83	11	11	22	35	86	121
30	Sulawesi Barat	56	159	215	25	37	62	8	33	41	35	103	138
31	Maluku	78	315	393	42	52	94	9	42	51	34	77	111
32	Maluku Utara	88	262	350	41	65	106	16	28	44	37	77	114
33	Papua Barat	84	218	302	34	38	72	7	18	25	33	81	114
34	Papua	236	518	754	64	40	104	25	39	64	73	125	198
Indonesia		**9,737**	**35,640**	**45,377**	**9,857**	**8,514**	**18,371**	**3,779**	**7,696**	**11,475**	**10,263**	**27,039**	**37,302**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 14.b

JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIS DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik			Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			Keterapian Fisik			Keteknisian Medis		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	35	391	426	5	14	19	19	98	117	95	489	584
2	Sumatera Utara	64	424	488	6	12	18	9	17	26	51	381	432
3	Sumatera Barat	50	317	367	3	3	6	6	26	32	68	506	574
4	Riau	42	271	313	0	5	5	4	30	34	27	184	211
5	Jambi	65	252	317	0	0	0	4	13	17	51	267	318
6	Sumatera Selatan	52	329	381	1	10	11	4	22	26	51	400	451
7	Bengkulu	40	170	210	4	3	7	2	1	3	2	46	48
8	Lampung	71	299	370	3	3	6	0	3	3	80	261	341
9	Kep. Bangka Belitung	26	94	120	1	0	1	1	0	1	32	119	151
10	Kepulauan Riau	22	64	86	1	0	1	0	2	2	8	61	69
11	DKI Jakarta	132	226	358	3	3	6	0	8	8	84	281	365
12	Jawa Barat	230	915	1,145	6	17	23	15	21	36	313	1,094	1,407
13	Jawa Tengah	234	1,056	1,290	21	21	42	63	159	222	331	1,274	1,605
14	DI Yogyakarta	34	208	242	0	5	5	23	38	61	52	295	347
15	Jawa Timur	228	1,086	1,314	16	17	33	37	54	91	307	935	1,242
16	Banten	33	168	201	3	1	4	4	12	16	43	165	208
17	Bali	36	112	148	5	0	5	2	3	5	56	172	228
18	Nusa Tenggara Barat	81	357	438	20	6	26	4	10	14	128	239	367
19	Nusa Tenggara Timur	160	433	593	8	2	10	6	28	34	139	491	630
20	Kalimantan Barat	81	266	347	5	1	6	1	2	3	151	334	485
21	Kalimantan Tengah	59	178	237	0	0	0	1	0	1	68	159	227
22	Kalimantan Selatan	67	339	406	3	1	4	3	5	8	93	353	446
23	Kalimantan Timur	48	218	266	0	1	1	0	4	4	43	89	132
24	Kalimantan Utara	20	41	61	1	0	1	0	1	1	19	32	51
25	Sulawesi Utara	34	62	96	4	1	5	4	22	26	37	185	222
26	Sulawesi Tengah	43	114	157	2	0	2	0	2	2	49	91	140
27	Sulawesi Selatan	78	508	586	4	5	9	6	14	20	111	533	644
28	Sulawesi Tenggara	44	215	259	3	4	7	3	12	15	40	163	203
29	Gorontalo	24	50	74	0	0	0	0	0	0	6	31	37
30	Sulawesi Barat	25	86	111	0	0	0	0	6	6	18	55	73
31	Maluku	40	163	203	2	3	5	1	1	2	11	28	39
32	Maluku Utara	36	131	167	2	6	8	4	5	9	13	38	51
33	Papua Barat	44	105	149	0	1	1	0	2	2	11	26	37
34	Papua	116	251	367	3	2	5	1	3	4	15	38	53
Indonesia		**2,394**	**9,899**	**12,293**	**135**	**147**	**282**	**227**	**624**	**851**	**2,603**	**9,815**	**12,418**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 14.c

JUMLAH TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA, KETERAPIAN FISIK, DAN KETEKNISAN MEDIK DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Ahli Teknologi Laboratorium Medik			Tenaga Teknik Biomedika Lainnya			Keterapian Fisik			Keteknisian Medis		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	77	490	567	272	266	538	63	239	302	147	419	566
2	Sumatera Utara	117	805	922	332	449	781	135	237	372	190	503	693
3	Sumatera Barat	122	511	633	256	216	472	63	150	213	178	706	884
4	Riau	91	527	618	166	192	358	76	175	251	157	327	484
5	Jambi	83	358	441	95	94	189	34	108	142	45	187	232
6	Sumatera Selatan	111	623	734	215	237	452	62	216	278	187	452	639
7	Bengkulu	64	170	234	90	63	153	14	30	44	67	90	157
8	Lampung	125	454	579	211	171	382	51	98	149	107	180	287
9	Kep. Bangka Belitung	44	152	196	86	54	140	12	64	76	49	131	180
10	Kepulauan Riau	51	181	232	97	83	180	24	58	82	65	122	187
11	DKI Jakarta	769	2,095	2,864	1,093	865	1,958	440	665	1,105	779	1,590	2,369
12	Jawa Barat	918	2,791	3,709	1,309	909	2,218	456	986	1,442	1,237	2,056	3,293
13	Jawa Tengah	623	2,548	3,171	1,260	1,048	2,308	476	889	1,365	913	2,539	3,452
14	DI Yogyakarta	130	520	650	265	222	487	115	208	323	197	674	871
15	Jawa Timur	690	2,645	3,335	1,095	931	2,026	411	637	1,048	931	1,860	2,791
16	Banten	189	763	952	312	295	607	135	320	455	189	438	627
17	Bali	190	548	738	316	162	478	83	77	160	114	281	395
18	Nusa Tenggara Barat	133	385	518	197	132	329	47	112	159	203	293	496
19	Nusa Tenggara Timur	114	335	449	134	121	255	47	76	123	146	368	514
20	Kalimantan Barat	110	304	414	135	90	225	34	76	110	142	236	378
21	Kalimantan Tengah	86	258	344	127	64	191	27	51	78	74	132	206
22	Kalimantan Selatan	148	442	590	175	115	290	49	69	118	136	271	407
23	Kalimantan Timur	157	414	571	151	126	277	75	124	199	112	166	278
24	Kalimantan Utara	33	68	101	44	33	77	10	20	30	30	37	67
25	Sulawesi Utara	64	150	214	81	35	116	58	77	135	50	109	159
26	Sulawesi Tengah	64	179	243	70	68	138	17	67	84	43	86	129
27	Sulawesi Selatan	243	812	1,055	286	426	712	97	261	358	174	584	758
28	Sulawesi Tenggara	45	161	206	64	84	148	11	74	85	53	144	197
29	Gorontalo	42	70	112	41	40	81	11	11	22	24	53	77
30	Sulawesi Barat	27	58	85	25	37	62	8	27	35	15	49	64
31	Maluku	35	119	154	33	46	79	8	40	48	22	47	69
32	Maluku Utara	32	112	144	39	57	96	13	22	35	22	36	58
33	Papua Barat	41	109	150	33	36	69	7	16	23	19	53	72
34	Papua	101	188	289	63	37	100	24	36	60	58	85	143
Indonesia		**5,869**	**20,345**	**26,214**	**9,168**	**7,804**	**16,972**	**3,193**	**6,316**	**9,509**	**6,875**	**15,304**	**22,179**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 15.a

JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Tenaga Kefarmasian								
		Tenaga Kefarmasian[a]			Apoteker			Total		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	179	1,242	1,421	73	508	581	252	1,750	2,002
2	Sumatera Utara	209	1,439	1,648	147	818	965	356	2,257	2,613
3	Sumatera Barat	140	1,017	1,157	86	559	645	226	1,576	1,802
4	Riau	131	927	1,058	98	668	766	229	1,595	1,824
5	Jambi	103	756	859	105	451	556	208	1,207	1,415
6	Sumatera Selatan	210	1,248	1,458	136	541	677	346	1,789	2,135
7	Bengkulu	68	314	382	49	245	294	117	559	676
8	Lampung	151	551	702	151	507	658	302	1,058	1,360
9	Kep. Bangka Belitung	81	339	420	71	222	293	152	561	713
10	Kepulauan Riau	103	326	429	107	333	440	210	659	869
11	DKI Jakarta	841	3,548	4,389	655	2,178	2,833	1,496	5,726	7,222
12	Jawa Barat	1,273	5,000	6,273	1,388	4,268	5,656	2,661	9,268	11,929
13	Jawa Tengah	933	5,945	6,878	1,094	5,646	6,740	2,027	11,591	13,618
14	DI Yogyakarta	136	1,030	1,166	221	1,502	1,723	357	2,532	2,889
15	Jawa Timur	922	5,407	6,329	1,067	4,976	6,043	1,989	10,383	12,372
16	Banten	325	1,265	1,590	258	1,088	1,346	583	2,353	2,936
17	Bali	145	661	806	266	555	821	411	1,216	1,627
18	Nusa Tenggara Barat	288	588	876	141	416	557	429	1,004	1,433
19	Nusa Tenggara Timur	216	892	1,108	115	462	577	331	1,354	1,685
20	Kalimantan Barat	169	560	729	125	341	466	294	901	1,195
21	Kalimantan Tengah	132	414	546	79	336	415	211	750	961
22	Kalimantan Selatan	209	773	982	150	420	570	359	1,193	1,552
23	Kalimantan Timur	252	782	1,034	198	694	892	450	1,476	1,926
24	Kalimantan Utara	58	216	274	70	185	255	128	401	529
25	Sulawesi Utara	126	406	532	82	276	358	208	682	890
26	Sulawesi Tengah	151	619	770	95	337	432	246	956	1,202
27	Sulawesi Selatan	260	1,444	1,704	228	1,306	1,534	488	2,750	3,238
28	Sulawesi Tenggara	107	536	643	104	493	597	211	1,029	1,240
29	Gorontalo	36	196	232	26	145	171	62	341	403
30	Sulawesi Barat	35	224	259	41	160	201	76	384	460
31	Maluku	50	152	202	46	266	312	96	418	514
32	Maluku Utara	36	181	217	36	183	219	72	364	436
33	Papua Barat	43	139	182	65	254	319	108	393	501
34	Papua	141	361	502	95	329	424	236	690	926
Indonesia		**8,259**	**39,498**	**47,757**	**7,668**	**31,668**	**39,336**	**15,927**	**71,166**	**87,093**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Keterangan : a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi;

Lampiran 15.b

JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Tenaga Kefarmasian								
		Tenaga Kefarmasian[a]			Apoteker			Total		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	66	552	618	27	171	198	93	723	816
2	Sumatera Utara	76	477	553	37	250	287	113	727	840
3	Sumatera Barat	36	270	306	24	160	184	60	430	490
4	Riau	41	283	324	30	162	192	71	445	516
5	Jambi	27	248	275	25	141	166	52	389	441
6	Sumatera Selatan	55	385	440	46	180	226	101	565	666
7	Bengkulu	20	114	134	15	72	87	35	186	221
8	Lampung	54	192	246	41	164	205	95	356	451
9	Kep. Bangka Belitung	13	81	94	23	53	76	36	134	170
10	Kepulauan Riau	16	59	75	23	72	95	39	131	170
11	DKI Jakarta	135	458	593	46	142	188	181	600	781
12	Jawa Barat	144	696	840	226	691	917	370	1,387	1,757
13	Jawa Tengah	149	884	1,033	124	598	722	273	1,482	1,755
14	DI Yogyakarta	20	140	160	21	123	144	41	263	304
15	Jawa Timur	140	814	954	101	495	596	241	1,309	1,550
16	Banten	36	130	166	41	214	255	77	344	421
17	Bali	17	86	103	33	60	93	50	146	196
18	Nusa Tenggara Barat	88	218	306	43	144	187	131	362	493
19	Nusa Tenggara Timur	105	426	531	41	134	175	146	560	706
20	Kalimantan Barat	55	211	266	45	113	158	100	324	424
21	Kalimantan Tengah	51	167	218	32	114	146	83	281	364
22	Kalimantan Selatan	54	241	295	57	152	209	111	393	504
23	Kalimantan Timur	50	188	238	42	143	185	92	331	423
24	Kalimantan Utara	12	60	72	16	49	65	28	109	137
25	Sulawesi Utara	34	159	193	26	97	123	60	256	316
26	Sulawesi Tengah	52	294	346	34	135	169	86	429	515
27	Sulawesi Selatan	52	466	518	58	428	486	110	894	1,004
28	Sulawesi Tenggara	59	247	306	40	216	256	99	463	562
29	Gorontalo	8	84	92	6	54	60	14	138	152
30	Sulawesi Barat	19	133	152	24	70	94	43	203	246
31	Maluku	28	65	93	22	105	127	50	170	220
32	Maluku Utara	24	79	103	15	83	98	39	162	201
33	Papua Barat	14	57	71	21	95	116	35	152	187
34	Papua	77	166	243	36	117	153	113	283	396
Indonesia		**1,827**	**9,130**	**10,957**	**1,441**	**5,997**	**7,438**	**3,268**	**15,127**	**18,395**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Keterangan : a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi;

Lampiran 15.c

JUMLAH TENAGA KEFARMASIAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Tenaga Kefarmasian								
		Tenaga Kefarmasian[a]			Apoteker			Total		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	103	636	739	43	319	362	146	955	1,101
2	Sumatera Utara	103	844	947	89	488	577	192	1,332	1,524
3	Sumatera Barat	93	673	766	47	323	370	140	996	1,136
4	Riau	82	551	633	49	362	411	131	913	1,044
5	Jambi	38	345	383	44	181	225	82	526	608
6	Sumatera Selatan	125	775	900	77	292	369	202	1,067	1,269
7	Bengkulu	33	137	170	22	108	130	55	245	300
8	Lampung	78	288	366	66	185	251	144	473	617
9	Kep. Bangka Belitung	46	163	209	24	82	106	70	245	315
10	Kepulauan Riau	48	156	204	42	129	171	90	285	375
11	DKI Jakarta	626	2,661	3,287	344	1,086	1,430	970	3,747	4,717
12	Jawa Barat	832	3,181	4,013	454	1,727	2,181	1,286	4,908	6,194
13	Jawa Tengah	578	3,369	3,947	303	1,620	1,923	881	4,989	5,870
14	DI Yogyakarta	73	602	675	64	419	483	137	1,021	1,158
15	Jawa Timur	533	3,111	3,644	359	1,712	2,071	892	4,823	5,715
16	Banten	233	887	1,120	130	572	702	363	1,459	1,822
17	Bali	83	407	490	100	228	328	183	635	818
18	Nusa Tenggara Barat	159	280	439	67	185	252	226	465	691
19	Nusa Tenggara Timur	66	311	377	45	212	257	111	523	634
20	Kalimantan Barat	89	279	368	59	160	219	148	439	587
21	Kalimantan Tengah	59	174	233	34	150	184	93	324	417
22	Kalimantan Selatan	123	399	522	56	178	234	179	577	756
23	Kalimantan Timur	177	463	640	73	243	316	250	706	956
24	Kalimantan Utara	30	103	133	31	66	97	61	169	230
25	Sulawesi Utara	80	211	291	55	154	209	135	365	500
26	Sulawesi Tengah	71	284	355	54	172	226	125	456	581
27	Sulawesi Selatan	171	815	986	134	681	815	305	1,496	1,801
28	Sulawesi Tenggara	31	201	232	44	201	245	75	402	477
29	Gorontalo	24	89	113	14	72	86	38	161	199
30	Sulawesi Barat	14	81	95	11	65	76	25	146	171
31	Maluku	18	66	84	16	116	132	34	182	216
32	Maluku Utara	6	86	92	15	76	91	21	162	183
33	Papua Barat	20	66	86	14	93	107	34	159	193
34	Papua	58	159	217	46	174	220	104	333	437
Indonesia		**4,903**	**22,853**	**27,756**	**3,025**	**12,831**	**15,856**	**7,928**	**35,684**	**43,612**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Keterangan : a) Termasuk analis farmasi, asisten apoteker, dan sarjana farmasi;

Lampiran 16.a

JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan									Total		
		Pejabat Struktural			Tenaga Pendidik			Tenaga Dukungan Manajemen					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	537	545	1,082	9	14	23	5,826	5,705	11,531	6,372	6,264	12,636
2	Sumatera Utara	617	904	1,521	32	33	65	7,840	9,530	17,370	8,489	10,467	18,956
3	Sumatera Barat	334	699	1,033	3	8	11	3,782	4,738	8,520	4,119	5,445	9,564
4	Riau	356	416	772	12	24	36	5,586	5,849	11,435	5,954	6,289	12,243
5	Jambi	376	287	663	11	6	17	3,149	3,509	6,658	3,536	3,802	7,338
6	Sumatera Selatan	479	667	1,146	5	10	15	5,875	6,469	12,344	6,359	7,146	13,505
7	Bengkulu	260	261	521	4	8	12	1,371	1,813	3,184	1,635	2,082	3,717
8	Lampung	603	610	1,213	7	31	38	5,685	6,560	12,245	6,295	7,201	13,496
9	Kep. Bangka Belitung	181	237	418	1	0	1	2,065	2,332	4,397	2,247	2,569	4,816
10	Kepulauan Riau	346	296	642	18	60	78	3,172	3,116	6,288	3,536	3,472	7,008
11	DKI Jakarta	922	1,176	2,098	359	444	803	31,528	26,405	57,933	32,809	28,025	60,834
12	Jawa Barat	2,312	2,269	4,581	73	94	167	44,973	33,877	78,850	47,358	36,240	83,598
13	Jawa Tengah	1,906	1,987	3,893	128	252	380	43,995	37,431	81,426	46,029	39,670	85,699
14	DI Yogyakarta	383	455	838	16	46	62	8,790	7,904	16,694	9,189	8,405	17,594
15	Jawa Timur	2,018	2,224	4,242	86	179	265	48,615	41,175	89,790	50,719	43,578	94,297
16	Banten	524	729	1,253	9	24	33	11,071	9,884	20,955	11,604	10,637	22,241
17	Bali	449	432	881	9	20	29	6,887	8,295	15,182	7,345	8,747	16,092
18	Nusa Tenggara Barat	497	324	821	67	93	160	4,662	3,251	7,913	5,226	3,668	8,894
19	Nusa Tenggara Timur	340	419	759	3	5	8	4,077	3,731	7,808	4,420	4,155	8,575
20	Kalimantan Barat	468	281	749	4	8	12	3,363	3,923	7,286	3,835	4,212	8,047
21	Kalimantan Tengah	376	293	669	3	4	7	2,530	2,841	5,371	2,909	3,138	6,047
22	Kalimantan Selatan	527	381	908	9	7	16	4,579	4,310	8,889	5,115	4,698	9,813
23	Kalimantan Timur	512	437	949	6	18	24	6,179	6,235	12,414	6,697	6,690	13,387
24	Kalimantan Utara	120	103	223	6	23	29	1,486	1,341	2,827	1,612	1,467	3,079
25	Sulawesi Utara	235	386	621	3	10	13	2,545	2,768	5,313	2,783	3,164	5,947
26	Sulawesi Tengah	293	315	608	0	5	5	2,093	2,566	4,659	2,386	2,886	5,272
27	Sulawesi Selatan	530	721	1,251	9	11	20	4,946	6,086	11,032	5,485	6,818	12,303
28	Sulawesi Tenggara	346	367	713	6	8	14	1,554	1,938	3,492	1,906	2,313	4,219
29	Gorontalo	122	181	303	0	0	0	1,041	1,443	2,484	1,163	1,624	2,787
30	Sulawesi Barat	116	153	269	0	0	0	835	965	1,800	951	1,118	2,069
31	Maluku	219	209	428	4	3	7	1,390	1,494	2,884	1,613	1,706	3,319
32	Maluku Utara	173	177	350	29	78	107	720	928	1,648	922	1,183	2,105
33	Papua Barat	250	161	411	0	0	0	1,202	1,121	2,323	1,452	1,282	2,734
34	Papua	496	381	877	14	12	26	2,366	2,330	4,696	2,876	2,723	5,599
Indonesia		**18,223**	**19,483**	**37,706**	**945**	**1,538**	**2,483**	**285,778**	**261,863**	**547,641**	**304,946**	**282,884**	**587,830**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 16.b

JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan									Total		
		Pejabat Struktural			Tenaga Pendidik			Tenaga Dukungan Manajemen					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	108	142	250	0	2	2	1,213	1,405	2,618	1,321	1,549	2,870
2	Sumatera Utara	94	177	271	0	2	2	783	899	1,682	877	1,078	1,955
3	Sumatera Barat	55	121	176	0	0	0	936	962	1,898	991	1,083	2,074
4	Riau	69	53	122	1	0	1	910	716	1,626	980	769	1,749
5	Jambi	102	61	163	0	0	0	429	482	911	531	543	1,074
6	Sumatera Selatan	144	163	307	1	0	1	882	993	1,875	1,027	1,156	2,183
7	Bengkulu	81	101	182	0	0	0	271	357	628	352	458	810
8	Lampung	142	111	253	0	1	1	999	1,204	2,203	1,141	1,316	2,457
9	Kep. Bangka Belitung	32	37	69	0	0	0	329	356	685	361	393	754
10	Kepulauan Riau	63	66	129	0	0	0	464	436	900	527	502	1,029
11	DKI Jakarta	26	55	81	0	0	0	2,862	1,243	4,105	2,888	1,298	4,186
12	Jawa Barat	492	358	850	0	1	1	5,341	4,381	9,722	5,833	4,740	10,573
13	Jawa Tengah	275	282	557	0	0	0	5,369	4,429	9,798	5,644	4,711	10,355
14	DI Yogyakarta	45	66	111	0	0	0	938	736	1,674	983	802	1,785
15	Jawa Timur	197	182	379	1	0	1	6,575	5,158	11,733	6,773	5,340	12,113
16	Banten	108	139	247	1	0	1	1,804	948	2,752	1,913	1,087	3,000
17	Bali	56	34	90	0	1	1	1,439	1,492	2,931	1,495	1,527	3,022
18	Nusa Tenggara Barat	177	69	246	1	2	3	1,137	763	1,900	1,315	834	2,149
19	Nusa Tenggara Timur	80	61	141	1	0	1	1,321	989	2,310	1,402	1,050	2,452
20	Kalimantan Barat	144	59	203	1	0	1	730	853	1,583	875	912	1,787
21	Kalimantan Tengah	129	56	185	0	0	0	477	586	1,063	606	642	1,248
22	Kalimantan Selatan	164	112	276	0	0	0	757	789	1,546	921	901	1,822
23	Kalimantan Timur	139	99	238	0	0	0	933	1,094	2,027	1,072	1,193	2,265
24	Kalimantan Utara	24	20	44	0	0	0	301	245	546	325	265	590
25	Sulawesi Utara	19	17	36	0	0	0	331	353	684	350	370	720
26	Sulawesi Tengah	64	40	104	0	0	0	460	519	979	524	559	1,083
27	Sulawesi Selatan	88	103	191	0	0	0	1,048	1,207	2,255	1,136	1,310	2,446
28	Sulawesi Tenggara	109	108	217	4	1	5	321	396	717	434	505	939
29	Gorontalo	24	40	64	0	0	0	220	406	626	244	446	690
30	Sulawesi Barat	38	51	89	0	0	0	282	341	623	320	392	712
31	Maluku	55	47	102	0	0	0	275	274	549	330	321	651
32	Maluku Utara	69	45	114	0	0	0	129	147	276	198	192	390
33	Papua Barat	62	33	95	0	0	0	206	180	386	268	213	481
34	Papua	162	107	269	0	2	2	520	453	973	682	562	1,244
Indonesia		**3,636**	**3,215**	**6,851**	**11**	**12**	**23**	**40,992**	**35,792**	**76,784**	**44,639**	**39,019**	**83,658**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 16.c

JUMLAH TENAGA PENUNJANG/PENDUKUNG KESEHATAN DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan									Total		
		Pejabat Struktural			Tenaga Pendidik			Tenaga Dukungan Manajemen					
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Aceh	227	189	416	2	2	4	3,843	3,360	7,203	4,072	3,551	7,623
2	Sumatera Utara	274	369	643	5	6	11	5,762	6,926	12,688	6,041	7,301	13,342
3	Sumatera Barat	154	335	489	1	1	2	2,305	2,963	5,268	2,460	3,299	5,759
4	Riau	150	198	348	4	1	5	3,689	3,823	7,512	3,843	4,022	7,865
5	Jambi	108	121	229	0	0	0	1,645	2,032	3,677	1,753	2,153	3,906
6	Sumatera Selatan	157	284	441	0	0	0	4,159	4,276	8,435	4,316	4,560	8,876
7	Bengkulu	71	80	151	1	1	2	814	970	1,784	886	1,051	1,937
8	Lampung	139	247	386	0	1	1	3,306	3,531	6,837	3,445	3,779	7,224
9	Kep. Bangka Belitung	84	99	183	0	0	0	1,232	1,109	2,341	1,316	1,208	2,524
10	Kepulauan Riau	88	96	184	1	2	3	1,750	1,553	3,303	1,839	1,651	3,490
11	DKI Jakarta	800	985	1,785	33	48	81	22,710	17,591	40,301	23,543	18,624	42,167
12	Jawa Barat	1,009	1,126	2,135	7	15	22	29,730	20,891	50,621	30,746	22,032	52,778
13	Jawa Tengah	963	924	1,887	18	12	30	25,488	18,997	44,485	26,469	19,933	46,402
14	DI Yogyakarta	189	201	390	4	14	18	5,316	4,103	9,419	5,509	4,318	9,827
15	Jawa Timur	941	1,103	2,044	14	21	35	26,323	20,373	46,696	27,278	21,497	48,775
16	Banten	222	325	547	2	1	3	7,135	6,468	13,603	7,359	6,794	14,153
17	Bali	252	289	541	1	2	3	4,036	4,977	9,013	4,289	5,268	9,557
18	Nusa Tenggara Barat	163	132	295	4	7	11	2,699	1,848	4,547	2,866	1,987	4,853
19	Nusa Tenggara Timur	98	127	225	0	2	2	2,048	2,068	4,116	2,146	2,197	4,343
20	Kalimantan Barat	116	126	242	0	0	0	1,701	2,256	3,957	1,817	2,382	4,199
21	Kalimantan Tengah	105	109	214	0	0	0	1,410	1,557	2,967	1,515	1,666	3,181
22	Kalimantan Selatan	173	127	300	1	1	2	2,879	2,600	5,479	3,053	2,728	5,781
23	Kalimantan Timur	164	168	332	0	0	0	3,551	3,352	6,903	3,715	3,520	7,235
24	Kalimantan Utara	42	38	80	0	0	0	912	806	1,718	954	844	1,798
25	Sulawesi Utara	122	205	327	3	7	10	1,768	1,866	3,634	1,893	2,078	3,971
26	Sulawesi Tengah	117	137	254	0	0	0	1,302	1,596	2,898	1,419	1,733	3,152
27	Sulawesi Selatan	248	347	595	5	3	8	3,138	3,951	7,089	3,391	4,301	7,692
28	Sulawesi Tenggara	85	94	179	0	1	1	850	966	1,816	935	1,061	1,996
29	Gorontalo	46	76	122	0	0	0	661	770	1,431	707	846	1,553
30	Sulawesi Barat	24	40	64	0	0	0	402	411	813	426	451	877
31	Maluku	75	69	144	0	2	2	766	850	1,616	841	921	1,762
32	Maluku Utara	26	52	78	0	0	0	397	572	969	423	624	1,047
33	Papua Barat	57	30	87	0	0	0	658	661	1,319	715	691	1,406
34	Papua	68	81	149	1	0	1	1,203	1,257	2,460	1,272	1,338	2,610
Indonesia		**7,557**	**8,929**	**16,486**	**107**	**150**	**257**	**175,588**	**151,330**	**326,918**	**183,252**	**160,409**	**343,661**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 16.d

JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI FASILITAS KESEHATAN DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Tenaga Psikologi Klinis			Tenaga Kesehatan Tradisional					
					Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan			Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	13	59	72	0	0	0	0	1	1
2	Sumatera Utara	2	23	25	0	0	0	0	2	2
3	Sumatera Barat	4	21	25	1	1	2	0	0	0
4	Riau	2	27	29	1	1	2	0	0	0
5	Jambi	0	11	11	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	7	27	34	0	1	1	0	0	0
7	Bengkulu	2	6	8	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	3	5	8	0	9	9	0	33	33
9	Kep. Bangka Belitung	2	6	8	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	3	12	15	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	16	126	142	20	20	40	23	73	96
12	Jawa Barat	7	85	92	0	2	2	9	3	12
13	Jawa Tengah	26	123	149	3	6	9	3	13	16
14	DI Yogyakarta	12	95	107	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	29	124	153	7	36	43	10	54	64
16	Banten	7	26	33	0	0	0	0	2	2
17	Bali	4	28	32	2	1	3	0	6	6
18	Nusa Tenggara Barat	1	15	16	0	0	0	0	1	1
19	Nusa Tenggara Timur	1	9	10	0	1	1	0	0	0
20	Kalimantan Barat	5	13	18	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	3	12	15	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	3	31	34	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	2	26	28	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	2	2	4	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	4	5	9	0	1	1	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	11	19	30	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	5	9	14	0	1	1	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	2	7	9	1	0	1	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	1	1	2	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	1	11	12	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	2	2	0	0	0	0	1	1
33	Papua Barat	0	3	3	0	0	0	0	1	1
34	Papua	3	3	6	0	1	1	28	34	62
Indonesia		**183**	**972**	**1,155**	**35**	**81**	**116**	**73**	**224**	**297**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 16.e

JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI PUSKESMAS DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Tenaga Psikologi Klinis			Tenaga Kesehatan Tradisional					
					Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan			Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	3	22	25	0	0	0	0	1	1
2	Sumatera Utara	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	1	1	0	1	1
4	Riau	0	2	2	0	1	1	0	1	1
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	2	5	7	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	1	1	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	4	18	22	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	2	2	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	0	0	0	0	1	1	0	1	1
14	DI Yogyakarta	5	56	61	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	10	48	58	5	30	35	5	30	35
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	1	1	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	1	1	0	1	1
20	Kalimantan Barat	0	2	2	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	1	1	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	1	1	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	1	5	6	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	1	4	5	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	1	1	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	1	1	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua	1	0	1	0	1	1	0	1	1
Indonesia		**27**	**171**	**198**	**5**	**35**	**40**	**5**	**36**	**41**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 16.f

JUMLAH TENAGA PSIKOLOGI KLINIS DAN TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL DI RUMAH SAKIT DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Tenaga Psikologi Klinis			Tenaga Kesehatan Tradisional					
					Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan			Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	8	30	38	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	2	21	23	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	3	18	21	0	0	0	0	0	0
4	Riau	2	23	25	1	0	1	0	0	0
5	Jambi	0	10	10	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	5	21	26	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	1	4	5	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	3	4	7	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	6	6	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	1	9	10	0	0	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	9	81	90	0	0	0	0	1	1
12	Jawa Barat	3	62	65	0	1	1	0	0	0
13	Jawa Tengah	22	114	136	1	3	4	1	0	1
14	DI Yogyakarta	4	24	28	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	14	61	75	1	2	3	3	3	6
16	Banten	6	23	29	0	0	0	0	1	1
17	Bali	2	17	19	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	1	14	15	0	0	0	0	1	1
19	Nusa Tenggara Timur	1	9	10	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	4	11	15	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	2	8	10	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	1	29	30	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	1	11	12	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	1	2	3	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	3	5	8	0	1	1	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	10	12	22	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	4	5	9	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	2	7	9	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	1	7	8	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	1	1	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	3	3	0	0	0	0	0	0
34	Papua	2	3	5	0	1	1	0	0	0
Indonesia		**119**	**655**	**774**	**3**	**8**	**11**	**4**	**6**	**10**

Sumber : SISDMK diolah oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 16.g

JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III POLTEKKES
MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2021

No	Nama Poltekkes	Program Studi																			Total
		Keperawatan	Kebidanan	Kesehatan Gigi	Analis Farmasi Dan Makanan	Farmasi	Jamu	Sanitasi	Gizi	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur	Teknologi Laboratorium Medis	Asuransi Kesehatan	Teknik Gigi	Radiologi	Rekam dan Informasi Kesehatan	Teknologi Elektro Medis	Ortetik Prostetik	Teknologi Bank Darah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Aceh	234	97	45	0	63	0	28	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491
2	Medan	161	341	98	0	105	0	82	104	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0	0	988
3	Padang	183	117	70	0	0	0	71	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	513
4	Riau	117	38	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232
5	Jambi	76	27	43	0	91	0	37	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	0	0	339
6	Palembang	287	135	56	0	77	0	34	81	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0	0	0	745
7	Bengkulu	140	155	0	0	43	0	82	78	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	581
8	Tanjung Karang	237	280	97	0	97	0	95	47	0	0	0	0	90	0	35	0	0	0	0	0	978
9	Tanjung Pinang	95	83	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223
10	Pangkal Pinang	38	36	0	0	37	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150
11	Jakarta I	74	68	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175
12	Jakarta II	0	0	0	72	90	0	78	65	0	0	0	0	0	0	38	57	0	39	0	0	439
13	Jakarta III	158	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	309
14	Bandung	201	175	37	0	64	0	43	37	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	633
15	Tasikmalaya	157	76	41	0	52	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0	119	0	0	0	524
16	Semarang	650	256	48	0	0	0	101	47	0	0	0	0	92	0	0	158	94	0	0	0	1,446
17	Surakarta	81	53	0	100	0	70	0	0	94	107	96	80	0	0	0	0	0	0	70	0	751
18	Yogyakarta	48	45	46	0	0	0	54	49	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	292
19	Surabaya	291	182	32	0	0	0	123	90	0	0	0	0	46	0	0	0	0	38	0	0	802
20	Malang	464	144	0	77	0	0	0	127	0	0	0	0	0	82	0	0	147	0	0	69	1,110
21	Banten	93	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0	0	0	269
22	Denpasar	176	74	66	0	0	0	26	55	0	0	0	0	105	0	0	0	0	0	0	0	502
23	Mataram	137	93	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	95	0	0	0	0	0	0	0	378
24	Kupang	373	108	64	0	111	0	62	64	0	0	0	0	86	0	0	0	0	0	0	0	868
25	Pontianak	43	56	67	0	0	0	9	25	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	237
26	Palangkaraya	79	71	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182
27	Banjarmasin	65	83	37	0	0	0	35	42	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	307
28	Kalimantan Timur	107	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	243
29	Manado	34	79	34	0	47	0	38	32	0	0	0	0	76	0	0	0	0	0	0	0	340
30	Palu	140	35	0	0	0	0	9	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220
31	Makassar	250	63	47	0	89	0	66	48	45	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	647
32	Kendari	43	66	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	183
33	Gorontalo	102	91	0	0	22	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269
34	Mamuju	19	20	0	0	0	0	22	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97
35	Maluku	226	103	0	0	0	0	35	52	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	495
36	Ternate	86	69	0	0	0	0	41	23	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	264
37	Jayapura	369	100	0	0	51	0	53	6	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	0	0	649
38	Sorong	122	96	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257
Total		**6,156**	**3,775**	**961**	**249**	**1,039**	**70**	**1,269**	**1,663**	**139**	**107**	**96**	**80**	**1,578**	**82**	**73**	**215**	**360**	**77**	**70**	**69**	**18,128**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Catatan: - = tidak ada program studi di poltekkes

Lampiran 16.h

JUMLAH LULUSAN PROGRAM STUDI DIPLOMA III RPL (REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU) POLTEKKES MENURUT JENIS PROGRAM STUDI TAHUN 2021

No	Nama Poltekkes	Program Studi					Total
		Keperawatan	Kebidanan	Farmasi	Teknologi Laboratorium Medis	Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	0	0	0	0	0	0
2	Medan	0	0	0	0	0	0
3	Padang	0	0	0	0	0	0
4	Riau	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0	0	0
6	Palembang	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	26	4	0	0	0	30
8	Tanjung Karang	2	0	0	0	0	2
9	Tanjung Pinang	9	0	0	0	0	9
10	Pangkal Pinang	0	0	3	0	0	3
11	Jakarta I	0	0	0	0	0	0
12	Jakarta II	0	0	0	0	0	0
13	Jakarta III	0	0	0	0	0	0
14	Bandung	0	0	0	0	0	0
15	Tasikmalaya	0	0	0	0	32	32
16	Semarang	1	0	0	0	74	75
17	Surakarta	0	0	0	0	0	0
18	Yogyakarta	0	0	0	0	0	0
19	Surabaya	5	0	0	39	0	44
20	Malang	38	0	0	0	56	94
21	Banten	0	0	0	38	0	38
22	Denpasar	0	0	0	0	0	0
23	Mataram	0	0	0	0	0	0
24	Kupang	0	0	0	0	0	0
25	Pontianak	0	0	0	0	0	0
26	Palangkaraya	0	0	0	0	0	0
27	Banjarmasin	1	0	0	0	0	1
28	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0
29	Manado	0	0	0	0	0	0
30	Palu	0	0	0	0	0	0
31	Makassar	0	0	0	0	0	0
32	Kendari	0	0	0	0	0	0
33	Gorontalo	0	0	0	0	0	0
34	Mamuju	0	0	0	0	0	0
35	Maluku	0	0	0	0	0	0
36	Ternate	0	0	0	0	0	0
37	Jayapura	0	0	0	0	0	0
38	Sorong	0	0	0	0	0	0
Total		**82**	**4**	**3**	**77**	**162**	**328**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Catatan: - = tidak ada program studi di poltekkes

Lampiran 16.i

JUMLAH LULUSAN PROGRAM DIPLOMA IV POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2021

No	Poltekkes	Kebidanan	Keperawatan	Keteknisian Medis	Kefarmasian	Kesehatan Lingkungan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Gizi	Keterapian Fisik				Teknik Biomedika				Jumlah
			Keperawatan	Terapis Gigi	Farmasi	Sanitasi Lingkungan	Promosi Kesehatan	Gizi & Dietetika	Fisioterapi	Okupasi Terapi	Terapi Wicara	Akupunktur dan Pengobatan Herbal	Teknologi Laboratorium Medis	Teknologi Rekayasa Elektromedis	Teknologi Radiologi Pencitraan	Ortotik Prostetik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(18)	(19)
1	Aceh	112	67	71	0	33	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0	321
2	Medan	0	47	0	0	10	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	184
3	Padang	103	0	0	0	38	36	66	0	0	0	0	0	0	0	0	243
4	Riau	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
5	Jambi	105	80	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214
6	Palembang	40	40	0	0	0	0	49	0	0	0	0	0	0	0	0	129
7	Bengkulu	155	39	0	0	0	80	40	0	0	0	0	0	0	0	0	314
8	Tanjung Karang	92	47	0	0	48	0	0	0	0	0	0	42	0	0	0	229
9	Tanjung Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Pangkal Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Jakarta I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
12	Jakarta II	0	0	0	0	72	0	80	0	0	0	0	0	65	93	0	310
13	Jakarta III	129	37	0	0	0	0	0	94	0	0	0	120	0	0	0	380
14	Bandung	0	0	0	0	50	38	82	0	0	0	0	39	0	0	0	209
15	Tasikmalaya	156	0	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232
16	Semarang	377	137	92	0	47	0	81	0	0	0	0	0	0	150	0	884
17	Surakarta	182	78	0	0	0	0	0	92	128	67	109	0	0	0	46	702
18	Yogyakarta	179	63	107	0	50	0	72	0	0	0	0	120	0	0	0	591
19	Surabaya	159	38	50	0	52	0	0	0	0	0	0	92	63	0	0	454
20	Malang	273	113	0	0	0	29	95	0	0	0	0	0	0	0	0	510
21	Banten	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
22	Denpasar	192	36	0	0	40	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	402
23	Mataram	69	112	0	0	0	0	86	0	0	0	0	119	0	0	0	386
24	Kupang	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60
25	Pontianak	104	137	0	0	17	0	48	0	0	0	0	16	0	0	0	322
26	Palangkaraya	76	34	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	155
27	Banjarmasin	34	37	36	0	43	0	41	0	0	0	0	50	0	0	0	241
28	Kalimantan Timur	107	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186
29	Manado	55	38	0	0	29	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	149
30	Palu	120	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139
31	Makassar	66	102	80	47	74	0	93	69	0	0	0	67	0	0	0	598
32	Kendari	40	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	67
33	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Mamuju	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Ternate	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
37	Jayapura	102	29	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	137
38	Sorong	79	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152
Total		**3,151**	**1,594**	**541**	**47**	**603**	**183**	**1,237**	**255**	**128**	**67**	**109**	**665**	**128**	**243**	**58**	**9,009**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Catatan: - = tidak ada program studi di poltekkes

Lampiran 16.j

JUMLAH LULUSAN PROGRAM PROFESI POLTEKKES MENURUT JENIS TENAGA KESEHATAN TAHUN 2021

No	Poltekkes	Profesi Bidan	Keperawatan	Gizi	Keterapian Fisik	Jumlah
			Ners	Dietisien	Fisioterapi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	-	-	-	-	-
2	Medan	0	0	0	0	0
3	Padang	0	0	0	0	0
4	Riau	-	-	-	-	-
5	Jambi	52	40	0	0	92
6	Palembang	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	77	0	0	77
8	Tanjung Karang	0	86	0	0	86
9	Tanjung Pinang	-	-	-	-	-
10	Pangkal Pinang	-	-	-	-	-
11	Jakarta I	0	0	0	0	0
12	Jakarta II	-	-	-	-	-
13	Jakarta III	25	60	0	0	85
14	Bandung	0	0	5	0	5
15	Tasikmalaya	57	0	0	0	57
16	Semarang	191	183	23	0	397
17	Surakarta	106	110	0	161	377
18	Yogyakarta	110	51	31	0	192
19	Surabaya	67	23	0	0	90
20	Malang	103	86	0	0	189
21	Banten	0	38	0	0	38
22	Denpasar	49	119	0	0	168
23	Mataram	0	34	0	0	34
24	Kupang	0	46	0	0	46
25	Pontianak	0	69	0	0	69
26	Palangkaraya	21	0	0	0	21
27	Banjarmasin	-	-	-	-	-
28	Kalimantan Timur	-	38	-	-	38
29	Manado	0	34	0	0	34
30	Palu	0	87	0	0	87
31	Makassar	0	0	12	12	24
32	Kendari	-	-	-	-	-
33	Gorontalo	-	-	-	-	-
34	Mamuju	-	-	-	-	-
35	Maluku	-	-	-	-	-
36	Ternate	-	-	-	-	-
37	Jayapura	0	8	0	0	8
38	Sorong	-	-	-	-	-
Total		**781**	**1,189**	**71**	**173**	**2,214**

Sumber : Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Catatan: - = tidak ada program studi di poltekkes

Lampiran 16.k

JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI*
MENURUT RUMPUN TENAGA KESEHATAN DAN PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Rumpun Tenaga Kesehatan												Jumlah
		Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi	Tenaga Keteknisian Medis	Tenaga Keterapian Fisik	Tenaga Teknik Biomedika	Tenaga Kesehatan Tradisional	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1	Aceh	432	124	760	480	236	398	61	89	189	-	40	-	2,809
2	Sumatera Utara	524	1	1,448	3,670	1,897	1,222	-	138	139	397	377	-	9,813
3	Sumatera Barat	191	108	1,194	807	828	524	103	214	308	60	320	-	4,657
4	Riau	152	-	833	1,046	388	345	-	131	117	58	170	-	3,240
5	Jambi	84	-	432	313	301	311	-	51	25	-	55	-	1,572
6	Sumatera Selatan	328	31	913	966	675	454	108	172	78	47	111	-	3,883
7	Bengkulu	23	-	498	781	181	204	82	119	46	-	83	-	2,017
8	Lampung	393	-	1,276	1,144	348	184	142	65	132	-	169	-	3,853
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	91	59	40	60	-	39	-	-	-	-	289
10	Kepulauan Riau	85	-	173	177	63	59	88	-	4	-	-	-	649
11	DKI Jakarta	1,512	316	2,835	1,293	3,875	1,986	197	583	370	338	746	-	14,051
12	Jawa Barat	624	295	4,934	2,213	4,664	665	92	402	1,045	201	1,083	-	16,218
13	Jawa Tengah	1,020	155	6,172	2,592	4,127	1,302	205	601	1,276	1,320	1,241	-	20,011
14	DI Yogyakarta	760	242	1,322	847	1,939	690	77	393	786	487	373	-	7,916
15	Jawa Timur	917	341	5,983	4,253	4,405	1,161	202	706	1,071	414	1,024	41	20,518
16	Banten	322	-	1,400	558	552	527	-	-	310	-	130	-	3,799
17	Bali	434	74	1,301	498	635	156	62	198	128	131	256	-	3,873
18	Nusa Tenggara Barat	105	-	524	388	288	46	2	142	100	-	245	-	1,840
19	Nusa Tenggara Timur	8	-	419	297	187	110	61	86	64	-	85	-	1,317
20	Kalimantan Barat	69	-	499	322	281	116	17	73	67	-	53	-	1,497
21	Kalimantan Tengah	4	-	118	232	99	-	-	82	-	-	51	-	586
22	Kalimantan Selatan	7	50	735	257	626	408	75	119	243	24	190	-	2,734
23	Kalimantan Timur	29	5	433	241	184	338	12	-	-	-	73	-	1,315
24	Kalimantan Utara	-	-	108	50	28	-	-	-	-	-	-	-	186
25	Sulawesi Utara	190	56	588	145	218	239	67	67	34	16	76	-	1,696
26	Sulawesi Tengah	152	-	498	252	208	207	3	54	-	-	-	-	1,374
27	Sulawesi Selatan	574	268	2,129	1,708	2,035	1,072	140	178	235	163	564	-	9,066
28	Sulawesi Tenggara	-	-	177	59	160	138	-	94	-	-	24	-	652
29	Gorontalo	-	-	213	122	62	56	-	83	28	-	6	-	570
30	Sulawesi Barat	-	-	47	48	-	39	21	37	-	-	-	-	192
31	Maluku	-	-	218	-	5	213	-	52	-	-	78	-	566
32	Maluku Utara	-	-	86	77	9	94	41	-	-	-	45	-	352
33	Papua Barat	-	-	104	97	36	43	-	45	-	-	18	-	343
34	Papua	69	-	380	158	53	81	34	12	-	-	39	-	826
Indonesia		**9,008**	**2,066**	**38,841**	**26,150**	**29,633**	**13,448**	**1,892**	**5,025**	**6,795**	**3,656**	**7,725**	**41**	**144,280**

Sumber : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Catatan : * = lulusan jenjang DIII, DIV, S1, S2, S3, spesialis, dan profesi

- = tidak ada lulusan

Lampiran 16.l

JUMLAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI DOKTER SPESIALIS DAN DOKTER GIGI SPESIALIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Dokter Spesialis Dasar				Dokter Spesialis Penunjang					Spesialis Lain	Dokter Gigi Spesialis	Total
		Spesialis Penyakit Dalam	Spesialis Obstetri dan Ginekologi	Spesialis Anak	Spesialis Bedah	Spesialis Radiologi	Spesialis Anestesi	Spesialis Patologi Klinik	Spesialis Patologi Anatomi	Spesialis Rehabilitasi Medik			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	24	15	3	11	-	1	-	-	-	31	-	85
2	Sumatera Utara	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3
3	Sumatera Barat	9	5	3	6	-	-	2	1	-	9	-	35
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
5	Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Sumatera Selatan	23	20	3	11	-	11	-	-	-	9	-	77
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	67	40	38	67	15	31	10	11	19	189	81	568
12	Jawa Barat	11	12	12	42	14	18	2	10	7	61	58	247
13	Jawa Tengah	24	21	20	28	13	35	17	3	8	105	-	274
14	DI Yogyakarta	27	8	16	5	11	-	10	6	-	63	46	192
15	Jawa Timur	11	7	10	17	12	8	8	1	-	32	4	110
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	16	12	21	16	4	12	7	8	-	43	-	139
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sulawesi Utara	28	12	13	13	-	-	-	-	-	14	-	80
26	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Selatan	28	10	9	31	6	3	7	3	-	78	12	187
28	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Indonesia		**269**	**162**	**149**	**247**	**75**	**119**	**64**	**43**	**34**	**636**	**201**	**1,999**

Sumber : Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2022

Catatan : - = tidak ada lulusan

Lampiran 17.a

CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	PBI	Penduduk yang Didaftarkan Pemda	Bukan PBI			Total
					Pekerja Penerima Upah	Pekerja Bukan Penerima Upah	Bukan Pekerja	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	5.459.891	2.168.711	2.424.731	853.630	30.379	98.784	5.576.235
2	Sumatera Utara	14.703.532	4.773.620	1.574.963	2.744.196	2.169.448	320.043	11.582.270
3	Sumatera Barat	5.498.751	1.959.461	806.452	919.047	828.407	97.986	4.611.353
4	Riau	7.128.305	1.733.306	756.346	1.622.413	907.108	69.847	5.089.020
5	Jambi	3.677.894	1.005.833	332.059	701.966	646.244	52.271	2.738.373
6	Sumatera Selatan	8.567.923	2.895.827	1.711.990	1.338.547	874.903	89.355	6.910.622
7	Bengkulu	2.019.848	773.226	211.006	378.765	307.260	22.437	1.692.694
8	Lampung	8.521.201	3.886.362	861.007	1.033.903	990.220	102.870	6.874.362
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.517.590	264.222	360.593	300.903	307.361	17.506	1.250.585
10	Kepulauan Riau	2.242.198	364.952	240.577	946.599	390.528	15.268	1.957.924
11	DKI Jakarta	10.644.986	1.140.936	5.117.111	10.915.377	1.006.227	298.530	18.478.181
12	Jawa Barat	49.935.858	17.051.660	4.960.308	9.356.404	6.555.665	749.660	38.673.697
13	Jawa Tengah	34.940.078	16.568.859	2.521.369	5.982.841	3.911.023	665.109	29.649.201
14	D I Yogyakarta	3.882.288	1.613.200	385.416	843.639	382.124	138.706	3.363.085
15	Jawa Timur	39.886.288	15.825.405	5.029.855	6.282.511	3.900.264	693.999	31.732.034
16	Banten	13.160.496	3.298.212	1.900.940	3.884.726	1.666.956	120.258	10.871.092
17	Bali	4.380.824	942.092	1.380.681	1.184.765	594.174	68.170	4.169.882
18	Nusa Tenggara Barat	5.125.622	2.955.435	469.000	607.136	319.407	48.871	4.399.849
19	Nusa Tenggara Timur	5.541.394	3.007.444	683.434	627.545	268.646	82.230	4.669.299
20	Kalimantan Barat	5.134.760	1.815.373	363.272	1.151.801	664.878	61.776	4.057.100
21	Kalimantan Tengah	2.769.156	561.989	741.925	922.391	291.364	41.112	2.558.781
22	Kalimantan Selatan	4.303.979	1.050.162	925.661	927.451	481.333	79.743	3.464.350
23	Kalimantan Timur	3.793.152	689.258	795.216	1.595.454	735.171	44.447	3.859.546
24	Kalimantan Utara	768.505	204.117	157.505	227.637	122.523	6.688	718.470
25	Sulawesi Utara	2.528.794	966.395	655.005	490.910	391.061	69.468	2.572.839
26	Sulawesi Tengah	3.096.976	1.357.715	617.090	567.568	299.562	33.530	2.875.465
27	Sulawesi Selatan	8.928.004	3.726.676	2.181.729	1.316.806	1.101.658	153.026	8.479.895
28	Sulawesi Tenggara	2.755.589	1.161.926	572.484	450.211	188.719	31.351	2.404.691
29	Gorontalo	1.219.576	650.364	262.866	183.847	62.378	11.161	1.170.616
30	Sulawesi Barat	1.405.012	680.873	325.279	179.494	135.619	20.554	1.341.819
31	Maluku	1.831.880	756.786	255.900	334.540	118.082	34.041	1.499.349
32	Maluku Utara	1.278.764	401.012	232.689	288.345	67.951	11.254	1.001.251
33	Papua Barat	981.822	628.344	213.177	257.730	59.511	10.896	1.169.658
34	Papua	3.435.430	3.107.466	397.103	589.197	137.972	23.936	4.255.674
Indonesia		**271.066.366**	**99.987.219**	**40.424.739**	**60.008.295**	**30.914.126**	**4.384.883**	**235.719.262**

Sumber: Laporan BPJS Kesehatan Bulan Desember 2021

Sumber Data Jumlah Penduduk: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, BPS (Diolah oleh Pusdatin Kemenkes RI)

Lampiran 17.b

FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN
TAHUN 2021

No	Provinsi	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama					Total
		Dokter Praktik Perorangan	Klinik Pratama	Puskesmas	RS Tipe D Pratama	Lainnya	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(8)*	*(9)*
1	Aceh	84	190	359	0	4	637
2	Sumatera Utara	131	543	608	3	8	1293
3	Sumatera Barat	112	149	278	2	37	578
4	Riau	8	124	86	1	1	220
5	Jambi	68	78	202	0	19	367
6	Sumatera Selatan	241	240	346	2	36	865
7	Bengkulu	97	47	179	0	16	339
8	Lampung	123	200	312	0	8	643
9	Kepulauan Bangka Belitung	30	35	64	3	6	138
10	Kepulauan Riau	8	124	86	1	1	220
11	DKI Jakarta	17	358	320	0	1	696
12	Jawa Barat	487	1422	1086	0	62	3057
13	Jawa Tengah	1090	760	879	0	310	3039
14	D I Yogyakarta	109	129	121	0	32	391
15	Jawa Timur	701	828	970	0	232	2731
16	Banten	8	424	245	0	3	680
17	Bali	310	133	120	1	92	656
18	Nusa Tenggara Barat	112	63	175	1	11	362
19	Nusa Tenggara Timur	95	84	420	5	31	635
20	Kalimantan Barat	91	89	246	2	13	441
21	Kalimantan Tengah	118	158	187	3	43	509
22	Kalimantan Selatan	153	103	237	0	37	530
23	Kalimantan Timur	118	158	187	3	43	509
24	Kalimantan Utara	29	25	57	4	5	120
25	Sulawesi Utara	155	61	195	1	33	445
26	Sulawesi Tengah	42	53	208	5	11	319
27	Sulawesi Selatan	190	216	468	5	79	958
28	Sulawesi Tenggara	69	37	293	1	13	413
29	Gorontalo	27	36	93	0	9	165
30	Sulawesi Barat	37	21	98	1	7	164
31	Maluku	33	26	215	0	7	281
32	Maluku Utara	31	21	145	1	8	206
33	Papua Barat	61	58	423	4	10	556
34	Papua	18	22	160	0	3	203
Indonesia		**5.003**	**7.015**	**10.068**	**49**	**1.231**	**23.366**

Sumber: BPJS Kesehatan, 2021

Lampiran 17.c

FASILITAS KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2021

No	Provinsi	Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut					Total
		RS Pemerintah	RS Swasta	RS TNI POLRI	RS Khusus	Klinik Utama	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	26	35	5	4	11	81
2	Sumatera Utara	35	103	8	13	4	163
3	Sumatera Barat	25	19	5	19	5	73
4	Riau	17	34	3	7	7	68
5	Jambi	14	15	2	2	2	35
6	Sumatera Selatan	28	30	4	12	5	79
7	Bengkulu	12	7	2	2	3	26
8	Lampung	18	37	1	11	5	72
9	Kepulauan Bangka Belitung	9	7	0	3	5	24
10	Kepulauan Riau	14	13	2	2	8	39
11	DKI Jakarta	36	73	10	22	28	169
12	Jawa Barat	52	232	15	36	64	399
13	Jawa Tengah	62	189	10	26	25	312
14	D I Yogyakarta	12	44	3	9	4	72
15	Jawa Timur	73	203	24	42	36	378
16	Banten	14	59	3	15	11	102
17	Bali	15	36	3	8	8	70
18	Nusa Tenggara Barat	16	14	2	3	2	37
19	Nusa Tenggara Timur	23	20	4	2	2	51
20	Kalimantan Barat	21	11	6	9	11	58
21	Kalimantan Tengah	16	3	2	1	2	24
22	Kalimantan Selatan	17	12	4	6	8	47
23	Kalimantan Timur	16	22	3	8	7	56
24	Kalimantan Utara	5	0	1	0	0	6
25	Sulawesi Utara	19	19	4	6	5	53
26	Sulawesi Tengah	18	6	2	4	5	35
27	Sulawesi Selatan	36	36	6	18	26	122
28	Sulawesi Tenggara	17	11	2	1	3	34
29	Gorontalo	11	4	0	1	2	18
30	Sulawesi Barat	7	1	1	0	2	11
31	Maluku	16	6	3	1	3	29
32	Maluku Utara	10	3	2	0	2	17
33	Papua Barat	20	7	5	1	0	33
34	Papua	9	3	3	0	1	16
Indonesia		**739**	**1.314**	**150**	**294**	**312**	**2.809**

Sumber: BPJS Kesehatan, 2021

Lampiran 17.d

FASILITAS KESEHATAN PENUNJANG YANG BEKERJA SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2021

No	Provinsi	Fasilitas Kesehatan Penunjang		Total
		Apotek	Optik	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	78	37	115
2	Sumatera Utara	203	58	261
3	Sumatera Barat	94	55	149
4	Riau	101	27	128
5	Jambi	50	18	68
6	Sumatera Selatan	83	29	112
7	Bengkulu	31	13	44
8	Lampung	94	18	112
9	Kepulauan Bangka Belitung	39	12	51
10	Kepulauan Riau	67	14	81
11	DKI Jakarta	198	34	232
12	Jawa Barat	528	113	641
13	Jawa Tengah	608	147	755
14	D I Yogyakarta	93	8	101
15	Jawa Timur	573	224	797
16	Banten	139	14	153
17	Bali	102	24	126
18	Nusa Tenggara Barat	39	26	65
19	Nusa Tenggara Timur	61	16	77
20	Kalimantan Barat	61	24	85
21	Kalimantan Tengah	44	10	54
22	Kalimantan Selatan	91	27	118
23	Kalimantan Timur	82	8	90
24	Kalimantan Utara	16	7	23
25	Sulawesi Utara	75	26	101
26	Sulawesi Tengah	57	13	70
27	Sulawesi Selatan	170	39	209
28	Sulawesi Tenggara	25	8	33
29	Gorontalo	25	7	32
30	Sulawesi Barat	17	4	21
31	Maluku	13	5	18
32	Maluku Utara	17	6	23
33	Papua Barat	25	15	40
34	Papua	11	6	17
Indonesia		**3.910**	**1.092**	**5.002**

Sumber: BPJS Kesehatan, 2021

Lampiran 19.a

ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2021

No	Sumber Biaya	Alokasi Anggaran Kesehatan	
		Rupiah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
	ANGGARAN KESEHATAN BERSUMBER:		
1	APBN PUSAT	**213.943.356.008.000**	87,30%
	Rupiah Murni	196.490.749.914.000	
	Pinjaman Luar Negeri	450.597.920.000	
	Penerimaan Negara Bukan Pajak	376.342.647.000	
	Badan Layanan Umum	16.035.341.546.000	
	Hibah Langsung Dalam Negeri	1.534.125.000	
	Hibah Langsung Luar Negeri	588.789.856.000	
2	DANA DEKONSENTRASI	**500.462.859.000**	0,20%
3	DANA ALOKASI KHUSUS	**30.634.393.000.000**	12,50%
	a. DAK Fisik	20.106.200.000.000	
	b. DAK Nonfisik	10.528.193.000.000	
	Total Anggaran Kesehatan	**245.078.211.867.000**	
	Total APBN	**2.750.028.018.431.000**	
	% APBN Kesehatan THD APBN Indonesia		**8,91%**

Sumber:

- Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
- Perpres Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021

Lampiran 19.b

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT ESELON I TAHUN 2021

No	Unit Eselon I	Anggaran Kementerian Kesehatan											
		Kantor Pusat			Kantor Daerah			Dekonsentrasi			Jumlah		%
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Sekretariat Jenderal	48.124.530.141.000	47.322.354.725.559	98,33%				10.541.687.000	9.641.513.513	91,46%	48.135.071.828.000	47.331.996.239.072	98,33%
2	Inspektorat Jenderal	124.247.294.000	114.857.333.539	92,44%							124.247.294.000	114.857.333.539	92,44%
3	Ditjen Kesehatan Masyarakat	929.247.183.000	887.841.227.048	95,54%	23.873.775.000	23.133.627.724	96,90%	92.959.429.000	86.983.784.495	93,57%	1.046.080.387.000	997.958.639.267	95,40%
4	Ditjen Pelayanan Kesehatan	84.639.116.498.000	84.072.356.064.609	99,33%	18.875.637.001.000	16.295.488.258.697	86,33%	40.191.262.000	35.748.472.711	88,95%	103.554.944.761.000	100.403.592.796.017	96,96%
5	Ditjen Pengendalian dan Pencegahan Penyakit	3.825.965.207.000	3.737.279.478.156	97,68%	1.324.231.416.000	1.282.019.900.823	96,81%	241.363.008.000	219.157.339.115	90,80%	5.391.559.631.000	5.238.456.718.094	97,16%
6	Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan	38.322.755.143.000	37.441.134.308.281	97,70%				12.000.000.000	10.466.054.109	87,22%	38.334.755.143.000	37.451.600.362.390	97,70%
7	Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	2.541.279.567.000	2.202.113.493.081	86,65%	329.246.943.000	318.146.481.850	96,63%				2.870.526.510.000	2.520.259.974.931	87,80%
8	Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan	11.634.717.123.000	11.211.937.705.127	96,37%	3.248.508.717.000	3.002.602.266.657	92,43%	103.407.473.000	83.574.121.490	80,82%	14.986.633.313.000	14.298.114.093.274	95,41%
Kementerian Kesehatan		**190.141.858.156.000**	**186.989.874.335.400**	**98,34%**	**23.801.497.852.000**	**20.921.390.535.751**	**87,90%**	**500.462.859.000**	**445.571.285.433**	**89,03%**	**214.443.818.867.000**	**208.356.836.156.584**	**97,16%**

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 19.c

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN
MENURUT JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021

No	Jenis Belanja	Unit Eselon I								
		Setjen	Itjen	Ditjen Kesehatan Masyarakat	Ditjen Pelayanan Kesehatan	Ditjen P2P	Ditjen Farmalkes	Badan Litbangkes	Badan PPSDM Kesehatan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	BELANJA PEGAWAI									
	Anggaran	849.023.394.000	38.289.676.000	67.974.991.000	2.318.081.691.000	548.755.073.000	34.601.247.000	172.574.193.000	1.093.877.593.000	5.123.177.858.000
	Realisasi	835.421.020.595	38.059.794.787	66.533.468.160	2.259.290.635.415	535.885.079.053	33.898.024.433	166.390.217.910	1.068.629.768.256	5.004.108.008.609
	%	98,40%	99,40%	97,88%	97,46%	97,65%	97,97%	96,42%	97,69%	97,68%
B.	BELANJA BARANG									
	Anggaran	1.789.389.158.000	83.545.486.000	969.245.845.000	98.047.910.804.000	4.630.533.095.000	38.288.774.168.000	2.518.789.238.000	13.280.991.008.000	159.609.178.802.000
	Realisasi	1.695.318.836.838	74.563.977.752	922.648.954.711	95.820.673.120.434	4.496.057.840.330	37.406.836.738.425	2.179.129.965.014	12.661.653.077.985	155.256.882.511.489
	%	94,74%	89,25%	95,19%	97,73%	97,10%	97,70%	86,51%	95,34%	97,27%
C.	BELANJA MODAL									
	Anggaran	83.329.772.000	2.412.132.000	8.859.551.000	3.188.952.266.000	212.271.463.000	11.379.728.000	179.163.079.000	611.764.712.000	4.298.132.703.000
	Realisasi	48.267.936.439	2.233.561.000	8.776.216.396	2.323.629.040.168	206.513.798.711	10.865.599.532	174.739.792.007	567.831.247.033	3.342.857.191.286
	%	57,92%	92,60%	99,06%	72,86%	97,29%	95,48%	97,53%	92,82%	77,77%
D.	BELANJA BANSOS									
	Anggaran	45.413.329.504.000								45.413.329.504.000
	Realisasi	44.752.988.445.200								44.752.988.445.200
	%	98,55%								98,55%
	TOTAL									
	Anggaran	**48.135.071.828.000**	**124.247.294.000**	**1.046.080.387.000**	**103.554.944.761.000**	**5.391.559.631.000**	**38.334.755.143.000**	**2.870.526.510.000**	**14.986.633.313.000**	**214.443.818.867.000**
	Realisasi	**47.331.996.239.072**	**114.857.333.539**	**997.958.639.267**	**100.403.592.796.017**	**5.238.456.718.094**	**37.451.600.362.390**	**2.520.259.974.931**	**14.298.114.093.274**	**208.356.836.156.584**
	%	**98,33%**	**92,44%**	**95,40%**	**96,96%**	**97,16%**	**97,70%**	**87,80%**	**95,41%**	**97,16%**

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 19.d

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN ESELON 1 KEMENTERIAN KESEHATAN RI
MENURUT SUMBER DANA TAHUN ANGGARAN 2021

No	Sumber Dana	Unit Eselon I								
		Setjen	Itjen	Ditjen Kesmas	Ditjen Yankes	Ditjen P2P	Ditjen Farmalkes	Badan Litbangkes	Badan PPSDM Kesehatan	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
A.	RUPIAH MURNI									
	Anggaran	48.117.343.790.000	124.247.294.000	1.034.992.337.000	87.741.613.777.000	4.894.527.723.000	38.199.937.460.000	2.859.231.627.000	14.019.318.765.000	196.991.212.773.000
	Realisasi	47.314.757.457.119	114.857.333.539	987.757.269.909	87.291.062.516.402	4.790.418.381.420	37.317.278.734.206	2.511.059.203.705	13.476.705.989.764	193.803.896.886.064
	%	98,33%	92,44%	95,44%	99,49%	97,87%	97,69%	87,82%	96,13%	98,38%
B.	PINJAMAN LUAR NEGERI									
	Anggaran				450.597.920.000					450.597.920.000
	Realisasi				161.005.215.533					161.005.215.533
	%				35,73%					35,73%
C	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK									
	Anggaran	11.783.673.000		340.760.000	64.600.487.000	61.856.429.000	15.093.888.000	3.344.653.000	219.322.757.000	376.342.647.000
	Realisasi	11.295.157.128		159.292.173	38.366.705.669	56.982.135.976	14.631.980.844	1.251.026.792	182.398.970.808	305.085.269.390
	%	95,85%		46,75%	59,39%	92,12%	96,94%	37,40%	83,16%	81,07%
D.	BADAN LAYANAN UMUM									
	Anggaran				15.289.782.309.000				745.559.237.000	16.035.341.546.000
	Realisasi				12.904.808.090.413				636.576.578.702	13.541.384.669.115
	%				84,40%				85,38%	84,45%
E.	HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI									
	Anggaran					805.750.000		566.375.000	162.000.000	1.534.125.000
	Realisasi					682.040.064		566.361.876	162.000.000	1.410.401.940
	%					84,65%		100,00%	100,00%	91,94%
F.	HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI (HLL)									
	Anggaran	5.944.365.000		10.747.290.000	8.350.268.000	434.369.729.000	119.723.795.000	7.383.855.000	2.270.554.000	588.789.856.000
	Realisasi	5.943.624.825		10.042.077.185	8.350.268.000	390.374.160.634	119.689.647.340	7.383.382.558	2.270.554.000	544.053.714.542
	%	99,99%		93,44%	100,00%	89,87%	99,97%	99,99%	100,00%	92,40%
	TOTAL									
	Anggaran	**48.135.071.828.000**	**124.247.294.000**	**1.046.080.387.000**	**103.554.944.761.000**	**5.391.559.631.000**	**38.334.755.143.000**	**2.870.526.510.000**	**14.986.633.313.000**	**214.443.818.867.000**
	Realisasi	**47.331.996.239.072**	**114.857.333.539**	**997.958.639.267**	**100.403.592.796.017**	**5.238.456.718.094**	**37.451.600.362.390**	**2.520.259.974.931**	**14.298.114.093.274**	**208.356.836.156.584**
%		**98,33%**	**92,44%**	**95,40%**	**96,96%**	**97,16%**	**97,70%**	**87,80%**	**95,41%**	**97,16%**

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 19.e

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KESEHATAN RI MENURUT PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2021

No	Provinsi	Alokasi	Realisasi	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	11.318.402.000	8.873.509.808	78,40%
2	Sumatera Utara	27.113.939.000	24.218.505.432	89,32%
3	Sumatera Barat	13.290.910.000	11.705.794.378	88,07%
4	Riau	11.828.540.000	10.142.826.095	85,75%
5	Jambi	13.656.442.000	12.626.744.017	92,46%
6	Sumatera Selatan	23.952.194.000	22.654.945.934	94,58%
7	Bengkulu	15.210.547.000	14.269.819.916	93,82%
8	Lampung	15.426.169.000	13.849.588.132	89,78%
9	Kepulauan Bangka Belitung	8.014.390.000	7.276.374.530	90,79%
10	Kepulauan Riau	9.790.117.000	9.547.763.311	97,52%
11	DKI Jakarta	4.228.150.000	3.629.608.100	85,84%
12	Jawa Barat	17.705.897.000	15.918.677.968	89,91%
13	Jawa Tengah	15.680.750.000	14.834.436.230	94,60%
14	D.I. Yogyakarata	4.492.206.000	4.102.580.294	91,33%
15	Jawa Timur	24.383.512.000	19.755.738.151	81,02%
16	Banten	8.447.980.000	6.619.051.000	78,35%
17	Bali	7.611.637.000	6.725.058.564	88,35%
18	Nusa Tenggara Barat	12.150.569.000	11.289.780.474	92,92%
19	Nusa Tenggara Timur	25.245.279.000	23.674.646.951	93,78%
20	Kalimantan Barat	9.170.478.000	7.832.327.344	85,41%
21	Kalimantan Tengah	9.099.433.000	7.612.464.806	83,66%
22	Kalimantan Selatan	11.768.391.000	9.584.658.370	81,44%
23	Kalimantan Timur	10.514.734.000	9.011.218.914	85,70%
24	Kalimantan Utara	8.692.756.000	7.688.801.024	88,45%
25	Sulawesi Utara	18.047.820.000	17.045.621.989	94,45%
26	Sulawesi Tengah	20.698.796.000	19.770.307.301	95,51%
27	Sulawesi Selatan	33.379.738.000	31.410.581.635	94,10%
28	Sulawesi Tenggara	9.754.876.000	9.521.468.600	97,61%
29	Gorontalo	15.670.787.000	15.051.150.635	96,05%
30	Sulawesi Barat	12.000.264.000	10.938.582.950	91,15%
31	Maluku	12.456.753.000	10.436.684.069	83,78%
32	Maluku Utara	15.851.576.000	15.306.715.067	96,56%
33	Papua Barat	20.680.869.000	15.894.172.202	76,85%
34	Papua	23.127.958.000	16.751.081.242	72,43%
Dekonsentrasi Kemenkes		**500.462.859.000**	**445.571.285.433**	**89,03%**

Sumber : Biro Keuangan dan BMN, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 19.f

ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KESEHATAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	DAK Fisik			DAK Non Fisik		
		Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	603.489.134.000	424.110.630.906	70,3%	385.546.598.000	126.799.572.756	32,9%
2	Sumatera Utara	820.197.436.000	419.716.409.151	51,2%	626.780.452.000	227.535.301.643	36,3%
3	Sumatera Barat	532.443.366.000	353.529.098.674	66,4%	271.468.298.000	85.536.725.726	31,5%
4	Riau	453.359.297.000	304.469.696.024	67,2%	245.862.033.000	89.725.255.657	36,5%
5	Jambi	371.320.037.000	287.458.004.327	77,4%	209.900.728.000	84.881.022.796	40,4%
6	Sumatera Selatan	550.760.256.000	449.870.587.463	81,7%	357.920.367.000	217.437.714.792	60,8%
7	Bengkulu	266.364.494.000	212.110.960.701	79,6%	182.676.409.000	98.229.485.249	53,8%
8	Lampung	334.193.663.000	234.176.070.021	70,1%	319.017.795.000	187.620.857.399	58,8%
9	DKI Jakarta	74.616.849.000	46.687.531.417	62,6%	19.562.371.000	4.565.885.286	23,3%
10	Jawa Barat	1.146.269.530.000	833.551.771.490	72,7%	970.376.053.000	353.029.086.801	36,4%
11	Jawa Tengah	1.434.190.918.000	1.170.530.976.706	81,6%	808.444.719.000	472.596.618.281	58,5%
12	DI Yogyakarta	150.825.284.000	133.386.547.775	88,4%	106.054.646.000	46.961.891.808	44,3%
13	Jawa Timur	1.531.274.424.000	886.597.372.207	57,9%	867.535.586.000	340.660.426.902	39,3%
14	Kalimantan Barat	977.404.998.000	599.720.255.949	61,4%	321.048.068.000	151.190.892.571	47,1%
15	Kalimantan Tengah	486.900.332.000	407.666.017.564	83,7%	249.475.260.000	123.810.636.514	49,6%
16	Kalimantan Selatan	456.391.525.000	283.966.956.869	62,2%	237.664.777.000	103.348.975.259	43,5%
17	Kalimantan Timur	212.641.907.000	120.273.649.461	56,6%	197.161.072.000	81.789.448.370	41,5%
18	Sulawesi Utara	502.431.111.000	306.267.345.034	61,0%	206.794.684.000	36.650.212.812	17,7%
19	Sulawesi Tengah	693.427.349.000	367.942.354.500	53,1%	255.852.321.000	150.190.960.080	58,7%
20	Sulawesi Selatan	1.435.149.866.000	879.364.563.327	61,3%	494.710.883.000	268.712.419.304	54,3%
21	Sulawesi Tenggara	613.061.505.000	431.791.675.496	70,4%	337.568.931.000	131.997.609.333	39,1%
22	Bali	264.720.784.000	216.451.052.402	81,8%	110.950.911.000	48.554.938.239	43,8%
23	Nusa Tenggara Barat	684.727.794.000	560.068.763.032	81,8%	192.316.349.000	120.118.348.208	62,5%
24	Nusa Tenggara Timur	1.006.982.309.000	611.841.943.782	60,8%	548.967.719.000	183.944.935.987	33,5%
25	Maluku	774.801.106.000	371.594.779.152	48,0%	298.845.502.000	33.890.503.115	11,3%
26	Papua	1.416.911.966.000	776.998.614.313	54,8%	636.553.967.000	150.367.609.619	23,6%
27	Maluku Utara	555.633.672.000	336.089.937.633	60,5%	190.517.046.000	63.262.999.321	33,2%
28	Banten	302.039.089.000	191.397.318.671	63,4%	211.096.064.000	70.890.698.617	33,6%
29	Kepulauan Bangka Belitung	299.141.570.000	232.045.265.553	77,6%	69.257.692.000	31.146.131.394	45,0%
30	Gorontalo	215.434.724.000	163.750.253.995	76,0%	107.499.802.000	44.308.482.432	41,2%
31	Kepulauan Riau	167.436.358.000	118.996.310.699	71,1%	78.166.693.000	42.991.312.623	55,0%
32	Papua Barat	344.281.187.000	218.182.886.126	63,4%	221.137.562.000	44.230.779.979	20,0%
33	Sulawesi Barat	214.241.421.000	160.847.981.300	75,1%	118.256.796.000	59.974.077.362	50,7%
34	Kalimantan Utara	213.134.739.000	167.903.274.463	78,8%	73.204.846.000	15.881.198.921	21,7%
TOTAL		**20.106.200.000.000**	**13.279.356.856.182**	**66,0%**	**10.528.193.000.000**	**4.292.833.015.156**	**40,8%**

KET:

1. Data Alokasi DAK Fisik dan Non Fisik berdasarkan Perpres No. 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
2. Data Realisasi DAK Fisik berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik (anggaran telah di update melalui Aplikasi SIKD Kemenkeu, Per 21 April 2022)
3. Data Realisasi Non Fisik TA 2020 berdasarkan data dari e-Renggar (Biro Perencanaan dan Anggaran) per 21 April 2022

Lampiran 20

JUMLAH KELAHIRAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Kelahiran		
		Hidup	Mati	Hidup + Mati
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	104.847	649	105.496
2	Sumatera Utara	278.100	413	278.513
3	Sumatera Barat	104.121	647	104.768
4	Riau	130.651	413	131.064
5	Jambi	63.912	243	64.155
6	Sumatera Selatan	158.262	381	158.643
7	Bengkulu	34.798	193	34.991
8	Lampung	144.178	367	144.545
9	Kepulauan Bangka Belitung	25.589	224	25.813
10	Kepulauan Riau	47.117	247	47.364
11	DKI Jakarta	172.215	164	172.379
12	Jawa Barat	815.650	3646	819.296
13	Jawa Tengah	495.556	2863	498.419
14	DI Yogyakarta	56.684	236	56.920
15	Jawa Timur	539.691	2827	542.518
16	Banten	223.004	554	223.558
17	Bali	65.379	382	65.761
18	Nusa Tenggara Barat	98.165	956	99.121
19	Nusa Tenggara Timur	114.473	1258	115.731
20	Kalimantan Barat	91.021	613	91.634
21	Kalimantan Tengah	43.901	280	44.181
22	Kalimantan Selatan	72.733	253	72.986
23	Kalimantan Timur	60.751	536	61.287
24	Kalimantan Utara	12.998	146	13.144
25	Sulawesi Utara	35.369	150	35.519
26	Sulawesi Tengah	58.725	629	59.354
27	Sulawesi Selatan	144.079	920	144.999
28	Sulawesi Tenggara	53.593	456	54.049
29	Gorontalo	20.151	206	20.357
30	Sulawesi Barat	27.218	315	27.533
31	Maluku	35.056	219	35.275
32	Maluku Utara	24.118	386	24.504
33	Papua Barat	20.478	77	20.555
34	Papua	65.558	408	65.966
Indonesia		**4.438.141**	**22.257**	**4.460.398**
Angka Lahir Mati per 1.000 Kelahiran (Dilaporkan)			**5,0**	

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Keterangan : Angka Lahir Mati (dilaporkan) tersebut di atas belum tentu menggambarkan Angka Lahir Mati yang sebenarnya di populasi

Lampiran 21

JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PROVINSI
TAHUN 2020 - 2021

No	Provinsi	2020		2021	
		Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian Ibu	Jumlah Lahir Hidup	Jumlah Kematian Ibu
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	114.623	173	104.847	208
2	Sumatera Utara	299.198	187	278.100	248
3	Sumatera Barat	108.653	125	104.121	193
4	Riau	155.322	129	130.651	180
5	Jambi	65.427	62	63.912	75
6	Sumatera Selatan	158.251	128	158.262	131
7	Bengkulu	36.917	32	34.798	50
8	Lampung	147.694	115	144.178	187
9	Kepulauan Bangka Belitung	27.476	26	25.589	62
10	Kepulauan Riau	40.568	38	47.117	99
11	DKI Jakarta	163.138	117	172.215	129
12	Jawa Barat	880.250	745	815.650	1204
13	Jawa Tengah	522.802	530	495.556	976
14	DI Yogyakarta	41.896	40	56.684	162
15	Jawa Timur	562.006	565	539.691	1279
16	Banten	237.844	242	223.004	298
17	Bali	64.417	56	65.379	125
18	Nusa Tenggara Barat	102.477	122	98.165	144
19	Nusa Tenggara Timur	140.603	151	114.473	181
20	Kalimantan Barat	99.378	115	91.021	183
21	Kalimantan Tengah	53.783	68	43.901	96
22	Kalimantan Selatan	79.621	97	72.733	140
23	Kalimantan Timur	75.011	92	60.751	169
24	Kalimantan Utara	12.146	18	12.998	29
25	Sulawesi Utara	40.496	48	35.369	64
26	Sulawesi Tengah	62.469	81	58.725	109
27	Sulawesi Selatan	167.083	133	144.079	195
28	Sulawesi Tenggara	56.438	61	53.593	113
29	Gorontalo	23.894	56	20.151	51
30	Sulawesi Barat	33.034	46	27.218	60
31	Maluku	44.803	70	35.056	63
32	Maluku Utara	29.282	39	24.118	58
33	Papua Barat	21.990	48	20.478	49
34	Papua	71.352	72	65.558	79
Indonesia		**4.740.342**	**4.627**	**4.438.141**	**7.389**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 22

JUMLAH KEMATIAN IBU MENURUT PENYEBAB DAN PROVINSI
TAHUN 2021

No	Provinsi	Penyebab Kematian Ibu								
		Perdarahan	Hipertensi Dalam Kehamilan	Infeksi	Abortus	Gangguan Sistem Peredaran Darah *	Gangguan Metabolik**	Jantung	Covid19	Lain-lain
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	55	27	5	0	3	1	5	54	58
2	Sumatera Utara	59	33	5	1	8	2	5	55	80
3	Sumatera Barat	46	29	8	0	0	3	9	47	51
4	Riau	50	19	2	0	1	8	7	66	27
5	Jambi	19	18	1	0	1	0	2	17	17
6	Sumatera Selatan	38	32	2	0	0	4	4	23	28
7	Bengkulu	10	6	2	0	0	1	1	20	10
8	Lampung	39	26	6	0	1	2	10	83	20
9	Kepulauan Bangka Belitung	5	15	3	0	0	0	1	23	15
10	Kepulauan Riau	23	15	1	1	2	0	3	39	15
11	DKI Jakarta	17	22	3	0	5	0	5	52	25
12	Jawa Barat	235	212	29	2	8	15	81	479	143
13	Jawa Tengah	96	156	15	3	2	4	44	539	117
14	DI Yogyakarta	16	16	3	0	0	1	7	110	9
15	Jawa Timur	128	119	26	1	13	6	54	799	133
16	Banten	64	50	10	0	1	1	28	98	46
17	Bali	8	4	0	0	0	2	12	75	24
18	Nusa Tenggara Barat	30	28	9	1	0	2	11	37	26
19	Nusa Tenggara Timur	55	23	11	0	9	7	2	7	67
20	Kalimantan Barat	41	31	9	0	3	1	9	50	39
21	Kalimantan Tengah	33	15	2	0	2	1	4	22	17
22	Kalimantan Selatan	20	32	3	0	2	5	4	45	29
23	Kalimantan Timur	21	17	3	0	0	2	6	94	26
24	Kalimantan Utara	3	5	0	0	0	0	0	14	7
25	Sulawesi Utara	12	9	5	0	0	1	2	20	15
26	Sulawesi Tengah	28	18	5	1	1	0	3	20	33
27	Sulawesi Selatan	44	41	6	2	1	2	2	40	57
28	Sulawesi Tenggara	25	20	4	1	1	4	1	14	43
29	Gorontalo	3	7	2	0	0	1	1	8	29
30	Sulawesi Barat	20	7	5	0	0	0	4	6	18
31	Maluku	26	7	7	0	0	1	2	1	19
32	Maluku Utara	24	7	2	1	1	0	3	3	17
33	Papua Barat	9	4	6	0	0	0	2	7	21
34	Papua	18	7	7	0	0	3	1	15	28
Indonesia		**1.320**	**1.077**	**207**	**14**	**65**	**80**	**335**	**2.982**	**1.309**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Keterangan *: Stroke, dll

**: Diabetes Melitus, dll

Lampiran 23.a

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021

No	Provinsi	Ibu Hamil							Ibu Bersalin/Nifas								
		Jumlah	K1		K4*		K6		Jumlah	Persalinan Di Fasyankes**		KF1		KF Lengkap		Ibu Nifas Mendapat Vit A	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	Aceh	114.929	103.655	90,2	89.721	78,1	47768	41,6	109.922	90.525	82,4	91.736	83,5	87.029	79,2	90.982	82,8
2	Sumatera Utara	305.910	281.385	92,0	257.550	84,2	258849	84,6	292.005	246.974	84,6	255.360	87,5	241.331	82,6	252.079	86,3
3	Sumatera Barat	114.533	99.415	86,8	85.590	74,7	48329	42,2	109.327	85.513	78,2	88.323	80,8	85.411	78,1	89.081	81,5
4	Riau	144.236	131.530	91,2	125.361	86,9	42559	29,5	137.184	116.271	84,8	121.699	88,7	113.869	83,0	121.727	88,7
5	Jambi	69.707	68.459	98,2	63.464	91,0	38826	55,7	66.559	58.256	87,5	62.260	93,5	61.142	91,9	51.805	77,8
6	Sumatera Selatan	171.905	162.571	94,6	154.821	90,1	125271	72,9	164.131	153.647	93,6	155.797	94,9	145.481	88,6	156.029	95,1
7	Bengkulu	38.278	35.848	93,7	34.010	88,8	16259	42,5	36.538	32.810	89,8	33.021	90,4	31.497	86,2	32.919	90,1
8	Lampung	158.593	155.707	98,2	147.268	92,9	58375	36,8	151.387	141.752	93,6	144.108	95,2	139.748	92,3	142.914	94,4
9	Kep. Bangka Belitung	28.030	26.028	92,9	23.711	84,6	23220	82,8	26.726	24.164	90,4	24.464	91,5	24.113	90,2	23.921	89,5
10	Kepulauan Riau	51.829	44.367	85,6	42.558	82,1	32279	62,3	49.473	40.993	82,9	40.750	82,4	38.715	78,3	40.598	82,1
11	DKI Jakarta	189.437	216.349	114,2	216.813	114,5	156813	82,8	180.826	207.620	114,8	208.873	115,5	206.459	114,2	208.115	115,1
12	Jawa Barat	897.215	962.676	107,3	886.238	98,8	627492	69,9	856.433	844.651	98,6	908.097	106,0	877.000	102,4	899.837	105,1
13	Jawa Tengah	545.961	545.813	100,0	500.134	91,6	408280	74,8	520.974	488.423	93,8	500.734	96,1	498.615	95,7	508.144	97,5
14	DI Yogyakarta	62.352	46.510	74,6	37.670	60,4	27243	43,7	59.518	38.513	64,7	40.270	67,7	38.457	64,6	40.084	67,3
15	Jawa Timur	592.735	579.277	97,7	531.380	89,6	348074	58,7	565.793	533.762	94,3	537.386	95,0	517.095	91,4	505.262	89,3
16	Banten	245.304	251.431	102,5	234.867	95,7	206642	84,2	234.154	232.620	99,3	245.978	105,0	228.469	97,6	242.023	103,4
17	Bali	71.917	68.806	95,7	64.898	90,2	37111	51,6	68.648	65.839	95,9	65.917	96,0	65.102	94,8	65.387	95,2
18	Nusa Tenggara Barat	107.982	109.858	101,7	100.851	93,4	62792	58,2	103.073	97.812	94,9	99.218	96,3	94.711	91,9	97.040	94,1
19	Nusa Tenggara Timur	131.245	122.022	93,0	82.765	63,1	101841	77,6	125.280	86.248	68,8	108.689	86,8	103.490	82,6	108.158	86,3
20	Kalimantan Barat	100.213	95.247	95,0	85.916	85,7	41511	41,4	95.657	75.595	79,0	84.889	88,7	81.626	85,3	84.394	88,2
21	Kalimantan Tengah	48.291	54.374	112,6	42.564	88,1	30626	63,4	46.096	35.843	77,8	48.623	105,5	45.038	97,7	47.387	102,8
22	Kalimantan Selatan	80.006	76.108	95,1	65.494	81,9	47787	59,7	76.370	64.928	85,0	69.251	90,7	59.861	78,4	69.337	90,8
23	Kalimantan Timur	66.826	67.794	101,4	58.905	88,1	32151	48,1	63.789	59.642	93,5	59.362	93,1	54.628	85,6	57.538	90,2
24	Kalimantan Utara	14.297	14.765	103,3	12.766	89,3	4003	28,0	13.647	12.623	92,5	13.149	96,4	12.378	90,7	13.015	95,4
25	Sulawesi Utara	39.254	30.633	78,0	29.535	75,2	16291	41,5	36.901	29.313	79,4	30.734	83,3	27.798	75,3	30.829	83,5
26	Sulawesi Tengah	64.598	45.605	70,6	51.771	80,1	28621	44,3	61.661	51.155	83,0	39.602	64,2	37.586	61,0	40.984	66,5
27	Sulawesi Selatan	158.487	165.749	104,6	148.062	93,4	87853	55,4	151.283	150.246	99,3	151.441	100,1	144.755	95,7	150.579	99,5
28	Sulawesi Tenggara	58.952	54.915	93,2	44.028	74,7	22998	39,0	56.273	47.151	83,8	48.988	87,1	43.565	77,4	48.308	85,8
29	Gorontalo	22.166	23.382	105,5	18.342	82,7	18078	81,6	21.159	20.508	96,9	18.061	85,4	17.137	81,0	17.771	84,0
30	Sulawesi Barat	29.940	29.168	97,4	23.009	76,9	22804	76,2	28.579	24.824	86,9	25.318	88,6	24.603	86,1	24.325	85,1
31	Maluku	38.562	37.230	96,5	29.888	77,5	31587	81,9	36.809	24.304	66,0	34.719	94,3	31.900	86,7	28.538	77,5
32	Maluku Utara	26.530	18.635	70,2	17.943	67,6	9093	34,3	25.324	16.725	66,0	16.599	65,5	16.197	64,0	16.547	65,3
33	Papua Barat	22.377	51.968	232,2	3.765	16,8	9952	44,5	21.360	4.869	22,8	33.334	156,1	7.209	33,8	32.412	151,7
34	Papua	72.114	9.362	13,0	24.596	34,1	6859	9,5	68.836	34.126	49,6	8.028	11,7	27.368	39,8	7.113	10,3
Indonesia		**4.884.711**	**4.786.642**	**98,0**	**4.336.254**	**88,8**	**3.078.237**	**63,0**	**4.661.695**	**4.238.245**	**90,9**	**4.414.778**	**94,7**	**4.229.383**	**90,7**	**4.345.182**	**93,2**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Keterangan: *cakupan K4 sama dengan indikator SPM "persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil"

** persalinan di fasyankes sama dengan indikator SPM "persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan"

Lampiran 23.b

PERSENTASE PUSKESMAS* MELAKSANAKAN KELAS IBU HAMIL DAN MELAKSANAKAN PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) SERTA JUMLAH RUMAH TUNGGU KELAHIRAN (RTK) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Puskesmas	Puskesmas Melaksanakan Kelas Ibu Hamil		Puskesmas Melaksanakan P4K		Jumlah RTK
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	359	295	82,2	327	91,1	117
2	Sumatera Utara	608	469	77,1	482	79,3	151
3	Sumatera Barat	276	248	89,9	256	92,8	74
4	Riau	231	216	93,5	231	100,0	41
5	Jambi	207	195	94,2	207	100,0	52
6	Sumatera Selatan	344	344	100,0	304	88,4	93
7	Bengkulu	179	179	100,0	179	100,0	67
8	Lampung	312	312	100,0	312	100,0	96
9	Kepulauan Bangka Belitung	64	64	100,0	64	100,0	41
10	Kepulauan Riau	88	88	100,0	88	100,0	15
11	DKI Jakarta	315	212	67,3	270	85,7	0
12	Jawa Barat	1083	984	90,9	1021	94,3	33
13	Jawa Tengah	878	696	79,3	878	100,0	40
14	DI Yogyakarta	121	115	95,0	121	100,0	8
15	Jawa Timur	968	901	93,1	888	91,7	47
16	Banten	245	230	93,9	245	100,0	10
17	Bali	120	82	68,3	120	100,0	30
18	Nusa Tenggara Barat	174	174	100,0	120	69,0	29
19	Nusa Tenggara Timur	410	382	93,2	173	42,2	54
20	Kalimantan Barat	246	200	81,3	235	95,5	149
21	Kalimantan Tengah	205	164	80,0	205	100,0	45
22	Kalimantan Selatan	236	217	91,9	236	100,0	75
23	Kalimantan Timur	187	126	67,4	187	100,0	71
24	Kalimantan Utara	55	55	100,0	55	100,0	25
25	Sulawesi Utara	195	121	62,1	113	57,9	64
26	Sulawesi Tengah	207	190	91,8	80	38,6	160
27	Sulawesi Selatan	461	374	81,1	418	90,7	146
28	Sulawesi Tenggara	292	253	86,6	252	86,3	176
29	Gorontalo	93	83	89,2	77	82,8	15
30	Sulawesi Barat	96	73	76,0	96	100,0	68
31	Maluku	215	183	85,1	160	74,4	30
32	Maluku Utara	147	102	69,4	88	59,9	43
33	Papua Barat	161	24	14,9	161	100,0	48
34	Papua	428	170	39,7	70	16,4	57
Indonesia		**10.203**	**8.521**	**83,5**	**8.719**	**85,5**	**2.170**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

* hanya Puskesmas teregistrasi

Lampiran 24

CAKUPAN IMUNISASI Td PADA IBU HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Ibu Hamil	Imunisasi Td Pada Ibu Hamil											
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5		Td2+	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1	Aceh	114.458	14.671	12,8	14.194	12,4	11.341	9,9	7.647	6,7	5.955	5,2	39.137	34,2
2	Sumatera Utara	305.915	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	114.534	6.576	5,7	8.178	7,1	7.316	6,4	6.141	5,4	6.637	5,8	28.272	24,7
4	Riau	143.716	4.754	3	6.881	5	11.268	8	12.344	9	13.411	9	43.904	31
5	Jambi	68.805	7.865	11,4	7.982	11,6	6.139	8,9	4.846	7,0	3.599	5,2	22.566	32,8
6	Sumatera Selatan	173.817	59.988	35	57.930	33	27.346	16	26.305	15	27.719	16	139.300	80
7	Bengkulu	38.278	2.264	5,9	2.362	6,2	1.801	4,7	1.800	4,7	1.603	4,2	7.566	19,8
8	Lampung	158.609	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.186	289	1,0	793	2,8	3.097	11,0	4.902	17,4	5.534	19,6	14.326	50,8
10	Kepulauan Riau	51.829	4.496	9	4.639	9	4.247	8	4.668	9	5.033	10	18.587	36
11	DKI Jakarta	189.438	15.693	8,3	17.888	9,4	20.085	10,6	21.133	11,2	24.663	13,0	83.769	44,2
12	Jawa Barat	897.216	417.148	46	384.334	43	171.971	19	105.978	12	77.998	9	740.281	83
13	Jawa Tengah	548.077	30.585	5,6	35.840	6,5	42.513	7,8	45.475	8,3	47.601	8,7	171.429	31,3
14	DI Yogyakarta	45.133	68	0	246	1	4.063	9	5.893	13	15.852	35	26.054	58
15	Jawa Timur	592.735	20.118	3,4	18.809	3,2	26.005	4,4	47.320	8,0	287.715	48,5	379.849	64,1
16	Banten	245.304	86.886	35	82.602	34	36.729	15	24.001	10	17.194	7	160.526	65
17	Bali	71.919	22	0,0	152	0,2	1.006	1,4	3.386	4,7	21.054	29,3	25.598	35,6
18	Nusa Tenggara Barat	107.981	18.995	18	18.388	17	13.107	12	10.744	10	7.755	7	49.994	46
19	Nusa Tenggara Timur	130.311	8.716	6,7	7.640	5,9	4.699	3,6	2.840	2,2	2.687	2,1	17.866	13,7
20	Kalimantan Barat	99.996	9.024	9	10.158	10	9.051	9	8.055	8	8.981	9	36.245	36
21	Kalimantan Tengah	48.290	3.528	7,3	2.960	6,1	1.383	2,9	819	1,7	681	1,4	5.843	12,1
22	Kalimantan Selatan	80.010	7.154	9	9.769	12	7.053	9	3.999	5	2.373	3	23.194	29
23	Kalimantan Timur	89.607	1.842	2,1	1.838	2,1	1.541	1,7	1.056	1,2	1.387	1,5	5.822	6,5
24	Kalimantan Utara	14.287	175	1	243	2	283	2	286	2	331	2	1.143	8
25	Sulawesi Utara	40.808	10.591	26,0	8.082	19,8	2.150	5,3	910	2,2	722	1,8	11.864	29,1
26	Sulawesi Tengah	64.599	10.534	16	10.010	15	8.154	13	6.366	10	5.834	9	30.364	47
27	Sulawesi Selatan	158.488	59.403	37,5	50.467	31,8	24.777	15,6	13.332	8,4	9.889	6,2	98.465	62,1
28	Sulawesi Tenggara	58.955	16.747	28	14.400	24	7.205	12	4.311	7	3.853	7	29.769	50
29	Gorontalo	22.166	11.776	53,1	11.090	50,0	1.459	6,6	600	2,7	584	2,6	13.733	62,0
30	Sulawesi Barat	29.940	4.631	15	4.218	14	3.050	10	1.485	5	1.240	4	9.993	33
31	Maluku	38.562	6.921	17,9	5.814	15,1	2.813	7,3	1.556	4,0	1.272	3,3	11.455	29,7
32	Maluku Utara	26.531	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	22.377	1.266	5,7	1.095	4,9	983	4,4	1.022	4,6	1.390	6,2	4.490	20,1
34	Papua	72.117	10.807	15,0	8.276	11,5	4.237	5,9	2.437	3,4	2.288	3,2	17.238	23,9
Indonesia		**4.892.994**	**853.533**	**17,4**	**807.278**	**16,5**	**466.872**	**9,5**	**381.657**	**7,8**	**612.835**	**12,5**	**2.268.642**	**46,4**

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Keterangan:

- : Tidak ada data

Lampiran 25

PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah WUS Tidak Hamil (15-39 Tahun)	Imunisasi Td Pada WUS Tidak Hamil									
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Aceh	1.029.124	14.157	1,4	8.379	0,8	6.917	0,7	5.575	0,5	6.462	0,6
2	Sumatera Utara	2.711.926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	1.006.249	33	0,0	7	0,0	25	0,0	27	0,0	38	0,0
4	Riau	1.287.867	1.502	0	1.501	0	3.890	0	2.737	0	1.854	0
5	Jambi	653.131	3.801	0,6	2.313	0,4	2.384	0,4	1.856	0,3	1.523	0,2
6	Sumatera Selatan	1.560.716	11.093	1	7.825	1	8.022	1	6.194	0	3.904	0
7	Bengkulu	360.630	457	0,1	159	0,0	155	0,0	134	0,0	178	0,0
8	Lampung	1.515.344	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	267.482	489	0,2	228	0,1	1.330	0,5	807	0,3	1.464	0,5
10	Kepulauan Riau	483.191	2.424	1	1.238	0	1.698	0	1.152	0	1.534	0
11	DKI Jakarta	2.069.350	12.334	0,6	9.891	0,5	14.724	0,7	12.488	0,6	14.946	0,7
12	Jawa Barat	9.156.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	5.925.050	78.351	1,3	68.061	1,1	72.233	1,2	77.168	1,3	76.656	1,3
14	DI Yogyakarta	717.469	31	0	76	0	713	0	1.428	0	4.712	1
15	Jawa Timur	6.797.210	45.822	0,7	77.145	1,1	160.376	2,4	404.122	5,9	3.068.816	45,1
16	Banten	2.406.950	8.268	0	6.318	0	6.207	0	6.282	0	5.916	0
17	Bali	792.060	4	0,0	4	0,0	10	0,0	47	0,0	108	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	943.305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	986.968	409	0,0	428	0,0	451	0,0	233	0,0	254	0,0
20	Kalimantan Barat	954.516	3.519	0	2.855	0	2.846	0	2.124	0	2.130	0
21	Kalimantan Tengah	500.155	895	0,2	306	0,1	211	0,0	125	0,0	141	0,0
22	Kalimantan Selatan	733.832	8.570	1	4.147	1	1.474	0	764	0	611	0
23	Kalimantan Timur	644.686	1.128	0,2	813	0,1	949	0,1	1.665	0,3	8.707	1,4
24	Kalimantan Utara	128.935	300	0	486	0	733	1	629	0	716	1
25	Sulawesi Utara	420.045	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Tengah	552.031	3.028	1	2.158	0	1.703	0	1.425	0	1.389	0
27	Sulawesi Selatan	1.606.750	11.115	0,7	1.674	0,1	1.789	0,1	960	0,1	630	0,0
28	Sulawesi Tenggara	511.712	3.076	1	471	0	475	0	177	0	123	0
29	Gorontalo	218.332	1.764	0,8	1.245	0,6	1.094	0,5	474	0,2	380	0,2
30	Sulawesi Barat	248.381	327	0	56	0	8	0	0	0	2	0
31	Maluku	334.354	2.588	0,8	2.194	0,7	2.679	0,8	1.021	0,3	830	0,2
32	Maluku Utara	234.724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	190.135	244	0,1	197	0,1	283	0,1	235	0,1	244	0,1
34	Papua	631.144	8.368	1,3	6.453	1,0	5.832	0,9	3.946	0,6	3.827	0,6
Indonesia		**48.579.963**	**224.097**	**0,5**	**206.628**	**0,4**	**299.211**	**0,6**	**533.795**	**1,1**	**3.208.095**	**6,6**

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Keterangan:

- : Tidak ada data

Lampiran 26

PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR (HAMIL DAN TIDAK HAMIL) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah WUS (15-39 Tahun)	Imunisasi Td Pada WUS									
			Td1		Td2		Td3		Td4		Td5	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	1.143.582	28.828	2,5	22.573	2,0	18.258	1,6	13.222	1,2	12.417	1,1
2	Sumatera Utara	3.017.841	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	1.120.783	6.609	0,6	8.185	0,7	7.341	0,7	6.168	0,6	6.675	0,6
4	Riau	1.431.583	6.256	0	8.382	1	15.158	1	15.081	1	15.265	1
5	Jambi	721.936	11.666	1,6	10.295	1,4	8.523	1,2	6.702	0,9	5.122	0,7
6	Sumatera Selatan	1.734.533	71.081	4	65.755	4	35.368	2	32.499	2	31.623	2
7	Bengkulu	398.908	2.721	0,7	2.521	0,6	1.956	0,5	1.934	0,5	1.781	0,4
8	Lampung	1.673.953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kepulauan Bangka Belitung	295.668	778	0,3	1.021	0,3	4.427	1,5	5.709	1,9	6.998	2,4
10	Kepulauan Riau	535.020	6.920	1	5.877	1	5.945	1	5.820	1	6.567	1
11	DKI Jakarta	2.258.788	28.027	1,2	27.779	1,2	34.809	1,5	33.621	1,5	39.609	1,8
12	Jawa Barat	10.053.425	417.148	4	384.334	4	171.971	2	105.978	1	77.998	1
13	Jawa Tengah	6.473.127	108.936	1,7	103.901	1,6	114.746	1,8	122.643	1,9	124.257	1,9
14	DI Yogyakarta	762.602	99	0	322	0	4.776	1	7.321	1	20.564	3
15	Jawa Timur	7.389.945	65.940	0,9	95.954	1,3	186.381	2,5	451.442	6,1	3.356.531	45,4
16	Banten	2.652.254	95.154	4	88.920	3	42.936	2	30.283	1	23.110	1
17	Bali	863.979	26	0,0	0	0,0	1.016	0,1	0	0,0	21.162	2,4
18	Nusa Tenggara Barat	1.051.286	18.995	2	18.388	2	13.107	1	10.744	1	7.755	1
19	Nusa Tenggara Timur	1.117.279	9.125	0,8	8.068	0,7	5.150	0,5	3.073	0,3	2.941	0,3
20	Kalimantan Barat	1.054.512	12.543	1	13.013	1	11.897	1	10.179	1	11.111	1
21	Kalimantan Tengah	548.445	4.423	0,8	3.266	0,6	1.594	0,3	944	0,2	822	0,1
22	Kalimantan Selatan	813.842	15.724	2	13.916	2	8.527	1	4.763	1	2.984	0
23	Kalimantan Timur	734.293	2.970	0,4	2.651	0,4	2.490	0,3	2.721	0,4	10.094	1,4
24	Kalimantan Utara	143.222	475	0	729	1	1.016	1	915	1	1.047	1
25	Sulawesi Utara	460.853	10.591	2,3	8.082	1,8	2.150	0,5	910	0,2	722	0,2
26	Sulawesi Tengah	616.630	13.562	2	12.168	2	9.857	2	7.791	1	7.223	1
27	Sulawesi Selatan	1.765.238	70.518	4,0	52.141	3,0	26.566	1,5	14.292	0,8	10.519	0,6
28	Sulawesi Tenggara	570.667	785	0	14.871	3	7.680	1	4.488	1	3.976	1
29	Gorontalo	240.498	13.540	5,6	12.335	5,1	2.553	1,1	1.074	0,4	964	0,4
30	Sulawesi Barat	278.321	4.958	2	4.274	2	3.058	1	1.485	1	1.242	0
31	Maluku	372.916	9.509	2,5	8.008	2,1	5.492	1,5	2.577	0,7	2.102	0,6
32	Maluku Utara	261.255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua Barat	212.512	1.510	0,7	1.292	0,6	1.266	0,6	1.257	0,6	1.634	0,8
34	Papua	703.261	19.175	2,7	14.729	2,1	10.069	1,4	6.383	0,9	6.115	0,9
Indonesia		**53.472.957**	**1.058.592**	**2,0**	**1.013.750**	**1,9**	**766.083**	**1,4**	**912.019**	**1,7**	**3.820.930**	**7,1**

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Keterangan:

- : Tidak ada data

Lampiran 27.a

PERSENTASE REMAJA PUTRI DAN IBU HAMIL MENDAPAT TABLET TAMBAH DARAH (TTD)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Remaja Putri (12-18 tahun)			Ibu Hamil		
		Jumlah	Jumlah mendapat TTD	%	Jumlah	Jumlah mendapat TTD Minimal 90 Tablet	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	312.015	66.022	21,2	114.456	92.478	80,8
2	Sumatera Utara	598.271	187.575	31,4	181.480	153.222	84,4
3	Sumatera Barat	294.992	33.949	11,5	103.233	82.508	79,9
4	Riau	306.320	16.408	5,4	42.270	30.918	73,1
5	Jambi	142.288	20.821	14,6	33.777	31.100	92,1
6	Sumatera Selatan	505.593	127.049	25,1	106.257	91.246	85,9
7	Bengkulu	96.883	34.439	35,5	36.836	33.485	90,9
8	Lampung	299.575	146.386	48,9	108.960	97.120	89,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	61.382	24.812	40,4	28.403	23.674	83,4
10	Kepulauan Riau	97.597	32.504	33,3	28.449	25.484	89,6
11	DKI Jakarta	544.883	41.184	7,6	58.040	44.210	76,2
12	Jawa Barat	1.506.843	328.916	21,8	743.390	673.596	90,6
13	Jawa Tengah	1.636.697	1.032.227	63,1	557.249	464.142	83,3
14	DI Yogyakarta	159.150	90.498	56,9	43.811	37.695	86,0
15	Jawa Timur	1.641.604	385.111	23,5	325.303	296.927	91,3
16	Banten	335.154	115.017	34,3	213.327	191.769	89,9
17	Bali	186.708	160.472	85,9	70.009	64.821	92,6
18	Nusa Tenggara Barat	286.848	102.299	35,7	129.551	97.971	75,6
19	Nusa Tenggara Timur	326.303	20.683	6,3	130.909	94.445	72,1
20	Kalimantan Barat	272.816	95.553	35,0	102.768	86.015	83,7
21	Kalimantan Tengah	136.526	25.824	18,9	46.730	40.220	86,1
22	Kalimantan Selatan	160.153	43.674	27,3	53.347	42.152	79,0
23	Kalimantan Timur	190.849	7.567	4,0	58.087	50.537	87,0
24	Kalimantan Utara	12.110	6.563	54,2	11.272	7.688	68,2
25	Sulawesi Utara	15.611	3.079	19,7	3.594	3.067	85,3
26	Sulawesi Tengah	161.451	94.657	58,6	64.598	48.864	75,6
27	Sulawesi Selatan	302.261	135.307	44,8	146.146	101.039	69,1
28	Sulawesi Tenggara	65.913	14.476	22,0	32.328	20.709	64,1
29	Gorontalo	19.749	463	2,3	24.948	18.663	74,8
30	Sulawesi Barat	61.702	2.392	3,9	28.069	22.446	80,0
31	Maluku	58.118	11.603	20,0	40.935	28.904	70,6
32	Maluku Utara	9.639	200	2,1	26.530	20.485	77,2
33	Papua Barat	9.454	1.095	11,6	12.353	4.632	37,5
34	Papua	81.583	5.418	6,6	4.463	2.535	56,8
Indonesia		**10.897.041**	**3.414.243**	**31,3**	**3.711.878**	**3.124.767**	**84,2**

Sumber: Laporan Rutin Tahun 2021

Lampiran 27.b

PERSENTASE BALITA KURUS DAN IBU HAMIL RISIKO KEK* MENDAPAT MAKANAN TAMBAHAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Persentase Mendapat Makanan Tambahan	
		Balita Kurus	Ibu Hamil Risiko KEK
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Aceh	75,5	81,1
2	Sumatera Utara	89,9	97,0
3	Sumatera Barat	94,3	91,8
4	Riau	79,8	95,2
5	Jambi	96,9	98,5
6	Sumatera Selatan	95,0	81,5
7	Bengkulu	97,1	98,9
8	Lampung	98,0	98,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	97,0	100,0
10	Kepulauan Riau	93,3	98,3
11	DKI Jakarta	98,6	63,8
12	Jawa Barat	72,1	92,1
13	Jawa Tengah	83,9	94,1
14	DI Yogyakarta	96,2	100,0
15	Jawa Timur	60,2	87,2
16	Banten	98,6	98,1
17	Bali	99,9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	63,0	93,9
19	Nusa Tenggara Timur	74,0	72,2
20	Kalimantan Barat	94,8	85,2
21	Kalimantan Tengah	98,5	93,0
22	Kalimantan Selatan	94,8	93,7
23	Kalimantan Timur	86,1	95,5
24	Kalimantan Utara	65,5	85,1
25	Sulawesi Utara	80,6	99,8
26	Sulawesi Tengah	92,4	629,0
27	Sulawesi Selatan	93,2	94,3
28	Sulawesi Tenggara	89,2	95,3
29	Gorontalo	99,0	97,3
30	Sulawesi Barat	65,7	91,5
31	Maluku	90,6	96,8
32	Maluku Utara	61,3	69,4
33	Papua Barat	46,6	42,2
34	Papua	58,5	78,9
Indonesia		**77,9**	**89,7**

Sumber: Laporan Rutin 2021

*KEK=Kekurangan Energi Kronik

Lampiran 28.a

JUMLAH PUS PESERTA KB BERDASARKAN METODE KONTRASEPSI YANG SEDANG DIGUNAKAN
TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah PUS	PUS Peserta KB Berdasarkan Metode Kontrasepsi																				Prevalensi KB
			Peserta KB Modern																		Peserta KB Tradisional		Jumlah PUS Peserta KB	
			Kondom	%	Suntik	%	Pil	%	IUD/AKDR	%	MOP	%	MOW	%	Implan	%	MAL	%	Jumlah	%	Jumlah	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	Aceh	773.590	10.729	2,8	253.776	65,9	68.356	17,7	18.907	4,9	306	0,1	15.492	4,0	17.479	4,5	276	0,1	385.321	49,8	6.907	0,9	392.228	50,7
2	Sumatera Utara	1.855.245	20.564	2,7	353.557	47,1	139.182	18,5	29.107	3,9	1.882	0,3	73.213	9,7	133.011	17,7	721	0,1	751.237	40,5	13.298	0,7	764.535	41,2
3	Sumatera Barat	709.389	16.078	4,5	195.272	54,4	42.410	11,8	32.096	8,9	1.512	0,4	24.245	6,8	47.173	13,1	185	0,1	358.971	50,6	4.688	0,7	363.659	51,3
4	Riau	911.400	10.349	2,5	243.908	58,7	83.713	20,2	19.276	4,6	730	0,2	18.112	4,4	38.900	9,4	176	0,0	415.164	45,6	6.960	0,8	422.124	46,3
5	Jambi	598.306	6.060	1,6	230.371	60,7	77.418	20,4	12.922	3,4	429	0,1	9.418	2,5	42.557	11,2	124	0,0	379.299	63,4	3.325	0,6	382.624	64,0
6	Sumatera Selatan	1.318.466	9.370	1,2	532.197	66,5	88.376	11,0	16.506	2,1	1.094	0,1	14.149	1,8	138.572	17,3	561	0,1	800.825	60,7	7.041	0,5	807.866	61,3
7	Bengkulu	328.796	6.180	2,9	131.203	61,4	22.871	10,7	9.499	4,4	482	0,2	6.738	3,2	36.804	17,2	54	0,0	213.831	65,0	1.458	0,4	215.289	65,5
8	Lampung	1.329.045	9.720	1,2	530.751	64,7	110.494	13,5	31.715	3,9	1.124	0,1	14.045	1,7	122.672	14,9	353	0,0	820.874	61,8	4.845	0,4	825.719	62,1
9	Kep. Bangka Belitung	233.364	3.222	2,1	90.140	57,8	40.424	25,9	5.831	3,7	239	0,2	5.032	3,2	11.111	7,1	52	0,0	156.051	66,9	1.549	0,7	157.600	67,5
10	Kepulauan Riau	294.526	3.815	3,2	58.330	49,0	26.543	22,3	10.475	8,8	307	0,3	10.089	8,5	9.264	7,8	105	0,1	118.928	40,4	5.543	1,9	124.471	42,3
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	7.822.002	64.416	1,4	2.811.552	61,0	826.179	17,9	471.470	10,2	9.721	0,2	159.038	3,5	263.003	5,7	1.436	0,0	4.606.815	58,9	18.157	0,2	4.624.972	59,1
13	Jawa Tengah	5.870.344	93.683	2,6	2.190.427	61,9	341.463	9,7	320.669	9,1	11.069	0,3	179.725	5,1	398.393	11,3	2.062	0,1	3.537.491	60,3	25.609	0,4	3.563.100	60,7
14	DI Yogyakarta	525.968	39.319	13,5	103.477	35,4	25.245	8,6	82.684	28,3	1.829	0,6	16.475	5,6	23.058	7,9	155	0,1	292.242	55,6	3.363	0,6	295.605	56,2
15	Jawa Timur	6.309.132	57.429	1,4	2.443.723	61,1	645.370	16,1	342.916	8,6	9.196	0,2	201.307	5,0	300.859	7,5	1.660	0,0	4.002.460	63,4	22.705	0,4	4.025.165	63,8
16	Banten	1.741.025	11.631	1,2	723.455	73,0	113.609	11,5	55.970	5,6	1.229	0,1	22.601	2,3	62.194	6,3	311	0,0	991.000	56,9	5.372	0,3	996.372	57,2
17	Bali	600.733	6.503	2,0	136.728	42,6	31.737	9,9	104.126	32,4	1.428	0,4	24.715	7,7	15.532	4,8	260	0,1	321.029	53,4	3.602	0,6	324.631	54,0
18	Nusa Tenggara Barat	925.538	2.895	0,5	358.637	66,8	30.178	5,6	38.135	7,1	660	0,1	9.727	1,8	96.718	18,0	173	0,0	537.123	58,0	1.440	0,2	538.563	58,2
19	Nusa Tenggara Timur	623.734	930	0,4	108.827	44,4	17.184	7,0	18.942	7,7	702	0,3	26.566	10,8	71.657	29,2	186	0,1	244.994	39,3	3.924	0,6	248.918	39,9
20	Kalimantan Barat	688.997	2.500	0,6	250.054	62,6	104.703	26,2	12.608	3,2	581	0,1	9.217	2,3	19.840	5,0	170	0,0	399.673	58,0	2.705	0,4	402.378	58,4
21	Kalimantan Tengah	340.332	1.823	0,8	139.892	64,2	52.461	24,1	3.307	1,5	278	0,1	3.498	1,6	16.351	7,5	130	0,1	217.740	64,0	1.113	0,3	218.853	64,3
22	Kalimantan Selatan	635.477	4.596	1,1	219.133	51,1	166.155	38,7	9.328	2,2	737	0,2	7.253	1,7	21.771	5,1	211	0,0	429.184	67,5	2.268	0,4	431.452	67,9
23	Kalimantan Timur	501.372	7.952	3,1	115.262	45,2	74.041	29,1	27.686	10,9	570	0,2	12.564	4,9	16.556	6,5	166	0,1	254.797	50,8	2.826	0,6	257.623	51,4
24	Kalimantan Utara	82.790	814	2,2	18.985	51,3	9.682	26,1	2.801	7,6	59	0,2	1.469	4,0	3.180	8,6	35	0,1	37.025	44,7	476	0,6	37.501	45,3
25	Sulawesi Utara	328.217	746	0,4	97.506	52,9	31.595	17,1	10.694	5,8	351	0,2	6.110	3,3	37.265	20,2	76	0,0	184.343	56,2	1.496	0,5	185.839	56,6
26	Sulawesi Tengah	445.164	969	0,4	113.457	47,8	64.493	27,2	15.407	6,5	488	0,2	9.246	3,9	33.150	14,0	98	0,0	237.308	53,3	1.935	0,4	239.243	53,7
27	Sulawesi Selatan	1.197.914	5.297	0,8	363.038	58,0	112.449	18,0	28.763	4,6	1.014	0,2	20.045	3,2	95.072	15,2	375	0,1	626.053	52,3	6.761	0,6	632.814	52,8
28	Sulawesi Tenggara	373.044	953	0,5	90.434	50,5	45.139	25,2	5.352	3,0	325	0,2	3.960	2,2	32.663	18,3	80	0,0	178.906	48,0	1.287	0,3	180.193	48,3
29	Gorontalo	196.453	363	0,3	55.808	46,6	22.828	19,1	6.914	5,8	358	0,3	4.940	4,1	28.480	23,8	19	0,0	119.710	60,9	371	0,2	120.081	61,1
30	Sulawesi Barat	186.406	1.312	1,4	44.456	47,8	24.419	26,3	3.032	3,3	299	0,3	2.714	2,9	16.696	17,9	93	0,1	93.021	49,9	715	0,4	93.736	50,3
31	Maluku	167.742	268	0,5	37.413	66,2	5.011	8,9	735	1,3	62	0,1	1.298	2,3	11.679	20,7	31	0,1	56.497	33,7	399	0,2	56.896	33,9
32	Maluku Utara	156.656	101	0,1	45.155	62,3	4.186	5,8	996	1,4	51	0,1	1.279	1,8	20.663	28,5	23	0,0	72.454	46,3	512	0,3	72.966	46,6
33	Papua Barat	48.306	71	0,5	9.543	68,6	1.881	13,5	336	2,4	36	0,3	400	2,9	1.629	11,7	17	0,1	13.913	28,8	301	0,6	14.214	29,4
34	Papua	290.249	1.663	3,8	23.222	53,3	8.864	20,3	1.052	2,4	60	0,1	1.895	4,3	6.788	15,6	26	0,1	43.570	15,0	1.105	0,4	44.675	15,4
Indonesia		**38.409.722**	**402.321**	**1,8**	**13.119.689**	**59,9**	**3.458.659**	**15,8**	**1.750.257**	**8,0**	**49.208**	**0,2**	**916.575**	**4,2**	**2.190.740**	**10,0**	**10.400**	**0,0**	**21.897.849**	**57,0**	**164.056**	**0,4**	**22.061.905**	**57,4**

Sumber: Pendataan Keluarga , BKKBN, 2021

Keterangan:

AKDR: Alat Kontrasepsi Dalam Rahim

MOP : Metode Operasi Pria

MOW : Metode Operasi Wanita

MAL : Metode Amenorea Laktasi

\- : Tidak ada data

Lampiran 28.b

JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) PESERTA KELUARGA BERENCANA MODERN MENURUT TEMPAT PELAYANAN DAN PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	PUS Peserta KB Modern										
		RS Pemerintah/ TNI/Polri	RS Swasta	Puskesmas/ Klinik TNI/ Polri	Klinik Swasta	Praktek Dokter	Pustu/ Pusling/ Bidan Desa	Praktek Mandiri Bidan	Mobil Pelayanan KB	Toko Obat/Apotik	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	27.082	10.310	67.800	34.187	11.941	113.700	95.061	2.649	19.564	3.027	385.321
2	Sumatera Utara	54.039	46.185	124.446	85.418	10.819	167.963	187.988	17.551	53.521	3.307	751.237
3	Sumatera Barat	26.929	14.766	48.418	13.775	5.205	148.229	71.657	3.638	23.722	2.632	358.971
4	Riau	12.933	19.618	42.630	37.813	11.057	125.588	124.512	2.555	37.274	1.184	415.164
5	Jambi	7.849	7.731	28.561	12.938	7.186	153.615	107.842	17.203	34.686	1.688	379.299
6	Sumatera Selatan	13.085	12.465	70.365	23.306	13.461	376.821	253.151	12.704	21.796	3.671	800.825
7	Bengkulu	7.518	3.522	32.469	6.668	3.769	76.315	70.417	4.179	8.161	813	213.831
8	Lampung	10.136	18.087	66.566	34.159	19.255	256.876	360.489	11.810	40.246	3.250	820.874
9	Kep. Bangka Belitung	4.085	3.629	10.392	4.451	2.694	64.419	45.783	2.411	17.420	767	156.051
10	Kepulauan Riau	7.647	9.497	19.069	11.278	3.708	24.784	28.889	846	12.801	409	118.928
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	167.014	190.815	473.799	291.841	90.484	869.960	1.919.246	20.141	552.255	31.260	4.606.815
13	Jawa Tengah	190.166	149.877	507.930	135.201	67.783	795.602	1.397.026	13.878	258.809	21.219	3.537.491
14	DI Yogyakarta	29.568	22.178	51.300	26.427	6.268	12.805	96.210	297	46.065	1.124	292.242
15	Jawa Timur	184.083	199.876	372.014	160.728	90.306	1.154.629	1.390.734	9.452	427.938	12.700	4.002.460
16	Banten	16.294	41.843	131.488	154.803	20.358	187.794	376.827	5.838	52.197	3.558	991.000
17	Bali	27.804	25.984	38.890	20.308	20.726	48.777	125.378	2.389	10.516	257	321.029
18	Nusa Tenggara Barat	15.945	7.900	61.289	13.982	12.719	313.403	91.833	7.505	7.898	4.649	537.123
19	Nusa Tenggara Timur	27.605	6.406	79.958	2.897	1.821	116.433	4.192	1.491	3.079	1.112	244.994
20	Kalimantan Barat	10.181	7.521	49.528	20.612	7.841	182.352	91.774	1.303	26.524	2.037	399.673
21	Kalimantan Tengah	4.326	1.565	24.075	7.748	2.687	104.215	45.018	1.319	25.059	1.728	217.740
22	Kalimantan Selatan	8.871	4.466	34.178	12.859	6.292	153.885	95.646	6.282	88.488	18.217	429.184
23	Kalimantan Timur	15.509	14.561	45.720	20.064	8.679	42.163	63.049	924	43.108	1.020	254.797
24	Kalimantan Utara	2.360	310	10.445	1.411	2.838	6.985	7.402	92	5.041	141	37.025
25	Sulawesi Utara	9.928	6.030	47.264	9.369	11.430	46.065	34.810	4.575	13.255	1.617	184.343
26	Sulawesi Tengah	12.144	4.083	33.022	3.532	2.748	138.302	18.297	3.658	16.452	5.070	237.308
27	Sulawesi Selatan	31.575	14.045	153.827	22.854	8.135	260.309	76.373	5.288	48.743	4.904	626.053
28	Sulawesi Tenggara	6.006	2.601	36.573	3.259	2.774	84.306	18.463	10.415	11.772	2.737	178.906
29	Gorontalo	7.391	2.206	34.759	6.137	3.192	40.494	13.568	1.345	8.979	1.639	119.710
30	Sulawesi Barat	3.506	1.058	17.335	2.133	827	50.321	8.803	1.839	5.549	1.650	93.021
31	Maluku	2.337	571	13.281	1.054	545	27.692	7.152	1.472	1.459	934	56.497
32	Maluku Utara	2.033	564	16.309	1.069	676	39.301	8.035	2.954	1.185	328	72.454
33	Papua Barat	701	250	5.193	321	248	5.250	1.199	31	636	84	13.913
34	Papua	3.674	509	17.733	1.673	634	14.050	3.189	185	1.600	323	43.570
Indonesia		**950.324**	**851.029**	**2.766.626**	**1.184.275**	**459.106**	**6.203.403**	**7.240.013**	**178.219**	**1.925.798**	**139.056**	**21.897.849**

Sumber: Pendataan Keluarga , BKKBN, 2021

Keterangan:

- : Tidak ada data

Lampiran 29

CAKUPAN DAN PROPORSI PESERTA KB PASCA PERSALINAN MENURUT JENIS KONTRASEPSI DAN PROVINSI
TAHUN 2021

No	Provinsi	Sasaran Ibu Bersalin	Peserta KB Pasca Salin		Peserta KB Pasca Persalinan																	
			ABS	%	Kondom	%	Suntik	%	Pil	%	AKDR	%	MOP	%	MOW	%	Implan	%	MAL	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Aceh	110.256	52.313	47,4	4.961	9,5	24.812	47,4	14.855	28,4	4.080	7,8	0	0,0	1.553	3,0	1.572	3,0	78	0,1	51.911	47,1
2	Sumatera Utara	292.215	62.534	21,4	4.355	7,0	14.548	23,3	9.748	15,6	1.484	2,4	30	0,0	1.969	3,1	6.875	11,0	23.525	37,6	62.534	21,4
3	Sumatera Barat	107.037	33.276	31,1	2.294	6,9	18.423	55,4	5.000	15,0	2.474	7,4	354	1,1	688	2,1	4.043	12,1	0	0,0	33.276	31,1
4	Riau	127.911	91.347	71,4	5.744	6,3	51.123	56,0	17.722	19,4	5.681	6,2	78	0,1	700	0,8	5.815	6,4	4.484	4,9	91.347	71,4
5	Jambi	66.559	34.340	51,6	1.066	3,1	20.041	58,4	10.384	30,2	944	2,7	60	0,2	247	0,7	1.259	3,7	339	1,0	34.340	51,6
6	Sumatera Selatan	164.131	127.415	77,0	8.817	6,9	77.336	60,7	25.430	20,0	2.034	1,6	16	0,0	459	0,4	9.786	7,7	3.537	2,8	127.415	77,6
7	Bengkulu	36.630	24.176	66,0	1.211	5,0	16.069	66,5	3.403	14,1	646	2,7	20	0,1	204	0,8	2.623	10,8	0	0,0	24.176	66,0
8	Lampung	153.778	94.619	59,0	4.241	4,5	54.967	58,1	14.024	14,8	9.512	10,1	97	0,1	1.172	1,2	10.606	11,2	0	0,0	94.619	61,5
9	Kep. Bangka Belitung	27.741	17.997	64,9	453	2,5	11.181	62,1	4.269	23,7	449	2,5	32	0,2	608	3,4	833	4,6	172	1,0	17.997	64,9
10	Kepulauan Riau	44.329	16.788	0,4	939	5,6	9.171	54,6	3.066	18,3	747	4,4	28	0,2	397	2,4	1.064	6,3	1.376	8,2	16.788	37,9
11	DKI Jakarta	207.620	136.055	0,7	14.014	10,3	70.776	52,0	16.243	11,9	22.455	16,5	27	0,0	1284	0,9	11.256	8,3	0	0,0	136.055	65,5
12	Jawa Barat	948.036	562.397	59,3	18.613	3,3	362.379	64,4	108.891	19,4	34.832	6,2	4452	0,8	4.762	0,8	23.433	4,2	5.035	0,9	562.397	59,3
13	Jawa Tengah	510.294	203.514	39,9	13.290	6,5	113.468	55,8	24.598	12,1	15.447	7,6	1978	1,0	7162	3,5	27.571	13,5	0	0,0	203.514	39,9
14	DI Yogyakarta	38.567	4.319	11.19	527	12,2	1.348	31,2	169	3,9	1.512	35,0	2	0,0	184	4,3	577	13,4	0	0,0	4.319	11,2
15	Jawa Timur	565.793	296.958	52,5	11.877	4,0	32.915	11,1	193.149	65,0	24.071	8,1	19312	6,5	6818	2,3	50	0,0	8.766	3,0	296.958	52,5
16	Banten	235.886	155.106	63,0	7.754	5,0	105.417	68,0	28.797	18,6	4.393	2,8	4	0,0	304	0,2	7.736	5,0	701	0,5	155.106	65,8
17	Bali	68.690	30.649	44,6	2.799	9,1	15.904	51,9	2.521	8,2	5.352	17,5	30	0,1	1641	5,4	2.402	7,8	0	0,0	30.649	44,6
18	Nusa Tenggara Barat	103.073	65.112	61,5	416	0,6	51.193	78,6	2.227	3,4	2.309	3,5	40	0,1	746	1,1	8.181	12,6	0	0,0	65.112	63,2
19	Nusa Tenggara Timur	124.405	23.586	19,0	530	2,2	12.712	53,9	1.222	5,2	1.193	5,1	86	0,4	1687	7,2	6.156	26,1		0,0	23.586	19,0
20	Kalimantan Barat	95.657	40.162	42,0	752	1,9	26.115	65,0	10.064	25,1	964	2,4	26	0,1	634	1,6	1.427	3,6	180	0,4	40.162	42,0
21	Kalimantan Tengah	46.096	29.297	63,6	300	1,0	21.452	73,2	5.953	20,3	211	0,7	7	0,0	225	0,8	1.149	3,9	0	0,0	29.297	63,6
22	Kalimantan Selatan	76.370	55.832	73,16	968	1,7	40.369	72,3	11.355	20,3	616	1,1	98	0,2	559	1,0	1.110	2,0	757	1,4	55.832	73,1
23	Kalimantan Timur	64.844	31.788	49,0	997	3,1	18.386	57,8	5.214	16,4	2.195	6,9	24	0,1	754	2,4	2.180	6,9	2.038	6,4	31.788	49,0
24	Kalimantan Utara	13.636	6.924	50,8	628	9,1	2.322	33,5	495	7,1	274	4,0	0	0,0	158	2,3	461	6,7	2.586	37,3	6.924	50,8
25	Sulawesi Utara	266.696	15.971	6,0	378	2,4	10.341	64,7	2.933	18,4	523	3,3	2	0,0	80	0,5	1.714	10,7	0	0,0	15.971	6,0
26	Sulawesi Tengah	61.661	32.772	53,1	635	1,9	18.099	55,2	8.616	26,3	1.637	5,0	54	0,2	656	2,0	3.075	9,4	0	0,0	32.772	53,1
27	Sulawesi Selatan	161.328	58.732	36,4	772	1,3	32.451	55,3	10.421	17,7	2.447	4,2	252	0,4	1706	2,9	8.885	15,1	1.798	3,1	58.732	36,4
28	Sulawesi Tenggara	455.100	1.517	3,0	34	2,2	444	29,3	747	49,2	17	1,1	126	8,3	8	0,5	0	0,0	141	9,3	1.517	0,3
29	Gorontalo	19.308	9.925	51,4	106	1,1	5.426	54,7	557	5,6	467	4,7	1	0,0	152	1,5	2.231	22,5	985	9,9	9.925	51,4
30	Sulawesi Barat	28.251	4.962	0,2	78	1,6	2.687	54,2	805	16,2	183	3,7	2	0,0	262	5,3	587	11,8	358	7,2	4.962	17,6
31	Maluku	36.019	11.472	29,0	86	0,7	6.002	52,3	3.322	29,0	100	0,9	3	0,0	77	0,7	1.882	16,4	0	0,0	11.472	31,8
32	Maluku Utara	428.040	10.440	41,0	124	1,2	8.229	78,8	576	5,5	110	1,1	0	0,0	66	0,6	1.241	11,9	94	0,9	10.440	2,4
33	Papua Barat	96.832	7.262	7,5	70	1,0	4.784	65,9	1.799	24,8	244	3,4	0	0,0	76	1,0	289	4,0	0	0,0	7.262	7,5
34	Papua	68.836	12.034	17,5	339	2,8	8.606	71,5	1.663	13,8	153	1,3	1	0,0	107	0,9	1.165	9,7	0	0,0	12.034	17,5
Indonesia		**5.851.625**	**2.361.591**	**40,4**	**110.168**	**4,7**	**1.269.496**	**53,8**	**550.238**	**23,3**	**149.756**	**6,3**	**27.242**	**1,2**	**38.105**	**1,6**	**159.234**	**6,7**	**56.950**	**2,4**	**2.361.189**	**40,4**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 30.a

PEMERIKSAAN HIV IBU HAMIL MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Sasaran Ibu Hamil Diperiksa HIV	Jumlah Ibu Hamil Diperiksa HIV	Persentase Ibu Hamil Diperiksa HIV	Jumlah Ibu Hamil Positif HIV	Persentase Ibu Hamil Positif HIV (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	114.456	37.962	33,2%	5	0,01%
2	Sumatera Utara	305.910	46.318	15,1%	107	0,23%
3	Sumatera Barat	114.533	45.272	39,5%	37	0,08%
4	Riau	143.716	48.791	33,9%	33	0,07%
5	Jambi	68.805	19.439	28,3%	43	0,22%
6	Sumatera Selatan	173.815	78.653	45,3%	15	0,02%
7	Bengkulu	38.278	11.129	29,1%	1	0,01%
8	Lampung	158.609	65.716	41,4%	27	0,04%
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.185	22.773	80,8%	20	0,09%
10	Kepulauan Riau	51.829	21.731	41,9%	77	0,35%
11	DKI Jakarta	189.437	173.109	91,4%	165	0,10%
12	Jawa Barat	897.215	379.383	42,3%	523	0,14%
13	Jawa Tengah	548.079	439.200	80,1%	1328	0,30%
14	DI Yogyakarta	62.352	32.168	51,6%	21	0,07%
15	Jawa Timur	592.735	429.782	72,5%	600	0,14%
16	Banten	245.304	165.891	67,6%	135	0,08%
17	Bali	71.917	58.944	82,0%	182	0,31%
18	Nusa Tenggara Barat	107.982	43.361	40,2%	26	0,06%
19	Nusa Tenggara Timur	130.310	22.141	17,0%	156	0,70%
20	Kalimantan Barat	99.996	39.833	39,8%	66	0,17%
21	Kalimantan Tengah	48.291	16.765	34,7%	17	0,10%
22	Kalimantan Selatan	80.006	22.252	27,8%	33	0,15%
23	Kalimantan Timur	66.826	42.111	63,0%	113	0,27%
24	Kalimantan Utara	14.286	9.598	67,2%	10	0,10%
25	Sulawesi Utara	40.807	7.117	17,4%	12	0,17%
26	Sulawesi Tengah	64.598	27.688	42,9%	10	0,04%
27	Sulawesi Selatan	158.487	92.648	58,5%	92	0,10%
28	Sulawesi Tenggara	58.952	14.587	24,7%	27	0,19%
29	Gorontalo	22.166	11.070	49,9%	14	0,13%
30	Sulawesi Barat	29.940	8.436	28,2%	6	0,07%
31	Maluku	38.562	14.021	36,4%	128	0,91%
32	Maluku Utara	26.530	6.600	24,9%	100	1,52%
33	Papua Barat	22.377	9.175	41,0%	64	0,70%
34	Papua	72.114	21.766	30,2%	273	1,25%
Indonesia		**4.887.405**	**2.485.430**	**50,9%**	**4.466**	**0,18%**

Sumber : Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021

Lampiran 30.b

PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) DAN HASILNYA MENURUT PROVINSI TAHUN 2022

No	Provinsi	Jumlah Sasaran Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Melaksana DDHB	Persentase Ibu Hamil Melaksanakan DDHB	Jumlah Ibu Hamil Terdeteksi HBsAg Reaktif	Persentase Ibu Hamil Terdeteksi HBsAg Reaktif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(5)*	*(5)*
1	Aceh	114.456	90.185	78,79	919	1,0
2	Sumatera Utara	305.910	32.438	10,60	415	1,3
3	Sumatera Barat	114.533	71.187	62,15	716	1,0
4	Riau	143.716	55.141	38,37	803	1,5
5	Jambi	68.805	41.319	60,05	556	1,3
6	Sumatera Selatan	173.815	99.084	57,01	788	0,8
7	Bengkulu	38.278	18.340	47,91	309	1,7
8	Lampung	158.609	113.132	71,33	1.403	1,2
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.185	21.865	77,58	390	1,8
10	Kepulauan Riau	51.829	18.898	36,46	297	1,6
11	DKI Jakarta	189.437	136.080	71,83	1.344	1,0
12	Jawa Barat	897.215	462.079	51,50	5.819	1,3
13	Jawa Tengah	548.079	438.169	79,95	5.942	1,4
14	DI Yogyakarta	62.352	31.568	50,63	261	0,8
15	Jawa Timur	592.735	450.406	75,99	8.071	1,8
16	Banten	245.304	167.154	68,14	2.264	1,4
17	Bali	71.917	59.686	82,99	705	1,2
18	Nusa Tenggara Barat	107.982	74.053	68,58	2.116	2,9
19	Nusa Tenggara Timur	130.310	63.245	48,53	3.148	5,0
20	Kalimantan Barat	99.996	49.818	49,82	1.132	2,3
21	Kalimantan Tengah	48.291	38.432	79,58	903	2,3
22	Kalimantan Selatan	80.006	55.880	69,84	1.086	1,9
23	Kalimantan Timur	66.826	49.772	74,48	985	2,0
24	Kalimantan Utara	14.286	11.703	81,92	254	2,2
25	Sulawesi Utara	40.807	12.812	31,40	147	1,1
26	Sulawesi Tengah	64.598	36.741	56,88	834	2,3
27	Sulawesi Selatan	158.487	134.634	84,95	2.685	2,0
28	Sulawesi Tenggara	58.952	21.901	37,15	657	3,0
29	Gorontalo	22.166	17.942	80,94	585	3,3
30	Sulawesi Barat	29.940	20.246	67,62	376	1,9
31	Maluku	38.562	13.681	35,48	367	2,7
32	Maluku Utara	26.530	12.629	47,60	419	3,3
33	Papua Barat	22.377	5.814	25,98	242	4,2
34	Papua	72.114	19.979	27,70	612	3,1
Indonesia		**4.887.405**	**2.946.013**	**60,3**	**47.550**	**1,6**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI 2022

Keterangan: Jumlah sasaran yang dimaksud pada kolom 3 adalah Jumlah Ibu Hamil yang tertera pada penduduk sasaran program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021-2025 (KMK RI Nomor HK.01.07/Menkes/5675/2021

Pemerikasaan Hepatitis B pada Bumil menggunakan RDT (Rapid Diagnostic Test) HBsAg

HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus hepatitis B yang memberikan arti adanya infeksi hepatitis B

Lampiran 31

JUMLAH KEMATIAN NEONATAL, BAYI, DAN BALITA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Kematian						
		Neonatal			Post Neonatal	Balita		
		0-6 Hari	7-28 Hari	0-28 Hari		Bayi [a]	Anak Balita	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Aceh	696	148	844	221	1.065	71	1.136
2	Sumatera Utara	484	76	560	78	638	40	678
3	Sumatera Barat	474	156	630	221	851	84	935
4	Riau	355	142	497	87	584	37	621
5	Jambi	247	34	281	25	306	9	315
6	Sumatera Selatan	359	52	411	90	501	31	532
7	Bengkulu	184	52	236	39	275	25	300
8	Lampung	349	78	427	60	487	24	511
9	Kepulauan Bangka Belitung	107	35	142	39	181	15	196
10	Kepulauan Riau	192	52	244	62	306	23	329
11	DKI Jakarta	183	84	267	61	328	52	380
12	Jawa Barat	1956	410	2.366	398	2.764	224	2.988
13	Jawa Tengah	2202	899	3.101	1.129	4.230	633	4.863
14	D I Yogyakarta	147	65	212	62	274	32	306
15	Jawa Timur	2092	633	2.725	631	3.356	219	3.575
16	Banten	839	170	1.009	191	1.200	84	1.284
17	Bali	206	85	291	90	381	36	417
18	Nusa Tenggara Barat	593	83	676	130	806	31	837
19	Nusa Tenggara Timur	571	123	694	261	955	119	1.074
20	Kalimantan Barat	410	86	496	120	616	37	653
21	Kalimantan Tengah	267	67	334	60	394	29	423
22	Kalimantan Selatan	401	82	483	137	620	56	676
23	Kalimantan Timur	432	127	559	145	704	52	756
24	Kalimantan Utara	76	21	97	36	133	8	141
25	Sulawesi Utara	103	26	129	38	167	27	194
26	Sulawesi Tengah	285	29	314	68	382	24	406
27	Sulawesi Selatan	543	138	681	163	844	48	892
28	Sulawesi Tenggara	247	39	286	72	358	29	387
29	Gorontalo	125	43	168	61	229	21	250
30	Sulawesi Barat	175	35	210	51	261	13	274
31	Maluku	143	21	164	48	212	31	243
32	Maluku Utara	175	45	220	80	300	34	334
33	Papua Barat	93	10	103	17	120	12	132
34	Papua	238	59	297	131	428	100	528
Indonesia		**15.949**	**4.205**	**20.154**	**5.102**	**25.256**	**2.310**	**27.566**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022
Keterangan : - a : kematian bayi termasuk kematian pada neonatal

Lampiran 32.a

JUMLAH KEMATIAN NEONATAL DAN POST NEONATAL MENURUT PENYEBAB UTAMA DI INDONESIA
TAHUN 2021

No	Provinsi	Penyebab Kematian Neonatal (0-28 Hari)							Penyebab Kematian Post Neonatal (29 Hari-11 Bulan)										
		BBLR	Asfiksia	Tetanus Neonatorium	Infeksi	Kelainan Kongenital	COVID-19	Lain-lain	Kondisi Perinatal	Pneumonia	Diare	Kelainan Kongenital	Meningitis	Penyakit Saraf	Demam Berdarah	PD3I	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	COVID-19	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	244	289	1	22	104	1	176	1	30	13	16	0	3	0	0	1	0	157
2	Sumatera Utara	133	168	0	17	64	5	173	1	10	10	6	0	0	0	0	0	0	51
3	Sumatera Barat	188	170	2	13	76	0	180	8	19	29	34	3	1	0	0	0	0	127
4	Riau	128	127	1	16	52	0	173	8	7	12	6	0	0	0	0	0	5	49
5	Jambi	86	92	0	3	38	2	60	0	4	4	3	0	1	0	0	0	0	13
6	Sumatera Selatan	133	128	2	13	31	0	104	0	11	17	11	1	2	0	0	0	2	46
7	Bengkulu	85	55	0	8	39	1	48	0	2	3	2	1	0	0	1	0	0	30
8	Lampung	118	118	0	7	64	3	117	0	5	4	5	1	0	0	0	0	1	44
9	Kep. Bangka Belitung	69	30	0	3	22	1	17	0	5	5	7	1	0	0	0	0	1	20
10	Kepulauan Riau	101	60	1	10	12	1	59	2	8	11	9	0	1	0	0	0	1	30
11	DKI Jakarta	74	82	0	29	37	1	42	1	14	6	4	1	1	1	0	0	2	31
12	Jawa Barat	902	709	2	107	299	13	334	2	52	61	54	8	0	7	0	0	8	206
13	Jawa Tengah	1149	750	2	99	502	27	538	9	100	131	147	11	10	7	0	2	30	682
14	D I Yogyakarta	60	45	0	12	42	1	52	0	10	1	17	1	0	1	0	0	1	31
15	Jawa Timur	993	757	4	128	430	19	394	4	110	80	83	1	5	2	0	2	9	335
16	Banten	374	309	5	55	119	3	144	6	19	30	30	0	0	1	1	1	3	100
17	Bali	95	49	0	23	67	0	57	0	9	4	21	0	0	1	0	0	2	53
18	Nusa Tenggara Barat	273	163	0	27	99	1	113	0	55	9	0	0	0	6	0	0	3	57
19	Nusa Tenggara Timur	191	220	4	35	58	0	186	0	64	21	10	0	13	2	0	0	2	149
20	Kalimantan Barat	151	139	1	18	41	0	146	1	25	16	2	0	0	0	0	0	1	75
21	Kalimantan Tengah	85	114	5	15	30	0	85	1	2	17	4	0	0	0	0	0	0	36
22	Kalimantan Selatan	208	106	2	13	56	2	96	0	22	27	20	0	0	0	0	2	1	65
23	Kalimantan Timur	204	145	0	29	86	7	88	0	31	30	18	1	1	0	0	3	3	58
24	Kalimantan Utara	32	24	2	2	16	0	21	0	3	11	1	0	0	0	0	0	1	20
25	Sulawesi Utara	42	32	0	4	20	1	30	0	3	7	3	0	0	1	0	0	1	23
26	Sulawesi Tengah	89	85	0	2	29	0	109	0	16	14	9	0	0	1	0	0	3	25
27	Sulawesi Selatan	259	194	3	13	59	4	149	0	26	23	4	0	0	0	0	0	1	109
28	Sulawesi Tenggara	92	96	1	3	31	0	63	0	12	18	3	0	0	0	0	0	0	39
29	Gorontalo	57	46	1	3	11	1	49	0	10	13	2	0	1	0	0	0	0	35
30	Sulawesi Barat	78	61	0	18	17	0	36	0	6	11	4	0	1	0	0	0	0	29
31	Maluku	49	41	0	5	7	0	62	0	10	13	0	0	0	0	0	0	0	25
32	Maluku Utara	70	56	3	18	9	3	61	4	7	16	6	0	0	0	0	0	0	47
33	Papua Barat	23	37	0	7	0	0	36	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	10
34	Papua	110	102	3	19	2	3	58	0	28	43	0	0	0	0	0	0	0	60
Indonesia		**6.945**	**5.599**	**45**	**796**	**2.569**	**100**	**4.056**	**48**	**737**	**715**	**541**	**30**	**40**	**30**	**2**	**11**	**81**	**2.867**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 32.b

JUMLAH KEMATIAN ANAK BALITA MENURUT PENYEBAB UTAMA DI INDONESIA
TAHUN 2021

No	Provinsi	Diare	Demam Berdarah	Pneumonia	Kelainan Kongenital Jantung	PD3I	Penyakit Saraf	Kel. Kongenital lainnya	Tenggelam, Cedera, Kecelakaan	Infeksi Parasit	COVID-19	Lain-lain
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Aceh	2	0	6	1	0	0	6	5	1	1	49
2	Sumatera Utara	6	0	1	0	0	0	1	3	0	0	29
3	Sumatera Barat	8	1	2	1	0	2	4	10	0	0	56
4	Riau	4	2	2	2	0	0	3	3	0	1	20
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	8
6	Sumatera Selatan	2	1	5	0	0	0	0	3	0	0	20
7	Bengkulu	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	19
8	Lampung	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	21
9	Kep. Bangka Belitung	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	10
10	Kepulauan Riau	5	1	0	1	0	0	0	2	0	0	14
11	DKI Jakarta	5	3	9	3	0	3	1	2	0	5	21
12	Jawa Barat	22	32	24	6	0	2	4	6	5	2	121
13	Jawa Tengah	53	16	37	36	0	6	73	24	4	14	370
14	D I Yogyakarta	4	0	3	3	0	0	4	3	0	0	15
15	Jawa Timur	29	13	31	4	0	0	9	11	4	6	112
16	Banten	12	4	8	0	3	0	8	3	0	1	45
17	Bali	0	0	2	4	0	0	6	1	0	0	23
18	Nusa Tenggara Barat	1	2	8	1	0	0	1	1	0	0	17
19	Nusa Tenggara Timur	7	7	14	0	0	2	0	1	1	0	87
20	Kalimantan Barat	4	0	3	0	0	0	0	0	0	2	28
21	Kalimantan Tengah	3	0	2	0	0	0	0	4	0	0	20
22	Kalimantan Selatan	5	1	1	0	0	0	4	11	0	0	34
23	Kalimantan Timur	2	1	3	2	0	1	0	5	0	3	35
24	Kalimantan Utara	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	4
25	Sulawesi Utara	3	0	9	0	0	0	3	0	2	0	10
26	Sulawesi Tengah	5	0	5	0	0	0	0	1	0	0	13
27	Sulawesi Selatan	3	1	3	0	0	0	1	8	0	1	31
28	Sulawesi Tenggara	5	0	1	2	0	0	2	2	0	0	17
29	Gorontalo	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0	15
30	Sulawesi Barat	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	9
31	Maluku	7	0	4	0	0	0	0	2	0	0	18
32	Maluku Utara	2	1	1	0	0	0	0	4	0	0	26
33	Papua Barat	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	9
34	Papua	27	0	30	0	0	0	0	0	4	1	38
Indonesia		**239**	**87**	**217**	**70**	**3**	**16**	**134**	**121**	**22**	**37**	**1.364**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 33

BAYI BERAT BADAN LAHIR RENDAH (BBLR) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup	Bayi Baru Lahir Ditimbang		BBLR	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	104.051	86.453	83,1	2.222	2,6
2	Sumatera Utara	278.100	144.648	52,0	1.451	1,0
3	Sumatera Barat	104.121	88.373	84,9	2.657	3,0
4	Riau	130.651	66.073	50,6	765	1,2
5	Jambi	62.550	45.165	72,2	1.354	3,0
6	Sumatera Selatan	158.014	270.612	171,3	3.189	1,2
7	Bengkulu	34.798	33.314	95,7	964	2,9
8	Lampung	144.190	128.782	89,3	4.812	3,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	25.623	24.618	96,1	1.090	4,4
10	Kepulauan Riau	47.117	41.044	87,1	848	2,1
11	DKI Jakarta	172.215	171.294	99,5	1.634	1,0
12	Jawa Barat	815.650	796.904	97,7	22.574	2,8
13	Jawa Tengah	498.254	56.520	11,3	2.864	5,1
14	D I Yogyakarta	56.684	38.568	68,0	2.201	5,7
15	Jawa Timur	538.850	495.346	91,9	18.739	3,8
16	Banten	223.004	198.940	89,2	3.100	1,6
17	Bali	65.379	63.336	96,9	2.123	3,4
18	Nusa Tenggara Barat	98.165	82.885	84,4	3.477	4,2
19	Nusa Tenggara Timur	118.464	173.105	146,1	7.784	4,5
20	Kalimantan Barat	90.905	112.984	124,3	4.699	4,2
21	Kalimantan Tengah	43.901	42.184	96,1	923	2,2
22	Kalimantan Selatan	72.733	71.540	98,4	4.391	6,1
23	Kalimantan Timur	60.751	62.378	102,7	3.774	6,1
24	Kalimantan Utara	12.987	9.755	75,1	596	6,1
25	Sulawesi Utara	37.097	7.341	19,8	177	2,4
26	Sulawesi Tengah	58.725	50.822	86,5	1.417	2,8
27	Sulawesi Selatan	144.079	141.868	98,5	6.254	4,4
28	Sulawesi Tenggara	53.593	27.740	51,8	1.072	3,9
29	Gorontalo	20.151	20.416	101,3	1.204	5,9
30	Sulawesi Barat	27.218	23.563	86,6	1.304	5,5
31	Maluku	35.056	22.779	65,0	742	3,3
32	Maluku Utara	24.118	20.361	84,4	666	3,3
33	Papua Barat	20.343	4.849	23,8	279	5,8
34	Papua	65.558	7.692	11,7	373	4,8
Indonesia		**4.443.095**	**3.632.252**	**81,8**	**111.719**	**2,5**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 34

CAKUPAN KUNJUNGAN NEONATAL MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup	Kunjungan Neonatal 1 Kali (KN1)		Kunjungan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap)*	
			Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	104.051	89.385	85,9	87.526	84,1
2	Sumatera Utara	278.100	244.852	88,0	240.022	86,3
3	Sumatera Barat	104.121	88.878	85,4	84.651	81,3
4	Riau	130.651	120.125	91,9	115.174	88,2
5	Jambi	62.550	62.079	99,2	60.426	96,6
6	Sumatera Selatan	158.014	159.001	100,6	151.416	95,8
7	Bengkulu	34.798	35.074	100,8	31.340	90,1
8	Lampung	144.190	146.276	101,4	137.983	95,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	25.623	24.336	95,0	24.082	94,0
10	Kepulauan Riau	47.117	40.679	86,3	38.199	81,1
11	DKI Jakarta	172.215	204.832	118,9	199.671	115,9
12	Jawa Barat	815.650	898.816	110,2	850.509	104,3
13	Jawa Tengah	498.254	552.047	110,8	429.158	86,1
14	D I Yogyakarta	56.684	36.973	65,2	65.889	116,2
15	Jawa Timur	538.850	532.438	98,8	639.688	118,7
16	Banten	223.004	241.325	108,2	226.481	101,6
17	Bali	65.379	65.850	100,7	65.368	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	98.165	98.601	100,4	96.149	97,9
19	Nusa Tenggara Timur	118.464	109.104	92,1	86.643	73,1
20	Kalimantan Barat	90.905	83.575	91,9	80.923	89,0
21	Kalimantan Tengah	43.901	50.670	115,4	40.167	91,5
22	Kalimantan Selatan	72.733	69.033	94,9	67.175	92,4
23	Kalimantan Timur	60.751	62.470	102,8	58.506	96,3
24	Kalimantan Utara	12.987	12.820	98,7	12.115	93,3
25	Sulawesi Utara	37.097	27.906	75,2	20.617	55,6
26	Sulawesi Tengah	58.725	52.551	89,5	51.027	86,9
27	Sulawesi Selatan	144.079	153.480	106,5	145.949	101,3
28	Sulawesi Tenggara	53.593	48.354	90,2	46.756	87,2
29	Gorontalo	20.151	21.206	105,2	18.828	93,4
30	Sulawesi Barat	27.218	25.297	92,9	24.655	90,6
31	Maluku	35.056	32.475	92,6	27.435	78,3
32	Maluku Utara	24.118	21.624	89,7	17.855	74,0
33	Papua Barat	20.343	32.513	159,8	3.488	17,1
34	Papua	65.558	5.486	8,4	31.048	47,4
Indonesia		**4.443.095**	**4.450.131**	**100,2**	**4.276.919**	**96,3**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Keterangan: *KN Lengkap sama dengan indikator SPM "Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir"

Lampiran 35

PERSENTASE BAYI BARU LAHIR MENDAPAT INISIASI MENYUSU DINI (IMD) DAN BAYI MENDAPAT ASI EKSKLUSIF MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

NO	PROVINSI	BAYI BARU LAHIR			BAYI USIA 6 BULAN		
		JUMLAH	MENDAPAT IMD		JUMLAH	DIBERI ASI EKSKLUSIF SAMPAI 6 BULAN	
			JUMLAH	%		JUMLAH	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	86.453	65.693	76,0	79.959	44.262	55,4
2	Sumatera Utara	176.416	118.574	67,2	194.840	82.025	42,1
3	Sumatera Barat	93.315	75.674	81,1	100.951	70.400	69,7
4	Riau	60.914	49.135	80,7	71.424	28.239	39,5
5	Jambi	46.722	43.266	92,6	102.298	64.725	63,3
6	Sumatera Selatan	324.726	272.757	84,0	217.603	98.733	45,4
7	Bengkulu	34.254	27.519	80,3	47.061	31.219	66,3
8	Lampung	132.985	112.184	84,4	261.678	170.068	65,0
9	Kep. Bangka Belitung	24.618	19.829	80,5	26.290	15.364	58,4
10	Kepulauan Riau	39.344	34.227	87,0	36.508	19.591	53,7
11	DKI Jakarta	174.493	171.833	98,5	67.205	46.088	68,6
12	Jawa Barat	813.321	714.948	87,9	954.773	567.552	59,4
13	Jawa Tengah	383.643	317.425	82,7	59.857	40.339	67,4
14	DI Yogyakarta	38.558	34.022	88,2	29.346	21.919	74,7
15	Jawa Timur	513.143	391.243	76,2	421.405	237.217	56,3
16	Banten	201.190	161.511	80,3	159.437	91.821	57,6
17	Bali	63.269	37.812	59,8	41.891	29.713	70,9
18	Nusa Tenggara Barat	96.506	84.286	87,3	158.099	130.343	82,4
19	Nusa Tenggara Timur	91.797	79.185	86,3	122.875	71.021	57,8
20	Kalimantan Barat	114.641	81.767	71,3	65.240	34.021	52,1
21	Kalimantan Tengah	42.449	37.614	88,6	46.021	20.567	44,7
22	Kalimantan Selatan	70.457	58.556	83,1	94.484	51.417	54,4
23	Kalimantan Timur	62.327	46.178	74,1	52.544	28.166	53,6
24	Kalimantan Utara	9.701	8.189	84,4	9.336	4.585	49,1
25	Sulawesi Utara	7.434	5.027	67,6	19.545	5.904	30,2
26	Sulawesi Tengah	52.966	47.536	89,7	64.762	32.191	49,7
27	Sulawesi Selatan	137.698	120.277	87,3	167.870	118.276	70,5
28	Sulawesi Tenggara	28.168	26.418	93,8	35.804	19.342	54,0
29	Gorontalo	20.828	16.941	81,3	32.164	8.684	27,0
30	Sulawesi Barat	23.295	21.234	91,2	25.674	11.761	45,8
31	Maluku	23.506	17.569	74,7	104.350	13.589	13,0
32	Maluku Utara	21.340	18.747	87,8	23.305	13.038	55,9
33	Papua Barat	2.576	1.989	77,2	4.788	1.321	27,6
34	Papua	7.717	6.514	84,4	12.461	1.685	13,5
INDONESIA		**4.020.769**	**3.325.680**	**82,7**	**3.911.849**	**2.225.186**	**56,9**

Sumber: Laporan Rutin 2021

Lampiran 37

CAKUPAN DESA/KELURAHAN *UNIVERSAL CHILD IMMUNIZATION* (UCI) MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa/Kelurahan UCI	% Desa/Kelurahan UCI
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	6.497	1.623	25,0
2	Sumatera Utara	6.110	4.432	72,5
3	Sumatera Barat	1.159	1.907	164,5
4	Riau	1.862		
5	Jambi	1.564		
6	Sumatera Selatan	3.248	2.740	84,4
7	Bengkulu	1.513	1.295	85,6
8	Lampung	2.640		
9	Kepulauan Bangka Belitung	393	317	80,7
10	Kepulauan Riau	417	281	67,4
11	DKI Jakarta	267	267	100,0
12	Jawa Barat	5.957	4.228	71,0
13	Jawa Tengah	8.562	7.333	85,6
14	D I Yogyakarta	438	438	100,0
15	Jawa Timur	8.501	6.132	72,1
16	Banten	1.552	1.068	68,8
17	Bali	716	693	96,8
18	Nusa Tenggara Barat	1.150	855	74,3
19	Nusa Tenggara Timur	3.353	2.596	77,4
20	Kalimantan Barat	2.130	1.217	57,1
21	Kalimantan Tengah	1.571	1.018	64,8
22	Kalimantan Selatan	2.008	1.034	51,5
23	Kalimantan Timur	1.038	750	72,3
24	Kalimantan Utara	482	279	57,9
25	Sulawesi Utara	1.839	280	15,2
26	Sulawesi Tengah	2.017		
27	Sulawesi Selatan	3.048	2.555	83,8
28	Sulawesi Tenggara	2.286	1.668	73,0
29	Gorontalo	729	543	74,5
30	Sulawesi Barat	648	246	38,0
31	Maluku	1.233	805	65,3
32	Maluku Utara	1.181	609	51,6
33	Papua Barat	5.521	692	12,5
34	Papua	1.837	655	35,7
Indonesia		**83.467**	**48.556**	**58,2**

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Keterangan : Data per 1 April 2022

1. Data per 1 April 2022
2. Jumlah desa/kelurahan berdasarkan Kepmendagri No 050-145 Tahun 2022

Lampiran 38

CAKUPAN IMUNISASI HEPATITIS B0 (0 -7 HARI) DAN BCG PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Lahir Hidup			Bayi Dimunisasi																							
					HB0																				BCG					
					< 24 Jam						1 - 7 Hari						Total											
					L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P	
		L	P	L+P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
1	Aceh	52.488	51.563	104.051	35.547	67,7	33.081	64,2	68.628	66,0	9.920	18,9	9.247	17,9	19.167	18,4	45.235	86,2	42.261	82,0	87.496	84,1	29.167	55,6	28.139	54,6	57.306	55,1
2	Sumatera Utara	139.706	138.394	278.100	95.025	68,0	92.024	66,5	187.049	67,3	25.884	18,5	25.158	18,2	51.042	18,4	120.909	86,5	117.182	84,7	238.091	85,6	114.613	82,0	112.095	81,0	226.708	81,5
3	Sumatera Barat	52.363	51.758	104.121	33.539	64,1	31.806	61,5	65.345	62,8	7.568	14,5	7.056	13,6	14.624	14,0	41.107	78,5	38.862	75,1	79.969	76,8	37.162	71,0	35.663	68,9	72.825	69,9
4	Riau	65.962	64.689	130.651	42.282	64,1	40.383	62,4	82.665	63,3	4.505	6,8	4.554	7,0	9.059	6,9	46.787	70,9	44.937	69,5	91.724	70,2	46.531	70,5	45.102	69,7	91.633	70,1
5	Jambi	31.399	31.151	62.550	25.953	82,7	24.704	79,3	50.657	81,0	1.700	5,4	1.573	5,0	3.273	5,2	27.653	88,1	26.277	84,4	53.930	86,2	27.990	89,1	26.847	86,2	54.837	87,7
6	Sumatera Selatan	79.618	78.396	158.014	66.057	83,0	65.418	83,4	131.475	83,2	8.674	10,9	8.697	11,1	17.371	11,0	74.731	93,9	74.115	94,5	148.846	94,2	75.279	94,6	74.454	95,0	149.733	94,8
7	Bengkulu	17.491	17.307	34.798	15.151	86,6	14.115	81,6	29.266	84,1	1.781	10,2	1.729	10,0	3.510	10,1	16.932	96,8	15.844	91,5	32.776	94,2	16.745	95,7	16.140	93,3	32.885	94,5
8	Lampung	72.305	71.885	144.190	58.989	81,6	56.450	78,5	115.439	80,1	8.060	11,1	7.803	10,9	15.863	11,0	67.049	92,7	64.253	89,4	131.302	91,1	62.431	86,3	60.795	84,6	123.226	85,5
9	Kep. Bangka Belitung	12.924	12.699	25.623	12.398	95,9	11.758	92,6	24.156	94,3	126	1,0	139	1,1	265	1,0	12.524	96,9	11.897	93,7	24.421	95,3	11.332	87,7	10.862	85,5	22.194	86,6
10	Kepulauan Riau	23.652	23.465	47.117	18.360	77,6	17.741	75,6	36.101	76,6	833	3,5	796	3,4	1.629	3,5	19.193	81,1	18.537	79,0	37.730	80,1	19.401	82,0	18.863	80,4	38.264	81,2
11	DKI Jakarta	86.264	85.951	172.215	87.524	101,5	92.630	107,8	180.154	104,6	5.031	5,8	5.121	6,0	10.152	5,9	93.800	108,7	98.977	115,2	192.777	111,9	91.385	105,9	96.718	112,5	188.103	109,2
12	Jawa Barat	408.809	406.841	815.650	385.114	94,2	372.113	91,5	757.227	92,8	5	0,0	5	0,0	10	0,0	385.119	94,2	372.118	91,5	757.237	92,8	368.949	90,2	358.020	88,0	726.969	89,1
13	Jawa Tengah	250.668	247.586	498.254	234.673	93,6	223.445	90,2	458.118	91,9	14.262	5,7	13.839	5,6	28.101	5,6	248.935	99,3	237.284	95,8	486.219	97,6	235.384	93,9	224.183	90,5	459.567	92,2
14	D I Yogyakarta	20.921	20.109	41.030	19.318	92,3	18.304	91,0	37.622	91,7	748	3,6	573	2,8	1.321	3,2	21.648	103,5	18.877	93,9	40.525	98,8	20.240	96,7	19.036	94,7	39.276	95,7
15	Jawa Timur	270.730	268.120	538.850	264.558	97,7	252.856	94,3	517.414	96,0	1.088	0,4	840	0,3	1.928	0,4	265.646	98,1	253.696	94,6	519.342	96,4	263.310	97,3	252.158	94,0	515.468	95,7
16	Banten	112.515	110.489	223.004	104.911	93,2	101.844	92,2	206.755	92,7	11.620	10,3	11.074	10,0	22.694	10,2	116.531	103,6	112.918	102,2	229.449	102,9	110.853	98,5	108.440	98,1	219.293	98,3
17	Bali	32.791	32.588	65.379	33.004	100,6	30.854	94,7	63.858	97,7	1.924	5,9	1.848	5,7	3.772	5,8	34.925	106,5	32.678	100,3	67.603	103,4	32.952	100,5	31.265	95,9	64.217	98,2
18	Nusa Tenggara Barat	49.226	48.939	98.165	48.355	98,2	45.593	93,2	93.948	95,7	571	1,2	568	1,2	1.139	1,2	48.926	99,4	46.161	94,3	95.087	96,9	46.631	94,7	44.411	90,7	91.042	92,7
19	Nusa Tenggara Timur	59.586	58.878	118.464	42.085	70,6	39.061	66,3	81.146	68,5	2.190	3,7	2.188	3,7	4.378	3,7	44.275	74,3	41.249	70,1	85.524	72,2	44.661	75,0	42.443	72,1	87.104	73,5
20	Kalimantan Barat	45.670	45.235	90.905	30.964	67,8	30.076	66,5	61.040	67,1	6.794	14,9	6.466	14,3	13.260	14,6	37.758	82,7	36.542	80,8	74.300	81,7	37.204	81,5	35.892	79,3	73.096	80,4
21	Kalimantan Tengah	22.103	21.798	43.901	17.563	79,5	15.784	72,4	33.347	76,0	3.498	15,8	3.424	15,7	6.922	15,8	21.061	95,3	19.208	88,1	40.269	91,7	22.042	99,7	20.538	94,2	42.580	97,0
22	Kalimantan Selatan	36.641	36.092	72.733	23.976	65,4	22.939	63,6	46.915	64,5	8.476	23,1	8.411	23,3	16.887	23,2	32.452	88,6	31.350	86,9	29.779	40,9	31.579	86,2	30.228	83,8	61.807	85,0
23	Kalimantan Timur	30.594	30.157	60.751	27.510	89,9	26.003	86,2	53.513	88,1	3.082	10,1	3.027	10,0	6.109	10,1	30.592	100,0	29.030	96,3	59.622	98,1	31.176	101,9	29.670	98,4	60.846	100,2
24	Kalimantan Utara	6.553	6.434	12.987	4.475	68,3	4.171	64,8	8.646	66,6	680	10,4	614	9,5	1.294	10,0	5.155	78,7	4.785	74,4	9.940	76,5	5.582	85,2	5.135	79,8	10.717	82,5
25	Sulawesi Utara	18.688	18.409	37.097	8.729	46,7	8.392	45,6	17.121	46,2	6.761	36,2	6.497	35,3	13.258	35,7	15.490	82,9	14.889	80,9	30.379	81,9	16.972	90,8	15.720	85,4	32.692	88,1
26	Sulawesi Tengah	29.519	29.206	58.725	19.588	66,4	18.413	63,0	38.001	64,7	5.359	18,2	5.262	18,0	10.621	18,1	24.947	84,5	23.675	81,1	48.622	82,8	24.755	83,9	23.909	81,9	48.664	82,9
27	Sulawesi Selatan	72.856	71.223	144.079	72.398	99,4	68.353	96,0	140.751	97,7	3.330	4,6	3.105	4,4	6.435	4,5	75.728	103,9	71.458	100,3	147.186	102,2	73.926	101,5	71.603	100,5	145.529	101,0
28	Sulawesi Tenggara	26.894	26.699	53.593	23.212	86,3	21.681	81,2	44.893	83,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	23.212	86,3	21.681	81,2	44.893	83,8	24.708	91,9	23.181	86,8	47.889	89,4
29	Gorontalo	10.160	9.991	20.151	8.654	85,2	8.357	83,6	17.011	84,4	428	4,2	502	5,0	930	4,6	8.319	81,9	8.138	81,5	16.457	81,7	8.808	86,7	8.509	85,2	17.317	85,9
30	Sulawesi Barat	13.663	13.555	27.218	10.015	73,3	9.399	69,3	19.414	71,3	1.178	8,6	1.114	8,2	2.292	8,4	11.193	81,9	10.513	77,6	21.706	79,7	10.829	79,3	10.285	75,9	21.114	77,6
31	Maluku	17.575	17.481	35.056	9.410	53,5	9.095	52,0	18.505	52,8	3.475	19,8	3.193	18,3	6.668	19,0	12.885	73,3	12.288	70,3	25.173	71,8	14.425	82,1	13.664	78,2	28.089	80,1
32	Maluku Utara	12.132	11.986	24.118	9.637	79,4	8.878	74,1	18.515	76,8	1.201	9,9	1.139	9,5	2.340	9,7	9.850	81,2	9.133	76,2	18.983	78,7	10.545	86,9	9.765	81,5	20.310	84,2
33	Papua Barat	10.114	10.229	20.343	3.290	32,5	3.091	30,2	6.381	31,4	3.109	30,7	3.040	29,7	6.149	30,2	6.399	63,3	6.131	59,9	12.530	61,6	8.117	80,3	7.821	76,5	15.938	78,3
34	Papua	33.073	32.484	65.557	9.950	30,1	9.085	28,0	19.035	29,0	7.845	23,7	7.303	22,5	15.148	23,1	17.795	53,8	16.388	50,4	34.183	52,1	21.764	65,8	20.287	62,5	42.051	64,1
	Indonesia	**2.225.653**	**2.201.787**	**4.427.440**	**1.902.214**	**85,5**	**1.827.897**	**83,0**	**3.730.111**	**84,2**	**161.706**	**7,3**	**155.905**	**7,1**	**317.611**	**7,2**	**2.064.761**	**92,8**	**1.983.332**	**90,1**	**4.014.070**	**90,7**	**1.997.448**	**89,7**	**1.931.841**	**87,7**	**3.929.289**	**88,7**

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Keterangan : Data per 1 April 2022

Lampiran 39.a

CAKUPAN IMUNISASI DPT-HB-Hib 3, POLIO 4*, CAMPAK RUBELA, DAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Bayi *(Surviving Infant)*			Bayi Diimunisasi																							
					DPT-HB-Hib3						Polio 4*						Campak Rubela						Imunisasi Dasar Lengkap					
		L	P	L+P	L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P		L		P		L + P	
					Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)
1	Aceh	51.202	50.322	101.524	23.767	46,4	23.247	46,2	47.014	46,3	26.084	50,9	25.548	50,8	51.632	50,9	22.589	44,1	21.837	43,4	44.426	43,8	22.033	43,0	21.305	42,3	43.338	42,7
2	Sumatera Utara	134.248	133.288	267.536	108.643	80,9	107.447	80,6	216.090	80,8	112.348	83,7	112.547	84,4	224.895	84,1	116.850	87,0	114.851	86,2	231.701	86,6	109.386	81,5	107.026	80,3	216.412	80,9
3	Sumatera Barat	51.224	50.645	101.869	32.454	63,4	31.515	62,2	63.969	62,8	31.391	61,3	30.785	60,8	62.176	61,0	31.303	61,1	30.534	60,3	61.837	60,7	30.098	58,8	29.368	58,0	59.466	58,4
4	Riau	62.996	61.763	124.759	40.887	64,9	39.235	63,5	80.122	64,2	42.110	66,8	40.427	65,5	82.537	66,2	43.957	69,8	42.013	68,0	85.970	68,9	40.095	63,6	38.386	62,2	78.481	62,9
5	Jambi	30.367	30.126	60.493	25.230	83,1	24.500	81,3	49.730	82,2	26.004	85,6	25.119	83,4	51.123	84,5	27.689	91,2	26.269	87,2	53.958	89,2	26.780	88,2	25.363	84,2	52.143	86,2
6	Sumatera Selatan	80.926	79.695	160.621	67.332	83,2	66.878	83,9	134.210	83,6	71.125	87,9	70.425	88,4	141.550	88,1	74.606	92,2	73.821	92,6	148.427	92,4	71.881	88,8	71.099	89,2	142.980	89,0
7	Bengkulu	16.946	16.771	33.717	14.971	88,3	14.351	85,6	29.322	87,0	15.078	89,0	14.749	87,9	29.827	88,5	16.170	95,4	15.434	92,0	31.604	93,7	16.238	95,8	15.480	92,3	31.718	94,1
8	Lampung	69.734	69.342	139.076	60.069	86,1	58.476	84,3	118.545	85,2	61.729	88,5	60.128	86,7	121.857	87,6	68.026	97,6	66.669	96,1	134.695	96,8	63.293	90,8	61.755	89,1	125.048	89,9
9	Kep. Bangka Belitung	12.474	12.251	24.725	9.271	74,3	9.079	74,1	18.350	74,2	9.570	76,7	9.413	76,8	18.983	76,8	10.933	87,6	10.594	86,5	21.527	87,1	10.940	87,7	10.640	86,9	21.580	87,3
10	Kepulauan Riau	22.636	22.481	45.117	18.298	80,8	17.888	79,6	36.186	80,2	18.306	80,9	17.924	79,7	36.230	80,3	18.668	82,5	18.226	81,1	36.894	81,8	18.539	81,9	18.162	80,8	36.701	81,3
11	DKI Jakarta	87.035	86.711	173.746	56.459	64,9	54.128	62,4	110.587	63,6	56.063	64,4	53.842	62,1	109.905	63,3	55.996	64,3	53.840	62,1	109.836	63,2	56.074	64,4	53.903	62,2	109.977	63,3
12	Jawa Barat	396.748	394.895	791.643	359.207	90,5	351.069	88,9	710.276	89,7	350.758	88,4	344.094	87,1	694.852	87,8	384.547	96,9	373.612	94,6	758.159	95,8	361.056	91,0	350.090	88,7	711.146	89,8
13	Jawa Tengah	243.168	240.311	483.479	189.379	77,9	181.691	75,6	371.070	76,7	190.236	78,2	182.994	76,1	373.230	77,2	224.896	92,5	215.088	89,5	439.984	91,0	218.784	90,0	210.568	87,6	429.352	88,8
14	D I Yogyakarta	20.756	19.992	40.748	20.144	97,1	18.855	94,3	38.999	95,7	20.099	TAD	18.905	TAD	39.004	TAD	20.072	96,7	18.703	93,6	38.775	95,2	20.035	96,5	18.802	94,0	38.837	95,3
15	Jawa Timur	287.669	284.872	572.541	219.130	76,2	211.484	74,2	430.614	75,2	235.334	81,8	227.680	79,9	463.014	80,9	257.839	89,6	247.248	86,8	505.087	88,2	263.087	91,5	253.727	89,1	516.814	90,3
16	Banten	109.590	107.719	217.309	104.308	95,2	102.008	94,7	206.316	94,9	104.879	95,7	102.692	95,3	207.571	95,5	107.498	98,1	104.897	97,4	212.395	97,7	104.113	95,0	101.857	94,6	205.970	94,8
17	Bali	32.481	32.297	64.778	31.191	96,0	29.455	91,2	60.646	93,6	31.367	96,6	29.594	91,6	60.961	94,1	32.890	101,3	31.194	96,6	64.084	98,9	32.942	101,4	31.076	96,2	64.018	98,8
18	Nusa Tenggara Barat	49.017	48.741	97.758	42.105	85,9	40.354	82,8	82.459	84,4	39.606	80,8	37.910	77,8	77.516	79,3	48.735	99,4	46.665	95,7	95.400	97,6	47.675	97,3	45.640	93,6	93.315	95,5
19	Nusa Tenggara Timur	59.370	58.690	118.060	41.463	69,8	39.374	67,1	80.837	68,5	43.189	72,7	41.111	70,0	84.300	71,4	44.926	75,7	43.292	73,8	88.218	74,7	44.395	74,8	42.390	72,2	86.785	73,5
20	Kalimantan Barat	44.347	43.923	88.270	32.943	74,3	31.860	72,5	64.803	73,4	31.007	69,9	30.045	68,4	61.052	69,2	34.269	77,3	32.695	74,4	66.964	75,9	33.350	75,2	31.785	72,4	65.135	73,8
21	Kalimantan Tengah	22.510	22.206	44.716	19.129	85,0	18.107	81,5	37.236	83,3	19.514	86,7	18.458	83,1	37.972	84,9	20.190	89,7	18.751	84,4	38.941	87,1	19.685	87,5	18.273	82,3	37.958	84,9
22	Kalimantan Selatan	35.535	35.008	70.543	28.493	80,2	27.237	77,8	55.730	79,0	27.939	78,6	26.884	76,8	54.823	77,7	28.869	81,2	27.610	78,9	56.479	80,1	29.004	81,6	27.560	78,7	56.564	80,2
23	Kalimantan Timur	30.472	30.042	60.514	27.015	88,7	26.366	87,8	53.381	88,2	27.307	89,6	26.652	88,7	53.959	89,2	27.902	91,6	26.831	89,3	54.733	90,4	27.733	91,0	26.704	88,9	54.437	90,0
24	Kalimantan Utara	6.277	6.179	12.456	4.433	70,6	4.250	68,8	8.683	69,7	4.492	71,6	4.240	68,6	8.732	70,1	4.655	74,2	4.337	70,2	8.992	72,2	4.555	72,6	4.291	69,4	8.846	71,0
25	Sulawesi Utara	19.134	18.851	37.985	14.561	76,1	13.923	73,9	28.484	75,0	15.217	79,5	14.614	77,5	29.831	78,5	16.408	85,8	15.629	82,9	32.037	84,3	15.849	82,8	15.055	79,9	30.904	81,4
26	Sulawesi Tengah	27.969	27.697	55.666	24.167	86,4	23.049	83,2	47.216	84,8	23.986	85,8	22.798	82,3	46.784	84,0	25.178	90,0	24.284	87,7	49.462	88,9	24.991	89,4	23.904	86,3	48.895	87,8
27	Sulawesi Selatan	70.187	68.651	138.838	67.006	95,5	65.006	94,7	132.012	95,1	68.068	97,0	66.119	96,3	134.187	96,7	73.026	104,0	70.287	102,4	143.313	103,2	70.645	100,7	68.162	99,3	138.807	100,0
28	Sulawesi Tenggara	27.327	27.172	54.499	20.531	75,1	17.931	66,0	38.462	70,6	21.032	77,0	20.084	73,9	41.116	75,4	24.622	90,1	23.339	85,9	47.961	88,0	23.395	85,6	22.061	81,2	45.456	83,4
29	Gorontalo	9.596	9.445	19.041	8.199	85,4	8.052	85,3	16.251	85,3	8.237	85,8	8.037	85,1	16.274	85,5	8.957	93,3	8.659	91,7	17.616	92,5	8.697	90,6	8.430	89,3	17.127	89,9
30	Sulawesi Barat	13.261	13.165	26.426	9.507	71,7	9.137	69,4	18.644	70,6	9.009	67,9	8.670	65,9	17.679	66,9	10.584	79,8	10.002	76,0	20.586	77,9	10.395	78,4	9.799	74,4	20.194	76,4
31	Maluku	16.833	16.742	33.575	13.286	78,9	12.870	76,9	26.156	77,9	13.121	77,9	13.015	77,7	26.136	77,8	13.499	80,2	13.045	77,9	26.544	79,1	12.526	74,4	11.974	71,5	24.500	73,0
32	Maluku Utara	11.655	11.520	23.175	9.870	84,7	9.332	81,0	19.202	82,9	9.495	81,5	9.106	79,0	18.601	80,3	10.158	87,2	9.553	82,9	19.711	85,1	9.720	83,4	9.054	78,6	18.774	81,0
33	Papua Barat	9.550	9.651	19.201	5.891	61,7	5.697	59,0	11.588	60,4	4.250	44,5	4.088	42,4	8.338	43,4	6.797	71,2	6.664	69,0	13.461	70,1	5.855	61,3	5.743	59,5	11.598	60,4
34	Papua	31.633	31.191	62.824	19.880	62,8	19.030	61,0	38.910	61,9	19.873	62,8	18.759	60,1	38.632	61,5	20.180	63,8	18.930	60,7	39.110	62,3	17.210	54,4	16.424	52,7	33.634	53,5
	Indonesia	**2.194.873**	**2.172.355**	**4.367.228**	**1.769.219**	**80,6**	**1.712.881**	**78,8**	**3.482.100**	**79,7**	**1.787.823**	**81,5**	**1.737.456**	**80,0**	**3.525.279**	**80,7**	**1.933.484**	**88,1**	**1.865.403**	**85,9**	**3.798.887**	**87,0**	**1.871.054**	**85,2**	**1.805.856**	**83,1**	**3.676.910**	**84,2**

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Keterangan:

*khusus untuk provinsi DIY, diisi dengan imunisasi IPV dosis ke 3

** Data per 1 April 2022

Lampiran 39.b

***DROP OUT RATE* CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HiB(1) - CAMPAK RUBELA DAN CAKUPAN IMUNISASI DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3) PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019-2021**

No	Provinsi	2019		2020		2021	
		DPT/HB/HiB(1)-Campak Rubela	DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3)	DPT/HB/HiB(1)-Campak Rubela	DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3)	DPT/HB/HiB(1)-Campak Rubela	DPT/HB/HiB(1) - DPT/HB/HiB(3)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	20,1	9,8	21,5	10,8	12,3	7,2
2	Sumatera Utara	2,5	1,5	6,4	3,4	-1,9	5,0
3	Sumatera Barat	15,3	5,2	10,1	8,0	11,0	8,0
4	Riau	5,6	3,9	9,0	3,6	0,5	7,3
5	Jambi	1,4	1,4	11,5	2,7	-0,5	7,4
6	Sumatera Selatan	1,8	0,5	1,3	1,5	-7,3	3,0
7	Bengkulu	7,6	4,2	2,9	3,1	1,2	8,3
8	Lampung	3,0	0,7	3,2	-0,1	-8,1	4,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	3,8	4,5	3,2	4,3	-3,1	12,1
10	Kepulauan Riau	3,2	0,3	0,3	4,1	1,9	3,8
11	DKI Jakarta	-0,1	0,4	-8,2	0,4	1,4	0,7
12	Jawa Barat	2,5	0,6	3,5	2,8	-3,8	2,8
13	Jawa Tengah	1,2	0,4	1,0	0,9	-4,0	12,2
14	DI Yogyakarta	1,3	0,4	1,4	0,4	2,2	1,7
15	Jawa Timur	2,2	1,1	1,9	1,4	-6,3	9,4
16	Banten	4,0	3,0	4,2	3,7	1,1	3,9
17	Bali	5,2	4,8	4,8	3,1	-0,2	5,2
18	Nusa Tenggara Barat	2,5	0,8	8,4	3,6	-4,2	9,9
19	Nusa Tenggara Timur	6,7	1,1	2,8	1,0	-1,0	7,4
20	Kalimantan Barat	6,5	4,4	7,4	8,2	5,5	8,5
21	Kalimantan Tengah	5,5	5,0	9,3	8,5	4,1	8,3
22	Kalimantan Selatan	2,8	1,8	8,2	6,3	5,9	7,2
23	Kalimantan Timur	5,2	4,2	9,9	6,9	7,0	9,3
24	Kalimantan Utara	9,9	6,1	11,9	12,7	16,1	19,0
25	Sulawesi Utara	4,8	2,1	7,6	5,0	-1,0	10,2
26	Sulawesi Tengah	3,5	2,5	5,3	4,8	2,4	6,9
27	Sulawesi Selatan	2,6	0,8	3,7	5,4	-0,3	7,6
28	Sulawesi Tenggara	2,8	4,6	3,7	7,0	-0,9	19,1
29	Gorontalo	0,0	3,5	6,2	9,7	3,1	10,6
30	Sulawesi Barat	2,9	3,8	6,0	6,8	4,1	13,2
31	Maluku	5,7	1,7	3,2	3,9	7,6	9,0
32	Maluku Utara	5,5	3,5	10,1	6,8	3,4	5,9
33	Papua Barat	10,5	5,2	16,1	12,0	4,2	17,5
34	Papua	24,8	11,8	12,8	13,0	9,6	10,1
Indonesia		**3,6**	**1,8**	**4,1**	**3,2**	**-1,6**	**6,9**

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Keterangan : Data per 1 April 2022

Lampiran 39.c

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENCAPAI 80% IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI MENURUT PROVINSI TAHUN 2019-2021

No	Provinsi	Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		Jumlah Kab/Kota	Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap	%	Jumlah Kab/Kota	Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap	%	Jumlah Kab/Kota	Mencapai 80% Imunisasi Dasar Lengkap	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Aceh	23	3	13,0	23	2	8,7	23	2	8,7
2	Sumatera Utara	33	20	60,6	33	9	27,3	33	14	42,4
3	Sumatera Barat	19	8	42,1	19	0	0,0	19	2	10,5
4	Riau	12	6	50,0	12	2	16,7	12	2	16,7
5	Jambi	11	11	100,0	11	11	100,0	11	7	63,6
6	Sumatera Selatan	17	17	100,0	17	16	94,1	17	16	94,1
7	Bengkulu	10	10	100,0	10	9	90,0	10	10	100,0
8	Lampung	15	15	100,0	15	14	93,3	15	12	80,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	4	57,1	7	4	57,1	7	4	57,1
10	Kepulauan Riau	7	6	85,7	7	6	85,7	7	5	71,4
11	DKI Jakarta	6	6	100,0	6	2	33,3	6	2	33,3
12	Jawa Barat	27	27	100,0	27	23	85,2	27	21	77,8
13	Jawa Tengah	35	35	100,0	35	34	97,1	35	26	74,3
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0	5	5	100,0	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	37	97,4	38	36	94,7	38	26	68,4
16	Banten	8	8	100,0	8	6	75,0	8	7	87,5
17	Bali	9	9	100,0	9	9	100,0	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0	10	8	80,0	10	8	80,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	6	27,3	22	6	27,3	22	9	40,9
20	Kalimantan Barat	14	6	42,9	14	4	28,6	14	4	28,6
21	Kalimantan Tengah	14	9	64,3	14	6	42,9	14	11	78,6
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,0	13	5	38,5	13	7	53,8
23	Kalimantan Timur	10	9	90,0	10	9	90,0	10	9	90,0
24	Kalimantan Utara	5	2	40,0	5	1	20,0	5	3	60,0
25	Sulawesi Utara	15	11	73,3	15	8	53,3	15	8	53,3
26	Sulawesi Tengah	13	12	92,3	13	8	61,5	13	8	61,5
27	Sulawesi Selatan	24	21	87,5	24	13	54,2	24	22	91,7
28	Sulawesi Tenggara	17	14	82,4	17	13	76,5	17	11	64,7
29	Gorontalo	6	5	83,3	6	1	16,7	6	5	83,3
30	Sulawesi Barat	6	3	50,0	6	1	16,7	6	3	50,0
31	Maluku	11	5	45,5	11	4	36,4	11	5	45,5
32	Maluku Utara	10	5	50,0	10	2	20,0	10	5	50,0
33	Papua Barat	13	8	61,5	13	4	30,8	13	3	23,1
34	Papua	29	12	41,4	29	8	27,6	29	7	24,1
Indonesia		**514**	**378**	**73,5**	**514**	**289**	**56,2**	**514**	**298**	**58,0**

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Keterangan : Data per 1 April 2022

Lampiran 40.a

CAKUPAN IMUNISASI LANJUTAN DPT-HB-Hib 4 DAN CAMPAK RUBELA 2 PADA ANAK USIA DIBAWAH DUA TAHUN (BADUTA)
MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Baduta			Baduta Diimunisasi											
					DPT-HB-Hib4						Campak Rubela 2					
					L		P		L + P		L		P		L + P	
		L	P	L+P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	57.654	55.310	112.964	8.920	15,5	8.676	15,7	17.596	15,6	7.527	13,1	7.474	13,5	15.001	13,3
2	Sumatera Utara	149.341	143.549	292.890	82.577	55,3	79.967	55,7	162.544	55,5	83.584	56,0	81.250	56,6	164.834	56,3
3	Sumatera Barat	54.361	52.166	106.527	15.699	28,9	15.575	29,9	31.274	29,4	14.688	27,0	14.543	27,9	29.231	27,4
4	Riau	77.649	74.415	152.064	25.712	33,1	24.907	33,5	50.619	33,3	25.128	32,4	24.705	33,2	49.833	32,8
5	Jambi	32.608	31.227	63.835	20.107	61,7	19.118	61,2	39.225	61,4	20.358	62,4	19.516	62,5	39.874	62,5
6	Sumatera Selatan	78.990	75.846	154.836	59.423	75,2	59.098	77,9	118.521	76,5	77.335	97,9	77.985	102,8	155.320	100,3
7	Bengkulu	18.354	17.623	35.977	12.993	70,8	12.521	71,0	25.514	70,9	12.476	68,0	12.418	70,5	24.894	69,2
8	Lampung	73.960	70.987	144.947	51.102	69,1	49.779	70,1	100.881	69,6	56.747	76,7	55.487	78,2	112.234	77,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	13.758	13.190	26.948	7.375	53,6	6.860	52,0	14.235	52,8	7.047	51,2	6.626	50,2	13.673	50,7
10	Kepulauan Riau	20.683	19.882	40.565	14.886	72,0	14.715	74,0	29.601	73,0	14.293	69,1	14.282	71,8	28.575	70,4
11	DKI Jakarta	84.176	80.749	164.925	74.843	88,9	72.994	90,4	147.837	89,6	74.987	89,1	72.609	89,9	147.596	89,5
12	Jawa Barat	438.968	419.530	858.498	274.516	62,5	267.769	63,8	542.285	63,2	283.674	64,6	277.084	66,0	560.758	65,3
13	Jawa Tengah	264.349	251.281	515.630	91.027	34,4	85.581	34,1	176.608	34,3	91.545	34,6	86.111	34,3	177.656	34,5
14	D I Yogyakarta	21.124	20.908	42.032	19.897	94,2	18.528	88,6	38.425	91,4	19.575	92,7	18.152	86,8	37.727	89,8
15	Jawa Timur	282.804	271.041	553.845	169.268	59,9	162.045	59,8	331.313	59,8	198.785	70,3	192.207	70,9	390.992	70,6
16	Banten	119.818	115.073	234.891	78.144	65,2	76.890	66,8	155.034	66,0	80.306	67,0	78.941	68,6	159.247	67,8
17	Bali	32.456	31.110	63.566	26.267	80,9	24.735	79,5	51.002	80,2	25.625	79,0	24.264	78,0	49.889	78,5
18	Nusa Tenggara Barat	50.385	48.361	98.746	31.881	63,3	30.090	62,2	61.971	62,8	32.296	64,1	31.010	64,1	63.306	64,1
19	Nusa Tenggara Timur	68.712	66.028	134.740	34.568	50,3	33.111	50,1	67.679	50,2	34.555	50,3	33.101	50,1	67.656	50,2
20	Kalimantan Barat	49.540	47.484	97.024	23.803	48,0	22.637	47,7	46.440	47,9	22.879	46,2	22.204	46,8	45.083	46,5
21	Kalimantan Tengah	26.387	25.426	51.813	13.700	51,9	13.040	51,3	26.740	51,6	12.744	48,3	12.310	48,4	25.054	48,4
22	Kalimantan Selatan	39.463	37.877	77.340	20.290	51,4	19.837	52,4	40.127	51,9	18.878	47,8	18.820	49,7	37.698	48,7
23	Kalimantan Timur	36.047	34.453	70.500	20.083	55,7	18.996	55,1	39.079	55,4	18.856	52,3	18.181	52,8	37.037	52,5
24	Kalimantan Utara	7.938	7.561	15.499	3.076	38,8	2.802	37,1	5.878	37,9	2.983	37,6	2.690	35,6	5.673	36,6
25	Sulawesi Utara	20.364	19.510	39.874	11.084	54,4	10.282	52,7	21.366	53,6	11.246	55,2	10.547	54,1	21.793	54,7
26	Sulawesi Tengah	30.843	29.561	60.404	16.824	54,5	16.067	54,4	32.891	54,5	15.439	50,1	15.246	51,6	30.685	50,8
27	Sulawesi Selatan	83.416	79.920	163.336	59.776	71,7	53.664	67,1	113.440	69,5	56.702	68,0	54.756	68,5	111.458	68,2
28	Sulawesi Tenggara	31.159	29.807	60.966	15.968	51,2	15.015	50,4	30.983	50,8	15.055	48,3	14.713	49,4	29.768	48,8
29	Gorontalo	11.797	11.297	23.094	6.167	52,3	6.183	54,7	12.350	53,5	5.648	47,9	5.785	51,2	11.433	49,5
30	Sulawesi Barat	16.033	15.415	31.448	7.313	45,6	7.090	46,0	14.403	45,8	6.926	43,2	6.560	42,6	13.486	42,9
31	Maluku	21.804	20.954	42.758	11.073	50,8	10.653	50,8	21.726	50,8	10.036	46,0	10.099	48,2	20.135	47,1
32	Maluku Utara	14.411	13.828	28.239	6.718	46,6	6.321	45,7	13.039	46,2	6.265	43,5	5.981	43,3	12.246	43,4
33	Papua Barat	10.699	10.319	21.018	4.084	38,2	3.864	37,4	7.948	37,8	4.342	40,6	4.518	43,8	8.860	42,2
34	Papua	34.716	33.654	68.370	13.110	37,8	12.510	37,2	25.620	37,5	11.853	34,1	11.520	34,2	23.373	34,2
Indonesia		**2.374.767**	**2.275.342**	**4.650.109**	**1.332.273**	**56,1**	**1.281.920**	**56,3**	**2.614.193**	**56,2**	**1.380.383**	**58,1**	**1.341.695**	**59,0**	**2.722.078**	**58,5**

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022
Keterangan : Data per 1 April 2022

Lampiran 40.b

CAKUPAN IMUNISASI ANAK SEKOLAH MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Sasaran (Siswa SD/Sederajat)*			Campak Rubela (Kelas 1)		DT (Kelas 1)		Td (Kelas 2)		Td (Kelas 5)	
		Kelas 1	Kelas 2	Kelas 5	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Aceh	101.475	101.411	101.130	15.637	15,4	16.303	16,1	16.335	16,1	17.843	17,6
2	Sumatera Utara	275.385	276.032	277.201	105.712	38,4	100.422	36,5	102.640	37,2	106.642	38,5
3	Sumatera Barat	103.787	103.645	102.746	38.383	37,0	21.173	20,4	20.839	20,1	22.243	21,6
4	Riau	132.238	134.612	143.622	75.576	57,2	69.643	52,7	76.314	56,7	90.322	62,9
5	Jambi	60.666	60.573	60.151	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
6	Sumatera Selatan	155.205	154.158	150.689	141.803	91,4	117.846	75,9	119.202	77,3	119.989	79,6
7	Bengkulu	33.224	33.175	33.079	31.034	93,4	30.591	92,1	31.113	93,8	31.533	95,3
8	Lampung	143.337	143.726	144.627	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	24.857	24.749	24.280	9.259	37,2	9.122	36,7	8.698	35,1	9.247	38,1
10	Kepulauan Riau	40.738	40.159	39.224	23.641	58,0	23.762	58,3	23.818	59,3	25.337	64,6
11	DKI Jakarta	162.567	159.173	146.535	120.392	74,1	120.489	74,1	128.191	80,5	134.206	91,6
12	Jawa Barat	798.193	803.875	825.643	521.395	65,3	554.628	69,5	576.440	71,7	593.283	71,9
13	Jawa Tengah	510.288	516.713	536.910	244.672	47,9	183.217	35,9	193.759	37,5	202.974	37,8
14	DI Yogyakarta	53.433	52.835	52.177	44.912	84,1	41.272	77,2	42.646	80,7	46.521	89,2
15	Jawa Timur	546.691	547.358	552.417	431.886	79,0	445.766	81,5	441.162	80,6	469.475	85,0
16	Banten	219.684	219.619	219.460	154.852	70,5	171.983	78,3	179.108	81,6	177.221	80,8
17	Bali	61.826	62.697	67.055	63.441	102,6	63.393	102,5	63.607	101,5	65.714	98,0
18	Nusa Tenggara Barat	96.203	95.382	92.403	58.529	60,8	62.214	64,7	60.273	63,2	60.452	65,4
19	Nusa Tenggara Timur	109.663	108.413	104.578	92.512	84,4	85.829	78,3	89.203	82,3	92.417	88,4
20	Kalimantan Barat	87.953	88.020	88.390	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
21	Kalimantan Tengah	44.940	44.923	44.932	36.247	80,7	40.653	90,5	29.166	64,9	28.254	62,9
22	Kalimantan Selatan	77.423	77.129	75.018	45.786	59,1	42.512	54,9	45.091	58,5	48.478	64,6
23	Kalimantan Timur	59.877	59.711	59.188	47.463	79,3	46.736	78,1	48.327	80,9	50.035	84,5
24	Kalimantan Utara	12.598	12.575	12.483	8.376	66,5	7.959	63,2	8.166	64,9	7.475	59,9
25	Sulawesi Utara	39.515	39.431	38.805	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
26	Sulawesi Tengah	55.541	55.232	54.067	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
27	Sulawesi Selatan	144.160	144.538	145.309	113.862	79,0	114.392	79,4	117.619	81,4	117.436	80,8
28	Sulawesi Tenggara	51.174	51.122	51.203	43.904	85,8	42.912	83,9	49.461	96,8	46.483	90,8
29	Gorontalo	19.587	19.638	19.771	8.991	45,9	8.959	45,7	9.709	49,4	9.608	48,6
30	Sulawesi Barat	26.167	26.054	25.663	14.549	55,6	15.334	58,6	15.988	61,4	16.066	62,6
31	Maluku	33.308	33.302	33.292	17.457	52,4	15.807	47,5	15.068	45,2	15.110	45,4
32	Maluku Utara	23.170	23.194	23.334	12.120	52,3	11.217	48,4	11.222	48,4	11.582	49,6
33	Papua Barat	18.678	18.611	18.458	9.376	50,2	8.864	47,5	7.806	41,9	7.530	40,8
34	Papua	62.089	61.824	60.933	30.783	49,6	30.998	49,9	30.111	48,7	28.267	46,4
Indonesia		**4.385.640**	**4.393.609**	**4.424.773**	**2.562.550**	**58,4**	**2.503.996**	**57,1**	**2.561.082**	**58,3**	**2.651.743**	**59,9**

Sumber : Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Keterangan : Data per 1 April 2022

Lampiran 41

CAKUPAN PEMBERIAN VITAMIN A PADA BAYI DAN ANAK BALITA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Bayi 6-11 Bulan			Anak Balita (12-59 Bulan)			Balita (6-59 Bulan)		
		Jumlah	Mendapat Vit A		Jumlah	Mendapat Vit A		Jumlah	Mendapat Vit A	
			S	%		S	%		S	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	99.998	93.482	93,5	309.626	292.853	94,6	409.623	386.335	94,3
2	Sumatera Utara	216.957	196.757	90,7	695.351	634.483	91,2	912.308	831.240	91,1
3	Sumatera Barat	91.971	82.827	90,1	321.483	288.190	89,6	413.454	371.017	89,7
4	Riau	67.257	51.792	77,0	290.447	208.339	71,7	357.704	260.131	72,7
5	Jambi	40.728	37.210	91,4	123.519	114.662	92,8	164.247	151.872	92,5
6	Sumatera Selatan	119.960	93.912	78,3	490.140	404.856	82,6	610.100	498.768	81,8
7	Bengkulu	32.124	29.944	93,2	97.230	88.611	91,1	129.354	118.555	91,7
8	Lampung	145.572	135.093	92,8	450.406	421.403	93,6	595.978	556.496	93,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	25.693	23.015	89,6	90.640	79.764	88,0	116.333	102.779	88,3
10	Kepulauan Riau	43.085	32.580	75,6	139.054	105.865	76,1	182.139	138.445	76,0
11	DKI Jakarta	136.026	89.264	65,6	614.301	431.376	70,2	750.327	520.640	69,4
12	Jawa Barat	741.784	716.741	96,6	2.690.942	2.599.997	96,6	3.432.726	3.316.738	96,6
13	Jawa Tengah	568.586	560.540	98,6	1.948.802	1.920.238	98,5	2.517.388	2.480.778	98,5
14	DI Yogyakarta	39.647	39.624	99,9	162.501	162.455	100,0	202.148	202.079	100,0
15	Jawa Timur	536.557	467.655	87,2	1.901.321	1.725.098	90,7	2.437.878	2.192.753	89,9
16	Banten	182.483	171.372	93,9	693.006	627.639	90,6	875.489	799.011	91,3
17	Bali	54.911	53.541	97,5	175.744	170.684	97,1	230.655	224.225	97,2
18	Nusa Tenggara Barat	111.182	108.071	97,2	369.245	356.821	96,6	480.427	464.892	96,8
19	Nusa Tenggara Timur	100.853	94.021	93,2	346.425	321.981	92,9	447.278	416.002	93,0
20	Kalimantan Barat	90.563	73.394	81,0	332.324	254.102	76,5	422.887	327.496	77,4
21	Kalimantan Tengah	47.058	39.263	83,4	162.013	126.578	78,1	209.071	165.841	79,3
22	Kalimantan Selatan	64.311	58.176	90,5	248.863	220.739	88,7	313.174	278.915	89,1
23	Kalimantan Timur	58.513	44.636	76,3	238.145	172.801	72,6	296.658	217.437	73,3
24	Kalimantan Utara	10.704	7.648	71,4	42.746	28.459	66,6	53.450	36.107	67,6
25	Sulawesi Utara	8.511	7.876	92,5	23.834	20.973	88,0	32.345	28.849	89,2
26	Sulawesi Tengah	51.993	46.697	89,8	182.081	156.788	86,1	234.074	203.485	86,9
27	Sulawesi Selatan	143.657	132.951	92,5	474.729	440.226	92,7	618.386	573.177	92,7
28	Sulawesi Tenggara	35.239	28.705	81,5	109.014	80.839	74,2	144.253	109.544	75,9
29	Gorontalo	21.512	18.531	86,1	69.034	64.056	92,8	90.546	82.587	91,2
30	Sulawesi Barat	23.080	18.059	78,2	92.539	73.172	79,1	115.619	91.231	78,9
31	Maluku	30.483	22.544	74,0	92.932	69.867	75,2	123.415	92.411	74,9
32	Maluku Utara	37.300	32.424	86,9	70.375	58.282	82,8	107.675	90.706	84,2
33	Papua Barat	11.062	4.474	40,4	24.687	6.661	27,0	35.749	11.135	31,1
34	Papua	14.171	5.010	35,4	51.857	9.534	18,4	66.028	14.544	22,0
Indonesia		**4.003.528**	**3.617.825**	**90,4**	**14.125.350**	**12.738.385**	**90,2**	**18.128.878**	**16.356.211**	**90,2**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, 2022

Keterangan: Pelaporan pemberian vitamin A dilakukan pada Februari dan Agustus, maka perhitungan bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A dalam setahun dihitung dengan mengakumulasi bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A di bulan Februari dan yang mendapat vitamin A di bulan Agustus.
Untuk perhitungan anak balita 12-59 bulan yang mendapat vitamin A menggunakan data bulan Agustus.

Lampiran 42

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BALITA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Sasaran Balita	Balita Memiliki Buku KIA		Balita Dipantau Pertumbuhan dan Perkembangannya		Balita Dilayani SDIDTK		Balita Dilayani MTBS*	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	508.364	385.347	75,8	369.968	72,8	276.237	54,3	133.181	21,1
2	Sumatera Utara	1.352.284	913.719	67,6	814.006	60,2	454.881	33,6	205.292	28,4
3	Sumatera Barat	514.865	408.644	79,4	336.322	65,3	350.772	68,1	140.852	39,8
4	Riau	640.238	398.903	62,3	375.356	58,6	316.841	49,5	126.945	14,6
5	Jambi	303.093	232.978	76,9	216.104	71,3	189.729	62,6	127.005	52,9
6	Sumatera Selatan	795.604	480.076	60,3	637.104	80,1	655.413	82,4	187.707	24,1
7	Bengkulu	167.985	138.429	82,4	109.663	65,3	64.990	38,7	24.634	23,1
8	Lampung	703.591	671.677	95,5	465.430	66,2	595.881	84,7	262.013	39,5
9	Kep. Bangka Belitung	124.139	81.018	65,3	84.234	67,9	79.041	63,7	38.721	97,4
10	Kepulauan Riau	222.314	112.094	50,4	144.386	64,9	58.486	26,3	24.441	75,6
11	DKI Jakarta	847.779	675.926	79,7	668.761	78,9	590.497	69,7	224.639	99,1
12	Jawa Barat	3.951.623	4.351.341	110,1	2.994.816	75,8	2.515.143	63,6	1.387.034	57,0
13	Jawa Tengah	2.443.282	2.345.943	96,0	1.587.669	65,0	1.321.320	54,1	880.266	52,0
14	D I Yogyakarta	278.940	175.486	62,9	142.529	51,1	121.688	43,6	39.113	76,9
15	Jawa Timur	2.793.402	2.244.289	80,3	2.173.452	77,8	1.727.410	61,8	649.572	16,9
16	Banten	1.094.798	786.227	71,8	965.286	88,2	834.577	76,2	406.416	42,0
17	Bali	317.193	245.219	77,3	249.266	78,6	233.050	73,5	112.416	28,6
18	Nusa Tenggara Barat	489.891	190.948	39,0	345.265	70,5	461.278	94,2	146.798	46,9
19	Nusa Tenggara Timur	577.891	327.299	56,6	351.219	60,8	16.721	2,9	38.912	32,5
20	Kalimantan Barat	441.161	287.165	65,1	286.444	64,9	190.093	43,1	80.405	25,0
21	Kalimantan Tengah	224.821	175.091	77,9	136.906	60,9	109.985	48,9	53.361	10,9
22	Kalimantan Selatan	369.602	298.176	80,7	251.645	68,1	268.135	72,5	874.619	95,1
23	Kalimantan Timur	301.884	227.186	75,3	190.233	63,0	99.125	32,8	73.149	25,3
24	Kalimantan Utara	62.822	36.568	58,2	37.138	59,1	38.124	60,7	25.175	24,8
25	Sulawesi Utara	192.997	125.937	65,3	58.427	30,3	82.470	42,7	13.461	2,8
26	Sulawesi Tengah	279.981	201.908	72,1	219.065	78,2	124.759	44,6	32.199	25,2
27	Sulawesi Selatan	704.722	473.261	67,2	551.958	78,3	390.214	55,4	131.717	16,7
28	Sulawesi Tenggara	264.911	178.914	67,5	106.723	40,3	89.991	34,0	39.967	50,3
29	Gorontalo	96.293	74.244	77,1	57.863	60,1	37.116	38,5	19.691	9,4
30	Sulawesi Barat	132.425	115.514	87,2	84.543	63,8	88.164	66,6	17.294	21,5
31	Maluku	167.387	118.490	70,8	75.377	45,0	96.207	57,5	42.557	8,6
32	Maluku Utara	116.267	91.781	78,9	69.550	59,8	61.888	53,2	39.966	17,2
33	Papua Barat	95.440	20.527	21,5	1.987	2,1	3.361	3,5	7.654	6,0
34	Papua	313.970	311.649	99,3	78.641	25,0	72.529	23,1	76.327	26,0
Indonesia		**21.891.959**	**17.901.974**	**81,8**	**15.237.336**	**69,6**	**12.616.116**	**57,6**	**6.683.499**	**30,5**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

* Cakupan balita dilayani MTBS dihitung berdasarkan sasaran kunjungan balita sakit

Lampiran 43

JUMLAH BALITA DITIMBANG MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2021

No	Provinsi	2021			2020		
		Jumlah Sasaran Balita (S)	Ditimbang		Jumlah Sasaran Balita (S)	Ditimbang	
			Jumlah (D)	% (D/S)		Jumlah (D)	% (D/S)
		L+P	L+P	L+P	L+P	L+P	L+P
(1)	*(2)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Aceh	435.460	371.939	85,4	440.625	352.113	79,9
2	Sumatera Utara	826.133	633.373	76,7	9.776.742	6.307.203	64,5
3	Sumatera Barat	399.789	297.500	74,4	400.281	250.483	62,6
4	Riau	346.500	166.937	48,2	745.790	295.486	39,6
5	Jambi	159.309	117.048	73,5	263.430	169.592	64,4
6	Sumatera Selatan	572.570	390.179	68,1	799.969	485.767	60,7
7	Bengkulu	101.236	69.508	68,7	117.345	84.654	72,1
8	Lampung	585.048	425.941	72,8	614.132	414.453	67,5
9	Kepulauan Bangka Belitung	118.228	72.162	61,0	118.957	63.268	53,2
10	Kepulauan Riau	145.009	84.741	58,4	225.873	128.174	56,7
11	DKI Jakarta	420.822	171.180	40,7	390.193	156.372	40,1
12	Jawa Barat	3.316.766	2.440.785	73,6	3.138.249	2.149.251	68,5
13	Jawa Tengah	2.463.945	1.939.373	78,7	2.272.887	1.369.895	60,3
14	DI Yogyakarta	194.878	126.946	65,1	192.978	135.249	70,1
15	Jawa Timur	2.530.798	1.576.250	62,3	2.783.068	1.566.665	56,3
16	Banten	769.852	520.394	67,6	1.005.193	574.303	57,1
17	Bali	224.419	166.203	74,1	207.528	129.642	62,5
18	Nusa Tenggara Barat	440.089	363.424	82,6	468.634	337.793	72,1
19	Nusa Tenggara Timur	439.280	350.371	79,8	441.183	343.304	77,8
20	Kalimantan Barat	380.518	183.454	48,2	372.182	164.855	44,3
21	Kalimantan Tengah	170.374	81.748	48,0	184.819	83.507	45,2
22	Kalimantan Selatan	296.907	180.960	60,9	341.521	173.327	50,8
23	Kalimantan Timur	257.306	88.414	34,4	237.590	86.329	36,3
24	Kalimantan Utara	49.378	19.405	39,3	73.724	22.086	30,0
25	Sulawesi Utara	28.572	17.847	62,5	131.069	82.279	62,8
26	Sulawesi Tengah	229.586	157.203	68,5	249.571	163.703	65,6
27	Sulawesi Selatan	609.163	437.980	71,9	978.527	565.442	57,8
28	Sulawesi Tenggara	146.319	96.946	66,3	215.393	136.252	63,3
29	Gorontalo	85.694	69.769	81,4	92.419	69.853	75,6
30	Sulawesi Barat	114.573	66.810	58,3	108.770	69.865	64,2
31	Maluku	133.758	78.703	58,8	186.649	108.171	58,0
32	Maluku Utara	96.176	79.264	82,4	94.863	65.714	69,3
33	Papua Barat	62.603	17.861	28,5	97.659	38.646	39,6
34	Papua	67.705	14.705	21,7	336.163	71.603	21,3
Indonesia		**17.218.758**	**11.875.318**	**69,0**	**28.103.977**	**17.215.298**	**61,3**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 44.a

PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	2021			
		Sangat Kurang	Kurang	Normal	Risiko Berat Badan Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1,7	7,1	86,0	5,2
2	Sumatera Utara	0,6	2,7	90,9	5,8
3	Sumatera Barat	1,3	6,3	87,3	5,0
4	Riau	0,9	3,9	88,6	6,6
5	Jambi	0,5	2,5	91,9	5,1
6	Sumatera Selatan	0,5	1,8	88,8	8,9
7	Bengkulu	0,3	2,1	91,0	6,5
8	Lampung	0,5	2,7	88,4	8,4
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,6	3,8	89,7	5,8
10	Kepulauan Riau	0,9	4,1	87,1	7,9
11	DKI Jakarta	0,7	2,4	87,7	9,2
12	Jawa Barat	1,1	4,2	86,8	7,9
13	Jawa Tengah	1,3	6,3	84,7	7,8
14	DI Yogyakarta	1,2	7,3	82,7	8,8
15	Jawa Timur	1,4	5,5	82,8	10,4
16	Banten	1,3	4,2	84,1	10,4
17	Bali	0,3	1,9	85,1	12,7
18	Nusa Tenggara Barat	1,8	8,9	84,8	4,5
19	Nusa Tenggara Timur	2,3	11,6	83,0	3,1
20	Kalimantan Barat	2,1	9,2	83,6	5,0
21	Kalimantan Tengah	1,5	6,7	85,3	6,4
22	Kalimantan Selatan	1,6	7,4	86,6	4,4
23	Kalimantan Timur	1,7	8,0	81,3	9,0
24	Kalimantan Utara	1,5	6,8	85,8	5,8
25	Sulawesi Utara	0,4	3,0	91,8	4,8
26	Sulawesi Tengah	1,7	7,6	86,1	4,6
27	Sulawesi Selatan	0,9	5,2	89,8	4,0
28	Sulawesi Tenggara	1,1	5,5	88,7	4,8
29	Gorontalo	1,4	6,1	89,7	2,8
30	Sulawesi Barat	1,8	9,1	84,9	4,1
31	Maluku	1,2	6,6	88,9	3,3
32	Maluku Utara	1,7	7,9	87,3	3,1
33	Papua Barat	3,4	10,0	80,9	5,7
34	Papua	2,1	7,2	83,5	7,2
Indonesia		**1,2**	**5,2**	**86,4**	**7,3**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022, data per tanggal 18 Januari 2022

Lampiran 44.b

PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	2021			
		Sangat Kurang	Kurang	Normal	Risiko Berat Badan Lebih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	1,8	8,6	86,7	2,9
2	Sumatera Utara	0,6	2,4	93,4	3,6
3	Sumatera Barat	1,3	7,8	87,8	3,1
4	Riau	1,0	4,0	90,4	4,5
5	Jambi	0,5	2,6	93,8	3,1
6	Sumatera Selatan	0,5	1,8	92,4	5,4
7	Bengkulu	0,3	2,4	93,7	3,6
8	Lampung	0,5	3,0	91,9	4,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,6	3,5	90,5	5,3
10	Kepulauan Riau	1,0	4,6	88,1	6,3
11	DKI Jakarta	0,5	2,3	91,1	6,0
12	Jawa Barat	1,0	5,2	88,0	5,7
13	Jawa Tengah	1,4	8,0	84,5	6,1
14	DI Yogyakarta	1,3	8,5	81,5	8,7
15	Jawa Timur	1,5	6,8	83,2	8,5
16	Banten	1,3	4,6	87,6	6,5
17	Bali	0,4	2,5	87,6	9,5
18	Nusa Tenggara Barat	2,0	12,1	83,5	2,3
19	Nusa Tenggara Timur	2,8	15,9	79,6	1,6
20	Kalimantan Barat	2,7	11,3	81,8	4,2
21	Kalimantan Tengah	1,7	7,9	84,5	5,9
22	Kalimantan Selatan	1,8	8,4	86,1	3,7
23	Kalimantan Timur	2,0	9,4	79,3	9,3
24	Kalimantan Utara	1,8	8,3	84,6	5,3
25	Sulawesi Utara	0,4	2,8	93,7	3,2
26	Sulawesi Tengah	1,9	9,0	85,9	3,1
27	Sulawesi Selatan	0,9	5,7	91,1	2,3
28	Sulawesi Tenggara	1,3	6,9	88,9	2,9
29	Gorontalo	1,5	6,7	89,4	2,3
30	Sulawesi Barat	2,3	12,2	83,0	2,6
31	Maluku	1,2	7,6	89,1	2,0
32	Maluku Utara	1,7	9,6	86,8	1,9
33	Papua Barat	3,8	12,9	78,8	4,5
34	Papua	2,1	8,6	83,2	6,0
Indonesia		**1,2**	**6,1**	**87,6**	**5,2**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022, data per tanggal 18 Januari 2022

Lampiran 44.c

PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	2021			
		Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	3,6	8,5	86,0	1,8
2	Sumatera Utara	2,0	4,3	91,6	2,1
3	Sumatera Barat	2,8	7,4	88,6	1,2
4	Riau	1,9	4,5	91,7	1,8
5	Jambi	1,3	3,4	94,1	1,2
6	Sumatera Selatan	1,1	2,6	93,9	2,4
7	Bengkulu	1,1	4,6	93,5	0,7
8	Lampung	1,6	3,8	92,6	2,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	1,2	3,4	94,9	0,6
10	Kepulauan Riau	1,8	4,4	91,9	1,9
11	DKI Jakarta	1,0	1,9	94,5	2,6
12	Jawa Barat	2,4	5,1	90,8	1,8
13	Jawa Tengah	2,9	8,1	87,7	1,3
14	DI Yogyakarta	3,9	10,3	84,8	0,9
15	Jawa Timur	3,1	7,3	88,3	1,4
16	Banten	3,4	5,6	87,5	3,6
17	Bali	1,2	2,8	94,8	1,2
18	Nusa Tenggara Barat	5,2	12,4	81,6	0,8
19	Nusa Tenggara Timur	4,8	11,5	83,1	0,7
20	Kalimantan Barat	4,8	10,9	83,2	1,2
21	Kalimantan Tengah	3,9	10,3	84,8	1,0
22	Kalimantan Selatan	3,0	8,3	87,7	1,0
23	Kalimantan Timur	4,3	10,1	83,6	2,0
24	Kalimantan Utara	3,1	8,8	87,4	0,7
25	Sulawesi Utara	0,6	2,6	95,7	1,0
26	Sulawesi Tengah	3,9	9,6	85,8	0,7
27	Sulawesi Selatan	2,4	6,7	90,1	0,8
28	Sulawesi Tenggara	3,2	8,9	87,2	0,7
29	Gorontalo	2,8	6,8	90,0	0,4
30	Sulawesi Barat	5,4	15,0	79,2	0,4
31	Maluku	2,0	6,7	90,7	0,6
32	Maluku Utara	3,7	9,5	86,5	0,3
33	Papua Barat	5,9	11,5	81,5	1,1
34	Papua	4,0	8,7	86,4	0,9
Indonesia		**2,7**	**6,5**	**89,2**	**1,6**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022, data pertanggal 18 Januari 2022

Lampiran 44.d

PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS TB/U MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	2021			
		Sangat Pendek	Pendek	Normal	Tinggi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	3,5	10,0	85,6	1,0
2	Sumatera Utara	1,7	4,2	92,8	1,4
3	Sumatera Barat	2,8	9,4	87,1	0,6
4	Riau	1,7	4,3	93,1	1,0
5	Jambi	1,1	3,5	94,8	0,5
6	Sumatera Selatan	1,1	2,8	94,8	1,3
7	Bengkulu	1,0	5,0	93,7	0,3
8	Lampung	1,4	4,0	93,6	0,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,9	3,5	95,2	0,4
10	Kepulauan Riau	1,6	4,8	92,8	0,9
11	DKI Jakarta	0,9	2,1	96,0	1,0
12	Jawa Barat	2,3	6,2	90,6	0,9
13	Jawa Tengah	2,6	8,7	88,0	0,7
14	DI Yogyakarta	2,9	10,3	86,3	0,5
15	Jawa Timur	2,4	7,2	89,5	0,9
16	Banten	2,9	5,8	89,4	1,9
17	Bali	1,0	3,4	95,0	0,6
18	Nusa Tenggara Barat	5,0	14,6	80,1	0,4
19	Nusa Tenggara Timur	5,5	15,7	78,4	0,3
20	Kalimantan Barat	4,8	12,4	82,1	0,7
21	Kalimantan Tengah	3,4	10,3	85,8	0,6
22	Kalimantan Selatan	2,7	8,2	88,6	0,5
23	Kalimantan Timur	3,8	10,5	84,2	1,5
24	Kalimantan Utara	3,0	9,6	87,0	0,4
25	Sulawesi Utara	0,6	2,5	96,4	0,5
26	Sulawesi Tengah	3,5	10,6	85,4	0,5
27	Sulawesi Selatan	2,1	6,9	90,7	0,4
28	Sulawesi Tenggara	3,1	10,2	86,3	0,4
29	Gorontalo	2,4	7,0	90,4	0,3
30	Sulawesi Barat	6,3	18,7	74,9	0,2
31	Maluku	2,0	7,8	89,8	0,3
32	Maluku Utara	3,0	10,2	86,7	0,2
33	Papua Barat	6,7	13,9	78,7	0,7
34	Papua	4,0	10,4	84,9	0,7
Indonesia		**2,5**	**7,0**	**89,6**	**0,9**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022, data pertanggal 18 Januari 2022

Lampiran 44.e

PERSENTASE BALITA USIA 0-23 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	2021					
		Gizi Buruk	Gizi Kurang	Gizi Baik	Berisiko Gizi Lebih	Gizi Lebih	Obesitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	1,8	5,4	81,4	8,0	2,4	0,9
2	Sumatera Utara	0,6	2,3	88,6	6,1	1,8	0,6
3	Sumatera Barat	1,2	5,1	82,3	8,2	2,4	0,8
4	Riau	1,4	3,6	83,6	8,0	2,4	1,0
5	Jambi	0,4	2,1	88,5	6,6	1,7	0,6
6	Sumatera Selatan	0,6	2,1	85,2	9,3	2,1	0,7
7	Bengkulu	0,2	1,2	84,1	11,0	2,8	0,7
8	Lampung	0,6	2,7	83,7	9,5	2,8	0,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,2	1,4	87,8	8,0	2,1	0,5
10	Kepulauan Riau	0,9	3,2	83,0	9,5	2,5	0,8
11	DKI Jakarta	0,8	2,7	85,5	7,4	2,4	1,0
12	Jawa Barat	0,8	3,4	81,7	9,8	3,1	1,1
13	Jawa Tengah	1,1	5,0	79,7	9,8	3,2	1,2
14	DI Yogyakarta	0,6	4,6	76,8	11,8	4,1	2,0
15	Jawa Timur	1,5	5,1	73,5	13,1	4,7	2,1
16	Banten	2,0	4,1	80,0	9,4	3,3	1,3
17	Bali	0,3	1,3	78,9	13,0	5,0	1,5
18	Nusa Tenggara Barat	0,7	4,3	82,0	9,2	2,9	1,0
19	Nusa Tenggara Timur	1,1	6,7	82,6	7,1	1,9	0,6
20	Kalimantan Barat	1,7	6,0	80,5	8,3	2,5	0,9
21	Kalimantan Tengah	1,2	4,9	78,7	10,5	3,4	1,3
22	Kalimantan Selatan	1,4	4,9	83,3	7,5	2,2	0,7
23	Kalimantan Timur	1,2	5,7	77,2	10,9	3,4	1,6
24	Kalimantan Utara	0,8	3,3	84,0	8,1	2,8	1,1
25	Sulawesi Utara	0,2	2,2	88,1	7,1	2,0	0,4
26	Sulawesi Tengah	1,2	4,6	81,7	8,8	2,7	1,0
27	Sulawesi Selatan	0,5	3,0	86,2	7,7	2,1	0,6
28	Sulawesi Tenggara	0,5	2,7	84,3	9,4	2,5	0,6
29	Gorontalo	0,7	3,7	86,7	6,4	1,9	0,6
30	Sulawesi Barat	0,7	4,0	80,5	10,9	3,0	0,8
31	Maluku	0,8	4,7	86,0	6,4	1,6	0,4
32	Maluku Utara	1,1	4,3	82,9	8,4	2,4	1,0
33	Papua Barat	2,8	7,2	73,4	11,2	3,7	1,8
34	Papua	1,7	5,2	76,0	11,8	3,7	1,6
Indonesia		**1,0**	**3,9**	**81,6**	**9,4**	**3,0**	**1,1**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022, data per tanggal 18 Januari 2022

Lampiran 44.f

PERSENTASE BALITA USIA 0-59 BULAN MENURUT STATUS GIZI DENGAN INDEKS BB/TB MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	2021					
		Gizi Buruk	Gizi Kurang	Gizi Baik	Berisiko Gizi Lebih	Gizi Lebih	Obesitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Aceh	1,6	5,6	84,8	5,9	1,5	0,6
2	Sumatera Utara	0,5	1,8	91,5	4,6	1,1	0,4
3	Sumatera Barat	1,1	5,2	85,3	6,2	1,6	0,6
4	Riau	1,1	3,6	86,9	5,8	1,7	0,9
5	Jambi	0,4	1,9	91,4	4,6	1,2	0,5
6	Sumatera Selatan	0,5	1,8	89,0	6,9	1,4	0,5
7	Bengkulu	0,1	1,1	89,3	7,3	1,7	0,5
8	Lampung	0,5	2,7	87,3	7,1	1,8	0,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,2	1,5	88,7	6,2	2,0	1,2
10	Kepulauan Riau	0,9	3,4	84,9	7,3	2,3	1,2
11	DKI Jakarta	0,5	2,2	88,8	5,3	1,9	1,2
12	Jawa Barat	0,7	3,6	84,6	7,5	2,4	1,2
13	Jawa Tengah	1,1	5,3	82,1	7,6	2,6	1,4
14	DI Yogyakarta	0,6	5,0	78,7	9,5	3,7	2,5
15	Jawa Timur	1,5	5,8	76,4	10,5	3,7	2,0
16	Banten	1,6	4,1	83,9	6,9	2,4	1,1
17	Bali	0,3	1,5	82,7	10,2	3,7	1,7
18	Nusa Tenggara Barat	0,6	5,0	86,5	5,8	1,6	0,6
19	Nusa Tenggara Timur	1,0	7,2	85,7	4,7	1,1	0,3
20	Kalimantan Barat	1,7	6,4	82,6	6,2	2,0	1,0
21	Kalimantan Tengah	1,2	5,1	80,8	8,7	2,8	1,4
22	Kalimantan Selatan	1,3	5,3	85,4	5,5	1,6	0,9
23	Kalimantan Timur	1,3	6,2	77,6	9,2	3,4	2,3
24	Kalimantan Utara	0,7	4,3	84,6	6,6	2,4	1,4
25	Sulawesi Utara	0,1	1,9	90,7	5,5	1,4	0,4
26	Sulawesi Tengah	1,4	5,2	84,4	6,4	1,8	0,7
27	Sulawesi Selatan	0,5	3,1	90,0	4,8	1,2	0,4
28	Sulawesi Tenggara	0,6	3,2	87,7	6,6	1,5	0,5
29	Gorontalo	0,9	4,0	88,3	4,8	1,4	0,6
30	Sulawesi Barat	0,7	4,2	84,6	7,9	2,0	0,7
31	Maluku	0,7	4,7	88,9	4,4	1,0	0,3
32	Maluku Utara	1,1	4,9	86,4	5,6	1,4	0,6
33	Papua Barat	2,7	8,2	75,8	8,9	2,9	1,5
34	Papua	1,7	5,6	78,1	10,0	3,1	1,5
Indonesia		**0,9**	**4,0**	**84,9**	**7,0**	**2,2**	**1,0**

Sumber: Ditjen Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022, data per tanggal 18 Januari 2022

Lampiran 45

CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PESERTA DIDIK SD/MI, SMP/MTS, DAN SMA/MA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2021

No	Provinsi	SEKOLAH								
		SD/MI			SMP/MTS			SMA/MA		
		Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%	Jumlah	Mendapat Pelayanan Kesehatan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	192.916	150.679	78,1	105.092	77.749	74,0	86.176	57.232	66,4
2	Sumatera Utara	405.478	168.290	41,5	293.944	117.147	39,9	268.075	79.262	29,6
3	Sumatera Barat	108.750	85.917	79,0	107.511	83.609	77,8	68.204	47.648	69,9
4	Riau	226.605	103.045	45,5	114.974	45.457	39,5	74.302	36.995	49,8
5	Jambi	118.685	103.984	87,6	88.874	77.540	87,2	80.614	66.059	81,9
6	Sumatera Selatan	203.386	164.321	80,8	143.338	106.042	74,0	120.817	76.478	63,3
7	Bengkulu	93.805	31.299	33,4	67.397	27.816	41,3	60.938	21.689	35,6
8	Lampung	469.936	291.582	62,0	418.785	151.786	36,2	171.697	123.236	71,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.447	27.056	95,1	25.192	21.887	86,9	22.750	16.310	71,7
10	Kepulauan Riau	43.083	22.990	53,4	22.937	13.488	58,8	8.905	5.409	60,7
11	DKI Jakarta	194.538	194.538	100,0	189.006	179.383	94,9	169.829	10.741	6,3
12	Jawa Barat	1.421.054	809.047	56,9	1.032.741	541.731	52,5	992.677	392.369	39,5
13	Jawa Tengah	585.408	497.164	84,9	551.534	462.178	83,8	479.080	365.395	76,3
14	D I Yogyakarta	154.247	136.371	88,4	69.758	61.338	87,9	25.135	22.056	87,8
15	Jawa Timur	622.346	545.993	87,7	591.678	442.384	74,8	508.948	353.528	69,5
16	Banten	7.202.130	3.818.193	53,0	3.127.234	1.503.584	48,1	2.416.020	940.599	38,9
17	Bali	72.028	61.990	86,1	71.896	55.918	77,8	65.424	47.091	72,0
18	Nusa Tenggara Barat	233.604	140.188	60,0	150.104	77.265	51,5	101.021	38.825	38,4
19	Nusa Tenggara Timur	109.663	21.255	19,4	91.189	5.089	5,6	76.298	6.382	8,4
20	Kalimantan Barat	87.952	59.688	67,9	88.203	47.210	53,5	87.313	27.028	31,0
21	Kalimantan Tengah	44.940	35.376	78,7	26.773	20.157	75,3	18.441	11.616	63,0
22	Kalimantan Selatan	194.073	132.269	68,2	101.862	69.332	68,1	58.727	36.870	62,8
23	Kalimantan Timur	109.089	70.059	64,2	74.565	48.693	65,3	75.602	40.777	53,9
24	Kalimantan Utara	41.324	14.576	35,3	27.235	10.246	37,6	31.126	5.661	18,2
25	Sulawesi Utara	108.152	37.721	34,9	61.314	23.827	38,9	48.621	16.570	34,1
26	Sulawesi Tengah	56.152	33.770	60,1	46.371	24.828	53,5	36.632	16.846	46,0
27	Sulawesi Selatan	390.438	133.015	34,1	231.985	92.657	39,9	154.668	46.342	30,0
28	Sulawesi Tenggara	35.803	17.231	48,1	25.329	15.032	59,3	19.406	10.188	52,5
29	Gorontalo	19.587	3.632	18,5	8.408	3.034	36,1	8.976	1.752	19,5
30	Sulawesi Barat	105.821	68.240	64,5	46.445	23.243	50,0	22.181	8.501	38,3
31	Maluku	148.365	49.593	33,4	78.296	25.441	32,5	69.716	19.018	27,3
32	Maluku Utara	114.035	19.867	17,4	65.241	11.844	18,2	54.945	10.948	19,9
33	Papua Barat	18.678	11.228	60,1	36.079	5.271	14,6	31.969	2.681	8,4
34	Papua	62.089	2.006	3,2	46.054	754	1,6	34.644	622	1,8
Indonesia		**14.022.607**	**8.062.173**	**57,5**	**8.227.344**	**4.472.960**	**54,4**	**6.549.877**	**2.962.724**	**45,2**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Keterangan :
* merupakan indikator SPM "Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar"

Lampiran 51.a

JUMLAH TERDUGA TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS, KASUS TUBERKULOSIS ANAK, *CASE NOTIFICATION RATE* (CNR) PER 100.000 PENDUDUK
***TREATMENT COVERAGE* (TC) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI**
TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Perkiraan Jumlah Terduga Tuberkulosis	Perkiraan Jumlah Terduga Tuberkulosis Yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	% Orang Terduga Tuberkulosis (TBC) Mendapatkan Pelayanan Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis					*Case Notification Rate (CNR)* Semua Kasus Tuberkulosis Per 100.000 Penduduk	Perkiraan Insiden Tuberkulosis (Dalam Absolut) *)	*Treatment Coverage (TC%)*	Kasus Tuberkulosis Anak 0-14 Tahun	Cakupan Penemuan Kasus Tuberkulosis Anak (%)
						Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan					
						Jumlah	%	Jumlah	%						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Aceh	5.483.702	80.515	34.963	43,4	4.448	63,8	2.526	36,2	6.974	127,2	20.149	34,6	216,0	8,9
2	Sumatera Utara	14.767.655	269.884	79.255	29,4	14.371	64,8	7.798	35,2	22.169	150,1	62.819	35,3	883,0	11,7
3	Sumatera Barat	5.522.731	111.640	51.713	46,3	5.036	61,3	3.180	38,7	8.216	148,8	22.971	35,8	967,0	35,1
4	Riau	7.159.392	134.303	52.533	39,1	5.872	63,5	3.372	36,5	9.244	129,1	27.634	33,5	678,0	20,4
5	Jambi	3.693.933	31.433	14.993	47,7	2.153	59,8	1.445	40,2	3.598	97,4	13.681	26,3	253,0	15,4
6	Sumatera Selatan	8.605.288	164.138	97.074	59,1	8.359	61,4	5.252	38,6	13.611	158,2	33.773	40,3	988,0	24,4
7	Bengkulu	2.028.657	29.705	7.095	23,9	1.095	60,6	711	39,4	1.806	89,0	7.760	23,3	127,0	13,6
8	Lampung	8.558.362	113.303	73.406	64,8	6.830	57,5	5.044	42,5	11.874	138,7	29.508	40,2	1.088,0	30,7
9	Kep. Bangka Belitung	1.524.208	21.476	14.694	68,4	948	62,3	574	37,7	1.522	99,9	5.923	25,7	129,0	18,1
10	Kepulauan Riau	2.251.976	52.684	22.763	43,2	2.477	61,6	1.544	38,4	4.021	178,6	10.840	37,1	329,0	25,3
11	DKI Jakarta	10.691.409	230.515	124.054	53,8	15.585	55,4	12.540	44,6	28.125	263,1	47.431	59,3	2.984,0	52,4
12	Jawa Barat	50.153.631	622.361	299.876	48,2	49.580	54,3	41.788	45,7	91.368	182,2	128.057	71,3	13.922,0	90,6
13	Jawa Tengah	35.092.453	403.747	168.429	41,7	23.877	55,4	19.244	44,6	43.121	122,9	83.076	51,9	5.121,0	51,4
14	DI Yogyakarta	3.899.219	43.259	18.448	42,6	1.755	58,0	1.270	42,0	3.025	77,6	9.074	33,3	540,0	49,6
15	Jawa Timur	40.060.234	466.297	261.191	56,0	23.372	55,4	18.821	44,6	42.193	105,3	95.925	44,0	2.779,0	24,1
16	Banten	13.217.890	178.729	98.708	55,2	13.516	57,9	9.827	42,1	23.343	176,6	33.098	70,5	1.955,0	49,2
17	Bali	4.399.929	40.516	12.598	31,1	1.861	61,5	1.166	38,5	3.027	68,8	12.406	24,4	115,0	7,7
18	Nusa Tenggara Barat	5.147.975	95.774	35.824	37,4	3.632	60,2	2.397	39,8	6.029	117,1	17.736	34,0	283,0	13,3
19	Nusa Tenggara Timur	5.565.560	82.037	45.399	55,3	2.903	57,5	2.148	42,5	5.051	90,8	18.856	26,8	256,0	11,3
20	Kalimantan Barat	5.157.153	63.607	31.893	50,1	4.607	63,2	2.679	36,8	7.286	141,3	17.233	42,3	691,0	33,4
21	Kalimantan Tengah	2.781.232	43.589	16.707	38,3	1.695	59,9	1.135	40,1	2.830	101,8	9.380	30,2	178,0	15,8
22	Kalimantan Selatan	4.322.749	73.321	21.225	28,9	2.454	60,6	1.596	39,4	4.050	93,7	15.087	26,8	256,0	14,1
23	Kalimantan Timur	3.809.694	70.270	23.594	33,6	3.063	59,2	2.108	40,8	5.171	135,7	14.459	35,8	451,0	26,0
24	Kalimantan Utara	771.856	13.471	9.296	69,0	602	60,5	393	39,5	995	128,9	2.772	35,9	78,0	23,4
25	Sulawesi Utara	2.539.822	46.386	16.392	35,3	3.534	63,5	2.030	36,5	5.564	219,1	9.532	58,4	197,0	17,2
26	Sulawesi Tengah	3.110.482	49.664	15.165	30,5	2.345	59,9	1.570	40,1	3.915	125,9	10.219	38,3	136,0	11,1
27	Sulawesi Selatan	8.966.939	150.768	66.092	43,8	8.496	57,6	6.262	42,4	14.758	164,6	31.022	47,6	515,0	13,8
28	Sulawesi Tenggara	2.767.606	39.382	17.121	43,5	2.215	60,2	1.463	39,8	3.678	132,9	9.003	40,9	99,0	9,2
29	Gorontalo	1.224.895	20.930	13.365	63,9	1.598	58,4	1.136	41,6	2.734	223,2	4.306	63,5	72,0	13,9
30	Sulawesi Barat	1.411.139	21.605	12.300	56,9	1.285	57,3	958	42,7	2.243	158,9	4.446	50,4	93,0	17,4
31	Maluku	1.839.869	32.012	8.508	26,6	1.702	59,3	1.169	40,7	2.871	156,0	6.587	43,6	174,0	22,0
32	Maluku Utara	1.284.341	19.256	7.691	39,9	1.034	60,1	687	39,9	1.721	134,0	4.193	41,0	50,0	9,9
33	Papua Barat	986.104	17.820	6.032	33,8	1.118	55,6	891	44,4	2.009	203,7	6.516	30,8	181,0	23,1
34	Papua	3.450.412	90.056	26.363	29,3	5.016	54,3	4.219	45,7	9.235	267,6	18.530	49,8	1.879,0	84,5
Indonesia		**272.248.500**	**3.924.454**	**1.804.760**	**46,0**	**228.434**	**57,5**	**168.943**	**42,5**	**397.377**	**146,0**	**844.000**	**47,1**	**38.663,0**	**38,2**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022
*) Berdasarkan Modeling Tahun 2018.

Keterangan:
Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

Lampiran 51.b

JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS SEMUA TIPE
MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																
		0 - 14		15 - 24		25 - 34		35 - 44		45 - 54		55 - 64		≥ 65		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)
1	Aceh	104	112	462	359	606	422	796	419	1.004	511	865	451	611	252	4.448	2.526	6.974
2	Sumatera Utara	478	405	1.804	1.623	2.226	1.395	2.717	1.220	3.134	1.437	2.753	1.204	1.259	514	14.371	7.798	22.169
3	Sumatera Barat	544	423	570	616	740	538	819	474	941	478	810	399	612	252	5.036	3.180	8.216
4	Riau	366	312	735	681	943	635	1.152	604	1.248	582	970	396	458	162	5.872	3.372	9.244
5	Jambi	129	124	272	257	346	237	369	270	419	281	400	188	218	88	2.153	1.445	3.598
6	Sumatera Selatan	553	435	844	827	1.267	920	1.446	867	1.520	991	1.651	805	1.078	407	8.359	5.252	13.611
7	Bengkulu	64	63	141	90	196	144	207	146	207	113	179	102	101	53	1.095	711	1.806
8	Lampung	568	520	613	738	985	844	1.171	901	1.312	893	1.231	737	950	411	6.830	5.044	11.874
9	Kep. Bangka Belitung	67	62	103	101	155	112	171	99	178	98	163	68	111	34	948	574	1.522
10	Kepulauan Riau	172	157	396	401	489	352	546	277	442	202	288	104	144	51	2.477	1.544	4.021
11	DKI Jakarta	1.481	1.503	2.506	2.846	2.788	2.282	2.701	1.878	2.790	1.981	2.208	1.411	1.111	639	15.585	12.540	28.125
12	Jawa Barat	7.162	6.760	7.749	9.607	8.300	7.416	7.631	6.068	7.987	5.902	6.740	4.052	4.011	1.983	49.580	41.788	91.368
13	Jawa Tengah	2.728	2.393	2.898	3.790	3.482	3.264	3.786	2.869	4.224	3.076	4.081	2.594	2.678	1.258	23.877	19.244	43.121
14	DI Yogyakarta	303	237	210	248	232	188	239	160	250	152	276	160	245	125	1.755	1.270	3.025
15	Jawa Timur	1.411	1.368	3.102	3.934	3.331	3.130	3.838	3.022	4.634	3.529	4.317	2.657	2.739	1.181	23.372	18.821	42.193
16	Banten	995	960	1.916	2.041	2.624	1.955	2.521	1.673	2.495	1.622	1.963	1.110	1.002	466	13.516	9.827	23.343
17	Bali	60	55	231	226	329	259	336	203	360	190	318	157	227	76	1.861	1.166	3.027
18	Nusa Tenggara Barat	147	136	376	388	627	472	677	423	750	506	635	317	420	155	3.632	2.397	6.029
19	Nusa Tenggara Timur	128	128	518	501	584	472	464	314	450	296	419	268	340	169	2.903	2.148	5.051
20	Kalimantan Barat	384	307	553	505	760	456	864	452	869	443	741	323	436	193	4.607	2.679	7.286
21	Kalimantan Tengah	89	89	191	165	281	232	338	228	381	210	289	151	126	60	1.695	1.135	2.830
22	Kalimantan Selatan	130	126	269	262	408	292	422	282	552	319	463	234	210	81	2.454	1.596	4.050
23	Kalimantan Timur	238	213	426	423	538	432	593	393	564	324	459	249	245	74	3.063	2.108	5.171
24	Kalimantan Utara	43	35	60	70	109	73	103	69	141	80	92	42	54	24	602	393	995
25	Sulawesi Utara	117	80	478	359	547	346	626	356	725	394	635	336	406	159	3.534	2.030	5.564
26	Sulawesi Tengah	69	67	348	318	438	260	417	260	447	317	371	240	255	108	2.345	1.570	3.915
27	Sulawesi Selatan	246	269	1.170	1.274	1.436	1.086	1.523	1.065	1.765	1.284	1.416	851	940	433	8.496	6.262	14.758
28	Sulawesi Tenggara	54	45	330	336	404	293	378	239	442	265	370	187	237	98	2.215	1.463	3.678
29	Gorontalo	38	34	219	202	247	181	307	186	326	268	284	188	177	77	1.598	1.136	2.734
30	Sulawesi Barat	47	46	203	217	208	153	236	160	261	176	193	136	137	70	1.285	958	2.243
31	Maluku	90	84	319	288	364	237	312	199	257	177	226	129	134	55	1.702	1.169	2.871
32	Maluku Utara	23	27	166	179	231	161	198	110	199	110	148	69	69	31	1.034	687	1.721
33	Papua Barat	84	97	235	267	239	209	212	126	180	108	103	64	65	20	1.118	891	2.009
34	Papua	974	905	1.214	1.231	1.077	934	772	585	541	330	308	172	130	62	5.016	4.219	9.235
Indonesia		**20.086**	**18.577**	**31.627**	**35.370**	**37.537**	**30.382**	**38.888**	**26.597**	**41.995**	**27.645**	**36.365**	**20.551**	**21.936**	**9.821**	**228.434**	**168.943**	**397.377**
		9,73%		**16,86%**		**17,09%**		**16,48%**		**17,52%**		**14,32%**		**7,99%**		**100%**		

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2021
Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan
* : Data berdasarkan hasil penyisiran kasus SIM RS Mopping up

Lampiran 51.c

JUMLAH KASUS TUBERKULOSIS PARU TERKONFIRMASI BAKTERIOLOGIS MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN, DAN PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																
		0 - 14		15 - 24		25 - 34		35 - 44		45 - 54		55 - 64		≥ 65		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(19)	(20)	(21)
1	Aceh	11	15	248	203	364	231	497	245	600	307	475	221	295	93	2.490	1.315	3.805
2	Sumatera Utara	48	55	919	767	1.212	716	1.537	663	1.812	803	1.502	621	603	224	7.633	3.849	11.482
3	Sumatera Barat	22	31	358	358	499	326	587	296	668	311	545	277	371	140	3.050	1.739	4.789
4	Riau	23	32	419	369	604	369	772	353	849	392	636	226	279	84	3.582	1.825	5.407
5	Jambi	8	14	170	136	217	147	252	160	271	172	253	122	131	55	1.302	806	2.108
6	Sumatera Selatan	45	39	466	444	721	508	869	468	908	531	840	378	453	153	4.302	2.521	6.823
7	Bengkulu	13	14	87	55	138	79	137	93	136	73	109	64	63	28	683	406	1.089
8	Lampung	85	90	347	402	620	469	784	562	846	567	744	431	557	240	3.983	2.761	6.744
9	Kep. Bangka Belitung	4	2	56	65	98	74	121	61	117	58	101	44	63	18	560	322	882
10	Kepulauan Riau	11	12	230	228	287	192	343	144	303	136	210	63	82	31	1.466	806	2.272
11	DKI Jakarta	62	113	1.344	1.357	1.515	1.050	1.539	915	1.613	1.054	1.144	640	397	217	7.614	5.346	12.960
12	Jawa Barat	211	350	3.448	4.111	3.921	3.224	3.920	2.688	3.967	2.638	2.986	1.670	1.463	648	19.916	15.329	35.245
13	Jawa Tengah	58	130	1.641	2.159	2.090	1.899	2.422	1.680	2.675	1.778	2.287	1.360	1.266	512	12.439	9.518	21.957
14	DI Yogyakarta	1	10	104	109	108	92	138	82	130	75	155	62	99	31	735	461	1.196
15	Jawa Timur	98	136	1.638	2.071	1.990	1.678	2.554	1.881	3.144	2.270	2.704	1.697	1.542	608	13.670	10.341	24.011
16	Banten	75	80	832	766	1.197	771	1.199	674	1.179	692	814	474	381	183	5.677	3.640	9.317
17	Bali	6	7	142	114	187	133	220	112	229	105	205	97	151	41	1.140	609	1.749
18	Nusa Tenggara Barat	30	27	259	262	473	335	526	323	575	406	483	254	297	114	2.643	1.721	4.364
19	Nusa Tenggara Timur	28	31	383	338	405	351	342	221	317	209	277	194	235	111	1.987	1.455	3.442
20	Kalimantan Barat	23	20	320	305	469	265	545	287	571	254	434	195	234	93	2.596	1.419	4.015
21	Kalimantan Tengah	6	10	120	94	177	127	210	131	240	132	175	91	70	32	998	617	1.615
22	Kalimantan Selatan	9	12	141	133	249	167	251	178	357	217	249	139	108	40	1.364	886	2.250
23	Kalimantan Timur	11	14	212	188	280	187	331	192	324	174	253	123	115	33	1.526	911	2.437
24	Kalimantan Utara	3	-	41	44	87	49	79	54	112	56	70	26	41	16	433	245	678
25	Sulawesi Utara	15	20	291	233	365	226	452	249	515	289	431	233	245	93	2.314	1.343	3.657
26	Sulawesi Tengah	13	23	229	205	270	163	291	174	296	187	226	148	133	47	1.458	947	2.405
27	Sulawesi Selatan	23	43	813	898	1.054	788	1.120	819	1.331	971	1.020	608	593	268	5.954	4.395	10.349
28	Sulawesi Tenggara	11	14	212	215	243	193	246	139	277	152	221	111	131	51	1.341	875	2.216
29	Gorontalo	9	9	129	128	172	122	195	123	215	157	152	99	92	31	964	669	1.633
30	Sulawesi Barat	12	17	151	159	155	121	190	119	186	125	140	83	83	41	917	665	1.582
31	Maluku	8	11	215	183	250	158	206	132	174	113	147	81	85	34	1.085	712	1.797
32	Maluku Utara	6	7	120	128	157	118	150	89	150	81	115	50	50	20	748	493	1.241
33	Papua Barat	5	14	144	167	136	114	119	81	108	47	55	31	28	5	595	459	1.054
34	Papua	99	96	695	684	604	478	424	285	273	140	146	81	55	20	2.296	1.784	4.080
Indonesia		**1.092**	**1.498**	**16.924**	**18.078**	**21.314**	**15.920**	**23.568**	**14.673**	**25.468**	**15.672**	**20.304**	**10.994**	**10.791**	**4.355**	**119.461**	**81.190**	**200.651**
		1,29%		**17,44%**		**18,56%**		**19,06%**		**20,50%**		**15,60%**		**7,55%**		**100%**		

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022
Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan
* : Data berdasarkan hasil penyisiran kasus SIM RS Mopping up

Mopping up untuk kelompok umur

Lampiran 52

ANGKA KESEMBUHAN DAN PENGOBATAN LENGKAP SERTA KEBERHASILAN PENGOBATAN TUBERKULOSIS MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Kasus Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis Yang Terdaftar dan Diobati*)			Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis Terdaftar Dan Diobati*)			Angka Kesembuhan *(Cure Rate)* Tuberkulosis Paru Terkonfirmasi Bakteriologis						Angka Pengobatan Lengkap *(Complete Rate) Semua Kasus Tuberkulosis*						Angka Keberhasilan Pengobatan *(Success Rate/SR)* Semua Kasus Tuberkulosis						Jumlah Kematian Selama Pengobatan Tuberkulosis	
								Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan		Laki-laki		Perempuan		Laki-laki + Perempuan			
		L	P	L + P	L	P	L + P	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*	*(27)*	*(28)*
1	Aceh	2.149	1.146	3.295	4.174	2.513	6.687	624	29,0	339	29,6	963	29,2	3.055	73,2	1.954	77,8	5.009	74,9	3.679	88,1	2.293	91,2	5.972	89,3	249	3,7
2	Sumatera Utara	6.572	3.442	10.014	14.090	7.816	21.906	2.274	34,6	1.212	35,2	3.486	34,8	10.353	73,5	5.937	76,0	16.290	74,4	12.627	89,6	7.149	91,5	19.776	90,3	327	1,5
3	Sumatera Barat	2.319	1.320	3.639	3.794	2.460	6.254	1.183	51,0	702	53,2	1.885	51,8	2.148	56,6	1.552	63,1	3.700	59,2	3.331	87,8	2.254	91,6	5.585	89,3	492	7,9
4	Riau	3.042	1.619	4.661	5.470	3.328	8.798	1.107	36,4	583	36,0	1.690	36,3	3.959	72,4	2.549	76,6	6.508	74,0	5.066	92,6	3.132	94,1	8.198	93,2	76	0,9
5	Jambi	1.238	734	1.972	2.011	1.253	3.264	437	35,3	268	36,5	705	35,8	1.368	68,0	862	68,8	2.230	68,3	1.805	89,8	1.130	90,2	2.935	89,9	168	5,1
6	Sumatera Selatan	3.584	2.202	5.786	6.047	3.895	9.942	1.244	34,7	792	36,0	2.036	35,2	4.151	68,6	2.729	70,1	6.880	69,2	5.395	89,2	3.521	90,4	8.916	89,7	834	8,4
7	Bengkulu	579	320	899	1.030	637	1.667	157	27,1	102	31,9	259	28,8	749	72,7	465	73,0	1.214	72,8	906	88,0	567	89,0	1.473	88,4	97	5,8
8	Lampung	3.801	2.527	6.328	6.785	4.785	11.570	1.689	44,4	1.198	47,4	2.887	45,6	4.703	69,3	3.388	70,8	8.091	69,9	6.392	94,2	4.586	95,8	10.978	94,9	158	1,4
9	Kep. Bangka Belitung	604	354	958	1.004	622	1.626	189	31,3	106	29,9	295	30,8	661	65,8	443	71,2	1.104	67,9	850	84,7	549	88,3	1.399	86,0	1.898	116,7
10	Kepulauan Riau	1.178	749	1.927	2.256	1.576	3.832	282	23,9	195	26,0	477	24,8	1.623	71,9	1.201	76,2	2.824	73,7	1.905	84,4	1.396	88,6	3.301	86,1	1.696	44,3
11	DKI Jakarta	6.729	4.191	10.920	14.569	10.794	25.363	2.260	33,6	1.423	34,0	3.683	33,7	9.083	62,3	7.353	68,1	16.436	64,8	11.343	77,9	8.776	81,3	20.119	79,3	2.154	8,5
12	Jawa Barat	17.726	12.865	30.591	46.404	38.118	84.522	6.223	35,1	4.749	36,9	10.972	35,9	31.333	67,5	27.366	71,8	58.699	69,4	37.556	80,9	32.115	84,3	69.671	82,4	307	0,4
13	Jawa Tengah	10.941	7.999	18.940	22.995	18.274	41.269	4.562	41,7	3.548	44,4	8.110	42,8	14.969	65,1	12.631	69,1	27.600	66,9	19.531	84,9	16.179	88,5	35.710	86,5	200	0,5
14	DI Yogyakarta	656	457	1.113	1.676	1.336	3.012	285	43,4	228	49,9	513	46,1	1.160	69,2	976	73,1	2.136	70,9	1.445	86,2	1.204	90,1	2.649	87,9	79	2,6
15	Jawa Timur	12.537	9.075	21.612	24.466	19.559	44.025	5.999	47,9	4.415	48,7	10.414	48,2	15.455	63,2	13.396	68,5	28.851	65,5	21.454	87,7	17.811	91,1	39.265	89,2	262	0,6
16	Banten	4.754	3.059	7.813	12.186	9.106	21.292	2.075	43,6	1.318	43,1	3.393	43,4	8.833	72,5	6.953	76,4	15.786	74,1	10.908	89,5	8.271	90,8	19.179	90,1	56	0,3
17	Bali	972	557	1.529	1.766	1.171	2.937	459	47,2	283	50,8	742	48,5	989	56,0	717	61,2	1.706	58,1	1.448	82,0	1.000	85,4	2.448	83,4	107	3,6
18	Nusa Tenggara Barat	2.238	1.379	3.617	3.335	2.205	5.540	1.296	57,9	810	58,7	2.106	58,2	1.695	50,8	1.199	54,4	2.894	52,2	2.991	89,7	2.009	91,1	5.000	90,3	162	2,9
19	Nusa Tenggara Timur	1.800	1.382	3.182	3.063	2.415	5.478	484	26,9	399	28,9	883	27,7	2.215	72,3	1.746	72,3	3.961	72,3	2.699	88,1	2.145	88,8	4.844	88,4	373	6,8
20	Kalimantan Barat	2.425	1.191	3.616	4.405	2.422	6.827	915	37,7	459	38,5	1.374	38,0	2.601	59,0	1.511	62,4	4.112	60,2	3.516	79,8	1.970	81,3	5.486	80,4	80	1,2
21	Kalimantan Tengah	919	463	1.382	1.592	912	2.504	331	36,0	168	36,3	499	36,1	996	62,6	601	65,9	1.597	63,8	1.327	83,4	769	84,3	2.096	83,7	84	3,4
22	Kalimantan Selatan	1.100	664	1.764	2.148	1.365	3.513	367	33,4	249	37,5	616	34,9	1.398	65,1	924	67,7	2.322	66,1	1.765	82,2	1.173	85,9	2.938	83,6	291	8,3
23	Kalimantan Timur	1.156	643	1.799	2.789	1.884	4.673	237	20,5	157	24,4	394	21,9	2.034	72,9	1.426	75,7	3.460	74,0	2.271	81,4	1.583	84,0	3.854	82,5	342	7,3
24	Kalimantan Utara	394	229	623	602	376	978	77	19,5	59	25,8	136	21,8	345	57,3	220	58,5	565	57,8	422	70,1	279	74,2	701	71,7	350	35,8
25	Sulawesi Utara	2.205	1.223	3.428	3.141	1.786	4.927	946	42,9	526	43,0	1.472	42,9	1.886	60,0	1.106	61,9	2.992	60,7	2.832	90,2	1.632	91,4	4.464	90,6	72	1,5
26	Sulawesi Tengah	1.485	937	2.422	2.549	1.631	4.180	291	19,6	176	18,8	467	19,3	1.952	76,6	1.301	79,8	3.253	77,8	2.243	88,0	1.477	90,6	3.720	89,0	366	8,8
27	Sulawesi Selatan	4.565	3.195	7.760	7.134	5.061	12.195	1.830	40,1	1.341	42,0	3.171	40,9	4.275	59,9	3.202	63,3	7.477	61,3	6.105	85,6	4.543	89,8	10.648	87,3	100	0,8
28	Sulawesi Tenggara	1.240	794	2.034	1.919	1.229	3.148	447	36,0	312	39,3	759	37,3	1.267	66,0	803	65,3	2.070	65,8	1.714	89,3	1.115	90,7	2.829	89,9	696	22,1
29	Gorontalo	865	630	1.495	1.339	989	2.328	327	37,8	226	35,9	553	37,0	860	64,2	672	67,9	1.532	65,8	1.187	88,6	898	90,8	2.085	89,6	240	10,3
30	Sulawesi Barat	780	580	1.360	1.160	841	2.001	238	30,5	191	32,9	429	31,5	794	68,4	596	70,9	1.390	69,5	1.032	89,0	787	93,6	1.819	90,9	191	9,5
31	Maluku	635	455	1.090	1.182	907	2.089	267	42,0	202	44,4	469	43,0	750	63,5	603	66,5	1.353	64,8	1.017	86,0	805	88,8	1.822	87,2	191	9,1
32	Maluku Utara	595	424	1.019	868	617	1.485	154	25,9	104	24,5	258	25,3	540	62,2	386	62,6	926	62,4	694	80,0	490	79,4	1.184	79,7	311	20,9
33	Papua Barat	487	343	830	857	745	1.602	104	21,4	68	19,8	172	20,7	507	59,2	507	68,1	1.014	63,3	611	71,3	575	77,2	1.186	74,0	375	23,4
34	Papua	2.186	1.617	3.803	4.903	3.953	8.856	761	34,8	546	33,8	1.307	34,4	2.734	55,8	2.338	59,1	5.072	57,3	3.495	71,3	2.884	73,0	6.379	72,0	764	8,6
Indonesia		**104.456**	**68.765**	**173.221**	**213.709**	**156.581**	**370.290**	**40.121**	**38,4**	**27.454**	**39,9**	**67.575**	**39,0**	**141.441**	**66,2**	**109.613**	**70,0**	**251.054**	**67,8**	**181.562**	**85,0**	**137.067**	**87,5**	**318.629**	**86,0**	**14.148**	**3,8**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Keterangan:

*) Kasus Tuberkulosis terdaftar dan diobati berdasarkan kohort yang sama dari kasus yang dinilai kesembuhan dan pengobatan lengkap
Jumlah pasien adalah seluruh pasien Tuberkulosis yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk pasien yang ditemukan di RS, BBKPM/BPKPM/BP4, Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Dokter Praktek Mandiri, Klinik dll

*) Hasil Pengobatan tahun 2020 berdasarkan kohort penemuan kasus tahun 2019

Lampiran 53.a

PENEMUAN KASUS PNEUMONIA BALITA MENURUT KELOMPOK UMUR, JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Balita	Prevalensi Pneumonia Pada Balita (%)	Perkiraan Pneumonia Balita	Realisasi Penemuan Penderita Pneumonia Pada Balita												Jumlah Kematian Balita Karena Pneumonia				Total			CFR (%)
					Pneumonia				Pneumonia Berat				Jumlah			%	< 1 Tahun		1-4 Tahun		L	P	L+P	
					< 1 Tahun		1-4 Tahun		< 1 Tahun		1-4 Tahun		L	P	L+P									
					L	P	L	P	L	P	L	P					L	P	L	P				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
1	Aceh	532.353	4,46	23.743	147	141	540	421	23	7	20	19	730	588	1.318	5,55	4	2	6	21	10	23	33	2,50
2	Sumatera Utara	1.479.131	2,99	44.226	519	510	1.144	1.054	38	9	16	55	1.717	1.628	3.345	7,56	5	4	9	11	14	15	29	0,87
3	Sumatera Barat	499.694	3,91	19.538	522	466	1.358	1.067	57	31	52	42	1.989	1.606	3.595	18,40	0	1	1	7	1	8	9	0,25
4	Riau	676.218	2,67	18.055	285	268	552	399	6	13	47	25	890	705	1.595	8,83	1	2	3	0	4	2	6	0,38
5	Jambi	364.183	3,15	11.472	160	158	451	332	24	9	18	11	653	510	1.163	10,14	0	0	0	0	0	0	0	0,00
6	Sumatera Selatan	874.326	3,61	31.563	598	529	1.483	1.215	52	39	41	42	2.174	1.825	3.999	12,67	0	0	0	0	0	0	0	0,00
7	Bengkulu	197.709	2,00	3.954	41	49	112	89	10	5	12	12	175	155	330	8,35	0	0	0	2	0	2	2	1,03
8	Lampung	769.682	2,23	17.164	961	925	2.374	2.085	68	38	286	235	3.689	3.283	6.972	40,62	1	0	1	0	2	0	2	0,05
9	Kep. Bangka Belitung	140.236	6,05	8.484	207	201	762	681	1	3	19	16	989	901	1.890	22,28	0	1	1	1	1	2	3	0,29
10	Kepulauan Riau	140.236	3,98	5.581	191	161	431	284	5	4	10	6	637	455	1.092	19,56	0	0	0	0	0	0	0	0,00
11	DKI Jakarta	1.110.093	4,62	51.286	2.346	1.978	4.583	3.895	34	23	21	28	6.984	5.924	12.908	25,17	0	0	0	0	0	0	0	0,00
12	Jawa Barat	4.835.292	4,24	205.016	10.803	10.258	23.229	20.676	578	443	659	539	35.269	31.916	67.185	32,77	9	9	18	5	27	14	41	0,13
13	Jawa Tengah	2.652.751	3,61	95.764	4.554	4.094	14.060	11.893	376	306	352	343	19.342	16.636	35.978	37,57	18	20	38	14	56	34	90	0,58
14	DI Yogyakarta	293.068	4,32	12.661	248	126	440	318	11	3	16	16	715	463	1.178	9,30	3	5	8	2	11	7	18	3,67
15	Jawa Timur	3.330.329	4,45	148.200	8.694	8.772	28.387	26.467	438	325	544	444	38.063	36.008	74.071	49,98	4	6	10	5	14	11	25	0,08
16	Banten	1.236.601	4,12	50.948	3.851	3.411	8.061	7.617	171	131	153	135	12.236	11.294	23.530	46,18	2	1	3	2	5	3	8	0,07
17	Bali	440.876	2,05	9.038	436	320	884	635	113	61	63	72	1.496	1.088	2.584	28,59	4	5	9	5	13	10	23	3,20
18	Nusa Tenggara Barat	522.598	6,38	33.342	2.347	1.817	3.720	3.178	214	174	265	198	6.546	5.367	11.913	35,73	4	3	7	0	11	3	14	0,43
19	Nusa Tenggara Timur	579.310	4,28	24.794	386	335	468	390	34	28	27	18	915	771	1.686	6,80	8	4	12	2	20	6	26	5,86
20	Kalimantan Barat	469.747	2,12	9.959	134	123	253	167	11	10	18	19	416	319	735	7,38	8	5	13	12	21	17	38	13,44
21	Kalimantan Tengah	265.371	4,37	11.597	149	139	291	218	74	62	79	50	593	469	1.062	9,16	1	3	4	1	5	4	9	2,29
22	Kalimantan Selatan	415.761	5,53	22.992	811	622	1.594	1.233	84	47	50	52	2.539	1.954	4.493	19,54	2	0	2	2	4	2	6	0,37
23	Kalimantan Timur	393.378	2,86	11.251	314	211	554	419	7	5	2	7	877	642	1.519	13,50	0	1	1	0	1	1	2	0,38
24	Kalimantan Utara	75.361	2,86	2.155	177	62	255	176	4	2	6	3	442	243	685	31,78	0	0	0	0	0	0	0	0,00
25	Sulawesi Utara	238.270	2,68	6.386	53	26	94	102	0	2	3	1	150	131	281	4,40	2	0	2	0	4	0	4	4,27
26	Sulawesi Tengah	296.292	5,19	15.378	855	703	1.660	1.328	51	16	33	22	2.599	2.069	4.668	30,36	0	0	0	5	0	5	5	0,34
27	Sulawesi Selatan	884.870	3,79	33.537	477	417	798	620	56	15	27	33	1.358	1.085	2.443	7,28	2	1	3	4	5	5	10	1,39
28	Sulawesi Tenggara	271.952	3,84	10.443	218	162	344	276	17	5	11	15	590	458	1.048	10,04	0	0	0	0	0	0	0	0,00
29	Gorontalo	118.781	4,84	5.749	285	210	425	353	24	15	47	65	781	643	1.424	24,77	4	3	7	0	11	3	14	3,05
30	Sulawesi Barat	141.096	4,88	6.885	73	51	156	98	9	1	3	5	241	155	396	5,75	1	0	1	2	2	2	4	3,33
31	Maluku	172.816	3,74	6.463	120	95	179	108	13	16	14	9	326	228	554	8,57	0	2	2	3	2	5	7	5,05
32	Maluku Utara	123.806	2,29	2.835	84	50	117	75	3	1	0	0	204	126	330	11,64	1	2	3	0	4	2	6	7,09
33	Papua Barat	97.542	2,88	2.809	68	66	107	88	2	1	4	2	181	157	338	12,03	3	2	5	0	8	2	10	12,13
34	Papua	318.861	2,80	8.928	409	341	451	495	72	60	67	58	999	954	1.953	21,87	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Indonesia		**24.958.589**	**3,55**	**886.030**	**41.523**	**37.797**	**100.317**	**88.452**	**2.680**	**1.910**	**2.985**	**2.597**	**147.505**	**130.756**	**278.261**	**31,41**	**87**	**82**	**169**	**106**	**256**	**188**	**444**	**0,16**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Laporan Rutin P2 ISPA Tahun 2021)

Keterangan:

Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di **beberapa** RS (belum semua kab/kota melaporkan kasus di RS wilayahnya)

Lampiran 53.b

BALITA BATUK/KESUKARAN BERNAFAS YANG DIBERIKAN TATALAKSANA STANDAR
DAN KABUPATEN/KOTA DENGAN 50% PUSKESMAS MELAKUKAN TATALAKSANA STANDAR MINIMAL 60%
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Balita Batuk Atau Kesukaran Bernafas			Batuk Bukan Pneumonia			Jumlah Kab/Kota	Jumlah Kab/Kota Yang 50% Puskesmas Melakukan Tatalaksana Standar Minimal 60%	Persentase Kab/Kota Yang 50% Puskesmas Melakukan Tatalaksana Standar Minimal 60%
		Jumlah Kunjungan	Diberikan Tatalaksana Standar (Dihitung Napas/ Lihat TDDK*)	Persentase Yang Diberikan Tatalaksana Standar	L	P	L + P			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	94.501	52.839	55,9	44.360	42.949	87.309	23	10	43,48
2	Sumatera Utara	196.696	154.881	86,6	113.538	113.302	226.840	33	15	45,45
3	Sumatera Barat	81.619	70.508	103,7	40.240	40.400	80.640	19	17	89,47
4	Riau	106.762	85.978	104,7	49.502	48.070	97.572	12	9	75,00
5	Jambi	88.882	82.593	139,4	41.590	40.891	82.481	11	11	100,00
6	Sumatera Selatan	140.888	132.123	150,0	72.292	71.274	143.566	17	14	82,35
7	Bengkulu	34.965	32.347	157,3	16.421	17.082	33.503	10	6	60,00
8	Lampung	161.506	164.165	193,1	87.403	89.337	176.740	15	14	93,33
9	Kep. Bangka Belitung	22.900	22.679	178,3	10.693	9.791	20.484	7	7	100,00
10	Kepulauan Riau	33.476	26.414	110,5	15.546	14.950	30.496	7	4	57,14
11	DKI Jakarta	154.371	151.952	216,6	75.818	66.597	142.415	6	6	100,00
12	Jawa Barat	922.230	749.816	170,7	428.791	424.076	852.867	27	26	96,30
13	Jawa Tengah	553.082	509.845	212,0	291.612	292.388	584.000	35	25	71,43
14	DI Yogyakarta	17.450	18.811	258,7	10.530	9.779	20.309	5	3	60,00
15	Jawa Timur	652.502	585.460	224,3	290.599	298.367	588.966	38	36	94,74
16	Banten	273.096	226.496	165,9	123.142	118.435	241.577	8	7	87,50
17	Bali	40.958	41.150	361,7	23.550	20.554	44.104	9	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	170.265	141.734	308,0	83.234	79.686	162.920	10	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	122.001	119.619	372,6	60.266	60.043	120.309	22	14	63,64
20	Kalimantan Barat	41.320	34.790	218,9	33.209	31.406	64.615	14	4	28,57
21	Kalimantan Tengah	27.844	25.814	250,3	14.893	13.730	28.623	14	11	78,57
22	Kalimantan Selatan	41.393	39.368	266,3	25.319	24.034	49.353	13	11	84,62
23	Kalimantan Timur	64.650	44.915	201,5	34.130	30.596	64.726	10	6	60,00
24	Kalimantan Utara	18.281	13.342	313,8	9.409	8.500	17.909	5	4	80,00
25	Sulawesi Utara	18.046	14.553	241,9	17.049	15.940	32.989	15	2	13,33
26	Sulawesi Tengah	69.521	60.436	278,2	34.916	33.678	68.594	13	13	100,00
27	Sulawesi Selatan	81.236	56.389	236,0	41.850	39.203	81.053	24	11	45,83
28	Sulawesi Tenggara	28.257	24.973	309,3	17.295	15.428	32.723	17	8	47,06
29	Gorontalo	16.326	11.912	241,5	8.035	7.467	15.502	6	4	66,67
30	Sulawesi Barat	17.022	12.579	243,9	8.820	8.424	17.244	6	5	83,33
31	Maluku	40.663	23.118	227,4	26.263	24.963	51.226	11	4	36,36
32	Maluku Utara	32.050	31.855	387,6	20.492	18.584	39.076	10	4	40,00
33	Papua Barat	19.011	14.907	321,5	10.596	10.957	21.553	13	1	7,69
34	Papua	48.407	21.398	185,7	26.909	27.233	54.142	29	0	0,00
Indonesia		**4.432.177**	**3.799.759**	**3,55**	**2.208.312**	**2.168.114**	**4.376.426**	**514**	**331**	**64,40**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Laporan Rutin P2 ISPA Tahun 2021)

Keterangan:

* TDDK = tarikan dinding dada ke dalam

Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut di beberapa kab/kota termasuk kasus yang ditemukan pada beberapa RS (belum semua kab/kota melaporkan kasus di RS wilayahnya)

Lampiran 53.c

KASUS KONFIRMASI, SEMBUH, DAN MENINGGAL COVID-19 MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021

No	Provinsi	Kasus Konfirmasi	Sembuh	Meninggal	Angka Kesembuhan (*Recovery Rate/RR*)	Angka Kematian (*Case Fatality Rate/ CFR*)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	38.430	36.361	2.066	94,62	5,38
2	Sumatera Utara	106.119	103.151	2.893	97,20	2,73
3	Sumatera Barat	89.873	87.704	2.153	97,59	2,40
4	Riau	128.939	124.476	4.124	96,54	3,20
5	Jambi	29.792	28.993	780	97,32	2,62
6	Sumatera Selatan	59.986	56.890	3.081	94,84	5,14
7	Bengkulu	23.106	22.632	473	97,95	2,05
8	Lampung	49.750	45.340	3.873	91,14	7,78
9	Kepulauan Bangka Belitung	52.359	50.881	1.462	97,18	2,79
10	Kep. Riau	54.214	52.133	1.748	96,16	3,22
11	DKI Jakarta	865.297	851.191	13.608	98,37	1,57
12	Jawa Barat	708.852	693.571	14.756	97,84	2,08
13	Jawa Tengah	486.916	455.599	30.287	93,57	6,22
14	DI Yogyakarta	156.997	151.624	5.271	96,58	3,36
15	Jawa Timur	400.066	370.225	29.745	92,54	7,44
16	Banten	132.835	130.094	2.693	97,94	2,03
17	Bali	114.389	110.271	4.059	96,40	3,55
18	Nusa Tenggara Barat	27.809	26.978	818	97,01	2,94
19	Nusa Tenggara Timur	64.253	62.844	1.347	97,81	2,10
20	Kalimantan Barat	41.672	40.604	1.063	97,44	2,55
21	Kalimantan Tengah	45.659	44.208	1.407	96,82	3,08
22	Kalimantan Selatan	69.955	67.553	2.391	96,57	3,42
23	Kalimantan Timur	158.332	152.867	5.457	96,55	3,45
24	Kalimantan Utara	35.940	35.111	811	97,69	2,26
25	Sulawesi Utara	34.799	33.629	1.062	96,64	3,05
26	Sulawesi Tengah	47.253	45.603	1.605	96,51	3,40
27	Sulawesi Selatan	110.000	107.723	2.241	97,93	2,04
28	Sulawesi Tenggara	20.173	19.639	528	97,35	2,62
29	Gorontalo	11.849	11.386	461	96,09	3,89
30	Sulawesi Barat	12.368	12.017	347	97,16	2,81
31	Maluku	14.596	14.325	264	98,14	1,81
32	Maluku Utara	12.105	11.802	303	97,50	2,50
33	Papua Barat	23.660	23.194	357	98,03	1,51
34	Papua	34.377	33.715	560	98,07	1,63
Indonesia		**4.262.720**	**4.114.334**	**144.094**	**96,52**	**3,38**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Data per 31 Desember 2021

Lampiran 53.d

JUMLAH LABORATORIUM DAN PEMERIKSAAN SPESIMEN COVID-19 MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Lab yang Memeriksa			Jumlah Spesimen[3]					Jumlah Orang Diperiksa[3]	Jumlah Orang Diperiksa Positif[3]	Jumlah Penduduk	Jumlah Orang Diperiksa/ 1 Juta Penduduk	*Positivity Rate (%)*
		RT-PCR[1]	TCM[2]	RT-PCR dan TCM[1]	Diperiksa	Positif	Negatif	Inkonklusif	Invalid					
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*
1	Aceh	4	4	1	170.157	44.179	124.740	616	595	97.644	38.430	5.483.702	17.806	39,36
2	Sumatera Utara	27	6	2	1.166.626	241.610	924.065	464	412	636.747	106.119	14.767.655	43.118	16,67
3	Sumatera Barat	5	6		871.615	120.084	750.401	362	572	380.996	89.873	5.522.731	68.987	23,59
4	Riau	11	3	2	674.715	171.267	503.305	16	28	354.090	128.939	7.159.392	49.458	36,41
5	Jambi	5	2	1	193.571	49.963	143.377	160	55	115.196	29.792	3.693.933	31.185	25,86
6	Sumatera Selatan	7	7	1	578.145	120.245	452.506	267	5.053	244.147	59.986	8.605.288	28.372	24,57
7	Bengkulu	3	6	2	75.927	21.707	53.866	242	82	51.040	23.106	2.028.657	25.160	45,27
8	Lampung	8	3		229.799	82.409	146.752	312	248	128.541	49.750	8.558.362	15.019	38,70
9	Kep. Bangka Belitung	3	4	1	162.541	32.348	130.039	74	61	101.344	52.359	1.524.208	66.490	51,66
10	Kep. Riau	15	4	2	485.874	65.543	420.180	84	26	308.459	54.214	2.251.976	136.973	17,58
11	DKI Jakarta	61	7	8	8.109.109	1.487.298	6.593.819	15.038	2.227	3.825.198	865.297	10.691.409	357.782	22,62
12	Jawa Barat	101	22	6	3.940.556	1.085.816	2.834.002	10.935	2.691	2.255.129	708.852	50.153.631	44.964	31,43
13	Jawa Tengah	35	23	5	2.407.929	747.139	1.652.125	3.425	2.295	1.190.765	486.916	35.092.453	33.932	40,89
14	DI Yogyakarta	11	1		680.452	174.462	505.046	819	23	410.230	156.997	3.899.219	105.208	38,27
15	Jawa Timur	35	38	19	3.157.059	759.630	2.368.825	19.516	7.713	1.662.769	400.066	40.060.234	41.507	24,06
16	Banten	19	8	5	1.325.477	356.163	963.526	3.690	1.618	744.253	132.835	13.217.890	56.306	17,85
17	Bali	14	0		711.326	118.356	592.487	101	44	420.463	114.389	4.399.929	95.561	27,21
18	Nusa Tenggara Barat	6	10	3	222.954	34.704	188.188	27	33	148.310	27.809	5.147.975	28.809	18,75
19	Nusa Tenggara Timur	12	11	1	197.918	33.901	163.577	44	90	145.079	64.253	5.565.560	26.067	44,29
20	Kalimantan Barat	17	5		387.217	53.251	333.542	228	80	255.639	41.672	5.157.153	49.570	16,30
21	Kalimantan Tengah	1	7	1	263.027	68.096	194.093	594	233	129.638	45.659	2.781.232	46.612	35,22
22	Kalimantan Selatan	9	2	1	615.099	120.487	493.459	145	964	276.248	69.955	4.322.749	63.906	25,32
23	Kalimantan Timur	10	10	2	1.186.175	176.906	1.006.971	1.132	1.086	514.996	158.332	3.809.694	135.180	30,74
24	Kalimantan Utara	4	4	2	101.435	20.219	80.892	228	8	62.037	35.940	771.856	80.374	57,93
25	Sulawesi Utara	5	5	1	279.868	45.656	232.313	1.157	544	145.595	34.799	2.539.822	57.325	23,90
26	Sulawesi Tengah	2	5		121.582	27.474	93.447	478	179	79.162	47.253	3.110.482	25.450	59,69
27	Sulawesi Selatan	20	12	1	882.264	167.572	710.770	1.782	1.741	493.904	110.000	8.966.939	55.081	22,27
28	Sulawesi Tenggara	8	2	1	89.877	16.611	73.199	26	34	61.644	20.173	2.767.606	22.273	32,73
29	Gorontalo	0	2		66.315	11.372	54.034	250	659	36.311	11.849	1.224.895	29.644	32,63
30	Sulawesi Barat	1	2		43.945	11.661	32.066	183	27	24.278	12.368	1.411.139	17.205	50,94
31	Maluku	3	10		98.352	17.206	79.826	1.218	99	60.730	14.596	1.839.869	33.008	24,03
32	Maluku Utara	6	3	3	181.837	14.343	167.136	132	191	65.291	12.105	1.284.341	50.836	18,54
33	Papua Barat	4	8	2	301.584	44.930	255.986	202	264	76.896	23.660	986.104	162.163	14,80
34	Papua	11	14	1	131.409	26.651	104.012	132	526	159.910	34.377	3.450.412	22.286	44,71
Indonesia		**483**	**256**	**74**	**30.111.736**	**6.569.259**	**23.422.572**	**64.079**	**30.501**	**15.502.769**	**4.262.720**	**272.248.500**	**56.943**	**27,50**

Sumber : [1] Badan Penelitian dan Pemngembangan Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

[2] Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

[3] Pusat Data dan Informasi, Kemenkes RI 2022

Catatan: kolom E bukan merupakan penjumlahan C dan D

Data per 31 Desember 2021

Lampiran 53.e

KASUS KONFIRMASI COVID-19 BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021

No	Provinsi	0-2 Tahun		3-6 Tahun		7-12 Tahun		13-15 Tahun		16-18 Tahun		19-30 Tahun		31-45 Tahun		46-59 Tahun		60+ Tahun		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Tidak diketahui
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Aceh	116	76	139	95	343	330	313	318	369	430	3.025	3.684	4.326	4.835	3.070	3.404	2.467	2.323	14.168	15.495	8.767
2	Sumatera Utara	600	484	862	808	1.950	1.960	1.185	1.228	1.458	1.785	9.099	11.076	11.979	12.426	8.487	9.690	6.044	6.833	41.664	46.290	18.165
3	Sumatera Barat	463	420	744	683	1.610	1.626	1.061	1.206	1.289	1.618	6.281	9.940	7.170	9.412	5.723	7.321	4.374	4.671	28.715	36.897	24.261
4	Riau	1.033	885	1.220	1.038	2.438	2.308	1.478	1.560	1.586	1.831	11.710	13.767	15.473	15.751	10.459	10.597	5.367	5.020	50.764	52.757	25.418
5	Jambi	192	202	282	249	590	566	395	436	531	537	2.647	3.446	3.740	3.990	2.611	2.812	1.435	1.349	12.423	13.587	3.782
6	Sumatera Selatan	340	310	373	378	794	739	478	458	530	631	5.139	5.977	7.172	7.162	5.004	5.276	3.814	3.395	23.644	24.326	12.016
7	Bengkulu	91	103	153	144	323	362	254	269	252	333	1.936	2.618	2.643	3.159	1.845	2.190	1.265	1.080	8.762	10.258	4.086
8	Lampung	184	147	241	235	526	553	384	469	426	677	3.081	5.391	5.019	6.800	4.804	6.313	3.926	3.633	18.591	24.218	6.941
9	Kep. Bangka Belitung	482	402	606	649	1.583	1.475	1.085	994	1.056	1.267	5.027	6.432	6.692	7.991	3.933	4.835	2.696	2.748	23.160	26.793	2.406
10	Kepulauan Riau	308	292	576	495	1.063	1.082	624	612	700	801	6.414	7.403	7.949	6.650	4.429	3.797	2.093	1.789	24.156	22.921	7.137
11	Dki Jakarta	6.251	5.740	7.663	6.960	14.270	13.695	8.001	8.347	9.651	11.858	85.473	98.576	102.616	94.672	64.692	65.434	33.112	35.317	331.729	340.599	192.969
12	Jawa Barat	4.848	4.597	6.669	6.153	13.039	12.994	8.328	9.032	9.580	12.056	67.948	81.592	86.624	84.651	63.545	69.652	32.691	31.360	293.272	312.087	103.493
13	Jawa Tengah	3.043	2.543	2.960	2.786	6.721	6.741	4.738	5.137	5.517	6.981	35.922	55.238	48.527	57.944	46.471	51.824	32.290	28.450	186.189	217.644	83.083
14	Di Yogyakarta	1.658	1.483	2.136	2.061	4.358	4.133	2.651	2.441	2.769	2.961	13.585	16.898	15.370	17.992	14.547	16.561	11.261	10.699	68.335	75.229	13.433
15	Jawa Timur	1.889	1.792	2.064	1.858	4.511	4.371	2.942	3.168	3.436	4.255	28.965	36.652	40.081	43.024	38.534	41.896	26.904	25.596	149.326	162.612	88.128
16	Banten	847	778	1.176	1.073	2.288	2.176	1.362	1.523	1.580	1.963	13.696	15.914	17.908	16.436	12.888	12.139	5.645	4.846	57.390	56.848	18.597
17	Bali	823	719	946	785	1.990	1.750	1.108	1.078	1.413	1.536	10.233	12.472	12.200	12.292	11.586	10.640	8.396	6.535	48.695	47.807	17.887
18	Nusa Tenggara Barat	223	187	105	128	254	229	191	191	269	256	2.750	3.266	3.524	3.456	2.129	2.225	1.504	1.203	10.949	11.141	5.719
19	Nusa Tenggara Timur	568	502	736	659	1.615	1.644	1.235	1.162	1.477	1.750	6.959	9.359	7.710	9.265	4.985	5.119	3.072	2.603	28.357	32.063	3.833
20	Kalimantan Barat	293	234	324	269	766	759	537	670	740	957	4.607	5.170	5.382	5.534	3.782	3.766	2.469	2.179	18.900	19.538	3.234
21	Kalimantan Tengah	300	256	404	357	841	731	465	464	542	662	4.418	4.940	5.437	5.328	3.602	3.669	1.864	1.467	17.873	17.874	9.912
22	Kalimantan Selatan	354	315	421	358	869	874	626	621	799	931	7.517	7.697	8.398	7.887	5.609	5.606	2.805	2.360	27.398	26.649	15.908
23	Kalimantan Timur	1.208	1.032	1.596	1.465	3.148	3.007	1.701	1.792	1.972	2.211	19.162	16.191	23.889	17.395	13.421	11.261	5.608	4.407	71.705	58.761	27.866
24	Kalimantan Utara	207	167	384	326	789	722	438	550	586	673	4.537	4.472	5.473	4.515	2.948	2.554	1.364	1.101	16.726	15.080	4.134
25	Sulawesi Utara	170	157	237	204	423	400	275	277	358	453	2.626	3.206	3.438	3.603	2.578	2.638	1.964	2.075	12.069	13.013	9.717
26	Sulawesi Tengah	357	325	394	325	843	858	484	631	640	907	4.662	6.756	5.663	7.275	3.960	4.610	2.566	2.375	19.569	24.062	3.622
27	Sulawesi Selatan	622	482	712	645	1.424	1.409	903	1.113	1.193	1.603	8.880	13.385	10.476	12.517	6.589	7.429	4.510	4.546	35.309	43.129	31.562
28	Sulawesi Tenggara	87	68	69	63	155	146	115	123	156	208	1.582	1.979	1.859	1.957	1.165	1.118	729	583	5.917	6.245	8.011
29	Gorontalo	46	46	45	32	91	97	102	91	120	161	1.040	1.369	1.129	1.203	848	749	420	407	3.841	4.155	3.853
30	Sulawesi Barat	66	46	75	73	174	204	106	139	173	241	1.188	1.795	1.497	1.882	880	855	516	455	4.675	5.690	2.003
31	Maluku	46	37	62	54	116	123	104	91	147	133	1.215	1.349	1.356	1.350	736	722	371	293	4.153	4.152	6.291
32	Maluku Utara	50	46	44	35	113	104	76	101	106	178	1.244	1.543	1.726	1.648	818	732	429	316	4.606	4.703	2.796
33	Papua Barat	190	133	226	198	379	362	247	253	307	360	2.538	2.693	3.062	2.598	1.549	1.284	620	446	9.118	8.327	6.215
34	Papua	200	172	226	232	481	423	278	273	395	408	2.957	2.988	3.545	3.070	2.197	1.771	859	624	11.138	9.961	13.278
Indonesia		**28.155**	**25.178**	**34.870**	**31.873**	**70.878**	**68.953**	**44.270**	**46.818**	**52.123**	**63.612**	**388.063**	**475.234**	**489.053**	**495.670**	**360.424**	**380.489**	**215.450**	**203.084**	**1.683.286**	**1.790.911**	**788.523**

Sumber : Pusat Data dan Teknlogi Informasi, Kemenkes RI, 2022

Catatan: Distribusi jenis kelamin dan umur hanya dari identitas kasus yang dilaporkan lengkap

Data per 31 Desember 2021

Lampiran 53.f

CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 MENURUT USIA BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR

MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Usia 12-17 Tahun									Usia 18-59 Tahun									Usia 60+									Cakupan Total				
		Sasaran	Dosis 1				Dosis 2				Sasaran	Dosis 1				Dosis 2				Sasaran	Dosis 1				Dosis 2				Sasaran	Dosis 1	%	Dosis 2	%
			L	P	L+P	%	L	P	L+P	%		L	P	L+P	%	L	P	L+P	%		L	P	L+P	%	L	P	L+P	%					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
1	Aceh	577.015	166.159	184.210	350.369	60,7	70.130	90.172	160.302	27,8	3.112.751	1.064.301	1.119.677	2.183.978	70,2	490.232	510.343	1.000.575	32,1	339.125	98.615	111.747	210.362	62,0	30.707	27.471	58.178	17	4.028.891	2.744.709	68,1	1.219.055	30,3
2	Sumatera Utara	1.586.864	766.337	792.517	1.558.854	98,2	506.594	577.507	1.084.101	68,3	8.739.249	3.107.413	3.321.597	6.429.010	73,6	1.959.122	2.253.056	4.212.178	48,2	1.093.446	331.723	410.092	741.815	67,8	192.195	252.391	444.586	41	11.419.559	8.729.679	76,4	5.740.865	50,3
3	Sumatera Barat	589.723	256.764	275.653	532.417	90,3	173.577	219.728	393.305	66,7	3.329.211	1.089.278	1.179.737	2.269.015	68,2	617.314	797.240	1.414.554	42,5	489.575	109.920	118.438	228.358	46,6	58.301	61.688	119.989	25	4.408.509	3.029.790	68,7	1.927.848	43,7
4	Riau	684.198	287.259	306.719	593.978	86,8	149.507	183.325	332.832	48,6	3.833.691	1.553.392	1.478.798	3.032.190	79,1	850.294	841.811	1.692.105	44,1	322.466	102.784	86.725	189.509	58,8	51.777	42.905	94.682	29	4.840.347	3.815.677	78,8	2.119.619	43,8
5	Jambi	364.233	154.464	166.763	321.227	88,2	104.311	124.461	228.772	62,8	2.099.710	809.097	822.794	1.631.891	77,7	571.964	617.609	1.189.573	56,7	222.250	72.891	64.871	137.762	62,0	51.241	43.799	95.040	43	2.686.193	2.090.880	77,8	1.513.385	56,3
6	Sumatera Selatan	846.683	355.724	381.669	737.393	87,1	235.470	282.804	518.274	61,2	4.859.342	1.848.188	1.916.327	3.764.515	77,5	987.205	1.095.786	2.082.991	42,9	597.071	199.286	192.670	391.956	65,6	94.944	94.452	189.396	32	6.303.096	4.893.864	77,6	2.790.661	44,3
7	Bengkulu	206.643	94.060	101.575	195.635	94,7	54.591	68.123	122.714	59,4	1.213.699	435.751	467.199	902.950	74,4	270.851	328.885	599.736	49,4	133.450	46.082	44.157	90.239	67,6	29.527	28.899	58.426	44	1.553.792	1.188.824	76,5	780.876	50,3
8	Lampung	880.203	390.447	416.208	806.655	91,6	230.918	275.507	506.425	57,5	5.060.777	1.901.438	1.966.429	3.867.867	76,4	1.123.731	1.309.551	2.433.282	48,1	704.246	264.132	227.154	491.286	69,8	129.509	109.827	239.336	34	6.645.226	5.165.808	77,7	3.179.043	47,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	151.433	76.663	80.424	157.087	103,7	51.108	58.389	109.497	72,3	890.528	360.231	344.256	704.487	79,1	260.018	269.219	529.237	59,4	95.863	35.293	32.747	68.040	71,0	26.936	24.890	51.826	54	1.137.824	929.614	81,7	690.560	60,7
10	Kepulauan Riau	207.663	157.135	154.147	311.282	149,9	83.572	86.686	170.258	82,0	1.286.244	643.314	591.664	1.234.978	96,0	515.717	501.566	1.017.283	79,1	87.128	37.222	35.978	73.200	84,0	28.918	27.043	55.961	64	1.581.035	1.619.460	102,4	1.243.502	78,7
11	DKI Jakarta	1.000.121	855.652	855.726	1.711.378	171,1	470.756	489.410	960.166	96,0	6.634.027	5.265.141	4.291.592	9.556.733	144,1	4.254.793	3.643.113	7.897.906	119,1	761.279	391.132	430.979	822.111	108,0	351.662	394.645	746.307	98	8.395.427	12.090.222	144,0	9.604.379	114,4
12	Jawa Barat	4.867.047	2.423.965	2.491.464	4.915.429	101,0	1.487.117	1.698.401	3.175.518	65,2	29.631.827	10.393.125	11.472.069	21.865.194	73,8	7.220.655	8.806.785	16.027.440	54,1	3.408.940	1.355.976	1.370.403	2.726.379	80,0	784.154	809.979	1.594.133	47	37.907.814	29.507.002	77,8	20.797.091	54,9
13	Jawa Tengah	3.571.070	1.807.759	1.810.163	3.617.922	107,3	1.253.149	1.337.523	2.590.672	76,9	21.675.260	7.727.653	8.897.521	16.625.174	76,7	5.775.490	7.186.808	12.962.298	59,8	3.681.475	1.316.812	1.404.712	2.721.524	73,9	968.032	1.028.237	1.996.269	54	28.727.805	22.964.628	79,9	17.549.239	61,1
14	Yogyakarta	311.596	223.000	216.945	439.945	141,2	158.384	156.371	314.755	101,0	2.095.251	1.025.895	1.090.205	2.116.100	101,0	925.583	1.014.590	1.940.173	92,6	472.852	187.673	210.024	397.697	84,1	164.451	184.138	348.589	74	2.879.699	2.953.742	102,6	2.603.517	90,4
15	Jawa Timur	3.586.141	1.959.629	1.959.350	3.918.979	109,3	1.242.388	1.323.371	2.565.759	71,5	23.904.516	8.950.945	9.639.785	18.590.730	77,8	6.581.217	7.493.966	14.075.183	58,9	4.335.549	1.365.697	1.501.666	2.867.363	66,1	879.840	954.082	1.833.922	42	31.826.206	25.377.072	79,7	18.474.864	58,0
16	Banten	1.207.002	626.561	654.967	1.281.528	106,2	320.601	378.036	698.637	57,9	7.378.774	2.740.482	2.913.708	5.654.190	76,6	1.903.092	2.175.642	4.078.734	55,3	643.607	240.571	240.577	481.148	74,8	154.286	149.460	303.746	47	9.229.383	7.416.866	80,4	5.081.117	55,1
17	Bali	397.239	390.741	366.128	756.869	190,5	190.907	181.449	372.356	93,7	2.552.987	1.396.683	1.296.065	2.692.748	105,5	1.228.142	1.174.281	2.402.423	94,1	454.904	197.261	199.254	396.515	87,2	173.590	172.417	346.007	76	3.405.130	3.846.132	113,0	3.120.786	91,6
18	Nusa Tenggara Barat	533.491	226.865	238.023	464.888	87,1	136.885	159.177	296.062	55,5	3.009.030	1.182.383	1.275.296	2.457.679	81,7	816.649	986.172	1.722.821	57,3	368.117	128.331	133.227	261.558	71,1	82.367	84.261	166.628	45	3.910.638	3.184.125	81,4	2.185.511	55,9
19	Nusa Tenggara Timur	582.844	231.055	263.310	494.365	84,8	119.154	154.968	274.122	47,0	2.843.029	988.000	1.080.904	2.068.904	72,8	482.483	562.656	1.045.139	36,8	405.566	109.532	106.999	216.531	53,4	47.296	43.332	90.628	22	3.831.439	2.779.800	72,6	1.409.889	36,8
20	Kalimantan Barat	569.699	195.781	215.149	410.930	72,1	144.123	171.104	315.227	55,3	2.952.086	1.069.848	1.056.083	2.125.931	72,0	674.055	685.220	1.359.275	46,0	350.692	85.488	78.579	164.067	46,8	48.449	43.015	91.464	26	3.872.477	2.700.928	69,7	1.765.966	45,6
21	Kalimantan Tengah	283.576	119.061	122.640	241.701	85,2	80.082	86.971	167.053	58,9	1.611.512	695.689	599.472	1.295.161	80,4	397.272	357.073	754.345	46,8	141.016	49.884	43.879	93.763	66,5	27.980	23.679	51.659	37	2.036.104	1.630.625	80,1	973.057	47,8
22	Kalimantan Selatan	402.121	160.075	168.626	328.701	81,7	102.630	118.161	220.791	54,9	2.500.464	963.182	929.554	1.892.736	75,7	525.469	496.601	1.022.070	40,9	258.552	79.676	76.642	156.318	60,5	32.100	28.304	60.404	23	3.161.137	2.377.755	75,2	1.303.265	41,2
23	Kalimantan Timur	397.462	188.331	187.454	375.785	94,5	133.624	140.641	274.265	69,0	2.287.406	1.038.509	871.904	1.910.413	83,5	776.058	660.640	1.436.698	62,8	189.533	65.819	49.848	115.667	61,0	49.516	37.692	87.208	46	2.874.401	2.401.865	83,6	1.798.171	62,6
24	Kalimantan Utara	77.891	39.750	39.533	79.283	101,8	24.051	25.826	49.877	64,0	434.527	188.634	156.084	344.718	79,3	141.951	124.096	266.047	61,2	33.254	13.357	10.200	23.557	70,8	9.274	6.816	16.090	48	545.672	447.558	82,0	332.014	60,8
25	Sulawesi Utara	245.339	120.114	123.396	243.510	99,3	67.277	79.658	146.935	59,9	1.575.881	589.622	596.000	1.185.622	75,2	344.524	398.259	742.783	47,1	259.465	82.037	90.814	172.851	66,6	49.731	58.041	107.772	42	2.080.685	1.601.983	77,0	997.490	47,9
26	Sulawesi Tengah	314.609	194.566	118.385	222.951	70,9	51.377	68.228	119.605	38,0	1.624.670	644.455	610.778	1.255.233	77,3	348.913	338.655	687.568	42,3	196.628	51.584	44.767	96.351	49,0	24.940	21.212	46.152	23	2.135.907	1.574.535	73,7	853.325	40,0
27	Sulawesi Selatan	978.898	371.708	402.070	773.778	79,0	224.062	282.218	506.280	51,7	5.325.332	1.857.546	2.087.879	3.945.425	74,1	1.013.095	1.268.431	2.281.526	42,8	753.919	194.909	223.618	418.527	55,5	82.518	93.711	176.229	23	7.058.141	5.137.730	72,8	2.964.035	42,0
28	Sulawesi Tenggara	296.418	110.583	120.143	230.726	77,8	48.912	63.685	112.597	38,0	1.540.873	563.775	562.655	1.126.430	72,7	274.083	279.058	553.141	35,7	157.296	43.127	41.315	84.442	53,7	14.838	11.680	26.518	17	2.002.579	1.441.598	72,0	692.256	34,6
29	Gorontalo	127.071	53.398	58.154	111.552	87,8	29.730	38.473	68.203	53,7	734.456	285.985	294.539	580.524	79,0	163.094	192.724	355.818	48,4	76.882	22.261	23.139	45.400	59,1	10.792	11.165	21.957	29	938.409	737.476	78,6	445.978	47,5
30	Sulawesi Barat	163.725	51.330	56.569	107.899	65,9	28.667	36.788	65.455	40,0	836.369	295.591	280.942	576.533	68,9	162.762	166.815	329.577	39,4	89.146	22.139	20.468	42.607	47,8	10.264	8.604	18.868	21	1.089.240	727.039	66,7	413.900	38,0
31	Maluku	215.898	66.425	71.435	137.860	63,9	27.451	34.041	61.492	28,5	1.074.492	328.169	324.657	652.826	60,8	152.909	162.760	315.669	29,4	127.308	29.220	28.354	57.574	45,2	12.990	12.383	25.373	20	1.417.698	848.260	59,8	402.534	28,4
32	Maluku Utara	145.842	38.915	44.492	83.407	57,2	16.008	21.833	37.841	25,9	733.927	311.189	266.024	577.213	78,6	163.216	126.671	289.887	39,5	74.323	26.800	23.390	50.190	67,5	7.726	5.834	13.560	18	954.092	710.810	74,5	341.288	35,8
33	Papua Barat	127.914	26.765	28.292	55.057	43,0	14.599	17.171	31.770	24,8	618.654	205.585	150.370	355.955	57,5	129.432	96.928	226.360	36,6	50.834	8.742	5.848	14.590	28,7	5.447	3.442	8.889	17	797.402	425.602	53,4	267.019	33,5
34	Papua	407.850	45.484	46.386	91.870	22,5	30.468	33.273	63.741	15,6	1.998.560	374.695	265.181	639.876	32,0	267.936	197.080	465.016	23,3	177.361	14.836	10.376	25.212	14,2	10.734	7.318	18.052	10	2.583.771	756.958	29,3	546.809	21,2
	Indonesia	**26.705.490**	**13.142.525**	**13.518.695**	**26.661.220**	**99,8**	**8.062.180**	**9.053.479**	**17.115.659**	**64,1**	**160.007.112**	**61.995.584**	**64.217.745**	**126.152.929**	**78,8**	**42.369.521**	**47.040.096**	**89.409.411**	**55,9**	**21.553.518**	**7.980.812**	**7.693.857**	**15.674.669**	**72,7**	**4.647.822**	**4.906.812**	**9.603.844**	**45**	**260.265.720**	**167.848.608**	**64,5**	**116.178.914**	**57,9**

Sumber: KP-CPEN, akses 18 Mei 2022 pukul 18.00.

Data Riset per 31 Desember 2021

Lampiran 53.g

CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 DOSIS I BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Usia 12-17 Tahun				Usia 18-59 Tahun					Usia 60+					Cakupan Total		
		Sasaran	Dosis 1			Sasaran	Dosis 1				Sasaran	Dosis 1				Sasaran	Dosis 1	%
			L	P	L+P		L	P	L+P	%		L	P	L+P	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(30)	(31)	(32)
1	Aceh	577.015	166.159	184.210	350.369	3.112.751	1.064.301	1.119.677	2.183.978	70	339.125	98.615	111.747	210.362	62	4.028.891	2.744.709	68
2	Sumatera Utara	1.586.864	766.337	792.517	1.558.854	8.739.249	3.107.413	3.321.597	6.429.010	74	1.093.446	331.723	410.092	741.815	68	11.419.559	8.729.679	76
3	Sumatera Barat	589.723	256.764	275.653	532.417	3.329.211	1.089.278	1.179.737	2.269.015	68	489.575	109.920	118.438	228.358	47	4.408.509	3.029.790	69
4	Riau	684.190	287.259	306.719	593.978	3.833.691	1.553.392	1.478.798	3.032.190	79	322.466	102.784	86.725	189.509	59	4.840.347	3.815.677	79
5	Jambi	364.233	154.464	166.763	321.227	2.099.710	809.097	822.794	1.631.891	78	222.250	72.891	64.871	137.762	62	2.686.193	2.090.880	78
6	Sumatera Selatan	846.683	355.724	381.669	737.393	4.859.342	1.848.188	1.916.327	3.764.515	77	597.071	199.286	192.670	391.956	66	6.303.096	4.893.864	78
7	Bengkulu	206.643	94.060	101.575	195.635	1.213.699	435.751	467.199	902.950	74	133.450	46.082	44.157	90.239	68	1.553.792	1.188.824	77
8	Lampung	880.203	390.447	416.208	806.655	5.060.777	1.901.438	1.966.429	3.867.867	76	704.246	264.132	227.154	491.286	70	6.645.226	5.165.808	78
9	Kepulauan Bangka Belitung	151.433	76.663	80.424	157.087	890.528	360.231	344.256	704.487	79	95.863	35.293	32.747	68.040	71	1.137.824	929.614	82
10	Kepulauan Riau	207.663	157.135	154.147	311.282	1.286.244	643.314	591.664	1.234.978	96	87.128	37.222	35.978	73.200	84	1.581.035	1.619.460	102
11	DKI Jakarta	1.000.121	855.652	855.726	1.711.378	6.634.027	5.265.141	4.291.592	9.556.733	144	761.279	391.132	430.979	822.111	108	8.395.427	12.090.222	144
12	Jawa Barat	4.867.047	2.423.965	2.491.464	4.915.429	29.631.827	10.393.125	11.472.069	21.865.194	74	3.408.940	1.355.976	1.370.403	2.726.379	80	37.907.814	29.507.002	78
13	Jawa Tengah	3.371.070	1.807.759	1.810.163	3.617.922	21.675.260	7.727.653	8.897.521	16.625.174	77	3.681.475	1.316.812	1.404.712	2.721.524	74	28.727.805	22.964.620	80
14	DI Yogyakarta	311.596	223.000	216.945	439.945	2.095.251	1.025.895	1.090.205	2.116.100	101	472.852	187.673	210.024	397.697	84	2.879.699	2.953.742	103
15	Jawa Timur	3.586.141	1.959.629	1.959.350	3.918.979	23.904.516	8.950.945	9.639.785	18.590.730	78	4.335.549	1.365.697	1.501.666	2.867.363	66	31.826.206	25.377.072	80
16	Banten	1.207.002	626.561	654.967	1.281.528	7.378.774	2.740.482	2.913.708	5.654.190	77	643.607	240.571	240.577	481.148	75	9.229.383	7.416.866	80
17	Bali	397.239	390.741	366.128	756.869	2.552.987	1.396.683	1.296.065	2.692.748	105	454.904	197.261	199.254	396.515	87	3.405.130	3.846.132	113
18	Nusa Tenggara Barat	533.491	226.865	238.023	464.888	3.009.030	1.182.383	1.275.296	2.457.679	82	368.117	128.331	133.227	261.558	71	3.910.638	3.184.125	81
19	Nusa Tenggara Timur	582.844	231.055	263.310	494.365	2.843.029	988.000	1.080.904	2.068.904	73	405.566	109.532	106.999	216.531	53	3.831.439	2.779.800	73
20	Kalimantan Barat	569.699	195.781	215.149	410.930	2.952.086	1.069.848	1.056.083	2.125.931	72	350.692	85.488	78.579	164.067	47	3.872.477	2.700.928	70
21	Kalimantan Tengah	283.576	119.061	122.640	241.701	1.611.512	695.689	599.472	1.295.161	80	141.016	49.884	43.879	93.763	66	2.036.104	1.630.625	80
22	Kalimantan Selatan	402.121	160.075	168.626	328.701	2.500.464	963.182	929.554	1.892.736	76	258.552	79.676	76.642	156.318	60	3.161.137	2.377.755	75
23	Kalimantan Timur	397.462	188.331	187.454	375.785	2.287.406	1.038.509	871.904	1.910.413	84	189.533	65.819	49.848	115.667	61	2.874.401	2.401.865	84
24	Kalimantan Utara	77.891	39.750	39.533	79.283	434.527	188.634	156.084	344.718	79	33.254	13.357	10.200	23.557	71	545.672	447.558	82
25	Sulawesi Utara	245.339	120.114	123.396	243.510	1.575.881	589.622	596.000	1.185.622	75	259.465	82.037	90.814	172.851	67	2.080.685	1.601.983	77
26	Sulawesi Tengah	314.609	104.566	118.385	222.951	1.624.670	644.455	610.778	1.255.233	77	196.628	51.584	44.767	96.351	49	2.135.907	1.574.535	74
27	Sulawesi Selatan	978.890	371.708	402.070	773.778	5.325.332	1.857.546	2.087.879	3.945.425	74	753.919	194.909	223.618	418.527	56	7.058.141	5.137.730	73
28	Sulawesi Tenggara	296.410	110.583	120.143	230.726	1.548.873	563.775	562.655	1.126.430	73	157.296	43.127	41.315	84.442	54	2.002.579	1.441.598	72
29	Gorontalo	127.071	53.398	58.154	111.552	734.456	285.985	294.539	580.524	79	76.882	22.261	23.139	45.400	59	938.409	737.476	79
30	Sulawesi Barat	163.725	51.330	56.569	107.899	836.369	295.591	280.942	576.533	69	89.146	22.139	20.468	42.607	48	1.089.240	727.039	67
31	Maluku	215.890	66.425	71.435	137.860	1.074.492	328.169	324.657	652.826	61	127.308	29.220	28.354	57.574	45	1.417.690	848.260	60
32	Maluku Utara	145.842	38.915	44.492	83.407	733.927	311.189	266.024	577.213	79	74.323	26.800	23.390	50.190	68	954.092	710.810	75
33	Papua Barat	127.914	26.765	28.292	55.057	618.654	205.585	150.370	355.955	58	50.834	8.742	5.848	14.590	29	797.402	425.602	53
34	Papua	407.850	45.484	46.386	91.870	1.998.560	374.695	265.181	639.876	32	177.361	14.836	10.376	25.212	14	2.583.771	756.958	29
Indonesia		**26.705.490**	**13.142.525**	**13.518.685**	**26.661.210**	**160.007.112**	**61.895.184**	**64.217.745**	**126.112.929**	**79**	**21.553.118**	**7.380.812**	**7.693.657**	**15.074.469**	**70**	**208.265.720**	**167.848.608**	**81**

Sumber: KPCPEN, akses 18 Mei 2022 pukul 18.00.

Data filter per 31 Desember 2021

Lampiran 53.h

CAKUPAN VAKSINASI COVID-19 DOSIS 2 BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Usia 12-17 Tahun					Usia 18-59 Tahun					Usia 60+					Cakupan Total		
		Sasaran	Dosis 2				Sasaran	Dosis 2				Sasaran	Dosis 2				Sasaran	Dosis 2	%
			L	P	L+P	%		L	P	L+P	%		L	P	L+P	%			
(1)	(2)	(3)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(33)	(34)
1	Aceh	577.015	70.130	90.172	160.302	27,8	3.112.751	490.232	510.343	1.000.575	32,1	339.125	30.707	27.471	58.178	17,2	4.028.891	1.219.055	30,3
2	Sumatera Utara	1.586.864	506.594	577.507	1.084.101	68,3	8.739.249	1.959.122	2.253.056	4.212.178	48,2	1.093.446	192.195	252.391	444.586	40,7	11.419.559	5.740.865	50,3
3	Sumatera Barat	589.723	173.577	219.728	393.305	66,7	3.329.211	617.314	797.240	1.414.554	42,5	489.575	58.301	61.688	119.989	24,5	4.408.509	1.927.848	43,7
4	Riau	684.190	149.507	183.325	332.832	48,6	3.833.691	850.294	841.811	1.692.105	44,1	322.466	51.777	42.905	94.682	29,4	4.840.347	2.119.619	43,8
5	Jambi	364.233	104.311	124.461	228.772	62,8	2.099.710	571.964	617.609	1.189.573	56,7	222.250	51.241	43.799	95.040	42,8	2.686.193	1.513.385	56,3
6	Sumatera Selatan	846.683	235.470	282.804	518.274	61,2	4.859.342	987.205	1.095.786	2.082.991	42,9	597.071	94.944	94.452	189.396	31,7	6.303.096	2.790.661	44,3
7	Bengkulu	206.643	54.591	68.123	122.714	59,4	1.213.699	270.851	328.885	599.736	49,4	133.450	29.527	28.899	58.426	43,8	1.553.792	780.876	50,3
8	Lampung	880.203	230.918	275.507	506.425	57,5	5.060.777	1.123.731	1.309.551	2.433.282	48,1	704.246	129.509	109.827	239.336	34,0	6.645.226	3.179.043	47,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	151.433	51.108	58.389	109.497	72,3	890.528	260.018	269.219	529.237	59,4	95.863	26.936	24.890	51.826	54,1	1.137.824	690.560	60,7
10	Kepulauan Riau	207.663	83.572	86.686	170.258	82,0	1.286.244	515.717	501.566	1.017.283	79,1	87.128	28.918	27.043	55.961	64,2	1.581.035	1.243.502	78,7
11	DKI Jakarta	1.000.121	470.756	489.410	960.166	96,0	6.634.027	4.254.793	3.643.113	7.897.906	119,1	761.279	351.662	394.645	746.307	98,0	8.395.427	9.604.379	114,4
12	Jawa Barat	4.867.047	1.487.117	1.688.401	3.175.518	65,2	29.631.827	7.220.655	8.806.785	16.027.440	54,1	3.408.940	784.154	809.979	1.594.133	46,8	37.907.814	20.797.091	54,9
13	Jawa Tengah	3.371.070	1.253.149	1.337.523	2.590.672	76,9	21.675.260	5.775.490	7.186.808	12.962.298	59,8	3.681.475	968.032	1.028.237	1.996.269	54,2	28.727.805	17.549.239	61,1
14	DI Yogyakarta	311.596	158.384	156.371	314.755	101,0	2.095.251	925.583	1.014.590	1.940.173	92,6	472.852	164.451	184.138	348.589	73,7	2.879.699	2.603.517	90,4
15	Jawa Timur	3.586.141	1.242.388	1.323.371	2.565.759	71,5	23.904.516	6.581.217	7.493.966	14.075.183	58,9	4.335.549	879.840	954.082	1.833.922	42,3	31.826.206	18.474.864	58,0
16	Banten	1.207.002	320.601	378.036	698.637	57,9	7.378.774	1.903.092	2.175.642	4.078.734	55,3	643.607	154.286	149.460	303.746	47,2	9.229.383	5.081.117	55,1
17	Bali	397.239	190.907	181.449	372.356	93,7	2.552.987	1.228.142	1.174.281	2.402.423	94,1	454.904	173.590	172.417	346.007	76,1	3.405.130	3.120.786	91,6
18	Nusa Tenggara Barat	533.491	136.885	159.177	296.062	55,5	3.009.030	816.649	906.172	1.722.821	57,3	368.117	82.367	84.261	166.628	45,3	3.910.638	2.185.511	55,9
19	Nusa Tenggara Timur	582.844	119.154	154.968	274.122	47,0	2.843.029	482.483	562.656	1.045.139	36,8	405.566	47.296	43.332	90.628	22,3	3.831.439	1.409.889	36,8
20	Kalimantan Barat	569.699	144.123	171.104	315.227	55,3	2.952.086	674.055	685.220	1.359.275	46,0	350.692	48.449	43.015	91.464	26,1	3.872.477	1.765.966	45,6
21	Kalimantan Tengah	283.576	80.082	86.971	167.053	58,9	1.611.512	397.272	357.073	754.345	46,8	141.016	27.980	23.679	51.659	36,6	2.036.104	973.057	47,8
22	Kalimantan Selatan	402.121	102.630	118.161	220.791	54,9	2.500.464	525.469	496.601	1.022.070	40,9	258.552	32.100	28.304	60.404	23,4	3.161.137	1.303.265	41,2
23	Kalimantan Timur	397.462	133.624	140.641	274.265	69,0	2.287.406	776.058	660.640	1.436.698	62,8	189.533	49.516	37.692	87.208	46,0	2.874.401	1.798.171	62,6
24	Kalimantan Utara	77.891	24.051	25.826	49.877	64,0	434.527	141.951	124.096	266.047	61,2	33.254	9.274	6.816	16.090	48,4	545.672	332.014	60,8
25	Sulawesi Utara	245.339	67.277	79.658	146.935	59,9	1.575.881	344.524	398.259	742.783	47,1	259.465	49.731	58.041	107.772	41,5	2.080.685	997.490	47,9
26	Sulawesi Tengah	314.609	51.377	68.228	119.605	38,0	1.624.670	348.913	338.655	687.568	42,3	196.628	24.940	21.212	46.152	23,5	2.135.907	853.325	40,0
27	Sulawesi Selatan	978.890	224.062	282.218	506.280	51,7	5.325.332	1.013.095	1.268.431	2.281.526	42,8	753.919	82.518	93.711	176.229	23,4	7.058.141	2.964.035	42,0
28	Sulawesi Tenggara	296.410	48.912	63.685	112.597	38,0	1.548.873	274.083	279.058	553.141	35,7	157.296	14.838	11.680	26.518	16,9	2.002.579	692.256	34,6
29	Gorontalo	127.071	29.730	38.473	68.203	53,7	734.456	163.094	192.724	355.818	48,4	76.882	10.792	11.165	21.957	28,6	938.409	445.978	47,5
30	Sulawesi Barat	163.725	28.667	36.788	65.455	40,0	836.369	162.762	166.815	329.577	39,4	89.146	10.264	8.604	18.868	21,2	1.089.240	413.900	38,0
31	Maluku	215.890	27.451	34.041	61.492	28,5	1.074.492	152.909	162.760	315.669	29,4	127.308	12.990	12.383	25.373	19,9	1.417.690	402.534	28,4
32	Maluku Utara	145.842	16.008	21.833	37.841	25,9	733.927	163.216	126.671	289.887	39,5	74.323	7.726	5.834	13.560	18,2	954.092	341.288	35,8
33	Papua Barat	127.914	14.599	17.171	31.770	24,8	618.654	129.432	96.928	226.360	36,6	50.834	5.447	3.442	8.889	17,5	797.402	267.019	33,5
34	Papua	407.850	30.468	33.273	63.741	15,6	1.998.560	267.936	197.080	465.016	23,3	177.361	10.734	7.318	18.052	10,2	2.583.771	546.809	21,2
Indonesia		**26.705.490**	**8.062.180**	**9.053.479**	**17.115.659**	**64,1**	**160.007.112**	**42.369.321**	**47.040.090**	**89.409.411**	**55,9**	**21.553.118**	**4.697.032**	**4.906.812**	**9.603.844**	**44,6**	**208.265.720**	**116.128.914**	**55,8**

Sumber: KPCPEN, akses 18 Mei 2022 pukul 18.00.

Data filter per 31 Desember 2021

Lampiran 54

JUMLAH KASUS HIV MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)															Jumlah estimasi orang dengan risiko terinfeksi HIV (minimal)	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
		≤ 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 24 Tahun		25 - 49 Tahun		≥ 50 Tahun		Total					
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	T			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Aceh	2	3	1	-	6	-	22	1	111	26	2	1	144	31	175	250.435	40.481	16,2
2	Sumatera Utara	7	7	2	8	39	3	296	30	1.149	239	89	35	1.582	322	1.904	713.310	69.706	9,8
3	Sumatera Barat	2	3	-	1	5	1	51	4	234	43	16	4	308	56	364	259.867	52.263	20,1
4	Riau	2	4	7	-	11	3	67	5	262	76	33	6	382	94	476	355.021	68.548	19,3
5	Jambi	3	-	2	1	1	-	24	1	113	26	12	4	155	32	187	156.504	23.435	15,0
6	Sumatera Selatan	7	2	1	1	10	2	59	13	304	81	33	8	414	107	521	396.073	94.666	23,9
7	Bengkulu	4	2	-	-	-	-	19	6	83	28	3	1	109	37	146	94.895	16.713	17,6
8	Lampung	12	3	5	6	17	3	86	14	260	96	13	11	393	133	526	357.206	72.062	20,2
9	Kep. Bangka Belitung	4	-	-	-	3	2	9	14	78	50	16	8	110	74	184	68.332	28.681	42,0
10	Kepulauan Riau	4	5	3	1	9	6	53	10	369	139	55	15	493	176	669	113.840	29.086	25,5
11	DKI Jakarta	21	16	12	6	76	27	612	100	2.633	585	214	56	3.568	790	4.358	488.965	219.640	44,9
12	Jawa Barat	55	30	15	17	151	40	828	200	2.735	1.005	195	66	3.979	1.358	5.337	2.112.292	475.277	22,5
13	Jawa Tengah	29	30	26	22	94	46	376	246	1.892	1.210	388	210	2.805	1.764	4.569	1.369.751	494.490	36,1
14	DI Yogyakarta	11	3	2	5	13	1	116	13	252	85	43	23	437	130	567	141.244	34.614	24,5
15	Jawa Timur	38	22	18	20	107	33	493	253	2.450	1.665	492	281	3.598	2.274	5.872	1.496.320	481.437	32,2
16	Banten	6	7	3	5	33	10	190	41	771	247	58	21	1.061	331	1.392	578.408	192.459	33,3
17	Bali	8	6	4	8	22	10	178	78	774	341	96	46	1.082	489	1.571	184.979	69.395	37,5
18	Nusa Tenggara Barat	3	2	1	1	4	2	39	8	99	39	7	2	153	54	207	231.825	46.669	20,1
19	Nusa Tenggara Timur	4	3	2	3	7	5	37	26	195	131	11	5	256	173	429	277.755	24.198	8,7
20	Kalimantan Barat	7	4	2	1	11	2	60	24	266	111	34	9	380	151	531	230.508	47.746	20,7
21	Kalimantan Tengah	2	1	1	-	3	1	31	9	129	63	12	5	178	79	257	132.559	19.013	14,3
22	Kalimantan Selatan	11	3	4	2	20	3	77	15	194	71	13	6	319	100	419	195.974	25.641	13,1
23	Kalimantan Timur	4	3	2	2	25	7	129	50	479	303	63	22	702	387	1.089	194.853	57.793	29,7
24	Kalimantan Utara	-	1	-	4	5	2	14	5	61	27	8	3	88	42	130	33.770	11.686	34,6
25	Sulawesi Utara	2	3	-	3	10	7	96	28	240	86	20	13	368	140	508	113.551	18.958	16,7
26	Sulawesi Tengah	2	-	2	-	7	1	59	5	97	44	9	1	176	51	227	143.917	31.481	21,9
27	Sulawesi Selatan	16	6	5	8	32	5	248	26	655	163	54	9	1.010	217	1.227	406.706	113.118	27,8
28	Sulawesi Tenggara	2	-	1	1	10	1	45	7	86	31	7	2	151	42	193	133.839	18.077	13,5
29	Gorontalo	1	2	4	-	2	-	20	1	61	14	1	3	89	20	109	58.504	14.969	25,6
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	5	2	13	10	1	-	19	12	31	67.386	9.434	14,0
31	Maluku	5	3	2	2	6	2	50	31	124	75	14	6	201	119	320	94.719	17.125	18,1
32	Maluku Utara	6	5	1	-	4	5	28	20	112	54	13	9	164	93	257	60.293	7.616	12,6
33	Papua Barat	3	3	-	2	8	15	24	59	104	131	7	4	146	214	360	126.994	30.446	24,0
34	Papua	17	19	6	12	30	131	156	291	511	544	41	32	761	1.029	1.790	97.232	11.069	11,4
Indonesia		**300**	**201**	**134**	**142**	**781**	**376**	**4.597**	**1.636**	**17.896**	**7.839**	**2.073**	**927**	**25.781**	**11.121**	**36.902**	**11.737.827**	**2.967.992**	**25,3**
		1,4		**0,7**		**3,1**		**16,9**		**69,7**		**8,1**		**100**					

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

Lampiran 55.a

JUMLAH KASUS BARU HIV
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 - 2021

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru HIV		
		2019	2020	2021
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	174	139	175
2	Sumatera Utara	2.463	2.193	1.904
3	Sumatera Barat	541	403	364
4	Riau	558	761	476
5	Jambi	131	167	187
6	Sumatera Selatan	601	556	521
7	Bengkulu	177	104	146
8	Lampung	568	589	526
9	Kepulauan Bangka Belitung	234	219	184
10	Kepulauan Riau	854	757	669
11	DKI Jakarta	6.701	4.931	4.358
12	Jawa Barat	6.066	5.666	5.337
13	Jawa Tengah	5.630	5.531	4.569
14	DI Yogyakarta	714	591	567
15	Jawa Timur	8.935	7.157	5.872
16	Banten	1.643	1.480	1.392
17	Bali	2.283	1.704	1.571
18	Nusa Tenggara Barat	258	278	207
19	Nusa Tenggara Timur	821	584	429
20	Kalimantan Barat	698	682	531
21	Kalimantan Tengah	222	286	257
22	Kalimantan Selatan	474	283	419
23	Kalimantan Timur	1.301	965	1.089
24	Kalimantan Utara	199	138	130
25	Sulawesi Utara	673	432	508
26	Sulawesi Tengah	350	317	227
27	Sulawesi Selatan	1.537	1.183	1.227
28	Sulawesi Tenggara	180	123	193
29	Gorontalo	48	84	109
30	Sulawesi Barat	69	27	31
31	Maluku	462	378	320
32	Maluku Utara	267	230	257
33	Papua Barat	697	405	360
34	Papua	3.753	2.644	1.790
Indonesia		**50.282**	**41.987**	**36.902**

Sumber: SIHA, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 55.b

JUMLAH KASUS BARU AIDS MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI
TAHUN 2021

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																				Total		
		< 1 Tahun		1 - 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 29 Tahun		30 - 39 Tahun		40 - 49 Tahun		50 - 59 Tahun		≥ 60 Tahun		Kelompok Umur Tidak Diketahui		Jenis Kelamin Tidak Diketahui			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P		L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Aceh	0	1	0	0	0	0	0	0	11	2	22	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	39	11	50
2	Sumatera Utara	1	0	1	1	0	1	1	0	108	11	83	32	32	19	22	4	7	3	0	0	0	255	71	326
3	Sumatera Barat	0	0	0	1	0	1	1	0	28	1	31	6	12	1	6	0	1	0	0	0	0	79	10	89
4	Riau	0	1	2	3	1	2	1	0	69	14	96	18	44	14	21	4	5	3	0	0	0	239	59	298
5	Jambi	0	0	1	0	1	0	0	0	3	0	1	2	5	1	2	0	0	0	0	0	0	13	3	16
6	Sumatera Selatan	0	0	1	0	1	1	2	0	46	10	49	6	20	7	14	0	4	1	0	1	0	137	26	163
7	Bengkulu	0	0	1	0	0	0	0	0	12	3	8	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	24	7	31
8	Lampung	1	0	3	2	2	1	1	0	16	2	21	3	7	5	1	1	1	0	0	0	0	53	14	67
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	3	6	1	0	0	0	1	0	0	0	10	6	16
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	2	0	1	1	15	4	49	6	19	6	11	3	2	0	0	0	0	99	20	119
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	1	0	29	5	45	8	25	6	9	3	2	0	0	0	0	111	22	133
12	Jawa Barat	1	0	1	1	0	2	5	0	84	7	57	15	24	9	9	2	2	2	0	0	0	183	38	221
13	Jawa Tengah	1	0	2	3	8	6	11	4	197	50	268	94	152	80	120	53	46	24	0	0	0	805	314	1.119
14	DI Yogyakarta	0	0	2	2	0	1	1	0	14	1	12	4	10	7	6	5	3	1	0	0	0	48	21	69
15	Jawa Timur	1	0	1	0	4	0	1	1	59	29	100	27	69	32	39	11	17	3	0	0	0	291	103	394
16	Banten	0	0	0	0	0	0	2	0	39	8	54	10	13	6	9	0	1	0	0	0	0	118	24	142
17	Bali	0	0	3	0	3	3	5	4	92	28	108	49	77	35	46	21	15	3	0	0	0	349	143	492
18	Nusa Tenggara Barat	1	0	4	1	0	1	2	0	42	14	32	7	14	8	8	0	2	0	14	4	0	119	35	154
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	1	2	1	1	1	1	35	11	40	15	21	4	6	4	3	2	0	0	0	108	40	148
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	3	0	1	21	4	17	7	13	7	3	0	3	0	0	0	0	57	22	79
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1	10	1	4	0	4	1	0	0	0	0	0	23	3	26
22	Kalimantan Selatan	0	0	1	1	2	3	1	1	39	7	34	10	20	2	7	4	4	3	0	0	0	108	31	139
23	Kalimantan Timur	0	0	1	0	0	0	1	0	48	16	72	27	50	20	20	13	4	2	0	0	0	196	78	274
24	Kalimantan Utara	0	0	0	1	0	1	0	0	5	3	10	2	8	0	3	1	0	0	0	0	0	26	8	34
25	Sulawesi Utara	1	1	0	1	0	2	3	1	69	12	51	15	22	9	11	4	10	2	0	0	0	167	47	214
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	1	0	14	2	20	5	9	1	4	0	2	0	1	0	0	51	8	59
27	Sulawesi Selatan	1	0	4	4	0	2	8	1	105	15	98	18	40	10	12	3	5	1	0	0	0	273	54	327
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	16	7	17	2	2	2	9	1	1	0	0	0	0	45	12	57
29	Gorontalo	0	0	0	1	0	0	0	0	17	0	19	1	2	1	1	1	0	0	0	0	0	39	4	43
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	1	12
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	7	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	14	6	20
32	Maluku Utara	1	1	1	0	1	0	1	1	17	12	22	7	11	2	6	0	0	0	2	0	0	62	23	85
33	Papua Barat	0	0	1	1	0	1	0	4	20	18	12	10	4	5	2	0	1	0	0	1	0	40	40	80
34	Papua	0	0	3	2	1	2	10	17	36	65	38	38	20	9	9	2	2	0	0	0	0	119	135	254
Indonesia		**9**	**4**	**34**	**27**	**27**	**34**	**62**	**37**	**1.326**	**365**	**1.508**	**459**	**764**	**313**	**421**	**143**	**143**	**51**	**17**	**6**	**0**	**4.311**	**1.439**	**5.750**
		0,2		**1,1**		**1,1**		**1,7**		**29,4**		**34,2**		**18,7**		**9,8**		**3,4**		**0,4**					

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

Lampiran 55.c

JUMLAH KASUS KUMULATIF AIDS MENURUT JENIS KELAMIN, KELOMPOK UMUR, DAN PROVINSI
TAHUN 2021

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																				Total		
		< 1 Tahun		1 - 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 29 Tahun		30 - 39 Tahun		40 - 49 Tahun		50 - 59 Tahun		≥ 60 Tahun		Kelompok Umur Tidak Diketahui		Jenis Kelamin Tidak Diketahui			
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L + P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
1	Aceh	1	1	8	2	9	1	3	3	134	63	204	73	102	26	24	2	5	0	0	0	2	490	171	663
2	Sumatera Utara	2	0	43	37	27	25	28	12	1.170	413	1.363	480	494	180	186	52	38	7	23	11	18	3.374	1.217	4.609
3	Sumatera Barat	3	0	13	7	8	16	18	3	373	78	478	150	228	46	40	15	11	2	9	4	952	1.181	321	2.454
4	Riau	1	5	30	31	24	14	21	11	668	297	798	311	353	120	141	42	34	5	0	1	0	2.070	837	2.907
5	Jambi	1	1	7	5	3	0	6	2	213	82	234	78	98	25	41	7	4	2	12	2	42	619	204	865
6	Sumatera Selatan	0	0	15	10	8	7	15	6	462	142	499	143	227	42	89	8	11	4	12	13	0	1.338	375	1.713
7	Bengkulu	51	34	5	11	2	3	4	0	111	64	119	64	43	18	12	5	3	1	0	2	3	350	202	555
8	Lampung	5	2	19	21	12	8	15	2	286	123	349	135	135	41	34	19	10	4	6	0	0	871	355	1.226
9	Kep. Bangka Belitung	9	3	4	9	6	6	2	4	93	42	156	57	76	28	22	7	11	6	44	8	2	423	170	595
10	Kepulauan Riau	14	7	20	13	14	10	18	8	421	250	594	303	341	149	133	41	50	16	6	0	1	1.611	797	2.409
11	DKI Jakarta	4	1	20	8	20	15	20	8	702	127	1.001	181	469	89	167	33	41	8	2	1	7.963	2.446	471	10.880
12	Jawa Barat	63	19	77	84	42	52	59	41	2.414	930	2.018	869	648	274	201	66	41	11	128	62	20	5.691	2.408	8.119
13	Jawa Tengah	42	12	141	108	93	84	78	70	2.132	1.202	3.134	1.725	2.081	1.046	1.108	503	415	112	70	53	21	9.294	4.915	14.230
14	DI Yogyakarta	1	0	22	11	141	53	6	2	147	69	204	109	139	61	92	42	24	8	357	180	9	1.133	535	1.677
15	Jawa Timur	54	40	269	181	161	111	104	139	3.535	2.546	4.871	3.016	2.930	1.479	1.262	541	323	114	0	0	0	13.509	8.167	21.676
16	Banten	41	16	39	28	17	14	62	24	992	365	903	337	271	91	82	18	20	7	13	4	52	2.440	904	3.396
17	Bali	54	44	149	88	42	41	70	81	1.787	980	2.346	1.050	1.200	516	528	193	156	56	99	44	28	6.431	3.093	9.552
18	Nusa Tenggara Barat	3	2	24	21	9	11	9	6	202	134	259	138	98	44	32	11	3	1	19	7	1	658	375	1.034
19	Nusa Tenggara Timur	3	7	23	16	9	9	10	25	484	365	589	237	231	112	90	30	27	9	3	0	112	1.469	810	2.391
20	Kalimantan Barat	4	5	23	15	11	16	100	131	665	521	760	264	249	75	86	23	22	4	0	1	0	1.920	1.055	2.975
21	Kalimantan Tengah	1	0	4	4	0	4	0	3	59	52	109	48	43	21	27	6	5	1	5	3	0	253	142	395
22	Kalimantan Selatan	5	2	8	6	7	7	4	4	154	89	171	77	95	22	36	11	10	4	0	0	0	490	222	712
23	Kalimantan Timur	7	10	19	18	11	12	13	21	406	300	527	284	246	125	129	45	31	3	3	1	0	1.392	819	2.211
24	Kalimantan Utara	0	0	18	17	6	2	10	4	117	80	208	82	111	29	29	10	13	1	0	0	5	512	225	742
25	Sulawesi Utara	9	7	21	17	12	13	32	21	610	272	559	243	331	108	120	31	33	9	8	10	0	1.735	731	2.466
26	Sulawesi Tengah	1	2	12	8	5	2	4	14	218	151	241	102	95	32	36	6	6	3	7	6	0	625	326	951
27	Sulawesi Selatan	7	8	26	30	25	22	68	21	1.210	372	1.088	371	387	108	119	38	27	9	89	33	16	3.046	1.012	4.074
28	Sulawesi Tenggara	0	3	2	0	1	3	4	6	110	56	109	49	36	23	22	8	2	0	169	91	0	455	239	694
29	Gorontalo	1	3	0	5	0	1	5	2	90	17	77	19	21	5	6	3	0	0	1	2	0	201	57	258
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	1	0	9	2	14	6	5	2	0	0	0	0	0	0	0	29	10	39
31	Maluku	3	2	9	11	1	4	5	9	153	130	169	110	77	39	53	25	21	3	0	0	0	491	333	824
32	Maluku Utara	5	4	9	5	2	4	11	11	172	155	203	97	92	35	41	8	9	2	3	1	0	547	322	869
33	Papua Barat	0	0	1	2	0	3	0	4	27	28	14	14	7	6	3	0	2	2	0	1	1.734	54	60	1.848
34	Papua	20	18	212	144	94	194	835	2.055	5.613	6.281	3.762	2.684	1.440	878	499	271	290	150	0	0	41	12.765	12.675	25.481
Indonesia		**415**	**258**	**1.292**	**973**	**822**	**767**	**1.640**	**2.753**	**25.939**	**16.778**	**28.130**	**13.906**	**13.399**	**5.895**	**5.490**	**2.120**	**1.698**	**564**	**1.088**	**541**	**11.022**	**79.913**	**44.555**	**135.490**
		0,5		**1,7**		**1,2**		**3,2**		**31,5**		**31,0**		**14,2**		**5,6**		**1,7**		**1,2**					

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

Lampiran 55.d

JUMLAH KEMATIAN AKIBAT AIDS MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR
TAHUN 2021

No	Provinsi	Kelompok Umur (Tahun)																						
		< 1 Tahun		1 - 4 Tahun		5 - 14 Tahun		15 - 19 Tahun		20 - 29 Tahun		30 - 39 Tahun		40 - 49 Tahun		50 - 59 Tahun		≥ 60 Tahun		Tidak Diketahui		Total		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L + P
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*
1	Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	9
2	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	4	0	8	3	2	1	2	0	0	0	24	4	28
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	5	1	6
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	8	1	8	2	6	0	1	0	0	0	0	0	23	3	26
5	Jambi	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	6	1	7
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	5	2	11	0	4	0	0	0	1	1	0	0	21	3	24
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	5
8	Lampung	0	0																	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	3
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	1	1	2	1	1	0	0	0	10	2	12
11	DKI Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	2	2	0	3	1	0	0	0	0	10	5	15
12	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	12	1	6	1	5	1	1	0	0	0	0	0	24	3	27
13	Jawa Tengah	0	0	0	0	1	0	1	0	32	9	57	13	32	17	25	11	11	3	0	0	159	53	212
14	DI Yogyakarta	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	2	1	1	3	0	1	0	0	0	0	4	6	10
15	Jawa Timur	0	0	0	0	1	1	0	0	8	6	18	6	23	9	10	3	0	0	0	0	60	25	85
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	4	1	5
17	Bali	1	1	0	0	0	0	1	0	1	1	5	2	9	2	6	2	0	0	0	0	23	8	31
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	4	1	2	2	1	0	0	0	4	0	14	5	19
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	12	0	12
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	4	2	3	2	0	0	0	0	0	0	9	5	14
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	4
22	Kalimantan Selatan	0	0	1	0	0	0	0	0	2	1	3	1	2	0	0	0	1	0	0	0	9	2	11
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	4	1	8	5	7	2	3	2	0	0	0	0	22	10	32
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	3	1	4
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	0	4	1	5
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	1	0	4	2	6
27	Sulawesi Selatan	0	0	0	1	0	0	0	0	6	1	8	3	0	3	1	0	1	0	0	0	16	8	24
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	4	1	5
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	5	0	1	1	0	1	0	0	0	0	13	2	15
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31	Maluku	0	0																	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	4	1	1	0	0	0	0	1	8	4	12
33	Papua Barat	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0	9	4	13
34	Papua	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
Indonesia		**1**	**1**	**2**	**2**	**4**	**1**	**3**	**1**	**124**	**35**	**184**	**45**	**120**	**49**	**64**	**24**	**17**	**5**	**5**	**1**	**524**	**164**	**688**
		0,3		**0,6**		**0,7**		**0,6**		**23,1**		**33,3**		**24,6**		**12,8**		**3,2**		**0,9**				

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Keterangan: L = Laki-laki P = Perempuan T = Jumlah laki-laki dan Perempuan

Lampiran 55.e

JUMLAH KASUS BARU DAN KASUS KUMULATIF AIDS MENURUT PROVINSI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2021

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru			Jumlah Kasus Kumulatif s.d. Desember 2021
		2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Aceh	49	67	50	663
2	Sumatera Utara	0	218	326	4.609
3	Sumatera Barat	258	148	89	2.453
4	Riau	0	139	298	2.907
5	Jambi	11	99	16	865
6	Sumatera Selatan	207	228	163	1.713
7	Bengkulu	69	40	31	555
8	Lampung	143	124	67	1.226
9	Kepulauan Bangka Belitung	44	32	16	595
10	Kepulauan Riau	411	306	119	2.409
11	DKI Jakarta	585	231	133	10.881
12	Jawa Barat	313	836	221	8.119
13	Jawa Tengah	1.613	1.387	1.119	14.230
14	DI Yogyakarta	78	71	69	1.677
15	Jawa Timur	958	495	394	21.676
16	Banten	158	107	142	3.396
17	Bali	240	830	492	9.552
18	Nusa Tenggara Barat	34	33	154	1.034
19	Nusa Tenggara Timur	29	155	148	2.391
20	Kalimantan Barat	113	88	79	2.975
21	Kalimantan Tengah	53	44	26	395
22	Kalimantan Selatan	5	163	139	712
23	Kalimantan Timur	203	162	274	2.211
24	Kalimantan Utara	66	103	34	742
25	Sulawesi Utara	125	328	214	2.466
26	Sulawesi Tengah	52	77	59	951
27	Sulawesi Selatan	0	328	327	4.071
28	Sulawesi Tenggara	52	25	57	695
29	Gorontalo	0	0	43	258
30	Sulawesi Barat	0	2	12	39
31	Maluku	45	30	20	824
32	Maluku Utara	61	86	85	869
33	Papua Barat	0	783	80	2.604
34	Papua	1.061	874	254	24.727
Indonesia		**7.036**	**8.639**	**5.750**	**135.490**

Sumber: SIHA, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 55.f

JUMLAH DAN PERSENTASE KASUS AIDS PADA PENGGUNA NAPZA SUNTIKAN (IDU)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Kasus Baru AIDS	Jumlah Kasus Baru AIDS pada IDU	Persentase Kasus Baru AIDS pada IDU
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	50		0%
2	Sumatera Utara	326	23	7%
3	Sumatera Barat	89	13	15%
4	Riau	298		0%
5	Jambi	16		0%
6	Sumatera Selatan	163	8	5%
7	Bengkulu	31	4	13%
8	Lampung	67	10	15%
9	Kepulauan Bangka Belitung	16	1	6%
10	Kepulauan Riau	119	27	23%
11	DKI Jakarta	133	34	26%
12	Jawa Barat	221	22	10%
13	Jawa Tengah	1.119	7	1%
14	DI Yogyakarta	69	13	19%
15	Jawa Timur	394	18	5%
16	Banten	142	5	4%
17	Bali	492	9	2%
18	Nusa Tenggara Barat	154	7	5%
19	Nusa Tenggara Timur	148		0%
20	Kalimantan Barat	79	2	3%
21	Kalimantan Tengah	26	3	12%
22	Kalimantan Selatan	139	2	1%
23	Kalimantan Timur	274		0%
24	Kalimantan Utara	34		0%
25	Sulawesi Utara	214	1	0%
26	Sulawesi Tengah	59	1	2%
27	Sulawesi Selatan	327	4	1%
28	Sulawesi Tenggara	57		0%
29	Gorontalo	43		0%
30	Sulawesi Barat	12	1	8%
31	Maluku	20	1	5%
32	Maluku Utara	85	1	1%
33	Papua Barat	80		0%
34	Papua	254		0%
Indonesia		**5.750**	**217**	**5,86**

Sumber: SIHA, Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 56

KASUS DIARE YANG DILAYANI MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Target Penemuan		Diare									
				Dilayani				Mendapat Oralit				Mendapat Zinc	
				Semua Umur		Balita		Semua Umur		Balita		Balita	
		Semua Umur	Balita	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	147.396	85.710	29.866	20,3	9.591	11,2	21.432	71,8	7.298	76,1	6.721	70,1
2	Sumatera Utara	403.759	227.995	26.945	6,7	7.416	3,3	21.662	80,4	5.634	76,0	5.201	70,1
3	Sumatera Barat	151.493	86.806	57.203	37,8	15.315	17,6	56.664	99,1	14.184	92,6	14.731	96,2
4	Riau	190.795	107.944	41.163	21,6	13.134	12,2	38.020	92,4	11.852	90,2	12.340	94,0
5	Jambi	98.315	51.101	38.704	39,4	11.153	21,8	36.319	93,8	10.913	97,8	10.416	93,4
6	Sumatera Selatan	234.971	134.139	94.538	40,2	30.862	23,0	89.808	95,0	30.107	97,6	29.617	96,0
7	Bengkulu	54.444	28.322	15.832	29,1	5.558	19,6	15.832	100,0	5.545	99,8	5.558	100,0
8	Lampung	232.467	118.625	49.194	21,2	14.162	11,9	47.353	96,3	13.112	92,6	13.331	94,1
9	Kep. Bangka Belitung	40.183	20.930	10.334	25,7	4.079	19,5	10.334	100,0	4.079	100,0	4.079	100,0
10	Kepulauan Riau	64.227	37.482	16.432	25,6	3.932	10,5	16.432	100,0	3.932	100,0	3.932	100,0
11	DKI Jakarta	287.430	142.936	122.914	42,8	38.818	27,2	118.313	96,3	37.519	96,7	37.277	96,0
12	Jawa Barat	1.352.788	666.244	430.520	31,8	162.745	24,4	385.987	89,7	144.853	89,0	141.688	87,1
13	Jawa Tengah	942.760	411.937	297.062	31,5	87.510	21,2	247.329	83,3	75.141	85,9	74.725	85,4
14	DI Yogyakarta	107.196	47.029	14.738	13,7	2.500	5,3	11.812	80,1	2.045	81,8	2.126	85,0
15	Jawa Timur	1.084.230	470.968	510.033	47,0	185.559	39,4	493.095	96,7	181.456	97,8	180.350	97,2
16	Banten	353.003	184.583	242.094	68,6	102.030	55,3	205.691	85,0	87.079	85,3	90.535	88,7
17	Bali	120.598	53.479	25.691	21,3	5.268	9,9	13.335	51,9	4.270	81,1	3.669	69,7
18	Nusa Tenggara Barat	143.059	82.596	92.978	65,0	42.430	51,4	90.762	97,6	41.187	97,1	37.916	89,4
19	Nusa Tenggara Timur	150.896	97.432	40.137	26,6	18.165	18,6	37.926	94,5	17.269	95,1	17.323	95,4
20	Kalimantan Barat	139.399	74.380	32.964	23,6	11.725	15,8	32.099	97,4	10.860	92,6	11.695	99,7
21	Kalimantan Tengah	73.499	37.905	18.357	25,0	6.283	16,6	18.315	99,8	6.264	99,7	6.267	99,7
22	Kalimantan Selatan	116.634	62.315	29.466	25,3	10.822	17,4	26.347	89,4	9.863	91,1	9.915	91,6
23	Kalimantan Timur	100.141	50.898	30.308	30,3	10.915	21,4	26.214	86,5	9.800	89,8	9.930	91,0
24	Kalimantan Utara	19.472	10.592	8.465	43,5	3.454	32,6	7.195	85,0	2.967	85,9	2.459	71,2
25	Sulawesi Utara	68.336	32.539	10.687	15,6	3.708	11,4	8.786	82,2	3.176	85,7	2.658	71,7
26	Sulawesi Tengah	84.263	47.205	29.273	34,7	10.012	21,2	27.499	93,9	9.584	95,7	9.545	95,3
27	Sulawesi Selatan	241.817	118.816	67.241	27,8	21.618	18,2	48.937	72,8	16.941	78,4	16.814	77,8
28	Sulawesi Tenggara	74.065	44.664	14.929	20,2	6.116	13,7	12.176	81,6	4.980	81,4	5.414	88,5
29	Gorontalo	32.289	16.235	9.982	30,9	4.707	29,0	7.796	78,1	3.905	83,0	4.246	90,2
30	Sulawesi Barat	37.712	22.327	15.589	41,3	4.739	21,2	13.750	88,2	4.238	89,4	4.164	87,9
31	Maluku	48.745	28.221	16.730	34,3	8.599	30,5	14.755	88,2	8.276	96,2	8.179	95,1
32	Maluku Utara	34.259	19.603	10.878	31,8	5.607	28,6	8.839	81,3	4.547	81,1	5.096	90,9
33	Papua Barat	27.235	16.091	9.250	34,0	4.862	30,2	7.983	86,3	4.339	89,2	4.396	90,4
34	Papua	92.833	52.935	12.584	13,6	6.202	11,7	9.703	77,1	5.276	85,1	5.183	83,6
Indonesia		**7.350.708**	**3.690.984**	**2.473.081**	**33,6**	**879.596**	**23,8**	**2.228.500**	**90,1**	**802.492**	**91,2**	**797.495**	**90,7**
Angka Kesakitan Diare Per 1.000 Penduduk													

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 57

KASUS BARU KUSTA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI
TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus Baru									Angka Penemuan Kasus Baru (NCDR/New Case Detection Rate) Per 100.000 Penduduk
			Pausi Basiler (PB)/ Kusta kering			Multi Basiler (MB)/ Kusta Basah			PB + MB			
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	5.539.628	29	17	46	148	60	208	177	77	254	4,59
2	Sumatera Utara	14.703.532	3	9	12	64	38	102	67	47	114	0,78
3	Sumatera Barat	5.610.859	4	4	8	33	31	64	37	35	72	1,28
4	Riau	7.066.264	4	2	6	50	19	69	54	21	75	1,06
5	Jambi	3.674.667	3	3	6	27	12	39	30	15	45	1,22
6	Sumatera Selatan	8.467.432	11	7	18	118	86	204	129	93	222	2,62
7	Bengkulu	1.991.838	1	1	2	7	6	13	8	7	15	0,75
8	Lampung	8.521.201	1	5	6	79	45	124	80	50	130	1,53
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.488.245	2	4	6	31	12	43	33	16	49	3,29
10	Kepulauan Riau	2.069.617	1	1	2	18	12	30	19	13	32	1,55
11	DKI Jakarta	11.100.929	15	21	36	236	124	360	251	145	396	3,57
12	Jawa Barat	51.963.170	48	37	85	838	405	1.243	886	442	1.328	2,56
13	Jawa Tengah	34.917.040	41	31	72	366	204	570	407	235	642	1,84
14	DI Yogyakarta	3.634.493	1	0	1	13	11	24	14	11	25	0,69
15	Jawa Timur	40.156.672	49	41	90	1.028	578	1.606	1.077	619	1.696	4,22
16	Banten	12.414.666	30	34	64	363	189	552	393	223	616	4,96
17	Bali	4.380.824	3	3	6	59	36	95	62	39	101	2,31
18	Nusa Tenggara Barat	5.298.471	6	11	17	96	57	153	102	68	170	3,21
19	Nusa Tenggara Timur	5.462.224	14	11	25	226	91	317	240	102	342	6,26
20	Kalimantan Barat	5.162.937	2	0	2	38	19	57	40	19	59	1,14
21	Kalimantan Tengah	2.605.274	4	1	5	25	15	40	29	16	45	1,73
22	Kalimantan Selatan	4.240.796	7	2	9	44	20	64	51	22	73	1,72
23	Kalimantan Timur	3.708.936	10	4	14	77	31	108	87	35	122	3,29
24	Kalimantan Utara	680.037	2	0	2	16	12	28	18	12	30	4,41
25	Sulawesi Utara	2.553.251	15	16	31	227	120	347	242	136	378	14,80
26	Sulawesi Tengah	3.274.422	8	6	14	111	55	166	119	61	180	5,50
27	Sulawesi Selatan	8.956.181	38	36	74	384	236	620	422	272	694	7,75
28	Sulawesi Tenggara	2.721.246	4	5	9	115	85	200	119	90	209	7,68
29	Gorontalo	1.190.569	3	3	6	80	35	115	83	38	121	10,16
30	Sulawesi Barat	1.405.012	4	3	7	65	29	94	69	32	101	7,19
31	Maluku	1.831.880	8	22	30	147	155	302	155	177	332	18,12
32	Maluku Utara	1.278.764	20	32	52	294	184	478	314	216	530	41,45
33	Papua Barat	950.557	119	97	216	400	165	565	519	262	781	82,16
34	Papua	3.309.626	104	146	250	478	269	747	582	415	997	30,12
Indonesia		**272.331.260**	**614**	**615**	**1.229**	**6.301**	**3.446**	**9.747**	**6.915**	**4.061**	**10.976**	**4,03**
Proporsi Jenis Kelamin			**50,0**	**50,0**		**64,6**	**35,4**		**63,0**	**37,0**		

Sumber: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 58

KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, DAN PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus Baru									
			Penderita Kusta	Cacat Tingkat 0		Cacat Tingkat 2		Angka Cacat Tingkat 2 Per 1.000.000 Penduduk	Penderita Kusta Anak <15 Tahun		Penderita Kusta Anak <15 Tahun dengan Cacat Tingkat 2	
				Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Aceh	5.539.628	254	231	90,94	15	5,91	2,71	16	6,30	0	0,00
2	Sumatera Utara	14.703.532	114	79	69,30	17	14,91	1,16	11	9,65	0	0,00
3	Sumatera Barat	5.610.859	72	42	58,33	25	34,72	4,46	7	9,72	2	28,57
4	Riau	7.066.264	75	71	94,67	1	1,33	0,14	1	1,33	0	0,00
5	Jambi	3.674.667	45	23	51,11	4	8,89	1,09	4	8,89	0	0,00
6	Sumatera Selatan	8.467.432	222	187	84,23	16	7,21	1,89	19	8,56	0	0,00
7	Bengkulu	1.991.838	15	10	66,67	1	6,67	0,50	0	0,00	0	0,00
8	Lampung	8.521.201	130	94	72,31	13	10,00	1,53	2	1,54	0	0,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.488.245	49	42	85,71	6	12,24	4,03	6	12,24	0	0,00
10	Kepulauan Riau	2.069.617	32	30	93,75	2	6,25	0,97	7	21,88	0	0,00
11	DKI Jakarta	11.100.929	396	367	92,68	8	2,02	0,72	29	7,32	0	0,00
12	Jawa Barat	51.963.170	1.328	991	74,62	102	7,68	1,96	82	6,17	2	2,44
13	Jawa Tengah	34.917.040	642	507	78,97	55	8,57	1,58	30	4,67	1	3,33
14	DI Yogyakarta	3.634.493	25	22	88,00	0	0,00	0,00	1	4,00	0	0,00
15	Jawa Timur	40.156.672	1.696	1.280	75,47	164	9,67	4,08	98	5,78	5	5,10
16	Banten	12.414.666	616	534	86,69	41	6,66	3,30	62	10,06	0	0,00
17	Bali	4.380.824	101	88	87,13	7	6,93	1,60	6	5,94	0	0,00
18	Nusa Tenggara Barat	5.298.471	170	151	88,82	6	3,53	1,13	10	5,88	0	0,00
19	Nusa Tenggara Timur	5.462.224	342	246	71,93	46	13,45	8,42	13	3,80	0	0,00
20	Kalimantan Barat	5.162.937	59	45	76,27	4	6,78	0,77	7	11,86	0	0,00
21	Kalimantan Tengah	2.605.274	45	35	77,78	5	11,11	1,92	3	6,67	0	0,00
22	Kalimantan Selatan	4.240.796	73	60	82,19	4	5,48	0,94	4	5,48	0	0,00
23	Kalimantan Timur	3.708.936	122	78	63,93	5	4,10	1,35	6	4,92	0	0,00
24	Kalimantan Utara	680.037	30	25	83,33	3	10,00	4,41	3	10,00	1	33,33
25	Sulawesi Utara	2.553.251	378	358	94,71	7	1,85	2,74	16	4,23	4	25,00
26	Sulawesi Tengah	3.274.422	180	167	92,78	8	4,44	2,44	17	9,44	0	0,00
27	Sulawesi Selatan	8.956.181	694	598	86,17	41	5,91	4,58	52	7,49	0	0,00
28	Sulawesi Tenggara	2.721.246	209	184	88,04	16	7,66	5,88	13	6,22	1	7,69
29	Gorontalo	1.190.569	121	111	91,74	6	4,96	5,04	12	9,92	0	0,00
30	Sulawesi Barat	1.405.012	101	98	97,03	1	0,99	0,71	7	6,93	0	0,00
31	Maluku	1.831.880	332	283	85,24	18	5,42	9,83	55	16,57	3	5,45
32	Maluku Utara	1.278.764	530	502	94,72	10	1,89	7,82	98	18,49	0	0,00
33	Papua Barat	950.557	781	746	95,52	11	1,41	11,57	202	25,86	0	0,00
34	Papua	3.309.626	997	891	89,37	5	0,50	1,51	235	23,57	0	0,00
Indonesia		**272.331.260**	**10.976**	**9.176**	**83,60**	**673**	**6,13**	**2,47**	**1.134**	**10,33**	**19**	**1,68**

Sumber: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 59.a

JUMLAH KASUS TERDAFTAR DAN ANGKA PREVALENSI PENYAKIT KUSTA MENURUT TIPE/JENIS DAN PROVINSI
TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Kasus Terdaftar			Provinsi dengan Eliminasi Kusta	
			PB	MB	PB + MB	Angka Prevalensi Per 10.000 Penduduk	Status Eliminasi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	5.539.628	33	227	260	0,47	Eliminasi
2	Sumatera Utara	14.703.532	8	104	112	0,08	Eliminasi
3	Sumatera Barat	5.610.859	6	67	73	0,13	Eliminasi
4	Riau	7.066.264	1	82	83	0,12	Eliminasi
5	Jambi	3.674.667	4	42	46	0,13	Eliminasi
6	Sumatera Selatan	8.467.432	12	223	235	0,28	Eliminasi
7	Bengkulu	1.991.838	1	14	15	0,08	Eliminasi
8	Lampung	8.521.201	2	134	136	0,16	Eliminasi
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.488.245	3	46	49	0,33	Eliminasi
10	Kepulauan Riau	2.069.617	1	42	43	0,21	Eliminasi
11	DKI Jakarta	11.100.929	24	496	520	0,47	Eliminasi
12	Jawa Barat	51.963.170	61	1.536	1.597	0,31	Eliminasi
13	Jawa Tengah	34.917.040	48	674	722	0,21	Eliminasi
14	DI Yogyakarta	3.634.493	1	42	43	0,12	Eliminasi
15	Jawa Timur	40.156.672	49	1.790	1.839	0,46	Eliminasi
16	Banten	12.414.666	37	608	645	0,52	Eliminasi
17	Bali	4.380.824	6	95	101	0,23	Eliminasi
18	Nusa Tenggara Barat	5.298.471	10	191	201	0,38	Eliminasi
19	Nusa Tenggara Timur	5.462.224	25	317	342	0,63	Eliminasi
20	Kalimantan Barat	5.162.937	2	50	52	0,10	Eliminasi
21	Kalimantan Tengah	2.605.274	4	46	50	0,19	Eliminasi
22	Kalimantan Selatan	4.240.796	9	80	89	0,21	Eliminasi
23	Kalimantan Timur	3.708.936	11	131	142	0,38	Eliminasi
24	Kalimantan Utara	680.037	1	27	28	0,41	Eliminasi
25	Sulawesi Utara	2.553.251	16	376	392	1,54	Belum Eliminasi
26	Sulawesi Tengah	3.274.422	11	171	182	0,56	Eliminasi
27	Sulawesi Selatan	8.956.181	56	679	735	0,82	Eliminasi
28	Sulawesi Tenggara	2.721.246	7	226	233	0,86	Eliminasi
29	Gorontalo	1.190.569	5	116	121	1,02	Belum Eliminasi
30	Sulawesi Barat	1.405.012	7	97	104	0,74	Eliminasi
31	Maluku	1.831.880	19	341	360	1,97	Belum Eliminasi
32	Maluku Utara	1.278.764	35	546	581	4,54	Belum Eliminasi
33	Papua Barat	950.557	109	614	723	7,61	Belum Eliminasi
34	Papua	3.309.626	230	1.146	1.400	4,23	Belum Eliminasi
Indonesia		**272.331.260**	**854**	**11.376**	**12.254**	**0,45**	

Sumber: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 59.b

PENDERITA KUSTA SELESAI BEROBAT (*RELEASE FROM TREATMENT* /RFT) MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021

No	Provinsi	Kusta (PB)		Kusta (MB)	
		Tahun 2020		Tahun 2019	
		Penderita PB[a]	RFT PB (%)	Penderita MB[b]	RFT MB (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	40	90	255	92
2	Sumatera Utara	15	93	178	84
3	Sumatera Barat	13	85	65	75
4	Riau	6	83	97	86
5	Jambi	8	100	83	92
6	Sumatera Selatan	14	100	215	98
7	Bengkulu	1	100	17	82
8	Lampung	11	100	139	96
9	Kep. Bangka Belitung	5	100	35	100
10	Kepulauan Riau	4	75	30	81
11	DKI Jakarta	62	97	514	85
12	Jawa Barat	122	97	1.929	92
13	Jawa Tengah	100	94	1.124	94
14	DI Yogyakarta	5	80	28	79
15	Jawa Timur	137	99	2.709	92
16	Banten	62	95	827	93
17	Bali	12	92	112	79
18	Nusa Tenggara Barat	32	100	294	91
19	Nusa Tenggara Timur	19	100	270	83
20	Kalimantan Barat	5	100	69	93
21	Kalimantan Tengah	6	67	59	86
22	Kalimantan Selatan	11	82	120	89
23	Kalimantan Timur	11	100	164	84
24	Kalimantan Utara	1	100	36	69
25	Sulawesi Utara	37	100	480	91
26	Sulawesi Tengah	11	91	248	99
27	Sulawesi Selatan	95	97	988	86
28	Sulawesi Tenggara	32	66	192	83
29	Gorontalo	2	100	185	94
30	Sulawesi Barat	20	90	142	90
31	Maluku	4	100	149	90
32	Maluku Utara	76	89	794	77
33	Papua Barat	235	87	789	67
34	Papua	334	86	819	75
Indonesia		**1.548**	**90**	**14.155**	**88**

Sumber: Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Keterangan :

a = Penderita kusta PB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 1 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2020, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2019 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu

b = Penderita kusta MB merupakan penderita pada kohort yang sama, yaitu diambil dari penderita baru yang masuk dalam kohort yang sama 2 tahun sebelumnya, misalnya: untuk mencari RFT rate tahun 2020, maka dapat dihitung dari penderita baru tahun 2018 yang menyelesaikan pengobatan tepat waktu

Lampiran 60.a

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B	Kabupaten/Kota Melaksanakan Deteksi Dini Hepatitis B (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	23	23	100,00
2	Sumatera Utara	33	25	75,76
3	Sumatera Barat	19	19	100,00
4	Riau	12	12	100,00
5	Jambi	11	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	17	100,00
7	Bengkulu	10	10	100,00
8	Lampung	15	15	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	7	100,00
11	DKI Jakarta	6	6	100,00
12	Jawa Barat	27	27	100,00
13	Jawa Tengah	35	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	100,00
16	Banten	8	8	100,00
17	Bali	9	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	100,00
20	Kalimantan Barat	14	12	85,71
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,00
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,00
23	Kalimantan Timur	10	10	100,00
24	Kalimantan Utara	5	5	100,00
25	Sulawesi Utara	15	14	93,33
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,00
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	17	15	88,24
29	Gorontalo	6	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	6	100,00
31	Maluku	11	10	90,91
32	Maluku Utara	10	10	100,00
33	Papua Barat	13	8	61,54
34	Papua	29	12	41,38
Indonesia		**514**	**478**	**93,00**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 60.b

PERSENTASE IBU HAMIL MELAKSANAKAN DETEKSI DINI HEPATITIS B (DDHB) DAN HASILNYA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Sasaran Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil Melaksana DDHB	Persentase Ibu Hamil Melaksanakan DDHB	Jumlah Ibu Hamil Terdeteksi HBsAg Reaktif	Persentase Ibu Hamil Terdeteksi HBsAg Reaktif
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	114.456	90.185	78,79	919	1,02
2	Sumatera Utara	305.910	32.438	10,60	415	1,28
3	Sumatera Barat	114.533	71.187	62,15	716	1,01
4	Riau	143.716	55.141	38,37	803	1,46
5	Jambi	68.805	41.319	60,05	556	1,35
6	Sumatera Selatan	173.815	99.084	57,01	788	0,80
7	Bengkulu	38.278	18.340	47,91	309	1,68
8	Lampung	158.609	113.132	71,33	1.403	1,24
9	Kepulauan Bangka Belitung	28.185	21.865	77,58	390	1,78
10	Kepulauan Riau	51.829	18.898	36,46	297	1,57
11	DKI Jakarta	189.437	136.080	71,83	1.344	0,99
12	Jawa Barat	897.215	462.079	51,50	5.819	1,26
13	Jawa Tengah	548.079	438.169	79,95	5.942	1,36
14	DI Yogyakarta	62.352	31.568	50,63	261	0,83
15	Jawa Timur	592.735	450.406	75,99	8.071	1,79
16	Banten	245.304	167.154	68,14	2.264	1,35
17	Bali	71.917	59.686	82,99	705	1,18
18	Nusa Tenggara Barat	107.982	74.053	68,58	2.116	2,86
19	Nusa Tenggara Timur	130.310	63.245	48,53	3.148	4,98
20	Kalimantan Barat	99.996	49.818	49,82	1.132	2,27
21	Kalimantan Tengah	48.291	38.432	79,58	903	2,35
22	Kalimantan Selatan	80.006	55.880	69,84	1.086	1,94
23	Kalimantan Timur	66.826	49.772	74,48	985	1,98
24	Kalimantan Utara	14.286	11.703	81,92	254	2,17
25	Sulawesi Utara	40.807	12.812	31,40	147	1,15
26	Sulawesi Tengah	64.598	36.741	56,88	834	2,27
27	Sulawesi Selatan	158.487	134.634	84,95	2.685	1,99
28	Sulawesi Tenggara	58.952	21.901	37,15	657	3,00
29	Gorontalo	22.166	17.942	80,94	585	3,26
30	Sulawesi Barat	29.940	20.246	67,62	376	1,86
31	Maluku	38.562	13.681	35,48	367	2,68
32	Maluku Utara	26.530	12.629	47,60	419	3,32
33	Papua Barat	22.377	5.814	25,98	242	4,16
34	Papua	72.114	19.979	27,70	612	3,06
Indonesia		**4.887.405**	**2.946.013**	**60,28**	**47.550**	**1,61**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI 2022

Keterangan: Jumlah sasaran yang dimaksud pada kolom 3 adalah Jumlah Ibu Hamil sesuai dengan penduduk sasaran program Pembangunan Kesehatan Tahun 2021-2025 (KMK RI Nomor HK.01.07/Menkes/5675/2021

Pemerikasaan Hepatitis B pada Bumil menggunakan RDT (Rapid Diagnostic Test) HBsAg

HBsAg (Hepatitis B Surface Antigen) merupakan antigen permukaan yang ditemukan pada virus hepatitis B yang memberikan arti adanya infeksi hepatitis B

Lampiran 61

KASUS *AFP (NON POLIO)* PER 100.000 PENDUDUK USIA <15 TAHUN DAN PERSENTASE SPESIMEN ADEKUAT MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Penduduk <15 Tahun	Jumlah Kasus *Non Polio AFP*	*Non Polio AFP Rate* per 100.000 Penduduk Usia < 15 Tahun	Spesimen adekuat (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	1.519.617	19	1,01	36,8
2	Sumatera Utara	4.112.379	12	0,28	83,3
3	Sumatera Barat	1.543.786	41	2,40	80,5
4	Riau	2.016.857	13	0,50	69,2
5	Jambi	906.436	36	3,63	83,3
6	Sumatera Selatan	2.320.658	36	1,54	50,0
7	Bengkulu	499.184	7	1,03	85,7
8	Lampung	2.142.260	13	0,42	61,5
9	Kep. Bangka Belitung	369.363	10	2,52	50,0
10	Kepulauan Riau	620.137	11	1,52	100,0
11	DKI Jakarta	2.392.014	131	4,60	26,7
12	Jawa Barat	12.097.846	120	0,81	75,8
13	Jawa Tengah	7.702.454	182	2,30	96,7
14	DI Yogyakarta	803.289	17	1,49	47,1
15	Jawa Timur	8.313.393	154	1,59	61,7
16	Banten	3.287.616	25	0,64	68,0
17	Bali	966.139	30	2,86	80,0
18	Nusa Tenggara Barat	1.427.232	10	0,70	90,0
19	Nusa Tenggara Timur	1.643.677	0	0,00	0,0
20	Kalimantan Barat	1.322.428	31	2,24	87,1
21	Kalimantan Tengah	673.584	5	0,59	40,0
22	Kalimantan Selatan	1.125.813	24	2,02	66,7
23	Kalimantan Timur	896.929	30	2,59	60,0
24	Kalimantan Utara	187.955	3	1,11	100,0
25	Sulawesi Utara	583.830	8	0,60	12,5
26	Sulawesi Tengah	825.379	5	0,55	40,0
27	Sulawesi Selatan	2.151.051	38	1,63	76,3
28	Sulawesi Tenggara	777.465	17	1,49	70,6
29	Gorontalo	293.039	0	0,00	0,0
30	Sulawesi Barat	390.463	6	1,49	66,7
31	Maluku	500.084	5	0,60	20,0
32	Maluku Utara	348.371	9	1,70	44,4
33	Papua Barat	280.819	11	1,34	27,3
34	Papua	927.699	19	1,20	89,5
Indonesia		**65.969.246**	**1.078**	**1,40**	**67,8**

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2022

Published : 15 Apr 2022

Lampiran 62.a

JUMLAH PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I)
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Difteri				Pertusis	Tetanus Neonatorum		Suspek Campak		
		Jumlah Kasus			Meninggal	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus	Meninggal	Jumlah Kasus		
		L	P	L+P		L+P	L+P		L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Aceh	5	8	13	0	0	0	0	42	37	79
2	Sumatera Utara	1	3	4	0	0	0	0	1	0	1
3	Sumatera Barat	3	0	3	3	0	0	0	16	28	44
4	Riau	0	1	1	0	0	0	0	5	6	11
5	Jambi	1	2	3	1	0	1	0	16	18	34
6	Sumatera Selatan	2	1	3	1	1	3	3	31	34	65
7	Bengkulu	0	0	0	0	2	0	0	15	13	28
8	Lampung	6	3	9	2	0	0	0	64	64	128
9	Kep. Bangka Belitung	2	1	3	1	0	0	0	22	18	40
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5
11	DKI Jakarta	12	12	24	4	0	0	0	248	241	489
12	Jawa Barat	19	14	33	0	4	0	0	93	121	214
13	Jawa Tengah	3	3	6	0	0	0	0	225	268	493
14	DI Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	68	89	157
15	Jawa Timur	35	24	59	1	2	1	1	176	190	366
16	Banten	2	1	3	3	0	0	0	51	42	93
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	52	45	97
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	27	22	49	6	0	1	0	19	22	41
21	Kalimantan Tengah	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	2	0	2	0	0	0	0	11	17	28
23	Kalimantan Timur	2	0	2	0	1	0	0	17	17	34
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	2	2	3	2	5
25	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0	0	25	29	54
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	11	16	27
27	Sulawesi Selatan	2	2	4	1	0	2	2	57	65	122
28	Sulawesi Tenggara	6	2	8	2	0	0	0	25	27	52
29	Gorontalo	0	1	1	0	0	0	0	2	0	2
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	1	1	15	22	37
31	Maluku	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0	0	0	0	0	61	72	133
33	Papua Barat	0	2	2	0	1	0	0	13	7	20
34	Papua	0	1	1	0	0	0	0	9	22	31
Jumlah		**131**	**104**	**235**	**25**	**12**	**11**	**9**	**1396**	**1535**	**2931**
Case Fatality Rate (%)					**11%**			**82%**			
Insidens Rate Suspek Campak (1/100.000 penduduk)											
Indonesia											

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2022

Published : 16 April 2022

Lampiran 62.b

JUMLAH KASUS TETANUS NEONATORUM DAN FAKTOR RISIKO MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Total	Meninggal	*Case Fatality Rate (%)*	Faktor Risiko																							
					Pemeriksaan Kehamilan					Status Imunisasi				Penolong Persalinan				Perawatan Tali Pusat				Pemotongan Tali Pusat				Dirawat di RS		
					Dokter	Bidan/Perawat	Tradisional	Tanpa pemeriksaan	Tidak Diketahui	TT2+	TT1	Tidak Diimunisasi	Tidak Diketahui	Dokter	Bidan/Perawat	Tradisional	Tidak Diketahui	Alkohol/Iodium	Tradisional	Lain-lain	Tidak Diketahui	Gunting	Bambu	Lain-lain	Tidak Diketahui	Ya	Tidak	Tidak Diketahui
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*	*(18)*	*(19)*	*(20)*	*(21)*	*(22)*	*(23)*	*(24)*	*(25)*	*(26)*	*(27)*	*(28)*	*(29)*
1	Aceh	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Riau	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	1	0	0%	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0
6	Sumatera Selatan	3	3	100%	1	0	1	1	0	0	0	3	0	1	0	2	0	0	2	1	0	1	0	2	0	3	0	0
7	Bengkulu	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jakarta	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Jawa Timur	1	1	100%	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
16	Banten	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	1	0	0%	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	2	2	50%	0	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0
25	Sulawesi Utara	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	2	2	100%	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	1	1	100%	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0
31	Maluku	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		**11**	**9**	**81,8**	**1**	**5**	**1**	**2**	**2**	**0**	**2**	**9**	**0**	**1**	**1**	**8**	**1**	**2**	**6**	**2**	**1**	**5**	**1**	**3**	**2**	**11**	**0**	**0**

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2022
Published : 16 April 2022

Lampiran 62.c

JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK PER BULAN
MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Kasus per Bulan												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	11	3	8	5	1	0	0	2	3	8	19	19	79
2	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	Sumatera Barat	0	0	2	5	3	0	3	0	5	12	10	4	44
4	Riau	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	7	11
5	Jambi	0	0	3	0	1	4	0	0	1	6	14	5	34
6	Sumatera Selatan	1	9	5	5	4	6	1	6	0	10	12	6	65
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	1	1	9	9	8	28
8	Lampung	13	11	5	5	13	12	5	15	13	12	14	10	128
9	Kep. Bangka Belitung	4	0	2	1	0	7	4	1	9	10	2	0	40
10	Kepulauan Riau	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	5
11	Jakarta	15	18	38	54	44	32	16	24	40	58	52	97	488
12	Jawa Barat	1	11	16	7	6	6	2	4	8	30	34	89	214
13	Jawa Tengah	11	14	18	37	26	21	7	11	20	78	139	111	493
14	DI Yogyakarta	12	10	17	10	9	4	5	6	4	14	28	38	157
15	Jawa Timur	11	9	16	25	22	11	2	5	12	30	77	146	366
16	Banten	0	1	0	5	1	2	0	0	0	37	24	23	93
17	Bali	1	2	0	0	1	0	6	0	3	8	31	45	97
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	1	0	4	0	0	2	0	25	7	2	41
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	24	28
23	Kalimantan Timur	0	0	3	3	1	5	1	2	5	6	3	5	34
24	Kalimantan Utara	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	5
25	Sulawesi Utara	0	0	2	2	0	1	1	1	3	3	19	22	54
26	Sulawesi Tengah	0	1	3	4	2	8	2	1	1	2	2	1	27
27	Sulawesi Selatan	2	8	8	6	15	17	9	2	8	9	26	12	122
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	2	0	2	0	0	2	9	31	6	52
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30	Sulawesi Barat	2	2	0	0	5	0	0	0	0	22	6	0	37
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	3	1	4	5	4	6	6	13	16	35	27	13	133
33	Papua Barat	3	1	1	1	0	1	0	0	1	4	8	1	21
34	Papua	1	0	1	1	1	3	1	3	0	9	11	0	31
Indonesia		**91**	**104**	**153**	**189**	**163**	**149**	**71**	**100**	**156**	**450**	**610**	**695**	**2931**

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2021
Published : 16 April 2022

Lampiran 62.d

JUMLAH KASUS SUSPEK CAMPAK DAN KASUS SUSPEK CAMPAK YANG DIVAKSINASI
MENURUT KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Kasus Menurut Kelompok Umur (Tahun)												Total Kasus	Total Divaksinasi	Proporsi Divaksinasi terhadap Kasus
		<1 Tahun		1-4 Tahun		5-9 Tahun		10-14 Tahun		> 14 Tahun		Tidak Diketahui				
		Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total	Divaksinasi	Total			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Aceh	0	11	0	23	0	23	0	12	0	10	0	0	79	0	0,00
2	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00
3	Sumatera Barat	1	4	0	7	4	7	0	5	3	21	0	0	44	8	18,18
4	Riau	0	6	0	2	0	0	0	1	0	2	0	0	11	0	0,00
5	Jambi	0	9	0	7	4	4	1	4	0	10	0	0	34	5	14,71
6	Sumatera Selatan	1	5	8	25	9	13	5	6	12	16	0	0	65	35	53,85
7	Bengkulu	0	8	0	6	0	1	0	2	0	11	0	0	28	0	0,00
8	Lampung	0	9	0	54	0	30	0	17	0	18	0	0	128	0	0,00
9	Kep. Bangka Belitung	0	3	3	13	10	14	5	9	0	1	0	0	40	18	45,00
10	Kepulauan Riau	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	0	5	0	0,00
11	Jakarta	27	110	26	173	14	79	8	31	7	95	0	0	488	82	16,80
12	Jawa Barat	8	29	10	38	14	36	9	18	27	93	0	0	214	68	31,78
13	Jawa Tengah	16	55	9	104	16	95	6	61	11	178	0	0	493	58	11,76
14	DI Yogyakarta	2	23	3	42	2	19	0	8	1	65	0	0	157	8	5,10
15	Jawa Timur	10	54	46	116	49	73	21	39	34	84	0	0	366	160	43,72
16	Banten	0	8	0	28	0	16	0	12	0	29	0	0	93	0	0,00
17	Bali	1	6	9	14	11	12	3	3	18	62	0	0	97	42	43,30
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0,00
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
20	Kalimantan Barat	1	5	1	3	4	12	1	7	7	14	0	0	41	14	34,15
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
22	Kalimantan Selatan	0	14	0	7	0	4	0	2	0	1	0	0	28	0	0,00
23	Kalimantan Timur	0	10	0	12	0	3	0	3	0	6	0	0	34	0	0,00
24	Kalimantan Utara	0	1	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	5	0	0,00
25	Sulawesi Utara	2	4	3	8	8	11	21	22	6	9	0	0	54	40	74,07
26	Sulawesi Tengah	1	5	0	3	5	7	1	4	1	8	0	0	27	8	29,63
27	Sulawesi Selatan	2	14	1	29	5	22	12	20	10	37	0	0	122	30	24,59
28	Sulawesi Tenggara	1	6	1	7	3	13	1	5	2	21	0	0	52	8	15,38
29	Gorontalo	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	1	50,00
30	Sulawesi Barat	0	0	0	1	1	3	1	5	9	28	0	0	37	11	29,73
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
32	Maluku Utara	5	31	10	37	17	21	11	13	6	31	0	0	133	49	36,84
33	Papua Barat	3	9	1	7	2	2	0	1	1	2	0	0	21	7	33,33
34	Papua	1	1	0	14	2	10	1	2	1	4	0	0	31	5	16,13
Indonesia		**82**	**442**	**131**	**783**	**180**	**532**	**108**	**316**	**156**	**858**	**0**	**0**	**2.931**	**657**	**22,42**

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2022
Published : 16 April 2022

Lampiran 62.e

FREKUENSI KLB DAN JUMLAH KASUS PADA SUSPEK KLB CAMPAK MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Laporan KLB					
		Total KLB	Frekuensi KLB dengan Spesimen > 5	Frekuensi KLB dengan Investigasi Penuh	Frekuensi KLB dengan Laporan ke Pusat	Total Kasus	Meninggal
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0
4	Riau	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0
11	Jakarta	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	1	1	1	1	7	0
15	Jawa Timur	1	1	1	1	7	0
16	Banten	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	1	1	1	1	21	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	1	0	1	1	4	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	3	2	3	3	15	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0
34	Papua	1	1	1	1	21	0
Indonesia		**8**	**6**	**8**	**8**	**75**	**0**

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2022

Published : 16 April 2022

Lampiran 62.f

DISTRIBUSI KLB CAMPAK BERDASARKAN KONFIRMASI LABORATORIUM MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Konfirmasi Laboratorium											Tanpa Spesimen	
		Total Darah (Serum) Sampel	Campak		Rubella		Gabungan (Campak dan Rubella)		Negatif		Pending Lab			
			Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus	Frekuensi	Kasus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Aceh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Sumatera Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Jambi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Sumatera Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Bengkulu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Lampung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Jakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jawa Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jawa Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	DI Yogyakarta	7	0	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	0
15	Jawa Timur	7	0	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Banten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Bali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Nusa Tenggara Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kalimantan Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	18	0	0	1	21	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sulawesi Selatan	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Maluku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Maluku Utara	16	0	0	2	9	1	6	0	0	0	0	0	0
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua	21	0	0	1	21	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		**73**	**1**	**4**	**5**	**58**	**1**	**6**	**1**	**7**	**0**	**0**	**0**	**0**

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2021
Published : 16 April 2022

Lampiran 63.a

KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) DI DESA/KELURAHAN YANG DITANGANI <24 JAM MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	KLB di Desa/Kelurahan		
		Jumlah	Ditangani <24 jam	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	1	1	100
2	Sumatera Utara	1	1	100
3	Sumatera Barat	3	3	100
4	Riau	7	7	100
5	Jambi	0	0	0
6	Sumatera Selatan	2	2	100
7	Bengkulu	0	0	0
8	Lampung	0	0	0
9	Kep. Bangka Belitung	0	0	0
10	Kepulauan Riau	0	0	0
11	Jakarta	1	0	0
12	Jawa Barat	21	21	100
13	Jawa Tengah	8	8	100
14	DI Yogyakarta	0	0	0
15	Jawa Timur	11	11	100
16	Banten	1	1	100
17	Bali	0	0	0
18	Nusa Tenggara Barat	12	12	100
19	Nusa Tenggara Timur	4	4	100
20	Kalimantan Barat	20	20	100
21	Kalimantan Tengah	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	1	1	100
23	Kalimantan Timur	4	4	100
24	Kalimantan Utara	1	1	100
25	Sulawesi Utara	0	0	0
26	Sulawesi Tengah	3	3	100
27	Sulawesi Selatan	55	55	100
28	Sulawesi Tenggara	0	0	0
29	Gorontalo	5	5	100
30	Sulawesi Barat	2	2	100
31	Maluku	1	1	100
32	Maluku Utara	4	4	100
33	Papua Barat	0	0	0
34	Papua	0	0	0
Indonesia		**168**	**167**	**99**

Sumber: Ditjen P2P Kemenkes RI, 2022

Lampiran 63.b

JUMLAH KEJADIAN KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA DAN WAKTU KEJADIAN DI INDONESIA
TAHUN 2021

No	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	Nopember	Desember	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1	Banjir	33	42	14	15	11	3	11	19	12	14	17	17	208
2	Letusan Gunung Api	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3	Gempa Bumi	1	1	0	2	1	1	0	1	0	1	1	3	12
4	Gempa Bumi dan Tsunami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Tanah Longsor	4	7	2	1	0	1	0	0	2	0	2	1	20
6	Banjir Bandang	6	0	4	3	1	1	0	2	1	2	3	3	26
7	Kekeringan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Angin Puting Beliung	2	11	7	5	2	4	1	1	4	3	2	4	46
9	Gelombang Pasang/Badai	2	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	1	9
10	Banjir dan Tanah Longsor	6	6	1	10	0	1	5	2	5	0	4	5	45
11	Tsunami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Alam		**54**	**68**	**28**	**37**	**15**	**11**	**18**	**26**	**24**	**20**	**31**	**35**	**367**
1	Kebakaran	4	2	4	1	4	5	6	4	2	4	1	2	39
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Kecelakaan Transportasi Darat	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	3
4	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	1	0	0	1	1	1	2	0	0	0	0	0	6
5	Kecelakaan Industri	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
6	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan	0	3	1	2	5	1	1	2	3	5	2	0	25
8	Gagal Teknologi	2	0	0	1	0	2	0	1	1	0	0	0	7
9	Wabah Penyakit (Epidemi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Bencana Non Alam		**7**	**5**	**7**	**5**	**10**	**10**	**9**	**7**	**6**	**9**	**4**	**2**	**81**
1	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Aksi Teror dan Sabotase	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Jumlah Bencana Sosial		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**	**0**	**2**
Total Jumlah Bencana 2021		**61**	**73**	**35**	**42**	**25**	**21**	**28**	**33**	**31**	**29**	**35**	**37**	**450**

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 63.c

JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT JENIS BENCANA
TAHUN 2021

No	Jenis Bencana	Frekuensi	Jumlah Provinsi	Meninggal	Luka Berat/ Rawat Inap	Luka Ringan/Rawat Jalan	Pengungsi
1	Banjir	208	29	124	178	35.702	395.041
2	Letusan Gunung Api	1	1	51	21	4.091	10.400
3	Gempa Bumi	12	8	121	304	10.637	109.538
4	Gempa Bumi dan Tsunami	0					
5	Tanah Longsor	20	7	50	4	27	3.392
6	Banjir Bandang	26	10	120	66	730	8.189
7	Kekeringan	0					
8	Angin Puting Beliung	46	15	4	20	77	329
9	Gelombang Pasang/Badai	9	5	7	0	92	3.012
10	Banjir dan Tanah Longsor	45	15	106	74	5.563	94.990
11	Tsunami	0					
Jumlah Bencana Alam		**367**	**90**	**583**	**667**	**56.919**	**624.891**
1	Kebakaran	39	14	42	14	133	8.152
2	Kebakaran Hutan dan Lahan	0					
3	Kecelakaan Transportasi Darat	3	3	35	27	60	0
4	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	6	5	134	1	310	0
5	Kecelakaan Industri	1	1	1	6	30	940
6	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit	0					
7	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan	25	13	6	625	1.477	0
8	Gagal Teknologi	7	4	7	144	221	943
9	Wabah Penyakit (Epidemi)	0					
Jumlah Bencana Non Alam		**81**	**40**	**225**	**817**	**2.231**	**10.035**
1	Konflik Sosial atau Kerusuhan Sosial						
2	Aksi Teror dan Sabotase	2	2	4	1	1	128
Jumlah Bencana Sosial		**2**	**2**	**4**	**1**	**1**	**128**
Indonesia		**450**		**812**	**1.485**	**59.151**	**635.054**

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 63.d

JUMLAH KORBAN AKIBAT KRISIS KESEHATAN MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021

No	Provinsi	Frekuensi	Meninggal	Luka Berat/ Rawat Inap	Luka Ringan/ Rawat Jalan	Hilang	Pengungsi
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	26	1	63	1.151	0	23.716
2	Sumatera Utara	18	8	147	962	1	13.590
3	Sumatera Barat	11	8	0	6	0	1.911
4	Riau	5	0	0	0	0	907
5	Jambi	4	0	5	132	0	92
6	Sumatera Selatan	6	0	0	109	0	346
7	Bengkulu	2	0	0	0	0	200
8	Lampung	4	0	1	3	0	8
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	10	0	0	70	0	3.097
11	DKI Jakarta	28	63	11	545	4	9.720
12	Jawa Barat	73	85	361	6.093	0	145.342
13	Jawa Tengah	32	14	14	1.084	0	3.715
14	DI Yogyakarta	2	0	31	139	0	0
15	Jawa Timur	48	99	149	6.376	9	19.949
16	Banten	19	44	8	454	0	8.940
17	Bali	3	64	9	124	17	19
18	Nusa Tenggara Barat	20	11	40	3.217	1	5.661
19	Nusa Tenggara Timur	26	180	113	2.606	45	45.423
20	Kalimantan Barat	18	26	90	9.968	42	64.465
21	Kalimantan Tengah	11	1	0	1.367	0	22.020
22	Kalimantan Selatan	16	64	48	13.743	0	136.277
23	Kalimantan Timur	11	1	0	307	0	1.309
24	Kalimantan Utara	2	0	0	0	0	328
25	Sulawesi Utara	11	22	5	415	1	5.058
26	Sulawesi Tengah	7	1	1	8	0	2.284
27	Sulawesi Selatan	16	9	48	191	1	11.766
28	Sulawesi Tenggara	2	0	0	0	0	213
29	Gorontalo	2	0	49	110	0	200
30	Sulawesi Barat	5	107	280	9.487	3	92.021
31	Maluku	3	0	0	0	0	9.775
32	Maluku Utara	3	0	2	320	1	2.018
33	Papua Barat	1	3	1	0	2	0
34	Papua	5	1	9	164	0	4.684
Indonesia		**450**	**812**	**1.485**	**59.151**	**127**	**635.054**

Sumber : Pusat Krisis Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 63.e

JUMLAH KEJADIAN BENCANA MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021

No.	Provinsi	Jumlah Kejadian Bencana																				Jumlah
		Banjir	Letusan Gunung Api	Gempa Bumi	Gempa Bumi dan Tsunami	Tanah Longsor	Banjir Bandang	Kekeringan	Angin Puting Beliung	Gelombang Pasang/Badai	Banjir dan Tanah Longsor	Kebakaran	Kebakaran Hutan dan Lahan	Kecelakaan Transportasi Darat	Kecelakaan Transportasi Laut-Udara	Kecelakaan Industri	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Penyakit	Kejadian Luar Biasa (KLB) - Keracunan	Gagal Teknologi	Wabah Penyakit (Epidemi - Pandemi)	Konflik Sosial/Kerusuhan Sosial	Aksi Teror dan Sabotase	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1	Aceh	17	0	0	0	1	0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	26
2	Sumatera Utara	7	0	0	0	1	2	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	18
3	Sumatera Barat	6	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
4	Riau	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
5	Jambi	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	4
6	Sumatera Selatan	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
7	Bengkulu	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
8	Lampung	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
9	Kepulauan Bangka Belitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kepulauan Riau	5	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
11	DKI Jakarta	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	19	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	28
12	Jawa Barat	29	0	0	0	13	3	0	8	2	3	1	0	1	0	1	0	9	3	0	0	0	73
13	Jawa Tengah	14	0	0	0	1	1	0	8	2	4	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	32
14	D.I. Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
15	Jawa Timur	20	1	4	0	2	2	0	11	0	4	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	48
16	Banten	13	0	0	0	0	0	0	2	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
17	Bali	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
18	Nusa Tenggara Barat	11	0	0	0	0	4	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	20
19	Nusa Tenggara Timur	7	0	1	0	0	4	0	1	1	10	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	26
20	Kalimantan Barat	15	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	18
21	Kalimantan Tengah	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
22	Kalimantan Selatan	15	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
23	Kalimantan Timur	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
24	Kalimantan Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
25	Sulawesi Utara	1	0	0	0	0	2	0	1	2	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
26	Sulawesi Tengah	2	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
27	Sulawesi Selatan	5	0	1	0	1	3	0	1	0	2	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	16
28	Sulawesi Tenggara	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
29	Gorontalo	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2
30	Sulawesi Barat	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
31	Maluku	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
32	Maluku Utara	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3
33	Papua Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
34	Papua	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	5
Total		**208**	**1**	**12**	**0**	**20**	**26**	**0**	**46**	**9**	**45**	**39**	**0**	**3**	**6**	**1**	**0**	**25**	**7**	**0**	**0**	**2**	**450**

Sumber: Pusat Krisis Kesehatan, 2022

Lampiran 64.a

JUMLAH JEMAAH HAJI SEBELUM KEBERANGKATAN MENURUT JENIS DAN PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	2021	
		PIHK	Reguler
(1)	*(2)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	28	4.938
2	Sumatera Utara	45	9.599
3	Sumatera Barat	131	5.221
4	Riau	299	5.646
5	Jambi	208	3.236
6	Sumatera Selatan	352	7.868
7	Bengkulu	15	1.809
8	Lampung	122	7.876
9	Kep. Bangka Belitung	58	1.172
10	Kepulauan Riau	68	1.434
11	DKI Jakarta	2.249	9.067
12	Jawa Barat	1.977	43.883
13	Jawa Tengah	1.260	34.267
14	DI Yogyakarta	552	3.588
15	Jawa Timur	2.512	40.250
16	Banten	969	10.994
17	Bali	41	771
18	Nusa Tenggara Barat	76	5.140
19	Nusa Tenggara Timur	2	723
20	Kalimantan Barat	30	2.785
21	Kalimantan Tengah	187	1.781
22	Kalimantan Selatan	598	4.321
23	Kalimantan Timur	946	2.888
24	Kalimantan Utara	1	497
25	Sulawesi Utara	3	817
26	Sulawesi Tengah	36	2.286
27	Sulawesi Selatan	1.151	8.317
28	Sulawesi Tenggara	131	2.319
29	Gorontalo	2	1.135
30	Sulawesi Barat	8	1.673
31	Maluku	7	1.210
32	Maluku Utara	11	1.240
33	Papua Barat	7	816
34	Papua	37	1.217
Indonesia		**14.119**	**230.784**

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

Keterangan:

Cakupan / % dari jumlah data hasil pemeriksaan di Siskohatkes dibagi kuota jemaah haji per provinsi dari Kemenag

Lampiran 64.b

JUMLAH JAMAAH HAJI BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DAN PROVINSI
TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Jamaah Haji				
		≤40 Thn	41-50 Thn	51-60 Thn	>60 Thn	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	433	986	1.659	1.888	4.966
2	Sumatera Utara	619	2.020	3.546	3.459	9644
3	Sumatera Barat	326	959	1.945	2.122	5352
4	Riau	445	1.495	2.326	1.679	5945
5	Jambi	263	813	1.241	1.127	3444
6	Sumatera Selatan	792	1.722	2.813	2.893	8220
7	Bengkulu	77	272	632	843	1824
8	Lampung	609	1.754	2.807	2.828	7998
9	Kep. Bangka Belitung	116	291	401	422	1230
10	Kepulauan Riau	124	484	516	378	1502
11	DKI Jakarta	1.217	3.166	3.703	3.230	11316
12	Jawa Barat	5.449	12.171	15.587	12.653	45860
13	Jawa Tengah	2.953	7.686	12.710	12.178	35527
14	DI Yogyakarta	285	939	1.525	1.391	4140
15	Jawa Timur	4.944	10.978	15.070	11.770	42762
16	Banten	1.507	3.319	4.046	3.091	11963
17	Bali	114	269	272	157	812
18	Nusa Tenggara Barat	385	1.256	1.784	1.791	5216
19	Nusa Tenggara Timur	126	185	198	216	725
20	Kalimantan Barat	210	711	1.031	863	2815
21	Kalimantan Tengah	376	690	594	308	1968
22	Kalimantan Selatan	829	1.620	1.599	871	4919
23	Kalimantan Timur	546	1.162	1.389	737	3834
24	Kalimantan Utara	78	169	137	114	498
25	Sulawesi Utara	93	206	249	272	820
26	Sulawesi Tengah	405	552	692	673	2322
27	Sulawesi Selatan	1.399	2.827	2.892	2.350	9468
28	Sulawesi Tenggara	331	641	712	766	2450
29	Gorontalo	118	308	315	396	1137
30	Sulawesi Barat	264	494	477	446	1681
31	Maluku	150	285	339	443	1217
32	Maluku Utara	113	247	341	550	1251
33	Papua Barat	137	245	252	189	823
34	Papua	259	422	343	230	1254
Indonesia		**26.092**	**61.344**	**84.143**	**73.324**	**244.903**

Sumber: Siskohatkes, Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

kelompok umur dibuat beradsarkan masukan dari surveilans, ada hubungannya dengan permintaan dari pemerintah Arab Saudi untuk kelompok umur tertentu

Lampiran 64.c

JUMLAH JEMAAH DAN CAPAIAN PEMERIKSAAN JAMAAH HAJI REGULER SEBELUM KEBERANGKATAN MENURUT PROVINSI TEMPAT PEMERIKSAAN TAHUN 2021

No	Provinsi	2021		
		Jumlah Jamaah Haji	Jumlah Jamaah Haji Yang Diperiksa	% Jamaah Haji yang Diperiksa
(1)	*(2)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	4.938	4.246	86%
2	Sumatera Utara	9.599	7.951	83%
3	Sumatera Barat	5.221	4.511	86%
4	Riau	5.646	5.097	90%
5	Jambi	3.236	2.821	87%
6	Sumatera Selatan	7.868	6.728	86%
7	Bengkulu	1.809	1.617	89%
8	Lampung	7.876	6.537	83%
9	Kep. Bangka Belitung	1.172	1.075	92%
10	Kepulauan Riau	1.434	1.233	86%
11	DKI Jakarta	9.067	7.080	78%
12	Jawa Barat	43.883	37.200	85%
13	Jawa Tengah	34.267	29.805	87%
14	DI Yogyakarta	3.588	3.220	90%
15	Jawa Timur	40.250	32.950	82%
16	Banten	10.994	9.221	84%
17	Bali	771	658	85%
18	Nusa Tenggara Barat	5.140	4.499	88%
19	Nusa Tenggara Timur	723	615	85%
20	Kalimantan Barat	2.785	2.385	86%
21	Kalimantan Tengah	1.781	1.542	87%
22	Kalimantan Selatan	4.321	3.713	86%
23	Kalimantan Timur	2.888	2.609	90%
24	Kalimantan Utara	497	387	78%
25	Sulawesi Utara	817	649	79%
26	Sulawesi Tengah	2.286	1.829	80%
27	Sulawesi Selatan	8.317	6.945	84%
28	Sulawesi Tenggara	2.319	2.013	87%
29	Gorontalo	1.135	902	79%
30	Sulawesi Barat	1.673	1.428	85%
31	Maluku	1.210	969	80%
32	Maluku Utara	1.240	1.046	84%
33	Papua Barat	816	688	84%
34	Papua	1.217	973	80%
Indonesia		**230.784**	**195.142**	**85%**

Sumber: Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

Keterangan:

- Cakupan / % dari jumlah data hasil pemeriksaan di Siskohatkes dibagi kuota jemaah haji per provinsi dari Kemenag
- Data dimaksud adalah data 2020 dan 2021

Lampiran 64.d

10 PENYAKIT RISIKO TINGGI TERBANYAK PADA JAMAAH HAJI REGULER
TAHUN 2021

No	Nama Penyakit	Kode ICD-X	Jumlah Kasus	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Dislipidemia	E78	55.057	37%
2	Hipertensi	I10	47.721	32%
3	Diabetes mellitus	E11	24.774	16%
4	Penyakit Jantung Iskemik	I25	9.179	6%
5	Obesitas	E66	4.841	3%
6	Gagal Jantung	I50	2.661	2%
7	Asma	J45	1.775	1%
8	Penyakit Kardiovaskuler	I51	1.430	1%
9	Tuberkulosis	A15	1.401	1%
10	Bronkhitis	J40	1.356	1%

Sumber: Siskohatkes, Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 64.e

HASIL PENGUKURAN KEBUGARAN JEMAAH HAJI REGULER MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021

No	Provinsi	Hasil Pengukuran Kebugaran Jemaah Haji				
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Total
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	149	1.563	1.457	340	3.509
2	Sumatera Utara	19	838	2.213	983	4.053
3	Sumatera Barat	47	441	1.424	343	2.255
4	Riau	116	1.000	1.991	960	4.067
5	Jambi	87	708	1.202	381	2.378
6	Sumatera Selatan	54	1.510	2.910	1.042	5.516
7	Bengkulu	110	442	700	76	1.328
8	Lampung	138	1.323	1.793	377	3.631
9	Kep. Bangka Belitung	22	252	256	43	573
10	Kepulauan Riau	7	240	289	105	641
11	DKI Jakarta	24	435	1.944	976	3.379
12	Jawa Barat	394	7.801	15.330	4.795	28.320
13	Jawa Tengah	379	3.647	7.830	2.341	14.197
14	DI Yogyakarta	49	405	1.209	434	2.097
15	Jawa Timur	363	6.802	11.034	2.582	20.781
16	Banten	57	1.398	3.025	756	5.236
17	Bali	-	35	226	146	407
18	Nusa Tenggara Barat	88	910	1.429	336	2.763
19	Nusa Tenggara Timur	4	82	99	47	232
20	Kalimantan Barat	74	234	543	70	921
21	Kalimantan Tengah	3	263	772	318	1.356
22	Kalimantan Selatan	27	265	1.204	741	2.237
23	Kalimantan Timur	10	182	687	115	994
24	Kalimantan Utara	4	14	48	41	107
25	Sulawesi Utara	46	61	35	6	148
26	Sulawesi Tengah	97	467	448	278	1.290
27	Sulawesi Selatan	99	1.402	1.877	635	4.013
28	Sulawesi Tenggara	53	252	357	143	805
29	Gorontalo	8	165	201	72	446
30	Sulawesi Barat	72	617	376	164	1.229
31	Maluku	63	179	433	54	729
32	Maluku Utara	92	145	451	121	809
33	Papua Barat	2	80	125	114	321
34	Papua	12	163	411	45	631
Indonesia						

Sumber: Siskohatkes, Pusat Kesehatan Haji, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 65.a

KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Penduduk	Jumlah Kasus	*Incidence Rate* per 100.000 Penduduk	Meninggal	*CFR* (%)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	5.459.114	366	6,7	7	1,91
2	Sumatera Utara	14.954.028	2.918	19,5	14	0,48
3	Sumatera Barat	5.610.859	654	11,7	6	0,92
4	Riau	7.066.464	1.038	14,7	10	0,96
5	Jambi	3.641.279	357	9,8	5	1,40
6	Sumatera Selatan	8.702.628	1.135	13,0	3	0,26
7	Bengkulu	2.016.437	628	31,1	1	0,16
8	Lampung	8.609.884	2.271	26,4	8	0,35
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.488.245	864	58,1	20	2,31
10	Kepulauan Riau	2.378.795	1.925	80,9	17	0,88
11	DKI Jakarta	10.645.542	3.092	29,0	0	0,00
12	Jawa Barat	50.103.251	23.959	47,8	212	0,88
13	Jawa Tengah	34.917.040	4.468	12,8	121	2,71
14	DI Yogyakarta	3.970.220	1.186	29,9	12	1,01
15	Jawa Timur	40.156.672	6.760	16,8	72	1,07
16	Banten	13.074.189	2.136	16,3	16	0,75
17	Bali	4.466.595	2.673	59,8	4	0,15
18	Nusa Tenggara Barat	5.298.471	2.697	50,9	21	0,78
19	Nusa Tenggara Timur	5.588.744	2.538	45,4	14	0,55
20	Kalimantan Barat	5.162.937	664	12,9	4	0,60
21	Kalimantan Tengah	2.722.168	189	6,9	0	0,00
22	Kalimantan Selatan	4.319.794	176	4,1	0	0,00
23	Kalimantan Timur	3.708.936	2.898	78,1	23	0,79
24	Kalimantan Utara	721.181	172	23,8	4	2,33
25	Sulawesi Utara	2.530.967	1.196	47,3	32	2,68
26	Sulawesi Tengah	3.120.863	671	21,5	5	0,75
27	Sulawesi Selatan	8.956.181	3.585	40,0	35	0,98
28	Sulawesi Tenggara	2.743.155	674	24,6	8	1,19
29	Gorontalo	1.195.883	557	46,6	15	2,69
30	Sulawesi Barat	1.396.749	339	24,3	6	1,77
31	Maluku	1.805.376	169	9,4	3	1,78
32	Maluku Utara	1.268.866	318	25,1	7	2,20
33	Papua Barat	1.008.698	147	14,6	0	0,00
34	Papua	3.438.243	98	2,9	0	0,00
Indonesia		**272.248.454**	**73.518**	**27,0**	**705**	**0,96**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

Lampiran 65.b

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG TERJANGKIT DEMAM BERDARAH DENGUE MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 - 2021

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Kabupaten/Kota Terjangkit					
			2019		2020		2021	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Aceh	23	23	100,00	23	100,00	21	91,30
2	Sumatera Utara	33	32	96,97	33	100,00	31	93,94
3	Sumatera Barat	19	19	100,00	19	100,00	19	100,00
4	Riau	12	12	100,00	12	100,00	12	100,00
5	Jambi	11	11	100,00	11	100,00	11	100,00
6	Sumatera Selatan	17	17	100,00	17	100,00	17	100,00
7	Bengkulu	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
8	Lampung	15	15	100,00	15	100,00	15	100,00
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,00	7	100,00	7	100,00
10	Kepulauan Riau	7	7	100,00	7	100,00	7	100,00
11	DKI Jakarta	6	6	100,00	6	100,00	6	100,00
12	Jawa Barat	27	27	100,00	27	100,00	27	100,00
13	Jawa Tengah	35	35	100,00	35	100,00	35	100,00
14	DI Yogyakarta	5	5	100,00	5	100,00	5	100,00
15	Jawa Timur	38	38	100,00	38	100,00	38	100,00
16	Banten	8	8	100,00	8	100,00	8	100,00
17	Bali	9	9	100,00	9	100,00	9	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	22	22	100,00	22	100,00	22	100,00
20	Kalimantan Barat	14	14	100,00	14	100,00	14	100,00
21	Kalimantan Tengah	14	14	100,00	14	100,00	14	100,00
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,00	13	100,00	12	92,31
23	Kalimantan Timur	10	10	100,00	10	100,00	10	100,00
24	Kalimantan Utara	5	5	100,00	5	100,00	4	80,00
25	Sulawesi Utara	15	15	100,00	15	100,00	15	100,00
26	Sulawesi Tengah	13	13	100,00	13	100,00	13	100,00
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,00	24	100,00	24	100,00
28	Sulawesi Tenggara	17	16	94,12	17	100,00	14	82,35
29	Gorontalo	6	6	100,00	6	100,00	6	100,00
30	Sulawesi Barat	6	6	100,00	6	100,00	6	100,00
31	Maluku	11	7	63,64	5	45,45	8	72,73
32	Maluku Utara	10	8	80,00	9	90,00	9	90,00
33	Papua Barat	13	7	53,85	6	46,15	5	38,46
34	Papua	29	10	34,48	6	20,69	10	34,48
Indonesia		**514**	**481**	**93,58**	**477**	**92,80**	**474**	**92,22**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 66.a

KESAKITAN AKIBAT MALARIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2021

No	Provinsi	Penduduk	Malaria										
			Suspek	Konfirmasi Laboratorium			% Konfirmasi Laboratorium	Positif			Pengobatan Standar	% Pengobatan Standar	*Annual Paracite Incidence* (API) per 1.000 Penduduk
				Mikroskopis	*Rapid Diagnostic Test (RDT)*	Total		L	P	L+P			
(1)	*(2)*	*(3)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*
1	Aceh	5.459.114	24.622	18.860	5.035	23.895	97,0	313	11	324	324	100,0	0,06
2	Sumatera Utara	14.954.028	20.770	10.735	8.143	18.878	90,9	1.568	963	2.531	2.504	98,9	0,17
3	Sumatera Barat	5.610.859	11.980	3.119	7.176	10.295	85,9	45	27	72	72	100,0	0,01
4	Riau	7.066.464	4.184	416	3.655	4.071	97,3	552	345	897	897	100,0	0,13
5	Jambi	3.641.279	30.516	12.514	15.372	27.886	91,4	30	9	39	39	100,0	0,01
6	Sumatera Selatan	8.702.628	17.684	9.898	7.393	17.291	97,8	24	1	25	25	100,0	0,00
7	Bengkulu	2.016.437	8.501	4.415	3.735	8.150	95,9	1	1	2	2	100,0	0,00
8	Lampung	8.609.884	29.404	15.779	12.690	28.469	96,8	343	214	557	557	100,0	0,06
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.488.245	14.632	9.929	3.266	13.195	90,2	76	28	104	101	97,1	0,07
10	Kepulauan Riau	2.378.795	3.061	929	2.132	3.061	100,0	24	15	39	38	97,4	0,02
11	DKI Jakarta	10.645.542	315	114	193	307	97,5	103	12	115	114	99,1	0,01
12	Jawa Barat	50.103.251	16.513	10.514	3.244	13.758	83,3	237	10	247	245	99,2	0,00
13	Jawa Tengah	34.917.040	30.313	28.809	880	29.689	97,9	510	295	805	805	100,0	0,02
14	DI Yogyakarta	3.970.220	14.275	13.752	126	13.878	97,2	18	7	25	24	96,0	0,01
15	Jawa Timur	40.156.672	8.444	7.022	1.267	8.289	98,2	199	13	212	212	100,0	0,01
16	Banten	13.074.189	1.547	135	1.128	1.263	81,6	20	3	23	15	65,2	0,00
17	Bali	4.466.595	6.013	5.857	58	5.915	98,4	24	9	33	24	72,7	0,01
18	Nusa Tenggara Barat	5.298.471	98.182	71.216	11.097	82.313	83,8	297	70	367	359	97,8	0,07
19	Nusa Tenggara Timur	5.588.744	514.658	338.901	163.897	502.798	97,7	5.270	4.149	9.419	9.397	99,8	1,69
20	Kalimantan Barat	5.162.937	36.533	23.024	9.796	32.820	89,8	14	3	17	13	76,5	0,00
21	Kalimantan Tengah	2.722.168	11.451	5.936	5.441	11.377	99,4	148	23	171	167	97,7	0,06
22	Kalimantan Selatan	4.319.794	19.327	13.116	4.808	17.924	92,7	268	27	295	293	99,3	0,07
23	Kalimantan Timur	3.708.936	14.354	8.074	5.982	14.056	97,9	2.069	180	2.249	2.038	90,6	0,61
24	Kalimantan Utara	721.181	2.213	375	1.403	1.778	80,3	31	2	33	18	54,5	0,05
25	Sulawesi Utara	2.530.967	14.552	7.406	4.463	11.869	81,6	483	230	713	682	95,7	0,28
26	Sulawesi Tengah	3.120.863	19.527	5.837	12.089	17.926	91,8	43	13	56	54	96,4	0,02
27	Sulawesi Selatan	8.956.181	17.728	8.490	8.546	17.036	96,1	756	180	936	914	97,6	0,10
28	Sulawesi Tenggara	2.743.155	16.405	7.535	8.506	16.041	97,8	284	67	351	349	99,4	0,13
29	Gorontalo	1.195.883	17.009	6.025	10.505	16.530	97,2	47	2	49	49	100,0	0,04
30	Sulawesi Barat	1.396.749	13.373	5.786	7.129	12.915	96,6	90	3	93	93	100,0	0,07
31	Maluku	1.805.376	57.268	38.666	15.047	53.713	93,8	483	326	809	793	98,0	0,45
32	Maluku Utara	1.268.866	20.968	12.419	6.762	19.181	91,5	88	40	128	128	100,0	0,10
33	Papua Barat	1.008.698	139.623	78.827	47.836	126.663	90,7	4.541	3.087	7.628	7.582	99,4	7,56
34	Papua	3.438.243	872.826	615.253	241.809	857.062	98,2	153.231	122.012	275.243	270.221	98,2	80,05
Indonesia		**272.248.454**	**2.128.771**	**1.399.683**	**640.609**	**2.040.292**	**95,8**	**172.230**	**132.377**	**304.607**	**299.148**	**98,2**	**1,12**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS

Lampiran 66.b

JUMLAH KABUPATEN/KOTA DENGAN API <1 DAN YANG MENCAPAI ELIMINASI MALARIA MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota Berdasarkan Tingkat Endemisitas Malaria				Persentase Kabupaten/Kota Mendapat Sertifikat Eliminasi Malaria
		Bebas Malaria (Sudah Mendapat Sertifikat Eliminasi)	Endemis Rendah (API<1)	Endemis Sedang (API 1-5)	Endemis Tinggi (API >5)	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	22	0	1	0	95,7
2	Sumatera Utara	21	9	3	0	63,6
3	Sumatera Barat	18	1	0	0	94,7
4	Riau	11	1	0	0	91,7
5	Jambi	7	4	0	0	63,6
6	Sumatera Selatan	11	6	0	0	64,7
7	Bengkulu	7	3	0	0	70,0
8	Lampung	11	4	0	0	73,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	6	1	0	0	85,7
10	Kepulauan Riau	4	3	0	0	57,1
11	DKI Jakarta	6	0	0	0	100,0
12	Jawa Barat	26	1	0	0	96,3
13	Jawa Tengah	33	2	0	0	94,3
14	DI Yogyakarta	4	1	0	0	80,0
15	Jawa Timur	38	0	0	0	100,0
16	Banten	8	0	0	0	100,0
17	Bali	9	0	0	0	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	6	4	0	0	60,0
19	Nusa Tenggara Timur	5	14	0	3	22,7
20	Kalimantan Barat	6	8	0	0	42,9
21	Kalimantan Tengah	11	3	0	0	78,6
22	Kalimantan Selatan	9	4	0	0	69,2
23	Kalimantan Timur	4	5	0	1	40,0
24	Kalimantan Utara	3	2	0	0	60,0
25	Sulawesi Utara	8	6	1	0	53,3
26	Sulawesi Tengah	6	7	0	0	46,2
27	Sulawesi Selatan	21	3	0	0	87,5
28	Sulawesi Tenggara	12	5	0	0	70,6
29	Gorontalo	5	1	0	0	83,3
30	Sulawesi Barat	5	1	0	0	83,3
31	Maluku	0	8	3	0	0,0
32	Maluku Utara	4	6	0	0	40,0
33	Papua Barat	0	3	5	5	0,0
34	Papua	0	8	4	17	0,0
Indonesia		**347**	**124**	**17**	**26**	**67,5**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 66.c

ANNUAL PARASITE INSIDENCE (API) MALARIA PER 1.000 PENDUDUK MENURUT PROVINSI TAHUN 2017- 2021

No	Provinsi	API				
		2017	2018	2019	2020	2021
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	0,06	0,02	0,02	0,04	0,06
2	Sumatera Utara	0,17	0,09	0,07	0,07	0,17
3	Sumatera Barat	0,10	0,09	0,06	0,02	0,01
4	Riau	0,03	0,01	0,02	0,24	0,13
5	Jambi	0,05	0,05	0,02	0,02	0,01
6	Sumatera Selatan	0,11	0,08	0,07	0,01	0,00
7	Bengkulu	0,53	0,16	0,04	0,05	0,00
8	Lampung	0,52	0,38	0,18	0,05	0,06
9	Kepulauan Bangka Belitung	0,07	0,16	0,09	0,12	0,07
10	Kepulauan Riau	0,17	0,11	0,06	0,09	0,02
11	DKI Jakarta	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
12	Jawa Barat	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00
13	Jawa Tengah	0,03	0,02	0,01	0,01	0,02
14	DI Yogyakarta	0,02	0,01	0,00	0,00	0,01
15	Jawa Timur	0,00	0,01	0,02	0,01	0,01
16	Banten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Bali	0,01	0,02	0,01	0,00	0,01
18	Nusa Tenggara Barat	0,15	0,34	0,19	0,05	0,07
19	Nusa Tenggara Timur	5,76	3,42	2,37	2,76	1,69
20	Kalimantan Barat	0,03	0,02	0,00	0,01	0,00
21	Kalimantan Tengah	0,29	0,25	0,07	0,06	0,06
22	Kalimantan Selatan	0,28	0,20	0,20	0,12	0,07
23	Kalimantan Timur	0,44	0,53	0,55	0,62	0,61
24	Kalimantan Utara	0,09	0,04	0,08	0,09	0,05
25	Sulawesi Utara	0,37	0,25	0,20	0,36	0,28
26	Sulawesi Tengah	0,18	0,06	0,06	0,06	0,02
27	Sulawesi Selatan	0,14	0,15	0,10	0,09	0,10
28	Sulawesi Tenggara	0,21	0,29	0,30	0,14	0,13
29	Gorontalo	0,04	0,05	0,03	0,03	0,04
30	Sulawesi Barat	0,11	0,19	0,14	0,10	0,07
31	Maluku	2,30	1,16	0,72	0,42	0,45
32	Maluku Utara	0,79	0,39	0,46	0,16	0,10
33	Papua Barat	14,97	8,49	7,38	10,15	7,56
34	Papua	59,00	52,99	64,03	63,12	80,05
Indonesia		**0,88**	**0,99**	**0,84**	**0,94**	**1,12**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 67.a

PENDERITA KRONIS FILARIASIS MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2021

No	Provinsi	Penderita Kronis Filariasis				
		Kasus Kronis TAHUN Sebelumnya	Kasus Kronis Baru Ditemukan	Kasus Kronis Pindah	Kasus Kronis Meninggal	Jumlah Seluruh Kasus Kronis
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(8)*
1	Aceh	570	19	2	64	523
2	Sumatera Utara	191	3	0	0	194
3	Sumatera Barat	187	0	13	46	128
4	Riau	136	11	5	9	133
5	Jambi	275	4	0	64	215
6	Sumatera Selatan	120	1	3	9	109
7	Bengkulu	64	0	0	0	64
8	Lampung	33	1	0	0	34
9	Kepulauan Bangka Belitung	93	7	0	0	100
10	Kepulauan Riau	81	0	0	0	81
11	DKI Jakarta	23	0	0	3	20
12	Jawa Barat	641	2	22	33	588
13	Jawa Tengah	400	29	3	21	405
14	DI Yogyakarta	2	0	0	0	2
15	Jawa Timur	329	0	57	31	241
16	Banten	107	1	0	3	105
17	Bali	2	0	0	0	2
18	Nusa Tenggara Barat	10	0	0	0	10
19	Nusa Tenggara Timur	1.534	57	4	280	1.307
20	Kalimantan Barat	251	1	0	1	251
21	Kalimantan Tengah	52	2	0	5	49
22	Kalimantan Selatan	27	12	0	1	38
23	Kalimantan Timur	107	5	0	0	112
24	Kalimantan Utara	3	0	0	0	0
25	Sulawesi Utara	18	0	0	1	17
26	Sulawesi Tengah	180	1	4	36	141
27	Sulawesi Selatan	63	0	0	1	62
28	Sulawesi Tenggara	50	1	1	6	44
29	Gorontalo	4	0	0	0	2
30	Sulawesi Barat	55	0	0	1	54
31	Maluku	39	12	0	2	49
32	Maluku Utara	24	1	0	0	25
33	Papua Barat	620	0	0	0	620
34	Papua	3.615	14	0	0	3.629
Indonesia		**9.906**	**184**	**114**	**617**	**9.354**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Keterangan : Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS sampai dengan 31 Desember 2021

* Berdasarkan hasil validasi, seluruh kasus di Provinsi Kaltara dan 2 kasus di Provinsi Gorontalo pada tahun sebelumnya bukan merupakan kasus kronis filariasis

Lampiran 67.b

JUMLAH KABUPATEN/KOTA ENDEMIS FILARIA, BERHASIL MENURUNKAN ANGKA MIKROFILARIA MENJADI <1%, DAN MASIH MELAKSANAKAN PEMBERIAN OBAT PENCEGAHAN MASSAL (POPM) FILARIASIS SERTA ELIMINASI FILARIASIS MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota Endemis Filariasis	Jumlah Kabupaten/Kota Berhasil Menurunkan Mikrofilaria < 1%	Persentase Kabupaten/Kota Berhasil Menurunkan Mikrofilaria < 1%	Jumlah Kabupaten/Kota yang Masih Melaksanakan POPM Filariasis	Persentase Kabupaten/Kota yang Masih Melaksanakan POPM Filariasis	Jumlah Kabupaten/Kota Eliminasi Filariasis	Persentase Kabupaten/Kota Eliminasi Filariasis
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Aceh	12	10	83,3	2	16,7	2	16,7
2	Sumatera Utara	9	9	100,0	0	0,0	5	55,6
3	Sumatera Barat	10	10	100,0	0	0,0	7	70,0
4	Riau	10	10	100,0	0	0,0	8	80,0
5	Jambi	5	5	100,0	0	0,0	1	20,0
6	Sumatera Selatan	9	9	100,0	0	0,0	4	44,4
7	Bengkulu	5	5	100,0	0	0,0	3	60,0
8	Lampung	1	1	100,0	0	0,0	0	0,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,0	0	0,0	5	71,4
10	Kepulauan Riau	3	2	66,7	0	0,0	0	0,0
11	DKI Jakarta	0	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	11	11	100,0	0	0,0	7	63,6
13	Jawa Tengah	9	4	44,4	5	55,6	0	0,0
14	DI Yogyakarta	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
15	Jawa Timur	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
16	Banten	5	5	100,0	0	0,0	5	100,0
17	Bali	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
18	Nusa Tenggara Barat	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	18	17	94,4	0	0,0	2	11,1
20	Kalimantan Barat	9	6	66,7	1	11,1	0	0,0
21	Kalimantan Tengah	11	10	90,9	0	0,0	3	27,3
22	Kalimantan Selatan	8	8	100,0	0	0,0	1	12,5
23	Kalimantan Timur	6	6	100,0	0	0,0	0	0,0
24	Kalimantan Utara	4	4	100,0	0	0,0	0	0,0
25	Sulawesi Utara	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
26	Sulawesi Tengah	9	9	100,0	1	11,1	3	33,3
27	Sulawesi Selatan	4	3	75,0	1	25,0	3	75,0
28	Sulawesi Tenggara	12	12	100,0	0	0,0	3	25,0
29	Gorontalo	6	6	100,0	0	0,0	4	66,7
30	Sulawesi Barat	4	3	75,0	1	25,0	1	25,0
31	Maluku	8	5	62,5	2	25,0	0	0,0
32	Maluku Utara	6	5	83,3	0	0,0	1	16,7
33	Papua Barat	12	0	0,0	8	66,7	0	0,0
34	Papua	23	8	34,8	11	47,8	4	17,4
Indonesia		**236**	**190**	**80,5**	**32**	**13,6**	**72**	**30,5**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Keterangan: * = Kolom tambahan untuk menjelaskan status 34 kab/kota yang sudah selesai POPM Filariasis 5 TAHUN tetapi tertunda pelaksanaan evaluasi penurunan mikrofilaria karena adanya kondisi pandemi Covid19

Lampiran 67.c

SITUASI RABIES MENURUT PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2019 - 2021

No	Provinsi	2019			2020			2021		
		GHPR	VAR	LYSSA	GHPR	VAR	LYSSA	GHPR	VAR	LYSSA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Aceh	893	634	0	640	640	0	527	170	0
2	Sumatera Utara	8.163	6.489	12	6.802	5.457	1	2201	1740	3
3	Sumatera Barat	4.994	2.912	1	4.341	2.508	2	3151	1565	0
4	Riau	2.514	2.514	1	2.543	1.696	4	557	476	0
5	Jambi	1.154	938	0	867	682	0	327	289	0
6	Sumatera Selatan	1.779	1.779	0	1.842	1.586	2	1164	1090	2
7	Bengkulu	1.608	1.505	0	1.555	1.481	0	1156	1096	0
8	Lampung	1.946	1.890	0	2.043	1.866	1	1555	1443	0
9	Kepulauan Bangka Belitung*	0	0	0	36	0	0	30	14	0
10	Kepulauan Riau*	2	0	0	13	3	0	5	5	0
11	DKI Jakarta*	157	80	0	869	697	0	605	0	0
12	Jawa Barat	1.571	944	0	1.291	755	0	480	290	0
13	Jawa Tengah*	254	89	0	250	117	0	223	41	0
14	DI Yogyakarta*	112	302	0	56	56	0	97	97	0
15	Jawa Timur*	0	0	0	19	0	0	98	65	0
16	Banten	192	157	0	176	88	0	100	88	0
17	Bali	37.372	19.681	4	26.979	13.511	2	16454	9020	0
18	Nusa Tenggara Barat	861	559	13	1.237	1.144	6	1864	1821	10
19	Nusa Tenggara Timur	13.449	11.100	16	11.262	10.913	5	10858	10857	4
20	Kalimantan Barat	4.154	3.757	14	3.124	2.573	2	2602	2304	13
21	Kalimantan Tengah	1.441	2.117	0	259	355	0	304	271	0
22	Kalimantan Selatan	438	376	0	311	270	0	136	125	0
23	Kalimantan Timur	1.049	1.822	0	169	222	0	868	777	0
24	Kalimantan Utara	155	104	0	36	25	0	183	108	0
25	Sulawesi Utara	5.851	3.129	17	3.924	589	7	1980	1295	9
26	Sulawesi Tengah	3.471	11.468	8	2.533	2.422	1	1637	1080	1
27	Sulawesi Selatan	6.583	3.210	12	6.078	4.956	4	5111	4038	7
28	Sulawesi Tenggara	1.257	1.249	1	920	90	0	497	484	0
29	Gorontalo	1.063	991	5	662	661	1	719	658	6
30	Sulawesi Barat	1.348	1.348	0	1.065	1.065	0	573	471	1
31	Maluku	1.133	835	2	539	291	2	1037	837	6
32	Maluku Utara	306	283	0	193	78	0	158	158	0
33	Papua Barat*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Papua*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Indonesia		**105.270**	**82.262**	**106**	**82.634**	**56.797**	**40**	**57.257**	**42.773**	**62**
Persentase VAR/GHPR		**78,1%**			**68,7%**			**74,7%**		

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022
Keterangan: : GHPR = Gigitan Hewan Penular Rabies (belum confirmed lab), VAR = Kasus digigit yang diberi Vaksin Anti Rabies, LYSSA = Positif rabies dan mati
* daerah bebas rabies

Lampiran 67.d

JUMLAH KASUS, MENINGGAL, DAN *CASE FATALITY RATE (CFR)* LEPTOSPIROSIS
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019 - 2021

No	Provinsi	2019			2020			2021		
		K	M	CFR	K	M	CFR	K	M	CFR
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(3)*	*(10)*	*(11)*
1	DKI Jakarta	37	0	0,00	209	9	4,31	15	0	0,0
2	Jawa Barat	32	1	3,13	55	9	16,36	14	2	14,3
3	Jawa Tengah	458	67	14,63	422	49	11,61	265	44	16,6
4	DI Yogyakarta	183	8	4,37	192	17	8,85	79	7	8,9
5	Jawa Timur	147	23	15,65	272	21	7,72	312	29	9,3
6	Banten	52	19	36,54	8	0	0,00	33	0	0,0
7	Maluku	2	1	50,00	0	0	0,00	0	0	0,0
8	Kalimantan Utara	8	3	37,50	11	1	9,09	15	1	6,7
9	Sulawesi Selatan	2	0	0,00	1	0	0,00	0	0	0,0
10	Sumatera Selatan	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,0
11	Kalimantan Timur	0	0	0,00	0	0	0,00	1	1	100,0
Indonesia		**921**	**122**	**13,25**	**1170**	**106**	**9,06**	**734**	**84**	**11,44**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022
Keterangan: K= Kasus, M= Meninggal, CFR=Case Fatality Rate

Lampiran 70.a

REKAPITULASI DETEKSI DINI KANKER SERVIKS (IVA) DAN KANKER PAYUDARA
MENURUT PROVINSI TAHUN 2019-2021

No	Provinsi	Jumlah WUS 30-50 tahun	Pemeriksaan 2021	Total Pemeriksaan s.d 2021	Cakupan Pemeriksaan 2019 s.d 2021 (%)	Hasil Pemeriksaan 2019 s.d 2021			
						IVA positif	Curiga Ca leher rahim	Benjolan	Curiga Ca Payudara
(1)	*(2)*	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Aceh	769.145	1.206	4.383	0,6	95	1	810	16
2	Sumatera Utara	2.144.204	19.776	150.117	7,0	354	61	405	50
3	Sumatera Barat	756.087		75.496	10,0	893	179	151	27
4	Riau	877.266	6.914	69.895	8,0	1.040	121	311	25
5	Jambi	546.881	10.388	63.707	11,6	254	26	482	3
6	Sumatera Selatan	1.314.890	153.564	330.769	25,2	426	125	680	142
7	Bengkulu	199.463	4.333	33.530	16,8	26	1	44	13
8	Lampung	1.269.785	49.701	181.650	14,3	651	165	1141	245
9	Kep. Bangka Belitung	228.853	20.654	69.200	30,2	63	14	41	15
10	Kepulauan Riau	380.361	6.593	25.850	6,8	304	28	90	9
11	DKI Jakarta	1.877.504	98.422	248.867	13,3	934	159	1007	243
12	Jawa Barat	7.768.504	64.679	285.466	3,7	1.366	814	1574	332
13	Jawa Tengah	4.847.364	29.675	156.350	3,2	7.043	781	3206	373
14	DI Yogyakarta	558.299	2.843	19.131	3,4	2.107	72	1985	63
15	Jawa Timur	6.000.227	67.617	280.746	4,7	5.849	418	3077	680
16	Banten	2.446.797	29.825	137.198	5,6	409	248	1151	251
17	Bali	549.265	21.300	103.377	18,8	2.246	118	389	39
18	Nusa Tenggara Barat	748.349	142.253	173.789	23,2	777	27	110	33
19	Nusa Tenggara Timur	788.144	17.998	89.132	11,3	1.340	126	196	71
20	Kalimantan Barat	756.914	6.101	27.261	3,6	420	117	309	62
21	Kalimantan Tengah	306.367	5.575	21.700	7,1	0	0	0	0
22	Kalimantan Selatan	591.352	4.353	42.453	7,2	302	97	106	126
23	Kalimantan Timur	853.466	6.211	22.865	2,7	179	81	268	94
24	Kalimantan Utara	489.059	189	7.846	1,6	120	35	179	52
25	Sulawesi Utara	332.147	871	6.572	2,0	224	9	8	0
26	Sulawesi Tengah	414.376	16.722	28.619	6,9	65	3	60	15
27	Sulawesi Selatan	1.422.704	24.732	150.339	10,6	54	26	182	13
28	Sulawesi Tenggara	431.381	1.613	4.652	1,1	28	8	31	0
29	Gorontalo	162.613	138	2.166	1,3	37	0	12	0
30	Sulawesi Barat	208.701	477	2.373	1,1	17	6	99	23
31	Maluku	329.738	599	4.535	1,4	204	20	29	15
32	Maluku Utara	186.108	1.018	6.105	3,3	9	8	16	10
33	Papua Barat	149.545	458	830	0,6	0	0	0	0
34	Papua	665.399	194	208	0,0	1	0	1	0
Indonesia		**41.371.258**	**816.992**	**2.827.177**	**6,8**	**27.837**	**3.894**	**18.150**	**3.040**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Keterangan : Sasaran = perempuan usia 30-50 tahun

Lampiran 70.b

JUMLAH DESA YANG MELAKSANAKAN POS PEMBINAAN TERPADU (POSBINDU) MENURUT PROVINSI S.D. TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Desa yang Melaksanakan Posbindu	% Desa yang Melaksanakan Posbindu
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	6.606	4.456	67,5
2	Sumatera Utara	6.076	3.934	64,7
3	Sumatera Barat	1.171	960	82,0
4	Riau	1.904	1.211	63,6
5	Jambi	1.522	919	60,4
6	Sumatera Selatan	3.353	2.490	74,3
7	Bengkulu	1.523	987	64,8
8	Lampung	2.652	2.146	80,9
9	Kepulauan Bangka Belitung	391	344	88,0
10	Kepulauan Riau	416	283	68,0
11	DKI Jakarta	267	261	97,8
12	Jawa Barat	5.996	4.297	71,7
13	Jawa Tengah	8.582	6.876	80,1
14	DI Yogyakarta	439	410	93,4
15	Jawa Timur	8.582	7.029	81,9
16	Banten	1.609	1.082	67,2
17	Bali	716	551	77,0
18	Nusa Tenggara Barat	1.152	1.070	92,9
19	Nusa Tenggara Timur	3.519	2.591	73,6
20	Kalimantan Barat	2.000	1.181	59,1
21	Kalimantan Tengah	1.612	919	57,0
22	Kalimantan Selatan	2.010	1.577	78,5
23	Kalimantan Timur	1.053	878	83,4
24	Kalimantan Utara	483	102	21,1
25	Sulawesi Utara	1.797	521	29,0
26	Sulawesi Tengah	2.125	1.505	70,8
27	Sulawesi Selatan	3.224	2.875	89,2
28	Sulawesi Tenggara	2.684	1.087	40,5
29	Gorontalo	734	537	73,2
30	Sulawesi Barat	701	445	63,5
31	Maluku	1.070	246	23,0
32	Maluku Utara	1.300	663	51,0
33	Papua Barat	1.585	345	21,8
34	Papua	3.898	208	5,3
Indonesia		**82.752**	**54.986**	**66,4**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 70.c

KABUPATEN/KOTA YANG MENERAPKAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Menerapkan KTR	
			Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	23	13	56,5
2	Sumatera Utara	33	13	39,4
3	Sumatera Barat	19	16	84,2
4	Riau	12	4	33,3
5	Jambi	11	8	72,7
6	Sumatera Selatan	17	15	88,2
7	Bengkulu	10	9	90,0
8	Lampung	15	10	66,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	7	100,0
10	Kepulauan Riau	7	5	71,4
11	DKI Jakarta	6	1	16,7
12	Jawa Barat	27	23	85,2
13	Jawa Tengah	35	20	57,1
14	DI Yogyakarta	5	3	60,0
15	Jawa Timur	38	22	57,9
16	Banten	8	6	75,0
17	Bali	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	7	70,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	10	45,5
20	Kalimantan Barat	14	10	71,4
21	Kalimantan Tengah	14	10	71,4
22	Kalimantan Selatan	13	13	100,0
23	Kalimantan Timur	10	8	80,0
24	Kalimantan Utara	5	3	60,0
25	Sulawesi Utara	15	5	33,3
26	Sulawesi Tengah	13	11	84,6
27	Sulawesi Selatan	24	23	95,8
28	Sulawesi Tenggara	17	9	52,9
29	Gorontalo	6	5	83,3
30	Sulawesi Barat	6	4	66,7
31	Maluku	11	8	72,7
32	Maluku Utara	10	5	50,0
33	Papua Barat	13	3	23,1
34	Papua	29	3	10,3
Indonesia		**514**	**321**	**62,5**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 70.d

KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI ≥40% PUSKESMAS MENYELENGGARAKAN UPAYA BERHENTI MEROKOK (UBM) MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Menyelenggarakan UBM	
			Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	23	2	8,7
2	Sumatera Utara	33	8	24,2
3	Sumatera Barat	19	5	26,3
4	Riau	12	3	25,0
5	Jambi	11	2	18,2
6	Sumatera Selatan	17	1	5,9
7	Bengkulu	10	0	0,0
8	Lampung	15	1	6,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	2	28,6
10	Kepulauan Riau	7	3	42,9
11	DKI Jakarta	6	1	16,7
12	Jawa Barat	27	1	3,7
13	Jawa Tengah	35	6	17,1
14	DI Yogyakarta	5	0	0,0
15	Jawa Timur	38	0	0,0
16	Banten	8	3	37,5
17	Bali	9	1	11,1
18	Nusa Tenggara Barat	10	4	40,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	9	40,9
20	Kalimantan Barat	14	1	7,1
21	Kalimantan Tengah	14	0	0,0
22	Kalimantan Selatan	13	2	15,4
23	Kalimantan Timur	10	1	10,0
24	Kalimantan Utara	5	3	60,0
25	Sulawesi Utara	15	1	6,7
26	Sulawesi Tengah	13	5	38,5
27	Sulawesi Selatan	24	2	8,3
28	Sulawesi Tenggara	17	0	0,0
29	Gorontalo	6	2	33,3
30	Sulawesi Barat	6	3	50,0
31	Maluku	11	0	0,0
32	Maluku Utara	10	1	10,0
33	Papua Barat	13	0	0,0
34	Papua	29	1	3,4
Indonesia		**514**	**74**	**14,4**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 70.e

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKUKAN PELAYANAN TERPADU (PANDU) PTM DI ≥80% PUSKESMAS MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota Melakukan Pelayanan PANDU	
			Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	23	10	43,5
2	Sumatera Utara	33	4	12,1
3	Sumatera Barat	19	8	42,1
4	Riau	12	3	25,0
5	Jambi	11	1	9,1
6	Sumatera Selatan	17	13	76,5
7	Bengkulu	10	8	80,0
8	Lampung	15	13	86,7
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	6	85,7
10	Kepulauan Riau	7	3	42,9
11	DKI Jakarta	6	3	50,0
12	Jawa Barat	27	9	33,3
13	Jawa Tengah	35	8	22,9
14	Di Yogyakarta	5	1	20,0
15	Jawa Timur	38	14	36,8
16	Banten	8	0	0,0
17	Bali	9	4	44,4
18	Nusa Tenggara Barat	10	6	60,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	7	31,8
20	Kalimantan Barat	14	7	50,0
21	Kalimantan Tengah	14	5	35,7
22	Kalimantan Selatan	13	1	7,7
23	Kalimantan Timur	10	2	20,0
24	Kalimantan Utara	5	2	40,0
25	Sulawesi Utara	15	0	0,0
26	Sulawesi Tengah	13	1	7,7
27	Sulawesi Selatan	24	15	62,5
28	Sulawesi Tenggara	17	8	47,1
29	Gorontalo	6	2	33,3
30	Sulawesi Barat	6	2	33,3
31	Maluku	11	2	18,2
32	Maluku Utara	10	0	0,0
33	Papua Barat	13	0	0,0
34	Papua	29	0	0,0
Indonesia		**514**	**168**	**32,7**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Keterangan : Sasaran = perempuan usia 30-50 tahun

Lampiran 70.f

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI GANGGUAN INDERA PADA ≥40% POPULASI MENURUT PROVINSI TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Target RENSTRA (Jumlah Kab/Kota)				Kabupaten/Kota Melaksanakan Deteksi Dini Gangguan Indera pada ≥40% Populasi Tahun 2021	
			2021	2022	2023	2024	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Aceh	23	9	14	16	23	4	43,4
2	Sumatera Utara	33	13	20	23	33	1	7,6
3	Sumatera Barat	19	8	11	13	19	1	13,1
4	Riau	12	5	7	8	12	0	0,0
5	Jambi	11	4	7	8	11	0	0,0
6	Sumatera Selatan	17	7	10	12	17	3	44,0
7	Bengkulu	10	4	6	7	10	0	0,0
8	Lampung	15	6	9	11	15	6	99,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	3	4	5	7	2	71,3
10	Kepulauan Riau	7	3	4	5	7	0	0,0
11	DKI Jakarta	6	2	4	4	6	6	249,5
12	Jawa Barat	27	11	16	19	27	5	46,2
13	Jawa Tengah	35	14	21	25	35	11	78,4
14	DI Yogyakarta	5	2	3	4	5	0	0,0
15	Jawa Timur	38	15	23	27	38	24	157,6
16	Banten	8	3	5	6	8	4	124,8
17	Bali	9	4	5	6	9	1	27,7
18	Nusa Tenggara Barat	10	4	6	7	10	5	124,8
19	Nusa Tenggara Timur	22	9	13	15	22	4	45,4
20	Kalimantan Barat	14	6	8	10	14	2	35,6
21	Kalimantan Tengah	14	6	8	10	14	2	35,6
22	Kalimantan Selatan	13	5	8	9	13	5	96,0
23	Kalimantan Timur	10	4	6	7	10	1	25,0
24	Kalimantan Utara	5	2	3	4	5	0	0,0
25	Sulawesi Utara	15	6	9	11	15	3	49,9
26	Sulawesi Tengah	13	5	8	9	13	1	19,2
27	Sulawesi Selatan	24	10	14	17	24	2	20,8
28	Sulawesi Tenggara	17	7	10	12	17	3	44,0
29	Gorontalo	6	2	4	4	6	1	41,6
30	Sulawesi Barat	6	2	4	4	6	0	0,0
31	Maluku	11	4	7	8	11	0	0,0
32	Maluku Utara	10	4	6	7	10	1	25,0
33	Papua Barat	13	5	8	9	13	0	0,0
34	Papua	29	12	17	20	29	0	0,0
Indonesia		**514**	**206**	**308**	**360**	**514**	**98**	**47,6**

Sumber: Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 71.a

JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN DETEKSI DINI KESEHATAN JIWA DAN NAPZA MENURUT PROVINSI DI INDONESIA TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota Target	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Keswa dan NAPZA	% Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Deteksi Dini Keswa dan NAPZA
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1	Aceh	23	17	23	100,0
2	Sumatera Utara	33	24	21	63,6
3	Sumatera Barat	19	14	15	78,9
4	Riau	12	9	4	33,3
5	Jambi	11	8	8	72,7
6	Sumatera Selatan	17	13	15	88,2
7	Bengkulu	10	7	4	40,0
8	Lampung	15	11	15	100,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	5	7	100,0
10	Kepulauan Riau	7	5	4	57,1
11	DKI Jakarta	6	4	6	100,0
12	Jawa Barat	27	21	24	88,9
13	Jawa Tengah	35	26	19	54,3
14	D I Yogyakarta	5	4	5	100,0
15	Jawa Timur	38	29	38	100,0
16	Banten	8	6	5	62,5
17	Bali	9	7	8	88,9
18	Nusa Tenggara Barat	10	7	9	90,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	16	2	9,1
20	Kalimantan Barat	14	10	8	57,1
21	Kalimantan Tengah	14	10	1	7,1
22	Kalimantan Selatan	13	10	10	76,9
23	Kalimantan Timur	10	7	9	90,0
24	Kalimantan Utara	5	4	5	100,0
25	Sulawesi Utara	15	11	14	93,3
26	Sulawesi Tengah	13	10	2	15,4
27	Sulawesi Selatan	24	18	17	70,8
28	Sulawesi Tenggara	17	13	1	5,9
29	Gorontalo	6	4	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	4	5	83,3
31	Maluku	11	8	7	63,6
32	Maluku Utara	10	7	7	70,0
33	Papua Barat	13	10	0	0,0
34	Papua	29	21	3	10,3
Indonesia		**514**	**380**	**327**	**63,6**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 71.b

JUMLAH PENYALAHGUNA NAPZA YANG MENDAPAT LAYANAN REHABILITASI MEDIS
MENURUT PROVINSI DI INDONESIA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

No	Provinsi	Baseline 2011 sd 2019	Target 2020	Capaian 2020	Target 2021	Capaian 2021	Capaian 2011-2021
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	207	229	67	252	75	349
2	Sumatera Utara	69	101	0	133	0	69
3	Sumatera Barat	416	434	19	453	25	460
4	Riau	795	807	41	818	16	852
5	Jambi	184	195	10	205	13	207
6	Sumatera Selatan	1177	1194	84	1211	66	1327
7	Bengkulu	100	110	5	119	0	105
8	Lampung	393	408	18	422	26	437
9	Kepulauan Bangka Belitung	72	79	5	86	5	82
10	Kepulauan Riau	27	34	0	41	0	27
11	DKI Jakarta	1115	1121	30	1127	24	1169
12	Jawa Barat	730	756	48	783	37	815
13	Jawa Tengah	244	278	20	312	19	283
14	D I Yogyakarta	191	196	23	201	22	236
15	Jawa Timur	529	566	29	603	46	604
16	Banten	150	158	0	166	0	150
17	Bali	155	164	15	173	24	194
18	Nusa Tenggara Barat	301	311	11	320	27	339
19	Nusa Tenggara Timur	2	23	0	45	0	2
20	Kalimantan Barat	241	250	4	268	18	263
21	Kalimantan Tengah	194	208	11	221	16	221
22	Kalimantan Selatan	1116	1129	97	1141	102	1315
23	Kalimantan Timur	502	512	7	521	0	509
24	Kalimantan Utara	14	19	0	24	0	14
25	Sulawesi Utara	4	18	0	32	0	4
26	Sulawesi Tengah	14	27	0	39	0	14
27	Sulawesi Selatan	30	53	3	77	3	36
28	Sulawesi Tenggara	1	19	0	35	0	1
29	Gorontalo	0	6	0	12	0	0
30	Sulawesi Barat	1	7	38	13	0	39
31	Maluku	6	17	0	27	0	6
32	Maluku Utara	12	22	0	31	0	12
33	Papua Barat	3	16	0	28	0	3
34	Papua	5	33	0	61	0	5
Indonesia		**9000**	**9500**	**585**	**10000**	**564**	**10149**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 72.a

PERSENTASE SARANA AIR MINUM YANG DIAWASI/DIPERIKSA KUALITAS AIR MINUMNYA SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI

TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Sarana Air Minum	Sarana Air Minum sesuai Standar			
			Jumlah Sarana Air Minum Di IKL	%	Jumlah Sarana Air Minum Memenuhi Syarat	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
1	Aceh	977	672	68,8	672	68,8
2	Sumatera Utara	1.317	963	73,1	963	73,1
3	Sumatera Barat	2.120	551	26,0	551	26,0
4	Riau	1.269	554	43,7	554	43,7
5	Jambi	780	679	87,1	679	87,1
6	Sumatera Selatan	1.842	1.805	98,0	1.805	98,0
7	Bengkulu	584	288	49,3	288	49,3
8	Lampung	1.327	1.247	94,0	1.247	94,0
9	Kepulauan Bangka Belitung	205	131	63,9	131	63,9
10	Kepulauan Riau	195	66	33,8	66	33,8
11	DKI Jakarta	6	6	100,0	6	100,0
12	Jawa Barat	2.223	1.726	77,6	1.726	77,6
13	Jawa Tengah	5.148	4.706	91,4	4.706	91,4
14	DI Yogyakarta	250	236	94,4	236	94,4
15	Jawa Timur	2.426	2.078	85,7	2.078	85,7
16	Banten	744	591	79,4	591	79,4
17	Bali	364	90	24,7	90	24,7
18	Nusa Tenggara Barat	608	571	93,9	571	93,9
19	Nusa Tenggara Timur	2.140	1.924	89,9	1.924	89,9
20	Kalimantan Barat	945	355	37,6	355	37,6
21	Kalimantan Tengah	654	527	80,6	527	80,6
22	Kalimantan Selatan	1.326	327	24,7	327	24,7
23	Kalimantan Timur	307	198	64,5	198	64,5
24	Kalimantan Utara	202	185	91,6	185	91,6
25	Sulawesi Utara	638	543	85,1	543	85,1
26	Sulawesi Tengah	1.286	1.179	91,7	1.179	91,7
27	Sulawesi Selatan	1.588	1.300	81,9	1.300	81,9
28	Sulawesi Tenggara	742	635	85,6	635	85,6
29	Gorontalo	452	404	89,4	404	89,4
30	Sulawesi Barat	495	36	7,3	36	7,3
31	Maluku	690	446	64,6	446	64,6
32	Maluku Utara	437	382	87,4	382	87,4
33	Papua Barat	483	143	29,6	143	29,6
34	Papua	747	374	50,1	374	50,1
Indonesia		**35.517**	**25.918**	**73,0**	**25.918**	**73,0**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 72.b

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP AIR MINUM LAYAK MENURUT PROVINSI

TAHUN 2019-2021

No	Provinsi	2019	2020	2021
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	85,81	87,66	88,79
2	Sumatera Utara	90,22	89,68	90,89
3	Sumatera Barat	81,44	83,37	83,40
4	Riau	87,42	88,25	89,76
5	Jambi	76,92	78,86	79,70
6	Sumatera Selatan	80,37	80,78	84,70
7	Bengkulu	57,60	62,47	67,39
8	Lampung	73,30	74,97	80,20
9	Kepulauan Bangka Belitung	73,45	75,06	73,40
10	Kepulauan Riau	88,51	90,41	90,83
11	DKI Jakarta	99,82	99,84	99,86
12	Jawa Barat	92,30	93,42	93,24
13	Jawa Tengah	93,82	94,07	93,62
14	DI Yogyakarta	94,94	96,02	95,69
15	Jawa Timur	94,39	95,56	95,02
16	Banten	91,64	92,87	93,51
17	Bali	96,84	97,36	97,56
18	Nusa Tenggara Barat	93,93	94,13	94,60
19	Nusa Tenggara Timur	82,35	83,87	85,40
20	Kalimantan Barat	77,07	78,83	78,76
21	Kalimantan Tengah	73,27	74,91	77,05
22	Kalimantan Selatan	69,45	70,36	76,40
23	Kalimantan Timur	83,54	85,51	85,80
24	Kalimantan Utara	87,90	89,50	86,80
25	Sulawesi Utara	90,81	90,31	91,65
26	Sulawesi Tengah	83,42	84,60	88,51
27	Sulawesi Selatan	89,38	90,84	91,18
28	Sulawesi Tenggara	89,66	92,49	91,94
29	Gorontalo	94,19	94,16	94,57
30	Sulawesi Barat	71,50	72,75	78,35
31	Maluku	90,83	91,68	93,21
32	Maluku Utara	85,04	86,90	88,66
33	Papua Barat	81,85	79,56	81,68
34	Papua	60,85	62,73	64,92
Indonesia		**89,27**	**90,21**	**90,78**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2022

Lampiran 73.a

JUMLAH KK DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT PROVINSI

TAHUN 2021

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah KK	Jumlah KK Pengguna Sarana			Keluarga Dengan Akses Terhadap Fasilitas Sanitasi Yang Layak (Jamban Sehat)	
				Sharing/Komunal	Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP)	Jamban Sehat Permanen (JSP)	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
1	Aceh	23	1.304.570	126.315	192.248	738.660	1.057.223	81,0
2	Sumatera Utara	33	3.665.892	254.415	669.876	2.200.986	3.125.277	85,3
3	Sumatera Barat	19	1.260.499	73.543	131.881	807.485	1.012.909	80,4
4	Riau	12	1.638.648	71.640	388.406	1.063.338	1.523.384	93,0
5	Jambi	11	919.053	63.350	204.170	572.042	839.562	91,4
6	Sumatera Selatan	17	2.226.837	135.248	373.886	1.474.201	1.983.335	89,1
7	Bengkulu	10	571.803	24.978	101.133	385.629	511.740	89,5
8	Lampung	15	2.178.205	95.759	539.388	1.403.392	2.038.539	93,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	558.092	10.371	52.826	471.273	534.470	95,8
10	Kepulauan Riau	7	734.664	13.130	34.365	562.989	610.484	83,1
11	DKI Jakarta	6	2.846.389	334.653	171.857	2.154.466	2.660.976	93,5
12	Jawa Barat	27	13.641.449	1.207.761	3.299.592	7.210.701	11.718.054	85,9
13	Jawa Tengah	35	10.495.294	1.077.656	1.107.502	7.895.824	10.080.982	96,1
14	DI Yogyakarta	5	1.088.699	53.773	98.041	936.885	1.088.699	100,0
15	Jawa Timur	38	11.726.452	906.594	1.553.034	8.619.807	11.079.435	94,5
16	Banten	8	3.151.332	1.659	5.225	110.331	117.215	3,7
17	Bali	9	1.064.269	70.101	26.455	914.710	1.011.266	95,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	1.468.226	194.363	154.783	984.361	1.333.507	90,8
19	Nusa Tenggara Timur	22	1.187.027	138.484	363.992	577.343	1.079.819	91,0
20	Kalimantan Barat	14	1.315.163	42.747	892.800	32.160	967.707	73,6
21	Kalimantan Tengah	14	721.765	31.907	105.751	396.064	533.722	73,9
22	Kalimantan Selatan	13	1.067.478	82.905	226.276	612.498	921.679	86,3
23	Kalimantan Timur	10	959.997	37.566	145.373	677.479	860.418	89,6
24	Kalimantan Utara	5	133.011	7.610	24.582	80.706	112.898	84,9
25	Sulawesi Utara	15	657.309	61.312	125.287	401.634	588.233	89,5
26	Sulawesi Tengah	13	793.353	48.614	91.076	492.506	632.196	79,7
27	Sulawesi Selatan	24	2.188.790	163.935	220.212	1.791.793	2.175.940	99,4
28	Sulawesi Tenggara	17	602.661	40.169	125.196	373.562	538.927	89,4
29	Gorontalo	6	317.969	84.138	8.327	158.807	251.272	79,0
30	Sulawesi Barat	6	304.759	29.721	21.709	210.618	262.048	86,0
31	Maluku	11	378.069	26.401	126.530	130.917	283.848	75,1
32	Maluku Utara	10	273.583	38.776	23.789	151.417	213.982	78,2
33	Papua Barat	13	117.759	12.262	11.780	58.231	82.273	69,9
34	Papua	29	640.519	37.198	114.089	210.893	362.180	56,5
Indonesia		**514**	**72.199.585**	**5.599.054**	**11.731.437**	**44.863.708**	**62.194.199**	**86,1**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 73.b

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MEMILIKI AKSES TERHADAP SANITASI LAYAK MENURUT PROVINSI

TAHUN 2019-2021

No	Provinsi	2019	2020	2021
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	73,16	77,06	77,55
2	Sumatera Utara	79,59	81,08	82,02
3	Sumatera Barat	63,98	68,11	68,68
4	Riau	80,04	83,99	83,64
5	Jambi	75,60	77,82	80,36
6	Sumatera Selatan	74,67	76,94	77,29
7	Bengkulu	75,91	78,10	79,81
8	Lampung	79,22	78,81	83,89
9	Kepulauan Bangka Belitung	90,32	92,58	92,24
10	Kepulauan Riau	89,13	89,19	91,62
11	DKI Jakarta	92,89	93,04	95,17
12	Jawa Barat	69,64	71,40	71,66
13	Jawa Tengah	80,29	83,24	83,28
14	DI Yogyakarta	94,67	96,96	97,12
15	Jawa Timur	78,78	80,98	80,97
16	Banten	81,01	82,00	82,89
17	Bali	94,59	95,01	95,95
18	Nusa Tenggara Barat	80,02	82,89	82,85
19	Nusa Tenggara Timur	64,55	69,70	73,36
20	Kalimantan Barat	72,08	75,81	78,39
21	Kalimantan Tengah	69,23	72,31	73,77
22	Kalimantan Selatan	76,56	81,17	81,43
23	Kalimantan Timur	89,27	89,17	89,77
24	Kalimantan Utara	77,20	82,09	79,80
25	Sulawesi Utara	82,36	85,49	84,85
26	Sulawesi Tengah	71,95	74,61	76,06
27	Sulawesi Selatan	87,80	88,96	91,57
28	Sulawesi Tenggara	79,75	82,38	85,62
29	Gorontalo	74,57	75,68	78,58
30	Sulawesi Barat	73,39	77,07	80,12
31	Maluku	70,00	75,06	76,77
32	Maluku Utara	72,52	75,99	77,11
33	Papua Barat	76,39	78,71	77,89
34	Papua	38,27	40,31	40,81
Indonesia		**77,39**	**79,53**	**80,29**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2022

Lampiran 74

PERSENTASE DESA/KELURAHAN DENGAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (SBS) MENURUT PROVINSI

TAHUN 2021

No	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa/Kelurahan	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)			
				Desa Melaksanakan STBM		Desa Stop BABS (SBS)	
				Jumlah	%	Jumlah	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*
1	Aceh	23	6.497	4.629	71,2	1.481	22,8
2	Sumatera Utara	33	6.110	3.928	64,3	1.174	19,2
3	Sumatera Barat	19	1.158	865	74,7	381	32,9
4	Riau	12	1.859	1.642	88,3	851	45,8
5	Jambi	11	1.562	1.260	80,7	783	50,1
6	Sumatera Selatan	17	3.240	2.827	87,3	1.756	54,2
7	Bengkulu	10	1.513	1.288	85,1	581	38,4
8	Lampung	15	2.640	2.288	86,7	1.758	66,6
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	391	391	100,0	267	68,3
10	Kepulauan Riau	7	417	400	95,9	104	24,9
11	DKI Jakarta	6	267	267	100,0	33	12,4
12	Jawa Barat	27	5.957	5.043	84,7	3.920	65,8
13	Jawa Tengah	35	8.562	8.563	100,0	7.303	85,3
14	DI Yogyakarta	5	438	438	100,0	438	100,0
15	Jawa Timur	38	8.501	8.070	94,9	6.151	72,4
16	Banten	8	1.551	1.442	93,0	346	22,3
17	Bali	9	716	715	99,9	326	45,5
18	Nusa Tenggara Barat	10	1.140	1.131	99,2	958	84,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	3.353	2.912	86,8	2.632	78,5
20	Kalimantan Barat	14	2.130	1.402	65,8	285	13,4
21	Kalimantan Tengah	14	1.571	1.338	85,2	501	31,9
22	Kalimantan Selatan	13	2.008	1.828	91,0	912	45,4
23	Kalimantan Timur	10	1.038	841	81,0	364	35,1
24	Kalimantan Utara	5	482	403	83,6	200	41,5
25	Sulawesi Utara	15	1.839	1.053	57,3	1.476	80,3
26	Sulawesi Tengah	13	2.017	1.564	77,5	809	40,1
27	Sulawesi Selatan	24	3.047	3.047	100,0	2.933	96,3
28	Sulawesi Tenggara	17	2.288	1.526	66,7	946	41,3
29	Gorontalo	6	729	517	70,9	78	10,7
30	Sulawesi Barat	6	648	525	81,0	197	30,4
31	Maluku	11	1.233	397	32,2	178	14,4
32	Maluku Utara	10	1.181	554	46,9	194	16,4
33	Papua Barat	13	1.837	412	22,4	141	7,7
34	Papua	29	5.521	989	17,9	208	3,8
Indonesia		**514**	**83.441**	**64.495**	**77,3**	**40.665**	**48,7**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022, Kementerian Dalam Negeri,2019 (Permendagri 72 Tahun 2019)

* SBS (Stop Buang Air Besar Sembarangan)

Lampiran 75

PERSENTASE TEMPAT DAN FASILITAS UMUM(TFU) YANG DILAKUKAN PENGAWASAN SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI

TAHUN 2021

No	Provinsi	TFU Terdaftar				TFU Yang Dilakukan Pengawasan Sesuai Standar							
		Sarana Pendidikan (SD/MI dan SMP/MTs)	Pasar	Puskesmas	Jumlah TFU Terdaftar	Sarana Pendidikan (SD/MI dan SMP/MTs)		Pasar		Puskesmas		Jumlah Total	
						Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*
1	Aceh	501	45	101	647	93	18,6	30	66,7	32	31,7	155	24,0
2	Sumatera Utara	1.824	122	205	2151	734	40,2	56	45,9	108	52,7	898	41,7
3	Sumatera Barat	2.934	215	198	3347	2.259	77,0	160	74,4	143	72,2	2.562	76,5
4	Riau	2.707	258	179	3144	1.831	67,6	151	58,5	96	53,6	2.078	66,1
5	Jambi	1.687	124	190	2001	674	40,0	68	54,8	154	81,1	896	44,8
6	Sumatera Selatan	1.054	126	93	1273	276	26,2	60	47,6	29	31,2	365	28,7
7	Bengkulu	1.890	146	164	2200	1.578	83,5	135	92,5	142	86,6	1.855	84,3
8	Lampung	1.298	161	111	1570	446	34,4	68	42,2	33	29,7	547	34,8
9	Kepulauan Bangka Belitung	712	33	36	781	494	69,4	30	90,9	23	63,9	547	70,0
10	Kepulauan Riau	549	16	36	601	126	23,0	7	43,8	8	22,2	141	23,5
11	DKI Jakarta	2.380	113	220	2713	1810	76,1	89	78,8	159	72,3	2.058	75,9
12	Jawa Barat	4.899	273	592	5764	2.361	48,2	107	39,2	333	56,3	2.801	48,6
13	Jawa Tengah	9.609	682	702	10993	7.289	75,9	422	61,9	485	69,1	8.196	74,6
14	DI Yogyakarta	1.601	99	87	1787	278	17,4	15	15,2	11	12,6	304	17,0
15	Jawa Timur	12.325	682	716	13723	7.970	64,7	348	51,0	503	70,3	8.821	64,3
16	Banten	2.879	92	136	3107	1.744	60,6	65	70,7	82	60,3	1.891	60,9
17	Bali	1.557	197	120	1874	1.020	65,5	118	59,9	75	62,5	1.213	64,7
18	Nusa Tenggara Barat	1.816	51	94	1961	671	36,9	19	37,3	20	21,3	710	36,2
19	Nusa Tenggara Timur	1.578	98	102	1778	477	30,2	41	41,8	40	39,2	558	31,4
20	Kalimantan Barat	970	50	119	1139	524	54,0	14	28,0	41	34,5	579	50,8
21	Kalimantan Tengah	1.286	78	110	1474	871	67,7	52	66,7	81	73,6	1.004	68,1
22	Kalimantan Selatan	900	40	79	1019	469	52,1	25	62,5	43	54,4	537	52,7
23	Kalimantan Timur	2.360	77	173	2610	1.645	69,7	41	53,2	139	80,3	1.825	69,9
24	Kalimantan Utara	379	14	20	413	215	56,7	9	64,3	15	75,0	239	57,9
25	Sulawesi Utara	25	9	20	54	21	84,0	1	11,1	7	35,0	29	53,7
26	Sulawesi Tengah	1.174	115	81	1370	585	49,8	61	53,0	48	59,3	694	50,7
27	Sulawesi Selatan	3.493	441	322	4256	2.559	73,3	212	48,1	185	57,5	2.956	69,5
28	Sulawesi Tenggara	1.938	194	161	2293	961	49,6	114	58,8	83	51,6	1.158	50,5
29	Gorontalo	96	40	53	189	59	61,5	6	15,0	6	11,3	71	37,6
30	Sulawesi Barat	1.119	95	80	1294	721	64,4	67	70,5	58	72,5	846	65,4
31	Maluku	0	1	1	2	0	0,0	0	0,0	1	100,0	1	50,0
32	Maluku Utara	198	7	49	254	120	60,6	2	28,6	28	57,1	150	59,1
33	Papua Barat	370	11	69	450	190	51,4	6	54,5	34	49,3	230	51,1
34	Papua	472	28	100	600	323	68,4	19	67,9	74	74,0	416	69,3
Indonesia		**68.580**	**4.733**	**5.519**	**78.832**	**41.394**	**60,4**	**2.618**	**55,3**	**3.319**	**60,1**	**47.331**	**60,0**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 76.a

PERSENTASE TEMPAT PENGELOLAAN PANGAN (TPP) YANG MEMENUHI SYARAT SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI

TAHUN 2021

No	Provinsi	TPP Terdaftar					TPP Yang Memenuhi Syarat Sesuai Standar									
		Jasa Boga	Rumah Makan/ Restoran	Depot Air Minum (DAM)	Makanan Jajanan/ Kantin/ Sentra	Jumlah TPP Terdaftar	Jasa Boga		Rumah Makan/Restoran		Depot Air Minum (DAM)		Makanan Jajanan/ Kantin/ Sentra Makanan Jajanan		Jumlah TPP Memenuhi Syarat Sesuai Standar	
							Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Total	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
1	Aceh	331	2.129	2.214	2.613	7.287	36	10,9	300	14,1	460	20,8	403	15,4	1.199	16,5
2	Sumatera Utara	223	1.624	1.771	1.464	5.082	59	26,5	419	25,8	750	42,3	566	38,7	1.794	35,3
3	Sumatera Barat	318	1.906	2.548	2.627	7.399	43	13,5	743	39,0	1.677	65,8	1.418	54,0	3.881	52,5
4	Riau	370	2.133	2.625	2.135	7.263	190	51,4	920	43,1	1.424	54,2	850	39,8	3.384	46,6
5	Jambi	170	1.310	1.555	1.363	4.398	95	55,9	620	47,3	966	62,1	792	58,1	2.473	56,2
6	Sumatera Selatan	224	1.001	991	920	3.136	95	42,4	459	45,9	484	48,8	529	57,5	1.567	50,0
7	Bengkulu	97	577	795	1.421	2.890	30	30,9	296	51,3	525	66,0	714	50,2	1.565	54,2
8	Lampung	301	2.008	1.621	2.403	6.333	112	37,2	968	48,2	878	54,2	1.494	62,2	3.452	54,5
9	Kepulauan Bangka	79	712	1.167	947	2.905	36	45,6	531	74,6	686	58,8	655	69,2	1.908	65,7
10	Kepulauan Riau	330	1.830	1.410	1.428	4.998	204	61,8	918	50,2	895	63,5	527	36,9	2.544	50,9
11	DKI Jakarta	474	4.462	2.773	3.937	11.646	185	39,0	5.046	113,1	734	26,5	2.255	57,3	8.220	70,6
12	Jawa Barat	1.718	5.178	9.175	8.146	24.217	605	35,2	1.518	29,3	3.245	35,4	2.850	35,0	8.218	33,9
13	Jawa Tengah	2.083	3.434	7.077	3.666	16.260	1597	76,7	2.631	76,6	6.112	86,4	2.605	71,1	12.945	79,6
14	DI Yogyakarta	248	375	358	1.843	2.824	133	53,6	244	65,1	270	75,4	1.347	73,1	1.994	70,6
15	Jawa Timur	1.811	3.248	7.240	7.506	19.805	855	47,2	1.902	58,6	5.165	71,3	4.692	62,5	12.614	63,7
16	Banten	595	1.595	3.787	616	6.593	252	42,4	594	37,2	1.711	45,2	204	33,1	2.761	41,9
17	Bali	176	1.572	447	2.701	4.896	57	32,4	1.030	65,5	339	75,8	1.503	55,6	2.929	59,8
18	Nusa Tenggara Barat	361	1.120	570	1.425	3.476	112	31,0	465	41,5	283	49,6	693	48,6	1.553	44,7
19	Nusa Tenggara Timur	221	1.478	831	508	3.038	30	13,6	486	32,9	340	40,9	138	27,2	994	32,7
20	Kalimantan Barat	163	1.393	1.289	2.027	4.872	68	41,7	528	37,9	724	56,2	862	42,5	2.182	44,8
21	Kalimantan Tengah	125	814	1.541	1.423	3.903	59	47,2	333	40,9	806	52,3	1.026	72,1	2.224	57,0
22	Kalimantan Selatan	212	1.042	2.279	3.946	7.479	51	24,1	362	34,7	1.209	53,0	1.735	44,0	3.357	44,9
23	Kalimantan Timur	479	2.775	3.703	3.189	10.146	262	54,7	1.352	48,7	2.292	61,9	1.927	60,4	5.833	57,5
24	Kalimantan Utara	68	537	666	1.541	2.812	40	58,8	282	52,5	380	57,1	1.165	75,6	1.867	66,4
25	Sulawesi Utara	81	917	630	489	2.117	23	28,4	284	31,0	279	44,3	327	66,9	913	43,1
26	Sulawesi Tengah	127	1.246	1.270	1.329	3.972	84	66,1	952	76,4	1.049	82,6	1.138	85,6	3.223	81,1
27	Sulawesi Selatan	323	3.626	2.156	5.241	11.346	144	44,6	1.565	43,2	1.207	56,0	2.542	48,5	5.458	48,1
28	Sulawesi Tenggara	83	1.242	856	2.335	4.516	19	22,9	426	34,3	360	42,1	1.200	51,4	2.005	44,4
29	Gorontalo	79	489	575	869	2.012	22	27,8	124	25,4	243	42,3	156	18,0	545	27,1
30	Sulawesi Barat	38	768	330	319	1.455	15	39,5	344	44,8	206	62,4	142	44,5	707	48,6
31	Maluku	55	434	307	373	1.169	18	32,7	171	39,4	223	72,6	176	47,2	588	50,3
32	Maluku Utara	66	283	181	182	712	20	30,3	146	51,6	120	66,3	123	67,6	409	57,4
33	Papua Barat	73	595	296	198	1.162	30	41,1	261	43,9	148	50,0	112	56,6	551	47,4
34	Papua	121	847	623	1.139	2.730	35	28,9	330	39,0	412	66,1	756	66,4	1.533	56,2
Indonesia		**12.223**	**54.700**	**65.657**	**72.269**	**204.849**	**5.616**	**45,9**	**27.550**	**50,4**	**36.602**	**55,7**	**37.622**	**52,1**	**107.390**	**52,4**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 76.b

JUMLAH KABUPATEN/ KOTA SEHAT MENURUT PROVINSI

TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/ Kota Sehat	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	23	1	4,3
2	Sumatera Utara	33	4	12,1
3	Sumatera Barat	19	10	52,6
4	Riau	12	4	33,3
5	Jambi	11	10	90,9
6	Sumatera Selatan	17	8	47,1
7	Bengkulu	10	6	60,0
8	Lampung	15	5	33,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	6	85,7
10	Kepulauan Riau	7	6	85,7
11	DKI Jakarta	6	1	16,7
12	Jawa Barat	27	25	92,6
13	Jawa Tengah	35	12	34,3
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	30	78,9
16	Banten	8	5	62,5
17	Bali	9	9	100,0
18	Nusa Tenggara Barat	10	0	0,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	0	0,0
20	Kalimantan Barat	14	1	7,1
21	Kalimantan Tengah	14	4	28,6
22	Kalimantan Selatan	13	9	69,2
23	Kalimantan Timur	10	3	30,0
24	Kalimantan Utara	5	3	60,0
25	Sulawesi Utara	15	15	100,0
26	Sulawesi Tengah	13	2	15,4
27	Sulawesi Selatan	24	24	100,0
28	Sulawesi Tenggara	17	5	29,4
29	Gorontalo	6	6	100,0
30	Sulawesi Barat	6	0	0,0
31	Maluku	11	0	0,0
32	Maluku Utara	10	1	10,0
33	Papua Barat	13	0	0,0
34	Papua	29	1	3,4
Indonesia		**514**	**221**	**43,0**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 76.c

JUMLAH FASYANKES YANG MEMILIKI PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS SESUAI STANDAR MENURUT PROVINSI
TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah RS dan Puskesmas	Jumlah RS dan Puskesmas yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	423	7	1,7
2	Sumatera Utara	780	126	16,2
3	Sumatera Barat	356	23	6,5
4	Riau	294	86	29,3
5	Jambi	235	31	13,2
6	Sumatera Selatan	405	90	22,2
7	Bengkulu	209	87	41,6
8	Lampung	401	313	78,1
9	Kepulauan Bangka Belitung	86	38	44,2
10	Kepulauan Riau	112	40	35,7
11	DKI Jakarta	512	137	26,8
12	Jawa Barat	1399	231	16,5
13	Jawa Tengah	1176	585	49,7
14	DI Yogyakarta	196	76	38,8
15	Jawa Timur	1339	647	48,3
16	Banten	339	215	63,4
17	Bali	177	31	17,5
18	Nusa Tenggara Barat	198	17	8,6
19	Nusa Tenggara Timur	440	10	2,3
20	Kalimantan Barat	294	44	15,0
21	Kalimantan Tengah	230	16	7,0
22	Kalimantan Selatan	277	12	4,3
23	Kalimantan Timur	236	107	45,3
24	Kalimantan Utara	64	5	7,8
25	Sulawesi Utara	240	47	19,6
26	Sulawesi Tengah	248	77	31,0
27	Sulawesi Selatan	568	276	48,6
28	Sulawesi Tenggara	324	11	3,4
29	Gorontalo	110	1	0,9
30	Sulawesi Barat	108	11	10,2
31	Maluku	243	10	4,1
32	Maluku Utara	160	2	1,3
33	Papua Barat	181	3	1,7
34	Papua	471	9	1,9
Indonesia		**12.831**	**3.421**	**26,7**

Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 2022; Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 76.d

PERSENTASE KABUPATEN/KOTA MELAKSANAKAN KEBIJAKAN GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)
TAHUN 2021

No	Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota Melaksanakan Kebijakan Germas	%
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	23	3	13,0
2	Sumatera Utara	33	6	18,2
3	Sumatera Barat	19	6	31,6
4	Riau	12	10	83,3
5	Jambi	11	5	45,5
6	Sumatera Selatan	17	4	23,5
7	Bengkulu	10	10	100,0
8	Lampung	15	11	73,3
9	Kepulauan Bangka Belitung	7	3	42,9
10	Kepulauan Riau	7	5	71,4
11	DKI Jakarta	6	3	50,0
12	Jawa Barat	27	11	40,7
13	Jawa Tengah	35	29	82,9
14	DI Yogyakarta	5	5	100,0
15	Jawa Timur	38	26	68,4
16	Banten	8	3	37,5
17	Bali	9	6	66,7
18	Nusa Tenggara Barat	10	10	100,0
19	Nusa Tenggara Timur	22	2	9,1
20	Kalimantan Barat	14	6	42,9
21	Kalimantan Tengah	14	10	71,4
22	Kalimantan Selatan	13	12	92,3
23	Kalimantan Timur	10	7	70,0
24	Kalimantan Utara	5	2	40,0
25	Sulawesi Utara	15	2	13,3
26	Sulawesi Tengah	13	7	53,8
27	Sulawesi Selatan	24	4	16,7
28	Sulawesi Tenggara	17	7	41,2
29	Gorontalo	6	4	66,7
30	Sulawesi Barat	6	1	16,7
31	Maluku	11	1	9,1
32	Maluku Utara	10	10	100,0
33	Papua Barat	13	1	7,7
34	Papua	29	0	0,0
Indonesia		**514**	**232**	**45,1**

Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kemenkes RI, 2022

Lampiran 76.e

PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENEMPATI RUMAH LAYAK HUNI MENURUT PROVINSI

TAHUN 2019-2021

No	Provinsi	2019	2020	2021
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Aceh	57,41	63,21	64,43
2	Sumatera Utara	64,65	67,44	69,48
3	Sumatera Barat	51,42	56,87	56,67
4	Riau	62,94	68,44	70,63
5	Jambi	54,78	61,41	62,54
6	Sumatera Selatan	52,24	55,25	57,86
7	Bengkulu	41,73	47,94	51,36
8	Lampung	52,00	53,22	61,56
9	Kepulauan Bangka Belitung	26,16	30,64	27,60
10	Kepulauan Riau	44,09	48,19	50,23
11	DKI Jakarta	34,25	33,18	40,00
12	Jawa Barat	49,29	52,28	53,14
13	Jawa Tengah	64,69	67,93	66,47
14	DI Yogyakarta	81,61	86,19	85,15
15	Jawa Timur	65,61	68,08	66,93
16	Banten	56,92	56,21	60,78
17	Bali	77,24	77,05	78,47
18	Nusa Tenggara Barat	56,35	62,53	62,90
19	Nusa Tenggara Timur	32,08	36,34	40,41
20	Kalimantan Barat	53,52	58,81	61,17
21	Kalimantan Tengah	47,90	51,97	55,34
22	Kalimantan Selatan	46,73	52,99	57,50
23	Kalimantan Timur	65,55	70,80	70,70
24	Kalimantan Utara	60,76	66,73	65,65
25	Sulawesi Utara	64,61	69,48	69,50
26	Sulawesi Tengah	56,65	58,85	62,70
27	Sulawesi Selatan	60,93	64,24	69,11
28	Sulawesi Tenggara	59,82	66,77	70,45
29	Gorontalo	62,26	65,42	67,28
30	Sulawesi Barat	47,23	50,65	57,26
31	Maluku	51,75	57,50	60,69
32	Maluku Utara	59,03	62,14	63,85
33	Papua Barat	52,22	55,44	57,90
34	Papua	26,19	28,56	28,92
Indonesia		**56,51**	**59,54**	**60,90**

Sumber: Badan Pusat Statistik, Susenas Maret 2019-2021

PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI

KEMENTERIAN KESEHATAN RI

2021